



PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR OF KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan Perda tentang APBD, Perda tentang perubahan APBD, dan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 64);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

dan

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);

- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp	3.958.295.361.262,68
b. Belanja	Rp	<u>4.071.747.457.825,29</u>
Surplus/(defisit)	Rp	(113.452.096.562,61)
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp	232.684.048.633,00
- Pengeluaran	Rp	<u>91.945.787.633,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp	140.738.261.000,62
d. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) :		
Surplus/(defisit)	Rp	(113.452.096.562,61)
Pembiayaan Netto	Rp	<u>140.738.261.000,62</u>
	Rp	27.286.164.438,01

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- (1) Selisih realisasi dengan anggaran pendapatan sejumlah Rp316.741.872.544,32 dengan rincian sebagai berikut:

a. Realisasi	Rp	3.958.295.361.262,68
b. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp	<u>4.275.037.233.807,00</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp	(316.741.872.544,32)
- (2) Selisih realisasi dengan anggaran belanja sejumlah Rp(342.451.346.959,71) dengan rincian sebagai berikut:

a. Realisasi	Rp	4.071.747.457.825,29
b. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp	<u>4.414.198.804.785,00</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp	(342.451.346.959,71)
- (3) Selisih realisasi dengan anggaran surplus/(defisit) sejumlah Rp25.709.474.415,39 dengan rincian sebagai berikut:

a. Realisasi	Rp	(113.452.096.562,61)
b. Anggaran Surplus/ (defisit) setelah perubahan	Rp	<u>(139.161.570.978,00)</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp	25.709.474.415,39
- (4) Selisih realisasi dengan anggaran penerimaan pembiayaan sejumlah Rp1.469.333.620,62 dengan rincian sebagai berikut:

a. Realisasi	Rp	232.684.048.633,62
b. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	<u>231.214.715.013,00</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp	1.469.333.620,62
- (5) Selisih realisasi dengan anggaran pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp(107.356.402,00) dengan rincian sebagai berikut:

a. Realisasi	Rp	91.945.787.633,00
--------------	----	-------------------

- b. Anggaran pengeluaran pembiayaan
setelah perubahan
Selisih lebih/(kurang)

Rp 92.053.144.035,00
Rp (107.356.402,00)

- (6) Selisih realisasi dengan anggaran pembiayaan netto sejumlah Rp1.576.690.022,62 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Realisasi
b. Anggaran pembiayaan netto
setelah perubahan
Selisih lebih/(kurang)

Rp 140.738.261.000,62
Rp 139.161.570.978,00
Rp 1.576.690.022,62

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2024 adalah:

- | | |
|--|-----------------------|
| a. Saldo Anggaran Lebih Awal | Rp 231.214.715.013,24 |
| Penggunaan SAL sebagai Penerimaan | |
| Pembiayaan Tahun Berjalan | Rp 232.583.164.925,62 |
| Sub Total | Rp (1.368.449.912,38) |
| b. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) | Rp 27.286.164.438,01 |
| c. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya | Rp (1.368.449.912,38) |
| Saldo Anggaran Lebih Akhir | Rp 27.286.164.438,01 |

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2023 adalah:

- | | |
|---------------------|------------------------|
| a. Jumlah aset | Rp7.105.534.873.977,98 |
| b. Jumlah kewajiban | Rp 651.254.610.738,43 |
| c. Jumlah ekuitas | Rp6.454.280.263.239,55 |

Pasal 6

Laporan Operasional (LO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

- | | |
|---|-------------------------|
| a. Pendapatan-LO | Rp4.115.268.949.417,46 |
| b. Beban | Rp4.377.962.746.624,97 |
| c. Surplus/defisit Kegiatan Operasional | Rp (262.693.797.207,51) |
| d. Surplus/defisit Kegiatan Non Operasional | Rp (39.000.172.538,89) |
| e. Surplus/defisit Sebelum Pos Luar Biasa | Rp (301.693.969.746,40) |
| f. Surplus/defisit Dari Pos Luar Biasa | Rp (2.065.423.140,00) |
| g. Surplus/defisit-LO | Rp (303.759.392.886,40) |

Pasal 7

Laporan Arus Kas (LAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

- | | |
|---|-------------------------|
| a. Saldo awal kas per 1 Januari 2024 | Rp 245.536.768.352,08 |
| b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi | Rp 149.415.511.050,17 |
| c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi | Rp (244.970.648.614,02) |
| d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan | Rp (91.844.903.925,00) |

e.	Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp	(10.866.391,81)
f.	Saldo akhir kas di bendahara penerimaan	Rp	0,00
g.	Saldo akhir kas di bendahara pengeluaran	Rp	19.041.006,00
h.	Saldo akhir kas di BLUD	Rp	2.264.885.131,34
i.	Saldo akhir kas di Bendahara BOS	Rp	1.699.060.482,84
j.	Saldo akhir kas lainnya	Rp	524.292.676,64
k.	Saldo akhir kas per 31 Desember 2023	Rp	27.810.220.201,59

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

Ekuitas Awal	Rp6.764.055.547.180,37
Surplus/Defisit-LO	Rp (303.759.392.886,40)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar:	
- Koreksi Nilai Persediaan	Rp 10.026.024.201,81
- Lain-lain	Rp (16.041.915.256,23)
Ekuitas Akhir	Rp6.454.280.263.239,55

Pasal 9

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas :
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;

- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun Anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas :
 - Lampiran XX.1 : Iktisar Laporan Keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
 - Lampiran XX.2 : Iktisar Laporan Keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 10

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 19 September 2025
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

dto

ADI PRIHANTARA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025 NOMOR 4.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 71 NOREG PERATURAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU 4-149/2025.



PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
		4	Pendapatan	4.275.037.233.807	3.958.295.361.262,68	(316.741.872.544)	92,59
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	153.446.188.051	161.199.636.058,04	7.753.448.007	105,05
1.01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	12.646.188.051	21.551.608.787,35	8.905.420.736	170,42
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pendidikan	12.646.188.051	21.551.608.787,35	8.905.420.736	170,42
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	12.646.188.051	21.551.608.787,35	8.905.420.736	170,42
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12.646.188.051	21.551.608.787,35	8.905.420.736	170,42
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	12.646.188.051	21.551.608.787,35	8.905.420.736	170,42
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	138.000.000.000	138.557.590.770,69	557.590.770	100,40
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001		Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	115.000.000.000	116.068.647.767,69	1.068.647.767	100,93
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	4	PENDAPATAN DAERAH	115.000.000.000	116.068.647.767,69	1.068.647.767	100,93
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	115.000.000.000	116.068.647.767,69	1.068.647.767	100,93
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	4.1.02	Retribusi Daerah	114.260.000.000	115.162.680.173,30	902.680.173	100,79
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	740.000.000	905.967.594,39	165.967.594	122,43
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002		Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	23.000.000.000	22.488.943.003,00	(511.056.997)	97,78
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	4	PENDAPATAN DAERAH	23.000.000.000	22.488.943.003,00	(511.056.997)	97,78
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	23.000.000.000	22.488.943.003,00	(511.056.997)	97,78
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	4.1.02	Retribusi Daerah	23.000.000.000	22.488.943.003,00	(511.056.997)	97,78
1.03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.800.000.000	1.090.436.500,00	(1.709.563.500)	38,94
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	2.800.000.000	1.090.436.500,00	(1.709.563.500)	38,94
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	2.800.000.000	1.090.436.500,00	(1.709.563.500)	38,94
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.800.000.000	1.090.436.500,00	(1.709.563.500)	38,94
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	2.800.000.000	1.090.436.500,00	(1.709.563.500)	38,94
2			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	11.702.607.254	7.341.390.518,00	(4.361.216.736)	62,73
2.07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	7.500.000.000	5.009.217.000,00	(2.490.783.000)	66,79
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	7.500.000.000	5.009.217.000,00	(2.490.783.000)	66,79

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	7.500.000.000	5.009.217.000,00	(2.490.783.000)	66,79
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.500.000.000	5.009.217.000,00	(2.490.783.000)	66,79
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	7.500.000.000	5.009.217.000,00	(2.490.783.000)	66,79
2.09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	385.387.254	133.906.900,00	(251.480.354)	34,75
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	385.387.254	133.906.900,00	(251.480.354)	34,75
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	385.387.254	133.906.900,00	(251.480.354)	34,75
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	385.387.254	133.906.900,00	(251.480.354)	34,75
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	385.387.254	133.906.900,00	(251.480.354)	34,75
2.11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	317.220.000	317.220.000,00	0	100,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	317.220.000	0,00	(317.220.000)	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	317.220.000	0,00	(317.220.000)	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	317.220.000	0,00	(317.220.000)	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	317.220.000	0,00	(317.220.000)	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0001		UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	0	317.220.000,00	317.220.000	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0001	4	PENDAPATAN DAERAH	0	317.220.000,00	317.220.000	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0001	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	317.220.000,00	317.220.000	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0001	4.1.02	Retribusi Daerah	0	317.220.000,00	317.220.000	0,00
2.15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	3.500.000.000	1.880.914.716,00	(1.619.085.284)	53,74
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		Dinas Perhubungan	3.500.000.000	1.617.883.939,00	(1.882.116.061)	46,23
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	3.500.000.000	1.617.883.939,00	(1.882.116.061)	46,23
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.500.000.000	1.617.883.939,00	(1.882.116.061)	46,23
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	3.500.000.000	1.612.319.508,00	(1.887.680.492)	46,07
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0	5.564.431,00	5.564.431	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0001		UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah I Kota Batam	0	3.185.000,00	3.185.000	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0001	4	PENDAPATAN DAERAH	0	3.185.000,00	3.185.000	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0001	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	3.185.000,00	3.185.000	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0001	4.1.02	Retribusi Daerah	0	3.185.000,00	3.185.000	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0002		UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah II Kabupaten Karimun	0	15.828.132,00	15.828.132	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0002	4	PENDAPATAN DAERAH	0	15.828.132,00	15.828.132	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0002	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	15.828.132,00	15.828.132	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0002	4.1.02	Retribusi Daerah	0	15.775.828,00	15.775.828	0,00

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0002	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0	52.304,00	52.304	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0003		UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah III Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan	0	149.257.335,00	149.257.335	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0003	4	PENDAPATAN DAERAH	0	149.257.335,00	149.257.335	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0003	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	149.257.335,00	149.257.335	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0003	4.1.02	Retribusi Daerah	0	148.582.855,00	148.582.855	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0003	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0	674.480,00	674.480	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0004		UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah IV Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas	0	45.257.910,00	45.257.910	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0004	4	PENDAPATAN DAERAH	0	45.257.910,00	45.257.910	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0004	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	45.257.910,00	45.257.910	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0004	4.1.02	Retribusi Daerah	0	45.257.910,00	45.257.910	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0005		UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah V Kabupaten Lingga	0	49.502.400,00	49.502.400	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0005	4	PENDAPATAN DAERAH	0	49.502.400,00	49.502.400	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0005	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	49.502.400,00	49.502.400	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0005	4.1.02	Retribusi Daerah	0	49.502.400,00	49.502.400	0,00
2.16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0	131.902,00	131.902	0,00
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	0	131.902,00	131.902	0,00
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	0	131.902,00	131.902	0,00
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	131.902,00	131.902	0,00
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0	131.902,00	131.902	0,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.488.695.580	742.352.020,00	(1.746.343.560)	29,83
3.25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.717.133.080	742.352.020,00	(974.781.060)	43,23
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000		Dinas Kelautan dan Perikanan	1.717.133.080	742.352.020,00	(974.781.060)	43,23
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	1.717.133.080	742.352.020,00	(974.781.060)	43,23
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.717.133.080	742.352.020,00	(974.781.060)	43,23
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	1.701.371.000	726.589.940,00	(974.781.060)	42,71
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	15.762.080	15.762.080,00	0	100,00
3.29			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	771.562.500	0,00	(771.562.500)	0,00

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	771.562.500	0,00	(771.562.500)	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	771.562.500	0,00	(771.562.500)	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	771.562.500	0,00	(771.562.500)	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	771.562.500	0,00	(771.562.500)	0,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	4.107.399.742.922	3.789.011.982.666,64	(318.387.760.255)	92,25
5.02			KEUANGAN	4.107.399.742.922	3.789.011.982.666,64	(318.387.760.255)	92,25
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000		Badan Keuangan dan Aset Daerah	2.323.910.447.374	1.995.372.351.485,64	(328.538.095.888)	85,86
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	2.323.910.447.374	1.995.372.351.485,64	(328.538.095.888)	85,86
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	70.842.330.483	18.831.453.687,64	(52.010.876.795)	26,58
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	1.500.000.000	1.410.850.000,00	(89.150.000)	94,06
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	34.003.224.423	1.904.909.335,00	(32.098.315.088)	5,60
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	35.339.106.060	15.515.694.352,64	(19.823.411.707)	43,91
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.250.268.116.891	1.976.533.066.207,00	(273.735.050.684)	87,84
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.250.268.116.891	1.976.533.066.207,00	(273.735.050.684)	87,84
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.800.000.000	7.831.591,00	(2.792.168.409)	0,28
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	4.3.01	Pendapatan Hibah	2.800.000.000	7.831.591,00	(2.792.168.409)	0,28
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000		Badan Pendapatan Daerah	1.783.489.295.548	1.793.639.631.181,00	10.150.335.633	100,57
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	1.783.489.295.548	1.793.639.631.181,00	10.150.335.633	100,57
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.782.196.595.548	1.792.346.931.181,00	10.150.335.633	100,57
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	4.1.01	Pajak Daerah	1.738.323.174.655	1.777.704.385.140,00	39.381.210.485	102,27
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	200.000.000	71.775.000,00	(128.225.000)	35,89
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	43.673.420.893	14.570.771.041,00	(29.102.649.852)	33,36
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.292.700.000	1.292.700.000,00	0	100,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	4.3.01	Pendapatan Hibah	1.292.700.000	1.292.700.000,00	0	100,00
		5	Belanja	4.414.198.804.785	4.071.747.457.825,29	(342.451.346.959)	92,24
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.000.117.557.115	1.830.388.316.655,89	(169.729.240.459)	91,51
1.01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.076.236.158.458	1.049.194.472.692,20	(27.041.685.765)	97,49
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pendidikan	1.073.992.372.183	1.047.256.370.731,55	(26.736.001.451)	97,51
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	1.073.992.372.183	1.047.256.370.731,55	(26.736.001.451)	97,51
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	895.506.248.200	877.156.761.845,49	(18.349.486.355)	97,95
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	566.534.775.403	561.581.059.166,00	(4.953.716.237)	99,13
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	284.019.747.397	272.104.568.513,40	(11.915.178.884)	95,80
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	41.103.725.400	40.498.534.166,09	(605.191.233)	98,53

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.848.000.000	2.972.600.000,00	(875.400.000)	77,25
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	178.486.123.982	170.099.608.886,06	(8.386.515.096)	95,30
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69.102.149.196	66.266.185.831,84	(2.835.963.364)	95,90
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	90.073.267.316	84.414.314.587,22	(5.658.952.728)	93,72
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	147.600.000	147.489.020,00	(110.980)	99,92
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	19.163.107.470	19.271.619.447,00	108.511.977	100,57
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0001		BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN	2.243.786.275	1.938.101.960,65	(305.684.314)	86,38
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0001	5	BELANJA DAERAH	2.243.786.275	1.938.101.960,65	(305.684.314)	86,38
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.994.036.275	1.760.769.653,00	(233.266.622)	88,30
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.994.036.275	1.760.769.653,00	(233.266.622)	88,30
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	249.750.000	177.332.307,65	(72.417.692)	71,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71.750.000	0,00	(71.750.000)	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	178.000.000	177.332.307,65	(667.692)	99,62
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	430.777.602.856	421.327.829.301,32	(9.449.773.554)	97,81
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000		Dinas Kesehatan	81.505.120.246	77.808.391.081,00	(3.696.729.165)	95,46
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	81.505.120.246	77.808.391.081,00	(3.696.729.165)	95,46
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	75.401.862.721	72.066.686.315,00	(3.335.176.406)	95,58
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	20.719.056.876	20.407.161.637,00	(311.895.239)	98,49
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.005.981.845	50.959.524.678,00	(2.046.457.167)	96,14
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5.1.05	Belanja Hibah	1.676.824.000	700.000.000,00	(976.824.000)	41,75
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	6.103.257.525	5.741.704.766,00	(361.552.759)	94,08
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.555.358.140	5.438.816.628,00	(116.541.512)	97,90
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	547.899.385	302.888.138,00	(245.011.247)	55,28
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001		Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	254.512.360.482	251.836.588.613,32	(2.675.771.868)	98,95
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	5	BELANJA DAERAH	254.512.360.482	251.836.588.613,32	(2.675.771.868)	98,95
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	235.045.373.010	233.230.226.401,00	(1.815.146.609)	99,23
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	99.906.925.457	98.546.369.902,00	(1.360.555.555)	98,64
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.138.447.552	134.683.856.499,00	(454.591.053)	99,66
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	5.2	BELANJA MODAL	19.466.987.472	18.606.362.212,32	(860.625.259)	95,58
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.286.129.276	6.687.428.829,00	(598.700.447)	91,78
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.059.965.196	7.799.433.383,32	(260.531.812)	96,77
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	4.120.893.000	4.119.500.000,00	(1.393.000)	99,97
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002		Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	94.760.122.128	91.682.849.607,00	(3.077.272.521)	96,75
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	5	BELANJA DAERAH	94.760.122.128	91.682.849.607,00	(3.077.272.521)	96,75
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	89.108.533.028	86.934.850.213,00	(2.173.682.815)	97,56
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	53.288.709.081	52.882.159.707,00	(406.549.374)	99,24

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.819.823.947	34.052.690.506,00	(1.767.133.441)	95,07
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	5.651.589.100	4.747.999.394,00	(903.589.706)	84,01
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.022.589.100	3.304.523.500,00	(718.065.600)	82,15
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	173.300.000	173.300.000,00	0	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.455.700.000	1.270.175.894,00	(185.524.106)	87,26
1.03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	172.595.960.648	143.743.011.263,61	(28.852.949.384)	83,28
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	166.798.238.645	138.190.320.370,61	(28.607.918.274)	82,85
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	5	BELANJA DAERAH	166.798.238.645	138.190.320.370,61	(28.607.918.274)	82,85
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	5.1	BELANJA OPERASI	99.678.174.242	79.592.629.321,24	(20.085.544.920)	79,85
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	19.626.163.063	19.498.232.211,00	(127.930.852)	99,35
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.820.210.937	47.363.973.045,00	(14.456.237.892)	76,62
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	5.1.05	Belanja Hibah	18.231.800.242	12.730.424.065,24	(5.501.376.176)	69,83
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	5.2	BELANJA MODAL	67.120.064.403	58.597.691.049,37	(8.522.373.353)	87,30
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	5.2.01	Belanja Modal Tanah	7.100.000.000	0,00	(7.100.000.000)	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	921.230.953	755.950.000,00	(165.280.953)	82,06
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24.390.863.100	24.190.863.000,00	(200.000.100)	99,18
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	34.707.970.350	33.650.878.049,37	(1.057.092.300)	96,95
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0002		UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR	4.849.182.613	4.632.157.991,00	(217.024.622)	95,52
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0002	5	BELANJA DAERAH	4.849.182.613	4.632.157.991,00	(217.024.622)	95,52
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.849.182.613	4.632.157.991,00	(217.024.622)	95,52
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.849.182.613	4.632.157.991,00	(217.024.622)	95,52
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0001		UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN	948.539.390	920.532.902,00	(28.006.488)	97,05
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0001	5	BELANJA DAERAH	948.539.390	920.532.902,00	(28.006.488)	97,05
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	948.539.390	920.532.902,00	(28.006.488)	97,05
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	948.539.390	920.532.902,00	(28.006.488)	97,05
1.04			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	254.987.625.329	155.084.552.494,00	(99.903.072.835)	60,82
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	254.987.625.329	155.084.552.494,00	(99.903.072.835)	60,82
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	5	BELANJA DAERAH	254.987.625.329	155.084.552.494,00	(99.903.072.835)	60,82
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	5.1	BELANJA OPERASI	252.069.744.322	153.410.693.254,00	(98.659.051.068)	60,86
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	9.156.176.472	8.327.806.194,00	(828.370.278)	90,95
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	242.913.567.850	145.082.887.060,00	(97.830.680.790)	59,73
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	5.2	BELANJA MODAL	2.917.881.007	1.673.859.240,00	(1.244.021.767)	57,37
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.542.989.200	557.269.000,00	(985.720.200)	36,12

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.374.891.807	1.116.590.240,00	(258.301.567)	81,21
1.05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	37.107.978.574	34.170.353.265,36	(2.937.625.308)	92,08
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000		Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	26.417.273.801	23.604.127.694,00	(2.813.146.107)	89,35
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	5	BELANJA DAERAH	26.417.273.801	23.604.127.694,00	(2.813.146.107)	89,35
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	5.1	BELANJA OPERASI	25.927.333.952	23.469.076.694,00	(2.458.257.258)	90,52
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	14.017.163.695	13.564.099.354,00	(453.064.341)	96,77
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.910.170.257	9.904.977.340,00	(2.005.192.917)	83,16
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	5.2	BELANJA MODAL	489.939.849	135.051.000,00	(354.888.849)	27,56
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	489.939.849	135.051.000,00	(354.888.849)	27,56
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.690.704.773	10.566.225.571,36	(124.479.201)	98,84
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	5	BELANJA DAERAH	10.690.704.773	10.566.225.571,36	(124.479.201)	98,84
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	5.1	BELANJA OPERASI	10.615.687.398	10.505.135.571,36	(110.551.827)	98,96
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	5.916.342.660	5.887.518.189,00	(28.824.471)	99,51
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.699.344.738	4.617.617.382,36	(81.727.356)	98,26
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	5.2	BELANJA MODAL	75.017.374	61.090.000,00	(13.927.374)	81,43
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.017.374	61.090.000,00	(13.927.374)	81,43
1.06			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	28.412.231.250	26.868.097.639,40	(1.544.133.610)	94,57
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000		Dinas Sosial	28.412.231.250	26.868.097.639,40	(1.544.133.610)	94,57
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	5	BELANJA DAERAH	28.412.231.250	26.868.097.639,40	(1.544.133.610)	94,57
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	5.1	BELANJA OPERASI	27.704.575.930	26.163.727.639,40	(1.540.848.290)	94,44
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	9.782.849.390	9.472.156.927,00	(310.692.463)	96,82
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.103.361.540	15.096.245.712,40	(1.007.115.827)	93,75
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	5.1.05	Belanja Hibah	565.000.000	565.000.000,00	0	100,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.253.365.000	1.030.325.000,00	(223.040.000)	82,20
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	5.2	BELANJA MODAL	707.655.320	704.370.000,00	(3.285.320)	99,54
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	707.655.320	704.370.000,00	(3.285.320)	99,54
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	334.216.954.320	313.676.026.002,42	(20.540.928.318)	93,85
2.07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	31.913.417.830	30.485.027.108,00	(1.428.390.722)	95,52
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	28.484.200.988	27.556.865.449,00	(927.335.539)	96,74
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	5	BELANJA DAERAH	28.484.200.988	27.556.865.449,00	(927.335.539)	96,74
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	5.1	BELANJA OPERASI	28.451.180.868	27.553.215.449,00	(897.965.419)	96,84
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	25.500.812.098	24.670.214.454,00	(830.597.644)	96,74
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.950.368.770	2.883.000.995,00	(67.367.775)	97,72
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	5.2	BELANJA MODAL	33.020.120	3.650.000,00	(29.370.120)	11,05
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.020.120	3.650.000,00	(29.370.120)	11,05

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0002		UPTD BLK Provinsi Kepulauan Riau	2.939.851.770	2.447.912.823,00	(491.938.947)	83,27
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0002	5	BELANJA DAERAH	2.939.851.770	2.447.912.823,00	(491.938.947)	83,27
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.675.931.730	2.433.072.823,00	(242.858.907)	90,92
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.675.931.730	2.433.072.823,00	(242.858.907)	90,92
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0002	5.2	BELANJA MODAL	263.920.040	14.840.000,00	(249.080.040)	5,62
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	263.920.040	14.840.000,00	(249.080.040)	5,62
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0003		UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Karimun	53.124.224	51.793.586,00	(1.330.638)	97,50
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0003	5	BELANJA DAERAH	53.124.224	51.793.586,00	(1.330.638)	97,50
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0003	5.1	BELANJA OPERASI	53.124.224	51.793.586,00	(1.330.638)	97,50
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.124.224	51.793.586,00	(1.330.638)	97,50
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0001		UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Batam	436.240.848	428.455.250,00	(7.785.598)	98,22
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0001	5	BELANJA DAERAH	436.240.848	428.455.250,00	(7.785.598)	98,22
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0001	5.1	BELANJA OPERASI	436.240.848	428.455.250,00	(7.785.598)	98,22
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	436.240.848	428.455.250,00	(7.785.598)	98,22
2.08			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	20.498.093.378	19.958.495.331,91	(539.598.046)	97,37
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	20.262.613.378	19.723.934.501,91	(538.678.876)	97,34
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	5	BELANJA DAERAH	20.262.613.378	19.723.934.501,91	(538.678.876)	97,34
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	5.1	BELANJA OPERASI	20.234.909.778	19.718.384.501,91	(516.525.276)	97,45
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	9.572.224.809	9.256.442.477,00	(315.782.332)	96,70
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.462.684.969	10.261.942.024,91	(200.742.944)	98,08
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	5.1.05	Belanja Hibah	200.000.000	200.000.000,00	0	100,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	5.2	BELANJA MODAL	27.703.600	5.550.000,00	(22.153.600)	20,03
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.703.600	5.550.000,00	(22.153.600)	20,03
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0001		UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	235.480.000	234.560.830,00	(919.170)	99,61
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0001	5	BELANJA DAERAH	235.480.000	234.560.830,00	(919.170)	99,61
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	235.480.000	234.560.830,00	(919.170)	99,61
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	235.480.000	234.560.830,00	(919.170)	99,61
2.09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	24.766.009.059	22.292.246.948,00	(2.473.762.111)	90,01
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	24.766.009.059	22.292.246.948,00	(2.473.762.111)	90,01
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	5	BELANJA DAERAH	24.766.009.059	22.292.246.948,00	(2.473.762.111)	90,01
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	5.1	BELANJA OPERASI	24.001.798.869	22.155.802.348,00	(1.845.996.521)	92,31
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	18.224.673.344	17.570.373.228,00	(654.300.116)	96,41
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.777.125.525	4.585.429.120,00	(1.191.696.405)	79,37
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	5.2	BELANJA MODAL	764.210.190	136.444.600,00	(627.765.590)	17,85

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	764.210.190	136.444.600,00	(627.765.590)	17,85
2.10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	1.048.980.723	1.042.951.731,00	(6.028.992)	99,43
2.10	1.03.2.10.0.00.03.0000		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	1.048.980.723	1.042.951.731,00	(6.028.992)	99,43
2.10	1.03.2.10.0.00.03.0000	5	BELANJA DAERAH	1.048.980.723	1.042.951.731,00	(6.028.992)	99,43
2.10	1.03.2.10.0.00.03.0000	5.1	BELANJA OPERASI	127.880.723	122.851.731,00	(5.028.992)	96,07
2.10	1.03.2.10.0.00.03.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.880.723	122.851.731,00	(5.028.992)	96,07
2.10	1.03.2.10.0.00.03.0000	5.2	BELANJA MODAL	921.100.000	920.100.000,00	(1.000.000)	99,89
2.10	1.03.2.10.0.00.03.0000	5.2.01	Belanja Modal Tanah	921.100.000	920.100.000,00	(1.000.000)	99,89
2.11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	36.111.720.447	33.235.468.363,00	(2.876.252.084)	92,04
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	35.503.115.160	32.693.838.223,00	(2.809.276.937)	92,09
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	5	BELANJA DAERAH	35.503.115.160	32.693.838.223,00	(2.809.276.937)	92,09
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	5.1	BELANJA OPERASI	33.296.873.656	30.698.438.223,00	(2.598.435.433)	92,20
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	27.436.768.874	26.532.474.269,00	(904.294.605)	96,70
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.860.104.782	4.165.963.954,00	(1.694.140.828)	71,09
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	5.2	BELANJA MODAL	2.206.241.504	1.995.400.000,00	(210.841.504)	90,44
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.206.241.504	1.995.400.000,00	(210.841.504)	90,44
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0002		UPTD KPHP Unit I Karimun	60.324.200	54.594.500,00	(5.729.700)	90,50
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0002	5	BELANJA DAERAH	60.324.200	54.594.500,00	(5.729.700)	90,50
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0002	5.1	BELANJA OPERASI	60.324.200	54.594.500,00	(5.729.700)	90,50
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.324.200	54.594.500,00	(5.729.700)	90,50
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0004		UPTD KPHP Unit III Lingga	39.162.800	26.449.280,00	(12.713.520)	67,54
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0004	5	BELANJA DAERAH	39.162.800	26.449.280,00	(12.713.520)	67,54
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0004	5.1	BELANJA OPERASI	39.162.800	26.449.280,00	(12.713.520)	67,54
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.162.800	26.449.280,00	(12.713.520)	67,54
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0005		UPTD KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang	59.903.760	58.373.239,00	(1.530.521)	97,45
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0005	5	BELANJA DAERAH	59.903.760	58.373.239,00	(1.530.521)	97,45
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0005	5.1	BELANJA OPERASI	59.903.760	58.373.239,00	(1.530.521)	97,45
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.903.760	58.373.239,00	(1.530.521)	97,45
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0006		UPTD KPHP Unit V Natuna	66.807.380	61.670.238,00	(5.137.142)	92,31
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0006	5	BELANJA DAERAH	66.807.380	61.670.238,00	(5.137.142)	92,31
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0006	5.1	BELANJA OPERASI	66.807.380	61.670.238,00	(5.137.142)	92,31
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.807.380	61.670.238,00	(5.137.142)	92,31
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0007		UPTD KPHP Unit VI Kepulauan Anambas	111.499.780	108.925.475,00	(2.574.305)	97,69
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0007	5	BELANJA DAERAH	111.499.780	108.925.475,00	(2.574.305)	97,69
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0007	5.1	BELANJA OPERASI	111.499.780	108.925.475,00	(2.574.305)	97,69
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.499.780	108.925.475,00	(2.574.305)	97,69
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0003		UPTD KPHP Unit II Batam	64.106.455	63.373.367,00	(733.088)	98,86
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0003	5	BELANJA DAERAH	64.106.455	63.373.367,00	(733.088)	98,86
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0003	5.1	BELANJA OPERASI	64.106.455	63.373.367,00	(733.088)	98,86

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.106.455	63.373.367,00	(733.088)	98,86
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0001		UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	206.800.912	168.244.041,00	(38.556.871)	81,36
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0001	5	BELANJA DAERAH	206.800.912	168.244.041,00	(38.556.871)	81,36
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0001	5.1	BELANJA OPERASI	203.195.912	168.244.041,00	(34.951.871)	82,80
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	203.195.912	168.244.041,00	(34.951.871)	82,80
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0001	5.2	BELANJA MODAL	3.605.000	0,00	(3.605.000)	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.605.000	0,00	(3.605.000)	0,00
2.12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	326.308.420	326.307.895,00	(525)	100,00
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	326.308.420	326.307.895,00	(525)	100,00
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	5	BELANJA DAERAH	326.308.420	326.307.895,00	(525)	100,00
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	5.1	BELANJA OPERASI	326.308.420	326.307.895,00	(525)	100,00
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	326.308.420	326.307.895,00	(525)	100,00
2.13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	17.168.500.302	15.775.273.011,00	(1.393.227.291)	91,88
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	17.168.500.302	15.775.273.011,00	(1.393.227.291)	91,88
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	5	BELANJA DAERAH	17.168.500.302	15.775.273.011,00	(1.393.227.291)	91,88
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	5.1	BELANJA OPERASI	16.977.454.760	15.598.859.058,00	(1.378.595.702)	91,88
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	9.901.902.423	9.605.491.504,00	(296.410.919)	97,01
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.219.052.337	5.818.367.554,00	(400.684.783)	93,56
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	5.1.05	Belanja Hibah	856.500.000	175.000.000,00	(681.500.000)	20,43
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	5.2	BELANJA MODAL	191.045.542	176.413.953,00	(14.631.589)	92,34
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	191.045.542	176.413.953,00	(14.631.589)	92,34
2.14			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4.188.772.374	2.182.372.362,00	(2.006.400.012)	52,10
2.14	2.08.2.14.0.00.08.0000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	4.188.772.374	2.182.372.362,00	(2.006.400.012)	52,10
2.14	2.08.2.14.0.00.08.0000	5	BELANJA DAERAH	4.188.772.374	2.182.372.362,00	(2.006.400.012)	52,10
2.14	2.08.2.14.0.00.08.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.188.772.374	2.182.372.362,00	(2.006.400.012)	52,10
2.14	2.08.2.14.0.00.08.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.188.772.374	2.182.372.362,00	(2.006.400.012)	52,10
2.15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	47.863.251.061	43.942.136.119,49	(3.921.114.941)	91,81
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		Dinas Perhubungan	45.471.840.708	41.637.790.274,49	(3.834.050.434)	91,57
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	45.471.840.708	41.637.790.274,49	(3.834.050.434)	91,57

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	40.908.966.482	39.026.713.812,72	(1.882.252.669)	95,40
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	12.666.373.495	12.602.617.139,00	(63.756.356)	99,50
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.314.592.986	26.424.096.673,72	(890.496.313)	96,74
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	928.000.000	0,00	(928.000.000)	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	4.562.874.226	2.611.076.461,77	(1.951.797.764)	57,22
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.793.867.570	1.783.806.844,00	(10.060.726)	99,44
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.769.006.656	827.269.617,77	(1.941.737.038)	29,88
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0001		UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah I Kota Batam	337.993.837	332.596.853,00	(5.396.984)	98,40
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0001	5	BELANJA DAERAH	337.993.837	332.596.853,00	(5.396.984)	98,40
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	337.993.837	332.596.853,00	(5.396.984)	98,40
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	337.993.837	332.596.853,00	(5.396.984)	98,40
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0002		UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah II Kabupaten Karimun	370.559.736	366.642.268,00	(3.917.468)	98,94
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0002	5	BELANJA DAERAH	370.559.736	366.642.268,00	(3.917.468)	98,94
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	370.559.736	366.642.268,00	(3.917.468)	98,94
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	370.559.736	366.642.268,00	(3.917.468)	98,94
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0003		UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah III Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan	883.917.117	856.453.391,00	(27.463.726)	96,89
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0003	5	BELANJA DAERAH	883.917.117	856.453.391,00	(27.463.726)	96,89
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	871.396.317	843.953.391,00	(27.442.926)	96,85
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	871.396.317	843.953.391,00	(27.442.926)	96,85
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	12.520.800	12.500.000,00	(20.800)	99,83
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.520.800	12.500.000,00	(20.800)	99,83
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0004		UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah IV Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas	437.351.482	423.155.793,00	(14.195.689)	96,75
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0004	5	BELANJA DAERAH	437.351.482	423.155.793,00	(14.195.689)	96,75
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	437.351.482	423.155.793,00	(14.195.689)	96,75
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	437.351.482	423.155.793,00	(14.195.689)	96,75
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0005		UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah V Kabupaten Lingga	361.588.177	325.497.540,00	(36.090.637)	90,02
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0005	5	BELANJA DAERAH	361.588.177	325.497.540,00	(36.090.637)	90,02
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	331.716.972	295.971.540,00	(35.745.432)	89,22
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	331.716.972	295.971.540,00	(35.745.432)	89,22
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0005	5.2	BELANJA MODAL	29.871.205	29.526.000,00	(345.205)	98,84
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.871.205	29.526.000,00	(345.205)	98,84
2.16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	36.016.895.744	34.492.959.301,00	(1.523.936.443)	95,77

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	36.016.895.744	34.492.959.301,00	(1.523.936.443)	95,77
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	5	BELANJA DAERAH	36.016.895.744	34.492.959.301,00	(1.523.936.443)	95,77
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	5.1	BELANJA OPERASI	35.004.099.184	33.562.544.301,00	(1.441.554.883)	95,88
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	9.264.438.194	9.187.874.578,00	(76.563.616)	99,17
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.039.660.990	23.674.669.723,00	(1.364.991.267)	94,55
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	5.1.05	Belanja Hibah	700.000.000	700.000.000,00	0	100,00
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.012.796.560	930.415.000,00	(82.381.560)	91,87
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.012.796.560	930.415.000,00	(82.381.560)	91,87
2.17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	21.236.276.208	19.253.917.261,00	(1.982.358.947)	90,67
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	21.236.276.208	19.253.917.261,00	(1.982.358.947)	90,67
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	5	BELANJA DAERAH	21.236.276.208	19.253.917.261,00	(1.982.358.947)	90,67
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	5.1	BELANJA OPERASI	21.120.997.923	19.160.268.976,00	(1.960.728.947)	90,72
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	8.210.965.030	8.094.176.415,00	(116.788.615)	98,58
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.240.032.893	7.851.791.381,00	(1.388.241.512)	84,98
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	5.1.04	Belanja Subsidi	1.400.000.000	944.301.180,00	(455.698.820)	67,45
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	5.1.05	Belanja Hibah	2.270.000.000	2.270.000.000,00	0	100,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	5.2	BELANJA MODAL	115.278.285	93.648.285,00	(21.630.000)	81,24
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	115.278.285	93.648.285,00	(21.630.000)	81,24
2.18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	15.043.835.367	14.748.383.021,00	(295.452.346)	98,04
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	15.043.835.367	14.748.383.021,00	(295.452.346)	98,04
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	5	BELANJA DAERAH	15.043.835.367	14.748.383.021,00	(295.452.346)	98,04
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	5.1	BELANJA OPERASI	15.041.835.367	14.746.383.021,00	(295.452.346)	98,04
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	10.577.033.703	10.528.583.634,00	(48.450.069)	99,54
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.464.801.664	4.217.799.387,00	(247.002.277)	94,47
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	5.2	BELANJA MODAL	2.000.000	2.000.000,00	0	100,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.000.000	2.000.000,00	0	100,00
2.19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	39.703.724.865	38.551.923.977,00	(1.151.800.888)	97,10
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000		Dinas Kepemudaan dan Olahraga	39.703.724.865	38.551.923.977,00	(1.151.800.888)	97,10
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	5	BELANJA DAERAH	39.703.724.865	38.551.923.977,00	(1.151.800.888)	97,10
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	5.1	BELANJA OPERASI	39.249.862.760	38.114.492.172,00	(1.135.370.588)	97,11
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	8.604.626.235	8.530.902.304,00	(73.723.931)	99,14
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.427.936.525	11.733.667.690,00	(694.268.835)	94,41
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	5.1.05	Belanja Hibah	18.217.300.000	17.849.922.178,00	(367.377.822)	97,98
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	5.2	BELANJA MODAL	453.862.105	437.431.805,00	(16.430.300)	96,38
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.430.300	0,00	(16.430.300)	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	437.431.805	437.431.805,00	0	100,00
2.20			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	82.222.400	81.562.515,00	(659.885)	99,20

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.20	2.16.0.00.0.00.13.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	82.222.400	81.562.515,00	(659.885)	99,20
2.20	2.16.0.00.0.00.13.0000	5	BELANJA DAERAH	82.222.400	81.562.515,00	(659.885)	99,20
2.20	2.16.0.00.0.00.13.0000	5.1	BELANJA OPERASI	82.222.400	81.562.515,00	(659.885)	99,20
2.20	2.16.0.00.0.00.13.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.222.400	81.562.515,00	(659.885)	99,20
2.21			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	134.534.834	129.352.024,00	(5.182.810)	96,15
2.21	2.16.0.00.0.00.13.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	134.534.834	129.352.024,00	(5.182.810)	96,15
2.21	2.16.0.00.0.00.13.0000	5	BELANJA DAERAH	134.534.834	129.352.024,00	(5.182.810)	96,15
2.21	2.16.0.00.0.00.13.0000	5.1	BELANJA OPERASI	134.534.834	129.352.024,00	(5.182.810)	96,15
2.21	2.16.0.00.0.00.13.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.534.834	129.352.024,00	(5.182.810)	96,15
2.22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	17.979.422.492	17.608.163.887,00	(371.258.605)	97,94
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000		Dinas Kebudayaan	17.979.422.492	17.608.163.887,00	(371.258.605)	97,94
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	5	BELANJA DAERAH	17.979.422.492	17.608.163.887,00	(371.258.605)	97,94
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	5.1	BELANJA OPERASI	17.209.940.222	16.841.018.887,00	(368.921.335)	97,86
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	7.741.662.046	7.616.677.097,00	(124.984.949)	98,39
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.905.528.176	7.761.591.790,00	(143.936.386)	98,18
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	5.1.05	Belanja Hibah	1.562.750.000	1.462.750.000,00	(100.000.000)	93,60
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	5.2	BELANJA MODAL	769.482.270	767.145.000,00	(2.337.270)	99,70
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	769.482.270	767.145.000,00	(2.337.270)	99,70
2.23			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	19.969.205.094	19.417.434.381,02	(551.770.713)	97,24
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000		Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	19.675.743.898	19.134.984.934,02	(540.758.964)	97,25
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	5	BELANJA DAERAH	19.675.743.898	19.134.984.934,02	(540.758.964)	97,25
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	5.1	BELANJA OPERASI	19.583.978.018	19.043.334.934,02	(540.643.084)	97,24
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	12.554.146.780	12.296.747.950,00	(257.398.830)	97,95
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.029.831.238	6.746.586.984,02	(283.244.254)	95,97
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	5.2	BELANJA MODAL	91.765.880	91.650.000,00	(115.880)	99,87
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	91.765.880	91.650.000,00	(115.880)	99,87
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0001		UPT Perpustakaan Muhammad Sani	293.461.196	282.449.447,00	(11.011.749)	96,25
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0001	5	BELANJA DAERAH	293.461.196	282.449.447,00	(11.011.749)	96,25
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0001	5.1	BELANJA OPERASI	288.997.196	278.019.447,00	(10.977.749)	96,20
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	288.997.196	278.019.447,00	(10.977.749)	96,20
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0001	5.2	BELANJA MODAL	4.464.000	4.430.000,00	(34.000)	99,24
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.464.000	4.430.000,00	(34.000)	99,24
2.24			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	165.783.721	152.050.766,00	(13.732.955)	91,72
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000		Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	165.783.721	152.050.766,00	(13.732.955)	91,72
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000	5	BELANJA DAERAH	165.783.721	152.050.766,00	(13.732.955)	91,72
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000	5.1	BELANJA OPERASI	165.783.721	152.050.766,00	(13.732.955)	91,72
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.783.721	152.050.766,00	(13.732.955)	91,72

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	172.109.228.253	145.369.936.136,24	(26.739.292.117)	84,46
3.25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	69.852.198.766	67.666.654.729,83	(2.185.544.036)	96,87
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000		Dinas Kelautan dan Perikanan	59.970.291.443	58.699.374.822,83	(1.270.916.620)	97,88
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	5	BELANJA DAERAH	59.970.291.443	58.699.374.822,83	(1.270.916.620)	97,88
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	5.1	BELANJA OPERASI	50.154.560.197	49.117.028.540,74	(1.037.531.656)	97,93
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	25.762.755.855	25.204.302.736,00	(558.453.119)	97,83
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	5.1.02	Belanja Barang dan jasa	13.714.595.649	13.370.052.912,80	(344.542.736)	97,49
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	5.1.05	Belanja Hibah	10.677.208.692	10.542.672.891,94	(134.535.800)	98,74
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	5.2	BELANJA MODAL	9.815.731.245	9.582.346.282,09	(233.384.963)	97,62
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	997.746.105	932.434.000,00	(65.312.105)	93,45
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.247.985.140	8.106.017.628,99	(141.967.511)	98,28
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	570.000.000	543.894.653,10	(26.105.346)	95,42
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0001		Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Anambas	400.886.878	342.863.535,00	(58.023.343)	85,53
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0001	5	BELANJA DAERAH	400.886.878	342.863.535,00	(58.023.343)	85,53
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0001	5.1	BELANJA OPERASI	389.976.878	331.953.535,00	(58.023.343)	85,12
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0001	5.1.02	Belanja Barang dan jasa	389.976.878	331.953.535,00	(58.023.343)	85,12
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0001	5.2	BELANJA MODAL	10.910.000	10.910.000,00	0	100,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.910.000	10.910.000,00	0	100,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0002		Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Natuna	956.588.944	927.218.516,00	(29.370.428)	96,93
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0002	5	BELANJA DAERAH	956.588.944	927.218.516,00	(29.370.428)	96,93
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0002	5.1	BELANJA OPERASI	911.558.109	895.659.516,00	(15.898.593)	98,26
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0002	5.1.02	Belanja Barang dan jasa	911.558.109	895.659.516,00	(15.898.593)	98,26
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0002	5.2	BELANJA MODAL	45.030.835	31.559.000,00	(13.471.835)	70,08
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.030.835	31.559.000,00	(13.471.835)	70,08
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0003		Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Lingga	1.006.371.797	970.726.423,00	(35.645.374)	96,46
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0003	5	BELANJA DAERAH	1.006.371.797	970.726.423,00	(35.645.374)	96,46
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0003	5.1	BELANJA OPERASI	988.959.227	953.376.423,00	(35.582.804)	96,40
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0003	5.1.02	Belanja Barang dan jasa	988.959.227	953.376.423,00	(35.582.804)	96,40
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0003	5.2	BELANJA MODAL	17.412.570	17.350.000,00	(62.570)	99,64
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.412.570	17.350.000,00	(62.570)	99,64
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0004		Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Karimun	1.168.654.562	1.139.056.602,00	(29.597.960)	97,47
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0004	5	BELANJA DAERAH	1.168.654.562	1.139.056.602,00	(29.597.960)	97,47
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.168.654.562	1.139.056.602,00	(29.597.960)	97,47
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0004	5.1.02	Belanja Barang dan jasa	1.168.654.562	1.139.056.602,00	(29.597.960)	97,47
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0005		Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Batam	922.960.472	913.970.332,00	(8.990.140)	99,03
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0005	5	BELANJA DAERAH	922.960.472	913.970.332,00	(8.990.140)	99,03
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0005	5.1	BELANJA OPERASI	875.917.472	866.927.332,00	(8.990.140)	98,97

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	875.917.472	866.927.332,00	(8.990.140)	98,97
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0005	5.2	BELANJA MODAL	47.043.000	47.043.000,00	0	100,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.043.000	47.043.000,00	0	100,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0008		UPTD Balai Benih Ikan	2.353.667.721	2.258.445.208,00	(95.222.513)	95,95
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0008	5	BELANJA DAERAH	2.353.667.721	2.258.445.208,00	(95.222.513)	95,95
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0008	5.1	BELANJA OPERASI	2.131.304.221	2.043.671.708,00	(87.632.513)	95,89
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.131.304.221	2.043.671.708,00	(87.632.513)	95,89
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0008	5.2	BELANJA MODAL	222.363.500	214.773.500,00	(7.590.000)	96,59
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0008	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	222.363.500	214.773.500,00	(7.590.000)	96,59
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0007		UPTD Balai Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan (BPMP2KP)	678.841.381	676.799.848,00	(2.041.533)	99,70
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0007	5	BELANJA DAERAH	678.841.381	676.799.848,00	(2.041.533)	99,70
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0007	5.1	BELANJA OPERASI	678.841.381	676.799.848,00	(2.041.533)	99,70
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	678.841.381	676.799.848,00	(2.041.533)	99,70
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0006		UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai	2.393.935.568	1.738.199.443,00	(655.736.125)	72,61
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0006	5	BELANJA DAERAH	2.393.935.568	1.738.199.443,00	(655.736.125)	72,61
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.379.615.568	1.723.879.443,00	(655.736.125)	72,44
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.379.615.568	1.723.879.443,00	(655.736.125)	72,44
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0006	5.2	BELANJA MODAL	14.320.000	14.320.000,00	0	100,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.320.000	14.320.000,00	0	100,00
3.26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	27.718.278.477	26.240.716.090,00	(1.477.562.387)	94,67
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pariwisata	27.718.278.477	26.240.716.090,00	(1.477.562.387)	94,67
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	27.718.278.477	26.240.716.090,00	(1.477.562.387)	94,67
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	27.689.778.477	26.212.216.090,00	(1.477.562.387)	94,66
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	10.477.903.312	10.165.197.472,00	(312.705.840)	97,02
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.211.875.165	16.047.018.618,00	(1.164.856.547)	93,23
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	28.500.000	28.500.000,00	0	100,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.500.000	28.500.000,00	0	100,00
3.27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	16.734.795.184	7.227.562.621,00	(9.507.232.563)	43,19
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	11.438.074.626	2.351.766.221,00	(9.086.308.405)	20,56
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	5	BELANJA DAERAH	11.438.074.626	2.351.766.221,00	(9.086.308.405)	20,56
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	5.1	BELANJA OPERASI	11.420.980.626	2.351.766.221,00	(9.069.214.405)	20,59
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.420.980.626	2.351.766.221,00	(9.069.214.405)	20,59
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	5.2	BELANJA MODAL	17.094.000	0,00	(17.094.000)	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.094.000	0,00	(17.094.000)	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0002		UPT Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan	565.063.587	238.629.394,00	(326.434.193)	42,23

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0002	5	BELANJA DAERAH	565.063.587	238.629.394,00	(326.434.193)	42,23
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	565.063.587	238.629.394,00	(326.434.193)	42,23
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	565.063.587	238.629.394,00	(326.434.193)	42,23
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0001		UPT Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (BP2SPTPHP)	4.731.656.971	4.637.167.006,00	(94.489.965)	98,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0001	5	BELANJA DAERAH	4.731.656.971	4.637.167.006,00	(94.489.965)	98,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.751.632.117	1.721.906.975,00	(29.725.142)	98,30
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.751.632.117	1.721.906.975,00	(29.725.142)	98,30
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0001	5.2	BELANJA MODAL	2.980.024.854	2.915.260.031,00	(64.764.823)	97,83
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.980.024.854	1.918.002.000,00	(62.022.854)	96,87
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.000.000.000	997.258.031,00	(2.741.969)	99,73
3.28			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	1.550.373.467	1.336.997.767,00	(213.375.700)	86,24
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.330.373.467	1.119.704.967,00	(210.668.500)	84,16
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	5	BELANJA DAERAH	1.330.373.467	1.119.704.967,00	(210.668.500)	84,16
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.261.979.242	1.067.154.967,00	(194.824.275)	84,56
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.261.979.242	1.067.154.967,00	(194.824.275)	84,56
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	5.2	BELANJA MODAL	68.394.225	52.550.000,00	(15.844.225)	76,83
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.394.225	52.550.000,00	(15.844.225)	76,83
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0002		UPTD KPHP Unit I Karimun	30.000.000	29.850.000,00	(150.000)	99,50
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0002	5	BELANJA DAERAH	30.000.000	29.850.000,00	(150.000)	99,50
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0002	5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	29.850.000,00	(150.000)	99,50
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	29.850.000,00	(150.000)	99,50
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0004		UPTD KPHP Unit III Lingga	30.000.000	28.050.000,00	(1.950.000)	93,50
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0004	5	BELANJA DAERAH	30.000.000	28.050.000,00	(1.950.000)	93,50
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0004	5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	28.050.000,00	(1.950.000)	93,50
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	28.050.000,00	(1.950.000)	93,50
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0005		UPTD KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang	42.500.000	42.240.800,00	(259.200)	99,39
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0005	5	BELANJA DAERAH	42.500.000	42.240.800,00	(259.200)	99,39
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0005	5.1	BELANJA OPERASI	34.999.925	34.790.800,00	(209.125)	99,40
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.999.925	34.790.800,00	(209.125)	99,40
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0005	5.2	BELANJA MODAL	7.500.075	7.450.000,00	(50.075)	99,33
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.500.075	7.450.000,00	(50.075)	99,33
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0006		UPTD KPHP Unit V Natuna	45.000.000	44.914.800,00	(85.200)	99,81
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0006	5	BELANJA DAERAH	45.000.000	44.914.800,00	(85.200)	99,81
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0006	5.1	BELANJA OPERASI	45.000.000	44.914.800,00	(85.200)	99,81
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000	44.914.800,00	(85.200)	99,81
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0007		UPTD KPHP Unit VI Kepulauan Anambas	30.000.000	30.000.000,00	0	100,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0007	5	BELANJA DAERAH	30.000.000	30.000.000,00	0	100,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0007	5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	30.000.000,00	0	100,00

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0007	5.1.02	Belanja Barang dan jasa	30.000.000	30.000.000,00	0	100,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0003		UPTD KPHP Unit II Batam	42.500.000	42.237.200,00	(262.800)	99,38
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0003	5	BELANJA DAERAH	42.500.000	42.237.200,00	(262.800)	99,38
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0003	5.1	BELANJA OPERASI	42.500.000	42.237.200,00	(262.800)	99,38
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0003	5.1.02	Belanja Barang dan jasa	42.500.000	42.237.200,00	(262.800)	99,38
3.29			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	33.876.262.600	21.134.203.211,41	(12.742.059.388)	62,39
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	33.876.262.600	21.134.203.211,41	(12.742.059.388)	62,39
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	5	BELANJA DAERAH	33.876.262.600	21.134.203.211,41	(12.742.059.388)	62,39
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	5.1	BELANJA OPERASI	24.611.788.035	18.062.264.262,81	(6.549.523.772)	73,39
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	9.666.430.246	9.319.033.538,00	(347.396.708)	96,41
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	5.1.02	Belanja Barang dan jasa	14.945.357.789	8.743.230.724,81	(6.202.127.064)	58,50
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	5.2	BELANJA MODAL	9.264.474.565	3.071.938.948,60	(6.192.535.616)	33,16
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	287.512.384	185.975.000,00	(101.537.384)	64,68
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	635.972.689	436.463.094,60	(199.509.594)	68,63
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.340.989.492	2.449.500.854,00	(5.891.488.638)	29,37
3.30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	2.158.809.289	2.153.616.766,00	(5.192.523)	99,76
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.158.809.289	2.153.616.766,00	(5.192.523)	99,76
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	5	BELANJA DAERAH	2.158.809.289	2.153.616.766,00	(5.192.523)	99,76
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.158.809.289	2.153.616.766,00	(5.192.523)	99,76
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	5.1.02	Belanja Barang dan jasa	2.158.809.289	2.153.616.766,00	(5.192.523)	99,76
3.31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	20.198.510.470	19.590.382.151,00	(608.128.319)	96,99
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	20.198.510.470	19.590.382.151,00	(608.128.319)	96,99
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	5	BELANJA DAERAH	20.198.510.470	19.590.382.151,00	(608.128.319)	96,99
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	5.1	BELANJA OPERASI	20.141.560.470	19.533.432.151,00	(608.128.319)	96,98
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	10.756.333.456	10.549.430.245,00	(206.903.211)	98,08
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	5.1.02	Belanja Barang dan jasa	9.385.227.014	8.984.001.906,00	(401.225.108)	95,72
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	5.2	BELANJA MODAL	56.950.000	56.950.000,00	0	100,00
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.950.000	56.950.000,00	0	100,00
3.32			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	20.000.000	19.802.800,00	(197.200)	99,01
3.32	2.07.3.32.0.00.07.0000		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	20.000.000	19.802.800,00	(197.200)	99,01
3.32	2.07.3.32.0.00.07.0000	5	BELANJA DAERAH	20.000.000	19.802.800,00	(197.200)	99,01
3.32	2.07.3.32.0.00.07.0000	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000	19.802.800,00	(197.200)	99,01
3.32	2.07.3.32.0.00.07.0000	5.1.02	Belanja Barang dan jasa	20.000.000	19.802.800,00	(197.200)	99,01
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	542.012.803.336	509.945.906.428,23	(32.066.896.907)	94,08
4.01			SEKRETARIAT DAERAH	385.655.474.580	368.677.964.441,23	(16.977.510.138)	95,60

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002		Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.243.173.252	4.212.198.024,00	(30.975.228)	99,27
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	5	BELANJA DAERAH	4.243.173.252	4.212.198.024,00	(30.975.228)	99,27
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.107.561.928	4.082.833.024,00	(24.728.904)	99,40
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.107.561.928	4.082.833.024,00	(24.728.904)	99,40
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	5.2	BELANJA MODAL	135.611.324	129.365.000,00	(6.246.324)	95,39
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	135.611.324	129.365.000,00	(6.246.324)	95,39
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004		Biro Kesejahteraan Rakyat	157.255.836.765	151.890.719.111,00	(5.365.117.654)	96,59
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	5	BELANJA DAERAH	157.255.836.765	151.890.719.111,00	(5.365.117.654)	96,59
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	5.1	BELANJA OPERASI	156.989.853.765	151.659.146.111,00	(5.330.707.654)	96,60
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.420.523.765	50.522.965.789,00	(897.557.976)	98,25
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	5.1.05	Belanja Hibah	105.569.330.000	101.136.180.322,00	(4.433.149.678)	95,80
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	5.2	BELANJA MODAL	265.983.000	231.573.000,00	(34.410.000)	87,06
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	265.983.000	231.573.000,00	(34.410.000)	87,06
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001		Biro Hukum	3.281.888.137	2.889.204.096,00	(392.684.041)	88,03
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	5	BELANJA DAERAH	3.281.888.137	2.889.204.096,00	(392.684.041)	88,03
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.182.131.037	2.790.788.096,00	(391.342.941)	87,70
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.182.131.037	2.790.788.096,00	(391.342.941)	87,70
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	5.2	BELANJA MODAL	99.757.100	98.416.000,00	(1.341.100)	98,66
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.757.100	98.416.000,00	(1.341.100)	98,66
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005		Biro Perekonomian dan Pembangunan	3.123.391.853	3.050.883.564,00	(72.508.289)	97,68
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	5	BELANJA DAERAH	3.123.391.853	3.050.883.564,00	(72.508.289)	97,68
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.123.391.853	3.050.883.564,00	(72.508.289)	97,68
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.123.391.853	3.050.883.564,00	(72.508.289)	97,68
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008		Biro Pengadaan Barang/Jasa	2.296.375.876	2.285.150.268,00	(11.225.608)	99,51
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	5	BELANJA DAERAH	2.296.375.876	2.285.150.268,00	(11.225.608)	99,51
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	5.1	BELANJA OPERASI	2.153.308.676	2.142.815.068,00	(10.493.608)	99,51
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.153.308.676	2.142.815.068,00	(10.493.608)	99,51
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	5.2	BELANJA MODAL	143.067.200	142.335.200,00	(732.000)	99,49
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	143.067.200	142.335.200,00	(732.000)	99,49
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006		Biro Umum	201.548.624.822	190.718.403.762,23	(10.830.221.060)	94,63
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	5	BELANJA DAERAH	201.548.624.822	190.718.403.762,23	(10.830.221.060)	94,63
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	5.1	BELANJA OPERASI	188.077.109.522	179.648.115.662,23	(8.428.993.860)	95,52
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	5.1.01	Belanja Pegawai	75.262.582.311	74.118.167.508,00	(1.144.414.803)	98,48
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.271.601.491	94.215.195.554,23	(2.056.405.936)	97,86
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	5.1.05	Belanja Hibah	16.542.925.720	11.314.752.600,00	(5.228.173.120)	68,40
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	5.2	BELANJA MODAL	13.471.515.300	11.070.288.100,00	(2.401.227.200)	82,18
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.471.515.300	11.070.288.100,00	(2.401.227.200)	82,18
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007		Biro Administrasi Pimpinan	12.003.455.423	11.743.835.725,00	(259.619.698)	97,84
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	5	BELANJA DAERAH	12.003.455.423	11.743.835.725,00	(259.619.698)	97,84
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	5.1	BELANJA OPERASI	11.829.835.023	11.582.460.325,00	(247.374.698)	97,91
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.829.835.023	11.582.460.325,00	(247.374.698)	97,91
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	5.2	BELANJA MODAL	173.620.400	161.375.400,00	(12.245.000)	92,95

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	173.620.400	161.375.400,00	(12.245.000)	92,95
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003		Biro Organisasi	1.902.728.451	1.887.569.891,00	(15.158.560)	99,20
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	5	BELANJA DAERAH	1.902.728.451	1.887.569.891,00	(15.158.560)	99,20
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.624.678.451	1.609.519.891,00	(15.158.560)	99,07
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.624.678.451	1.609.519.891,00	(15.158.560)	99,07
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	5.2	BELANJA MODAL	278.050.000	278.050.000,00	0	100,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	278.050.000	278.050.000,00	0	100,00
4.02			SEKRETARIAT DPRD	156.357.328.756	141.267.941.987,00	(15.089.386.769)	90,35
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000		Sekretariat DPRD	156.357.328.756	141.267.941.987,00	(15.089.386.769)	90,35
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	5	BELANJA DAERAH	156.357.328.756	141.267.941.987,00	(15.089.386.769)	90,35
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	5.1	BELANJA OPERASI	152.682.384.560	140.705.641.987,00	(11.976.742.573)	92,16
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	44.389.765.813	42.440.166.622,00	(1.949.599.191)	95,61
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.292.618.747	98.265.475.365,00	(10.027.143.382)	90,74
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	5.2	BELANJA MODAL	3.674.944.196	562.300.000,00	(3.112.644.196)	15,30
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.308.644.196	203.500.000,00	(3.105.144.196)	6,15
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	366.300.000	358.800.000,00	(7.500.000)	97,95
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.133.238.665.769	1.046.690.978.423,51	(86.547.687.346)	92,36
5.01			PERENCANAAN	32.833.472.462	32.587.868.882,00	(245.603.580)	99,25
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	32.833.472.462	32.587.868.882,00	(245.603.580)	99,25
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5	BELANJA DAERAH	32.833.472.462	32.587.868.882,00	(245.603.580)	99,25
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.1	BELANJA OPERASI	32.304.407.014	32.066.571.082,00	(237.835.932)	99,26
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	20.746.897.529	20.587.713.727,00	(159.183.802)	99,23
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.557.509.484	11.478.857.355,00	(78.652.129)	99,32
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.2	BELANJA MODAL	529.065.448	521.297.800,00	(7.767.648)	98,53
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	529.065.448	521.297.800,00	(7.767.648)	98,53
5.02			KEUANGAN	1.038.416.646.256	954.766.579.169,51	(83.650.067.086)	91,94
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000		Badan Keuangan dan Aset Daerah	912.103.051.023	836.155.098.479,31	(75.947.952.543)	91,67
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5	BELANJA DAERAH	912.103.051.023	836.155.098.479,31	(75.947.952.543)	91,67
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.1	BELANJA OPERASI	64.866.800.728	58.142.334.324,31	(6.724.466.403)	89,63
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	23.141.765.384	22.645.636.563,00	(496.128.821)	97,86
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.675.035.344	31.804.137.488,31	(5.870.897.855)	84,42
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.1.03	Belanja Bunga	4.050.000.000	3.692.560.273,00	(357.439.727)	91,17
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.2	BELANJA MODAL	844.964.817	803.140.000,00	(41.824.817)	95,05
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	844.964.817	803.140.000,00	(41.824.817)	95,05
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.773.672.048	2.065.423.140,00	(2.708.248.908)	43,27
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.773.672.048	2.065.423.140,00	(2.708.248.908)	43,27
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.4	BELANJA TRANSFER	841.617.613.430	775.144.201.015,00	(66.473.412.415)	92,10
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.4.01	Belanja Bagi Hasil	812.172.113.430	748.291.201.015,00	(63.880.912.415)	92,13
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	29.445.500.000	26.853.000.000,00	(2.592.500.000)	91,20
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000		Badan Pendapatan Daerah	108.768.933.389	102.689.630.031,20	(6.079.303.357)	94,41
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5	BELANJA DAERAH	108.768.933.389	102.689.630.031,20	(6.079.303.357)	94,41

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.1	BELANJA OPERASI	104.689.991.691	99.272.483.421,20	(5.417.508.269)	94,83
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	76.222.387.105	75.978.849.916,00	(243.537.189)	99,68
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.467.604.586	23.293.633.505,20	(5.173.971.080)	81,83
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.2	BELANJA MODAL	4.078.941.698	3.417.146.610,00	(661.795.088)	83,78
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.953.087.298	3.292.346.610,00	(660.740.688)	83,29
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	125.854.400	124.800.000,00	(1.054.400)	99,16
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0001		UPT PPD Batam Centre	3.786.262.530	3.143.115.497,00	(643.147.033)	83,01
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0001	5	BELANJA DAERAH	3.786.262.530	3.143.115.497,00	(643.147.033)	83,01
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.690.512.530	3.120.115.497,00	(570.397.033)	84,54
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.690.512.530	3.120.115.497,00	(570.397.033)	84,54
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0001	5.2	BELANJA MODAL	95.750.000	23.000.000,00	(72.750.000)	24,02
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	95.750.000	23.000.000,00	(72.750.000)	24,02
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0003		UPT PPD Bintan	1.628.754.821	1.470.954.766,00	(157.800.055)	90,31
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0003	5	BELANJA DAERAH	1.628.754.821	1.470.954.766,00	(157.800.055)	90,31
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.564.907.732	1.409.529.766,00	(155.377.966)	90,07
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.564.907.732	1.409.529.766,00	(155.377.966)	90,07
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0003	5.2	BELANJA MODAL	63.847.089	61.425.000,00	(2.422.089)	96,21
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	63.847.089	61.425.000,00	(2.422.089)	96,21
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0004		UPT PPD Karimun	1.513.037.545	1.417.553.013,00	(95.484.532)	93,69
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0004	5	BELANJA DAERAH	1.513.037.545	1.417.553.013,00	(95.484.532)	93,69
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.444.126.599	1.351.183.013,00	(92.943.586)	93,56
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.444.126.599	1.351.183.013,00	(92.943.586)	93,56
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0004	5.2	BELANJA MODAL	68.910.946	66.370.000,00	(2.540.946)	96,31
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.910.946	66.370.000,00	(2.540.946)	96,31
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0005		UPT PPD Lingga	958.629.448	940.189.896,00	(18.439.552)	98,08
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0005	5	BELANJA DAERAH	958.629.448	940.189.896,00	(18.439.552)	98,08
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0005	5.1	BELANJA OPERASI	940.028.746	921.589.896,00	(18.438.850)	98,04
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	940.028.746	921.589.896,00	(18.438.850)	98,04
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0005	5.2	BELANJA MODAL	18.600.702	18.600.000,00	(702)	100,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.600.702	18.600.000,00	(702)	100,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0002		UPT PPD Tanjungpinang	2.644.754.176	2.505.196.008,00	(139.558.168)	94,72
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0002	5	BELANJA DAERAH	2.644.754.176	2.505.196.008,00	(139.558.168)	94,72
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.587.698.844	2.458.831.008,00	(128.867.836)	95,02
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.587.698.844	2.458.831.008,00	(128.867.836)	95,02
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0002	5.2	BELANJA MODAL	57.055.332	46.365.000,00	(10.690.332)	81,26
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.055.332	46.365.000,00	(10.690.332)	81,26
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0006		UPT PPD Natuna	995.857.280	935.783.224,00	(60.074.056)	93,97
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0006	5	BELANJA DAERAH	995.857.280	935.783.224,00	(60.074.056)	93,97
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0006	5.1	BELANJA OPERASI	995.857.280	935.783.224,00	(60.074.056)	93,97
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	995.857.280	935.783.224,00	(60.074.056)	93,97
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0007		UPT PPD Anambas	662.688.059	621.110.134,00	(41.577.925)	93,73
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0007	5	BELANJA DAERAH	662.688.059	621.110.134,00	(41.577.925)	93,73
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0007	5.1	BELANJA OPERASI	625.649.745	587.324.634,00	(38.325.111)	93,87
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	625.649.745	587.324.634,00	(38.325.111)	93,87

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0007	5.2	BELANJA MODAL	37.038.314	33.785.500,00	(3.252.814)	91,22
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.038.314	33.785.500,00	(3.252.814)	91,22
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0008		UPT PPD Batu Aji	1.262.176.745	1.092.170.417,00	(170.006.328)	86,53
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0008	5	BELANJA DAERAH	1.262.176.745	1.092.170.417,00	(170.006.328)	86,53
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0008	5.1	BELANJA OPERASI	1.245.725.645	1.076.470.417,00	(169.255.228)	86,41
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.245.725.645	1.076.470.417,00	(169.255.228)	86,41
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0008	5.2	BELANJA MODAL	16.451.100	15.700.000,00	(751.100)	95,43
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0008	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.451.100	15.700.000,00	(751.100)	95,43
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0009		UPT PPD Kijang	647.703.948	568.374.069,00	(79.329.879)	87,75
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0009	5	BELANJA DAERAH	647.703.948	568.374.069,00	(79.329.879)	87,75
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0009	5.1	BELANJA OPERASI	612.268.748	534.324.069,00	(77.944.679)	87,27
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	612.268.748	534.324.069,00	(77.944.679)	87,27
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0009	5.2	BELANJA MODAL	35.435.200	34.050.000,00	(1.385.200)	96,09
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0009	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.435.200	34.050.000,00	(1.385.200)	96,09
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0010		UPT PPD Tanjung Batu	578.055.194	546.109.835,00	(31.945.359)	94,47
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0010	5	BELANJA DAERAH	578.055.194	546.109.835,00	(31.945.359)	94,47
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0010	5.1	BELANJA OPERASI	573.455.194	541.509.835,00	(31.945.359)	94,43
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	573.455.194	541.509.835,00	(31.945.359)	94,43
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0010	5.2	BELANJA MODAL	4.600.000	4.600.000,00	0	100,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.600.000	4.600.000,00	0	100,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0002		UPT Pemberdayaan dan Pemanfaatan Aset	2.221.372.130	2.128.530.596,00	(92.841.534)	95,82
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0002	5	BELANJA DAERAH	2.221.372.130	2.128.530.596,00	(92.841.534)	95,82
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.186.587.172	2.093.748.538,00	(92.838.634)	95,75
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.186.587.172	2.093.748.538,00	(92.838.634)	95,75
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0002	5.2	BELANJA MODAL	34.784.958	34.782.058,00	(2.900)	99,99
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.784.958	34.782.058,00	(2.900)	99,99
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0001		UPT Dana Bergulir	645.369.968	552.763.204,00	(92.606.764)	85,65
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0001	5	BELANJA DAERAH	645.369.968	552.763.204,00	(92.606.764)	85,65
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0001	5.1	BELANJA OPERASI	645.369.968	552.763.204,00	(92.606.764)	85,65
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	645.369.968	552.763.204,00	(92.606.764)	85,65
5.03			KEPEGAWAIAN	19.120.520.906	18.762.730.608,00	(357.790.298)	98,13
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000		Badan Kepegawaian dan Korpri	19.120.520.906	18.762.730.608,00	(357.790.298)	98,13
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5	BELANJA DAERAH	19.120.520.906	18.762.730.608,00	(357.790.298)	98,13
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.1	BELANJA OPERASI	19.050.938.906	18.695.051.608,00	(355.887.298)	98,13
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	15.886.323.945	15.556.560.291,00	(329.763.654)	97,92
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.164.614.961	3.138.491.317,00	(26.123.644)	99,17
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.2	BELANJA MODAL	69.582.000	67.679.000,00	(1.903.000)	97,27
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69.582.000	67.679.000,00	(1.903.000)	97,27
5.04			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	16.183.217.701	15.453.682.273,00	(729.535.428)	95,49
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	16.183.217.701	15.453.682.273,00	(729.535.428)	95,49
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5	BELANJA DAERAH	16.183.217.701	15.453.682.273,00	(729.535.428)	95,49
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.1	BELANJA OPERASI	15.822.250.732	15.110.352.273,00	(711.898.459)	95,50

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	11.030.740.449	10.808.777.703,00	(221.962.746)	97,99
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.791.510.283	4.301.574.570,00	(489.935.713)	89,77
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.2	BELANJA MODAL	360.966.969	343.330.000,00	(17.636.969)	95,11
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	360.966.969	343.330.000,00	(17.636.969)	95,11
5.05			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	743.490.996	742.584.939,00	(906.057)	99,88
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	743.490.996	742.584.939,00	(906.057)	99,88
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000	5	BELANJA DAERAH	743.490.996	742.584.939,00	(906.057)	99,88
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.1	BELANJA OPERASI	743.490.996	742.584.939,00	(906.057)	99,88
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	743.490.996	742.584.939,00	(906.057)	99,88
5.06			PENGELOLAAN PERBATASAN	7.537.067.752	6.876.027.694,00	(661.040.058)	91,23
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000		Badan Pengelola Perbatasan Daerah	7.537.067.752	6.876.027.694,00	(661.040.058)	91,23
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5	BELANJA DAERAH	7.537.067.752	6.876.027.694,00	(661.040.058)	91,23
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.1	BELANJA OPERASI	7.537.067.752	6.876.027.694,00	(661.040.058)	91,23
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	5.999.433.243	5.348.677.461,00	(650.755.782)	89,15
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.537.634.508	1.527.350.233,00	(10.284.275)	99,33
5.07			PENGELOLAAN PENGHUBUNG	18.404.249.696	17.501.504.858,00	(902.744.838)	95,09
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000		Badan Penghubung Daerah	18.404.249.696	17.501.504.858,00	(902.744.838)	95,09
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	18.404.249.696	17.501.504.858,00	(902.744.838)	95,09
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	15.804.383.544	15.009.246.858,00	(795.136.686)	94,97
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.754.634.768	3.647.428.136,00	(107.206.632)	97,14
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.049.748.776	11.361.818.722,00	(687.930.054)	94,29
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	2.599.866.152	2.492.258.000,00	(107.608.152)	95,86
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.599.866.152	2.492.258.000,00	(107.608.152)	95,86
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	46.909.639.743	45.517.169.676,00	(1.392.470.067)	97,03
6.01			INSPEKTORAT DAERAH	46.909.639.743	45.517.169.676,00	(1.392.470.067)	97,03
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000		Inspektorat	46.909.639.743	45.517.169.676,00	(1.392.470.067)	97,03
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	5	BELANJA DAERAH	46.909.639.743	45.517.169.676,00	(1.392.470.067)	97,03
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	5.1	BELANJA OPERASI	45.287.040.043	43.903.195.476,00	(1.383.844.567)	96,94
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	28.490.843.519	28.399.622.618,00	(91.220.901)	99,68
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.796.196.524	15.503.572.858,00	(1.292.623.666)	92,30
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.622.599.700	1.613.974.200,00	(8.625.500)	99,47
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.622.599.700	1.613.974.200,00	(8.625.500)	99,47
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	185.593.956.247	180.159.124.503,00	(5.434.831.744)	97,07
8.01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	185.593.956.247	180.159.124.503,00	(5.434.831.744)	97,07
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	185.593.956.247	180.159.124.503,00	(5.434.831.744)	97,07
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	185.593.956.247	180.159.124.503,00	(5.434.831.744)	97,07
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	184.707.226.247	179.914.495.503,00	(4.792.730.744)	97,41
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	8.760.829.742	8.405.166.832,00	(355.662.910)	95,94
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.010.746.473	14.073.235.685,00	(937.510.788)	93,75

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	160.935.650.032	157.436.092.986,00	(3.499.557.046)	97,83
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	886.730.000	244.629.000,00	(642.101.000)	27,59
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	886.730.000	244.629.000,00	(642.101.000)	27,59
			Jumlah	(139.161.570.978)	(113.452.096.562,61)	25.709.474.415	81,53

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

dto

ANSAR AHMAD



PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	4.275.037.233.807,00	3.958.295.361.262,68	92,59	4.170.044.095.409,31
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.020.676.416.916,00	1.980.461.763.464,68	98,01	1.806.972.833.505,31
4.1.01	Pajak Daerah	1.738.323.174.655,00	1.777.704.385.140,00	102,27	1.631.489.164.580,00
4.1.02	Retribusi Daerah	155.935.540.754,00	148.286.242.017,30	95,09	12.203.621.186,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	34.003.224.423,00	1.904.909.335,00	5,60	2.449.330.649,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	92.414.477.084,00	52.566.226.972,38	56,88	160.830.717.090,31
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.020.676.416.916,00	1.980.461.763.464,68	98,01	1.806.972.833.505,31
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.250.268.116.891,00	1.976.533.066.207,00	87,84	2.361.792.541.904,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.250.268.116.891,00	1.976.533.066.207,00	87,84	2.361.792.541.904,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	2.250.268.116.891,00	1.976.533.066.207,00	87,84	2.361.792.541.904,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.092.700.000,00	1.300.531.591,00	31,78	1.278.720.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	4.092.700.000,00	1.300.531.591,00	31,78	1.278.720.000,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.092.700.000,00	1.300.531.591,00	31,78	1.278.720.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	4.275.037.233.807,00	3.958.295.361.262,68	92,59	4.170.044.095.409,31
5	BELANJA DAERAH	4.414.198.804.785,00	4.071.747.457.825,29	92,24	4.276.981.449.459,56
5.1	BELANJA OPERASI	3.222.810.004.132,90	2.987.193.758.080,43	92,69	2.888.146.534.690,97
5.1.01	Belanja Pegawai	1.329.553.415.809,12	1.309.833.869.704,00	98,52	1.100.521.283.967,05
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.502.668.209.237,78	1.311.138.772.714,16	87,25	1.405.114.292.589,86
5.1.03	Belanja Bunga	4.050.000.000,00	3.692.560.273,00	91,17	8.623.436.793,00
5.1.04	Belanja Subsidi	1.400.000.000,00	944.301.180,00	67,45	4.143.883.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	380.037.014.086,00	357.581.329.209,27	94,09	362.326.208.341,06
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.101.365.000,00	4.002.925.000,00	78,47	7.417.430.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	3.222.810.004.132,90	2.987.193.758.080,43	92,69	2.888.146.534.690,97
5.2	BELANJA MODAL	344.997.515.174,10	307.344.075.589,86	89,09	618.877.436.638,59
5.2.01	Belanja Modal Tanah	8.021.100.000,00	920.100.000,00	11,47	1.388.489.184,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	130.089.417.367,93	115.508.155.838,84	88,79	202.847.528.770,05
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	138.014.437.494,17	129.103.961.833,55	93,54	232.962.878.105,59
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	43.766.559.842,00	36.791.762.576,47	84,06	178.551.126.080,95
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	19.529.407.470,00	19.630.419.447,00	100,52	529.474.380,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	5.576.593.000,00	5.389.675.894,00	96,65	2.597.940.118,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	344.997.515.174,10	307.344.075.589,86	89,09	618.877.436.638,59
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.773.672.048,00	2.065.423.140,00	43,27	2.413.029.129,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.773.672.048,00	2.065.423.140,00	43,27	2.413.029.129,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	4.773.672.048,00	2.065.423.140,00	43,27	2.413.029.129,00
5.4	BELANJA TRANSFER	841.617.613.430,00	775.144.201.015,00	92,10	767.544.449.001,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	812.172.113.430,00	748.291.201.015,00	92,13	759.191.867.087,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	29.445.500.000,00	26.853.000.000,00	91,20	8.352.581.914,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	841.617.613.430,00	775.144.201.015,00	92,10	767.544.449.001,00
	JUMLAH BELANJA	4.414.198.804.785,00	4.071.747.457.825,29	92,24	4.276.981.449.459,56
	SURPLUS/DEFISIT	(139.161.570.978,00)	(113.452.096.562,61)	81,53	(106.937.354.050,25)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	139.161.570.978,00	140.738.261.000,62	101,13	338.152.069.063,49
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	231.214.715.013,00	232.684.048.633,62	100,64	404.418.715.081,49
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	231.214.715.013,00	232.583.164.925,62	100,59	388.950.302.882,49
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	15.431.239.382,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	100.883.708,00	0,00	37.172.817,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	231.214.715.013,00	232.684.048.633,62	100,64	404.418.715.081,49

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	92.053.144.035,00	91.945.787.633,00	99,88	66.266.646.018,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	92.053.144.035,00	91.945.787.633,00	99,88	66.266.646.018,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	92.053.144.035,00	91.945.787.633,00	99,88	66.266.646.018,00
	PEMBIAYAAN NETTO	139.161.570.978,00	140.738.261.000,62	101,13	338.152.069.063,49
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	27.286.164.438,01	0,00	231.214.715.013,24

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

dto

ANSAR AHMAD



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Organisasi : Dinas Pendidikan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.01.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	12.646.188.051,00	21.551.608.787,35	8.905.420.736,35	170,41	
	1.01.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12.646.188.051,00	21.551.608.787,35	8.905.420.736,35	170,41	
	1.01.0.00.0.00.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	12.646.188.051,00	21.551.608.787,35	8.905.420.736,35	170,41	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	1.076.236.158.458,00	1.049.194.472.692,20	(27.041.685.765,80)	97,48	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	377.526.999.967,33	360.144.936.667,81	(17.382.063.299,52)	95,39	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	219.216.229.867,33	212.116.473.652,77	(7.099.756.214,56)	96,76	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0003		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.382.435.600,00	2.333.090.440,00	(49.345.160,00)	97,92	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	147.435.600,00	143.147.541,00	(4.288.059,00)	97,09	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.435.600,00	143.147.541,00	(4.288.059,00)	97,09	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	2.235.000.000,00	2.189.942.899,00	(45.057.101,00)	97,98	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0003	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.235.000.000,00	2.189.942.899,00	(45.057.101,00)	97,98	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0010		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	947.541.200,00	932.881.949,00	(14.659.251,00)	98,45	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	101.541.200,00	91.693.210,00	(9.847.990,00)	90,30	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.541.200,00	91.693.210,00	(9.847.990,00)	90,30	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0010	5.2	BELANJA MODAL	846.000.000,00	841.188.739,00	(4.811.261,00)	99,43	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0010	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	846.000.000,00	841.188.739,00	(4.811.261,00)	99,43	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0011		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.022.791.800,00	1.008.712.407,00	(14.079.393,00)	98,62	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	60.701.800,00	58.738.901,00	(1.962.899,00)	96,76	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.701.800,00	58.738.901,00	(1.962.899,00)	96,76	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0011	5.2	BELANJA MODAL	962.090.000,00	949.973.506,00	(12.116.494,00)	98,74	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0011	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	962.090.000,00	949.973.506,00	(12.116.494,00)	98,74	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0012		Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	7.797.300.000,00	7.467.464.513,77	(329.835.486,23)	95,76	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	197.050.000,00	181.521.075,00	(15.528.925,00)	92,11	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	197.050.000,00	181.521.075,00	(15.528.925,00)	92,11	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0012	5.2	BELANJA MODAL	7.600.250.000,00	7.285.943.438,77	(314.306.561,23)	95,86	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0012	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.600.250.000,00	7.285.943.438,77	(314.306.561,23)	95,86	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0014		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	13.959.628.513,05	13.212.510.997,00	(747.117.516,05)	94,64	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	1.770.015.880,04	1.645.268.651,00	(124.747.229,04)	92,95	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.770.015.880,04	1.645.268.651,00	(124.747.229,04)	92,95	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0014	5.2	BELANJA MODAL	12.189.612.633,01	11.567.242.346,00	(622.370.287,01)	94,89	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0014	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	825.200.000,00	811.712.900,00	(13.487.100,00)	98,36	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0014	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11.216.812.633,01	10.608.040.426,00	(608.772.207,01)	94,57	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0014	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	147.600.000,00	147.489.020,00	(110.980,00)	99,92	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0019		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	14.211.545.800,00	13.977.087.479,00	(234.458.321,00)	98,35	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0019	5.1	BELANJA OPERASI	519.284.300,00	498.999.479,00	(20.284.821,00)	96,09	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0019	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	519.284.300,00	498.999.479,00	(20.284.821,00)	96,09	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0019	5.2	BELANJA MODAL	13.692.261.500,00	13.478.088.000,00	(214.173.500,00)	98,43	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0019	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13.692.261.500,00	13.478.088.000,00	(214.173.500,00)	98,43	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0020		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.558.818.600,00	2.521.364.311,00	(37.454.289,00)	98,53	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0020	5.1	BELANJA OPERASI	258.832.600,00	244.691.702,00	(14.140.898,00)	94,53	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	258.832.600,00	244.691.702,00	(14.140.898,00)	94,53	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0020	5.2	BELANJA MODAL	2.299.986.000,00	2.276.672.609,00	(23.313.391,00)	98,98	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0020	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.299.986.000,00	2.276.672.609,00	(23.313.391,00)	98,98	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0027		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	150.656.000,00	141.204.463,00	(9.451.537,00)	93,72	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0027	5.1	BELANJA OPERASI	48.656.000,00	39.783.220,00	(8.872.780,00)	81,76	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0027	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.656.000,00	39.783.220,00	(8.872.780,00)	81,76	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0027	5.2	BELANJA MODAL	102.000.000,00	101.421.243,00	(578.757,00)	99,43	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0027	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	102.000.000,00	101.421.243,00	(578.757,00)	99,43	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0028		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	1.336.422.600,00	1.317.752.460,00	(18.670.140,00)	98,60	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0028	5.1	BELANJA OPERASI	163.302.600,00	154.291.151,00	(9.011.449,00)	94,48	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.302.600,00	154.291.151,00	(9.011.449,00)	94,48	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0028	5.2	BELANJA MODAL	1.173.120.000,00	1.163.461.309,00	(9.658.691,00)	99,17	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0028	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.173.120.000,00	1.163.461.309,00	(9.658.691,00)	99,17	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0036		Pengadaan Mebel Sekolah	9.473.559.360,00	9.447.070.330,00	(26.489.030,00)	99,72	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0036	5.1	BELANJA OPERASI	93.798.160,00	92.679.360,00	(1.118.800,00)	98,80	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0036	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.798.160,00	92.679.360,00	(1.118.800,00)	98,80	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0036	5.2	BELANJA MODAL	9.379.761.200,00	9.354.390.970,00	(25.370.230,00)	99,72	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0036	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.379.761.200,00	9.354.390.970,00	(25.370.230,00)	99,72	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0038		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.552.380.000,00	1.550.440.000,00	(1.940.000,00)	99,87	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0038	5.1	BELANJA OPERASI	780.000,00	0,00	(780.000,00)	0,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0038	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	780.000,00	0,00	(780.000,00)	0,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0038	5.2	BELANJA MODAL	1.551.600.000,00	1.550.440.000,00	(1.160.000,00)	99,92	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0038	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	251.600.000,00	250.500.000,00	(1.100.000,00)	99,56	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0038	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.300.000.000,00	1.299.940.000,00	(60.000,00)	99,99	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0039		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	10.092.582.539,00	8.823.417.585,00	(1.269.164.954,00)	87,42	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0039	5.1	BELANJA OPERASI	10.092.582.539,00	8.823.417.585,00	(1.269.164.954,00)	87,42	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0039	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.092.582.539,00	8.823.417.585,00	(1.269.164.954,00)	87,42	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0041		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	3.362.969.974,00	3.341.294.298,00	(21.675.676,00)	99,35	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0041	5.1	BELANJA OPERASI	173.019.974,00	151.624.298,00	(21.395.676,00)	87,63	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	173.019.974,00	151.624.298,00	(21.395.676,00)	87,63	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0041	5.2	BELANJA MODAL	3.189.950.000,00	3.189.670.000,00	(280.000,00)	99,99	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0041	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.189.950.000,00	3.189.670.000,00	(280.000,00)	99,99	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0045		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	17.594.244.940,00	16.546.216.225,00	(1.048.028.715,00)	94,04	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0045	5.1	BELANJA OPERASI	17.594.244.940,00	16.546.216.225,00	(1.048.028.715,00)	94,04	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0045	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.594.244.940,00	16.546.216.225,00	(1.048.028.715,00)	94,04	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0049		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	695.432.726,28	667.608.384,00	(27.824.342,28)	95,99	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0049	5.1	BELANJA OPERASI	695.432.726,28	667.608.384,00	(27.824.342,28)	95,99	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0049	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	695.432.726,28	667.608.384,00	(27.824.342,28)	95,99	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0050		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.580.331.600,00	1.339.929.000,00	(240.402.600,00)	84,78	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0050	5.1	BELANJA OPERASI	1.580.331.600,00	1.339.929.000,00	(240.402.600,00)	84,78	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0050	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.331.600,00	58.209.000,00	(10.122.600,00)	85,18	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0050	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.512.000.000,00	1.281.720.000,00	(230.280.000,00)	84,76	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0051		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	524.526.000,00	106.214.800,00	(418.311.200,00)	20,24	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0051	5.1	BELANJA OPERASI	524.526.000,00	106.214.800,00	(418.311.200,00)	20,24	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0051	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	524.526.000,00	106.214.800,00	(418.311.200,00)	20,24	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0052		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	212.091.480,00	140.047.610,00	(72.043.870,00)	66,03	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0052	5.1	BELANJA OPERASI	212.091.480,00	140.047.610,00	(72.043.870,00)	66,03	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0052	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	212.091.480,00	140.047.610,00	(72.043.870,00)	66,03	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0053		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	109.224.680.000,00	107.151.065.962,00	(2.073.614.038,00)	98,10	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0053	5.1	BELANJA OPERASI	78.821.973.387,00	77.487.478.338,00	(1.334.495.049,00)	98,30	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0053	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.811.463.387,00	63.830.760.112,00	(980.703.275,00)	98,48	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0053	5.1.05	Belanja Hibah	14.010.510.000,00	13.656.718.226,00	(353.791.774,00)	97,47	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0053	5.2	BELANJA MODAL	30.402.706.613,00	29.663.587.624,00	(739.118.989,00)	97,56	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0053	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.398.659.073,00	16.657.847.382,00	(1.740.811.691,00)	90,53	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0053	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.004.047.540,00	13.005.740.242,00	1.001.692.702,00	108,34	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0060		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	75.602.000,00	62.306.000,00	(13.296.000,00)	82,41	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0060	5.1	BELANJA OPERASI	75.602.000,00	62.306.000,00	(13.296.000,00)	82,41	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0060	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.602.000,00	62.306.000,00	(13.296.000,00)	82,41	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0067		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	287.501.000,00	285.827.314,00	(1.673.686,00)	99,41	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0067	5.1	BELANJA OPERASI	47.501.000,00	47.145.720,00	(355.280,00)	99,25	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0067	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.501.000,00	47.145.720,00	(355.280,00)	99,25	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0067	5.2	BELANJA MODAL	240.000.000,00	238.681.594,00	(1.318.406,00)	99,45	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0067	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	240.000.000,00	238.681.594,00	(1.318.406,00)	99,45	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0068		Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.397.415.680,00	1.377.992.331,00	(19.423.349,00)	98,61	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0068	5.1	BELANJA OPERASI	169.197.080,00	164.766.603,00	(4.430.477,00)	97,38	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0068	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.197.080,00	164.766.603,00	(4.430.477,00)	97,38	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0068	5.2	BELANJA MODAL	1.228.218.600,00	1.213.225.728,00	(14.992.872,00)	98,77	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0068	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.228.218.600,00	1.213.225.728,00	(14.992.872,00)	98,77	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0070		Pembangunan Ruang Laboratorium	8.243.372.600,00	8.105.204.330,00	(138.168.270,00)	98,32	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0070	5.1	BELANJA OPERASI	461.735.600,00	431.337.194,00	(30.398.406,00)	93,41	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0070	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	461.735.600,00	431.337.194,00	(30.398.406,00)	93,41	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0070	5.2	BELANJA MODAL	7.781.637.000,00	7.673.867.136,00	(107.769.864,00)	98,61	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0070	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.781.637.000,00	7.673.867.136,00	(107.769.864,00)	98,61	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0071		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	4.604.345.965,00	4.537.109.803,00	(67.236.162,00)	98,53	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0071	5.1	BELANJA OPERASI	428.331.011,00	402.237.222,00	(26.093.789,00)	93,90	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0071	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	428.331.011,00	402.237.222,00	(26.093.789,00)	93,90	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0071	5.2	BELANJA MODAL	4.176.014.954,00	4.134.872.581,00	(41.142.373,00)	99,01	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0071	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.176.014.954,00	4.134.872.581,00	(41.142.373,00)	99,01	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0072		Pembangunan Ruang Kelas Baru	5.628.231.890,00	5.499.312.297,00	(128.919.593,00)	97,70	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0072	5.1	BELANJA OPERASI	639.619.370,00	589.884.446,00	(49.734.924,00)	92,22	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0072	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	639.619.370,00	589.884.446,00	(49.734.924,00)	92,22	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0072	5.2	BELANJA MODAL	4.988.612.520,00	4.909.427.851,00	(79.184.669,00)	98,41	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0072	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.988.612.520,00	4.909.427.851,00	(79.184.669,00)	98,41	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0073		Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	138.500.000,00	137.708.364,00	(791.636,00)	99,42	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0073	5.1	BELANJA OPERASI	13.500.000,00	13.484.280,00	(15.720,00)	99,88	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0073	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	13.484.280,00	(15.720,00)	99,88	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0073	5.2	BELANJA MODAL	125.000.000,00	124.224.084,00	(775.916,00)	99,37	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0073	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	125.000.000,00	124.224.084,00	(775.916,00)	99,37	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0078		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	161.322.000,00	85.640.000,00	(75.682.000,00)	53,08	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0078	5.1	BELANJA OPERASI	161.322.000,00	85.640.000,00	(75.682.000,00)	53,08	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0078	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.322.000,00	85.640.000,00	(75.682.000,00)	53,08	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	143.731.404.700,00	135.578.222.050,45	(8.153.182.649,55)	94,32	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0004		Pembangunan Ruang Praktik Siswa	7.931.686.317,00	7.539.037.699,33	(392.648.617,67)	95,04	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	474.692.300,00	410.990.470,00	(63.701.830,00)	86,58	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	474.692.300,00	410.990.470,00	(63.701.830,00)	86,58	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0004	5.2	BELANJA MODAL	7.456.994.017,00	7.128.047.229,33	(328.946.787,67)	95,58	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0004	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.456.994.017,00	7.128.047.229,33	(328.946.787,67)	95,58	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0005		Pembangunan Ruang Laboratorium	4.867.412.000,00	4.786.130.875,12	(81.281.124,88)	98,33	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	412.412.000,00	399.270.436,00	(13.141.564,00)	96,81	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	412.412.000,00	399.270.436,00	(13.141.564,00)	96,81	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0005	5.2	BELANJA MODAL	4.455.000.000,00	4.386.860.439,12	(68.139.560,88)	98,47	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0005	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.455.000.000,00	4.386.860.439,12	(68.139.560,88)	98,47	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0006		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	167.500.000,00	164.065.850,00	(3.434.150,00)	97,94	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	22.500.000,00	22.192.230,00	(307.770,00)	98,63	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	22.192.230,00	(307.770,00)	98,63	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0006	5.2	BELANJA MODAL	145.000.000,00	141.873.620,00	(3.126.380,00)	97,84	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0006	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	145.000.000,00	141.873.620,00	(3.126.380,00)	97,84	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0010		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.917.559.533,00	5.207.100.943,35	(710.458.589,65)	87,99	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	602.936.909,00	535.916.813,35	(67.020.095,65)	88,88	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	602.936.909,00	535.916.813,35	(67.020.095,65)	88,88	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0010	5.2	BELANJA MODAL	5.314.622.624,00	4.671.184.130,00	(643.438.494,00)	87,89	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	415.784.540,00	415.784.540,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0010	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.898.838.084,00	4.255.399.590,00	(643.438.494,00)	86,86	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0016		Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	668.426.170,00	606.908.796,50	(61.517.373,50)	90,79	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	124.708.583,00	104.534.256,50	(20.174.326,50)	83,82	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.708.583,00	104.534.256,50	(20.174.326,50)	83,82	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0016	5.2	BELANJA MODAL	543.717.587,00	502.374.540,00	(41.343.047,00)	92,39	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0016	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	543.717.587,00	502.374.540,00	(41.343.047,00)	92,39	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0018		Rehabilitasi Ruang Laboratorium	1.849.350.900,00	1.644.631.755,00	(204.719.145,00)	88,93	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0018	5.1	BELANJA OPERASI	219.350.900,00	196.278.975,00	(23.071.925,00)	89,48	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	219.350.900,00	196.278.975,00	(23.071.925,00)	89,48	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0018	5.2	BELANJA MODAL	1.630.000.000,00	1.448.352.780,00	(181.647.220,00)	88,85	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0018	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.630.000.000,00	1.448.352.780,00	(181.647.220,00)	88,85	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0028		Pengadaan Mebel Sekolah	2.723.349.988,00	2.691.957.960,00	(31.392.028,00)	98,84	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0028	5.1	BELANJA OPERASI	67.197.140,00	52.333.500,00	(14.863.640,00)	77,88	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.197.140,00	52.333.500,00	(14.863.640,00)	77,88	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0028	5.2	BELANJA MODAL	2.656.152.848,00	2.639.624.460,00	(16.528.388,00)	99,37	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0028	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.656.152.848,00	2.639.624.460,00	(16.528.388,00)	99,37	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0031		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	6.466.334.400,00	4.879.249.500,00	(1.587.084.900,00)	75,45	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0031	5.1	BELANJA OPERASI	6.466.334.400,00	4.879.249.500,00	(1.587.084.900,00)	75,45	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0031	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.466.334.400,00	4.879.249.500,00	(1.587.084.900,00)	75,45	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0033		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	14.259.336.000,00	13.522.533.462,00	(736.802.538,00)	94,83	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	219.258.658,00	120.980.135,00	(98.278.523,00)	55,17	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	219.258.658,00	120.980.135,00	(98.278.523,00)	55,17	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0033	5.2	BELANJA MODAL	14.040.077.342,00	13.401.553.327,00	(638.524.015,00)	95,45	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0033	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.996.092.112,00	13.401.553.327,00	(594.538.785,00)	95,75	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0033	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	43.985.230,00	0,00	(43.985.230,00)	0,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0037		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	7.782.760.370,00	5.791.174.447,00	(1.991.585.923,00)	74,41	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0037	5.1	BELANJA OPERASI	7.782.760.370,00	5.791.174.447,00	(1.991.585.923,00)	74,41	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0037	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.782.760.370,00	5.791.174.447,00	(1.991.585.923,00)	74,41	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0041		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	410.137.909,00	341.700.891,00	(68.437.018,00)	83,31	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0041	5.1	BELANJA OPERASI	410.137.909,00	341.700.891,00	(68.437.018,00)	83,31	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	410.137.909,00	341.700.891,00	(68.437.018,00)	83,31	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0042		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.965.942.240,00	1.323.743.000,00	(642.199.240,00)	67,33	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0042	5.1	BELANJA OPERASI	1.965.942.240,00	1.323.743.000,00	(642.199.240,00)	67,33	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0042	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.942.240,00	36.863.000,00	(9.079.240,00)	80,23	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0042	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.920.000.000,00	1.286.880.000,00	(633.120.000,00)	67,02	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0043		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	792.323.634,00	291.336.798,00	(500.986.836,00)	36,76	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0043	5.1	BELANJA OPERASI	792.323.634,00	291.336.798,00	(500.986.836,00)	36,76	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0043	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	592.323.634,00	91.336.798,00	(500.986.836,00)	15,42	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0043	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0045		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	234.696.560,00	206.292.550,00	(28.404.010,00)	87,89	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0045	5.1	BELANJA OPERASI	234.696.560,00	206.292.550,00	(28.404.010,00)	87,89	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0045	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	234.696.560,00	206.292.550,00	(28.404.010,00)	87,89	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0046		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	76.947.020.000,00	77.748.685.107,00	801.665.107,00	101,04	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	55.783.085.322,00	59.031.899.369,00	3.248.814.047,00	105,82	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.334.185.322,00	39.757.895.069,00	3.423.709.747,00	109,42	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0046	5.1.05	Belanja Hibah	19.448.900.000,00	19.274.004.300,00	(174.895.700,00)	99,10	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0046	5.2	BELANJA MODAL	21.163.934.678,00	18.716.785.738,00	(2.447.148.940,00)	88,43	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0046	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.843.804.778,00	13.811.960.033,00	(2.031.844.745,00)	87,17	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0046	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.320.129.900,00	4.904.825.705,00	(415.304.195,00)	92,19	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0053		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	66.730.600,00	66.463.400,00	(267.200,00)	99,59	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0053	5.1	BELANJA OPERASI	66.730.600,00	66.463.400,00	(267.200,00)	99,59	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0053	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.730.600,00	66.463.400,00	(267.200,00)	99,59	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0062		Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	508.350.000,00	485.598.325,65	(22.751.674,35)	95,52	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0062	5.1	BELANJA OPERASI	508.350.000,00	485.598.325,65	(22.751.674,35)	95,52	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0062	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	508.350.000,00	485.598.325,65	(22.751.674,35)	95,52	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0064		Pembangunan Ruang Kelas Baru	7.541.423.879,00	5.775.289.686,50	(1.766.134.192,50)	76,58	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0064	5.1	BELANJA OPERASI	616.509.935,00	417.210.723,50	(199.299.211,50)	67,67	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0064	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	616.509.935,00	417.210.723,50	(199.299.211,50)	67,67	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0064	5.2	BELANJA MODAL	6.924.913.944,00	5.358.078.963,00	(1.566.834.981,00)	77,37	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0064	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.924.913.944,00	5.358.078.963,00	(1.566.834.981,00)	77,37	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0069		Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	2.469.350.000,00	2.436.126.404,00	(33.223.596,00)	98,65	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0069	5.1	BELANJA OPERASI	277.273.800,00	273.101.854,00	(4.171.946,00)	98,49	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0069	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	277.273.800,00	273.101.854,00	(4.171.946,00)	98,49	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0069	5.2	BELANJA MODAL	2.192.076.200,00	2.163.024.550,00	(29.051.650,00)	98,67	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0069	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.192.076.200,00	2.163.024.550,00	(29.051.650,00)	98,67	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0072		Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	161.714.200,00	70.194.600,00	(91.519.600,00)	43,40	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0072	5.1	BELANJA OPERASI	161.714.200,00	70.194.600,00	(91.519.600,00)	43,40	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0072	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.714.200,00	70.194.600,00	(91.519.600,00)	43,40	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	14.579.365.400,00	12.450.240.964,59	(2.129.124.435,41)	85,39	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0003		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	283.933.000,00	278.753.466,80	(5.179.533,20)	98,17	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	283.933.000,00	278.753.466,80	(5.179.533,20)	98,17	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.785.000,00	16.132.650,00	(2.652.350,00)	85,88	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0003	5.1.05	Belanja Hibah	265.148.000,00	262.620.816,80	(2.527.183,20)	99,04	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0004		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	174.099.400,00	171.561.675,00	(2.537.725,00)	98,54	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	174.099.400,00	171.561.675,00	(2.537.725,00)	98,54	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	13.144.650,00	(855.350,00)	93,89	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0004	5.1.05	Belanja Hibah	160.099.400,00	158.417.025,00	(1.682.375,00)	98,94	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0005		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	285.880.000,00	284.582.910,00	(1.297.090,00)	99,54	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	285.880.000,00	284.582.910,00	(1.297.090,00)	99,54	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.900.000,00	11.761.350,00	(138.650,00)	98,83	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0005	5.1.05	Belanja Hibah	273.980.000,00	272.821.560,00	(1.158.440,00)	99,57	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0008		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	825.229.750,00	646.044.589,29	(179.185.160,71)	78,28	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0008	5.1	BELANJA OPERASI	679.975.750,00	646.044.589,29	(33.931.160,71)	95,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.495.750,00	66.203.524,00	(31.292.226,00)	67,90	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0008	5.1.05	Belanja Hibah	582.480.000,00	579.841.065,29	(2.638.934,71)	99,54	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0008	5.2	BELANJA MODAL	145.254.000,00	0,00	(145.254.000,00)	0,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0008	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	145.254.000,00	0,00	(145.254.000,00)	0,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0010		Pembangunan Kantin Sekolah	367.699.850,00	363.516.433,00	(4.183.417,00)	98,86	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0010	5.1	BELANJA OPERASI	367.699.850,00	363.516.433,00	(4.183.417,00)	98,86	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.752.850,00	21.449.263,00	(2.303.587,00)	90,30	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0010	5.1.05	Belanja Hibah	343.947.000,00	342.067.170,00	(1.879.830,00)	99,45	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0035		Pengadaan Mebel Sekolah	170.000.000,00	167.595.000,00	(2.405.000,00)	98,58	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0035	5.1	BELANJA OPERASI	170.000.000,00	167.595.000,00	(2.405.000,00)	98,58	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0035	5.1.05	Belanja Hibah	170.000.000,00	167.595.000,00	(2.405.000,00)	98,58	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0038		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	677.000.000,00	132.781.665,00	(544.218.335,00)	19,61	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0038	5.1	BELANJA OPERASI	677.000.000,00	132.781.665,00	(544.218.335,00)	19,61	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0038	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	627.000.000,00	82.781.665,00	(544.218.335,00)	13,20	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0038	5.1.05	Belanja Hibah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0040		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	319.090.000,00	308.114.000,00	(10.976.000,00)	96,56	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0040	5.1	BELANJA OPERASI	249.090.000,00	238.486.500,00	(10.603.500,00)	95,74	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.969.000,00	18.646.000,00	(6.323.000,00)	74,67	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0040	5.1.05	Belanja Hibah	224.121.000,00	219.840.500,00	(4.280.500,00)	98,09	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0040	5.2	BELANJA MODAL	70.000.000,00	69.627.500,00	(372.500,00)	99,46	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0040	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.000.000,00	69.627.500,00	(372.500,00)	99,46	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0048		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	396.700.000,00	394.751.300,00	(1.948.700,00)	99,50	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0048	5.1	BELANJA OPERASI	396.700.000,00	394.751.300,00	(1.948.700,00)	99,50	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0048	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	396.700.000,00	394.751.300,00	(1.948.700,00)	99,50	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0049		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	257.479.000,00	235.852.000,00	(21.627.000,00)	91,60	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0049	5.1	BELANJA OPERASI	257.479.000,00	235.852.000,00	(21.627.000,00)	91,60	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0049	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.479.000,00	31.852.000,00	(9.627.000,00)	76,79	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0049	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	216.000.000,00	204.000.000,00	(12.000.000,00)	94,44	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0051		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	185.336.150,00	108.048.083,00	(77.288.067,00)	58,29	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0051	5.1	BELANJA OPERASI	185.336.150,00	108.048.083,00	(77.288.067,00)	58,29	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0051	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.336.150,00	108.048.083,00	(77.288.067,00)	58,29	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0052		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	9.398.200.000,00	8.156.542.019,00	(1.241.657.981,00)	86,78	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0052	5.1	BELANJA OPERASI	7.917.946.500,00	7.193.637.575,00	(724.308.925,00)	90,85	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0052	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.943.406.500,00	3.254.339.192,00	(689.067.308,00)	82,52	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0052	5.1.05	Belanja Hibah	3.974.540.000,00	3.939.298.383,00	(35.241.617,00)	99,11	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0052	5.2	BELANJA MODAL	1.480.253.500,00	962.904.444,00	(517.349.056,00)	65,04	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0052	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	985.308.700,00	901.790.944,00	(83.517.756,00)	91,52	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0052	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	494.944.800,00	61.113.500,00	(433.831.300,00)	12,34	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0059		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	49.761.600,00	38.422.900,00	(11.338.700,00)	77,21	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0059	5.1	BELANJA OPERASI	49.761.600,00	38.422.900,00	(11.338.700,00)	77,21	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0059	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.761.600,00	38.422.900,00	(11.338.700,00)	77,21	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0070		Pembangunan Ruang Kelas Baru	633.120.000,00	620.496.900,00	(12.623.100,00)	98,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0070	5.1	BELANJA OPERASI	19.640.000,00	16.058.400,00	(3.581.600,00)	81,76	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0070	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.640.000,00	16.058.400,00	(3.581.600,00)	81,76	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0070	5.2	BELANJA MODAL	613.480.000,00	604.438.500,00	(9.041.500,00)	98,52	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0070	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	613.480.000,00	604.438.500,00	(9.041.500,00)	98,52	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0071		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	80.426.650,00	70.864.559,00	(9.562.091,00)	88,11	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0071	5.1	BELANJA OPERASI	80.426.650,00	70.864.559,00	(9.562.091,00)	88,11	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0071	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.426.650,00	70.864.559,00	(9.562.091,00)	88,11	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0079		Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	475.410.000,00	472.313.464,50	(3.096.535,50)	99,34	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0079	5.1	BELANJA OPERASI	56.810.000,00	54.444.223,50	(2.365.776,50)	95,83	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0079	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.810.000,00	54.444.223,50	(2.365.776,50)	95,83	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0079	5.2	BELANJA MODAL	418.600.000,00	417.869.241,00	(730.759,00)	99,82	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0079	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	418.600.000,00	417.869.241,00	(730.759,00)	99,82	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	405.402.792,00	330.631.647,00	(74.771.145,00)	81,55	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.03.1.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	338.552.792,00	265.530.647,00	(73.022.145,00)	78,43	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.03.1.01.0004		Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	338.552.792,00	265.530.647,00	(73.022.145,00)	78,43	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.03.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	338.552.792,00	265.530.647,00	(73.022.145,00)	78,43	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.03.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	338.552.792,00	265.530.647,00	(73.022.145,00)	78,43	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.03.1.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	66.850.000,00	65.101.000,00	(1.749.000,00)	97,38	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.03.1.02.0004		Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	66.850.000,00	65.101.000,00	(1.749.000,00)	97,38	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.03.1.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	66.850.000,00	65.101.000,00	(1.749.000,00)	97,38	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.03.1.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.850.000,00	65.101.000,00	(1.749.000,00)	97,38	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.04		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	379.760.000,00	321.180.012,00	(58.579.988,00)	84,57	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.04.1.01		Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	379.760.000,00	321.180.012,00	(58.579.988,00)	84,57	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.04.1.01.0001		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	200.000.000,00	150.730.312,00	(49.269.688,00)	75,36	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.04.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	150.730.312,00	(49.269.688,00)	75,36	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.04.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	150.730.312,00	(49.269.688,00)	75,36	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.04.1.01.0002		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	179.760.000,00	170.449.700,00	(9.310.300,00)	94,82	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.04.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	179.760.000,00	170.449.700,00	(9.310.300,00)	94,82	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.04.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	179.760.000,00	170.449.700,00	(9.310.300,00)	94,82	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.05		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	63.630.400,00	61.758.400,00	(1.872.000,00)	97,05	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.05.1.01		Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	45.711.200,00	44.639.000,00	(1.072.200,00)	97,65	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.05.1.01.0001		Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	45.711.200,00	44.639.000,00	(1.072.200,00)	97,65	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.05.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	45.711.200,00	44.639.000,00	(1.072.200,00)	97,65	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.05.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.711.200,00	44.639.000,00	(1.072.200,00)	97,65	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.05.1.02		Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	17.919.200,00	17.119.400,00	(799.800,00)	95,53	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.05.1.02.0001		Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	17.919.200,00	17.119.400,00	(799.800,00)	95,53	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.05.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	17.919.200,00	17.119.400,00	(799.800,00)	95,53	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.05.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.919.200,00	17.119.400,00	(799.800,00)	95,53	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	697.860.365.298,67	688.335.965.965,39	(9.524.399.333,28)	98,63	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	970.016.113,00	748.872.347,00	(221.143.766,00)	77,20	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	554.198.213,00	419.518.097,00	(134.680.116,00)	75,69	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	554.198.213,00	419.518.097,00	(134.680.116,00)	75,69	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	554.198.213,00	419.518.097,00	(134.680.116,00)	75,69	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	155.708.000,00	144.242.000,00	(11.466.000,00)	92,63	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	155.708.000,00	144.242.000,00	(11.466.000,00)	92,63	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.708.000,00	44.242.000,00	(11.466.000,00)	79,41	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.01.0002	5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	49.976.000,00	19.611.250,00	(30.364.750,00)	39,24	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	49.976.000,00	19.611.250,00	(30.364.750,00)	39,24	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.976.000,00	19.611.250,00	(30.364.750,00)	39,24	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	210.133.900,00	165.501.000,00	(44.632.900,00)	78,75	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	210.133.900,00	165.501.000,00	(44.632.900,00)	78,75	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.133.900,00	165.501.000,00	(44.632.900,00)	78,75	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	566.697.494.003,02	561.719.428.666,00	(4.978.065.337,02)	99,12	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	562.020.207.403,02	558.002.381.166,00	(4.017.826.237,02)	99,28	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	562.020.207.403,02	558.002.381.166,00	(4.017.826.237,02)	99,28	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	562.020.207.403,02	558.002.381.166,00	(4.017.826.237,02)	99,28	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.514.568.000,00	3.578.678.000,00	(935.890.000,00)	79,26	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.514.568.000,00	3.578.678.000,00	(935.890.000,00)	79,26	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	4.514.568.000,00	3.578.678.000,00	(935.890.000,00)	79,26	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	137.030.600,00	133.489.500,00	(3.541.100,00)	97,41	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	137.030.600,00	133.489.500,00	(3.541.100,00)	97,41	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.030.600,00	133.489.500,00	(3.541.100,00)	97,41	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	25.688.000,00	4.880.000,00	(20.808.000,00)	18,99	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	25.688.000,00	4.880.000,00	(20.808.000,00)	18,99	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.688.000,00	4.880.000,00	(20.808.000,00)	18,99	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	56.737.820,00	56.135.000,00	(602.820,00)	98,93	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.03.0004		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	27.277.500,00	27.242.400,00	(35.100,00)	99,87	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	27.277.500,00	27.242.400,00	(35.100,00)	99,87	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.277.500,00	27.242.400,00	(35.100,00)	99,87	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	29.460.320,00	28.892.600,00	(567.720,00)	98,07	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	29.460.320,00	28.892.600,00	(567.720,00)	98,07	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.460.320,00	28.892.600,00	(567.720,00)	98,07	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.678.193.500,25	1.032.688.683,00	(645.504.817,25)	61,53	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	249.312.000,25	243.671.300,00	(5.640.700,25)	97,73	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	249.312.000,25	243.671.300,00	(5.640.700,25)	97,73	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.312.000,25	243.671.300,00	(5.640.700,25)	97,73	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.05.0005		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	987.434.400,00	697.838.126,00	(289.596.274,00)	70,67	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.05.0005	5.1	BELANJA OPERASI	987.434.400,00	697.838.126,00	(289.596.274,00)	70,67	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.05.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	987.434.400,00	697.838.126,00	(289.596.274,00)	70,67	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	11.097.600,00	3.372.907,00	(7.724.693,00)	30,39	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	11.097.600,00	3.372.907,00	(7.724.693,00)	30,39	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.097.600,00	3.372.907,00	(7.724.693,00)	30,39	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	430.349.500,00	87.806.350,00	(342.543.150,00)	20,40	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	430.349.500,00	87.806.350,00	(342.543.150,00)	20,40	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	430.349.500,00	87.806.350,00	(342.543.150,00)	20,40	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.941.369.610,00	1.615.991.411,00	(1.325.378.199,00)	54,94	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.895.920,00	18.777.600,00	(32.118.320,00)	36,89	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	50.895.920,00	18.777.600,00	(32.118.320,00)	36,89	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.895.920,00	18.777.600,00	(32.118.320,00)	36,89	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	239.949.969,00	8.932.500,00	(231.017.469,00)	3,72	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	131.409.107,00	8.932.500,00	(122.476.607,00)	6,79	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.409.107,00	8.932.500,00	(122.476.607,00)	6,79	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	108.540.862,00	0,00	(108.540.862,00)	0,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	108.540.862,00	0,00	(108.540.862,00)	0,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	75.590.300,00	73.589.100,00	(2.001.200,00)	97,35	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	74.910.300,00	72.909.100,00	(2.001.200,00)	97,32	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.910.300,00	72.909.100,00	(2.001.200,00)	97,32	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0003	5.2	BELANJA MODAL	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	382.231.398,00	220.059.769,00	(162.171.629,00)	57,57	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	382.231.398,00	220.059.769,00	(162.171.629,00)	57,57	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	382.231.398,00	220.059.769,00	(162.171.629,00)	57,57	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	228.301.900,00	191.768.000,00	(36.533.900,00)	83,99	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	228.301.900,00	191.768.000,00	(36.533.900,00)	83,99	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	228.301.900,00	191.768.000,00	(36.533.900,00)	83,99	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	43.920.000,00	29.740.000,00	(14.180.000,00)	67,71	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	43.920.000,00	29.740.000,00	(14.180.000,00)	67,71	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.920.000,00	29.740.000,00	(14.180.000,00)	67,71	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	116.793.400,00	85.832.000,00	(30.961.400,00)	73,49	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	116.793.400,00	85.832.000,00	(30.961.400,00)	73,49	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.793.400,00	85.832.000,00	(30.961.400,00)	73,49	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.699.320.103,00	900.468.792,00	(798.851.311,00)	52,98	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	1.699.320.103,00	900.468.792,00	(798.851.311,00)	52,98	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.699.320.103,00	900.468.792,00	(798.851.311,00)	52,98	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0010		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	104.366.620,00	86.823.650,00	(17.542.970,00)	83,19	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0010	5.1	BELANJA OPERASI	104.366.620,00	86.823.650,00	(17.542.970,00)	83,19	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.366.620,00	86.823.650,00	(17.542.970,00)	83,19	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.753.240.479,40	1.490.104.000,00	(263.136.479,40)	84,99	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	599.649.629,40	458.124.000,00	(141.525.629,40)	76,39	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	599.649.629,40	458.124.000,00	(141.525.629,40)	76,39	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	599.649.629,40	458.124.000,00	(141.525.629,40)	76,39	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.07.0007		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	661.723.000,00	661.630.000,00	(93.000,00)	99,98	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.07.0007	5.2	BELANJA MODAL	661.723.000,00	661.630.000,00	(93.000,00)	99,98	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.07.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	661.723.000,00	661.630.000,00	(93.000,00)	99,98	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.07.0009		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	491.867.850,00	370.350.000,00	(121.517.850,00)	75,29	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.07.0009	5.1	BELANJA OPERASI	491.867.850,00	370.350.000,00	(121.517.850,00)	75,29	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.07.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	491.867.850,00	370.350.000,00	(121.517.850,00)	75,29	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	106.407.002.435,00	97.278.994.815,00	(9.128.007.620,00)	91,42	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.728.960,00	1.699.802,00	(29.158,00)	98,31	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.728.960,00	1.699.802,00	(29.158,00)	98,31	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.728.960,00	1.699.802,00	(29.158,00)	98,31	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.982.937.554,00	1.180.344.861,00	(802.592.693,00)	59,52	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.982.937.554,00	1.180.344.861,00	(802.592.693,00)	59,52	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.982.937.554,00	1.180.344.861,00	(802.592.693,00)	59,52	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	231.618.500,00	122.043.000,00	(109.575.500,00)	52,69	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	231.618.500,00	122.043.000,00	(109.575.500,00)	52,69	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	231.618.500,00	122.043.000,00	(109.575.500,00)	52,69	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	104.190.717.421,00	95.974.907.152,00	(8.215.810.269,00)	92,11	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	104.190.717.421,00	95.974.907.152,00	(8.215.810.269,00)	92,11	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.190.717.421,00	95.974.907.152,00	(8.215.810.269,00)	92,11	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.510.123.287,00	2.792.528.504,65	(1.717.594.782,35)	61,91	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	597.344.502,00	260.990.300,00	(336.354.202,00)	43,69	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	597.344.502,00	260.990.300,00	(336.354.202,00)	43,69	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	597.344.502,00	260.990.300,00	(336.354.202,00)	43,69	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	51.700.000,00	0,00	(51.700.000,00)	0,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	51.700.000,00	0,00	(51.700.000,00)	0,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.700.000,00	0,00	(51.700.000,00)	0,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.861.078.785,00	2.531.538.204,65	(1.329.540.580,35)	65,56	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	1.700.688.508,00	1.535.241.906,00	(165.446.602,00)	90,27	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.688.508,00	59.931.786,00	(140.756.722,00)	29,86	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.09.0010	5.1.05	Belanja Hibah	1.500.000.000,00	1.475.310.120,00	(24.689.880,00)	98,35	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.09.0010	5.2	BELANJA MODAL	2.160.390.277,00	996.296.298,65	(1.164.093.978,35)	46,11	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.09.0010	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.160.390.277,00	996.296.298,65	(1.164.093.978,35)	46,11	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	12.846.188.051,00	21.601.222.538,74	8.755.034.487,74	168,15	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.10.0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	12.846.188.051,00	21.601.222.538,74	8.755.034.487,74	168,15	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.10.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.055.195.597,00	17.959.932.762,90	6.904.737.165,90	162,45	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.10.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.055.195.597,00	17.959.932.762,90	6.904.737.165,90	162,45	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.10.0001	5.2	BELANJA MODAL	1.790.992.454,00	3.641.289.775,84	1.850.297.321,84	203,31	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.10.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.790.992.454,00	3.641.289.775,84	1.850.297.321,84	203,31	
	1.01.0.00.0.00.01.0000		6	PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	1.368.449.912,38	1.368.449.912,38	0,00	
	1.01.0.00.0.00.01.0000		6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	1.368.449.912,38	1.368.449.912,38	0,00	
	1.01.0.00.0.00.01.0000		6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	1.368.449.912,38	1.368.449.912,38	0,00	



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**
Organisasi : **Dinas Kesehatan**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	81.505.120.246,00	77.808.391.081,00	(3.696.729.165,00)	95,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	44.437.498.341,00	41.258.918.621,00	(3.178.579.720,00)	92,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	11.884.692.377,00	9.716.394.585,00	(2.168.297.792,00)	81,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.01.0004		Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.974.529.835,00	2.253.991.827,00	(720.538.008,00)	75,77	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.219.859.310,00	859.424.061,00	(360.435.249,00)	70,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.219.859.310,00	859.424.061,00	(360.435.249,00)	70,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	1.754.670.525,00	1.394.567.766,00	(360.102.759,00)	79,47	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.01.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.206.771.140,00	1.091.679.628,00	(115.091.512,00)	90,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.01.0004	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	547.899.385,00	302.888.138,00	(245.011.247,00)	55,28	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.01.0006		Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	534.300.200,00	414.525.689,00	(119.774.511,00)	77,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	534.300.200,00	414.525.689,00	(119.774.511,00)	77,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.01.0006	5.1.01	Belanja Pegawai	40.000.000,00	28.800.000,00	(11.200.000,00)	72,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	494.300.200,00	385.725.689,00	(108.574.511,00)	78,03	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.01.0010		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	5.076.824.000,00	4.099.950.000,00	(976.874.000,00)	80,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	976.824.000,00	0,00	(976.824.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.01.0010	5.1.05	Belanja Hibah	976.824.000,00	0,00	(976.824.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.01.0010	5.2	BELANJA MODAL	4.100.000.000,00	4.099.950.000,00	(50.000,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.01.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.100.000.000,00	4.099.950.000,00	(50.000,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.01.0025		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	647.768.000,00	628.573.400,00	(19.194.600,00)	97,03	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.01.0025	5.1	BELANJA OPERASI	647.768.000,00	628.573.400,00	(19.194.600,00)	97,03	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.01.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	647.768.000,00	628.573.400,00	(19.194.600,00)	97,03	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.01.0027		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2.651.270.342,00	2.319.353.669,00	(331.916.673,00)	87,48	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.01.0027	5.1	BELANJA OPERASI	2.651.270.342,00	2.319.353.669,00	(331.916.673,00)	87,48	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.01.0027	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.651.270.342,00	2.319.353.669,00	(331.916.673,00)	87,48	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	32.199.372.464,00	31.199.683.366,00	(999.689.098,00)	96,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	45.074.000,00	44.314.500,00	(759.500,00)	98,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	45.074.000,00	44.314.500,00	(759.500,00)	98,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.074.000,00	44.314.500,00	(759.500,00)	98,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	45.000.000,00	44.451.500,00	(548.500,00)	98,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	45.000.000,00	44.451.500,00	(548.500,00)	98,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	44.451.500,00	(548.500,00)	98,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0003		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1.111.388.800,00	1.087.053.650,00	(24.335.150,00)	97,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.111.388.800,00	1.087.053.650,00	(24.335.150,00)	97,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.111.388.800,00	1.087.053.650,00	(24.335.150,00)	97,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0004		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	54.931.500,00	54.901.800,00	(29.700,00)	99,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	51.077.500,00	51.047.800,00	(29.700,00)	99,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.077.500,00	51.047.800,00	(29.700,00)	99,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0004	5.2	BELANJA MODAL	3.854.000,00	3.854.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.854.000,00	3.854.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0006		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	934.646.050,00	925.104.450,00	(9.541.600,00)	98,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	934.646.050,00	925.104.450,00	(9.541.600,00)	98,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	934.646.050,00	925.104.450,00	(9.541.600,00)	98,97	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0008		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	63.101.600,00	62.755.500,00	(346.100,00)	99,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	63.101.600,00	62.755.500,00	(346.100,00)	99,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.101.600,00	62.755.500,00	(346.100,00)	99,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0009		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.831.329.861,00	1.463.111.100,00	(368.218.761,00)	79,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	1.831.329.861,00	1.463.111.100,00	(368.218.761,00)	79,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.831.329.861,00	1.463.111.100,00	(368.218.761,00)	79,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	167.995.400,00	165.922.000,00	(2.073.400,00)	98,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	167.995.400,00	165.922.000,00	(2.073.400,00)	98,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	167.995.400,00	165.922.000,00	(2.073.400,00)	98,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.041.634.106,00	1.036.000.656,00	(5.633.450,00)	99,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	1.041.634.106,00	1.036.000.656,00	(5.633.450,00)	99,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	841.634.106,00	836.000.656,00	(5.633.450,00)	99,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0011	5.1.05	Belanja Hibah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	46.855.400,00	46.855.400,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.855.400,00	46.855.400,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0013	5.1	BELANJA OPERASI	147.167.000,00	147.167.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.167.000,00	147.167.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0016		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	25.427.534.547,00	24.847.026.053,00	(580.508.494,00)	97,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	25.427.534.547,00	24.847.026.053,00	(580.508.494,00)	97,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.427.534.547,00	24.847.026.053,00	(580.508.494,00)	97,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0017		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	579.737.000,00	572.046.600,00	(7.690.400,00)	98,67	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	579.737.000,00	572.046.600,00	(7.690.400,00)	98,67	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	579.737.000,00	572.046.600,00	(7.690.400,00)	98,67	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0019		Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	554.000.000,00	553.995.957,00	(4.043,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0019	5.1	BELANJA OPERASI	554.000.000,00	553.995.957,00	(4.043,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0019	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000,00	53.995.957,00	(4.043,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0019	5.1.05	Belanja Hibah	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0021	5.1	BELANJA OPERASI	148.977.200,00	148.977.200,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.977.200,00	148.977.200,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	308.359.500,00	298.553.470,00	(9.806.030,00)	96,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.03.0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	308.359.500,00	298.553.470,00	(9.806.030,00)	96,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	308.359.500,00	298.553.470,00	(9.806.030,00)	96,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	308.359.500,00	298.553.470,00	(9.806.030,00)	96,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	45.074.000,00	44.287.200,00	(786.800,00)	98,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.04.0003		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	45.074.000,00	44.287.200,00	(786.800,00)	98,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	45.074.000,00	44.287.200,00	(786.800,00)	98,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.074.000,00	44.287.200,00	(786.800,00)	98,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	10.237.113.827,00	10.219.702.669,00	(17.411.158,00)	99,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	10.096.730.252,00	10.080.442.469,00	(16.287.783,00)	99,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.1.01.0001		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	10.043.079.652,00	10.027.213.869,00	(15.865.783,00)	99,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.043.079.652,00	10.027.213.869,00	(15.865.783,00)	99,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.043.079.652,00	10.027.213.869,00	(15.865.783,00)	99,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.1.01.0002		Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	53.650.600,00	53.228.600,00	(422.000,00)	99,21	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	53.650.600,00	53.228.600,00	(422.000,00)	99,21	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.650.600,00	53.228.600,00	(422.000,00)	99,21	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	140.383.575,00	139.260.200,00	(1.123.375,00)	99,19	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.1.02.0001		Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	107.059.200,00	106.242.800,00	(816.400,00)	99,23	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	107.059.200,00	106.242.800,00	(816.400,00)	99,23	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.059.200,00	106.242.800,00	(816.400,00)	99,23	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.1.02.0002		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	33.324.375,00	33.017.400,00	(306.975,00)	99,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	33.324.375,00	33.017.400,00	(306.975,00)	99,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.324.375,00	33.017.400,00	(306.975,00)	99,07	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	71.603.200,00	71.446.730,00	(156.470,00)	99,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.1.01		Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	71.603.200,00	71.446.730,00	(156.470,00)	99,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.1.01.0001		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	71.603.200,00	71.446.730,00	(156.470,00)	99,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	71.603.200,00	71.446.730,00	(156.470,00)	99,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.603.200,00	71.446.730,00	(156.470,00)	99,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	689.129.700,00	688.528.000,00	(601.700,00)	99,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05.1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	689.129.700,00	688.528.000,00	(601.700,00)	99,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05.1.01.0001		Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	689.129.700,00	688.528.000,00	(601.700,00)	99,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	689.129.700,00	688.528.000,00	(601.700,00)	99,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	689.129.700,00	688.528.000,00	(601.700,00)	99,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	26.069.775.178,00	25.569.795.061,00	(499.980.117,00)	98,08	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	242.195.682,00	241.997.300,00	(198.382,00)	99,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	369.000,00	369.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	369.000,00	369.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	141.527.930,00	141.370.400,00	(157.530,00)	99,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	141.527.930,00	141.370.400,00	(157.530,00)	99,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.527.930,00	141.370.400,00	(157.530,00)	99,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.298.752,00	100.257.900,00	(40.852,00)	99,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	100.298.752,00	100.257.900,00	(40.852,00)	99,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.298.752,00	100.257.900,00	(40.852,00)	99,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.696.616.667,00	20.394.591.337,00	(302.025.330,00)	98,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.846.832.876,00	19.546.137.637,00	(300.695.239,00)	98,48	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	19.846.832.876,00	19.546.137.637,00	(300.695.239,00)	98,48	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	19.846.832.876,00	19.546.137.637,00	(300.695.239,00)	98,48	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	832.312.500,00	832.224.000,00	(88.500,00)	99,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	832.312.500,00	832.224.000,00	(88.500,00)	99,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	832.224.000,00	832.224.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.500,00	0,00	(88.500,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.02.0006		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	17.471.291,00	16.229.700,00	(1.241.591,00)	92,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	17.471.291,00	16.229.700,00	(1.241.591,00)	92,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.471.291,00	16.229.700,00	(1.241.591,00)	92,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	48.120.900,00	46.332.950,00	(1.787.950,00)	96,28	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.03.0004		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	48.120.900,00	46.332.950,00	(1.787.950,00)	96,28	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	48.120.900,00	46.332.950,00	(1.787.950,00)	96,28	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.120.900,00	46.332.950,00	(1.787.950,00)	96,28	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.914.000,00	7.459.500,00	(454.500,00)	94,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	7.914.000,00	7.459.500,00	(454.500,00)	94,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	7.914.000,00	7.459.500,00	(454.500,00)	94,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.914.000,00	7.459.500,00	(454.500,00)	94,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	958.931.329,00	926.259.357,00	(32.671.972,00)	96,59	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.116.719,00	21.103.900,00	(2.012.819,00)	91,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	23.116.719,00	21.103.900,00	(2.012.819,00)	91,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.116.719,00	21.103.900,00	(2.012.819,00)	91,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	107.423.800,00	107.423.800,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.423.800,00	107.423.800,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.962.400,00	850.000,00	(2.112.400,00)	28,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.962.400,00	850.000,00	(2.112.400,00)	28,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.962.400,00	850.000,00	(2.112.400,00)	28,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	67.917.160,00	65.171.910,00	(2.745.250,00)	95,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	67.917.160,00	65.171.910,00	(2.745.250,00)	95,95	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.917.160,00	65.171.910,00	(2.745.250,00)	95,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.560.000,00	24.049.854,00	(9.510.146,00)	71,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	33.560.000,00	24.049.854,00	(9.510.146,00)	71,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.560.000,00	24.049.854,00	(9.510.146,00)	71,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	19.000.000,00	17.097.000,00	(1.903.000,00)	89,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	19.000.000,00	17.097.000,00	(1.903.000,00)	89,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	17.097.000,00	(1.903.000,00)	89,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.06.0008		Fasilitas Kunjungan Tamu	51.000.000,00	44.894.650,00	(6.105.350,00)	88,02	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	51.000.000,00	44.894.650,00	(6.105.350,00)	88,02	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.000.000,00	44.894.650,00	(6.105.350,00)	88,02	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	653.951.250,00	645.668.243,00	(8.283.007,00)	98,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	653.951.250,00	645.668.243,00	(8.283.007,00)	98,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	653.951.250,00	645.668.243,00	(8.283.007,00)	98,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	279.733.000,00	278.333.000,00	(1.400.000,00)	99,49	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.07.0005		Pengadaan Mebel	23.100.000,00	23.000.000,00	(100.000,00)	99,56	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	23.100.000,00	23.000.000,00	(100.000,00)	99,56	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.100.000,00	23.000.000,00	(100.000,00)	99,56	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	221.633.000,00	220.333.000,00	(1.300.000,00)	99,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	221.633.000,00	220.333.000,00	(1.300.000,00)	99,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	221.633.000,00	220.333.000,00	(1.300.000,00)	99,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.07.0009	5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.07.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.174.652.522,00	3.021.064.129,00	(153.588.393,00)	95,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	132.014.233,00	110.996.008,00	(21.018.225,00)	84,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	132.014.233,00	110.996.008,00	(21.018.225,00)	84,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.014.233,00	110.996.008,00	(21.018.225,00)	84,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	79.177.300,00	77.646.196,00	(1.531.104,00)	98,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	79.177.300,00	77.646.196,00	(1.531.104,00)	98,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.177.300,00	77.646.196,00	(1.531.104,00)	98,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.963.460.989,00	2.832.421.925,00	(131.039.064,00)	95,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.963.460.989,00	2.832.421.925,00	(131.039.064,00)	95,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.963.460.989,00	2.832.421.925,00	(131.039.064,00)	95,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	661.611.078,00	653.757.488,00	(7.853.590,00)	98,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	398.600.000,00	390.992.350,00	(7.607.650,00)	98,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	398.600.000,00	390.992.350,00	(7.607.650,00)	98,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	398.600.000,00	390.992.350,00	(7.607.650,00)	98,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.465.940,00	15.220.000,00	(245.940,00)	98,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	15.465.940,00	15.220.000,00	(245.940,00)	98,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.465.940,00	15.220.000,00	(245.940,00)	98,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	247.545.138,00	247.545.138,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	247.545.138,00	247.545.138,00	0,00	100,00	



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**
Organisasi : **Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.02.0001		4	PENDAPATAN DAERAH	115.000.000.000,00	116.068.647.767,69	1.068.647.767,69	100,92	
	1.02.0.00.0.00.02.0001		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	115.000.000.000,00	116.068.647.767,69	1.068.647.767,69	100,92	
	1.02.0.00.0.00.02.0001		4.1.02	Retribusi Daerah	114.260.000.000,00	115.162.680.173,30	902.680.173,30	100,79	
	1.02.0.00.0.00.02.0001		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	740.000.000,00	905.967.594,39	165.967.594,39	122,42	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001		5	BELANJA DAERAH	254.512.360.482,00	251.836.588.613,32	(2.675.771.868,68)	98,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	11.569.565.203,82	10.792.301.486,32	(777.263.717,50)	93,28	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	11.494.705.387,82	10.723.970.918,32	(770.734.469,50)	93,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0009		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	64.380.000,00	58.213.000,00	(6.167.000,00)	90,42	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	64.380.000,00	58.213.000,00	(6.167.000,00)	90,42	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.380.000,00	58.213.000,00	(6.167.000,00)	90,42	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0010		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	2.914.429.913,00	2.667.037.329,00	(247.392.584,00)	91,51	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0010	5.2	BELANJA MODAL	2.914.429.913,00	2.667.037.329,00	(247.392.584,00)	91,51	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.914.429.913,00	2.667.037.329,00	(247.392.584,00)	91,51	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0017		Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	312.946.072,82	56.303.000,00	(256.643.072,82)	17,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	312.946.072,82	56.303.000,00	(256.643.072,82)	17,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	312.946.072,82	56.303.000,00	(256.643.072,82)	17,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0026		Pengembangan Rumah Sakit	8.202.949.402,00	7.942.417.589,32	(260.531.812,68)	96,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0026	5.1	BELANJA OPERASI	142.984.206,00	142.984.206,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.984.206,00	142.984.206,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0026	5.2	BELANJA MODAL	8.059.965.196,00	7.799.433.383,32	(260.531.812,68)	96,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0026	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.059.965.196,00	7.799.433.383,32	(260.531.812,68)	96,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	74.859.816,00	68.330.568,00	(6.529.248,00)	91,27	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.02.0008		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	49.873.548,00	45.704.768,00	(4.168.780,00)	91,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	49.873.548,00	45.704.768,00	(4.168.780,00)	91,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.873.548,00	45.704.768,00	(4.168.780,00)	91,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.02.0009		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	24.986.268,00	22.625.800,00	(2.360.468,00)	90,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	24.986.268,00	22.625.800,00	(2.360.468,00)	90,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.986.268,00	22.625.800,00	(2.360.468,00)	90,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	6.571.806.779,00	6.164.108.000,00	(407.698.779,00)	93,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.03.1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	6.471.962.679,00	6.071.988.049,00	(399.974.630,00)	93,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.03.1.01.0001		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	6.471.962.679,00	6.071.988.049,00	(399.974.630,00)	93,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.03.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.471.962.679,00	6.071.988.049,00	(399.974.630,00)	93,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.03.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.471.962.679,00	6.071.988.049,00	(399.974.630,00)	93,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.03.1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	99.844.100,00	92.119.951,00	(7.724.149,00)	92,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.03.1.02.0001		Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	99.844.100,00	92.119.951,00	(7.724.149,00)	92,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.03.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	99.844.100,00	92.119.951,00	(7.724.149,00)	92,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.03.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.844.100,00	92.119.951,00	(7.724.149,00)	92,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	236.370.988.499,18	234.880.179.127,00	(1.490.809.372,18)	99,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.005.277,18	61.317.860,00	(38.687.417,18)	61,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.005.277,18	61.317.860,00	(38.687.417,18)	61,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	100.005.277,18	61.317.860,00	(38.687.417,18)	61,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.005.277,18	61.317.860,00	(38.687.417,18)	61,31	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	83.130.849.909,44	82.222.546.927,00	(908.302.982,44)	98,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	82.173.893.493,44	81.275.942.821,00	(897.950.672,44)	98,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	82.173.893.493,44	81.275.942.821,00	(897.950.672,44)	98,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	82.173.893.493,44	81.275.942.821,00	(897.950.672,44)	98,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	924.783.210,00	916.030.000,00	(8.753.210,00)	99,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	924.783.210,00	916.030.000,00	(8.753.210,00)	99,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	924.720.000,00	916.030.000,00	(8.690.000,00)	99,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.210,00	0,00	(63.210,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	22.174.206,00	22.174.106,00	(100,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	22.174.206,00	22.174.106,00	(100,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.174.206,00	22.174.106,00	(100,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0006		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	9.999.000,00	8.400.000,00	(1.599.000,00)	84,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	9.999.000,00	8.400.000,00	(1.599.000,00)	84,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.999.000,00	8.400.000,00	(1.599.000,00)	84,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.880.000,00	30.564.500,00	(315.500,00)	98,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.880.000,00	30.564.500,00	(315.500,00)	98,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	30.880.000,00	30.564.500,00	(315.500,00)	98,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.880.000,00	30.564.500,00	(315.500,00)	98,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	274.547.983,00	240.404.469,00	(34.143.514,00)	87,56	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	149.984.199,00	140.352.119,00	(9.632.080,00)	93,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	149.984.199,00	140.352.119,00	(9.632.080,00)	93,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.984.199,00	140.352.119,00	(9.632.080,00)	93,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.394.084,00	42.367.000,00	(27.084,00)	99,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	42.394.084,00	42.367.000,00	(27.084,00)	99,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.394.084,00	42.367.000,00	(27.084,00)	99,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	18.469.700,00	17.962.000,00	(507.700,00)	97,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	18.469.700,00	17.962.000,00	(507.700,00)	97,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.469.700,00	17.962.000,00	(507.700,00)	97,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63.700.000,00	39.723.350,00	(23.976.650,00)	62,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	63.700.000,00	39.723.350,00	(23.976.650,00)	62,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.700.000,00	39.723.350,00	(23.976.650,00)	62,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	195.592.363,00	21.208.000,00	(174.384.363,00)	10,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	195.592.363,00	21.208.000,00	(174.384.363,00)	10,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	195.592.363,00	21.208.000,00	(174.384.363,00)	10,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	195.592.363,00	21.208.000,00	(174.384.363,00)	10,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.437.961.233,56	15.615.399.288,00	(822.561.945,56)	94,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.333.146,56	5.928.000,00	(405.146,56)	93,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.333.146,56	5.928.000,00	(405.146,56)	93,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.333.146,56	5.928.000,00	(405.146,56)	93,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.722.790.126,00	6.377.509.333,00	(345.280.793,00)	94,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.722.790.126,00	6.377.509.333,00	(345.280.793,00)	94,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.722.790.126,00	6.377.509.333,00	(345.280.793,00)	94,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.136.000,00	38.500.000,00	(636.000,00)	98,37	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	39.136.000,00	38.500.000,00	(636.000,00)	98,37	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.136.000,00	38.500.000,00	(636.000,00)	98,37	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.669.701.961,00	9.193.461.955,00	(476.240.006,00)	95,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	9.669.701.961,00	9.193.461.955,00	(476.240.006,00)	95,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.669.701.961,00	9.193.461.955,00	(476.240.006,00)	95,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.459.073.664,00	4.100.468.020,00	(358.605.644,00)	91,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60.008.200,00	56.424.020,00	(3.584.180,00)	94,02	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	60.008.200,00	56.424.020,00	(3.584.180,00)	94,02	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.008.200,00	56.424.020,00	(3.584.180,00)	94,02	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.010.520,00	150.000.000,00	(10.520,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	150.010.520,00	150.000.000,00	(10.520,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.010.520,00	150.000.000,00	(10.520,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.249.054.944,00	3.894.044.000,00	(355.010.944,00)	91,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	4.249.054.944,00	3.894.044.000,00	(355.010.944,00)	91,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.249.054.944,00	3.894.044.000,00	(355.010.944,00)	91,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	131.742.078.069,00	132.588.270.063,00	846.191.994,00	100,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.10.0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	131.742.078.069,00	132.588.270.063,00	846.191.994,00	100,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.10.0001	5.1	BELANJA OPERASI	123.445.078.069,00	124.469.586.563,00	1.024.508.494,00	100,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.10.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	16.808.311.964,00	16.354.397.081,00	(453.914.883,00)	97,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.10.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.636.766.105,00	108.115.189.482,00	1.478.423.377,00	101,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.10.0001	5.2	BELANJA MODAL	8.297.000.000,00	8.118.683.500,00	(178.316.500,00)	97,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.10.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.176.107.000,00	3.999.183.500,00	(176.923.500,00)	95,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.10.0001	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	4.120.893.000,00	4.119.500.000,00	(1.393.000,00)	99,96	



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**

Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**

Organisasi : **Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.02.0002		4	PENDAPATAN DAERAH	23.000.000.000,00	22.488.943.003,00	(511.056.997,00)	97,77	
	1.02.0.00.0.00.02.0002		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	23.000.000.000,00	22.488.943.003,00	(511.056.997,00)	97,77	
	1.02.0.00.0.00.02.0002		4.1.02	Retribusi Daerah	23.000.000.000,00	22.488.943.003,00	(511.056.997,00)	97,77	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002		5	BELANJA DAERAH	94.760.122.128,00	91.682.849.607,00	(3.077.272.521,00)	96,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	8.156.908.634,00	7.063.626.735,00	(1.093.281.899,00)	86,59	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	6.310.322.664,00	5.238.876.532,00	(1.071.446.132,00)	83,02	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0004		Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	280.283.000,00	280.256.000,00	(27.000,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	26.351.000,00	26.351.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.351.000,00	26.351.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	253.932.000,00	253.905.000,00	(27.000,00)	99,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80.632.000,00	80.605.000,00	(27.000,00)	99,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0004	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	173.300.000,00	173.300.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0010		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	2.104.800.000,00	1.641.486.500,00	(463.313.500,00)	77,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	25.800.700,00	24.420.000,00	(1.380.700,00)	94,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.800.700,00	24.420.000,00	(1.380.700,00)	94,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0010	5.2	BELANJA MODAL	2.078.999.300,00	1.617.066.500,00	(461.932.800,00)	77,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.078.999.300,00	1.617.066.500,00	(461.932.800,00)	77,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0016		Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	1.159.864.000,00	1.016.540.000,00	(143.324.000,00)	87,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0016	5.2	BELANJA MODAL	1.159.864.000,00	1.016.540.000,00	(143.324.000,00)	87,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0016	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.159.864.000,00	1.016.540.000,00	(143.324.000,00)	87,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0027		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2.765.375.664,00	2.300.594.032,00	(464.781.632,00)	83,19	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0027	5.1	BELANJA OPERASI	2.584.375.664,00	2.168.494.032,00	(415.881.632,00)	83,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0027	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.584.375.664,00	2.168.494.032,00	(415.881.632,00)	83,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0027	5.2	BELANJA MODAL	181.000.000,00	132.100.000,00	(48.900.000,00)	72,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0027	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	181.000.000,00	132.100.000,00	(48.900.000,00)	72,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.792.397.970,00	1.775.421.598,00	(16.976.372,00)	99,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.02.0009		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	885.700.000,00	877.307.548,00	(8.392.452,00)	99,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	828.471.500,00	822.747.548,00	(5.723.952,00)	99,30	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	828.471.500,00	822.747.548,00	(5.723.952,00)	99,30	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.02.0009	5.2	BELANJA MODAL	57.228.500,00	54.560.000,00	(2.668.500,00)	95,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.02.0009	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.228.500,00	54.560.000,00	(2.668.500,00)	95,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.02.0022		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	906.697.970,00	898.114.050,00	(8.583.920,00)	99,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.02.0022	5.1	BELANJA OPERASI	906.697.970,00	898.114.050,00	(8.583.920,00)	99,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.02.0022	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	906.697.970,00	898.114.050,00	(8.583.920,00)	99,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	15.000.000,00	14.950.000,00	(50.000,00)	99,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.03.0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	15.000.000,00	14.950.000,00	(50.000,00)	99,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.03.0002	5.2	BELANJA MODAL	15.000.000,00	14.950.000,00	(50.000,00)	99,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.03.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	14.950.000,00	(50.000,00)	99,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	39.188.000,00	34.378.605,00	(4.809.395,00)	87,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.04.0002		Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	39.188.000,00	34.378.605,00	(4.809.395,00)	87,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	39.188.000,00	34.378.605,00	(4.809.395,00)	87,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.188.000,00	34.378.605,00	(4.809.395,00)	87,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	5.349.084.296,00	5.244.753.049,00	(104.331.247,00)	98,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.03.1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	5.175.135.154,00	5.075.006.807,00	(100.128.347,00)	98,06	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.03.1.01.0001		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	5.175.135.154,00	5.075.006.807,00	(100.128.347,00)	98,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.03.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.175.135.154,00	5.075.006.807,00	(100.128.347,00)	98,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.03.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.175.135.154,00	5.075.006.807,00	(100.128.347,00)	98,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.03.1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	173.949.142,00	169.746.242,00	(4.202.900,00)	97,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.03.1.02.0001		Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	173.949.142,00	169.746.242,00	(4.202.900,00)	97,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.03.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	173.949.142,00	169.746.242,00	(4.202.900,00)	97,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.03.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	173.949.142,00	169.746.242,00	(4.202.900,00)	97,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	81.254.129.198,00	79.374.469.823,00	(1.879.659.375,00)	97,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	246.559.948,00	232.210.686,00	(14.349.262,00)	94,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	216.822.448,00	205.133.186,00	(11.689.262,00)	94,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	216.822.448,00	205.133.186,00	(11.689.262,00)	94,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	216.822.448,00	205.133.186,00	(11.689.262,00)	94,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29.737.500,00	27.077.500,00	(2.660.000,00)	91,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	29.737.500,00	27.077.500,00	(2.660.000,00)	91,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.737.500,00	27.077.500,00	(2.660.000,00)	91,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	48.357.032.381,00	48.075.850.981,00	(281.181.400,00)	99,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	47.585.005.081,00	47.322.346.981,00	(262.658.100,00)	99,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	47.585.005.081,00	47.322.346.981,00	(262.658.100,00)	99,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	47.585.005.081,00	47.322.346.981,00	(262.658.100,00)	99,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	703.704.000,00	685.388.000,00	(18.316.000,00)	97,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	703.704.000,00	685.388.000,00	(18.316.000,00)	97,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	703.704.000,00	685.388.000,00	(18.316.000,00)	97,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	68.323.300,00	68.116.000,00	(207.300,00)	99,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	68.323.300,00	68.116.000,00	(207.300,00)	99,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.323.300,00	68.116.000,00	(207.300,00)	99,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.000.000,00	24.306.000,00	(694.000,00)	97,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.05.0004		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	25.000.000,00	24.306.000,00	(694.000,00)	97,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.05.0004	5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	24.306.000,00	(694.000,00)	97,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.05.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.306.000,00	(694.000,00)	97,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	646.229.700,00	567.473.632,00	(78.756.068,00)	87,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.000.000,00	98.269.000,00	(1.731.000,00)	98,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	98.269.000,00	(1.731.000,00)	98,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	98.269.000,00	(1.731.000,00)	98,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.000.000,00	70.022.000,00	(4.978.000,00)	93,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	70.022.000,00	(4.978.000,00)	93,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	70.022.000,00	(4.978.000,00)	93,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	261.282.300,00	192.223.000,00	(69.059.300,00)	73,56	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	261.282.300,00	192.223.000,00	(69.059.300,00)	73,56	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	261.282.300,00	192.223.000,00	(69.059.300,00)	73,56	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	60.000.000,00	58.359.000,00	(1.641.000,00)	97,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	58.359.000,00	(1.641.000,00)	97,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	58.359.000,00	(1.641.000,00)	97,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	149.947.400,00	148.600.632,00	(1.346.768,00)	99,10	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	149.947.400,00	148.600.632,00	(1.346.768,00)	99,10	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.947.400,00	148.600.632,00	(1.346.768,00)	99,10	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.303.833.494,00	1.271.743.614,00	(32.089.880,00)	97,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.303.833.494,00	1.271.743.614,00	(32.089.880,00)	97,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.303.833.494,00	1.271.743.614,00	(32.089.880,00)	97,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.303.833.494,00	1.271.743.614,00	(32.089.880,00)	97,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.860.880.176,00	4.536.902.659,00	(323.977.517,00)	93,33	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.731.200,00	9.609.700,00	(3.121.500,00)	75,48	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.731.200,00	9.609.700,00	(3.121.500,00)	75,48	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.731.200,00	9.609.700,00	(3.121.500,00)	75,48	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	177.941.000,00	176.938.900,00	(1.002.100,00)	99,43	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	177.941.000,00	176.938.900,00	(1.002.100,00)	99,43	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.941.000,00	176.938.900,00	(1.002.100,00)	99,43	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0003		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	117.547.600,00	98.181.759,00	(19.365.841,00)	83,52	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0003	5.1	BELANJA OPERASI	64.432.300,00	45.106.759,00	(19.325.541,00)	70,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.432.300,00	45.106.759,00	(19.325.541,00)	70,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0003	5.2	BELANJA MODAL	53.115.300,00	53.075.000,00	(40.300,00)	99,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.115.300,00	53.075.000,00	(40.300,00)	99,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0005		Pemeliharaan Mebel	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0005	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	669.548.500,00	600.565.000,00	(68.983.500,00)	89,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	580.798.500,00	511.815.000,00	(68.983.500,00)	88,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	580.798.500,00	511.815.000,00	(68.983.500,00)	88,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0006	5.2	BELANJA MODAL	88.750.000,00	88.750.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	88.750.000,00	88.750.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0007		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.553.907.300,00	1.387.097.300,00	(166.810.000,00)	89,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0007	5.1	BELANJA OPERASI	1.245.907.300,00	1.140.220.300,00	(105.687.000,00)	91,51	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.245.907.300,00	1.140.220.300,00	(105.687.000,00)	91,51	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0007	5.2	BELANJA MODAL	308.000.000,00	246.877.000,00	(61.123.000,00)	80,15	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	308.000.000,00	246.877.000,00	(61.123.000,00)	80,15	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.979.204.576,00	1.964.720.000,00	(14.484.576,00)	99,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	1.979.204.576,00	1.964.720.000,00	(14.484.576,00)	99,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.979.204.576,00	1.964.720.000,00	(14.484.576,00)	99,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	300.000.000,00	299.790.000,00	(210.000,00)	99,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000,00	299.790.000,00	(210.000,00)	99,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	299.790.000,00	(210.000,00)	99,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	25.814.593.499,00	24.665.982.251,00	(1.148.611.248,00)	95,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.10.0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	25.814.593.499,00	24.665.982.251,00	(1.148.611.248,00)	95,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.10.0001	5.1	BELANJA OPERASI	24.358.893.499,00	23.395.806.357,00	(963.087.142,00)	96,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.10.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	5.000.000.000,00	4.874.424.726,00	(125.575.274,00)	97,48	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.10.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.358.893.499,00	18.521.381.631,00	(837.511.868,00)	95,67	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.10.0001	5.2	BELANJA MODAL	1.455.700.000,00	1.270.175.894,00	(185.524.106,00)	87,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.10.0001	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.455.700.000,00	1.270.175.894,00	(185.524.106,00)	87,25	



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**

Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**

Organisasi : **Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.02.0001		4	PENDAPATAN DAERAH	115.000.000.000,00	116.068.647.767,69	1.068.647.767,69	100,92	
	1.02.0.00.0.00.02.0001		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	115.000.000.000,00	116.068.647.767,69	1.068.647.767,69	100,92	
	1.02.0.00.0.00.02.0001		4.1.02	Retribusi Daerah	114.260.000.000,00	115.162.680.173,30	902.680.173,30	100,79	
	1.02.0.00.0.00.02.0001		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	740.000.000,00	905.967.594,39	165.967.594,39	122,42	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001		5	BELANJA DAERAH	254.512.360.482,00	251.836.588.613,32	(2.675.771.868,68)	98,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	11.569.565.203,82	10.792.301.486,32	(777.263.717,50)	93,28	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	11.494.705.387,82	10.723.970.918,32	(770.734.469,50)	93,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0009		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	64.380.000,00	58.213.000,00	(6.167.000,00)	90,42	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	64.380.000,00	58.213.000,00	(6.167.000,00)	90,42	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.380.000,00	58.213.000,00	(6.167.000,00)	90,42	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0010		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	2.914.429.913,00	2.667.037.329,00	(247.392.584,00)	91,51	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0010	5.2	BELANJA MODAL	2.914.429.913,00	2.667.037.329,00	(247.392.584,00)	91,51	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.914.429.913,00	2.667.037.329,00	(247.392.584,00)	91,51	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0017		Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	312.946.072,82	56.303.000,00	(256.643.072,82)	17,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	312.946.072,82	56.303.000,00	(256.643.072,82)	17,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	312.946.072,82	56.303.000,00	(256.643.072,82)	17,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0026		Pengembangan Rumah Sakit	8.202.949.402,00	7.942.417.589,32	(260.531.812,68)	96,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0026	5.1	BELANJA OPERASI	142.984.206,00	142.984.206,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.984.206,00	142.984.206,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0026	5.2	BELANJA MODAL	8.059.965.196,00	7.799.433.383,32	(260.531.812,68)	96,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0026	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.059.965.196,00	7.799.433.383,32	(260.531.812,68)	96,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	74.859.816,00	68.330.568,00	(6.529.248,00)	91,27	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.02.0008		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	49.873.548,00	45.704.768,00	(4.168.780,00)	91,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	49.873.548,00	45.704.768,00	(4.168.780,00)	91,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.873.548,00	45.704.768,00	(4.168.780,00)	91,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.02.0009		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	24.986.268,00	22.625.800,00	(2.360.468,00)	90,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	24.986.268,00	22.625.800,00	(2.360.468,00)	90,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.986.268,00	22.625.800,00	(2.360.468,00)	90,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	6.571.806.779,00	6.164.108.000,00	(407.698.779,00)	93,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.03.1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	6.471.962.679,00	6.071.988.049,00	(399.974.630,00)	93,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.03.1.01.0001		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	6.471.962.679,00	6.071.988.049,00	(399.974.630,00)	93,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.03.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.471.962.679,00	6.071.988.049,00	(399.974.630,00)	93,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.03.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.471.962.679,00	6.071.988.049,00	(399.974.630,00)	93,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.03.1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	99.844.100,00	92.119.951,00	(7.724.149,00)	92,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.03.1.02.0001		Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	99.844.100,00	92.119.951,00	(7.724.149,00)	92,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.03.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	99.844.100,00	92.119.951,00	(7.724.149,00)	92,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.03.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.844.100,00	92.119.951,00	(7.724.149,00)	92,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	236.370.988.499,18	234.880.179.127,00	(1.490.809.372,18)	99,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.005.277,18	61.317.860,00	(38.687.417,18)	61,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.005.277,18	61.317.860,00	(38.687.417,18)	61,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	100.005.277,18	61.317.860,00	(38.687.417,18)	61,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.005.277,18	61.317.860,00	(38.687.417,18)	61,31	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	83.130.849.909,44	82.222.546.927,00	(908.302.982,44)	98,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	82.173.893.493,44	81.275.942.821,00	(897.950.672,44)	98,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	82.173.893.493,44	81.275.942.821,00	(897.950.672,44)	98,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	82.173.893.493,44	81.275.942.821,00	(897.950.672,44)	98,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	924.783.210,00	916.030.000,00	(8.753.210,00)	99,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	924.783.210,00	916.030.000,00	(8.753.210,00)	99,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	924.720.000,00	916.030.000,00	(8.690.000,00)	99,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.210,00	0,00	(63.210,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	22.174.206,00	22.174.106,00	(100,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	22.174.206,00	22.174.106,00	(100,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.174.206,00	22.174.106,00	(100,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0006		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	9.999.000,00	8.400.000,00	(1.599.000,00)	84,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	9.999.000,00	8.400.000,00	(1.599.000,00)	84,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.999.000,00	8.400.000,00	(1.599.000,00)	84,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.880.000,00	30.564.500,00	(315.500,00)	98,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.880.000,00	30.564.500,00	(315.500,00)	98,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	30.880.000,00	30.564.500,00	(315.500,00)	98,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.880.000,00	30.564.500,00	(315.500,00)	98,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	274.547.983,00	240.404.469,00	(34.143.514,00)	87,56	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	149.984.199,00	140.352.119,00	(9.632.080,00)	93,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	149.984.199,00	140.352.119,00	(9.632.080,00)	93,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.984.199,00	140.352.119,00	(9.632.080,00)	93,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.394.084,00	42.367.000,00	(27.084,00)	99,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	42.394.084,00	42.367.000,00	(27.084,00)	99,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.394.084,00	42.367.000,00	(27.084,00)	99,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	18.469.700,00	17.962.000,00	(507.700,00)	97,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	18.469.700,00	17.962.000,00	(507.700,00)	97,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.469.700,00	17.962.000,00	(507.700,00)	97,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63.700.000,00	39.723.350,00	(23.976.650,00)	62,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	63.700.000,00	39.723.350,00	(23.976.650,00)	62,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.700.000,00	39.723.350,00	(23.976.650,00)	62,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	195.592.363,00	21.208.000,00	(174.384.363,00)	10,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	195.592.363,00	21.208.000,00	(174.384.363,00)	10,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	195.592.363,00	21.208.000,00	(174.384.363,00)	10,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	195.592.363,00	21.208.000,00	(174.384.363,00)	10,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.437.961.233,56	15.615.399.288,00	(822.561.945,56)	94,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.333.146,56	5.928.000,00	(405.146,56)	93,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.333.146,56	5.928.000,00	(405.146,56)	93,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.333.146,56	5.928.000,00	(405.146,56)	93,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.722.790.126,00	6.377.509.333,00	(345.280.793,00)	94,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.722.790.126,00	6.377.509.333,00	(345.280.793,00)	94,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.722.790.126,00	6.377.509.333,00	(345.280.793,00)	94,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.136.000,00	38.500.000,00	(636.000,00)	98,37	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	39.136.000,00	38.500.000,00	(636.000,00)	98,37	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.136.000,00	38.500.000,00	(636.000,00)	98,37	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.669.701.961,00	9.193.461.955,00	(476.240.006,00)	95,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	9.669.701.961,00	9.193.461.955,00	(476.240.006,00)	95,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.669.701.961,00	9.193.461.955,00	(476.240.006,00)	95,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.459.073.664,00	4.100.468.020,00	(358.605.644,00)	91,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60.008.200,00	56.424.020,00	(3.584.180,00)	94,02	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	60.008.200,00	56.424.020,00	(3.584.180,00)	94,02	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.008.200,00	56.424.020,00	(3.584.180,00)	94,02	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.010.520,00	150.000.000,00	(10.520,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	150.010.520,00	150.000.000,00	(10.520,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.010.520,00	150.000.000,00	(10.520,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.249.054.944,00	3.894.044.000,00	(355.010.944,00)	91,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	4.249.054.944,00	3.894.044.000,00	(355.010.944,00)	91,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.249.054.944,00	3.894.044.000,00	(355.010.944,00)	91,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	131.742.078.069,00	132.588.270.063,00	846.191.994,00	100,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.10.0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	131.742.078.069,00	132.588.270.063,00	846.191.994,00	100,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.10.0001	5.1	BELANJA OPERASI	123.445.078.069,00	124.469.586.563,00	1.024.508.494,00	100,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.10.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	16.808.311.964,00	16.354.397.081,00	(453.914.883,00)	97,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.10.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.636.766.105,00	108.115.189.482,00	1.478.423.377,00	101,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.10.0001	5.2	BELANJA MODAL	8.297.000.000,00	8.118.683.500,00	(178.316.500,00)	97,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.10.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.176.107.000,00	3.999.183.500,00	(176.923.500,00)	95,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.10.0001	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	4.120.893.000,00	4.119.500.000,00	(1.393.000,00)	99,96	



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**

Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**

Organisasi : **Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.02.0002		4	PENDAPATAN DAERAH	23.000.000.000,00	22.488.943.003,00	(511.056.997,00)	97,77	
	1.02.0.00.0.00.02.0002		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	23.000.000.000,00	22.488.943.003,00	(511.056.997,00)	97,77	
	1.02.0.00.0.00.02.0002		4.1.02	Retribusi Daerah	23.000.000.000,00	22.488.943.003,00	(511.056.997,00)	97,77	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002		5	BELANJA DAERAH	94.760.122.128,00	91.682.849.607,00	(3.077.272.521,00)	96,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	8.156.908.634,00	7.063.626.735,00	(1.093.281.899,00)	86,59	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	6.310.322.664,00	5.238.876.532,00	(1.071.446.132,00)	83,02	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0004		Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	280.283.000,00	280.256.000,00	(27.000,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	26.351.000,00	26.351.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.351.000,00	26.351.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	253.932.000,00	253.905.000,00	(27.000,00)	99,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80.632.000,00	80.605.000,00	(27.000,00)	99,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0004	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	173.300.000,00	173.300.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0010		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	2.104.800.000,00	1.641.486.500,00	(463.313.500,00)	77,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	25.800.700,00	24.420.000,00	(1.380.700,00)	94,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.800.700,00	24.420.000,00	(1.380.700,00)	94,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0010	5.2	BELANJA MODAL	2.078.999.300,00	1.617.066.500,00	(461.932.800,00)	77,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.078.999.300,00	1.617.066.500,00	(461.932.800,00)	77,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0016		Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	1.159.864.000,00	1.016.540.000,00	(143.324.000,00)	87,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0016	5.2	BELANJA MODAL	1.159.864.000,00	1.016.540.000,00	(143.324.000,00)	87,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0016	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.159.864.000,00	1.016.540.000,00	(143.324.000,00)	87,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0027		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2.765.375.664,00	2.300.594.032,00	(464.781.632,00)	83,19	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0027	5.1	BELANJA OPERASI	2.584.375.664,00	2.168.494.032,00	(415.881.632,00)	83,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0027	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.584.375.664,00	2.168.494.032,00	(415.881.632,00)	83,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0027	5.2	BELANJA MODAL	181.000.000,00	132.100.000,00	(48.900.000,00)	72,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0027	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	181.000.000,00	132.100.000,00	(48.900.000,00)	72,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.792.397.970,00	1.775.421.598,00	(16.976.372,00)	99,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.02.0009		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	885.700.000,00	877.307.548,00	(8.392.452,00)	99,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	828.471.500,00	822.747.548,00	(5.723.952,00)	99,30	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	828.471.500,00	822.747.548,00	(5.723.952,00)	99,30	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.02.0009	5.2	BELANJA MODAL	57.228.500,00	54.560.000,00	(2.668.500,00)	95,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.02.0009	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.228.500,00	54.560.000,00	(2.668.500,00)	95,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.02.0022		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	906.697.970,00	898.114.050,00	(8.583.920,00)	99,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.02.0022	5.1	BELANJA OPERASI	906.697.970,00	898.114.050,00	(8.583.920,00)	99,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.02.0022	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	906.697.970,00	898.114.050,00	(8.583.920,00)	99,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	15.000.000,00	14.950.000,00	(50.000,00)	99,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.03.0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	15.000.000,00	14.950.000,00	(50.000,00)	99,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.03.0002	5.2	BELANJA MODAL	15.000.000,00	14.950.000,00	(50.000,00)	99,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.03.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	14.950.000,00	(50.000,00)	99,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	39.188.000,00	34.378.605,00	(4.809.395,00)	87,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.04.0002		Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	39.188.000,00	34.378.605,00	(4.809.395,00)	87,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	39.188.000,00	34.378.605,00	(4.809.395,00)	87,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.188.000,00	34.378.605,00	(4.809.395,00)	87,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	5.349.084.296,00	5.244.753.049,00	(104.331.247,00)	98,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.03.1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	5.175.135.154,00	5.075.006.807,00	(100.128.347,00)	98,06	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.03.1.01.0001		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	5.175.135.154,00	5.075.006.807,00	(100.128.347,00)	98,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.03.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.175.135.154,00	5.075.006.807,00	(100.128.347,00)	98,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.03.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.175.135.154,00	5.075.006.807,00	(100.128.347,00)	98,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.03.1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	173.949.142,00	169.746.242,00	(4.202.900,00)	97,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.03.1.02.0001		Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	173.949.142,00	169.746.242,00	(4.202.900,00)	97,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.03.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	173.949.142,00	169.746.242,00	(4.202.900,00)	97,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.03.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	173.949.142,00	169.746.242,00	(4.202.900,00)	97,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	81.254.129.198,00	79.374.469.823,00	(1.879.659.375,00)	97,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	246.559.948,00	232.210.686,00	(14.349.262,00)	94,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	216.822.448,00	205.133.186,00	(11.689.262,00)	94,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	216.822.448,00	205.133.186,00	(11.689.262,00)	94,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	216.822.448,00	205.133.186,00	(11.689.262,00)	94,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29.737.500,00	27.077.500,00	(2.660.000,00)	91,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	29.737.500,00	27.077.500,00	(2.660.000,00)	91,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.737.500,00	27.077.500,00	(2.660.000,00)	91,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	48.357.032.381,00	48.075.850.981,00	(281.181.400,00)	99,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	47.585.005.081,00	47.322.346.981,00	(262.658.100,00)	99,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	47.585.005.081,00	47.322.346.981,00	(262.658.100,00)	99,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	47.585.005.081,00	47.322.346.981,00	(262.658.100,00)	99,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	703.704.000,00	685.388.000,00	(18.316.000,00)	97,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	703.704.000,00	685.388.000,00	(18.316.000,00)	97,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	703.704.000,00	685.388.000,00	(18.316.000,00)	97,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	68.323.300,00	68.116.000,00	(207.300,00)	99,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	68.323.300,00	68.116.000,00	(207.300,00)	99,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.323.300,00	68.116.000,00	(207.300,00)	99,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.000.000,00	24.306.000,00	(694.000,00)	97,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.05.0004		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	25.000.000,00	24.306.000,00	(694.000,00)	97,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.05.0004	5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	24.306.000,00	(694.000,00)	97,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.05.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.306.000,00	(694.000,00)	97,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	646.229.700,00	567.473.632,00	(78.756.068,00)	87,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.000.000,00	98.269.000,00	(1.731.000,00)	98,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	98.269.000,00	(1.731.000,00)	98,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	98.269.000,00	(1.731.000,00)	98,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.000.000,00	70.022.000,00	(4.978.000,00)	93,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	70.022.000,00	(4.978.000,00)	93,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	70.022.000,00	(4.978.000,00)	93,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	261.282.300,00	192.223.000,00	(69.059.300,00)	73,56	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	261.282.300,00	192.223.000,00	(69.059.300,00)	73,56	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	261.282.300,00	192.223.000,00	(69.059.300,00)	73,56	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	60.000.000,00	58.359.000,00	(1.641.000,00)	97,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	58.359.000,00	(1.641.000,00)	97,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	58.359.000,00	(1.641.000,00)	97,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	149.947.400,00	148.600.632,00	(1.346.768,00)	99,10	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	149.947.400,00	148.600.632,00	(1.346.768,00)	99,10	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.947.400,00	148.600.632,00	(1.346.768,00)	99,10	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.303.833.494,00	1.271.743.614,00	(32.089.880,00)	97,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.303.833.494,00	1.271.743.614,00	(32.089.880,00)	97,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.303.833.494,00	1.271.743.614,00	(32.089.880,00)	97,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.303.833.494,00	1.271.743.614,00	(32.089.880,00)	97,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.860.880.176,00	4.536.902.659,00	(323.977.517,00)	93,33	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.731.200,00	9.609.700,00	(3.121.500,00)	75,48	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.731.200,00	9.609.700,00	(3.121.500,00)	75,48	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.731.200,00	9.609.700,00	(3.121.500,00)	75,48	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	177.941.000,00	176.938.900,00	(1.002.100,00)	99,43	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	177.941.000,00	176.938.900,00	(1.002.100,00)	99,43	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.941.000,00	176.938.900,00	(1.002.100,00)	99,43	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0003		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	117.547.600,00	98.181.759,00	(19.365.841,00)	83,52	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0003	5.1	BELANJA OPERASI	64.432.300,00	45.106.759,00	(19.325.541,00)	70,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.432.300,00	45.106.759,00	(19.325.541,00)	70,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0003	5.2	BELANJA MODAL	53.115.300,00	53.075.000,00	(40.300,00)	99,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.115.300,00	53.075.000,00	(40.300,00)	99,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0005		Pemeliharaan Mebel	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0005	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	669.548.500,00	600.565.000,00	(68.983.500,00)	89,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	580.798.500,00	511.815.000,00	(68.983.500,00)	88,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	580.798.500,00	511.815.000,00	(68.983.500,00)	88,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0006	5.2	BELANJA MODAL	88.750.000,00	88.750.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	88.750.000,00	88.750.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0007		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.553.907.300,00	1.387.097.300,00	(166.810.000,00)	89,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0007	5.1	BELANJA OPERASI	1.245.907.300,00	1.140.220.300,00	(105.687.000,00)	91,51	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.245.907.300,00	1.140.220.300,00	(105.687.000,00)	91,51	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0007	5.2	BELANJA MODAL	308.000.000,00	246.877.000,00	(61.123.000,00)	80,15	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	308.000.000,00	246.877.000,00	(61.123.000,00)	80,15	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.979.204.576,00	1.964.720.000,00	(14.484.576,00)	99,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	1.979.204.576,00	1.964.720.000,00	(14.484.576,00)	99,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.979.204.576,00	1.964.720.000,00	(14.484.576,00)	99,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	300.000.000,00	299.790.000,00	(210.000,00)	99,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000,00	299.790.000,00	(210.000,00)	99,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	299.790.000,00	(210.000,00)	99,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	25.814.593.499,00	24.665.982.251,00	(1.148.611.248,00)	95,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.10.0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	25.814.593.499,00	24.665.982.251,00	(1.148.611.248,00)	95,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.10.0001	5.1	BELANJA OPERASI	24.358.893.499,00	23.395.806.357,00	(963.087.142,00)	96,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.10.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	5.000.000.000,00	4.874.424.726,00	(125.575.274,00)	97,48	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.10.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.358.893.499,00	18.521.381.631,00	(837.511.868,00)	95,67	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.10.0001	5.2	BELANJA MODAL	1.455.700.000,00	1.270.175.894,00	(185.524.106,00)	87,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.10.0001	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.455.700.000,00	1.270.175.894,00	(185.524.106,00)	87,25	



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**

Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**

Organisasi : **Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.03.2.10.0.00.03.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	2.800.000.000,00	1.090.436.500,00	(1.709.563.500,00)	38,94	
	1.03.2.10.0.00.03.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.800.000.000,00	1.090.436.500,00	(1.709.563.500,00)	38,94	
	1.03.2.10.0.00.03.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	2.800.000.000,00	1.090.436.500,00	(1.709.563.500,00)	38,94	
2.10	1.03.2.10.0.00.03.0000		5	BELANJA DAERAH	1.048.980.723,00	1.042.951.731,00	(6.028.992,00)	99,42	
2.10	1.03.2.10.0.00.03.0000	2.10.03		PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	1.048.980.723,00	1.042.951.731,00	(6.028.992,00)	99,42	
2.10	1.03.2.10.0.00.03.0000	2.10.03.1.01		Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	1.048.980.723,00	1.042.951.731,00	(6.028.992,00)	99,42	
2.10	1.03.2.10.0.00.03.0000	2.10.03.1.01.0001		Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	1.048.980.723,00	1.042.951.731,00	(6.028.992,00)	99,42	
2.10	1.03.2.10.0.00.03.0000	2.10.03.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	127.880.723,00	122.851.731,00	(5.028.992,00)	96,06	
2.10	1.03.2.10.0.00.03.0000	2.10.03.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.880.723,00	122.851.731,00	(5.028.992,00)	96,06	
2.10	1.03.2.10.0.00.03.0000	2.10.03.1.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	921.100.000,00	920.100.000,00	(1.000.000,00)	99,89	
2.10	1.03.2.10.0.00.03.0000	2.10.03.1.01.0001	5.2.01	Belanja Modal Tanah	921.100.000,00	920.100.000,00	(1.000.000,00)	99,89	



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
Organisasi : **Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.03.2.10.0.00.03.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	2.800.000.000,00	1.090.436.500,00	(1.709.563.500,00)	38,94	
	1.03.2.10.0.00.03.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.800.000.000,00	1.090.436.500,00	(1.709.563.500,00)	38,94	
	1.03.2.10.0.00.03.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	2.800.000.000,00	1.090.436.500,00	(1.709.563.500,00)	38,94	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000		5	BELANJA DAERAH	172.595.960.648,00	143.743.011.263,61	(28.852.949.384,39)	83,28	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	7.184.972.509,00	2.221.415.631,00	(4.963.556.878,00)	30,91	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.02.1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	7.184.972.509,00	2.221.415.631,00	(4.963.556.878,00)	30,91	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.02.1.01.0009		Pembangunan Tanggul Sungai	1.280.481.300,00	1.191.561.690,00	(88.919.610,00)	93,05	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.02.1.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	262.464.000,00	173.626.690,00	(88.837.310,00)	66,15	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.02.1.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	262.464.000,00	173.626.690,00	(88.837.310,00)	66,15	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.02.1.01.0009	5.2	BELANJA MODAL	1.018.017.300,00	1.017.935.000,00	(82.300,00)	99,99	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.02.1.01.0009	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.018.017.300,00	1.017.935.000,00	(82.300,00)	99,99	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.02.1.01.0075		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	271.133.994,00	257.638.633,00	(13.495.361,00)	95,02	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.02.1.01.0075	5.1	BELANJA OPERASI	271.133.994,00	257.638.633,00	(13.495.361,00)	95,02	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.02.1.01.0075	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	271.133.994,00	257.638.633,00	(13.495.361,00)	95,02	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.02.1.01.0079		Normalisasi/Restorasi Sungai	3.878.656.000,00	73.196.572,00	(3.805.459.428,00)	1,88	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.02.1.01.0079	5.1	BELANJA OPERASI	3.878.656.000,00	73.196.572,00	(3.805.459.428,00)	1,88	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.02.1.01.0079	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.878.656.000,00	73.196.572,00	(3.805.459.428,00)	1,88	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.02.1.01.0096		Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	1.183.008.970,00	319.273.591,00	(863.735.379,00)	26,98	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.02.1.01.0096	5.1	BELANJA OPERASI	295.137.670,00	187.331.221,00	(107.806.449,00)	63,47	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.02.1.01.0096	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	295.137.670,00	187.331.221,00	(107.806.449,00)	63,47	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.02.1.01.0096	5.2	BELANJA MODAL	887.871.300,00	131.942.370,00	(755.928.930,00)	14,86	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.02.1.01.0096	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	887.871.300,00	131.942.370,00	(755.928.930,00)	14,86	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.02.1.01.0118		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	210.854.000,00	18.906.900,00	(191.947.100,00)	8,96	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.02.1.01.0118	5.1	BELANJA OPERASI	40.854.000,00	18.906.900,00	(21.947.100,00)	46,27	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.02.1.01.0118	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.854.000,00	18.906.900,00	(21.947.100,00)	46,27	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.02.1.01.0118	5.2	BELANJA MODAL	170.000.000,00	0,00	(170.000.000,00)	0,00	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.02.1.01.0118	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	170.000.000,00	0,00	(170.000.000,00)	0,00	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.02.1.01.0122	5.1	BELANJA OPERASI	360.838.245,00	360.838.245,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.02.1.01.0122	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	360.838.245,00	360.838.245,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	2.418.507.304,00	2.284.231.265,37	(134.276.038,63)	94,44	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.03.1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	2.418.507.304,00	2.284.231.265,37	(134.276.038,63)	94,44	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.03.1.01.0015		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.867.784.000,00	1.743.385.325,00	(124.398.675,00)	93,33	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.03.1.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	1.783.071.900,00	1.743.385.325,00	(39.686.575,00)	97,77	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.03.1.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.783.071.900,00	1.743.385.325,00	(39.686.575,00)	97,77	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.03.1.01.0015	5.2	BELANJA MODAL	84.712.100,00	0,00	(84.712.100,00)	0,00	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.03.1.01.0015	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	84.712.100,00	0,00	(84.712.100,00)	0,00	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.03.1.01.0018		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	550.723.304,00	540.845.940,37	(9.877.363,63)	98,20	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.03.1.01.0018	5.1	BELANJA OPERASI	190.723.304,00	180.888.411,00	(9.834.893,00)	94,84	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.03.1.01.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	190.723.304,00	180.888.411,00	(9.834.893,00)	94,84	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.03.1.01.0018	5.2	BELANJA MODAL	360.000.000,00	359.957.529,37	(42.470,63)	99,98	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.03.1.01.0018	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	360.000.000,00	359.957.529,37	(42.470,63)	99,98	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	910.903.605,00	786.893.146,02	(124.010.458,98)	86,38	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.05.1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	910.903.605,00	786.893.146,02	(124.010.458,98)	86,38	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.05.1.01.0013		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	106.939.605,00	106.939.604,02	(0,98)	99,99	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.05.1.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	106.939.605,00	106.939.604,02	(0,98)	99,99	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.05.1.01.0013	5.1.05	Belanja Hibah	106.939.605,00	106.939.604,02	(0,98)	99,99	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.05.1.01.0014		Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	223.666.000,00	154.909.088,00	(68.756.912,00)	69,25	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.05.1.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	223.666.000,00	154.909.088,00	(68.756.912,00)	69,25	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.05.1.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	223.666.000,00	154.909.088,00	(68.756.912,00)	69,25	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.05.1.01.0015		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	580.298.000,00	525.044.454,00	(55.253.546,00)	90,47	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.05.1.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	580.298.000,00	525.044.454,00	(55.253.546,00)	90,47	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.05.1.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	580.298.000,00	525.044.454,00	(55.253.546,00)	90,47	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.06		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	18.820.000,00	7.714.000,00	(11.106.000,00)	40,98	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.06.1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	18.820.000,00	7.714.000,00	(11.106.000,00)	40,98	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.06.1.01.0011		Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	18.820.000,00	7.714.000,00	(11.106.000,00)	40,98	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.06.1.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	18.820.000,00	7.714.000,00	(11.106.000,00)	40,98	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.06.1.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.820.000,00	7.714.000,00	(11.106.000,00)	40,98	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	61.155.945.399,00	52.250.743.268,00	(8.905.202.131,00)	85,43	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.08.1.01		Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	61.155.945.399,00	52.250.743.268,00	(8.905.202.131,00)	85,43	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.08.1.01.0013		Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	40.170.850.323,00	31.281.460.544,00	(8.889.389.779,00)	77,87	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.08.1.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	11.632.094.323,00	10.042.704.544,00	(1.589.389.779,00)	86,33	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.08.1.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.121.318.523,00	1.812.703.344,00	(1.308.615.179,00)	58,07	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.08.1.01.0013	5.1.05	Belanja Hibah	8.510.775.800,00	8.230.001.200,00	(280.774.600,00)	96,70	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.08.1.01.0013	5.2	BELANJA MODAL	28.538.756.000,00	21.238.756.000,00	(7.300.000.000,00)	74,42	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.08.1.01.0013	5.2.01	Belanja Modal Tanah	7.100.000.000,00	0,00	(7.100.000.000,00)	0,00	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.08.1.01.0013	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21.438.756.000,00	21.238.756.000,00	(200.000.000,00)	99,06	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.08.1.01.0016		Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	19.468.924.852,00	19.453.628.520,00	(15.296.332,00)	99,92	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.08.1.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	19.468.924.852,00	19.453.628.520,00	(15.296.332,00)	99,92	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.08.1.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.629.430.252,00	16.614.133.920,00	(15.296.332,00)	99,90	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.08.1.01.0016	5.1.05	Belanja Hibah	2.839.494.600,00	2.839.494.600,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.08.1.01.0019		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	1.516.170.224,00	1.515.654.204,00	(516.020,00)	99,96	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.08.1.01.0019	5.1	BELANJA OPERASI	1.516.170.224,00	1.515.654.204,00	(516.020,00)	99,96	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.08.1.01.0019	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.516.170.224,00	1.515.654.204,00	(516.020,00)	99,96	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.09		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	13.516.739.516,00	7.198.630.257,22	(6.318.109.258,78)	53,25	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.09.1.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	13.516.739.516,00	7.198.630.257,22	(6.318.109.258,78)	53,25	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.09.1.01.0008		Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	13.516.739.516,00	7.198.630.257,22	(6.318.109.258,78)	53,25	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.09.1.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	10.564.632.416,00	4.246.523.257,22	(6.318.109.158,78)	40,19	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.09.1.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.987.106.179,00	3.396.751.796,00	(1.590.354.383,00)	68,11	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.09.1.01.0008	5.1.05	Belanja Hibah	5.577.526.237,00	849.771.461,22	(4.727.754.775,78)	15,23	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.09.1.01.0008	5.2	BELANJA MODAL	2.952.107.100,00	2.952.107.000,00	(100,00)	99,99	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.09.1.01.0008	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.952.107.100,00	2.952.107.000,00	(100,00)	99,99	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	56.014.659.149,00	48.539.486.540,00	(7.475.172.609,00)	86,65	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	56.014.659.149,00	48.539.486.540,00	(7.475.172.609,00)	86,65	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0024		Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	1.682.312.000,00	1.261.541.320,00	(420.770.680,00)	74,98	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0024	5.1	BELANJA OPERASI	1.682.312.000,00	1.261.541.320,00	(420.770.680,00)	74,98	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0024	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.682.312.000,00	1.261.541.320,00	(420.770.680,00)	74,98	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0026		Pemeliharaan Rutin Jembatan	2.080.832.390,00	1.981.743.590,00	(99.088.800,00)	95,23	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0026	5.1	BELANJA OPERASI	2.080.832.390,00	1.981.743.590,00	(99.088.800,00)	95,23	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.080.832.390,00	1.981.743.590,00	(99.088.800,00)	95,23	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0031		Rekonstruksi Jalan	32.824.680.520,00	32.688.181.414,00	(136.499.106,00)	99,58	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0031	5.1	BELANJA OPERASI	833.266.520,00	827.806.014,00	(5.460.506,00)	99,34	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0031	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	333.266.520,00	332.708.014,00	(558.506,00)	99,83	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0031	5.1.05	Belanja Hibah	500.000.000,00	495.098.000,00	(4.902.000,00)	99,01	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0031	5.2	BELANJA MODAL	31.991.414.000,00	31.860.375.400,00	(131.038.600,00)	99,59	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0031	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	31.991.414.000,00	31.860.375.400,00	(131.038.600,00)	99,59	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0032	5.2	BELANJA MODAL	280.667.750,00	280.667.750,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0032	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	280.667.750,00	280.667.750,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0033		Pemeliharaan Rutin Jalan	7.547.596.137,00	7.278.033.745,00	(269.562.392,00)	96,42	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0033	5.1	BELANJA OPERASI	7.547.596.137,00	7.278.033.745,00	(269.562.392,00)	96,42	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.547.596.137,00	7.278.033.745,00	(269.562.392,00)	96,42	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0041		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.844.013.071,00	1.790.378.093,00	(53.634.978,00)	97,09	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0041	5.1	BELANJA OPERASI	1.844.013.071,00	1.790.378.093,00	(53.634.978,00)	97,09	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.844.013.071,00	1.790.378.093,00	(53.634.978,00)	97,09	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0042		Pembangunan Jalan	8.254.557.281,00	2.959.442.093,00	(5.295.115.188,00)	35,85	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0042	5.1	BELANJA OPERASI	8.254.557.281,00	2.959.442.093,00	(5.295.115.188,00)	35,85	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0042	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.557.493.281,00	2.750.322.893,00	(4.807.170.388,00)	36,39	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0042	5.1.05	Belanja Hibah	697.064.000,00	209.119.200,00	(487.944.800,00)	30,00	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0043		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1.500.000.000,00	299.498.535,00	(1.200.501.465,00)	19,96	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0043	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000.000,00	299.498.535,00	(1.200.501.465,00)	19,96	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0043	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000.000,00	299.498.535,00	(1.200.501.465,00)	19,96	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	638.656.000,00	578.005.573,00	(60.650.427,00)	90,50	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.11.1.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	368.979.027,00	316.676.388,00	(52.302.639,00)	85,82	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.11.1.01.0011		Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	168.578.175,00	155.137.766,00	(13.440.409,00)	92,02	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.11.1.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	168.578.175,00	155.137.766,00	(13.440.409,00)	92,02	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.11.1.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	168.578.175,00	155.137.766,00	(13.440.409,00)	92,02	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.11.1.01.0012		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	60.118.433,00	48.564.322,00	(11.554.111,00)	80,78	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.11.1.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	60.118.433,00	48.564.322,00	(11.554.111,00)	80,78	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.11.1.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.118.433,00	48.564.322,00	(11.554.111,00)	80,78	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.11.1.01.0014		Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	140.282.419,00	112.974.300,00	(27.308.119,00)	80,53	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.11.1.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	140.282.419,00	112.974.300,00	(27.308.119,00)	80,53	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.11.1.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.282.419,00	112.974.300,00	(27.308.119,00)	80,53	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.11.1.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	149.953.249,00	142.270.947,00	(7.682.302,00)	94,87	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.11.1.02.0006		Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	74.827.124,00	68.963.318,00	(5.863.806,00)	92,16	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.11.1.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	74.827.124,00	68.963.318,00	(5.863.806,00)	92,16	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.11.1.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.827.124,00	68.963.318,00	(5.863.806,00)	92,16	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.11.1.02.0008		Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	75.126.125,00	73.307.629,00	(1.818.496,00)	97,57	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.11.1.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	75.126.125,00	73.307.629,00	(1.818.496,00)	97,57	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.11.1.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.126.125,00	73.307.629,00	(1.818.496,00)	97,57	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.11.1.03		Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	119.723.724,00	119.058.238,00	(665.486,00)	99,44	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.11.1.03.0006		Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	96.967.508,00	96.834.238,00	(133.270,00)	99,86	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.11.1.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	96.967.508,00	96.834.238,00	(133.270,00)	99,86	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.11.1.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.967.508,00	96.834.238,00	(133.270,00)	99,86	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.11.1.03.0008		Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi	22.756.216,00	22.224.000,00	(532.216,00)	97,66	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.11.1.03.0008	5.1	BELANJA OPERASI	22.756.216,00	22.224.000,00	(532.216,00)	97,66	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.11.1.03.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.756.216,00	22.224.000,00	(532.216,00)	97,66	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	939.455.510,00	866.589.272,00	(72.866.238,00)	92,24	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.12.1.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	417.449.589,00	377.588.658,00	(39.860.931,00)	90,45	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.12.1.01.0007		Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi	417.449.589,00	377.588.658,00	(39.860.931,00)	90,45	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.12.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	417.449.589,00	377.588.658,00	(39.860.931,00)	90,45	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.12.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	417.449.589,00	377.588.658,00	(39.860.931,00)	90,45	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.12.1.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	203.376.000,00	191.090.228,00	(12.285.772,00)	93,95	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.12.1.02.0009		Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota	203.376.000,00	191.090.228,00	(12.285.772,00)	93,95	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.12.1.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	203.376.000,00	191.090.228,00	(12.285.772,00)	93,95	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.12.1.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	203.376.000,00	191.090.228,00	(12.285.772,00)	93,95	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.12.1.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	181.543.221,00	161.023.686,00	(20.519.535,00)	88,69	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.12.1.03.0007		Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	181.543.221,00	161.023.686,00	(20.519.535,00)	88,69	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.12.1.03.0007	5.1	BELANJA OPERASI	181.543.221,00	161.023.686,00	(20.519.535,00)	88,69	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.12.1.03.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	181.543.221,00	161.023.686,00	(20.519.535,00)	88,69	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.12.1.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	137.086.700,00	136.886.700,00	(200.000,00)	99,85	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.12.1.04.0004		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	68.099.137,00	67.899.137,00	(200.000,00)	99,70	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.12.1.04.0004	5.1	BELANJA OPERASI	68.099.137,00	67.899.137,00	(200.000,00)	99,70	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.12.1.04.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.099.137,00	67.899.137,00	(200.000,00)	99,70	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.12.1.04.0007	5.1	BELANJA OPERASI	68.987.563,00	68.987.563,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.12.1.04.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.987.563,00	68.987.563,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	29.797.301.656,00	29.009.302.311,00	(787.999.345,00)	97,35	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	539.929.768,00	517.198.977,00	(22.730.791,00)	95,79	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	90.757.700,00	77.201.300,00	(13.556.400,00)	85,06	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	90.757.700,00	77.201.300,00	(13.556.400,00)	85,06	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.757.700,00	77.201.300,00	(13.556.400,00)	85,06	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	365.044.128,00	362.836.737,00	(2.207.391,00)	99,39	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	365.044.128,00	362.836.737,00	(2.207.391,00)	99,39	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	365.044.128,00	362.836.737,00	(2.207.391,00)	99,39	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84.127.940,00	77.160.940,00	(6.967.000,00)	91,71	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	84.127.940,00	77.160.940,00	(6.967.000,00)	91,71	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.127.940,00	77.160.940,00	(6.967.000,00)	91,71	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.711.217.003,00	19.573.063.151,00	(138.153.852,00)	99,29	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.201.595.063,00	18.096.884.211,00	(104.710.852,00)	99,42	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	18.201.595.063,00	18.096.884.211,00	(104.710.852,00)	99,42	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	18.201.595.063,00	18.096.884.211,00	(104.710.852,00)	99,42	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.424.634.000,00	1.401.348.000,00	(23.286.000,00)	98,36	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.424.634.000,00	1.401.348.000,00	(23.286.000,00)	98,36	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	1.424.568.000,00	1.401.348.000,00	(23.220.000,00)	98,37	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.000,00	0,00	(66.000,00)	0,00	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	84.987.940,00	74.830.940,00	(10.157.000,00)	88,04	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	84.987.940,00	74.830.940,00	(10.157.000,00)	88,04	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.987.940,00	74.830.940,00	(10.157.000,00)	88,04	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	74.854.000,00	70.406.450,00	(4.447.550,00)	94,05	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.03.0003		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	74.854.000,00	70.406.450,00	(4.447.550,00)	94,05	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	74.854.000,00	70.406.450,00	(4.447.550,00)	94,05	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.854.000,00	70.406.450,00	(4.447.550,00)	94,05	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	160.907.500,00	157.699.000,00	(3.208.500,00)	98,00	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	160.907.500,00	157.699.000,00	(3.208.500,00)	98,00	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	160.907.500,00	157.699.000,00	(3.208.500,00)	98,00	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.907.500,00	157.699.000,00	(3.208.500,00)	98,00	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.476.045.060,00	2.249.855.065,00	(226.189.995,00)	90,86	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	45.767.875,00	35.738.000,00	(10.029.875,00)	78,08	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	45.767.875,00	35.738.000,00	(10.029.875,00)	78,08	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.767.875,00	35.738.000,00	(10.029.875,00)	78,08	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	398.057.155,00	305.535.200,00	(92.521.955,00)	76,75	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	160.317.302,00	148.285.200,00	(12.032.102,00)	92,49	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.317.302,00	148.285.200,00	(12.032.102,00)	92,49	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	237.739.853,00	157.250.000,00	(80.489.853,00)	66,14	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	237.739.853,00	157.250.000,00	(80.489.853,00)	66,14	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	160.988.790,00	150.534.098,00	(10.454.692,00)	93,50	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	160.988.790,00	150.534.098,00	(10.454.692,00)	93,50	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.988.790,00	150.534.098,00	(10.454.692,00)	93,50	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	312.209.710,00	273.262.050,00	(38.947.660,00)	87,52	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	312.209.710,00	273.262.050,00	(38.947.660,00)	87,52	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	312.209.710,00	273.262.050,00	(38.947.660,00)	87,52	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	256.659.431,00	247.273.000,00	(9.386.431,00)	96,34	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	256.659.431,00	247.273.000,00	(9.386.431,00)	96,34	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	256.659.431,00	247.273.000,00	(9.386.431,00)	96,34	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	26.603.400,00	11.620.000,00	(14.983.400,00)	43,67	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	26.603.400,00	11.620.000,00	(14.983.400,00)	43,67	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.603.400,00	11.620.000,00	(14.983.400,00)	43,67	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0007		Penyediaan Bahan/Material	29.010.165,00	28.515.000,00	(495.165,00)	98,29	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	29.010.165,00	28.515.000,00	(495.165,00)	98,29	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.010.165,00	28.515.000,00	(495.165,00)	98,29	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	265.028.000,00	226.579.700,00	(38.448.300,00)	85,49	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	265.028.000,00	226.579.700,00	(38.448.300,00)	85,49	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	265.028.000,00	226.579.700,00	(38.448.300,00)	85,49	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	981.720.534,00	970.798.017,00	(10.922.517,00)	98,88	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	981.720.534,00	970.798.017,00	(10.922.517,00)	98,88	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	981.720.534,00	970.798.017,00	(10.922.517,00)	98,88	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	854.062.866,00	852.960.971,00	(1.101.895,00)	99,87	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	598.912.866,00	598.700.000,00	(212.866,00)	99,96	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.07.0002	5.1	BELANJA OPERASI	133.866,00	0,00	(133.866,00)	0,00	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.07.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.866,00	0,00	(133.866,00)	0,00	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.07.0002	5.2	BELANJA MODAL	598.779.000,00	598.700.000,00	(79.000,00)	99,98	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.07.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	598.779.000,00	598.700.000,00	(79.000,00)	99,98	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.07.0009		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	55.150.000,00	55.000.000,00	(150.000,00)	99,72	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.07.0009	5.1	BELANJA OPERASI	55.150.000,00	55.000.000,00	(150.000,00)	99,72	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.07.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.150.000,00	55.000.000,00	(150.000,00)	99,72	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000,00	199.260.971,00	(739.029,00)	99,63	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.07.0010	5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	199.260.971,00	(739.029,00)	99,63	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.07.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	199.260.971,00	(739.029,00)	99,63	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.102.044.717,00	4.880.054.997,00	(221.989.720,00)	95,64	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26.740.000,00	12.173.000,00	(14.567.000,00)	45,52	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	26.740.000,00	12.173.000,00	(14.567.000,00)	45,52	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.740.000,00	12.173.000,00	(14.567.000,00)	45,52	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	864.485.713,00	750.083.429,00	(114.402.284,00)	86,76	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	864.485.713,00	750.083.429,00	(114.402.284,00)	86,76	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	864.485.713,00	750.083.429,00	(114.402.284,00)	86,76	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63.082.000,00	55.887.600,00	(7.194.400,00)	88,59	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	63.082.000,00	55.887.600,00	(7.194.400,00)	88,59	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.082.000,00	55.887.600,00	(7.194.400,00)	88,59	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.147.737.004,00	4.061.910.968,00	(85.826.036,00)	97,93	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	4.147.737.004,00	4.061.910.968,00	(85.826.036,00)	97,93	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.147.737.004,00	4.061.910.968,00	(85.826.036,00)	97,93	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	878.240.742,00	708.063.700,00	(170.177.042,00)	80,62	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	451.394.242,00	416.659.600,00	(34.734.642,00)	92,30	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	451.394.242,00	416.659.600,00	(34.734.642,00)	92,30	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	451.394.242,00	416.659.600,00	(34.734.642,00)	92,30	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	194.161.520,00	186.469.100,00	(7.692.420,00)	96,03	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	194.161.520,00	186.469.100,00	(7.692.420,00)	96,03	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	194.161.520,00	186.469.100,00	(7.692.420,00)	96,03	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.09.0007		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	71.234.965,00	71.110.000,00	(124.965,00)	99,82	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.09.0007	5.1	BELANJA OPERASI	71.234.965,00	71.110.000,00	(124.965,00)	99,82	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.09.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.234.965,00	71.110.000,00	(124.965,00)	99,82	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.09.0011		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	161.450.015,00	33.825.000,00	(127.625.015,00)	20,95	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	161.450.015,00	33.825.000,00	(127.625.015,00)	20,95	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.450.015,00	33.825.000,00	(127.625.015,00)	20,95	



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
Organisasi : **Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000		5	BELANJA DAERAH	254.987.625.329,00	155.084.552.494,00	(99.903.072.835,00)	60,82	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	346.357.720,00	345.904.890,00	(452.830,00)	99,86	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.02.1.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	346.357.720,00	345.904.890,00	(452.830,00)	99,86	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.02.1.01.0002		Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	133.390.560,00	133.126.130,00	(264.430,00)	99,80	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.02.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	133.390.560,00	133.126.130,00	(264.430,00)	99,80	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.02.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.390.560,00	133.126.130,00	(264.430,00)	99,80	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.02.1.01.0003		Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	110.126.400,00	109.938.000,00	(188.400,00)	99,82	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.02.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	110.126.400,00	109.938.000,00	(188.400,00)	99,82	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.02.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.126.400,00	109.938.000,00	(188.400,00)	99,82	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.02.1.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	102.840.760,00	102.840.760,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.02.1.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.840.760,00	102.840.760,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	3.282.027.640,00	1.203.448.686,00	(2.078.578.954,00)	36,66	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.03.1.01		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	254.332.640,00	225.133.786,00	(29.198.854,00)	88,51	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.03.1.01.0017		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	60.212.640,00	47.141.400,00	(13.071.240,00)	78,29	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.03.1.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	60.212.640,00	47.141.400,00	(13.071.240,00)	78,29	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.03.1.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.212.640,00	47.141.400,00	(13.071.240,00)	78,29	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.03.1.01.0018		Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	194.120.000,00	177.992.386,00	(16.127.614,00)	91,69	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.03.1.01.0018	5.1	BELANJA OPERASI	194.120.000,00	177.992.386,00	(16.127.614,00)	91,69	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.03.1.01.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	194.120.000,00	177.992.386,00	(16.127.614,00)	91,69	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.03.1.02		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	3.027.695.000,00	978.314.900,00	(2.049.380.100,00)	32,31	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.03.1.02.0003		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	2.721.695.000,00	672.347.900,00	(2.049.347.100,00)	24,70	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.03.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.721.695.000,00	672.347.900,00	(2.049.347.100,00)	24,70	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.03.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.721.695.000,00	672.347.900,00	(2.049.347.100,00)	24,70	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.03.1.02.0014		Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	306.000.000,00	305.967.000,00	(33.000,00)	99,98	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.03.1.02.0014	5.1	BELANJA OPERASI	306.000.000,00	305.967.000,00	(33.000,00)	99,98	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.03.1.02.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	306.000.000,00	305.967.000,00	(33.000,00)	99,98	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.05		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	232.354.534.274,31	137.703.532.006,00	(94.651.002.268,31)	59,26	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.05.1.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	232.354.534.274,31	137.703.532.006,00	(94.651.002.268,31)	59,26	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.05.1.01.0001		Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	580.660.000,00	0,00	(580.660.000,00)	0,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.05.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	580.660.000,00	0,00	(580.660.000,00)	0,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.05.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	580.660.000,00	0,00	(580.660.000,00)	0,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.05.1.01.0002		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	230.983.676.234,31	136.919.598.917,00	(94.064.077.317,31)	59,27	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.05.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	230.118.596.427,31	136.090.811.917,00	(94.027.784.510,31)	59,13	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.05.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	230.118.596.427,31	136.090.811.917,00	(94.027.784.510,31)	59,13	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.05.1.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	865.079.807,00	828.787.000,00	(36.292.807,00)	95,80	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.05.1.01.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	865.079.807,00	828.787.000,00	(36.292.807,00)	95,80	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.05.1.01.0003		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	790.198.040,00	783.933.089,00	(6.264.951,00)	99,20	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.05.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	790.198.040,00	783.933.089,00	(6.264.951,00)	99,20	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.05.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	790.198.040,00	783.933.089,00	(6.264.951,00)	99,20	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.004.705.694,69	15.831.666.912,00	(3.173.038.782,69)	83,30	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	809.358.960,00	782.171.951,00	(27.187.009,00)	96,64	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	272.854.960,00	271.093.651,00	(1.761.309,00)	99,35	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	272.854.960,00	271.093.651,00	(1.761.309,00)	99,35	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	272.854.960,00	271.093.651,00	(1.761.309,00)	99,35	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	536.504.000,00	511.078.300,00	(25.425.700,00)	95,26	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	536.504.000,00	511.078.300,00	(25.425.700,00)	95,26	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	536.504.000,00	511.078.300,00	(25.425.700,00)	95,26	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.156.775.951,00	8.327.806.194,00	(828.969.757,00)	90,94	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.253.000.472,00	7.550.764.194,00	(702.236.278,00)	91,49	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.253.000.472,00	7.550.764.194,00	(702.236.278,00)	91,49	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	8.253.000.472,00	7.550.764.194,00	(702.236.278,00)	91,49	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	903.775.479,00	777.042.000,00	(126.733.479,00)	85,97	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	903.775.479,00	777.042.000,00	(126.733.479,00)	85,97	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	903.176.000,00	777.042.000,00	(126.134.000,00)	86,03	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	599.479,00	0,00	(599.479,00)	0,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	330.658.192,00	330.025.345,00	(632.847,00)	99,80	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.03.0002		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	133.014.192,00	132.477.545,00	(536.647,00)	99,59	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	133.014.192,00	132.477.545,00	(536.647,00)	99,59	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.014.192,00	132.477.545,00	(536.647,00)	99,59	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	197.644.000,00	197.547.800,00	(96.200,00)	99,95	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	197.644.000,00	197.547.800,00	(96.200,00)	99,95	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	197.644.000,00	197.547.800,00	(96.200,00)	99,95	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	596.902.232,00	592.692.536,00	(4.209.696,00)	99,29	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	267.707.000,00	267.320.000,00	(387.000,00)	99,85	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	267.707.000,00	267.320.000,00	(387.000,00)	99,85	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	267.707.000,00	267.320.000,00	(387.000,00)	99,85	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.05.0003		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	299.195.232,00	296.372.536,00	(2.822.696,00)	99,05	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	299.195.232,00	296.372.536,00	(2.822.696,00)	99,05	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	299.195.232,00	296.372.536,00	(2.822.696,00)	99,05	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000,00	29.000.000,00	(1.000.000,00)	96,66	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	29.000.000,00	(1.000.000,00)	96,66	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.000.000,00	(1.000.000,00)	96,66	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.177.209.461,69	2.123.888.948,00	(53.320.513,69)	97,55	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	96.000.000,00	94.900.000,00	(1.100.000,00)	98,85	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	96.000.000,00	94.900.000,00	(1.100.000,00)	98,85	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.000.000,00	94.900.000,00	(1.100.000,00)	98,85	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	42.097.400,00	41.238.400,00	(859.000,00)	97,95	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	42.097.400,00	41.238.400,00	(859.000,00)	97,95	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.097.400,00	41.238.400,00	(859.000,00)	97,95	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	342.466.700,00	324.103.300,00	(18.363.400,00)	94,63	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	342.466.700,00	324.103.300,00	(18.363.400,00)	94,63	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	342.466.700,00	324.103.300,00	(18.363.400,00)	94,63	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	112.772.000,00	100.542.000,00	(12.230.000,00)	89,15	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	112.772.000,00	100.542.000,00	(12.230.000,00)	89,15	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.772.000,00	100.542.000,00	(12.230.000,00)	89,15	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	94.140.000,00	87.900.000,00	(6.240.000,00)	93,37	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	94.140.000,00	87.900.000,00	(6.240.000,00)	93,37	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.140.000,00	87.900.000,00	(6.240.000,00)	93,37	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	3.238.600,00	3.238.600,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.238.600,00	3.238.600,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	888.100.097,69	887.800.468,00	(299.629,69)	99,96	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	888.100.097,69	887.800.468,00	(299.629,69)	99,96	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	888.100.097,69	887.800.468,00	(299.629,69)	99,96	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.06.0010		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	299.195.232,00	294.570.683,00	(4.624.549,00)	98,45	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.06.0010	5.1	BELANJA OPERASI	299.195.232,00	294.570.683,00	(4.624.549,00)	98,45	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.06.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	299.195.232,00	294.570.683,00	(4.624.549,00)	98,45	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.06.0011		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	299.199.432,00	289.595.497,00	(9.603.935,00)	96,79	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.06.0011	5.1	BELANJA OPERASI	299.199.432,00	289.595.497,00	(9.603.935,00)	96,79	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.06.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	299.199.432,00	289.595.497,00	(9.603.935,00)	96,79	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.153.780.000,00	840.043.740,00	(1.313.736.260,00)	39,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.07.0001	5.2	BELANJA MODAL	152.080.000,00	152.080.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.07.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	152.080.000,00	152.080.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	340.250.000,00	340.250.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	340.250.000,00	340.250.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.07.0007		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	384.638.000,00	0,00	(384.638.000,00)	0,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.07.0007	5.2	BELANJA MODAL	384.638.000,00	0,00	(384.638.000,00)	0,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.07.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	384.638.000,00	0,00	(384.638.000,00)	0,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.233.812.000,00	305.174.740,00	(928.637.260,00)	24,73	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.07.0010	5.1	BELANJA OPERASI	130.000.000,00	17.371.500,00	(112.628.500,00)	13,36	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.07.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	17.371.500,00	(112.628.500,00)	13,36	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.07.0010	5.2	BELANJA MODAL	1.103.812.000,00	287.803.240,00	(816.008.760,00)	26,07	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.07.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	594.000.000,00	0,00	(594.000.000,00)	0,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.07.0010	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	509.812.000,00	287.803.240,00	(222.008.760,00)	56,45	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.07.0011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	43.000.000,00	42.539.000,00	(461.000,00)	98,92	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.07.0011	5.2	BELANJA MODAL	43.000.000,00	42.539.000,00	(461.000,00)	98,92	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.07.0011	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.000.000,00	42.539.000,00	(461.000,00)	98,92	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.615.898.500,00	1.489.517.207,00	(126.381.293,00)	92,17	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	418.204.500,00	349.524.031,00	(68.680.469,00)	83,57	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	418.204.500,00	349.524.031,00	(68.680.469,00)	83,57	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	418.204.500,00	349.524.031,00	(68.680.469,00)	83,57	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.187.694.000,00	1.129.993.176,00	(57.700.824,00)	95,14	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.187.694.000,00	1.129.993.176,00	(57.700.824,00)	95,14	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.187.694.000,00	1.129.993.176,00	(57.700.824,00)	95,14	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.164.122.398,00	1.345.520.991,00	(818.601.407,00)	62,17	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.996.000,00	19.410.000,00	(1.586.000,00)	92,44	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	20.996.000,00	19.410.000,00	(1.586.000,00)	92,44	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.996.000,00	19.410.000,00	(1.586.000,00)	92,44	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	46.852.000,00	42.220.400,00	(4.631.600,00)	90,11	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	46.852.000,00	42.220.400,00	(4.631.600,00)	90,11	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.852.000,00	42.220.400,00	(4.631.600,00)	90,11	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.250.000,00	30.540.000,00	(12.710.000,00)	70,61	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	43.250.000,00	30.540.000,00	(12.710.000,00)	70,61	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.250.000,00	30.540.000,00	(12.710.000,00)	70,61	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.053.024.398,00	1.253.350.591,00	(799.673.807,00)	61,04	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	2.024.003.198,00	1.230.950.591,00	(793.052.607,00)	60,81	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.024.003.198,00	1.230.950.591,00	(793.052.607,00)	60,81	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.09.0009	5.2	BELANJA MODAL	29.021.200,00	22.400.000,00	(6.621.200,00)	77,18	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.09.0009	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.021.200,00	22.400.000,00	(6.621.200,00)	77,18	



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**

Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Organisasi : **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000		5	BELANJA DAERAH	10.690.704.773,00	10.566.225.571,36	(124.479.201,64)	98,83	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.225.656.194,00	2.192.202.076,00	(33.454.118,00)	98,49	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	14.640.770,00	14.542.753,00	(98.017,00)	99,33	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.01.0002		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	14.640.770,00	14.542.753,00	(98.017,00)	99,33	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	14.640.770,00	14.542.753,00	(98.017,00)	99,33	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.640.770,00	14.542.753,00	(98.017,00)	99,33	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	680.072.394,00	660.135.293,00	(19.937.101,00)	97,06	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.02.0014		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	79.515.057,00	78.196.988,00	(1.318.069,00)	98,34	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.02.0014	5.1	BELANJA OPERASI	64.682.497,00	63.396.988,00	(1.285.509,00)	98,01	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.02.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.682.497,00	63.396.988,00	(1.285.509,00)	98,01	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.02.0014	5.2	BELANJA MODAL	14.832.560,00	14.800.000,00	(32.560,00)	99,78	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.02.0014	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.832.560,00	14.800.000,00	(32.560,00)	99,78	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	64.879.800,00	64.879.800,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.879.800,00	64.879.800,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.02.0016		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	75.624.537,00	74.682.060,00	(942.477,00)	98,75	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	75.624.537,00	74.682.060,00	(942.477,00)	98,75	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.624.537,00	74.682.060,00	(942.477,00)	98,75	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.02.0021		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	460.053.000,00	442.376.445,00	(17.676.555,00)	96,15	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.02.0021	5.1	BELANJA OPERASI	444.216.774,00	440.166.445,00	(4.050.329,00)	99,08	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.02.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	444.216.774,00	440.166.445,00	(4.050.329,00)	99,08	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.02.0021	5.2	BELANJA MODAL	15.836.226,00	2.210.000,00	(13.626.226,00)	13,95	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.02.0021	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.836.226,00	2.210.000,00	(13.626.226,00)	13,95	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	945.648.618,00	939.861.201,00	(5.787.417,00)	99,38	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.03.0002		Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	506.250.549,00	504.292.824,00	(1.957.725,00)	99,61	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	506.250.549,00	504.292.824,00	(1.957.725,00)	99,61	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	506.250.549,00	504.292.824,00	(1.957.725,00)	99,61	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.03.0003		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	42.257.428,00	41.727.600,00	(529.828,00)	98,74	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	42.257.428,00	41.727.600,00	(529.828,00)	98,74	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.257.428,00	41.727.600,00	(529.828,00)	98,74	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.03.0004		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	396.539.441,00	393.239.577,00	(3.299.864,00)	99,16	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	396.539.441,00	393.239.577,00	(3.299.864,00)	99,16	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	396.539.441,00	393.239.577,00	(3.299.864,00)	99,16	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	601.200,00	601.200,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	601.200,00	601.200,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	585.294.412,00	577.662.829,00	(7.631.583,00)	98,69	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.04.0007		Penanganan Pasca Bencana Provinsi	358.212.952,00	355.601.770,00	(2.611.182,00)	99,27	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.04.0007	5.1	BELANJA OPERASI	358.212.952,00	355.601.770,00	(2.611.182,00)	99,27	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.04.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	358.212.952,00	355.601.770,00	(2.611.182,00)	99,27	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.04.0009		Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	26.000.000,00	25.610.566,00	(389.434,00)	98,50	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.04.0009	5.1	BELANJA OPERASI	26.000.000,00	25.610.566,00	(389.434,00)	98,50	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.04.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	25.610.566,00	(389.434,00)	98,50	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.04.0013		Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi	106.864.000,00	103.465.448,00	(3.398.552,00)	96,81	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.04.0013	5.1	BELANJA OPERASI	106.864.000,00	103.465.448,00	(3.398.552,00)	96,81	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.04.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.864.000,00	103.465.448,00	(3.398.552,00)	96,81	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.04.0017		Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	69.717.460,00	69.033.649,00	(683.811,00)	99,01	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.04.0017	5.1	BELANJA OPERASI	69.717.460,00	69.033.649,00	(683.811,00)	99,01	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.04.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.717.460,00	69.033.649,00	(683.811,00)	99,01	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.04.0020		Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	24.500.000,00	23.951.396,00	(548.604,00)	97,76	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.04.0020	5.1	BELANJA OPERASI	24.500.000,00	23.951.396,00	(548.604,00)	97,76	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.04.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.500.000,00	23.951.396,00	(548.604,00)	97,76	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.465.048.579,00	8.374.023.495,36	(91.025.083,64)	98,92	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	124.854.754,81	124.481.692,00	(373.062,81)	99,70	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	70.479.623,46	70.363.521,00	(116.102,46)	99,83	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	70.479.623,46	70.363.521,00	(116.102,46)	99,83	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.479.623,46	70.363.521,00	(116.102,46)	99,83	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.476.564,00	15.392.806,00	(83.758,00)	99,45	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	15.476.564,00	15.392.806,00	(83.758,00)	99,45	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.476.564,00	15.392.806,00	(83.758,00)	99,45	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.898.567,35	38.725.365,00	(173.202,35)	99,55	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	38.898.567,35	38.725.365,00	(173.202,35)	99,55	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.898.567,35	38.725.365,00	(173.202,35)	99,55	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.927.749.010,35	5.898.618.739,00	(29.130.271,35)	99,50	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.566.526.660,35	5.537.902.189,00	(28.624.471,35)	99,48	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.566.526.660,35	5.537.902.189,00	(28.624.471,35)	99,48	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	5.566.526.660,35	5.537.902.189,00	(28.624.471,35)	99,48	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	350.046.880,00	349.616.000,00	(430.880,00)	99,87	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	350.046.880,00	349.616.000,00	(430.880,00)	99,87	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	349.816.000,00	349.616.000,00	(200.000,00)	99,94	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	230.880,00	0,00	(230.880,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	11.175.470,00	11.100.550,00	(74.920,00)	99,32	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	11.175.470,00	11.100.550,00	(74.920,00)	99,32	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.175.470,00	11.100.550,00	(74.920,00)	99,32	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	564.806.413,10	552.511.564,00	(12.294.849,10)	97,82	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.383.483,10	33.090.000,00	(293.483,10)	99,12	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	400.155,00	360.000,00	(40.155,00)	89,96	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.155,00	360.000,00	(40.155,00)	89,96	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	32.983.328,10	32.730.000,00	(253.328,10)	99,23	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.983.328,10	32.730.000,00	(253.328,10)	99,23	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.159.590,00	12.895.000,00	(264.590,00)	97,98	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.794.330,00	1.545.000,00	(249.330,00)	86,10	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.794.330,00	1.545.000,00	(249.330,00)	86,10	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0003	5.2	BELANJA MODAL	11.365.260,00	11.350.000,00	(15.260,00)	99,86	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.365.260,00	11.350.000,00	(15.260,00)	99,86	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	53.449.300,00	52.778.950,00	(670.350,00)	98,74	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	53.449.300,00	52.778.950,00	(670.350,00)	98,74	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.449.300,00	52.778.950,00	(670.350,00)	98,74	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.394.120,00	22.409.940,00	(3.984.180,00)	84,90	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	26.394.120,00	22.409.940,00	(3.984.180,00)	84,90	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.394.120,00	22.409.940,00	(3.984.180,00)	84,90	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0007		Penyediaan Bahan/Material	13.756.800,00	11.783.178,00	(1.973.622,00)	85,65	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	13.756.800,00	11.783.178,00	(1.973.622,00)	85,65	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.756.800,00	11.783.178,00	(1.973.622,00)	85,65	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	45.369.460,00	45.156.560,00	(212.900,00)	99,53	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	45.369.460,00	45.156.560,00	(212.900,00)	99,53	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.369.460,00	45.156.560,00	(212.900,00)	99,53	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	379.293.660,00	374.397.936,00	(4.895.724,00)	98,70	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	379.293.660,00	374.397.936,00	(4.895.724,00)	98,70	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	379.293.660,00	374.397.936,00	(4.895.724,00)	98,70	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.07.0009	5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.07.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.441.871.471,00	1.436.023.845,00	(5.847.626,00)	99,59	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	113.034.696,00	112.307.025,00	(727.671,00)	99,35	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	113.034.696,00	112.307.025,00	(727.671,00)	99,35	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.034.696,00	112.307.025,00	(727.671,00)	99,35	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.728.000,00	23.600.000,00	(128.000,00)	99,46	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	23.728.000,00	23.600.000,00	(128.000,00)	99,46	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.728.000,00	23.600.000,00	(128.000,00)	99,46	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.305.108.775,00	1.300.116.820,00	(4.991.955,00)	99,61	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.305.108.775,00	1.300.116.820,00	(4.991.955,00)	99,61	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.305.108.775,00	1.300.116.820,00	(4.991.955,00)	99,61	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	255.766.929,74	212.387.655,36	(43.379.274,38)	83,03	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	171.962.320,00	142.107.131,00	(29.855.189,00)	82,63	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	171.962.320,00	142.107.131,00	(29.855.189,00)	82,63	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	171.962.320,00	142.107.131,00	(29.855.189,00)	82,63	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.278.700,00	20.918.600,00	(360.100,00)	98,30	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	21.278.700,00	20.918.600,00	(360.100,00)	98,30	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.278.700,00	20.918.600,00	(360.100,00)	98,30	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	62.525.909,74	49.361.924,36	(13.163.985,38)	78,94	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	62.525.909,74	49.361.924,36	(13.163.985,38)	78,94	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.525.909,74	49.361.924,36	(13.163.985,38)	78,94	



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**

Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Organisasi : **Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000		5	BELANJA DAERAH	26.417.273.801,00	23.604.127.694,00	(2.813.146.107,00)	89,35	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.324.923.540,00	1.379.502.518,00	(945.421.022,00)	59,33	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.305.950.500,00	1.361.507.961,00	(944.442.539,00)	59,04	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.01.0006		Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	22.465.000,00	21.766.400,00	(698.600,00)	96,89	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	22.465.000,00	21.766.400,00	(698.600,00)	96,89	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.465.000,00	21.766.400,00	(698.600,00)	96,89	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.01.0008		Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	14.823.000,00	2.241.700,00	(12.581.300,00)	15,12	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	14.823.000,00	2.241.700,00	(12.581.300,00)	15,12	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.823.000,00	2.241.700,00	(12.581.300,00)	15,12	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.01.0014		Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	931.666.000,00	118.259.754,00	(813.406.246,00)	12,69	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	931.666.000,00	118.259.754,00	(813.406.246,00)	12,69	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	931.666.000,00	118.259.754,00	(813.406.246,00)	12,69	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.01.0016		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	660.841.500,00	648.287.407,00	(12.554.093,00)	98,10	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	660.841.500,00	648.287.407,00	(12.554.093,00)	98,10	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	660.841.500,00	648.287.407,00	(12.554.093,00)	98,10	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.01.0017		Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	661.929.000,00	556.917.600,00	(105.011.400,00)	84,13	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	661.929.000,00	556.917.600,00	(105.011.400,00)	84,13	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	661.929.000,00	556.917.600,00	(105.011.400,00)	84,13	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.01.0018		Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	2.783.000,00	2.674.300,00	(108.700,00)	96,09	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.01.0018	5.1	BELANJA OPERASI	2.783.000,00	2.674.300,00	(108.700,00)	96,09	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.01.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.783.000,00	2.674.300,00	(108.700,00)	96,09	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.01.0019		Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	11.443.000,00	11.360.800,00	(82.200,00)	99,28	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.01.0019	5.1	BELANJA OPERASI	11.443.000,00	11.360.800,00	(82.200,00)	99,28	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.01.0019	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.443.000,00	11.360.800,00	(82.200,00)	99,28	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.02		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	16.680.000,00	15.784.457,00	(895.543,00)	94,63	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.02.0001		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	3.813.500,00	3.633.300,00	(180.200,00)	95,27	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.813.500,00	3.633.300,00	(180.200,00)	95,27	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.813.500,00	3.633.300,00	(180.200,00)	95,27	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.02.0002		Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	10.241.000,00	9.658.157,00	(582.843,00)	94,30	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.141.000,00	5.578.157,00	(562.843,00)	90,83	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.141.000,00	5.578.157,00	(562.843,00)	90,83	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	4.100.000,00	4.080.000,00	(20.000,00)	99,51	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.02.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.100.000,00	4.080.000,00	(20.000,00)	99,51	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.02.0003		Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	2.625.500,00	2.493.000,00	(132.500,00)	94,95	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.625.500,00	2.493.000,00	(132.500,00)	94,95	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.625.500,00	2.493.000,00	(132.500,00)	94,95	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	2.293.040,00	2.210.100,00	(82.940,00)	96,38	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.03.0001		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	2.293.040,00	2.210.100,00	(82.940,00)	96,38	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.293.040,00	2.210.100,00	(82.940,00)	96,38	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.293.040,00	2.210.100,00	(82.940,00)	96,38	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.04		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	61.495.100,00	7.243.800,00	(54.251.300,00)	11,77	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.04.1.01		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	61.495.100,00	7.243.800,00	(54.251.300,00)	11,77	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.04.1.01.0022		Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	2.575.100,00	0,00	(2.575.100,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.04.1.01.0022	5.1	BELANJA OPERASI	2.575.100,00	0,00	(2.575.100,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.04.1.01.0022	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.575.100,00	0,00	(2.575.100,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.04.1.01.0023		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	58.920.000,00	7.243.800,00	(51.676.200,00)	12,29	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.04.1.01.0023	5.1	BELANJA OPERASI	7.956.100,00	5.165.800,00	(2.790.300,00)	64,92	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.04.1.01.0023	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.956.100,00	5.165.800,00	(2.790.300,00)	64,92	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.04.1.01.0023	5.2	BELANJA MODAL	50.963.900,00	2.078.000,00	(48.885.900,00)	4,07	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.04.1.01.0023	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.963.900,00	2.078.000,00	(48.885.900,00)	4,07	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	24.030.855.161,00	22.217.381.376,00	(1.813.473.785,00)	92,45	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	160.877.267,00	156.573.126,00	(4.304.141,00)	97,32	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	74.147.000,00	71.749.140,00	(2.397.860,00)	96,76	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	74.147.000,00	71.749.140,00	(2.397.860,00)	96,76	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.147.000,00	71.749.140,00	(2.397.860,00)	96,76	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	86.730.267,00	84.823.986,00	(1.906.281,00)	97,80	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	86.730.267,00	84.823.986,00	(1.906.281,00)	97,80	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.730.267,00	84.823.986,00	(1.906.281,00)	97,80	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.046.941.695,00	13.591.887.673,00	(455.054.022,00)	96,76	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.605.419.695,00	13.163.595.354,00	(441.824.341,00)	96,75	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	13.605.419.695,00	13.163.595.354,00	(441.824.341,00)	96,75	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	13.605.419.695,00	13.163.595.354,00	(441.824.341,00)	96,75	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	412.260.000,00	400.504.000,00	(11.756.000,00)	97,14	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	412.260.000,00	400.504.000,00	(11.756.000,00)	97,14	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	411.744.000,00	400.504.000,00	(11.240.000,00)	97,27	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	516.000,00	0,00	(516.000,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.02.0004		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	19.776.000,00	18.540.200,00	(1.235.800,00)	93,75	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	19.776.000,00	18.540.200,00	(1.235.800,00)	93,75	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.776.000,00	18.540.200,00	(1.235.800,00)	93,75	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.486.000,00	9.248.119,00	(237.881,00)	97,49	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	9.486.000,00	9.248.119,00	(237.881,00)	97,49	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.486.000,00	9.248.119,00	(237.881,00)	97,49	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	16.745.900,00	15.848.000,00	(897.900,00)	94,63	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16.745.900,00	15.848.000,00	(897.900,00)	94,63	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	16.745.900,00	15.848.000,00	(897.900,00)	94,63	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.745.900,00	15.848.000,00	(897.900,00)	94,63	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	736.822.121,00	126.215.774,00	(610.606.347,00)	17,12	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	704.595.121,00	94.513.200,00	(610.081.921,00)	13,41	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	704.595.121,00	94.513.200,00	(610.081.921,00)	13,41	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	704.595.121,00	94.513.200,00	(610.081.921,00)	13,41	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	32.227.000,00	31.702.574,00	(524.426,00)	98,37	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	32.227.000,00	31.702.574,00	(524.426,00)	98,37	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.227.000,00	31.702.574,00	(524.426,00)	98,37	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	948.585.238,63	876.538.261,00	(72.046.977,63)	92,40	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	6.000.000,00	(4.000.000,00)	60,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	6.000.000,00	(4.000.000,00)	60,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	6.000.000,00	(4.000.000,00)	60,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.150.000,00	2.072.086,00	(5.077.914,00)	28,98	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.030.000,00	2.072.086,00	(957.914,00)	68,38	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.030.000,00	2.072.086,00	(957.914,00)	68,38	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.06.0003	5.2	BELANJA MODAL	4.120.000,00	0,00	(4.120.000,00)	0,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.06.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.120.000,00	0,00	(4.120.000,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.093.700,00	30.021.622,00	(11.072.078,00)	73,05	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	41.093.700,00	30.021.622,00	(11.072.078,00)	73,05	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.093.700,00	30.021.622,00	(11.072.078,00)	73,05	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.000.000,00	10.323.000,00	(24.677.000,00)	29,49	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	10.323.000,00	(24.677.000,00)	29,49	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	10.323.000,00	(24.677.000,00)	29,49	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.312.000,00	6.039.954,00	(272.046,00)	95,69	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	6.312.000,00	6.039.954,00	(272.046,00)	95,69	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.312.000,00	6.039.954,00	(272.046,00)	95,69	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	839.643.738,63	821.790.499,00	(17.853.239,63)	97,87	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	839.643.738,63	821.790.499,00	(17.853.239,63)	97,87	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	839.643.738,63	821.790.499,00	(17.853.239,63)	97,87	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.06.0010		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9.385.800,00	291.100,00	(9.094.700,00)	3,10	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.06.0010	5.1	BELANJA OPERASI	9.385.800,00	291.100,00	(9.094.700,00)	3,10	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.06.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.385.800,00	291.100,00	(9.094.700,00)	3,10	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	544.372.765,00	134.263.000,00	(410.109.765,00)	24,66	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.07.0005		Pengadaan Mebel	357.299.485,00	102.220.000,00	(255.079.485,00)	28,60	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	110.706.600,00	4.720.000,00	(105.986.600,00)	4,26	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.706.600,00	4.720.000,00	(105.986.600,00)	4,26	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	246.592.885,00	97.500.000,00	(149.092.885,00)	39,53	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	246.592.885,00	97.500.000,00	(149.092.885,00)	39,53	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	187.073.280,00	32.043.000,00	(155.030.280,00)	17,12	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.910.216,00	650.000,00	(2.260.216,00)	22,33	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.910.216,00	650.000,00	(2.260.216,00)	22,33	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	184.163.064,00	31.393.000,00	(152.770.064,00)	17,04	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	184.163.064,00	31.393.000,00	(152.770.064,00)	17,04	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.046.784.787,00	6.944.723.452,00	(102.061.335,00)	98,55	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	176.576.550,00	173.225.000,00	(3.351.550,00)	98,10	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	176.576.550,00	173.225.000,00	(3.351.550,00)	98,10	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.576.550,00	173.225.000,00	(3.351.550,00)	98,10	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.424.000,00	14.195.300,00	(7.228.700,00)	66,25	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	21.424.000,00	14.195.300,00	(7.228.700,00)	66,25	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.424.000,00	14.195.300,00	(7.228.700,00)	66,25	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.848.784.237,00	6.757.303.152,00	(91.481.085,00)	98,66	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	6.848.784.237,00	6.757.303.152,00	(91.481.085,00)	98,66	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.848.784.237,00	6.757.303.152,00	(91.481.085,00)	98,66	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	529.725.387,37	371.332.090,00	(158.393.297,37)	70,09	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52.851.200,00	51.980.000,00	(871.200,00)	98,35	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	52.851.200,00	51.980.000,00	(871.200,00)	98,35	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.851.200,00	51.980.000,00	(871.200,00)	98,35	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	286.430.239,37	181.553.900,00	(104.876.339,37)	63,38	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	286.430.239,37	181.553.900,00	(104.876.339,37)	63,38	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	286.430.239,37	181.553.900,00	(104.876.339,37)	63,38	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00	18.162.890,00	(6.837.110,00)	72,65	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	18.162.890,00	(6.837.110,00)	72,65	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	18.162.890,00	(6.837.110,00)	72,65	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	165.443.948,00	119.635.300,00	(45.808.648,00)	72,31	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	165.443.948,00	119.635.300,00	(45.808.648,00)	72,31	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.443.948,00	119.635.300,00	(45.808.648,00)	72,31	



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**
Organisasi : **Dinas Sosial**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000		5	BELANJA DAERAH	28.412.231.250,00	26.868.097.639,40	(1.544.133.610,60)	94,56	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.02		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	971.567.886,00	970.668.517,00	(899.369,00)	99,90	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.02.1.02		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	971.567.886,00	970.668.517,00	(899.369,00)	99,90	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.02.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	102.118.281,00	102.118.281,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.02.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.118.281,00	102.118.281,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.02.1.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	72.720.000,00	72.720.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.02.1.02.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	72.720.000,00	72.720.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.02.1.02.0004		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	796.729.605,00	795.830.236,00	(899.369,00)	99,88	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.02.1.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	796.729.605,00	795.830.236,00	(899.369,00)	99,88	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.02.1.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	231.729.605,00	230.830.236,00	(899.369,00)	99,61	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.02.1.02.0004	5.1.05	Belanja Hibah	565.000.000,00	565.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.694.795.164,00	1.933.826.538,00	(760.968.626,00)	71,76	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	696.601.651,00	281.202.584,00	(415.399.067,00)	40,36	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.01.0001		Penyediaan Permakanan	158.803.112,00	100.724.650,00	(58.078.462,00)	63,42	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	158.803.112,00	100.724.650,00	(58.078.462,00)	63,42	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.803.112,00	100.724.650,00	(58.078.462,00)	63,42	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	28.258.500,00	28.258.500,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.258.500,00	28.258.500,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.01.0003		Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	71.660.282,00	69.349.525,00	(2.310.757,00)	96,77	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	71.660.282,00	69.349.525,00	(2.310.757,00)	96,77	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.660.282,00	69.349.525,00	(2.310.757,00)	96,77	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.01.0004		Penyediaan Alat Bantu	160.018.700,00	939.000,00	(159.079.700,00)	0,58	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	160.018.700,00	939.000,00	(159.079.700,00)	0,58	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.018.700,00	939.000,00	(159.079.700,00)	0,58	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.01.0005		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	5.526.300,00	5.486.250,00	(40.050,00)	99,27	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	5.526.300,00	5.486.250,00	(40.050,00)	99,27	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.526.300,00	5.486.250,00	(40.050,00)	99,27	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.01.0006		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	272.334.757,00	76.444.659,00	(195.890.098,00)	28,07	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	272.334.757,00	76.444.659,00	(195.890.098,00)	28,07	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	272.334.757,00	76.444.659,00	(195.890.098,00)	28,07	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1.385.011.198,00	1.157.363.331,00	(227.647.867,00)	83,56	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.02.0001		Pengasuhan	40.944.709,00	40.932.900,00	(11.809,00)	99,97	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	40.944.709,00	40.932.900,00	(11.809,00)	99,97	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.944.709,00	40.932.900,00	(11.809,00)	99,97	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.02.0002		Penyediaan Makanan	591.741.651,00	554.864.610,00	(36.877.041,00)	93,76	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	591.741.651,00	554.864.610,00	(36.877.041,00)	93,76	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	591.741.651,00	554.864.610,00	(36.877.041,00)	93,76	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.02.0003		Penyediaan Sandang	163.047.811,00	33.228.800,00	(129.819.011,00)	20,37	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	163.047.811,00	33.228.800,00	(129.819.011,00)	20,37	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.047.811,00	33.228.800,00	(129.819.011,00)	20,37	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.02.0004		Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	198.470.152,00	197.788.952,00	(681.200,00)	99,65	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	198.470.152,00	197.788.952,00	(681.200,00)	99,65	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.470.152,00	197.788.952,00	(681.200,00)	99,65	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.02.0005		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	9.769.765,00	8.558.550,00	(1.211.215,00)	87,60	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	9.769.765,00	8.558.550,00	(1.211.215,00)	87,60	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.769.765,00	8.558.550,00	(1.211.215,00)	87,60	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.02.0006		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	381.037.110,00	321.989.519,00	(59.047.591,00)	84,50	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	381.037.110,00	321.989.519,00	(59.047.591,00)	84,50	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	381.037.110,00	321.989.519,00	(59.047.591,00)	84,50	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	404.677.894,00	303.179.050,00	(101.498.844,00)	74,91	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.03.0001		Penyediaan Permakanan	191.396.540,00	165.362.300,00	(26.034.240,00)	86,39	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	191.396.540,00	165.362.300,00	(26.034.240,00)	86,39	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	191.396.540,00	165.362.300,00	(26.034.240,00)	86,39	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.03.0002		Penyediaan Sandang	41.460.925,00	33.093.650,00	(8.367.275,00)	79,81	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	41.460.925,00	33.093.650,00	(8.367.275,00)	79,81	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.460.925,00	33.093.650,00	(8.367.275,00)	79,81	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.03.0003		Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	40.040.590,00	38.916.150,00	(1.124.440,00)	97,19	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	40.040.590,00	38.916.150,00	(1.124.440,00)	97,19	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.040.590,00	38.916.150,00	(1.124.440,00)	97,19	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.03.0004		Penyediaan Alat Bantu	23.963.200,00	6.991.300,00	(16.971.900,00)	29,17	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	23.963.200,00	6.991.300,00	(16.971.900,00)	29,17	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.963.200,00	6.991.300,00	(16.971.900,00)	29,17	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.03.0005		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	21.324.302,00	8.375.650,00	(12.948.652,00)	39,27	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	21.324.302,00	8.375.650,00	(12.948.652,00)	39,27	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.324.302,00	8.375.650,00	(12.948.652,00)	39,27	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.03.0006		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	75.347.817,00	39.624.000,00	(35.723.817,00)	52,58	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	75.347.817,00	39.624.000,00	(35.723.817,00)	52,58	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.347.817,00	39.624.000,00	(35.723.817,00)	52,58	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.03.0012		Pemulasaraan	11.144.520,00	10.816.000,00	(328.520,00)	97,05	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.03.0012	5.1	BELANJA OPERASI	11.144.520,00	10.816.000,00	(328.520,00)	97,05	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.03.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.144.520,00	10.816.000,00	(328.520,00)	97,05	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.04		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	90.099.000,00	79.631.276,00	(10.467.724,00)	88,38	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.04.0001		Penyediaan Permakanan	10.000.000,00	9.021.750,00	(978.250,00)	90,21	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.021.750,00	(978.250,00)	90,21	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.021.750,00	(978.250,00)	90,21	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.04.0002		Penyediaan Sandang	10.000.000,00	8.037.600,00	(1.962.400,00)	80,37	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	8.037.600,00	(1.962.400,00)	80,37	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	8.037.600,00	(1.962.400,00)	80,37	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.04.0003		Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	16.324.000,00	13.802.300,00	(2.521.700,00)	84,55	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	16.324.000,00	13.802.300,00	(2.521.700,00)	84,55	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.324.000,00	13.802.300,00	(2.521.700,00)	84,55	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.04.0004		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.04.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.04.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.04.0005		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	11.378.000,00	9.297.274,00	(2.080.726,00)	81,71	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.04.0005	5.1	BELANJA OPERASI	11.378.000,00	9.297.274,00	(2.080.726,00)	81,71	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.04.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.378.000,00	9.297.274,00	(2.080.726,00)	81,71	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.04.0010		Pemulangan ke Daerah Asal	40.397.000,00	39.472.352,00	(924.648,00)	97,71	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.04.0010	5.1	BELANJA OPERASI	40.397.000,00	39.472.352,00	(924.648,00)	97,71	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.04.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.397.000,00	39.472.352,00	(924.648,00)	97,71	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.05		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	118.405.421,00	112.450.297,00	(5.955.124,00)	94,97	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.05.0005		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	46.505.524,00	45.950.400,00	(555.124,00)	98,80	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.05.0005	5.1	BELANJA OPERASI	46.505.524,00	45.950.400,00	(555.124,00)	98,80	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.05.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.505.524,00	45.950.400,00	(555.124,00)	98,80	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.05.0010		Pemulangan ke Daerah Asal	71.899.897,00	66.499.897,00	(5.400.000,00)	92,48	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.05.0010	5.1	BELANJA OPERASI	71.899.897,00	66.499.897,00	(5.400.000,00)	92,48	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.05.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.899.897,00	66.499.897,00	(5.400.000,00)	92,48	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.05		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	9.564.150.999,00	9.138.455.605,00	(425.695.394,00)	95,54	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.05.1.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	9.564.150.999,00	9.138.455.605,00	(425.695.394,00)	95,54	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.05.1.02.0001		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	6.660.215.013,00	6.467.998.911,00	(192.216.102,00)	97,11	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.05.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.660.215.013,00	6.467.998.911,00	(192.216.102,00)	97,11	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.05.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.660.215.013,00	6.467.998.911,00	(192.216.102,00)	97,11	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.05.1.02.0002		Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.091.799.746,00	1.089.733.122,00	(2.066.624,00)	99,81	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.05.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.059.853.946,00	1.058.133.122,00	(1.720.824,00)	99,83	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.05.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.059.853.946,00	1.058.133.122,00	(1.720.824,00)	99,83	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.05.1.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	31.945.800,00	31.600.000,00	(345.800,00)	98,91	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.05.1.02.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.945.800,00	31.600.000,00	(345.800,00)	98,91	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.05.1.02.0003		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	1.812.136.240,00	1.580.723.572,00	(231.412.668,00)	87,22	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.05.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.812.136.240,00	1.580.723.572,00	(231.412.668,00)	87,22	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.05.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	558.771.240,00	550.398.572,00	(8.372.668,00)	98,50	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.05.1.02.0003	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.253.365.000,00	1.030.325.000,00	(223.040.000,00)	82,20	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.06		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	553.301.727,00	544.090.750,00	(9.210.977,00)	98,33	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.06.1.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	553.301.727,00	544.090.750,00	(9.210.977,00)	98,33	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.06.1.01.0001		Penyediaan Permakanaan	260.629.984,00	260.157.300,00	(472.684,00)	99,81	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.06.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	260.629.984,00	260.157.300,00	(472.684,00)	99,81	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.06.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	260.629.984,00	260.157.300,00	(472.684,00)	99,81	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.06.1.01.0002		Penyediaan Sandang	153.523.403,00	152.703.550,00	(819.853,00)	99,46	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.06.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	153.523.403,00	152.703.550,00	(819.853,00)	99,46	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.06.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.523.403,00	152.703.550,00	(819.853,00)	99,46	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.06.1.01.0005		Pelayanan Dukungan Psikososial	139.148.340,00	131.229.900,00	(7.918.440,00)	94,30	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.06.1.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	139.148.340,00	131.229.900,00	(7.918.440,00)	94,30	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.06.1.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.148.340,00	131.229.900,00	(7.918.440,00)	94,30	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.07		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	1.372.789.000,00	1.372.018.000,00	(771.000,00)	99,94	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.07.1.01		Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1.372.789.000,00	1.372.018.000,00	(771.000,00)	99,94	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.07.1.01.0002		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1.372.789.000,00	1.372.018.000,00	(771.000,00)	99,94	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.07.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.372.789.000,00	1.372.018.000,00	(771.000,00)	99,94	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.07.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.372.789.000,00	1.372.018.000,00	(771.000,00)	99,94	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.255.626.474,00	12.909.038.229,40	(346.588.244,60)	97,38	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	690.663.591,00	683.321.456,00	(7.342.135,00)	98,93	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.355.895,00	18.551.100,00	(804.795,00)	95,84	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	19.355.895,00	18.551.100,00	(804.795,00)	95,84	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.355.895,00	18.551.100,00	(804.795,00)	95,84	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	195.040.340,00	190.674.974,00	(4.365.366,00)	97,76	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	195.040.340,00	190.674.974,00	(4.365.366,00)	97,76	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	195.040.340,00	190.674.974,00	(4.365.366,00)	97,76	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	199.052.761,00	197.954.080,00	(1.098.681,00)	99,44	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	199.052.761,00	197.954.080,00	(1.098.681,00)	99,44	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.052.761,00	197.954.080,00	(1.098.681,00)	99,44	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	277.214.595,00	276.141.302,00	(1.073.293,00)	99,61	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	277.214.595,00	276.141.302,00	(1.073.293,00)	99,61	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	277.214.595,00	276.141.302,00	(1.073.293,00)	99,61	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.787.145.390,00	9.475.381.527,00	(311.763.863,00)	96,81	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.208.931.390,00	8.905.420.527,00	(303.510.863,00)	96,70	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.208.931.390,00	8.905.420.527,00	(303.510.863,00)	96,70	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	9.206.633.390,00	8.903.680.927,00	(302.952.463,00)	96,70	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.298.000,00	1.739.600,00	(558.400,00)	75,70	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	578.214.000,00	569.961.000,00	(8.253.000,00)	98,57	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	578.214.000,00	569.961.000,00	(8.253.000,00)	98,57	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	576.216.000,00	568.476.000,00	(7.740.000,00)	98,65	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.998.000,00	1.485.000,00	(513.000,00)	74,32	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	101.871.353,00	101.122.456,00	(748.897,00)	99,26	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.03.0002		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	101.871.353,00	101.122.456,00	(748.897,00)	99,26	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	101.871.353,00	101.122.456,00	(748.897,00)	99,26	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.871.353,00	101.122.456,00	(748.897,00)	99,26	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	54.413.500,00	53.919.800,00	(493.700,00)	99,09	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	54.413.500,00	53.919.800,00	(493.700,00)	99,09	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	54.413.500,00	53.919.800,00	(493.700,00)	99,09	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.413.500,00	53.919.800,00	(493.700,00)	99,09	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	715.992.262,00	704.155.103,00	(11.837.159,00)	98,34	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.345.531,00	12.139.000,00	(206.531,00)	98,32	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.345.531,00	12.139.000,00	(206.531,00)	98,32	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.345.531,00	12.139.000,00	(206.531,00)	98,32	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	36.854.997,00	33.463.650,00	(3.391.347,00)	90,79	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	36.854.997,00	33.463.650,00	(3.391.347,00)	90,79	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.854.997,00	33.463.650,00	(3.391.347,00)	90,79	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	88.816.872,00	88.147.300,00	(669.572,00)	99,24	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	88.816.872,00	88.147.300,00	(669.572,00)	99,24	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.816.872,00	88.147.300,00	(669.572,00)	99,24	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	77.368.110,00	70.750.000,00	(6.618.110,00)	91,44	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	77.368.110,00	70.750.000,00	(6.618.110,00)	91,44	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.368.110,00	70.750.000,00	(6.618.110,00)	91,44	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	11.022.000,00	10.960.000,00	(62.000,00)	99,43	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	11.022.000,00	10.960.000,00	(62.000,00)	99,43	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.022.000,00	10.960.000,00	(62.000,00)	99,43	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.630.250,00	8.080.000,00	(550.250,00)	93,62	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	8.630.250,00	8.080.000,00	(550.250,00)	93,62	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.630.250,00	8.080.000,00	(550.250,00)	93,62	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	480.954.502,00	480.615.153,00	(339.349,00)	99,92	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	480.954.502,00	480.615.153,00	(339.349,00)	99,92	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	480.954.502,00	480.615.153,00	(339.349,00)	99,92	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	683.861.798,00	680.427.600,00	(3.434.198,00)	99,49	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.07.0001		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	493.278.010,00	493.200.000,00	(78.010,00)	99,98	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.07.0001	5.1	BELANJA OPERASI	79.477.500,00	79.400.000,00	(77.500,00)	99,90	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.07.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.477.500,00	79.400.000,00	(77.500,00)	99,90	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.07.0001	5.2	BELANJA MODAL	413.800.510,00	413.800.000,00	(510,00)	99,99	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.07.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	413.800.510,00	413.800.000,00	(510,00)	99,99	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.07.0005		Pengadaan Mebel	23.629.000,00	23.550.000,00	(79.000,00)	99,66	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	277.500,00	200.000,00	(77.500,00)	72,07	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	277.500,00	200.000,00	(77.500,00)	72,07	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	23.351.500,00	23.350.000,00	(1.500,00)	99,99	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.351.500,00	23.350.000,00	(1.500,00)	99,99	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	166.954.788,00	163.677.600,00	(3.277.188,00)	98,03	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.117.278,00	777.600,00	(339.678,00)	69,59	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.117.278,00	777.600,00	(339.678,00)	69,59	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	165.837.510,00	162.900.000,00	(2.937.510,00)	98,22	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	165.837.510,00	162.900.000,00	(2.937.510,00)	98,22	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	815.613.435,00	812.848.032,00	(2.765.403,00)	99,66	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	57.868.340,00	57.800.000,00	(68.340,00)	99,88	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	57.868.340,00	57.800.000,00	(68.340,00)	99,88	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.868.340,00	57.800.000,00	(68.340,00)	99,88	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	71.312.252,00	69.120.280,00	(2.191.972,00)	96,92	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	71.312.252,00	69.120.280,00	(2.191.972,00)	96,92	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.312.252,00	69.120.280,00	(2.191.972,00)	96,92	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	686.432.843,00	685.927.752,00	(505.091,00)	99,92	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	686.432.843,00	685.927.752,00	(505.091,00)	99,92	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	686.432.843,00	685.927.752,00	(505.091,00)	99,92	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	406.065.145,00	397.862.255,40	(8.202.889,60)	97,97	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	189.688.793,00	184.791.670,00	(4.897.123,00)	97,41	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	189.688.793,00	184.791.670,00	(4.897.123,00)	97,41	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	189.688.793,00	184.791.670,00	(4.897.123,00)	97,41	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.713.360,00	36.750.000,00	(963.360,00)	97,44	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	37.713.360,00	36.750.000,00	(963.360,00)	97,44	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.713.360,00	36.750.000,00	(963.360,00)	97,44	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	178.662.992,00	176.320.585,40	(2.342.406,60)	98,68	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	178.662.992,00	176.320.585,40	(2.342.406,60)	98,68	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	178.662.992,00	176.320.585,40	(2.342.406,60)	98,68	



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**

Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**

Organisasi : **Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.07.3.32.0.00.07.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	7.500.000.000,00	5.009.217.000,00	(2.490.783.000,00)	66,78	
	2.07.3.32.0.00.07.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.500.000.000,00	5.009.217.000,00	(2.490.783.000,00)	66,78	
	2.07.3.32.0.00.07.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	7.500.000.000,00	5.009.217.000,00	(2.490.783.000,00)	66,78	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000		5	BELANJA DAERAH	31.913.417.830,00	30.485.027.108,00	(1.428.390.722,00)	95,52	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.02		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	4.995.864,00	4.772.000,00	(223.864,00)	95,51	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.02.1.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	4.995.864,00	4.772.000,00	(223.864,00)	95,51	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.02.1.01.0003		Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	4.995.864,00	4.772.000,00	(223.864,00)	95,51	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.02.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	4.995.864,00	4.772.000,00	(223.864,00)	95,51	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.02.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.995.864,00	4.772.000,00	(223.864,00)	95,51	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	3.239.016.874,00	3.084.224.287,00	(154.792.587,00)	95,22	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.03.1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	3.239.016.874,00	3.084.224.287,00	(154.792.587,00)	95,22	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.03.1.01.0001		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	3.239.016.874,00	3.084.224.287,00	(154.792.587,00)	95,22	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.03.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.239.016.874,00	3.084.224.287,00	(154.792.587,00)	95,22	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.03.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.239.016.874,00	3.084.224.287,00	(154.792.587,00)	95,22	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.04		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	43.233.680,00	40.430.700,00	(2.802.980,00)	93,51	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.04.1.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.489.880,00	14.606.500,00	(883.380,00)	94,29	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.04.1.02.0001		Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	15.489.880,00	14.606.500,00	(883.380,00)	94,29	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.04.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.489.880,00	14.606.500,00	(883.380,00)	94,29	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.04.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.489.880,00	14.606.500,00	(883.380,00)	94,29	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.04.1.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	13.883.600,00	12.943.700,00	(939.900,00)	93,23	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.04.1.03.0002		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	13.883.600,00	12.943.700,00	(939.900,00)	93,23	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.04.1.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	13.883.600,00	12.943.700,00	(939.900,00)	93,23	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.04.1.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.883.600,00	12.943.700,00	(939.900,00)	93,23	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.04.1.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	13.860.200,00	12.880.500,00	(979.700,00)	92,93	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.04.1.04.0003		Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	13.860.200,00	12.880.500,00	(979.700,00)	92,93	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.04.1.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	13.860.200,00	12.880.500,00	(979.700,00)	92,93	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.04.1.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.860.200,00	12.880.500,00	(979.700,00)	92,93	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.05		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	273.939.600,00	271.022.300,00	(2.917.300,00)	98,93	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.05.1.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	136.647.500,00	134.754.200,00	(1.893.300,00)	98,61	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.05.1.02.0002		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	8.268.500,00	7.933.700,00	(334.800,00)	95,95	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.05.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	8.268.500,00	7.933.700,00	(334.800,00)	95,95	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.05.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.268.500,00	7.933.700,00	(334.800,00)	95,95	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.05.1.02.0004		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	128.379.000,00	126.820.500,00	(1.558.500,00)	98,78	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.05.1.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	128.379.000,00	126.820.500,00	(1.558.500,00)	98,78	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.05.1.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.379.000,00	126.820.500,00	(1.558.500,00)	98,78	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.05.1.03		Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	137.292.100,00	136.268.100,00	(1.024.000,00)	99,25	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.05.1.03.0001		Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	57.292.100,00	57.038.900,00	(253.200,00)	99,55	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.05.1.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	57.292.100,00	57.038.900,00	(253.200,00)	99,55	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.05.1.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.292.100,00	57.038.900,00	(253.200,00)	99,55	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.05.1.03.0003		Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	80.000.000,00	79.229.200,00	(770.800,00)	99,03	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.05.1.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	79.229.200,00	(770.800,00)	99,03	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.05.1.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	79.229.200,00	(770.800,00)	99,03	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.06		PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	318.023.952,00	310.933.383,00	(7.090.569,00)	97,77	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.06.1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	318.023.952,00	310.933.383,00	(7.090.569,00)	97,77	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.06.1.01.0001		Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	153.600.000,00	149.690.400,00	(3.909.600,00)	97,45	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.06.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	153.600.000,00	149.690.400,00	(3.909.600,00)	97,45	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.06.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.600.000,00	149.690.400,00	(3.909.600,00)	97,45	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.06.1.01.0002		Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	24.000.000,00	22.851.500,00	(1.148.500,00)	95,21	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.06.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	24.000.000,00	22.851.500,00	(1.148.500,00)	95,21	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.06.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	22.851.500,00	(1.148.500,00)	95,21	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.06.1.01.0003		Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	140.423.952,00	138.391.483,00	(2.032.469,00)	98,55	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.06.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	140.423.952,00	138.391.483,00	(2.032.469,00)	98,55	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.06.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.423.952,00	138.391.483,00	(2.032.469,00)	98,55	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	28.034.207.860,00	26.773.644.438,00	(1.260.563.422,00)	95,50	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54.385.178,00	48.773.591,00	(5.611.587,00)	89,68	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.046.688,00	15.011.066,00	(1.035.622,00)	93,54	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	16.046.688,00	15.011.066,00	(1.035.622,00)	93,54	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.046.688,00	15.011.066,00	(1.035.622,00)	93,54	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.588.617,00	15.126.164,00	(1.462.453,00)	91,18	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	16.588.617,00	15.126.164,00	(1.462.453,00)	91,18	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.588.617,00	15.126.164,00	(1.462.453,00)	91,18	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.749.873,00	18.636.361,00	(3.113.512,00)	85,68	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	21.749.873,00	18.636.361,00	(3.113.512,00)	85,68	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.749.873,00	18.636.361,00	(3.113.512,00)	85,68	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.503.332.098,00	24.670.214.454,00	(833.117.644,00)	96,73	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.930.032.098,00	24.104.484.454,00	(825.547.644,00)	96,68	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	24.930.032.098,00	24.104.484.454,00	(825.547.644,00)	96,68	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	24.930.032.098,00	24.104.484.454,00	(825.547.644,00)	96,68	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	573.300.000,00	565.730.000,00	(7.570.000,00)	98,67	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	573.300.000,00	565.730.000,00	(7.570.000,00)	98,67	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	570.780.000,00	565.730.000,00	(5.050.000,00)	99,11	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.520.000,00	0,00	(2.520.000,00)	0,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	328.295.926,00	325.731.188,00	(2.564.738,00)	99,21	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	9.898.100,00	(101.900,00)	98,98	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.898.100,00	(101.900,00)	98,98	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.898.100,00	(101.900,00)	98,98	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.000.000,00	19.850.250,00	(149.750,00)	99,25	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.850.250,00	(149.750,00)	99,25	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.850.250,00	(149.750,00)	99,25	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.044.518,00	33.655.800,00	(388.718,00)	98,85	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	34.044.518,00	33.655.800,00	(388.718,00)	98,85	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.044.518,00	33.655.800,00	(388.718,00)	98,85	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	10.080.000,00	10.080.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.080.000,00	10.080.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	244.171.408,00	242.247.038,00	(1.924.370,00)	99,21	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	244.171.408,00	242.247.038,00	(1.924.370,00)	99,21	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	244.171.408,00	242.247.038,00	(1.924.370,00)	99,21	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	378.343.120,00	18.490.000,00	(359.853.120,00)	4,88	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.07.0005		Pengadaan Mebel	92.412.608,00	4.400.000,00	(88.012.608,00)	4,76	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	92.412.608,00	4.400.000,00	(88.012.608,00)	4,76	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	92.412.608,00	4.400.000,00	(88.012.608,00)	4,76	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	204.527.552,00	14.090.000,00	(190.437.552,00)	6,88	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	204.527.552,00	14.090.000,00	(190.437.552,00)	6,88	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	204.527.552,00	14.090.000,00	(190.437.552,00)	6,88	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.07.0011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	81.402.960,00	0,00	(81.402.960,00)	0,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.07.0011	5.1	BELANJA OPERASI	81.402.960,00	0,00	(81.402.960,00)	0,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.07.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.402.960,00	0,00	(81.402.960,00)	0,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.657.907.556,00	1.601.578.005,00	(56.329.551,00)	96,60	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	370.702.376,00	319.623.661,00	(51.078.715,00)	86,22	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	370.702.376,00	319.623.661,00	(51.078.715,00)	86,22	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	370.702.376,00	319.623.661,00	(51.078.715,00)	86,22	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.070.000,00	29.820.000,00	(250.000,00)	99,16	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	30.070.000,00	29.820.000,00	(250.000,00)	99,16	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.070.000,00	29.820.000,00	(250.000,00)	99,16	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.257.135.180,00	1.252.134.344,00	(5.000.836,00)	99,60	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.257.135.180,00	1.252.134.344,00	(5.000.836,00)	99,60	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.257.135.180,00	1.252.134.344,00	(5.000.836,00)	99,60	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	111.943.982,00	108.857.200,00	(3.086.782,00)	97,24	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	101.943.982,00	99.257.200,00	(2.686.782,00)	97,36	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	101.943.982,00	99.257.200,00	(2.686.782,00)	97,36	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.943.982,00	99.257.200,00	(2.686.782,00)	97,36	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	9.600.000,00	(400.000,00)	96,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.600.000,00	(400.000,00)	96,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.600.000,00	(400.000,00)	96,00	



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**
Organisasi : **Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.07.3.32.0.00.07.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	7.500.000.000,00	5.009.217.000,00	(2.490.783.000,00)	66,78	
	2.07.3.32.0.00.07.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.500.000.000,00	5.009.217.000,00	(2.490.783.000,00)	66,78	
	2.07.3.32.0.00.07.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	7.500.000.000,00	5.009.217.000,00	(2.490.783.000,00)	66,78	
3.32	2.07.3.32.0.00.07.0000		5	BELANJA DAERAH	20.000.000,00	19.802.800,00	(197.200,00)	99,01	
3.32	2.07.3.32.0.00.07.0000	3.32.02		PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI	20.000.000,00	19.802.800,00	(197.200,00)	99,01	
3.32	2.07.3.32.0.00.07.0000	3.32.02.1.01		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	20.000.000,00	19.802.800,00	(197.200,00)	99,01	
3.32	2.07.3.32.0.00.07.0000	3.32.02.1.01.0001		Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	20.000.000,00	19.802.800,00	(197.200,00)	99,01	
3.32	2.07.3.32.0.00.07.0000	3.32.02.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.802.800,00	(197.200,00)	99,01	
3.32	2.07.3.32.0.00.07.0000	3.32.02.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.802.800,00	(197.200,00)	99,01	



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
Organisasi : **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.14	2.08.2.14.0.00.08.0000		5	BELANJA DAERAH	4.188.772.374,00	2.182.372.362,00	(2.006.400.012,00)	52,10	
2.14	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.14.03		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	4.010.400.000,00	2.004.000.000,00	(2.006.400.000,00)	49,97	
2.14	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.14.03.1.02		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	4.010.400.000,00	2.004.000.000,00	(2.006.400.000,00)	49,97	
2.14	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.14.03.1.02.0004		Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana	4.010.400.000,00	2.004.000.000,00	(2.006.400.000,00)	49,97	
2.14	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.14.03.1.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	4.010.400.000,00	2.004.000.000,00	(2.006.400.000,00)	49,97	
2.14	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.14.03.1.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.010.400.000,00	2.004.000.000,00	(2.006.400.000,00)	49,97	
2.14	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.14.04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	178.372.374,00	178.372.362,00	(12,00)	99,99	
2.14	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.14.04.1.01		Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	178.372.374,00	178.372.362,00	(12,00)	99,99	
2.14	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.14.04.1.01.0017		Pelaksanaan Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	178.372.374,00	178.372.362,00	(12,00)	99,99	
2.14	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.14.04.1.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	178.372.374,00	178.372.362,00	(12,00)	99,99	
2.14	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.14.04.1.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	178.372.374,00	178.372.362,00	(12,00)	99,99	



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
Organisasi : **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000		5	BELANJA DAERAH	20.498.093.378,00	19.958.495.331,91	(539.598.046,09)	97,36	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.02		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.210.303.454,41	1.160.863.721,00	(49.439.733,41)	95,91	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.02.1.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	59.266.360,41	48.501.442,00	(10.764.918,41)	81,83	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.02.1.01.0006		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	32.074.100,41	32.074.010,00	(90,41)	99,99	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.02.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	32.074.100,41	32.074.010,00	(90,41)	99,99	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.02.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.074.100,41	32.074.010,00	(90,41)	99,99	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.02.1.01.0007		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	27.192.260,00	16.427.432,00	(10.764.828,00)	60,41	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.02.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	27.192.260,00	16.427.432,00	(10.764.828,00)	60,41	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.02.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.192.260,00	16.427.432,00	(10.764.828,00)	60,41	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.02.1.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	1.116.635.794,00	1.077.970.779,00	(38.665.015,00)	96,53	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.02.1.02.0003		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	500.460.055,00	500.170.165,00	(289.890,00)	99,94	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.02.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	500.460.055,00	500.170.165,00	(289.890,00)	99,94	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.02.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.460.055,00	300.170.165,00	(289.890,00)	99,90	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.02.1.02.0003	5.1.05	Belanja Hibah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.02.1.02.0004		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	616.175.739,00	577.800.614,00	(38.375.125,00)	93,77	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.02.1.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	616.175.739,00	577.800.614,00	(38.375.125,00)	93,77	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.02.1.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	616.175.739,00	577.800.614,00	(38.375.125,00)	93,77	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.02.1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	34.401.300,00	34.391.500,00	(9.800,00)	99,97	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.02.1.03.0005		Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	34.401.300,00	34.391.500,00	(9.800,00)	99,97	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.02.1.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	34.401.300,00	34.391.500,00	(9.800,00)	99,97	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.02.1.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.401.300,00	34.391.500,00	(9.800,00)	99,97	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1.409.636.144,00	1.395.157.851,00	(14.478.293,00)	98,97	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.03.1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.054.625.844,00	1.043.269.721,00	(11.356.123,00)	98,92	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.03.1.01.0001		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	907.930.844,00	896.574.721,00	(11.356.123,00)	98,74	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.03.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	907.930.844,00	896.574.721,00	(11.356.123,00)	98,74	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.03.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	907.930.844,00	896.574.721,00	(11.356.123,00)	98,74	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.03.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	146.695.000,00	146.695.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.03.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.695.000,00	146.695.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.03.1.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	136.258.300,00	135.744.730,00	(513.570,00)	99,62	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.03.1.02.0002		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	136.258.300,00	135.744.730,00	(513.570,00)	99,62	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.03.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	136.258.300,00	135.744.730,00	(513.570,00)	99,62	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.03.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.258.300,00	135.744.730,00	(513.570,00)	99,62	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.03.1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	218.752.000,00	216.143.400,00	(2.608.600,00)	98,80	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.03.1.03.0001		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	149.732.000,00	149.245.400,00	(486.600,00)	99,67	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.03.1.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	149.732.000,00	149.245.400,00	(486.600,00)	99,67	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.03.1.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.732.000,00	149.245.400,00	(486.600,00)	99,67	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.03.1.03.0002		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	69.020.000,00	66.898.000,00	(2.122.000,00)	96,92	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.03.1.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	69.020.000,00	66.898.000,00	(2.122.000,00)	96,92	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.03.1.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.020.000,00	66.898.000,00	(2.122.000,00)	96,92	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.04		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	4.086.542.944,10	4.049.956.331,00	(36.586.613,10)	99,10	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.04.1.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	3.355.740.396,00	3.339.082.896,00	(16.657.500,00)	99,50	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.04.1.01.0003		Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	3.355.740.396,00	3.339.082.896,00	(16.657.500,00)	99,50	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.04.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.355.740.396,00	3.339.082.896,00	(16.657.500,00)	99,50	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.04.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.355.740.396,00	3.339.082.896,00	(16.657.500,00)	99,50	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.04.1.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	191.419.680,00	189.372.500,00	(2.047.180,00)	98,93	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.04.1.02.0002		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	191.419.680,00	189.372.500,00	(2.047.180,00)	98,93	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.04.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	191.419.680,00	189.372.500,00	(2.047.180,00)	98,93	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.04.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	191.419.680,00	189.372.500,00	(2.047.180,00)	98,93	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.04.1.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	539.382.868,10	521.500.935,00	(17.881.933,10)	96,68	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.04.1.03.0001		Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	539.382.868,10	521.500.935,00	(17.881.933,10)	96,68	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.04.1.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	539.382.868,10	521.500.935,00	(17.881.933,10)	96,68	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.04.1.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	539.382.868,10	521.500.935,00	(17.881.933,10)	96,68	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.05		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	8.000.000,00	7.867.530,00	(132.470,00)	98,34	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.05.1.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	8.000.000,00	7.867.530,00	(132.470,00)	98,34	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.05.1.01.0001		Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	8.000.000,00	7.867.530,00	(132.470,00)	98,34	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.05.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	7.867.530,00	(132.470,00)	98,34	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.05.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	7.867.530,00	(132.470,00)	98,34	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	555.960.895,04	555.738.048,00	(222.847,04)	99,95	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.06.1.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	555.960.895,04	555.738.048,00	(222.847,04)	99,95	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.06.1.01.0002		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	116.678.403,06	116.648.393,00	(30.010,06)	99,97	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.06.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	116.678.403,06	116.648.393,00	(30.010,06)	99,97	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.06.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.678.403,06	116.648.393,00	(30.010,06)	99,97	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.06.1.01.0003		Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	439.282.491,98	439.089.655,00	(192.836,98)	99,95	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.06.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	439.282.491,98	439.089.655,00	(192.836,98)	99,95	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.06.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	439.282.491,98	439.089.655,00	(192.836,98)	99,95	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	149.882.100,00	149.069.100,00	(813.000,00)	99,45	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.07.1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	50.660.400,00	50.253.000,00	(407.400,00)	99,19	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.07.1.01.0002		Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	50.660.400,00	50.253.000,00	(407.400,00)	99,19	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.07.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	50.660.400,00	50.253.000,00	(407.400,00)	99,19	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.07.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.660.400,00	50.253.000,00	(407.400,00)	99,19	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.07.1.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	99.221.700,00	98.816.100,00	(405.600,00)	99,59	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.07.1.02.0006		Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	99.221.700,00	98.816.100,00	(405.600,00)	99,59	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.07.1.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	99.221.700,00	98.816.100,00	(405.600,00)	99,59	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.07.1.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.221.700,00	98.816.100,00	(405.600,00)	99,59	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.077.767.840,45	12.639.842.750,91	(437.925.089,54)	96,65	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	225.753.748,00	224.749.315,00	(1.004.433,00)	99,55	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	142.857.448,00	142.846.344,00	(11.104,00)	99,99	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	142.857.448,00	142.846.344,00	(11.104,00)	99,99	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.857.448,00	142.846.344,00	(11.104,00)	99,99	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	51.584.200,00	51.560.780,00	(23.420,00)	99,95	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	51.584.200,00	51.560.780,00	(23.420,00)	99,95	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.584.200,00	51.560.780,00	(23.420,00)	99,95	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31.312.100,00	30.342.191,00	(969.909,00)	96,90	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	31.312.100,00	30.342.191,00	(969.909,00)	96,90	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.312.100,00	30.342.191,00	(969.909,00)	96,90	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.576.807.609,00	9.260.924.277,00	(315.883.332,00)	96,70	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.110.253.809,00	8.804.230.477,00	(306.023.332,00)	96,64	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.110.253.809,00	8.804.230.477,00	(306.023.332,00)	96,64	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	9.110.253.809,00	8.804.230.477,00	(306.023.332,00)	96,64	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	462.072.000,00	452.212.000,00	(9.860.000,00)	97,86	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	462.072.000,00	452.212.000,00	(9.860.000,00)	97,86	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	461.971.000,00	452.212.000,00	(9.759.000,00)	97,88	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.000,00	0,00	(101.000,00)	0,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.481.800,00	4.481.800,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.481.800,00	4.481.800,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	66.709.448,00	66.497.048,00	(212.400,00)	99,68	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.03.0002		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	66.709.448,00	66.497.048,00	(212.400,00)	99,68	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	66.709.448,00	66.497.048,00	(212.400,00)	99,68	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.709.448,00	66.497.048,00	(212.400,00)	99,68	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	138.383.009,00	138.360.000,00	(23.009,00)	99,98	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	138.383.009,00	138.360.000,00	(23.009,00)	99,98	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	138.383.009,00	138.360.000,00	(23.009,00)	99,98	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.383.009,00	138.360.000,00	(23.009,00)	99,98	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	675.810.700,03	636.883.237,00	(38.927.463,03)	94,23	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.441.000,00	8.441.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.441.000,00	8.441.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.974.600,00	12.821.000,00	(22.153.600,00)	36,65	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.271.000,00	7.271.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.271.000,00	7.271.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	27.703.600,00	5.550.000,00	(22.153.600,00)	20,03	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.703.600,00	5.550.000,00	(22.153.600,00)	20,03	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	23.442.700,03	23.430.200,00	(12.500,03)	99,94	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	23.442.700,03	23.430.200,00	(12.500,03)	99,94	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.442.700,03	23.430.200,00	(12.500,03)	99,94	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	52.743.400,00	52.743.400,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.743.400,00	52.743.400,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	266.041.000,00	259.304.500,00	(6.736.500,00)	97,46	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	266.041.000,00	259.304.500,00	(6.736.500,00)	97,46	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	266.041.000,00	259.304.500,00	(6.736.500,00)	97,46	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	265.568.000,00	255.543.137,00	(10.024.863,00)	96,22	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	265.568.000,00	255.543.137,00	(10.024.863,00)	96,22	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	265.568.000,00	255.543.137,00	(10.024.863,00)	96,22	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.648.334.179,00	1.605.805.705,00	(42.528.474,00)	97,41	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	239.705.310,00	207.141.280,00	(32.564.030,00)	86,41	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	239.705.310,00	207.141.280,00	(32.564.030,00)	86,41	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	239.705.310,00	207.141.280,00	(32.564.030,00)	86,41	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.000.000,00	46.900.000,00	(100.000,00)	99,78	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	47.000.000,00	46.900.000,00	(100.000,00)	99,78	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.000.000,00	46.900.000,00	(100.000,00)	99,78	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.361.628.869,00	1.351.764.425,00	(9.864.444,00)	99,27	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.361.628.869,00	1.351.764.425,00	(9.864.444,00)	99,27	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.361.628.869,00	1.351.764.425,00	(9.864.444,00)	99,27	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	745.969.147,42	706.623.168,91	(39.345.978,51)	94,72	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	162.535.000,00	162.519.300,00	(15.700,00)	99,99	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	162.535.000,00	162.519.300,00	(15.700,00)	99,99	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.535.000,00	162.519.300,00	(15.700,00)	99,99	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	68.997.278,51	29.667.000,00	(39.330.278,51)	42,99	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	68.997.278,51	29.667.000,00	(39.330.278,51)	42,99	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.997.278,51	29.667.000,00	(39.330.278,51)	42,99	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	514.436.868,91	514.436.868,91	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	514.436.868,91	514.436.868,91	0,00	100,00	



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**

Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**

Organisasi : **Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.09.3.27.0.00.09.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	385.387.254,00	133.906.900,00	(251.480.354,00)	34,74	
	2.09.3.27.0.00.09.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	385.387.254,00	133.906.900,00	(251.480.354,00)	34,74	
	2.09.3.27.0.00.09.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	385.387.254,00	133.906.900,00	(251.480.354,00)	34,74	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000		5	BELANJA DAERAH	24.766.009.059,50	22.292.246.948,00	(2.473.762.111,50)	90,01	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.803.507.070,10	1.173.800.426,00	(629.706.644,10)	65,08	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.1.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1.159.164.454,10	930.859.537,00	(228.304.917,10)	80,30	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.1.01.0002		Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1.112.711.818,10	893.419.437,00	(219.292.381,10)	80,29	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.112.711.818,10	893.419.437,00	(219.292.381,10)	80,29	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.112.711.818,10	893.419.437,00	(219.292.381,10)	80,29	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.1.01.0008		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	23.129.636,00	20.089.000,00	(3.040.636,00)	86,85	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.1.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	23.129.636,00	20.089.000,00	(3.040.636,00)	86,85	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.1.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.129.636,00	20.089.000,00	(3.040.636,00)	86,85	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.1.01.0013		Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	23.323.000,00	17.351.100,00	(5.971.900,00)	74,39	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.1.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	23.323.000,00	17.351.100,00	(5.971.900,00)	74,39	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.1.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.323.000,00	17.351.100,00	(5.971.900,00)	74,39	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.1.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	391.968.956,00	39.969.000,00	(351.999.956,00)	10,19	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.1.02.0004		Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	56.446.956,00	23.540.000,00	(32.906.956,00)	41,70	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.1.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	56.446.956,00	23.540.000,00	(32.906.956,00)	41,70	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.1.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.446.956,00	23.540.000,00	(32.906.956,00)	41,70	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.1.02.0007		Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	335.522.000,00	16.429.000,00	(319.093.000,00)	4,89	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.1.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	335.522.000,00	16.429.000,00	(319.093.000,00)	4,89	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.1.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	335.522.000,00	16.429.000,00	(319.093.000,00)	4,89	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.1.04		Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	252.373.660,00	202.971.889,00	(49.401.771,00)	80,42	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.1.04.0002		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	252.373.660,00	202.971.889,00	(49.401.771,00)	80,42	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.1.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	252.373.660,00	202.971.889,00	(49.401.771,00)	80,42	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.1.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	252.373.660,00	202.971.889,00	(49.401.771,00)	80,42	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.04		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	133.571.210,00	43.616.700,00	(89.954.510,00)	32,65	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.04.1.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	22.732.010,00	11.200.700,00	(11.531.310,00)	49,27	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.04.1.01.0001		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	22.732.010,00	11.200.700,00	(11.531.310,00)	49,27	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.04.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	22.732.010,00	11.200.700,00	(11.531.310,00)	49,27	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.04.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.732.010,00	11.200.700,00	(11.531.310,00)	49,27	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.04.1.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	110.839.200,00	32.416.000,00	(78.423.200,00)	29,24	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.04.1.02.0002		Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	50.707.500,00	26.866.900,00	(23.840.600,00)	52,98	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.04.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	50.707.500,00	26.866.900,00	(23.840.600,00)	52,98	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.04.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.707.500,00	26.866.900,00	(23.840.600,00)	52,98	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.04.1.02.0004		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	60.131.700,00	5.549.100,00	(54.582.600,00)	9,22	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.04.1.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	60.131.700,00	5.549.100,00	(54.582.600,00)	9,22	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.04.1.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.131.700,00	5.549.100,00	(54.582.600,00)	9,22	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.05		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	47.169.787,00	25.901.500,00	(21.268.287,00)	54,91	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.05.1.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	47.169.787,00	25.901.500,00	(21.268.287,00)	54,91	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.05.1.01.0006		Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	29.422.793,00	8.802.900,00	(20.619.893,00)	29,91	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.05.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	29.422.793,00	8.802.900,00	(20.619.893,00)	29,91	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.05.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.422.793,00	8.802.900,00	(20.619.893,00)	29,91	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.05.1.01.0009		Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	17.746.994,00	17.098.600,00	(648.394,00)	96,34	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.05.1.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	17.746.994,00	17.098.600,00	(648.394,00)	96,34	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.05.1.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.746.994,00	17.098.600,00	(648.394,00)	96,34	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22.781.760.992,40	21.048.928.322,00	(1.732.832.670,40)	92,39	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	295.133.208,40	269.514.384,00	(25.618.824,40)	91,31	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	162.576.208,40	153.545.652,00	(9.030.556,40)	94,44	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	162.576.208,40	153.545.652,00	(9.030.556,40)	94,44	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.576.208,40	153.545.652,00	(9.030.556,40)	94,44	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	132.557.000,00	115.968.732,00	(16.588.268,00)	87,48	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	132.557.000,00	115.968.732,00	(16.588.268,00)	87,48	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.557.000,00	115.968.732,00	(16.588.268,00)	87,48	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.225.375.344,00	17.570.373.228,00	(655.002.116,00)	96,40	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.559.521.344,00	16.909.011.228,00	(650.510.116,00)	96,29	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	17.559.521.344,00	16.909.011.228,00	(650.510.116,00)	96,29	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	17.559.521.344,00	16.909.011.228,00	(650.510.116,00)	96,29	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	665.854.000,00	661.362.000,00	(4.492.000,00)	99,32	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	665.854.000,00	661.362.000,00	(4.492.000,00)	99,32	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	665.152.000,00	661.362.000,00	(3.790.000,00)	99,43	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	702.000,00	0,00	(702.000,00)	0,00	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	885.869.937,00	739.204.712,00	(146.665.225,00)	83,44	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.624.812,00	6.705.900,00	(918.912,00)	87,94	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.624.812,00	6.705.900,00	(918.912,00)	87,94	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.624.812,00	6.705.900,00	(918.912,00)	87,94	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	242.922.544,00	136.444.600,00	(106.477.944,00)	56,16	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	312.354,00	0,00	(312.354,00)	0,00	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	312.354,00	0,00	(312.354,00)	0,00	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	242.610.190,00	136.444.600,00	(106.165.590,00)	56,24	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	242.610.190,00	136.444.600,00	(106.165.590,00)	56,24	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	121.147.731,00	96.237.000,00	(24.910.731,00)	79,43	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	121.147.731,00	96.237.000,00	(24.910.731,00)	79,43	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.147.731,00	96.237.000,00	(24.910.731,00)	79,43	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.761.110,00	8.571.500,00	(1.189.610,00)	87,81	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	9.761.110,00	8.571.500,00	(1.189.610,00)	87,81	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.761.110,00	8.571.500,00	(1.189.610,00)	87,81	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.968.360,00	3.740.000,00	(4.228.360,00)	46,93	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	7.968.360,00	3.740.000,00	(4.228.360,00)	46,93	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.968.360,00	3.740.000,00	(4.228.360,00)	46,93	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	42.723.000,00	34.250.000,00	(8.473.000,00)	80,16	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	42.723.000,00	34.250.000,00	(8.473.000,00)	80,16	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.723.000,00	34.250.000,00	(8.473.000,00)	80,16	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	453.722.380,00	453.255.712,00	(466.668,00)	99,89	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	453.722.380,00	453.255.712,00	(466.668,00)	99,89	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	453.722.380,00	453.255.712,00	(466.668,00)	99,89	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	521.906.000,00	0,00	(521.906.000,00)	0,00	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	521.906.000,00	0,00	(521.906.000,00)	0,00	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.07.0002	5.1	BELANJA OPERASI	306.000,00	0,00	(306.000,00)	0,00	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.07.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	306.000,00	0,00	(306.000,00)	0,00	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.07.0002	5.2	BELANJA MODAL	521.600.000,00	0,00	(521.600.000,00)	0,00	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.07.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	521.600.000,00	0,00	(521.600.000,00)	0,00	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.196.470.493,00	2.152.105.686,00	(44.364.807,00)	97,98	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.615.550,00	6.000.000,00	(6.615.550,00)	47,56	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.615.550,00	6.000.000,00	(6.615.550,00)	47,56	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.615.550,00	6.000.000,00	(6.615.550,00)	47,56	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	99.567.215,00	91.905.309,00	(7.661.906,00)	92,30	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	99.567.215,00	91.905.309,00	(7.661.906,00)	92,30	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.567.215,00	91.905.309,00	(7.661.906,00)	92,30	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.713.240,00	27.195.000,00	(19.518.240,00)	58,21	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	46.713.240,00	27.195.000,00	(19.518.240,00)	58,21	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.713.240,00	27.195.000,00	(19.518.240,00)	58,21	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.037.574.488,00	2.027.005.377,00	(10.569.111,00)	99,48	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.037.574.488,00	2.027.005.377,00	(10.569.111,00)	99,48	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.037.574.488,00	2.027.005.377,00	(10.569.111,00)	99,48	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	657.006.010,00	317.730.312,00	(339.275.698,00)	48,36	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	385.375.700,00	258.818.312,00	(126.557.388,00)	67,15	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	385.375.700,00	258.818.312,00	(126.557.388,00)	67,15	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	385.375.700,00	258.818.312,00	(126.557.388,00)	67,15	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74.360.000,00	49.968.000,00	(24.392.000,00)	67,19	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	74.360.000,00	49.968.000,00	(24.392.000,00)	67,19	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.360.000,00	49.968.000,00	(24.392.000,00)	67,19	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	197.270.310,00	8.944.000,00	(188.326.310,00)	4,53	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	197.270.310,00	8.944.000,00	(188.326.310,00)	4,53	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	197.270.310,00	8.944.000,00	(188.326.310,00)	4,53	



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**
Organisasi : **Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.09.3.27.0.00.09.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	385.387.254,00	133.906.900,00	(251.480.354,00)	34,74	
	2.09.3.27.0.00.09.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	385.387.254,00	133.906.900,00	(251.480.354,00)	34,74	
	2.09.3.27.0.00.09.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	385.387.254,00	133.906.900,00	(251.480.354,00)	34,74	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000		5	BELANJA DAERAH	16.734.795.184,50	7.227.562.621,00	(9.507.232.563,50)	43,18	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	7.161.044.012,00	2.001.882.170,00	(5.159.161.842,00)	27,95	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.02.1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	5.066.233.487,00	1.072.239.000,00	(3.993.994.487,00)	21,16	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.02.1.01.0001		Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	5.066.233.487,00	1.072.239.000,00	(3.993.994.487,00)	21,16	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.02.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.066.233.487,00	1.072.239.000,00	(3.993.994.487,00)	21,16	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.02.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.066.233.487,00	1.072.239.000,00	(3.993.994.487,00)	21,16	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.02.1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	940.533.012,00	917.040.170,00	(23.492.842,00)	97,50	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.02.1.02.0001		Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	40.700.776,00	40.384.000,00	(316.776,00)	99,22	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.02.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	40.700.776,00	40.384.000,00	(316.776,00)	99,22	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.02.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.700.776,00	40.384.000,00	(316.776,00)	99,22	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.02.1.02.0005		Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	899.832.236,00	876.656.170,00	(23.176.066,00)	97,42	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.02.1.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	899.832.236,00	876.656.170,00	(23.176.066,00)	97,42	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.02.1.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	899.832.236,00	876.656.170,00	(23.176.066,00)	97,42	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.02.1.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	1.154.277.513,00	12.603.000,00	(1.141.674.513,00)	1,09	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.02.1.05.0005		Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	1.154.277.513,00	12.603.000,00	(1.141.674.513,00)	1,09	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.02.1.05.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.154.277.513,00	12.603.000,00	(1.141.674.513,00)	1,09	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.02.1.05.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.154.277.513,00	12.603.000,00	(1.141.674.513,00)	1,09	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	7.134.223.785,50	3.638.866.702,00	(3.495.357.083,50)	51,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.03.1.01		Penataan Prasarana Pertanian	7.134.223.785,50	3.638.866.702,00	(3.495.357.083,50)	51,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.03.1.01.0007		Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	874.166.100,00	871.032.000,00	(3.134.100,00)	99,64	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.03.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	32.446.100,00	32.402.000,00	(44.100,00)	99,86	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.03.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.446.100,00	32.402.000,00	(44.100,00)	99,86	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.03.1.01.0007	5.2	BELANJA MODAL	841.720.000,00	838.630.000,00	(3.090.000,00)	99,63	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.03.1.01.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	841.720.000,00	838.630.000,00	(3.090.000,00)	99,63	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.03.1.01.0009		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	695.462.750,00	144.885.716,00	(550.577.034,00)	20,83	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.03.1.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	678.368.750,00	144.885.716,00	(533.483.034,00)	21,35	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.03.1.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	678.368.750,00	144.885.716,00	(533.483.034,00)	21,35	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.03.1.01.0009	5.2	BELANJA MODAL	17.094.000,00	0,00	(17.094.000,00)	0,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.03.1.01.0009	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.094.000,00	0,00	(17.094.000,00)	0,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.03.1.01.0010		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	2.449.895.350,00	2.386.680.281,00	(63.215.069,00)	97,41	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.03.1.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	341.595.350,00	339.850.250,00	(1.745.100,00)	99,48	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.03.1.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	341.595.350,00	339.850.250,00	(1.745.100,00)	99,48	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.03.1.01.0010	5.2	BELANJA MODAL	2.108.300.000,00	2.046.830.031,00	(61.469.969,00)	97,08	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.03.1.01.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.108.300.000,00	1.049.572.000,00	(58.728.000,00)	94,70	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.03.1.01.0010	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.000.000.000,00	997.258.031,00	(2.741.969,00)	99,72	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.03.1.01.0013		Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	3.114.699.585,50	236.268.705,00	(2.878.430.880,50)	7,58	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.03.1.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	3.114.699.585,50	236.268.705,00	(2.878.430.880,50)	7,58	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.03.1.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.114.699.585,50	236.268.705,00	(2.878.430.880,50)	7,58	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	321.779.968,00	60.655.085,00	(261.124.883,00)	18,84	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.04.1.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	49.252.085,00	41.343.085,00	(7.909.000,00)	83,94	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.04.1.01.0006		Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis	49.252.085,00	41.343.085,00	(7.909.000,00)	83,94	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.04.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	49.252.085,00	41.343.085,00	(7.909.000,00)	83,94	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.04.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.252.085,00	41.343.085,00	(7.909.000,00)	83,94	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.04.1.03		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	253.735.258,00	16.042.000,00	(237.693.258,00)	6,32	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.04.1.03.0003		Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	253.735.258,00	16.042.000,00	(237.693.258,00)	6,32	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.04.1.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	253.735.258,00	16.042.000,00	(237.693.258,00)	6,32	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.04.1.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	253.735.258,00	16.042.000,00	(237.693.258,00)	6,32	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.04.1.05		Kesejahteraan Hewan	18.792.625,00	3.270.000,00	(15.522.625,00)	17,40	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.04.1.05.0003		Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	18.792.625,00	3.270.000,00	(15.522.625,00)	17,40	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.04.1.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	18.792.625,00	3.270.000,00	(15.522.625,00)	17,40	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.04.1.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.792.625,00	3.270.000,00	(15.522.625,00)	17,40	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.05		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	132.228.531,00	127.021.801,00	(5.206.730,00)	96,06	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.05.1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	132.228.531,00	127.021.801,00	(5.206.730,00)	96,06	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.05.1.01.0001		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	132.228.531,00	127.021.801,00	(5.206.730,00)	96,06	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.05.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	132.228.531,00	127.021.801,00	(5.206.730,00)	96,06	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.05.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.228.531,00	127.021.801,00	(5.206.730,00)	96,06	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.207.128.050,00	714.134.914,00	(492.993.136,00)	59,15	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.07.1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	1.207.128.050,00	714.134.914,00	(492.993.136,00)	59,15	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.07.1.02.0002		Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	1.207.128.050,00	714.134.914,00	(492.993.136,00)	59,15	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.07.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.207.128.050,00	714.134.914,00	(492.993.136,00)	59,15	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.07.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.207.128.050,00	714.134.914,00	(492.993.136,00)	59,15	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	778.390.838,00	685.001.949,00	(93.388.889,00)	88,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	134.101.936,00	90.952.192,00	(43.149.744,00)	67,82	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.01.1.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.273.492,00	6.240.420,00	(33.072,00)	99,47	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.01.1.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.273.492,00	6.240.420,00	(33.072,00)	99,47	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.01.1.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.273.492,00	6.240.420,00	(33.072,00)	99,47	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.01.1.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.910.744,00	11.868.867,00	(41.877,00)	99,64	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.01.1.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	11.910.744,00	11.868.867,00	(41.877,00)	99,64	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.01.1.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.910.744,00	11.868.867,00	(41.877,00)	99,64	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.01.1.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.993.751,00	15.676.985,00	(316.766,00)	98,01	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	15.993.751,00	15.676.985,00	(316.766,00)	98,01	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.993.751,00	15.676.985,00	(316.766,00)	98,01	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.245.300,00	4.196.500,00	(48.800,00)	98,85	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.245.300,00	4.196.500,00	(48.800,00)	98,85	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.245.300,00	4.196.500,00	(48.800,00)	98,85	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.01.1.06.0007		Penyediaan Bahan/Material	58.000.875,00	26.002.020,00	(31.998.855,00)	44,83	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.01.1.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	58.000.875,00	26.002.020,00	(31.998.855,00)	44,83	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.01.1.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.000.875,00	26.002.020,00	(31.998.855,00)	44,83	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.01.1.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.145.518,00	3.090.800,00	(54.718,00)	98,26	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.01.1.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	3.145.518,00	3.090.800,00	(54.718,00)	98,26	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.145.518,00	3.090.800,00	(54.718,00)	98,26	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34.532.256,00	23.876.600,00	(10.655.656,00)	69,14	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	34.532.256,00	23.876.600,00	(10.655.656,00)	69,14	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.532.256,00	23.876.600,00	(10.655.656,00)	69,14	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.004.854,00	29.800.000,00	(204.854,00)	99,31	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.01.1.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.004.854,00	29.800.000,00	(204.854,00)	99,31	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.01.1.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	30.004.854,00	29.800.000,00	(204.854,00)	99,31	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.01.1.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.004.854,00	29.800.000,00	(204.854,00)	99,31	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	428.989.333,00	413.807.407,00	(15.181.926,00)	96,46	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	199.628.693,00	187.107.794,00	(12.520.899,00)	93,72	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	199.628.693,00	187.107.794,00	(12.520.899,00)	93,72	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.628.693,00	187.107.794,00	(12.520.899,00)	93,72	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	229.360.640,00	226.699.613,00	(2.661.027,00)	98,83	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	229.360.640,00	226.699.613,00	(2.661.027,00)	98,83	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	229.360.640,00	226.699.613,00	(2.661.027,00)	98,83	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	185.294.715,00	150.442.350,00	(34.852.365,00)	81,19	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	96.447.015,00	91.169.350,00	(5.277.665,00)	94,52	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	96.447.015,00	91.169.350,00	(5.277.665,00)	94,52	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.447.015,00	91.169.350,00	(5.277.665,00)	94,52	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.307.500,00	57.625.000,00	(22.682.500,00)	71,75	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	80.307.500,00	57.625.000,00	(22.682.500,00)	71,75	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.307.500,00	57.625.000,00	(22.682.500,00)	71,75	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.01.1.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.540.200,00	1.648.000,00	(6.892.200,00)	19,29	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.01.1.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	8.540.200,00	1.648.000,00	(6.892.200,00)	19,29	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.01.1.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.540.200,00	1.648.000,00	(6.892.200,00)	19,29	



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**
Organisasi : **Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.11.3.28.0.00.10.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	317.220.000,00	317.220.000,00	0,00	100,00	
	2.11.3.28.0.00.10.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	317.220.000,00	317.220.000,00	0,00	100,00	
	2.11.3.28.0.00.10.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	317.220.000,00	317.220.000,00	0,00	100,00	
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000		5	BELANJA DAERAH	1.550.373.467,00	1.336.997.767,00	(213.375.700,00)	86,23	
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.03		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	873.980.300,00	721.486.889,00	(152.493.411,00)	82,55	
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.03.1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	15.606.000,00	15.292.000,00	(314.000,00)	97,98	
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.03.1.03.0005		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	15.606.000,00	15.292.000,00	(314.000,00)	97,98	
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.03.1.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	15.606.000,00	15.292.000,00	(314.000,00)	97,98	
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.03.1.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.606.000,00	15.292.000,00	(314.000,00)	97,98	
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.03.1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	425.186.300,00	384.177.286,00	(41.009.014,00)	90,35	
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.03.1.04.0004		Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	425.186.300,00	384.177.286,00	(41.009.014,00)	90,35	
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.03.1.04.0004	5.1	BELANJA OPERASI	388.887.150,00	363.177.286,00	(25.709.864,00)	93,38	
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.03.1.04.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	388.887.150,00	363.177.286,00	(25.709.864,00)	93,38	
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.03.1.04.0004	5.2	BELANJA MODAL	36.299.150,00	21.000.000,00	(15.299.150,00)	57,85	
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.03.1.04.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.299.150,00	21.000.000,00	(15.299.150,00)	57,85	
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.03.1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	337.248.000,00	232.288.800,00	(104.959.200,00)	68,87	
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.03.1.05.0001		Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	220.000.000,00	217.292.800,00	(2.707.200,00)	98,76	
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.03.1.05.0001	5.1	BELANJA OPERASI	212.499.925,00	209.842.800,00	(2.657.125,00)	98,74	
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.03.1.05.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	212.499.925,00	209.842.800,00	(2.657.125,00)	98,74	
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.03.1.05.0001	5.2	BELANJA MODAL	7.500.075,00	7.450.000,00	(50.075,00)	99,33	
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.03.1.05.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.500.075,00	7.450.000,00	(50.075,00)	99,33	
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.03.1.05.0005		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	117.248.000,00	14.996.000,00	(102.252.000,00)	12,78	
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.03.1.05.0005	5.1	BELANJA OPERASI	117.248.000,00	14.996.000,00	(102.252.000,00)	12,78	
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.03.1.05.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.248.000,00	14.996.000,00	(102.252.000,00)	12,78	
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.03.1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	95.940.000,00	89.728.803,00	(6.211.197,00)	93,52	
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.03.1.07.0002		Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	95.940.000,00	89.728.803,00	(6.211.197,00)	93,52	
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.03.1.07.0002	5.1	BELANJA OPERASI	85.143.925,00	79.278.803,00	(5.865.122,00)	93,11	
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.03.1.07.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.143.925,00	79.278.803,00	(5.865.122,00)	93,11	
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.03.1.07.0002	5.2	BELANJA MODAL	10.796.075,00	10.450.000,00	(346.075,00)	96,79	
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.03.1.07.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.796.075,00	10.450.000,00	(346.075,00)	96,79	
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	676.393.167,00	615.510.878,00	(60.882.289,00)	90,99	
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.05.1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	676.393.167,00	615.510.878,00	(60.882.289,00)	90,99	
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.05.1.01.0002		Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	644.725.167,00	585.448.878,00	(59.276.289,00)	90,80	
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.05.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	623.426.167,00	564.348.878,00	(59.077.289,00)	90,52	
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.05.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	623.426.167,00	564.348.878,00	(59.077.289,00)	90,52	
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.05.1.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	21.299.000,00	21.100.000,00	(199.000,00)	99,06	
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.05.1.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.299.000,00	21.100.000,00	(199.000,00)	99,06	
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.05.1.01.0003		Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	31.668.000,00	30.062.000,00	(1.606.000,00)	94,92	
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.05.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	31.668.000,00	30.062.000,00	(1.606.000,00)	94,92	
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.05.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.668.000,00	30.062.000,00	(1.606.000,00)	94,92	



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**

Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**

Organisasi : **Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.11.3.28.0.00.10.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	317.220.000,00	317.220.000,00	0,00	100,00	
	2.11.3.28.0.00.10.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	317.220.000,00	317.220.000,00	0,00	100,00	
	2.11.3.28.0.00.10.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	317.220.000,00	317.220.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000		5	BELANJA DAERAH	36.111.720.447,00	33.235.468.363,00	(2.876.252.084,00)	92,03	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.02		PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	366.213.910,00	355.188.472,00	(11.025.438,00)	96,98	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.02.1.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	366.213.910,00	355.188.472,00	(11.025.438,00)	96,98	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.02.1.02.0002		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJP/RPJMD	366.213.910,00	355.188.472,00	(11.025.438,00)	96,98	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.02.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	366.213.910,00	355.188.472,00	(11.025.438,00)	96,98	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.02.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	366.213.910,00	355.188.472,00	(11.025.438,00)	96,98	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.05		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	214.235.911,00	151.298.245,00	(62.937.666,00)	70,62	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.05.1.01		Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	214.235.911,00	151.298.245,00	(62.937.666,00)	70,62	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.05.1.01.0002		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	214.235.911,00	151.298.245,00	(62.937.666,00)	70,62	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.05.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	214.235.911,00	151.298.245,00	(62.937.666,00)	70,62	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.05.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	214.235.911,00	151.298.245,00	(62.937.666,00)	70,62	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.08		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	181.589.541,00	177.987.091,00	(3.602.450,00)	98,01	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.08.1.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	181.589.541,00	177.987.091,00	(3.602.450,00)	98,01	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.08.1.01.0002		Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	181.589.541,00	177.987.091,00	(3.602.450,00)	98,01	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.08.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	181.589.541,00	177.987.091,00	(3.602.450,00)	98,01	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.08.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	181.589.541,00	177.987.091,00	(3.602.450,00)	98,01	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.10.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	50.720.600,00	50.720.600,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.10.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.720.600,00	50.720.600,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.298.306.000,00	52.997.000,00	(1.245.309.000,00)	4,08	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.11.1.01		Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	1.298.306.000,00	52.997.000,00	(1.245.309.000,00)	4,08	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.11.1.01.0007		Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	1.298.306.000,00	52.997.000,00	(1.245.309.000,00)	4,08	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.11.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	1.298.306.000,00	52.997.000,00	(1.245.309.000,00)	4,08	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.11.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.298.306.000,00	52.997.000,00	(1.245.309.000,00)	4,08	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	34.000.654.485,00	32.447.276.955,00	(1.553.377.530,00)	95,43	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	181.327.620,00	176.900.796,00	(4.426.824,00)	97,55	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	76.855.620,00	73.034.702,00	(3.820.918,00)	95,02	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	76.855.620,00	73.034.702,00	(3.820.918,00)	95,02	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.855.620,00	73.034.702,00	(3.820.918,00)	95,02	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	104.472.000,00	103.866.094,00	(605.906,00)	99,42	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	104.472.000,00	103.866.094,00	(605.906,00)	99,42	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.472.000,00	103.866.094,00	(605.906,00)	99,42	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.436.947.874,00	26.532.474.269,00	(904.473.605,00)	96,70	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.879.956.874,00	25.984.062.269,00	(895.894.605,00)	96,66	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	26.879.956.874,00	25.984.062.269,00	(895.894.605,00)	96,66	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	26.879.956.874,00	25.984.062.269,00	(895.894.605,00)	96,66	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	556.991.000,00	548.412.000,00	(8.579.000,00)	98,45	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	556.991.000,00	548.412.000,00	(8.579.000,00)	98,45	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	556.812.000,00	548.412.000,00	(8.400.000,00)	98,49	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	179.000,00	0,00	(179.000,00)	0,00	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.664.000,00	23.715.096,00	(1.948.904,00)	92,40	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.664.000,00	23.715.096,00	(1.948.904,00)	92,40	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	25.664.000,00	23.715.096,00	(1.948.904,00)	92,40	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.664.000,00	23.715.096,00	(1.948.904,00)	92,40	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.098.176.158,00	1.027.285.624,00	(70.890.534,00)	93,54	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	54.853.400,00	52.426.000,00	(2.427.400,00)	95,57	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	54.853.400,00	52.426.000,00	(2.427.400,00)	95,57	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.853.400,00	52.426.000,00	(2.427.400,00)	95,57	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.822.000,00	4.014.850,00	(1.807.150,00)	68,95	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.822.000,00	4.014.850,00	(1.807.150,00)	68,95	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.822.000,00	4.014.850,00	(1.807.150,00)	68,95	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	36.785.272,00	26.076.000,00	(10.709.272,00)	70,88	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	33.180.272,00	26.076.000,00	(7.104.272,00)	78,58	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.180.272,00	26.076.000,00	(7.104.272,00)	78,58	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.06.0003	5.2	BELANJA MODAL	3.605.000,00	0,00	(3.605.000,00)	0,00	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.06.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.605.000,00	0,00	(3.605.000,00)	0,00	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	181.135.480,00	150.164.925,00	(30.970.555,00)	82,90	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	181.135.480,00	150.164.925,00	(30.970.555,00)	82,90	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	181.135.480,00	150.164.925,00	(30.970.555,00)	82,90	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	74.167.894,00	65.870.100,00	(8.297.794,00)	88,81	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	74.167.894,00	65.870.100,00	(8.297.794,00)	88,81	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.167.894,00	65.870.100,00	(8.297.794,00)	88,81	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	194.631.800,00	194.435.000,00	(196.800,00)	99,89	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	194.631.800,00	194.435.000,00	(196.800,00)	99,89	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	194.631.800,00	194.435.000,00	(196.800,00)	99,89	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.06.0007		Penyediaan Bahan/Material	7.159.200,00	2.166.000,00	(4.993.200,00)	30,25	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	7.159.200,00	2.166.000,00	(4.993.200,00)	30,25	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.159.200,00	2.166.000,00	(4.993.200,00)	30,25	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	38.264.000,00	36.602.800,00	(1.661.200,00)	95,65	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	38.264.000,00	36.602.800,00	(1.661.200,00)	95,65	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.264.000,00	36.602.800,00	(1.661.200,00)	95,65	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	505.357.112,00	495.529.949,00	(9.827.163,00)	98,05	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	505.357.112,00	495.529.949,00	(9.827.163,00)	98,05	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	505.357.112,00	495.529.949,00	(9.827.163,00)	98,05	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.323.322.326,00	2.034.261.824,00	(289.060.502,00)	87,55	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.769.581.822,00	1.627.986.224,00	(141.595.598,00)	91,99	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.07.0002	5.1	BELANJA OPERASI	111.333.822,00	34.186.224,00	(77.147.598,00)	30,70	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.07.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.333.822,00	34.186.224,00	(77.147.598,00)	30,70	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.07.0002	5.2	BELANJA MODAL	1.658.248.000,00	1.593.800.000,00	(64.448.000,00)	96,11	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.07.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.658.248.000,00	1.593.800.000,00	(64.448.000,00)	96,11	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	553.740.504,00	406.275.600,00	(147.464.904,00)	73,36	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.747.000,00	4.675.600,00	(1.071.400,00)	81,35	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.747.000,00	4.675.600,00	(1.071.400,00)	81,35	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	547.993.504,00	401.600.000,00	(146.393.504,00)	73,28	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	547.993.504,00	401.600.000,00	(146.393.504,00)	73,28	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.402.370.657,00	2.309.525.146,00	(92.845.511,00)	96,13	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	186.862.833,00	164.294.333,00	(22.568.500,00)	87,92	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	186.862.833,00	164.294.333,00	(22.568.500,00)	87,92	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	186.862.833,00	164.294.333,00	(22.568.500,00)	87,92	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	140.850.000,00	139.505.000,00	(1.345.000,00)	99,04	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	140.850.000,00	139.505.000,00	(1.345.000,00)	99,04	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.850.000,00	139.505.000,00	(1.345.000,00)	99,04	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.072.907.824,00	2.003.975.813,00	(68.932.011,00)	96,67	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.072.907.824,00	2.003.975.813,00	(68.932.011,00)	96,67	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.072.907.824,00	2.003.975.813,00	(68.932.011,00)	96,67	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	532.845.850,00	343.114.200,00	(189.731.650,00)	64,39	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	317.624.700,00	313.464.200,00	(4.160.500,00)	98,69	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	317.624.700,00	313.464.200,00	(4.160.500,00)	98,69	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	317.624.700,00	313.464.200,00	(4.160.500,00)	98,69	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.970.000,00	29.650.000,00	(1.320.000,00)	95,73	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	30.970.000,00	29.650.000,00	(1.320.000,00)	95,73	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.970.000,00	29.650.000,00	(1.320.000,00)	95,73	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	184.251.150,00	0,00	(184.251.150,00)	0,00	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	184.251.150,00	0,00	(184.251.150,00)	0,00	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	184.251.150,00	0,00	(184.251.150,00)	0,00	



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
Organisasi : **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000		5	BELANJA DAERAH	326.308.420,00	326.307.895,00	(525,00)	99,99	
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	62.198.990,00	62.198.465,00	(525,00)	99,99	
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.02.1.02		Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	62.198.990,00	62.198.465,00	(525,00)	99,99	
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.02.1.02.0004		Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	62.198.990,00	62.198.465,00	(525,00)	99,99	
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.02.1.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	62.198.990,00	62.198.465,00	(525,00)	99,99	
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.02.1.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.198.990,00	62.198.465,00	(525,00)	99,99	
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.04.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	239.415.330,00	239.415.330,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.04.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	239.415.330,00	239.415.330,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.05.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	24.694.100,00	24.694.100,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.05.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.694.100,00	24.694.100,00	0,00	100,00	



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**

Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Organisasi : **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000		5	BELANJA DAERAH	17.168.500.302,00	15.775.273.011,00	(1.393.227.291,00)	91,88	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.02		PROGRAM PENATAAN DESA	73.373.000,00	72.728.560,00	(644.440,00)	99,12	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.02.1.01		Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	73.373.000,00	72.728.560,00	(644.440,00)	99,12	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.02.1.01.0003		Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	14.940.000,00	14.937.500,00	(2.500,00)	99,98	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.02.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	14.940.000,00	14.937.500,00	(2.500,00)	99,98	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.02.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.940.000,00	14.937.500,00	(2.500,00)	99,98	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.02.1.01.0004		Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	58.433.000,00	57.791.060,00	(641.940,00)	98,90	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.02.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	58.433.000,00	57.791.060,00	(641.940,00)	98,90	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.02.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.433.000,00	57.791.060,00	(641.940,00)	98,90	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.03		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	34.047.500,00	33.959.252,00	(88.248,00)	99,74	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.03.1.01		Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	34.047.500,00	33.959.252,00	(88.248,00)	99,74	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.03.1.01.0002		Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	28.271.000,00	28.217.952,00	(53.048,00)	99,81	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.03.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	28.271.000,00	28.217.952,00	(53.048,00)	99,81	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.03.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.271.000,00	28.217.952,00	(53.048,00)	99,81	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.03.1.01.0003		Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	5.776.500,00	5.741.300,00	(35.200,00)	99,39	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.03.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	5.776.500,00	5.741.300,00	(35.200,00)	99,39	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.03.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.776.500,00	5.741.300,00	(35.200,00)	99,39	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.04		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	558.746.800,00	558.136.500,00	(610.300,00)	99,89	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.04.1.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	558.746.800,00	558.136.500,00	(610.300,00)	99,89	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.04.1.01.0005		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	397.638.000,00	397.073.300,00	(564.700,00)	99,85	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.04.1.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	397.638.000,00	397.073.300,00	(564.700,00)	99,85	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.04.1.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	397.638.000,00	397.073.300,00	(564.700,00)	99,85	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.04.1.01.0008		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	161.108.800,00	161.063.200,00	(45.600,00)	99,97	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.04.1.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	161.108.800,00	161.063.200,00	(45.600,00)	99,97	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.04.1.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.108.800,00	161.063.200,00	(45.600,00)	99,97	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	4.011.388.472,00	2.945.745.728,00	(1.065.642.744,00)	73,43	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.05.1.01		Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4.011.388.472,00	2.945.745.728,00	(1.065.642.744,00)	73,43	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.05.1.01.0002		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	238.530.000,00	238.332.406,00	(197.594,00)	99,91	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.05.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	238.530.000,00	238.332.406,00	(197.594,00)	99,91	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.05.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	238.530.000,00	238.332.406,00	(197.594,00)	99,91	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.05.1.01.0003		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	345.100.000,00	317.019.420,00	(28.080.580,00)	91,86	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.05.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	345.100.000,00	317.019.420,00	(28.080.580,00)	91,86	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.05.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	345.100.000,00	317.019.420,00	(28.080.580,00)	91,86	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.05.1.01.0004		Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	947.344.700,00	265.678.100,00	(681.666.600,00)	28,04	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.05.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	947.344.700,00	265.678.100,00	(681.666.600,00)	28,04	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.05.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.844.700,00	90.678.100,00	(166.600,00)	99,81	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.05.1.01.0004	5.1.05	Belanja Hibah	856.500.000,00	175.000.000,00	(681.500.000,00)	20,43	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.05.1.01.0006		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	285.414.500,00	285.003.248,00	(411.252,00)	99,85	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.05.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	285.414.500,00	285.003.248,00	(411.252,00)	99,85	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.05.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	285.414.500,00	285.003.248,00	(411.252,00)	99,85	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.05.1.01.0009		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	2.194.999.272,00	1.839.712.554,00	(355.286.718,00)	83,81	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.05.1.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	2.180.423.272,00	1.839.712.554,00	(340.710.718,00)	84,37	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.05.1.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.180.423.272,00	1.839.712.554,00	(340.710.718,00)	84,37	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.05.1.01.0009	5.2	BELANJA MODAL	14.576.000,00	0,00	(14.576.000,00)	0,00	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.05.1.01.0009	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.576.000,00	0,00	(14.576.000,00)	0,00	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.490.944.530,00	12.164.702.971,00	(326.241.559,00)	97,38	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	121.567.000,00	120.346.129,00	(1.220.871,00)	98,99	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.535.500,00	12.297.752,00	(237.748,00)	98,10	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.535.500,00	12.297.752,00	(237.748,00)	98,10	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.535.500,00	12.297.752,00	(237.748,00)	98,10	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	44.260.700,00	43.423.178,00	(837.522,00)	98,10	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	44.260.700,00	43.423.178,00	(837.522,00)	98,10	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.260.700,00	43.423.178,00	(837.522,00)	98,10	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.770.800,00	64.625.199,00	(145.601,00)	99,77	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	64.770.800,00	64.625.199,00	(145.601,00)	99,77	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.770.800,00	64.625.199,00	(145.601,00)	99,77	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.902.742.423,00	9.606.331.504,00	(296.410.919,00)	97,00	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.395.592.423,00	9.106.751.504,00	(288.840.919,00)	96,92	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.395.592.423,00	9.106.751.504,00	(288.840.919,00)	96,92	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	9.394.752.423,00	9.105.911.504,00	(288.840.919,00)	96,92	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	840.000,00	840.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	507.150.000,00	499.580.000,00	(7.570.000,00)	98,50	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	507.150.000,00	499.580.000,00	(7.570.000,00)	98,50	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	507.150.000,00	499.580.000,00	(7.570.000,00)	98,50	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	58.500.000,00	58.435.000,00	(65.000,00)	99,88	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	58.500.000,00	58.435.000,00	(65.000,00)	99,88	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	58.500.000,00	58.435.000,00	(65.000,00)	99,88	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.500.000,00	58.435.000,00	(65.000,00)	99,88	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	586.674.006,00	586.361.816,00	(312.190,00)	99,94	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.891.507,00	5.891.000,00	(507,00)	99,99	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.891.507,00	5.891.000,00	(507,00)	99,99	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.891.507,00	5.891.000,00	(507,00)	99,99	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	103.991.594,00	103.762.264,00	(229.330,00)	99,77	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	103.991.594,00	103.762.264,00	(229.330,00)	99,77	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.991.594,00	103.762.264,00	(229.330,00)	99,77	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.988.565,00	25.988.400,00	(165,00)	99,99	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	25.988.565,00	25.988.400,00	(165,00)	99,99	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.988.565,00	25.988.400,00	(165,00)	99,99	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	29.160.000,00	29.157.200,00	(2.800,00)	99,99	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	29.160.000,00	29.157.200,00	(2.800,00)	99,99	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.160.000,00	29.157.200,00	(2.800,00)	99,99	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.528.340,00	5.528.300,00	(40,00)	99,99	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	5.528.340,00	5.528.300,00	(40,00)	99,99	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.528.340,00	5.528.300,00	(40,00)	99,99	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	416.114.000,00	416.034.652,00	(79.348,00)	99,98	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	416.114.000,00	416.034.652,00	(79.348,00)	99,98	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	416.114.000,00	416.034.652,00	(79.348,00)	99,98	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	177.969.542,00	177.913.953,00	(55.589,00)	99,96	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	82.535.700,00	82.487.000,00	(48.700,00)	99,94	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	82.535.700,00	82.487.000,00	(48.700,00)	99,94	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	82.535.700,00	82.487.000,00	(48.700,00)	99,94	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	95.433.842,00	95.426.953,00	(6.889,00)	99,99	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.07.0010	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.07.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.07.0010	5.2	BELANJA MODAL	93.933.842,00	93.926.953,00	(6.889,00)	99,99	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.07.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	93.933.842,00	93.926.953,00	(6.889,00)	99,99	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.450.916.187,00	1.424.148.769,00	(26.767.418,00)	98,15	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.685.000,00	45.378.856,00	(1.306.144,00)	97,20	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	46.685.000,00	45.378.856,00	(1.306.144,00)	97,20	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.685.000,00	45.378.856,00	(1.306.144,00)	97,20	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.500.000,00	43.498.000,00	(2.000,00)	99,99	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	43.500.000,00	43.498.000,00	(2.000,00)	99,99	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.500.000,00	43.498.000,00	(2.000,00)	99,99	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.353.731.187,00	1.328.271.913,00	(25.459.274,00)	98,11	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.353.731.187,00	1.328.271.913,00	(25.459.274,00)	98,11	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.353.731.187,00	1.328.271.913,00	(25.459.274,00)	98,11	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	192.575.372,00	191.165.800,00	(1.409.572,00)	99,26	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	157.805.013,00	156.814.800,00	(990.213,00)	99,37	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	157.805.013,00	156.814.800,00	(990.213,00)	99,37	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.805.013,00	156.814.800,00	(990.213,00)	99,37	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.770.359,00	34.351.000,00	(419.359,00)	98,79	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	34.770.359,00	34.351.000,00	(419.359,00)	98,79	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.770.359,00	34.351.000,00	(419.359,00)	98,79	



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**
Organisasi : **Dinas Perhubungan**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.15.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	3.500.000.000,00	1.880.914.716,00	(1.619.085.284,00)	53,74	
	2.15.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.500.000.000,00	1.880.914.716,00	(1.619.085.284,00)	53,74	
	2.15.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	3.500.000.000,00	1.874.623.501,00	(1.625.376.499,00)	53,56	
	2.15.0.00.0.00.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	6.291.215,00	6.291.215,00	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	47.863.251.061,00	43.942.136.119,49	(3.921.114.941,51)	91,80	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3.010.068.920,00	2.039.392.705,00	(970.676.215,00)	67,75	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1.935.685.870,00	1.924.943.084,00	(10.742.786,00)	99,44	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.02.0002		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1.935.685.870,00	1.924.943.084,00	(10.742.786,00)	99,44	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	141.818.300,00	141.136.240,00	(682.060,00)	99,51	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.818.300,00	141.136.240,00	(682.060,00)	99,51	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	1.793.867.570,00	1.783.806.844,00	(10.060.726,00)	99,43	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.02.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.793.867.570,00	1.783.806.844,00	(10.060.726,00)	99,43	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.06		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	44.513.600,00	43.752.500,00	(761.100,00)	98,29	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.06.0004		Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	44.513.600,00	43.752.500,00	(761.100,00)	98,29	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	44.513.600,00	43.752.500,00	(761.100,00)	98,29	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.513.600,00	43.752.500,00	(761.100,00)	98,29	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.08		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	957.588.900,00	988.000,00	(956.600.900,00)	0,10	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.08.0002		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	957.588.900,00	988.000,00	(956.600.900,00)	0,10	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	957.588.900,00	988.000,00	(956.600.900,00)	0,10	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.588.900,00	988.000,00	(28.600.900,00)	3,33	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.08.0002	5.1.05	Belanja Hibah	928.000.000,00	0,00	(928.000.000,00)	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	72.280.550,00	69.709.121,00	(2.571.429,00)	96,44	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.13.0002		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	72.280.550,00	69.709.121,00	(2.571.429,00)	96,44	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.13.0002	5.1	BELANJA OPERASI	72.280.550,00	69.709.121,00	(2.571.429,00)	96,44	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.13.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.280.550,00	69.709.121,00	(2.571.429,00)	96,44	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	27.025.122.466,13	24.183.989.715,49	(2.841.132.750,64)	89,48	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	13.804.446,00	13.804.446,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.804.446,00	13.804.446,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	27.240.804,00	27.240.804,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.240.804,00	27.240.804,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	30.914.950,00	30.914.950,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.914.950,00	30.914.950,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	30.219.207,00	30.219.207,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.219.207,00	30.219.207,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.09		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	26.922.943.059,13	24.081.810.308,49	(2.841.132.750,64)	89,44	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.09.0001		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	249.712.000,00	228.044.300,00	(21.667.700,00)	91,32	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	249.712.000,00	228.044.300,00	(21.667.700,00)	91,32	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.712.000,00	228.044.300,00	(21.667.700,00)	91,32	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.09.0002		Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	3.029.379.956,16	1.028.712.488,77	(2.000.667.467,39)	33,95	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	260.373.300,00	201.442.871,00	(58.930.429,00)	77,36	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	260.373.300,00	201.442.871,00	(58.930.429,00)	77,36	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.09.0002	5.2	BELANJA MODAL	2.769.006.656,16	827.269.617,77	(1.941.737.038,39)	29,87	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.09.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.769.006.656,16	827.269.617,77	(1.941.737.038,39)	29,87	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.09.0003		Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	23.643.851.102,97	22.825.053.519,72	(818.797.583,25)	96,53	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.09.0003	5.1	BELANJA OPERASI	23.601.459.097,97	22.783.027.519,72	(818.431.578,25)	96,53	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.09.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.601.459.097,97	22.783.027.519,72	(818.431.578,25)	96,53	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.09.0003	5.2	BELANJA MODAL	42.392.005,00	42.026.000,00	(366.005,00)	99,13	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.09.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.392.005,00	42.026.000,00	(366.005,00)	99,13	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.828.059.674,87	17.718.753.699,00	(109.305.975,87)	99,38	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	168.904.572,91	166.595.941,00	(2.308.631,91)	98,63	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60.392.673,76	59.883.735,00	(508.938,76)	99,15	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	60.392.673,76	59.883.735,00	(508.938,76)	99,15	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.392.673,76	59.883.735,00	(508.938,76)	99,15	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	108.511.899,15	106.712.206,00	(1.799.693,15)	98,34	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	108.511.899,15	106.712.206,00	(1.799.693,15)	98,34	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.511.899,15	106.712.206,00	(1.799.693,15)	98,34	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.735.103.355,54	12.670.776.339,00	(64.327.016,54)	99,49	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.849.087.095,54	11.785.450.739,00	(63.636.356,54)	99,46	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.849.087.095,54	11.785.450.739,00	(63.636.356,54)	99,46	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	11.849.087.095,54	11.785.450.739,00	(63.636.356,54)	99,46	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	817.359.660,00	817.166.400,00	(193.260,00)	99,97	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	817.359.660,00	817.166.400,00	(193.260,00)	99,97	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	817.286.400,00	817.166.400,00	(120.000,00)	99,98	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.260,00	0,00	(73.260,00)	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	68.656.600,00	68.159.200,00	(497.400,00)	99,27	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	68.656.600,00	68.159.200,00	(497.400,00)	99,27	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.656.600,00	68.159.200,00	(497.400,00)	99,27	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	32.268.000,00	31.797.599,00	(470.401,00)	98,54	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.03.0004		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	32.268.000,00	31.797.599,00	(470.401,00)	98,54	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	32.268.000,00	31.797.599,00	(470.401,00)	98,54	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.268.000,00	31.797.599,00	(470.401,00)	98,54	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	92.516.601,08	92.336.000,00	(180.601,08)	99,80	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.04.0007		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	92.516.601,08	92.336.000,00	(180.601,08)	99,80	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.04.0007	5.1	BELANJA OPERASI	92.516.601,08	92.336.000,00	(180.601,08)	99,80	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.04.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.516.601,08	92.336.000,00	(180.601,08)	99,80	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	51.721.000,00	48.842.000,00	(2.879.000,00)	94,43	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.05.0005		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	49.566.000,00	48.842.000,00	(724.000,00)	98,53	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.05.0005	5.1	BELANJA OPERASI	49.566.000,00	48.842.000,00	(724.000,00)	98,53	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.05.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.566.000,00	48.842.000,00	(724.000,00)	98,53	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.155.000,00	0,00	(2.155.000,00)	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	2.155.000,00	0,00	(2.155.000,00)	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.155.000,00	0,00	(2.155.000,00)	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	544.534.000,00	536.500.866,00	(8.033.134,00)	98,52	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	105.866.000,00	105.859.500,00	(6.500,00)	99,99	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	105.866.000,00	105.859.500,00	(6.500,00)	99,99	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.866.000,00	105.859.500,00	(6.500,00)	99,99	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.06.0008		Fasilitas Kunjungan Tamu	98.750.000,00	92.045.000,00	(6.705.000,00)	93,21	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	98.750.000,00	92.045.000,00	(6.705.000,00)	93,21	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.750.000,00	92.045.000,00	(6.705.000,00)	93,21	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	296.418.000,00	295.096.366,00	(1.321.634,00)	99,55	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	296.418.000,00	295.096.366,00	(1.321.634,00)	99,55	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	296.418.000,00	295.096.366,00	(1.321.634,00)	99,55	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.07.0010	5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.07.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.874.440.145,34	3.854.157.254,00	(20.282.891,34)	99,47	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.015.000,00	4.000.000,00	(15.000,00)	99,62	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.015.000,00	4.000.000,00	(15.000,00)	99,62	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.015.000,00	4.000.000,00	(15.000,00)	99,62	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.679.100,00	76.682.184,00	(3.996.916,00)	95,04	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	80.679.100,00	76.682.184,00	(3.996.916,00)	95,04	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.679.100,00	76.682.184,00	(3.996.916,00)	95,04	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95.798.400,00	95.797.320,00	(1.080,00)	99,99	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	95.798.400,00	95.797.320,00	(1.080,00)	99,99	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.798.400,00	95.797.320,00	(1.080,00)	99,99	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.693.947.645,34	3.677.677.750,00	(16.269.895,34)	99,55	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	3.693.947.645,34	3.677.677.750,00	(16.269.895,34)	99,55	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.693.947.645,34	3.677.677.750,00	(16.269.895,34)	99,55	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	253.572.000,00	242.747.700,00	(10.824.300,00)	95,73	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	232.560.200,00	221.947.700,00	(10.612.500,00)	95,43	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	232.560.200,00	221.947.700,00	(10.612.500,00)	95,43	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	232.560.200,00	221.947.700,00	(10.612.500,00)	95,43	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.011.800,00	20.800.000,00	(211.800,00)	98,99	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	21.011.800,00	20.800.000,00	(211.800,00)	98,99	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.011.800,00	20.800.000,00	(211.800,00)	98,99	



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
Organisasi : **Dinas Komunikasi dan Informatika**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.16.0.00.0.00.13.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	131.902,00	131.902,00	0,00	
	2.16.0.00.0.00.13.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	131.902,00	131.902,00	0,00	
	2.16.0.00.0.00.13.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	131.902,00	131.902,00	0,00	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000		5	BELANJA DAERAH	36.016.895.744,00	34.492.959.301,00	(1.523.936.443,00)	95,76	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.02		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	16.408.038.762,00	15.228.168.888,00	(1.179.869.874,00)	92,80	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.02.1.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	16.408.038.762,00	15.228.168.888,00	(1.179.869.874,00)	92,80	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.02.1.01.0002		Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	50.369.082,00	48.147.771,00	(2.221.311,00)	95,58	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.02.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	50.369.082,00	48.147.771,00	(2.221.311,00)	95,58	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.02.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.369.082,00	48.147.771,00	(2.221.311,00)	95,58	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.02.1.01.0004		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	853.164.774,00	838.141.862,00	(15.022.912,00)	98,23	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.02.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	853.164.774,00	838.141.862,00	(15.022.912,00)	98,23	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.02.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	853.164.774,00	838.141.862,00	(15.022.912,00)	98,23	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.02.1.01.0005		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	230.352.530,00	228.266.488,00	(2.086.042,00)	99,09	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.02.1.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	230.352.530,00	228.266.488,00	(2.086.042,00)	99,09	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.02.1.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	230.352.530,00	228.266.488,00	(2.086.042,00)	99,09	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.02.1.01.0006		Pelayanan Informasi Publik	254.007.202,00	237.119.110,00	(16.888.092,00)	93,35	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.02.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	254.007.202,00	237.119.110,00	(16.888.092,00)	93,35	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.02.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	254.007.202,00	237.119.110,00	(16.888.092,00)	93,35	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.02.1.01.0007		Layanan Hubungan Media	8.495.385.578,00	8.465.854.913,00	(29.530.665,00)	99,65	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.02.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	8.495.385.578,00	8.465.854.913,00	(29.530.665,00)	99,65	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.02.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.495.385.578,00	8.465.854.913,00	(29.530.665,00)	99,65	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.02.1.01.0008		Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	4.060.159.916,00	3.060.124.046,00	(1.000.035.870,00)	75,36	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.02.1.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	4.060.159.916,00	3.060.124.046,00	(1.000.035.870,00)	75,36	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.02.1.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.060.159.916,00	3.060.124.046,00	(1.000.035.870,00)	75,36	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.02.1.01.0011		Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	602.969.680,00	578.513.698,00	(24.455.982,00)	95,94	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.02.1.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	602.969.680,00	578.513.698,00	(24.455.982,00)	95,94	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.02.1.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	602.969.680,00	578.513.698,00	(24.455.982,00)	95,94	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.02.1.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.02.1.01.0012	5.1.05	Belanja Hibah	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.02.1.01.0013		Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	1.161.630.000,00	1.072.001.000,00	(89.629.000,00)	92,28	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.02.1.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	1.158.025.000,00	1.068.401.000,00	(89.624.000,00)	92,26	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.02.1.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.158.025.000,00	1.068.401.000,00	(89.624.000,00)	92,26	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.02.1.01.0013	5.2	BELANJA MODAL	3.605.000,00	3.600.000,00	(5.000,00)	99,86	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.02.1.01.0013	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.605.000,00	3.600.000,00	(5.000,00)	99,86	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.03		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	6.815.046.036,00	6.769.596.223,00	(45.449.813,00)	99,33	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.03.1.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	5.181.398.550,00	5.165.550.344,00	(15.848.206,00)	99,69	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.03.1.01.0002		Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	44.261.712,00	44.196.190,00	(65.522,00)	99,85	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.03.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	44.261.712,00	44.196.190,00	(65.522,00)	99,85	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.03.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.261.712,00	44.196.190,00	(65.522,00)	99,85	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.03.1.01.0003		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	5.137.136.838,00	5.121.354.154,00	(15.782.684,00)	99,69	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.03.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	4.234.436.838,00	4.219.454.154,00	(14.982.684,00)	99,64	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.03.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.234.436.838,00	4.219.454.154,00	(14.982.684,00)	99,64	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.03.1.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	902.700.000,00	901.900.000,00	(800.000,00)	99,91	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.03.1.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	902.700.000,00	901.900.000,00	(800.000,00)	99,91	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.03.1.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	1.633.647.486,00	1.604.045.879,00	(29.601.607,00)	98,18	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.03.1.02.0002		Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	28.713.172,00	27.579.672,00	(1.133.500,00)	96,05	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.03.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	28.713.172,00	27.579.672,00	(1.133.500,00)	96,05	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.03.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.713.172,00	27.579.672,00	(1.133.500,00)	96,05	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.03.1.02.0003		Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	310.178.689,00	292.875.536,00	(17.303.153,00)	94,42	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.03.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	295.087.129,00	279.375.536,00	(15.711.593,00)	94,67	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.03.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	295.087.129,00	279.375.536,00	(15.711.593,00)	94,67	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.03.1.02.0003	5.2	BELANJA MODAL	15.091.560,00	13.500.000,00	(1.591.560,00)	89,45	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.03.1.02.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.091.560,00	13.500.000,00	(1.591.560,00)	89,45	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.03.1.02.0006		Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	123.905.854,00	122.655.142,00	(1.250.712,00)	98,99	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.03.1.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	123.905.854,00	122.655.142,00	(1.250.712,00)	98,99	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.03.1.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.905.854,00	122.655.142,00	(1.250.712,00)	98,99	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.03.1.02.0007		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	1.105.918.983,00	1.098.304.741,00	(7.614.242,00)	99,31	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.03.1.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	1.105.918.983,00	1.098.304.741,00	(7.614.242,00)	99,31	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.03.1.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.105.918.983,00	1.098.304.741,00	(7.614.242,00)	99,31	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.03.1.02.0008		Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	21.496.135,00	20.836.135,00	(660.000,00)	96,92	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.03.1.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	21.496.135,00	20.836.135,00	(660.000,00)	96,92	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.03.1.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.496.135,00	20.836.135,00	(660.000,00)	96,92	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.03.1.02.0012		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	43.434.653,00	41.794.653,00	(1.640.000,00)	96,22	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.03.1.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	43.434.653,00	41.794.653,00	(1.640.000,00)	96,22	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.03.1.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.434.653,00	41.794.653,00	(1.640.000,00)	96,22	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.793.810.946,00	12.495.194.190,00	(298.616.756,00)	97,66	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	155.324.313,00	153.466.721,00	(1.857.592,00)	98,80	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	80.923.843,00	79.757.006,00	(1.166.837,00)	98,55	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	80.923.843,00	79.757.006,00	(1.166.837,00)	98,55	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.923.843,00	79.757.006,00	(1.166.837,00)	98,55	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	74.400.470,00	73.709.715,00	(690.755,00)	99,07	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	74.400.470,00	73.709.715,00	(690.755,00)	99,07	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.400.470,00	73.709.715,00	(690.755,00)	99,07	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.264.508.194,00	9.187.874.578,00	(76.633.616,00)	99,17	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.763.898.194,00	8.699.664.578,00	(64.233.616,00)	99,26	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.763.898.194,00	8.699.664.578,00	(64.233.616,00)	99,26	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	8.763.898.194,00	8.699.664.578,00	(64.233.616,00)	99,26	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	500.610.000,00	488.210.000,00	(12.400.000,00)	97,52	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	500.610.000,00	488.210.000,00	(12.400.000,00)	97,52	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	500.540.000,00	488.210.000,00	(12.330.000,00)	97,53	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000,00	0,00	(70.000,00)	0,00	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	107.281.000,00	106.600.194,00	(680.806,00)	99,36	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	87.500.000,00	87.356.000,00	(144.000,00)	99,83	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	87.500.000,00	87.356.000,00	(144.000,00)	99,83	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.500.000,00	87.356.000,00	(144.000,00)	99,83	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	19.781.000,00	19.244.194,00	(536.806,00)	97,28	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	19.781.000,00	19.244.194,00	(536.806,00)	97,28	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.781.000,00	19.244.194,00	(536.806,00)	97,28	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	493.397.814,00	422.680.054,00	(70.717.760,00)	85,66	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	9.820.400,00	(179.600,00)	98,20	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.820.400,00	(179.600,00)	98,20	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.820.400,00	(179.600,00)	98,20	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.605.000,00	18.240.000,00	(365.000,00)	98,03	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	9.605.000,00	9.375.000,00	(230.000,00)	97,60	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.605.000,00	9.375.000,00	(230.000,00)	97,60	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	9.000.000,00	8.865.000,00	(135.000,00)	98,5	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.000.000,00	8.865.000,00	(135.000,00)	98,5	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.188.800,00	24.140.300,00	(48.500,00)	99,79	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	24.188.800,00	24.140.300,00	(48.500,00)	99,79	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.188.800,00	24.140.300,00	(48.500,00)	99,79	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	88.670.500,00	42.118.400,00	(46.552.100,00)	47,49	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	88.670.500,00	42.118.400,00	(46.552.100,00)	47,49	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.670.500,00	42.118.400,00	(46.552.100,00)	47,49	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.013.200,00	6.639.000,00	(23.374.200,00)	22,12	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	30.013.200,00	6.639.000,00	(23.374.200,00)	22,12	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.013.200,00	6.639.000,00	(23.374.200,00)	22,12	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.994.000,00	24.819.000,00	(175.000,00)	99,29	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	24.994.000,00	24.819.000,00	(175.000,00)	99,29	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.994.000,00	24.819.000,00	(175.000,00)	99,29	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	296.926.314,00	296.902.954,00	(23.360,00)	99,99	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	296.926.314,00	296.902.954,00	(23.360,00)	99,99	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	296.926.314,00	296.902.954,00	(23.360,00)	99,99	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	82.400.000,00	2.550.000,00	(79.850.000,00)	3,09	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	82.400.000,00	2.550.000,00	(79.850.000,00)	3,09	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	82.400.000,00	2.550.000,00	(79.850.000,00)	3,09	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	82.400.000,00	2.550.000,00	(79.850.000,00)	3,09	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.460.441.065,00	2.392.679.843,00	(67.761.222,00)	97,24	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	135.041.620,00	129.715.101,00	(5.326.519,00)	96,05	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	135.041.620,00	129.715.101,00	(5.326.519,00)	96,05	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.041.620,00	129.715.101,00	(5.326.519,00)	96,05	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.030.000,00	31.500.000,00	(10.530.000,00)	74,94	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	42.030.000,00	31.500.000,00	(10.530.000,00)	74,94	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.030.000,00	31.500.000,00	(10.530.000,00)	74,94	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.283.369.445,00	2.231.464.742,00	(51.904.703,00)	97,72	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.283.369.445,00	2.231.464.742,00	(51.904.703,00)	97,72	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.283.369.445,00	2.231.464.742,00	(51.904.703,00)	97,72	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	230.458.560,00	229.342.800,00	(1.115.760,00)	99,51	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	206.334.560,00	205.439.800,00	(894.760,00)	99,56	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	206.334.560,00	205.439.800,00	(894.760,00)	99,56	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	206.334.560,00	205.439.800,00	(894.760,00)	99,56	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.000.000,00	12.839.000,00	(161.000,00)	98,76	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	13.000.000,00	12.839.000,00	(161.000,00)	98,76	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	12.839.000,00	(161.000,00)	98,76	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.124.000,00	11.064.000,00	(60.000,00)	99,46	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	11.124.000,00	11.064.000,00	(60.000,00)	99,46	
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.124.000,00	11.064.000,00	(60.000,00)	99,46	



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**
Organisasi : **Dinas Komunikasi dan Informatika**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.16.0.00.0.00.13.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	131.902,00	131.902,00	0,00	
	2.16.0.00.0.00.13.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	131.902,00	131.902,00	0,00	
	2.16.0.00.0.00.13.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	131.902,00	131.902,00	0,00	
2.21	2.16.0.00.0.00.13.0000		5	BELANJA DAERAH	134.534.834,00	129.352.024,00	(5.182.810,00)	96,14	
2.21	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.21.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	134.534.834,00	129.352.024,00	(5.182.810,00)	96,14	
2.21	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.21.02.1.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	71.341.928,00	66.359.449,00	(4.982.479,00)	93,01	
2.21	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.21.02.1.01.0004		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	71.341.928,00	66.359.449,00	(4.982.479,00)	93,01	
2.21	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.21.02.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	71.341.928,00	66.359.449,00	(4.982.479,00)	93,01	
2.21	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.21.02.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.341.928,00	66.359.449,00	(4.982.479,00)	93,01	
2.21	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.21.02.1.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	63.192.906,00	62.992.575,00	(200.331,00)	99,68	
2.21	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.21.02.1.02.0001		Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	63.192.906,00	62.992.575,00	(200.331,00)	99,68	
2.21	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.21.02.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	63.192.906,00	62.992.575,00	(200.331,00)	99,68	
2.21	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.21.02.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.192.906,00	62.992.575,00	(200.331,00)	99,68	



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**
Organisasi : **Dinas Komunikasi dan Informatika**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.16.0.00.0.00.13.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	131.902,00	131.902,00	0,00	
	2.16.0.00.0.00.13.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	131.902,00	131.902,00	0,00	
	2.16.0.00.0.00.13.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	131.902,00	131.902,00	0,00	
2.20	2.16.0.00.0.00.13.0000		5	BELANJA DAERAH	82.222.400,00	81.562.515,00	(659.885,00)	99,19	
2.20	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.20.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	82.222.400,00	81.562.515,00	(659.885,00)	99,19	
2.20	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.20.02.1.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	82.222.400,00	81.562.515,00	(659.885,00)	99,19	
2.20	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.20.02.1.01.0001		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	82.222.400,00	81.562.515,00	(659.885,00)	99,19	
2.20	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.20.02.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	82.222.400,00	81.562.515,00	(659.885,00)	99,19	
2.20	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.20.02.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.222.400,00	81.562.515,00	(659.885,00)	99,19	



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Organisasi : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000		5	BELANJA DAERAH	21.236.276.208,00	19.253.917.261,00	(1.982.358.947,00)	90,66	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.02		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	50.119.600,00	49.819.800,00	(299.800,00)	99,40	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.02.1.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	50.119.600,00	49.819.800,00	(299.800,00)	99,40	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.02.1.01.0002		Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	50.119.600,00	49.819.800,00	(299.800,00)	99,40	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.02.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	50.119.600,00	49.819.800,00	(299.800,00)	99,40	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.02.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.119.600,00	49.819.800,00	(299.800,00)	99,40	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.03		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	67.456.130,00	65.289.460,00	(2.166.670,00)	96,78	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.03.1.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	23.692.530,00	23.411.530,00	(281.000,00)	98,81	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.03.1.01.0003		Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	23.692.530,00	23.411.530,00	(281.000,00)	98,81	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.03.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	23.692.530,00	23.411.530,00	(281.000,00)	98,81	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.03.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.692.530,00	23.411.530,00	(281.000,00)	98,81	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.03.1.02		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	43.763.600,00	41.877.930,00	(1.885.670,00)	95,69	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.03.1.02.0002		Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	43.763.600,00	41.877.930,00	(1.885.670,00)	95,69	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.03.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	43.763.600,00	41.877.930,00	(1.885.670,00)	95,69	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.03.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.763.600,00	41.877.930,00	(1.885.670,00)	95,69	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.04		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	23.851.200,00	23.773.500,00	(77.700,00)	99,67	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.04.1.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	23.851.200,00	23.773.500,00	(77.700,00)	99,67	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.04.1.01.0003		Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	23.851.200,00	23.773.500,00	(77.700,00)	99,67	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.04.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	23.851.200,00	23.773.500,00	(77.700,00)	99,67	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.04.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.851.200,00	23.773.500,00	(77.700,00)	99,67	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	483.133.500,00	472.596.105,00	(10.537.395,00)	97,81	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.05.1.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	483.133.500,00	472.596.105,00	(10.537.395,00)	97,81	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.05.1.01.0001		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	483.133.500,00	472.596.105,00	(10.537.395,00)	97,81	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.05.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	483.133.500,00	472.596.105,00	(10.537.395,00)	97,81	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.05.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	483.133.500,00	472.596.105,00	(10.537.395,00)	97,81	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.06		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	196.242.000,00	191.940.500,00	(4.301.500,00)	97,80	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.06.1.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	196.242.000,00	191.940.500,00	(4.301.500,00)	97,80	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.06.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.06.1.01.0002	5.1.05	Belanja Hibah	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.06.1.01.0003		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	26.242.000,00	21.940.500,00	(4.301.500,00)	83,60	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.06.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	26.242.000,00	21.940.500,00	(4.301.500,00)	83,60	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.06.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.242.000,00	21.940.500,00	(4.301.500,00)	83,60	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.07		PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	6.703.797.700,00	5.669.013.347,00	(1.034.784.353,00)	84,56	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.07.1.01		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	6.703.797.700,00	5.669.013.347,00	(1.034.784.353,00)	84,56	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.07.1.01.0001		Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	4.222.279.800,00	3.299.128.956,00	(923.150.844,00)	78,13	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.07.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.222.279.800,00	3.299.128.956,00	(923.150.844,00)	78,13	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.07.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.122.279.800,00	1.199.128.956,00	(923.150.844,00)	56,50	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.07.1.01.0001	5.1.05	Belanja Hibah	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.07.1.01.0002		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	2.481.517.900,00	2.369.884.391,00	(111.633.509,00)	95,50	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.07.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.481.517.900,00	2.369.884.391,00	(111.633.509,00)	95,50	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.07.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.481.517.900,00	2.369.884.391,00	(111.633.509,00)	95,50	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.08		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.743.695.649,00	1.175.578.823,00	(568.116.826,00)	67,41	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.08.1.01		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	1.743.695.649,00	1.175.578.823,00	(568.116.826,00)	67,41	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.08.1.01.0001		Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	1.510.087.000,00	954.195.180,00	(555.891.820,00)	63,18	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.08.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.510.087.000,00	954.195.180,00	(555.891.820,00)	63,18	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.08.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.087.000,00	9.894.000,00	(100.193.000,00)	8,98	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.08.1.01.0001	5.1.04	Belanja Subsidi	1.400.000.000,00	944.301.180,00	(455.698.820,00)	67,45	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.08.1.01.0002		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	233.608.649,00	221.383.643,00	(12.225.006,00)	94,76	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.08.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	233.608.649,00	221.383.643,00	(12.225.006,00)	94,76	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.08.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	233.608.649,00	221.383.643,00	(12.225.006,00)	94,76	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.967.980.429,00	11.605.905.726,00	(362.074.703,00)	96,97	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	161.494.794,00	134.682.894,00	(26.811.900,00)	83,39	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	64.790.742,00	56.090.742,00	(8.700.000,00)	86,57	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	64.790.742,00	56.090.742,00	(8.700.000,00)	86,57	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.790.742,00	56.090.742,00	(8.700.000,00)	86,57	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	12.955.175,00	12.955.175,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.955.175,00	12.955.175,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31.798.502,00	31.686.602,00	(111.900,00)	99,64	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	31.798.502,00	31.686.602,00	(111.900,00)	99,64	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.798.502,00	31.686.602,00	(111.900,00)	99,64	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.950.375,00	33.950.375,00	(18.000.000,00)	65,35	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	51.950.375,00	33.950.375,00	(18.000.000,00)	65,35	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.950.375,00	33.950.375,00	(18.000.000,00)	65,35	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.289.609.030,00	8.171.960.915,00	(117.648.115,00)	98,58	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.776.585.030,00	7.667.051.415,00	(109.533.615,00)	98,59	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.776.585.030,00	7.667.051.415,00	(109.533.615,00)	98,59	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	7.774.585.030,00	7.665.720.415,00	(108.864.615,00)	98,59	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.331.000,00	(669.000,00)	66,54	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	438.380.000,00	430.265.500,00	(8.114.500,00)	98,14	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	438.380.000,00	430.265.500,00	(8.114.500,00)	98,14	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	436.380.000,00	428.456.000,00	(7.924.000,00)	98,18	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.809.500,00	(190.500,00)	90,47	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	74.644.000,00	74.644.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.644.000,00	74.644.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	84.852.800,00	82.852.800,00	(2.000.000,00)	97,64	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	74.852.800,00	74.852.800,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.852.800,00	74.852.800,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000,00	8.000.000,00	(2.000.000,00)	80,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	8.000.000,00	(2.000.000,00)	80,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	8.000.000,00	(2.000.000,00)	80,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.535.423.373,00	1.476.573.420,00	(58.849.953,00)	96,16	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.431.159,00	9.431.159,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.431.159,00	9.431.159,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	112.472.000,00	90.842.000,00	(21.630.000,00)	80,76	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	683.000,00	683.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	683.000,00	683.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	111.789.000,00	90.159.000,00	(21.630.000,00)	80,65	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	111.789.000,00	90.159.000,00	(21.630.000,00)	80,65	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.969.034,00	14.918.034,00	(51.000,00)	99,65	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	14.969.034,00	14.918.034,00	(51.000,00)	99,65	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.969.034,00	14.918.034,00	(51.000,00)	99,65	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.986.875,00	97.603.937,00	(2.382.938,00)	97,61	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	99.986.875,00	97.603.937,00	(2.382.938,00)	97,61	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.986.875,00	97.603.937,00	(2.382.938,00)	97,61	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	186.489.500,00	182.380.377,00	(4.109.123,00)	97,79	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	186.489.500,00	182.380.377,00	(4.109.123,00)	97,79	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	186.489.500,00	182.380.377,00	(4.109.123,00)	97,79	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	512.000.000,00	511.980.108,00	(19.892,00)	99,99	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	512.000.000,00	511.980.108,00	(19.892,00)	99,99	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	512.000.000,00	511.980.108,00	(19.892,00)	99,99	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.06.0010	5.1	BELANJA OPERASI	6.473.520,00	6.473.520,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.06.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.473.520,00	6.473.520,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.06.0010	5.2	BELANJA MODAL	3.489.285,00	3.489.285,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.06.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.489.285,00	3.489.285,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.06.0011		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	590.112.000,00	559.455.000,00	(30.657.000,00)	94,80	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.06.0011	5.1	BELANJA OPERASI	590.112.000,00	559.455.000,00	(30.657.000,00)	94,80	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.06.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	590.112.000,00	559.455.000,00	(30.657.000,00)	94,80	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	62.250.000,00	2.015.000,00	(60.235.000,00)	3,23	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.07.0009		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	62.250.000,00	2.015.000,00	(60.235.000,00)	3,23	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.07.0009	5.1	BELANJA OPERASI	62.250.000,00	2.015.000,00	(60.235.000,00)	3,23	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.07.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.250.000,00	2.015.000,00	(60.235.000,00)	3,23	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.609.362.382,00	1.587.859.797,00	(21.502.585,00)	98,66	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.000.000,00	24.950.229,00	(49.771,00)	99,80	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	24.950.229,00	(49.771,00)	99,80	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.950.229,00	(49.771,00)	99,80	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000,00	17.661.470,00	(338.530,00)	98,11	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	18.000.000,00	17.661.470,00	(338.530,00)	98,11	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	17.661.470,00	(338.530,00)	98,11	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	49.990.200,00	49.990.200,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.990.200,00	49.990.200,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.516.372.182,00	1.495.257.898,00	(21.114.284,00)	98,60	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.516.372.182,00	1.495.257.898,00	(21.114.284,00)	98,60	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.516.372.182,00	1.495.257.898,00	(21.114.284,00)	98,60	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	224.988.050,00	149.960.900,00	(75.027.150,00)	66,65	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200.000.000,00	143.437.700,00	(56.562.300,00)	71,71	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	143.437.700,00	(56.562.300,00)	71,71	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	143.437.700,00	(56.562.300,00)	71,71	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.988.050,00	6.523.200,00	(18.464.850,00)	26,10	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	24.988.050,00	6.523.200,00	(18.464.850,00)	26,10	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.988.050,00	6.523.200,00	(18.464.850,00)	26,10	



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**
Organisasi : **Dinas Penanaman Modal dan PTSP**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000		5	BELANJA DAERAH	15.043.835.367,00	14.748.383.021,00	(295.452.346,00)	98,03	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.02		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	280.132.740,00	256.499.680,00	(23.633.060,00)	91,56	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.02.1.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	280.132.740,00	256.499.680,00	(23.633.060,00)	91,56	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.02.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	30.132.740,00	30.132.740,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.02.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.132.740,00	30.132.740,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.02.1.02.0005		Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	250.000.000,00	226.366.940,00	(23.633.060,00)	90,54	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.02.1.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	250.000.000,00	226.366.940,00	(23.633.060,00)	90,54	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.02.1.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	226.366.940,00	(23.633.060,00)	90,54	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	56.159.600,00	56.029.292,00	(130.308,00)	99,76	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.03.1.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	56.159.600,00	56.029.292,00	(130.308,00)	99,76	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.03.1.01.0002		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	52.174.000,00	52.043.692,00	(130.308,00)	99,75	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.03.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	52.174.000,00	52.043.692,00	(130.308,00)	99,75	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.03.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.174.000,00	52.043.692,00	(130.308,00)	99,75	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.03.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.985.600,00	3.985.600,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.03.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.985.600,00	3.985.600,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	552.250.623,00	546.445.525,00	(5.805.098,00)	98,94	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.04.1.01		Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	140.418.052,00	139.483.768,00	(934.284,00)	99,33	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.04.1.01.0006		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	28.725.000,00	28.675.331,00	(49.669,00)	99,82	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.04.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	28.725.000,00	28.675.331,00	(49.669,00)	99,82	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.04.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.725.000,00	28.675.331,00	(49.669,00)	99,82	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.04.1.01.0007		Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	111.693.052,00	110.808.437,00	(884.615,00)	99,20	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.04.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	111.693.052,00	110.808.437,00	(884.615,00)	99,20	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.04.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.693.052,00	110.808.437,00	(884.615,00)	99,20	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.04.1.02		Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	411.832.571,00	406.961.757,00	(4.870.814,00)	98,81	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.04.1.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	26.589.300,00	26.589.300,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.04.1.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.589.300,00	26.589.300,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.04.1.02.0006		Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	193.980.000,00	193.978.451,00	(1.549,00)	99,99	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.04.1.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	193.980.000,00	193.978.451,00	(1.549,00)	99,99	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.04.1.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	193.980.000,00	193.978.451,00	(1.549,00)	99,99	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.04.1.02.0007		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	176.270.371,00	171.401.106,00	(4.869.265,00)	97,23	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.04.1.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	176.270.371,00	171.401.106,00	(4.869.265,00)	97,23	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.04.1.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.270.371,00	171.401.106,00	(4.869.265,00)	97,23	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.04.1.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	14.992.900,00	14.992.900,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.04.1.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.992.900,00	14.992.900,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.05		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1.386.207.000,00	1.186.900.126,00	(199.306.874,00)	85,62	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.05.1.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1.386.207.000,00	1.186.900.126,00	(199.306.874,00)	85,62	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.05.1.01.0004		Pengawasan Penanaman Modal	417.260.000,00	342.477.886,00	(74.782.114,00)	82,07	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.05.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	417.260.000,00	342.477.886,00	(74.782.114,00)	82,07	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.05.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	417.260.000,00	342.477.886,00	(74.782.114,00)	82,07	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.05.1.01.0005		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	207.630.000,00	163.690.700,00	(43.939.300,00)	78,83	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.05.1.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	207.630.000,00	163.690.700,00	(43.939.300,00)	78,83	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.05.1.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	207.630.000,00	163.690.700,00	(43.939.300,00)	78,83	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.05.1.01.0006		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	761.317.000,00	680.731.540,00	(80.585.460,00)	89,41	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.05.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	761.317.000,00	680.731.540,00	(80.585.460,00)	89,41	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.05.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	761.317.000,00	680.731.540,00	(80.585.460,00)	89,41	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.06.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	32.162.703,00	32.162.703,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.06.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.162.703,00	32.162.703,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.736.922.701,00	12.670.345.695,00	(66.577.006,00)	99,47	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	211.516.100,00	211.212.176,00	(303.924,00)	99,85	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	174.222.200,00	174.031.776,00	(190.424,00)	99,89	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	174.222.200,00	174.031.776,00	(190.424,00)	99,89	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.222.200,00	174.031.776,00	(190.424,00)	99,89	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.312.600,00	13.289.100,00	(23.500,00)	99,82	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	13.312.600,00	13.289.100,00	(23.500,00)	99,82	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.312.600,00	13.289.100,00	(23.500,00)	99,82	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.981.300,00	23.891.300,00	(90.000,00)	99,62	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	23.981.300,00	23.891.300,00	(90.000,00)	99,62	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.981.300,00	23.891.300,00	(90.000,00)	99,62	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.654.058.575,00	10.605.483.154,00	(48.575.421,00)	99,54	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.126.985.703,00	10.078.535.634,00	(48.450.069,00)	99,52	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.126.985.703,00	10.078.535.634,00	(48.450.069,00)	99,52	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	10.126.985.703,00	10.078.535.634,00	(48.450.069,00)	99,52	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	450.048.000,00	450.048.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	450.048.000,00	450.048.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	77.024.872,00	76.899.520,00	(125.352,00)	99,83	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	77.024.872,00	76.899.520,00	(125.352,00)	99,83	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.024.872,00	76.899.520,00	(125.352,00)	99,83	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	33.320.436,00	33.300.660,00	(19.776,00)	99,94	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.03.0002		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	33.320.436,00	33.300.660,00	(19.776,00)	99,94	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	33.320.436,00	33.300.660,00	(19.776,00)	99,94	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.320.436,00	33.300.660,00	(19.776,00)	99,94	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	396.793.281,00	396.512.707,00	(280.574,00)	99,92	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.385.400,00	4.382.500,00	(2.900,00)	99,93	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.385.400,00	4.382.500,00	(2.900,00)	99,93	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.385.400,00	4.382.500,00	(2.900,00)	99,93	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.635.000,00	41.461.700,00	(173.300,00)	99,58	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	41.635.000,00	41.461.700,00	(173.300,00)	99,58	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.635.000,00	41.461.700,00	(173.300,00)	99,58	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.403.200,00	14.382.500,00	(20.700,00)	99,85	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	14.403.200,00	14.382.500,00	(20.700,00)	99,85	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.403.200,00	14.382.500,00	(20.700,00)	99,85	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	14.880.000,00	14.860.000,00	(20.000,00)	99,86	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	14.880.000,00	14.860.000,00	(20.000,00)	99,86	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.880.000,00	14.860.000,00	(20.000,00)	99,86	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.06.0008		Fasilitas Kunjungan Tamu	14.206.500,00	14.155.500,00	(51.000,00)	99,64	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	14.206.500,00	14.155.500,00	(51.000,00)	99,64	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.206.500,00	14.155.500,00	(51.000,00)	99,64	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	307.283.181,00	307.270.507,00	(12.674,00)	99,99	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	307.283.181,00	307.270.507,00	(12.674,00)	99,99	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	307.283.181,00	307.270.507,00	(12.674,00)	99,99	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	57.553.300,00	57.430.800,00	(122.500,00)	99,78	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.07.0011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	57.553.300,00	57.430.800,00	(122.500,00)	99,78	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.07.0011	5.1	BELANJA OPERASI	55.553.300,00	55.430.800,00	(122.500,00)	99,77	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.07.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.553.300,00	55.430.800,00	(122.500,00)	99,77	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.07.0011	5.2	BELANJA MODAL	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.07.0011	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.237.407.037,00	1.223.823.688,00	(13.583.349,00)	98,90	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	189.381.725,00	185.201.377,00	(4.180.348,00)	97,79	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	189.381.725,00	185.201.377,00	(4.180.348,00)	97,79	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	189.381.725,00	185.201.377,00	(4.180.348,00)	97,79	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	79.140.000,00	79.080.000,00	(60.000,00)	99,92	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	79.140.000,00	79.080.000,00	(60.000,00)	99,92	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.140.000,00	79.080.000,00	(60.000,00)	99,92	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	968.885.312,00	959.542.311,00	(9.343.001,00)	99,03	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	968.885.312,00	959.542.311,00	(9.343.001,00)	99,03	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	968.885.312,00	959.542.311,00	(9.343.001,00)	99,03	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	146.273.972,00	142.582.510,00	(3.691.462,00)	97,47	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	109.313.536,00	105.661.850,00	(3.651.686,00)	96,65	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	109.313.536,00	105.661.850,00	(3.651.686,00)	96,65	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.313.536,00	105.661.850,00	(3.651.686,00)	96,65	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.640.000,00	3.620.000,00	(20.000,00)	99,45	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.640.000,00	3.620.000,00	(20.000,00)	99,45	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.640.000,00	3.620.000,00	(20.000,00)	99,45	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	33.320.436,00	33.300.660,00	(19.776,00)	99,94	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	33.320.436,00	33.300.660,00	(19.776,00)	99,94	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.320.436,00	33.300.660,00	(19.776,00)	99,94	



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**
Organisasi : **Dinas Kepemudaan dan Olahraga**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000		5	BELANJA DAERAH	39.703.724.865,00	38.551.923.977,00	(1.151.800.888,00)	97,09	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	146.232.200,00	111.331.400,00	(34.900.800,00)	76,13	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.02.1.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	146.232.200,00	111.331.400,00	(34.900.800,00)	76,13	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.02.1.01.0011		Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	6.194.000,00	5.746.000,00	(448.000,00)	92,76	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.02.1.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	6.194.000,00	5.746.000,00	(448.000,00)	92,76	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.02.1.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.194.000,00	5.746.000,00	(448.000,00)	92,76	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.02.1.01.0013		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	140.038.200,00	105.585.400,00	(34.452.800,00)	75,39	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.02.1.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	140.038.200,00	105.585.400,00	(34.452.800,00)	75,39	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.02.1.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.038.200,00	105.585.400,00	(34.452.800,00)	75,39	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.03		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	23.778.106.462,00	23.298.780.074,00	(479.326.388,00)	97,98	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.03.1.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	2.421.973.862,00	2.181.533.250,00	(240.440.612,00)	90,07	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.03.1.01.0001		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	1.972.011.427,00	1.737.024.250,00	(234.987.177,00)	88,08	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.03.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.972.011.427,00	1.737.024.250,00	(234.987.177,00)	88,08	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.03.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.972.011.427,00	1.737.024.250,00	(234.987.177,00)	88,08	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.03.1.01.0002		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	116.960.500,00	112.461.400,00	(4.499.100,00)	96,15	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.03.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	116.960.500,00	112.461.400,00	(4.499.100,00)	96,15	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.03.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.960.500,00	112.461.400,00	(4.499.100,00)	96,15	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.03.1.01.0004		Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi	333.001.935,00	332.047.600,00	(954.335,00)	99,71	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.03.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	333.001.935,00	332.047.600,00	(954.335,00)	99,71	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.03.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	242.701.935,00	241.747.600,00	(954.335,00)	99,60	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.03.1.01.0004	5.1.05	Belanja Hibah	90.300.000,00	90.300.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.03.1.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	4.371.132.600,00	4.148.510.546,00	(222.622.054,00)	94,90	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.03.1.02.0004		Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	1.124.604.200,00	1.106.544.546,00	(18.059.654,00)	98,39	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.03.1.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.124.604.200,00	1.106.544.546,00	(18.059.654,00)	98,39	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.03.1.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.124.604.200,00	1.106.544.546,00	(18.059.654,00)	98,39	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.03.1.02.0006		Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	3.246.528.400,00	3.041.966.000,00	(204.562.400,00)	93,69	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.03.1.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.246.528.400,00	3.041.966.000,00	(204.562.400,00)	93,69	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.03.1.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.246.528.400,00	3.041.966.000,00	(204.562.400,00)	93,69	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.03.1.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	16.985.000.000,00	16.968.736.278,00	(16.263.722,00)	99,90	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.03.1.04.0003		Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	16.985.000.000,00	16.968.736.278,00	(16.263.722,00)	99,90	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.03.1.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	16.985.000.000,00	16.968.736.278,00	(16.263.722,00)	99,90	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.03.1.04.0003	5.1.05	Belanja Hibah	16.985.000.000,00	16.968.736.278,00	(16.263.722,00)	99,90	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.04		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1.147.431.500,00	790.885.900,00	(356.545.600,00)	68,92	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.04.1.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	1.147.431.500,00	790.885.900,00	(356.545.600,00)	68,92	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.04.1.01.0002		Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	1.147.431.500,00	790.885.900,00	(356.545.600,00)	68,92	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.04.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.147.431.500,00	790.885.900,00	(356.545.600,00)	68,92	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.04.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.431.500,00	0,00	(5.431.500,00)	0,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.04.1.01.0002	5.1.05	Belanja Hibah	1.142.000.000,00	790.885.900,00	(351.114.100,00)	69,25	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.631.954.703,00	14.350.926.603,00	(281.028.100,00)	98,07	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	235.643.017,00	222.086.200,00	(13.556.817,00)	94,24	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.285.600,00	16.996.500,00	(289.100,00)	98,32	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	17.285.600,00	16.996.500,00	(289.100,00)	98,32	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.285.600,00	16.996.500,00	(289.100,00)	98,32	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	82.006.038,00	69.888.100,00	(12.117.938,00)	85,22	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	82.006.038,00	69.888.100,00	(12.117.938,00)	85,22	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.006.038,00	69.888.100,00	(12.117.938,00)	85,22	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	136.351.379,00	135.201.600,00	(1.149.779,00)	99,15	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	136.351.379,00	135.201.600,00	(1.149.779,00)	99,15	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.351.379,00	135.201.600,00	(1.149.779,00)	99,15	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.636.795.262,00	8.559.104.904,00	(77.690.358,00)	99,10	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.057.784.258,00	8.003.944.304,00	(53.839.954,00)	99,33	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.057.784.258,00	8.003.944.304,00	(53.839.954,00)	99,33	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	8.057.784.231,00	8.003.944.304,00	(53.839.927,00)	99,33	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27,00	0,00	(27,00)	0,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	546.842.004,00	526.958.000,00	(19.884.004,00)	96,36	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	546.842.004,00	526.958.000,00	(19.884.004,00)	96,36	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	546.842.004,00	526.958.000,00	(19.884.004,00)	96,36	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	32.169.000,00	28.202.600,00	(3.966.400,00)	87,67	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	32.169.000,00	28.202.600,00	(3.966.400,00)	87,67	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.169.000,00	28.202.600,00	(3.966.400,00)	87,67	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	232.775.088,00	232.467.024,00	(308.064,00)	99,86	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.03.0002		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	232.775.088,00	232.467.024,00	(308.064,00)	99,86	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	232.775.088,00	232.467.024,00	(308.064,00)	99,86	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	232.775.088,00	232.467.024,00	(308.064,00)	99,86	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	28.050.000,00	27.720.000,00	(330.000,00)	98,82	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	28.050.000,00	27.720.000,00	(330.000,00)	98,82	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	28.050.000,00	27.720.000,00	(330.000,00)	98,82	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.050.000,00	27.720.000,00	(330.000,00)	98,82	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.649.133.055,00	1.548.470.059,00	(100.662.996,00)	93,89	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.430.300,00	0,00	(16.430.300,00)	0,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	16.430.300,00	0,00	(16.430.300,00)	0,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.430.300,00	0,00	(16.430.300,00)	0,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	35.000.000,00	34.854.200,00	(145.800,00)	99,58	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	34.854.200,00	(145.800,00)	99,58	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	34.854.200,00	(145.800,00)	99,58	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000,00	49.822.900,00	(177.100,00)	99,64	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.822.900,00	(177.100,00)	99,64	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.822.900,00	(177.100,00)	99,64	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	732.421.600,00	726.688.100,00	(5.733.500,00)	99,21	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	732.421.600,00	726.688.100,00	(5.733.500,00)	99,21	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	732.421.600,00	726.688.100,00	(5.733.500,00)	99,21	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.625.000,00	3.250.000,00	(1.375.000,00)	70,27	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	4.625.000,00	3.250.000,00	(1.375.000,00)	70,27	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.625.000,00	3.250.000,00	(1.375.000,00)	70,27	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	746.364.944,00	676.064.359,00	(70.300.585,00)	90,58	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	746.364.944,00	676.064.359,00	(70.300.585,00)	90,58	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	746.364.944,00	676.064.359,00	(70.300.585,00)	90,58	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.06.0011		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	64.291.211,00	57.790.500,00	(6.500.711,00)	89,88	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.06.0011	5.1	BELANJA OPERASI	64.291.211,00	57.790.500,00	(6.500.711,00)	89,88	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.06.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.291.211,00	57.790.500,00	(6.500.711,00)	89,88	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.07.0010	5.1	BELANJA OPERASI	60.872.850,00	60.872.850,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.07.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.872.850,00	60.872.850,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.07.0010	5.2	BELANJA MODAL	437.431.805,00	437.431.805,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.07.0010	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	437.431.805,00	437.431.805,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.799.747.326,00	2.771.790.661,00	(27.956.665,00)	99,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	226.761.500,00	212.095.639,00	(14.665.861,00)	93,53	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	226.761.500,00	212.095.639,00	(14.665.861,00)	93,53	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	226.761.500,00	212.095.639,00	(14.665.861,00)	93,53	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.833.000,00	41.488.000,00	(4.345.000,00)	90,51	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	45.833.000,00	41.488.000,00	(4.345.000,00)	90,51	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.833.000,00	41.488.000,00	(4.345.000,00)	90,51	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.527.152.826,00	2.518.207.022,00	(8.945.804,00)	99,64	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.527.152.826,00	2.518.207.022,00	(8.945.804,00)	99,64	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.527.152.826,00	2.518.207.022,00	(8.945.804,00)	99,64	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	551.506.300,00	490.983.100,00	(60.523.200,00)	89,02	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	251.352.700,00	226.849.900,00	(24.502.800,00)	90,25	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	251.352.700,00	226.849.900,00	(24.502.800,00)	90,25	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	251.352.700,00	226.849.900,00	(24.502.800,00)	90,25	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.09.0007		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	300.153.600,00	264.133.200,00	(36.020.400,00)	87,99	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.09.0007	5.1	BELANJA OPERASI	300.153.600,00	264.133.200,00	(36.020.400,00)	87,99	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.09.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.153.600,00	264.133.200,00	(36.020.400,00)	87,99	



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**

Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**

Organisasi : **Dinas Kebudayaan**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000		5	BELANJA DAERAH	17.979.422.492,00	17.608.163.887,00	(371.258.605,00)	97,93	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	3.183.954.684,00	3.080.560.208,00	(103.394.476,00)	96,75	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.02.1.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	712.778.480,00	709.584.170,00	(3.194.310,00)	99,55	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.02.1.01.0001		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	712.778.480,00	709.584.170,00	(3.194.310,00)	99,55	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.02.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	712.778.480,00	709.584.170,00	(3.194.310,00)	99,55	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.02.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	712.778.480,00	709.584.170,00	(3.194.310,00)	99,55	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.02.1.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1.077.074.604,00	977.811.438,00	(99.263.166,00)	90,78	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.02.1.02.0001		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	993.327.424,00	894.508.438,00	(98.818.986,00)	90,05	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.02.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	993.327.424,00	894.508.438,00	(98.818.986,00)	90,05	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.02.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	993.327.424,00	894.508.438,00	(98.818.986,00)	90,05	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.02.1.02.0003		Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	83.747.180,00	83.303.000,00	(444.180,00)	99,46	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.02.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	83.747.180,00	83.303.000,00	(444.180,00)	99,46	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.02.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.747.180,00	83.303.000,00	(444.180,00)	99,46	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.02.1.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.394.101.600,00	1.393.164.600,00	(937.000,00)	99,93	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.02.1.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	100,00	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.02.1.03.0001	5.1.05	Belanja Hibah	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	100,00	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.02.1.03.0002		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	194.101.600,00	193.164.600,00	(937.000,00)	99,51	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.02.1.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	194.101.600,00	193.164.600,00	(937.000,00)	99,51	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.02.1.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	194.101.600,00	193.164.600,00	(937.000,00)	99,51	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1.938.884.660,00	1.831.348.192,00	(107.536.468,00)	94,45	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.03.1.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.938.884.660,00	1.831.348.192,00	(107.536.468,00)	94,45	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.03.1.01.0001		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	123.432.793,00	122.875.313,00	(557.480,00)	99,54	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.03.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	123.432.793,00	122.875.313,00	(557.480,00)	99,54	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.03.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.432.793,00	122.875.313,00	(557.480,00)	99,54	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.03.1.01.0003		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	1.815.451.867,00	1.708.472.879,00	(106.978.988,00)	94,10	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.03.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.815.451.867,00	1.708.472.879,00	(106.978.988,00)	94,10	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.03.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.452.701.867,00	1.445.722.879,00	(6.978.988,00)	99,51	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.03.1.01.0003	5.1.05	Belanja Hibah	362.750.000,00	262.750.000,00	(100.000.000,00)	72,43	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.04		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	152.592.200,00	151.328.600,00	(1.263.600,00)	99,17	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.04.1.01		Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	152.592.200,00	151.328.600,00	(1.263.600,00)	99,17	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.04.1.01.0004		Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal	152.592.200,00	151.328.600,00	(1.263.600,00)	99,17	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.04.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	152.592.200,00	151.328.600,00	(1.263.600,00)	99,17	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.04.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.592.200,00	151.328.600,00	(1.263.600,00)	99,17	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.05		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	600.259.972,00	591.536.827,00	(8.723.145,00)	98,54	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.05.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	112.340.000,00	112.340.000,00	0,00	100,00	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.05.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.340.000,00	112.340.000,00	0,00	100,00	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.05.1.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	487.919.972,00	479.196.827,00	(8.723.145,00)	98,21	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.05.1.02.0001		Pelindungan Cagar Budaya	35.647.000,00	30.804.778,00	(4.842.222,00)	86,41	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.05.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	35.647.000,00	30.804.778,00	(4.842.222,00)	86,41	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.05.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.647.000,00	30.804.778,00	(4.842.222,00)	86,41	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.05.1.02.0004		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	452.272.972,00	448.392.049,00	(3.880.923,00)	99,14	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.05.1.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	452.272.972,00	448.392.049,00	(3.880.923,00)	99,14	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.05.1.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	452.272.972,00	448.392.049,00	(3.880.923,00)	99,14	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.06		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	236.538.972,00	235.448.223,00	(1.090.749,00)	99,53	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.06.1.01		Pengelolaan Museum Provinsi	236.538.972,00	235.448.223,00	(1.090.749,00)	99,53	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.06.1.01.0004		Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	236.538.972,00	235.448.223,00	(1.090.749,00)	99,53	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.06.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	121.908.972,00	120.923.223,00	(985.749,00)	99,19	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.06.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.908.972,00	120.923.223,00	(985.749,00)	99,19	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.06.1.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	114.630.000,00	114.525.000,00	(105.000,00)	99,90	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.06.1.01.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	114.630.000,00	114.525.000,00	(105.000,00)	99,90	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.867.192.004,00	11.717.941.837,00	(149.250.167,00)	98,74	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	494.457.584,00	492.836.116,00	(1.621.468,00)	99,67	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	23.316.000,00	22.578.830,00	(737.170,00)	96,83	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	23.316.000,00	22.578.830,00	(737.170,00)	96,83	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.316.000,00	22.578.830,00	(737.170,00)	96,83	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	422.088.224,00	421.237.186,00	(851.038,00)	99,79	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	422.088.224,00	421.237.186,00	(851.038,00)	99,79	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	422.088.224,00	421.237.186,00	(851.038,00)	99,79	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.053.360,00	49.020.100,00	(33.260,00)	99,93	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	49.053.360,00	49.020.100,00	(33.260,00)	99,93	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.053.360,00	49.020.100,00	(33.260,00)	99,93	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.741.749.284,00	7.616.677.097,00	(125.072.187,00)	98,38	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.316.022.284,00	7.206.077.097,00	(109.945.187,00)	98,49	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.316.022.284,00	7.206.077.097,00	(109.945.187,00)	98,49	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	7.316.022.046,00	7.206.077.097,00	(109.944.949,00)	98,49	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	238,00	0,00	(238,00)	0,00	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	425.727.000,00	410.600.000,00	(15.127.000,00)	96,44	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	425.727.000,00	410.600.000,00	(15.127.000,00)	96,44	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	425.640.000,00	410.600.000,00	(15.040.000,00)	96,46	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.000,00	0,00	(87.000,00)	0,00	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70.228.500,00	69.114.000,00	(1.114.500,00)	98,41	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	60.225.000,00	60.214.000,00	(11.000,00)	99,98	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	60.225.000,00	60.214.000,00	(11.000,00)	99,98	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.225.000,00	60.214.000,00	(11.000,00)	99,98	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.003.500,00	8.900.000,00	(1.103.500,00)	88,96	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	10.003.500,00	8.900.000,00	(1.103.500,00)	88,96	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.003.500,00	8.900.000,00	(1.103.500,00)	88,96	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	937.660.236,00	935.742.722,00	(1.917.514,00)	99,79	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.110.500,00	16.622.800,00	(487.700,00)	97,14	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	17.110.500,00	16.622.800,00	(487.700,00)	97,14	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.110.500,00	16.622.800,00	(487.700,00)	97,14	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.000.000,00	19.881.100,00	(118.900,00)	99,40	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.881.100,00	(118.900,00)	99,40	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.881.100,00	(118.900,00)	99,40	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	282.173.500,00	282.050.600,00	(122.900,00)	99,95	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	282.173.500,00	282.050.600,00	(122.900,00)	99,95	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	282.173.500,00	282.050.600,00	(122.900,00)	99,95	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	198.858.000,00	198.858.000,00	0,00	100,00	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.858.000,00	198.858.000,00	0,00	100,00	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000,00	29.400.000,00	(600.000,00)	98,00	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	29.400.000,00	(600.000,00)	98,00	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.400.000,00	(600.000,00)	98,00	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	376.518.236,00	375.930.222,00	(588.014,00)	99,84	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	376.518.236,00	375.930.222,00	(588.014,00)	99,84	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	376.518.236,00	375.930.222,00	(588.014,00)	99,84	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.06.0011	5.1	BELANJA OPERASI	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.06.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	654.852.270,00	652.620.000,00	(2.232.270,00)	99,65	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	603.000.000,00	601.700.000,00	(1.300.000,00)	99,78	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.07.0002	5.2	BELANJA MODAL	603.000.000,00	601.700.000,00	(1.300.000,00)	99,78	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.07.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	603.000.000,00	601.700.000,00	(1.300.000,00)	99,78	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.852.270,00	50.920.000,00	(932.270,00)	98,20	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	51.852.270,00	50.920.000,00	(932.270,00)	98,20	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.852.270,00	50.920.000,00	(932.270,00)	98,20	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.730.415.064,00	1.716.403.020,00	(14.012.044,00)	99,19	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	133.216.896,00	133.177.536,00	(39.360,00)	99,97	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	133.216.896,00	133.177.536,00	(39.360,00)	99,97	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.216.896,00	133.177.536,00	(39.360,00)	99,97	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	502.277.230,00	489.467.923,00	(12.809.307,00)	97,44	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	502.277.230,00	489.467.923,00	(12.809.307,00)	97,44	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	502.277.230,00	489.467.923,00	(12.809.307,00)	97,44	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.500.000,00	44.475.000,00	(25.000,00)	99,94	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	44.500.000,00	44.475.000,00	(25.000,00)	99,94	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.500.000,00	44.475.000,00	(25.000,00)	99,94	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.050.420.938,00	1.049.282.561,00	(1.138.377,00)	99,89	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.050.420.938,00	1.049.282.561,00	(1.138.377,00)	99,89	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.050.420.938,00	1.049.282.561,00	(1.138.377,00)	99,89	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	237.829.066,00	234.548.882,00	(3.280.184,00)	98,62	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.655.000,00	44.140.450,00	(1.514.550,00)	96,68	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	45.655.000,00	44.140.450,00	(1.514.550,00)	96,68	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.655.000,00	44.140.450,00	(1.514.550,00)	96,68	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.040.000,00	34.744.000,00	(296.000,00)	99,15	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	35.040.000,00	34.744.000,00	(296.000,00)	99,15	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.040.000,00	34.744.000,00	(296.000,00)	99,15	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	133.216.896,00	133.164.432,00	(52.464,00)	99,96	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	133.216.896,00	133.164.432,00	(52.464,00)	99,96	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.216.896,00	133.164.432,00	(52.464,00)	99,96	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.917.170,00	22.500.000,00	(1.417.170,00)	94,07	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	23.917.170,00	22.500.000,00	(1.417.170,00)	94,07	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.917.170,00	22.500.000,00	(1.417.170,00)	94,07	



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**
Organisasi : **Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000		5	BELANJA DAERAH	165.783.721,30	152.050.766,00	(13.732.955,30)	91,71	
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.24.02		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	165.783.721,30	152.050.766,00	(13.732.955,30)	91,71	
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.24.02.1.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	162.301.721,30	148.702.186,00	(13.599.535,30)	91,62	
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.24.02.1.01.0003		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	151.242.721,30	138.457.599,00	(12.785.122,30)	91,54	
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.24.02.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	151.242.721,30	138.457.599,00	(12.785.122,30)	91,54	
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.24.02.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.242.721,30	138.457.599,00	(12.785.122,30)	91,54	
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.24.02.1.01.0004		Penyusutan Arsip Dinamis	11.059.000,00	10.244.587,00	(814.413,00)	92,63	
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.24.02.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	11.059.000,00	10.244.587,00	(814.413,00)	92,63	
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.24.02.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.059.000,00	10.244.587,00	(814.413,00)	92,63	
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.24.02.1.03		Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	3.482.000,00	3.348.580,00	(133.420,00)	96,16	
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.24.02.1.03.0001		Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	3.482.000,00	3.348.580,00	(133.420,00)	96,16	
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.24.02.1.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.482.000,00	3.348.580,00	(133.420,00)	96,16	
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.24.02.1.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.482.000,00	3.348.580,00	(133.420,00)	96,16	



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**
Organisasi : **Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000		5	BELANJA DAERAH	19.969.205.094,70	19.417.434.381,02	(551.770.713,68)	97,23	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	659.420.202,46	497.741.540,00	(161.678.662,46)	75,48	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.1.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	581.721.384,46	429.671.573,00	(152.049.811,46)	73,86	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.1.01.0003		Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	189.987.056,46	41.188.656,00	(148.798.400,46)	21,67	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	189.987.056,46	41.188.656,00	(148.798.400,46)	21,67	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	189.987.056,46	41.188.656,00	(148.798.400,46)	21,67	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.1.01.0006		Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	37.907.476,00	37.303.526,00	(603.950,00)	98,40	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	37.907.476,00	37.303.526,00	(603.950,00)	98,40	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.907.476,00	37.303.526,00	(603.950,00)	98,40	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.1.01.0007		Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	331.174.512,00	328.789.891,00	(2.384.621,00)	99,27	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	322.474.512,00	320.089.891,00	(2.384.621,00)	99,26	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	322.474.512,00	320.089.891,00	(2.384.621,00)	99,26	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.1.01.0007	5.2	BELANJA MODAL	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.1.01.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.1.01.0009		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	22.652.340,00	22.389.500,00	(262.840,00)	98,83	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.1.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	22.652.340,00	22.389.500,00	(262.840,00)	98,83	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.1.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.652.340,00	22.389.500,00	(262.840,00)	98,83	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.1.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	77.698.818,00	68.069.967,00	(9.628.851,00)	87,60	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.1.02.0004		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	77.698.818,00	68.069.967,00	(9.628.851,00)	87,60	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.1.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	77.698.818,00	68.069.967,00	(9.628.851,00)	87,60	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.1.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.698.818,00	68.069.967,00	(9.628.851,00)	87,60	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.03		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	357.333.291,00	352.942.747,00	(4.390.544,00)	98,77	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.03.1.03		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	357.333.291,00	352.942.747,00	(4.390.544,00)	98,77	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.03.1.03.0001		Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	14.075.200,00	11.602.806,00	(2.472.394,00)	82,43	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.03.1.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	14.075.200,00	11.602.806,00	(2.472.394,00)	82,43	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.03.1.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.075.200,00	11.602.806,00	(2.472.394,00)	82,43	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.03.1.03.0002		Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	343.258.091,00	341.339.941,00	(1.918.150,00)	99,44	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.03.1.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	343.258.091,00	341.339.941,00	(1.918.150,00)	99,44	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.03.1.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	343.258.091,00	341.339.941,00	(1.918.150,00)	99,44	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.952.451.601,24	18.566.750.094,02	(385.701.507,22)	97,96	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	118.272.300,24	114.307.350,00	(3.964.950,24)	96,64	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.722.200,00	9.756.400,00	(1.965.800,00)	83,23	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.722.200,00	9.756.400,00	(1.965.800,00)	83,23	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.722.200,00	9.756.400,00	(1.965.800,00)	83,23	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	106.550.100,24	104.550.950,00	(1.999.150,24)	98,12	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	106.550.100,24	104.550.950,00	(1.999.150,24)	98,12	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.550.100,24	104.550.950,00	(1.999.150,24)	98,12	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.554.146.780,00	12.296.747.950,00	(257.398.830,00)	97,94	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.157.498.780,00	11.901.109.950,00	(256.388.830,00)	97,89	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.157.498.780,00	11.901.109.950,00	(256.388.830,00)	97,89	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	12.157.498.780,00	11.901.109.950,00	(256.388.830,00)	97,89	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	396.648.000,00	395.638.000,00	(1.010.000,00)	99,74	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	396.648.000,00	395.638.000,00	(1.010.000,00)	99,74	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	396.648.000,00	395.638.000,00	(1.010.000,00)	99,74	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	37.403.500,00	37.290.000,00	(113.500,00)	99,69	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	9.003.500,00	9.000.000,00	(3.500,00)	99,96	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	9.003.500,00	9.000.000,00	(3.500,00)	99,96	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.003.500,00	9.000.000,00	(3.500,00)	99,96	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	28.400.000,00	28.290.000,00	(110.000,00)	99,61	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	28.400.000,00	28.290.000,00	(110.000,00)	99,61	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.400.000,00	28.290.000,00	(110.000,00)	99,61	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	860.772.635,00	846.197.138,00	(14.575.497,00)	98,30	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.491.900,00	18.885.500,00	(606.400,00)	96,88	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	19.491.900,00	18.885.500,00	(606.400,00)	96,88	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.491.900,00	18.885.500,00	(606.400,00)	96,88	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	84.748.880,00	84.600.000,00	(148.880,00)	99,82	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	84.748.880,00	84.600.000,00	(148.880,00)	99,82	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	84.748.880,00	84.600.000,00	(148.880,00)	99,82	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	329.333.874,00	326.358.800,00	(2.975.074,00)	99,09	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	329.333.874,00	326.358.800,00	(2.975.074,00)	99,09	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	329.333.874,00	326.358.800,00	(2.975.074,00)	99,09	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	68.353.851,00	66.083.600,00	(2.270.251,00)	96,67	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	68.353.851,00	66.083.600,00	(2.270.251,00)	96,67	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.353.851,00	66.083.600,00	(2.270.251,00)	96,67	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	13.203.500,00	13.152.000,00	(51.500,00)	99,60	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	13.203.500,00	13.152.000,00	(51.500,00)	99,60	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.203.500,00	13.152.000,00	(51.500,00)	99,60	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	297.135.130,00	289.740.038,00	(7.395.092,00)	97,51	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	297.135.130,00	289.740.038,00	(7.395.092,00)	97,51	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	297.135.130,00	289.740.038,00	(7.395.092,00)	97,51	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.06.0010		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	48.505.500,00	47.377.200,00	(1.128.300,00)	97,67	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.06.0010	5.1	BELANJA OPERASI	48.505.500,00	47.377.200,00	(1.128.300,00)	97,67	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.06.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.505.500,00	47.377.200,00	(1.128.300,00)	97,67	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.454.000,00	3.453.000,00	(1.000,00)	99,97	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.07.0005		Pengadaan Mebel	3.454.000,00	3.453.000,00	(1.000,00)	99,97	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	673.000,00	673.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	673.000,00	673.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	2.781.000,00	2.780.000,00	(1.000,00)	99,96	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.781.000,00	2.780.000,00	(1.000,00)	99,96	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.092.731.042,00	5.032.421.232,71	(60.309.809,29)	98,81	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.603.500,00	3.600.000,00	(3.500,00)	99,90	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.603.500,00	3.600.000,00	(3.500,00)	99,90	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.603.500,00	3.600.000,00	(3.500,00)	99,90	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	835.062.435,00	790.614.467,71	(44.447.967,29)	94,67	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	835.062.435,00	790.614.467,71	(44.447.967,29)	94,67	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	835.062.435,00	790.614.467,71	(44.447.967,29)	94,67	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.254.065.107,00	4.238.206.765,00	(15.858.342,00)	99,62	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	4.254.065.107,00	4.238.206.765,00	(15.858.342,00)	99,62	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.254.065.107,00	4.238.206.765,00	(15.858.342,00)	99,62	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	285.671.344,00	236.333.423,31	(49.337.920,69)	82,72	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	62.050.100,00	60.229.400,00	(1.820.700,00)	97,06	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	62.050.100,00	60.229.400,00	(1.820.700,00)	97,06	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.050.100,00	60.229.400,00	(1.820.700,00)	97,06	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	138.587.744,00	94.313.423,31	(44.274.320,69)	68,05	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	138.587.744,00	94.313.423,31	(44.274.320,69)	68,05	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.587.744,00	94.313.423,31	(44.274.320,69)	68,05	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	85.033.500,00	81.790.600,00	(3.242.900,00)	96,18	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	85.033.500,00	81.790.600,00	(3.242.900,00)	96,18	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.033.500,00	81.790.600,00	(3.242.900,00)	96,18	



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**
Organisasi : **Dinas Kelautan dan Perikanan**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	3.25.0.00.0.00.19.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	1.717.133.080,00	742.352.020,00	(974.781.060,00)	43,23	
	3.25.0.00.0.00.19.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.717.133.080,00	742.352.020,00	(974.781.060,00)	43,23	
	3.25.0.00.0.00.19.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	1.701.371.000,00	726.589.940,00	(974.781.060,00)	42,70	
	3.25.0.00.0.00.19.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	15.762.080,00	15.762.080,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000		5	BELANJA DAERAH	69.852.198.766,00	67.666.654.729,83	(2.185.544.036,17)	96,87	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.02		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	432.682.670,00	397.662.602,00	(35.020.068,00)	91,90	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.02.1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	173.716.556,00	167.793.651,00	(5.922.905,00)	96,59	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.02.1.01.0002		Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	173.716.556,00	167.793.651,00	(5.922.905,00)	96,59	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.02.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	173.716.556,00	167.793.651,00	(5.922.905,00)	96,59	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.02.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	173.716.556,00	167.793.651,00	(5.922.905,00)	96,59	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.02.1.02		Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	111.758.299,00	86.206.881,00	(25.551.418,00)	77,13	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.02.1.02.0002		Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	111.758.299,00	86.206.881,00	(25.551.418,00)	77,13	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.02.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	86.259.299,00	86.206.881,00	(52.418,00)	99,93	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.02.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.259.299,00	86.206.881,00	(52.418,00)	99,93	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.02.1.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	25.499.000,00	0,00	(25.499.000,00)	0,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.02.1.02.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.499.000,00	0,00	(25.499.000,00)	0,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.02.1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	147.207.815,00	143.662.070,00	(3.545.745,00)	97,59	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.02.1.03.0001		Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	147.207.815,00	143.662.070,00	(3.545.745,00)	97,59	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.02.1.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	147.207.815,00	143.662.070,00	(3.545.745,00)	97,59	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.02.1.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.207.815,00	143.662.070,00	(3.545.745,00)	97,59	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	23.674.205.828,93	23.348.532.332,83	(325.673.496,10)	98,62	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.03.1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	13.249.242.074,00	13.243.047.267,94	(6.194.806,06)	99,95	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.03.1.01.0002		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	6.547.339.397,00	6.546.361.587,00	(977.810,00)	99,98	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.03.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.541.639.397,00	6.540.661.587,00	(977.810,00)	99,98	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.03.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.541.639.397,00	6.540.661.587,00	(977.810,00)	99,98	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.03.1.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.03.1.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.03.1.01.0003		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	6.701.902.677,00	6.696.685.680,94	(5.216.996,06)	99,92	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.03.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	6.655.902.481,00	6.650.685.680,94	(5.216.800,06)	99,92	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.03.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	288.680.071,00	286.373.789,00	(2.306.282,00)	99,20	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.03.1.01.0003	5.1.05	Belanja Hibah	6.367.222.410,00	6.364.311.891,94	(2.910.518,06)	99,95	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.03.1.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	46.000.196,00	46.000.000,00	(196,00)	99,99	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.03.1.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.000.196,00	46.000.000,00	(196,00)	99,99	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.03.1.03		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	38.116.140,93	38.113.640,00	(2.500,93)	99,99	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.03.1.03.0002		Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	38.116.140,93	38.113.640,00	(2.500,93)	99,99	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.03.1.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	25.066.140,00	25.063.640,00	(2.500,00)	99,99	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.03.1.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.066.140,00	25.063.640,00	(2.500,00)	99,99	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.03.1.03.0002	5.2	BELANJA MODAL	13.050.000,93	13.050.000,00	(0,93)	99,99	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.03.1.03.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.050.000,93	13.050.000,00	(0,93)	99,99	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.03.1.05		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	30.594.970,00	27.534.764,00	(3.060.206,00)	89,99	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.03.1.05.0002		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	30.594.970,00	27.534.764,00	(3.060.206,00)	89,99	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.03.1.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	13.182.400,00	10.184.764,00	(2.997.636,00)	77,26	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.03.1.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.182.400,00	10.184.764,00	(2.997.636,00)	77,26	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.03.1.05.0002	5.2	BELANJA MODAL	17.412.570,00	17.350.000,00	(62.570,00)	99,64	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.03.1.05.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.412.570,00	17.350.000,00	(62.570,00)	99,64	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.03.1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	9.970.753.245,00	9.656.896.306,89	(313.856.938,11)	96,85	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.03.1.06.0002		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	9.888.134.525,00	9.609.563.306,89	(278.571.218,11)	97,18	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.03.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	600.718.851,00	491.701.024,80	(109.017.826,20)	81,85	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.03.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.718.851,00	491.701.024,80	(109.017.826,20)	81,85	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.03.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	9.287.415.674,00	9.117.862.282,09	(169.553.391,91)	98,17	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.03.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	469.430.534,00	467.950.000,00	(1.480.534,00)	99,68	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.03.1.06.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.247.985.140,00	8.106.017.628,99	(141.967.511,01)	98,27	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.03.1.06.0002	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	570.000.000,00	543.894.653,10	(26.105.346,90)	95,42	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.03.1.06.0003		Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	82.618.720,00	47.333.000,00	(35.285.720,00)	57,29	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.03.1.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	82.618.720,00	47.333.000,00	(35.285.720,00)	57,29	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.03.1.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.618.720,00	47.333.000,00	(35.285.720,00)	57,29	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.03.1.10		Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	385.499.399,00	382.940.354,00	(2.559.045,00)	99,33	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.03.1.10.0002		Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	385.499.399,00	382.940.354,00	(2.559.045,00)	99,33	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.03.1.10.0002	5.1	BELANJA OPERASI	338.456.399,00	335.897.354,00	(2.559.045,00)	99,24	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.03.1.10.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	338.456.399,00	335.897.354,00	(2.559.045,00)	99,24	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.03.1.10.0002	5.2	BELANJA MODAL	47.043.000,00	47.043.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.03.1.10.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.043.000,00	47.043.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	4.950.650.657,01	4.763.757.011,00	(186.893.646,01)	96,22	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.04.1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	4.950.650.657,01	4.763.757.011,00	(186.893.646,01)	96,22	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.04.1.05.0001		Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	19.607.553,00	6.365.000,00	(13.242.553,00)	32,46	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.04.1.05.0001	5.1	BELANJA OPERASI	19.607.553,00	6.365.000,00	(13.242.553,00)	32,46	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.04.1.05.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.607.553,00	6.365.000,00	(13.242.553,00)	32,46	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.04.1.05.0002		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	2.861.208.146,00	2.831.990.880,00	(29.217.266,00)	98,97	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.04.1.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.659.494.646,00	2.637.867.380,00	(21.627.266,00)	99,18	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.04.1.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	886.939.434,00	865.317.380,00	(21.622.054,00)	97,56	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.04.1.05.0002	5.1.05	Belanja Hibah	1.772.555.212,00	1.772.550.000,00	(5.212,00)	99,99	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.04.1.05.0002	5.2	BELANJA MODAL	201.713.500,00	194.123.500,00	(7.590.000,00)	96,23	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.04.1.05.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	201.713.500,00	194.123.500,00	(7.590.000,00)	96,23	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.04.1.05.0004		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1.143.384.000,01	1.019.651.628,00	(123.732.372,01)	89,17	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.04.1.05.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.106.234.000,01	990.701.628,00	(115.532.372,01)	89,55	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.04.1.05.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.664.000,01	126.831.628,00	(1.832.372,01)	98,57	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.04.1.05.0004	5.1.05	Belanja Hibah	977.570.000,00	863.870.000,00	(113.700.000,00)	88,36	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.04.1.05.0004	5.2	BELANJA MODAL	37.150.000,00	28.950.000,00	(8.200.000,00)	77,92	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.04.1.05.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.150.000,00	28.950.000,00	(8.200.000,00)	77,92	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.04.1.05.0006		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	267.252.169,00	264.112.303,00	(3.139.866,00)	98,82	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.04.1.05.0006	5.1	BELANJA OPERASI	267.252.169,00	264.112.303,00	(3.139.866,00)	98,82	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.04.1.05.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	267.252.169,00	264.112.303,00	(3.139.866,00)	98,82	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.04.1.05.0008		Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	659.198.789,00	641.637.200,00	(17.561.589,00)	97,33	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.04.1.05.0008	5.1	BELANJA OPERASI	659.198.789,00	641.637.200,00	(17.561.589,00)	97,33	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.04.1.05.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.618.789,00	80.577.200,00	(1.041.589,00)	98,72	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.04.1.05.0008	5.1.05	Belanja Hibah	577.580.000,00	561.060.000,00	(16.520.000,00)	97,13	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.05		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.667.398.387,00	1.550.334.546,00	(117.063.841,00)	92,97	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.05.1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1.667.398.387,00	1.550.334.546,00	(117.063.841,00)	92,97	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.05.1.01.0001		Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	1.535.310.251,00	1.419.048.546,00	(116.261.705,00)	92,42	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.05.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.391.272.151,00	1.303.898.546,00	(87.373.605,00)	93,71	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.05.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	859.272.081,00	773.298.546,00	(85.973.535,00)	89,99	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.05.1.01.0001	5.1.05	Belanja Hibah	532.000.070,00	530.600.000,00	(1.400.070,00)	99,73	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.05.1.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	144.038.100,00	115.150.000,00	(28.888.100,00)	79,94	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.05.1.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	144.038.100,00	115.150.000,00	(28.888.100,00)	79,94	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.05.1.01.0002		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	32.158.758,00	31.657.500,00	(501.258,00)	98,44	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.05.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	32.158.758,00	31.657.500,00	(501.258,00)	98,44	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.05.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.158.758,00	31.657.500,00	(501.258,00)	98,44	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.05.1.01.0004		Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	99.929.378,00	99.628.500,00	(300.878,00)	99,69	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.05.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	99.929.378,00	99.628.500,00	(300.878,00)	99,69	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.05.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.929.378,00	99.628.500,00	(300.878,00)	99,69	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.06		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	981.660.035,00	966.518.908,00	(15.141.127,00)	98,45	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.06.1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	514.719.735,00	499.578.608,00	(15.141.127,00)	97,05	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.06.1.02.0001		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	31.418.300,00	31.382.871,00	(35.429,00)	99,88	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.06.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	31.418.300,00	31.382.871,00	(35.429,00)	99,88	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.06.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.418.300,00	31.382.871,00	(35.429,00)	99,88	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.06.1.02.0002		Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	483.301.435,00	468.195.737,00	(15.105.698,00)	96,87	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.06.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	481.301.435,00	466.195.737,00	(15.105.698,00)	96,86	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.06.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	481.301.435,00	466.195.737,00	(15.105.698,00)	96,86	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.06.1.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.06.1.02.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.06.1.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	466.940.300,00	466.940.300,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.06.1.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.659.300,00	16.659.300,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.06.1.03.0002	5.1.05	Belanja Hibah	450.281.000,00	450.281.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	38.145.601.188,06	36.639.849.330,00	(1.505.751.858,06)	96,05	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	261.975.855,48	260.759.558,00	(1.216.297,48)	99,53	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	189.974.812,48	189.926.451,00	(48.361,48)	99,97	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	189.974.812,48	189.926.451,00	(48.361,48)	99,97	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	189.974.812,48	189.926.451,00	(48.361,48)	99,97	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	49.861.883,00	48.713.907,00	(1.147.976,00)	97,69	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	49.861.883,00	48.713.907,00	(1.147.976,00)	97,69	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.861.883,00	48.713.907,00	(1.147.976,00)	97,69	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.139.160,00	22.119.200,00	(19.960,00)	99,90	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	22.139.160,00	22.119.200,00	(19.960,00)	99,90	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.139.160,00	22.119.200,00	(19.960,00)	99,90	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.773.220.375,98	25.214.701.256,00	(558.519.119,98)	97,83	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.445.882.355,98	23.911.824.236,00	(534.058.119,98)	97,81	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	24.445.882.355,98	23.911.824.236,00	(534.058.119,98)	97,81	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	24.445.882.355,98	23.911.824.236,00	(534.058.119,98)	97,81	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.316.939.500,00	1.292.478.500,00	(24.461.000,00)	98,14	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.316.939.500,00	1.292.478.500,00	(24.461.000,00)	98,14	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	1.316.873.500,00	1.292.478.500,00	(24.395.000,00)	98,14	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.000,00	0,00	(66.000,00)	0,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	10.398.520,00	10.398.520,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.398.520,00	10.398.520,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	132.737.544,00	128.654.764,00	(4.082.780,00)	96,92	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	132.737.544,00	128.654.764,00	(4.082.780,00)	96,92	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	132.737.544,00	128.654.764,00	(4.082.780,00)	96,92	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.737.544,00	128.654.764,00	(4.082.780,00)	96,92	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.810.366.283,10	1.732.417.959,00	(77.948.324,10)	95,69	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	105.851.936,00	95.335.049,00	(10.516.887,00)	90,06	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	94.941.936,00	84.425.049,00	(10.516.887,00)	88,92	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.941.936,00	84.425.049,00	(10.516.887,00)	88,92	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.06.0003	5.2	BELANJA MODAL	10.910.000,00	10.910.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.06.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.910.000,00	10.910.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	451.292.716,10	409.023.925,00	(42.268.791,10)	90,63	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	406.261.881,10	377.464.925,00	(28.796.956,10)	92,91	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	406.261.881,10	377.464.925,00	(28.796.956,10)	92,91	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.06.0004	5.2	BELANJA MODAL	45.030.835,00	31.559.000,00	(13.471.835,00)	70,08	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.06.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.030.835,00	31.559.000,00	(13.471.835,00)	70,08	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	47.842.400,00	44.519.200,00	(3.323.200,00)	93,05	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	47.842.400,00	44.519.200,00	(3.323.200,00)	93,05	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.842.400,00	44.519.200,00	(3.323.200,00)	93,05	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	37.750.000,00	30.000.000,00	(7.750.000,00)	79,47	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	37.750.000,00	30.000.000,00	(7.750.000,00)	79,47	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.750.000,00	30.000.000,00	(7.750.000,00)	79,47	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.163.179.231,00	1.149.089.785,00	(14.089.446,00)	98,78	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	1.158.779.231,00	1.144.689.785,00	(14.089.446,00)	98,78	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.158.779.231,00	1.144.689.785,00	(14.089.446,00)	98,78	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.06.0009	5.2	BELANJA MODAL	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.06.0009	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	323.943.682,50	322.627.708,00	(1.315.974,50)	99,59	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	138.720.000,00	138.648.300,00	(71.700,00)	99,94	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.07.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	1.928.300,00	(71.700,00)	96,41	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.07.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.928.300,00	(71.700,00)	96,41	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.07.0002	5.2	BELANJA MODAL	136.720.000,00	136.720.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.07.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	136.720.000,00	136.720.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	185.223.682,50	183.979.408,00	(1.244.274,50)	99,32	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	36.495.408,00	36.495.408,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.495.408,00	36.495.408,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	148.728.274,50	147.484.000,00	(1.244.274,50)	99,16	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	148.728.274,50	147.484.000,00	(1.244.274,50)	99,16	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.532.425.382,00	7.367.302.200,00	(165.123.182,00)	97,80	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.625.587.787,00	1.521.794.551,00	(103.793.236,00)	93,61	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.625.587.787,00	1.521.794.551,00	(103.793.236,00)	93,61	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.625.587.787,00	1.521.794.551,00	(103.793.236,00)	93,61	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.906.837.595,00	5.845.507.649,00	(61.329.946,00)	98,96	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	5.906.837.595,00	5.845.507.649,00	(61.329.946,00)	98,96	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.906.837.595,00	5.845.507.649,00	(61.329.946,00)	98,96	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.310.932.065,00	1.613.385.885,00	(697.546.180,00)	69,81	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	197.579.224,00	192.003.372,00	(5.575.852,00)	97,17	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	197.579.224,00	192.003.372,00	(5.575.852,00)	97,17	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	197.579.224,00	192.003.372,00	(5.575.852,00)	97,17	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	674.035.485,00	605.833.127,00	(68.202.358,00)	89,88	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	674.035.485,00	605.833.127,00	(68.202.358,00)	89,88	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	674.035.485,00	605.833.127,00	(68.202.358,00)	89,88	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.421.913.636,00	798.146.086,00	(623.767.550,00)	56,13	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.421.913.636,00	798.146.086,00	(623.767.550,00)	56,13	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.421.913.636,00	798.146.086,00	(623.767.550,00)	56,13	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.09.0011		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.403.720,00	17.403.300,00	(420,00)	99,99	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	17.403.720,00	17.403.300,00	(420,00)	99,99	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.403.720,00	17.403.300,00	(420,00)	99,99	



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**
Organisasi : **Dinas Pariwisata**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	27.718.278.477,00	26.240.716.090,00	(1.477.562.387,00)	94,66	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	455.110.618,00	229.625.417,00	(225.485.201,00)	50,45	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.1.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	56.581.201,00	56.223.200,00	(358.001,00)	99,36	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.1.01.0007		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	56.581.201,00	56.223.200,00	(358.001,00)	99,36	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	56.581.201,00	56.223.200,00	(358.001,00)	99,36	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.581.201,00	56.223.200,00	(358.001,00)	99,36	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.1.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	350.060.017,00	125.356.117,00	(224.703.900,00)	35,80	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.1.03.0009		Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi	350.060.017,00	125.356.117,00	(224.703.900,00)	35,80	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.1.03.0009	5.1	BELANJA OPERASI	350.060.017,00	125.356.117,00	(224.703.900,00)	35,80	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.1.03.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.060.017,00	125.356.117,00	(224.703.900,00)	35,80	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.1.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	48.469.400,00	48.046.100,00	(423.300,00)	99,12	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.1.04.0009		Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	48.469.400,00	48.046.100,00	(423.300,00)	99,12	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.1.04.0009	5.1	BELANJA OPERASI	48.469.400,00	48.046.100,00	(423.300,00)	99,12	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.1.04.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.469.400,00	48.046.100,00	(423.300,00)	99,12	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	12.822.617.814,00	12.060.439.550,00	(762.178.264,00)	94,05	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.1.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	12.822.617.814,00	12.060.439.550,00	(762.178.264,00)	94,05	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.1.01.0001		Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	11.556.310.665,00	10.794.177.400,00	(762.133.265,00)	93,40	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.556.310.665,00	10.794.177.400,00	(762.133.265,00)	93,40	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.556.310.665,00	10.794.177.400,00	(762.133.265,00)	93,40	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.1.01.0006		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1.266.307.149,00	1.266.262.150,00	(44.999,00)	99,99	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.266.307.149,00	1.266.262.150,00	(44.999,00)	99,99	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.266.307.149,00	1.266.262.150,00	(44.999,00)	99,99	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.04.1.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	77.393.100,00	77.393.100,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.04.1.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.393.100,00	77.393.100,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.04.1.02.0014	5.1	BELANJA OPERASI	220.918.500,00	220.918.500,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.04.1.02.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	220.918.500,00	220.918.500,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.04.1.02.0018	5.1	BELANJA OPERASI	93.307.100,00	93.307.100,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.04.1.02.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.307.100,00	93.307.100,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	119.267.600,00	119.267.600,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.267.600,00	119.267.600,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.929.663.745,00	13.439.764.823,00	(489.898.922,00)	96,48	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	218.808.194,00	218.232.056,00	(576.138,00)	99,73	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	202.885.900,00	202.309.762,00	(576.138,00)	99,71	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	202.885.900,00	202.309.762,00	(576.138,00)	99,71	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	202.885.900,00	202.309.762,00	(576.138,00)	99,71	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	15.922.294,00	15.922.294,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.922.294,00	15.922.294,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.489.835.912,00	10.176.848.072,00	(312.987.840,00)	97,01	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.984.201.312,00	9.693.185.472,00	(291.015.840,00)	97,08	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.984.201.312,00	9.693.185.472,00	(291.015.840,00)	97,08	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	9.984.101.312,00	9.693.185.472,00	(290.915.840,00)	97,08	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	494.712.000,00	472.740.000,00	(21.972.000,00)	95,55	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	494.712.000,00	472.740.000,00	(21.972.000,00)	95,55	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	493.802.000,00	472.012.000,00	(21.790.000,00)	95,58	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	910.000,00	728.000,00	(182.000,00)	80,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	10.922.600,00	10.922.600,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.922.600,00	10.922.600,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.227.818.430,00	1.138.601.304,00	(89.217.126,00)	92,73	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	186.983.280,00	117.167.900,00	(69.815.380,00)	62,66	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	186.983.280,00	117.167.900,00	(69.815.380,00)	62,66	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	186.983.280,00	117.167.900,00	(69.815.380,00)	62,66	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	101.998.000,00	97.279.000,00	(4.719.000,00)	95,37	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	101.998.000,00	97.279.000,00	(4.719.000,00)	95,37	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.998.000,00	97.279.000,00	(4.719.000,00)	95,37	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	938.837.150,00	924.154.404,00	(14.682.746,00)	98,43	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	938.837.150,00	924.154.404,00	(14.682.746,00)	98,43	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	938.837.150,00	924.154.404,00	(14.682.746,00)	98,43	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.663.361.209,00	1.592.280.491,00	(71.080.718,00)	95,72	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72.889.009,00	67.649.629,00	(5.239.380,00)	92,81	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	72.889.009,00	67.649.629,00	(5.239.380,00)	92,81	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.889.009,00	67.649.629,00	(5.239.380,00)	92,81	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.579.572.200,00	1.513.730.862,00	(65.841.338,00)	95,83	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.579.572.200,00	1.513.730.862,00	(65.841.338,00)	95,83	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.579.572.200,00	1.513.730.862,00	(65.841.338,00)	95,83	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	301.340.000,00	285.302.900,00	(16.037.100,00)	94,67	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	138.080.000,00	135.663.000,00	(2.417.000,00)	98,24	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	138.080.000,00	135.663.000,00	(2.417.000,00)	98,24	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.080.000,00	135.663.000,00	(2.417.000,00)	98,24	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	146.230.000,00	133.454.900,00	(12.775.100,00)	91,26	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	146.230.000,00	133.454.900,00	(12.775.100,00)	91,26	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.230.000,00	133.454.900,00	(12.775.100,00)	91,26	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.030.000,00	16.185.000,00	(845.000,00)	95,03	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	17.030.000,00	16.185.000,00	(845.000,00)	95,03	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.030.000,00	16.185.000,00	(845.000,00)	95,03	



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**

Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Organisasi : **Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	3.29.0.00.0.00.20.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	771.562.500,00	0,00	(771.562.500,00)	0,00	
	3.29.0.00.0.00.20.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	771.562.500,00	0,00	(771.562.500,00)	0,00	
	3.29.0.00.0.00.20.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	771.562.500,00	0,00	(771.562.500,00)	0,00	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000		5	BELANJA DAERAH	33.876.262.600,00	21.134.203.211,41	(12.742.059.388,59)	62,38	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.02		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	429.510.032,00	375.666.910,81	(53.843.121,19)	87,46	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.02.1.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	347.460.032,00	332.709.510,81	(14.750.521,19)	95,75	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.02.1.01.0001		Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	347.460.032,00	332.709.510,81	(14.750.521,19)	95,75	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.02.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	347.460.032,00	332.709.510,81	(14.750.521,19)	95,75	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.02.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	347.460.032,00	332.709.510,81	(14.750.521,19)	95,75	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.02.1.03		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	82.050.000,00	42.957.400,00	(39.092.600,00)	52,35	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.02.1.03.0001		Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	29.317.000,00	23.964.100,00	(5.352.900,00)	81,74	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.02.1.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	29.317.000,00	23.964.100,00	(5.352.900,00)	81,74	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.02.1.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.317.000,00	23.964.100,00	(5.352.900,00)	81,74	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.02.1.03.0003		Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	52.733.000,00	18.993.300,00	(33.739.700,00)	36,01	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.02.1.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	52.733.000,00	18.993.300,00	(33.739.700,00)	36,01	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.02.1.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.733.000,00	18.993.300,00	(33.739.700,00)	36,01	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.03		PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	230.249.000,00	180.064.700,00	(50.184.300,00)	78,20	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.03.1.04		Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	34.650.000,00	19.164.000,00	(15.486.000,00)	55,30	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.03.1.04.0003		Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	34.650.000,00	19.164.000,00	(15.486.000,00)	55,30	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.03.1.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	34.650.000,00	19.164.000,00	(15.486.000,00)	55,30	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.03.1.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.650.000,00	19.164.000,00	(15.486.000,00)	55,30	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.03.1.12		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	66.621.000,00	65.460.800,00	(1.160.200,00)	98,25	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.03.1.12.0002		Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	66.621.000,00	65.460.800,00	(1.160.200,00)	98,25	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.03.1.12.0002	5.1	BELANJA OPERASI	66.621.000,00	65.460.800,00	(1.160.200,00)	98,25	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.03.1.12.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.621.000,00	65.460.800,00	(1.160.200,00)	98,25	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.03.1.13		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	128.978.000,00	95.439.900,00	(33.538.100,00)	73,99	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.03.1.13.0002		Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	128.978.000,00	95.439.900,00	(33.538.100,00)	73,99	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.03.1.13.0002	5.1	BELANJA OPERASI	128.978.000,00	95.439.900,00	(33.538.100,00)	73,99	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.03.1.13.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.978.000,00	95.439.900,00	(33.538.100,00)	73,99	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.05		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	8.033.625.300,00	2.793.524.831,00	(5.240.100.469,00)	34,77	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.05.1.07		Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	7.794.114.700,00	2.611.563.931,00	(5.182.550.769,00)	33,50	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.05.1.07.0007		Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	5.913.215.500,00	2.014.076.200,00	(3.899.139.300,00)	34,06	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.05.1.07.0007	5.1	BELANJA OPERASI	5.292.215.500,00	1.531.076.200,00	(3.761.139.300,00)	28,93	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.05.1.07.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.292.215.500,00	1.531.076.200,00	(3.761.139.300,00)	28,93	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.05.1.07.0007	5.2	BELANJA MODAL	621.000.000,00	483.000.000,00	(138.000.000,00)	77,77	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.05.1.07.0007	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	621.000.000,00	483.000.000,00	(138.000.000,00)	77,77	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.05.1.07.0009		Pemeliharaan infrastruktur aneka EBT	1.880.899.200,00	597.487.731,00	(1.283.411.469,00)	31,76	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.05.1.07.0009	5.1	BELANJA OPERASI	1.880.899.200,00	597.487.731,00	(1.283.411.469,00)	31,76	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.05.1.07.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.880.899.200,00	597.487.731,00	(1.283.411.469,00)	31,76	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.05.1.10		Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	239.510.600,00	181.960.900,00	(57.549.700,00)	75,97	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.05.1.10.0005		Sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	239.510.600,00	181.960.900,00	(57.549.700,00)	75,97	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.05.1.10.0005	5.1	BELANJA OPERASI	239.510.600,00	181.960.900,00	(57.549.700,00)	75,97	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.05.1.10.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	239.510.600,00	181.960.900,00	(57.549.700,00)	75,97	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	11.663.605.756,00	4.892.814.680,60	(6.770.791.075,40)	41,94	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.01		Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	122.276.400,00	101.776.300,00	(20.500.100,00)	83,23	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.01.0002		Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	93.763.000,00	73.798.000,00	(19.965.000,00)	78,70	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	93.763.000,00	73.798.000,00	(19.965.000,00)	78,70	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.763.000,00	73.798.000,00	(19.965.000,00)	78,70	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.01.0003		Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	28.513.400,00	27.978.300,00	(535.100,00)	98,12	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	28.513.400,00	27.978.300,00	(535.100,00)	98,12	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.513.400,00	27.978.300,00	(535.100,00)	98,12	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.02		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	23.305.500,00	22.634.500,00	(671.000,00)	97,12	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.02.0003		Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	23.305.500,00	22.634.500,00	(671.000,00)	97,12	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	23.305.500,00	22.634.500,00	(671.000,00)	97,12	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.305.500,00	22.634.500,00	(671.000,00)	97,12	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.05		Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	60.329.400,00	44.429.200,00	(15.900.200,00)	73,64	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.05.0002		Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	41.174.000,00	31.114.200,00	(10.059.800,00)	75,56	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	41.174.000,00	31.114.200,00	(10.059.800,00)	75,56	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.174.000,00	31.114.200,00	(10.059.800,00)	75,56	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.05.0003		Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	19.155.400,00	13.315.000,00	(5.840.400,00)	69,51	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	19.155.400,00	13.315.000,00	(5.840.400,00)	69,51	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.155.400,00	13.315.000,00	(5.840.400,00)	69,51	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	11.457.694.456,00	4.723.974.680,60	(6.733.719.775,40)	41,22	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.06.0002		Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	2.188.310.000,00	2.096.679.300,00	(91.630.700,00)	95,81	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.188.310.000,00	2.096.679.300,00	(91.630.700,00)	95,81	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.188.310.000,00	2.096.679.300,00	(91.630.700,00)	95,81	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.06.0004		Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	112.480.000,00	86.937.100,00	(25.542.900,00)	77,29	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	112.480.000,00	86.937.100,00	(25.542.900,00)	77,29	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.480.000,00	86.937.100,00	(25.542.900,00)	77,29	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.06.0006		Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	9.126.529.456,00	2.539.990.780,60	(6.586.538.675,40)	27,83	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	770.567.275,00	137.026.832,00	(633.540.443,00)	17,78	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	770.567.275,00	137.026.832,00	(633.540.443,00)	17,78	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.06.0006	5.2	BELANJA MODAL	8.355.962.181,00	2.402.963.948,60	(5.952.998.232,40)	28,75	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.06.0006	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	635.972.689,00	436.463.094,60	(199.509.594,40)	68,62	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.06.0006	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.719.989.492,00	1.966.500.854,00	(5.753.488.638,00)	25,47	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.06.0007		Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	30.375.000,00	367.500,00	(30.007.500,00)	1,20	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	30.375.000,00	367.500,00	(30.007.500,00)	1,20	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.375.000,00	367.500,00	(30.007.500,00)	1,20	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.519.272.512,00	12.892.132.089,00	(627.140.423,00)	95,36	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	470.489.040,00	444.372.750,00	(26.116.290,00)	94,44	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	101.396.000,00	94.733.700,00	(6.662.300,00)	93,42	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	101.396.000,00	94.733.700,00	(6.662.300,00)	93,42	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.396.000,00	94.733.700,00	(6.662.300,00)	93,42	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	196.598.000,00	183.236.350,00	(13.361.650,00)	93,20	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	196.598.000,00	183.236.350,00	(13.361.650,00)	93,20	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	196.598.000,00	183.236.350,00	(13.361.650,00)	93,20	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	172.495.040,00	166.402.700,00	(6.092.340,00)	96,46	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	172.495.040,00	166.402.700,00	(6.092.340,00)	96,46	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.495.040,00	166.402.700,00	(6.092.340,00)	96,46	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.816.197.142,00	9.460.534.690,00	(355.662.452,00)	96,37	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.345.940.246,00	8.998.543.538,00	(347.396.708,00)	96,28	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.345.940.246,00	8.998.543.538,00	(347.396.708,00)	96,28	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	9.345.940.246,00	8.998.543.538,00	(347.396.708,00)	96,28	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	320.490.000,00	320.490.000,00	0,00	100,00	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	320.490.000,00	320.490.000,00	0,00	100,00	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	149.766.896,00	141.501.152,00	(8.265.744,00)	94,48	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	149.766.896,00	141.501.152,00	(8.265.744,00)	94,48	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.766.896,00	141.501.152,00	(8.265.744,00)	94,48	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	102.355.366,00	87.472.000,00	(14.883.366,00)	85,45	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	81.355.366,00	79.272.000,00	(2.083.366,00)	97,43	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	81.355.366,00	79.272.000,00	(2.083.366,00)	97,43	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.355.366,00	79.272.000,00	(2.083.366,00)	97,43	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	21.000.000,00	8.200.000,00	(12.800.000,00)	39,04	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	21.000.000,00	8.200.000,00	(12.800.000,00)	39,04	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	8.200.000,00	(12.800.000,00)	39,04	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.403.456.484,00	1.218.341.298,00	(185.115.186,00)	86,81	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	287.512.384,00	185.975.000,00	(101.537.384,00)	64,68	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	287.512.384,00	185.975.000,00	(101.537.384,00)	64,68	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	287.512.384,00	185.975.000,00	(101.537.384,00)	64,68	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	78.346.800,00	70.412.100,00	(7.934.700,00)	89,87	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	78.346.800,00	70.412.100,00	(7.934.700,00)	89,87	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.346.800,00	70.412.100,00	(7.934.700,00)	89,87	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	58.758.000,00	58.326.300,00	(431.700,00)	99,26	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	58.758.000,00	58.326.300,00	(431.700,00)	99,26	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.758.000,00	58.326.300,00	(431.700,00)	99,26	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	978.839.300,00	903.627.898,00	(75.211.402,00)	92,31	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	978.839.300,00	903.627.898,00	(75.211.402,00)	92,31	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	978.839.300,00	903.627.898,00	(75.211.402,00)	92,31	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.277.705.136,00	1.264.745.901,00	(12.959.235,00)	98,98	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.101.700,00	36.017.914,00	(6.083.786,00)	85,54	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	42.101.700,00	36.017.914,00	(6.083.786,00)	85,54	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.101.700,00	36.017.914,00	(6.083.786,00)	85,54	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.235.603.436,00	1.228.727.987,00	(6.875.449,00)	99,44	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.235.603.436,00	1.228.727.987,00	(6.875.449,00)	99,44	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.235.603.436,00	1.228.727.987,00	(6.875.449,00)	99,44	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	449.069.344,00	416.665.450,00	(32.403.894,00)	92,78	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	232.717.704,00	202.885.050,00	(29.832.654,00)	87,18	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	232.717.704,00	202.885.050,00	(29.832.654,00)	87,18	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	232.717.704,00	202.885.050,00	(29.832.654,00)	87,18	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.150.000,00	30.579.000,00	(2.571.000,00)	92,24	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	33.150.000,00	30.579.000,00	(2.571.000,00)	92,24	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.150.000,00	30.579.000,00	(2.571.000,00)	92,24	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.09.0011		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	158.201.640,00	158.201.400,00	(240,00)	99,99	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	158.201.640,00	158.201.400,00	(240,00)	99,99	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.201.640,00	158.201.400,00	(240,00)	99,99	



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**
Organisasi : **Dinas Perindustrian dan Perdagangan**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000		5	BELANJA DAERAH	2.158.809.289,00	2.153.616.766,00	(5.192.523,00)	99,75	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.03.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	453.597.402,00	453.597.402,00	0,00	100,00	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.03.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	453.597.402,00	453.597.402,00	0,00	100,00	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	143.073.937,00	142.224.537,00	(849.400,00)	99,40	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.04.1.02		Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	143.073.937,00	142.224.537,00	(849.400,00)	99,40	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.04.1.02.0001		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	57.984.000,00	57.134.600,00	(849.400,00)	98,53	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.04.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	57.984.000,00	57.134.600,00	(849.400,00)	98,53	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.04.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.984.000,00	57.134.600,00	(849.400,00)	98,53	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.04.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	85.089.937,00	85.089.937,00	0,00	100,00	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.04.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.089.937,00	85.089.937,00	0,00	100,00	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.05.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	27.868.200,00	27.868.200,00	0,00	100,00	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.05.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.868.200,00	27.868.200,00	0,00	100,00	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.05.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	59.708.500,00	59.708.500,00	0,00	100,00	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.05.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.708.500,00	59.708.500,00	0,00	100,00	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.05.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	25.848.168,00	25.848.168,00	0,00	100,00	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.05.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.848.168,00	25.848.168,00	0,00	100,00	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.06		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	846.730.482,00	844.197.779,00	(2.532.703,00)	99,70	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.06.1.01		Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	546.874.116,00	544.341.413,00	(2.532.703,00)	99,53	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.06.1.01.0001		Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	546.874.116,00	544.341.413,00	(2.532.703,00)	99,53	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.06.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	546.874.116,00	544.341.413,00	(2.532.703,00)	99,53	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.06.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	546.874.116,00	544.341.413,00	(2.532.703,00)	99,53	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.06.1.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	299.856.366,00	299.856.366,00	0,00	100,00	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.06.1.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	299.856.366,00	299.856.366,00	0,00	100,00	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.07		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	476.982.600,00	475.172.180,00	(1.810.420,00)	99,62	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.07.1.03		Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	476.982.600,00	475.172.180,00	(1.810.420,00)	99,62	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.07.1.03.0002		Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	476.982.600,00	475.172.180,00	(1.810.420,00)	99,62	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.07.1.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	476.982.600,00	475.172.180,00	(1.810.420,00)	99,62	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.07.1.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	476.982.600,00	475.172.180,00	(1.810.420,00)	99,62	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.01.1.06.0011	5.1	BELANJA OPERASI	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	100,00	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.01.1.06.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	100,00	



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**
Organisasi : **Dinas Perindustrian dan Perdagangan**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000		5	BELANJA DAERAH	20.198.510.470,00	19.590.382.151,00	(608.128.319,00)	96,98	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.02		PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	4.671.593.002,00	4.324.879.949,00	(346.713.053,00)	92,57	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.02.1.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	4.671.593.002,00	4.324.879.949,00	(346.713.053,00)	92,57	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.02.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	599.989.750,00	599.989.750,00	0,00	100,00	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.02.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	599.989.750,00	599.989.750,00	0,00	100,00	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.02.1.01.0004		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	2.915.531.252,00	2.808.126.794,00	(107.404.458,00)	96,31	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.02.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.915.531.252,00	2.808.126.794,00	(107.404.458,00)	96,31	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.02.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.915.531.252,00	2.808.126.794,00	(107.404.458,00)	96,31	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.02.1.01.0005		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1.116.072.000,00	877.576.158,00	(238.495.842,00)	78,63	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.02.1.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.116.072.000,00	877.576.158,00	(238.495.842,00)	78,63	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.02.1.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.116.072.000,00	877.576.158,00	(238.495.842,00)	78,63	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.02.1.01.0006		Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	40.000.000,00	39.187.247,00	(812.753,00)	97,96	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.02.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	39.187.247,00	(812.753,00)	97,96	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.02.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.187.247,00	(812.753,00)	97,96	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.03.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	76.103.700,00	76.103.700,00	0,00	100,00	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.03.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.103.700,00	76.103.700,00	0,00	100,00	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.450.813.768,00	15.189.398.502,00	(261.415.266,00)	98,30	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	296.271.942,00	295.120.647,00	(1.151.295,00)	99,61	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	127.060.042,00	126.380.147,00	(679.895,00)	99,46	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	127.060.042,00	126.380.147,00	(679.895,00)	99,46	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.060.042,00	126.380.147,00	(679.895,00)	99,46	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.01.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	11.694.100,00	11.694.100,00	0,00	100,00	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.01.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.694.100,00	11.694.100,00	0,00	100,00	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.01.1.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	157.517.800,00	157.046.400,00	(471.400,00)	99,70	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.01.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	157.517.800,00	157.046.400,00	(471.400,00)	99,70	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.01.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.517.800,00	157.046.400,00	(471.400,00)	99,70	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.757.343.456,00	10.549.430.245,00	(207.913.211,00)	98,06	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.308.571.456,00	10.112.778.245,00	(195.793.211,00)	98,10	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.308.571.456,00	10.112.778.245,00	(195.793.211,00)	98,10	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	10.308.571.456,00	10.112.778.245,00	(195.793.211,00)	98,10	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.01.1.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	448.772.000,00	436.652.000,00	(12.120.000,00)	97,29	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.01.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	448.772.000,00	436.652.000,00	(12.120.000,00)	97,29	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.01.1.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	447.762.000,00	436.652.000,00	(11.110.000,00)	97,51	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.01.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.010.000,00	0,00	(1.010.000,00)	0,00	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	82.205.222,00	82.201.322,00	(3.900,00)	99,99	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.01.1.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	54.590.000,00	54.590.000,00	0,00	100,00	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.01.1.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.590.000,00	54.590.000,00	0,00	100,00	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.01.1.05.0004		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	27.615.222,00	27.611.322,00	(3.900,00)	99,98	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.01.1.05.0004	5.1	BELANJA OPERASI	27.615.222,00	27.611.322,00	(3.900,00)	99,98	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.01.1.05.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.615.222,00	27.611.322,00	(3.900,00)	99,98	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.299.343.719,00	1.287.780.982,00	(11.562.737,00)	99,11	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	319.364.335,00	319.364.335,00	0,00	100,00	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	319.364.335,00	319.364.335,00	0,00	100,00	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	56.950.000,00	56.950.000,00	0,00	100,00	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.950.000,00	56.950.000,00	0,00	100,00	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.01.1.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	106.169.200,00	100.548.000,00	(5.621.200,00)	94,70	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	106.169.200,00	100.548.000,00	(5.621.200,00)	94,70	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.169.200,00	100.548.000,00	(5.621.200,00)	94,70	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	203.590.000,00	203.082.500,00	(507.500,00)	99,75	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	203.590.000,00	203.082.500,00	(507.500,00)	99,75	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	203.590.000,00	203.082.500,00	(507.500,00)	99,75	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	613.270.184,00	607.836.147,00	(5.434.037,00)	99,11	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	613.270.184,00	607.836.147,00	(5.434.037,00)	99,11	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	613.270.184,00	607.836.147,00	(5.434.037,00)	99,11	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.762.080.029,00	2.731.590.128,00	(30.489.901,00)	98,89	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	100,00	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	100,00	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.632.080.029,00	2.601.590.128,00	(30.489.901,00)	98,84	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.632.080.029,00	2.601.590.128,00	(30.489.901,00)	98,84	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.632.080.029,00	2.601.590.128,00	(30.489.901,00)	98,84	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	253.569.400,00	243.275.178,00	(10.294.222,00)	95,94	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	218.469.400,00	209.345.178,00	(9.124.222,00)	95,82	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	218.469.400,00	209.345.178,00	(9.124.222,00)	95,82	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	218.469.400,00	209.345.178,00	(9.124.222,00)	95,82	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.100.000,00	33.930.000,00	(1.170.000,00)	96,66	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	35.100.000,00	33.930.000,00	(1.170.000,00)	96,66	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.100.000,00	33.930.000,00	(1.170.000,00)	96,66	



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**
Bidang Urusan : **SEKRETARIAT DAERAH**
Organisasi : **Biro Hukum**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001		5	BELANJA DAERAH	3.281.888.137,29	2.889.204.096,00	(392.684.041,29)	88,03	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.05		PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	2.244.421.444,00	1.929.437.297,00	(314.984.147,00)	85,96	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.05.1.01		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	1.033.970.172,00	902.685.483,00	(131.284.689,00)	87,30	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.05.1.01.0001		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	336.829.104,00	333.855.108,00	(2.973.996,00)	99,11	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.05.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	336.829.104,00	333.855.108,00	(2.973.996,00)	99,11	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.05.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	336.829.104,00	333.855.108,00	(2.973.996,00)	99,11	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.05.1.01.0002		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	319.991.372,00	229.381.377,00	(90.609.995,00)	71,68	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.05.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	305.211.372,00	214.631.377,00	(90.579.995,00)	70,32	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.05.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	305.211.372,00	214.631.377,00	(90.579.995,00)	70,32	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.05.1.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	14.780.000,00	14.750.000,00	(30.000,00)	99,79	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.05.1.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.780.000,00	14.750.000,00	(30.000,00)	99,79	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.05.1.01.0003		Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	107.684.524,00	102.272.989,00	(5.411.535,00)	94,97	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.05.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	107.684.524,00	102.272.989,00	(5.411.535,00)	94,97	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.05.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.684.524,00	102.272.989,00	(5.411.535,00)	94,97	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.05.1.01.0004		Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	269.465.172,00	237.176.009,00	(32.289.163,00)	88,01	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.05.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	244.197.972,00	211.910.009,00	(32.287.963,00)	86,77	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.05.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	244.197.972,00	211.910.009,00	(32.287.963,00)	86,77	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.05.1.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	25.267.200,00	25.266.000,00	(1.200,00)	99,99	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.05.1.01.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.267.200,00	25.266.000,00	(1.200,00)	99,99	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.05.1.02		Fasilitasi Bantuan Hukum	1.210.451.272,00	1.026.751.814,00	(183.699.458,00)	84,82	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.05.1.02.0001		Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	320.448.900,00	290.127.152,00	(30.321.748,00)	90,53	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.05.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	320.448.900,00	290.127.152,00	(30.321.748,00)	90,53	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.05.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	320.448.900,00	290.127.152,00	(30.321.748,00)	90,53	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.05.1.02.0002		Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	890.002.372,00	736.624.662,00	(153.377.710,00)	82,76	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.05.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	886.502.372,00	733.174.662,00	(153.327.710,00)	82,70	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.05.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	886.502.372,00	733.174.662,00	(153.327.710,00)	82,70	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.05.1.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	3.500.000,00	3.450.000,00	(50.000,00)	98,57	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.05.1.02.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.500.000,00	3.450.000,00	(50.000,00)	98,57	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.037.466.693,29	959.766.799,00	(77.699.894,29)	92,51	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.964.534,29	67.300.183,00	(1.664.351,29)	97,58	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	68.964.534,29	67.300.183,00	(1.664.351,29)	97,58	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	65.668.534,29	64.200.183,00	(1.468.351,29)	97,76	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.668.534,29	64.200.183,00	(1.468.351,29)	97,76	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.01.0006	5.2	BELANJA MODAL	3.296.000,00	3.100.000,00	(196.000,00)	94,05	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.01.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.296.000,00	3.100.000,00	(196.000,00)	94,05	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	317.238.628,00	243.511.349,00	(73.727.279,00)	76,75	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.256.600,00	79.448.600,00	(808.000,00)	98,99	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	76.214.100,00	75.538.600,00	(675.500,00)	99,11	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.214.100,00	75.538.600,00	(675.500,00)	99,11	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	4.042.500,00	3.910.000,00	(132.500,00)	96,72	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.042.500,00	3.910.000,00	(132.500,00)	96,72	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.154.000,00	13.134.500,00	(19.500,00)	99,85	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	13.154.000,00	13.134.500,00	(19.500,00)	99,85	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.154.000,00	13.134.500,00	(19.500,00)	99,85	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	14.568.500,00	14.568.500,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.568.500,00	14.568.500,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.848.400,00	4.088.400,00	(2.760.000,00)	59,69	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	6.848.400,00	4.088.400,00	(2.760.000,00)	59,69	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.848.400,00	4.088.400,00	(2.760.000,00)	59,69	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	202.411.128,00	132.271.349,00	(70.139.779,00)	65,34	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	202.411.128,00	132.271.349,00	(70.139.779,00)	65,34	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	202.411.128,00	132.271.349,00	(70.139.779,00)	65,34	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	109.435.400,00	108.140.000,00	(1.295.400,00)	98,81	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.07.0005		Pengadaan Mebel	109.435.400,00	108.140.000,00	(1.295.400,00)	98,81	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	60.564.000,00	60.200.000,00	(364.000,00)	99,39	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.564.000,00	60.200.000,00	(364.000,00)	99,39	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	48.871.400,00	47.940.000,00	(931.400,00)	98,09	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.871.400,00	47.940.000,00	(931.400,00)	98,09	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	445.421.235,00	444.429.717,00	(991.518,00)	99,77	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.600.380,00	8.536.500,00	(63.880,00)	99,25	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	8.600.380,00	8.536.500,00	(63.880,00)	99,25	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.600.380,00	8.536.500,00	(63.880,00)	99,25	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	436.820.855,00	435.893.217,00	(927.638,00)	99,78	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	436.820.855,00	435.893.217,00	(927.638,00)	99,78	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	436.820.855,00	435.893.217,00	(927.638,00)	99,78	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96.406.896,00	96.385.550,00	(21.346,00)	99,97	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	87.926.896,00	87.925.550,00	(1.346,00)	99,99	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	87.926.896,00	87.925.550,00	(1.346,00)	99,99	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.926.896,00	87.925.550,00	(1.346,00)	99,99	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.480.000,00	8.460.000,00	(20.000,00)	99,76	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	8.480.000,00	8.460.000,00	(20.000,00)	99,76	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.480.000,00	8.460.000,00	(20.000,00)	99,76	



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**
Bidang Urusan : **SEKRETARIAT DAERAH**
Organisasi : **Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002		5	BELANJA DAERAH	4.243.173.252,00	4.212.198.024,00	(30.975.228,00)	99,26	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	1.657.629.793,00	1.646.844.924,00	(10.784.869,00)	99,34	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.01		Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	647.273.065,00	638.030.630,00	(9.242.435,00)	98,57	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.01.0001		Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	25.397.900,00	24.917.902,00	(479.998,00)	98,11	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	25.397.900,00	24.917.902,00	(479.998,00)	98,11	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.397.900,00	24.917.902,00	(479.998,00)	98,11	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.01.0002		Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	541.271.465,00	533.584.436,00	(7.687.029,00)	98,57	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	541.271.465,00	533.584.436,00	(7.687.029,00)	98,57	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	541.271.465,00	533.584.436,00	(7.687.029,00)	98,57	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.01.0003		Fasilitasi Penataan Wilayah	80.603.700,00	79.528.292,00	(1.075.408,00)	98,66	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	80.603.700,00	79.528.292,00	(1.075.408,00)	98,66	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.603.700,00	79.528.292,00	(1.075.408,00)	98,66	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.02		Pelaksanaan Otonomi Daerah	356.813.851,00	356.642.899,00	(170.952,00)	99,95	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.02.0001		Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	87.699.936,00	87.675.100,00	(24.836,00)	99,97	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	87.699.936,00	87.675.100,00	(24.836,00)	99,97	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.699.936,00	87.675.100,00	(24.836,00)	99,97	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.02.0002		Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	36.302.441,00	36.293.854,00	(8.587,00)	99,97	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	36.302.441,00	36.293.854,00	(8.587,00)	99,97	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.302.441,00	36.293.854,00	(8.587,00)	99,97	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.02.0003		Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	232.811.474,00	232.673.945,00	(137.529,00)	99,94	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	232.811.474,00	232.673.945,00	(137.529,00)	99,94	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	232.811.474,00	232.673.945,00	(137.529,00)	99,94	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.03		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	653.542.877,00	652.171.395,00	(1.371.482,00)	99,79	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.03.0001		Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	352.284.544,00	352.166.740,00	(117.804,00)	99,96	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	352.284.544,00	352.166.740,00	(117.804,00)	99,96	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	352.284.544,00	352.166.740,00	(117.804,00)	99,96	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.03.0002		Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	163.391.133,00	162.218.905,00	(1.172.228,00)	99,28	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	163.391.133,00	162.218.905,00	(1.172.228,00)	99,28	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.391.133,00	162.218.905,00	(1.172.228,00)	99,28	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.03.0003		Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	137.867.200,00	137.785.750,00	(81.450,00)	99,94	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	137.867.200,00	137.785.750,00	(81.450,00)	99,94	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.867.200,00	137.785.750,00	(81.450,00)	99,94	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.585.543.459,00	2.565.353.100,00	(20.190.359,00)	99,21	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	78.406.000,00	78.122.877,00	(283.123,00)	99,63	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	78.406.000,00	78.122.877,00	(283.123,00)	99,63	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	78.406.000,00	78.122.877,00	(283.123,00)	99,63	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.406.000,00	78.122.877,00	(283.123,00)	99,63	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	312.571.450,00	312.058.631,00	(512.819,00)	99,83	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	126.349.600,00	126.187.100,00	(162.500,00)	99,87	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	126.349.600,00	126.187.100,00	(162.500,00)	99,87	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.349.600,00	126.187.100,00	(162.500,00)	99,87	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	186.221.850,00	185.871.531,00	(350.319,00)	99,81	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	186.221.850,00	185.871.531,00	(350.319,00)	99,81	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	186.221.850,00	185.871.531,00	(350.319,00)	99,81	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	459.207.168,00	452.091.628,00	(7.115.540,00)	98,45	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	537.100,00	487.000,00	(50.100,00)	90,67	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	537.100,00	487.000,00	(50.100,00)	90,67	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	537.100,00	487.000,00	(50.100,00)	90,67	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.559.424,00	44.400.000,00	(159.424,00)	99,64	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	868.400,00	800.000,00	(68.400,00)	92,12	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	868.400,00	800.000,00	(68.400,00)	92,12	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	43.691.024,00	43.600.000,00	(91.024,00)	99,79	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.691.024,00	43.600.000,00	(91.024,00)	99,79	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.491.494,00	5.950.643,00	(1.540.851,00)	79,43	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	7.491.494,00	5.950.643,00	(1.540.851,00)	79,43	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.491.494,00	5.950.643,00	(1.540.851,00)	79,43	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.250.000,00	10.248.024,00	(1.001.976,00)	91,09	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	11.250.000,00	10.248.024,00	(1.001.976,00)	91,09	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.250.000,00	10.248.024,00	(1.001.976,00)	91,09	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.998.400,00	8.858.495,00	(2.139.905,00)	80,54	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	10.998.400,00	8.858.495,00	(2.139.905,00)	80,54	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.998.400,00	8.858.495,00	(2.139.905,00)	80,54	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	19.776.000,00	19.153.200,00	(622.800,00)	96,85	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	19.776.000,00	19.153.200,00	(622.800,00)	96,85	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.776.000,00	19.153.200,00	(622.800,00)	96,85	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	363.844.750,00	362.244.266,00	(1.600.484,00)	99,56	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	363.844.750,00	362.244.266,00	(1.600.484,00)	99,56	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	363.844.750,00	362.244.266,00	(1.600.484,00)	99,56	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	77.190.000,00	77.125.000,00	(65.000,00)	99,91	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.07.0005		Pengadaan Mebel	25.046.000,00	25.000.000,00	(46.000,00)	99,81	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	25.046.000,00	25.000.000,00	(46.000,00)	99,81	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.046.000,00	25.000.000,00	(46.000,00)	99,81	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.144.000,00	52.125.000,00	(19.000,00)	99,96	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	19.000,00	0,00	(19.000,00)	0,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.000,00	0,00	(19.000,00)	0,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	52.125.000,00	52.125.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.125.000,00	52.125.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	896.096.345,00	892.242.201,00	(3.854.144,00)	99,56	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.333.650,00	445.628,00	(888.022,00)	33,41	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.333.650,00	445.628,00	(888.022,00)	33,41	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.333.650,00	445.628,00	(888.022,00)	33,41	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	845.262.695,00	842.296.573,00	(2.966.122,00)	99,64	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	845.262.695,00	842.296.573,00	(2.966.122,00)	99,64	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	845.262.695,00	842.296.573,00	(2.966.122,00)	99,64	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	308.621.100,00	301.846.824,00	(6.774.276,00)	97,80	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	235.866.800,00	235.719.324,00	(147.476,00)	99,93	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	235.866.800,00	235.719.324,00	(147.476,00)	99,93	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	235.866.800,00	235.719.324,00	(147.476,00)	99,93	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.09.0007	5.1	BELANJA OPERASI	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.09.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	68.824.300,00	62.197.500,00	(6.626.800,00)	90,37	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	54.075.000,00	53.557.500,00	(517.500,00)	99,04	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.075.000,00	53.557.500,00	(517.500,00)	99,04	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.09.0009	5.2	BELANJA MODAL	14.749.300,00	8.640.000,00	(6.109.300,00)	58,57	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.09.0009	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.749.300,00	8.640.000,00	(6.109.300,00)	58,57	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.13		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	453.451.396,00	451.865.939,00	(1.585.457,00)	99,65	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.13.0002		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	453.451.396,00	451.865.939,00	(1.585.457,00)	99,65	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.13.0002	5.1	BELANJA OPERASI	453.451.396,00	451.865.939,00	(1.585.457,00)	99,65	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.13.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	453.451.396,00	451.865.939,00	(1.585.457,00)	99,65	



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**
Bidang Urusan : **SEKRETARIAT DAERAH**
Organisasi : **Biro Organisasi**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003		5	BELANJA DAERAH	1.902.728.451,17	1.887.569.891,00	(15.158.560,17)	99,20	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.02		PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	359.978.213,17	354.417.978,00	(5.560.235,17)	98,45	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.02.1.01		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	130.765.663,42	128.071.848,00	(2.693.815,42)	97,93	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.02.1.01.0001		Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	26.363.900,00	24.187.246,00	(2.176.654,00)	91,74	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.02.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	26.363.900,00	24.187.246,00	(2.176.654,00)	91,74	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.02.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.363.900,00	24.187.246,00	(2.176.654,00)	91,74	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.02.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	26.140.398,00	26.140.398,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.02.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.140.398,00	26.140.398,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.02.1.01.0003		Penataan Analisis Jabatan	78.261.365,42	77.744.204,00	(517.161,42)	99,33	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.02.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	78.261.365,42	77.744.204,00	(517.161,42)	99,33	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.02.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.261.365,42	77.744.204,00	(517.161,42)	99,33	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.02.1.02		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	229.212.549,75	226.346.130,00	(2.866.419,75)	98,74	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.02.1.02.0001		Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	65.299.713,00	65.219.793,00	(79.920,00)	99,87	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.02.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	65.299.713,00	65.219.793,00	(79.920,00)	99,87	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.02.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.299.713,00	65.219.793,00	(79.920,00)	99,87	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.02.1.02.0002		Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	30.316.654,00	29.248.814,00	(1.067.840,00)	96,47	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.02.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	30.316.654,00	29.248.814,00	(1.067.840,00)	96,47	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.02.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.316.654,00	29.248.814,00	(1.067.840,00)	96,47	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.02.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	30.550.264,00	30.550.264,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.02.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.550.264,00	30.550.264,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.02.1.02.0004		Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	44.001.354,75	43.140.252,00	(861.102,75)	98,04	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.02.1.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	44.001.354,75	43.140.252,00	(861.102,75)	98,04	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.02.1.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.001.354,75	43.140.252,00	(861.102,75)	98,04	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.02.1.02.0005		Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	59.044.564,00	58.187.007,00	(857.557,00)	98,54	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.02.1.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	59.044.564,00	58.187.007,00	(857.557,00)	98,54	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.02.1.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.044.564,00	58.187.007,00	(857.557,00)	98,54	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.542.750.238,00	1.533.151.913,00	(9.598.325,00)	99,37	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	177.159.630,00	172.703.119,00	(4.456.511,00)	97,48	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	177.159.630,00	172.703.119,00	(4.456.511,00)	97,48	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	177.159.630,00	172.703.119,00	(4.456.511,00)	97,48	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.159.630,00	172.703.119,00	(4.456.511,00)	97,48	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	394.234.796,00	391.540.069,00	(2.694.727,00)	99,31	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.113.216,00	48.429.600,00	(683.616,00)	98,60	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	49.113.216,00	48.429.600,00	(683.616,00)	98,60	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.113.216,00	48.429.600,00	(683.616,00)	98,60	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.154.380,00	11.750.000,00	(404.380,00)	96,67	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	12.154.380,00	11.750.000,00	(404.380,00)	96,67	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.154.380,00	11.750.000,00	(404.380,00)	96,67	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	13.453.200,00	11.880.000,00	(1.573.200,00)	88,30	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	13.453.200,00	11.880.000,00	(1.573.200,00)	88,30	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.453.200,00	11.880.000,00	(1.573.200,00)	88,30	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	319.514.000,00	319.480.469,00	(33.531,00)	99,98	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	319.514.000,00	319.480.469,00	(33.531,00)	99,98	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	319.514.000,00	319.480.469,00	(33.531,00)	99,98	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	278.710.000,00	278.702.500,00	(7.500,00)	99,99	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	278.710.000,00	278.702.500,00	(7.500,00)	99,99	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	660.000,00	652.500,00	(7.500,00)	98,86	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	660.000,00	652.500,00	(7.500,00)	98,86	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	278.050.000,00	278.050.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	278.050.000,00	278.050.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	534.357.412,00	533.570.025,00	(787.387,00)	99,85	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.480.352,00	1.293.632,00	(186.720,00)	87,38	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.480.352,00	1.293.632,00	(186.720,00)	87,38	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.480.352,00	1.293.632,00	(186.720,00)	87,38	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	46.620.000,00	46.620.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.620.000,00	46.620.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	486.257.060,00	485.656.393,00	(600.667,00)	99,87	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	486.257.060,00	485.656.393,00	(600.667,00)	99,87	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	486.257.060,00	485.656.393,00	(600.667,00)	99,87	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	147.688.400,00	146.036.200,00	(1.652.200,00)	98,88	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	138.231.200,00	136.666.200,00	(1.565.000,00)	98,86	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	138.231.200,00	136.666.200,00	(1.565.000,00)	98,86	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.231.200,00	136.666.200,00	(1.565.000,00)	98,86	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.457.200,00	9.370.000,00	(87.200,00)	99,07	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	9.457.200,00	9.370.000,00	(87.200,00)	99,07	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.457.200,00	9.370.000,00	(87.200,00)	99,07	



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**
Bidang Urusan : **SEKRETARIAT DAERAH**
Organisasi : **Biro Kesejahteraan Rakyat**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004		5	BELANJA DAERAH	157.255.836.765,00	151.890.719.111,00	(5.365.117.654,00)	96,58	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.04		PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	155.554.917.593,75	150.361.307.142,00	(5.193.610.451,75)	96,66	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.04.1.01		Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	139.188.227.437,75	134.275.026.843,00	(4.913.200.594,75)	96,47	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.04.1.01.0001		Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	108.654.068.893,87	104.135.477.238,00	(4.518.591.655,87)	95,84	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.04.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	108.654.068.893,87	104.135.477.238,00	(4.518.591.655,87)	95,84	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.04.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.084.738.893,87	2.999.296.916,00	(85.441.977,87)	97,23	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.04.1.01.0001	5.1.05	Belanja Hibah	105.569.330.000,00	101.136.180.322,00	(4.433.149.678,00)	95,80	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.04.1.01.0002		Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	30.534.158.543,88	30.139.549.605,00	(394.608.938,88)	98,70	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.04.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	30.534.158.543,88	30.139.549.605,00	(394.608.938,88)	98,70	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.04.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.534.158.543,88	30.139.549.605,00	(394.608.938,88)	98,70	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.04.1.02		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	16.219.631.156,00	15.965.320.049,00	(254.311.107,00)	98,43	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.04.1.02.0001		Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	16.096.473.256,00	15.862.530.088,00	(233.943.168,00)	98,54	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.04.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	16.096.473.256,00	15.862.530.088,00	(233.943.168,00)	98,54	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.04.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.096.473.256,00	15.862.530.088,00	(233.943.168,00)	98,54	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.04.1.02.0002		Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	23.007.100,00	19.993.100,00	(3.014.000,00)	86,89	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.04.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	23.007.100,00	19.993.100,00	(3.014.000,00)	86,89	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.04.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.007.100,00	19.993.100,00	(3.014.000,00)	86,89	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.04.1.02.0003		Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	100.150.800,00	82.796.861,00	(17.353.939,00)	82,67	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.04.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	100.150.800,00	82.796.861,00	(17.353.939,00)	82,67	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.04.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.150.800,00	82.796.861,00	(17.353.939,00)	82,67	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.04.1.03		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	147.059.000,00	120.960.250,00	(26.098.750,00)	82,25	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.04.1.03.0001		Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	56.629.000,00	42.176.700,00	(14.452.300,00)	74,47	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.04.1.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	56.629.000,00	42.176.700,00	(14.452.300,00)	74,47	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.04.1.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.629.000,00	42.176.700,00	(14.452.300,00)	74,47	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.04.1.03.0002		Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	51.170.000,00	43.725.100,00	(7.444.900,00)	85,45	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.04.1.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	51.170.000,00	43.725.100,00	(7.444.900,00)	85,45	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.04.1.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.170.000,00	43.725.100,00	(7.444.900,00)	85,45	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.04.1.03.0003		Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	39.260.000,00	35.058.450,00	(4.201.550,00)	89,29	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.04.1.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	39.260.000,00	35.058.450,00	(4.201.550,00)	89,29	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.04.1.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.260.000,00	35.058.450,00	(4.201.550,00)	89,29	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.700.919.171,25	1.529.411.969,00	(171.507.202,25)	89,91	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85.915.319,75	81.770.820,00	(4.144.499,75)	95,17	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	72.535.619,75	70.341.120,00	(2.194.499,75)	96,97	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	72.535.619,75	70.341.120,00	(2.194.499,75)	96,97	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.535.619,75	70.341.120,00	(2.194.499,75)	96,97	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.379.700,00	11.429.700,00	(1.950.000,00)	85,42	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	13.379.700,00	11.429.700,00	(1.950.000,00)	85,42	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.379.700,00	11.429.700,00	(1.950.000,00)	85,42	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	138.254.000,00	115.727.358,00	(22.526.642,00)	83,70	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	65.304.000,00	65.304.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.304.000,00	65.304.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	72.950.000,00	50.423.358,00	(22.526.642,00)	69,12	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	72.950.000,00	50.423.358,00	(22.526.642,00)	69,12	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.950.000,00	50.423.358,00	(22.526.642,00)	69,12	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	462.524.972,50	382.805.000,00	(79.719.972,50)	82,76	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.671.465,00	59.979.000,00	(692.465,00)	98,85	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	60.671.465,00	59.979.000,00	(692.465,00)	98,85	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.671.465,00	59.979.000,00	(692.465,00)	98,85	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	401.853.507,50	322.826.000,00	(79.027.507,50)	80,33	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	401.853.507,50	322.826.000,00	(79.027.507,50)	80,33	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	401.853.507,50	322.826.000,00	(79.027.507,50)	80,33	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	306.362.600,00	271.952.600,00	(34.410.000,00)	88,76	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	40.329.600,00	40.329.600,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.329.600,00	40.329.600,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	203.241.000,00	203.241.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	203.241.000,00	203.241.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	62.792.000,00	28.382.000,00	(34.410.000,00)	45,20	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	62.742.000,00	28.332.000,00	(34.410.000,00)	45,15	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.742.000,00	28.332.000,00	(34.410.000,00)	45,15	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	453.941.279,00	446.244.741,00	(7.696.538,00)	98,30	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	102.900.000,00	101.440.000,00	(1.460.000,00)	98,58	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	102.900.000,00	101.440.000,00	(1.460.000,00)	98,58	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.900.000,00	101.440.000,00	(1.460.000,00)	98,58	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	351.041.279,00	344.804.741,00	(6.236.538,00)	98,22	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	351.041.279,00	344.804.741,00	(6.236.538,00)	98,22	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	351.041.279,00	344.804.741,00	(6.236.538,00)	98,22	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	253.921.000,00	230.911.450,00	(23.009.550,00)	90,93	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	253.921.000,00	230.911.450,00	(23.009.550,00)	90,93	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	253.921.000,00	230.911.450,00	(23.009.550,00)	90,93	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	253.921.000,00	230.911.450,00	(23.009.550,00)	90,93	



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**
Bidang Urusan : **SEKRETARIAT DAERAH**
Organisasi : **Biro Perekonomian dan Pembangunan**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005		5	BELANJA DAERAH	3.123.391.853,00	3.050.883.564,00	(72.508.289,00)	97,67	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.06		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	742.550.321,00	722.392.814,00	(20.157.507,00)	97,28	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.06.1.01		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	132.443.300,00	127.956.917,00	(4.486.383,00)	96,61	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.06.1.01.0001		Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	76.111.800,00	73.579.473,00	(2.532.327,00)	96,67	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.06.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	76.111.800,00	73.579.473,00	(2.532.327,00)	96,67	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.06.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.111.800,00	73.579.473,00	(2.532.327,00)	96,67	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.06.1.01.0002		Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	56.331.500,00	54.377.444,00	(1.954.056,00)	96,53	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.06.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	56.331.500,00	54.377.444,00	(1.954.056,00)	96,53	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.06.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.331.500,00	54.377.444,00	(1.954.056,00)	96,53	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.06.1.02		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	223.176.025,00	218.875.101,00	(4.300.924,00)	98,07	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.06.1.02.0001		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	69.714.800,00	68.379.700,00	(1.335.100,00)	98,08	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.06.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	69.714.800,00	68.379.700,00	(1.335.100,00)	98,08	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.06.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.714.800,00	68.379.700,00	(1.335.100,00)	98,08	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.06.1.02.0002		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	72.845.601,00	70.847.569,00	(1.998.032,00)	97,25	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.06.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	72.845.601,00	70.847.569,00	(1.998.032,00)	97,25	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.06.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.845.601,00	70.847.569,00	(1.998.032,00)	97,25	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.06.1.02.0003		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	80.615.624,00	79.647.832,00	(967.792,00)	98,79	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.06.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	80.615.624,00	79.647.832,00	(967.792,00)	98,79	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.06.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.615.624,00	79.647.832,00	(967.792,00)	98,79	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.06.1.03		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	386.930.996,00	375.560.796,00	(11.370.200,00)	97,06	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.06.1.03.0001		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	215.342.200,00	205.941.512,00	(9.400.688,00)	95,63	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.06.1.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	215.342.200,00	205.941.512,00	(9.400.688,00)	95,63	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.06.1.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.342.200,00	205.941.512,00	(9.400.688,00)	95,63	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.06.1.03.0002		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	171.588.796,00	169.619.284,00	(1.969.512,00)	98,85	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.06.1.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	171.588.796,00	169.619.284,00	(1.969.512,00)	98,85	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.06.1.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	171.588.796,00	169.619.284,00	(1.969.512,00)	98,85	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.08		PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	206.553.170,00	198.889.530,00	(7.663.640,00)	96,28	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.08.1.01		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	94.427.824,00	94.375.394,00	(52.430,00)	99,94	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.08.1.01.0003		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	94.427.824,00	94.375.394,00	(52.430,00)	99,94	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.08.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	94.427.824,00	94.375.394,00	(52.430,00)	99,94	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.08.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.427.824,00	94.375.394,00	(52.430,00)	99,94	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.08.1.02		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	112.125.346,00	104.514.136,00	(7.611.210,00)	93,21	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.08.1.02.0002		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	112.125.346,00	104.514.136,00	(7.611.210,00)	93,21	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.08.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	112.125.346,00	104.514.136,00	(7.611.210,00)	93,21	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.08.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.125.346,00	104.514.136,00	(7.611.210,00)	93,21	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.174.288.362,00	2.129.601.220,00	(44.687.142,00)	97,94	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	108.623.941,00	105.594.822,00	(3.029.119,00)	97,21	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	108.623.941,00	105.594.822,00	(3.029.119,00)	97,21	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	108.623.941,00	105.594.822,00	(3.029.119,00)	97,21	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.623.941,00	105.594.822,00	(3.029.119,00)	97,21	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	558.031.344,00	537.131.493,00	(20.899.851,00)	96,25	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	115.004.300,00	108.921.200,00	(6.083.100,00)	94,71	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	115.004.300,00	108.921.200,00	(6.083.100,00)	94,71	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.004.300,00	108.921.200,00	(6.083.100,00)	94,71	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.872.172,00	43.148.196,00	(1.723.976,00)	96,15	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	44.872.172,00	43.148.196,00	(1.723.976,00)	96,15	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.872.172,00	43.148.196,00	(1.723.976,00)	96,15	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	398.154.872,00	385.062.097,00	(13.092.775,00)	96,71	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	398.154.872,00	385.062.097,00	(13.092.775,00)	96,71	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	398.154.872,00	385.062.097,00	(13.092.775,00)	96,71	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	735.004.420,00	723.898.424,00	(11.105.996,00)	98,48	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.000.000,00	8.080.874,00	(6.919.126,00)	53,87	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	8.080.874,00	(6.919.126,00)	53,87	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	8.080.874,00	(6.919.126,00)	53,87	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	96.300.000,00	96.090.000,00	(210.000,00)	99,78	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	96.300.000,00	96.090.000,00	(210.000,00)	99,78	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.300.000,00	96.090.000,00	(210.000,00)	99,78	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	623.704.420,00	619.727.550,00	(3.976.870,00)	99,36	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	623.704.420,00	619.727.550,00	(3.976.870,00)	99,36	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	623.704.420,00	619.727.550,00	(3.976.870,00)	99,36	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.143.800,00	147.421.500,00	(2.722.300,00)	98,18	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	136.093.800,00	133.796.500,00	(2.297.300,00)	98,31	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	136.093.800,00	133.796.500,00	(2.297.300,00)	98,31	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.093.800,00	133.796.500,00	(2.297.300,00)	98,31	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.050.000,00	13.625.000,00	(425.000,00)	96,97	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	14.050.000,00	13.625.000,00	(425.000,00)	96,97	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.050.000,00	13.625.000,00	(425.000,00)	96,97	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.13		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	622.484.857,00	615.554.981,00	(6.929.876,00)	98,88	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.13.0002		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	622.484.857,00	615.554.981,00	(6.929.876,00)	98,88	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.13.0002	5.1	BELANJA OPERASI	622.484.857,00	615.554.981,00	(6.929.876,00)	98,88	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.13.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	622.484.857,00	615.554.981,00	(6.929.876,00)	98,88	



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**
Bidang Urusan : **SEKRETARIAT DAERAH**
Organisasi : **Biro Umum**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006		5	BELANJA DAERAH	201.548.624.822,54	190.718.403.762,23	(10.830.221.060,31)	94,62	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	201.548.624.822,54	190.718.403.762,23	(10.830.221.060,31)	94,62	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	199.762.908,00	194.918.243,00	(4.844.665,00)	97,57	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	199.762.908,00	194.918.243,00	(4.844.665,00)	97,57	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	199.762.908,00	194.918.243,00	(4.844.665,00)	97,57	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.762.908,00	194.918.243,00	(4.844.665,00)	97,57	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	72.593.028.187,54	71.659.616.611,00	(933.411.576,54)	98,71	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	68.416.084.243,54	67.693.480.308,00	(722.603.935,54)	98,94	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	68.416.084.243,54	67.693.480.308,00	(722.603.935,54)	98,94	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	68.416.084.243,54	67.693.480.308,00	(722.603.935,54)	98,94	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.186.531.100,00	2.981.722.800,00	(204.808.300,00)	93,57	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.186.531.100,00	2.981.722.800,00	(204.808.300,00)	93,57	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	2.792.226.000,00	2.594.473.500,00	(197.752.500,00)	92,91	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	394.305.100,00	387.249.300,00	(7.055.800,00)	98,21	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	576.980.620,00	573.324.998,00	(3.655.622,00)	99,36	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	576.980.620,00	573.324.998,00	(3.655.622,00)	99,36	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	576.980.620,00	573.324.998,00	(3.655.622,00)	99,36	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.02.0004		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	183.477.224,00	182.442.565,00	(1.034.659,00)	99,43	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	183.477.224,00	182.442.565,00	(1.034.659,00)	99,43	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	183.477.224,00	182.442.565,00	(1.034.659,00)	99,43	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	65.000.000,00	64.700.000,00	(300.000,00)	99,53	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	65.000.000,00	64.700.000,00	(300.000,00)	99,53	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	64.700.000,00	(300.000,00)	99,53	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.02.0006		Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	60.016.000,00	59.288.340,00	(727.660,00)	98,78	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	60.016.000,00	59.288.340,00	(727.660,00)	98,78	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.016.000,00	59.288.340,00	(727.660,00)	98,78	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	104.939.000,00	104.657.600,00	(281.400,00)	99,73	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	104.939.000,00	104.657.600,00	(281.400,00)	99,73	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.939.000,00	104.657.600,00	(281.400,00)	99,73	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.568.052.416,00	1.548.788.106,40	(19.264.309,60)	98,77	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.03.0001		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	44.289.000,00	44.267.000,00	(22.000,00)	99,95	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	44.289.000,00	44.267.000,00	(22.000,00)	99,95	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.289.000,00	44.267.000,00	(22.000,00)	99,95	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.03.0002		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	698.943.368,00	681.058.140,40	(17.885.227,60)	97,44	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	698.943.368,00	681.058.140,40	(17.885.227,60)	97,44	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	698.943.368,00	681.058.140,40	(17.885.227,60)	97,44	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.03.0004		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	155.122.500,00	154.712.400,00	(410.100,00)	99,73	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	155.122.500,00	154.712.400,00	(410.100,00)	99,73	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.122.500,00	154.712.400,00	(410.100,00)	99,73	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.03.0005		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	58.863.000,00	58.610.760,00	(252.240,00)	99,57	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	58.863.000,00	58.610.760,00	(252.240,00)	99,57	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.863.000,00	58.610.760,00	(252.240,00)	99,57	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	610.834.548,00	610.139.806,00	(694.742,00)	99,88	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	610.834.548,00	610.139.806,00	(694.742,00)	99,88	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	610.834.548,00	610.139.806,00	(694.742,00)	99,88	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	779.187.716,00	759.887.221,00	(19.300.495,00)	97,52	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	335.851.448,00	327.588.430,00	(8.263.018,00)	97,53	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	335.851.448,00	327.588.430,00	(8.263.018,00)	97,53	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	335.851.448,00	327.588.430,00	(8.263.018,00)	97,53	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.05.0003		Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	129.134.532,00	121.276.441,00	(7.858.091,00)	93,91	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	129.134.532,00	121.276.441,00	(7.858.091,00)	93,91	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.134.532,00	121.276.441,00	(7.858.091,00)	93,91	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.05.0010		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	160.155.136,00	158.360.350,00	(1.794.786,00)	98,87	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.05.0010	5.1	BELANJA OPERASI	160.155.136,00	158.360.350,00	(1.794.786,00)	98,87	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.05.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.155.136,00	158.360.350,00	(1.794.786,00)	98,87	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150.546.600,00	149.162.000,00	(1.384.600,00)	99,08	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	150.546.600,00	149.162.000,00	(1.384.600,00)	99,08	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.546.600,00	149.162.000,00	(1.384.600,00)	99,08	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	31.873.407.828,00	31.572.455.414,00	(300.952.414,00)	99,05	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.354.332.100,00	4.312.983.206,00	(41.348.894,00)	99,05	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.380.067.000,00	2.355.763.206,00	(24.303.794,00)	98,97	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	252.268.620,00	236.018.206,00	(16.250.414,00)	93,55	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.06.0002	5.1.05	Belanja Hibah	2.127.798.380,00	2.119.745.000,00	(8.053.380,00)	99,62	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	1.974.265.100,00	1.957.220.000,00	(17.045.100,00)	99,13	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.974.265.100,00	1.957.220.000,00	(17.045.100,00)	99,13	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	654.600.448,00	653.079.517,00	(1.520.931,00)	99,76	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	654.600.448,00	653.079.517,00	(1.520.931,00)	99,76	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	654.600.448,00	653.079.517,00	(1.520.931,00)	99,76	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.103.475.609,00	11.092.309.487,00	(11.166.122,00)	99,89	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	11.103.475.609,00	11.092.309.487,00	(11.166.122,00)	99,89	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.103.475.609,00	11.092.309.487,00	(11.166.122,00)	99,89	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	438.002.748,00	432.336.298,00	(5.666.450,00)	98,70	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	438.002.748,00	432.336.298,00	(5.666.450,00)	98,70	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	438.002.748,00	432.336.298,00	(5.666.450,00)	98,70	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	111.962.324,00	106.952.779,00	(5.009.545,00)	95,52	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	111.962.324,00	106.952.779,00	(5.009.545,00)	95,52	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.962.324,00	106.952.779,00	(5.009.545,00)	95,52	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.811.461.803,00	12.741.650.262,00	(69.811.541,00)	99,45	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	12.811.461.803,00	12.741.650.262,00	(69.811.541,00)	99,45	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.811.461.803,00	12.741.650.262,00	(69.811.541,00)	99,45	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.818.412.392,00	1.791.598.868,00	(26.813.524,00)	98,52	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	1.818.412.392,00	1.791.598.868,00	(26.813.524,00)	98,52	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.818.412.392,00	1.791.598.868,00	(26.813.524,00)	98,52	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.06.0010		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	409.675.172,00	288.317.372,00	(121.357.800,00)	70,37	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.06.0010	5.1	BELANJA OPERASI	275.975.972,00	154.865.372,00	(121.110.600,00)	56,11	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.06.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	275.975.972,00	154.865.372,00	(121.110.600,00)	56,11	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.06.0010	5.2	BELANJA MODAL	133.699.200,00	133.452.000,00	(247.200,00)	99,81	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.06.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	133.699.200,00	133.452.000,00	(247.200,00)	99,81	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.06.0011		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	171.485.232,00	153.227.625,00	(18.257.607,00)	89,35	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.06.0011	5.1	BELANJA OPERASI	171.485.232,00	153.227.625,00	(18.257.607,00)	89,35	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.06.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	171.485.232,00	153.227.625,00	(18.257.607,00)	89,35	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26.143.563.732,00	18.530.940.989,00	(7.612.622.743,00)	70,88	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.07.0001		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.844.720.000,00	2.375.300.000,00	(469.420.000,00)	83,49	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.07.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.07.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.07.0001	5.2	BELANJA MODAL	2.843.720.000,00	2.375.300.000,00	(468.420.000,00)	83,52	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.07.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.843.720.000,00	2.375.300.000,00	(468.420.000,00)	83,52	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22.045.010.060,00	14.906.766.435,00	(7.138.243.625,00)	67,61	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.07.0002	5.1	BELANJA OPERASI	14.630.029.060,00	9.404.589.335,00	(5.225.439.725,00)	64,28	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.07.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	224.954.920,00	219.621.735,00	(5.333.185,00)	97,62	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.07.0002	5.1.05	Belanja Hibah	14.405.074.140,00	9.184.967.600,00	(5.220.106.540,00)	63,76	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.07.0002	5.2	BELANJA MODAL	7.414.981.000,00	5.502.177.100,00	(1.912.803.900,00)	74,20	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.07.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.414.981.000,00	5.502.177.100,00	(1.912.803.900,00)	74,20	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.07.0005		Pengadaan Mebel	1.253.833.672,00	1.248.874.554,00	(4.959.118,00)	99,60	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	148.983.672,00	146.735.554,00	(2.248.118,00)	98,49	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.930.472,00	136.695.554,00	(2.234.918,00)	98,39	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.07.0005	5.1.05	Belanja Hibah	10.053.200,00	10.040.000,00	(13.200,00)	99,86	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	1.104.850.000,00	1.102.139.000,00	(2.711.000,00)	99,75	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.104.850.000,00	1.102.139.000,00	(2.711.000,00)	99,75	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.931.183.323,00	35.984.308.018,00	(946.875.305,00)	97,43	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	589.495.749,00	574.762.382,00	(14.733.367,00)	97,50	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	589.495.749,00	574.762.382,00	(14.733.367,00)	97,50	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	589.495.749,00	574.762.382,00	(14.733.367,00)	97,50	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.919.102.374,00	7.387.703.268,00	(531.399.106,00)	93,28	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.919.102.374,00	7.387.703.268,00	(531.399.106,00)	93,28	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.919.102.374,00	7.387.703.268,00	(531.399.106,00)	93,28	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.715.317.855,00	9.691.083.539,00	(24.234.316,00)	99,75	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	9.715.317.855,00	9.691.083.539,00	(24.234.316,00)	99,75	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.715.317.855,00	9.691.083.539,00	(24.234.316,00)	99,75	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.707.267.345,00	18.330.758.829,00	(376.508.516,00)	97,98	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	18.707.267.345,00	18.330.758.829,00	(376.508.516,00)	97,98	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.707.267.345,00	18.330.758.829,00	(376.508.516,00)	97,98	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.073.526.120,00	18.702.185.842,83	(371.340.277,17)	98,05	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	907.284.340,00	904.659.197,00	(2.625.143,00)	99,71	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	907.284.340,00	904.659.197,00	(2.625.143,00)	99,71	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	907.284.340,00	904.659.197,00	(2.625.143,00)	99,71	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.503.943.389,00	6.399.079.739,00	(104.863.650,00)	98,38	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.503.943.389,00	6.399.079.739,00	(104.863.650,00)	98,38	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.503.943.389,00	6.399.079.739,00	(104.863.650,00)	98,38	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.09.0005		Pemeliharaan Mebel	168.239.224,00	167.420.768,00	(818.456,00)	99,51	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.09.0005	5.1	BELANJA OPERASI	168.239.224,00	167.420.768,00	(818.456,00)	99,51	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.09.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	168.239.224,00	167.420.768,00	(818.456,00)	99,51	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.587.692.884,00	4.459.158.106,33	(128.534.777,67)	97,19	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.587.692.884,00	4.459.158.106,33	(128.534.777,67)	97,19	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.587.692.884,00	4.459.158.106,33	(128.534.777,67)	97,19	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.09.0007		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	829.502.661,00	817.068.397,00	(12.434.264,00)	98,50	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.09.0007	5.1	BELANJA OPERASI	829.502.661,00	817.068.397,00	(12.434.264,00)	98,50	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.09.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	829.502.661,00	817.068.397,00	(12.434.264,00)	98,50	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.076.863.622,00	5.954.799.635,50	(122.063.986,50)	97,99	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	6.076.863.622,00	5.954.799.635,50	(122.063.986,50)	97,99	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.076.863.622,00	5.954.799.635,50	(122.063.986,50)	97,99	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.518.269.418,00	4.139.690.537,00	(378.578.881,00)	91,62	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.11.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.545.658.626,00	1.321.600.258,00	(224.058.368,00)	85,50	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.11.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.545.658.626,00	1.321.600.258,00	(224.058.368,00)	85,50	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.11.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.545.658.626,00	1.321.600.258,00	(224.058.368,00)	85,50	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.11.0002		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	320.311.850,00	306.496.337,00	(13.815.513,00)	95,68	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.11.0002	5.1	BELANJA OPERASI	320.311.850,00	306.496.337,00	(13.815.513,00)	95,68	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.11.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	320.311.850,00	306.496.337,00	(13.815.513,00)	95,68	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.11.0003		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	140.705.000,00	0,00	(140.705.000,00)	0,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.11.0003	5.1	BELANJA OPERASI	140.705.000,00	0,00	(140.705.000,00)	0,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.11.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.705.000,00	0,00	(140.705.000,00)	0,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.11.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.511.593.942,00	2.511.593.942,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.11.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	2.508.613.442,00	2.508.613.442,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.11.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.980.500,00	2.980.500,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	7.175.995.570,00	6.935.567.287,00	(240.428.283,00)	96,64	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.12.0001		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	3.198.138.166,00	3.054.902.136,00	(143.236.030,00)	95,52	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.12.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.198.138.166,00	3.054.902.136,00	(143.236.030,00)	95,52	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.12.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.198.138.166,00	3.054.902.136,00	(143.236.030,00)	95,52	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.12.0002		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	2.398.094.600,00	2.343.988.886,00	(54.105.714,00)	97,74	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.12.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.398.094.600,00	2.343.988.886,00	(54.105.714,00)	97,74	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.12.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.398.094.600,00	2.343.988.886,00	(54.105.714,00)	97,74	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.12.0003		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1.579.762.804,00	1.536.676.265,00	(43.086.539,00)	97,27	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.12.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.579.762.804,00	1.536.676.265,00	(43.086.539,00)	97,27	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.12.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.579.762.804,00	1.536.676.265,00	(43.086.539,00)	97,27	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.13		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	692.647.604,00	690.045.493,00	(2.602.111,00)	99,62	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.13.0002		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	692.647.604,00	690.045.493,00	(2.602.111,00)	99,62	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.13.0002	5.1	BELANJA OPERASI	692.647.604,00	690.045.493,00	(2.602.111,00)	99,62	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.13.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	692.647.604,00	690.045.493,00	(2.602.111,00)	99,62	



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**
Bidang Urusan : **SEKRETARIAT DAERAH**
Organisasi : **Biro Administrasi Pimpinan**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007		5	BELANJA DAERAH	12.003.455.423,00	11.743.835.725,00	(259.619.698,00)	97,83	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.003.455.423,00	11.743.835.725,00	(259.619.698,00)	97,83	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	274.855.450,00	274.608.750,00	(246.700,00)	99,91	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	225.257.250,00	225.114.650,00	(142.600,00)	99,93	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	225.257.250,00	225.114.650,00	(142.600,00)	99,93	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.257.250,00	225.114.650,00	(142.600,00)	99,93	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.121.000,00	4.121.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.121.000,00	4.121.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.477.200,00	45.373.100,00	(104.100,00)	99,77	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	45.477.200,00	45.373.100,00	(104.100,00)	99,77	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.477.200,00	45.373.100,00	(104.100,00)	99,77	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	125.732.000,00	125.537.240,00	(194.760,00)	99,84	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	125.732.000,00	125.537.240,00	(194.760,00)	99,84	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	125.732.000,00	125.537.240,00	(194.760,00)	99,84	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.732.000,00	125.537.240,00	(194.760,00)	99,84	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.109.122.682,00	1.080.191.358,00	(28.931.324,00)	97,39	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	78.316.250,00	61.638.500,00	(16.677.750,00)	78,70	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	78.316.250,00	61.638.500,00	(16.677.750,00)	78,70	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.316.250,00	61.638.500,00	(16.677.750,00)	78,70	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	61.690.000,00	49.636.000,00	(12.054.000,00)	80,46	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	61.690.000,00	49.636.000,00	(12.054.000,00)	80,46	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.690.000,00	49.636.000,00	(12.054.000,00)	80,46	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	125.545.000,00	125.348.360,00	(196.640,00)	99,84	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	125.545.000,00	125.348.360,00	(196.640,00)	99,84	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.545.000,00	125.348.360,00	(196.640,00)	99,84	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	843.571.432,00	843.568.498,00	(2.934,00)	99,99	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	843.571.432,00	843.568.498,00	(2.934,00)	99,99	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	843.571.432,00	843.568.498,00	(2.934,00)	99,99	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	169.627.900,00	169.427.900,00	(200.000,00)	99,88	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	169.627.900,00	169.427.900,00	(200.000,00)	99,88	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	8.052.500,00	8.052.500,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.052.500,00	8.052.500,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	161.575.400,00	161.375.400,00	(200.000,00)	99,87	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	161.575.400,00	161.375.400,00	(200.000,00)	99,87	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.391.475.238,00	3.324.472.616,00	(67.002.622,00)	98,02	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	18.700.000,00	18.700.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.700.000,00	18.700.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	126.533.558,00	122.405.244,00	(4.128.314,00)	96,73	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	126.533.558,00	122.405.244,00	(4.128.314,00)	96,73	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.533.558,00	122.405.244,00	(4.128.314,00)	96,73	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	219.600.000,00	219.400.000,00	(200.000,00)	99,90	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	219.600.000,00	219.400.000,00	(200.000,00)	99,90	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	219.600.000,00	219.400.000,00	(200.000,00)	99,90	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.026.641.680,00	2.963.967.372,00	(62.674.308,00)	97,92	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	3.026.641.680,00	2.963.967.372,00	(62.674.308,00)	97,92	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.026.641.680,00	2.963.967.372,00	(62.674.308,00)	97,92	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	198.400.000,00	161.207.800,00	(37.192.200,00)	81,25	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	158.940.000,00	142.108.000,00	(16.832.000,00)	89,40	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	158.940.000,00	142.108.000,00	(16.832.000,00)	89,40	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.940.000,00	142.108.000,00	(16.832.000,00)	89,40	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.460.000,00	19.099.800,00	(20.360.200,00)	48,40	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	39.460.000,00	19.099.800,00	(20.360.200,00)	48,40	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.460.000,00	19.099.800,00	(20.360.200,00)	48,40	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.13		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	2.536.821.315,00	2.424.244.935,00	(112.576.380,00)	95,56	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.13.0001		Penyiapan Materi Pimpinan	261.713.500,00	207.502.300,00	(54.211.200,00)	79,28	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.13.0001	5.1	BELANJA OPERASI	261.713.500,00	207.502.300,00	(54.211.200,00)	79,28	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.13.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	261.713.500,00	207.502.300,00	(54.211.200,00)	79,28	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.13.0002		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1.070.722.112,00	1.054.354.896,00	(16.367.216,00)	98,47	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.13.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.070.722.112,00	1.054.354.896,00	(16.367.216,00)	98,47	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.13.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.070.722.112,00	1.054.354.896,00	(16.367.216,00)	98,47	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.13.0003		Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	1.204.385.703,00	1.162.387.739,00	(41.997.964,00)	96,51	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.13.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.192.340.703,00	1.162.387.739,00	(29.952.964,00)	97,48	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.13.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.192.340.703,00	1.162.387.739,00	(29.952.964,00)	97,48	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.13.0003	5.2	BELANJA MODAL	12.045.000,00	0,00	(12.045.000,00)	0,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.13.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.045.000,00	0,00	(12.045.000,00)	0,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.14		Fasilitasi Keprotokolan	4.197.420.838,00	4.184.145.126,00	(13.275.712,00)	99,68	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.14.0001		Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	2.153.455.872,00	2.143.778.476,00	(9.677.396,00)	99,55	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.14.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.153.455.872,00	2.143.778.476,00	(9.677.396,00)	99,55	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.14.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.153.455.872,00	2.143.778.476,00	(9.677.396,00)	99,55	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.14.0002		Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.451.159.566,00	1.448.974.400,00	(2.185.166,00)	99,84	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.14.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.451.159.566,00	1.448.974.400,00	(2.185.166,00)	99,84	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.14.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.451.159.566,00	1.448.974.400,00	(2.185.166,00)	99,84	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.14.0003		Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	592.805.400,00	591.392.250,00	(1.413.150,00)	99,76	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.14.0003	5.1	BELANJA OPERASI	592.805.400,00	591.392.250,00	(1.413.150,00)	99,76	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.14.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	592.805.400,00	591.392.250,00	(1.413.150,00)	99,76	



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**
Bidang Urusan : **SEKRETARIAT DAERAH**
Organisasi : **Biro Pengadaan Barang/Jasa**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008		5	BELANJA DAERAH	2.296.375.876,00	2.285.150.268,00	(11.225.608,00)	99,51	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.07		PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	147.326.632,00	146.925.000,00	(401.632,00)	99,72	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.07.1.01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	8.665.200,00	8.645.000,00	(20.200,00)	99,76	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.07.1.01.0001		Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	388.400,00	380.000,00	(8.400,00)	97,83	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.07.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	388.400,00	380.000,00	(8.400,00)	97,83	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.07.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	388.400,00	380.000,00	(8.400,00)	97,83	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.07.1.01.0002		Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	388.400,00	380.000,00	(8.400,00)	97,83	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.07.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	388.400,00	380.000,00	(8.400,00)	97,83	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.07.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	388.400,00	380.000,00	(8.400,00)	97,83	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.07.1.01.0003		Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	7.888.400,00	7.885.000,00	(3.400,00)	99,95	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.07.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	7.888.400,00	7.885.000,00	(3.400,00)	99,95	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.07.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.888.400,00	7.885.000,00	(3.400,00)	99,95	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.07.1.02		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	131.509.632,00	131.280.000,00	(229.632,00)	99,82	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.07.1.02.0001		Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	388.400,00	385.000,00	(3.400,00)	99,12	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.07.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	388.400,00	385.000,00	(3.400,00)	99,12	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.07.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	388.400,00	385.000,00	(3.400,00)	99,12	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.07.1.02.0002		Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	130.732.832,00	130.580.000,00	(152.832,00)	99,88	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.07.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	130.732.832,00	130.580.000,00	(152.832,00)	99,88	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.07.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.732.832,00	130.580.000,00	(152.832,00)	99,88	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.07.1.02.0003		Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	388.400,00	315.000,00	(73.400,00)	81,10	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.07.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	388.400,00	315.000,00	(73.400,00)	81,10	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.07.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	388.400,00	315.000,00	(73.400,00)	81,10	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.07.1.03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	7.151.800,00	7.000.000,00	(151.800,00)	97,87	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.07.1.03.0001		Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	6.763.400,00	6.650.000,00	(113.400,00)	98,32	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.07.1.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.763.400,00	6.650.000,00	(113.400,00)	98,32	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.07.1.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.763.400,00	6.650.000,00	(113.400,00)	98,32	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.07.1.03.0002		Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	388.400,00	350.000,00	(38.400,00)	90,11	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.07.1.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	388.400,00	350.000,00	(38.400,00)	90,11	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.07.1.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	388.400,00	350.000,00	(38.400,00)	90,11	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.149.049.244,00	2.138.225.268,00	(10.823.976,00)	99,49	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.107.000,00	59.675.667,00	(431.333,00)	99,28	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60.107.000,00	59.675.667,00	(431.333,00)	99,28	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	60.107.000,00	59.675.667,00	(431.333,00)	99,28	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.107.000,00	59.675.667,00	(431.333,00)	99,28	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	383.000,00	298.000,00	(85.000,00)	77,80	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.05.0010		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	383.000,00	298.000,00	(85.000,00)	77,80	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.05.0010	5.1	BELANJA OPERASI	383.000,00	298.000,00	(85.000,00)	77,80	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.05.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	383.000,00	298.000,00	(85.000,00)	77,80	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	592.485.900,00	589.799.764,00	(2.686.136,00)	99,54	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.945.900,00	4.788.000,00	(157.900,00)	96,80	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.945.900,00	4.788.000,00	(157.900,00)	96,80	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.945.900,00	4.788.000,00	(157.900,00)	96,80	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	137.794.300,00	137.050.000,00	(744.300,00)	99,45	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.092.300,00	1.080.000,00	(12.300,00)	98,87	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.092.300,00	1.080.000,00	(12.300,00)	98,87	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	136.702.000,00	135.970.000,00	(732.000,00)	99,46	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	136.702.000,00	135.970.000,00	(732.000,00)	99,46	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	114.619.900,00	114.233.100,00	(386.800,00)	99,66	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	114.619.900,00	114.233.100,00	(386.800,00)	99,66	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.619.900,00	114.233.100,00	(386.800,00)	99,66	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.123.200,00	13.469.600,00	(653.600,00)	95,37	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	14.123.200,00	13.469.600,00	(653.600,00)	95,37	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.123.200,00	13.469.600,00	(653.600,00)	95,37	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9.994.600,00	9.960.000,00	(34.600,00)	99,65	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	9.994.600,00	9.960.000,00	(34.600,00)	99,65	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.994.600,00	9.960.000,00	(34.600,00)	99,65	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	311.008.000,00	310.299.064,00	(708.936,00)	99,77	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	311.008.000,00	310.299.064,00	(708.936,00)	99,77	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	311.008.000,00	310.299.064,00	(708.936,00)	99,77	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	6.365.200,00	6.365.200,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.365.200,00	6.365.200,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.269.343.402,00	1.263.607.756,00	(5.735.646,00)	99,54	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.913.300,00	5.504.025,00	(1.409.275,00)	79,61	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.913.300,00	5.504.025,00	(1.409.275,00)	79,61	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.913.300,00	5.504.025,00	(1.409.275,00)	79,61	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87.612.924,00	87.570.000,00	(42.924,00)	99,95	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	87.612.924,00	87.570.000,00	(42.924,00)	99,95	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.612.924,00	87.570.000,00	(42.924,00)	99,95	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.172.317.178,00	1.168.033.731,00	(4.283.447,00)	99,63	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.172.317.178,00	1.168.033.731,00	(4.283.447,00)	99,63	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.172.317.178,00	1.168.033.731,00	(4.283.447,00)	99,63	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	220.364.742,00	218.478.881,00	(1.885.861,00)	99,14	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	157.404.742,00	156.215.000,00	(1.189.742,00)	99,24	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	157.404.742,00	156.215.000,00	(1.189.742,00)	99,24	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.404.742,00	156.215.000,00	(1.189.742,00)	99,24	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.960.000,00	7.810.000,00	(150.000,00)	98,11	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	7.960.000,00	7.810.000,00	(150.000,00)	98,11	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.960.000,00	7.810.000,00	(150.000,00)	98,11	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	55.000.000,00	54.453.881,00	(546.119,00)	99,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	55.000.000,00	54.453.881,00	(546.119,00)	99,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	54.453.881,00	(546.119,00)	99,00	



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**
Bidang Urusan : **SEKRETARIAT DPRD**
Organisasi : **Sekretariat DPRD**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000		5	BELANJA DAERAH	156.357.328.756,00	141.267.941.987,00	(15.089.386.769,00)	90,34	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	68.316.517.837,00	63.748.379.080,00	(4.568.138.757,00)	93,31	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.01		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	1.756.999.954,00	1.523.478.740,00	(233.521.214,00)	86,70	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.01.0001		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	359.999.954,00	278.986.650,00	(81.013.304,00)	77,49	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	359.999.954,00	278.986.650,00	(81.013.304,00)	77,49	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	359.999.954,00	278.986.650,00	(81.013.304,00)	77,49	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.01.0002		Pembahasan Rancangan Perda	750.000.000,00	732.021.605,00	(17.978.395,00)	97,60	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	750.000.000,00	732.021.605,00	(17.978.395,00)	97,60	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	750.000.000,00	732.021.605,00	(17.978.395,00)	97,60	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.01.0003		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	360.000.000,00	329.380.590,00	(30.619.410,00)	91,49	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	360.000.000,00	329.380.590,00	(30.619.410,00)	91,49	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	360.000.000,00	329.380.590,00	(30.619.410,00)	91,49	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.01.0004		Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	287.000.000,00	183.089.895,00	(103.910.105,00)	63,79	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	287.000.000,00	183.089.895,00	(103.910.105,00)	63,79	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	287.000.000,00	183.089.895,00	(103.910.105,00)	63,79	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	280.000.000,00	89.250.600,00	(190.749.400,00)	31,87	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.02.0003		Pembahasan APBD	280.000.000,00	89.250.600,00	(190.749.400,00)	31,87	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	280.000.000,00	89.250.600,00	(190.749.400,00)	31,87	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	280.000.000,00	89.250.600,00	(190.749.400,00)	31,87	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	13.050.654.376,00	11.667.165.848,00	(1.383.488.528,00)	89,39	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.04.0002		Pendalaman Tugas DPRD	1.852.564.000,00	1.329.464.403,00	(523.099.597,00)	71,76	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.852.564.000,00	1.329.464.403,00	(523.099.597,00)	71,76	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.852.564.000,00	1.329.464.403,00	(523.099.597,00)	71,76	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.04.0005		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	2.777.000.000,00	2.725.800.000,00	(51.200.000,00)	98,15	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.04.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.777.000.000,00	2.725.800.000,00	(51.200.000,00)	98,15	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.04.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.777.000.000,00	2.725.800.000,00	(51.200.000,00)	98,15	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.04.0006		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	2.483.051.808,00	1.889.793.845,00	(593.257.963,00)	76,10	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.04.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.483.051.808,00	1.889.793.845,00	(593.257.963,00)	76,10	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.04.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.483.051.808,00	1.889.793.845,00	(593.257.963,00)	76,10	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.04.0008		Publikasi dan Dokumentasi DPRD	5.938.038.568,00	5.722.107.600,00	(215.930.968,00)	96,36	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.04.0008	5.1	BELANJA OPERASI	5.938.038.568,00	5.722.107.600,00	(215.930.968,00)	96,36	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.04.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.938.038.568,00	5.722.107.600,00	(215.930.968,00)	96,36	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	18.625.935.155,00	17.836.365.928,00	(789.569.227,00)	95,76	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.05.0002		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	188.000.000,00	187.514.822,00	(485.178,00)	99,74	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	188.000.000,00	187.514.822,00	(485.178,00)	99,74	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	188.000.000,00	187.514.822,00	(485.178,00)	99,74	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.05.0003		Pelaksanaan Reses	18.437.935.155,00	17.648.851.106,00	(789.084.049,00)	95,72	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	18.437.935.155,00	17.648.851.106,00	(789.084.049,00)	95,72	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.437.935.155,00	17.648.851.106,00	(789.084.049,00)	95,72	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.08		Fasilitasi Tugas DPRD	34.602.928.352,00	32.632.117.964,00	(1.970.810.388,00)	94,30	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.08.0001		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	26.282.550.702,00	24.409.719.440,00	(1.872.831.262,00)	92,87	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	26.282.550.702,00	24.409.719.440,00	(1.872.831.262,00)	92,87	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.282.550.702,00	24.409.719.440,00	(1.872.831.262,00)	92,87	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.08.0002		Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	320.000.000,00	294.773.050,00	(25.226.950,00)	92,11	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	320.000.000,00	294.773.050,00	(25.226.950,00)	92,11	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	320.000.000,00	294.773.050,00	(25.226.950,00)	92,11	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.08.0003		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	140.000.000,00	68.789.800,00	(71.210.200,00)	49,13	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	140.000.000,00	68.789.800,00	(71.210.200,00)	49,13	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000,00	68.789.800,00	(71.210.200,00)	49,13	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.08.0004		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	7.860.377.650,00	7.858.835.674,00	(1.541.976,00)	99,98	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	7.860.377.650,00	7.858.835.674,00	(1.541.976,00)	99,98	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.860.377.650,00	7.858.835.674,00	(1.541.976,00)	99,98	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	88.040.810.919,00	77.519.562.907,00	(10.521.248.012,00)	88,04	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	642.317.700,00	564.079.935,00	(78.237.765,00)	87,81	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	95.000.000,00	87.617.036,00	(7.382.964,00)	92,22	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	95.000.000,00	87.617.036,00	(7.382.964,00)	92,22	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000,00	87.617.036,00	(7.382.964,00)	92,22	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	45.000.000,00	25.269.045,00	(19.730.955,00)	56,15	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	45.000.000,00	25.269.045,00	(19.730.955,00)	56,15	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	25.269.045,00	(19.730.955,00)	56,15	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	45.000.000,00	4.799.689,00	(40.200.311,00)	10,66	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	45.000.000,00	4.799.689,00	(40.200.311,00)	10,66	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	4.799.689,00	(40.200.311,00)	10,66	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000,00	18.656.865,00	(1.343.135,00)	93,28	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	18.656.865,00	(1.343.135,00)	93,28	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	18.656.865,00	(1.343.135,00)	93,28	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	437.317.700,00	427.737.300,00	(9.580.400,00)	97,80	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	437.317.700,00	427.737.300,00	(9.580.400,00)	97,80	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	437.317.700,00	427.737.300,00	(9.580.400,00)	97,80	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.705.500.745,00	14.197.296.911,00	(508.203.834,00)	96,54	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.098.786.445,00	13.021.081.379,00	(77.705.066,00)	99,40	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	13.098.786.445,00	13.021.081.379,00	(77.705.066,00)	99,40	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	13.098.786.445,00	13.021.081.379,00	(77.705.066,00)	99,40	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	990.160.000,00	804.406.362,00	(185.753.638,00)	81,24	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	990.160.000,00	804.406.362,00	(185.753.638,00)	81,24	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	975.096.000,00	789.512.000,00	(185.584.000,00)	80,96	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.064.000,00	14.894.362,00	(169.638,00)	98,87	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	310.000.000,00	216.291.971,00	(93.708.029,00)	69,77	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	280.000.000,00	186.341.971,00	(93.658.029,00)	66,55	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	280.000.000,00	186.341.971,00	(93.658.029,00)	66,55	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.02.0003	5.2	BELANJA MODAL	30.000.000,00	29.950.000,00	(50.000,00)	99,83	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.02.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.000.000,00	29.950.000,00	(50.000,00)	99,83	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.02.0004		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	261.554.300,00	122.646.700,00	(138.907.600,00)	46,89	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	261.554.300,00	122.646.700,00	(138.907.600,00)	46,89	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	261.554.300,00	122.646.700,00	(138.907.600,00)	46,89	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.02.0008		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	45.000.000,00	32.870.499,00	(12.129.501,00)	73,04	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	45.000.000,00	32.870.499,00	(12.129.501,00)	73,04	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	32.870.499,00	(12.129.501,00)	73,04	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.214.550.500,00	978.645.561,00	(235.904.939,00)	80,57	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	583.130.000,00	554.504.300,00	(28.625.700,00)	95,09	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	583.130.000,00	554.504.300,00	(28.625.700,00)	95,09	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	583.130.000,00	554.504.300,00	(28.625.700,00)	95,09	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	431.420.500,00	286.687.811,00	(144.732.689,00)	66,45	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	431.420.500,00	286.687.811,00	(144.732.689,00)	66,45	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	431.420.500,00	286.687.811,00	(144.732.689,00)	66,45	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	200.000.000,00	137.453.450,00	(62.546.550,00)	68,72	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	137.453.450,00	(62.546.550,00)	68,72	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	137.453.450,00	(62.546.550,00)	68,72	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	23.009.416.434,00	20.256.870.678,00	(2.752.545.756,00)	88,03	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	883.797.242,00	309.784.000,00	(574.013.242,00)	35,05	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	350.939.664,00	136.234.000,00	(214.705.664,00)	38,81	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.939.664,00	136.234.000,00	(214.705.664,00)	38,81	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	532.857.578,00	173.550.000,00	(359.307.578,00)	32,56	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	532.857.578,00	173.550.000,00	(359.307.578,00)	32,56	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.671.714.426,00	8.734.523.255,00	(1.937.191.171,00)	81,84	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	10.353.324.426,00	8.734.523.255,00	(1.618.801.171,00)	84,36	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.353.324.426,00	8.734.523.255,00	(1.618.801.171,00)	84,36	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.06.0004	5.2	BELANJA MODAL	318.390.000,00	0,00	(318.390.000,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.06.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	318.390.000,00	0,00	(318.390.000,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.603.904.766,00	10.595.382.424,00	(8.522.342,00)	99,91	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	10.603.904.766,00	10.595.382.424,00	(8.522.342,00)	99,91	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.603.904.766,00	10.595.382.424,00	(8.522.342,00)	99,91	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	850.000.000,00	617.180.999,00	(232.819.001,00)	72,60	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	850.000.000,00	617.180.999,00	(232.819.001,00)	72,60	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	850.000.000,00	617.180.999,00	(232.819.001,00)	72,60	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.017.075.307,00	554.944.500,00	(2.462.130.807,00)	18,39	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.07.0007		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	2.792.908.345,00	358.800.000,00	(2.434.108.345,00)	12,84	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.07.0007	5.1	BELANJA OPERASI	229.264,00	0,00	(229.264,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.07.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	229.264,00	0,00	(229.264,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.07.0007	5.2	BELANJA MODAL	2.792.679.081,00	358.800.000,00	(2.433.879.081,00)	12,84	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.07.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.426.379.081,00	0,00	(2.426.379.081,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.07.0007	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	366.300.000,00	358.800.000,00	(7.500.000,00)	97,95	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.07.0011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	224.166.962,00	196.144.500,00	(28.022.462,00)	87,49	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.07.0011	5.1	BELANJA OPERASI	223.149.425,00	196.144.500,00	(27.004.925,00)	87,89	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.07.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	223.149.425,00	196.144.500,00	(27.004.925,00)	87,89	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.07.0011	5.2	BELANJA MODAL	1.017.537,00	0,00	(1.017.537,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.07.0011	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.017.537,00	0,00	(1.017.537,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.190.157.137,00	6.687.746.000,00	(502.411.137,00)	93,01	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.183.999.550,00	1.766.350.101,00	(417.649.449,00)	80,87	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.183.999.550,00	1.766.350.101,00	(417.649.449,00)	80,87	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.183.999.550,00	1.766.350.101,00	(417.649.449,00)	80,87	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.006.157.587,00	4.921.395.899,00	(84.761.688,00)	98,30	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	5.006.157.587,00	4.921.395.899,00	(84.761.688,00)	98,30	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.006.157.587,00	4.921.395.899,00	(84.761.688,00)	98,30	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.405.515.228,00	4.407.281.429,00	(1.998.233.799,00)	68,80	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.358.072.628,00	1.922.720.475,00	(1.435.352.153,00)	57,25	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.358.072.628,00	1.922.720.475,00	(1.435.352.153,00)	57,25	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.358.072.628,00	1.922.720.475,00	(1.435.352.153,00)	57,25	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	344.510.000,00	170.205.000,00	(174.305.000,00)	49,40	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	344.510.000,00	170.205.000,00	(174.305.000,00)	49,40	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	344.510.000,00	170.205.000,00	(174.305.000,00)	49,40	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.09.0007		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	567.474.348,00	364.644.000,00	(202.830.348,00)	64,25	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.09.0007	5.1	BELANJA OPERASI	567.474.348,00	364.644.000,00	(202.830.348,00)	64,25	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.09.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	567.474.348,00	364.644.000,00	(202.830.348,00)	64,25	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	345.200.000,00	341.597.327,00	(3.602.673,00)	98,95	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	345.200.000,00	341.597.327,00	(3.602.673,00)	98,95	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	345.200.000,00	341.597.327,00	(3.602.673,00)	98,95	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.790.258.252,00	1.608.114.627,00	(182.143.625,00)	89,82	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	1.790.258.252,00	1.608.114.627,00	(182.143.625,00)	89,82	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.790.258.252,00	1.608.114.627,00	(182.143.625,00)	89,82	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	31.506.277.868,00	29.574.156.893,00	(1.932.120.975,00)	93,86	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.15.0001		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	30.315.883.368,00	28.629.573.243,00	(1.686.310.125,00)	94,43	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.15.0001	5.1	BELANJA OPERASI	30.315.883.368,00	28.629.573.243,00	(1.686.310.125,00)	94,43	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.15.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	30.315.883.368,00	28.629.573.243,00	(1.686.310.125,00)	94,43	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.15.0002		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	934.294.500,00	901.434.100,00	(32.860.400,00)	96,48	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.15.0002	5.1	BELANJA OPERASI	934.294.500,00	901.434.100,00	(32.860.400,00)	96,48	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.15.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	934.294.500,00	901.434.100,00	(32.860.400,00)	96,48	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.15.0003		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	256.100.000,00	43.149.550,00	(212.950.450,00)	16,84	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.15.0003	5.1	BELANJA OPERASI	256.100.000,00	43.149.550,00	(212.950.450,00)	16,84	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.15.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	256.100.000,00	43.149.550,00	(212.950.450,00)	16,84	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.16		Layanan Administrasi DPRD	350.000.000,00	298.541.000,00	(51.459.000,00)	85,29	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.16.0002		Fasilitasi Fraksi DPRD	350.000.000,00	298.541.000,00	(51.459.000,00)	85,29	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.16.0002	5.1	BELANJA OPERASI	350.000.000,00	298.541.000,00	(51.459.000,00)	85,29	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.16.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	298.541.000,00	(51.459.000,00)	85,29	



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**
Bidang Urusan : **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**
Organisasi : **Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000		5	BELANJA DAERAH	743.490.996,43	742.584.939,00	(906.057,43)	99,87	
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.05.02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	743.490.996,43	742.584.939,00	(906.057,43)	99,87	
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.05.02.1.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	551.080.096,02	550.472.973,00	(607.123,02)	99,88	
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.05.02.1.01.0004		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	160.217.150,04	160.217.150,00	(0,04)	99,99	
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.05.02.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	160.217.150,04	160.217.150,00	(0,04)	99,99	
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.05.02.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.217.150,04	160.217.150,00	(0,04)	99,99	
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.05.02.1.01.0005		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	215.169.981,47	214.581.381,00	(588.600,47)	99,72	
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.05.02.1.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	215.169.981,47	214.581.381,00	(588.600,47)	99,72	
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.05.02.1.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.169.981,47	214.581.381,00	(588.600,47)	99,72	
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.05.02.1.01.0012		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	175.692.964,51	175.674.442,00	(18.522,51)	99,98	
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.05.02.1.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	175.692.964,51	175.674.442,00	(18.522,51)	99,98	
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.05.02.1.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.692.964,51	175.674.442,00	(18.522,51)	99,98	
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.05.02.1.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	192.410.900,41	192.111.966,00	(298.934,41)	99,84	
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.05.02.1.04.0003		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	192.410.900,41	192.111.966,00	(298.934,41)	99,84	
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.05.02.1.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	192.410.900,41	192.111.966,00	(298.934,41)	99,84	
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.05.02.1.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	192.410.900,41	192.111.966,00	(298.934,41)	99,84	



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**
Bidang Urusan : **PERENCANAAN**
Organisasi : **Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000		5	BELANJA DAERAH	32.833.472.462,57	32.587.868.882,00	(245.603.580,57)	99,25	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02		PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	3.741.181.127,01	3.721.941.666,00	(19.239.461,01)	99,48	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.1.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	2.974.022.856,00	2.956.455.575,00	(17.567.281,00)	99,40	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.1.01.0002		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	83.691.750,00	83.444.950,00	(246.800,00)	99,70	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	83.691.750,00	83.444.950,00	(246.800,00)	99,70	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.691.750,00	83.444.950,00	(246.800,00)	99,70	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.1.01.0003		Pelaksanaan Konsultasi Publik	72.323.175,00	72.316.175,00	(7.000,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	72.323.175,00	72.316.175,00	(7.000,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.323.175,00	72.316.175,00	(7.000,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.1.01.0004		Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	204.366.174,00	202.348.229,00	(2.017.945,00)	99,01	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	204.366.174,00	202.348.229,00	(2.017.945,00)	99,01	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	204.366.174,00	202.348.229,00	(2.017.945,00)	99,01	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.1.01.0005		Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	578.229.389,00	578.215.389,00	(14.000,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.1.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	578.229.389,00	578.215.389,00	(14.000,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.1.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	578.229.389,00	578.215.389,00	(14.000,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.1.01.0006		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	2.035.412.368,00	2.020.130.832,00	(15.281.536,00)	99,24	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.035.412.368,00	2.020.130.832,00	(15.281.536,00)	99,24	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.035.412.368,00	2.020.130.832,00	(15.281.536,00)	99,24	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.1.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	22.298.883,01	22.298.800,00	(83,01)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.1.02.0001		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	22.298.883,01	22.298.800,00	(83,01)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	22.298.883,01	22.298.800,00	(83,01)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.298.883,01	22.298.800,00	(83,01)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.1.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	744.859.388,00	743.187.291,00	(1.672.097,00)	99,77	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.1.03.0001		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	318.663.405,00	317.984.708,00	(678.697,00)	99,78	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.1.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	318.663.405,00	317.984.708,00	(678.697,00)	99,78	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.1.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	318.663.405,00	317.984.708,00	(678.697,00)	99,78	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.1.03.0004		Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	426.195.983,00	425.202.583,00	(993.400,00)	99,76	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.1.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	426.195.983,00	425.202.583,00	(993.400,00)	99,76	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.1.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	426.195.983,00	425.202.583,00	(993.400,00)	99,76	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.851.430.388,81	1.836.513.295,00	(14.917.093,81)	99,19	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	509.015.749,81	502.152.238,00	(6.863.511,81)	98,65	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.01.0001		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	130.664.500,80	128.499.754,00	(2.164.746,80)	98,34	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	130.664.500,80	128.499.754,00	(2.164.746,80)	98,34	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.664.500,80	128.499.754,00	(2.164.746,80)	98,34	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.01.0003		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	25.654.690,01	24.663.890,00	(990.800,01)	96,13	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	25.654.690,01	24.663.890,00	(990.800,01)	96,13	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.654.690,01	24.663.890,00	(990.800,01)	96,13	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.01.0004		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	31.047.300,00	30.777.887,00	(269.413,00)	99,13	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	31.047.300,00	30.777.887,00	(269.413,00)	99,13	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.047.300,00	30.777.887,00	(269.413,00)	99,13	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.01.0006		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	70.217.159,00	69.050.510,00	(1.166.649,00)	98,33	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	70.217.159,00	69.050.510,00	(1.166.649,00)	98,33	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.217.159,00	69.050.510,00	(1.166.649,00)	98,33	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.01.0007		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	137.789.000,00	136.822.845,00	(966.155,00)	99,29	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	137.789.000,00	136.822.845,00	(966.155,00)	99,29	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.789.000,00	136.822.845,00	(966.155,00)	99,29	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.01.0008		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	113.643.100,00	112.337.352,00	(1.305.748,00)	98,85	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	113.643.100,00	112.337.352,00	(1.305.748,00)	98,85	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.643.100,00	112.337.352,00	(1.305.748,00)	98,85	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	552.296.939,00	551.047.385,00	(1.249.554,00)	99,77	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.02.0004		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	379.903.814,00	379.870.471,00	(33.343,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	379.903.814,00	379.870.471,00	(33.343,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	379.903.814,00	379.870.471,00	(33.343,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.02.0005		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	172.393.125,00	171.176.914,00	(1.216.211,00)	99,29	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	172.393.125,00	171.176.914,00	(1.216.211,00)	99,29	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.393.125,00	171.176.914,00	(1.216.211,00)	99,29	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	790.117.700,00	783.313.672,00	(6.804.028,00)	99,13	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.03.0001		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	136.422.800,00	134.704.900,00	(1.717.900,00)	98,74	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	136.422.800,00	134.704.900,00	(1.717.900,00)	98,74	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.422.800,00	134.704.900,00	(1.717.900,00)	98,74	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.03.0002		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	112.715.100,00	111.578.875,00	(1.136.225,00)	98,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	112.715.100,00	111.578.875,00	(1.136.225,00)	98,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.715.100,00	111.578.875,00	(1.136.225,00)	98,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.03.0003		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	145.438.400,00	144.195.219,00	(1.243.181,00)	99,14	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	145.438.400,00	144.195.219,00	(1.243.181,00)	99,14	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.438.400,00	144.195.219,00	(1.243.181,00)	99,14	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.03.0004		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	395.541.400,00	392.834.678,00	(2.706.722,00)	99,31	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	395.541.400,00	392.834.678,00	(2.706.722,00)	99,31	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	395.541.400,00	392.834.678,00	(2.706.722,00)	99,31	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	27.240.860.946,75	27.029.413.921,00	(211.447.025,75)	99,22	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	162.583.333,00	162.341.333,00	(242.000,00)	99,85	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	106.369.473,00	106.127.473,00	(242.000,00)	99,77	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	106.369.473,00	106.127.473,00	(242.000,00)	99,77	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.369.473,00	106.127.473,00	(242.000,00)	99,77	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	19.496.159,00	19.496.159,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.496.159,00	19.496.159,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	36.717.701,00	36.717.701,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.717.701,00	36.717.701,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.869.688.129,98	20.710.006.429,00	(159.681.700,98)	99,23	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.136.151.529,98	19.976.942.727,00	(159.208.802,98)	99,20	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	20.136.151.529,98	19.976.942.727,00	(159.208.802,98)	99,20	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	20.133.577.529,98	19.974.393.727,00	(159.183.802,98)	99,20	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.574.000,00	2.549.000,00	(25.000,00)	99,02	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	614.772.000,00	614.735.000,00	(37.000,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	614.772.000,00	614.735.000,00	(37.000,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	613.320.000,00	613.320.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.452.000,00	1.415.000,00	(37.000,00)	97,45	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	33.026.200,00	32.926.613,00	(99.587,00)	99,69	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	33.026.200,00	32.926.613,00	(99.587,00)	99,69	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.026.200,00	32.926.613,00	(99.587,00)	99,69	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.02.0004		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	38.733.000,00	38.535.686,00	(197.314,00)	99,49	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	38.733.000,00	38.535.686,00	(197.314,00)	99,49	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.733.000,00	38.535.686,00	(197.314,00)	99,49	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	27.803.600,00	27.692.710,00	(110.890,00)	99,60	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	27.803.600,00	27.692.710,00	(110.890,00)	99,60	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.803.600,00	27.692.710,00	(110.890,00)	99,60	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	19.201.800,00	19.173.693,00	(28.107,00)	99,85	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	19.201.800,00	19.173.693,00	(28.107,00)	99,85	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.201.800,00	19.173.693,00	(28.107,00)	99,85	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	726.000,00	726.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	726.000,00	726.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	32.164.000,00	29.229.978,00	(2.934.022,00)	90,87	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	32.164.000,00	29.229.978,00	(2.934.022,00)	90,87	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	32.164.000,00	29.229.978,00	(2.934.022,00)	90,87	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.164.000,00	29.229.978,00	(2.934.022,00)	90,87	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.666.640.378,00	1.640.389.204,00	(26.251.174,00)	98,42	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	58.993.725,00	58.987.009,00	(6.716,00)	99,98	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	58.993.725,00	58.987.009,00	(6.716,00)	99,98	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.993.725,00	58.987.009,00	(6.716,00)	99,98	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	99.994.905,00	99.917.430,00	(77.475,00)	99,92	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	99.994.905,00	99.917.430,00	(77.475,00)	99,92	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.994.905,00	99.917.430,00	(77.475,00)	99,92	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	249.994.023,00	249.671.000,00	(323.023,00)	99,87	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	249.994.023,00	249.671.000,00	(323.023,00)	99,87	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.994.023,00	249.671.000,00	(323.023,00)	99,87	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	233.551.770,00	232.882.500,00	(669.270,00)	99,71	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	233.551.770,00	232.882.500,00	(669.270,00)	99,71	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	233.551.770,00	232.882.500,00	(669.270,00)	99,71	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	85.360.000,00	85.120.000,00	(240.000,00)	99,71	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	85.360.000,00	85.120.000,00	(240.000,00)	99,71	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.360.000,00	85.120.000,00	(240.000,00)	99,71	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	227.015.955,00	205.316.069,00	(21.699.886,00)	90,44	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	227.015.955,00	205.316.069,00	(21.699.886,00)	90,44	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	227.015.955,00	205.316.069,00	(21.699.886,00)	90,44	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	711.730.000,00	708.495.196,00	(3.234.804,00)	99,54	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	711.730.000,00	708.495.196,00	(3.234.804,00)	99,54	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	711.730.000,00	708.495.196,00	(3.234.804,00)	99,54	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	76.203.848,00	72.375.000,00	(3.828.848,00)	94,97	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	76.203.848,00	72.375.000,00	(3.828.848,00)	94,97	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.984.000,00	3.800.000,00	(184.000,00)	95,38	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.984.000,00	3.800.000,00	(184.000,00)	95,38	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	72.219.848,00	68.575.000,00	(3.644.848,00)	94,95	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	72.219.848,00	68.575.000,00	(3.644.848,00)	94,95	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.941.051.283,77	2.929.094.990,00	(11.956.293,77)	99,59	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.550.000,00	12.550.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.550.000,00	12.550.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	82.890.000,00	81.419.406,00	(1.470.594,00)	98,22	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	82.890.000,00	81.419.406,00	(1.470.594,00)	98,22	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.890.000,00	81.419.406,00	(1.470.594,00)	98,22	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	236.400.000,00	236.400.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	236.400.000,00	236.400.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.609.211.283,77	2.598.725.584,00	(10.485.699,77)	99,59	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.609.211.283,77	2.598.725.584,00	(10.485.699,77)	99,59	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.609.211.283,77	2.598.725.584,00	(10.485.699,77)	99,59	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.491.803.974,00	1.485.250.987,00	(6.552.987,00)	99,56	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	78.757.900,00	78.757.900,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.757.900,00	78.757.900,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	396.329.650,00	396.329.650,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	396.329.650,00	396.329.650,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	49.621.000,00	49.621.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.621.000,00	49.621.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	967.095.424,00	960.542.437,00	(6.552.987,00)	99,32	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	510.249.824,00	507.819.637,00	(2.430.187,00)	99,52	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	510.249.824,00	507.819.637,00	(2.430.187,00)	99,52	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.09.0010	5.2	BELANJA MODAL	456.845.600,00	452.722.800,00	(4.122.800,00)	99,09	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.09.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	456.845.600,00	452.722.800,00	(4.122.800,00)	99,09	



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**

Bidang Urusan : **KEUANGAN**

Organisasi : **Badan Keuangan dan Aset Daerah**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02.0.00.0.00.25.0000			4	PENDAPATAN DAERAH	2.323.910.447.374,00	1.995.372.351.485,64	(328.538.095.888,36)	85,86	
5.02.0.00.0.00.25.0000			4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	70.842.330.483,00	18.831.453.687,64	(52.010.876.795,36)	26,58	
5.02.0.00.0.00.25.0000			4.1.02	Retribusi Daerah	1.500.000.000,00	1.410.850.000,00	(89.150.000,00)	94,05	
5.02.0.00.0.00.25.0000			4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	34.003.224.423,00	1.904.909.335,00	(32.098.315.088,00)	5,60	
5.02.0.00.0.00.25.0000			4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	35.339.106.060,00	15.515.694.352,64	(19.823.411.707,36)	43,90	
5.02.0.00.0.00.25.0000			4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.250.268.116.891,00	1.976.533.066.207,00	(273.735.050.684,00)	87,83	
5.02.0.00.0.00.25.0000			4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.250.268.116.891,00	1.976.533.066.207,00	(273.735.050.684,00)	87,83	
5.02.0.00.0.00.25.0000			4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.800.000.000,00	7.831.591,00	(2.792.168.409,00)	0,27	
5.02.0.00.0.00.25.0000			4.3.01	Pendapatan Hibah	2.800.000.000,00	7.831.591,00	(2.792.168.409,00)	0,27	
5.02.0.00.0.00.25.0000			5	BELANJA DAERAH	914.969.793.121,00	838.836.392.279,31	(76.133.400.841,69)	91,67	
5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	865.760.556.278,00	793.681.749.997,50	(72.078.806.280,50)	91,67	
5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.612.725.400,00	4.721.087.640,00	(891.637.760,00)	84,11	
5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0001			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	522.200.000,00	449.661.912,00	(72.538.088,00)	86,10	
5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0001	5.1		BELANJA OPERASI	522.200.000,00	449.661.912,00	(72.538.088,00)	86,10	
5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0001	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	522.200.000,00	449.661.912,00	(72.538.088,00)	86,10	
5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0002			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	231.538.000,00	210.275.420,00	(21.262.580,00)	90,81	
5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0002	5.1		BELANJA OPERASI	231.538.000,00	210.275.420,00	(21.262.580,00)	90,81	
5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0002	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	231.538.000,00	210.275.420,00	(21.262.580,00)	90,81	
5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0003			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	268.240.000,00	157.488.080,00	(110.751.920,00)	58,71	
5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0003	5.1		BELANJA OPERASI	268.240.000,00	157.488.080,00	(110.751.920,00)	58,71	
5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0003	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	268.240.000,00	157.488.080,00	(110.751.920,00)	58,71	
5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0004			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	167.900.000,00	156.435.800,00	(11.464.200,00)	93,17	
5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0004	5.1		BELANJA OPERASI	167.900.000,00	156.435.800,00	(11.464.200,00)	93,17	
5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0004	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	167.900.000,00	156.435.800,00	(11.464.200,00)	93,17	
5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0007			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	476.070.000,00	379.500.693,00	(96.569.307,00)	79,71	
5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0007	5.1		BELANJA OPERASI	476.070.000,00	379.500.693,00	(96.569.307,00)	79,71	
5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0007	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	476.070.000,00	379.500.693,00	(96.569.307,00)	79,71	
5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0008			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	328.763.000,00	310.651.068,00	(18.111.932,00)	94,49	
5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0008	5.1		BELANJA OPERASI	328.763.000,00	310.651.068,00	(18.111.932,00)	94,49	
5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0008	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	328.763.000,00	310.651.068,00	(18.111.932,00)	94,49	
5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0009			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	676.086.000,00	537.719.032,00	(138.366.968,00)	79,53	
5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0009	5.1		BELANJA OPERASI	676.086.000,00	537.719.032,00	(138.366.968,00)	79,53	
5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0009	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	676.086.000,00	537.719.032,00	(138.366.968,00)	79,53	
5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0010			Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	297.500.000,00	263.689.218,00	(33.810.782,00)	88,63	
5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0010	5.1		BELANJA OPERASI	297.500.000,00	263.689.218,00	(33.810.782,00)	88,63	
5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0010	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	297.500.000,00	263.689.218,00	(33.810.782,00)	88,63	
5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0011			Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1.723.959.000,00	1.411.771.724,00	(312.187.276,00)	81,89	
5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0011	5.1		BELANJA OPERASI	1.723.959.000,00	1.411.771.724,00	(312.187.276,00)	81,89	
5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0011	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	1.723.959.000,00	1.411.771.724,00	(312.187.276,00)	81,89	
5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0012			Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	297.000.000,00	246.246.396,00	(50.753.604,00)	82,91	
5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0012	5.1		BELANJA OPERASI	297.000.000,00	246.246.396,00	(50.753.604,00)	82,91	
5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0012	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	297.000.000,00	246.246.396,00	(50.753.604,00)	82,91	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0013		Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	623.469.400,00	597.648.297,00	(25.821.103,00)	95,85	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	623.469.400,00	597.648.297,00	(25.821.103,00)	95,85	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	623.469.400,00	597.648.297,00	(25.821.103,00)	95,85	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	3.148.069.000,00	2.636.308.625,00	(511.760.375,00)	83,74	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.02.0002		Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	344.000.000,00	279.537.300,00	(64.462.700,00)	81,26	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	344.000.000,00	279.537.300,00	(64.462.700,00)	81,26	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	344.000.000,00	279.537.300,00	(64.462.700,00)	81,26	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.02.0003		Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	358.500.000,00	314.896.374,00	(43.603.626,00)	87,83	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	358.500.000,00	314.896.374,00	(43.603.626,00)	87,83	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	358.500.000,00	314.896.374,00	(43.603.626,00)	87,83	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.02.0004		Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	249.009.000,00	209.030.122,00	(39.978.878,00)	83,94	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	249.009.000,00	209.030.122,00	(39.978.878,00)	83,94	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.009.000,00	209.030.122,00	(39.978.878,00)	83,94	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.02.0005		Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	402.450.000,00	261.623.702,00	(140.826.298,00)	65,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	402.450.000,00	261.623.702,00	(140.826.298,00)	65,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	402.450.000,00	261.623.702,00	(140.826.298,00)	65,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.02.0006		Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	606.360.000,00	521.866.966,00	(84.493.034,00)	86,06	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	606.360.000,00	521.866.966,00	(84.493.034,00)	86,06	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	606.360.000,00	521.866.966,00	(84.493.034,00)	86,06	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.02.0007		Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	209.500.000,00	150.275.252,00	(59.224.748,00)	71,73	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	209.500.000,00	150.275.252,00	(59.224.748,00)	71,73	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	209.500.000,00	150.275.252,00	(59.224.748,00)	71,73	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.02.0011		Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	584.400.000,00	534.147.787,00	(50.252.213,00)	91,40	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	584.400.000,00	534.147.787,00	(50.252.213,00)	91,40	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	584.400.000,00	534.147.787,00	(50.252.213,00)	91,40	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.02.0012		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	393.850.000,00	364.931.122,00	(28.918.878,00)	92,65	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	393.850.000,00	364.931.122,00	(28.918.878,00)	92,65	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	393.850.000,00	364.931.122,00	(28.918.878,00)	92,65	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	2.122.015.321,00	1.938.907.353,00	(183.107.968,00)	91,37	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.03.0001		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	814.705.272,00	761.461.703,00	(53.243.569,00)	93,46	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	814.705.272,00	761.461.703,00	(53.243.569,00)	93,46	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	814.705.272,00	761.461.703,00	(53.243.569,00)	93,46	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.03.0004		Penatausahaan Pembiayaan Daerah	167.844.600,00	155.856.404,00	(11.988.196,00)	92,85	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	167.844.600,00	155.856.404,00	(11.988.196,00)	92,85	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	167.844.600,00	155.856.404,00	(11.988.196,00)	92,85	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.03.0005		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	250.348.000,00	246.505.073,00	(3.842.927,00)	98,46	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	250.348.000,00	246.505.073,00	(3.842.927,00)	98,46	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.348.000,00	246.505.073,00	(3.842.927,00)	98,46	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.03.0006		Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	200.910.339,00	177.164.994,00	(23.745.345,00)	88,18	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	200.910.339,00	177.164.994,00	(23.745.345,00)	88,18	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.910.339,00	177.164.994,00	(23.745.345,00)	88,18	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.03.0009		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	197.870.110,00	143.954.112,00	(53.915.998,00)	72,75	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.03.0009	5.1	BELANJA OPERASI	197.870.110,00	143.954.112,00	(53.915.998,00)	72,75	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.03.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	197.870.110,00	143.954.112,00	(53.915.998,00)	72,75	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.03.0010		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	185.199.000,00	155.412.922,00	(29.786.078,00)	83,91	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.03.0010	5.1	BELANJA OPERASI	185.199.000,00	155.412.922,00	(29.786.078,00)	83,91	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.03.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.199.000,00	155.412.922,00	(29.786.078,00)	83,91	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.03.0011		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	305.138.000,00	298.552.145,00	(6.585.855,00)	97,84	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.03.0011	5.1	BELANJA OPERASI	305.138.000,00	298.552.145,00	(6.585.855,00)	97,84	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.03.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	305.138.000,00	298.552.145,00	(6.585.855,00)	97,84	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	2.814.380.408,00	2.197.781.487,50	(616.598.920,50)	78,09	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.04.0001		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	250.134.352,00	220.478.240,00	(29.656.112,00)	88,14	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	250.134.352,00	220.478.240,00	(29.656.112,00)	88,14	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.134.352,00	220.478.240,00	(29.656.112,00)	88,14	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.04.0002		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	290.000.000,00	179.235.085,00	(110.764.915,00)	61,80	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	290.000.000,00	179.235.085,00	(110.764.915,00)	61,80	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	290.000.000,00	179.235.085,00	(110.764.915,00)	61,80	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.04.0004		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	651.172.886,00	584.902.220,00	(66.270.666,00)	89,82	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.04.0004	5.1	BELANJA OPERASI	651.172.886,00	584.902.220,00	(66.270.666,00)	89,82	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.04.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	651.172.886,00	584.902.220,00	(66.270.666,00)	89,82	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.04.0005		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	507.451.937,00	399.920.587,00	(107.531.350,00)	78,80	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.04.0005	5.1	BELANJA OPERASI	507.451.937,00	399.920.587,00	(107.531.350,00)	78,80	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.04.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	507.451.937,00	399.920.587,00	(107.531.350,00)	78,80	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.04.0006		Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	165.042.800,00	121.285.535,00	(43.757.265,00)	73,48	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.04.0006	5.1	BELANJA OPERASI	165.042.800,00	121.285.535,00	(43.757.265,00)	73,48	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.04.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.042.800,00	121.285.535,00	(43.757.265,00)	73,48	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.04.0007		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	285.299.657,00	135.831.849,00	(149.467.808,00)	47,61	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.04.0007	5.1	BELANJA OPERASI	285.299.657,00	135.831.849,00	(149.467.808,00)	47,61	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.04.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	285.299.657,00	135.831.849,00	(149.467.808,00)	47,61	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.04.0010		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	295.728.000,00	259.714.761,50	(36.013.238,50)	87,82	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.04.0010	5.1	BELANJA OPERASI	295.728.000,00	259.714.761,50	(36.013.238,50)	87,82	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.04.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	295.728.000,00	259.714.761,50	(36.013.238,50)	87,82	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.04.0011		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	180.950.776,00	174.867.821,00	(6.082.955,00)	96,63	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.04.0011	5.1	BELANJA OPERASI	180.950.776,00	174.867.821,00	(6.082.955,00)	96,63	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.04.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.950.776,00	174.867.821,00	(6.082.955,00)	96,63	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.04.0012		Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	188.600.000,00	121.545.389,00	(67.054.611,00)	64,44	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.04.0012	5.1	BELANJA OPERASI	188.600.000,00	121.545.389,00	(67.054.611,00)	64,44	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.04.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	188.600.000,00	121.545.389,00	(67.054.611,00)	64,44	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	850.928.198.878,00	781.333.150.862,00	(69.595.048.016,00)	91,82	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.05.0004		Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	4.050.000.000,00	3.692.560.273,00	(357.439.727,00)	91,17	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.05.0004	5.1	BELANJA OPERASI	4.050.000.000,00	3.692.560.273,00	(357.439.727,00)	91,17	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.05.0004	5.1.03	Belanja Bunga	4.050.000.000,00	3.692.560.273,00	(357.439.727,00)	91,17	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.05.0006		Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	419.087.400,00	375.298.234,00	(43.789.166,00)	89,55	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.05.0006	5.1	BELANJA OPERASI	419.087.400,00	375.298.234,00	(43.789.166,00)	89,55	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.05.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	419.087.400,00	375.298.234,00	(43.789.166,00)	89,55	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.05.0008		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	29.513.326.000,00	26.908.668.200,00	(2.604.657.800,00)	91,17	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.05.0008	5.1	BELANJA OPERASI	67.826.000,00	55.668.200,00	(12.157.800,00)	82,07	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.05.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.826.000,00	55.668.200,00	(12.157.800,00)	82,07	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.05.0008	5.4	BELANJA TRANSFER	29.445.500.000,00	26.853.000.000,00	(2.592.500.000,00)	91,19	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.05.0008	5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	29.445.500.000,00	26.853.000.000,00	(2.592.500.000,00)	91,19	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.05.0009		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	4.773.672.048,00	2.065.423.140,00	(2.708.248.908,00)	43,26	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.05.0009	5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.773.672.048,00	2.065.423.140,00	(2.708.248.908,00)	43,26	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.05.0009	5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.773.672.048,00	2.065.423.140,00	(2.708.248.908,00)	43,26	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.05.0010		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	812.172.113.430,00	748.291.201.015,00	(63.880.912.415,00)	92,13	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.05.0010	5.4	BELANJA TRANSFER	812.172.113.430,00	748.291.201.015,00	(63.880.912.415,00)	92,13	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.05.0010	5.4.01	Belanja Bagi Hasil	812.172.113.430,00	748.291.201.015,00	(63.880.912.415,00)	92,13	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.06		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	1.135.167.271,00	854.514.030,00	(280.653.241,00)	75,27	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.06.0002		Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	564.989.569,00	473.098.414,00	(91.891.155,00)	83,73	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	564.989.569,00	473.098.414,00	(91.891.155,00)	83,73	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	564.989.569,00	473.098.414,00	(91.891.155,00)	83,73	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.06.0003		Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	570.177.702,00	381.415.616,00	(188.762.086,00)	66,89	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	570.177.702,00	381.415.616,00	(188.762.086,00)	66,89	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	570.177.702,00	381.415.616,00	(188.762.086,00)	66,89	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	4.411.453.370,00	3.981.096.754,00	(430.356.616,00)	90,24	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	4.411.453.370,00	3.981.096.754,00	(430.356.616,00)	90,24	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.1.01.0001		Penyusunan Standar Harga	580.480.000,00	546.047.386,00	(34.432.614,00)	94,06	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	580.480.000,00	546.047.386,00	(34.432.614,00)	94,06	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	580.480.000,00	546.047.386,00	(34.432.614,00)	94,06	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.1.01.0003		Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	238.698.000,00	211.628.299,00	(27.069.701,00)	88,65	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	238.698.000,00	211.628.299,00	(27.069.701,00)	88,65	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	238.698.000,00	211.628.299,00	(27.069.701,00)	88,65	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.1.01.0005		Penatausahaan Barang Milik Daerah	345.218.000,00	327.188.776,00	(18.029.224,00)	94,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.1.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	345.218.000,00	327.188.776,00	(18.029.224,00)	94,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.1.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	345.218.000,00	327.188.776,00	(18.029.224,00)	94,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.1.01.0006		Inventarisasi Barang Milik Daerah	635.574.288,00	580.084.486,00	(55.489.802,00)	91,26	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	635.574.288,00	580.084.486,00	(55.489.802,00)	91,26	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	635.574.288,00	580.084.486,00	(55.489.802,00)	91,26	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.1.01.0007		Pengamanan Barang Milik Daerah	820.987.712,00	724.674.622,00	(96.313.090,00)	88,26	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	820.987.712,00	724.674.622,00	(96.313.090,00)	88,26	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	820.987.712,00	724.674.622,00	(96.313.090,00)	88,26	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.1.01.0008		Penilaian Barang Milik Daerah	836.837.300,00	808.508.669,00	(28.328.631,00)	96,61	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.1.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	836.837.300,00	808.508.669,00	(28.328.631,00)	96,61	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.1.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	836.837.300,00	808.508.669,00	(28.328.631,00)	96,61	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.1.01.0010		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	472.500.000,00	419.181.984,00	(53.318.016,00)	88,71	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.1.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	472.500.000,00	419.181.984,00	(53.318.016,00)	88,71	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.1.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	472.500.000,00	419.181.984,00	(53.318.016,00)	88,71	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.1.01.0012		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	368.950.000,00	284.620.082,00	(84.329.918,00)	77,14	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.1.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	368.950.000,00	284.620.082,00	(84.329.918,00)	77,14	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.1.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	368.950.000,00	284.620.082,00	(84.329.918,00)	77,14	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.1.01.0013		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	112.208.070,00	79.162.450,00	(33.045.620,00)	70,54	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.1.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	112.208.070,00	79.162.450,00	(33.045.620,00)	70,54	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.1.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.208.070,00	79.162.450,00	(33.045.620,00)	70,54	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	44.797.783.473,00	41.173.545.527,81	(3.624.237.945,19)	91,90	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	654.428.464,00	598.903.026,00	(55.525.438,00)	91,51	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	353.696.241,00	329.422.610,00	(24.273.631,00)	93,13	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	353.696.241,00	329.422.610,00	(24.273.631,00)	93,13	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	353.696.241,00	329.422.610,00	(24.273.631,00)	93,13	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	106.292.674,00	92.668.254,00	(13.624.420,00)	87,18	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	106.292.674,00	92.668.254,00	(13.624.420,00)	87,18	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.292.674,00	92.668.254,00	(13.624.420,00)	87,18	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	85.159.818,00	75.945.508,00	(9.214.310,00)	89,17	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	85.159.818,00	75.945.508,00	(9.214.310,00)	89,17	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.159.818,00	75.945.508,00	(9.214.310,00)	89,17	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	109.279.731,00	100.866.654,00	(8.413.077,00)	92,30	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	109.279.731,00	100.866.654,00	(8.413.077,00)	92,30	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.279.731,00	100.866.654,00	(8.413.077,00)	92,30	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.397.968.889,00	22.883.341.718,00	(514.627.171,00)	97,80	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.388.061.384,00	20.946.732.563,00	(441.328.821,00)	97,93	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	21.388.061.384,00	20.946.732.563,00	(441.328.821,00)	97,93	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	21.388.061.384,00	20.946.732.563,00	(441.328.821,00)	97,93	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.758.528.000,00	1.703.344.000,00	(55.184.000,00)	96,86	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.758.528.000,00	1.703.344.000,00	(55.184.000,00)	96,86	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	1.753.704.000,00	1.698.904.000,00	(54.800.000,00)	96,87	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.824.000,00	4.440.000,00	(384.000,00)	92,03	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	134.945.423,00	121.629.450,00	(13.315.973,00)	90,13	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	134.945.423,00	121.629.450,00	(13.315.973,00)	90,13	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.945.423,00	121.629.450,00	(13.315.973,00)	90,13	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	116.434.082,00	111.635.705,00	(4.798.377,00)	95,87	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	116.434.082,00	111.635.705,00	(4.798.377,00)	95,87	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.434.082,00	111.635.705,00	(4.798.377,00)	95,87	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	484.405.000,00	448.688.712,00	(35.716.288,00)	92,62	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	208.900.000,00	202.285.000,00	(6.615.000,00)	96,83	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	208.900.000,00	202.285.000,00	(6.615.000,00)	96,83	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	208.900.000,00	202.285.000,00	(6.615.000,00)	96,83	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	275.505.000,00	246.403.712,00	(29.101.288,00)	89,43	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	275.505.000,00	246.403.712,00	(29.101.288,00)	89,43	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	275.505.000,00	246.403.712,00	(29.101.288,00)	89,43	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.415.750.908,00	3.174.290.160,00	(241.460.748,00)	92,93	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	108.000.000,00	101.196.520,00	(6.803.480,00)	93,70	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	108.000.000,00	101.196.520,00	(6.803.480,00)	93,70	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.000.000,00	101.196.520,00	(6.803.480,00)	93,70	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	256.750.000,00	252.099.330,00	(4.650.670,00)	98,18	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	221.965.042,00	217.317.272,00	(4.647.770,00)	97,90	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	221.965.042,00	217.317.272,00	(4.647.770,00)	97,90	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	34.784.958,00	34.782.058,00	(2.900,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.784.958,00	34.782.058,00	(2.900,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	260.000.000,00	215.722.833,00	(44.277.167,00)	82,97	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	260.000.000,00	215.722.833,00	(44.277.167,00)	82,97	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	260.000.000,00	215.722.833,00	(44.277.167,00)	82,97	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	255.000.000,00	247.288.000,00	(7.712.000,00)	96,97	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	255.000.000,00	247.288.000,00	(7.712.000,00)	96,97	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	255.000.000,00	247.288.000,00	(7.712.000,00)	96,97	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	25.533.047,00	25.500.000,00	(33.047,00)	99,87	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	25.533.047,00	25.500.000,00	(33.047,00)	99,87	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.533.047,00	25.500.000,00	(33.047,00)	99,87	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	59.100.000,00	47.306.100,00	(11.793.900,00)	80,04	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	59.100.000,00	47.306.100,00	(11.793.900,00)	80,04	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.100.000,00	47.306.100,00	(11.793.900,00)	80,04	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.130.530.214,00	1.978.376.877,00	(152.153.337,00)	92,85	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	2.130.530.214,00	1.978.376.877,00	(152.153.337,00)	92,85	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.130.530.214,00	1.978.376.877,00	(152.153.337,00)	92,85	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.06.0010		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	320.837.647,00	306.800.500,00	(14.037.147,00)	95,62	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.06.0010	5.1	BELANJA OPERASI	320.837.647,00	306.800.500,00	(14.037.147,00)	95,62	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.06.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	320.837.647,00	306.800.500,00	(14.037.147,00)	95,62	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	861.842.200,00	817.428.000,00	(44.414.200,00)	94,84	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.07.0005		Pengadaan Mebel	140.744.140,00	132.755.000,00	(7.989.140,00)	94,32	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	7.390.405,00	6.295.000,00	(1.095.405,00)	85,17	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.390.405,00	6.295.000,00	(1.095.405,00)	85,17	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	133.353.735,00	126.460.000,00	(6.893.735,00)	94,83	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	133.353.735,00	126.460.000,00	(6.893.735,00)	94,83	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	721.098.060,00	684.673.000,00	(36.425.060,00)	94,94	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	9.486.978,00	7.993.000,00	(1.493.978,00)	84,25	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.486.978,00	7.993.000,00	(1.493.978,00)	84,25	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	711.611.082,00	676.680.000,00	(34.931.082,00)	95,09	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	711.611.082,00	676.680.000,00	(34.931.082,00)	95,09	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.227.559.816,00	11.696.390.831,00	(2.531.168.985,00)	82,20	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	614.000.000,00	573.339.683,00	(40.660.317,00)	93,37	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	614.000.000,00	573.339.683,00	(40.660.317,00)	93,37	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	614.000.000,00	573.339.683,00	(40.660.317,00)	93,37	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	211.600.000,00	211.414.000,00	(186.000,00)	99,91	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	211.600.000,00	211.414.000,00	(186.000,00)	99,91	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	211.600.000,00	211.414.000,00	(186.000,00)	99,91	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13.401.959.816,00	10.911.637.148,00	(2.490.322.668,00)	81,41	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	13.401.959.816,00	10.911.637.148,00	(2.490.322.668,00)	81,41	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.401.959.816,00	10.911.637.148,00	(2.490.322.668,00)	81,41	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.755.828.196,00	1.554.503.080,81	(201.325.115,19)	88,53	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	85.000.000,00	65.905.000,00	(19.095.000,00)	77,53	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	85.000.000,00	65.905.000,00	(19.095.000,00)	77,53	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	65.905.000,00	(19.095.000,00)	77,53	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	785.856.500,00	679.324.360,00	(106.532.140,00)	86,44	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	785.856.500,00	679.324.360,00	(106.532.140,00)	86,44	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	785.856.500,00	679.324.360,00	(106.532.140,00)	86,44	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	176.741.000,00	107.998.000,00	(68.743.000,00)	61,10	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	176.741.000,00	107.998.000,00	(68.743.000,00)	61,10	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.741.000,00	107.998.000,00	(68.743.000,00)	61,10	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	621.230.696,00	616.343.220,81	(4.887.475,19)	99,21	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	621.230.696,00	616.343.220,81	(4.887.475,19)	99,21	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	621.230.696,00	616.343.220,81	(4.887.475,19)	99,21	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	87.000.000,00	84.932.500,00	(2.067.500,00)	97,62	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	87.000.000,00	84.932.500,00	(2.067.500,00)	97,62	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.000.000,00	84.932.500,00	(2.067.500,00)	97,62	
	5.02.0.00.0.00.25.0000		6	PEMBIAYAAN DAERAH	139.161.570.978,00	139.369.811.088,24	208.240.110,24	100,14	
	5.02.0.00.0.00.25.0000		6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	231.214.715.013,00	231.315.598.721,24	100.883.708,24	100,04	
	5.02.0.00.0.00.25.0000		6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	231.214.715.013,00	231.214.715.013,24	0,24	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	5.02.0.00.0.00.25.0000		6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	100.883.708,00	100.883.708,00	0,00	
	5.02.0.00.0.00.25.0000		6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	92.053.144.035,00	91.945.787.633,00	(107.356.402,00)	99,88	
	5.02.0.00.0.00.25.0000		6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	92.053.144.035,00	91.945.787.633,00	(107.356.402,00)	99,88	



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**
Bidang Urusan : **KEUANGAN**
Organisasi : **Badan Pendapatan Daerah**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	5.02.0.00.0.00.26.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	1.783.489.295.548,00	1.793.639.631.181,00	10.150.335.633,00	100,56	
	5.02.0.00.0.00.26.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.782.196.595.548,00	1.792.346.931.181,00	10.150.335.633,00	100,56	
	5.02.0.00.0.00.26.0000		4.1.01	Pajak Daerah	1.738.323.174.655,00	1.777.704.385.140,00	39.381.210.485,00	102,26	
	5.02.0.00.0.00.26.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	200.000.000,00	71.775.000,00	(128.225.000,00)	35,88	
	5.02.0.00.0.00.26.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	43.673.420.893,00	14.570.771.041,00	(29.102.649.852,00)	33,36	
	5.02.0.00.0.00.26.0000		4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.292.700.000,00	1.292.700.000,00	0,00	100,00	
	5.02.0.00.0.00.26.0000		4.3.01	Pendapatan Hibah	1.292.700.000,00	1.292.700.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000		5	BELANJA DAERAH	123.446.853.135,00	115.930.186.890,20	(7.516.666.244,80)	93,91	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	433.501.500,00	415.493.566,00	(18.007.934,00)	95,84	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.1.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	91.199.000,00	90.636.348,00	(562.652,00)	99,38	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.1.01.0011		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	91.199.000,00	90.636.348,00	(562.652,00)	99,38	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.1.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	91.199.000,00	90.636.348,00	(562.652,00)	99,38	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.1.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.199.000,00	90.636.348,00	(562.652,00)	99,38	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	291.286.400,00	276.033.818,00	(15.252.582,00)	94,76	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.1.03.0005		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	291.286.400,00	276.033.818,00	(15.252.582,00)	94,76	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.1.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	291.286.400,00	276.033.818,00	(15.252.582,00)	94,76	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.1.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	291.286.400,00	276.033.818,00	(15.252.582,00)	94,76	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	51.016.100,00	48.823.400,00	(2.192.700,00)	95,70	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.1.04.0006		Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	51.016.100,00	48.823.400,00	(2.192.700,00)	95,70	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.1.04.0006	5.1	BELANJA OPERASI	51.016.100,00	48.823.400,00	(2.192.700,00)	95,70	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.1.04.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.016.100,00	48.823.400,00	(2.192.700,00)	95,70	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	11.999.240.488,00	10.532.589.144,00	(1.466.651.344,00)	87,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	11.999.240.488,00	10.532.589.144,00	(1.466.651.344,00)	87,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0001		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	697.629.880,00	645.479.408,00	(52.150.472,00)	92,52	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	697.629.880,00	645.479.408,00	(52.150.472,00)	92,52	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	697.629.880,00	645.479.408,00	(52.150.472,00)	92,52	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0002		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	852.491.520,00	749.306.971,00	(103.184.549,00)	87,89	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	852.491.520,00	749.306.971,00	(103.184.549,00)	87,89	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	852.491.520,00	749.306.971,00	(103.184.549,00)	87,89	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0003		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	993.346.352,00	785.615.947,00	(207.730.405,00)	79,08	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	993.346.352,00	785.615.947,00	(207.730.405,00)	79,08	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	993.346.352,00	785.615.947,00	(207.730.405,00)	79,08	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0004		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2.321.281.793,00	1.850.372.610,00	(470.909.183,00)	79,71	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.814.164.393,00	1.518.257.610,00	(295.906.783,00)	83,68	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.814.164.393,00	1.518.257.610,00	(295.906.783,00)	83,68	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	507.117.400,00	332.115.000,00	(175.002.400,00)	65,49	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	507.117.400,00	332.115.000,00	(175.002.400,00)	65,49	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0005		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	536.174.600,00	517.831.977,00	(18.342.623,00)	96,57	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	536.174.600,00	517.831.977,00	(18.342.623,00)	96,57	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	536.174.600,00	517.831.977,00	(18.342.623,00)	96,57	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0006		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	761.151.935,00	614.566.452,00	(146.585.483,00)	80,74	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	748.351.935,00	601.766.452,00	(146.585.483,00)	80,41	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	748.351.935,00	601.766.452,00	(146.585.483,00)	80,41	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0006	5.2	BELANJA MODAL	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0007		Penetapan Wajib Pajak Daerah	28.630.000,00	21.226.593,00	(7.403.407,00)	74,14	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	28.630.000,00	21.226.593,00	(7.403.407,00)	74,14	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.630.000,00	21.226.593,00	(7.403.407,00)	74,14	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0008		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	159.662.550,00	124.796.701,00	(34.865.849,00)	78,16	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	157.862.550,00	123.008.701,00	(34.853.849,00)	77,92	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.862.550,00	123.008.701,00	(34.853.849,00)	77,92	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0008	5.2	BELANJA MODAL	1.800.000,00	1.788.000,00	(12.000,00)	99,33	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0008	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.800.000,00	1.788.000,00	(12.000,00)	99,33	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0009		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	141.573.600,00	132.621.131,00	(8.952.469,00)	93,67	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	141.573.600,00	132.621.131,00	(8.952.469,00)	93,67	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.573.600,00	132.621.131,00	(8.952.469,00)	93,67	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0010		Penagihan Pajak Daerah	3.107.052.246,00	2.922.510.249,00	(184.541.997,00)	94,06	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	3.107.052.246,00	2.922.510.249,00	(184.541.997,00)	94,06	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.107.052.246,00	2.922.510.249,00	(184.541.997,00)	94,06	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0011		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	271.946.952,00	192.090.985,00	(79.855.967,00)	70,63	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	271.946.952,00	192.090.985,00	(79.855.967,00)	70,63	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	271.946.952,00	192.090.985,00	(79.855.967,00)	70,63	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0012		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	1.918.074.160,00	1.797.548.988,00	(120.525.172,00)	93,71	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	1.918.074.160,00	1.797.548.988,00	(120.525.172,00)	93,71	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.918.074.160,00	1.797.548.988,00	(120.525.172,00)	93,71	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0013		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	144.864.900,00	134.208.640,00	(10.656.260,00)	92,64	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	144.864.900,00	134.208.640,00	(10.656.260,00)	92,64	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.864.900,00	134.208.640,00	(10.656.260,00)	92,64	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0014		Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	65.360.000,00	44.412.492,00	(20.947.508,00)	67,95	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	65.360.000,00	44.412.492,00	(20.947.508,00)	67,95	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.360.000,00	44.412.492,00	(20.947.508,00)	67,95	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	111.014.111.147,00	104.982.104.180,20	(6.032.006.966,80)	94,56	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	497.753.932,00	489.229.867,00	(8.524.065,00)	98,28	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	189.873.376,00	187.451.622,00	(2.421.754,00)	98,72	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	189.873.376,00	187.451.622,00	(2.421.754,00)	98,72	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	189.873.376,00	187.451.622,00	(2.421.754,00)	98,72	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.895.000,00	20.126.797,00	(1.768.203,00)	91,92	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	21.895.000,00	20.126.797,00	(1.768.203,00)	91,92	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.895.000,00	20.126.797,00	(1.768.203,00)	91,92	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	285.985.556,00	281.651.448,00	(4.334.108,00)	98,48	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	285.985.556,00	281.651.448,00	(4.334.108,00)	98,48	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	285.985.556,00	281.651.448,00	(4.334.108,00)	98,48	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	79.248.895.307,00	78.980.310.400,00	(268.584.907,00)	99,66	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	39.857.561.139,00	39.698.343.136,00	(159.218.003,00)	99,60	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	39.857.561.139,00	39.698.343.136,00	(159.218.003,00)	99,60	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	39.857.561.139,00	39.698.343.136,00	(159.218.003,00)	99,60	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	39.374.223.168,00	39.266.435.041,00	(107.788.127,00)	99,72	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	39.374.223.168,00	39.266.435.041,00	(107.788.127,00)	99,72	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	36.364.825.966,00	36.280.506.780,00	(84.319.186,00)	99,76	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.009.397.202,00	2.985.928.261,00	(23.468.941,00)	99,22	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	17.111.000,00	15.532.223,00	(1.578.777,00)	90,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	17.111.000,00	15.532.223,00	(1.578.777,00)	90,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.111.000,00	15.532.223,00	(1.578.777,00)	90,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	135.264.804,00	132.924.977,00	(2.339.827,00)	98,27	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.03.0005		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	135.264.804,00	132.924.977,00	(2.339.827,00)	98,27	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	135.264.804,00	132.924.977,00	(2.339.827,00)	98,27	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.264.804,00	132.924.977,00	(2.339.827,00)	98,27	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	548.064.000,00	429.863.069,00	(118.200.931,00)	78,43	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.04.0001		Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	74.987.400,00	67.882.552,00	(7.104.848,00)	90,52	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	74.987.400,00	67.882.552,00	(7.104.848,00)	90,52	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.987.400,00	67.882.552,00	(7.104.848,00)	90,52	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.04.0002		Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	153.519.400,00	129.182.847,00	(24.336.553,00)	84,14	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	153.519.400,00	129.182.847,00	(24.336.553,00)	84,14	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.519.400,00	129.182.847,00	(24.336.553,00)	84,14	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.04.0003		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	197.793.400,00	119.734.470,00	(78.058.930,00)	60,53	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	197.793.400,00	119.734.470,00	(78.058.930,00)	60,53	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	197.793.400,00	119.734.470,00	(78.058.930,00)	60,53	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.04.0007		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	121.763.800,00	113.063.200,00	(8.700.600,00)	92,85	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.04.0007	5.1	BELANJA OPERASI	121.763.800,00	113.063.200,00	(8.700.600,00)	92,85	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.04.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.763.800,00	113.063.200,00	(8.700.600,00)	92,85	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	603.472.161,00	568.693.521,00	(34.778.640,00)	94,23	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	416.114.261,00	413.990.000,00	(2.124.261,00)	99,48	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	416.114.261,00	413.990.000,00	(2.124.261,00)	99,48	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	416.114.261,00	413.990.000,00	(2.124.261,00)	99,48	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	187.357.900,00	154.703.521,00	(32.654.379,00)	82,57	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	187.357.900,00	154.703.521,00	(32.654.379,00)	82,57	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.357.900,00	154.703.521,00	(32.654.379,00)	82,57	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	9.798.050.861,00	6.579.472.532,00	(3.218.578.329,00)	67,15	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	109.279.821,00	104.523.500,00	(4.756.321,00)	95,64	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	109.279.821,00	104.523.500,00	(4.756.321,00)	95,64	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.279.821,00	104.523.500,00	(4.756.321,00)	95,64	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.571.400.305,00	1.498.925.000,00	(72.475.305,00)	95,38	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	12.520.201,00	11.475.000,00	(1.045.201,00)	91,65	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.520.201,00	11.475.000,00	(1.045.201,00)	91,65	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	1.558.880.104,00	1.487.450.000,00	(71.430.104,00)	95,41	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.433.025.704,00	1.362.650.000,00	(70.375.704,00)	95,08	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	125.854.400,00	124.800.000,00	(1.054.400,00)	99,16	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	675.713.804,00	266.793.500,00	(408.920.304,00)	39,48	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	45.679.668,00	40.988.000,00	(4.691.668,00)	89,72	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.679.668,00	40.988.000,00	(4.691.668,00)	89,72	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06.0003	5.2	BELANJA MODAL	630.034.136,00	225.805.500,00	(404.228.636,00)	35,84	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	630.034.136,00	225.805.500,00	(404.228.636,00)	35,84	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.314.548.093,00	1.166.529.202,00	(148.018.891,00)	88,73	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.314.548.093,00	1.166.529.202,00	(148.018.891,00)	88,73	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.314.548.093,00	1.166.529.202,00	(148.018.891,00)	88,73	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.354.386.129,00	1.050.720.700,00	(2.303.665.429,00)	31,32	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.344.648.329,00	1.041.140.700,00	(2.303.507.629,00)	31,12	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.344.648.329,00	1.041.140.700,00	(2.303.507.629,00)	31,12	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06.0005	5.2	BELANJA MODAL	9.737.800,00	9.580.000,00	(157.800,00)	98,37	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.737.800,00	9.580.000,00	(157.800,00)	98,37	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	72.888.000,00	70.030.000,00	(2.858.000,00)	96,07	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	72.888.000,00	70.030.000,00	(2.858.000,00)	96,07	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.888.000,00	70.030.000,00	(2.858.000,00)	96,07	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	127.296.000,00	109.807.000,00	(17.489.000,00)	86,26	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	127.296.000,00	109.807.000,00	(17.489.000,00)	86,26	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.296.000,00	109.807.000,00	(17.489.000,00)	86,26	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.393.518.905,00	2.181.114.858,00	(212.404.047,00)	91,12	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	2.393.518.905,00	2.181.114.858,00	(212.404.047,00)	91,12	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.393.518.905,00	2.181.114.858,00	(212.404.047,00)	91,12	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06.0010		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	179.019.804,00	131.028.772,00	(47.991.032,00)	73,19	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06.0010	5.1	BELANJA OPERASI	179.019.804,00	131.028.772,00	(47.991.032,00)	73,19	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	179.019.804,00	131.028.772,00	(47.991.032,00)	73,19	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.028.653.550,00	2.984.902.733,00	(1.043.750.817,00)	74,09	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	633.820.019,00	633.820.000,00	(19,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.07.0002	5.2	BELANJA MODAL	633.820.019,00	633.820.000,00	(19,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.07.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	633.820.019,00	633.820.000,00	(19,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.07.0005		Pengadaan Mebel	2.206.763.731,00	1.846.444.400,00	(360.319.331,00)	83,67	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.084.322.809,00	828.760.790,00	(255.562.019,00)	76,43	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.084.322.809,00	828.760.790,00	(255.562.019,00)	76,43	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	1.122.440.922,00	1.017.683.610,00	(104.757.312,00)	90,66	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.122.440.922,00	1.017.683.610,00	(104.757.312,00)	90,66	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.07.0009		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.188.069.800,00	504.638.333,00	(683.431.467,00)	42,47	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.07.0009	5.1	BELANJA OPERASI	1.188.069.800,00	504.638.333,00	(683.431.467,00)	42,47	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.07.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.188.069.800,00	504.638.333,00	(683.431.467,00)	42,47	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.001.168.021,00	8.659.046.510,00	(342.121.511,00)	96,19	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	59.726.000,00	58.423.806,00	(1.302.194,00)	97,81	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	59.726.000,00	58.423.806,00	(1.302.194,00)	97,81	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.726.000,00	58.423.806,00	(1.302.194,00)	97,81	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.870.284.835,00	3.613.592.285,00	(256.692.550,00)	93,36	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.870.284.835,00	3.613.592.285,00	(256.692.550,00)	93,36	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.870.284.835,00	3.613.592.285,00	(256.692.550,00)	93,36	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	284.052.000,00	256.640.000,00	(27.412.000,00)	90,34	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	284.052.000,00	256.640.000,00	(27.412.000,00)	90,34	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	284.052.000,00	256.640.000,00	(27.412.000,00)	90,34	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.787.105.186,00	4.730.390.419,00	(56.714.767,00)	98,81	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	4.787.105.186,00	4.730.390.419,00	(56.714.767,00)	98,81	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.787.105.186,00	4.730.390.419,00	(56.714.767,00)	98,81	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.152.788.511,00	6.157.660.571,20	(995.127.939,80)	86,08	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.432.794.519,00	2.176.800.865,00	(255.993.654,00)	89,47	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.432.794.519,00	2.176.800.865,00	(255.993.654,00)	89,47	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.432.794.519,00	2.176.800.865,00	(255.993.654,00)	89,47	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	521.489.400,00	353.871.332,00	(167.618.068,00)	67,85	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	521.489.400,00	353.871.332,00	(167.618.068,00)	67,85	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	521.489.400,00	353.871.332,00	(167.618.068,00)	67,85	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.198.504.592,00	3.626.988.374,20	(571.516.217,80)	86,38	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	4.198.504.592,00	3.626.988.374,20	(571.516.217,80)	86,38	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.198.504.592,00	3.626.988.374,20	(571.516.217,80)	86,38	



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**

Bidang Urusan : **KEPEGAWAIAN**

Organisasi : **Badan Kepegawaian dan Korpri**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000		5	BELANJA DAERAH	19.120.520.906,00	18.762.730.608,00	(357.790.298,00)	98,12	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.540.528.119,00	1.528.832.663,00	(11.695.456,00)	99,24	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	420.216.912,00	418.046.936,00	(2.169.976,00)	99,48	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.01.0003		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	368.017.044,00	366.614.925,00	(1.402.119,00)	99,61	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	368.017.044,00	366.614.925,00	(1.402.119,00)	99,61	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	368.017.044,00	366.614.925,00	(1.402.119,00)	99,61	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.01.0006		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	13.617.900,00	13.348.600,00	(269.300,00)	98,02	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	13.617.900,00	13.348.600,00	(269.300,00)	98,02	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.617.900,00	13.348.600,00	(269.300,00)	98,02	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.01.0008		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	9.950.000,00	9.817.643,00	(132.357,00)	98,66	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	9.950.000,00	9.817.643,00	(132.357,00)	98,66	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.950.000,00	9.817.643,00	(132.357,00)	98,66	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.01.0010		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	20.532.820,00	20.172.020,00	(360.800,00)	98,24	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	20.532.820,00	20.172.020,00	(360.800,00)	98,24	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.532.820,00	20.172.020,00	(360.800,00)	98,24	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.01.0011		Pengelolaan Data Kepegawaian	8.099.148,00	8.093.748,00	(5.400,00)	99,93	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	8.099.148,00	8.093.748,00	(5.400,00)	99,93	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.099.148,00	8.093.748,00	(5.400,00)	99,93	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.02		Mutasi dan Promosi ASN	533.045.507,00	528.306.643,00	(4.738.864,00)	99,11	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.02.0001		Pengelolaan Mutasi ASN	108.894.800,00	108.041.479,00	(853.321,00)	99,21	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	108.894.800,00	108.041.479,00	(853.321,00)	99,21	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.894.800,00	108.041.479,00	(853.321,00)	99,21	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.02.0002		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	14.249.907,00	14.036.907,00	(213.000,00)	98,50	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	14.249.907,00	14.036.907,00	(213.000,00)	98,50	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.249.907,00	14.036.907,00	(213.000,00)	98,50	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.02.0003		Pengelolaan Promosi ASN	409.900.800,00	406.228.257,00	(3.672.543,00)	99,10	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	409.900.800,00	406.228.257,00	(3.672.543,00)	99,10	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	409.900.800,00	406.228.257,00	(3.672.543,00)	99,10	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.03		Pengembangan Kompetensi ASN	451.855.100,00	450.928.167,00	(926.933,00)	99,79	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.03.0002		Pengelolaan Assessment Center	147.412.200,00	147.227.956,00	(184.244,00)	99,87	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	146.588.200,00	146.403.956,00	(184.244,00)	99,87	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.588.200,00	146.403.956,00	(184.244,00)	99,87	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.03.0002	5.2	BELANJA MODAL	824.000,00	824.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.03.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	824.000,00	824.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.03.0004		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	265.036.400,00	264.894.300,00	(142.100,00)	99,94	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	265.036.400,00	264.894.300,00	(142.100,00)	99,94	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	265.036.400,00	264.894.300,00	(142.100,00)	99,94	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.03.0013		Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	39.406.500,00	38.805.911,00	(600.589,00)	98,47	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.03.0013	5.1	BELANJA OPERASI	39.406.500,00	38.805.911,00	(600.589,00)	98,47	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.03.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.406.500,00	38.805.911,00	(600.589,00)	98,47	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	135.410.600,00	131.550.917,00	(3.859.683,00)	97,14	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.04.0002		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	36.982.200,00	35.455.896,00	(1.526.304,00)	95,87	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	36.982.200,00	35.455.896,00	(1.526.304,00)	95,87	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.982.200,00	35.455.896,00	(1.526.304,00)	95,87	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.04.0004		Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	29.003.200,00	27.924.305,00	(1.078.895,00)	96,28	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.04.0004	5.1	BELANJA OPERASI	29.003.200,00	27.924.305,00	(1.078.895,00)	96,28	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.04.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.003.200,00	27.924.305,00	(1.078.895,00)	96,28	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.04.0007		Pembinaan Disiplin ASN	49.552.600,00	49.122.902,00	(429.698,00)	99,13	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.04.0007	5.1	BELANJA OPERASI	49.552.600,00	49.122.902,00	(429.698,00)	99,13	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.04.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.552.600,00	49.122.902,00	(429.698,00)	99,13	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.04.0008		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	19.872.600,00	19.047.814,00	(824.786,00)	95,84	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.04.0008	5.1	BELANJA OPERASI	19.872.600,00	19.047.814,00	(824.786,00)	95,84	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.04.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.872.600,00	19.047.814,00	(824.786,00)	95,84	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.579.992.787,00	17.233.897.945,00	(346.094.842,00)	98,03	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.371.200,00	59.844.525,00	(526.675,00)	99,12	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60.371.200,00	59.844.525,00	(526.675,00)	99,12	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	60.371.200,00	59.844.525,00	(526.675,00)	99,12	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.371.200,00	59.844.525,00	(526.675,00)	99,12	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.895.858.945,00	15.565.570.281,00	(330.288.664,00)	97,92	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.483.747.945,00	15.156.984.291,00	(326.763.654,00)	97,88	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.483.747.945,00	15.156.984.291,00	(326.763.654,00)	97,88	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	15.483.747.945,00	15.156.984.291,00	(326.763.654,00)	97,88	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	403.230.000,00	400.076.000,00	(3.154.000,00)	99,21	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	403.230.000,00	400.076.000,00	(3.154.000,00)	99,21	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	402.576.000,00	399.576.000,00	(3.000.000,00)	99,25	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	654.000,00	500.000,00	(154.000,00)	76,45	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.881.000,00	8.509.990,00	(371.010,00)	95,82	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	8.881.000,00	8.509.990,00	(371.010,00)	95,82	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.881.000,00	8.509.990,00	(371.010,00)	95,82	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24.667.200,00	24.635.270,00	(31.930,00)	99,87	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	24.667.200,00	24.635.270,00	(31.930,00)	99,87	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	24.667.200,00	24.635.270,00	(31.930,00)	99,87	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.667.200,00	24.635.270,00	(31.930,00)	99,87	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	683.489.985,00	675.964.384,00	(7.525.601,00)	98,89	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.000.000,00	11.944.938,00	(1.055.062,00)	91,88	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	13.000.000,00	11.944.938,00	(1.055.062,00)	91,88	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	11.944.938,00	(1.055.062,00)	91,88	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	108.886.764,00	106.855.000,00	(2.031.764,00)	98,13	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	40.128.764,00	40.000.000,00	(128.764,00)	99,67	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.128.764,00	40.000.000,00	(128.764,00)	99,67	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	68.758.000,00	66.855.000,00	(1.903.000,00)	97,23	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.758.000,00	66.855.000,00	(1.903.000,00)	97,23	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000.000,00	13.784.900,00	(1.215.100,00)	91,89	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	13.784.900,00	(1.215.100,00)	91,89	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	13.784.900,00	(1.215.100,00)	91,89	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.445.300,00	36.028.700,00	(1.416.600,00)	96,21	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	37.445.300,00	36.028.700,00	(1.416.600,00)	96,21	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.445.300,00	36.028.700,00	(1.416.600,00)	96,21	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00	23.553.500,00	(1.446.500,00)	94,21	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	23.553.500,00	(1.446.500,00)	94,21	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	23.553.500,00	(1.446.500,00)	94,21	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	59.901.000,00	59.568.678,00	(332.322,00)	99,44	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	59.901.000,00	59.568.678,00	(332.322,00)	99,44	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.901.000,00	59.568.678,00	(332.322,00)	99,44	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	424.256.921,00	424.228.668,00	(28.253,00)	99,99	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	424.256.921,00	424.228.668,00	(28.253,00)	99,99	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	424.256.921,00	424.228.668,00	(28.253,00)	99,99	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	604.195.269,00	603.336.556,00	(858.713,00)	99,85	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.066.000,00	16.006.000,00	(60.000,00)	99,62	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	16.066.000,00	16.006.000,00	(60.000,00)	99,62	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.066.000,00	16.006.000,00	(60.000,00)	99,62	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.806.100,00	19.740.335,00	(65.765,00)	99,66	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	19.806.100,00	19.740.335,00	(65.765,00)	99,66	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.806.100,00	19.740.335,00	(65.765,00)	99,66	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	520.323.169,00	519.590.221,00	(732.948,00)	99,85	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	520.323.169,00	519.590.221,00	(732.948,00)	99,85	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	520.323.169,00	519.590.221,00	(732.948,00)	99,85	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	311.410.188,00	304.546.929,00	(6.863.259,00)	97,79	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	265.879.188,00	260.029.299,00	(5.849.889,00)	97,79	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	265.879.188,00	260.029.299,00	(5.849.889,00)	97,79	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	265.879.188,00	260.029.299,00	(5.849.889,00)	97,79	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00	24.290.000,00	(710.000,00)	97,15	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	24.290.000,00	(710.000,00)	97,15	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.290.000,00	(710.000,00)	97,15	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.531.000,00	20.227.630,00	(303.370,00)	98,52	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	20.531.000,00	20.227.630,00	(303.370,00)	98,52	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.531.000,00	20.227.630,00	(303.370,00)	98,52	



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**
Bidang Urusan : **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**
Organisasi : **Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000		5	BELANJA DAERAH	16.183.217.701,00	15.453.682.273,00	(729.535.428,00)	95,49	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.02		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.340.581.442,00	1.939.440.467,00	(401.140.975,00)	82,86	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.02.1.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	576.977.500,00	567.599.191,00	(9.378.309,00)	98,37	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.02.1.01.0003		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	576.977.500,00	567.599.191,00	(9.378.309,00)	98,37	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.02.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	576.977.500,00	567.599.191,00	(9.378.309,00)	98,37	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.02.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	576.977.500,00	567.599.191,00	(9.378.309,00)	98,37	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.02.1.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.763.603.942,00	1.371.841.276,00	(391.762.666,00)	77,78	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.02.1.02.0003		Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	352.589.598,00	283.186.813,00	(69.402.785,00)	80,31	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.02.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	352.589.598,00	283.186.813,00	(69.402.785,00)	80,31	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.02.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	352.589.598,00	283.186.813,00	(69.402.785,00)	80,31	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.02.1.02.0004		Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	113.322.944,00	105.266.228,00	(8.056.716,00)	92,89	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.02.1.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	113.322.944,00	105.266.228,00	(8.056.716,00)	92,89	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.02.1.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.322.944,00	105.266.228,00	(8.056.716,00)	92,89	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.02.1.02.0007		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.297.691.400,00	983.388.235,00	(314.303.165,00)	75,77	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.02.1.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	1.297.691.400,00	983.388.235,00	(314.303.165,00)	75,77	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.02.1.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.297.691.400,00	983.388.235,00	(314.303.165,00)	75,77	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.842.636.259,00	13.514.241.806,00	(328.394.453,00)	97,62	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	544.178.414,00	538.495.663,00	(5.682.751,00)	98,95	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	465.333.214,00	460.616.128,00	(4.717.086,00)	98,98	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	465.333.214,00	460.616.128,00	(4.717.086,00)	98,98	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	465.333.214,00	460.616.128,00	(4.717.086,00)	98,98	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	78.845.200,00	77.879.535,00	(965.665,00)	98,77	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	78.845.200,00	77.879.535,00	(965.665,00)	98,77	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.845.200,00	77.879.535,00	(965.665,00)	98,77	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.030.860.449,00	10.808.897.703,00	(221.962.746,00)	97,98	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.762.012.449,00	10.561.119.703,00	(200.892.746,00)	98,13	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.762.012.449,00	10.561.119.703,00	(200.892.746,00)	98,13	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	10.762.012.449,00	10.561.119.703,00	(200.892.746,00)	98,13	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	268.848.000,00	247.778.000,00	(21.070.000,00)	92,16	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	268.848.000,00	247.778.000,00	(21.070.000,00)	92,16	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	268.728.000,00	247.658.000,00	(21.070.000,00)	92,15	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	715.575.934,00	691.658.951,00	(23.916.983,00)	96,65	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.600.400,00	9.432.500,00	(167.900,00)	98,25	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.600.400,00	9.432.500,00	(167.900,00)	98,25	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.600.400,00	9.432.500,00	(167.900,00)	98,25	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.515.600,00	20.490.000,00	(11.025.600,00)	65,01	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	22.715.600,00	17.770.000,00	(4.945.600,00)	78,22	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.715.600,00	17.770.000,00	(4.945.600,00)	78,22	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	8.800.000,00	2.720.000,00	(6.080.000,00)	30,90	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.800.000,00	2.720.000,00	(6.080.000,00)	30,90	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	5.053.400,00	5.053.400,00	0,00	100,00	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.053.400,00	5.053.400,00	0,00	100,00	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	114.143.634,00	102.811.900,00	(11.331.734,00)	90,07	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	114.143.634,00	102.811.900,00	(11.331.734,00)	90,07	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.143.634,00	102.811.900,00	(11.331.734,00)	90,07	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.674.900,00	14.690.000,00	(984.900,00)	93,71	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	15.674.900,00	14.690.000,00	(984.900,00)	93,71	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.674.900,00	14.690.000,00	(984.900,00)	93,71	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.300.000,00	7.955.000,00	(345.000,00)	95,84	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	8.300.000,00	7.955.000,00	(345.000,00)	95,84	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.300.000,00	7.955.000,00	(345.000,00)	95,84	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	531.288.000,00	531.226.151,00	(61.849,00)	99,98	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	531.288.000,00	531.226.151,00	(61.849,00)	99,98	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	531.288.000,00	531.226.151,00	(61.849,00)	99,98	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	352.166.969,00	340.610.000,00	(11.556.969,00)	96,71	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.07.0005		Pengadaan Mebel	219.915.065,00	211.810.000,00	(8.105.065,00)	96,31	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	219.915.065,00	211.810.000,00	(8.105.065,00)	96,31	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	219.915.065,00	211.810.000,00	(8.105.065,00)	96,31	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	132.251.904,00	128.800.000,00	(3.451.904,00)	97,38	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	132.251.904,00	128.800.000,00	(3.451.904,00)	97,38	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	132.251.904,00	128.800.000,00	(3.451.904,00)	97,38	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	863.643.271,00	811.491.736,00	(52.151.535,00)	93,96	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.409.960,00	29.763.754,00	(16.646.206,00)	64,13	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	46.409.960,00	29.763.754,00	(16.646.206,00)	64,13	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.409.960,00	29.763.754,00	(16.646.206,00)	64,13	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.120.000,00	45.120.000,00	(3.000.000,00)	93,76	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	48.120.000,00	45.120.000,00	(3.000.000,00)	93,76	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.120.000,00	45.120.000,00	(3.000.000,00)	93,76	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	769.113.311,00	736.607.982,00	(32.505.329,00)	95,77	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	769.113.311,00	736.607.982,00	(32.505.329,00)	95,77	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	769.113.311,00	736.607.982,00	(32.505.329,00)	95,77	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	336.211.222,00	323.087.753,00	(13.123.469,00)	96,09	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	196.560.960,00	184.588.453,00	(11.972.507,00)	93,90	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	196.560.960,00	184.588.453,00	(11.972.507,00)	93,90	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	196.560.960,00	184.588.453,00	(11.972.507,00)	93,90	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.640.000,00	16.810.000,00	(830.000,00)	95,29	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	17.640.000,00	16.810.000,00	(830.000,00)	95,29	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.640.000,00	16.810.000,00	(830.000,00)	95,29	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	122.010.262,00	121.689.300,00	(320.962,00)	99,73	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	122.010.262,00	121.689.300,00	(320.962,00)	99,73	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.010.262,00	121.689.300,00	(320.962,00)	99,73	



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**
Bidang Urusan : **PENGELOLAAN PERBATASAN**
Organisasi : **Badan Pengelola Perbatasan Daerah**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000		5	BELANJA DAERAH	7.537.067.752,00	6.876.027.694,00	(661.040.058,00)	91,22	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02		PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	454.640.774,00	452.198.328,00	(2.442.446,00)	99,46	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02.1.01		Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	104.697.874,00	104.151.374,00	(546.500,00)	99,47	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02.1.01.0001		Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	46.785.784,00	46.239.284,00	(546.500,00)	98,83	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	46.785.784,00	46.239.284,00	(546.500,00)	98,83	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.785.784,00	46.239.284,00	(546.500,00)	98,83	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	57.912.090,00	57.912.090,00	0,00	100,00	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.912.090,00	57.912.090,00	0,00	100,00	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02.1.02		Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	203.803.800,00	202.903.594,00	(900.206,00)	99,55	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02.1.02.0001		Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	58.794.000,00	58.596.110,00	(197.890,00)	99,66	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	58.794.000,00	58.596.110,00	(197.890,00)	99,66	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.794.000,00	58.596.110,00	(197.890,00)	99,66	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02.1.02.0002		Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	49.168.300,00	49.126.265,00	(42.035,00)	99,91	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	49.168.300,00	49.126.265,00	(42.035,00)	99,91	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.168.300,00	49.126.265,00	(42.035,00)	99,91	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02.1.02.0003		Fasilitasi Penegakan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	49.461.500,00	49.224.026,00	(237.474,00)	99,51	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	49.461.500,00	49.224.026,00	(237.474,00)	99,51	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.461.500,00	49.224.026,00	(237.474,00)	99,51	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02.1.02.0004		Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan	46.380.000,00	45.957.193,00	(422.807,00)	99,08	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02.1.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	46.380.000,00	45.957.193,00	(422.807,00)	99,08	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02.1.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.380.000,00	45.957.193,00	(422.807,00)	99,08	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02.1.03		Monitoring dan Evaluasi	146.139.100,00	145.143.360,00	(995.740,00)	99,31	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02.1.03.0001		Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	41.577.100,00	41.080.872,00	(496.228,00)	98,80	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02.1.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	41.577.100,00	41.080.872,00	(496.228,00)	98,80	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02.1.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.577.100,00	41.080.872,00	(496.228,00)	98,80	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02.1.03.0002		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	42.964.638,00	42.585.126,00	(379.512,00)	99,11	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02.1.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	42.964.638,00	42.585.126,00	(379.512,00)	99,11	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02.1.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.964.638,00	42.585.126,00	(379.512,00)	99,11	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02.1.03.0003		Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	61.597.362,00	61.477.362,00	(120.000,00)	99,80	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02.1.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	61.597.362,00	61.477.362,00	(120.000,00)	99,80	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02.1.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.597.362,00	61.477.362,00	(120.000,00)	99,80	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.082.426.978,00	6.423.829.366,00	(658.597.612,00)	90,70	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	189.681.420,00	188.733.203,00	(948.217,00)	99,50	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	112.682.820,00	112.125.622,00	(557.198,00)	99,50	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	112.682.820,00	112.125.622,00	(557.198,00)	99,50	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.682.820,00	112.125.622,00	(557.198,00)	99,50	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	76.998.600,00	76.607.581,00	(391.019,00)	99,49	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	76.998.600,00	76.607.581,00	(391.019,00)	99,49	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.998.600,00	76.607.581,00	(391.019,00)	99,49	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.999.859.543,27	5.349.097.061,00	(650.762.482,27)	89,15	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.765.327.043,27	5.145.277.061,00	(620.049.982,27)	89,24	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.765.327.043,27	5.145.277.061,00	(620.049.982,27)	89,24	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	5.765.059.243,27	5.145.013.461,00	(620.045.782,27)	89,24	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	267.800,00	263.600,00	(4.200,00)	98,43	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	234.532.500,00	203.820.000,00	(30.712.500,00)	86,90	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	234.532.500,00	203.820.000,00	(30.712.500,00)	86,90	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	234.374.000,00	203.664.000,00	(30.710.000,00)	86,89	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.500,00	156.000,00	(2.500,00)	98,42	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.034.000,00	24.925.600,00	(108.400,00)	99,56	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	25.034.000,00	24.925.600,00	(108.400,00)	99,56	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	25.034.000,00	24.925.600,00	(108.400,00)	99,56	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.034.000,00	24.925.600,00	(108.400,00)	99,56	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	436.065.119,73	434.490.377,00	(1.574.742,73)	99,63	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.800.000,00	11.676.400,00	(123.600,00)	98,95	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	11.800.000,00	11.676.400,00	(123.600,00)	98,95	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.800.000,00	11.676.400,00	(123.600,00)	98,95	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42.884.300,00	42.676.147,00	(208.153,00)	99,51	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	42.884.300,00	42.676.147,00	(208.153,00)	99,51	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.884.300,00	42.676.147,00	(208.153,00)	99,51	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.622.100,00	17.508.385,00	(113.715,00)	99,35	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	17.622.100,00	17.508.385,00	(113.715,00)	99,35	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.622.100,00	17.508.385,00	(113.715,00)	99,35	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	18.168.600,00	18.147.100,00	(21.500,00)	99,88	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	18.168.600,00	18.147.100,00	(21.500,00)	99,88	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.168.600,00	18.147.100,00	(21.500,00)	99,88	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.746.030,00	10.070.400,00	(675.630,00)	93,71	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	10.746.030,00	10.070.400,00	(675.630,00)	93,71	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.746.030,00	10.070.400,00	(675.630,00)	93,71	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	334.844.089,73	334.411.945,00	(432.144,73)	99,87	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	334.844.089,73	334.411.945,00	(432.144,73)	99,87	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	334.844.089,73	334.411.945,00	(432.144,73)	99,87	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	354.174.630,00	350.496.213,00	(3.678.417,00)	98,96	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	100,00	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	100,00	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	310.174.630,00	306.496.213,00	(3.678.417,00)	98,81	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	310.174.630,00	306.496.213,00	(3.678.417,00)	98,81	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	310.174.630,00	306.496.213,00	(3.678.417,00)	98,81	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.612.265,00	76.086.912,00	(1.525.353,00)	98,03	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	77.612.265,00	76.086.912,00	(1.525.353,00)	98,03	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	77.612.265,00	76.086.912,00	(1.525.353,00)	98,03	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.612.265,00	76.086.912,00	(1.525.353,00)	98,03	



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**
Bidang Urusan : **PENGELOLAAN PENGHUBUNG**
Organisasi : **Badan Penghubung Daerah**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	18.404.249.696,00	17.501.504.858,00	(902.744.838,00)	95,09	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.02		PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	6.689.241.460,00	6.409.110.569,00	(280.130.891,00)	95,81	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.02.1.01		Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	6.689.241.460,00	6.409.110.569,00	(280.130.891,00)	95,81	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.02.1.01.0001		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	1.076.012.116,00	863.085.600,00	(212.926.516,00)	80,21	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.02.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.076.012.116,00	863.085.600,00	(212.926.516,00)	80,21	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.02.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.076.012.116,00	863.085.600,00	(212.926.516,00)	80,21	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.02.1.01.0002		Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	1.514.872.334,00	1.480.088.587,00	(34.783.747,00)	97,70	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.02.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	901.607.672,00	868.438.587,00	(33.169.085,00)	96,32	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.02.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	901.607.672,00	868.438.587,00	(33.169.085,00)	96,32	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.02.1.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	613.264.662,00	611.650.000,00	(1.614.662,00)	99,73	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.02.1.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	613.264.662,00	611.650.000,00	(1.614.662,00)	99,73	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.02.1.01.0003		Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	1.482.399.578,00	1.467.622.328,00	(14.777.250,00)	99,00	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.02.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.482.399.578,00	1.467.622.328,00	(14.777.250,00)	99,00	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.02.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.482.399.578,00	1.467.622.328,00	(14.777.250,00)	99,00	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.02.1.01.0005		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	2.615.957.432,00	2.598.314.054,00	(17.643.378,00)	99,32	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.02.1.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.579.301.432,00	2.561.834.054,00	(17.467.378,00)	99,32	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.02.1.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.579.301.432,00	2.561.834.054,00	(17.467.378,00)	99,32	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.02.1.01.0005	5.2	BELANJA MODAL	36.656.000,00	36.480.000,00	(176.000,00)	99,51	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.02.1.01.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.656.000,00	36.480.000,00	(176.000,00)	99,51	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.715.008.236,00	11.092.394.289,00	(622.613.947,00)	94,68	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	615.155.201,00	581.492.727,00	(33.662.474,00)	94,52	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	125.099.999,00	117.975.864,00	(7.124.135,00)	94,30	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	125.099.999,00	117.975.864,00	(7.124.135,00)	94,30	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.099.999,00	117.975.864,00	(7.124.135,00)	94,30	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	414.936.202,00	406.717.026,00	(8.219.176,00)	98,01	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	369.180.512,00	367.067.026,00	(2.113.486,00)	99,42	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	369.180.512,00	367.067.026,00	(2.113.486,00)	99,42	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	45.755.690,00	39.650.000,00	(6.105.690,00)	86,65	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.755.690,00	39.650.000,00	(6.105.690,00)	86,65	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	75.119.000,00	56.799.837,00	(18.319.163,00)	75,61	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	64.518.800,00	56.799.837,00	(7.718.963,00)	88,03	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.518.800,00	56.799.837,00	(7.718.963,00)	88,03	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.01.0006	5.2	BELANJA MODAL	10.600.200,00	0,00	(10.600.200,00)	0,00	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.01.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.600.200,00	0,00	(10.600.200,00)	0,00	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.831.460.778,00	3.719.786.274,00	(111.674.504,00)	97,08	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.553.965.568,00	3.446.057.436,00	(107.908.132,00)	96,96	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.553.965.568,00	3.446.057.436,00	(107.908.132,00)	96,96	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.549.674.768,00	3.442.468.136,00	(107.206.632,00)	96,97	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.290.800,00	3.589.300,00	(701.500,00)	83,65	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	208.651.510,00	204.960.000,00	(3.691.510,00)	98,23	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	208.651.510,00	204.960.000,00	(3.691.510,00)	98,23	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	204.960.000,00	204.960.000,00	0,00	100,00	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.691.510,00	0,00	(3.691.510,00)	0,00	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	68.843.700,00	68.768.838,00	(74.862,00)	99,89	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	68.843.700,00	68.768.838,00	(74.862,00)	99,89	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.843.700,00	68.768.838,00	(74.862,00)	99,89	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	74.618.150,00	72.268.000,00	(2.350.150,00)	96,85	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	64.900.000,00	64.220.000,00	(680.000,00)	98,95	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	64.900.000,00	64.220.000,00	(680.000,00)	98,95	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.900.000,00	64.220.000,00	(680.000,00)	98,95	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	9.718.150,00	8.048.000,00	(1.670.150,00)	82,81	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	9.718.150,00	8.048.000,00	(1.670.150,00)	82,81	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.718.150,00	8.048.000,00	(1.670.150,00)	82,81	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	264.200.000,00	258.607.724,00	(5.592.276,00)	97,88	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	264.200.000,00	258.607.724,00	(5.592.276,00)	97,88	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	102.510.000,00	97.817.724,00	(4.692.276,00)	95,42	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.510.000,00	97.817.724,00	(4.692.276,00)	95,42	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.06.0003	5.2	BELANJA MODAL	161.690.000,00	160.790.000,00	(900.000,00)	99,44	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.06.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	161.690.000,00	160.790.000,00	(900.000,00)	99,44	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.718.507.600,00	1.630.488.000,00	(88.019.600,00)	94,87	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.518.707.600,00	1.437.060.000,00	(81.647.600,00)	94,62	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.07.0002	5.2	BELANJA MODAL	1.518.707.600,00	1.437.060.000,00	(81.647.600,00)	94,62	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.07.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.518.707.600,00	1.437.060.000,00	(81.647.600,00)	94,62	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.07.0005		Pengadaan Mebel	199.800.000,00	193.428.000,00	(6.372.000,00)	96,81	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	199.800.000,00	193.428.000,00	(6.372.000,00)	96,81	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	199.800.000,00	193.428.000,00	(6.372.000,00)	96,81	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.646.220.670,00	3.361.104.137,00	(285.116.533,00)	92,18	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	763.538.000,00	749.279.063,00	(14.258.937,00)	98,13	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	763.538.000,00	749.279.063,00	(14.258.937,00)	98,13	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	763.538.000,00	749.279.063,00	(14.258.937,00)	98,13	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.682.682.670,00	2.411.825.074,00	(270.857.596,00)	89,90	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.682.682.670,00	2.411.825.074,00	(270.857.596,00)	89,90	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.682.682.670,00	2.411.825.074,00	(270.857.596,00)	89,90	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.564.845.837,00	1.468.647.427,00	(96.198.410,00)	93,85	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	510.036.500,00	487.252.200,00	(22.784.300,00)	95,53	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	496.644.500,00	474.052.200,00	(22.592.300,00)	95,45	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	496.644.500,00	474.052.200,00	(22.592.300,00)	95,45	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.09.0002	5.2	BELANJA MODAL	13.392.000,00	13.200.000,00	(192.000,00)	98,56	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.09.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.392.000,00	13.200.000,00	(192.000,00)	98,56	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	136.219.550,00	70.923.995,00	(65.295.555,00)	52,06	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	136.219.550,00	70.923.995,00	(65.295.555,00)	52,06	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.219.550,00	70.923.995,00	(65.295.555,00)	52,06	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	918.589.787,00	910.471.232,00	(8.118.555,00)	99,11	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	918.589.787,00	910.471.232,00	(8.118.555,00)	99,11	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	918.589.787,00	910.471.232,00	(8.118.555,00)	99,11	



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**
Bidang Urusan : **INSPEKTORAT DAERAH**
Organisasi : **Inspektorat**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000		5	BELANJA DAERAH	46.909.639.743,00	45.517.169.676,00	(1.392.470.067,00)	97,03	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	5.180.293.411,00	4.796.617.484,00	(383.675.927,00)	92,59	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	4.203.907.911,00	3.883.396.585,00	(320.511.326,00)	92,37	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.1.01.0001		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	711.156.940,00	609.864.000,00	(101.292.940,00)	85,75	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	711.156.940,00	609.864.000,00	(101.292.940,00)	85,75	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	711.156.940,00	609.864.000,00	(101.292.940,00)	85,75	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.1.01.0002		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	638.388.000,00	638.099.900,00	(288.100,00)	99,95	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	638.388.000,00	638.099.900,00	(288.100,00)	99,95	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	638.388.000,00	638.099.900,00	(288.100,00)	99,95	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.1.01.0003		Reviu Laporan Kinerja	39.735.600,00	39.390.340,00	(345.260,00)	99,13	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	39.735.600,00	39.390.340,00	(345.260,00)	99,13	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.735.600,00	39.390.340,00	(345.260,00)	99,13	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.1.01.0004		Reviu Laporan Keuangan	89.997.081,00	86.559.400,00	(3.437.681,00)	96,18	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	89.997.081,00	86.559.400,00	(3.437.681,00)	96,18	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.997.081,00	86.559.400,00	(3.437.681,00)	96,18	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.1.01.0005		Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	965.630.590,00	965.465.986,00	(164.604,00)	99,98	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.1.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	965.630.590,00	965.465.986,00	(164.604,00)	99,98	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.1.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	965.630.590,00	965.465.986,00	(164.604,00)	99,98	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.1.01.0006		Kerjasama Pengawasan Internal	1.250.000.000,00	1.042.723.635,00	(207.276.365,00)	83,41	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.249.691.000,00	1.042.723.635,00	(206.967.365,00)	83,43	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.249.691.000,00	1.042.723.635,00	(206.967.365,00)	83,43	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.1.01.0006	5.2	BELANJA MODAL	309.000,00	0,00	(309.000,00)	0,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.1.01.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	309.000,00	0,00	(309.000,00)	0,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.1.01.0007		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	508.999.700,00	501.293.324,00	(7.706.376,00)	98,48	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	508.999.700,00	501.293.324,00	(7.706.376,00)	98,48	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	508.999.700,00	501.293.324,00	(7.706.376,00)	98,48	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.1.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	976.385.500,00	913.220.899,00	(63.164.601,00)	93,53	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.1.02.0001		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	68.398.000,00	68.242.500,00	(155.500,00)	99,77	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	68.398.000,00	68.242.500,00	(155.500,00)	99,77	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.398.000,00	68.242.500,00	(155.500,00)	99,77	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.1.02.0002		Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	907.987.500,00	844.978.399,00	(63.009.101,00)	93,06	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	907.987.500,00	844.978.399,00	(63.009.101,00)	93,06	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	907.987.500,00	844.978.399,00	(63.009.101,00)	93,06	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.757.361.624,00	1.680.165.285,00	(77.196.339,00)	95,60	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03.1.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	812.721.000,00	809.731.575,00	(2.989.425,00)	99,63	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03.1.01.0001		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	390.824.000,00	388.239.875,00	(2.584.125,00)	99,33	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	390.824.000,00	388.239.875,00	(2.584.125,00)	99,33	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	390.824.000,00	388.239.875,00	(2.584.125,00)	99,33	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03.1.01.0002		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	421.897.000,00	421.491.700,00	(405.300,00)	99,90	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	421.897.000,00	421.491.700,00	(405.300,00)	99,90	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	421.897.000,00	421.491.700,00	(405.300,00)	99,90	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03.1.02		Pendampingan dan Asistensi	944.640.624,00	870.433.710,00	(74.206.914,00)	92,14	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03.1.02.0001		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	268.909.084,00	268.606.079,00	(303.005,00)	99,88	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	268.909.084,00	268.606.079,00	(303.005,00)	99,88	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	268.909.084,00	268.606.079,00	(303.005,00)	99,88	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03.1.02.0002		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	75.800.500,00	67.544.400,00	(8.256.100,00)	89,10	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	75.800.500,00	67.544.400,00	(8.256.100,00)	89,10	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.800.500,00	67.544.400,00	(8.256.100,00)	89,10	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03.1.02.0003		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	435.770.000,00	394.622.100,00	(41.147.900,00)	90,55	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	435.770.000,00	394.622.100,00	(41.147.900,00)	90,55	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	435.770.000,00	394.622.100,00	(41.147.900,00)	90,55	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03.1.02.0004		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	164.161.040,00	139.661.131,00	(24.499.909,00)	85,07	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03.1.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	164.161.040,00	139.661.131,00	(24.499.909,00)	85,07	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03.1.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	164.161.040,00	139.661.131,00	(24.499.909,00)	85,07	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	39.971.984.708,00	39.040.386.907,00	(931.597.801,00)	97,66	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	223.431.200,00	162.956.350,00	(60.474.850,00)	72,93	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	153.024.000,00	106.733.850,00	(46.290.150,00)	69,74	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	153.024.000,00	106.733.850,00	(46.290.150,00)	69,74	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.024.000,00	106.733.850,00	(46.290.150,00)	69,74	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.407.200,00	56.222.500,00	(14.184.700,00)	79,85	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	70.407.200,00	56.222.500,00	(14.184.700,00)	79,85	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.407.200,00	56.222.500,00	(14.184.700,00)	79,85	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28.535.323.519,00	28.441.871.918,00	(93.451.601,00)	99,67	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.998.003.519,00	27.915.170.618,00	(82.832.901,00)	99,70	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	27.998.003.519,00	27.915.170.618,00	(82.832.901,00)	99,70	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	27.998.003.519,00	27.915.170.618,00	(82.832.901,00)	99,70	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	494.750.000,00	484.452.000,00	(10.298.000,00)	97,91	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	494.750.000,00	484.452.000,00	(10.298.000,00)	97,91	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	492.840.000,00	484.452.000,00	(8.388.000,00)	98,29	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.910.000,00	0,00	(1.910.000,00)	0,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	42.570.000,00	42.249.300,00	(320.700,00)	99,24	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	42.570.000,00	42.249.300,00	(320.700,00)	99,24	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.570.000,00	42.249.300,00	(320.700,00)	99,24	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	59.203.000,00	40.736.600,00	(18.466.400,00)	68,80	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.03.0001		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	25.454.000,00	7.500.000,00	(17.954.000,00)	29,46	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	25.454.000,00	7.500.000,00	(17.954.000,00)	29,46	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.454.000,00	7.500.000,00	(17.954.000,00)	29,46	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	33.749.000,00	33.236.600,00	(512.400,00)	98,48	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	33.749.000,00	33.236.600,00	(512.400,00)	98,48	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.749.000,00	33.236.600,00	(512.400,00)	98,48	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.183.163.500,00	1.987.100.445,00	(196.063.055,00)	91,01	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	208.765.000,00	181.440.000,00	(27.325.000,00)	86,91	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	208.765.000,00	181.440.000,00	(27.325.000,00)	86,91	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	208.765.000,00	181.440.000,00	(27.325.000,00)	86,91	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.05.0003		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	103.386.000,00	58.320.345,00	(45.065.655,00)	56,41	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	103.386.000,00	58.320.345,00	(45.065.655,00)	56,41	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.386.000,00	58.320.345,00	(45.065.655,00)	56,41	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.794.058.500,00	1.706.340.100,00	(87.718.400,00)	95,11	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	1.794.058.500,00	1.706.340.100,00	(87.718.400,00)	95,11	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.794.058.500,00	1.706.340.100,00	(87.718.400,00)	95,11	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.05.0010		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	76.954.000,00	41.000.000,00	(35.954.000,00)	53,27	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.05.0010	5.1	BELANJA OPERASI	76.954.000,00	41.000.000,00	(35.954.000,00)	53,27	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.05.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.954.000,00	41.000.000,00	(35.954.000,00)	53,27	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.713.854.498,00	5.424.618.976,00	(289.235.522,00)	94,93	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.000.000,00	99.707.970,00	(292.030,00)	99,70	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	99.707.970,00	(292.030,00)	99,70	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.707.970,00	(292.030,00)	99,70	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	382.287.000,00	376.950.000,00	(5.337.000,00)	98,60	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	382.287.000,00	376.950.000,00	(5.337.000,00)	98,60	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	382.287.000,00	376.950.000,00	(5.337.000,00)	98,60	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.000.000,00	49.014.050,00	(985.950,00)	98,02	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.014.050,00	(985.950,00)	98,02	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.014.050,00	(985.950,00)	98,02	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	594.735.000,00	584.322.138,00	(10.412.862,00)	98,24	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	593.190.000,00	584.322.138,00	(8.867.862,00)	98,50	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	593.190.000,00	584.322.138,00	(8.867.862,00)	98,50	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.06.0004	5.2	BELANJA MODAL	1.545.000,00	0,00	(1.545.000,00)	0,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.06.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.545.000,00	0,00	(1.545.000,00)	0,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	350.000.000,00	275.097.260,00	(74.902.740,00)	78,59	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	350.000.000,00	275.097.260,00	(74.902.740,00)	78,59	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	275.097.260,00	(74.902.740,00)	78,59	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	25.500.000,00	25.320.000,00	(180.000,00)	99,29	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	25.500.000,00	25.320.000,00	(180.000,00)	99,29	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.500.000,00	25.320.000,00	(180.000,00)	99,29	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.137.856.398,00	3.996.978.392,00	(140.878.006,00)	96,59	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	4.137.856.398,00	3.996.978.392,00	(140.878.006,00)	96,59	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.137.856.398,00	3.996.978.392,00	(140.878.006,00)	96,59	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.06.0011		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	73.476.100,00	17.229.166,00	(56.246.934,00)	23,44	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.06.0011	5.1	BELANJA OPERASI	73.476.100,00	17.229.166,00	(56.246.934,00)	23,44	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.06.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.476.100,00	17.229.166,00	(56.246.934,00)	23,44	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.261.920.900,00	1.253.524.200,00	(8.396.700,00)	99,33	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.07.0001		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.025.400.000,00	1.024.000.000,00	(1.400.000,00)	99,86	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.07.0001	5.2	BELANJA MODAL	1.025.400.000,00	1.024.000.000,00	(1.400.000,00)	99,86	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.07.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.025.400.000,00	1.024.000.000,00	(1.400.000,00)	99,86	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.07.0005		Pengadaan Mebel	219.985.900,00	215.024.200,00	(4.961.700,00)	97,74	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	6.927.200,00	2.000.000,00	(4.927.200,00)	28,87	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.927.200,00	2.000.000,00	(4.927.200,00)	28,87	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	213.058.700,00	213.024.200,00	(34.500,00)	99,98	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	213.058.700,00	213.024.200,00	(34.500,00)	99,98	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.535.000,00	14.500.000,00	(2.035.000,00)	87,69	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	16.535.000,00	14.500.000,00	(2.035.000,00)	87,69	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.535.000,00	14.500.000,00	(2.035.000,00)	87,69	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	827.188.091,00	826.462.278,00	(725.813,00)	99,91	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	45.815.200,00	45.736.000,00	(79.200,00)	99,82	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	45.815.200,00	45.736.000,00	(79.200,00)	99,82	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.815.200,00	45.736.000,00	(79.200,00)	99,82	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.000.000,00	59.360.000,00	(640.000,00)	98,93	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	59.360.000,00	(640.000,00)	98,93	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	59.360.000,00	(640.000,00)	98,93	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	721.372.891,00	721.366.278,00	(6.613,00)	99,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	721.372.891,00	721.366.278,00	(6.613,00)	99,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	721.372.891,00	721.366.278,00	(6.613,00)	99,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.167.900.000,00	903.116.140,00	(264.783.860,00)	77,32	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	275.000.000,00	271.817.600,00	(3.182.400,00)	98,84	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	275.000.000,00	271.817.600,00	(3.182.400,00)	98,84	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	275.000.000,00	271.817.600,00	(3.182.400,00)	98,84	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	370.265.000,00	358.556.000,00	(11.709.000,00)	96,83	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	370.265.000,00	358.556.000,00	(11.709.000,00)	96,83	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	370.265.000,00	358.556.000,00	(11.709.000,00)	96,83	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	98.000.000,00	96.095.000,00	(1.905.000,00)	98,05	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	98.000.000,00	96.095.000,00	(1.905.000,00)	98,05	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.000.000,00	96.095.000,00	(1.905.000,00)	98,05	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	424.635.000,00	176.647.540,00	(247.987.460,00)	41,59	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	424.635.000,00	176.647.540,00	(247.987.460,00)	41,59	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	424.635.000,00	176.647.540,00	(247.987.460,00)	41,59	



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**
Bidang Urusan : **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
Organisasi : **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	185.593.956.247,00	180.159.124.503,00	(5.434.831.744,00)	97,07	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	2.342.809.214,00	2.319.530.192,00	(23.279.022,00)	99,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.342.809.214,00	2.319.530.192,00	(23.279.022,00)	99,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.1.01.0004		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	542.252.170,00	534.156.396,00	(8.095.774,00)	98,50	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	542.252.170,00	534.156.396,00	(8.095.774,00)	98,50	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.252.170,00	104.156.396,00	(8.095.774,00)	92,78	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.1.01.0004	5.1.05	Belanja Hibah	430.000.000,00	430.000.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.1.01.0005		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	86.687.844,00	78.267.097,00	(8.420.747,00)	90,28	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.1.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	86.687.844,00	78.267.097,00	(8.420.747,00)	90,28	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.1.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.687.844,00	78.267.097,00	(8.420.747,00)	90,28	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.1.01.0012		Pembentukan Paskibraka	1.713.869.200,00	1.707.106.699,00	(6.762.501,00)	99,60	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.1.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	1.713.869.200,00	1.707.106.699,00	(6.762.501,00)	99,60	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.1.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.713.869.200,00	1.707.106.699,00	(6.762.501,00)	99,60	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	125.182.726.928,00	124.960.903.948,00	(221.822.980,00)	99,82	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	125.182.726.928,00	124.960.903.948,00	(221.822.980,00)	99,82	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.1.01.0003		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	34.559.939.696,00	34.559.341.524,00	(598.172,00)	99,99	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	34.559.939.696,00	34.559.341.524,00	(598.172,00)	99,99	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.315.096,00	82.716.924,00	(598.172,00)	99,28	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.1.01.0003	5.1.05	Belanja Hibah	34.476.624.600,00	34.476.624.600,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.1.01.0004		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	89.702.925.832,00	89.686.425.532,00	(16.500.300,00)	99,98	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	89.702.925.832,00	89.686.425.532,00	(16.500.300,00)	99,98	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.732.500,00	35.241.200,00	(16.491.300,00)	68,12	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.1.01.0004	5.1.05	Belanja Hibah	89.651.193.332,00	89.651.184.332,00	(9.000,00)	99,99	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.1.01.0005		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	919.861.400,00	715.136.892,00	(204.724.508,00)	77,74	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.1.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	919.861.400,00	715.136.892,00	(204.724.508,00)	77,74	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.1.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	919.861.400,00	715.136.892,00	(204.724.508,00)	77,74	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	4.327.203.459,00	4.286.595.665,00	(40.607.794,00)	99,06	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	4.327.203.459,00	4.286.595.665,00	(40.607.794,00)	99,06	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.1.01.0003		Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50.000.000,00	47.570.050,00	(2.429.950,00)	95,14	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	47.570.050,00	(2.429.950,00)	95,14	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	47.570.050,00	(2.429.950,00)	95,14	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.1.01.0004		Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4.200.031.200,00	4.162.550.190,00	(37.481.010,00)	99,10	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	4.200.031.200,00	4.162.550.190,00	(37.481.010,00)	99,10	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.031.200,00	278.430.500,00	(21.600.700,00)	92,80	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.1.01.0004	5.1.05	Belanja Hibah	3.900.000.000,00	3.884.119.690,00	(15.880.310,00)	99,59	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.1.01.0005		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	77.172.259,00	76.475.425,00	(696.834,00)	99,09	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.1.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	77.172.259,00	76.475.425,00	(696.834,00)	99,09	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.1.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.172.259,00	76.475.425,00	(696.834,00)	99,09	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1.715.851.224,00	1.683.077.508,00	(32.773.716,00)	98,08	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1.715.851.224,00	1.683.077.508,00	(32.773.716,00)	98,08	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.1.01.0003		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	183.859.052,00	151.856.324,00	(32.002.728,00)	82,59	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	183.859.052,00	151.856.324,00	(32.002.728,00)	82,59	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	183.859.052,00	151.856.324,00	(32.002.728,00)	82,59	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.1.01.0004		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.441.442.674,00	1.441.055.910,00	(386.764,00)	99,97	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.441.442.674,00	1.441.055.910,00	(386.764,00)	99,97	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	186.442.674,00	186.055.910,00	(386.764,00)	99,79	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.1.01.0004	5.1.05	Belanja Hibah	1.255.000.000,00	1.255.000.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.1.01.0005		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	90.549.498,00	90.165.274,00	(384.224,00)	99,57	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.1.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	90.549.498,00	90.165.274,00	(384.224,00)	99,57	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.1.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.549.498,00	90.165.274,00	(384.224,00)	99,57	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	37.645.236.084,00	33.896.599.778,00	(3.748.636.306,00)	90,04	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	37.645.236.084,00	33.896.599.778,00	(3.748.636.306,00)	90,04	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.1.01.0003		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	243.571.684,00	202.549.206,00	(41.022.478,00)	83,15	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	243.571.684,00	202.549.206,00	(41.022.478,00)	83,15	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	243.571.684,00	202.549.206,00	(41.022.478,00)	83,15	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.1.01.0004		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	31.281.536.000,00	30.403.872.697,00	(877.663.303,00)	97,19	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	31.281.536.000,00	30.403.872.697,00	(877.663.303,00)	97,19	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.831.536.000,00	2.664.708.333,00	(166.827.667,00)	94,10	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.1.01.0004	5.1.05	Belanja Hibah	28.450.000.000,00	27.739.164.364,00	(710.835.636,00)	97,50	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.1.01.0005		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	296.672.400,00	288.223.375,00	(8.449.025,00)	97,15	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.1.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	296.672.400,00	288.223.375,00	(8.449.025,00)	97,15	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.1.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	296.672.400,00	288.223.375,00	(8.449.025,00)	97,15	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.1.01.0006		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	5.823.456.000,00	3.001.954.500,00	(2.821.501.500,00)	51,54	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.823.456.000,00	3.001.954.500,00	(2.821.501.500,00)	51,54	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.050.623.900,00	3.001.954.500,00	(48.669.400,00)	98,40	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.1.01.0006	5.1.05	Belanja Hibah	2.772.832.100,00	0,00	(2.772.832.100,00)	0,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.380.129.338,00	13.012.417.412,00	(1.367.711.926,00)	90,48	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	497.280.786,00	466.548.432,00	(30.732.354,00)	93,81	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	313.966.787,00	298.298.305,00	(15.668.482,00)	95,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	313.966.787,00	298.298.305,00	(15.668.482,00)	95,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	313.966.787,00	298.298.305,00	(15.668.482,00)	95,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	183.313.999,00	168.250.127,00	(15.063.872,00)	91,78	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	183.313.999,00	168.250.127,00	(15.063.872,00)	91,78	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	183.313.999,00	168.250.127,00	(15.063.872,00)	91,78	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.823.626.442,00	8.465.845.869,00	(357.780.573,00)	95,94	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.074.549.742,00	7.741.610.832,00	(332.938.910,00)	95,87	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.074.549.742,00	7.741.610.832,00	(332.938.910,00)	95,87	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	8.074.549.742,00	7.741.610.832,00	(332.938.910,00)	95,87	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	686.960.000,00	663.556.000,00	(23.404.000,00)	96,59	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	686.960.000,00	663.556.000,00	(23.404.000,00)	96,59	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	686.280.000,00	663.556.000,00	(22.724.000,00)	96,68	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	0,00	(680.000,00)	0,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	62.116.700,00	60.679.037,00	(1.437.663,00)	97,68	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	62.116.700,00	60.679.037,00	(1.437.663,00)	97,68	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.116.700,00	60.679.037,00	(1.437.663,00)	97,68	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	47.830.000,00	47.830.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.830.000,00	47.830.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.305.170.244,00	1.266.413.589,00	(38.756.655,00)	97,03	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.277.643,00	41.261.750,00	(15.893,00)	99,96	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	41.277.643,00	41.261.750,00	(15.893,00)	99,96	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.277.643,00	41.261.750,00	(15.893,00)	99,96	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	162.333.600,00	158.531.000,00	(3.802.600,00)	97,65	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	162.333.600,00	158.531.000,00	(3.802.600,00)	97,65	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.333.600,00	158.531.000,00	(3.802.600,00)	97,65	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	958.200.001,00	924.161.839,00	(34.038.162,00)	96,44	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	958.200.001,00	924.161.839,00	(34.038.162,00)	96,44	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	958.200.001,00	924.161.839,00	(34.038.162,00)	96,44	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06.0011		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	128.859.000,00	127.959.000,00	(900.000,00)	99,30	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06.0011	5.1	BELANJA OPERASI	128.859.000,00	127.959.000,00	(900.000,00)	99,30	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.859.000,00	127.959.000,00	(900.000,00)	99,30	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	908.030.000,00	246.629.000,00	(661.401.000,00)	27,16	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.07.0011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	908.030.000,00	246.629.000,00	(661.401.000,00)	27,16	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.07.0011	5.1	BELANJA OPERASI	21.300.000,00	2.000.000,00	(19.300.000,00)	9,38	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.07.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.300.000,00	2.000.000,00	(19.300.000,00)	9,38	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.07.0011	5.2	BELANJA MODAL	886.730.000,00	244.629.000,00	(642.101.000,00)	27,58	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.07.0011	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	886.730.000,00	244.629.000,00	(642.101.000,00)	27,58	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.609.910.090,00	2.342.036.122,00	(267.873.968,00)	89,73	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.328.665.845,00	1.198.768.500,00	(129.897.345,00)	90,22	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.328.665.845,00	1.198.768.500,00	(129.897.345,00)	90,22	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.328.665.845,00	1.198.768.500,00	(129.897.345,00)	90,22	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	39.980.000,00	39.980.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.980.000,00	39.980.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.241.264.245,00	1.103.287.622,00	(137.976.623,00)	88,88	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.241.264.245,00	1.103.287.622,00	(137.976.623,00)	88,88	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.241.264.245,00	1.103.287.622,00	(137.976.623,00)	88,88	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188.281.776,00	177.114.400,00	(11.167.376,00)	94,06	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	182.109.776,00	170.942.400,00	(11.167.376,00)	93,86	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	182.109.776,00	170.942.400,00	(11.167.376,00)	93,86	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	182.109.776,00	170.942.400,00	(11.167.376,00)	93,86	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	6.172.000,00	6.172.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.172.000,00	6.172.000,00	0,00	100,00	

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

dto

ANSAR AHMAD



PROVINSI KEPULAUAN RIAU



REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.718.849.291.082	1.569.843.247.800	281.268.266.032	260.545.068.855	0	0	0	0
1.01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	897.500.284.475	878.917.531.498	178.735.873.982	170.276.941.193	0	0	0	0
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pendidikan	895.506.248.200	877.156.761.845	178.486.123.982	170.099.608.886	0	0	0	0
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	690.544.352.801	680.817.176.237,90	5.072.226.222	5.580.687.766,84	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	970.016.113	748.872.347,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	554.198.213	419.518.097,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	155.708.000	144.242.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	49.976.000	19.611.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	210.133.900	165.501.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	566.697.494.003	561.719.428.666,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	562.020.207.403	558.002.381.166,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.514.568.000	3.578.678.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	137.030.600	133.489.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	25.688.000	4.880.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	56.737.820	56.135.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	27.277.500	27.242.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	29.460.320	28.892.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.634.349.500	996.431.999,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	249.312.000	243.671.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	943.590.400	661.581.442,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	11.097.600	3.372.907,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	430.349.500	87.806.350,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.702.599.237	1.525.828.662,00	37.470.862	680.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.895.920	18.777.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	88.332.607	1.576.000,00	36.790.862	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	72.910.300	72.909.100,00	680.000	680.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	299.758.387	137.933.520,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	227.301.900	191.768.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	43.920.000	29.740.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	116.793.400	85.832.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.699.320.103	900.468.792,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	104.366.620	86.823.650,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	491.867.850	370.350.000,00	1.261.372.629	1.119.754.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	599.649.629	458.124.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	0	0,00	661.723.000	661.630.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	491.867.850	370.350.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104.672.581.179	95.665.853.795,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.728.960	1.699.802,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.810.657.554	1.060.294.243,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	231.618.500	122.043.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	102.628.576.165	94.481.816.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.263.511.502	1.774.343.006,00	1.982.390.277	818.963.991,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	597.344.502	260.990.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	51.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.614.467.000	1.513.352.706,00	1.982.390.277	818.963.991,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	11.055.195.597	17.959.932.762,90	1.790.992.454	3.641.289.775,84	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	11.055.195.597	17.959.932.762,90	1.790.992.454	3.641.289.775,84	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	204.113.102.207	195.626.015.548,59	173.413.897.760	164.518.921.119,22	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	115.052.408.847	110.210.151.995,00	104.163.821.020	101.906.321.657,77	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	147.435.600	143.147.541,00	2.235.000.000	2.189.942.899,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0010	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	101.541.200	91.693.210,00	846.000.000	841.188.739,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0011	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	60.701.800	58.738.901,00	962.090.000	949.973.506,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0012	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	197.050.000	181.521.075,00	7.600.250.000	7.285.943.438,77	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.770.015.880	1.645.268.651,00	12.189.612.633	11.567.242.346,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	519.284.300	498.999.479,00	13.692.261.500	13.478.088.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	258.832.600	244.691.702,00	2.299.986.000	2.276.672.609,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0027	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	48.656.000	39.783.220,00	102.000.000	101.421.243,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0028	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	163.302.600	154.291.151,00	1.173.120.000	1.163.461.309,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0036	Pengadaan Mebel Sekolah	93.798.160	92.679.360,00	9.379.761.200	9.354.390.970,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0038	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	780.000	0,00	1.551.600.000	1.550.440.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	10.092.582.539	8.823.417.585,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0041	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	173.019.974	151.624.298,00	3.189.950.000	3.189.670.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	17.594.244.940	16.546.216.225,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	695.432.726	667.608.384,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.580.331.600	1.339.929.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	524.526.000	106.214.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	212.091.480	140.047.610,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	78.821.973.387	77.487.478.338,00	30.402.706.613	29.663.587.624,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	75.602.000	62.306.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0067	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	47.501.000	47.145.720,00	240.000.000	238.681.594,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	169.197.080	164.766.603,00	1.228.218.600	1.213.225.728,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0070	Pembangunan Ruang Laboratorium	461.735.600	431.337.194,00	7.781.637.000	7.673.867.136,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0071	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	428.331.011	402.237.222,00	4.176.014.954	4.134.872.581,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru	639.619.370	589.884.446,00	4.988.612.520	4.909.427.851,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0073	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	13.500.000	13.484.280,00	125.000.000	124.224.084,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	161.322.000	85.640.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	77.208.915.460	75.020.462.274,00	66.522.489.240	60.557.759.776,45	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	474.692.300	410.990.470,00	7.456.994.017	7.128.047.229,33	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0005	Pembangunan Ruang Laboratorium	412.412.000	399.270.436,00	4.455.000.000	4.386.860.439,12	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0006	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	22.500.000	22.192.230,00	145.000.000	141.873.620,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	602.936.909	535.916.813,35	5.314.622.624	4.671.184.130,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0016	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	124.708.583	104.534.256,50	543.717.587	502.374.540,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0018	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	219.350.900	196.278.975,00	1.630.000.000	1.448.352.780,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah	67.197.140	52.333.500,00	2.656.152.848	2.639.624.460,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	6.466.334.400	4.879.249.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0033	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	219.258.658	120.980.135,00	14.040.077.342	13.401.553.327,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	7.782.760.370	5.791.174.447,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	410.137.909	341.700.891,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.965.942.240	1.323.743.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	792.323.634	291.336.798,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	234.696.560	206.292.550,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	55.783.085.322	59.031.899.369,00	21.163.934.678	18.716.785.738,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	66.730.600	66.463.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0062	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	508.350.000	485.598.325,65	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru	616.509.935	417.210.723,50	6.924.913.944	5.358.078.963,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	277.273.800	273.101.854,00	2.192.076.200	2.163.024.550,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	161.714.200	70.194.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	11.851.777.900	10.395.401.279,59	2.727.587.500	2.054.839.685,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	283.933.000	278.753.466,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	174.099.400	171.561.675,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	285.880.000	284.582.910,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	679.975.750	646.044.589,29	145.254.000	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0010	Pembangunan Kantin Sekolah	367.699.850	363.516.433,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0035	Pengadaan Mebel Sekolah	170.000.000	167.595.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0038	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	677.000.000	132.781.665,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0040	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	249.090.000	238.486.500,00	70.000.000	69.627.500,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	396.700.000	394.751.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	257.479.000	235.852.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	185.336.150	108.048.083,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	7.917.946.500	7.193.637.575,00	1.480.253.500	962.904.444,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	49.761.600	38.422.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru	19.640.000	16.058.400,00	613.480.000	604.438.500,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	80.426.650	70.864.559,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0079	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	56.810.000	54.444.223,50	418.600.000	417.869.241,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	405.402.792	330.631.647,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	338.552.792	265.530.647,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.03.1.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	338.552.792	265.530.647,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.03.1.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	66.850.000	65.101.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.03.1.02.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	66.850.000	65.101.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	379.760.000	321.180.012,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	379.760.000	321.180.012,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.04.1.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	200.000.000	150.730.312,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.04.1.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	179.760.000	170.449.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	63.630.400	61.758.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.05.1.01	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	45.711.200	44.639.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.05.1.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	45.711.200	44.639.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.05.1.02	Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	17.919.200	17.119.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.05.1.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	17.919.200	17.119.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0001		BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN	1.994.036.275	1.760.769.653	249.750.000	177.332.307	0	0	0	0
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0001	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.994.036.275	1.760.769.653,00	249.750.000	177.332.307,65	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0001	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	43.844.000	36.256.684,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0001	1.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	43.844.000	36.256.684,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0001	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	129.549.511	89.482.749,00	71.750.000	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0001	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0001	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.076.500	7.356.500,00	71.750.000	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0001	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0001	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	82.473.011	82.126.249,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0001	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0001	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.734.421.256	1.613.141.020,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0001	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	172.280.000	120.050.618,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0001	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.562.141.256	1.493.090.402,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0001	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.221.508	21.889.200,00	178.000.000	177.332.307,65	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0001	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	86.221.508	21.889.200,00	178.000.000	177.332.307,65	0	0,00	0	0,00
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	399.555.768.759	392.231.762.929	31.221.834.097	29.096.066.372	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000		Dinas Kesehatan	75.401.862.721	72.066.686.315	6.103.257.525	5.741.704.766	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	25.825.042.178	25.326.462.061,00	244.733.000	243.333.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	242.195.682	241.997.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	369.000	369.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	141.527.930	141.370.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.298.752	100.257.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.696.616.667	20.394.591.337,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.846.832.876	19.546.137.637,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	832.312.500	832.224.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	17.471.291	16.229.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	48.120.900	46.332.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	48.120.900	46.332.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.914.000	7.459.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	7.914.000	7.459.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	958.931.329	926.259.357,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.116.719	21.103.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	107.423.800	107.423.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.962.400	850.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	67.917.160	65.171.910,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	33.560.000	24.049.854,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	19.000.000	17.097.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	51.000.000	44.894.650,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	653.951.250	645.668.243,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	35.000.000	35.000.000,00	244.733.000	243.333.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	0	0,00	23.100.000	23.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	221.633.000	220.333.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.000.000	35.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.174.652.522	3.021.064.129,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	132.014.233	110.996.008,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	79.177.300	77.646.196,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.963.460.989	2.832.421.925,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	661.611.078	653.757.488,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	398.600.000	390.992.350,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.465.940	15.220.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	247.545.138	247.545.138,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	38.578.973.816	35.760.546.855,00	5.858.524.525	5.498.371.766,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	6.030.021.852	4.221.876.819,00	5.854.670.525	5.494.517.766,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.01.0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.219.859.310	859.424.061,00	1.754.670.525	1.394.567.766,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.01.0006	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	534.300.200	414.525.689,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	976.824.000	0,00	4.100.000.000	4.099.950.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	647.768.000	628.573.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2.651.270.342	2.319.353.669,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	32.195.518.464	31.195.829.366,00	3.854.000	3.854.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	45.074.000	44.314.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	45.000.000	44.451.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1.111.388.800	1.087.053.650,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	51.077.500	51.047.800,00	3.854.000	3.854.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	934.646.050	925.104.450,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	63.101.600	62.755.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.831.329.861	1.463.111.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	167.995.400	165.922.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.041.634.106	1.036.000.656,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	46.855.400	46.855.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	147.167.000	147.167.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	25.427.534.547	24.847.026.053,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	579.737.000	572.046.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	554.000.000	553.995.957,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0021	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	148.977.200	148.977.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	308.359.500	298.553.470,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	308.359.500	298.553.470,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	45.074.000	44.287.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	45.074.000	44.287.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	10.237.113.827	10.219.702.669,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	10.096.730.252	10.080.442.469,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	10.043.079.652	10.027.213.869,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.1.01.0002	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	53.650.600	53.228.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	140.383.575	139.260.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	107.059.200	106.242.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	33.324.375	33.017.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	71.603.200	71.446.730,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	71.603.200	71.446.730,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	71.603.200	71.446.730,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	689.129.700	688.528.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	689.129.700	688.528.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	689.129.700	688.528.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001		Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	235.045.373.010	233.230.226.401	19.466.987.472	18.606.362.212	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	227.878.396.136	226.740.287.627,00	8.492.592.363	8.139.891.500,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.005.277	61.317.860,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.005.277	61.317.860,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	83.130.849.909	82.222.546.927,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	82.173.893.493	81.275.942.821,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	924.783.210	916.030.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	22.174.206	22.174.106,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	9.999.000	8.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.880.000	30.564.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.880.000	30.564.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	274.547.983	240.404.469,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	149.984.199	140.352.119,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	42.394.084	42.367.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	18.469.700	17.962.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63.700.000	39.723.350,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	195.592.363	21.208.000,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	195.592.363	21.208.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.437.961.233	15.615.399.288,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.333.146	5.928.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.722.790.126	6.377.509.333,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.136.000	38.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.669.701.961	9.193.461.955,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.459.073.664	4.100.468.020,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60.008.200	56.424.020,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.010.520	150.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.249.054.944	3.894.044.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	123.445.078.069	124.469.586.563,00	8.297.000.000	8.118.683.500,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	123.445.078.069	124.469.586.563,00	8.297.000.000	8.118.683.500,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	595.170.094	325.830.774,00	10.974.395.109	10.466.470.712,32	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	520.310.278	257.500.206,00	10.974.395.109	10.466.470.712,32	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	64.380.000	58.213.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	0	0,00	2.914.429.913	2.667.037.329,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	312.946.072	56.303.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit	142.984.206	142.984.206,00	8.059.965.196	7.799.433.383,32	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	74.859.816	68.330.568,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	49.873.548	45.704.768,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	24.986.268	22.625.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	6.571.806.779	6.164.108.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	6.471.962.679	6.071.988.049,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	6.471.962.679	6.071.988.049,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	99.844.100	92.119.951,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	99.844.100	92.119.951,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002		Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	89.108.533.028	86.934.850.213	5.651.589.100	4.747.999.394	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	79.348.563.898	77.715.591.929,00	1.905.565.300	1.658.877.894,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	246.559.948	232.210.686,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	216.822.448	205.133.186,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29.737.500	27.077.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	48.357.032.381	48.075.850.981,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	47.585.005.081	47.322.346.981,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	703.704.000	685.388.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	68.323.300	68.116.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.000.000	24.306.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	25.000.000	24.306.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	646.229.700	567.473.632,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.000.000	98.269.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.000.000	70.022.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	261.282.300	192.223.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	60.000.000	58.359.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	149.947.400	148.600.632,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.303.833.494	1.271.743.614,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.303.833.494	1.271.743.614,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.411.014.876	4.148.200.659,00	449.865.300	388.702.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.731.200	9.609.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	177.941.000	176.938.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	64.432.300	45.106.759,00	53.115.300	53.075.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	50.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	580.798.500	511.815.000,00	88.750.000	88.750.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.245.907.300	1.140.220.300,00	308.000.000	246.877.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.979.204.576	1.964.720.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	300.000.000	299.790.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	24.358.893.499	23.395.806.357,00	1.455.700.000	1.270.175.894,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	24.358.893.499	23.395.806.357,00	1.455.700.000	1.270.175.894,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	4.410.884.834	3.974.505.235,00	3.746.023.800	3.089.121.500,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	2.636.527.364	2.219.265.032,00	3.673.795.300	3.019.611.500,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	26.351.000	26.351.000,00	253.932.000	253.905.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	25.800.700	24.420.000,00	2.078.999.300	1.617.066.500,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	0	0,00	1.159.864.000	1.016.540.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2.584.375.664	2.168.494.032,00	181.000.000	132.100.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.735.169.470	1.720.861.598,00	57.228.500	54.560.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	828.471.500	822.747.548,00	57.228.500	54.560.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.02.0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	906.697.970	898.114.050,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0	0,00	15.000.000	14.950.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0	0,00	15.000.000	14.950.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	39.188.000	34.378.605,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	39.188.000	34.378.605,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	5.349.084.296	5.244.753.049,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	5.175.135.154	5.075.006.807,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	5.175.135.154	5.075.006.807,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	173.949.142	169.746.242,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	173.949.142	169.746.242,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	105.475.896.245	85.145.320.214	67.120.064.403	58.597.691.049	0	0	0	0
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	99.678.174.242	79.592.629.321	67.120.064.403	58.597.691.049	0	0	0	0
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	27.305.543.940	26.641.096.522,00	836.518.853	755.950.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	539.929.768	517.198.977,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	90.757.700	77.201.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	365.044.128	362.836.737,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84.127.940	77.160.940,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.711.217.003	19.573.063.151,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.201.595.063	18.096.884.211,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.424.634.000	1.401.348.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	84.987.940	74.830.940,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	74.854.000	70.406.450,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	74.854.000	70.406.450,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	160.907.500	157.699.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	160.907.500	157.699.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.723.032.712	1.602.450.795,00	237.739.853	157.250.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.748.000	14.722.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	93.240.000	82.500.000,00	237.739.853	157.250.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	92.912.734	87.448.298,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	257.653.520	224.110.050,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	184.094.069	178.086.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	26.603.400	11.620.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	265.028.000	226.579.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	787.752.989	777.384.247,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	255.283.866	254.260.971,00	598.779.000	598.700.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	133.866	0,00	598.779.000	598.700.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	55.150.000	55.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000	199.260.971,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.209.654.849	4.002.532.578,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26.740.000	12.173.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	864.485.713	750.083.429,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.318.429.136	3.240.276.149,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	630.664.242	463.484.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	451.394.242	416.659.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.660.000	46.825.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	127.610.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	5.109.083.909	1.071.538.261,00	2.075.888.600	1.149.877.370,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5.109.083.909	1.071.538.261,00	2.075.888.600	1.149.877.370,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.02.1.01.0009	Pembangunan Tanggul Sungai	262.464.000	173.626.690,00	1.018.017.300	1.017.935.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.02.1.01.0075	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	271.133.994	257.638.633,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.02.1.01.0079	Normalisasi/Restorasi Sungai	3.878.656.000	73.196.572,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.02.1.01.0096	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	295.137.670	187.331.221,00	887.871.300	131.942.370,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.02.1.01.0118	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	40.854.000	18.906.900,00	170.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.02.1.01.0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	360.838.245	360.838.245,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.973.795.204	1.924.273.736,00	444.712.100	359.957.529,37	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.973.795.204	1.924.273.736,00	444.712.100	359.957.529,37	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.03.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.783.071.900	1.743.385.325,00	84.712.100	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.03.1.01.0018	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	190.723.304	180.888.411,00	360.000.000	359.957.529,37	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	910.903.605	786.893.146,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	910.903.605	786.893.146,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.05.1.01.0013	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	106.939.605	106.939.604,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.05.1.01.0014	Pembiinan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	223.666.000	154.909.088,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.05.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	580.298.000	525.044.454,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	18.820.000	7.714.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	18.820.000	7.714.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.06.1.01.0011	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	18.820.000	7.714.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	32.617.189.399	31.011.987.268,00	28.538.756.000	21.238.756.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	32.617.189.399	31.011.987.268,00	28.538.756.000	21.238.756.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.08.1.01.0013	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	11.632.094.323	10.042.704.544,00	28.538.756.000	21.238.756.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.08.1.01.0016	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	19.468.924.852	19.453.628.520,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.08.1.01.0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	1.516.170.224	1.515.654.204,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	10.365.003.403	4.046.974.244,22	2.952.107.100	2.952.107.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10.365.003.403	4.046.974.244,22	2.952.107.100	2.952.107.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.09.1.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	10.365.003.403	4.046.974.244,22	2.952.107.100	2.952.107.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	19.799.723.272	12.657.557.299,00	32.272.081.750	32.141.043.150,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	19.799.723.272	12.657.557.299,00	32.272.081.750	32.141.043.150,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0024	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	1.682.312.000	1.261.541.320,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan	833.266.520	827.806.014,00	31.991.414.000	31.860.375.400,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0032	Pembangunan Jembatan	0	0,00	280.667.750	280.667.750,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	5.715.074.400	5.548.384.544,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.844.013.071	1.790.378.093,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0042	Pembangunan Jalan	8.225.057.281	2.929.948.793,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1.500.000.000	299.498.535,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	638.656.000	578.005.573,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	368.979.027	316.676.388,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.11.1.01.0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	168.578.175	155.137.766,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.11.1.01.0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	60.116.433	48.564.322,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.11.1.01.0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	140.282.419	112.974.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAK) Cakupan Daerah Provinsi	149.953.249	142.270.947,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.11.1.02.0006	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	74.827.124	68.963.318,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.11.1.02.0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	75.126.125	73.307.629,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	119.723.724	119.058.238,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.11.1.03.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	96.967.508	96.834.238,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.11.1.03.0008	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi	22.756.216	22.224.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	939.455.510	866.589.272,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	417.449.589	377.588.658,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.12.1.01.0007	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi	417.449.589	377.588.658,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	203.376.000	191.090.228,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.12.1.02.0009	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota	203.376.000	191.090.228,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	181.543.221	161.023.686,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.12.1.03.0007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	181.543.221	161.023.686,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	137.086.700	136.886.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.12.1.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	68.099.137	67.899.137,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.12.1.04.0007	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	68.987.563	68.987.563,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0001		UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN	948.539.390	920.532.902	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0001	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	948.539.390	920.532.902,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0001	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	161.722.405	146.814.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0001	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.019.875	21.016.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0001	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.556.190	49.152.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0001	1.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	29.010.165	28.515.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0001	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48.136.175	48.131.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0001	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	592.450.000	582.305.502,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0001	1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63.082.000	55.887.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0001	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	529.368.000	526.417.902,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0001	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	194.366.985	191.413.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0001	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	123.132.020	120.303.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0001	1.03.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	71.234.965	71.110.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0002		UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR	4.849.182.613	4.632.157.991	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0002	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	706.699.473	691.722.887,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0002	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	353.550.090	343.339.870,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0002	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.077.302	65.785.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0002	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	68.076.056	63.085.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0002	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	72.565.362	69.186.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0002	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	145.831.370	145.282.370,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0002	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	299.939.868	295.216.917,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0002	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	299.939.868	295.216.917,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0002	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.209.515	53.166.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0002	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.369.500	19.341.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0002	1.03.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33.840.015	33.825.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0002	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	199.629.013	199.549.013,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0002	1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	199.629.013	199.549.013,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0002	1.03.09.1.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	199.629.013	199.549.013,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0002	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	3.942.854.127	3.740.886.091,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0002	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	3.942.854.127	3.740.886.091,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0002	1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan	2.080.832.390	1.981.743.590,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0002	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	1.832.521.737	1.729.649.201,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0002	1.03.10.1.01.0042	Pembangunan Jalan	29.500.000	29.493.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	252.069.744.322	153.410.693.254	2.917.881.007	1.673.859.240	0	0	0	0
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	252.069.744.322	153.410.693.254	2.917.881.007	1.673.859.240	0	0	0	0
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.951.904.494	14.986.594.672,00	2.052.801.200	845.072.240,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	809.358.960	782.171.951,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	272.854.960	271.093.651,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	536.504.000	511.078.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.156.775.951	8.327.806.194,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.253.000.472	7.550.764.194,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	903.775.479	777.042.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	330.658.192	330.025.345,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	133.014.192	132.477.545,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	197.644.000	197.547.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	596.902.232	592.692.536,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	267.707.000	267.320.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	299.195.232	296.372.536,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000	29.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.177.209.461	2.123.888.948,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	96.000.000	94.900.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	42.097.400	41.238.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	342.466.700	324.103.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	112.772.000	100.542.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	94.140.000	87.900.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.238.600	3.238.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	888.100.097	887.800.468,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	299.195.232	294.570.683,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	299.199.432	289.595.497,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	130.000.000	17.371.500,00	2.023.780.000	822.672.240,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0,00	152.080.000	152.080.000,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	340.250.000	340.250.000,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	0	0,00	384.638.000	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	130.000.000	17.371.500,00	1.103.812.000	287.803.240,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0,00	43.000.000	42.539.000,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.615.898.500	1.489.517.207,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	10.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	418.204.500	349.524.031,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.187.694.000	1.129.993.176,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.135.101.198	1.323.120.991,00	29.021.200	22.400.000,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.996.000	19.410.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	46.852.000	42.220.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.250.000	30.540.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.024.003.198	1.230.950.591,00	29.021.200	22.400.000,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	346.357.720	345.904.890,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	346.357.720	345.904.890,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.02.1.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	133.390.560	133.126.130,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.02.1.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	110.126.400	109.938.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.02.1.01.0011	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	102.840.760	102.840.760,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	3.282.027.640	1.203.448.686,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	254.332.640	225.133.786,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.03.1.01.0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	60.212.640	47.141.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.03.1.01.0018	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	194.120.000	177.992.386,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	3.027.695.000	978.314.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.03.1.02.0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	2.721.695.000	672.347.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.03.1.02.0014	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	306.000.000	305.967.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	231.489.454.467	136.874.745.006,00	865.079.807	828.787.000,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	231.489.454.467	136.874.745.006,00	865.079.807	828.787.000,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.05.1.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	580.660.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.05.1.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	230.118.596.427	136.090.811.917,00	865.079.807	828.787.000,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.05.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	790.198.040	783.933.089,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	36.543.021.350	33.974.212.265	564.957.223	196.141.000	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.615.687.398	10.505.135.571	75.017.374	61.090.000	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.420.699.990	8.329.943.495,36	44.348.588	44.080.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	124.854.754	124.481.692,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	70.479.623	70.363.521,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.476.564	15.392.806,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.898.567	38.725.365,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.927.749.010	5.898.618.739,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.566.526.660	5.537.902.189,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	350.046.880	349.616.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	11.175.470	11.100.550,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	520.457.825	508.431.564,00	44.348.588	44.080.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	400.155	360.000,00	32.983.328	32.730.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.794.330	1.545.000,00	11.365.260	11.350.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	53.449.300	52.778.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	26.394.120	22.409.940,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	13.756.800	11.783.178,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	45.369.460	45.156.560,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	379.293.660	374.397.936,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	150.000.000	150.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000	150.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.441.871.471	1.436.023.845,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	113.034.696	112.307.025,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.728.000	23.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.305.108.775	1.300.116.820,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	255.766.929	212.387.655,36	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	171.962.320	142.107.131,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.278.700	20.918.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	62.525.909	49.361.924,36	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.194.987.408	2.175.192.076,00	30.668.786	17.010.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	14.640.770	14.542.753,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.01.0002	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	14.640.770	14.542.753,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	649.403.608	643.125.293,00	30.668.786	17.010.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.02.0014	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	64.682.497	63.396.988,00	14.832.560	14.800.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.02.0015	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	64.879.800	64.879.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	75.624.537	74.682.060,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.02.0021	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	444.216.774	440.166.445,00	15.836.226	2.210.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	945.648.618	939.861.201,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.03.0002	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	506.250.549	504.292.824,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	42.257.428	41.727.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.03.0004	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	396.539.441	393.239.577,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.03.0005	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	601.200	601.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	585.294.412	577.662.829,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	358.212.952	355.601.770,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.04.0009	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	26.000.000	25.610.566,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.04.0013	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi	106.864.000	103.465.448,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.04.0017	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	69.717.460	69.033.649,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.04.0020	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	24.500.000	23.951.396,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000		Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	25.927.333.952	23.469.076.694	489.939.849	135.051.000	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.595.979.212	22.088.488.376,00	434.875.949	128.893.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	160.877.267	156.573.126,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	74.147.000	71.749.140,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	86.730.267	84.823.986,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.046.941.695	13.591.887.673,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.605.419.695	13.163.595.354,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	412.260.000	400.504.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	19.776.000	18.540.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.486.000	9.248.119,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	16.745.900	15.848.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16.745.900	15.848.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	736.822.121	126.215.774,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	704.595.121	94.513.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	32.227.000	31.702.574,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	944.465.238	876.538.261,00	4.120.000	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	6.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.030.000	2.072.086,00	4.120.000	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.093.700	30.021.622,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.000.000	10.323.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.312.000	6.039.954,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	839.643.738	821.790.499,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9.385.800	291.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	113.616.816	5.370.000,00	430.755.949	128.893.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	110.706.600	4.720.000,00	246.592.885	97.500.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.910.216	650.000,00	184.163.064	31.393.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.046.784.787	6.944.723.452,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	176.576.550	173.225.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.424.000	14.195.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.848.784.237	6.757.303.152,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	529.725.387	371.332.090,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52.851.200	51.980.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	286.430.239	181.553.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000	18.162.890,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	165.443.948	119.635.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.320.823.540	1.375.422.518,00	4.100.000	4.080.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.305.950.500	1.361.507.961,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.01.0006	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	22.465.000	21.766.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	14.823.000	2.241.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.01.0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	931.666.000	118.259.754,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.01.0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	660.841.500	648.287.407,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.01.0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	661.929.000	556.917.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.01.0018	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bermuansa Hak Asasi Manusia	2.783.000	2.674.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.01.0019	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Pemberitaan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	11.443.000	11.360.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	12.580.000	11.704.457,00	4.100.000	4.080.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.02.0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	3.813.500	3.633.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.02.0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	6.141.000	5.578.157,00	4.100.000	4.080.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.02.0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	2.625.500	2.493.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	2.293.040	2.210.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	2.293.040	2.210.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	10.531.200	5.165.800,00	50.963.900	2.078.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	10.531.200	5.165.800,00	50.963.900	2.078.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.04.1.01.0022	Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	2.575.100	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.04.1.01.0023	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	7.956.100	5.165.800,00	50.963.900	2.078.000,00	0	0,00	0	0,00
1.06			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	27.704.575.930	26.163.727.639	707.655.320	704.370.000	0	0	0	0
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000		Dinas Sosial	27.704.575.930	26.163.727.639	707.655.320	704.370.000	0	0	0	0
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.652.636.954	12.308.988.229,40	602.989.520	600.050.000,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	690.663.591	683.321.456,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.355.895	18.551.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	195.040.340	190.674.974,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	199.052.761	197.954.080,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	277.214.595	276.141.302,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.787.145.390	9.475.381.527,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.208.931.390	8.905.420.527,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	578.214.000	569.961.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	101.871.353	101.122.456,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	101.871.353	101.122.456,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	54.413.500	53.919.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	54.413.500	53.919.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	715.992.262	704.155.103,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.345.531	12.139.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	36.854.997	33.463.650,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	88.816.872	88.147.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	77.368.110	70.750.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	11.022.000	10.960.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.630.250	8.080.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	480.954.502	480.615.153,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80.872.278	80.377.600,00	602.989.520	600.050.000,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	79.477.500	79.400.000,00	413.800.510	413.800.000,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	277.500	200.000,00	23.351.500	23.350.000,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.117.278	777.600,00	165.837.510	162.900.000,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	815.613.435	812.848.032,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	57.868.340	57.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	71.312.252	69.120.280,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	686.432.843	685.927.752,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	406.065.145	397.862.255,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	189.688.793	184.791.670,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.713.360	36.750.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	178.662.992	176.320.585,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	898.847.886	897.948.517,00	72.720.000	72.720.000,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	898.847.886	897.948.517,00	72.720.000	72.720.000,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.02.1.02.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	102.118.281	102.118.281,00	72.720.000	72.720.000,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	796.729.605	795.830.236,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.694.795.164	1.933.826.538,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	696.601.651	281.202.584,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	158.803.112	100.724.650,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang	28.258.500	28.258.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	71.660.282	69.349.525,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu	160.018.700	939.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	5.526.300	5.486.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	272.334.757	76.444.659,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1.385.011.198	1.157.363.331,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.02.0001	Pengasuhan	40.944.709	40.932.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan	591.741.651	554.864.610,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang	163.047.811	33.228.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	198.470.152	197.788.952,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	9.769.765	8.558.550,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	381.037.110	321.989.519,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	404.677.894	303.179.050,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan	191.396.540	165.362.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang	41.460.925	33.093.650,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.03.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	40.040.590	38.916.150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.03.0004	Penyediaan Alat Bantu	23.963.200	6.991.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	21.324.302	8.375.650,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	75.347.817	39.624.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan	11.144.520	10.816.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	90.099.000	79.631.276,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.04.0001	Penyediaan Permakanan	10.000.000	9.021.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.04.0002	Penyediaan Sandang	10.000.000	8.037.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.04.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	16.324.000	13.802.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.04.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	2.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.04.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	11.378.000	9.297.274,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.04.0010	Pemulangan ke Daerah Asal	40.397.000	39.472.352,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	118.405.421	112.450.297,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.05.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	46.505.524	45.950.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.05.0010	Pemulangan ke Daerah Asal	71.899.897	66.499.897,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	9.532.205.199	9.106.855.605,00	31.945.800	31.600.000,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	9.532.205.199	9.106.855.605,00	31.945.800	31.600.000,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.05.1.02.0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	6.660.215.013	6.467.998.911,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.05.1.02.0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.059.853.946	1.058.133.122,00	31.945.800	31.600.000,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.05.1.02.0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	1.812.136.240	1.580.723.572,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	553.301.727	544.090.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	553.301.727	544.090.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.06.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	260.629.984	260.157.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.06.1.01.0002	Penyediaan Sandang	153.523.403	152.703.550,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	139.148.340	131.229.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	1.372.789.000	1.372.018.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1.372.789.000	1.372.018.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.07.1.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1.372.789.000	1.372.018.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	322.751.192.993	305.443.804.897	11.465.761.327	8.232.221.104	0	0	0	0
2.07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	31.616.477.670	30.466.537.108	296.940.160	18.490.000	0	0	0	0
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	28.451.180.868	27.553.215.449	33.020.120	3.650.000	0	0	0	0
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	27.182.329.724	26.315.969.849,00	33.020.120	3.650.000,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54.385.178	48.773.591,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.046.688	15.011.066,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.588.617	15.126.164,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.749.873	18.636.361,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.503.332.098	24.670.214.454,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.930.032.098	24.104.484.454,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	573.300.000	565.730.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	324.295.926	322.010.388,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	9.898.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.000.000	19.850.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.044.518	29.935.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000	10.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.080.000	10.080.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	244.171.408	242.247.038,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	33.020.120	3.650.000,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	33.020.120	3.650.000,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.188.372.540	1.166.114.216,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200.905.376	181.892.914,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.070.000	29.820.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	957.397.164	954.401.302,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	111.943.982	108.857.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	101.943.982	99.257.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	9.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	4.995.864	4.772.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.02.1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	4.995.864	4.772.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.02.1.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	4.995.864	4.772.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	876.682.000	856.378.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	876.682.000	856.378.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	876.682.000	856.378.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	43.233.680	40.430.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.04.1.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.489.880	14.606.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.04.1.02.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	15.489.880	14.606.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	13.883.600	12.943.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.04.1.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	13.883.600	12.943.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.04.1.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	13.860.200	12.880.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.04.1.04.0003	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	13.860.200	12.880.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	273.939.600	271.022.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	136.647.500	134.754.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.05.1.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	8.268.500	7.933.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.05.1.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	128.379.000	126.820.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	137.292.100	136.268.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.05.1.03.0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	57.292.100	57.038.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.05.1.03.0003	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	80.000.000	79.229.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	70.000.000	64.642.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	70.000.000	64.642.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	24.000.000	20.602.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	24.000.000	22.851.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	22.000.000	21.188.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0001		UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Batam	436.240.848	428.455.250	0	0	0	0	0	0
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0001	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	188.216.896	182.164.267,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0001	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188.216.896	182.164.267,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0001	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.000.000	50.061.249,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0001	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	133.216.896	132.103.018,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0001	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	248.023.952	246.290.983,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0001	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	248.023.952	246.290.983,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0001	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	129.600.000	129.088.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0001	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	118.423.952	117.202.983,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0002		UPTD BLK Provinsi Kepulauan Riau	2.675.931.730	2.433.072.823	263.920.040	14.840.000	0	0	0	0
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0002	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	313.596.856	205.226.736,00	263.920.040	14.840.000,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0002	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	81.402.960	0,00	263.920.040	14.840.000,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0002	2.07.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	0	0,00	92.412.608	4.400.000,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0002	2.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	171.507.432	10.440.000,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0002	2.07.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	81.402.960	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0002	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	232.193.896	205.226.736,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0002	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	98.977.000	72.782.998,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0002	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	133.216.896	132.443.738,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0002	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.362.334.874	2.227.846.087,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0002	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	2.362.334.874	2.227.846.087,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0002	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	2.362.334.874	2.227.846.087,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0003		UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Karimun	53.124.224	51.793.586	0	0	0	0	0	0
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0003	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	53.124.224	51.793.586,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0003	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.000.000	3.720.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0003	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.000.000	3.720.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0003	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.124.224	48.072.786,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0003	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.820.000	14.886.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0003	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	33.304.224	33.186.286,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	20.470.389.778	19.952.945.331	27.703.600	5.550.000	0	0	0	0
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	20.234.909.778	19.718.384.501	27.703.600	5.550.000	0	0	0	0
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.050.064.240	12.634.292.750,91	27.703.600	5.550.000,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	225.753.748	224.749.315,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	142.857.448	142.846.344,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	51.584.200	51.560.780,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31.312.100	30.342.191,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.576.807.609	9.260.924.277,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.110.253.809	8.804.230.477,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	462.072.000	452.212.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.481.800	4.481.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	66.709.448	66.497.048,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	66.709.448	66.497.048,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	138.383.009	138.360.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	138.383.009	138.360.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	648.107.100	631.333.237,00	27.703.600	5.550.000,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.441.000	8.441.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.271.000	7.271.000,00	27.703.600	5.550.000,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	23.442.700	23.430.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	52.743.400	52.743.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	266.041.000	259.304.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	24.600.000	24.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	265.568.000	255.543.137,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.648.334.179	1.605.805.705,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	239.705.310	207.141.280,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.000.000	46.900.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.361.628.869	1.351.764.425,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	745.969.147	706.623.168,91	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	162.535.000	162.519.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	68.997.278	29.667.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	514.436.868	514.436.868,91	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.210.303.454	1.160.863.721,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.02.1.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	59.266.360	48.501.442,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.02.1.01.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	32.074.100	32.074.010,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.02.1.01.0007	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	27.192.260	16.427.432,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	1.116.635.794	1.077.970.779,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.02.1.02.0003	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	500.460.055	500.170.165,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.02.1.02.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	616.175.739	577.800.614,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	34.401.300	34.391.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.02.1.03.0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	34.401.300	34.391.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1.273.377.844	1.259.413.121,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.054.625.844	1.043.269.721,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	907.930.844	896.574.721,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.03.1.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	146.695.000	146.695.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	218.752.000	216.143.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.03.1.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	149.732.000	149.245.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.03.1.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	69.020.000	66.898.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	4.086.542.944	4.049.956.331,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.04.1.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	3.355.740.396	3.339.082.896,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.04.1.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	3.355.740.396	3.339.082.896,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.04.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	191.419.680	189.372.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.04.1.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	191.419.680	189.372.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.04.1.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	539.382.868	521.500.935,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.04.1.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	539.382.868	521.500.935,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	8.000.000	7.867.530,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	8.000.000	7.867.530,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.05.1.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	8.000.000	7.867.530,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	555.960.895	555.738.048,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.06.1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	555.960.895	555.738.048,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.06.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	116.678.403	116.648.393,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.06.1.01.0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	439.282.491	439.089.655,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	50.660.400	50.253.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	50.660.400	50.253.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.07.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	50.660.400	50.253.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0001		UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	235.480.000	234.560.830	0	0	0	0	0	0
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0001	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	136.258.300	135.744.730,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0001	2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	136.258.300	135.744.730,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0001	2.08.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	136.258.300	135.744.730,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0001	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	99.221.700	98.816.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0001	2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	99.221.700	98.816.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0001	2.08.07.1.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	99.221.700	98.816.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	24.001.798.869	22.155.802.348	764.210.190	136.444.600	0	0	0	0
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	24.001.798.869	22.155.802.348	764.210.190	136.444.600	0	0	0	0
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22.017.550.802	20.912.483.722,00	764.210.190	136.444.600,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	295.133.208	269.514.384,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	162.576.208	153.545.652,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	132.557.000	115.968.732,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.225.375.344	17.570.373.228,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.559.521.344	16.909.011.228,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	665.854.000	661.362.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	643.259.747	602.760.112,00	242.610.190	136.444.600,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.624.812	6.705.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	312.354	0,00	242.610.190	136.444.600,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	121.147.731	96.237.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.761.110	8.571.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.968.360	3.740.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	42.723.000	34.250.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	453.722.380	453.255.712,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	306.000	0,00	521.600.000	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	306.000	0,00	521.600.000	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.196.470.493	2.152.105.686,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.615.550	6.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	99.567.215	91.905.309,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.713.240	27.195.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.037.574.488	2.027.005.377,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	657.006.010	317.730.312,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	385.375.700	258.818.312,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74.360.000	49.968.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	197.270.310	8.944.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.803.507.070	1.173.800.426,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1.159.164.454	930.859.537,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.1.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1.112.711.818	893.419.437,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.1.01.0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	23.129.636	20.089.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.1.01.0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	23.323.000	17.351.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	391.968.956	39.969.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.1.02.0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	56.446.956	23.540.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.1.02.0007	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	335.522.000	16.429.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	252.373.660	202.971.889,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	252.373.660	202.971.889,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	133.571.210	43.616.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	22.732.010	11.200.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.04.1.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	22.732.010	11.200.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	110.839.200	32.416.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.04.1.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	50.707.500	26.866.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	60.131.700	5.549.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	47.169.787	25.901.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	47.169.787	25.901.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	29.422.793	8.802.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	17.746.994	17.098.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	127.880.723	122.851.731	921.100.000	920.100.000	0	0	0	0
2.10	1.03.2.10.0.00.03.0000		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	127.880.723	122.851.731	921.100.000	920.100.000	0	0	0	0
2.10	1.03.2.10.0.00.03.0000	2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	127.880.723	122.851.731,00	921.100.000	920.100.000,00	0	0,00	0	0,00
2.10	1.03.2.10.0.00.03.0000	2.10.03.1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	127.880.723	122.851.731,00	921.100.000	920.100.000,00	0	0,00	0	0,00
2.10	1.03.2.10.0.00.03.0000	2.10.03.1.01.0001	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	127.880.723	122.851.731,00	921.100.000	920.100.000,00	0	0,00	0	0,00
2.11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	33.901.873.943	31.240.068.363	2.209.846.504	1.995.400.000	0	0	0	0
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	33.296.873.656	30.698.438.223	2.206.241.504	1.995.400.000	0	0	0	0
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	31.185.807.694	29.910.246.815,00	2.206.241.504	1.995.400.000,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	181.327.620	176.900.796,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	76.855.620	73.034.702,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	104.472.000	103.866.094,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.436.947.874	26.532.474.269,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.879.956.874	25.984.062.269,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	556.991.000	548.412.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	18.664.000	16.715.096,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	18.664.000	16.715.096,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	814.786.104	787.284.817,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	23.537.772	23.220.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	77.948.420	60.207.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	66.060.000	62.480.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	194.631.800	194.435.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	31.664.000	30.202.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	420.944.112	416.739.517,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	117.080.822	38.861.824,00	2.206.241.504	1.995.400.000,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	111.333.822	34.186.224,00	1.658.248.000	1.593.800.000,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.747.000	4.675.600,00	547.993.504	401.600.000,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.084.155.424	2.014.895.813,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.247.600	10.920.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.072.907.824	2.003.975.813,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	532.845.850	343.114.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	317.624.700	313.464.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.970.000	29.650.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	184.251.150	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	366.213.910	355.188.472,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	366.213.910	355.188.472,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.02.1.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	366.213.910	355.188.472,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	214.235.911	151.298.245,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	214.235.911	151.298.245,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	214.235.911	151.298.245,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	181.589.541	177.987.091,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	181.589.541	177.987.091,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.08.1.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	181.589.541	177.987.091,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	50.720.600	50.720.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	50.720.600	50.720.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.10.1.01.0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	50.720.600	50.720.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.298.306.000	52.997.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	1.298.306.000	52.997.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.11.1.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	1.298.306.000	52.997.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0001		UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	203.195.912	168.244.041	3.605.000	0	0	0	0	0
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0001	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	203.195.912	168.244.041,00	3.605.000	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0001	2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.000.000	7.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0001	2.11.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	7.000.000	7.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0001	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	110.308.112	89.265.700,00	3.605.000	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0001	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	52.883.500	50.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0001	2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.724.500	0,00	3.605.000	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0001	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.173.800	10.265.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0001	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.601.812	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0001	2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	4.200.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0001	2.11.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	5.280.000	5.120.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0001	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.444.500	23.380.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0001	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.887.800	71.978.341,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0001	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84.637.800	71.978.341,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0001	2.11.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.250.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0002		UPTD KPHP Unit I Karimun	60.324.200	54.594.500	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0002	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	60.324.200	54.594.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0002	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	26.431.700	22.514.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0002	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	872.700	858.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0002	2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.384.900	1.367.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0002	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.950.100	9.277.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0002	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	80.500	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0002	2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	1.461.000	1.368.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0002	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.682.500	9.644.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0002	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.892.500	32.080.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0002	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.042.500	14.230.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0002	2.11.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.850.000	17.850.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0003		UPTD KPHP Unit II Batam	64.106.455	63.373.367	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0003	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	64.106.455	63.373.367,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0003	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	25.813.855	25.474.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0003	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.097.200	1.068.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0003	2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.533.100	1.489.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0003	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.883.000	11.877.650,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0003	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	992.155	935.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0003	2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	890.400	798.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0003	2.11.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	1.320.000	1.280.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0003	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.098.000	8.027.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0003	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.292.600	37.898.617,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0003	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0003	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.042.600	17.743.617,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0003	2.11.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.750.000	19.655.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0004		UPTD KPHP Unit III Lingga	39.162.800	26.449.280	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0004	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	39.162.800	26.449.280,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0004	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	35.521.227	25.191.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0004	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.903.000	20.004.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0004	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	892.427	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0004	2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	607.800	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0004	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.118.000	5.187.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0004	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.641.573	1.258.280,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0004	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	250.000	250.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0004	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.391.573	1.008.280,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0005		UPTD KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang	59.903.760	58.373.239	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0005	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	59.903.760	58.373.239,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0005	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	34.637.160	33.947.739,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0005	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.809.160	23.203.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0005	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.828.000	10.744.239,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0005	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.266.600	24.425.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0005	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.266.600	24.425.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0006		UPTD KPHP Unit V Natuna	66.807.380	61.670.238	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0006	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	66.807.380	61.670.238,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0006	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	32.067.900	28.967.243,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0006	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.822.000	4.014.850,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0006	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.248.900	12.160.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0006	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.041.000	975.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0006	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11.956.000	11.817.393,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0006	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.739.480	32.702.995,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0006	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0006	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.739.480	9.702.995,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0006	2.11.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.000.000	22.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0007		UPTD KPHP Unit VI Kepulauan Anambas	111.499.780	108.925.475	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0007	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	111.499.780	108.925.475,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0007	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	15.005.100	14.639.875,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0007	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.219.100	3.169.875,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0007	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.500.000	1.480.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0007	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.286.000	9.990.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0007	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96.494.680	94.285.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0007	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.494.680	14.285.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0007	2.11.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.000.000	80.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	326.308.420	326.307.895	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	326.308.420	326.307.895	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	62.198.990	62.198.465,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	62.198.990	62.198.465,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.02.1.02.0004	Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	62.198.990	62.198.465,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	239.415.330	239.415.330,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	239.415.330	239.415.330,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.04.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	239.415.330	239.415.330,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	24.694.100	24.694.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	24.694.100	24.694.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.05.1.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	24.694.100	24.694.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	16.977.454.760	15.598.859.058	191.045.542	176.413.953	0	0	0	0
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.977.454.760	15.598.859.058	191.045.542	176.413.953	0	0	0	0
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.314.474.988	11.988.289.018,00	176.469.542	176.413.953,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	121.567.000	120.346.129,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.535.500	12.297.752,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	44.260.700	43.423.178,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.770.800	64.625.199,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.902.742.423	9.606.331.504,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.395.592.423	9.106.751.504,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	507.150.000	499.580.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	58.500.000	58.435.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	58.500.000	58.435.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	586.674.006	586.361.816,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.891.507	5.891.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	103.991.594	103.762.264,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.988.565	25.988.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	29.160.000	29.157.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.528.340	5.528.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	416.114.000	416.034.652,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.500.000	1.500.000,00	176.469.542	176.413.953,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	82.535.700	82.487.000,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.500.000	1.500.000,00	93.933.842	93.926.953,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.450.916.187	1.424.148.769,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000	7.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.685.000	45.378.856,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.500.000	43.498.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.353.731.187	1.328.271.913,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	192.575.372	191.165.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.09.0001	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	157.805.013	156.814.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.770.359	34.351.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	73.373.000	72.728.560,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.02.1.01	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	73.373.000	72.728.560,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.02.1.01.0003	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	14.940.000	14.937.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.02.1.01.0004	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	58.433.000	57.791.060,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	34.047.500	33.959.252,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	34.047.500	33.959.252,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.03.1.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	28.271.000	28.217.952,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.03.1.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	5.776.500	5.741.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	558.746.800	558.136.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	558.746.800	558.136.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.04.1.01.0005	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	397.638.000	397.073.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.04.1.01.0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	161.108.800	161.063.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	3.996.812.472	2.945.745.728,00	14.576.000	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaah Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3.996.812.472	2.945.745.728,00	14.576.000	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.05.1.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga keMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	238.530.000	238.332.406,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga keMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	345.100.000	317.019.420,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.05.1.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga keMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	947.344.700	265.678.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	285.414.500	285.003.248,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.05.1.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	2.180.423.272	1.839.712.554,00	14.576.000	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4.188.772.374	2.182.372.362	0	0	0	0	0	0
2.14	2.08.2.14.0.00.08.0000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	4.188.772.374	2.182.372.362	0	0	0	0	0	0
2.14	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	4.010.400.000	2.004.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.14.03.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	4.010.400.000	2.004.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.14.03.1.02.0004	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana	4.010.400.000	2.004.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	178.372.374	178.372.362,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	178.372.374	178.372.362,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.14.04.1.01.0017	Pelaksanaan Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	178.372.374	178.372.362,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	43.257.984.829	41.289.033.657	4.605.266.231	2.653.102.461	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		Dinas Perhubungan	40.908.966.482	39.026.713.812	4.562.874.226	2.611.076.461	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.035.087.425	15.933.418.254,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	168.904.572	166.595.941,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60.392.673	59.883.735,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	108.511.899	106.712.206,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.735.103.355	12.670.776.339,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.849.087.095	11.785.450.739,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	817.359.660	817.166.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	68.656.600	68.159.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	32.268.000	31.797.599,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	32.268.000	31.797.599,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	92.516.601	92.336.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	92.516.601	92.336.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	51.721.000	48.842.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	49.566.000	48.842.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.155.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	544.534.000	536.500.866,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	105.866.000	105.859.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	43.500.000	43.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	98.750.000	92.045.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	296.418.000	295.096.366,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75.000.000	75.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.000.000	75.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.081.467.895	2.068.821.809,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.015.000	4.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.679.100	76.682.184,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95.798.400	95.797.320,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.900.975.395	1.892.342.305,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	253.572.000	242.747.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	232.560.200	221.947.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.011.800	20.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.216.201.350	255.585.861,00	1.793.867.570	1.783.806.844,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	141.818.300	141.136.240,00	1.793.867.570	1.783.806.844,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	141.818.300	141.136.240,00	1.793.867.570	1.783.806.844,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	44.513.600	43.752.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.06.0004	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	44.513.600	43.752.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	957.588.900	988.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.08.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	957.588.900	988.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	72.280.550	69.709.121,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.13.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	72.280.550	69.709.121,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	23.657.677.706	22.837.709.697,72	2.769.006.656	827.269.617,77	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	13.804.446	13.804.446,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	13.804.446	13.804.446,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.02	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	27.240.804	27.240.804,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	27.240.804	27.240.804,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.03	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	30.914.950	30.914.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	30.914.950	30.914.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.06	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	30.219.207	30.219.207,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.06.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	30.219.207	30.219.207,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	23.555.498.299	22.735.530.290,72	2.769.006.656	827.269.617,77	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.09.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	249.712.000	228.044.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.09.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	260.373.300	201.442.871,00	2.769.006.656	827.269.617,77	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.09.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	23.045.412.999	22.306.043.119,72	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0001		UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah I Kota Batam	337.993.837	332.596.853	0	0	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0001	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	266.864.987	264.860.255,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0001	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	266.864.987	264.860.255,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0001	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	266.864.987	264.860.255,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0001	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	71.128.850	67.736.598,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0001	2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	71.128.850	67.736.598,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0001	2.15.03.1.09.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	71.128.850	67.736.598,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0002		UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah II Kabupaten Karimun	370.559.736	366.642.268	0	0	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0002	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	296.143.486	295.116.052,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0002	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	296.143.486	295.116.052,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0002	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	296.143.486	295.116.052,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0002	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	74.416.250	71.526.216,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0002	2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	74.416.250	71.526.216,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0002	2.15.03.1.09.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	74.416.250	71.526.216,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0003		UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah III Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan	871.396.317	843.953.391	12.520.800	12.500.000	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0003	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	730.592.517	727.757.653,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0003	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	730.592.517	727.757.653,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0003	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	730.592.517	727.757.653,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0003	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	140.803.800	116.195.738,00	12.520.800	12.500.000,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0003	2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	140.803.800	116.195.738,00	12.520.800	12.500.000,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0003	2.15.03.1.09.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	140.803.800	116.195.738,00	12.520.800	12.500.000,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0004		UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah IV Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas	437.351.482	423.155.793	0	0	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0004	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	298.984.252	297.933.465,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0004	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	298.984.252	297.933.465,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0004	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	298.984.252	297.933.465,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0004	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	138.367.230	125.222.328,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0004	2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	138.367.230	125.222.328,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0004	2.15.03.1.09.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	138.367.230	125.222.328,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0005		UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah V Kabupaten Lingga	331.716.972	295.971.540	29.871.205	29.526.000	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0005	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	200.387.004	199.668.020,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0005	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	200.387.004	199.668.020,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0005	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200.387.004	199.668.020,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0005	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	131.329.968	96.303.520,00	29.871.205	29.526.000,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0005	2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	131.329.968	96.303.520,00	29.871.205	29.526.000,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0005	2.15.03.1.09.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	131.329.968	96.303.520,00	29.871.205	29.526.000,00	0	0,00	0	0,00
2.16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	35.004.099.184	33.562.544.301	1.012.796.560	930.415.000	0	0	0	0
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	35.004.099.184	33.562.544.301	1.012.796.560	930.415.000	0	0	0	0
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.702.410.946	12.483.779.190,00	91.400.000	11.415.000,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	155.324.313	153.466.721,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	80.923.843	79.757.006,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	74.400.470	73.709.715,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.264.508.194	9.187.874.578,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.763.898.194	8.699.664.578,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	500.610.000	488.210.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	107.281.000	106.600.194,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	87.500.000	87.356.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	19.781.000	19.244.194,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	484.397.814	413.815.054,00	9.000.000	8.865.000,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	9.820.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.605.000	9.375.000,00	9.000.000	8.865.000,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.188.800	24.140.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	88.670.500	42.118.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.013.200	6.639.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	24.994.000	24.819.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	296.926.314	296.902.954,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0,00	82.400.000	2.550.000,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	82.400.000	2.550.000,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.460.441.065	2.392.679.843,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	135.041.620	129.715.101,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.030.000	31.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.283.369.445	2.231.464.742,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	230.458.560	229.342.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	206.334.560	205.439.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.000.000	12.839.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.124.000	11.064.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	16.404.433.762	15.224.568.888,00	3.605.000	3.600.000,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	16.404.433.762	15.224.568.888,00	3.605.000	3.600.000,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.02.1.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	50.369.082	48.147.771,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.02.1.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	853.164.774	838.141.862,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.02.1.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	230.352.530	228.266.488,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.02.1.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	254.007.202	237.119.110,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.02.1.01.0007	Layanan Hubungan Media	8.495.385.578	8.465.854.913,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.02.1.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	4.060.159.916	3.060.124.046,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.02.1.01.0011	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	602.969.680	578.513.698,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.02.1.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	700.000.000	700.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.02.1.01.0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	1.158.025.000	1.068.401.000,00	3.605.000	3.600.000,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	5.897.254.476	5.854.196.223,00	917.791.560	915.400.000,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	4.278.698.550	4.263.650.344,00	902.700.000	901.900.000,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.03.1.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	44.261.712	44.196.190,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.03.1.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	4.234.436.838	4.219.454.154,00	902.700.000	901.900.000,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	1.618.555.926	1.590.545.879,00	15.091.560	13.500.000,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.03.1.02.0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	28.713.172	27.579.672,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.03.1.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	295.087.129	279.375.536,00	15.091.560	13.500.000,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.03.1.02.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	123.905.854	122.655.142,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.03.1.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	1.105.918.983	1.098.304.741,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.03.1.02.0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	21.496.135	20.836.135,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.16.03.1.02.0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	43.434.653	41.794.653,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	21.120.997.923	19.160.268.976	115.278.285	93.648.285	0	0	0	0
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	21.120.997.923	19.160.268.976	115.278.285	93.648.285	0	0	0	0
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.852.702.144	11.512.257.441,00	115.278.285	93.648.285,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	161.494.794	134.682.894,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	64.790.742	56.090.742,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	12.955.175	12.955.175,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31.798.502	31.686.602,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.950.375	33.950.375,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.289.609.030	8.171.960.915,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.776.585.030	7.667.051.415,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	438.380.000	430.265.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	74.644.000	74.644.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	84.852.800	82.852.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	74.852.800	74.852.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000	8.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.420.145.088	1.382.925.135,00	115.278.285	93.648.285,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.431.159	9.431.159,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	683.000	683.000,00	111.789.000	90.159.000,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.969.034	14.918.034,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.986.875	97.603.937,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	186.489.500	182.380.377,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	512.000.000	511.980.108,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6.473.520	6.473.520,00	3.489.285	3.489.285,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	590.112.000	559.455.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	62.250.000	2.015.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	62.250.000	2.015.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.609.362.382	1.587.859.797,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.000.000	24.950.229,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000	17.661.470,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.990.200	49.990.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.516.372.182	1.495.257.898,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	224.988.050	149.960.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200.000.000	143.437.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.988.050	6.523.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	50.119.600	49.819.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.02.1.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	50.119.600	49.819.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.02.1.01.0002	Facilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	50.119.600	49.819.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	67.456.130	65.289.460,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	23.692.530	23.411.530,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	23.692.530	23.411.530,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	43.763.600	41.877.930,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.03.1.02.0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	43.763.600	41.877.930,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	23.851.200	23.773.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.04.1.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	23.851.200	23.773.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.04.1.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	23.851.200	23.773.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	483.133.500	472.596.105,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	483.133.500	472.596.105,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	483.133.500	472.596.105,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	196.242.000	191.940.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	196.242.000	191.940.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.06.1.01.0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	170.000.000	170.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.06.1.01.0003	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	26.242.000	21.940.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	6.703.797.700	5.669.013.347,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	6.703.797.700	5.669.013.347,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	4.222.279.800	3.299.128.956,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	2.481.517.900	2.369.884.391,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.743.695.649	1.175.578.823,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	1.743.695.649	1.175.578.823,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.08.1.01.0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	1.510.087.000	954.195.180,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.08.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	233.608.649	221.383.643,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	15.041.835.367	14.746.383.021	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	15.041.835.367	14.746.383.021	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.734.922.701	12.668.345.695,00	2.000.000	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	211.516.100	211.212.176,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	174.222.200	174.031.776,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.312.600	13.289.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.981.300	23.891.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.654.058.575	10.605.483.154,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.126.985.703	10.078.535.634,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	450.048.000	450.048.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	77.024.872	76.899.520,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	33.320.436	33.300.660,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	33.320.436	33.300.660,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	396.793.281	396.512.707,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.385.400	4.382.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.635.000	41.461.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.403.200	14.382.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	14.880.000	14.860.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	14.206.500	14.155.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	307.283.181	307.270.507,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	55.553.300	55.430.800,00	2.000.000	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	55.553.300	55.430.800,00	2.000.000	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.237.407.037	1.223.823.688,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	189.381.725	185.201.377,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	79.140.000	79.080.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	968.885.312	959.542.311,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	146.273.972	142.582.510,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	109.313.536	105.661.850,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.640.000	3.620.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	33.320.436	33.300.660,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	280.132.740	256.499.680,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	280.132.740	256.499.680,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.02.1.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	30.132.740	30.132.740,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.02.1.02.0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	250.000.000	226.366.940,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	56.159.600	56.029.292,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	56.159.600	56.029.292,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	52.174.000	52.043.692,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.03.1.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	3.985.600	3.985.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	552.250.623	546.445.525,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.04.1.01	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	140.418.052	139.483.768,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.04.1.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	28.725.000	28.675.331,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.04.1.01.0007	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	111.693.052	110.808.437,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	411.832.571	406.961.757,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.04.1.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	26.589.300	26.589.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.04.1.02.0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	193.980.000	193.978.451,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.04.1.02.0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	176.270.371	171.401.106,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.04.1.02.0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	14.992.900	14.992.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1.386.207.000	1.186.900.126,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1.386.207.000	1.186.900.126,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal	417.260.000	342.477.886,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	207.630.000	163.690.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	761.317.000	680.731.540,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	32.162.703	32.162.703,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	32.162.703	32.162.703,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	32.162.703	32.162.703,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	39.249.862.760	38.114.492.172	453.862.105	437.431.805	0	0	0	0
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000		Dinas Kepemudaan dan Olahraga	39.249.862.760	38.114.492.172	453.862.105	437.431.805	0	0	0	0
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.178.092.598	13.913.494.798,00	453.862.105	437.431.805,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	235.643.017	222.086.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.285.600	16.996.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	82.006.038	69.888.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	136.351.379	135.201.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.636.795.262	8.559.104.904,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.057.784.258	8.003.944.304,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	546.842.004	526.958.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	32.169.000	28.202.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	232.775.088	232.467.024,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	232.775.088	232.467.024,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	28.050.000	27.720.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	28.050.000	27.720.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.632.702.755	1.548.470.059,00	16.430.300	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0,00	16.430.300	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	35.000.000	34.854.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000	49.822.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	732.421.600	726.688.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	4.625.000	3.250.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	746.364.944	676.064.359,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	64.291.211	57.790.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60.872.850	60.872.850,00	437.431.805	437.431.805,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60.872.850	60.872.850,00	437.431.805	437.431.805,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.799.747.326	2.771.790.661,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	226.761.500	212.095.639,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.833.000	41.488.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.527.152.826	2.518.207.022,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	551.506.300	490.983.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	251.352.700	226.849.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	300.153.600	264.133.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	146.232.200	111.331.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	146.232.200	111.331.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.02.1.01.0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	6.194.000	5.746.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	140.038.200	105.585.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	23.778.106.462	23.298.780.074,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	2.421.973.862	2.181.533.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	1.972.011.427	1.737.024.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	116.960.500	112.461.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.03.1.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi	333.001.935	332.047.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	4.371.132.600	4.148.510.546,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.03.1.02.0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	1.124.604.200	1.106.544.546,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	3.246.528.400	3.041.966.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	16.985.000.000	16.968.736.278,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.03.1.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	16.985.000.000	16.968.736.278,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1.147.431.500	790.885.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	1.147.431.500	790.885.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.04.1.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	1.147.431.500	790.885.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.20			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	82.222.400	81.562.515	0	0	0	0	0	0
2.20	2.16.0.00.0.00.13.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	82.222.400	81.562.515	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.20	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	82.222.400	81.562.515,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.20	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	82.222.400	81.562.515,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.20	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.20.02.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	82.222.400	81.562.515,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.21			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	134.534.834	129.352.024	0	0	0	0	0	0
2.21	2.16.0.00.0.00.13.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	134.534.834	129.352.024	0	0	0	0	0	0
2.21	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	134.534.834	129.352.024,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.21	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	71.341.928	66.359.449,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.21	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.21.02.1.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	71.341.928	66.359.449,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.21	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	63.192.906	62.992.575,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.21	2.16.0.00.0.00.13.0000	2.21.02.1.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	63.192.906	62.992.575,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	17.209.940.222	16.841.018.887	769.482.270	767.145.000	0	0	0	0
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000		Dinas Kebudayaan	17.209.940.222	16.841.018.887	769.482.270	767.145.000	0	0	0	0
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.212.339.734	11.065.321.837,00	654.852.270	652.620.000,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	494.457.584	492.836.116,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	23.316.000	22.578.830,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	422.088.224	421.237.186,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.053.360	49.020.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.741.749.284	7.616.677.097,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.316.022.284	7.206.077.097,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	425.727.000	410.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70.228.500	69.114.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	60.225.000	60.214.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.003.500	8.900.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	937.660.236	935.742.722,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.110.500	16.622.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.000.000	19.881.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	282.173.500	282.050.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	198.858.000	198.858.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	30.000.000	29.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	376.518.236	375.930.222,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	13.000.000	13.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	654.852.270	652.620.000,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0,00	603.000.000	601.700.000,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	51.852.270	50.920.000,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.730.415.064	1.716.403.020,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	133.216.896	133.177.536,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	502.277.230	489.467.923,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.500.000	44.475.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.050.420.938	1.049.282.561,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	237.829.066	234.548.882,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.655.000	44.140.450,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.040.000	34.744.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	133.216.896	133.164.432,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.917.170	22.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	3.183.954.684	3.080.560.208,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	712.778.480	709.584.170,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	712.778.480	709.584.170,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1.077.074.604	977.811.438,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.02.1.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	993.327.424	894.508.438,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	83.747.180	83.303.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.02.1.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.394.101.600	1.393.164.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.02.1.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	1.200.000.000	1.200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.02.1.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	194.101.600	193.164.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1.938.884.660	1.831.348.192,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.938.884.660	1.831.348.192,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.03.1.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	123.432.793	122.875.313,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.03.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	1.815.451.867	1.708.472.879,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	152.592.200	151.328.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	152.592.200	151.328.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.04.1.01.0004	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal	152.592.200	151.328.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	600.259.972	591.536.827,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	112.340.000	112.340.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.05.1.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	112.340.000	112.340.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	487.919.972	479.196.827,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.05.1.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	35.647.000	30.804.778,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.05.1.02.0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	452.272.972	448.392.049,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	121.908.972	120.923.223,00	114.630.000	114.525.000,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	121.908.972	120.923.223,00	114.630.000	114.525.000,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.06.1.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	121.908.972	120.923.223,00	114.630.000	114.525.000,00	0	0,00	0	0,00
2.23			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	19.872.975.214	19.321.354.381	96.229.880	96.080.000	0	0	0	0
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000		Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	19.583.978.018	19.043.334.934	91.765.880	91.650.000	0	0	0	0
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.575.924.525	18.201.350.647,02	83.065.880	82.950.000,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	118.272.300	114.307.350,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.722.200	9.756.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	106.550.100	104.550.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.554.146.780	12.296.747.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.157.498.780	11.901.109.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	396.648.000	395.638.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24.350.000	24.240.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	24.350.000	24.240.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	597.863.254	589.139.153,00	83.065.880	82.950.000,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.948.400	18.345.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0,00	83.065.880	82.950.000,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	264.305.974	262.359.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.108.000	37.860.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12.000.000	12.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	213.995.380	211.196.653,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	48.505.500	47.377.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.031.377.947	4.975.532.870,71	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	774.312.840	734.326.105,71	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.254.065.107	4.238.206.765,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	249.914.244	201.383.323,31	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	54.300.000	52.479.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	112.584.244	69.113.423,31	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	83.030.000	79.790.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	650.720.202	489.041.540,00	8.700.000	8.700.000,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	573.021.384	420.971.573,00	8.700.000	8.700.000,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.1.01.0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	189.987.056	41.188.656,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.1.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	37.907.476	37.303.526,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.1.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	322.474.512	320.089.891,00	8.700.000	8.700.000,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	22.652.340	22.389.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	77.698.818	68.069.967,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.1.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	77.698.818	68.069.967,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	357.333.291	352.942.747,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.03.1.03	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	357.333.291	352.942.747,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.03.1.03.0001	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	14.075.200	11.602.806,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.03.1.03.0002	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	343.258.091	341.339.941,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0001		UPT Perpustakaan Muhammad Sani	288.997.196	278.019.447	4.464.000	4.430.000	0	0	0	0
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0001	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	288.997.196	278.019.447,00	4.464.000	4.430.000,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0001	2.23.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13.053.500	13.050.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0001	2.23.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	9.003.500	9.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0001	2.23.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4.050.000	4.050.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0001	2.23.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	178.160.501	172.457.985,00	1.683.000	1.650.000,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0001	2.23.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	543.500	540.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0001	2.23.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0,00	1.683.000	1.650.000,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0001	2.23.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	65.027.900	63.999.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0001	2.23.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.245.851	28.223.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0001	2.23.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.203.500	1.152.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0001	2.23.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	83.139.750	78.543.385,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0001	2.23.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	673.000	673.000,00	2.781.000	2.780.000,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0001	2.23.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	673.000	673.000,00	2.781.000	2.780.000,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0001	2.23.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.353.095	56.888.362,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0001	2.23.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	603.500	600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0001	2.23.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.749.595	56.288.362,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0001	2.23.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.757.100	34.950.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0001	2.23.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7.750.100	7.750.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0001	2.23.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	26.003.500	25.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0001	2.23.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.003.500	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.24			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	165.783.721	152.050.766	0	0	0	0	0	0
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000		Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	165.783.721	152.050.766	0	0	0	0	0	0
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	165.783.721	152.050.766,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	162.301.721	148.702.186,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.24.02.1.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	151.242.721	138.457.599,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.24.02.1.01.0004	Penyusutan Arsip Dinamis	11.059.000	10.244.587,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	3.482.000	3.348.580,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	3.482.000	3.348.580,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	149.513.479.384	129.318.985.374	22.595.748.869	16.050.950.761	0	0	0	0
3.25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	59.679.387.615	57.748.352.947	10.172.811.150	9.918.301.782	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000		Dinas Kelautan dan Perikanan	50.154.560.197	49.117.028.540	9.815.731.245	9.582.346.282	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	30.297.902.268	29.630.237.799,00	275.528.274	274.284.000,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	261.975.855	260.759.558,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	189.974.812	189.926.451,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	49.861.883	48.713.907,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.139.160	22.119.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.773.220.375	25.214.701.256,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.445.882.355	23.911.824.236,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.316.939.500	1.292.478.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.398.520	10.398.520,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	132.737.544	128.654.764,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	132.737.544	128.654.764,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.295.541.506	1.239.318.695,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	94.941.936	84.425.049,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	116.068.560	92.809.282,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.092.400	34.769.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	37.750.000	30.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.008.688.610	997.315.164,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	38.495.408	38.423.708,00	275.528.274	274.284.000,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.000.000	1.928.300,00	136.720.000	136.720.000,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.495.408	36.495.408,00	138.808.274	137.564.000,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.350.560.723	2.313.459.528,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	697.289.800	692.640.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.653.270.923	1.620.819.428,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	445.370.856	434.920.290,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	156.114.224	154.226.340,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	271.304.632	263.780.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.952.000	16.913.350,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	259.975.855	254.000.532,00	25.499.000	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	173.716.556	167.793.651,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	173.716.556	167.793.651,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	86.259.299	86.206.881,00	25.499.000	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.02.1.02.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	86.259.299	86.206.881,00	25.499.000	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	13.823.326.869	13.708.111.932,74	9.352.165.870	9.182.612.282,09	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	13.197.541.878	13.191.347.267,94	51.700.196	51.700.000,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.03.1.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	6.541.639.397	6.540.661.587,00	5.700.000	5.700.000,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.03.1.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	6.655.902.481	6.650.685.680,94	46.000.196	46.000.000,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	25.066.140	25.063.640,00	13.050.000	13.050.000,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.03.1.03.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	25.066.140	25.063.640,00	13.050.000	13.050.000,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	600.718.851	491.701.024,80	9.287.415.674	9.117.862.282,09	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	600.718.851	491.701.024,80	9.287.415.674	9.117.862.282,09	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.913.884.513	3.762.332.711,00	16.500.000	8.300.000,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	3.913.884.513	3.762.332.711,00	16.500.000	8.300.000,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.04.1.05.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	19.607.553	6.365.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.04.1.05.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1.898.447.002	1.896.046.680,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1.069.379.000	954.171.528,00	16.500.000	8.300.000,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.04.1.05.0006	Pengelolaan Kesehatan ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	267.252.169	264.112.303,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.04.1.05.0008	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	659.198.789	641.637.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	950.606.957	868.508.012,00	144.038.100	115.150.000,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	950.606.957	868.508.012,00	144.038.100	115.150.000,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.05.1.01.0001	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	950.606.957	868.508.012,00	144.038.100	115.150.000,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	908.863.735	893.837.554,00	2.000.000	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	441.923.435	426.897.254,00	2.000.000	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.06.1.02.0002	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saling	441.923.435	426.897.254,00	2.000.000	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.06.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	466.940.300	466.940.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.06.1.03.0002	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	466.940.300	466.940.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0001		Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Anambas	389.976.878	331.953.535	10.910.000	10.910.000	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0001	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	293.100.401	235.222.918,00	10.910.000	10.910.000,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0001	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	32.734.500	32.734.500,00	10.910.000	10.910.000,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0001	3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	0,00	10.910.000	10.910.000,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0001	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.460.500	2.460.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0001	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.750.000	9.750.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0001	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.524.000	20.524.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0001	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	148.021.174	147.181.841,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0001	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.299.280	14.999.280,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0001	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	132.721.894	132.182.561,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0001	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	112.344.727	55.306.577,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0001	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	112.344.727	55.306.577,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0001	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	96.876.477	96.730.617,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0001	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	96.876.477	96.730.617,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0001	3.25.05.1.01.0001	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	82.828.477	82.682.617,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0001	3.25.05.1.01.0004	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	14.048.000	14.048.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0002		Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Natuna	911.558.109	895.659.516	45.030.835	31.559.000	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0002	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	911.558.109	895.659.516,00	45.030.835	31.559.000,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0002	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	311.525.748	310.994.399,00	45.030.835	31.559.000,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0002	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	206.647.127	206.175.778,00	45.030.835	31.559.000,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0002	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	104.878.621	104.818.621,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0002	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	581.335.725	577.105.117,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0002	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.871.224	21.872.007,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0002	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	557.464.501	555.233.110,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0002	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.696.636	7.560.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0002	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.696.636	7.560.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0003		Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Lingga	988.959.227	953.376.423	17.412.570	17.350.000	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0003	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	812.628.732	784.072.089,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0003	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	504.838.886	479.922.839,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0003	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.799.520	24.474.267,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0003	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	473.039.366	455.448.572,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0003	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	307.789.846	304.149.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0003	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	290.386.126	286.745.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0003	3.25.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.403.720	17.403.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0003	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	147.207.815	143.662.070,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0003	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	147.207.815	143.662.070,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0003	3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	147.207.815	143.662.070,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0003	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	13.182.400	10.184.764,00	17.412.570	17.350.000,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0003	3.25.03.1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	13.182.400	10.184.764,00	17.412.570	17.350.000,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0003	3.25.03.1.05.0002	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	13.182.400	10.184.764,00	17.412.570	17.350.000,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0003	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	15.940.280	15.457.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0003	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	15.940.280	15.457.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0003	3.25.05.1.01.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	15.940.280	15.457.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0004		Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Karimun	1.168.654.562	1.139.056.602	0	0	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0004	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	730.979.075	703.844.303,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0004	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	11.606.965	11.605.965,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0004	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.606.965	11.605.965,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0004	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	713.372.110	686.557.338,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0004	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73.884.415	48.081.895,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0004	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	639.487.695	638.475.443,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0004	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.000.000	5.681.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0004	3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6.000.000	5.681.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0004	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	224.509.966	223.839.643,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0004	3.25.03.1.10	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	224.509.966	223.839.643,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0004	3.25.03.1.10.0002	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	224.509.966	223.839.643,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0004	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	213.165.521	211.372.656,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0004	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	213.165.521	211.372.656,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0004	3.25.05.1.01.0001	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	213.165.521	211.372.656,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0005		Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Batam	875.917.472	866.927.332	47.043.000	47.043.000	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0005	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	515.199.987	511.753.860,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0005	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	14.407.500	14.252.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0005	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.407.500	14.252.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0005	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	500.792.487	497.501.460,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0005	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	68.162.500	65.710.858,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0005	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	432.629.987	431.790.602,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0005	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	113.946.433	112.057.711,00	47.043.000	47.043.000,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0005	3.25.03.1.10	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	113.946.433	112.057.711,00	47.043.000	47.043.000,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0005	3.25.03.1.10.0002	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	113.946.433	112.057.711,00	47.043.000	47.043.000,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0005	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	246.771.052	243.115.761,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0005	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	246.771.052	243.115.761,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0005	3.25.05.1.01.0001	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	144.671.196	141.335.261,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0005	3.25.05.1.01.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	16.218.478	16.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0005	3.25.05.1.01.0004	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	85.881.378	85.580.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0006		UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai	2.379.615.568	1.723.879.443	14.320.000	14.320.000	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0006	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.296.996.848	1.676.546.443,00	14.320.000	14.320.000,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0006	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	81.053.229	73.721.000,00	4.400.000	4.400.000,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0006	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.450.000	4.450.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0006	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51.915.229	47.239.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0006	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.688.000	22.032.000,00	4.400.000	4.400.000,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0006	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	9.920.000	9.920.000,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0006	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	9.920.000	9.920.000,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0006	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	833.118.619	831.592.707,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0006	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	366.293.085	365.049.734,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0006	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	466.825.534	466.542.973,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0006	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.382.825.000	771.232.736,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0006	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.382.825.000	771.232.736,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0006	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	82.618.720	47.333.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0006	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	82.618.720	47.333.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0006	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	82.618.720	47.333.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0007		UPTD Balai Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan (BPM2ZKP)	678.841.381	676.799.848	0	0	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0007	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	608.045.081	606.118.494,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0007	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	605.605.081	603.678.494,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0007	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	92.187.963	91.788.692,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0007	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	513.417.118	511.889.802,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0007	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.440.000	2.440.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0007	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.440.000	2.440.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0007	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	70.796.300	70.681.354,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0007	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	70.796.300	70.681.354,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0007	3.25.06.1.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	31.418.300	31.382.871,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0007	3.25.06.1.02.0002	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	39.378.000	39.298.483,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0008		UPTD Balai Benih Ikan	2.131.304.221	2.043.671.708	222.363.500	214.773.500	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0008	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.333.401.577	1.265.320.908,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0008	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.156.000	2.922.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0008	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.156.000	2.922.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0008	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.294.780.577	1.230.302.876,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0008	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	256.800.000	197.177.718,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0008	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.037.980.577	1.033.125.158,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0008	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.465.000	32.096.032,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0008	3.25.01.1.09.0001	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.465.000	32.096.032,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0008	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	797.902.644	778.350.800,00	222.363.500	214.773.500,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0008	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	797.902.644	778.350.800,00	222.363.500	214.773.500,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0008	3.25.04.1.05.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	761.047.644	741.820.700,00	201.713.500	194.123.500,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0008	3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	36.855.000	36.530.100,00	20.650.000	20.650.000,00	0	0,00	0	0,00
3.26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	27.689.778.477	26.212.216.090	28.500.000	28.500.000	0	0	0	0
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pariwisata	27.689.778.477	26.212.216.090	28.500.000	28.500.000	0	0	0	0
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.901.163.745	13.411.264.823,00	28.500.000	28.500.000,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	218.808.194	218.232.056,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	202.885.900	202.309.762,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.922.294	15.922.294,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.489.835.912	10.176.848.072,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.984.201.312	9.693.185.472,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	494.712.000	472.740.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.922.600	10.922.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.227.818.430	1.138.601.304,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	186.983.280	117.167.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	101.998.000	97.279.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	938.837.150	924.154.404,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	28.500.000	28.500.000,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	28.500.000	28.500.000,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.663.361.209	1.592.280.491,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.900.000	10.900.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72.889.009	67.649.629,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.579.572.200	1.513.730.862,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	301.340.000	285.302.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.09.0001	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	138.080.000	135.663.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.09.0002	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	146.230.000	133.454.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.030.000	16.185.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	455.110.618	229.625.417,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	56.581.201	56.223.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	56.581.201	56.223.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	350.060.017	125.356.117,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.1.03.0009	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi	350.060.017	125.356.117,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	48.469.400	48.046.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.1.04.0009	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	48.469.400	48.046.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	12.822.617.814	12.060.439.550,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	12.822.617.814	12.060.439.550,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	11.556.310.665	10.794.177.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.1.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1.266.307.149	1.266.262.150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	391.618.700	391.618.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifA	391.618.700	391.618.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.04.1.02.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	77.393.100	77.393.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.04.1.02.0014	Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif	220.918.500	220.918.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.04.1.02.0018	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	93.307.100	93.307.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	119.267.600	119.267.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	119.267.600	119.267.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.1.01.0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	119.267.600	119.267.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	13.737.676.330	4.312.302.590	2.997.118.854	2.915.260.031	0	0	0	0
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	11.420.980.626	2.351.766.221	17.094.000	0	0	0	0	0
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	6.220.511.000	1.084.842.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	5.066.233.487	1.072.239.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	5.066.233.487	1.072.239.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	1.154.277.513	12.603.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.02.1.05.0005	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	1.154.277.513	12.603.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.793.068.335	381.154.421,00	17.094.000	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	3.793.068.335	381.154.421,00	17.094.000	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	678.368.750	144.885.716,00	17.094.000	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.03.1.01.0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	3.114.699.585	236.268.705,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	68.044.710	44.613.085,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	49.252.085	41.343.085,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.04.1.01.0006	Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis	49.252.085	41.343.085,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan	18.792.625	3.270.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.04.1.05.0003	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	18.792.625	3.270.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	132.228.531	127.021.801,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	132.228.531	127.021.801,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	132.228.531	127.021.801,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.207.128.050	714.134.914,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	1.207.128.050	714.134.914,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	1.207.128.050	714.134.914,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0001		UPT Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (BP2SPTPHP)	1.751.632.117	1.721.906.975	2.980.024.854	2.915.260.031	0	0	0	0
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0001	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	437.057.655	432.614.555,00	30.004.854	29.800.000,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0001	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	49.557.461	49.106.302,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0001	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.266.792	4.242.420,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0001	3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.910.744	11.868.867,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0001	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.993.351	9.931.715,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0001	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.244.800	2.199.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0001	3.27.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	3.145.518	3.090.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0001	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.996.256	17.773.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0001	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0,00	30.004.854	29.800.000,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0001	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	30.004.854	29.800.000,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0001	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	287.220.144	285.811.903,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0001	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	92.041.800	92.020.022,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0001	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	195.178.344	193.791.881,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0001	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.280.050	97.696.350,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0001	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	67.301.250	65.688.350,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0001	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.320.000	30.360.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0001	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.658.800	1.648.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0001	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	940.533.012	917.040.170,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0001	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	940.533.012	917.040.170,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0001	3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	40.700.776	40.384.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0001	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	899.832.236	876.656.170,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0001	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	374.041.450	372.252.250,00	2.950.020.000	2.885.460.031,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0001	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	374.041.450	372.252.250,00	2.950.020.000	2.885.460.031,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0001	3.27.03.1.01.0007	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	32.446.100	32.402.000,00	841.720.000	838.630.000,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0001	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	341.595.350	339.850.250,00	2.108.300.000	2.046.830.031,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0002		UPT Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan	565.063.587	238.629.394	0	0	0	0	0	0
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0002	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	311.328.329	222.587.394,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0002	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	84.544.475	41.845.890,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0002	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.006.700	1.998.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0002	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.000.400	5.745.270,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0002	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.000.500	1.997.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0002	3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	58.000.875	26.002.020,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0002	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.536.000	6.103.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0002	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	141.769.189	127.995.504,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0002	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	107.586.893	95.087.772,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0002	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	34.182.296	32.907.732,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0002	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.014.665	52.746.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0002	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.145.765	25.481.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0002	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.987.500	27.265.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0002	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.881.400	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0002	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	253.735.258	16.042.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

3.27	2.09.3.27.0.00.09.0002	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	253.735.258	16.042.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0002	3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	253.735.258	16.042.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	1.474.479.167	1.276.997.767	75.894.300	60.000.000	0	0	0	0
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.261.979.242	1.067.154.967	68.394.225	52.550.000	0	0	0	0
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	606.885.075	472.744.089,00	47.095.225	31.450.000,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	15.606.000	15.292.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.03.1.03.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	15.606.000	15.292.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	388.887.150	363.177.286,00	36.299.150	21.000.000,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	388.887.150	363.177.286,00	36.299.150	21.000.000,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	117.248.000	14.996.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	117.248.000	14.996.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	85.143.925	79.278.803,00	10.796.075	10.450.000,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.03.1.07.0002	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	85.143.925	79.278.803,00	10.796.075	10.450.000,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	655.094.167	594.410.878,00	21.299.000	21.100.000,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	655.094.167	594.410.878,00	21.299.000	21.100.000,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	623.426.167	564.348.878,00	21.299.000	21.100.000,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	31.668.000	30.062.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0002		UPTD KPHP Unit I Karimun	30.000.000	29.850.000	0	0	0	0	0	0
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0002	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	30.000.000	29.850.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0002	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	30.000.000	29.850.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0002	3.28.03.1.05.0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	30.000.000	29.850.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0003		UPTD KPHP Unit II Batam	42.500.000	42.237.200	0	0	0	0	0	0
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0003	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	42.500.000	42.237.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0003	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	42.500.000	42.237.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0003	3.28.03.1.05.0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	42.500.000	42.237.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0004		UPTD KPHP Unit III Lingga	30.000.000	28.050.000	0	0	0	0	0	0
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0004	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	30.000.000	28.050.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0004	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	30.000.000	28.050.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0004	3.28.03.1.05.0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	30.000.000	28.050.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0005		UPTD KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang	34.999.925	34.790.800	7.500.075	7.450.000	0	0	0	0
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0005	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	34.999.925	34.790.800,00	7.500.075	7.450.000,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0005	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	34.999.925	34.790.800,00	7.500.075	7.450.000,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0005	3.28.03.1.05.0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	34.999.925	34.790.800,00	7.500.075	7.450.000,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0006		UPTD KPHP Unit V Natuna	45.000.000	44.914.800	0	0	0	0	0	0
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0006	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	45.000.000	44.914.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0006	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	45.000.000	44.914.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0006	3.28.03.1.05.0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	45.000.000	44.914.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0007		UPTD KPHP Unit VI Kepulauan Anambas	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	0	0
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0007	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	30.000.000	30.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0007	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	30.000.000	30.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0007	3.28.03.1.05.0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	30.000.000	30.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.29			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	24.611.788.035	18.062.264.262	9.264.474.565	3.071.938.948	0	0	0	0
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	24.611.788.035	18.062.264.262	9.264.474.565	3.071.938.948	0	0	0	0
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.231.760.128	12.706.157.089,00	287.512.384	185.975.000,00	0	0,00	0	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	470.489.040	444.372.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	101.396.000	94.733.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	196.598.000	183.236.350,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	172.495.040	166.402.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.816.197.142	9.460.534.690,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.345.940.246	8.998.543.538,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	320.490.000	320.490.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	149.766.896	141.501.152,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	102.355.366	87.472.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	81.355.366	79.272.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	21.000.000	8.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.115.944.100	1.032.366.298,00	287.512.384	185.975.000,00	0	0,00	0	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0,00	287.512.384	185.975.000,00	0	0,00	0	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	78.346.800	70.412.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	58.758.000	58.326.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	978.839.300	903.627.898,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.277.705.136	1.264.745.901,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.101.700	36.017.914,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.235.603.436	1.228.727.987,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	449.069.344	416.665.450,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	232.717.704	202.885.050,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.150.000	30.579.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000	25.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	158.201.640	158.201.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGELOGLIAN	429.510.032	375.666.910,81	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	347.460.032	332.709.510,81	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.02.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	347.460.032	332.709.510,81	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	82.050.000	42.957.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.02.1.03.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	29.317.000	23.964.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	52.733.000	18.993.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	230.249.000	180.064.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.03.1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	34.650.000	19.164.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.03.1.04.0003	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	34.650.000	19.164.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.03.1.12	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	66.621.000	65.460.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.03.1.12.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	66.621.000	65.460.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.03.1.13	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	128.978.000	95.439.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.03.1.13.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	128.978.000	95.439.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	7.412.625.300	2.310.524.831,00	621.000.000	483.000.000,00	0	0,00	0	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	7.173.114.700	2.128.563.931,00	621.000.000	483.000.000,00	0	0,00	0	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.05.1.07.0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	5.292.215.500	1.531.076.200,00	621.000.000	483.000.000,00	0	0,00	0	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.05.1.07.0009	Pemeliharaan infrastruktur aneka EBT	1.880.899.200	597.487.731,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.05.1.10	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	239.510.600	181.960.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.05.1.10.0005	Sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	239.510.600	181.960.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	3.307.643.575	2.489.850.732,00	8.355.962.181	2.402.963.948,60	0	0,00	0	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.01	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	122.276.400	101.776.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.01.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	93.763.000	73.798.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	28.513.400	27.978.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	23.305.500	22.634.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.02.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	23.305.500	22.634.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.05	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	60.329.400	44.429.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.05.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	41.174.000	31.114.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.05.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	19.155.400	13.315.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	3.101.732.275	2.321.010.732,00	8.355.962.181	2.402.963.948,60	0	0,00	0	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.06.0002	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	2.188.310.000	2.096.679.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.06.0004	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	112.480.000	86.937.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.06.0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	770.567.275	137.026.832,00	8.355.962.181	2.402.963.948,60	0	0,00	0	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.06.0007	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	30.375.000	367.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	2.158.809.289	2.153.616.766	0	0	0	0	0	0
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.158.809.289	2.153.616.766	0	0	0	0	0	0
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	125.000.000	125.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	125.000.000	125.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	125.000.000	125.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	453.597.402	453.597.402,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	453.597.402	453.597.402,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.03.1.01.0002	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	453.597.402	453.597.402,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	143.073.937	142.224.537,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	143.073.937	142.224.537,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	57.984.000	57.134.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	85.089.937	85.089.937,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	113.424.868	113.424.868,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	113.424.868	113.424.868,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.05.1.01.0002	Pameran Dagang Lokal	27.868.200	27.868.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.05.1.01.0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	59.708.500	59.708.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor	25.848.168	25.848.168,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	846.730.482	844.197.779,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	546.874.116	544.341.413,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	546.874.116	544.341.413,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	299.856.366	299.856.366,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	299.856.366	299.856.366,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	476.982.600	475.172.180,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	476.982.600	475.172.180,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.07.1.03.0002	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	476.982.600	475.172.180,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	20.141.560.470	19.533.432.151	56.950.000	56.950.000	0	0	0	0
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	20.141.560.470	19.533.432.151	56.950.000	56.950.000	0	0	0	0
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.393.863.768	15.132.448.502,00	56.950.000	56.950.000,00	0	0,00	0	0,00
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	296.271.942	295.120.647,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	127.060.042	126.380.147,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.694.100	11.694.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	157.517.800	157.046.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.757.343.456	10.549.430.245,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.308.571.456	10.112.778.245,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	448.772.000	436.652.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	82.205.222	82.201.322,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	54.590.000	54.590.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	27.615.222	27.611.322,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.242.393.719	1.230.830.982,00	56.950.000	56.950.000,00	0	0,00	0	0,00
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	319.364.335	319.364.335,00	56.950.000	56.950.000,00	0	0,00	0	0,00
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	106.169.200	100.548.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	203.590.000	203.082.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	613.270.184	607.836.147,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.762.080.029	2.731.590.128,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	130.000.000	130.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.632.080.029	2.601.590.128,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	253.569.400	243.275.178,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	218.469.400	209.345.178,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.100.000	33.930.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	4.671.593.002	4.324.879.949,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	4.671.593.002	4.324.879.949,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	599.989.750	599.989.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	2.915.531.252	2.808.126.794,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1.116.072.000	877.576.158,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.02.1.01.0006	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	40.000.000	39.187.247,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	76.103.700	76.103.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	76.103.700	76.103.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.03.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	76.103.700	76.103.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.32			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	20.000.000	19.802.800	0	0	0	0	0	0
3.32	2.07.3.32.0.00.07.0000		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	20.000.000	19.802.800	0	0	0	0	0	0
3.32	2.07.3.32.0.00.07.0000	3.32.02	PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI	20.000.000	19.802.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.32	2.07.3.32.0.00.07.0000	3.32.02.1.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	20.000.000	19.802.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.32	2.07.3.32.0.00.07.0000	3.32.02.1.01.0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	20.000.000	19.802.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	523.770.254.816	497.272.203.728	18.242.548.520	12.673.702.700	0	0	0	0
4.01			SEKRETARIAT DAERAH	371.087.870.256	356.566.561.741	14.567.604.324	12.111.402.700	0	0	0	0
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001		Biro Hukum	3.182.131.037	2.790.788.096	99.757.100	98.416.000	0	0	0	0
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	981.256.793	904.816.799,00	56.209.900	54.950.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65.668.534	64.200.183,00	3.296.000	3.100.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	65.668.534	64.200.183,00	3.296.000	3.100.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	313.196.128	239.601.349,00	4.042.500	3.910.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	76.214.100	75.538.600,00	4.042.500	3.910.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.154.000	13.134.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.568.500	14.568.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.848.400	4.088.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	202.411.128	132.271.349,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60.564.000	60.200.000,00	48.871.400	47.940.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	60.564.000	60.200.000,00	48.871.400	47.940.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	445.421.235	444.429.717,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.600.380	8.536.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	436.820.855	435.893.217,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96.406.896	96.385.550,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	87.926.896	87.925.550,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.480.000	8.460.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	2.200.874.244	1.885.971.297,00	43.547.200	43.466.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	993.922.972	862.669.483,00	40.047.200	40.016.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	336.829.104	333.855.108,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	305.211.372	214.631.377,00	14.780.000	14.750.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	107.684.524	102.272.989,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	244.197.972	211.910.009,00	25.267.200	25.266.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	1.206.951.272	1.023.301.814,00	3.500.000	3.450.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	320.448.900	290.127.152,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	886.502.372	733.174.662,00	3.500.000	3.450.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002		Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.107.561.928	4.082.833.024	135.611.324	129.365.000	0	0	0	0
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.449.932.135	2.435.988.100,00	135.611.324	129.365.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	78.406.000	78.122.877,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	78.406.000	78.122.877,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	312.571.450	312.058.631,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	126.349.600	126.187.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	186.221.850	185.871.531,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	415.516.144	408.491.628,00	43.691.024	43.600.000,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	537.100	487.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	868.400	800.000,00	43.691.024	43.600.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.491.494	5.950.643,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.250.000	10.248.024,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.998.400	8.858.495,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	19.776.000	19.153.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	750.000	750.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	363.844.750	362.244.266,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.000	0,00	77.171.000	77.125.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	0	0,00	25.046.000	25.000.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.000	0,00	52.125.000	52.125.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	896.096.345	892.242.201,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.333.650	445.628,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.000.000	48.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	845.262.695	842.296.573,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	293.871.800	293.206.824,00	14.749.300	8.640.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	235.866.800	235.719.324,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.550.000	2.550.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.380.000	1.380.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	54.075.000	53.557.500,00	14.749.300	8.640.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	453.451.396	451.865.939,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	453.451.396	451.865.939,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	1.657.629.793	1.646.844.924,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	647.273.065	638.030.630,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.01.0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	25.397.900	24.917.902,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	541.271.465	533.584.436,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah	80.603.700	79.528.292,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	356.813.851	356.642.899,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	87.699.936	87.675.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.02.0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	36.302.441	36.293.854,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	232.811.474	232.673.945,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	653.542.877	652.171.395,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	352.284.544	352.166.740,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.03.0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	163.391.133	162.218.905,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.03.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	137.867.200	137.785.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003		Biro Organisasi	1.624.678.451	1.609.519.891	278.050.000	278.050.000	0	0	0	0
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.264.700.238	1.255.101.913,00	278.050.000	278.050.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	177.159.630	172.703.119,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	177.159.630	172.703.119,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.600.000	10.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	9.600.000	9.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.000.000	1.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	394.234.796	391.540.069,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.113.216	48.429.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.154.380	11.750.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	13.453.200	11.880.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	319.514.000	319.480.469,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	660.000	652.500,00	278.050.000	278.050.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	660.000	652.500,00	278.050.000	278.050.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	534.357.412	533.570.025,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.480.352	1.293.632,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.620.000	46.620.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	486.257.060	485.656.393,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	147.688.400	146.036.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	138.231.200	136.666.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.457.200	9.370.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	359.978.213	354.417.978,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	130.765.663	128.071.848,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	26.363.900	24.187.246,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	26.140.398	26.140.398,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan	78.261.365	77.744.204,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	229.212.549	226.346.130,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	65.299.713	65.219.793,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	30.316.654	29.248.814,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.02.1.02.0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	30.550.264	30.550.264,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	44.001.354	43.140.252,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	59.044.564	58.187.007,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004		Biro Kesejahteraan Rakyat	156.989.853.765	151.659.146.111	265.983.000	231.573.000	0	0	0	0
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.434.936.171	1.297.838.969,00	265.983.000	231.573.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85.915.319	81.770.820,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	72.535.619	70.341.120,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.379.700	11.429.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	138.254.000	115.727.358,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	65.304.000	65.304.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	72.950.000	50.423.358,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	462.524.972	382.805.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.671.465	59.979.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	401.853.507	322.826.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40.379.600	40.379.600,00	265.983.000	231.573.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	40.329.600	40.329.600,00	203.241.000	203.241.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000	50.000,00	62.742.000	28.332.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	453.941.279	446.244.741,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	102.900.000	101.440.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	351.041.279	344.804.741,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	253.921.000	230.911.450,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	253.921.000	230.911.450,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	155.554.917.593	150.361.307.142,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	139.188.227.437	134.275.026.843,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	108.654.068.893	104.135.477.238,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	30.534.158.543	30.139.549.605,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	16.219.631.156	15.965.320.049,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	16.096.473.256	15.862.530.088,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	23.007.100	19.993.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	100.150.800	82.796.861,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	147.059.000	120.960.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	56.629.000	42.176.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.04.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	51.170.000	43.725.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.04.1.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	39.260.000	35.058.450,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005		Biro Perekonomian dan Pembangunan	3.123.391.853	3.050.883.564	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.174.288.362	2.129.601.220,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	108.623.941	105.594.822,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	108.623.941	105.594.822,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	558.031.344	537.131.493,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	115.004.300	108.921.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	44.872.172	43.148.196,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	398.154.872	385.062.097,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	735.004.420	723.898.424,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.000.000	8.080.874,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	96.300.000	96.090.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	623.704.420	619.727.550,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.143.800	147.421.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	136.093.800	133.796.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.050.000	13.625.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	622.484.857	615.554.981,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	622.484.857	615.554.981,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	742.550.321	722.392.814,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	132.443.300	127.956.917,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	76.111.800	73.579.473,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.06.1.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	56.331.500	54.377.444,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	223.176.025	218.875.101,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	69.714.800	68.379.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.06.1.02.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	72.845.601	70.847.569,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.06.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	80.615.624	79.647.832,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	386.930.996	375.560.796,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.06.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	215.342.200	205.941.512,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.06.1.03.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	171.588.796	169.619.284,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	206.553.170	198.889.530,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	94.427.824	94.375.394,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.08.1.01.0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	94.427.824	94.375.394,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	112.125.346	104.514.136,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.08.1.02.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	112.125.346	104.514.136,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006		Biro Umum	188.077.109.522	179.648.115.662	13.471.515.300	11.070.288.100	0	0	0	0
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	188.077.109.522	179.648.115.662,23	13.471.515.300	11.070.288.100,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	199.762.908	194.918.243,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	199.762.908	194.918.243,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	72.593.028.187	71.659.616.611,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	68.416.084.243	67.693.480.308,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.186.531.100	2.981.722.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	576.980.620	573.324.998,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	183.477.224	182.442.565,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	65.000.000	64.700.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiaipan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	60.016.000	59.288.340,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	104.939.000	104.657.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.568.052.416	1.548.788.106,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	44.289.000	44.267.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	698.943.368	681.058.140,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	155.122.500	154.712.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	58.863.000	58.610.760,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	610.834.548	610.139.806,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	779.187.716	759.887.221,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	335.851.448	327.588.430,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	129.134.532	121.276.441,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3.500.000	3.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	160.155.136	158.360.350,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150.546.600	149.162.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	29.765.443.528	29.481.783.414,00	2.107.964.300	2.090.672.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.380.067.000	2.355.763.206,00	1.974.265.100	1.957.220.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	654.600.448	653.079.517,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.103.475.609	11.092.309.487,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	438.002.748	432.336.298,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	111.962.324	106.952.779,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.811.461.803	12.741.650.262,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.818.412.392	1.791.598.868,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	275.975.972	154.865.372,00	133.699.200	133.452.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	171.485.232	153.227.625,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.780.012.732	9.551.324.889,00	11.363.551.000	8.979.616.100,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.000.000	0,00	2.843.720.000	2.375.300.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.630.029.060	9.404.589.335,00	7.414.981.000	5.502.177.100,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	148.983.672	146.735.554,00	1.104.850.000	1.102.139.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.931.183.323	35.984.308.018,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	589.495.749	574.762.382,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.919.102.374	7.387.703.268,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.715.317.855	9.691.083.539,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.707.267.345	18.330.758.829,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.073.526.120	18.702.185.842,83	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	907.284.340	904.659.197,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.503.943.389	6.399.079.739,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	168.239.224	167.420.768,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.587.692.884	4.459.158.106,33	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	829.502.661	817.068.397,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.076.863.622	5.954.799.635,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.518.269.418	4.139.690.537,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.545.658.626	1.321.600.258,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.11.0002	Penyediaan Pakai Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	320.311.850	306.496.337,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	140.705.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.511.593.942	2.511.593.942,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	7.175.995.570	6.935.567.287,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	3.198.138.166	3.054.902.136,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	2.398.094.600	2.343.988.886,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1.579.762.804	1.536.676.265,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	692.647.604	690.045.493,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	692.647.604	690.045.493,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007		Biro Administrasi Pimpinan	11.829.835.023	11.582.460.325	173.620.400	161.375.400	0	0	0	0
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.829.835.023	11.582.460.325,00	173.620.400	161.375.400,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	274.855.450	274.608.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	225.257.250	225.114.650,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.121.000	4.121.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.477.200	45.373.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	125.732.000	125.537.240,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	125.732.000	125.537.240,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.109.122.682	1.080.191.358,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	78.316.250	61.638.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	61.690.000	49.636.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	125.545.000	125.348.360,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	843.571.432	843.568.498,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.052.500	8.052.500,00	161.575.400	161.375.400,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.052.500	8.052.500,00	161.575.400	161.375.400,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.391.475.238	3.324.472.616,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18.700.000	18.700.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	126.533.558	122.405.244,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	219.600.000	219.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.026.641.680	2.963.967.372,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	198.400.000	161.207.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	158.940.000	142.108.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.460.000	19.099.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	2.524.776.315	2.424.244.935,00	12.045.000	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.13.0001	Penyiapan Materi Pimpinan	261.713.500	207.502.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1.070.722.112	1.054.354.896,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.13.0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	1.192.340.703	1.162.387.739,00	12.045.000	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	4.197.420.838	4.184.145.126,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	2.153.455.872	2.143.778.476,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.14.0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.451.159.566	1.448.974.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	592.805.400	591.392.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008		Biro Pengadaan Barang/Jasa	2.153.308.676	2.142.815.068	143.067.200	142.335.200	0	0	0	0
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.005.982.044	1.995.890.068,00	143.067.200	142.335.200,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.107.000	59.675.667,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60.107.000	59.675.667,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	383.000	298.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	383.000	298.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	455.783.900	453.829.764,00	136.702.000	135.970.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.945.900	4.788.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.092.300	1.080.000,00	136.702.000	135.970.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	114.619.900	114.233.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.123.200	13.469.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9.994.600	9.960.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	311.008.000	310.299.064,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0,00	6.365.200	6.365.200,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	6.365.200	6.365.200,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.269.343.402	1.263.607.756,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	2.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.913.300	5.504.025,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87.612.924	87.570.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.172.317.178	1.168.033.731,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	220.364.742	218.478.881,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	157.404.742	156.215.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.960.000	7.810.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	55.000.000	54.453.881,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	147.326.632	146.925.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	8.665.200	8.645.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.07.1.01.0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	388.400	380.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	388.400	380.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.07.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	7.888.400	7.885.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	131.509.632	131.280.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	388.400	385.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.07.1.02.0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	130.732.832	130.580.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.07.1.02.0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	388.400	315.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	7.151.800	7.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.07.1.03.0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	6.763.400	6.650.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.07.1.03.0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	388.400	350.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02			SEKRETARIAT DPRD	152.682.384.560	140.705.641.987	3.674.944.196	562.300.000	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000		Sekretariat DPRD	152.682.384.560	140.705.641.987	3.674.944.196	562.300.000	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	84.365.866.723	76.957.262.907,00	3.674.944.196	562.300.000,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	642.317.700	564.079.935,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	95.000.000	87.617.036,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	45.000.000	25.269.045,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	45.000.000	4.799.689,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000	18.656.865,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	437.317.700	427.737.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.675.500.745	14.167.346.911,00	30.000.000	29.950.000,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.098.786.445	13.021.081.379,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	990.160.000	804.406.362,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	280.000.000	186.341.971,00	30.000.000	29.950.000,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	261.554.300	122.646.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	45.000.000	32.870.499,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.214.550.500	978.645.561,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	583.130.000	554.504.300,00		0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	431.420.500	286.687.811,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	200.000.000	137.453.450,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	22.158.168.856	20.083.320.678,00	851.247.578	173.550.000,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	350.939.664	136.234.000,00	532.857.578	173.550.000,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.353.324.426	8.734.523.255,00	318.390.000	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.603.904.766	10.595.382.424,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	850.000.000	617.180.999,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	223.378.689	196.144.500,00	2.793.696.618	358.800.000,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	229.264	0,00	2.792.679.081	358.800.000,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	223.149.425	196.144.500,00	1.017.537	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.190.157.137	6.687.746.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.183.999.550	1.766.350.101,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.006.157.587	4.921.395.899,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.405.515.228	4.407.281.429,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.358.072.628	1.922.720.475,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	344.510.000	170.205.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	567.474.348	364.644.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	345.200.000	341.597.327,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.790.258.252	1.608.114.627,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	31.506.277.868	29.574.156.893,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	30.315.883.368	28.629.573.243,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	934.294.500	901.434.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	256.100.000	43.149.550,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	350.000.000	298.541.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	350.000.000	298.541.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	68.316.517.837	63.748.379.080,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	1.756.999.954	1.523.478.740,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	359.999.954	278.986.650,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda	750.000.000	732.021.605,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	360.000.000	329.380.590,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	287.000.000	183.089.895,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	280.000.000	89.250.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.02.0003	Pembahasan APBD	280.000.000	89.250.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	13.050.654.376	11.667.165.848,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	1.852.564.000	1.329.464.403,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	2.777.000.000	2.725.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	2.483.051.808	1.889.793.845,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	5.938.038.568	5.722.107.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	18.625.935.155	17.836.365.928,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	188.000.000	187.514.822,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses	18.437.935.155	17.648.851.106,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	34.602.928.352	32.632.117.964,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	26.282.550.702	24.409.719.440,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	320.000.000	294.773.050,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	140.000.000	68.789.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	7.860.377.650	7.858.835.674,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	277.931.519.567	261.497.825.300	8.915.860.725	7.983.528.968	4.773.672.048	2.065.423.140	841.617.613.430	775.144.201.015
5.01			PERENCANAAN	32.304.407.014	32.066.571.082	529.065.448	521.297.800	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	32.304.407.014	32.066.571.082	529.065.448	521.297.800	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	26.711.795.498	26.508.116.121,00	529.065.448	521.297.800,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	162.583.333	162.341.333,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	106.369.473	106.127.473,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.496.159	19.496.159,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.717.701	36.717.701,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.869.688.129	20.710.006.429,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.136.151.529	19.976.942.727,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	614.772.000	614.735.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	33.026.200	32.926.613,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	38.733.000	38.535.686,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	27.803.600	27.692.710,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	19.201.800	19.173.693,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	726.000	726.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	726.000	726.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	32.164.000	29.229.978,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	32.164.000	29.229.978,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.666.640.378	1.640.389.204,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	58.993.725	58.987.009,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	99.994.905	99.917.430,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	249.994.023	249.671.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	233.551.770	232.882.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	85.360.000	85.120.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	227.015.955	205.316.069,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	711.730.000	708.495.196,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.984.000	3.800.000,00	72.219.848	68.575.000,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.984.000	3.800.000,00	72.219.848	68.575.000,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.941.051.283	2.929.094.990,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.550.000	12.550.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	82.890.000	81.419.406,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	236.400.000	236.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.609.211.283	2.598.725.584,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.034.958.374	1.032.528.187,00	456.845.600	452.722.800,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.09.0001	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	78.757.900	78.757.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.09.0002	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	396.329.650	396.329.650,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.621.000	49.621.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	510.249.824	507.819.637,00	456.845.600	452.722.800,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	3.741.181.127	3.721.941.666,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	2.974.022.856	2.956.455.575,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.1.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	83.691.750	83.444.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	72.323.175	72.316.175,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	204.366.174	202.348.229,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	578.229.389	578.215.389,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	2.035.412.368	2.020.130.832,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	22.298.883	22.298.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	22.298.883	22.298.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	744.859.388	743.187.291,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.1.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	318.663.405	317.984.708,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	426.195.983	425.202.583,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.851.430.388	1.836.513.295,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	509.015.749	502.152.238,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	130.664.500	128.499.754,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	25.654.690	24.663.890,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	31.047.300	30.777.887,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	70.217.159	69.050.510,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	137.789.000	136.822.845,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	113.643.100	112.337.352,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	552.296.939	551.047.385,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	379.903.814	379.870.471,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	172.393.125	171.176.914,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	790.117.700	783.313.672,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	136.422.800	134.704.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	112.715.100	111.578.875,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	145.438.400	144.195.219,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	395.541.400	392.834.678,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02			KEUANGAN	186.668.980.622	172.997.990.846	5.356.380.156	4.558.964.168	4.773.672.048	2.065.423.140	841.617.613.430	775.144.201.015
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000		Badan Keuangan dan Aset Daerah	64.866.800.728	58.142.334.324	844.964.817	803.140.000	4.773.672.048	2.065.423.140	841.617.613.430	775.144.201.015
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	41.545.163.958	38.081.946.461,81	844.964.817	803.140.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	654.428.464	598.903.026,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	353.696.241	329.422.610,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	106.292.674	92.668.254,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	85.159.818	75.945.508,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	109.279.731	100.866.654,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.397.968.889	22.883.341.718,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.388.061.384	20.946.732.563,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.758.528.000	1.703.344.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	134.945.423	121.629.450,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	116.434.082	111.635.705,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	484.405.000	448.688.712,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	208.900.000	202.285.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	275.505.000	246.403.712,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.657.421.272	2.486.792.927,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	48.000.000	44.674.020,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.750.000	87.649.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	210.000.000	174.847.933,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	230.000.000	223.550.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	25.533.047	25.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	59.100.000	47.306.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.673.200.578	1.576.464.974,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	320.837.647	306.800.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.877.383	14.288.000,00	844.964.817	803.140.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	7.390.405	6.295.000,00	133.353.735	126.460.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.486.978	7.993.000,00	711.611.082	676.680.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.201.465.450	10.712.956.628,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	206.000.000	202.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	211.600.000	211.414.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.783.865.450	10.299.042.628,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.132.597.500	936.975.450,81	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	85.000.000	65.905.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	785.856.500	679.324.360,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	176.741.000	107.998.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	85.000.000	83.748.090,81	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	18.910.183.400	16.079.291.108,50	0	0,00	4.773.672.048	2.065.423.140,00	841.617.613.430	775.144.201.015,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.612.725.400	4.721.087.640,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	522.200.000	449.661.912,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	231.538.000	210.275.420,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	268.240.000	157.488.080,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD	167.900.000	156.435.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	476.070.000	379.500.693,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	328.763.000	310.651.068,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	676.086.000	537.719.032,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	297.500.000	263.689.218,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1.723.959.000	1.411.771.724,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	297.000.000	246.246.396,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	623.469.400	597.648.297,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	3.148.069.000	2.636.308.625,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	344.000.000	279.537.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.02.0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	358.500.000	314.896.374,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.02.0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	249.009.000	209.030.122,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.02.0005	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	402.450.000	261.623.702,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.02.0006	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	606.360.000	521.866.966,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.02.0007	Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	209.500.000	150.275.252,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.02.0011	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	584.400.000	534.147.787,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.02.0012	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	393.850.000	364.931.122,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	2.122.015.321	1.938.907.353,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.03.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	814.705.272	761.461.703,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.03.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	167.844.600	155.856.404,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.03.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	250.348.000	246.505.073,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.03.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	200.910.339	177.164.994,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.03.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	197.870.110	143.954.112,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.03.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	185.199.000	155.412.922,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.03.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	305.138.000	298.552.145,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	2.774.380.408	2.180.244.987,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.04.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	250.134.352	220.478.240,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.04.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	250.000.000	161.698.585,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	651.172.886	584.902.220,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	507.451.937	399.920.587,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.04.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	165.042.800	121.285.535,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.04.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	285.299.657	135.831.849,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.04.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	295.728.000	259.714.761,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.04.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	180.950.776	174.867.821,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.04.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	188.600.000	121.545.389,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.05	Penujangan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	4.117.826.000	3.748.228.473,00	0	0,00	4.773.672.048	2.065.423.140,00	841.617.613.430	775.144.201.015,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.05.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	4.050.000.000	3.692.560.273,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	67.826.000	55.668.200,00	0	0,00	0	0,00	29.445.500.000	26.853.000.000,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	0	0,00	0	0,00	4.773.672.048	2.065.423.140,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	0	0,00	0	0,00	0	0,00	812.172.113.430	748.291.201.015,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	1.135.167.271	854.514.030,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.06.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	564.989.569	473.098.414,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.06.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	570.177.702	381.415.616,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	4.411.453.370	3.981.096.754,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	4.411.453.370	3.981.096.754,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga	580.480.000	546.047.386,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	238.698.000	211.628.299,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	345.218.000	327.188.776,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.1.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	635.574.288	580.084.486,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	820.987.712	724.674.622,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.1.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	836.837.300	808.508.669,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	472.500.000	419.181.984,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.1.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	368.950.000	284.620.082,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.1.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	112.208.070	79.162.450,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0001		UPT Dana Bergulir	645.369.968	552.763.204	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0001	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	186.282.568	159.928.470,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0001	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	186.282.568	159.928.470,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0001	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	186.282.568	159.928.470,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0001	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	459.087.400	392.834.734,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0001	5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	40.000.000	17.536.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0001	5.02.02.1.04.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	40.000.000	17.536.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0001	5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	419.087.400	375.298.234,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0001	5.02.02.1.05.0006	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	419.087.400	375.298.234,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0002		UPT Pemberdayaan dan Pemanfaatan Aset	2.186.587.172	2.093.748.538	34.784.958	34.782.058	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0002	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.186.587.172	2.093.748.538,00	34.784.958	34.782.058,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0002	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	537.262.110	492.786.705,00	34.784.958	34.782.058,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0002	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60.000.000	56.522.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0002	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	131.215.042	129.667.872,00	34.784.958	34.782.058,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0002	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000	40.874.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0002	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000	23.738.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0002	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	271.047.068	241.983.433,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0002	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.026.094.366	983.434.203,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0002	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	408.000.000	370.839.683,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0002	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	618.094.366	612.594.520,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0002	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	623.230.696	617.527.630,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0002	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	536.230.696	532.595.130,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0002	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	87.000.000	84.932.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000		Badan Pendapatan Daerah	104.689.991.691	99.272.483.421	4.078.941.698	3.417.146.610	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	99.198.836.498	94.653.665.041,20	3.572.087.198	3.083.118.610,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	497.753.932	489.229.867,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	189.873.376	187.451.622,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.895.000	20.126.797,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	285.985.556	281.651.448,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	79.248.895.307	78.980.310.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	39.857.561.139	39.698.343.136,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	39.374.223.168	39.266.435.041,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	17.111.000	15.532.223,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	135.264.804	132.924.977,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	135.264.804	132.924.977,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	548.064.000	429.863.069,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	74.987.400	67.882.552,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	153.519.400	129.182.847,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	197.793.400	119.734.470,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	121.763.800	113.063.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	385.433.900	352.779.521,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	198.076.000	198.076.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	187.357.900	154.703.521,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.115.302.437	1.920.795.669,00	1.815.826.257	1.431.615.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	62.917.000	62.917.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0,00	1.327.157.457	1.309.735.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	0,00	485.681.000	118.900.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	421.134.620	404.733.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.743.098.900	754.213.900,00	2.987.800	2.980.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	49.980.000	48.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	95.850.000	80.035.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	563.302.113	439.267.997,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	179.019.804	131.028.772,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.272.392.609	1.333.399.123,00	1.756.260.941	1.651.503.610,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0,00	633.820.019	633.820.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	1.084.322.809	828.760.790,00	1.122.440.922	1.017.683.610,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.188.069.800	504.638.333,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.559.555.186	7.338.285.233,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18.790.000	18.321.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.595.660.000	2.443.173.814,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	158.000.000	146.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.787.105.186	4.730.390.419,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.436.174.323	3.676.077.182,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	893.061.640	807.308.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	335.102.000	224.111.332,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.208.010.683	2.644.656.950,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	433.501.500	415.493.566,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	91.199.000	90.636.348,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.1.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	91.199.000	90.636.348,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	291.286.400	276.033.818,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.1.03.0005	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	291.286.400	276.033.818,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	51.016.100	48.823.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.1.04.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	51.016.100	48.823.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.057.653.693	4.203.324.814,00	506.854.500	334.028.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.057.653.693	4.203.324.814,00	506.854.500	334.028.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	697.629.880	645.479.408,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	852.491.520	749.306.971,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	993.346.352	785.615.947,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	197.002.876	174.285.231,00	492.254.500	319.440.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	748.351.935	601.766.452,00	12.800.000	12.800.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah	28.630.000	21.226.593,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	157.862.550	123.008.701,00	1.800.000	1.788.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0009	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	141.573.600	132.621.131,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	420.231.752	332.836.159,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0011	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	271.946.952	192.090.985,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	338.361.376	266.466.104,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	144.864.900	134.208.640,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0014	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	65.360.000	44.412.492,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0001		UPT PPD Batam Centre	3.690.512.530	3.120.115.497	95.750.000	23.000.000	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0001	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.728.956.186	1.361.146.275,00	95.750.000	23.000.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0001	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	74.937.000	74.937.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0001	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	74.937.000	74.937.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0001	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	685.538.681	457.524.777,00	95.750.000	23.000.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0001	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.577.000	8.577.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0001	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	147.000	0,00	38.250.000	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0001	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	479.800	332.000,00	57.500.000	23.000.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0001	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	217.990.100	181.419.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0001	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	240.346.925	52.424.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0001	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.547.000	5.147.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0001	5.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	580.000	547.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0001	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	211.870.856	209.077.477,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0001	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	197.039.740	173.975.033,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0001	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.147.000	4.147.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0001	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	130.345.740	123.028.033,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0001	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62.547.000	46.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0001	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	771.440.765	654.709.465,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0001	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	736.233.765	645.579.465,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0001	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.207.000	9.130.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0001	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.961.556.344	1.758.969.222,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0001	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.961.556.344	1.758.969.222,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0001	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	510.392.000	322.168.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0001	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	86.084.800	83.950.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0001	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	682.860.280	676.564.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0001	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	682.219.264	676.286.722,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0002		UPT PPD Tanjungpinang	2.587.698.844	2.458.831.008	57.055.332	46.365.000	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0002	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.373.239.662	1.274.229.568,00	57.055.332	46.365.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0002	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.917.061	21.797.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0002	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	21.917.061	21.797.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0002	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	570.091.241	537.535.027,00	57.055.332	46.365.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0002	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.138.850	6.855.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0002	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.976.250	4.800.000,00	57.055.332	46.365.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0002	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	37.004.568	32.656.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0002	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	62.343.483	53.073.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0002	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	72.420.410	64.986.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0002	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.000.000	5.760.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0002	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.668.000	2.690.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0002	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	372.539.680	366.714.327,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0002	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	265.498.160	248.148.519,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0002	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000	3.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0002	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	261.993.160	245.148.519,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0002	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0002	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	515.733.200	466.749.022,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0002	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	227.945.200	190.655.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0002	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.519.500	20.140.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0002	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	257.268.500	255.954.022,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0002	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.214.459.182	1.184.601.440,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0002	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.214.459.182	1.184.601.440,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0002	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	272.905.408	258.156.008,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0002	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	47.218.300	45.570.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0002	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	674.113.466	664.145.834,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0002	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	220.222.008	216.728.798,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0003		UPT PPD Bintan	1.564.907.732	1.409.529.766	63.847.089	61.425.000	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0003	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	873.484.560	807.346.881,00	48.984.189	48.750.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0003	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.031.700	23.730.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0003	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	25.031.700	23.730.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0003	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	250.063.992	215.383.399,00	48.984.189	48.750.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0003	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.257.871	7.887.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0003	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	609.951	0,00	44.319.525	44.200.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0003	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	0,00	4.664.664	4.550.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0003	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	88.834.090	85.501.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0003	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	43.263.080	33.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0003	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	800.000	744.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0003	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	108.299.000	87.650.899,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0003	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	133.514.443	126.789.183,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0003	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.000.000	13.990.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0003	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	119.514.443	112.799.183,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0003	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	464.874.425	441.444.299,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0003	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	216.727.400	206.115.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0003	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.390.000	30.680.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0003	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	205.757.025	204.649.299,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0003	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	691.423.172	602.182.885,00	14.862.900	12.675.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0003	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	691.423.172	602.182.885,00	14.862.900	12.675.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0003	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	314.587.996	261.984.035,00	14.862.900	12.675.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0003	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	42.875.000	42.424.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0003	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	142.256.648	121.572.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0003	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	191.703.528	176.201.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0004		UPT PPD Karimun	1.444.126.599	1.351.183.013	68.910.946	66.370.000	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0004	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	836.847.878	787.166.133,00	68.910.946	66.370.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0004	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.895.500	35.260.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0004	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	35.895.500	35.260.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0004	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	333.177.424	310.118.073,00	68.910.946	66.370.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0004	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0,00	38.631.334	37.500.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0004	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	0,00	23.529.612	22.270.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0004	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56.259.900	55.112.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0004	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.721.800	9.125.900,00	6.750.000	6.600.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0004	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.600.000	3.300.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0004	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.759.000	3.612.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0004	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	259.836.724	238.968.073,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0004	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	287.703.182	263.794.714,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0004	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.150.000	6.150.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0004	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	281.553.182	257.644.714,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0004	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	180.071.772	177.993.346,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0004	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55.380.000	55.060.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0004	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.120.000	20.575.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0004	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	102.571.772	102.358.346,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0004	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	607.278.721	564.016.880,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0004	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	607.278.721	564.016.880,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0004	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	241.257.597	228.640.383,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0004	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	33.432.900	32.191.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0004	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	166.981.824	158.749.097,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0004	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	165.606.400	144.436.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0005		UPT PPD Lingga	940.028.746	921.589.896	18.600.702	18.600.000	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0005	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	439.160.290	432.272.031,00	18.600.702	18.600.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0005	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.701.000	8.700.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0005	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	8.701.000	8.700.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0005	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	233.745.700	232.568.600,00	18.600.702	18.600.000,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0005	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.271.000	4.269.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0005	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	500	0,00	11.800.500	11.800.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0005	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	500	0,00	6.800.202	6.800.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0005	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42.263.000	42.263.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0005	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.337.000	23.760.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0005	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	841.000	840.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0005	5.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	9.451.000	9.450.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0005	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	152.581.700	151.986.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0005	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.111.400	72.466.178,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0005	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.001.000	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0005	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.610.400	63.026.178,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0005	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.500.000	7.440.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0005	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	121.602.190	118.537.253,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0005	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	46.226.514	45.994.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0005	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.760.900	8.735.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0005	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	66.614.776	63.808.253,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0005	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	500.868.456	489.317.865,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0005	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	500.868.456	489.317.865,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0005	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	103.872.576	103.438.953,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0005	5.02.04.1.01.0005	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	109.774.896	104.031.528,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0005	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	166.023.464	162.081.984,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0005	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	121.197.520	119.765.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0006		UPT PPD Natuna	995.857.280	935.783.224	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0006	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	694.239.260	641.493.438,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0006	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.256.000	6.240.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0006	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	6.256.000	6.240.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0006	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	426.553.780	401.060.569,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0006	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51.355.600	44.959.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0006	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.554.500	45.447.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0006	5.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	6.150.000	5.850.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0006	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	318.493.680	304.803.769,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0006	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.229.800	79.910.756,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0006	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0006	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	102.229.800	76.910.756,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0006	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	156.199.680	154.282.113,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0006	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	77.410.000	75.624.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0006	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.200.000	12.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0006	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	66.589.680	66.457.613,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0006	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	301.618.020	294.289.786,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0006	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	301.618.020	294.289.786,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0006	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	84.430.000	81.279.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0006	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	146.184.520	142.715.786,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0006	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	71.003.500	70.295.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0007		UPT PPD Anambas	625.649.745	587.324.634	37.038.314	33.785.500	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0007	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	254.151.925	242.194.096,00	37.038.314	33.785.500,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0007	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	153.713.000	147.008.602,00	37.038.314	33.785.500,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0007	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.995.100	1.935.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0007	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0,00	10.678.256	8.200.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0007	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	0,00	26.360.058	25.585.500,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0007	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.204.100	26.959.402,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0007	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.959.800	16.958.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0007	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.285.000	3.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0007	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	104.269.000	97.956.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0007	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.288.925	57.444.191,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0007	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.230.000	2.222.306,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0007	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.058.925	55.221.885,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0007	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.150.000	37.741.303,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0007	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.710.000	10.586.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0007	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.920.000	7.850.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0007	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.520.000	19.305.303,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0007	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	371.497.820	345.130.538,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0007	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	371.497.820	345.130.538,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0007	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	32.645.000	30.037.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0007	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	257.702.256	234.038.774,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0007	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	81.150.564	81.054.564,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0008		UPT PPD Batu Aji	1.245.725.645	1.076.470.417	16.451.100	15.700.000	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0008	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	790.491.937	646.362.982,00	16.451.100	15.700.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0008	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16.160.000	16.160.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0008	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	16.160.000	16.160.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0008	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	409.097.252	295.072.892,00	16.451.100	15.700.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0008	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.374.000	3.374.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0008	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.786.500	6.675.000,00	7.256.500	7.050.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0008	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	0,00	9.194.600	8.650.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0008	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	259.518.400	190.099.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0008	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36.615.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0008	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	2.040.000	1.560.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0008	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.763.352	93.364.892,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0008	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	165.259.785	153.148.167,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0008	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.058.000	2.043.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0008	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	121.201.785	109.104.667,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0008	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.000.000	42.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0008	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	199.974.900	181.981.923,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0008	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47.630.000	38.393.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0008	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.360.000	6.920.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0008	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	138.984.900	136.668.423,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0008	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	455.233.708	430.107.435,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0008	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	455.233.708	430.107.435,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0008	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	38.685.000	38.541.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0008	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	174.400.504	169.906.549,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0008	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	242.148.204	221.659.886,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0009		UPT PPD Kijang	612.268.748	534.324.069	35.435.200	34.050.000	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0009	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	474.175.704	397.906.397,00	35.435.200	34.050.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0009	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.800.000	10.750.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0009	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	10.800.000	10.750.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0009	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	213.224.600	159.543.788,00	35.435.200	34.050.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0009	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.040.000	4.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0009	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0,00	23.731.200	22.600.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0009	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.194.800	8.000.000,00	11.704.000	11.450.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0009	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56.724.400	51.489.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0009	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	47.919.400	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0009	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.040.000	2.040.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0009	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.088.000	2.958.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0009	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91.218.000	91.056.388,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0009	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.329.000	98.084.015,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0009	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.850.000	1.550.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0009	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84.479.000	82.534.015,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0009	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.000.000	14.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0009	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	149.822.104	129.528.594,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0009	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	77.410.000	57.430.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0009	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.850.000	5.570.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0009	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	66.562.104	66.528.594,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0009	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	138.093.044	136.417.672,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0009	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	138.093.044	136.417.672,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0009	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	26.730.940	25.464.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0009	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	8.550.000	8.550.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0009	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	83.112.104	82.818.172,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0009	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	19.700.000	19.585.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0010		UPT PPD Tanjung Batu	573.455.194	541.509.835	4.600.000	4.600.000	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0010	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	395.614.266	363.982.228,00	4.600.000	4.600.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0010	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	18.340.000	18.340.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0010	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	18.340.000	18.340.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0010	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	208.890.714	180.025.636,00	4.600.000	4.600.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0010	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.709.000	4.709.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0010	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	0,00	4.600.000	4.600.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0010	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.920.400	30.920.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0010	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	59.411.514	40.624.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0010	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.040.000	2.039.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0010	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.465.000	1.465.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0010	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110.344.800	100.268.236,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0010	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.638.400	47.000.521,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0010	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0010	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.638.400	45.000.521,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0010	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118.745.152	118.616.071,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0010	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.060.000	44.054.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0010	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.060.000	7.960.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0010	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	66.625.152	66.601.571,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0010	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	177.840.928	177.527.607,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0010	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	177.840.928	177.527.607,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0010	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	24.300.000	24.300.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0010	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1.193.200	1.170.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0010	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	125.437.728	125.327.607,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0010	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	26.910.000	26.730.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03			KEPEGAWAIAN	19.050.938.906	18.695.051.608	69.582.000	67.679.000	0	0	0	0
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000		Badan Kepegawaian dan Korpri	19.050.938.906	18.695.051.608	69.582.000	67.679.000	0	0	0	0
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.511.234.787	17.167.042.945,00	68.758.000	66.855.000,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.371.200	59.844.525,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60.371.200	59.844.525,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.895.858.945	15.565.570.281,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.483.747.945	15.156.984.291,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	403.230.000	400.076.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.881.000	8.509.990,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24.667.200	24.635.270,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	24.667.200	24.635.270,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	614.731.985	609.109.384,00	68.758.000	66.855.000,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.000.000	11.944.938,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.128.764	40.000.000,00	68.758.000	66.855.000,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000.000	13.784.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.445.300	36.028.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000	23.553.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	59.901.000	59.568.678,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	424.256.921	424.228.668,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	604.195.269	603.336.556,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.066.000	16.006.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.806.100	19.740.335,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.000.000	48.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	520.323.169	519.590.221,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	311.410.188	304.546.929,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	265.879.188	260.029.299,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000	24.290.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.531.000	20.227.630,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.539.704.119	1.528.008.663,00	824.000	824.000,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	420.216.912	418.046.936,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	368.017.044	366.614.925,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	13.617.900	13.348.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.01.0008	Facilitasi Lembaga Profesi ASN	9.950.000	9.817.643,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	20.532.820	20.172.020,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	8.099.148	8.093.748,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	533.045.507	528.306.643,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	108.894.800	108.041.479,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	14.249.907	14.036.907,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	409.900.800	406.228.257,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	451.031.100	450.104.167,00	824.000	824.000,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	146.588.200	146.403.956,00	824.000	824.000,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	265.036.400	264.894.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	39.406.500	38.805.911,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	135.410.600	131.550.917,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	36.982.200	35.455.896,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	29.003.200	27.924.305,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	49.552.600	49.122.902,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	19.872.600	19.047.814,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.04			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	15.822.250.732	15.110.352.273	360.966.969	343.330.000	0	0	0	0
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	15.822.250.732	15.110.352.273	360.966.969	343.330.000	0	0	0	0
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.481.669.290	13.170.911.806,00	360.966.969	343.330.000,00	0	0,00	0	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	544.178.414	538.495.663,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	465.333.214	460.616.128,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	78.845.200	77.879.535,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.030.860.449	10.808.897.703,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.762.012.449	10.561.119.703,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	268.848.000	247.778.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	706.775.934	688.938.951,00	8.800.000	2.720.000,00	0	0,00	0	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.600.400	9.432.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.715.600	17.770.000,00	8.800.000	2.720.000,00	0	0,00	0	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.053.400	5.053.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	114.143.634	102.811.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.674.900	14.690.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.06.0008	Facilitasi Kunjungan Tamu	8.300.000	7.955.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	531.288.000	531.226.151,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	352.166.969	340.610.000,00	0	0,00	0	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	0	0,00	219.915.065	211.810.000,00	0	0,00	0	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	132.251.904	128.800.000,00	0	0,00	0	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	863.643.271	811.491.736,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.409.960	29.763.754,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.120.000	45.120.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	769.113.311	736.607.982,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	336.211.222	323.087.753,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	196.560.960	184.588.453,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.640.000	16.810.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	122.010.262	121.689.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.340.581.442	1.939.440.467,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	576.977.500	567.599.191,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	576.977.500	567.599.191,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.763.603.942	1.371.841.276,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.02.1.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	352.589.598	283.186.813,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.02.1.02.0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	113.322.944	105.266.228,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.02.1.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.297.691.400	983.388.235,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.05			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	743.490.996	742.584.939	0	0	0	0	0	0
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	743.490.996	742.584.939	0	0	0	0	0	0
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	743.490.996	742.584.939,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	551.080.096	550.472.973,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.05.02.1.01.0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	160.217.150	160.217.150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.05.02.1.01.0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	215.169.981	214.581.381,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.05.02.1.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	175.692.964	175.674.442,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	192.410.900	192.111.966,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.05.02.1.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	192.410.900	192.111.966,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.06			PENGLOLAAN PERBATASAN	7.537.067.752	6.876.027.694	0	0	0	0	0	0
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000		Badan Pengelola Perbatasan Daerah	7.537.067.752	6.876.027.694	0	0	0	0	0	0
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.082.426.978	6.423.829.366,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	189.681.420	188.733.203,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	112.682.820	112.125.622,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	76.998.600	76.607.581,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.999.859.543	5.349.097.061,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.765.327.043	5.145.277.061,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	234.532.500	203.820.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.034.000	24.925.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	25.034.000	24.925.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	436.065.119	434.490.377,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.800.000	11.676.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42.884.300	42.676.147,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.622.100	17.508.385,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	18.168.600	18.147.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.746.030	10.070.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	334.844.089	334.411.945,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	354.174.630	350.496.213,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.000.000	42.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	310.174.630	306.496.213,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.612.265	76.086.912,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	77.612.265	76.086.912,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	454.640.774	452.198.328,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02.1.01	Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama	104.697.874	104.151.374,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02.1.01.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	46.785.784	46.239.284,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	57.912.090	57.912.090,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02.1.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	203.803.800	202.903.594,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02.1.02.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	58.794.000	58.596.110,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02.1.02.0002	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	49.168.300	49.126.265,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02.1.02.0003	Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	49.461.500	49.224.026,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02.1.02.0004	Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan	46.380.000	45.957.193,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02.1.03	Monitoring dan Evaluasi	146.139.100	145.143.360,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02.1.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	41.577.100	41.080.872,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02.1.03.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	42.964.638	42.585.126,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02.1.03.0003	Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	61.597.362	61.477.362,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.07			PENGELOLAAN PENGHUBUNG	15.804.383.544	15.009.246.858	2.599.866.152	2.492.258.000	0	0	0	0
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000		Badan Penghubung Daerah	15.804.383.544	15.009.246.858	2.599.866.152	2.492.258.000	0	0	0	0
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.765.062.746	9.248.266.289,00	1.949.945.490	1.844.128.000,00	0	0,00	0	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	558.799.311	541.842.727,00	56.355.890	39.650.000,00	0	0,00	0	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	125.099.999	117.975.864,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	369.180.512	367.067.026,00	45.755.690	39.650.000,00	0	0,00	0	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	64.518.800	56.799.837,00	10.600.200	0,00	0	0,00	0	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.831.460.778	3.719.786.274,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.553.965.568	3.446.057.436,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	208.651.510	204.960.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	68.843.700	68.768.838,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	74.618.150	72.268.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	64.900.000	64.220.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	9.718.150	8.048.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	102.510.000	97.817.724,00	161.690.000	160.790.000,00	0	0,00	0	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	102.510.000	97.817.724,00	161.690.000	160.790.000,00	0	0,00	0	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	1.718.507.600	1.630.488.000,00	0	0,00	0	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0,00	1.518.707.600	1.437.060.000,00	0	0,00	0	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	0	0,00	199.800.000	193.428.000,00	0	0,00	0	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.646.220.670	3.361.104.137,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	763.538.000	749.279.063,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.000.000	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.682.682.670	2.411.825.074,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.551.453.837	1.455.447.427,00	13.392.000	13.200.000,00	0	0,00	0	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	496.644.500	474.052.200,00	13.392.000	13.200.000,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	136.219.550	70.923.995,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	918.589.787	910.471.232,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	6.039.320.798	5.760.980.569,00	649.920.662	648.130.000,00	0	0,00	0	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	6.039.320.798	5.760.980.569,00	649.920.662	648.130.000,00	0	0,00	0	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.02.1.01.0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	1.076.012.116	863.085.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.02.1.01.0002	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	901.607.672	868.438.587,00	613.264.662	611.650.000,00	0	0,00	0	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.02.1.01.0003	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	1.482.399.578	1.467.622.328,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.02.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	2.579.301.432	2.561.834.054,00	36.656.000	36.480.000,00	0	0,00	0	0,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	45.287.040.043	43.903.195.476	1.622.599.700	1.613.974.200	0	0	0	0
6.01			INSPEKTORAT DAERAH	45.287.040.043	43.903.195.476	1.622.599.700	1.613.974.200	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000		Inspektorat	45.287.040.043	43.903.195.476	1.622.599.700	1.613.974.200	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	38.349.694.008	37.426.412.707,00	1.622.290.700	1.613.974.200,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	223.431.200	162.956.350,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	153.024.000	106.733.850,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.407.200	56.222.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28.535.323.519	28.441.871.918,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.998.003.519	27.915.170.618,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	494.750.000	484.452.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	42.570.000	42.249.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	59.203.000	40.736.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	25.454.000	7.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	33.749.000	33.236.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.183.163.500	1.987.100.445,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	208.765.000	181.440.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	103.386.000	58.320.345,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.794.058.500	1.706.340.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	76.954.000	41.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.330.022.498	5.047.668.976,00	383.832.000	376.950.000,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.000.000	99.707.970,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0,00	382.287.000	376.950.000,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.000.000	49.014.050,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	593.190.000	584.322.138,00	1.545.000	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	350.000.000	275.097.260,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	25.500.000	25.320.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.137.856.398	3.996.978.392,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	73.476.100	17.229.166,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23.462.200	16.500.000,00	1.238.458.700	1.237.024.200,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0,00	1.025.400.000	1.024.000.000,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	6.927.200	2.000.000,00	213.058.700	213.024.200,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.535.000	14.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	827.188.091	826.462.278,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	45.815.200	45.736.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.000.000	59.360.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	721.372.891	721.366.278,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.167.900.000	903.116.140,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.09.0001	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	275.000.000	271.817.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.09.0002	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	370.265.000	358.556.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	98.000.000	96.095.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	424.635.000	176.647.540,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	5.179.984.411	4.796.617.484,00	309.000	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	4.203.598.911	3.883.396.585,00	309.000	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	711.156.940	609.864.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	638.388.000	638.099.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	39.735.600	39.390.340,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	89.997.081	86.559.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	965.630.590	965.465.986,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.1.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal	1.249.691.000	1.042.723.635,00	309.000	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	508.999.700	501.293.324,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	976.385.500	913.220.899,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.1.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	68.398.000	68.242.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	907.987.500	844.978.399,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.757.361.624	1.680.165.285,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	812.721.000	809.731.575,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	390.824.000	388.239.875,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	421.897.000	421.491.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	944.640.624	870.433.710,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	268.909.084	268.606.079,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	75.800.500	67.544.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	435.770.000	394.622.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	164.161.040	139.661.131,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	184.707.226.247	179.914.495.503	886.730.000	244.629.000	0	0	0	0
8.01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	184.707.226.247	179.914.495.503	886.730.000	244.629.000	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	184.707.226.247	179.914.495.503	886.730.000	244.629.000	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.493.399.338	12.767.788.412,00	886.730.000	244.629.000,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	497.280.786	466.548.432,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	313.966.787	298.298.305,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	183.313.999	168.250.127,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.823.626.442	8.465.845.869,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.074.549.742	7.741.610.832,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	686.960.000	663.556.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	62.116.700	60.679.037,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	47.830.000	47.830.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	47.830.000	47.830.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.305.170.244	1.266.413.589,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.277.643	41.261.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	162.333.600	158.531.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.500.000	14.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	958.200.001	924.161.839,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	128.859.000	127.959.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21.300.000	2.000.000,00	886.730.000	244.629.000,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.300.000	2.000.000,00	886.730.000	244.629.000,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.609.910.090	2.342.036.122,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.328.665.845	1.198.768.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.980.000	39.980.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.241.264.245	1.103.287.622,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188.281.776	177.114.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	162.109.776	170.942.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.172.000	6.172.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	2.342.809.214	2.319.530.192,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.342.809.214	2.319.530.192,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	542.252.170	534.156.396,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	86.687.844	78.267.097,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka	1.713.869.200	1.707.106.699,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	125.182.726.928	124.960.903.948,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	125.182.726.928	124.960.903.948,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	34.559.939.696	34.559.341.524,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	89.702.925.832	89.686.425.532,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	919.861.400	715.136.892,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	4.327.203.459	4.286.595.665,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	4.327.203.459	4.286.595.665,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50.000.000	47.570.050,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4.200.031.200	4.162.550.190,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	77.172.259	76.475.425,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1.715.851.224	1.683.077.508,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1.715.851.224	1.683.077.508,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	183.859.052	151.856.324,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.441.442.674	1.441.055.910,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	90.549.498	90.165.274,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	37.645.236.084	33.896.599.778,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	37.645.236.084	33.896.599.778,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	243.571.684	202.549.206,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	31.281.536.000	30.403.872.697,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	296.672.400	288.223.375,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	5.823.456.000	3.001.954.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
			Jumlah	3.222.810.004.132	2.987.193.758.080,43	344.997.515.174	307.344.075.589,86	4.773.672.048	2.065.423.140,00	841.617.613.430	775.144.201.015,00

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

dto

ANSAR AHMAD

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023
Saldo Anggaran Lebih Awal	231.214.715.013,24	388.950.302.882,49
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	232.583.164.925,62	388.950.302.882,49
Subtotal (1-2)	(1.368.449.912,38)	0,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SiKPA)	27.286.164.438,01	231.214.715.013,24
Subtotal (3+4)	25.917.714.525,63	231.214.715.013,24
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	1.368.449.912,38	0,00
Lain-lain	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	27.286.164.438,01	231.214.715.013,24

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

ANSAR AHMAD

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)				
URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN - LO				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO				
Pajak Daerah-LO	1.787.142.204.747,00	1.636.218.610.341,00	150.923.594.406,00	9,22
Retribusi Daerah-LO	155.726.470.273,30	12.172.912.898,00	143.553.557.375,30	1.179,29
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO	1.904.909.335,00	2.449.330.649,00	(544.421.314,00)	(22,23)
Lain-lain PAD yang Sah-LO	49.872.933.967,50	157.705.419.758,02	(107.832.485.790,52)	(68,38)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah-LO (4 s.d 7)	1.994.646.518.322,80	1.808.546.273.646,02	186.100.244.676,78	10,29
PENDAPATAN TRANSFER-LO				
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	1.949.654.986.207,00	2.348.989.767.452,00	(399.334.781.245,00)	(17,00)
Jumlah Pendapatan Transfer-LO (10)	1.949.654.986.207,00	2.348.989.767.452,00	(399.334.781.245,00)	(17,00)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO				
Pendapatan Hibah - LO	170.967.444.887,66	385.069.034.851,10	(214.101.589.963,44)	(55,60)
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO (13)	170.967.444.887,66	385.069.034.851,10	(214.101.589.963,44)	(55,60)
JUMLAH PENDAPATAN-LO (8+11+14)	4.115.268.949.417,46	4.542.605.075.949,12	(427.336.126.531,66)	(9,41)
BEBAN				
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai	1.309.490.093.784,00	1.107.151.335.185,05	202.338.758.598,95	18,28
Beban Barang dan Jasa	1.466.829.936.561,96	1.589.253.037.899,72	(122.423.101.337,76)	(7,70)
Beban Bunga	3.078.651.404,00	8.525.004.761,00	(5.446.353.357,00)	(63,89)
Beban Subsidi	944.301.180,00	4.143.883.000,00	(3.199.581.820,00)	(77,21)
Beban Hibah	353.850.454.704,03	304.901.011.544,11	48.949.443.159,92	16,05
Beban Bantuan Sosial	4.002.925.000,00	7.417.430.000,00	(3.414.505.000,00)	(46,03)
Beban Penyisihan Piutang	24.667.815.407,51	881.949.071,90	23.785.866.335,61	2.696,97
Jumlah Beban Operasi (18 s.d 24)	3.162.864.178.041,50	3.022.273.651.461,78	140.590.526.579,72	4,65
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI				
Beban Penyusutan dan Amortisasi	391.610.349.705,48	412.092.933.201,00	(20.482.583.495,52)	(4,97)
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi (27)	391.610.349.705,48	412.092.933.201,00	(20.482.583.495,52)	(4,97)
BEBAN TRANSFER				
Beban Bagi Hasil	796.635.218.878,00	750.249.878.516,00	46.385.340.362,00	6,18
Beban Bantuan Keuangan	26.853.000.000,00	8.352.581.914,00	18.500.418.086,00	221,49
Jumlah Beban Transfer (30 s.d 31)	823.488.218.878,00	758.602.460.430,00	64.885.758.448,00	8,55
JUMLAH BEBAN (25+28+32)	4.377.962.746.624,97	4.192.969.045.092,78	184.993.701.532,19	4,41
SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL (15-33)	(262.693.797.207,51)	349.636.030.856,34	(612.329.828.063,85)	(175,13)
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS NON OPERASIONAL				
Jumlah Surplus Non Operasional-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFISIT NON OPERASIONAL				
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	39.000.172.538,89	13.263.844.787,78	25.736.327.751,11	194,03
Jumlah Defisit Non Operasional-LO (39)	39.000.172.538,89	13.263.844.787,78	25.736.327.751,11	194,03
SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL (37 - 40)	(39.000.172.538,89)	(13.263.844.787,78)	(25.736.327.751,11)	194,03
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA-LO (15-33+41)	(301.693.969.746,40)	336.372.186.068,56	(638.066.155.814,96)	(189,69)
POS LUAR BIASA				
PENDAPATAN LUAR BIASA-LO				
Jumlah Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN LUAR BIASA				
Beban Tak Terduga	2.065.423.140,00	2.413.029.129,00	(347.605.989,00)	(14,41)
Jumlah Beban Luar Biasa (47)	2.065.423.140,00	2.413.029.129,00	(347.605.989,00)	(14,41)
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA (45-48)	(2.065.423.140,00)	(2.413.029.129,00)	347.605.989,00	(14,41)
SURPLUS/DEFISIT-LO (42+49)	(303.759.392.886,40)	333.959.156.939,56	(637.718.549.825,96)	(190,96)

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

ANSAR AHMAD

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)		
URAIAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	6.764.055.547.180,37	6.543.925.196.252,10
SURPLUS/DEFISIT-LO	(303.759.392.886,40)	333.959.156.939,56
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN		
Koreksi Nilai Persediaan	10.026.024.201,81	0,00
Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap		0,00
Lain-lain	(16.041.915.256,23)	(113.828.806.011,29)
EKUITAS AKHIR (1+2+3)	6.454.280.263.239,55	6.764.055.547.180,37

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

GUBERNUR KEPULAUAN

dto

ANSAR AHMAD

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)		
URAIAN	2024	2023
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Kas Daerah	23.302.940.904,77	210.713.848.785,43
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	1.732.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	19.041.006,00	3.738.300,00
Kas di BLUD	2.264.885.131,34	19.556.671.568,72
Kas Dana BOS	1.699.060.482,84	935.783.131,84
Kas Lainnya	524.292.676,64	14.324.994.566,09
Piutang Pajak Daerah	99.618.122.631,00	89.871.468.322,00
Piutang Retribusi Daerah	11.437.716.976,00	121.705.500,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	18.180.173.021,32	22.055.375.028,32
Piutang Lainnya	96.250.000,00	96.250.000,00
Penyisihan Piutang	(66.851.818.877,96)	(42.204.201.911,65)
Beban Dibayar Dimuka	1.809.609.683,07	1.537.600.288,02
Persediaan	294.022.966.235,40	178.060.899.676,71
Jumlah Aset Lancar (3 s.d 15)	386.123.239.870,43	495.075.865.255,48
INVESTASI JANGKA PANJANG		
INVESTASI JANGKA PANJANG NON PERMANEN		
Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen (19)	0,00	0,00
INVESTASI JANGKA PANJANG PERMANEN		
Investasi Permanen	138.205.300.338,00	144.684.048.818,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen (22)	138.205.300.338,00	144.684.048.818,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang (20+23)	138.205.300.338,00	144.684.048.818,00
ASET TETAP		
Tanah	1.279.193.541.736,32	1.242.532.489.774,32
Peralatan dan Mesin	2.115.169.411.496,30	2.023.580.374.784,91
Gedung dan Bangunan	2.878.738.414.770,81	2.704.114.608.690,98
Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.011.564.533.138,15	3.966.635.637.433,47
Aset Tetap Lainnya	279.218.737.302,70	260.235.633.980,32
Konstruksi dalam Pengerjaan	25.295.808.664,94	44.722.208.283,85
Akumulasi Penyusutan	(4.549.816.476.728,71)	(4.176.976.245.412,62)
Jumlah Aset Tetap (26 s.d 32)	6.039.363.970.380,51	6.064.844.707.535,23
ASET LAINNYA		
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	993.008.950,00	994.508.950,00
Aset Tidak Berwujud	26.348.603.927,06	26.984.101.427,06
Aset Lain-lain	361.847.876.562,91	547.637.174.524,47
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(2.413.781.320,00)	(3.146.651.320,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(41.286.530.988,55)	(9.661.355.568,70)
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	196.353.186.257,62	0,00
Jumlah Aset Lainnya (35 s.d 40)	541.842.363.389,04	562.807.778.012,83
JUMLAH ASET (16+24+33+41)	7.105.534.873.977,98	7.267.412.399.621,54
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	14.391.867,00	4.619.097,00
Utang Bunga	0,00	613.908.869,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	91.945.787.633,00
Utang Belanja	451.420.582.417,31	210.029.652.829,73
Utang Jangka Pendek Lainnya	3.466.450.196,50	9.425.693.470,26
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (45 s.d 49)	454.901.424.480,81	312.019.661.898,99
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang kepada Pemerintah Pusat	196.353.186.257,62	191.337.190.542,18
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (52)	196.353.186.257,62	191.337.190.542,18
JUMLAH KEWAJIBAN (50+53)	651.254.610.738,43	503.356.852.441,17
EKUITAS		
Ekuitas	6.454.280.263.239,55	6.764.055.547.180,37
JUMLAH EKUITAS (56)	6.454.280.263.239,55	6.764.055.547.180,37
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (54+57)	7.105.534.873.977,98	7.267.412.399.621,54

GOVERNOR OF RIAU,

by

ANSAR AHMAD

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
LAPORAN ARUS KAS
Per 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
METODE LANGSUNG

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2024	2023
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Pajak Daerah	1.777.704.385.140,00	1.631.489.164.580,00
Penerimaan Retribusi Daerah	10.634.618.841,00	12.203.621.186,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.904.909.335,00	2.449.330.649,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	30.108.755.601,70	31.323.464.050,03
Penerimaan dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.782.713.495.768,00	2.176.901.723.279,00
Penerimaan Hibah	1.300.531.591,00	1.278.720.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d 8)	3.604.366.696.276,70	3.855.646.023.744,03
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pegawai	1.288.605.047.897,00	1.079.500.223.419,05
Pembayaran Barang dan Jasa	1.059.785.418.421,26	1.190.258.080.402,71
Pembayaran Bunga	3.692.560.273,00	8.623.436.793,00
Pembayaran Subsidi	944.301.180,00	4.143.883.000,00
Pembayaran Hibah	320.711.308.300,27	325.417.334.130,06
Pembayaran Bantuan Sosial	4.002.925.000,00	7.417.430.000,00
Pembayaran Tak Terduga	2.065.423.140,00	2.413.029.129,00
Pembayaran Bagi Hasil	748.291.201.015,00	759.191.867.087,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	26.853.000.000,00	8.352.581.914,00
Jumlah Arus Keluar Kas (11 s.d 19)	3.454.951.185.226,53	3.385.317.865.874,82
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI (9-20)	149.415.511.050,17	470.328.157.869,21
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Arus Masuk Kas		
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	1.842.358.888,00
Jumlah Arus Masuk Kas (24)	0,00	1.842.358.888,00
Arus Keluar Kas		
Perolehan Tanah	920.100.000,00	1.388.489.184,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	76.496.084.204,00	151.991.551.074,05
Perolehan Gedung dan Bangunan	129.103.961.833,55	232.962.878.105,59
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	36.791.762.576,47	178.551.126.080,95
Perolehan Aset Tetap Lainnya	1.658.740.000,00	529.474.380,00
Perolehan Aset Lainnya	0,00	378.476.300,00
Jumlah Arus Keluar Kas (27 s.d 32)	244.970.648.614,02	565.801.995.124,59
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI (25-33)	(244.970.648.614,02)	(563.959.636.236,59)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
ARUS MASUK KAS		
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	15.431.239.382,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	100.883.708,00	37.172.817,00
Jumlah Arus Masuk Kas (37 s.d 38)	100.883.708,00	15.468.412.199,00
ARUS KELUAR KAS		
Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Daerah	91.945.787.633,00	66.266.646.018,00
Jumlah Arus Keluar Kas (41)	91.945.787.633,00	66.266.646.018,00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN (39-42)	(91.844.903.925,00)	(50.798.233.819,00)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
ARUS MASUK KAS		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	212.522.600.526,00	246.800.531.830,00
UYHD TAHUN 2023	3.738.300,00	5.000.000,00
Pengembalian Jasa Giro Kas Lainnya Tahun 2023	2.941.227,25	233.804,00
Pengembalian Kas dari Bendahara Penerimaan	1.732.000,00	180.000,00
Pengembalian Dana Bos	0,00	90.000.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk (46 s.d 50)	212.531.012.053,25	246.895.945.634,00
ARUS KELUAR KAS		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	212.522.600.526,00	246.800.531.830,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	1.732.000,00
Jasa Giro Kas Lainnya	236.913,06	2.941.227,25
UYHD TAHUN 2024	19.041.006,00	3.738.300,00
Jumlah Arus Keluar Kas (53 s.d. 56)	212.541.878.445,06	246.808.943.357,25
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS (51-57)	(10.866.391,81)	87.002.276,75
Kenaikan/ (Penurunan) Kas (21+34+43+58)	(187.410.907.880,66)	(144.342.709.909,63)
Saldo Awal Kas di BUD	210.713.848.785,43	355.056.558.695,06
Saldo Akhir Kas di BUD (59+60)	23.302.940.904,77	210.713.848.785,43

URAIAN	2024	2023
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	1.732.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	19.041.006,00	3.738.300,00
Kas di BLUD	2.264.885.131,34	19.556.671.568,72
Kas Dana BOS	1.699.060.482,84	935.783.131,84
Kas Lainnya	524.292.676,64	14.324.994.566,09
Saldo Akhir Kas (61 s.d 66)	27.810.220.201,59	245.536.768.352,08

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

ANSAR AHMAD

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan yang disusun Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Secara umum, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, dengan menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

Dalam memenuhi tujuan umum tersebut diatas, laporan keuangan tahun 2024 yang disusun oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas;
4. Pendapatan-LRA;
5. Belanja;
6. Transfer;
7. Pembiayaan;
8. Saldo Anggaran Lebih;
9. Pendapatan-LO;
10. Beban; dan
11. Arus Kas.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan, namun demikian masih diperlukan informasi tambahan, termasuk laporan non-keuangan, untuk dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 disusun dengan berlandaskan pada :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 250, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 899);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 58);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 7);
23. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 893) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 1008);
24. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);
25. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 1000);

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan ini mengacu pada sistematika penulisan laporan keuangan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, yaitu dengan format sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Bab II	Perkembangan Makro Ekonomi Daerah, Perkembangan Keuangan Daerah, Perkembangan Inflasi, Pembiayaan Daerah serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM, Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Rupiah, Ketenagakerjaan Masyarakat dan Kesejahteraan, Prospek Perekonomian Daerah
2.1.	Perkembangan Makro Ekonomi Daerah
2.2.	Perkembangan Keuangan Daerah
2.3.	Perkembangan Inflasi
2.4.	Pembiayaan Daerah serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM
2.5.	Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah
2.6.	Kesejahteraan Masyarakat dan Ketenagakerjaan
2.7.	Prospek Perekonomian Daerah
Bab III	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
3.1.	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
3.2.	Hambatan dan Kendala Yang ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan
3.3.	Kebijakan Anggaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024
3.4.	Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024
3.5.	Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
3.6.	Pencapaian Pemenuhan Mandatory Spending dalam APBD
Bab IV	Kebijakan Akuntansi
4.1.	Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
4.2.	Komponen Utama Kebijakan Akuntansi
Bab V	Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
	Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah yang terdiri dari:
5.1.	Penjelasan Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
5.2.	Penjelasan Pos – Pos Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (SAL)
5.3.	Penjelasan Pos-pos Neraca
5.4.	Penjelasan Pos – Pos Laporan Operasional (LO)
5.5.	Penjelasan Pos – Pos Laporan Arus Kas (LAK)
5.6.	Penjelasan Pos – Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Bab VI	Penjelasan atas Informasi Non Keuangan Pemerintah Daerah
Bab VII	Penutup
	LAMPIRAN

BAB II

PERKEMBANGAN MAKRO EKONOMI DAERAH, PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH, PERKEMBANGAN INFLASI, PEMBIAYAAN DAERAH SERTA PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM, PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH, KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN, PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH.

2.1. Perkembangan Makro Ekonomi Daerah



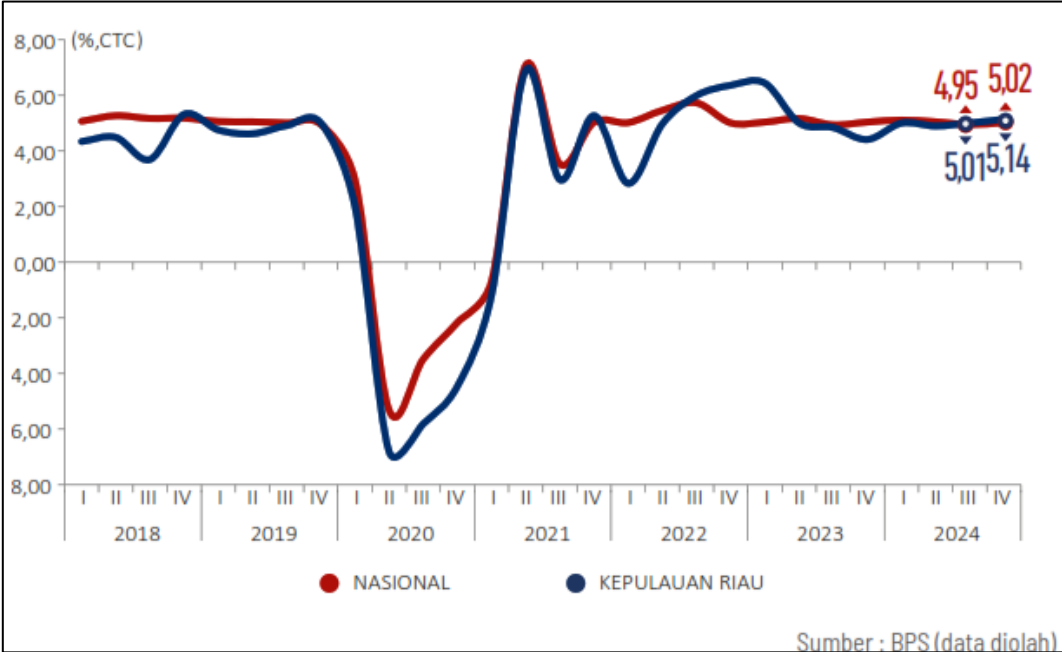
Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada triwulan IV 2024 tumbuh positif sebesar 5,14% (yoy), terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,01% (yoy). Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dari pertumbuhan wilayah Sumatera yang sebesar 4,60% (yoy).

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2024 terutama ditopang oleh pertumbuhan komponen Net Ekspor. Di sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ekonomi didukung oleh pertumbuhan LU Industri Pengolahan, Perdagangan, serta Pertambangan.

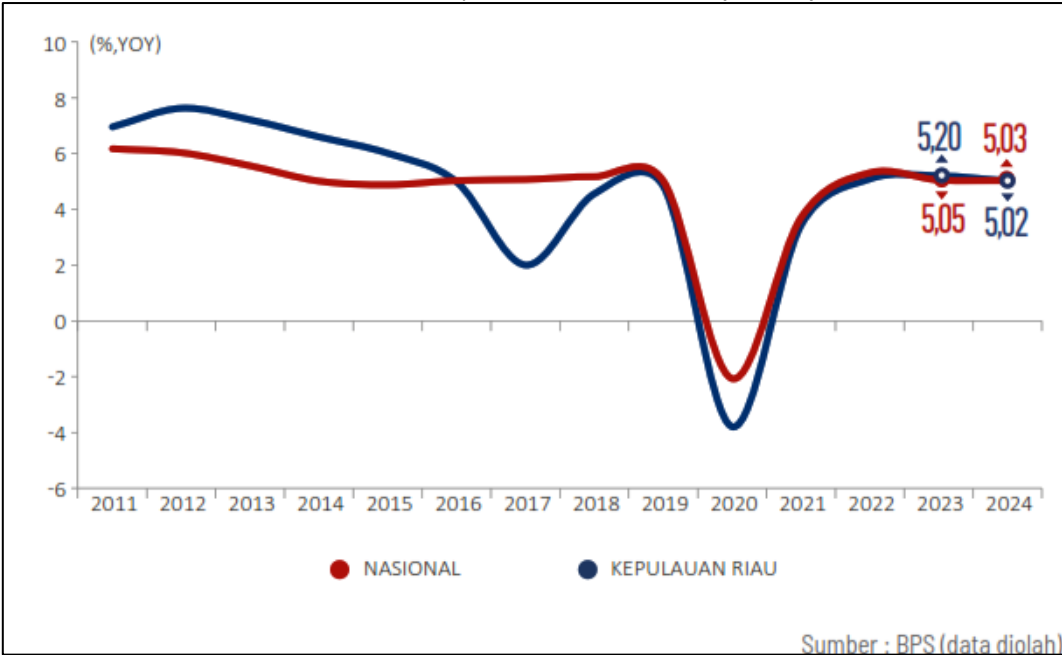
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan Provinsi Kepri pada triwulan IV 2024 tercatat sebesar Rp53.394,49 miliar atau tumbuh 5,14% (yoy). Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,01% (yoy). Pertumbuhan ekonomi tersebut terutama ditopang oleh beberapa LU yakni Industri Pengolahan, Perdagangan, dan Pertambangan. Di sisi pengeluaran, pertumbuhan tetap tinggi terutama didorong oleh tumbuhnya komponen Net Ekspor, PMTB, dan Konsumsi Rumah Tangga.

Secara spasial, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri triwulan IV 2024 lebih tinggi dari wilayah Sumatera yang tercatat sebesar 4,60% (yoy) maupun capaian Nasional yang tumbuh sebesar 5,02% (yoy). Pertumbuhan tertinggi di wilayah Sumatera dicapai oleh Jambi, Lampung, dan Kepri masing-masing sebesar 6,00% (yoy), 5,32% (yoy), dan 5,14% (yoy). Adapun pangsa/distribusi PDRB Provinsi Kepri triwulan IV 2024 terhadap wilayah Sumatera tercatat sebesar 7,42% dan merupakan terbesar ke-5 setelah Sumatera Utara (23,48%), Riau (22,97%), Sumatera Selatan (13,42%) dan Lampung (9,65%).

Grafik 2.1 Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional (Triwulanan)



Grafik 2.2 Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional (Tahunan)



Tabel 2.1 Kontribusi dan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera

No	Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III 2024(% ,yoy)	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV 2024(% ,yoy)	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III 2024 (% , qtg)	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV 2024(% , qtg)	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III 2024(% , ctc)	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV 2024(% , ctc)	Kontribusi terhadap Pulau Sumatera (%)
1	Aceh	5,17	4,15	2,06	6,11	4,85	4,66	5,19
2	Sumatera Utara	5,20	5,10	2,25	0,44	5,01	5,03	23,48
3	Sumatera Barat	4,33	4,04	0,46	2,03	4,48	4,36	6,78
4	Riau	3,46	3,52	3,17	0,16	3,53	3,52	22,97
5	Jambi	4,01	6,00	2,36	0,89	4,00	4,51	6,70
6	Sumatera Selatan	5,04	5,07	2,47	-1,85	5,02	5,03	13,42
7	Bengkulu	4,57	4,55	-2,56	3,11	4,64	4,62	2,14
8	Lampung	4,81	5,32	0,75	-3,52	4,33	4,57	9,65
9	Kep. Bangka Belitung	0,13	0,94	-0,86	3,48	0,71	0,77	2,24
10	Kepulauan Riau	5,01	5,14	0,53	6,94	4,98	5,02	7,42
SUMATERA		4,48	4,60	1,88	0,70	4,40	4,45	100,00

▲ Menguat dibandingkan triwulan sebelumnya
▼ Melambat dibandingkan triwulan sebelumnya

Sumber: BPS (data diolah)

Tabel 2.2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Sisi Pengeluaran (%yoy)

PDRB Sisi Pengeluaran	2022					2023					2024					ARAH TW	ARAH TAHUNAN
	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
1. Konsumsi RT	1,15	3,66	7,44	6,43	4,65	5,52	3,46	2,77	4,98	4,17	4,85	5,16	5,10	2,97	4,51	▼	▲
2. Konsumsi LNPRT	3,09	4,20	5,93	-2,11	2,75	0,65	5,40	5,48	15,82	6,77	17,76	7,02	10,20	2,03	9,02	▼	▲
3. Konsumsi Pemerintah	-1,53	-1,77	-1,29	0,67	-0,67	5,29	10,35	3,91	8,58	7,46	28,99	7,95	5,39	-7,08	4,25	▼	▼
4. PMTB (Investasi)	1,18	1,89	3,94	9,01	4,03	7,03	7,72	10,84	9,15	8,72	8,45	8,04	3,22	5,63	6,26	▲	▼
5. Perubahan Inventori	-47,94	-39,53	35,05	-1,324,22	433,24	212,70	718,19	-42,78	61,52	0,12	-213,45	-198,09	-273,92	-45,09	-35,95	▲	▼
6. Total Net Ekspor	13,64	18,30	9,01	-8,95	7,26	4,81	8,80	-3,49	-19,01	-1,82	2,02	-20,48	17,47	30,17	4,68	▲	▲
a. Total Ekspor	10,37	13,48	15,05	5,73	11,09	3,15	-6,72	-2,88	-3,35	-2,53	-3,04	3,27	0,25	14,85	3,77	▲	▲
b. Total Impor	10,00	13,00	15,61	7,39	11,49	2,96	-8,33	-2,82	-1,85	-2,61	-3,63	6,19	-1,26	13,63	3,68	▲	▲
PERTUMBUHAN PDRB	2,83	4,97	5,99	6,36	5,06	6,44	5,01	4,84	4,41	5,16	5,00	4,90	5,01	5,14	5,02	▲	▼

▲ Menguat

▼ Melambat

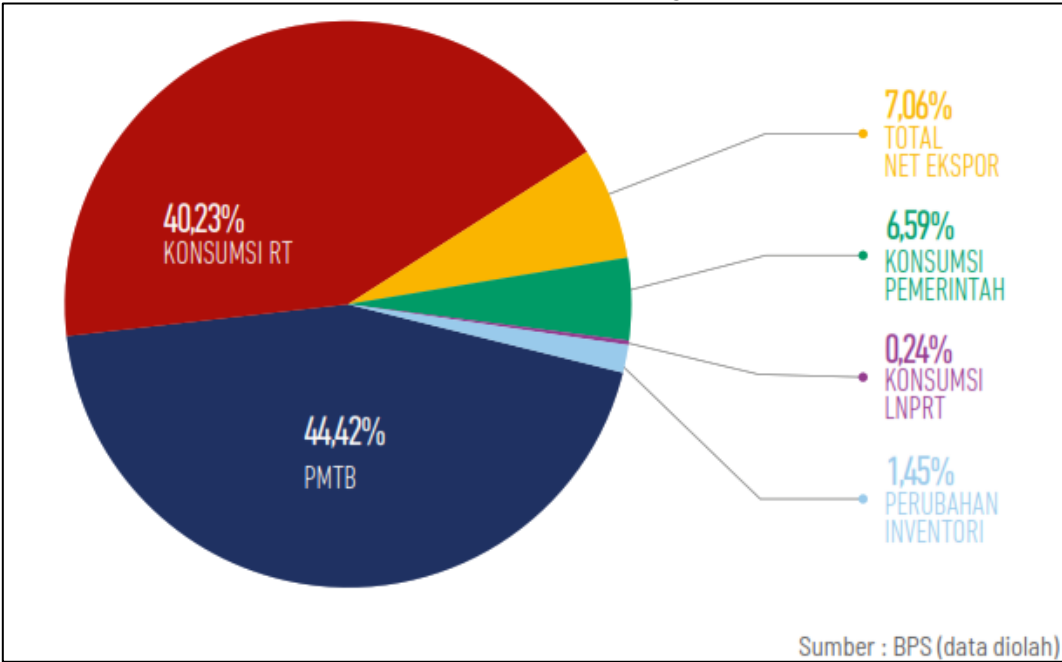
Sumber: BPS (data diolah)

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran

Distribusi perekonomian Provinsi Kepri pada triwulan IV 2024 didominasi oleh PMTB/investasi dengan pangsa sebesar 44,42%, diikuti Konsumsi Rumah Tangga sebesar 40,23% dari total PDRB. Pangsa komponen investasi yang cukup tinggi dipengaruhi oleh upaya pelaku usaha pada sektor industri dalam meningkatkan kapasitas produksi dengan menambah barang modal maupun investasi aset bangunan untuk ekspansi usaha. Selain itu, belanja modal pemerintah juga cukup besar terutama untuk pembangunan infrastruktur. Selanjutnya, konsumsi rumah tangga memiliki pangsa tertinggi kedua dan mengalami pertumbuhan yang masih tinggi sejalan dengan momen libur Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru serta sejumlah cuti bersama.

Sementara itu, komponen net ekspor memiliki pangsa terbesar ketiga sebesar 7,06%, sejalan dengan peningkatan jumlah ekspor yang lebih tinggi dibandingkan impor. Selanjutnya, komponen konsumsi pemerintah memiliki pangsa terbesar keempat yaitu sebesar 6,59% didorong pengeluaran pemerintah dalam rangka pemilu dan pilkada.

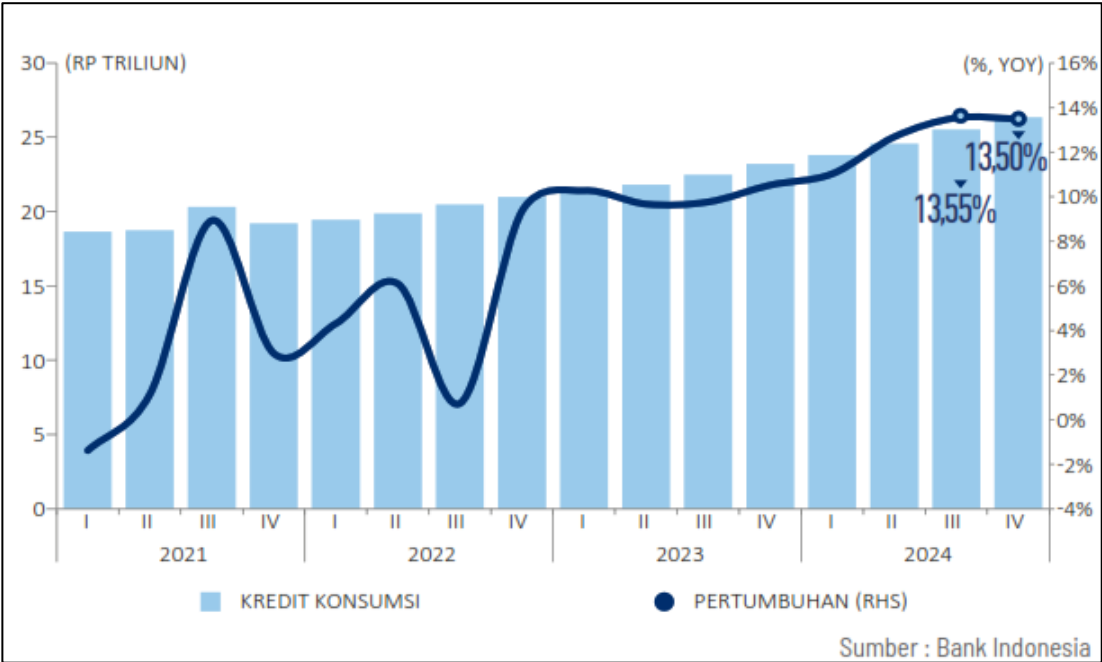
Grafik 2.3 Struktur Ekonomi Sisi Pengeluaran



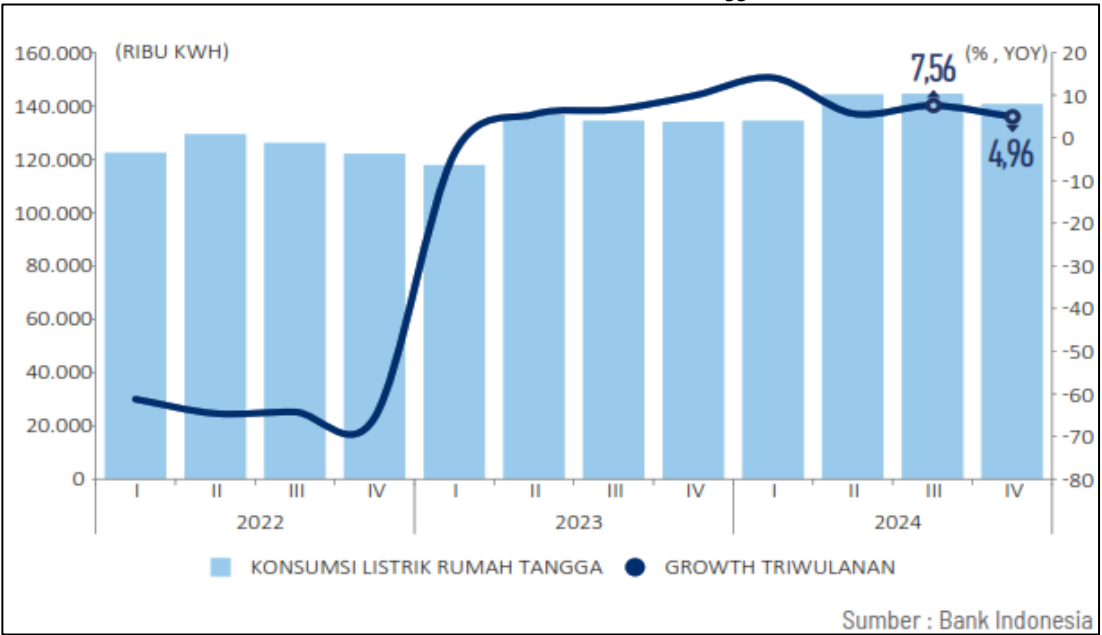
2.1.1.1 Konsumsi Rumah Tangga

Konsumsi Rumah Tangga pada triwulan IV 2024 tetap tumbuh sebesar 2,97% (yoy), meskipun lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,10% (yoy). Deselerasi konsumsi rumah tangga tecermin dari kredit konsumsi yang tumbuh sebesar 13,50% (yoy), melambat dibanding dengan periode sebelumnya yang tumbuh sebesar 13,55% (yoy). Penurunan konsumsi RT ini juga sejalan dengan konsumsi listrik rumah tangga yang tumbuh melambat sebesar 4,96% (yoy) di triwulan IV 2024, setelah pada triwulan sebelumnya Komponen konsumsi pemerintah pada triwulan IV 2024 melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan IV 2024, konsumsi pemerintah berkontraksi sebesar 7,08% (yoy), berbalik arah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,39% (yoy). Hal tersebut sejalan dengan menurunnya total realisasi belanja APBD Pemda seluruh Kepri, yang hingga triwulan IV 2024 hanya sebesar 87,63% dari pagu anggaran, lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2023 yang mencapai 90,91%. tercatat tumbuh sebesar 7,56% (yoy).

Grafik 2.4 Kredit Konsumsi

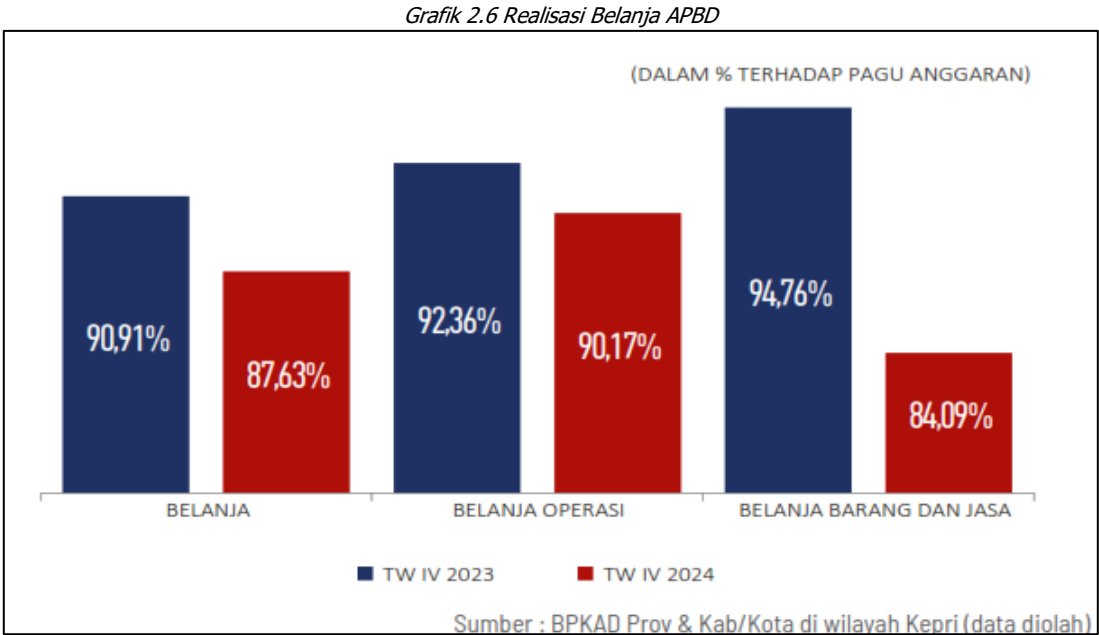


Grafik 2.5 Konsumsi Listrik Rumah Tangga

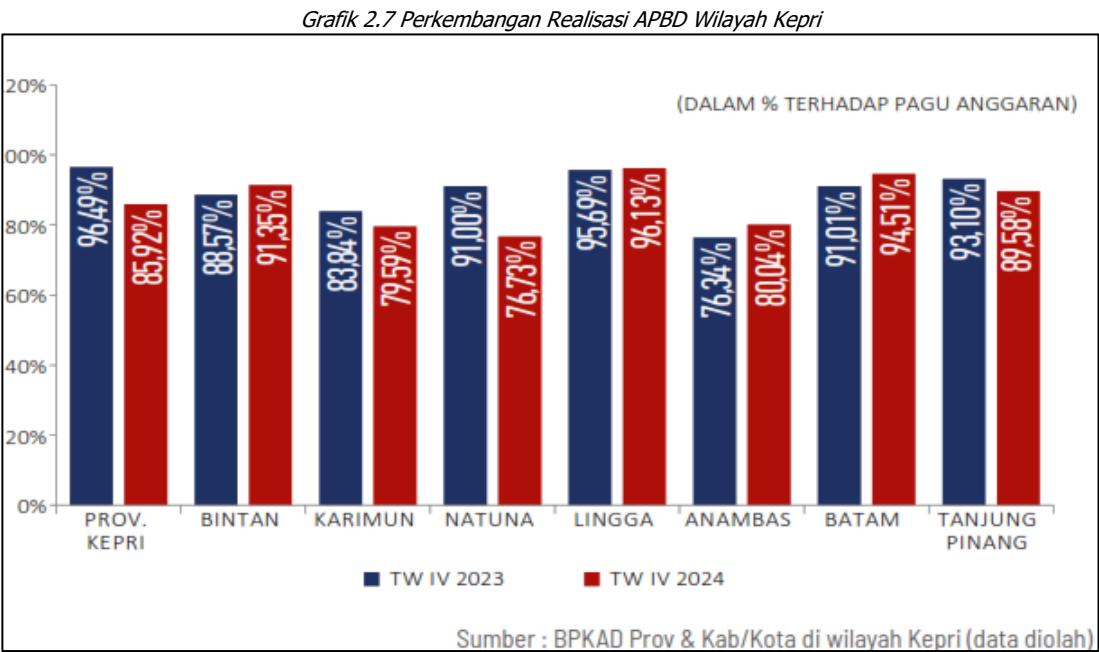


2.1.1.2 Konsumsi Pemerintah

Komponen konsumsi pemerintah pada triwulan IV 2024 melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan IV 2024, konsumsi pemerintah berkontraksi sebesar 7,08% (yoy), berbalik arah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,39% (yoy). Hal tersebut sejalan dengan menurunnya total realisasi belanja APBD Pemda seluruh Kepri, yang hingga triwulan IV 2024 hanya sebesar 87,63% dari pagu anggaran, lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2023 yang mencapai 90,91%.



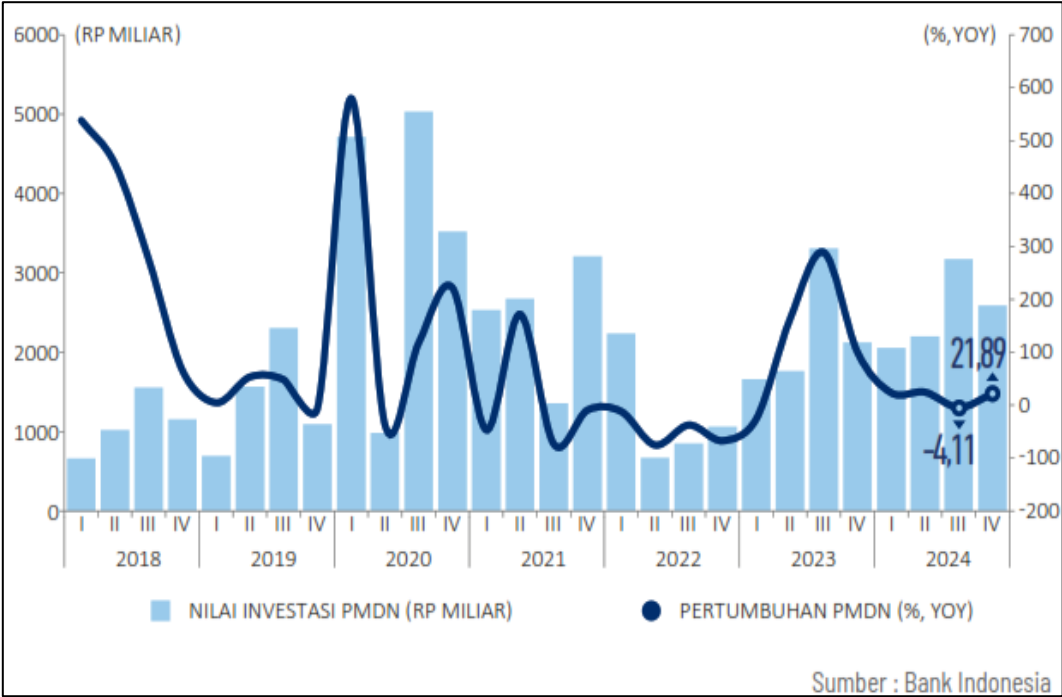
Secara spasial, empat Pemda (Provinsi Kepri, Kab. Karimun, Kab. Natuna, dan Kota Tanjungpinang) mencatat penurunan realisasi belanja pada triwulan IV 2024. Realisasi belanja keempat Pemda tersebut menurun masing-masing Provinsi Kepri dari 96,49% menjadi sebesar 85,92%, Kab. Karimun dari 83,84% menjadi 79,59%, Kab. Natuna dari 91,00% menjadi 76,73%, serta Kota Tanjungpinang dari 93,10% menjadi 89,58%. Sementara itu, empat Pemda lainnya mengalami peningkatan realisasi belanja yakni Kab. Bintan dari 88,57% menjadi 91,35%, Kab. Lingga dari 95,69% menjadi 96,13%, Kab. Anambas dari 76,34% menjadi 80,04%, serta Kota Batam dari 91,01% menjadi 94,51%.



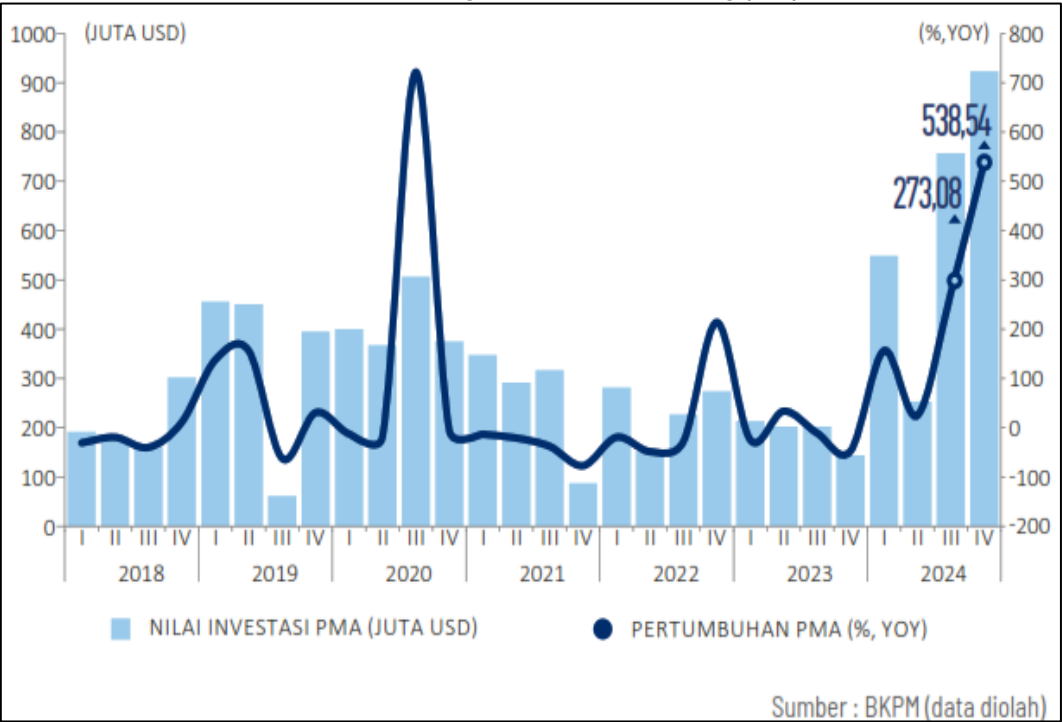
2.1.1.3 Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB

PMTB atau investasi di Provinsi Kepri pada triwulan IV 2024 tumbuh sebesar 5,63% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,22% (yoy). Akselerasi tersebut terkonfirmasi dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kepri yang tumbuh sebesar 21,89% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 4,11% (yoy). Peningkatan investasi juga tecermin dari Penanaman Modal Asing (PMA) yang tumbuh signifikan sebesar 538,54% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 273,08% (yoy), seiring dengan masuknya investasi asing khususnya pada sejumlah kawasan industri di Kepri, salah satunya di Kawasan Industri Wiraradja Batam. Hal tersebut juga sejalan dengan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia untuk komponen investasi yang tumbuh dari -0,59% menjadi 5,22%.

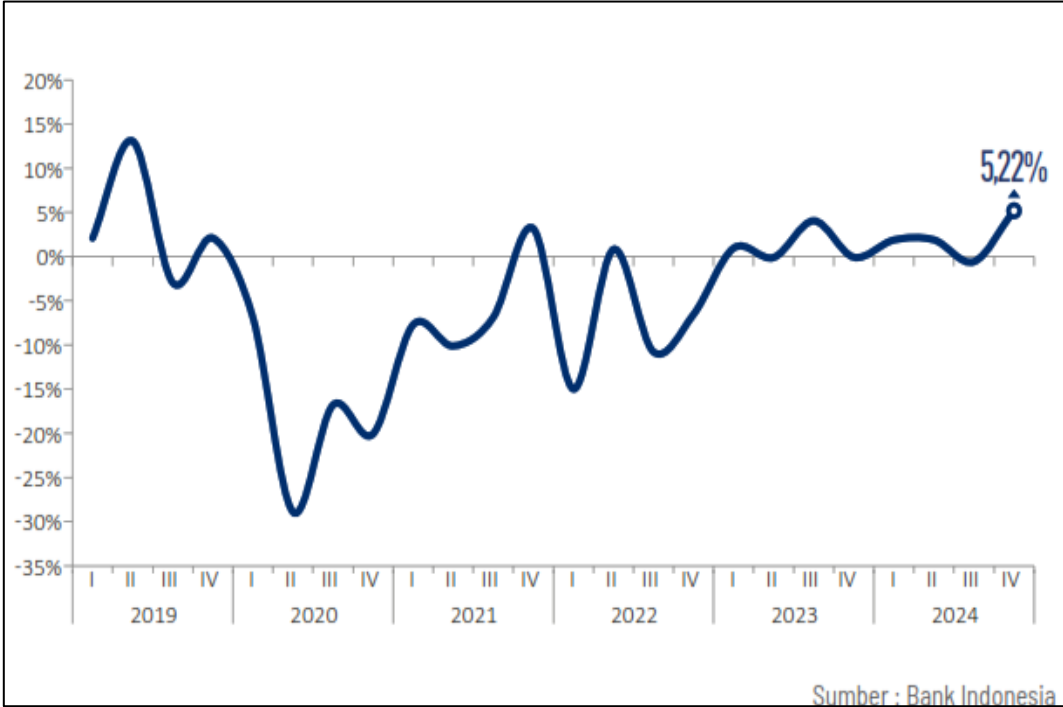
Grafik 2.8 Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)



Grafik 2.9 Perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA)



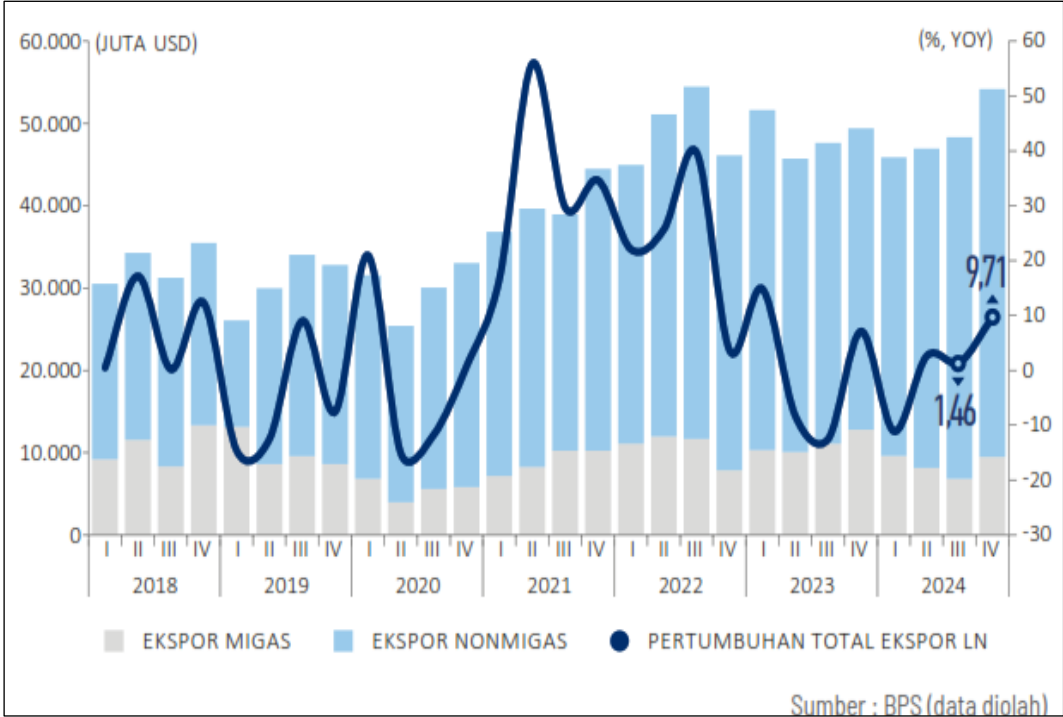
Grafik 2.10 SBT Investasi



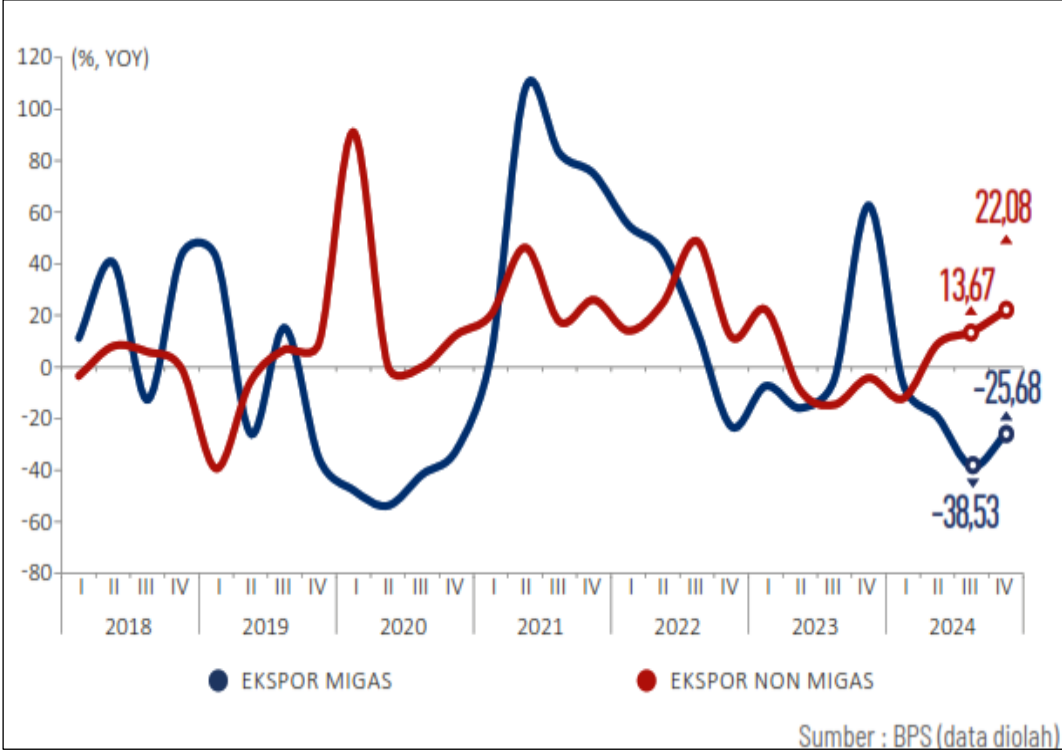
2.1.1.4 Kegiatan Ekspor-Import

Kinerja eksternal Provinsi Kepri sebagaimana tecermin dari Net Ekspor tumbuh sebesar 30,17% (yoy), lebih tinggi dari periode sebelumnya yang mencapai 17,47% (yoy). Hal tersebut didorong oleh pertumbuhan ekspor yang lebih tinggi dibandingkan dengan impor. Ekspor tumbuh sebesar 14,85% (yoy), atau terakselerasi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 0,25% (yoy). Sementara itu, impor juga tumbuh sebesar 13,63% (yoy), berbalik arah dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 1,26% (yoy). Ekspor yang terakselerasi sejalan dengan nilai total ekspor ke luar negeri dari Provinsi Kepri (migas dan nonmigas) pada triwulan IV 2024 yang tumbuh sebesar 9,71% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 1,46% (yoy).

Grafik 2.11 Perkembangan Ekspor Total Luar Negeri

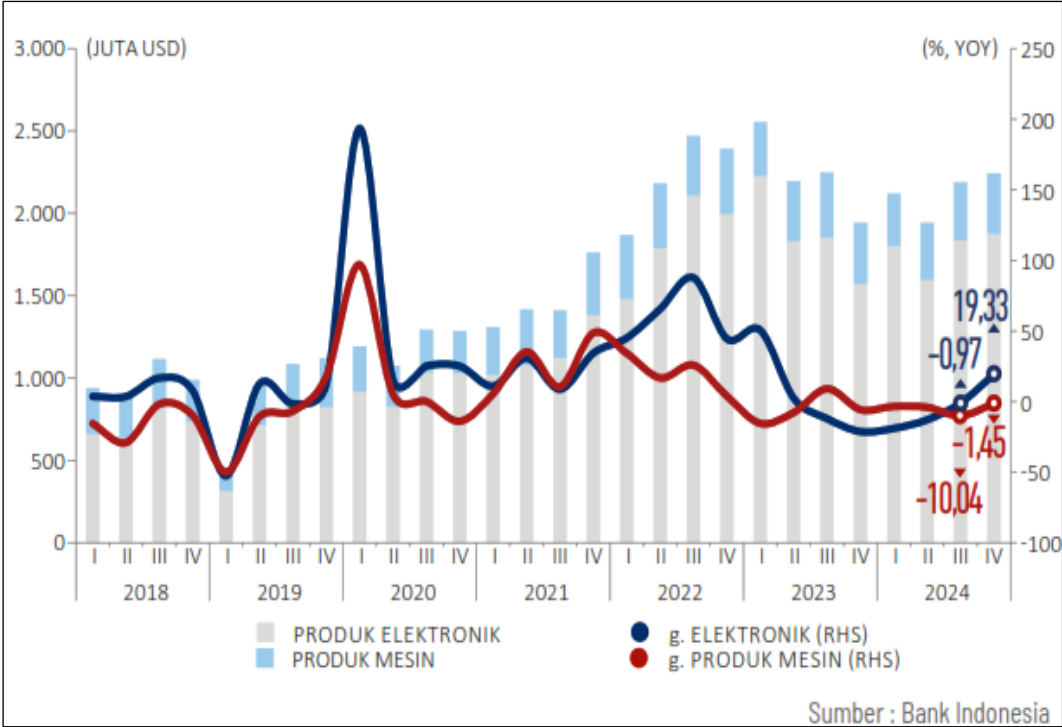


Grafik 2.12 Perkembangan Ekspor Komoditas Nonmigas dan Migas

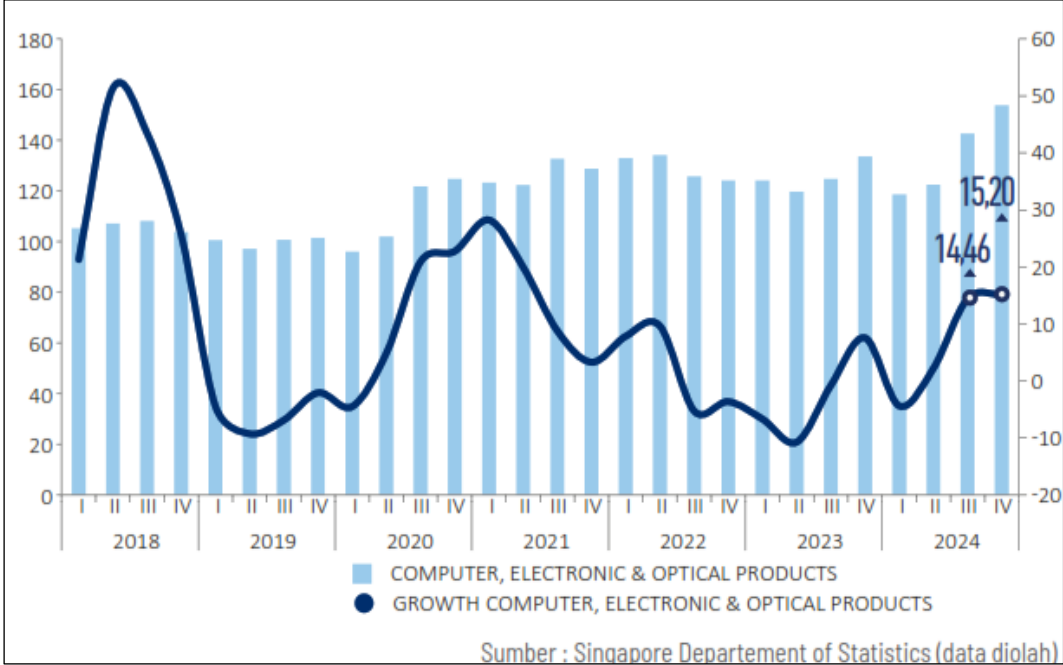


Kinerja ekspor Provinsi Kepri yang terakselerasi sejalan dengan meningkatnya ekspor produk elektronik dan produk mesin. Nominal ekspor produk mesin pada triwulan IV 2024 tercatat tumbuh sebesar 19,33% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 0,97% (yoy). Kondisi tersebut sejalan dengan perubahan *Index of Industrial Production* (IIP) Singapura untuk produk komputer, elektronik, dan optik yang pada triwulan IV 2024 yang tumbuh sebesar 15,20% (yoy), meningkat dari sebelumnya yang tumbuh sebesar 14,46% (yoy). Adapun nominal ekspor produk mesin mengalami perbaikan, dari terkontraksi sebesar 10,04% (yoy) menjadi kontraksi 1,45% (yoy).

Grafik 2.13 Perkembangan Ekspor Produk Elektronik dan Produk Mesin

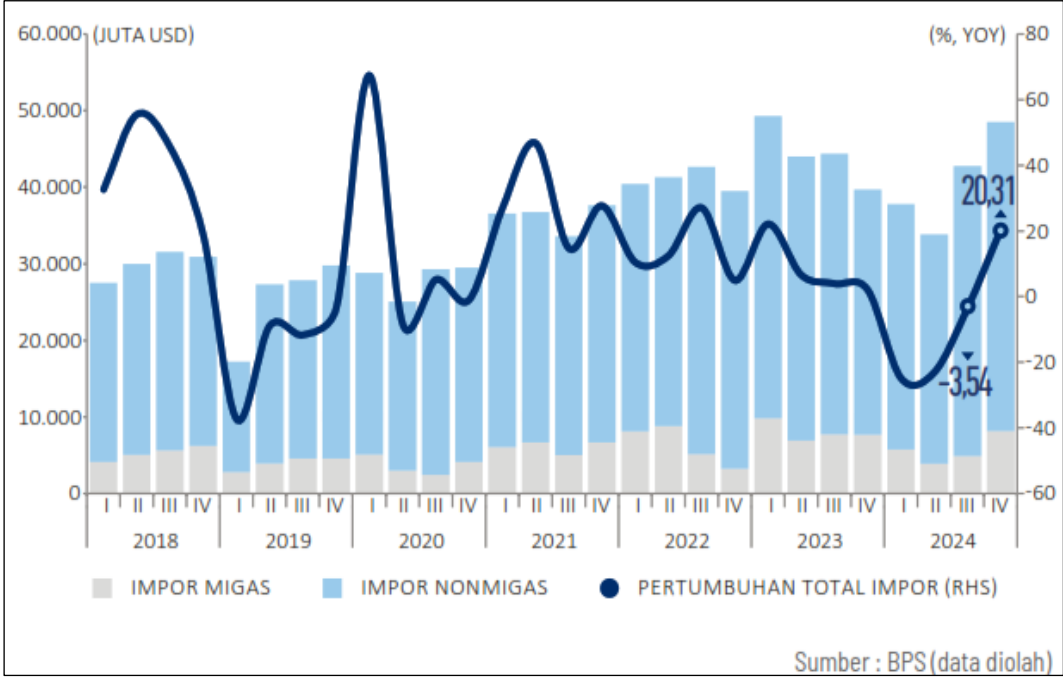


Grafik 2.14 Indeks of Industrial Production (IIP) Singapura

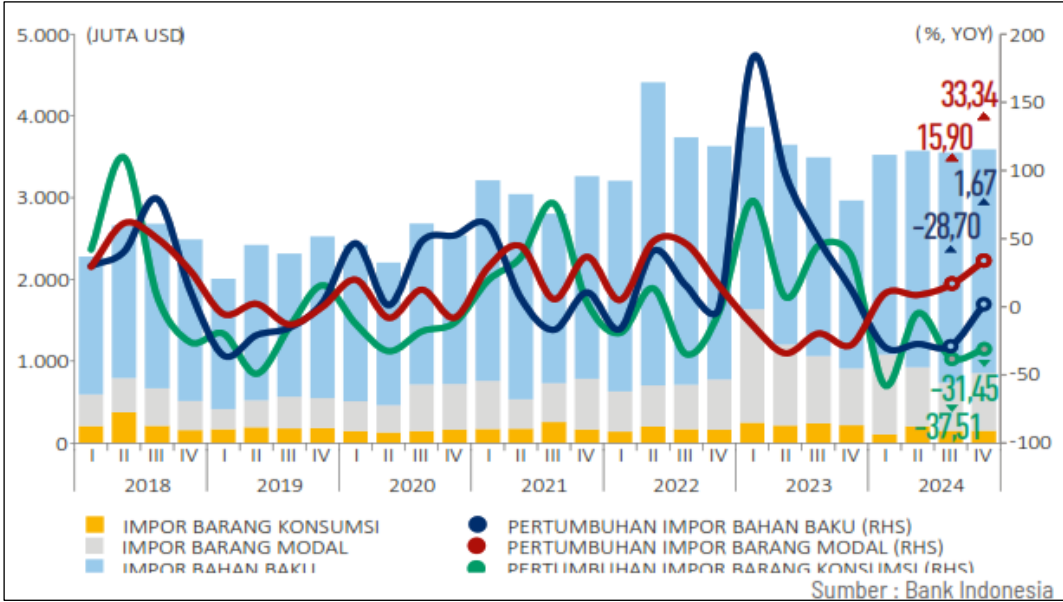


Sejalan dengan arah pertumbuhan ekspor secara total yang meningkat, komponen impor juga tercatat mengalami akselerasi. Total impor Provinsi Kepri pada triwulan IV 2024 tumbuh sebesar 13,63% (yoy), meningkat setelah pada triwulan sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 1,26% (yoy). Selanjutnya, total nilai impor luar negeri juga tumbuh sebesar 20,31% (yoy) pada triwulan IV, tercatat lebih baik dari sebelumnya yang terkontraksi sebesar 3,54% (yoy). Meningkatnya impor luar negeri terutama disebabkan oleh peningkatan impor bahan baku. Nilai impor bahan baku dari luar negeri pada triwulan IV 2024 tumbuh sebesar 33,34% (yoy), lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 15,90% (yoy). Selanjutnya, impor barang modal juga mengalami peningkatan, yakni tumbuh sebesar 1,67% (yoy) setelah pada periode sebelumnya terkontraksi sebesar 28,70% (yoy). Di sisi lain, impor barang konsumsi masih mengalami kontraksi sebesar 31,45% (yoy), meskipun lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya.

Grafik 2.15 Perkembangan Impor



Grafik 2.16 Perkembangan Impor Nonmigas - BEC



2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Lapangan Usaha

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), kinerja industri yang tetap baik serta kinerja sektor perdagangan yang meningkat pada triwulan IV 2024 mampu mendorong kinerja PDRB secara keseluruhan. Kinerja positif ekonomi Kepri tetap ditopang oleh tumbuhnya LU Industri Pengolahan, LU Perdagangan Besar dan Eceran, LU Pertambangan dan Penggalian, serta LU Konstruksi.

Tabel 2.3 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Sisi Lapangan Usaha

PDRB Sisi Lapangan Usaha	2022					2023					2024					ARAH TW	ARAH TAHUNAN
	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,00	5,82	4,63	7,41	5,26	7,79	-2,32	-5,92	6,96	1,53	5,05	3,31	-3,76	-2,08	0,57	▲	▼
Pertambangan dan Penggalian	-7,05	8,37	-4,06	-22,89	-7,00	-15,04	-0,51	3,69	2,61	-2,65	-4,69	-25,84	-5,01	7,43	-7,83	▲	▼
Industri Pengolahan	4,16	2,23	4,82	6,68	4,51	7,71	-0,27	0,62	1,83	2,46	3,86	13,35	7,76	6,64	7,77	▼	▲
Pengadaan Listrik, Gas	10,93	18,53	17,62	18,35	16,38	12,08	11,03	7,05	2,67	8,03	5,13	7,74	6,85	9,01	7,20	▲	▼
Pengadaan Air	-0,71	3,27	24,05	9,31	8,82	11,53	-3,28	0,07	10,42	4,45	8,55	7,89	-5,50	-1,65	1,98	▲	▼
Konstruksi	0,69	-0,61	2,30	17,32	5,00	6,74	10,31	13,74	10,94	10,49	13,89	7,58	2,06	1,02	5,75	▼	▼
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	19,19	22,06	7,76	7,40	13,86	5,49	2,28	10,03	6,03	5,87	4,79	2,24	4,84	10,66	5,59	▲	▼
Transportasi dan Pergudangan	19,06	32,43	81,05	31,11	38,37	33,07	21,77	9,94	-0,22	14,92	0,86	2,49	0,79	5,94	2,51	▲	▼
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,02	45,32	98,36	60,29	49,71	82,70	44,71	13,28	-4,58	27,31	-5,98	2,74	13,16	8,31	4,21	▼	▼
Informasi dan Komunikasi	6,04	-12,43	16,53	23,58	8,66	24,53	51,60	13,91	0,43	19,96	2,30	4,18	1,68	-8,54	-0,06	▼	▼
Jasa Keuangan	4,96	-3,68	5,13	10,49	4,17	4,94	12,83	7,99	9,10	8,65	8,24	10,22	9,83	1,70	7,41	▼	▼
Real Estate	1,01	2,55	5,67	9,25	4,64	11,35	7,51	2,63	0,12	5,25	2,85	4,50	8,53	6,58	5,59	▼	▲
Jasa Perusahaan	4,33	8,11	23,59	23,83	15,18	35,59	28,90	11,80	2,81	18,32	-4,29	-1,39	6,90	18,80	5,05	▲	▼
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-9,65	13,54	8,62	-1,06	3,36	8,03	3,39	-3,21	12,20	5,13	25,50	15,75	32,83	3,93	17,86	▼	▲
Jasa Pendidikan	-1,00	2,44	6,01	5,85	3,32	8,82	7,44	-0,54	0,15	3,87	-1,74	-3,46	2,98	18,16	3,94	▲	▲
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,39	-11,55	4,94	6,15	-0,02	6,21	-7,37	-23,87	7,06	-4,82	7,07	30,72	31,53	13,87	19,60	▼	▲
Jasa lainnya	6,73	140,12	94,80	58,95	69,97	37,38	8,79	27,56	21,09	21,51	9,99	1,80	26,93	26,89	15,95	▼	▼
PERTUMBUHAN PDRB	2,83	4,97	5,99	6,36	5,06	6,44	5,01	4,84	4,41	5,16	5,00	4,90	5,01	5,14	5,02	▲	▼

▲ Menguat
▼ Melambat

Sumber: BPS (data diolah)

Secara struktur, perekonomian Provinsi Kepri pada triwulan IV 2024 masih didominasi oleh LU Industri Pengolahan dengan pangsa 41,07%. Pangsa terbesar kedua yakni LU Konstruksi sebesar 20,82%, diikuti LU Pertambangan dan Penggalian serta LU Perdagangan Besar dan Eceran masing-masing sebesar 9,87% dan 9,07%. Pertumbuhan LU Industri Pengolahan tetap baik sejalan dengan masih tingginya permintaan global terhadap produk elektronik. LU Konstruksi juga masih tumbuh sejalan dengan masih berlanjutnya sejumlah pembangunan infrastruktur. Adapun kinerja LU Pertambangan dan Penggalian menunjukkan perbaikan sejalan dengan beroperasinya sejumlah proyek migas baru di Kepri. Kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran terakselerasi sejalan dengan peningkatan aktivitas pariwisata serta belanja masyarakat di HBKN Natal dan Tahun Baru.

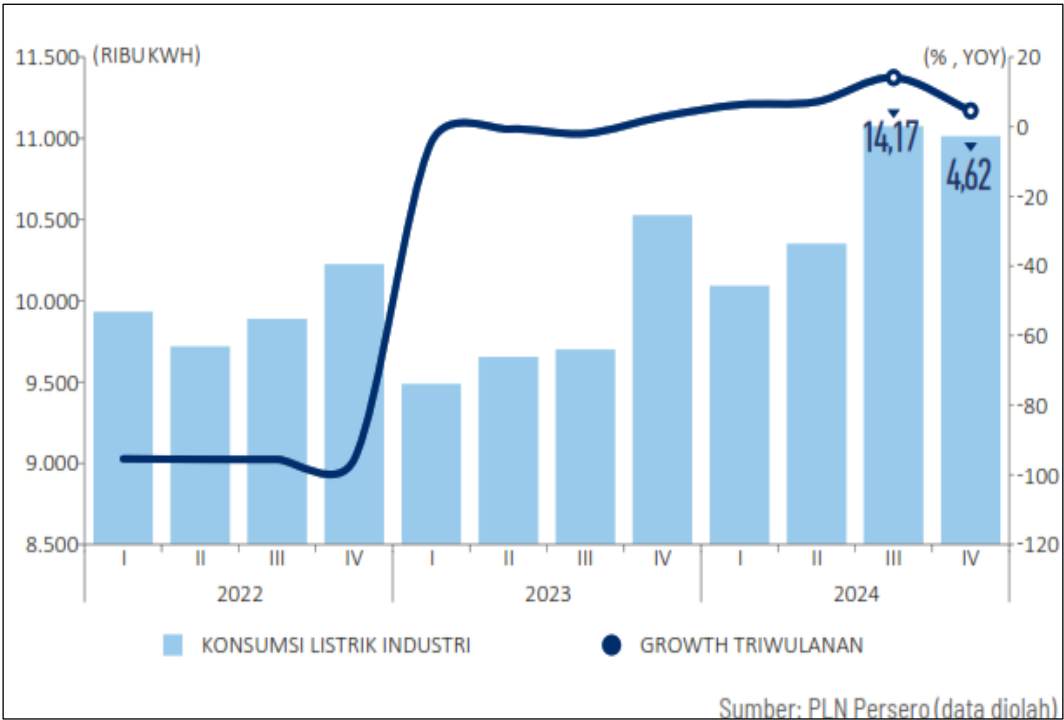
Grafik 2.17 Kontribusi Lapangan Usaha Terhadap PDRB (%)



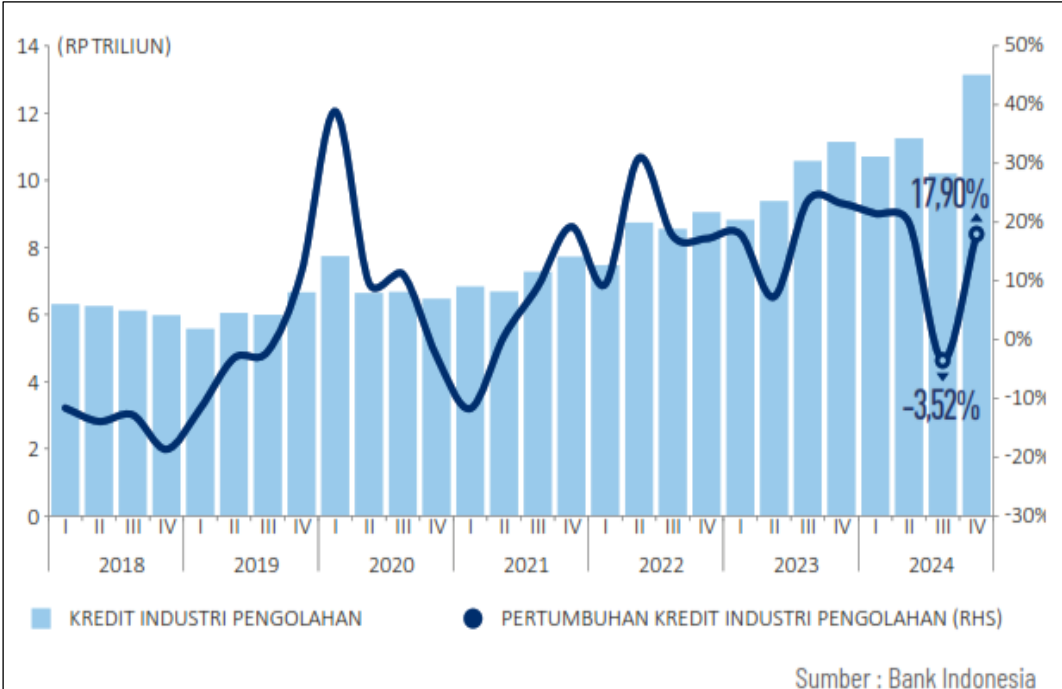
2.1.2.1 Lapangan Usaha Industri Pengolahan

LU Industri Pengolahan pada triwulan IV 2024 tetap tumbuh tinggi sebesar 6,64% (yoy), meskipun melambat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,76% (yoy) dan memberikan andil 2,73% terhadap pertumbuhan Provinsi Kepri atau yang terbesar dibandingkan LU lainnya. Kinerja LU Industri Pengolahan yang melambat tecermin dari data konsumsi listrik pada sektor industri yang tumbuh sebesar 4,62% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 14,17% (yoy). Meskipun demikian, kinerja LU Industri Pengolahan yang masih tumbuh cukup tinggi turut ditopang oleh meningkatnya pertumbuhan kredit pada sektor tersebut, dari terkontraksi 3,52% (yoy) pada triwulan III menjadi tumbuh 17,90% (yoy) di triwulan IV.

Grafik 2.18 Konsumsi Listrik Industri



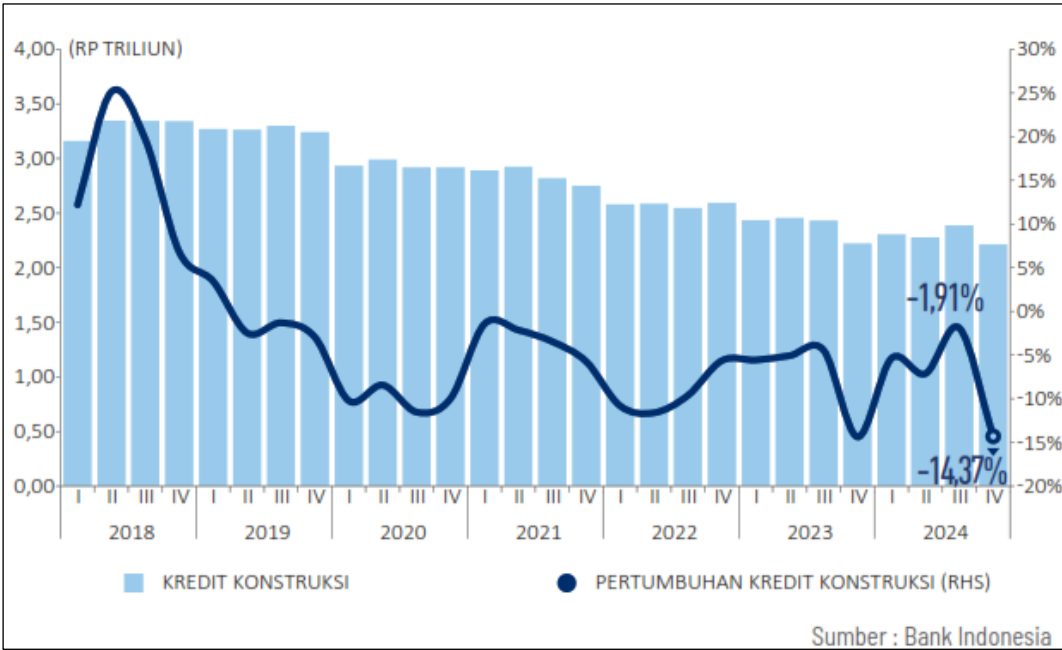
Grafik 2.19 SBT Industri Pengolahan

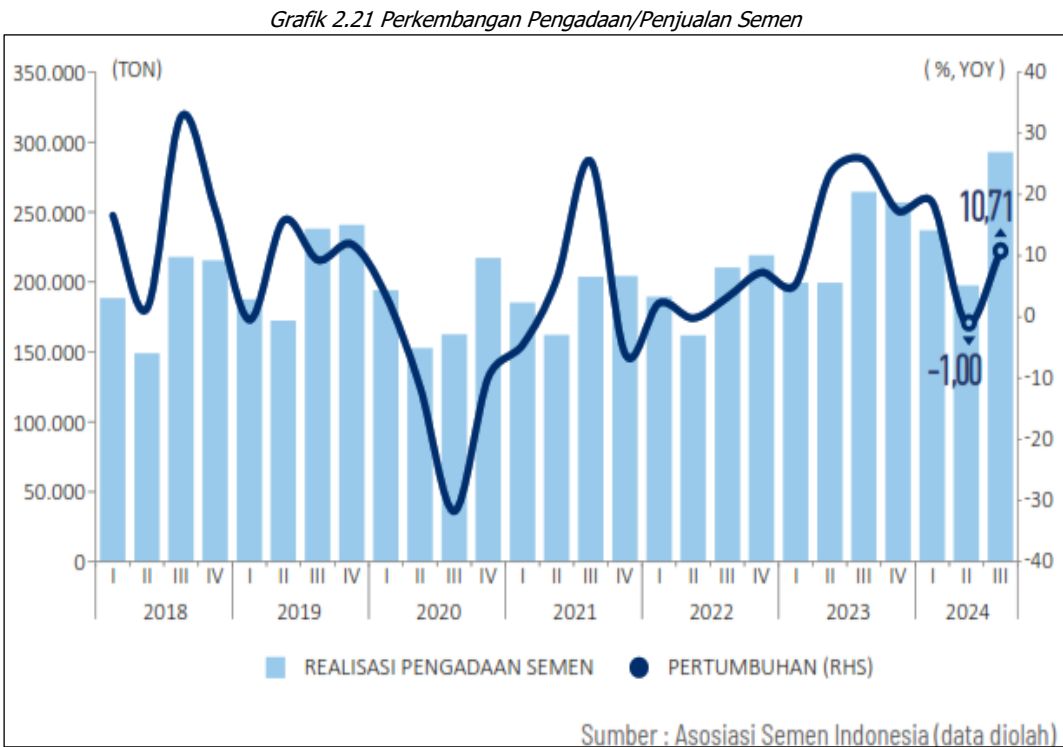


2.1.2.2 Lapangan Usaha Konstruksi

LU Konstruksi pada triwulan IV 2024 tetap tumbuh namun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. LU Konstruksi pada triwulan laporan tumbuh sebesar 1,02% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,06% (yoy). Perlambatan kinerja LU Konstruksi terkonfirmasi dari pertumbuhan kredit pada sektor tersebut di Provinsi Kepri yang mengalami kontraksi sebesar 14,37% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang juga mengalami kontraksi sebesar 1,91% (yoy). Di sisi lain, perlambatan yang lebih dalam masih tertahan yang diindikasikan oleh realisasi pengadaan/penjualan semen yang masih tumbuh sebesar 19,91% (yoy). Meskipun melambat, LU Konstruksi tetap menjadi salah satu sektor yang memberikan andil tertinggi terhadap PDRB Kepri yaitu sebesar 0,21%. Hal tersebut sejalan dengan berlanjutnya pembangunan proyek infrastruktur yang cukup masif dan masih tingginya aktivitas investasi perusahaan di Provinsi Kepri.

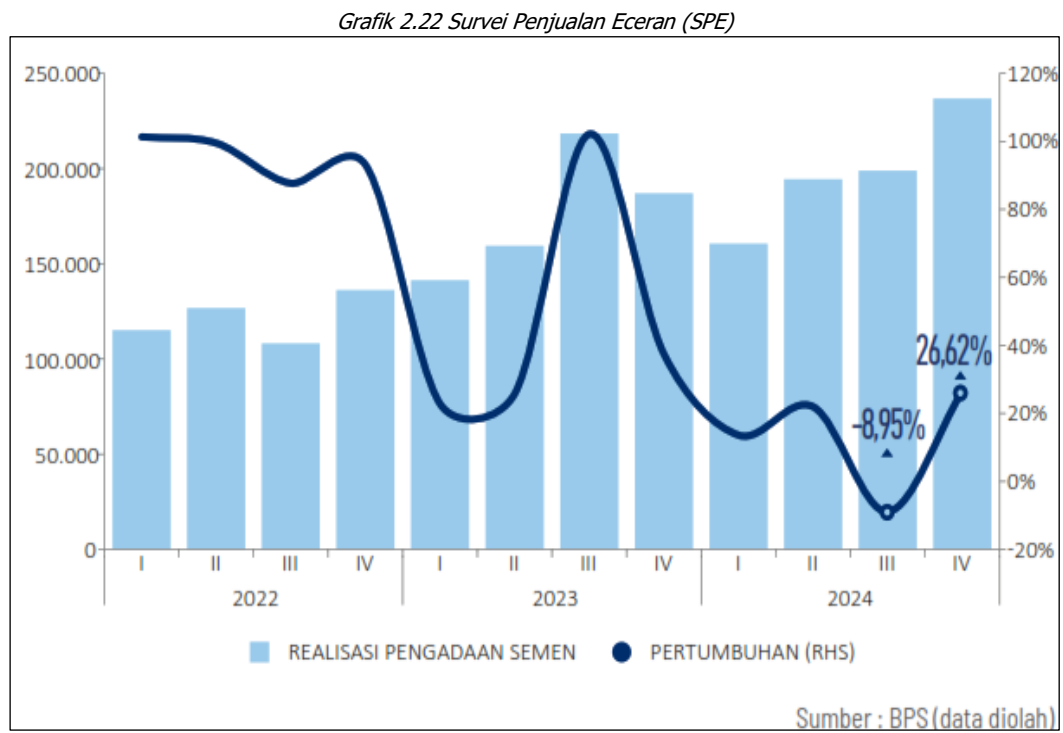
Grafik 2.20 Kredit Sektor Konstruksi



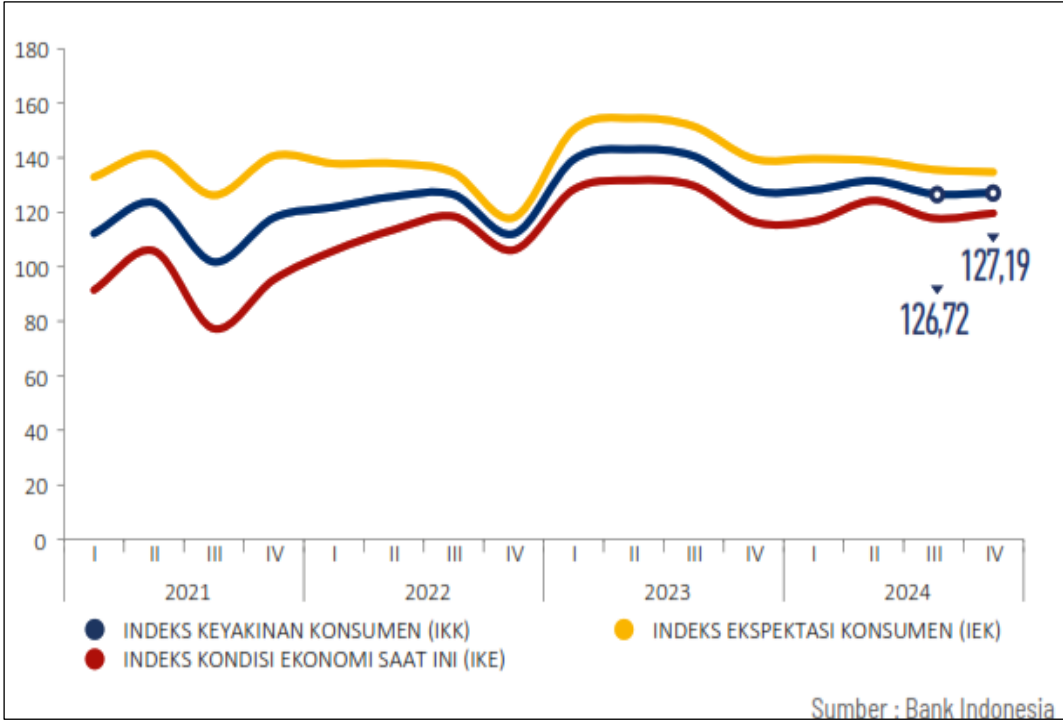


2.1.3 Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor

Kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran pada triwulan IV 2024 tumbuh sebesar 10,66% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,84% (yoy). Akselerasi tersebut tecermin dari Survei Penjualan Eceran (SPE) Bank Indonesia yang menunjukkan peningkatan pertumbuhan omzet dari terkontraksi 8,95% (yoy) pada triwulan III menjadi tumbuh 26,62% (yoy) di triwulan IV. Selain itu, Survei Konsumen Bank Indonesia juga menunjukkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang meningkat dari 126,72 menjadi 127,19. Hal ini menunjukkan perbaikan optimisme masyarakat terhadap perekonomian dan mendorong spending yang lebih tinggi sehingga turut mendukung kinerja LU Perdagangan.



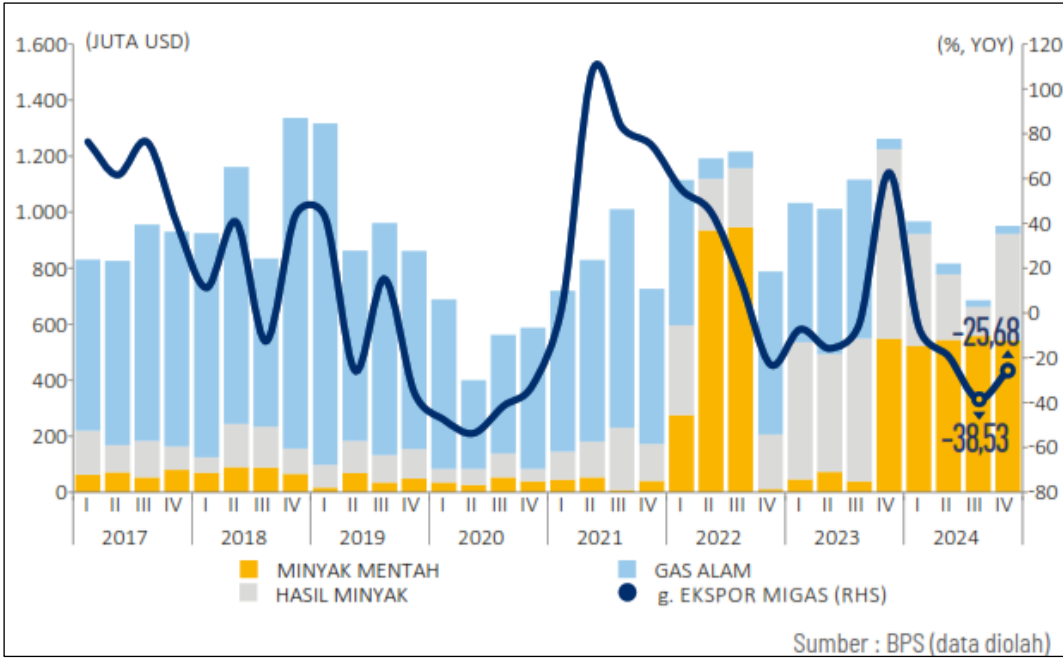
Grafik 2.23 Survei Konsumen



2.1.4 Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian

Pada triwulan IV 2024 kinerja LU Pertambangan dan Penggalian tumbuh sebesar 7,43% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 5,01% (yoy). Kinerja LU Pertambangan mulai meningkat sejalan dengan adanya sejumlah proyek migas yang baru mulai beroperasi. Hal ini tecermin dari membaiknya perkembangan ekspor migas pada triwulan IV 2024, walaupun masih mengalami kontraksi sebesar 25,68% (yoy) namun lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi lebih. Pada triwulan IV 2024 kinerja LU Pertambangan dan Penggalian tumbuh sebesar 7,43% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 5,01% (yoy). Kinerja LU dalam yakni sebesar 38,53% (yoy).

Grafik 2.24 Perkembangan Ekspor Migas



2.2. Perkembangan Keuangan Daerah



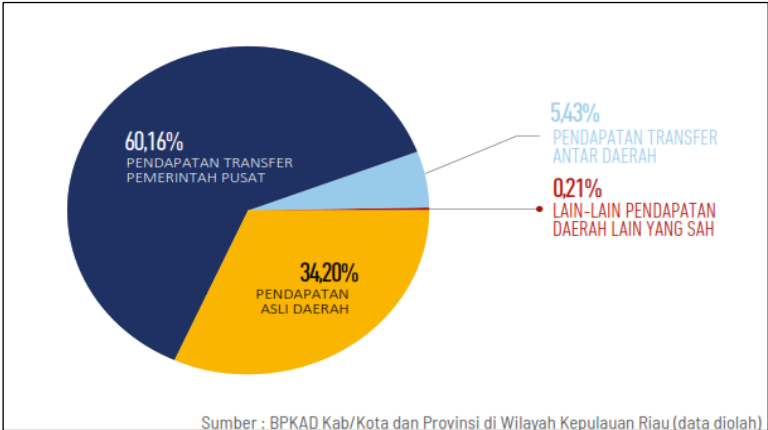
Capaian persentase realisasi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) hingga triwulan IV 2024 terhadap pagu anggaran tercatat melandai dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu, yang disebabkan oleh penurunan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer Antar Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sementara itu, realisasi belanja pemerintah juga mengalami penurunan terutama pada pos Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

Realisasi total pendapatan Pemda di wilayah Provinsi Kepri sampai dengan triwulan IV 2024 tercatat sebesar 91,88%, sementara realisasi belanja mencapai 87,63% dari total anggaran. Realisasi pendapatan tersebut lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu sebesar 95,99%. Penurunan realisasi pendapatan terutama terjadi pada pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer Antar Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Selain itu, realisasi belanja juga mengalami penurunan dari 90,92% menjadi pada tahun 2023 menjadi 87,63% pada tahun 2024. Penurunan realisasi belanja terutama terjadi pada pos Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

2.2.1. Realisasi Pendapatan

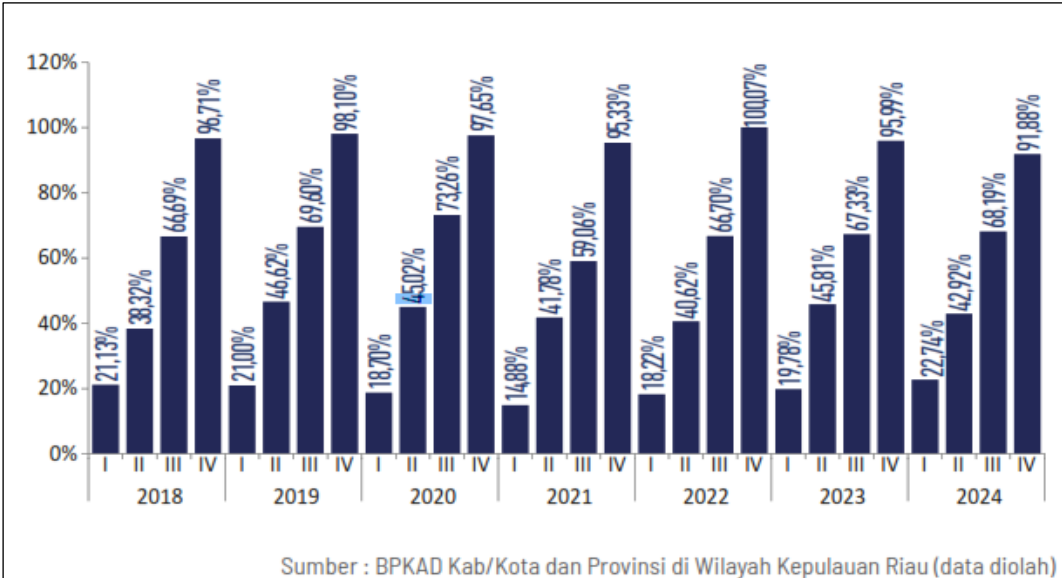
Realisasi pendapatan seluruh Pemda di wilayah Kepri pada triwulan IV 2024 mencapai 91,88% dari total anggaran atau sebesar Rp13,90 triliun. Persentase realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2023 yang tercatat sebesar 95,99% dari total anggaran. Penurunan tersebut terutama berasal dari penurunan realisasi pada pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer Antar Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Meskipun demikian, penurunan realisasi anggaran yang lebih dalam tertahan dengan peningkatan persentase pada pos Pendapatan Asli Daerah.

Grafik 2.1 Komposisi Realisasi Pendapatan Triwulan IV 2024



Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat pada triwulan IV 2024 mencapai Rp8,36 triliun atau sebesar 90,72% dari pagu anggaran dan memiliki pangsa anggaran pendapatan dengan porsi terbesar yakni sebesar 60,16% dari pagu anggaran. Capaian tersebut secara persentase lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2023 yang mencapai 96,34% dari pagu. Penurunan tersebut terjadi pada semua pos sub anggaran pendapatan yaitu pos Dana Perimbangan, Dana Insentif Fiskal, dan Dana Desa. Realisasi dana perimbangan sampai triwulan IV 2024 mencapai 90,43% dari pagu anggaran, lebih rendah dari tahun sebelumnya yang sebesar 96,16%, didorong oleh realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Fisik, dan Dana Alokasi Non Fisik yang realisasinya lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya. Dana Desa mengalami penurunan menjadi hanya terealisasi sebesar 99,29% pada triwulan IV 2024 lebih rendah dibandingkan pencapaian pada tahun sebelumnya yang dapat mencapai 101,12%. Sementara itu, pos Dana Insentif Daerah (DID) yang pada tahun 2024 tidak ada dan digantikan oleh pos Dana Insentif Fiskal yang pada triwulan IV 2024 terealisasi sebesar 98,50% atau Rp79,25 miliar dari pagu anggaran sebesar Rp80,46 miliar. Dengan demikian, dari sisi nominal realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Pusat secara keseluruhan mengalami penurunan dari Rp8,69 triliun pada tahun sebelumnya menjadi Rp8,36 triliun pada triwulan IV 2024.

Grafik 2.2 Perkembangan Realisasi Pendapatan Triwulan IV 2024



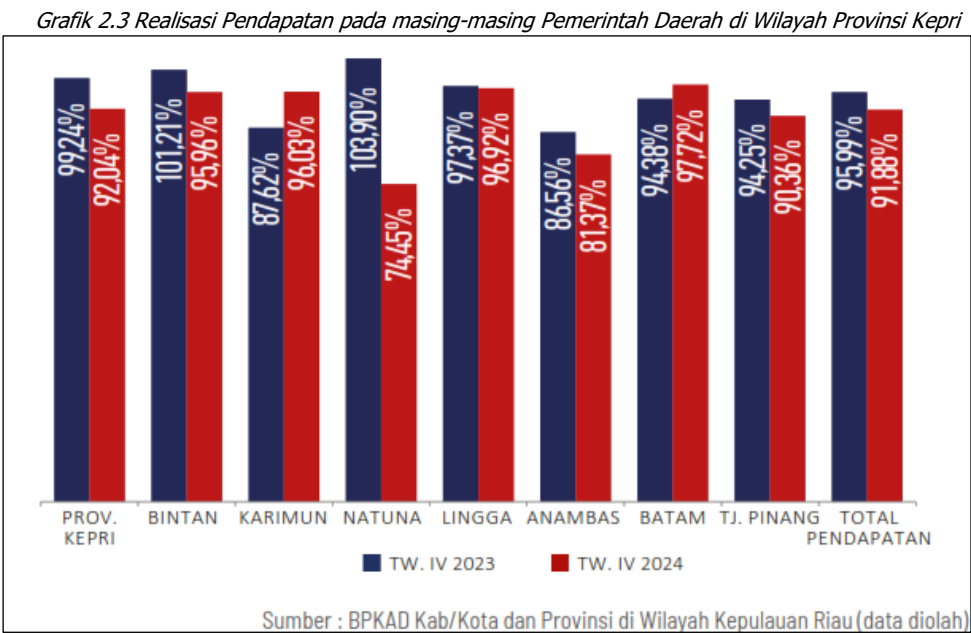
Tabel 2.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan di Wilayah Provinsi Kepri Triwulan IV 2024

Jenis Anggaran	Anggaran		Realisasi		
	Rp	Struktur (%)	Rp	Realisasi (%)	Porsi (%)
Pendapatan Asli Daerah	4.981,16	55,10%	4.754,59	95,45%	34,20%
Pajak Daerah	3.958,71	26,17%	3.917,59	82,40%	
Retribusi Daerah	603,80	26,17%	547,15	90,62%	
Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	64,76	0,43%	-	0,00%	
Lain-lain PAD yang Sah	353,89	2,34%	289,84	81,90%	
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	9.218,41	60,93%	8.363,10	90,72%	60,16%
Dana Perimbangan	8.912,20	0,59	8.059,70	90,43%	
Dana Insentif Fiskal*	80,46	0,01	79,25	98,50%	
Dana Desa	225,75	0,01	224,15	99,29%	
Pendapatan Transfer Antar Daerah	891,59	5,89%	754,87	84,67%	5,43%
Pendapatan Bagi Hasil	891,59	5,89%	754,87	84,67%	
Bantuan Keuangan**	-	0,00%	-	0,00%	
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	38,04	0,25%	28,54	75,02%	0,21%
Hibah	4,73	0,03%	2,27	48,08%	
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan	33,31	0,22%	26,26	78,85%	
TOTAL PENDAPATAN	15.129,20	100,00%	13.901,10	91,88%	

Sumber: BPKAD Kab/Kota dan Provinsi di Wilayah Kepulauan Riau (diolah)
* Pada tahun 2023, merupakan Dana Insentif Daerah yang pada tahun 2024 berganti menjadi Dana Insentif Fiskal
**Bantuan Keuangan pada tahun 2024 tidak dianggarkan

Di sisi lain, Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada seluruh Pemda di Kepri hingga triwulan IV 2024 tumbuh lebih tinggi dan tercatat sebesar Rp4,75 triliun atau 95,45% dari pagu anggaran. Realisasi ini lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 93,34% dari pagu anggaran atau sebesar Rp4,25 triliun. Peningkatan capaian PAD berasal terutama berasal dari pos Retribusi Daerah dan pos Lain-lain PAD yang Sah. Realisasi pos Retribusi Daerah meningkat mencapai 90,62% dari pagu anggaran, lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang mencapai 73,08%. Hal ini didorong dengan adanya kebijakan peningkatan tarif parkir di Kota Batam sejak Januari 2024 sehingga terjadi peningkatan pendapatan daerah dari retribusi parkir. Di sisi lain, secara persentase realisasi pada pos Pajak Daerah menurun menjadi 82,40% pada triwulan IV 2024 dari 99,18% pada triwulan IV 2023 dengan pagu anggaran menjadi sebesar Rp3,96 triliun dari sebesar Rp3,61 triliun pada tahun sebelumnya. Oleh karena itu, secara nominal realisasi pada pos Pajak Daerah di triwulan IV 2024 meningkat sebesar Rp335,92 miliar menjadi sebesar Rp3,92 triliun dari sebesar Rp3,58 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya mengindikasikan Pendapatan Asli Daerah tetap meningkat secara nominal dibandingkan periode sebelumnya.

Berdasarkan wilayah kewenangan, realisasi pendapatan tertinggi pada triwulan IV 2024 dicapai Pemerintah Kota Batam dengan jumlah pendapatan sebesar Rp3,65 triliun atau 97,72% dari total anggaran. Realisasi pendapatan Kota Batam memiliki pangsa sebesar 26,16% dari total realisasi pendapatan sehingga mempengaruhi realisasi pendapatan untuk seluruh wilayah Kepri. Capaian realisasi tertinggi berikutnya yakni Kabupaten Lingga dan Kabupaten Karimun yang masing-masing mencapai sebesar 96,92% dan 96,03% dari pagu anggaran tahun ini. Realisasi pendapatan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencapai 92,04% dari pagu anggaran.



2.2.2. Realisasi Belanja

Realisasi belanja Pemda di wilayah Kepri sampai dengan triwulan IV 2024 juga tercatat lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Realisasi belanja Pemda hingga triwulan IV 2024 mencapai 87,63% dari pagu anggaran atau sebesar Rp13,80 triliun. Pencapaian realisasi belanja yang menurun secara presentase tersebut terjadi pada pos Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Transfer. Sementara itu, realisasi Belanja Tidak Terduga tercatat mengalami peningkatan menjadi 11,73% terhadap total anggaran tahun 2024, meningkat dari 7,29% pada tahun 2023. Realisasi belanja Pemda berdasarkan pos pengeluaran didominasi oleh Belanja Operasi dengan porsi 79,23%, diikuti Belanja Modal sebesar 12,08%, Belanja Transfer sebesar 8,65%, dan Belanja Tidak Terduga sebesar 0,03%.

Realisasi Belanja Operasi tercapai sebesar 90,17% dari pagu anggaran atau tercatat sebesar Rp10,94 triliun. Pencapaian realisasi tersebut secara presentase lebih rendah dibandingkan periode tahun sebelumnya yang mampu mencapai 92,36%, namun berdasarkan nominalnya lebih tinggi Rp464,61 miliar dibandingkan realisasi pada triwulan IV 2023 sebesar Rp10,47 triliun. Secara umum, penurunan persentase pencapaian realisasi pada tahun 2024 disebabkan oleh pagu anggaran belanja yang lebih tinggi, namun secara nominal realisasi belanja tidak menurun secara signifikan. Secara lebih rinci, realisasi Belanja Pegawai yang merupakan penyumbang terbesar Belanja Operasi mencapai 95,51% dari pagu anggaran pos Belanja Operasi yakni sebesar Rp5,64 triliun, secara nominal meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang terealisasi sebesar Rp4,87 triliun. Selain itu, Belanja Hibah terealisasi 90,86% atau sebesar Rp823,08 miliar, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 87,28%. Sementara itu, pencapaian realisasi pada pos Belanja Operasi tertahan oleh penurunan realisasi pada pos Belanja Barang dan Jasa yang tercapai sebesar tercapai 84,09%, Belanja Bunga yang tercapai sebesar 91,17%, dan Belanja Subsidi yang tercapai sebesar 77,14% sampai dengan triwulan IV 2024. Realisasi ini lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2023.

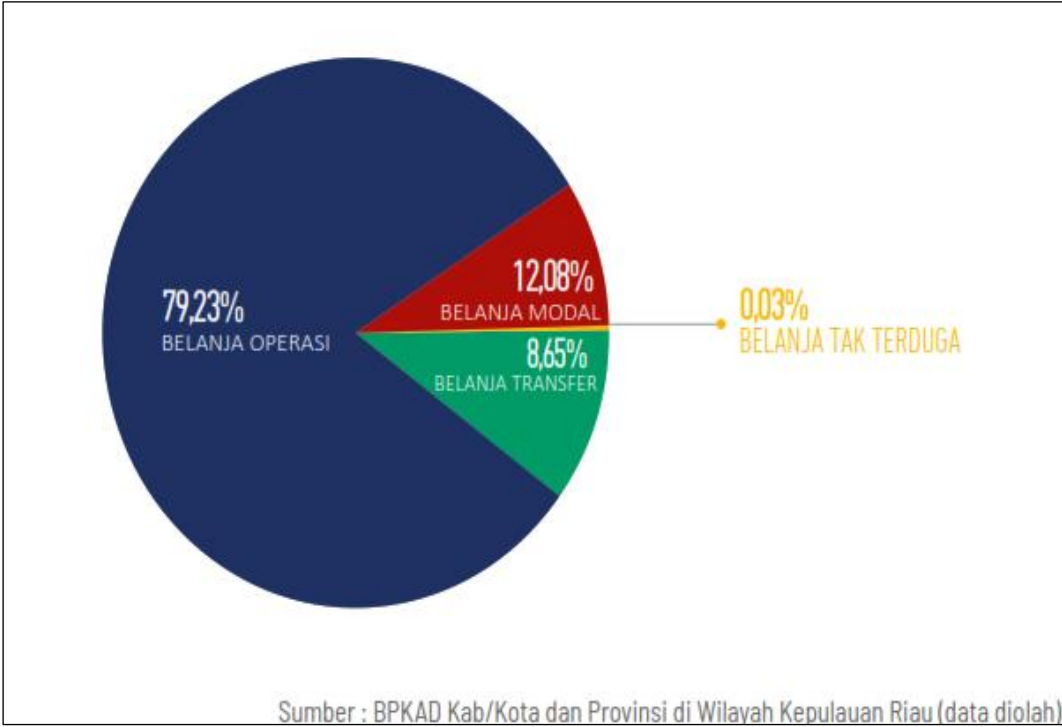
Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja di Wilayah Provinsi Kepri Triwulan IV 2024

Jenis Anggaran	Anggaran		Realisasi		Porsi (%)
	Rp	Struktur (%)	Rp	Realisasi (%)	
Belanja Operasi	12.129,54	77,00%	10.937,46	90,17%	79,23%
Belanja Pegawai	5.909,60	37,52%	5.644,00	95,51%	
Belanja Barang dan Jasa	5.281,30	33,53%	4.441,30	84,09%	
Belanja Bunga	4,05	0,03%	3,69	91,17%	
Belanja Subsidi	2,89	0,02%	2,23	77,14%	
Belanja Hibah	905,89	5,75%	823,08	90,86%	
Belanja Bantuan Sosial	25,80	0,16%	23,16	89,76%	
Belanja Modal	2.239,82	14,22%	1.667,67	74,46%	12,08%
Belanja Modal Tanah	12,58	0,08%	3,67	29,14%	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	484,69	3,08%	324,11	66,87%	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	738,15	4,69%	543,84	73,68%	
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	938,39	5,96%	756,07	80,57%	
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	61,40	0,39%	37,82	61,60%	
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	4,61	0,03%	2,16	46,89%	
Belanja Tidak Terduga	39,24	0,25%	4,80	11,73%	0,03%
Belanja Transfer	1.343,49	8,53%	1.194,15	88,88%	8,85%
Belanja Bagi Hasil	775,88	4,93%	670,31	86,39%	
Belanja Bantuan Keuangan	567,61	3,60%	523,84	92,29%	
TOTAL BELANJA	15.752,08	100,00%	13.803,89	87,63%	
SURPLUS/DEFISIT	-622,89		97,21		
Pembiayaan Neto	711,17		253,10	35,59%	
Penerimaan Pembiayaan Daerah	806,72		276,09	34,22%	
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	95,55		22,99	24,06%	
SILPA TAHUN BERKENAAN	88,28		350,32		

Sumber: BPKAD Kab/Kota dan Provinsi di Wilayah Kepulauan Riau (diolah)

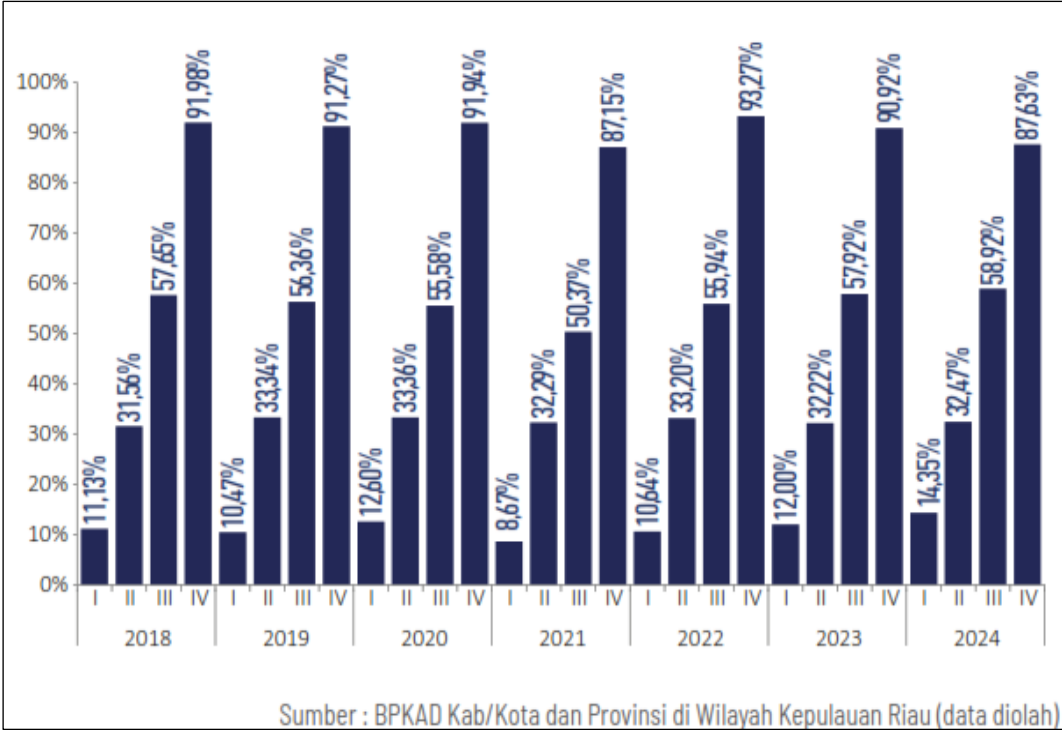
Pertumbuhan realisasi belanja tertahan oleh penyerapan pos Belanja Modal pada triwulan IV 2024. Realisasi pada pos Belanja Modal mencapai 74,46% dari pagu anggaran atau Rp1,67 triliun, dengan pangsa sebesar 12,08% dari seluruh pos anggaran belanja. Realisasi ini lebih rendah dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 86,54% dari pagu anggaran. Penurunan tersebut sejalan dengan penurunan pagu anggaran Belanja Modal secara keseluruhan meliputi pos anggaran Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, serta Belanja Modal Aset Tidak Berwujud yang menurun jika dibandingkan realisasi pada triwulan IV tahun sebelumnya.

Grafik 2.4 Komposisi Realisasi Belanja Triwulan IV 2024

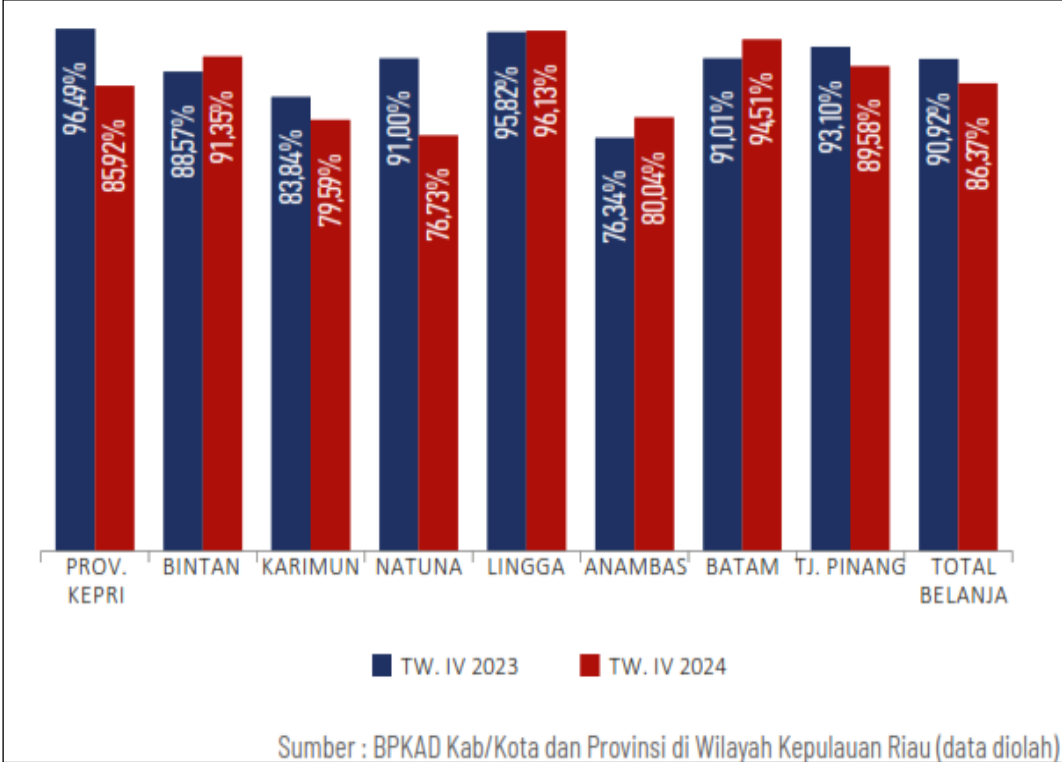


Penurunan realisasi belanja juga dipengaruhi oleh menurunnya realisasi Belanja Transfer yaitu Belanja Bagi Hasil. Realisasi Belanja Transfer tercapai 88,88% dari pagu anggaran atau sebesar Rp1,19 triliun, menurun dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 94,75% atau sebesar Rp1,30 triliun. Hal ini didorong dengan realisasi Belanja Bagi Hasil yang menurun mencapai 86,39%, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya tercapai 96,33%. Sementara itu, realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada desa mengalami penurunan dari 92,44% menjadi 92,29%, meskipun secara nominal meningkat Rp9,08 miliar dari triwulan IV 2023 menjadi sebesar Rp523,24 miliar pada triwulan IV 2024.

Grafik 2.5 Perkembangan Realisasi Belanja Triwulan IV 2024



Grafik 2.6 Realisasi Belanja pada masing-masing Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kepri



2.2.3. Anggaran dan Realisasi APBN di Wilayah Kepri

Secara keseluruhan pada 2024, target pendapatan APBN di Kepri meningkat, namun target belanja APBN tercatat mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2024, target Pendapatan APBN mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp15,16 triliun dari Rp11,52 triliun, sementara target Belanja APBN mengalami penurunan menjadi sebesar Rp18,68 triliun dari Rp19,20 triliun pada tahun 2023. Peningkatan target anggaran Pendapatan terutama terjadi pada pos Penerimaan Perpajakan dengan target menjadi Rp12,45 triliun. Sementara, penurunan anggaran Belanja terutama terjadi pada pos anggaran Transfer Ke Daerah (TKD) menjadi Rp8,18 triliun pada triwulan IV 2024 dari Rp9,29 triliun pada triwulan IV 2023.

Realisasi pendapatan APBN di wilayah Kepri sampai dengan triwulan IV 2024 mencapai 90,87% dari pagu atau sebesar Rp13,77 triliun, lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2023 yang mencapai 106,66% dari pagu. Meskipun secara presentase lebih rendah, secara nominal realisasi tersebut lebih tinggi dari triwulan IV 2023 yang tercapai sebesar Rp12,29 triliun dan tumbuh sebesar 12,08% (yoy) seiring dengan kenaikan target pendapatan pada pagu anggaran. Hal tersebut sejalan dengan pertumbuhan nominal pendapatan pajak dalam negeri sebesar tumbuh sebesar 10,82% (yoy) dengan nilai mencapai Rp10,58 triliun atau 85,01% dari pagu anggaran. Selain itu, pendapatan APBN turut didukung oleh pertumbuhan pos Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang realisasinya sebesar 117,82% dari target atau sebesar Rp3,19 triliun yang telah melampaui target sebesar Rp2,71 triliun, pencapaian ini lebih tinggi dibandingkan realisasi triwulan IV tahun 2023. Selain itu, pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) yang tumbuh 103,07% (yoy), mencapai Rp2,38 triliun atau 103,07% dari target, angka ini mencatatkan pertumbuhan sebesar 50,31% (yoy).

Tabel 2.3 Akumulasi Anggaran dan Realisasi Belanja APBN di Wilayah Provinsi Kepri

Uraian	Target	Realisasi Triwulan IV 2023	% Realisasi	Target	Realisasi Triwulan IV 2024	% Realisasi	Pertumbuhan %
A. Pendapatan Negara	11.519,71	12.287,00	106,66%	15.155,62	13.771,66	90,87%	12,08%
I. Pajak Dalam Negeri	9.209,34	9.829,88	106,74%	12.448,53	10.582,10	85,01%	7,65%
1 Pajak Dalam Negeri	8.528,78	8.999,93	105,52%	11.797,69	9.973,91	84,54%	10,82%
2 Pajak Perdagangan Internasional	680,56	829,95	121,95%	650,85	608,19	93,45%	-26,72%
II. PNBP	2.310,37	2.457,12	106,35%	2.707,09	3.189,56	117,82%	29,81%
1 Pendapatan Sumber Daya Alam	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2 Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
3 Pendapatan BLU	1.909,97	1.584,81	82,98%	2.311,07	2.382,05	103,07%	50,31%
4 PNBP Lainnya	400,40	872,31	217,86%	396,02	807,51	203,91%	-7,43%
III. Hibah	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
B. Belanja Negara	19.192,76	17.926,49	93,40%	18.682,57	17.166,89	91,89%	-4,24%
I. Belanja Pemerintah Pusat	9.698,10	8.726,49	88,16%	10.501,28	9.130,36	86,95%	4,63%
1 Belanja Pegawai	2.072,02	2.010,67	97,04%	2.264,29	2.239,50	98,90%	11,38%
2 Belanja Barang	4.944,82	4.401,58	89,01%	4.824,65	4.103,79	85,06%	-6,77%
3 Belanja Modal	2.630,22	2.073,11	78,82%	3.149,61	2.779,38	88,25%	34,07%
4 Belanja Bansos	4,59	4,54	98,71%	7,82	7,70	98,43%	69,69%
5 Belanja Lainnya	246,44	236,60	96,01%	254,91	0,00	0,00%	-100,00%
II. Transfer ke Daerah (TKD)	9.294,66	9.200,00	98,98%	8.181,29	8.036,53	98,23%	-12,65%
1 Dana Bagi Hasil (DBH)	2.447,33	2.446,94	99,98%	1.149,18	1.149,09	99,99%	-53,04%
2 Dana Alokasi Umum (DAU)	4.474,84	4.464,78	99,78%	4.817,40	4.748,06	98,56%	6,34%
3 DAK Fisik	805,94	755,76	93,77%	648,36	602,83	92,98%	-20,23%
4 DAK Non Fisik	1.173,84	1.139,97	97,11%	1.245,31	1.219,10	97,89%	6,94%
5 Dana Desa	225,94	225,78	99,93%	227,05	226,46	99,74%	0,30%
6 Dana Insentif Fiskal	166,77	166,77	100,00%	93,99	90,98	96,80%	-45,44%
7 Transfer Hibah	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
C. SURPLUS/(DEFISIT)	-7.673,05	-5.639,49	73,50%	-3.526,94	-3.395,23	96,27%	-39,80%

Sumber: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kepri

Realisasi belanja APBN di wilayah Kepri sampai dengan triwulan IV 2024 mencapai 91,89% dari pagu atau sebesar Rp17,17 triliun, lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2023 yang mencapai 93,40% dari pagu. Realisasi belanja APBN di wilayah Kepri sampai dengan triwulan IV 2024 terkontraksi 4,24% (yoy). Penurunan realisasi terjadi pada pos Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah (TKD) yang masing-masing hanya mencapai 86,95% dari target dan 98,23% target, lebih rendah dari triwulan IV 2023. Untuk komponen Belanja Pemerintah Pusat penurunan terutama terjadi pada Belanja Barang yang terkontraksi sebesar 6,77% (yoy). Di samping itu, pada komponen Transfer ke Daerah (TKD) pada triwulan IV 2024, terkontraksi sebesar 12,65% (yoy). Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan pada Dana Bagi Hasil (DBH) yang terkontraksi sebesar 53,04% (yoy), DAK Fisik yang terkontraksi sebesar 20,23% (yoy), serta Dana Insentif Fiskal yang terkontraksi sebesar 45,44% (yoy). Pada triwulan IV 2024, Neraca APBN menunjukkan defisit sebesar Rp3,39 triliun.

Realisasi anggaran belanja infrastruktur APBN di Kepri telah terserap 96,30% atau Rp1,78 triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang terealisasi sebesar 90,76%. Belanja untuk proyek infrastruktur terutama untuk proyek program ketahanan sumber daya air dan konektivitas darat yang realisasinya masing-masing mencapai 99,48% dan 99,29% dari pagu anggaran. Pengembangan konektivitas darat tersebut meningkat sejalan dengan lanjutan kegiatan pelaksanaan pembebasan lahan, pemeliharaan Jalan Toapaya Km. 46 Kab. Bintan, pembangunan dan reservasi jalan dan jembatan pada kawasan Bintan serta penanganan jalan dan jembatan Sp. Sekunyam – Desa Cemaga di Kab. Natuna. Pencapaian ini lebih tinggi dibandingkan dengan persentase realisasi dari periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, pengembangan konektivitas udara terealisasi 91,38% dari total anggaran atau sebesar Rp58,54 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan proyek pengembangan pekerjaan lanjutan pembangunan terminal kargo armada udara di Kota Batam yang telah berlangsung dan memasuki tahap penyelesaian. Selain itu, belanja proyek untuk pengembangan konektivitas laut mencapai 87,04% atau Rp359,18 miliar, salah satunya untuk peningkatan Jalan Pelabuhan Parit I di Kab. Karimun.

Tabel 2.4 Anggaran Belanja Infrastruktur APBN Wilayah Provinsi Kepulauan Riau

No	Jenis Proyek	Triwulan IV 2023			Triwulan IV 2024		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	Konektivitas Udara	157,63	155,63	98,73%	64,06	58,54	91,38%
2	Konektivitas Laut	360,05	296,79	82,43%	412,68	359,18	87,04%
3	Konektivitas Darat	1.795,29	1.639,54	91,32%	1.149,88	1.141,70	99,29%
4	Program Ketahanan Sumber Daya Air	89,46	88,41	98,83%	221,08	219,92	99,48%
Total		2.402,43	2.180,37	90,76%	1.847,70	1.779,34	96,30%

Sumber: KFR Triwulan III Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kepri

2.3. Perkembangan Inflasi



Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada triwulan IV 2024 mengalami inflasi sebesar 2,09% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,53% (yoy). Penurunan tekanan inflasi didorong oleh Kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan kelompok pendidikan. Dengan demikian, inflasi akhir tahun 2024 tetap terkendali dan berada pada sekitar titik tengah target inflasi sebesar 2,5±1% (yoy).

Inflasi Provinsi Kepri tercatat 2,09% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,53% (yoy). Inflasi yang tercatat lebih rendah tersebut disebabkan oleh penurunan harga pada kelompok: (1) perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga; (2) kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan turun; serta (3) kelompok pendidikan. Secara spasial, inflasi di Kota Batam mengalami penurunan dari triwulan sebelumnya dari 2,76% (yoy) menjadi 2,24% (yoy) pada triwulan IV 2024. Kondisi yang sama juga terjadi di Kabupaten Karimun yang mengalami penurunan inflasi dari 2,04% (yoy) menjadi 1,57% (yoy) pada triwulan IV 2024. Sementara untuk Kota Tanjungpinang terdapat peningkatan inflasi dimana sebelumnya tercatat sebesar 1,36% (yoy) menjadi 1,53% (yoy). Pada saat yang sama, inflasi Nasional mengalami penurunan dari 1,84% (yoy) menjadi sebesar 1,57% (yoy) pada triwulan IV 2024.

Pada bulan Desember 2024, secara bulanan IHK Provinsi Kepri tercatat mengalami inflasi sebesar 0,68% (mtm), lebih tinggi dibandingkan pada September 2024 yang mengalami inflasi sebesar 0,14% (mtm). Inflasi pada Desember 2024 terutama disebabkan oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang memberikan andil sebesar 0,61% (mtm) terutama disumbang oleh kenaikan harga kangkung, telur ayam ras, santan segar, cabai merah, dan bayam. Penyebab inflasi juga berasal dari Kelompok Transportasi dengan andil sebesar 0,07% (mtm), sejalan dengan naiknya tarif angkutan udara karena peningkatan permintaan jelang libur akhir tahun. Selain itu, Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya juga menyumbang inflasi dengan andil sebesar 0,01% (mtm) didorong oleh kenaikan biaya pembuatan paspor.

Tabel 2.1 Inflasi Nasional, Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjungpinang, Kota Batam dan Kab. Karimun (% , yoy)

Kelompok	2022				2023				2024			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Inflasi Nasional	2,64	4,35	5,95	5,51	4,97	3,52	2,28	2,61	3,05	2,51	1,84	1,57
Inflasi Kepri	3,24	5,89	6,79	5,83	4,77	2,64	2,05	2,76	3,37	3,54	2,53	2,09
Inflasi Tanjungpinang	2,15	5,27	6,12	4,96	4,28	1,78	1,53	2,14	2,68	2,97	1,36	1,53
Inflasi Batam	3,39	5,98	6,87	5,95	4,83	2,75	2,12	2,85	3,56	3,71	2,76	2,24
Inflasi Karimun									2,57	2,79	2,04	1,57
Sumber: BPS (data diolah)												

Tabel 2.2 Penyumbang Inflansi Provinsi Kepri Desember 2024

No	Komoditas	Kelompok	Andil Inflasi (%, mtm)
1	Kangkung	Makanan, Minuman, dan Tembakau	0,08
2	Telur Ayam Ras	Makanan, Minuman, dan Tembakau	0,07
3	Santan Segar	Makanan, Minuman, dan Tembakau	0,06
4	Cabai Merah	Makanan, Minuman, dan Tembakau	0,06
5	Bayam	Makanan, Minuman, dan Tembakau	0,06
6	Angkutan Udara	Transportasi	0,06
7	Cabai Rawit	Makanan, Minuman, dan Tembakau	0,06
8	Bawang Merah	Makanan, Minuman, dan Tembakau	0,05
9	Kacang Panjang	Makanan, Minuman, dan Tembakau	0,04
10	Sawi Hijau	Makanan, Minuman, dan Tembakau	0,03

Sumber: BPS (data diolah)

Tabel 2.3 Penyumbang Deflasi Provinsi Kepri Desember 2024

No	Komoditas	Kelompok	Andil Deflasi (%, mtm)
1	Daging Ayam Ras	Makanan, Minuman, dan Tembakau	-0,03
2	Tomat	Makanan, Minuman, dan Tembakau	-0,02
3	Pisang	Makanan, Minuman, dan Tembakau	-0,01
4	Emas Perhiasan	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	-0,01
5	Ikan Layang/Ikan Benggol	Makanan, Minuman, dan Tembakau	-0,01

Sumber: BPS (data diolah)

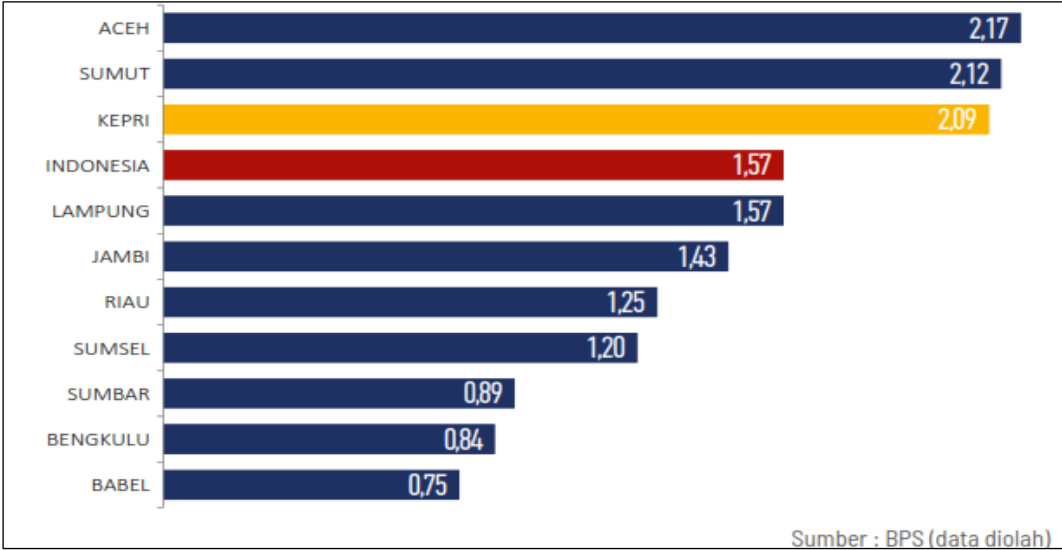
2.3.1. Perkembangan Inflasi Menurut Kelompok Barang dan Jasa

Inflasi Provinsi Kepri pada triwulan IV 2024 tercatat 2,09% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2,53% (yoy). Inflasi Provinsi Kepri tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan lebih dengan inflasi Nasional sebesar 1,57% (yoy). Inflasi Provinsi Kepri tetap terkendali dan berada di sekitar kisaran sasaran inflasi tahun 2024 yang ditetapkan pemerintah yaitu sebesar 2,5±1% (yoy).

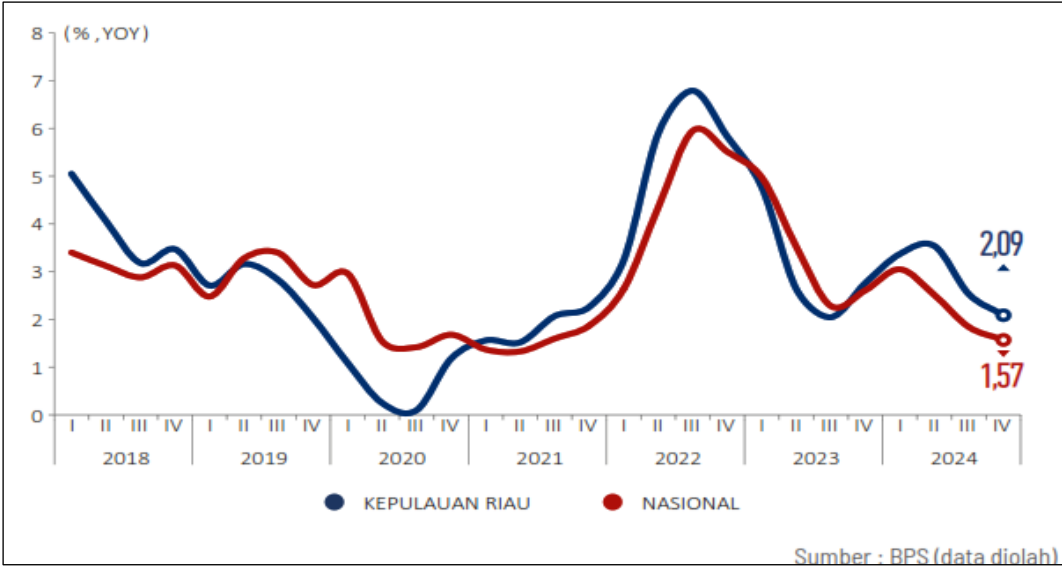
Berdasarkan perkembangan inflasi kelompok barang dan jasa, penurunan tekanan inflasi Provinsi Kepri pada triwulan IV 2024 disebabkan oleh penurunan harga pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil 0,72% (yoy), yang sebelumnya tercatat menyumbangkan andil 1,00% (yoy). Selanjutnya disusul Kelompok Transportasi yang turun sebanyak 0,17% (yoy) dibanding triwulan III 2024, atau turun dari 0,47% (yoy) menjadi 0,30% (yoy).

Tekanan inflasi pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau menurun disebabkan oleh penurunan harga sejumlah komoditas pangan antara lain cabai merah, cabai rawit, bayam, sawi hijau, dan daun bawang sejalan dengan membaiknya pasokan untuk komoditas dimaksud. Inflasi yang lebih rendah juga disebabkan oleh penurunan tarif angkutan udara di triwulan IV 2024 sebagai akibat imbauan pemerintah untuk menurunkan tarif anhgkutan udara pada momen HBKN.

Grafik 2.1 Inflasi Triwulan IVV 2024 Regional Sumatera (yoy)



Grafik 2.2 Perkembangan Inflasi Kepulauan Riau, Nasional dan Sumatera Triwulan IV 2024 (% yoy)



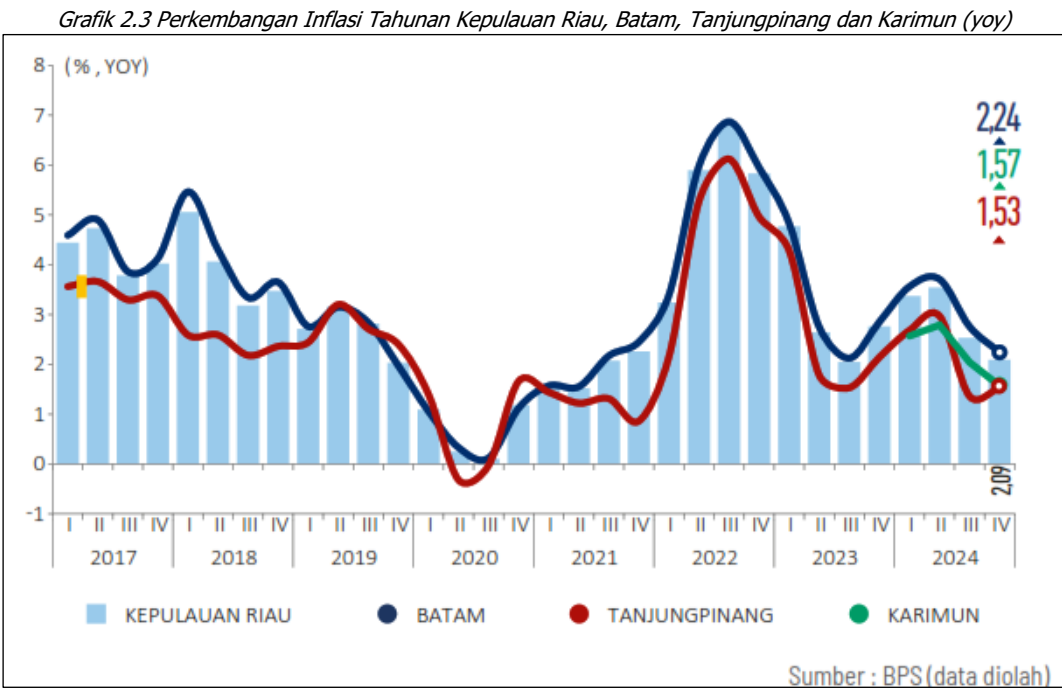
Tabel 2.4 Inflasi Tahunan Kepulauan Riau Menurut Kelompok Barang dan Jasa (% yoy)

No	Kelompok	2022								2023								2024							
		I		II		III		IV		I		II		III		IV		I		II		III		IV	
		Andil	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil	Inflasi
1	Makanan, Minuman dan Tembakau	1,45	5,02	3,54	12,31	2,88	9,95	2,17	7,39	1,91	6,49	0,37	1,20	0,93	3,12	1,61	5,40	1,87	6,38	1,87	6,48	1,00	3,46	0,72	2,46
2	Pakaian dan Alas Kaki	0,16	2,88	0,13	2,44	0,08	1,36	0,08	1,43	0,12	2,18	0,14	2,70	0,21	3,92	0,20	3,87	0,16	3,35	0,15	3,26	0,12	2,51	0,10	2,11
3	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,17	0,93	0,20	1,10	0,27	1,52	0,36	2,04	0,41	2,37	0,38	2,26	0,35	2,08	0,25	1,50	0,16	0,98	0,14	0,90	0,39	2,42	0,42	2,65
4	Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,23	4,70	0,25	5,05	0,27	5,36	0,24	4,94	0,13	2,64	0,09	1,75	0,04	0,77	0,03	0,69	0,01	0,23	-0,02	-0,41	0,00	0,10	-0,01	-0,22
5	Kesehatan	0,02	1,03	0,02	0,77	0,01	0,56	0,01	0,31	0,00	0,25	0,01	0,54	0,01	0,45	0,01	0,35	0,09	3,53	0,09	3,45	0,09	3,62	0,10	4,24
6	Transportasi	0,41	3,42	0,87	7,24	2,33	19,69	2,05	16,93	1,47	12,24	1,16	9,49	-0,02	-0,18	0,12	0,87	0,60	4,33	0,56	4,04	0,47	3,39	0,30	2,13
7	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,22	-0,33	-0,02	-0,25	-0,02	-0,39	-0,02	-0,30	0,01	0,13	0,00	0,03	0,01	0,22	0,02	0,27	0,00	-0,02	0,00	-0,05	0,00	-0,04	-0,01	-0,10
8	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0,02	1,03	0,04	1,90	0,05	2,15	0,05	2,21	0,05	2,28	0,01	0,61	0,02	0,75	0,01	0,73	-0,01	-0,35	0,00	-0,09	0,00	-0,14	0,01	0,38
9	Pendidikan	0,11	1,80	0,11	1,80	0,17	2,77	0,17	2,76	0,17	2,82	0,16	2,82	0,16	2,80	0,16	2,80	0,17	2,49	0,17	2,49	-0,13	-1,92	-0,13	-1,84
10	Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0,31	3,76	0,42	5,20	0,44	5,40	0,31	3,81	0,17	2,03	0,04	0,43	0,05	0,63	0,05	0,66	0,10	1,03	0,18	1,86	0,14	1,51	0,13	1,42
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,39	5,95	0,33	4,94	0,32	4,88	0,41	6,32	0,33	4,89	0,28	4,24	0,30	4,63	0,30	4,52	0,26	4,34	0,40	6,66	0,45	7,50	0,46	7,53
Umum		3,24		5,89		6,79		5,83		4,77		2,64		2,05		2,76		3,37		3,54		2,53		2,09	

Sumber: BPS (data diolah)

2.3.2. Perkembangan Inflasi Menurut Kota

Secara spasial, dua Kota/Kabupaten IHK di Provinsi Kepri yakni Kota Batam dan Kabupaten Karimun pada triwulan IV 2024 mencatatkan inflasi dengan tren yang menurun. Inflasi Kota Batam tercatat sebesar 2,24% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,76% (yoy). Begitu pula inflasi Kabupaten Karimun yang mengalami penurunan dari 2,04% (yoy) menjadi sebesar 1,57% (yoy). Sementara itu, Kota Tanjungpinang mencatatkan kenaikan pada inflasi dari yang sebelumnya 1,36% (yoy) menjadi 1,53% (yoy) pada triwulan IV 2024. Dengan demikian, inflasi di Provinsi Kepri tercatat sebesar 2,09% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 2,53% (yoy).



2.3.2.1. Inflasi Kota Batam

Kota Batam pada triwulan IV 2024 mengalami inflasi sebesar 2,24% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,76% (yoy). Inflasi di Kota Batam pada triwulan IV 2024 yang lebih rendah tersebut disebabkan oleh andil inflasi Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau yang tercatat memiliki andil 0,64% (yoy) atau menurun sebesar 0,33 persen poin menjadi 0,64% (yoy). Hal tersebut disebabkan oleh penurunan harga cabai rawit dan cabai merah. Selain itu, tekanan inflasi menurun pada Kelompok Transportasi yang turun sebesar 0,24% (yoy) yang didorong akibat penurunan harga bensin dan tarif angkutan udara.

2.3.2.2. Inflasi Kota Tanjungpinang

Kota Tanjungpinang pada triwulan IV 2024 mengalami inflasi sebesar 1,53% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,36% (yoy). Tekanan inflasi yang lebih tinggi tersebut utamanya disebabkan oleh peningkatan andil inflasi pada Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau yang tercatat naik sebesar 0,23 persen poin atau sebesar 1,01% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya dengan andil sebesar 0,77% (yoy) sejalan dengan kenaikan harga beras dan sigaret kretek mesin. Selain itu, tekanan inflasi juga terjadi akibat didorong oleh peningkatan andil kelompok pendidikan sebesar 0,04 persen poin seiring dengan kenaikan biaya pendidikan utamanya untuk Taman Kanak-Kanak, Akademi/Perguruan Tinggi, dan Biaya Les Privat.

2.3.2.3. Inflasi Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun pada triwulan IV 2024 mengalami inflasi sebesar 1,57% (yoy), lebih rendah dibanding inflasi pada triwulan sebelumnya sebesar 2,04% (yoy). Tekanan inflasi yang menurun tersebut disebabkan oleh penurunan andil inflasi Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau yang tercatat mengalami penurunan andil sebesar 0,50 persen poin atau turun dari 1,59% (yoy) menjadi 1,50% (yoy) seiring dengan penurunan harga cabai merah, cabai rawit, dan bayam. Selanjutnya, Kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga mengalami penurunan andil sebesar 0,10% seiring dengan penurunan harga komoditas sabun cair/cuci piring dan pembersih lantai.

Tabel 2.5 Andil Inflasi menurut Kelompok Barang dan Jasa di Kota Penghitungan IHK (% -yoy)

Periode	II-2023		III-2023		IV-2023		I-2024			II-2024			III-2024			IV-2024		
Kelompok Komoditas	Batam	Tj. Pinang	Batam	Tj. Pinang	Batam	Tj. Pinang	Batam	Tj. Pinang	Karimun	Batam	Tj. Pinang	Karimun	Batam	Tj. Pinang	Karimun	Batam	Tj. Pinang	Karimun
Makanan, Minuman dan Tembakau	0,44	-0,15	0,98	0,53	2,74	1,19	1,98	1,56	1,47	1,88	1,79	1,86	0,97	0,77	1,59	0,64	1,01	1,09
Pakaian dan Alas Kaki	0,16	0,01	0,24	-0,03	0,16	0,02	0,18	-0,02	0,23	0,20	-0,18	0,23	0,16	-0,16	0,12	0,15	-0,25	0,10
Perumahan, Air, Listrik dan Bahan bakar	0,39	0,37	0,37	0,18	0,44	0,03	0,19	0,03	0,01	0,18	-0,01	0,01	0,51	-0,01	-0,14	0,55	0,01	-0,12
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,10	0,02	0,04	0,04	0,19	0,04	0,00	0,04	0,01	-0,02	0,03	-0,04	0,00	0,04	-0,02	0,00	0,04	-0,12
Kesehatan	0,01	0,02	0,01	0,01	0,00	0,01	0,07	0,14	0,17	0,07	0,14	0,15	0,07	0,15	0,19	0,09	0,16	0,18
Transportasi	1,16	1,12	-0,06	0,27	1,57	0,25	0,72	0,28	-0,01	0,65	0,36	0,01	0,57	0,16	0,04	0,33	0,15	0,19
Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	0,01	-0,02	0,02	-0,02	0,01	-0,01	0,00	-0,01	-0,02	0,00	-0,02	-0,02	0,00	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	0,01	0,02	0,02	-0,01	0,05	-0,01	-0,01	0,00	0,02	-0,01	0,00	0,03	-0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,00
Pendidikan	0,17	0,15	0,17	0,15	0,17	0,15	0,19	0,15	0,00	0,19	0,15	0,00	-0,11	-0,14	-0,34	-0,11	-0,09	-0,34
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0,02	0,13	0,02	0,24	0,16	0,27	0,03	0,30	0,49	0,13	0,39	0,31	0,11	0,16	0,41	0,11	0,12	0,42
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,30	0,13	0,32	0,16	0,44	0,20	0,27	0,24	0,25	0,43	0,31	0,25	0,49	0,37	0,19	0,50	0,38	0,19
Umum	2,75	1,78	2,12	1,53	2,85	2,14	3,56	2,68	2,57	3,71	2,97	2,79	2,76	1,36	2,04	2,24	1,53	1,57

Sumber: BPS (data diolah)

2.3.3. Arah Perkembangan Inflasi

Inflasi Provinsi Kepri pada triwulan I 2025 diperkirakan masih berada pada rentang kisaran sasaran inflasi 2025 yakni 2,5±1%, mempertimbangkan perkembangan sejumlah indikator harga. Tekanan inflasi pada triwulan I 2025 diperkirakan ontrack seiring dengan peningkatan permintaan akibat HBKN yang dinormalisasi dengan penurunan mobilisasi pemerintah yang dapat mendorong penurunan tarif angkutan laut dan angkutan udara sebagai bagian dari upaya efisiensi belanja pemerintah.

Berdasarkan realisasi inflasi hingga bulan Januari 2025, Provinsi Kepri mengalami inflasi 0,43% (mtm), menurun dibandingkan Desember 2024 yang mengalami inflasi 0,68% (mtm). Inflasi pada Januari 2025 terutama disebabkan oleh Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil sebesar 0,72% (mtm), sejalan dengan kenaikan harga daging ayam ras, cabai merah, dan cabai rawit. Selain itu, inflasi juga didorong oleh kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran yang memberikan andil inflasi 0,09% (mtm) yang didorong oleh peningkatan harga mie dan nasi dengan lauk. Selain itu, kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya juga mengalami inflasi dan memberikan andil sebesar 0,04% (mtm) yang didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan.

Tekanan inflasi pada keseluruhan tahun diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan prakiraan sebelumnya. Sejumlah risiko inflasi hingga akhir tahun 2025 yang dapat meningkatkan tekanan inflasi antara lain: (i) Potensi terjadinya La Nina yang mendorong curah hujan lebih tinggi dari normal sehingga dapat menimbulkan bencana banjir yang dapat mengganggu produksi komoditas pangan. (ii) Pengaruh *base line* sejalan dengan penurunan harga pangan pada semester kedua 2024. (iii) Relaksasi kebijakan moneter secara global yang diperkirakan akan berlanjut pada tahun 2025 dan (iv) Harga emas global masih berada pada tren meningkat seiring dengan pelonggaran kebijakan moneter AS. Di sisi lain, faktor yang menahan kenaikan inflasi antara lain high base effect sejalan dengan kenaikan tarif parkir dan

tarif listrik pada tahun 2024 dan prakiraan harga komoditas energi global yang lebih stabil pada tahun 2025. Selain itu, program GNPIP yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia juga diharapkan dapat meredam tekanan inflasi tahun 2025.

2.3.4. Upaya Pengendalian Inflasi

Sinergi antar instansi dan lembaga dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus ditingkatkan dan diperkuat sebagai Upaya pengendalian inflasi di tengah peningkatan tekanan inflasi global dan dinamika pasokan domestik. Berbagai upaya dilakukan dalam kerangka 4K yaitu, memastikan Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Upaya pengendalian yang telah dilakukan pada triwulan IV 2024 antara lain:

a. Keterjangkauan Harga

- 1) Melaksanakan pasar murah dan Gerakan Pangan Murah di berbagai titik di seluruh Kab/Kota di wilayah Kepri. Penyelenggaraan Operasi Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah sebanyak 144 kali pasar murah sejak awal tahun.
- 2) Penyaluran SPHP oleh Bulog sejumlah 1559 kali penyaluran ke berbagai Rumah Pangan Kita (RPK) yang tersebar di Kota Batam dan 705 kali penyaluran di Kabupaten Natuna.

b. Ketersediaan Pasokan

- 1) Penyaluran traktor sebagai sarpras budidaya pertanian pada November 2024 dan solar dome sebagai sarpras pasca panen pada Desember 2024.
- 2) Penyaluran bantuan 3 unit greenhouse untuk mendorong budidaya pertanian di bulan Desember 2024.
- 3) Penyaluran bantuan 5 buah rumah pemasaran untuk hilirisasi dan pasca panen sepanjang triwulan IV 2024.

c. Kelancaran Distribusi

- 1) Penandatanganan KAD B2B antara PT. Pelabuhan Karimun dengan Perum Bulog Kantor Cabang Batam untuk pengadaan dan pembelian minyak kita dan komoditi lainnya pada Desember 2024.
- 2) Pengiriman produk berupa cabai merah keriting dari Koperasi Plasma Agri Kundur Kabupaten Karimun kepada Koperasi KTSBB Kota Batam sepanjang 2024.
- 3) Pemberian fasilitasi distribusi pangan berupa bantuan sewa kendaraan ataupun bongkar muat pada pelaksanaan program sembako bersubsidi, pasar murah, serta pangan murah.

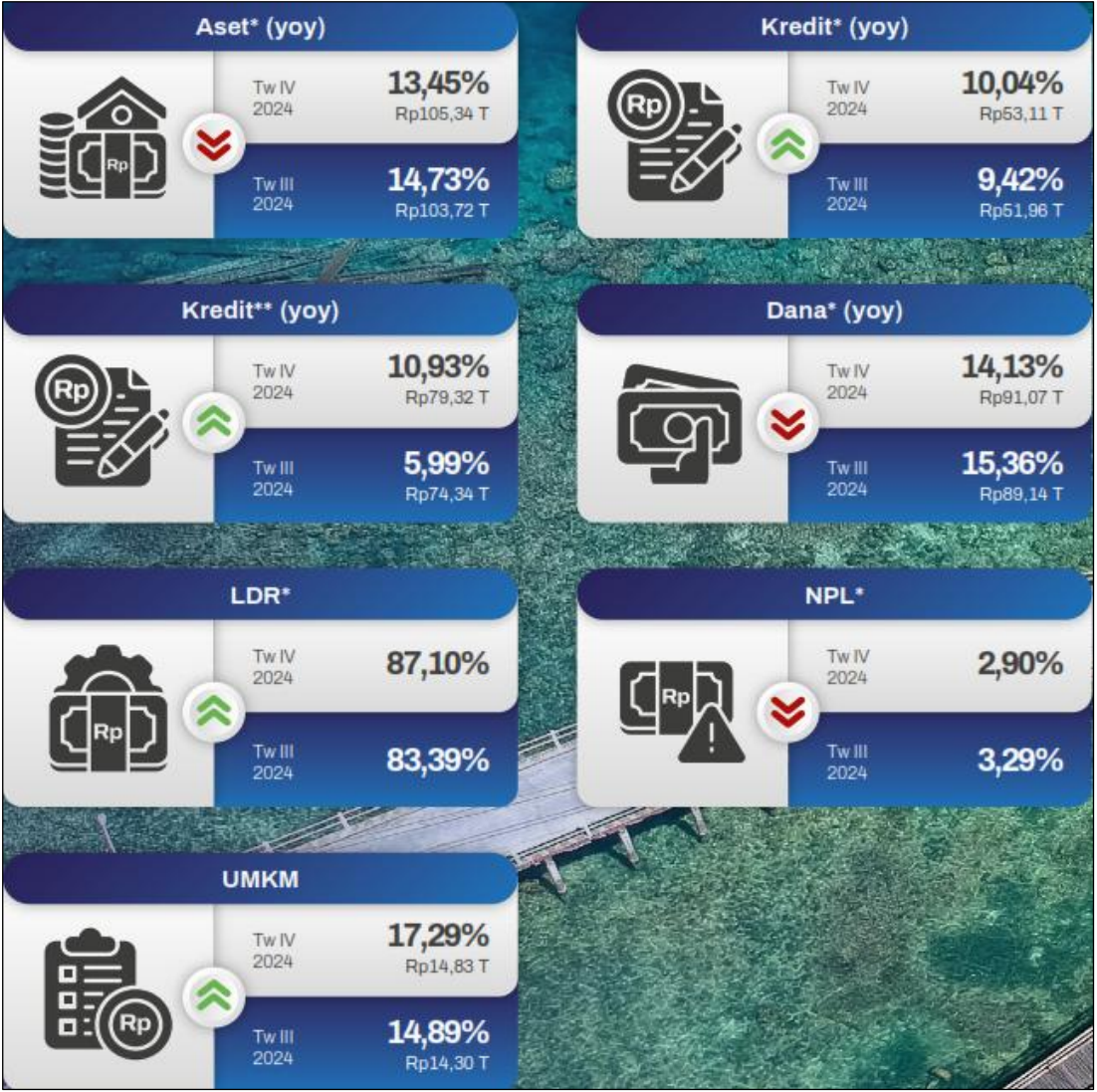
d. Komunikasi Efektif

- 1) *Site Visit* ke klaster binaan KPwBI Malang tanggal 11–14 November 2024 untuk mereplikasi budidaya cabai merah dengan menggunakan metode *vertical farming*.
- 2) Digitalisasi data pengendalian inflasi melalui dashboardtpi.com
- 3) Hingga Desember 2024, telah terlaksana sebanyak 39 kali penguatan koordinasi kelembagaan, baik di level kab/kota maupun provinsi.
- 4) Hingga Desember 2024, telah dilaksanakan 4 kali kegiatan *Capacity Building* yang merupakan hasil sinergi TPID Provinsi Kabupaten/Kota di Kepri. Salah satunya adalah *capacity building* TPID se-Provinsi Kepulauan Riau tentang penguatan peta jalan pengendalian inflasi yang dilaksanakan pada 10 Desember 2024.
- 5) Telah dilaksanakan program komunikasi rutin dan insidentil. Berbagai program tersebut diantaranya siaran pers inflasi, talkshow radio, sidak, iklan layanan masyarakat, serta sosialisasi kepada masyarakat

Sejumlah strategi telah dan akan dilakukan oleh TPID sesuai arahan Presiden RI pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi dalam menghadapi berbagai tantangan inflasi ke depan. Pengendalian inflasi pangan dengan implementasi 7 (tujuh) program unggulan GNPIP dengan menghasilkan inovasi pemanfaatan IoT pada budidaya

hidroponik, integrasi data pertanian, dan kelas digital (*smart agriculture*) kepada petani untuk memperluas edukasi budidaya tanaman pangan. Selain itu, penguatan pasokan melalui pembentukan *command center* KAD yang bertindak sebagai pusat informasi dan kebijakan terkait dengan kebutuhan daerah surplus dan defisit. Dalam penguatan KAD tersebut, integrasi data stok dan neraca pangan antar daerah akan dilakukan untuk penyusunan kebijakan pengendalian inflasi yang lebih optimal. Penguatan KAD tersebut juga akan didukung oleh penguatan infrastruktur dan rantai pasok untuk memperlancar distribusi barang dan jasa.

2.4. Pembiayaan Daerah serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM



Intermediasi perbankan pada triwulan IV 2024 tumbuh positif dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan tersebut tercermin dari peningkatan laju penyaluran kredit yang tetap disertai dengan terjaganya kualitas kredit yang tecermin dari risiko kredit pada segmen korporasi dan segmen kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), sementara risiko kredit sektor rumah tangga meningkat.

Kinerja perbankan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada triwulan IV 2024 tetap kuat, tecermin dari jumlah kredit yang meningkat dari triwulan sebelumnya dan rasio NPL yang lebih terjaga. Penyaluran kredit perbankan berdasarkan bank yang berlokasi di Provinsi Kepri pada triwulan IV 2024 tumbuh sebesar 10,04% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2024 yang tumbuh sebesar 9,42% (yoy). Sementara jumlah kredit yang disalurkan kepada proyek yang berlokasi di Kepri tumbuh sebesar 10,93% (yoy), meningkat disbanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,99% (yoy). Selain itu, DPK yang dihimpun oleh perbankan di Provinsi Kepri tumbuh sebesar 14,13% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 15,36% (yoy). Sementara, total Aset tercatat tumbuh sebesar 13,45% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 14,73% (yoy).

Kinerja intermediasi perbankan di Provinsi Kepri tetap terjaga. Berdasarkan lokasi bank, Loan to Deposit Ratio (LDR) Kepri pada triwulan IV 2024 mengalami peningkatan menjadi 58,31%, setelah tercatat sebesar 58,29% pada triwulan sebelumnya. Selanjutnya, berdasarkan lokasi proyek, LDR Kepri tercatat 87,10%, lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya sebesar 83,39%. Penyaluran kredit yang terjaga turut didukung oleh kualitas kredit yang tetap terjaga dengan rasio NPL gross yang tercatat sebesar 2,90%, mengalami perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,29%.

Kinerja penyaluran kredit UMKM tumbuh positif dengan risiko kredit yang tetap terjaga. Penyaluran kredit UMKM pada triwulan IV 2024 tumbuh sebesar 17,29% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 14,89% (yoy). Peningkatan kredit UMKM pada triwulan IV 2024 didorong oleh LU Listrik, Gas dan Air yang meningkat sebesar 1.663% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 186,11% (yoy). LU Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi tercatat sebesar 80,15% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 59,68% (yoy).

2.4.1. Perkembangan Kondisi Perbankan Provinsi Kepri

Penyaluran kredit perbankan untuk proyek yang berlokasi di Provinsi Kepri pada triwulan IV 2024 tumbuh sebesar 10,93% (yoy), mengalami peningkatan dibandingkan triwulan III 2024 yang tumbuh sebesar 5,99% (yoy). Peningkatan kredit lokasi proyek terutama disebabkan oleh peningkatan penyaluran kredit pada LU Industri Pengolahan dan LU Listrik, Gas, dan Air. Berdasarkan jenis penggunaan, peningkatan laju penyaluran kredit disebabkan oleh membaiknya penyaluran kredit modal kerja.

Selanjutnya, aset perbankan tumbuh positif sebesar 13,45% (yoy), termoderasi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 14,73% (yoy). Di samping itu, DPK tumbuh sebesar 14,13% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 15,36% (yoy). Deselerasi tersebut terutama terjadi pada giro dan tabungan, sedangkan deposito tumbuh terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat cenderung memilih instrumen jangka panjang seperti deposito. Pada triwulan IV 2024, kemampuan pelaku usaha dalam membayar angsuran kredit tetap terjaga, yang tercermin dari menurunnya tingkat kredit bermasalah (rasio NPL gross) dari 3,29% pada triwulan sebelumnya menjadi 2,90%.

Tabel 2.13 Perkembangan Indikator Utama Perbankan Kepri

	2023 (Rp Triliun)				2024 (Rp Triliun)				Pertumbuhan (%, YoY)			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	Tw I 2024	Tw II 2024	Tw III 2024	Tw IV 2024
Total Aset*	83,29	85,97	90,40	92,85	100,68	100,45	103,72	105,34	20,88%	16,84%	14,73%	13,45%
Total Dana*	71,84	72,11	77,27	79,80	82,20	86,84	89,14	91,07	14,41%	20,44%	15,36%	14,13%
Total Kredit*	45,16	46,06	47,49	48,26	48,61	51,19	51,96	53,11	7,64%	11,14%	9,42%	10,04%
Total Kredit**	65,81	67,33	70,13	71,51	71,72	73,69	74,34	79,32	8,98%	9,46%	5,99%	10,93%
NPL*	2,14%	2,29%	4,33%	3,88%	3,73%	3,28%	3,29%	2,90%	-	-	-	-
LDR**	91,60%	93,37%	90,76%	89,61%	87,25%	84,85%	83,39%	87,10%	-	-	-	-

Sumber: LBUT Bank Indonesia
(*) dari bank yang berlokasi di Kepri,
(**) kepada proyek yang berlokasi di Kepri

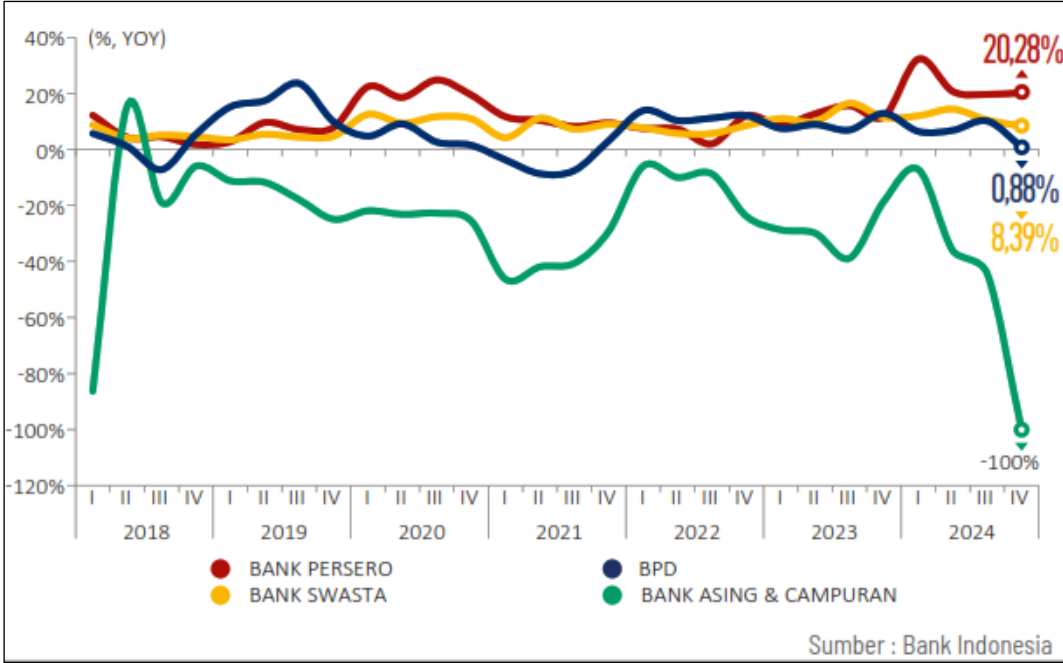
2.4.1.1. Perkembangan Aset Perbankan

Aset perbankan di Provinsi Kepri pada triwulan IV 2024 berjumlah Rp105,34 triliun atau tumbuh 13,45% (yoy), termoderasi dari triwulan sebelumnya yang mencapai 14,73% (yoy). Pertumbuhan aset bersumber dari kelompok Bank Persero yang tumbuh sebesar 20,28% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 19,67% (yoy). Aset Bank Swasta dan BPD termoderasi masing-masing menjadi 8,39% dan 0,88% dari sebelumnya yang masing-masing tumbuh sebesar 10,51% dan 10,16%. Di sisi lain, aset kelompok Bank Asing dan Campuran mengalami kontraksi hingga 100% (yoy), seiring dengan tidak adanya lagi aset dari kelompok bank tersebut di Kepri sejak November 2024. Secara keseluruhan, struktur aset perbankan di Provinsi Kepri pada triwulan IV 2024 tercatat didominasi oleh kelompok Bank Persero yakni sebesar 49,85%, diikuti oleh Bank Swasta Nasional (44,17%), dan BPD (5,98%).

Grafik 2.4 Perkembangan Aset Perbankan



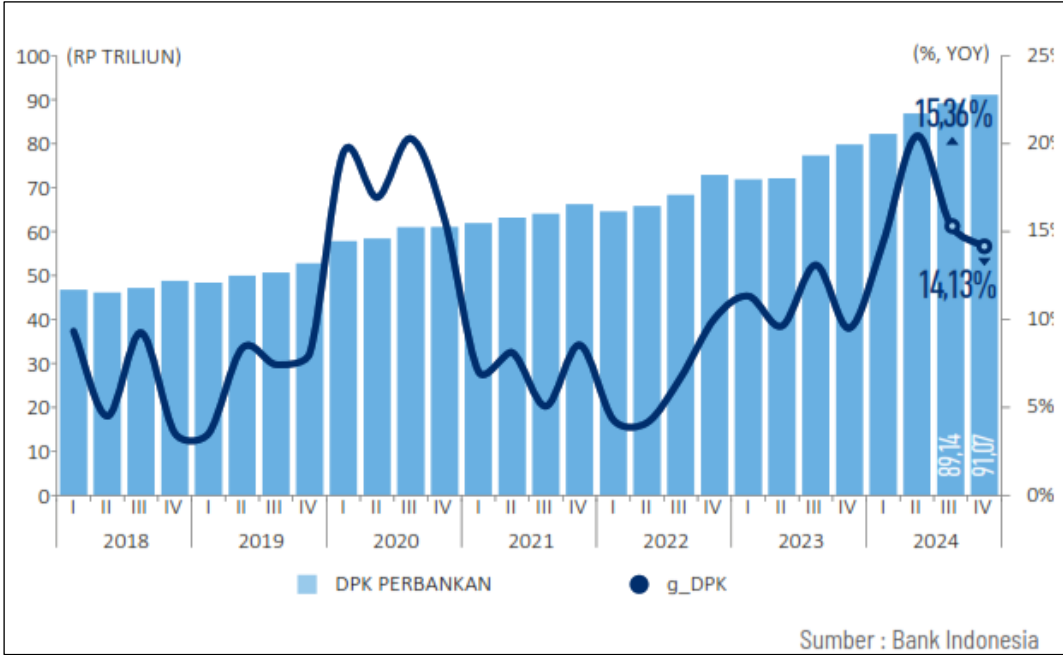
Grafik 2.5 Pertumbuhan Aset Berdasarkan Kelompok Bank



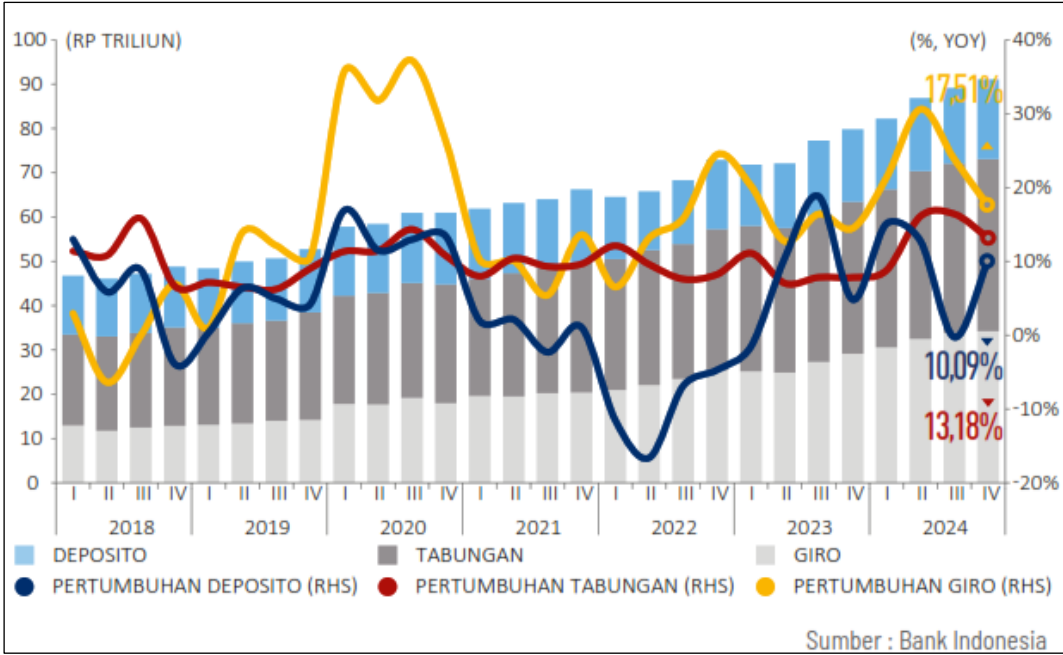
2.4.1.2. Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan

Pada triwulan IV 2024, total DPK di Kepri berjumlah Rp91,07 triliun atau tumbuh 14,13% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 15,36% (yoy) atau berjumlah Rp89,14 triliun. Penurunan tersebut bersumber dari giro dan tabungan yang masing-masing termoderasi sebesar 17,51% (yoy) dan 13,18% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan III yang masing-masing tumbuh sebesar 23,85% (yoy) dan 16,43% (yoy). Sementara, deposito mengalami peningkatan dari -0,27% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 10,09% (yoy). Hal ini menunjukkan preferensi simpanan masyarakat pada instrumen yang lebih *profitable* meningkat. Struktur DPK pada triwulan IV 2024 masih didominasi tabungan dengan pangsa 42,67%, diikuti giro 37,62% dan deposito 19,71%. Penempatan dana yang tinggi pada instrumen simpanan jangka pendek (giro dan tabungan) mengindikasikan masih rendahnya preferensi masyarakat untuk menjadikan simpanan bank sebagai instrumen investasi.

Grafik 2.6 Perkembangan DPK Perbankan



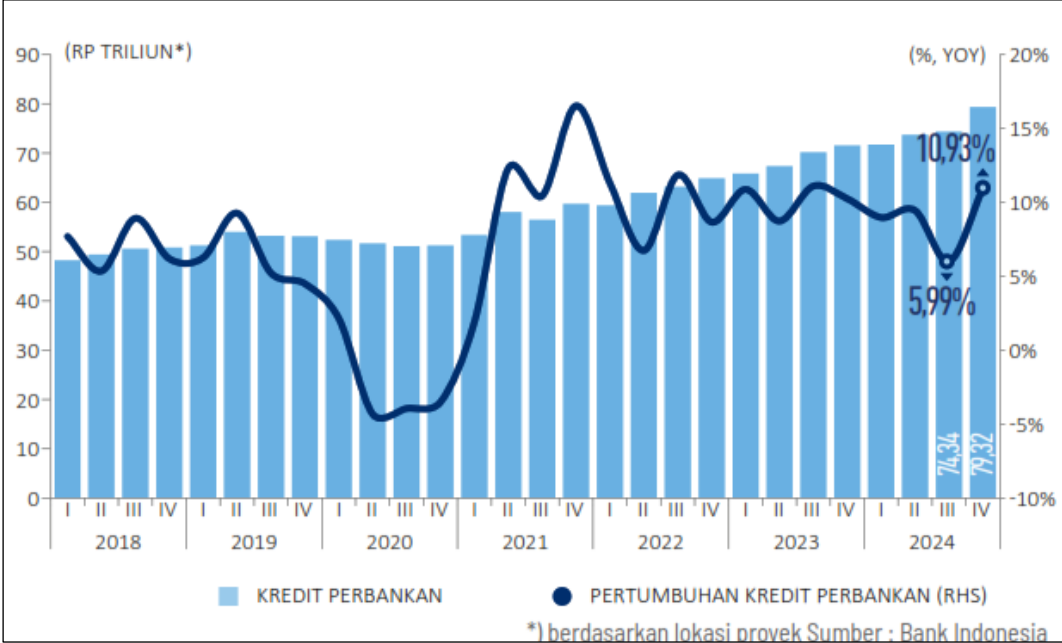
Grafik 2.7 DPK Perbankan Berdasarkan Jenis Simpanan



2.4.1.3. Perkembangan Kredit Perbankan

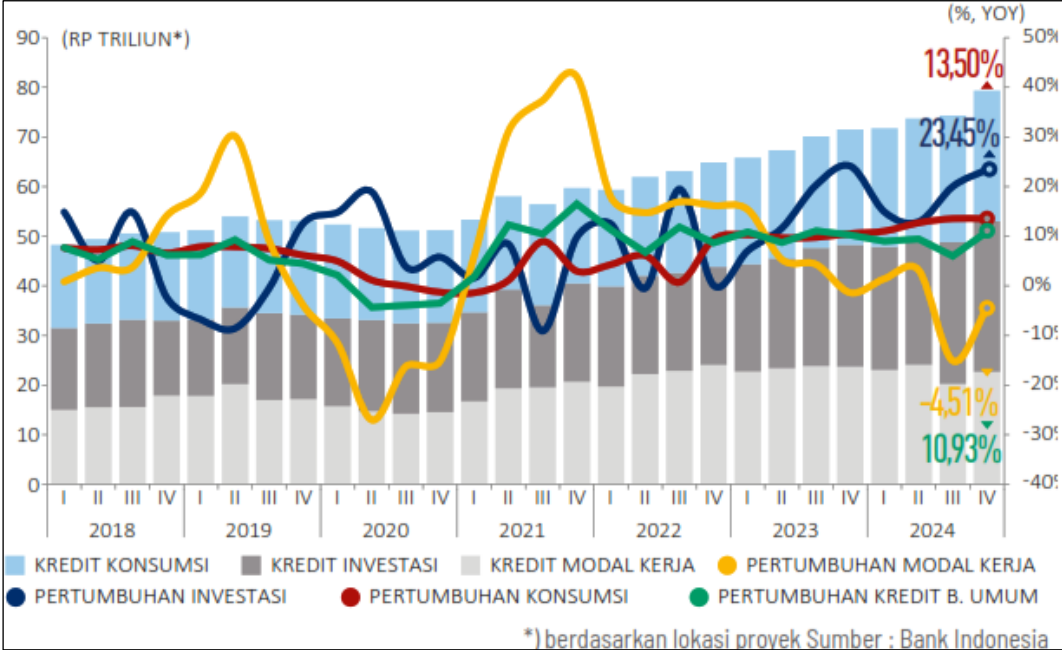
Jumlah penyaluran kredit (berdasarkan lokasi proyek) di Provinsi Kepri pada triwulan IV 2024 sebesar Rp79,32 triliun atau tumbuh 10,93% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 5,99% (yoy). Peningkatan terutama bersumber dari kredit investasi yang tercatat tumbuh 23,45% (yoy) pada triwulan IV 2024, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 20,04% (yoy). Selanjutnya, pertumbuhan kredit modal kerja mengalami perbaikan dari yang sebelumnya terkontraksi 15,13% (yoy) menjadi terkontraksi 4,51% (yoy) di triwulan IV 2024. Disisi lain, kredit konsumsi tumbuh sebesar 13,50% (yoy), termoderasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 13,55% (yoy). Secara keseluruhan, struktur kredit pada triwulan IV 2024 didominasi oleh kredit investasi dengan pangsa sebesar 38,20%, diikuti oleh kredit konsumsi 33,20% dan kredit modal kerja sebesar 28,60%.

Grafik 2.8 Perkembangan Kredit Perbankan

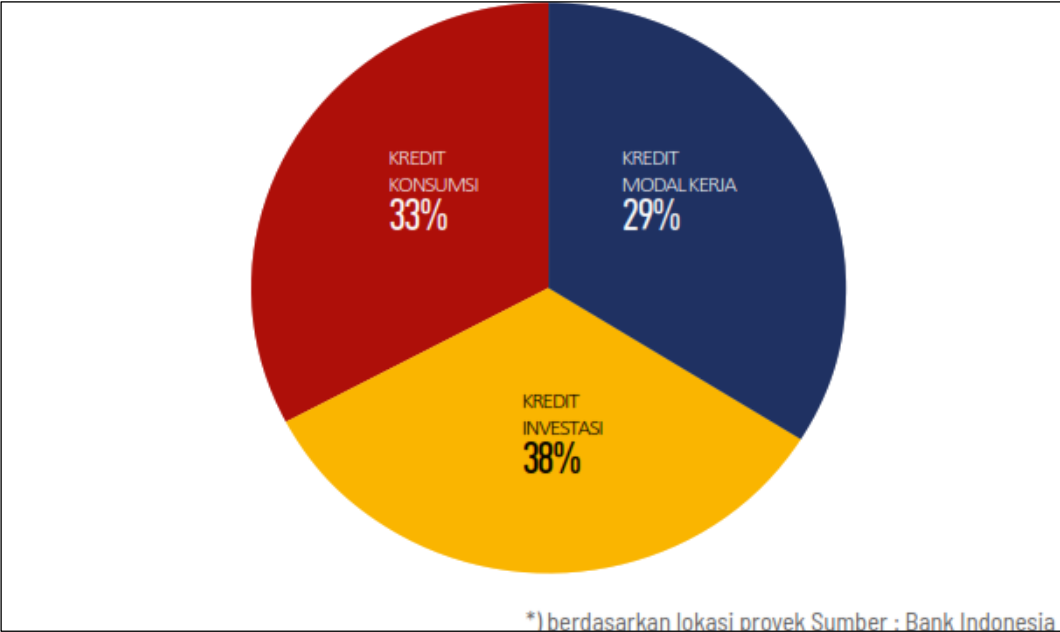


Pada triwulan IV 2024, rata-rata tingkat suku bunga kredit perbankan di Provinsi Kepri tercatat 8,59%, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 8,74%. Bank Indonesia tetap menjaga transmisi kebijakan yang *pro growth* dan *pro market* direspon dengan penurunan suku bunga kredit untuk mendukung penyaluran pembiayaan di sektor strategis. Penurunan suku bunga terjadi pada kredit modal kerja dan kredit investasi yang tercatat masing-masing sebesar 7,82% dan 8,32%, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang masing-masing tercatat sebesar 8,32% dan 8,45%. Di samping itu, perkembangan suku bunga simpanan (DPK) pada giro dan deposito cenderung meningkat. Rata-rata suku bunga giro dan deposito pada triwulan berjalan masing-masing tercatat sebesar 2,27% dan 4,49%, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang masing-masing sebesar 2,01% dan 4,32%. Sementara suku bunga pada tabungan menurun dari yang sebelumnya 0,60% menjadi 0,59% pada triwulan IV 2024.

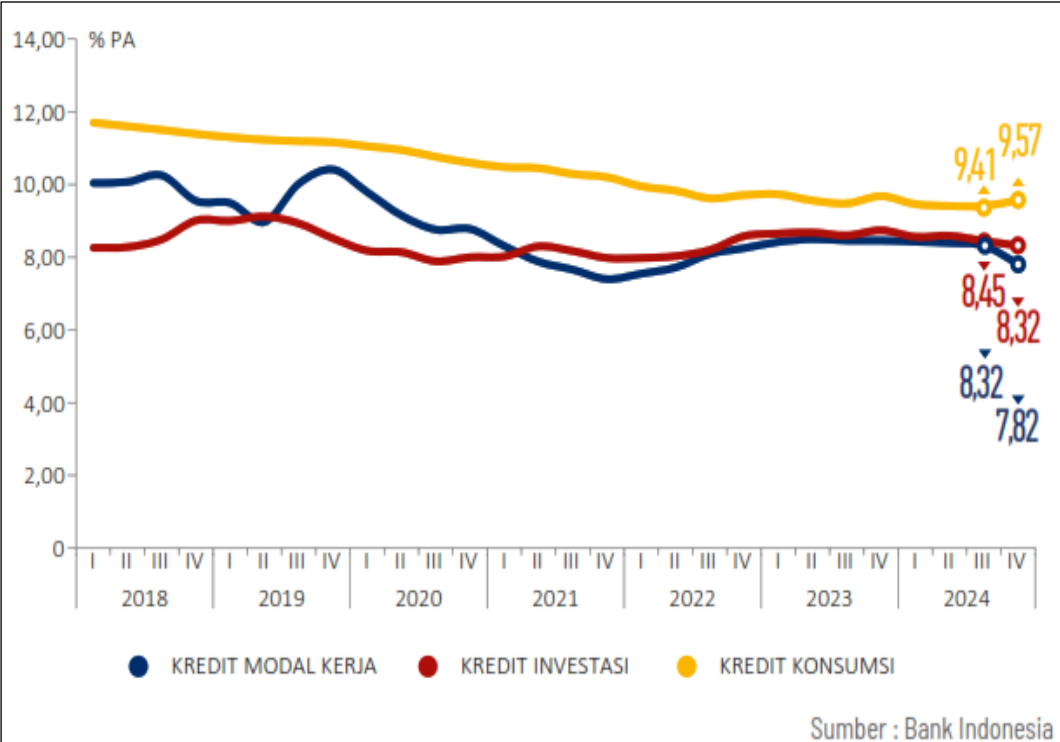
Grafik 2.9 Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan



Grafik 2.10 Porsi Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan

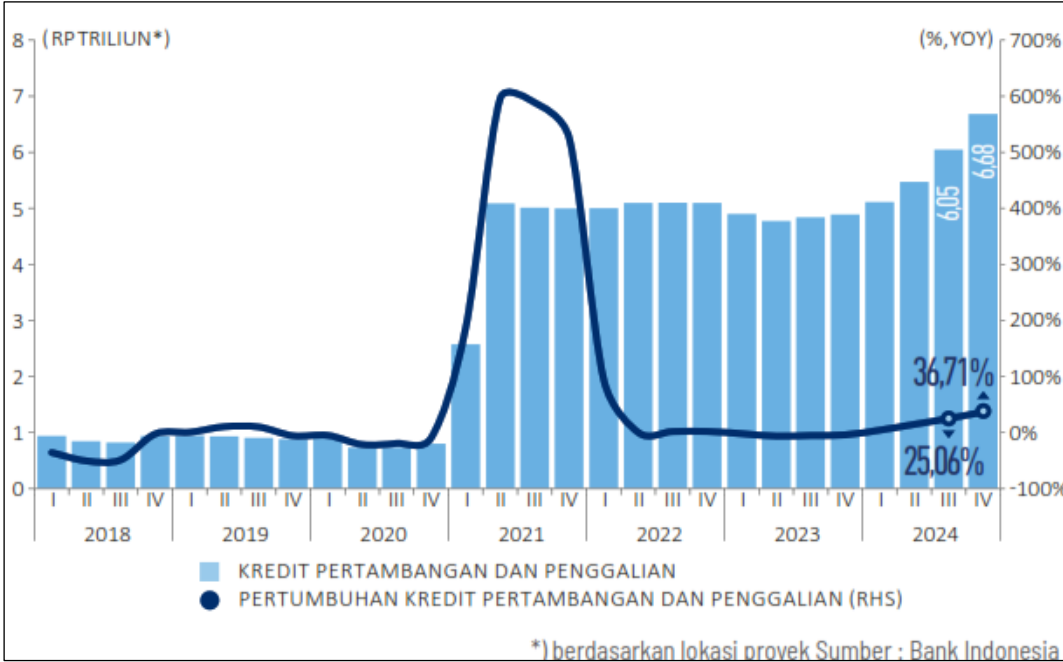


Grafik 2.11 Perkembangan Suku Bunga Kredit



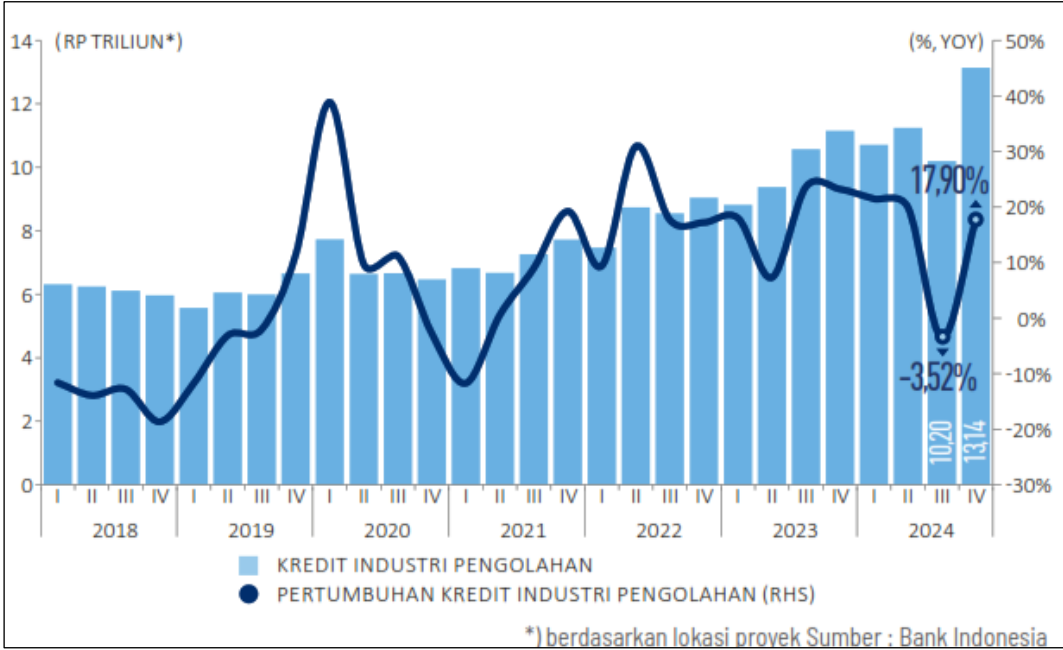
Secara sektoral, membaiknya penyaluran kredit berdasarkan lokasi proyek bersumber dari kredit industri pengolahan yang tumbuh 17,90%, meningkat signifikan dibanding triwulan sebelumnya yang berkontraksi 3,52% dan LU listrik, gas, dan air yang terakselerasi 36,71% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 25,06% (yoy). Hal ini sejalan dengan meningkatnya aktivitas industri pengolahan sehingga permintaan terhadap penggunaan listrik, gas, dan air meningkat.

Grafik 2.12 Kredit Sektor Listrik, Gas, dan Air



Pertumbuhan ini juga diikuti oleh penurunan kredit di beberapa sektor diantaranya LU Pertambangan dan Penggalan mengalami kontraksi sebesar 21,51% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang terkontraksi 4,59% (yoy). Selain itu, LU Jasa Perorangan RT juga mengalami kontraksi yang lebih dalam pada triwulan IV yaitu sebesar 11,18% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang terkontraksi 9,16% (yoy). Di sisi lain, LU Perdagangan Besar dan Eceran dan LU Jasa Masyarakat, Sosial Budaya, dan Hiburan termoderasi dibanding triwulan sebelumnya dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 1,25% (yoy) dan 13,33% (yoy), dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,44% (yoy) dan 22,06% (yoy).

Grafik 2.13 Kredit Sektor Industri Pengolahan



Tabel 2.14 Penyaluran Kredit (Spasial)

Kabupaten/Kota	Triwulan III 2024	
	Kredit (Rp Triliun*)	Porsi (%)
Batam	55,61	77,01%
Tanjungpinang	7,42	10,37%
Karimun	4,01	5,61%
Lingga	0,69	0,96%
Natuna	2,64	3,69%
Bintan	3,64	5,09%
Kep. Anambas	0,33	0,47%
Kepulauan Riau	74,34	103,00%

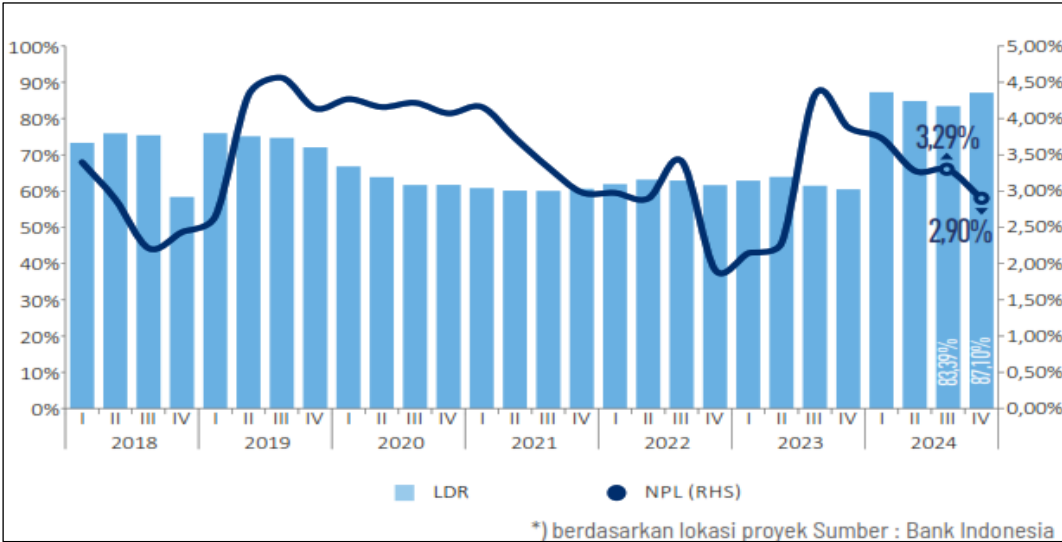
Sumber: Bank Indonesia
*)Berdasarkan lokasi proyek

Secara spasial, penyaluran kredit di wilayah Provinsi Kepri masih terkonsentrasi di Kota Batam dengan jumlah kredit pada triwulan IV 2024 sebesar Rp58,58 triliun dengan pangsa 73,85% dari total kredit di Provinsi Kepri. Kondisi tersebut sejalan dengan peran Kota Batam sebagai pusat ekonomi di Provinsi Kepri yang memiliki pangsa > 60% dalam PDRB Kepri. Penyaluran kredit terbesar kedua berlokasi di Kota Tanjungpinang dengan pangsa 9,34% dari total kredit atau sebesar Rp7,41 triliun, diikuti Kabupaten Karimun dengan pangsa 5,28% dari total kredit atau sebesar Rp4,19 triliun.

2.4.1.4. Intermediasi dan Resiko Kredit Perbankan

Kinerja intermediasi perbankan di Provinsi Kepri yang tercermin dari rasio LDR berdasarkan lokasi proyek pada triwulan IV 2024 mengalami peningkatan menjadi 87,10%, setelah pada triwulan sebelumnya tercatat sebesar 83,39%. Peningkatan LDR Rupiah lebih disebabkan oleh peningkatan kredit Rupiah yang lebih tinggi yang diiringi oleh turunnya DPK rupiah. Penyaluran kredit yang terjaga turut didukung oleh kualitas kredit yang tetap terjaga sebagaimana rasio NPL gross yang tercatat membaik dari 3,29% menjadi sebesar 2,90% di triwulan IV 2024. Angka NPL ini juga mengindikasikan bahwa tingkat pengembalian kredit nasabah di Kepri masih dalam batasan risiko aman, di bawah plafon yang ditetapkan 5%.

Grafik 2.14 Intermediasi dan Risiko Perbankan Kepri



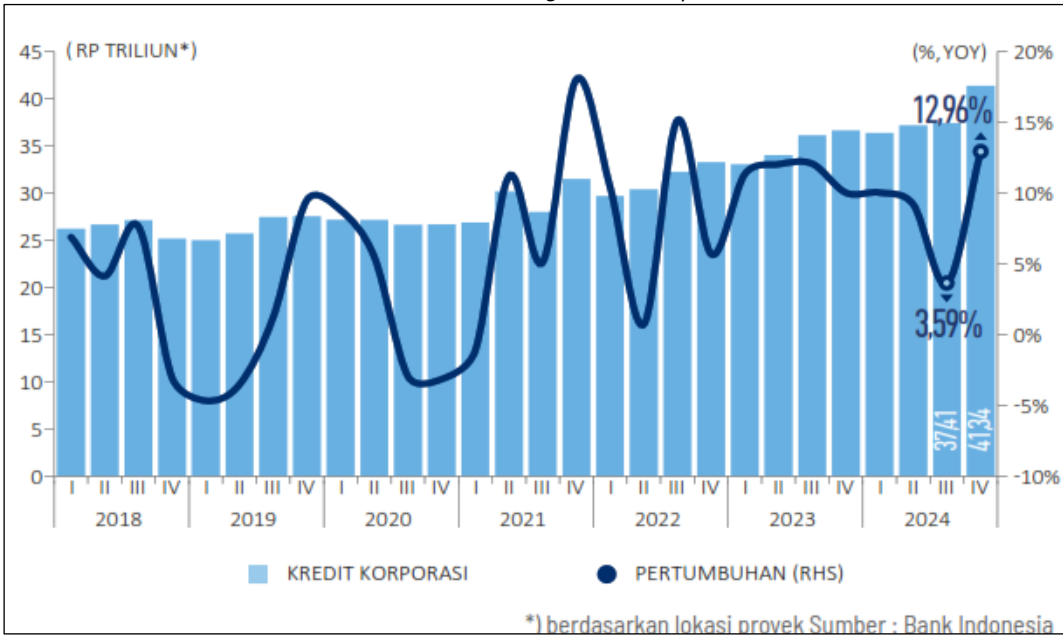
2.4.2. Asesmen Pembiayaan Daerah serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Pembiayaan pada sektor korporasi dan rumah tangga juga tetap terjaga sejalan dengan pemulihan ekonomi di daerah yang terus berlangsung. Momentum tersebut juga didukung oleh kebijakan keterbukaan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) yang mendorong penurunan suku bunga kredit. Pada triwulan IV terjadi akselerasi kinerja kredit sektor korporasi dan UMKM. Sementara itu kredit sektor rumah tangga masih tumbuh positif namun termoderasi disbanding triwulan sebelumnya.

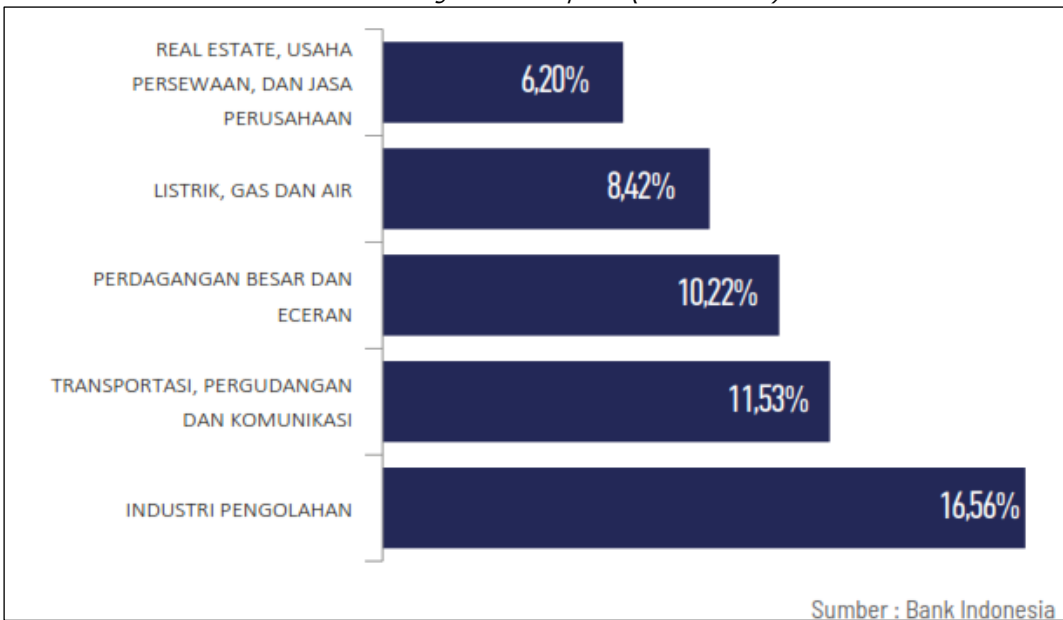
2.4.2.1. Ketahanan Sektor Korporasi

Kinerja penyaluran kredit ke sektor korporasi mengalami akselerasi pada triwulan IV 2024. Penyaluran kredit korporasi (lokasi proyek) berjumlah Rp41,34 triliun atau tumbuh 12,96% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,59% (yoy). Di samping itu, risiko kredit korporasi melandai ditandai dengan terkendalinya NPL kredit korporasi menjadi 4,16%, lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tercatat 5,02%.

Grafik 2.15 Perkembangan Kredit Korporasi



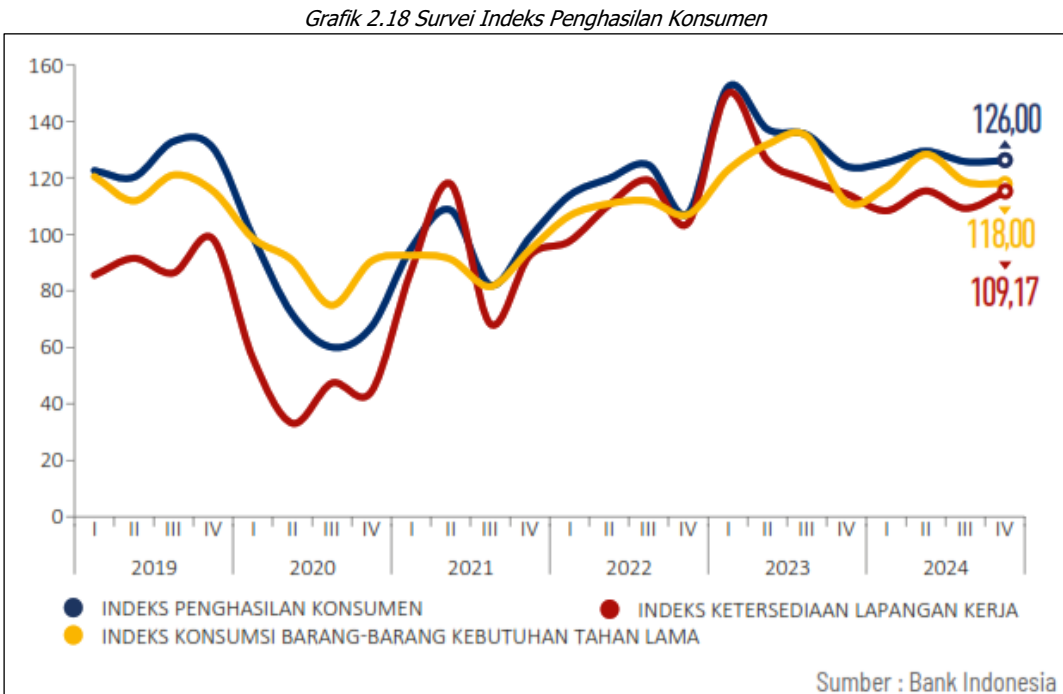
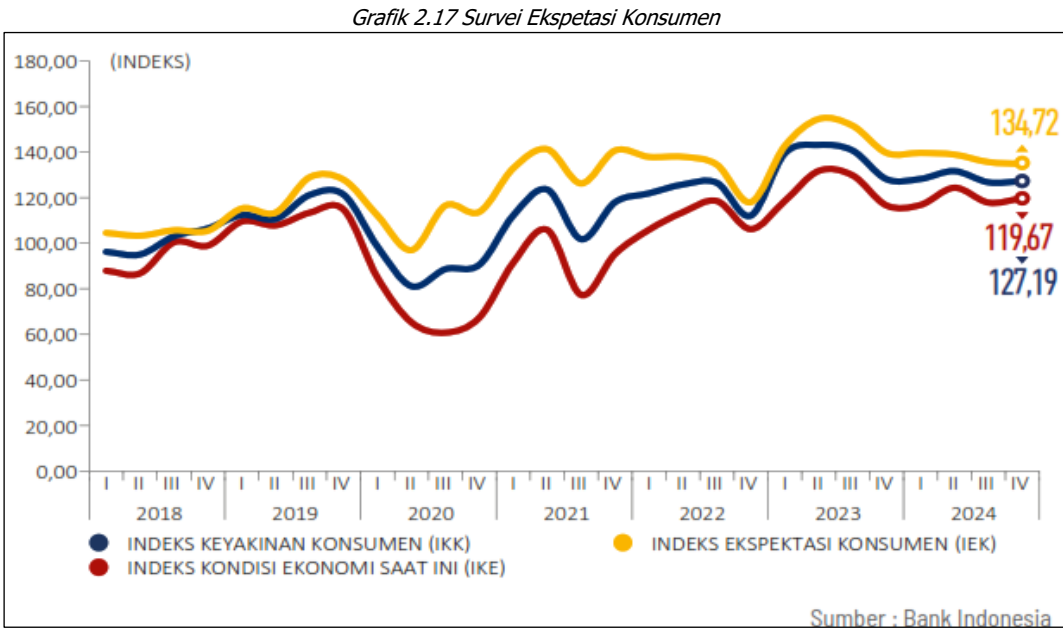
Grafik 2.16 Pangsa Kredit Korporasi (5 LU Terbesar)



Pangsa penyaluran kredit ke sektor korporasi didominasi oleh LU Industri Pengolahan dengan pangsa sebesar 16,56% dari total kredit. Pangsa penyaluran kredit selanjutnya diikuti oleh LU Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi (11,53%), LU Perdagangan Besar dan Eceran (10,22%), LU Listrik, Gas, dan Air (8,42%) serta LU *Real Estate*, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan (6,20%). Sementara, pangsa LU lainnya pada triwulan IV 2024 masih < 6%.

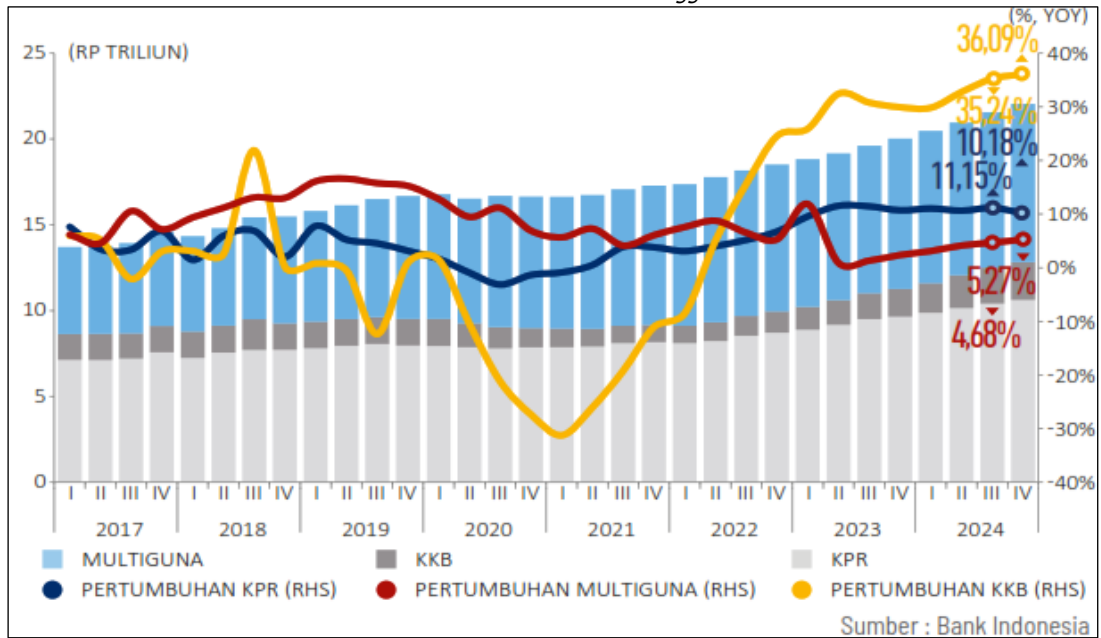
2.4.2.2. Ketahanan Sektor Rumah Tangga

Ketahanan sektor rumah tangga mengalami penurunan sejalan dengan termoderasinya penyaluran kredit rumah tangga dan tingkat konsumsi rumah tangga. Indeks Penghasilan Konsumen tercatat mengalami peningkatan pada triwulan IV 2024 menjadi sebesar 126,00 dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 125,67. Hal tersebut sejalan dengan hasil Survei Konsumen Bank Indonesia yang menunjukkan tingkat keyakinan yang masih terjaga optimis sebesar 127,19 (>100).

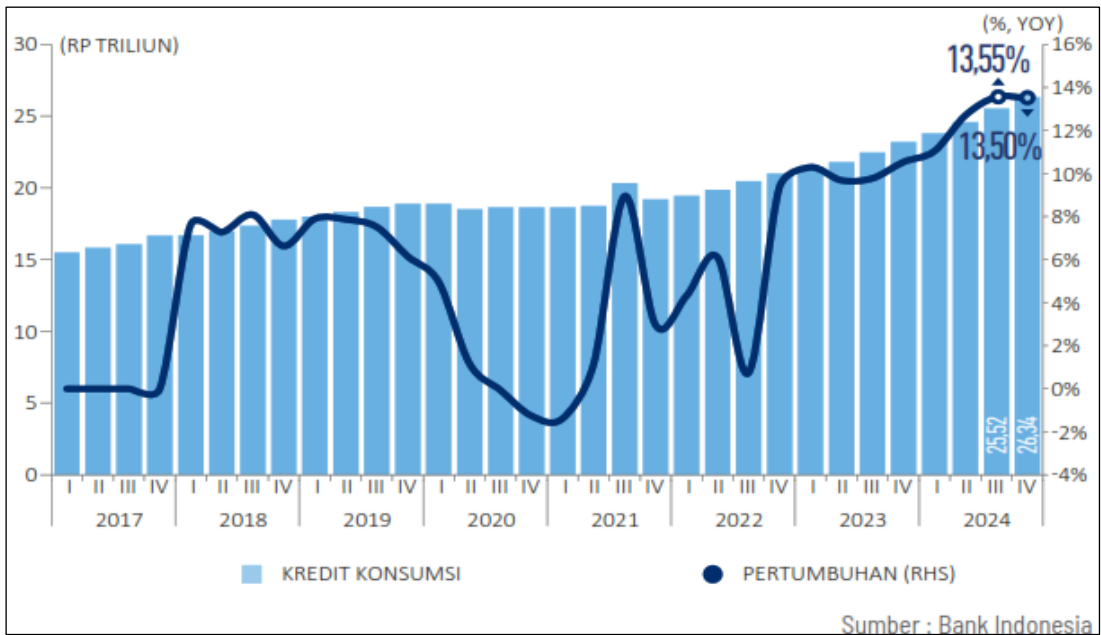


Di tengah tingkat keyakinan konsumen yang masih terjaga di level optimis, penyaluran kredit rumah tangga mengalami peningkatan. Kredit konsumsi tumbuh sebesar 13,50% (yoy), sedikit mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 13,55% (yoy). Penurunan didorong oleh Kredit Perumahan Rakyat (KPR), yang termoderasi dari yang sebelumnya tumbuh 11,15% (yoy) menjadi 10,18% (yoy). Di sisi lain, peningkatan pertumbuhan terjadi pada Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), dan kredit multiguna yang pada triwulan IV 2024 tumbuh masing-masing sebesar 36,09% (yoy) dan 5,27% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 35,24% (yoy) dan 4,68% (yoy).

Grafik 2.19 Kredit Rumah Tangga



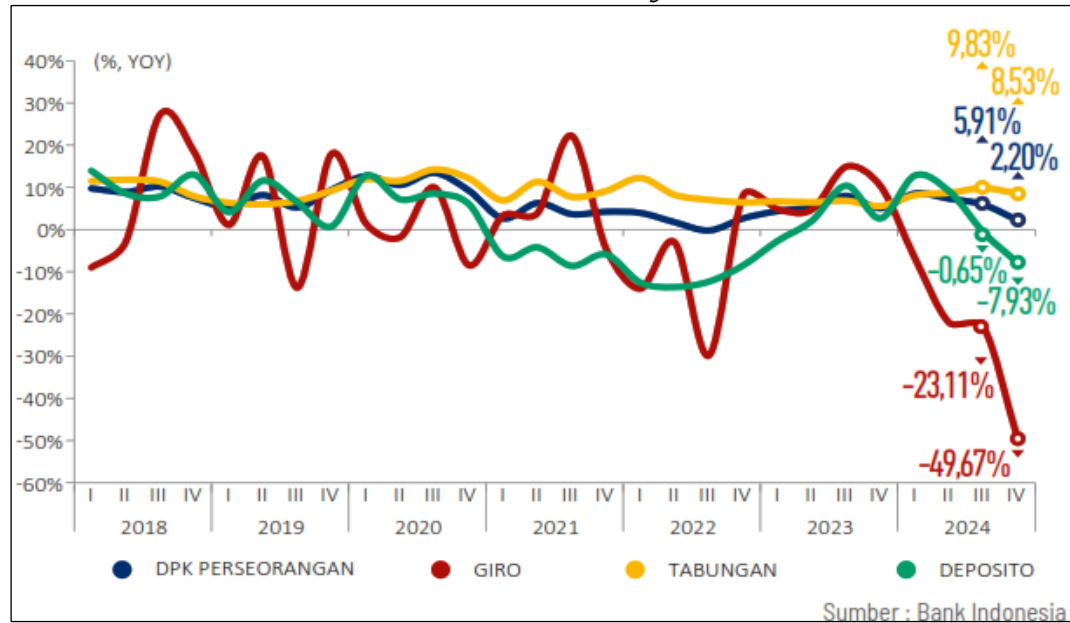
Grafik 2.20 Kredit Konsumsi



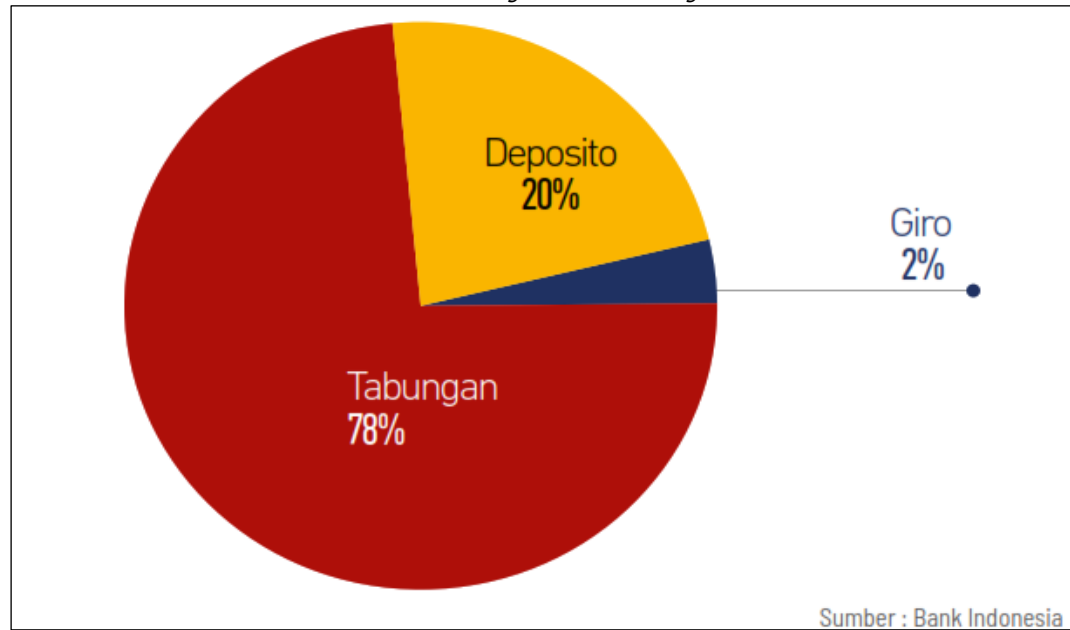
Jumlah DPK milik perseorangan pada triwulan IV 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 2,20% (yoy), melandai dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,91% (yoy). Deselerasi pertumbuhan DPK perseorangan terjadi terutama karena giro yang terkontraksi lebih dalam dari 23,11%(yoy) menjadi terkontraksi 49,67%(yoy) dan deposito yang juga terkontraksi tajam dari 0,65%(yoy) menjadi terkontraksi 7,93%(yoy) Di samping itu, tabungan juga termoderasi dengan tumbuh sebesar 8,53%(yoy), lebih rendah dibanding triwulan

sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,83%(yoy). Pertumbuhan DPK yang secara umum melandai mengindikasikan kebutuhan likuiditas yang meningkat pada triwulan IV dan upaya masyarakat untuk mempertahankan daya beli di tengah meningkatnya harga bahan pokok selaras dengan libur sekolah dan Nataru yang jatuh di triwulan IV 2024. Dengan perkembangan tersebut, struktur DPK perseorangan masih didominasi jenis tabungan dengan pangsa 77,57%, diikuti deposito 20,19% dan giro 2,24%. Tingginya pangsa tabungan terhadap total DPK perseorangan menunjukkan kecenderungan preferensi masyarakat untuk menyimpan dana pada instrumen yang lebih likuid.

Grafik 2.21 DPK Perseorangan



Grafik 2.22 Pangsa DPK Perseorangan



Dari sisi risiko kredit, NPL kredit rumah tangga pada triwulan IV 2024 tercatat meningkat namun masih berada dibawah *threshold* 5%. NPL kredit rumah tangga tersebut meningkat menjadi 1,67% dari sebelumnya sebesar 1,60% pada triwulan III. Peningkatan NPL terjadi pada seluruh kategori kredit rumah tangga, seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari 2,08% menjadi 2,11%, Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) dari 0,75% menjadi 0,89%, kredit Peralatan Rumah Tangga dari 1,34% menjadi 1,77%, dan Kredit Multiguna dari 1,37% menjadi 1,41%.

Tabel 2.15 Perkembangan NPL Kredit Rumah Tangga

Kategori	2022				2023				2024			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Kredit Rumah Tangga	2,10%	1,98%	1,87%	1,61%	1,78%	2,00%	1,95%	1,69%	1,78%	1,66%	1,60%	1,67%
Kredit Pemilikan Rumah	2,85%	2,83%	2,57%	2,28%	2,43%	2,71%	2,52%	2,32%	2,33%	2,11%	2,08%	2,11%
Kredit Kendaraan Bermotor	0,88%	0,61%	0,55%	0,45%	0,42%	0,48%	0,63%	0,51%	0,58%	0,63%	0,75%	0,89%
Kredit Peralatan Rumah Tangga	2,89%	1,93%	1,12%	0,79%	0,90%	0,80%	0,88%	1,13%	1,22%	1,15%	1,34%	1,77%
Kredit Multiguna	1,39%	1,40%	1,42%	1,26%	1,40%	1,66%	1,61%	1,39%	1,43%	1,42%	1,37%	1,41%
Bukan Lapangan Usaha Lainnya	3,39%	1,60%	1,67%	1,22%	1,73%	1,70%	2,69%	1,24%	1,72%	1,20%	1,28%	1,40%

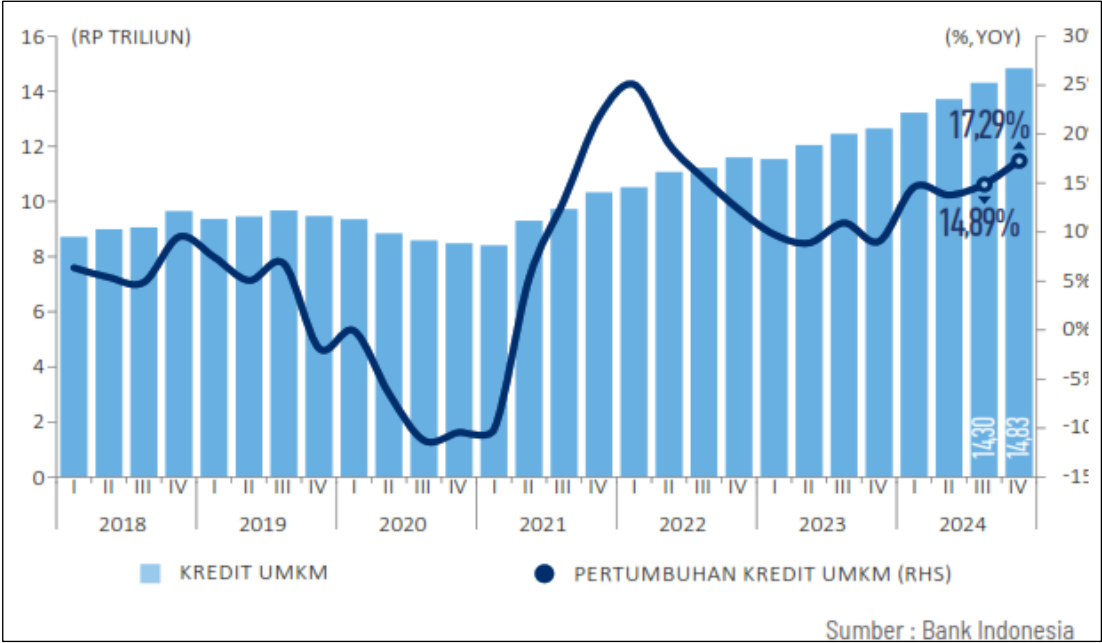
Sumber: Bank Indonesia
) berdasarkan lokasi proyek

2.4.2.3. Ketahanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Penyaluran kredit UMKM (lokasi proyek) pada triwulan IV 2024 tetap tumbuh positif dengan risiko kredit yang perlu diwaspadai. Penyaluran kredit UMKM pada triwulan IV 2024 tumbuh sebesar 17,29% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 14,89% (yoy). Di sisi lain, risiko kredit mengalami perbaikan, tecermin dari rasio NPL kredit UMKM yang semula tercatat sebesar 5,14% menjadi 4,90%.

Pangsa kredit UMKM terhadap total kredit tercatat sebesar 18,70%, turun dari triwulan sebelumnya sebesar 19,24%. Pangsa kredit UMKM terhadap total kredit di Provinsi Kepri tersebut dari waktu ke waktu semakin mendekati 20% sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Berdasarkan Lapangan Usaha, penyaluran kredit UMKM masih terkontraksi pada LU Pertambangan dan Penggalan yakni sebesar 23,97% (yoy) dan LU Konstruksi yang terkontraksi sebesar 8,26% (yoy).

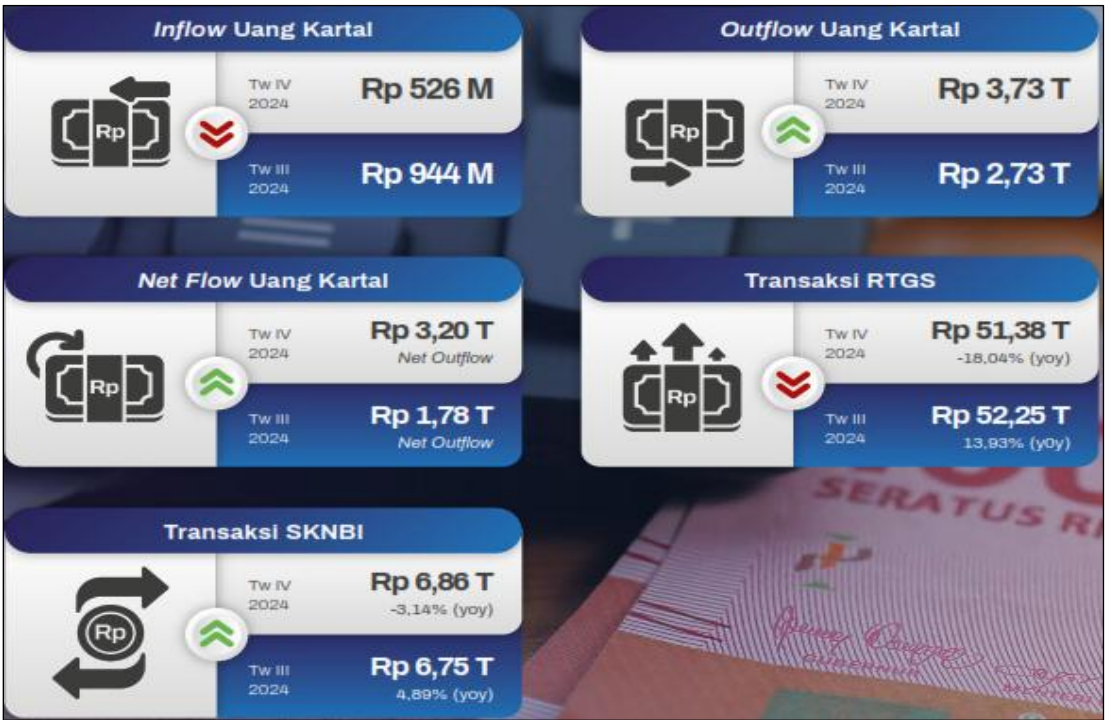
Grafik 2.23 Perkembangan Kredit UMKM



Peningkatan kredit UMKM pada triwulan IV 2024 didorong oleh LU Listrik, Gas dan Air yang meningkat sebesar 1.663% (yoy) didorong oleh *base effect* diakibatkan pertumbuhan yang tertahan di periode yang sama di tahun 2023 dan tumbuh dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 186,11% (yoy). LU Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi tercatat sebesar 80,15% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 59,68% (yoy).

Dalam rangka mendukung penguatan UMKM di Provinsi Kepri, Pemerintah berperan dalam penyaluran pembiayaan mikro dan ultra mikro oleh perbankan, melalui subsidi bunga pada program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Bank Indonesia turut berperan antara lain dengan mendorong pengembangan UMKM melalui kebijakan kewajiban bank untuk memenuhi secara bertahap Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM). Pembiayaan inklusif merupakan penyediaan dana yang diberikan bank untuk UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau Perorangan Berpenghasilan Rendah (PBR) dalam Rupiah dan valuta asing. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri juga terus mendorong UMKM agar dapat terus bertumbuh dan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi digital antara lain melalui dukungan dalam penyelenggaraan pameran, kurasi produk, pelatihan, dan *business matching* terhadap para pelaku usaha UMKM yang dilakukan secara berkelanjutan.

2.5. Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah



Sejalan dengan perbaikan kondisi perekonomian, aktivitas transaksi pembayaran tunai menggunakan Rupiah di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tetap tumbuh positif meskipun mengalami perlambatan pada triwulan IV 2024. Selain itu, transaksi pembayaran nontunai turut mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya akseptasi dan preferensi Masyarakat terhadap instrumen pembayaran digital khususnya *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS).

Aktivitas transaksi pembayaran tunai pada triwulan IV 2024 mencatatkan *net outflow* sebesar Rp3,20 triliun, tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2024 yang tercatat *net outflow* sebesar Rp1,78 triliun. Hal ini mengindikasikan aktivitas perekonomian yang tumbuh seiring dengan pertumbuhan positif pada sektor perdagangan yang sejalan dengan kinerja ekonomi Kepri yang tumbuh positif mencapai 5,14% (yoy) pada triwulan IV 2024. Lebih lanjut, transaksi QRIS dan Uang Elektronik (UE) juga mengalami peningkatan. Hal ini mencerminkan preferensi dan akseptasi masyarakat terhadap penggunaan transaksi nontunai mengalami peningkatan.

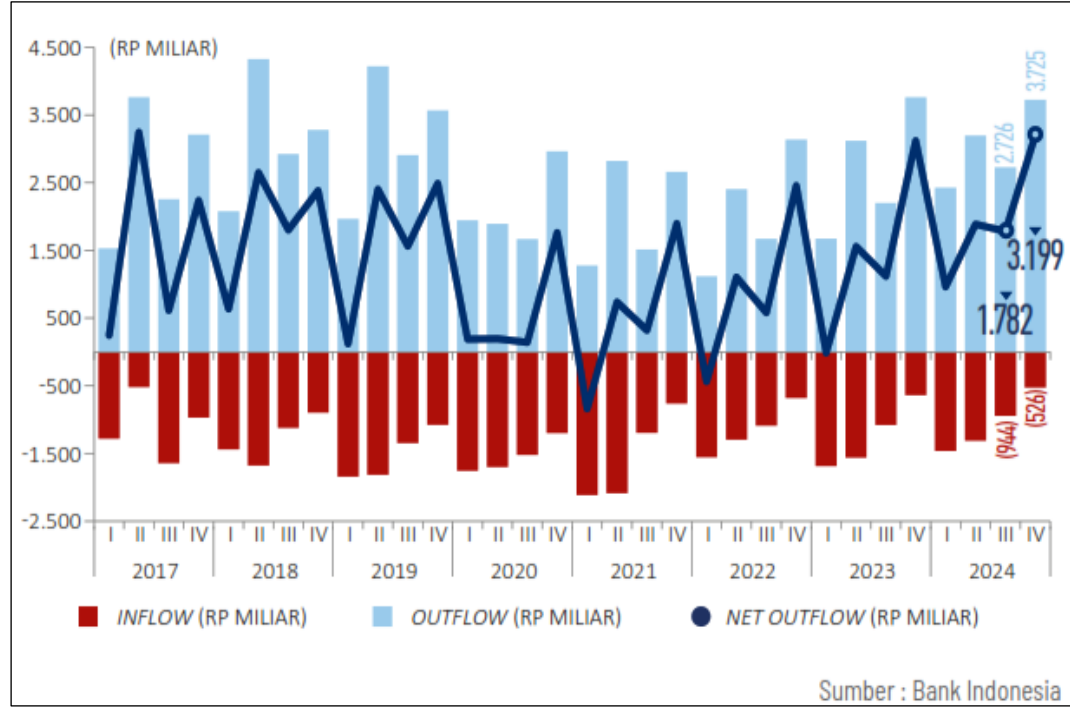
2.5.1. Transaksi Pembayaran Tunai

2.5.1.1. Aliran Uang Kartal Masuk/Keluar (*inflow*¹/*outflow*²)

Pada triwulan IV 2024, pergerakan aliran uang tunai tercatat mengalami *net outflow* sebesar Rp3,20 triliun. Jumlah tersebut menunjukkan jumlah uang yang beredar lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai *net outflow* sebesar Rp1,78 triliun. Sejalan dengan pertumbuhan aliran uang tunai tersebut, kinerja ekonomi Kepri tetap tumbuh positif mendukung pertumbuhan yang positif pada aktivitas perekonomian di Kepri.

Jumlah aliran uang kartal yang keluar (*outflow*) pada triwulan IV 2024 berjumlah Rp3,73 triliun, lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2024 sebesar Rp2,73 triliun. Pada saat yang sama, aliran uang kartal yang masuk (*inflow*) tercatat sebesar Rp526 miliar, lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya sebesar Rp944 miliar. Kondisi *net outflow* pada periode laporan mengindikasikan perekonomian yang semakin kuat. Hal ini sejalan dengan akselerasi pada sektor Lapangan Usaha (LU) Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, serta LU Transportasi dan Pergudangan yang mengindikasikan aktivitas perekonomian yang mengalami peningkatan di tengah momen liburan dan HBKN Nataru. Lebih lanjut, konsumsi rumah tangga masih berdaya tahan dan tumbuh positif meskipun melandai dari triwulan sebelumnya. Hal ini mengindikasikan meningkatnya kebutuhan uang tunai di Provinsi Kepri pada triwulan IV 2024.

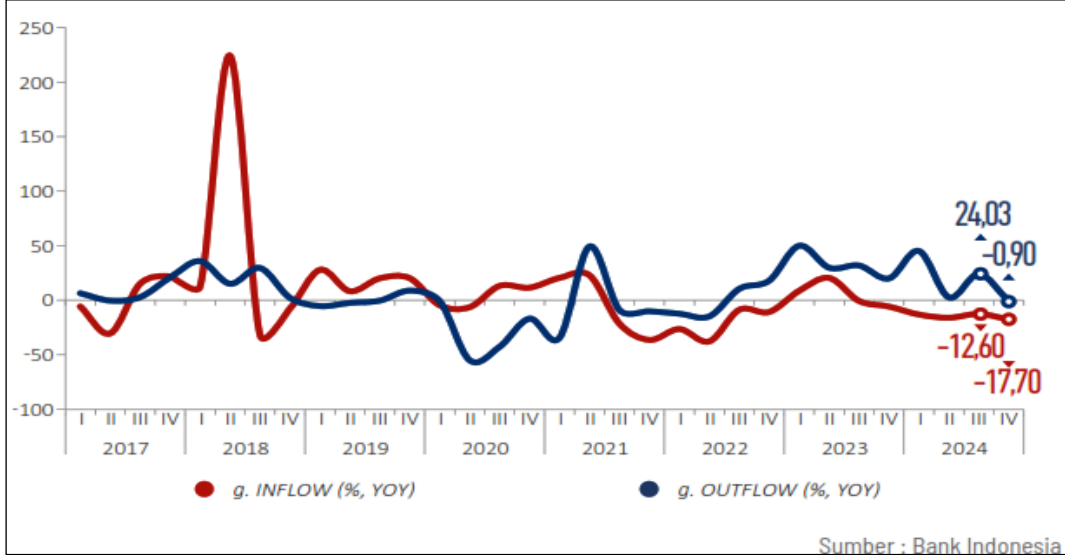
Grafik 2.24 Perkembangan Inflow dan Outflow Kepri



Untuk memastikan ketersediaan uang tunai di Provinsi Kepulauan Riau, Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat mengoperasikan kas titipan di tiga lokasi, yaitu Kota Tanjungpinang, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Karimun. Selain itu, kas keliling dilakukan di wilayah perkotaan dan daerah 3T (Terdepan, Terluar, Terpencil) untuk menjamin distribusi Rupiah yang layak edar. Pada 2024, Bank Indonesia juga mengadakan Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) ke beberapa pulau terpencil, termasuk Pulau Singkep, Pulau Tambelan, Pulau Subi Besar, Pulau Midai, dan Pulau Tarempa.

¹Inflow: aliran uang masuk ke Bank Indonesia melalui setoran Bank
²Outflow: aliran uang keluar dari Bank Indonesia melalui penarikan Bank

Grafik 2.25 Perkembangan Pertumbuhan Inflow dan Outflow

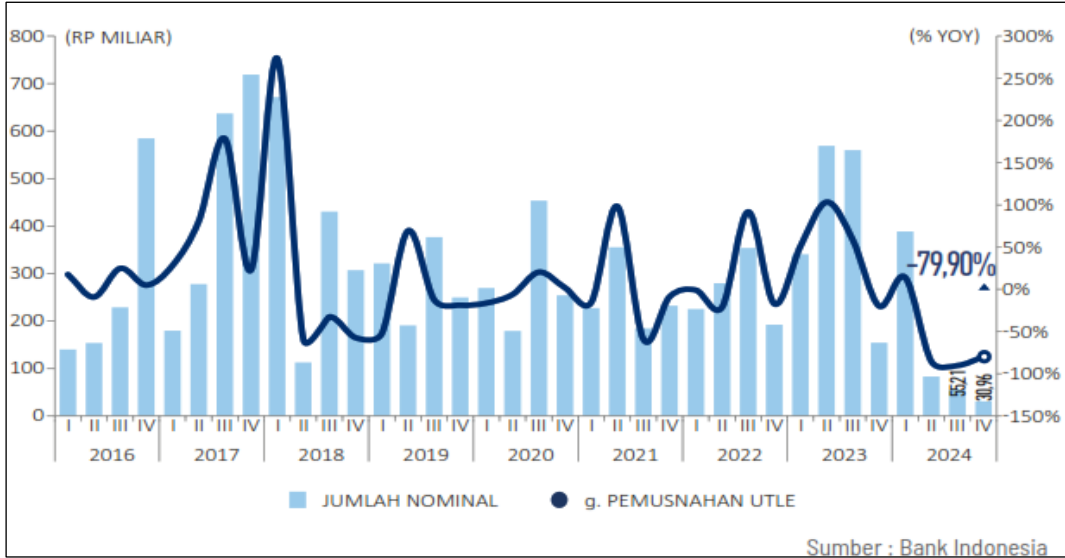


2.5.1.2. Penyediaan Uang Kartal Layak Edar

Bank Indonesia berperan menyediakan uang kartal layak edar dalam rangka menjaga kualitas uang yang diedarkan. Proses penyediaan uang kartal layak edar melibatkan beberapa aspek penting, mulai dari penerbitan uang yang berkualitas, pengaturan jumlah uang beredar, edukasi masyarakat melalui program Cinta Bangsa Paham (CBP) Rupiah, kas keliling, hingga pemeliharaan kualitas uang layak edar. Dalam rangka memelihara kualitas uang layak edar di masyarakat, Bank Indonesia menjalankan *Clean Money Policy* dengan melakukan pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (UTLE) yang berasal dari penukaran oleh masyarakat maupun setoran perbankan.

Jumlah uang kartal tidak layak edar yang dimusnahkan pada triwulan IV 2024 tercatat sebanyak Rp31 miliar, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang berjumlah Rp55 miliar. Penurunan jumlah pemusnahan UTLE tersebut sejalan dengan penurunan jumlah uang masuk (*inflow*) pada triwulan IV 2024. Hal ini tercermin dari berkurangnya jumlah pecahan uang besar yang dimusnahkan dibandingkan triwulan sebelumnya. Pemusnahan uang kartal yang sudah tidak layak edar mencakup uang yang rusak parah atau telah mencapai akhir masa edarnya. Penurunan pemusnahan nuang kartal ini didukung oleh peredaran uang yang lebih terjaga, seiring dengan kampanye nasional CBP Rupiah oleh Bank Indonesia yang masif guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam merawat uang Rupiah di Kepulauan Riau. Selain itu, edukasi tentang uang Rupiah kini telah dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah.

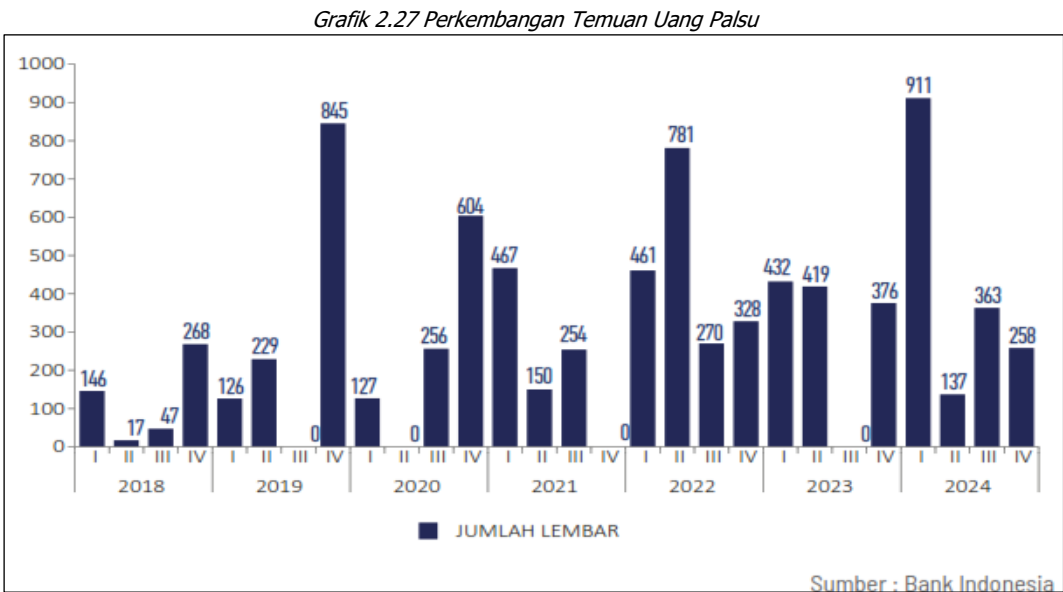
Grafik 2.26 Perkembangan Pemusnahan UTLE



2.5.1.3. Upaya Menekan Peredaran Uang Palsu (UPAL)

Dalam rangka meningkatkan kecintaan, pemahaman, dan kebanggaan terhadap Rupiah maka sejumlah kegiatan edukasi CBP Rupiah terus dilakukan ke masyarakat melalui berbagai kegiatan sosialisasi. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengenalkan ciri keaslian uang Rupiah, menumbuhkan kecintaan pada Rupiah dan membangkitkan kebanggaan menggunakan Rupiah sebagai salah satu simbol kedaulatan negara.

Melalui edukasi CBP Rupiah tersebut diharapkan pemahaman masyarakat dalam mengenali ciri keaslian uang Rupiah semakin meningkat dan dapat menekan peredaran uang palsu. Selama triwulan IV 2024 terdapat 258 lembar temuan uang palsu (UPAL) di wilayah Kepri, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebanyak 363 lembar uang palsu. Adanya temuan UPAL tersebut seiring dengan meningkatnya pelaporan temuan UPAL sejalan dengan konsistensi BI dalam melaksanakan edukasi CBP Rupiah atau diseminasi terkait ancaman hukuman bagi pelaku, atau upaya sejenis dari Bank Indonesia. Dalam hal masyarakat menemukan uang Rupiah yang diragukan keasliannya, masyarakat dapat meminta klarifikasi dari Bank Indonesia tentang Rupiah yang diragukan keasliannya dan dihibau untuk melaporkan temuan tersebut disertai fisik uang yang diragukan keasliannya kepada bank, kepolisian, atau meminta klarifikasi langsung ke kantor Bank Indonesia terdekat. Laporan masyarakat atas uang yang diragukan keasliannya kepada Bank Indonesia, baik yang disampaikan langsung atau melalui bank, akan diteliti lebih lanjut. Jika uang tersebut dinyatakan tidak asli oleh Bank Indonesia, maka masyarakat dapat melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

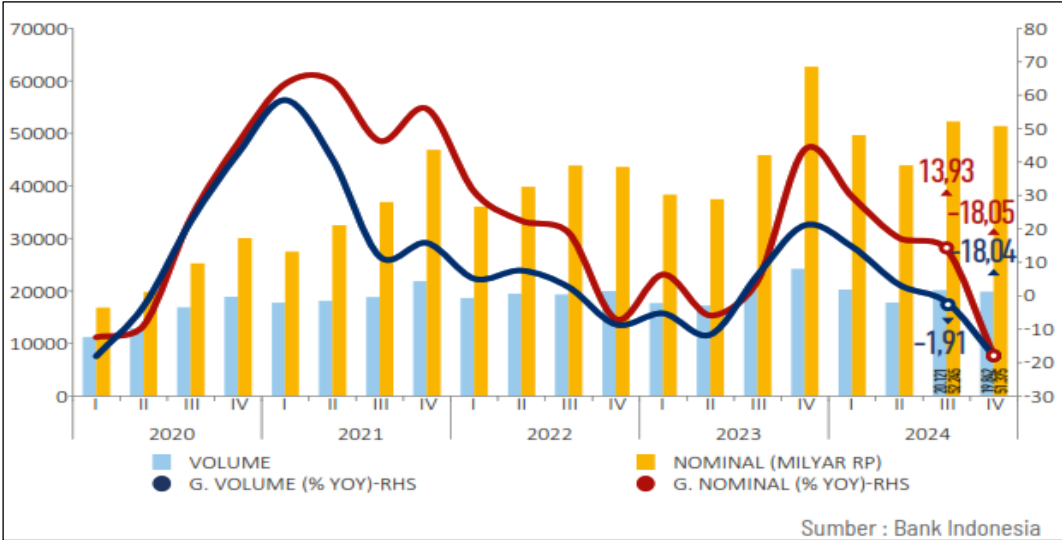


2.5.2. Transaksi Pembayaran Non Tunai

2.5.2.1. Transaksi Bank Indonesia – Real Time Gross Settlement (RTGS)

Nominal transaksi sistem *Real-Time Gross Settlement* (RTGS) triwulan IV 2024 tetap tumbuh meskipun mengalami perlambatan. Transaksi BI-RTGS di Provinsi Kepri pada triwulan IV 2024 tercatat mencapai Rp51,38 triliun, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh mencapai Rp52,25 triliun. Meskipun demikian, pertumbuhan secara tahunan tercatat mengalami deselerasi jika dibandingkan dengan triwulan III 2024 yakni dari tumbuh 13,93% (yoy) menjadi terkontraksi 18,04% (yoy) pada triwulan IV 2024. Di sisi lain, volume transaksi pada triwulan IV 2024 terkontraksi sebesar 18,04% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan III 2024 terkontraksi sebesar 1,91% (yoy). Tren penurunan transaksi RTGS mengindikasikan adanya perubahan preferensi layanan pembayaran ke alternatif pembayaran lainnya yang tercermin dari peningkatan jumlah volume dan nominal transaksi QRIS yang terakselerasi masing-masing sebesar 110,89% (yoy) dan 117,16% (yoy).

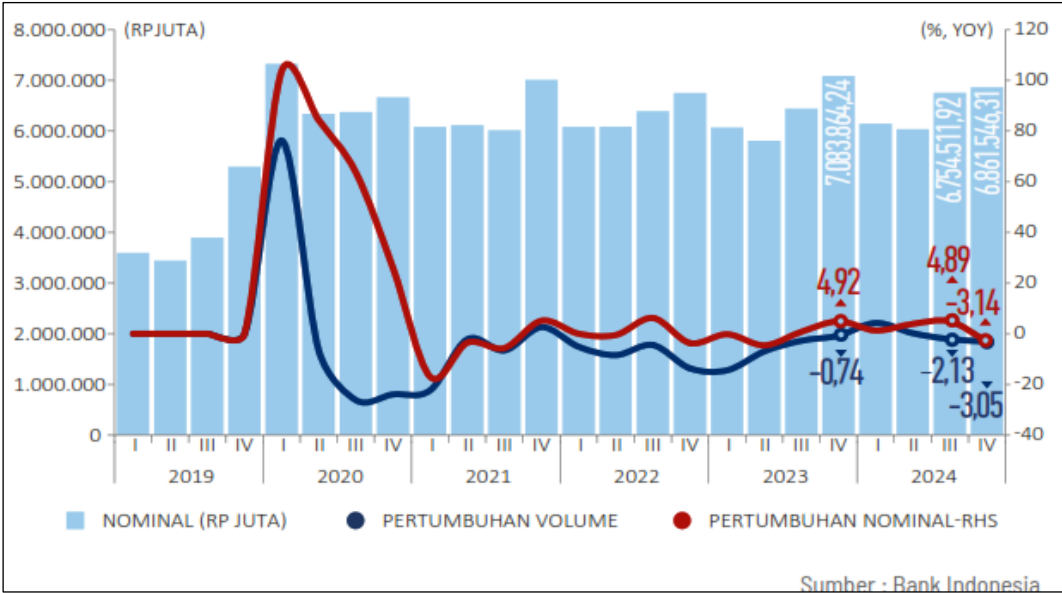
Grafik 2.28 Perkembangan RTGS di Provinsi Kepri



2.5.2.2. Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

Pada saat yang sama, pertumbuhan nominal transaksi kliring melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) selama triwulan IV 2024 mengalami peningkatan dari triwulan sebelumnya, yaitu tercatat sebesar Rp6,86 triliun. Meskipun demikian, pertumbuhan nominal transaksi kliring selama triwulan IV 2024 terkontraksi sebesar 3,14% (yoy), lebih rendah dibandingkan periode triwulan yang sama pada tahun 2023 yang tumbuh sebesar 4,92% (yoy) atau sebesar Rp6,86 triliun. Pertumbuhan volume transaksi terkontraksi 3,05% (yoy) pada triwulan IV 2024, lebih dalam dibandingkan triwulan III 2024 yang terkontraksi sebesar 2,13% (yoy) yang mengindikasikan bahwa preferensi masyarakat memilih menggunakan layanan SKNBI untuk transaksi dalam nominal yang besar cenderung menurun di Tengah semakin beragamnya layanan jasa transfer untuk bertransaksi. Saat ini, selain BI RTGS dan SKNBI, sudah ada BI FAST yang menyediakan layanan transfer 24/7.

Grafik 2.29 Perkembangan Transaksi Kliring di Provinsi Kepri

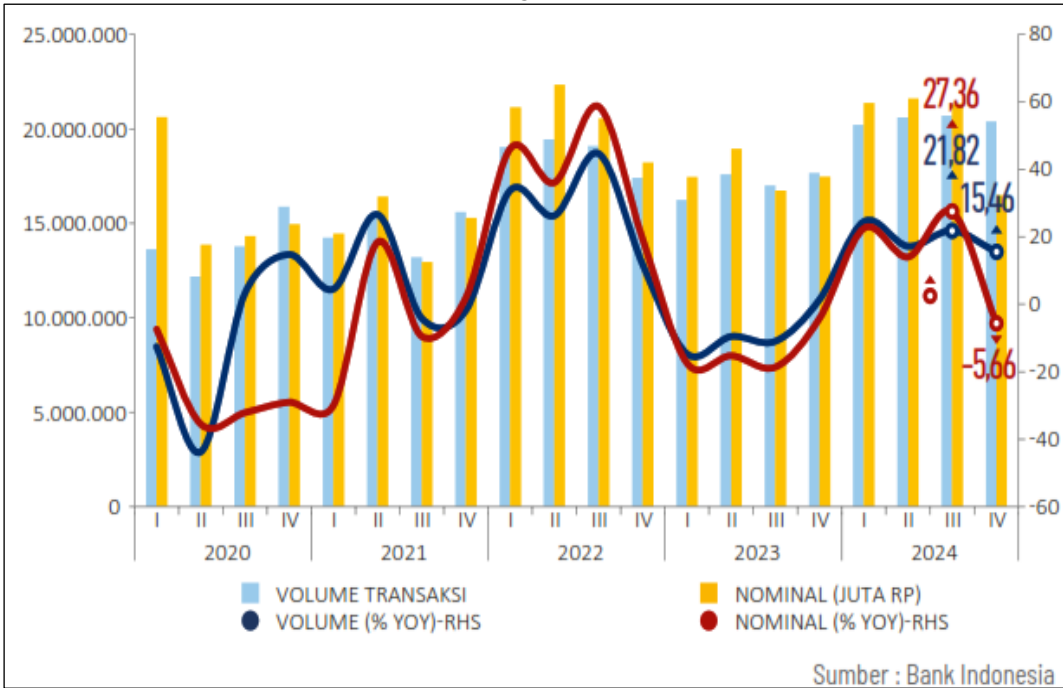


2.5.2.3. Alat Pembayaran menggunakan Kartu (APMK) dan Uang Elektronik (UE)

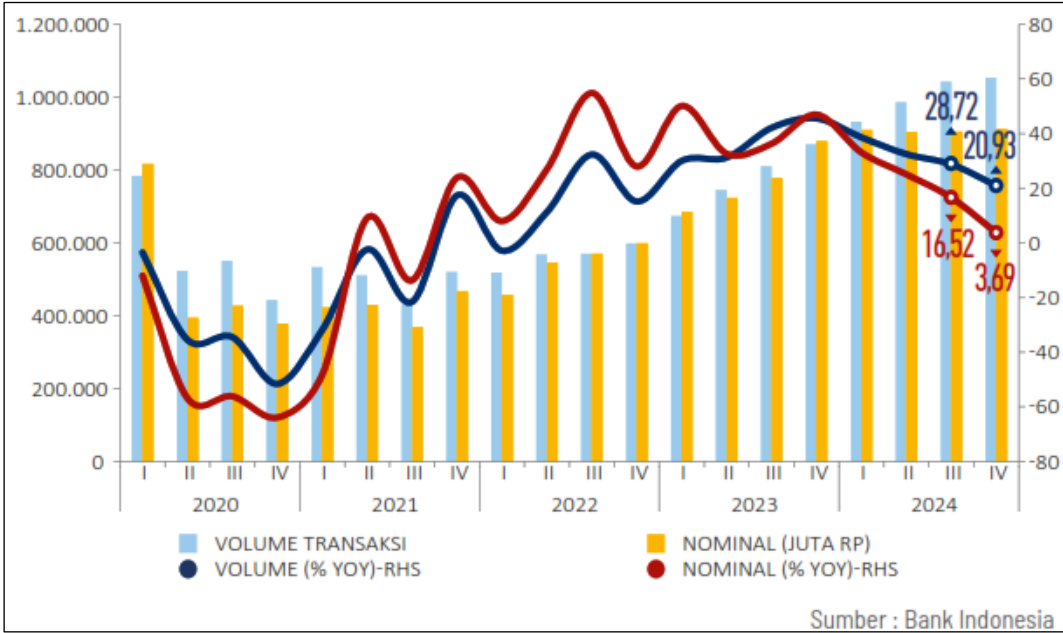
Transaksi menggunakan kartu debit pada triwulan IV 2024 mengalami penurunan dari sisi nilai transaksi maupun sisi volume transaksi. Nilai transaksi kartu debit terkontraksi sebesar 5,66% (yoy), menurun dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 27,36% (yoy). Sementara itu, volume transaksi tetap tumbuh positif meski melandai menjadi sebesar 15,46% (yoy), menurun dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 21,82% (yoy).

Di sisi lain, volume dan nominal transaksi menggunakan kartu kredit pada triwulan IV 2024 tetap kuat meski mengalami perlambatan. Volume transaksi tumbuh sebesar 20,93% (yoy), termoderasi dibandingkan triwulan III 2024 yang tumbuh sebesar 28,72% (yoy). Selain itu, nominal transaksi juga termoderasi dari 16,52% (yoy) menjadi 3,69% (yoy). Meskipun termoderasi, namun pertumbuhan penggunaan kartu kredit masih mengindikasikan bahwa konsumsi tetap tumbuh didukung oleh kredit/pembiayaan perbankan.

Grafik 2.30 Perkembangan Transaksi Kartu Debit

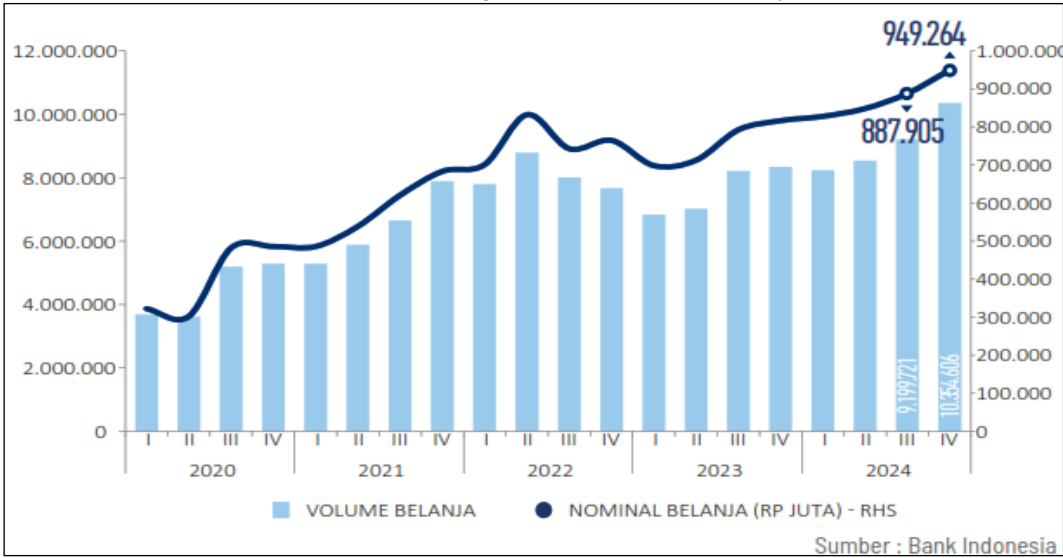


Grafik 2.31 Perkembangan Transaksi Kartu Kredit



Jumlah transaksi menggunakan UE di wilayah Kepri pada triwulan IV 2024 tercatat Rp949,26 miliar, lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2024 yang tercatat sebesar Rp887,91 miliar. Peningkatan tersebut terjadi seiring dengan kinerja perekonomian Kepri yang tumbuh positif. Sebagai Upaya untuk meningkatkan transaksi menggunakan UE, Bank Indonesia terus mendorong penggunaan transaksi nontunai khususnya QRIS.

Grafik 2.32 Perkembangan Transaksi UE di Provinsi Kepri

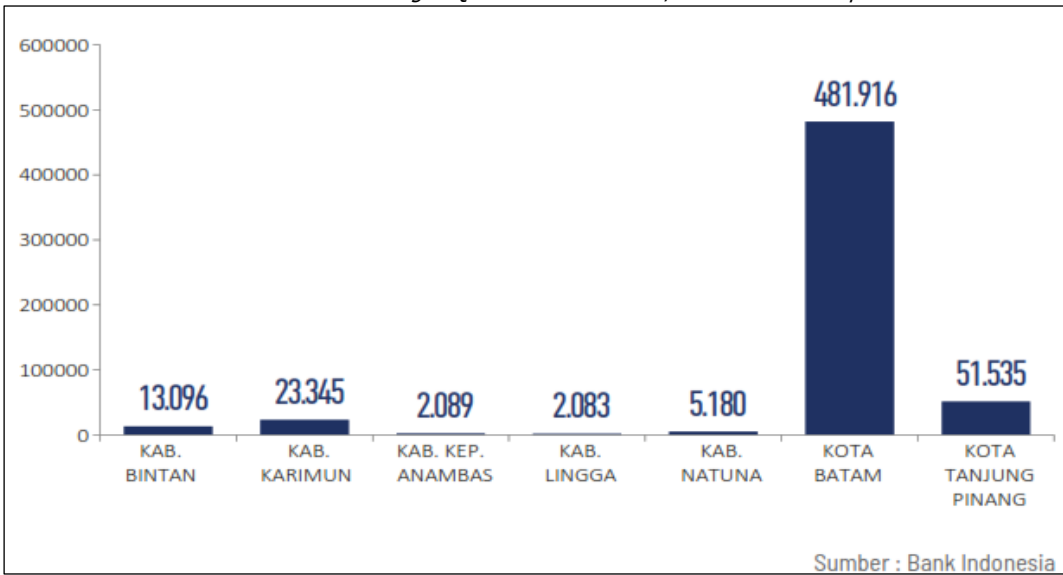


2.5.2.4. Perkembangan QRIS

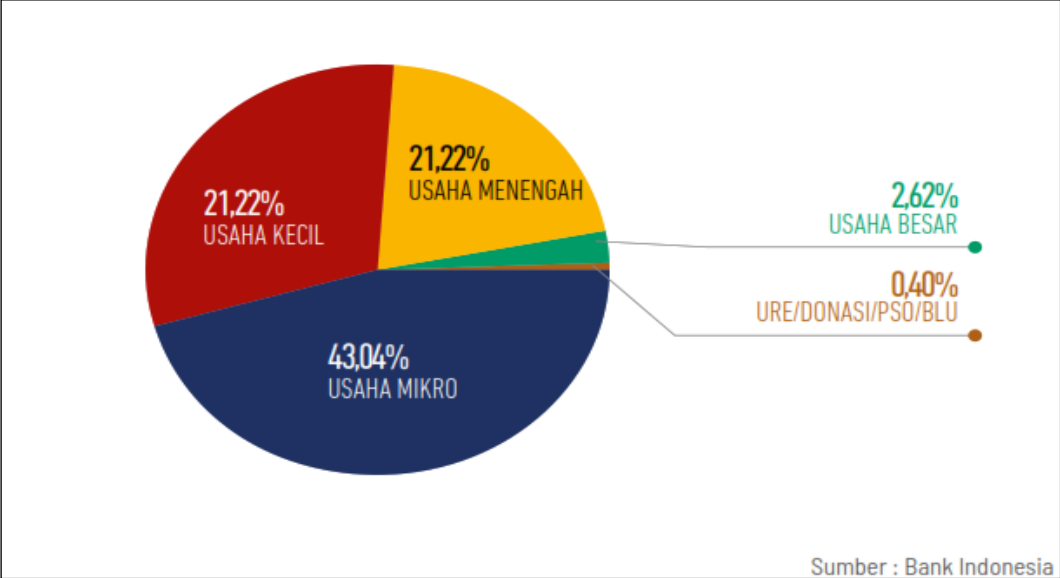
Implementasi QRIS di wilayah Kepri tumbuh secara signifikan dan diharapkan dapat mendukung SP yang aman, lancar dan handal serta turut mendorong inklusi keuangan khususnya pada UMKM. Dari sisi user/pengguna, pada triwulan IV 2024 tercatat penambahan sebanyak 25.302 pengguna baru atau tumbuh sebesar 5,01% (qtq) dibandingkan dengan triwulan III 2024, sehingga secara akumulasi total pengguna QRIS di Kepri telah mencapai 530.327 pengguna. Selain itu, dari sisi transaksi, sampai dengan triwulan IV 2024 tercatat total transaksi sebanyak 33.977.601 transaksi, tumbuh sebesar 22,32% (qtq), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 15,67% (qtq). Nominal total transaksi QRIS di Kepri hingga triwulan IV 2024 tercatat sebesar Rp1,61 triliun atau tumbuh sebesar 22,74% (qtq).

Hingga triwulan IV 2024, jumlah merchant QRIS tercatat sebesar 579.244 merchant, atau tumbuh 14,27% (yoy). Mayoritas merchant berlokasi di Kota Batam (83,51%), diikuti oleh Kota Tanjungpinang (8,78%) dan Kab. Karimun (3,91%). Merchant QRIS di wilayah Kepri didominasi oleh kategori Mikro dengan pangsa sebesar 43,72%, diikuti kategori Usaha Kecil (32,04%), dan Usaha Menengah (21,22%). Berdasarkan hal tersebut, terdapat lebih dari 97,02% transaksi QRIS yang dilakukan oleh UMKM.

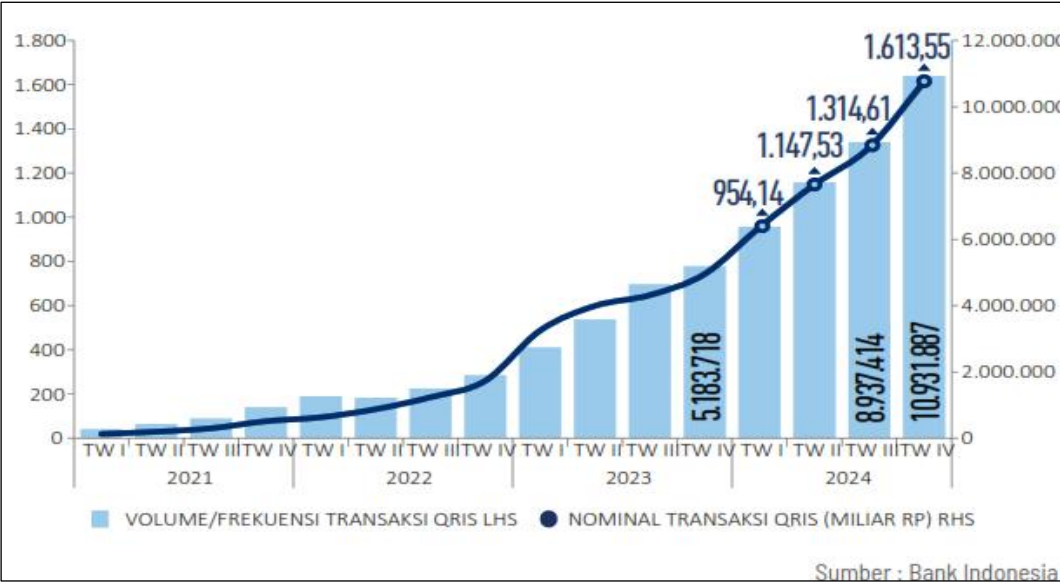
Grafik 2.33 Perkembangan QRIS berdasarkan Kab/Kota di Provinsi Kepri



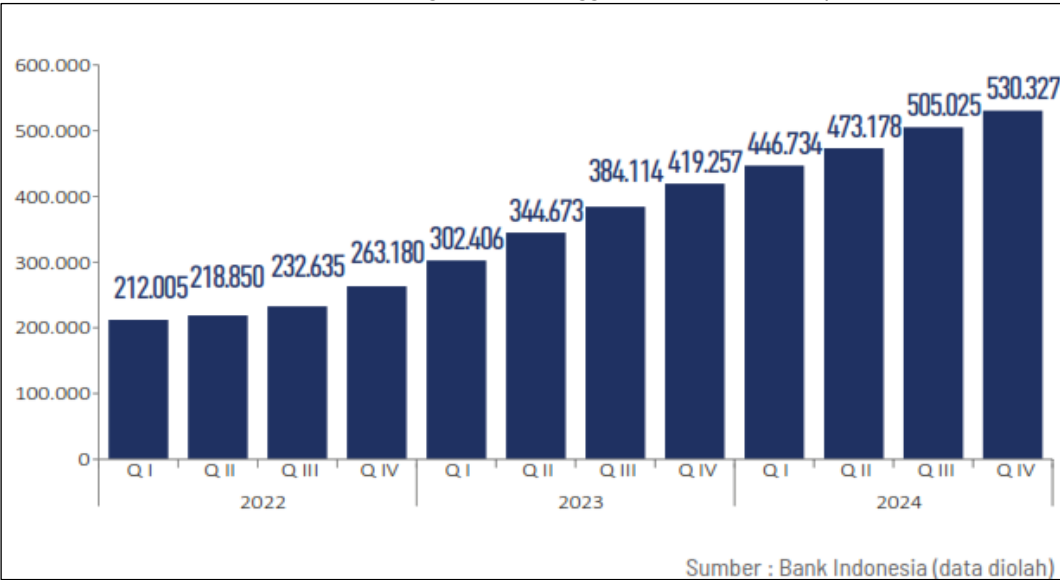
Grafik 2.34 Perkembangan Merchant QRIS berdasarkan Kelompok Usaha



Grafik 2.35 Perkembangan Volume Transaksi QRIS di Provinsi Kepri



Grafik 2.36 Perkembangan Jumlah Pengguna QRIS di Provinsi Kepri



2.5.2.5. Intensifikasi Sistem Pembayaran Nontunai

Upaya perluasan penggunaan transaksi digital (QRIS) terus dilakukan pada berbagai sektor dan segmen pengguna. Berdasarkan karakteristik Kepri yang menjadi tempat transit bagi wisatawan dan melting pot dari berbagai penduduk Indonesia serta tantangan yang dihadapi dalam upaya mendorong penggunaan QRIS, BI Kepri melakukan upaya strategi dalam peningkatan pengguna QRIS seperti sinergi dan kolaborasi, sosialisasi, *showcasing*, dan *onboarding* QRIS. Strategi perluasan implementasi QRIS yang dilaksanakan selama 2024 hingga triwulan IV antara lain:

- a. Sinergi dan kolaborasi Bersama Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP), Pemda, Komunitas, Asosiasi Media, Pelaku Usaha dan Instansi Terkait.
- b. Perluasan komunikasi QRIS *Cross Border* khususnya pada kawasan wisata.
- c. Perluasan QRIS pada sektor prioritas, seperti kawasan wisata, pasar, kuliner, pelabuhan, layanan Kesehatan, rumah ibadah dan pembayaran pajak/retribusi.
- d. *Reward* bagi *merchant* dan *user* bekerjasama dengan PJP dan instansi terkait lainnya.
- e. Edukasi/sosialisasi/*onboarding*/hiburan/perlombaan kerjasama dengan PJP dan instansi terkait lainnya;
 - 1) QRIS *Goes to School/Campus*;
 - 2) Kolaborasi pada kegiatan/*event* strategis di Kepri;
 - 3) Sinergi *event* strategis antar Unit/Fungsi Bank Indonesia
- f. Perluasan QRIS yang disinergikan dengan Program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) untuk pembayaran pajak dan retribusi, serta belanja melalui fitur QRIS - Kartu Kredit Indonesia (KKI).
- g. *On boarding* pada sektor pariwisata seperti hotel, *travel agent*, dan objek wisata.
- h. *Showcase* dan QRIS *Experience* dalam memperluas transaksi QRIS pada event strategis.

Bank Indonesia Kepri akan terus mendorong usaha pada sektor pariwisata serta sektor pendukung lainnya untuk dapat mengimplementasikan QRIS serta mengakselerasi ekosistem pembayaran digital khususnya di sektor pariwisata Kepri melalui intensifikasi sosialisasi QRIS. BI Kepri telah melakukan beberapa kegiatan dan sinergi event yaitu sosialisasi, FGD, dan rapat koordinasi bersama para *stakeholders* terkait untuk meningkatkan dukungan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak yang terlibat. Adapun salah satu kegiatan yang telah dilakukan antara lain Sosialisasi QRIS khususnya QRIS Antarnegara kepada penggiat wisata melalui asosiasi diantaranya Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), *Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies* (ASITA), dan Asosiasi Pariwisata Bahari Indonesia (ASPABRI). Selain itu, dalam rangka bulan Ramadhan, Bank Indonesia Kepri melaksanakan kegiatan sinergi berupa *On Boarding*, Sosialisasi, dan QRIS *Experience* pada berbagai Bazaar Ramadhan dan Operasi Pasar Murah.

Ke depan, Bank Indonesia Kepri akan terus mendorong usaha pada sektor pariwisata serta sektor pendukung lainnya untuk dapat mengimplementasikan QRIS serta mengakselerasi ekosistem pembayaran digital khususnya di sektor pariwisata Kepri melalui intensifikasi sosialisasi QRIS, khususnya QRIS *Cross-Border* mengingat letak geografis Kepri yang berbatasan langsung dengan Negara Singapura dan Malaysia serta sebagian besar kunjungan wisman didominasi oleh kedua negara tersebut. Ke depannya Bank Indonesia Kepri juga akan memperluas publikasi QRIS Antarnegara pada kawasan pelabuhan lainnya yang merupakan tempat keluar masuk turis mancanegara.

2.5.2.6. Pengembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)

ETPD terus dilakukan dalam rangka perluasan *cashless society* dan keuangan inklusif dengan menyediakan saluran pembiayaan nontunai dalam pelaksanaan transaksi keuangan Pemerintah. Untuk mendukung pencapaian tersebut, Bank Indonesia Kepri memiliki beberapa strategi serta upaya untuk mendorong baik dari aspek implementasi, realisasi,

maupun lingkungan strategis, antara lain perluasan kanal pembayaran digital dalam transaksi Pemerintah Daerah, peningkatan transaksi non-tunai melalui QRIS dan Teller untuk pembayaran pajak dan retribusi daerah, serta penguatan aspek lingkungan strategis, khususnya pelaksanaan sosialisasi oleh Pemerintah Daerah. Lebih lanjut, beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mendorong implementasi ETPD di Kepri sepanjang 2024 hingga triwulan IV:

- a. Rapat koordinasi & *capacity building* dengan Tim Teknis Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) untuk membahas evaluasi dan tindak lanjut peta jalan masing-masing daerah.
- b. Memfasilitasi antar bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) & Pemda untuk mendorong implementasi kanal digital & *Integrasi Cash Management System* (CMS).
- c. Berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Penerimaan untuk mendorong perluasan ekosistem nontunai.
- d. *Coaching clinic* dan pendampingan pengisian Indeks ETPD.
- e. Penyampaian *strategic advisory* kepada kepala daerah terkait kondisi, tantangan/isu & strategi TP2DD.
- f. *High Level Meeting* (HLM) TP2DD untuk eskalasi isu strategis & mendorong *political will* kepala Daerah.
- g. *Benchmarking* dengan daerah lain melalui kegiatan studi banding dan kunjungan kerja.

2.5.2.7. Bantuan Sosial Non Tunai

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi Kepri mendukung akselerasi elektronifikasi transaksi pemerintah melalui program penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) nontunai. Program Bansos yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) antara lain adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako dan Program Kartu Pra Kerja. Program Sembako dan PKH disalurkan melalui dua mekanisme yakni secara nontunai melalui Himbara dan tunai melalui PT Pos.

Realisasi penyaluran program PKH tahap keempat 2024 secara nominal sebesar Rp24,68 miliar, sedangkan penyaluran kepada KPM sebesar 34.909 KPM. Penyaluran program sembako berdasarkan jumlah KPM pada Desember 2024 adalah sebesar 158.686 penerima dengan persentase penyerapan terhadap penyaluran sebesar 100%. Pembayaran digital menggunakan QRIS pada bansos, moda transportasi umum dan ETPD selalu ditingkatkan sebagai metode pembayaran yang paling mudah dilakukan.

Tabel 2.16 Penyaluran PKH Tahap 4 tahun 2024 di Wilayah Provinsi Kepri

PROVINSI	KAB/KOTA	SP2D (Jml KPM)	SP2D (Nominal)	Penyaluran (Jml KPM)	Penyaluran (Nominal)	% Penyaluran (Jml KPM)	% Penyaluran (Nominal)	Penyerapan (Jml KPM)	% Penyerapan (Jml KPM)	Mekanisme
KEPULAUAN RIAU	BINTAN	2.985	Rp2.165.957.887	2.985	Rp2.165.957.887	100,00%	100,00%	2.978	99,77%	NON TUNAI
KEPULAUAN RIAU	BINTAN	80	Rp48.925.000	68	Rp41.150.000	85,00%	84,11%	68	100,00%	TUNAI
KEPULAUAN RIAU	KARIMUN	5.412	Rp4.035.241.048	5.412	Rp4.035.241.048	100,00%	100,00%	5.381	99,43%	NON TUNAI
KEPULAUAN RIAU	KARIMUN	11	Rp5.900.000	11	Rp5.900.000	100,00%	100,00%	11	100,00%	TUNAI
KEPULAUAN RIAU	KEPULAUAN ANAMBAS	813	Rp583.199.898	813	Rp583.199.898	100,00%	100,00%	715	87,95%	NON TUNAI
KEPULAUAN RIAU	KEPULAUAN ANAMBAS	5	Rp2.475.000	4	Rp1.875.000	80,00%	75,76%	4	100,00%	TUNAI
KEPULAUAN RIAU	KOTA BATAM	18.807	Rp13.168.696.377	18.805	Rp13.167.496.377	99,99%	99,99%	16.597	88,26%	NON TUNAI
KEPULAUAN RIAU	KOTA BATAM	313	Rp178.200.000	216	Rp119.700.000	69,01%	67,17%	216	100,00%	TUNAI
KEPULAUAN RIAU	KOTA TANJUNG PINANG	4.172	Rp2.928.824.315	4.172	Rp2.928.824.315	100,00%	100,00%	3.946	94,58%	NON TUNAI
KEPULAUAN RIAU	KOTA TANJUNG PINANG	167	Rp110.375.000	149	Rp97.150.000	89,22%	88,02%	149	100,00%	TUNAI
KEPULAUAN RIAU	LINGGA	3.551	Rp2.442.766.302	3.551	Rp2.442.766.302	100,00%	100,00%	3.534	99,52%	NON TUNAI
KEPULAUAN RIAU	LINGGA	13	Rp6.900.000	12	Rp6.525.000	92,31%	94,57%	12	100,00%	TUNAI
KEPULAUAN RIAU	NATUNA	1.659	Rp1.138.175.000	1.659	Rp1.138.175.000	100,00%	100,00%	1.416	85,35%	NON TUNAI
KEPULAUAN RIAU	NATUNA	43	Rp27.400.000	37	Rp23.550.000	86,05%	85,95%	37	100,00%	TUNAI
TOTAL		35.046	24.677.077.939	34.909	24.591.552.939	99,61%	99,65%	32.086	91,91%	

Sumber: Bank Indonesia, diolah (data per Januari 2025)

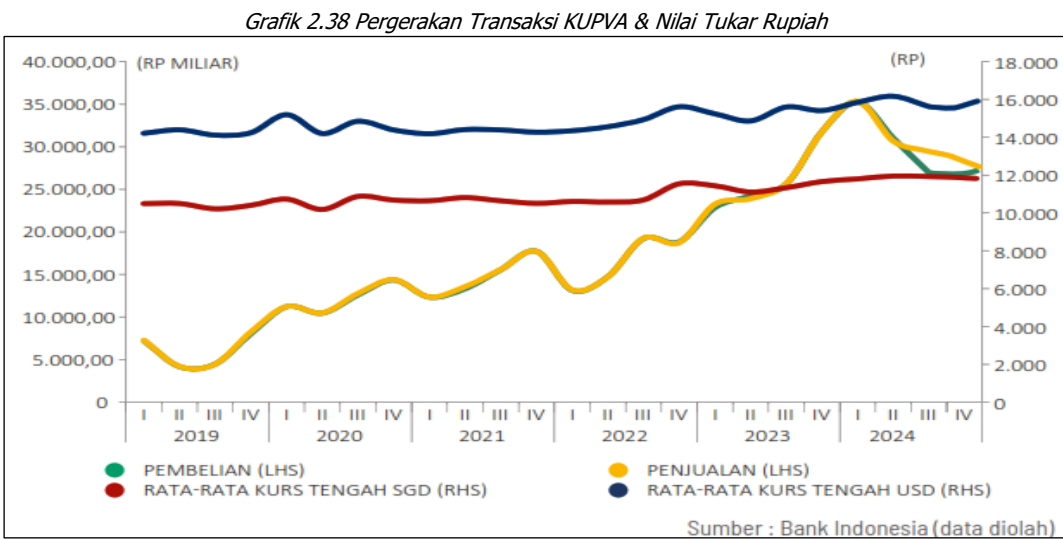
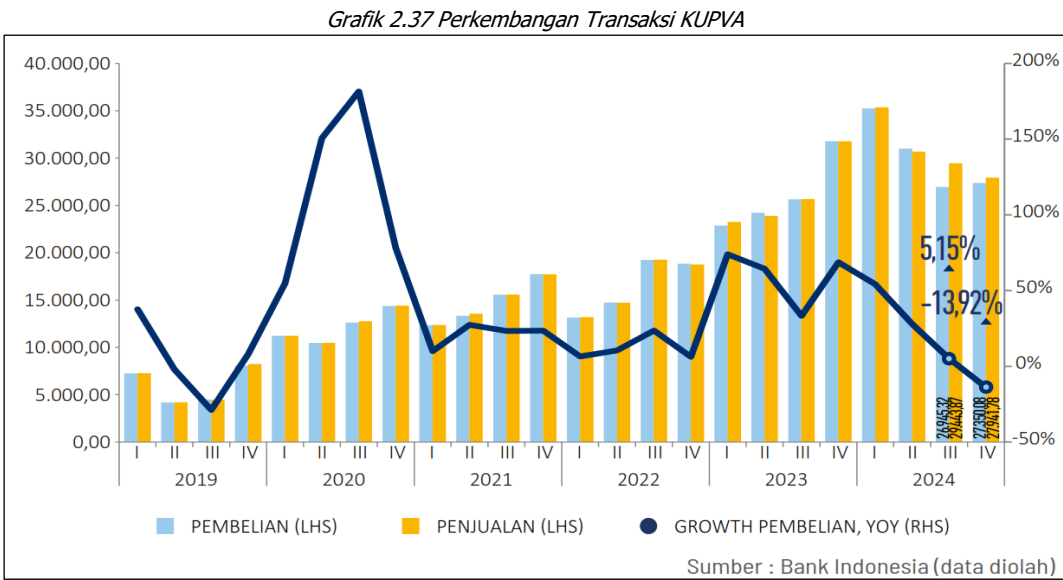
2.5.3. Transaksi KUPVA BB dan PJP LR

Dalam rangka menjaga kelancaran transaksi Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) dan Penyedia Jasa Pembayaran Layanan Remitansi (PJP LR) di Provinsi Kepri, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri terus melakukan monitoring perizinan dan pengawasan terhadap operasional 120 KUPVA BB dan 65 PJP LR yang berada di Provinsi Kepri hingga triwulan III 2024.

2.5.3.1. Perkembangan Transaksi KUPVA Bukan Bank (KUPVA BB)

Perkembangan KUPVA BB di Provinsi Kepri pada Triwulan IV 2024 relatif stabil dan tidak ada perubahan jumlah Kantor Pusat (KP) dan Kantor Cabang (KC) jika dibandingkan dengan triwulan III 2024. Jumlah KP dan KC KUPVA BB yakni masing-masing 120 kantor dan 68 kantor, masih sama dengan jumlah pada Triwulan III 2024.

Pada triwulan IV 2024, transaksi Uang Kertas Asing (UKA) didominasi oleh Dolar Singapura (SGD) sebesar 67,43% atau sejumlah Rp36,68 triliun, diikuti oleh Dolar Amerika Serikat (USD) sebesar 19,95% atau sejumlah Rp10,85 triliun, Renminbi Tiongkok (CNY) sebesar 6,83% atau sejumlah Rp3,72 triliun, Ringgit Malaysia (MYR) sebesar 4,67% atau sejumlah Rp2,54 triliun dan mata uang lainnya sebesar 1,12% atau sejumlah Rp611,27 miliar. Secara umum, total transaksi UKA pada Triwulan IV 2024 setara dengan Rp54,40 triliun, terkontraksi sebesar 3,52% (qtq) atau menurun setara dengan Rp1,99 triliun dibandingkan triwulan III 2024.

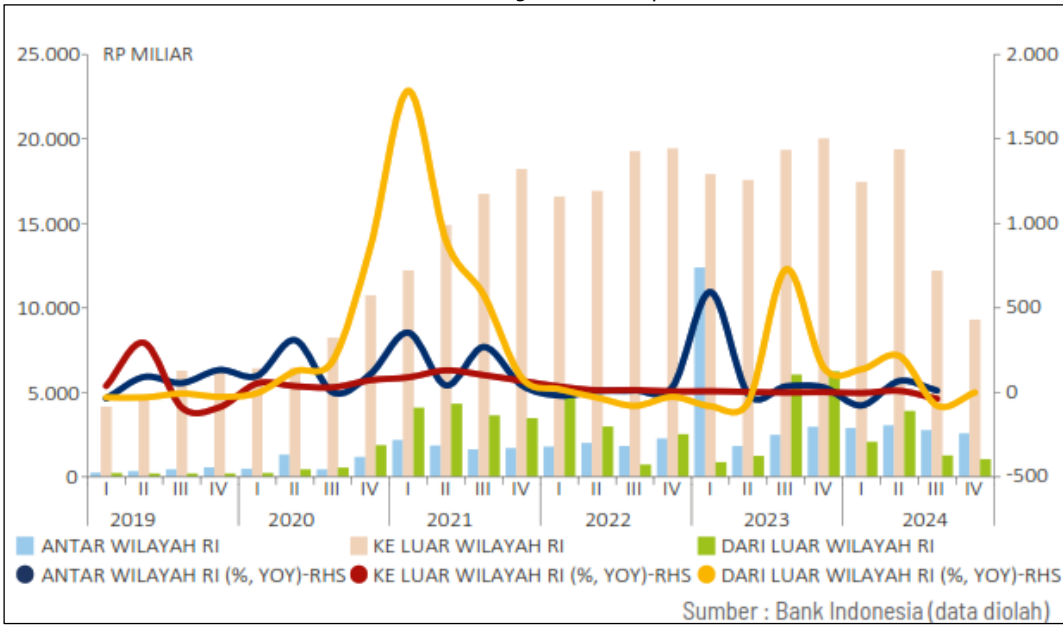


2.5.3.2. Perkembangan Transaksi Penyedia Jasa Pembayaran Layanan Remitansi (PJP LR)

Berdasarkan jenis transaksinya, komposisi transaksi pada PJP LR di Kepri masih didominasi oleh jenis transaksi ke luar wilayah Indonesia dengan pangsa sebesar 71,96%, diikuti transaksi antar wilayah di Republik Indonesia sebesar 19,91%, dan transaksi masuk dari luar wilayah Indonesia sebesar 8,13%. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa PJP LR di Provinsi Kepri lebih banyak digunakan untuk memfasilitasi pengiriman dana ke luar wilayah Indonesia antara lain untuk keperluan pembayaran transaksi pembelian barang impor maupun transaksi lainnya. Sejalan dengan transaksi pada PJP LR yang meningkat, terdapat 16 (enam belas) izin pembukaan kantor pusat KUPVA BB dan PJP Layanan Remitansi yang telah diberikan dan terdapat 7 (tujuh) proses perizinan KUPVA BB dan Layanan Remitansi sedang berjalan. Hal ini mengindikasikan bahwa industri KUPVA BB dan PJP Layanan Remitansi masih memiliki ruang untuk pertumbuhan di Provinsi Kepulauan Riau.

Jumlah Penyelenggara Jasa Pembayaran Layanan Remitansi (PJP LR) di Provinsi Kepri pada triwulan IV 2024 tidak mengalami peningkatan, masih sejumlah 65 Penyelenggara sama dengan triwulan III 2024. Dari frekuensi dan volume nominal transaksi, baik transaksi *outgoing*, *incoming* dan domestik mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya. Transaksi *outgoing* mengalami terkontraksi 53,52% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan III 2024 yang terkontraksi 37,03% (yoy). Transaksi *incoming* mengalami terkontraksi 83,14% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan III 2024 yang terkontraksi 79,04%. Transaksi domestik juga mengalami penurunan, terkontraksi 12,69% (yoy), lebih rendah dari triwulan III 2024 yang tumbuh 11,49% (yoy). Secara umum, pada triwulan IV 2024 total pengiriman dana oleh PJP LR di Provinsi Kepri tercatat menurun, terkontraksi sebesar 55,72% (yoy) menjadi sebesar Rp12,93 triliun dari sebesar Rp16,22 triliun pada triwulan III 2024.

Grafik 2.39 Perkembangan Transaksi pada PJP LR



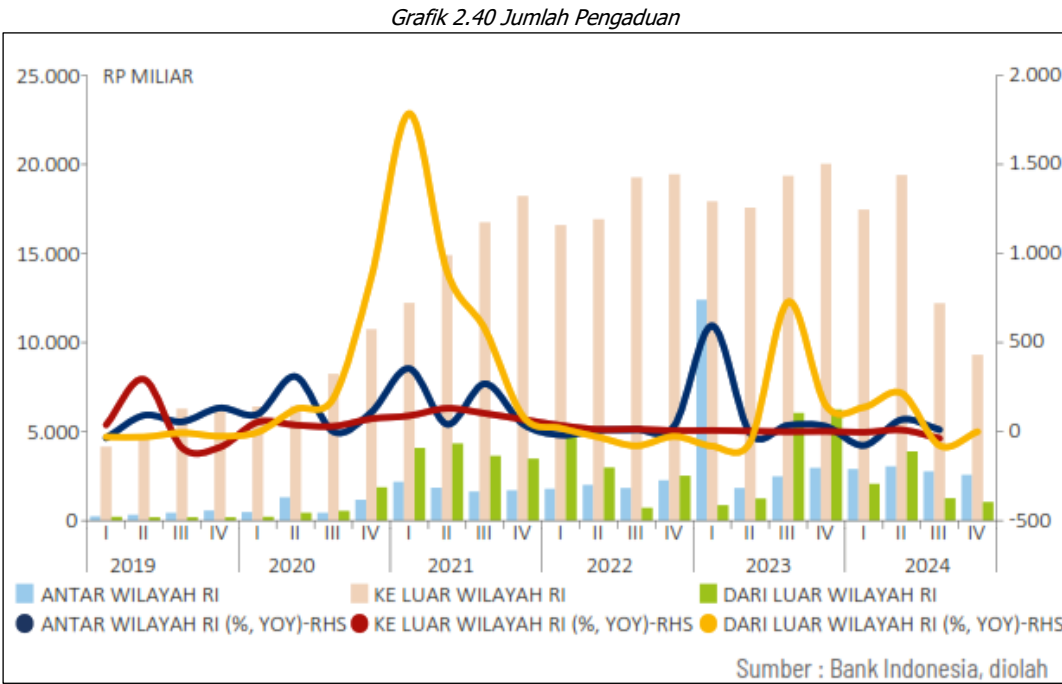
2.5.3.3. Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran di Provinsi Kepulauan Riau

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri (KPw BI Provinsi Kepri) secara aktif melakukan fungsi edukasi Pelindungan Konsumen melalui sosialisasi daring dan luring serta pembuatan konten infografis dan video di media sosial. Sampai dengan triwulan IV tahun 2024 telah dilakukan edukasi pelindungan konsumen yang bertujuan untuk meningkatkan literasi digital dan kesadaran masyarakat terhadap risiko penipuan di dunia digital sebanyak 101 kali kegiatan. Edukasi pelindungan konsumen ini melibatkan 30.017 peserta dari berbagai lapisan masyarakat. Kegiatan ini meliputi seminar, sosialisasi, dan kuis-kuis yang terfokus pada edukasi tentang hak dan kewajiban konsumen seperti pelindungan data pribadi, tips &

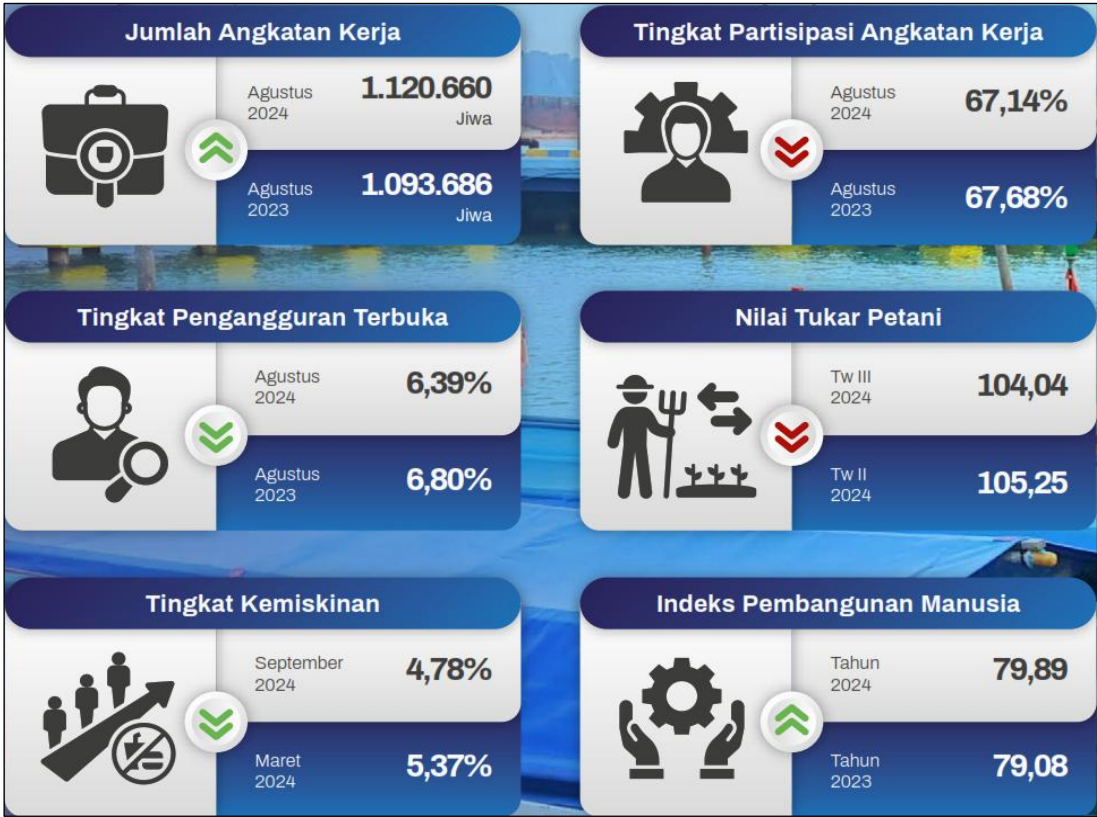
trik aman bertransaksi, dan langkah-langkah untuk menghindari modus penipuan digital. Selain itu, dilakukan pemanfaatan media sosial secara efektif untuk mensosialisasikan informasi penting terkait perlindungan konsumen, mencatat 48.397 keterlibatan melalui kanal Instagram dan 2.468 di kanal Tiktok KPw BI Provinsi Kepri. Kegiatan ini mencakup edukasi 20.000 mengenai perlindungan data pribadi, serta cara-cara menghindari berbagai modus penipuan digital seperti *phishing*, *skimming*, dan *social fraud engineering*.

KPw BI Provinsi Kepri memberikan edukasi untuk meningkatkan literasi ekonomi keuangan inklusif dan perlindungan konsumen kepada sebanyak 225 peserta. Dalam rangka memperluas jangkauan dan dampak dari inisiatif perlindungan konsumen, KPw BI Provinsi Kepri melakukan kolaborasi yang erat dengan berbagai pihak seperti Pemerintah Daerah (Provinsi & Kota) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperluas cakupan dan efektivitas program edukasi. Berdasarkan Indeks Keberdayaan Konsumen – Sistem Pembayaran (IKK-SP), IKK-SP Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebesar 66,62% menjelaskan bahwa konsumen telah mampu dan berani menyampaikan pendapat/masalah ketika ada hak-haknya yang tidak dipenuhi atau adanya beban berlebihan atas kewajibannya, serta mampu mengenali risiko dan menghindarinya.

Sepanjang tahun 2024, KPw BI Provinsi Kepri telah menerima 13 (tiga belas) surat pengaduan terkait berbagai isu konsumen, khususnya yang berkaitan dengan transaksi digital dan telah berhasil ditindaklanjuti dengan baik. Penanganan yang dilakukan juga meliputi koordinasi dengan perbankan dan OJK serta memberikan edukasi perlindungan data diri kepada konsumen.



2.6. Kesejahteraan Masyarakat dan Ketenagakerjaan



Tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menunjukkan perbaikan tercermin dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) seiring dengan tren pemulihan ekonomi yang terus berlanjut. Selain itu, kesejahteraan petani mengalami peningkatan sebagaimana tergambar dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang mengalami kenaikan seiring terjadinya kenaikan indeks yang diterima petani.

2.6.1. Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan Provinsi Kepri terus melanjutkan perbaikan tercermin dari indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)³ yang menurun. TPT pada Agustus 2024 berada pada level 6,39%, menurun dibandingkan Agustus 2023 yang tercatat 6,80%. Perbaikan kondisi tersebut utamanya terjadi di pedesaan yang mengalami penurunan TPT dari 7,00% pada Agustus 2023 menjadi 2,50% pada Agustus 2024. Perbaikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tersebut didorong oleh pertumbuhan positif sektor industri yang terus menyerap tenaga kerja. Selain itu, masifnya proyek investasi di Kepri turut mendukung peningkatan kesempatan kerja, sehingga berkontribusi pada penurunan TPT.

Tabel 2.17 Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Kepri

Indikator	Periode					Perubahan 1 Tahun	
	Ags'20	Ags'21	Ags'22	Ags'23	Ags'24	Orang	% Perubahan
Angkatan Kerja	1.133.776	1.207.014	1.259.712	1.093.686	1.120.660	26.974	2,47%
Bekerja	1.016.600	1.087.419	1.155.997	1.019.356	1.049.090	29.734	2,92%
Pengangguran	117.176	119.595	103.715	74.330	71.570	(2.760)	-3,71%
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	10,34%	9,91%	8,23%	6,80%	6,39%		-6,03%
- Pedesaan	5,41%	4,43%	5,88%	7,00%	2,50%		-64,29%
- Perkotaan	10,89%	10,45%	8,52%	6,77%	6,74%		-0,44%
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	66,28%	68,27%	68,94%	68,68%	69,17%		

Sumber: BPS (data diolah)

³ Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja

Tabel 2.18 Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Persentase Pengangguran						
		Aug'18	Aug'19	Aug'20	Aug'21	Aug'22	Aug'23	Aug'24
1	≤SD	2,39%	3,89%	4,25%	7,76%	3,31%	5,44%	5,48%
2	SMP	6,04%	5,33%	9,92%	11,72%	10,38%	5,87%	6,26%
3	SMA	12,37%	10,49%	11,02%	11,75%	11,03%	7,85%	7,80%
4	SMK	14,30%	10,22%	16,55%	9,96%	11,34%	9,99%	6,83%
5	Diploma I/II/III	0,84%	3,77%	9,56%	8,82%	3,51%	2,93%	5,32%
6	Universitas	1,39%	5,07%	7,75%	7,09%	2,50%	3,53%	4,36%

Sumber: BPS (diolah)

Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, TPT secara tahunan untuk level pendidikan SMA dan SMK mengalami penurunan, sedangkan untuk level ≤SD, SMP dan Perguruan Tinggi (Diploma dan Universitas) mengalami peningkatan. TPT kelompok pendidikan SMA dan SMK mengalami perubahan masing-masing dari 7,85% dan 9,99% pada Agustus 2023 menjadi 7,80% dan 6,83% pada Agustus 2024. Sementara kelompok pendidikan ≤SD, SMP, diploma dan universitas mengalami peningkatan TPT masing-masing sebesar 5,44%, 5,87%, 2,93% dan 3,53% pada Agustus 2023 menjadi 5,48%, 6,26%, 5,32% dan 4,36% pada Agustus 2024.

Penyerapan tenaga kerja di Provinsi Kepri didominasi oleh Sektor Industri Pengolahan dengan pangsa sebanyak 23,65% dari jumlah tenaga kerja pada Agustus 2024, menurun dibandingkan Agustus 2023 dengan pangsa 25,23%. Hal ini mencerminkan bahwa LU Industri Pengolahan memiliki peran yang strategis sebagai penyumbang PDRB terbesar dan menyediakan lapangan kerja formal terbanyak di Provinsi Kepri. LU berikutnya yang banyak menyerap tenaga kerja secara berurutan yakni sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (16,59%), LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (10,82%), LU Konstruksi (8,03%), dan LU Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (7,08%).

Tabel 2.19 Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Kepri

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Agt'18	Agt'19	Agt'20	Agt'21	Agt'22	Agt'23	Agt'24
1	Industri Pengolahan	23,37%	23,80%	22,76%	25,01%	25,77%	25,23%	23,65%
2	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Spd Motor	19,35%	17,30%	17,32%	17,67%	17,41%	16,45%	16,59%
3	Administrasi Pemerintahan, jasa pendidikan dan jasa kesehatan	5,95%	6,41%	6,18%	6,02%	5,15%	5,55%	5,76%
4	Konstruksi	9,44%	7,92%	6,86%	6,64%	7,14%	7,74%	8,03%
5	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	8,06%	7,71%	8,95%	9,00%	7,80%	8,36%	7,08%
6	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,09%	8,22%	7,92%	7,54%	10,19%	9,01%	10,82%
7	Transportasi dan Pergudangan	6,44%	6,39%	6,85%	6,05%	6,34%	6,22%	6,46%
8	Informasi, Komunikasi, jasa keuangan, asuransi, real estat dan perusahaan	1,35%	1,66%	1,26%	1,48%	2,07%	1,72%	1,36%
9	Jasa Lainnya	7,13%	6,72%	6,57%	5,08%	6,43%	6,24%	5,26%
10	Tambang, Listrik, Air, dan Gas	2,44%	2,54%	2,34%	1,83%	1,32%	2,11%	2,15%

Sumber: BPS (data diolah)

Buruh/karyawan merupakan status pekerjaan yang paling dominan di Provinsi Kepri dengan porsi sebesar 64,16%, diikuti kelompok berusaha sendiri (wiraswasta mandiri) sebesar 17,42%. Pangsa kelompok berusaha sendiri dan pekerja keluarga/tak dibayar mengalami penurunan masing-masing 2,75 persen poin dan 0,40 persen poin pada bulan Agustus 2024 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara peningkatan pangsa jumlah pekerja terjadi pada kelompok buruh/karyawan, pekerja bebas, berusaha dibantu buruh tetap dan berusaha dibantu buruh tidak tetap sebesar 1,60 persen poin, 0,59 persen poin, 0,52 persen poin dan 0,43 persen poin pada bulan Agustus 2024 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Tabel 2.20 Tenaga Kerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Provinsi Kepri (%)

No	Status Pekerjaan Utama	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Perubahan 1 tahun (Poin Persen)
		Agustus	Agustus	Agustus	Agustus	Agustus	Agustus	Agustus	
1	Berusaha Sendiri	19,83	19,29	21,80	20,90	19,80	20,17	17,42	-2,75
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap	4,16	4,59	4,32	6,10	5,77	5,63	6,06	0,43
3	Berusaha dibantu buruh tetap	3,27	4,04	3,65	3,15	3,23	3,77	4,29	0,52
4	Buruh/karyawan	64,95	66,39	60,94	64,79	60,45	62,56	64,16	1,60
5	Pekerja Bebas	3,30	2,51	3,86	4,02	4,12	1,71	2,30	0,59
6	Pekerja keluarga/tak dibayar	4,50	3,19	5,42	5,90	6,63	6,17	5,77	-0,40
TOTAL		100	100	100	100	100	100	100	

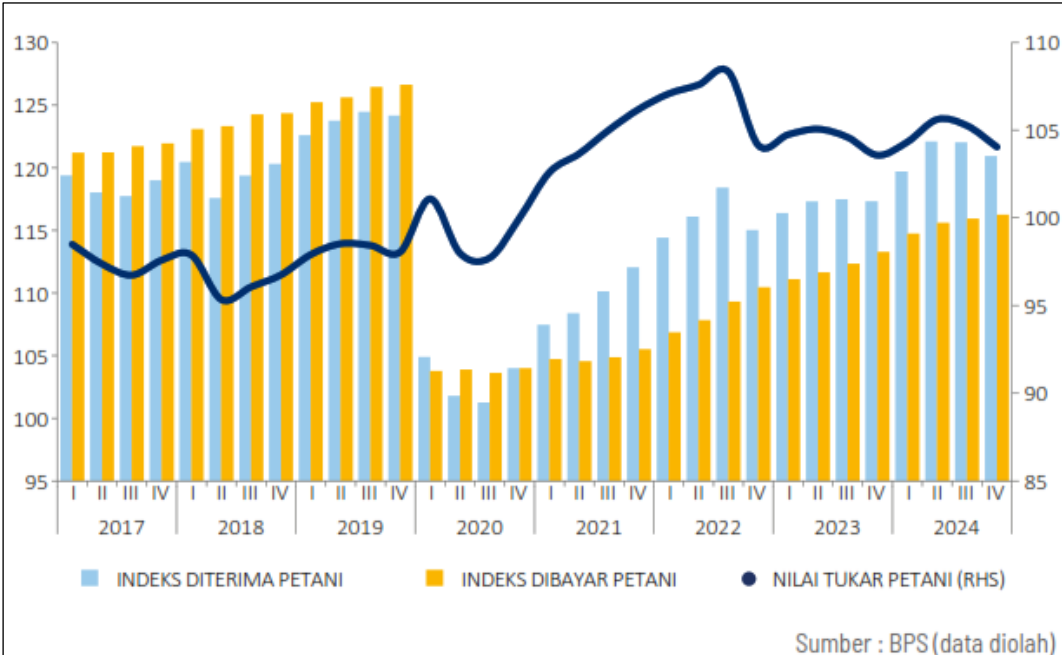
Sumber: BPS (diolah)

2.6.2. Kesejahteraan Masyarakat

2.6.2.1. Nilai Tukar Petani (NTP)

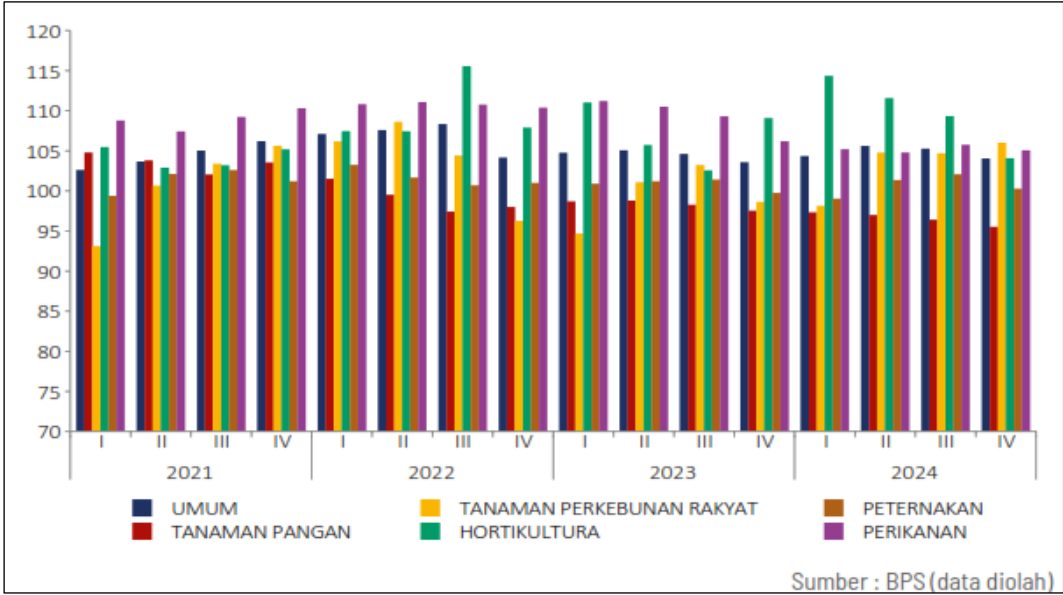
NTP adalah salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani. Nilai NTP yang semakin tinggi menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan petani. Berdasarkan analisis triwulanan, Tingkat kesejahteraan petani pada triwulan IV 2024 yang merupakan rata- rata bulan Oktober-Desember 2024 mengalami penurunan disbanding triwulan sebelumnya (Juli-September 2024). Rata-rata NTP pada triwulan IV 2024 tercatat sebesar 104,04, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 105,25. Penurunan tersebut terjadi seiring dengan turunnya Indeks yang Diterima (It) petani di *subsector* Holtikultura, Tanaman Pangan, Perikanan dan Peternakan.

Grafik 2.41 Perkembangan NTP



Berdasarkan subsektor, NTP triwulan tertinggi tercatat pada sub kelompok Holtikultura sebesar 109,34 dan NTP terendah tercatat pada sub kelompok Tanaman Pangan sebesar 96,40. Meskipun masih mencatatkan NTP tertinggi dibandingkan subsektor lain, namun NTP sub kelompok Holtikultura mengalami penurunan sebesar 1,99% jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kenaikan NTP tertinggi jika dibandingkan triwulan sebelumnya terjadi pada sub kelompok Perikanan sebesar 0,45%. Hal ini disebabkan oleh naiknya permintaan komoditas ikan-ikanan ditengah pasokan yang menipis karena faktor cuaca, sehingga memberikan keuntungan lebih bagi nelayan.

Grafik 2.42 NTP Berdasarkan Subsektor



Berdasarkan subsektor, NTP triwulan tertinggi tercatat pada sub kelompok Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 106, dan NTP terendah tercatat pada sub kelompok Tanaman Pangan sebesar 95,51. Selain itu terjadi penurunan yang cukup signifikan pada sub Kelompok Holtikultura yang selama ini merupakan NTP tertinggi. NTP Holtikultura tercatat sebesar 104,07 pada triwulan IV 2024, menurun dibandingkan triwulan III 2024 sebesar 109,34.

Tabel 2.21 Nilai Tukar Petani Provinsi Kepri

Sub Kelompok / Kelompok	2018 = 100															
	2021				2022				2023				2024			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1. Tanaman Pangan																
a. Indeks yang Diterima (It)	110,13	108,80	107,29	109,68	109,13	108,23	107,59	109,04	110,36	110,94	111,08	111,16	112,62	113,22	112,92	112,18
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	105,11	104,82	105,15	105,62	107,53	108,77	110,46	111,28	111,84	112,29	113,05	113,99	115,74	116,75	117,14	117,46
c. Nilai Tukar Petani (NTP-P)	104,78	103,79	102,03	103,53	101,49	99,50	97,41	97,99	98,67	98,80	98,26	97,52	97,31	96,97	96,40	95,51
2. Hortikultura																
a. Indeks yang Diterima (It)	111,43	107,61	108,20	111,07	115,06	116,38	127,04	119,47	123,41	117,88	115,10	123,46	131,29	129,21	126,97	121,16
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	105,01	104,58	104,88	105,60	107,09	108,34	109,95	110,74	111,16	111,52	112,25	113,18	115,12	115,82	116,13	116,42
c. Nilai Tukar Petani (NTP-H)	105,45	102,90	103,17	105,17	107,44	107,42	115,55	107,89	111,02	105,70	102,55	109,07	114,34	111,56	109,34	104,07
3. Tanaman Perkebunan Rakyat																
a. Indeks yang Diterima (It)	97,93	105,50	108,70	110,97	114,13	117,98	115,11	107,04	105,85	113,62	116,99	112,52	113,59	122,35	123,23	124,58
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	105,20	104,84	105,17	105,90	107,49	108,64	110,27	111,19	111,78	112,43	113,08	114,08	115,77	116,78	117,24	117,53
c. Nilai Tukar Petani (NTP-Pr)	93,11	100,64	103,36	105,63	106,17	108,59	104,41	96,27	94,69	101,06	103,22	98,63	98,12	104,77	104,67	106,00
4. Peternakan																
a. Indeks yang Diterima (It)	103,67	106,51	107,27	106,35	106,85	108,89	109,45	110,35	111,02	112,16	112,97	111,37	111,82	115,15	115,10	114,56
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	104,30	104,31	104,57	105,10	106,53	107,40	108,70	109,28	110,04	110,85	111,41	112,03	112,93	113,62	115,05	114,27
c. Nilai Tukar Petani (NTP-Pt)	99,39	102,11	102,58	101,18	103,22	101,64	100,69	100,98	100,89	101,19	101,40	99,73	99,02	101,35	102,06	100,26
5. Perikanan																
a. Indeks yang Diterima (It)	113,43	112,00	114,30	115,97	117,51	117,96	119,58	121,19	123,07	122,87	122,33	119,86	120,08	120,26	121,10	121,23
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	104,29	104,28	104,67	105,12	106,06	106,66	107,98	109,81	110,68	111,21	111,92	112,88	114,16	114,77	115,05	115,39
c. Nilai Tukar Petani (NTP-Pi)	108,77	107,40	109,20	110,31	110,79	111,08	110,75	110,36	111,20	110,49	109,30	106,20	105,19	104,78	105,74	105,06
Umum																
a. Indeks yang Diterima (It)	107,45	108,38	110,14	112,05	114,41	116,10	118,41	115,02	116,38	117,30	117,49	117,31	119,70	122,08	122,03	120,94
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	104,73	104,54	104,87	105,50	106,84	107,82	109,31	110,45	111,11	111,65	112,34	113,27	114,73	115,59	115,94	116,25
c. Nilai Tukar Petani (NTP)	102,60	103,66	105,02	106,20	107,08	107,59	108,33	104,14	104,75	105,06	104,59	103,57	104,33	105,61	105,25	104,04

Sumber : BPS (data diolah)

2.6.2.2. Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepri pada September 2024 tercatat sebanyak 124.960 orang, menurun dibandingkan periode Maret 2024 yang tercatat sebesar 138.300 orang. Pada periode September 2024, garis kemiskinan mengalami peningkatan dari Rp787.211/bulan/kapita pada Maret 2024 menjadi Rp807.602/bulan/kapita pada September 2024. Di sisi lain, Indeks Kedalaman Kemiskinan pada periode September 2024 tercatat sebesar 0,635%, lebih rendah dibandingkan dengan periode Maret 2024 sebesar 0,704%. Penurunan indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauhi garis kemiskinan. Adapun Indeks Keparahan Kemiskinan pada September 2024 juga mengalami penurunan dari 0,146% pada Maret 2024 menjadi sebesar 0,143% pada September 2024.

Tabel 2.22 Profil Kemiskinan di Provinsi Kepri

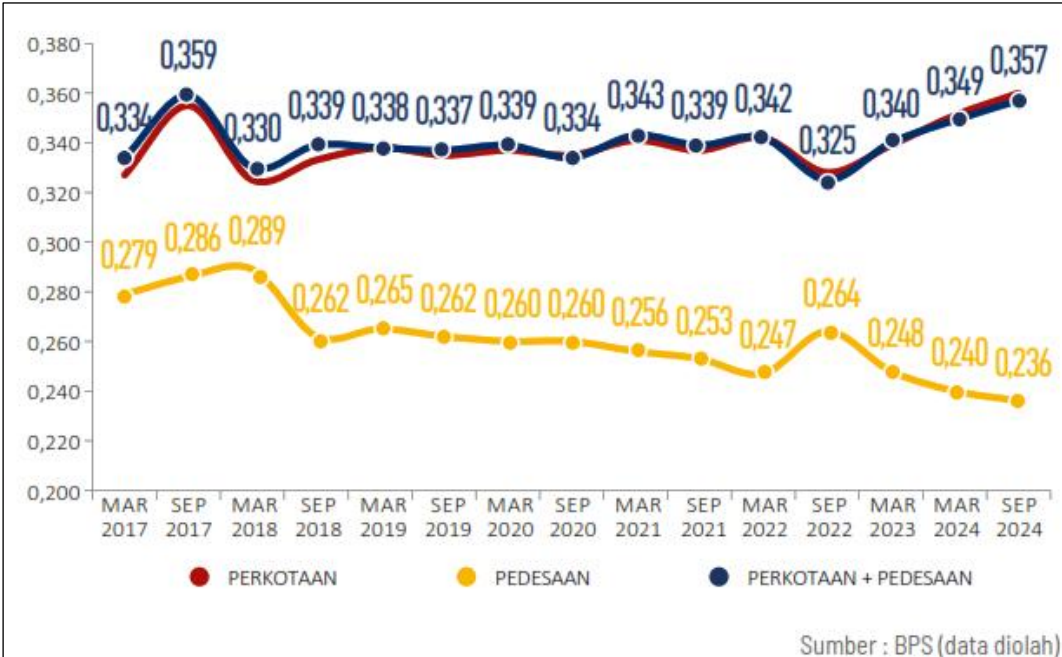
	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	2024	
	Mar	Sept	Mar	Sept	Mar	Sept	Mar	Sept	Mar	Sept	Mar	Sept	Mar	Mar	Sept
Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	125.370	128.462	131.676	125.362	128.462	127.758	131.966	142.611	144.462	137.750	151.680	148.890	142.500	138.300	124.960
Persentase Penduduk Miskin (%)	6,06	6,13	6,20	5,83	5,90	5,80	5,92	6,13	6,12	5,75	6,24	6,03	5,69	5,37	4,78
Garis Kemiskinan (Rp/bulan/kapita)	513.237	536.027	559.291	567.972	594.059	602.038	614.727	617.532	642.425	653.853	684.070	730.462	742.526	787.211	807.602
Indeks Kedalaman Kemiskinan/P1(%)	0,971	1,183	0,995	0,591	0,690	0,900	1,110	1,213	1,070	0,953	1,047	0,886	0,823	0,704	0,635
Indeks Keparahan Kemiskinan/ P2(%)	0,228	0,313	0,243	0,107	0,130	0,18	0,290	0,423	0,280	0,218	0,252	0,186	0,181	0,146	0,143
Pertumbuhan Penduduk Miskin (yoy)	4,12%	7,82%	5,03%	-2,41%	-2,44%	1,91%	2,73%	11,63%	9,47%	-3,41%	5,00%	8,09%	-6,05%	-7,11%	-12,31%
Pertumbuhan Garis Kemiskinan (yoy)	4,71%	6,64%	8,97%	5,96%	6,22%	6,00%	3,48%	2,57%	4,51%	5,88%	6,48%	11,72%	8,55%	7,77%	8,76%

Sumber: BPS (data diolah)

2.6.2.3. Gini Ratio (GR)

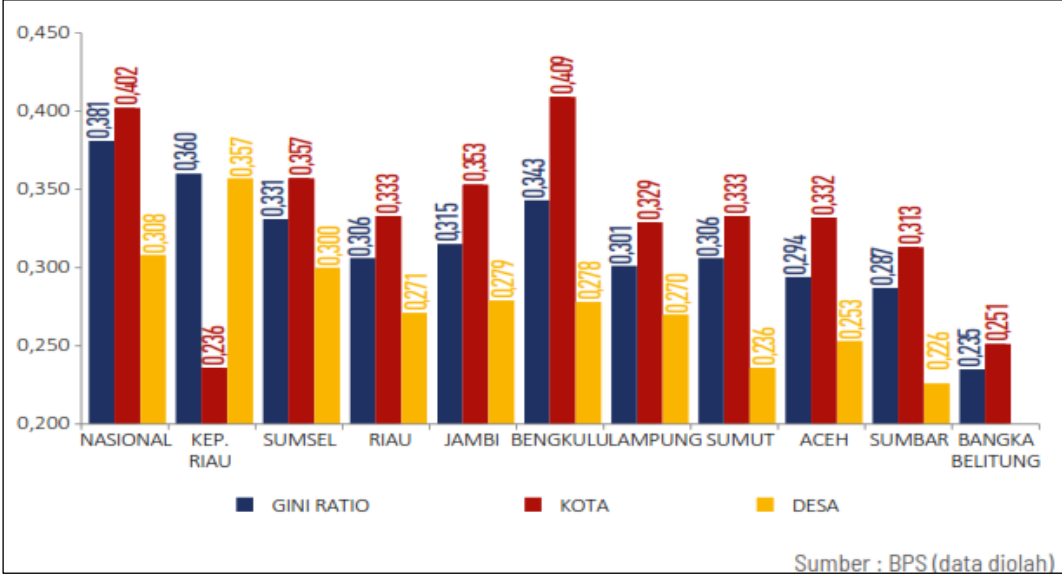
Gini Ratio⁴ Provinsi Kepri pada September 2024 tercatat sebesar 0,357, meningkat dibandingkan Maret 2024 sebesar 0,349. Kenaikan Gini Ratio mengindikasikan bahwa tingkat kesenjangan pendapatan antar penduduk di Provinsi Kepri menunjukkan pemburukan ditandai dengan kesenjangan yang meluas pada periode Maret 2024 – September 2024. Berdasarkan lokasi, tingkat ketimpangan pendapatan di wilayah perkotaan tercatat lebih tinggi dibandingkan masyarakat di wilayah perdesaan. Gini Ratio di perkotaan pada September 2024 tercatat sebesar 0,360, meningkat dari Maret 2024 tercatat sebesar 0,351, sementara Gini Ratio di perdesaan tercatat sebesar 0,236, menurun dari Maret 2024 yang tercatat sebesar 0,240. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan yang terjadi di perdesaan mengalami perbaikan, sedangkan ketimpangan di perkotaan sedikit meningkat. Jika dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Sumatera, Indeks Gini Ratio di Provinsi Kepri adalah yang tertinggi, meskipun masih lebih rendah dibandingkan dengan Nasional (0,381).

Grafik 2.43 Perkembangan Gini Ratio Provinsi Kepri



⁴ Gini Ratio merupakan ratio ketimpangan pengeluaran penduduk yang nilainya antara 0 sampai 1. Gini Ratio yang semakin tinggi mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi.

Grafik 2.44 Gini Ratio Provinsi di Wilayah Sumatera

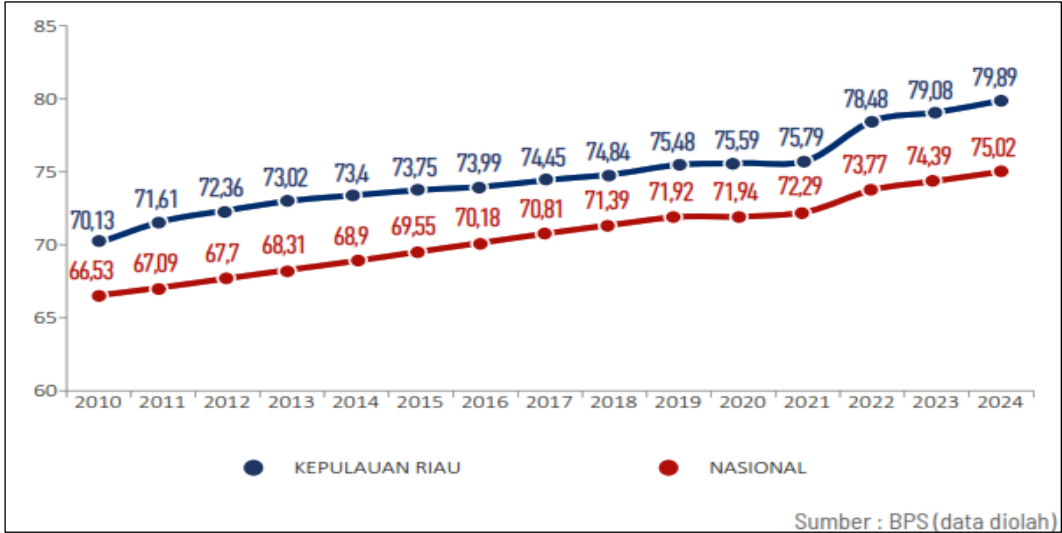


2.6.2.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM Provinsi Kepri pada tahun 2024 tercatat sebesar 79,89, meningkat 0,81 poin (1,01%) dibandingkan tahun sebelumnya 79,08. Peningkatan IPM Kepri 2024 didukung oleh peningkatan ketiga dimensi penyusunnya yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diukur melalui Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH), dimensi pengetahuan yang diukur melalui Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), serta dimensi standar hidup layak yang diukur melalui rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan. Dari sisi dimensi umur panjang dan hidup sehat, angka UHH saat Lahir di Kepri tercatat sebesar 75,12, artinya bayi yang lahir pada tahun 2024 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 75,12 tahun, lebih lama 0,22 tahun dibandingkan dengan bayi yang lahir pada tahun 2023.

Angka UHH penduduk di Provinsi Kepri pada tahun 2024 tercatat 75,12 tahun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 74,90 tahun yang menunjukkan kualitas hidup masyarakat yang semakin baik. Tingkat Harapan Lama Sekolah (HLS) juga mengalami peningkatan menjadi 13,27 tahun yang diikuti peningkatan rata-rata lama sekolah menjadi 10,50 tahun. Peningkatan angka harapan sekolah maupun rata-rata lama sekolah memberikan sinyal positif bahwa kualitas SDM di Provinsi Kepri akan semakin baik. Sejalan dengan hal tersebut, tingkat pengeluaran per kapita juga mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp15.573.000,00, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp14.998.000,00.

Grafik 2.45 Perkembangan IPM Kepri



Secara kewilayahan, seluruh daerah di Provinsi Kepri mengalami peningkatan IPM, dimana IPM Kota Batam dan Tanjungpinang termasuk dalam kelompok IPM sangat tinggi dengan angka IPM masing-masing 83,32 dan 81,58. Sementara itu 5 (lima) kabupaten lainnya termasuk dalam kelompok IPM tinggi yang meliputi Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, Kabupaten Karimun, Kepulauan Anambas. Secara keseluruhan, semua Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau mencatatkan peningkatan IPM dibandingkan tahun sebelumnya yang menunjukkan adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia.

Tabel 2.23 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri Menurut Komponen

Komponen	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2014
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)	Tahun	68,42	68,63	68,85	69,05	69,15	69,41	69,45	69,48	69,64	69,80	74,25	74,36	74,62	74,90	75,12
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	11,51	11,61	11,90	12,26	12,51	12,60	12,66	12,81	12,82	12,83	12,87	12,98	12,99	13,05	13,27
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,38	9,46	9,58	9,63	9,64	9,65	9,67	9,79	9,81	9,99	10,12	10,18	10,37	10,41	10,50
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu Rupiah)	Rp 000	12.267	12.513	12.740	12.942	13.019	13.177	13.359	13.566	13.976	14.466	14.209	14.122	14.469	14.998	15.573
IPM		71,13	71,61	72,36	73,02	73,40	73,75	73,99	74,45	74,84	75,48	77,69	77,87	78,48	79,08	79,89

Sumber: BPS (data diolah)

Tabel 2.24 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri berdasarkan wilayah kabupaten/kota

Wilayah	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Karimun	69,21	69,84	70,26	70,56	71,10	71,44	71,70	72,65	74,70	75,49
Bintan	71,92	72,38	72,91	73,41	73,98	74,13	74,57	74,99	77,50	77,96
Natuna	70,87	71,23	71,52	72,10	72,63	72,72	73,09	73,47	78,23	78,60
Lingga	61,28	62,44	63,45	64,06	64,98	65,29	65,83	66,57	72,23	73,05
Kepulauan Anambas	65,86	66,30	67,06	67,53	68,48	68,80	69,23	69,61	72,80	73,47
Batam	79,34	79,79	80,26	80,54	81,09	81,11	81,12	81,67	82,64	83,32
Tanjungpinang	77,57	77,77	78,00	78,33	78,73	78,91	78,93	79,64	81,14	81,58
Kepulauan Riau	73,75	73,99	74,45	74,84	75,48	75,59	75,79	78,48	79,08	79,89

Sumber: BPS (data diolah)

2.7. Prospek Perekonomian Daerah

Perekonomian global diperkirakan tetap tumbuh stabil, meskipun tingkat pertumbuhannya cukup bervariasi antar negara. Sejumlah negara di kawasan Asia dan Eropa tumbuh lebih rendah dibandingkan prakiraan. Di sisi lain, momentum pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) yang tetap kuat mampu menjadi faktor pendorong perekonomian global. Sejalan dengan kondisi global, perekonomian Indonesia juga diperkirakan tetap tumbuh kuat sejalan dengan peningkatan investasi. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) secara keseluruhan tahun 2025 diperkirakan tumbuh menguat didukung oleh konsumsi rumah tangga dan investasi yang terus berkembang.

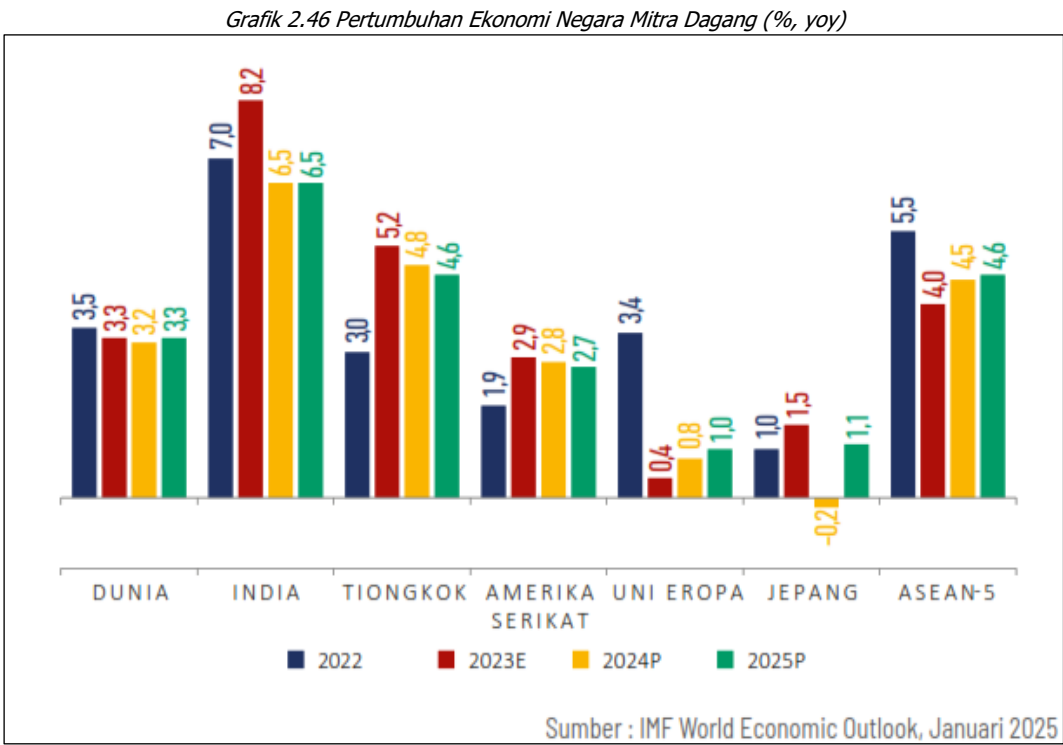
Tekanan inflasi di Provinsi Kepri pada tahun 2025 juga diperkirakan tetap terjaga dalam rentang sasaran inflasi 2,5±1% (yoy). Beberapa faktor pendukung terjaganya inflasi antara lain normalisasi harga pangan dan energi global, perbaikan rantai pasok, serta penguatan sinergi upaya pengendalian inflasi di daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2.7.1. **Prospek Pertumbuhan Ekonomi**

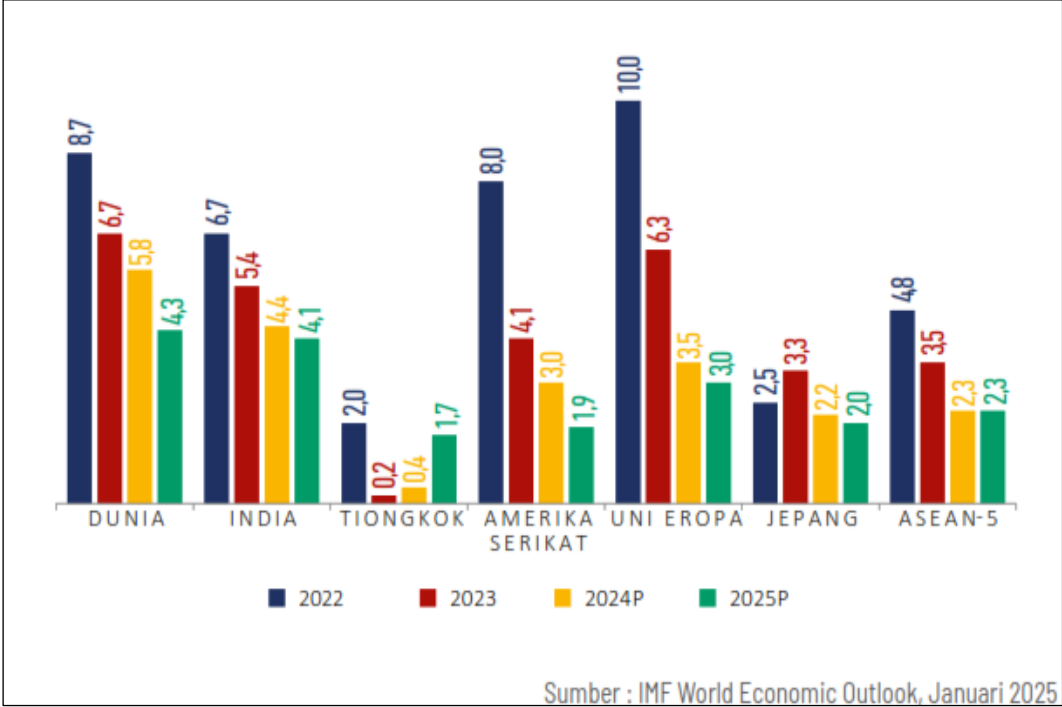
Perekonomian global diperkirakan dapat tumbuh lebih tinggi dari prakiraan sebelumnya. Berdasarkan proyeksi dari *International Monetary Fund* (IMF), pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2025 diperkirakan sebesar 3,3% (yoy), atau meningkat 0,1% dibandingkan prakiraan sebelumnya, serta lebih tinggi dibandingkan tahun 2024. Hal tersebut didukung dengan revisi ke atas pada pertumbuhan ekonomi negara maju (*advanced economies*) khususnya AS, di tengah proyeksi untuk negara *emerging market and developing economies* yang tetap stabil. Pertumbuhan ekonomi AS diperkirakan meningkat didukung oleh konsumsi yang masih kuat. Di sisi lain, perlambatan konsumsi domestik di Tiongkok, penurunan aktivitas industri di India, disrupsi supply di Jepang, hingga pelemahan industri manufaktur dan ekspor komoditas di Eropa menjadi faktor penahan laju pertumbuhan ekonomi global. Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi negara ASEAN-5 (Indonesia, Thailand, Filipina, Singapura, dan Malaysia) di tahun 2025 diperkirakan masih tetap kuat sebesar 4,6% (yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 4,5% (yoy).

Tekanan inflasi global diperkirakan terus melanjutkan tren penurunan, dari 5,8% (yoy) pada tahun 2024 menjadi 4,3% (yoy) pada tahun 2025. Disinflasi global tersebut terutama didorong oleh penurunan harga komoditas inti serta ekspektasi penurunan harga energi. Meskipun demikian, risiko berlanjutnya konflik geopolitik global masih menjadi perhatian yang dapat berdampak pada meningkatnya tekanan inflasi. Tren disinflasi yang masih terjadi diperkirakan akan mendorong kebijakan moneter yang lebih longgar. Adapun berdasarkan prakiraan IMF, inflasi di negara ASEAN-5 cenderung stabil pada level 2,3% (yoy) di tahun 2025, tidak berubah dari capaian pada tahun 2024.

Ekonomi Indonesia diperkirakan tetap berdaya tahan di Tengah tingginya ketidakpastian global. Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2025 berada pada kisaran 4,7% - 5,5% (yoy). Ke depan, pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap baik ditopang oleh prakiraan peningkatan investasi, khususnya investasi non bangunan. Sementara itu, konsumsi rumah tangga perlu terus didorong sehingga dapat semakin menopang permintaan domestik. Adapun dari sisi eksternal, berbagai upaya untuk memperkuat ekspor perlu terus ditingkatkan guna memitigasi dampak melambatnya permintaan negara-negara mitra dagang utama.

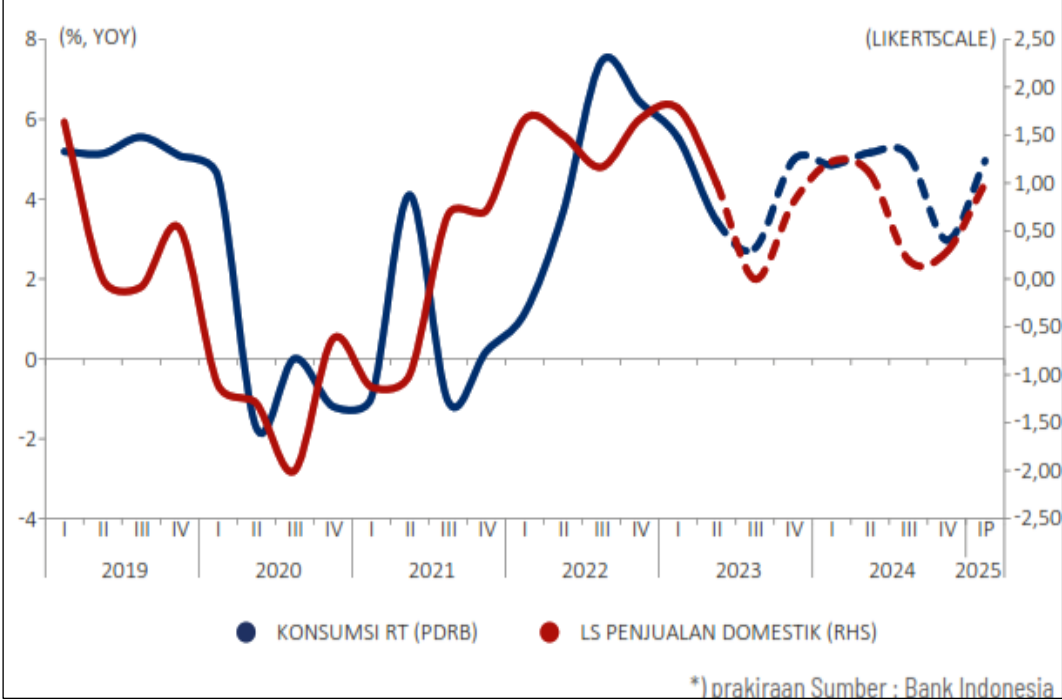


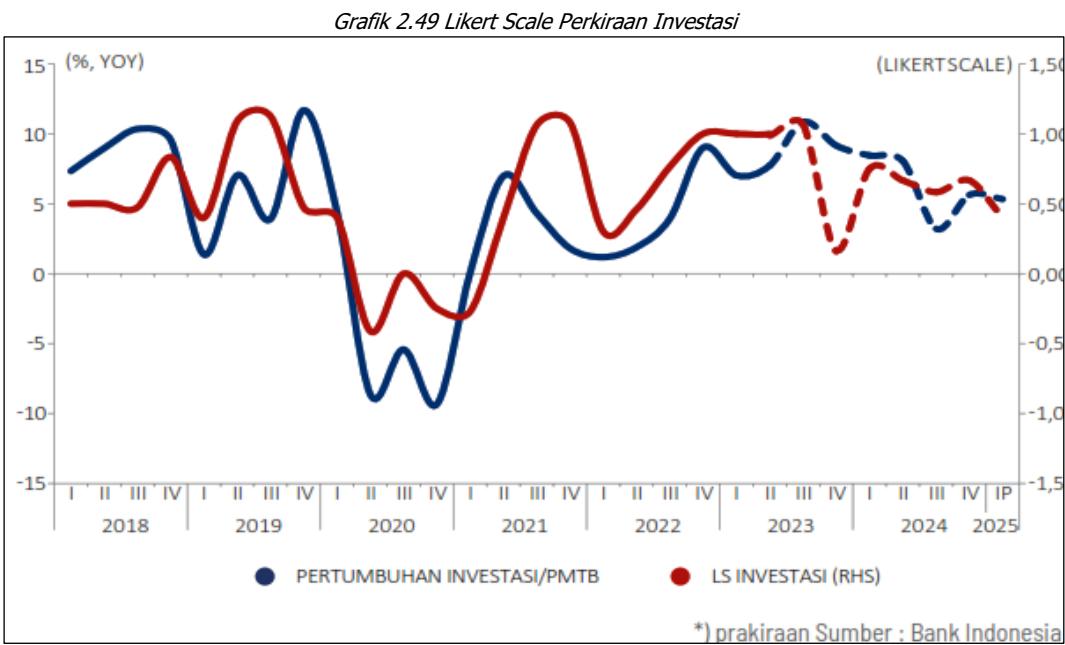
Grafik 2.47 Perkembangan Inflasi Negara Mitra Dagang (%yoy)



Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri tahun 2025 diperkirakan tetap tumbuh dan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Perekonomian Kepri tetap tumbuh didukung oleh kinerja *domestic* yang membaik, ditunjukkan oleh *Likert Scale* (LS) Penjualan Domestik sejalan dengan adanya kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) bagi pekerja di wilayah Kepri. Selain itu, investasi diperkirakan tetap tumbuh meskipun melambat setelah realisasi yang tinggi pada tahun sebelumnya. Adapun dari sisi LU, pertumbuhan ekonomi Kepri terutama ditopang oleh LU Industri Pengolahan, LU Konstruksi, serta LU Perdagangan Besar dan Eceran. Dengan pertimbangan tersebut, Bank Indonesia memperkirakan perekonomian Provinsi Kepri pada tahun 2025 di prakirakan tumbuh pada kisaran 4,8% - 5,6% (yoy).

Grafik 2.48 Likert Scale Perkiraan Penjualan Ekspor





Pertumbuhan ekonomi Kepri pada tahun 2025 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2024. Dari sisi pengeluaran, ekonomi tahun 2025 akan banyak ditopang konsumsi rumah tangga yang biasanya meningkat pada akhir tahun. Berakhirnya pemilu dan pilkada juga diharapkan mendorong investasi yang cenderung *wait and see* pada tahun sebelumnya. Akselerasi kinerja perekonomian pada tahun depan diperkirakan bersumber dari Lapangan Usaha (LU) utama yaitu LU Perdagangan Besar dan Eceran serta LU Industri Pengolahan. Akselerasi LU Perdagangan diperkirakan bersumber dari meningkatnya permintaan sejalan dengan kebijakan moneter yang lebih akomodatif serta meningkatnya kunjungan wisatawan. Sementara itu, meningkatnya penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) secara global diharapkan dapat mendorong permintaan terhadap industri semikonduktor dan elektronik.

Tabel 2.25 Risiko Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau Tahun 2024

Komponen	Faktor Pendorong / Penahan	Arah
Kebijakan Moneter Akomodatif	Kebijakan moneter yang lebih akomodatif seiring dengan tren inflasi yang melandai diharapkan dapat mendorong konsumsi masyarakat.	▲
Kunjungan Wisatawan	Implementasi kebijakan <i>short term visa</i> serta kebijakan pendorong pariwisata lainnya dapat mendukung kunjungan wisman.	▲
Investasi	Berakhirnya tahun politik diharapkan memberikan kepercayaan kepada investor sehingga tidak lagi bersikap <i>wait and see</i> .	▲
Proyek Strategis Nasional dan Kawasan Ekonomi Khusus	Berlanjutnya pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kepri.	▲
Persaingan Daerah Industri	Peresmian kerja sama <i>Johor-Singapore Special Economic Zone (JS-SEZ)</i> meningkatkan persaingan investasi dengan KEK yang ada di Kepri.	▼
Transisi Pemerintahan AS	Transisi pemerintahan AS sebagai mitra dagang utama perlu dicermati, khususnya terkait dengan kebijakan perdagangan internasional.	▼
Risiko Geopolitik	Gejolak geopolitik yang masih berlanjut dapat memberikan disrupsi terhadap perekonomian global hingga domestik.	▼

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 diperkirakan tumbuh sebesar 4,9 s/d 5,7%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2024. Dari sisi pengeluaran, ekonomi tahun 2025 akan banyak ditopang konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah yang biasanya meningkat pada akhir tahun. Berakhirnya pemilu dan pilkada juga diharapkan mendorong investasi yang cenderung *wait and see* pada tahun sebelumnya. Akselerasi kinerja perekonomian pada tahun depan diperkirakan bersumber dari Lapangan Usaha (LU) utama yaitu LU Perdagangan Besar dan Eceran serta LU Industri Pengolahan. Akselerasi LU Perdagangan diperkirakan bersumber dari meningkatnya permintaan sejalan dengan kebijakan moneter yang lebih akomodatif serta meningkatnya kunjungan wisatawan. Sementara itu, meningkatnya penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) secara global diharapkan dapat mendorong permintaan terhadap industri semikonduktor dan elektronik tetap kuat.

2.7.2. **Prospek Inflasi**

Tekanan inflasi Provinsi Kepri pada tahun 2025 diperkirakan tetap berada dalam sasaran inflasi nasional 2,5±1% (yoy). Inflasi pada tahun 2025 diperkirakan terutama bersumber dari beberapa kelompok komoditas, antara lain (1) kelompok makanan, minuman dan tembakau; (2) transportasi, dan (3) penyediaan makanan dan minuman. Tekanan inflasi diperkirakan akan tetap stabil sejalan dengan normalisasi pasokan, harga komoditas global, dan rantai pasok dunia. Selain itu, sinergi TPID melalui GNPIP diperkirakan dapat meredam tekanan inflasi sehingga dapat mencapai target sasaran inflasi. Di samping itu, moderasi tarif angkutan sejalan dengan penambahan jumlah armada/rute penerbangan menahan tekanan inflasi lebih lanjut. Terjaganya inflasi di dalam kisaran sasaran tersebut tidak terlepas dari konsistensi kebijakan moneter yang didukung dengan eratnya sinergi antara Bank Indonesia dan pemerintah melalui TPID.

Tabel 2.26 Risiko Inflasi Kepulauan Riau Tahun 2024

Komponen	Faktor Pendorong / Penahan
Upside Risk	• Potensi kenaikan beberapa bahan pangan sebagai dampak ketegangan geopolitik yang masih berlangsung, seperti kenaikan harga beras dan pupuk. • Potensi kenaikan harga pangan karena peningkatan permintaan. • Kebijakan pembatasan impor pangan yang perlu diimbangi dengan penguatan ketersediaan pasokan domestik. • Potensi berlanjutnya kenaikan harga komoditas emas seiring dengan risiko ketidakpastian global yang masih berlanjut. • Kenaikan UMR yang dapat mendukung perbaikan konsumsi masyarakat. • Potensi terjadinya La Nina yang mendorong curah hujan lebih tinggi.
Downside Risk	• Berlanjutnya normalisasi harga minyak dunia diperkirakan dapat menurunkan tingkat harga komoditas energi. • Normalisasi tarif angkutan udara seiring penambahan dan perluasan frekuensi penerbangan. • Inflasi inti tetap terjaga sejalan dengan terkendalinya ekspektasi inflasi. • Berlanjutnya Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan.

Risiko inflasi yang perlu diperhatikan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a) Potensi kenaikan beberapa bahan pangan sebagai dampak ketegangan geopolitik yang masih berlangsung, seperti kenaikan harga beras dan pupuk.
- b) Kebijakan pembatasan impor pangan yang perlu diimbangi dengan penguatan ketersediaan pasokan domestik.
- c) Potensi berlanjutnya kenaikan harga komoditas emas seiring dengan risiko ketidakpastian global yang masih berlanjut.
- d) Kenaikan UMR yang dapat mendukung perbaikasumsi masyarakat.
- e) Impelementasi tarif oleh Amerika Serikat dan negara mitra dagang yang berpotensi mendorong kenaikan harga bahan baku impor dan pangan

2.7.3. **Rekomendasi**

Dalam rangka mendorong momentum pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri, sinergi Bank Indonesia dengan Pemerintah Daerah dan *stakeholders* lainnya akan terus diperkuat. Sehubungan hal tersebut, beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, antara lain:

1. Mendorong peningkatan investasi, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) melalui:
 - a) Pemberian insentif, penguatan regulasi termasuk integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke dalam sistem *One Single Submission-Risk Based Approach* (OSS RBA).
 - b) Mendorong promosi investasi dengan menjadikan PSN dan KEK sebagai salah satu daya tarik investasi di Kepri, khususnya dengan lokasi yang strategis serta kepastian iklim investasi dengan berakhirnya tahun politik.

- c) Mendukung peningkatan *comparative advantage* daya saing investasi di Kepri di tengah semakin tingginya persaingan di kawasan (termasuk SJ SEZ) antara lain melalui penguatan insentif terhadap investor dan perbaikan infrastruktur.
2. Optimalisasi potensi sektor pariwisata melalui:
 - a) Penguatan aspek 3A dan 2P (Akses, Amenitas, Atraksi, Pelaku, dan Promosi) sebagai upaya mendorong pemulihan sektor pariwisata, antara lain dengan penambahan event, peningkatan promosi MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*) serta *quality tourism*.
 - b) Mendukung implementasi kebijakan *short term* visa guna mendorong peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke wilayah Kepri.
 - c) Mendorong normalisasi frekuensi dan perluasan rute penerbangan baru di wilayah Kepri untuk mendukung peningkatan kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara sekaligus menjaga stabilitas inflasi dari komoditas angkutan udara.
 3. Memperkuat realisasi belanja pemerintah, baik APBD maupun APBN, yang dapat memberikan *multiplier effect* terhadap perekonomian.
 4. Mendorong hilirisasi bahan baku dan sumber daya alam yang ada di Kepri untuk memperkuat *local value chain* (LVC).
 5. Meningkatkan perluasan digitalisasi sistem pembayaran melalui berbagai kanal digital, termasuk upaya peningkatan akseptansi merchant dan user QRIS sehingga juga dapat mendorong peningkatan konsumsi masyarakat, termasuk promosi QRIS *cross border*.
 6. Memperluas implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di bawah koordinasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang sekaligus dapat mendorong optimalisasi realisasi pendapatan maupun belanja pemerintah daerah.
 7. Memperkuat program pemberdayaan UMKM antara lain melalui dukungan pembiayaan, *capacity building*, perluasan akses pasar, maupun pendampingan sehingga dapat menghasilkan produk-produk unggulan yang berorientasi ekspor.

Selanjutnya, beberapa upaya yang juga dapat dilakukan untuk menjaga stabilitas inflasi dan mempertahankan daya beli masyarakat, antara lain:

1. Melanjutkan dan memperkuat pelaksanaan GNPIP untuk mengendalikan inflasi pangan melalui 7 (tujuh) program unggulan, yakni: (1) penguatan ketahanan pangan komoditas pangan strategis; (2) penguatan kapasitas budidaya pangan mandiri; (3) optimalisasi Kerjasama Antar Daerah (KAD); (4) dukungan fasilitasi distribusi pangan; (5) dukungan optimalisasi pasar murah, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), dan Gerakan Pangan Murah (GPM); (6) penguatan digitalisasi dan data pangan; serta (7) penguatan koordinasi dan komunikasi untuk menjaga ekspektasi inflasi.
2. Di tengah keterbatasan lahan pertanian yang subur, peningkatan produksi pangan di Kepri terus didorong, antara lain penanaman serentak cabai melalui Gerakan Sekolah Menanam (GSM) Cabai di 100 SMA/SMK se-Kepri sebanyak 25.000 bibit, peningkatan budidaya cabai merah melalui koperasi dan kelompok-kelompok tani, maupun pembangunan *greenhouse* untuk menjaga produksi di tengah kendala cuaca. Upaya peningkatan produksi pangan juga dapat dilakukan dengan mendorong peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk pengembangan budidaya komoditas pangan strategis.

3. Koordinasi dan komunikasi yang efektif juga memegang peranan penting dalam pengendalian inflasi. Sinergi dan kolaborasi antara pihak-pihak yang tergabung dalam TPID perlu terus dilakukan melalui rapat koordinasi, rapat teknis, hingga *High Level Meeting* (HLM) untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pengendalian inflasi. Selain itu, pengendalian ekspektasi inflasi masyarakat juga perlu terus dilakukan antara lain dengan rutin mendiseminasikan informasi kecukupan pasokan, kewajaran harga, serta mengampanyekan himbauan belanja bijak melalui TV, radio, media sosial, dan *flyer*.
4. Sinergitas antar instansi dalam TPID juga perlu terus diperkuat melalui penyelarasan program yang dapat mendukung GNPIP dan kebijakan pengendalian inflasi daerah. Selain itu, sinergitas untuk mengendalikan inflasi tentunya juga diperlukan dalam mengimplementasikan strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif).
5. Mengoptimalkan kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan bahan pangan khususnya yang didatangkan dari luar daerah dengan dukungan asosiasi distributor.
6. Meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) terkait dengan program stabilisasi dalam rangka menjaga keterjangkauan harga pangan strategis.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp4.344.939.688.669,00 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Target Pendapatan Daerah pada APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 adalah sebesar Rp4.216.352.903.217,00.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan perubahan APBD yang semula sebesar Rp4.344.939.688.669,00 menjadi sebesar Rp4.407.669.774.785,00 atau bertambah sebesar Rp62.730.086.116,00 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Target Pendapatan Daerah pada perubahan APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 menjadi sebesar Rp4.268.508.203.807,00 atau bertambah sebesar Rp52.155.300.590,00.

Selanjutnya dilakukan Pergeseran Penjabaran setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 53 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Target Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024 menjadi Rp4.275.037.233.807,00 atau bertambah sebesar Rp6.529.030.000,00.

Secara keseluruhan jumlah realisasi Pendapatan Daerah tahun 2024 sebesar Rp3.958.295.361.262,68 atau sebesar 92,59% dari target yang ditetapkan dalam Perubahan APBD sebesar Rp4.275.037.233.807,00. Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp211.748.734.146,63 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah tahun 2023 sebesar Rp4.170.044.095.409,31 atau sebesar 1,05%. Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Alokasi Belanja Daerah Pergeseran Penjabaran setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.414.198.804.785,00 yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Alokasi Belanja Operasi tahun 2024 sebesar Rp3.222.810.004.132,90 yang digunakan untuk membiayai Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Sedangkan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp344.997.515.174,10 dan alokasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp4.773.672.048,00 serta Alokasi Belanja Transfer sebesar Rp841.617.613.430,00. Belanja Daerah tahun 2024 terealisasi sebesar Rp4.071.747.457.825,29 atau sebesar 92,24% dari nilai yang dianggarkan terhadap Belanja Daerah. Untuk Belanja Operasi tahun 2024 terealisasi sebesar Rp2.987.193.758.080,43 atau 92,69% dari nilai yang dianggarkan terhadap belanja operasi. Sedangkan Belanja Modal terealisasi sebesar Rp307.344.075.589,86 atau 89,09% dari nilai yang dianggarkan terhadap Belanja Modal. Belanja Tidak Terduga terealisasi sebesar Rp2.065.423.140,00 atau sebesar 43,27% dari nilai yang dianggarkan terhadap Belanja Tidak Terduga. Belanja Transfer terealisasi sebesar Rp775.144.201.015,00 atau sebesar 92,10% dari nilai yang dianggarkan terhadap Belanja Transfer.

Adapun Pembiayaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari Penerimaan Pembiayaan terealisasi sebesar Rp232.684.048.633,62 atau sebesar 100,64% dari dialokasikan sebesar Rp231.214.715.013,00. Penerimaan Pembiayaan yang dianggarkan yang terdiri dari Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya yang terealisasi sebesar Rp232.583.164.925,62 atau sebesar 100,59% dari yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp231.214.715.013,00 dan Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya (Penarikan Dana Bergulir) sebesar Rp100.883.708,00 dari yang semula tidak dianggarkan. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan terealisasi sebesar Rp91.945.787.633,00 atau 99,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp92.053.144.035,00 yang merupakan Pembayaran Cicilan Pokok Utang Pinjaman Daerah yang Jatuh Tempo kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur. Berikut disajikan gambaran realisasi APBD Tahun 2024:

Tabel 3.1 Realisasi APBD Tahun 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	4.275.037.233.807,00	3.958.295.361.262,68	92,59	4.170.044.095.409,31
5	BELANJA DAERAH	4.414.198.804.785,00	4.071.747.457.825,29	92,24	4.276.981.449.459,56
	SURPLUS/ DEFISIT	(139.161.570.978,00)	(113.452.096.562,61)	81,53	(106.937.354.050,25)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	139.161.570.978,00	140.738.261.000,62	101,13	338.152.069.063,49
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(139.161.570.978,00)	(113.452.096.562,61)	81,53	(106.937.354.050,25)

3.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024 menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang terkait adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun 2024 menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi

KODE		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1		2	3	4	5	6
		4 Pendapatan	4.275.037.233.807,00	3.958.295.361.262,68	(316.741.872.544,32)	92,59
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	153.446.188.051,00	161.199.636.058,04	7.753.448.007,04	105,05
1.01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	12.646.188.051,00	21.551.608.787,35	8.905.420.736,35	170,42
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	12.646.188.051,00	21.551.608.787,35	8.905.420.736,35	170,42
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	4 PENDAPATAN DAERAH	12.646.188.051,00	21.551.608.787,35	8.905.420.736,35	170,42
1.02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	138.000.000.000,00	138.557.590.770,69	557.590.770,69	100,40
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	115.000.000.000,00	116.068.647.767,69	1.068.647.767,69	100,93
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	4 PENDAPATAN DAERAH	115.000.000.000,00	116.068.647.767,69	1.068.647.767,69	100,93
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	23.000.000.000,00	22.488.943.003,00	(511.056.997,00)	97,78
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	4 PENDAPATAN DAERAH	23.000.000.000,00	22.488.943.003,00	(511.056.997,00)	97,78
1.03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.800.000.000,00	1.090.436.500,00	(1.709.563.500,00)	38,94

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	2.800.000.000,00	1.090.436.500,00	(1.709.563.500,00)	38,94
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	2.800.000.000,00	1.090.436.500,00	(1.709.563.500,00)	38,94
2			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	11.702.607.254,00	7.341.390.518,00	(4.361.216.736,00)	62,73
2.07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	7.500.000.000,00	5.009.217.000,00	(2.490.783.000,00)	66,79
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	7.500.000.000,00	5.009.217.000,00	(2.490.783.000,00)	66,79
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	7.500.000.000,00	5.009.217.000,00	(2.490.783.000,00)	66,79
2.09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	385.387.254,00	133.906.900,00	(251.480.354,00)	34,75
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	385.387.254,00	133.906.900,00	(251.480.354,00)	34,75
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	385.387.254,00	133.906.900,00	(251.480.354,00)	34,75
2.11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	317.220.000,00	317.220.000,00	0,00	100,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	317.220.000,00	0,00	(317.220.000,00)	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	317.220.000,00	0,00	(317.220.000,00)	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0001		UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	0,00	317.220.000,00	317.220.000,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0001	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	317.220.000,00	317.220.000,00	0,00
2.15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	3.500.000.000,00	1.880.914.716,00	(1.619.085.284,00)	53,74
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		Dinas Perhubungan	3.500.000.000,00	1.617.883.939,00	(1.882.116.061,00)	46,23
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	3.500.000.000,00	1.617.883.939,00	(1.882.116.061,00)	46,23
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0001		UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah I Kota Batam	0,00	3.185.000,00	3.185.000,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0001	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	3.185.000,00	3.185.000,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0002		UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah II Kabupaten Karimun	0,00	15.828.132,00	15.828.132,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0002	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	15.828.132,00	15.828.132,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0003		UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah III Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan	0,00	149.257.335,00	149.257.335,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0003	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	149.257.335,00	149.257.335,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0004		UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah IV Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas	0,00	45.257.910,00	45.257.910,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0004	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	45.257.910,00	45.257.910,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0005		UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah V Kabupaten Lingga	0,00	49.502.400,00	49.502.400,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0005	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	49.502.400,00	49.502.400,00	0,00
2.16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	131.902,00	131.902,00	0,00
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	131.902,00	131.902,00	0,00
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	131.902,00	131.902,00	0,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.488.695.580,00	742.352.020,00	(1.746.343.560,00)	29,83
3.25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.717.133.080,00	742.352.020,00	(974.781.060,00)	43,23
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000		Dinas Kelautan dan Perikanan	1.717.133.080,00	742.352.020,00	(974.781.060,00)	43,23
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	1.717.133.080,00	742.352.020,00	(974.781.060,00)	43,23
3.29			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	771.562.500,00	0,00	(771.562.500,00)	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	771.562.500,00	0,00	(771.562.500,00)	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	771.562.500,00	0,00	(771.562.500,00)	0,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	4.107.399.742.922,00	3.789.011.982.666,64	(318.387.760.255,36)	92,25
5.02			KEUANGAN	4.107.399.742.922,00	3.789.011.982.666,64	(318.387.760.255,36)	92,25

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000		Badan Keuangan dan Aset Daerah	2.323.910.447.374,00	1.995.372.351.485,64	(328.538.095.888,36)	85,86
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	2.323.910.447.374,00	1.995.372.351.485,64	(328.538.095.888,36)	85,86
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000		Badan Pendapatan Daerah	1.783.489.295.548,00	1.793.639.631.181,00	10.150.335.633,00	100,57
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	1.783.489.295.548,00	1.793.639.631.181,00	10.150.335.633,00	100,57
		5	Belanja	4.414.198.804.785,00	4.071.747.457.825,29	(342.451.346.959,71)	92,24
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.000.117.557.115,00	1.830.388.316.655,89	(169.729.240.459,11)	91,51
1.01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.076.236.158.458,00	1.049.194.472.692,20	(27.041.685.765,80)	97,49
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pendidikan	1.073.992.372.183,00	1.047.256.370.731,55	(26.736.001.451,45)	97,51
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	1.073.992.372.183,00	1.047.256.370.731,55	(26.736.001.451,45)	97,51
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0001		BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN	2.243.786.275,00	1.938.101.960,65	(305.684.314,35)	86,38
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0001	5	BELANJA DAERAH	2.243.786.275,00	1.938.101.960,65	(305.684.314,35)	86,38
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	430.777.602.856,00	421.327.829.301,32	(9.449.773.554,68)	97,81
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000		Dinas Kesehatan	81.505.120.246,00	77.808.391.081,00	(3.696.729.165,00)	95,46
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	81.505.120.246,00	77.808.391.081,00	(3.696.729.165,00)	95,46
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001		Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	254.512.360.482,00	251.836.588.613,32	(2.675.771.868,68)	98,95
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	5	BELANJA DAERAH	254.512.360.482,00	251.836.588.613,32	(2.675.771.868,68)	98,95
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002		Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	94.760.122.128,00	91.682.849.607,00	(3.077.272.521,00)	96,75
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	5	BELANJA DAERAH	94.760.122.128,00	91.682.849.607,00	(3.077.272.521,00)	96,75
1.03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	172.595.960.648,00	143.743.011.263,61	(28.852.949.384,39)	83,28
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	166.798.238.645,00	138.190.320.370,61	(28.607.918.274,39)	82,85
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	5	BELANJA DAERAH	166.798.238.645,00	138.190.320.370,61	(28.607.918.274,39)	82,85
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0002		UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR	4.849.182.613,00	4.632.157.991,00	(217.024.622,00)	95,52
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0002	5	BELANJA DAERAH	4.849.182.613,00	4.632.157.991,00	(217.024.622,00)	95,52
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0001		UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN	948.539.390,00	920.532.902,00	(28.006.488,00)	97,05
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0001	5	BELANJA DAERAH	948.539.390,00	920.532.902,00	(28.006.488,00)	97,05
1.04			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	254.987.625.329,00	155.084.552.494,00	(99.903.072.835,00)	60,82
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	254.987.625.329,00	155.084.552.494,00	(99.903.072.835,00)	60,82
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	5	BELANJA DAERAH	254.987.625.329,00	155.084.552.494,00	(99.903.072.835,00)	60,82
1.05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	37.107.978.574,00	34.170.353.265,36	(2.937.625.308,64)	92,08
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000		Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	26.417.273.801,00	23.604.127.694,00	(2.813.146.107,00)	89,35
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	5	BELANJA DAERAH	26.417.273.801,00	23.604.127.694,00	(2.813.146.107,00)	89,35
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.690.704.773,00	10.566.225.571,36	(124.479.201,64)	98,84
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	5	BELANJA DAERAH	10.690.704.773,00	10.566.225.571,36	(124.479.201,64)	98,84
1.06			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	28.412.231.250,00	26.868.097.639,40	(1.544.133.610,60)	94,57
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000		Dinas Sosial	28.412.231.250,00	26.868.097.639,40	(1.544.133.610,60)	94,57
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	5	BELANJA DAERAH	28.412.231.250,00	26.868.097.639,40	(1.544.133.610,60)	94,57
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	334.216.954.320,00	313.676.026.002,42	(20.540.928.318,08)	93,85
2.07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	31.913.417.830,00	30.485.027.108,00	(1.428.390.722,00)	95,52
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	28.484.200.988,00	27.556.865.449,00	(927.335.539,00)	96,74

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	5	BELANJA DAERAH	28.484.200.988,00	27.556.865.449,00	(927.335.539,00)	96,74
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0002		UPTD BLK Provinsi Kepulauan Riau	2.939.851.770,00	2.447.912.823,00	(491.938.947,00)	83,27
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0002	5	BELANJA DAERAH	2.939.851.770,00	2.447.912.823,00	(491.938.947,00)	83,27
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0003		UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Karimun	53.124.224,00	51.793.586,00	(1.330.638,00)	97,50
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0003	5	BELANJA DAERAH	53.124.224,00	51.793.586,00	(1.330.638,00)	97,50
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0001		UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Batam	436.240.848,00	428.455.250,00	(7.785.598,00)	98,22
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0001	5	BELANJA DAERAH	436.240.848,00	428.455.250,00	(7.785.598,00)	98,22
2.08			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	20.498.093.378,00	19.958.495.331,91	(539.598.046,09)	97,37
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	20.262.613.378,00	19.723.934.501,91	(538.678.876,09)	97,34
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	5	BELANJA DAERAH	20.262.613.378,00	19.723.934.501,91	(538.678.876,09)	97,34
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0001		UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	235.480.000,00	234.560.830,00	(919.170,00)	99,61
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0001	5	BELANJA DAERAH	235.480.000,00	234.560.830,00	(919.170,00)	99,61
2.09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	24.766.009.059,00	22.292.246.948,00	(2.473.762.111,50)	90,01
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	24.766.009.059,00	22.292.246.948,00	(2.473.762.111,50)	90,01
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	5	BELANJA DAERAH	24.766.009.059,00	22.292.246.948,00	(2.473.762.111,50)	90,01
2.10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	1.048.980.723,00	1.042.951.731,00	(6.028.992,00)	99,43
2.10	1.03.2.10.0.00.03.0000		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	1.048.980.723,00	1.042.951.731,00	(6.028.992,00)	99,43
2.10	1.03.2.10.0.00.03.0000	5	BELANJA DAERAH	1.048.980.723,00	1.042.951.731,00	(6.028.992,00)	99,43
2.11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	36.111.720.447,00	33.235.468.363,00	(2.876.252.084,00)	92,04
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	35.503.115.160,00	32.693.838.223,00	(2.809.276.937,00)	92,09
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	5	BELANJA DAERAH	35.503.115.160,00	32.693.838.223,00	(2.809.276.937,00)	92,09
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0002		UPTD KPHP Unit I Karimun	60.324.200,00	54.594.500,00	(5.729.700,00)	90,50
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0002	5	BELANJA DAERAH	60.324.200,00	54.594.500,00	(5.729.700,00)	90,50
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0004		UPTD KPHP Unit III Lingga	39.162.800,00	26.449.280,00	(12.713.520,00)	67,54
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0004	5	BELANJA DAERAH	39.162.800,00	26.449.280,00	(12.713.520,00)	67,54
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0005		UPTD KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang	59.903.760,00	58.373.239,00	(1.530.521,00)	97,45
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0005	5	BELANJA DAERAH	59.903.760,00	58.373.239,00	(1.530.521,00)	97,45
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0006		UPTD KPHP Unit V Natuna	66.807.380,00	61.670.238,00	(5.137.142,00)	92,31
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0006	5	BELANJA DAERAH	66.807.380,00	61.670.238,00	(5.137.142,00)	92,31
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0007		UPTD KPHP Unit VI Kepulauan Anambas	111.499.780,00	108.925.475,00	(2.574.305,00)	97,69
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0007	5	BELANJA DAERAH	111.499.780,00	108.925.475,00	(2.574.305,00)	97,69
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0003		UPTD KPHP Unit II Batam	64.106.455,00	63.373.367,00	(733.088,00)	98,86
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0003	5	BELANJA DAERAH	64.106.455,00	63.373.367,00	(733.088,00)	98,86
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0001		UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	206.800.912,00	168.244.041,00	(38.556.871,00)	81,36
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0001	5	BELANJA DAERAH	206.800.912,00	168.244.041,00	(38.556.871,00)	81,36
2.12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	326.308.420,00	326.307.895,00	(525,00)	100,00
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	326.308.420,00	326.307.895,00	(525,00)	100,00
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	5	BELANJA DAERAH	326.308.420,00	326.307.895,00	(525,00)	100,00
2.13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	17.168.500.302,00	15.775.273.011,00	(1.393.227.291,00)	91,88

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	17.168.500.302,00	15.775.273.011,00	(1.393.227.291,00)	91,88
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	5	BELANJA DAERAH	17.168.500.302,00	15.775.273.011,00	(1.393.227.291,00)	91,88
2.14			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4.188.772.374,00	2.182.372.362,00	(2.006.400.012,00)	52,10
2.14	2.08.2.14.0.00.08.0000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	4.188.772.374,00	2.182.372.362,00	(2.006.400.012,00)	52,10
2.14	2.08.2.14.0.00.08.0000	5	BELANJA DAERAH	4.188.772.374,00	2.182.372.362,00	(2.006.400.012,00)	52,10
2.15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	47.863.251.061,00	43.942.136.119,49	(3.921.114.941,51)	91,81
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		Dinas Perhubungan	45.471.840.708,00	41.637.790.274,49	(3.834.050.434,14)	91,57
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	45.471.840.708,00	41.637.790.274,49	(3.834.050.434,14)	91,57
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0001		UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah I Kota Batam	337.993.837,00	332.596.853,00	(5.396.984,71)	98,40
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0001	5	BELANJA DAERAH	337.993.837,00	332.596.853,00	(5.396.984,71)	98,40
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0002		UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah II Kabupaten Karimun	370.559.736,00	366.642.268,00	(3.917.468,56)	98,94
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0002	5	BELANJA DAERAH	370.559.736,00	366.642.268,00	(3.917.468,56)	98,94
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0003		UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah III Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan	883.917.117,00	856.453.391,00	(27.463.726,72)	96,89
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0003	5	BELANJA DAERAH	883.917.117,00	856.453.391,00	(27.463.726,72)	96,89
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0004		UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah IV Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas	437.351.482,00	423.155.793,00	(14.195.689,90)	96,75
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0004	5	BELANJA DAERAH	437.351.482,00	423.155.793,00	(14.195.689,90)	96,75
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0005		UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah V Kabupaten Lingga	361.588.177,00	325.497.540,00	(36.090.637,48)	90,02
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0005	5	BELANJA DAERAH	361.588.177,00	325.497.540,00	(36.090.637,48)	90,02
2.16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	36.016.895.744,00	34.492.959.301,00	(1.523.936.443,00)	95,77
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	36.016.895.744,00	34.492.959.301,00	(1.523.936.443,00)	95,77
2.16	2.16.0.00.0.00.13.0000	5	BELANJA DAERAH	36.016.895.744,00	34.492.959.301,00	(1.523.936.443,00)	95,77
2.17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	21.236.276.208,00	19.253.917.261,00	(1.982.358.947,00)	90,67
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	21.236.276.208,00	19.253.917.261,00	(1.982.358.947,00)	90,67
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	5	BELANJA DAERAH	21.236.276.208,00	19.253.917.261,00	(1.982.358.947,00)	90,67
2.18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	15.043.835.367,00	14.748.383.021,00	(295.452.346,00)	98,04
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	15.043.835.367,00	14.748.383.021,00	(295.452.346,00)	98,04
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	5	BELANJA DAERAH	15.043.835.367,00	14.748.383.021,00	(295.452.346,00)	98,04
2.19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	39.703.724.865,00	38.551.923.977,00	(1.151.800.888,00)	97,10
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000		Dinas Kepemudaan dan Olahraga	39.703.724.865,00	38.551.923.977,00	(1.151.800.888,00)	97,10
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	5	BELANJA DAERAH	39.703.724.865,00	38.551.923.977,00	(1.151.800.888,00)	97,10
2.20			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	82.222.400,00	81.562.515,00	(659.885,00)	99,20
2.20	2.16.0.00.0.00.13.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	82.222.400,00	81.562.515,00	(659.885,00)	99,20
2.20	2.16.0.00.0.00.13.0000	5	BELANJA DAERAH	82.222.400,00	81.562.515,00	(659.885,00)	99,20
2.21			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	134.534.834,00	129.352.024,00	(5.182.810,00)	96,15
2.21	2.16.0.00.0.00.13.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	134.534.834,00	129.352.024,00	(5.182.810,00)	96,15
2.21	2.16.0.00.0.00.13.0000	5	BELANJA DAERAH	134.534.834,00	129.352.024,00	(5.182.810,00)	96,15
2.22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	17.979.422.492,00	17.608.163.887,00	(371.258.605,00)	97,94

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000		Dinas Kebudayaan	17.979.422.492,00	17.608.163.887,00	(371.258.605,00)	97,94
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	5	BELANJA DAERAH	17.979.422.492,00	17.608.163.887,00	(371.258.605,00)	97,94
2.23			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	19.969.205.094,00	19.417.434.381,02	(551.770.713,68)	97,24
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000		Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	19.675.743.898,00	19.134.984.934,02	(540.758.964,68)	97,25
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	5	BELANJA DAERAH	19.675.743.898,00	19.134.984.934,02	(540.758.964,68)	97,25
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0001		UPT Perpustakaan Muhammad Sani	293.461.196,00	282.449.447,00	(11.011.749,00)	96,25
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0001	5	BELANJA DAERAH	293.461.196,00	282.449.447,00	(11.011.749,00)	96,25
2.24			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	165.783.721,00	152.050.766,00	(13.732.955,30)	91,72
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000		Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	165.783.721,00	152.050.766,00	(13.732.955,30)	91,72
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000	5	BELANJA DAERAH	165.783.721,00	152.050.766,00	(13.732.955,30)	91,72
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	172.109.228.253,00	145.369.936.136,24	(26.739.292.117,26)	84,46
3.25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	69.852.198.766,00	67.666.654.729,83	(2.185.544.036,17)	96,87
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000		Dinas Kelautan dan Perikanan	59.970.291.443,00	58.699.374.822,83	(1.270.916.620,17)	97,88
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	5	BELANJA DAERAH	59.970.291.443,00	58.699.374.822,83	(1.270.916.620,17)	97,88
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0001		Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Anambas	400.886.878,00	342.863.535,00	(58.023.343,00)	85,53
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0001	5	BELANJA DAERAH	400.886.878,00	342.863.535,00	(58.023.343,00)	85,53
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0002		Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Natuna	956.588.944,00	927.218.516,00	(29.370.428,00)	96,93
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0002	5	BELANJA DAERAH	956.588.944,00	927.218.516,00	(29.370.428,00)	96,93
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0003		Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Lingga	1.006.371.797,00	970.726.423,00	(35.645.374,00)	96,46
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0003	5	BELANJA DAERAH	1.006.371.797,00	970.726.423,00	(35.645.374,00)	96,46
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0004		Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Karimun	1.168.654.562,00	1.139.056.602,00	(29.597.960,00)	97,47
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0004	5	BELANJA DAERAH	1.168.654.562,00	1.139.056.602,00	(29.597.960,00)	97,47
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0005		Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Batam	922.960.472,00	913.970.332,00	(8.990.140,00)	99,03
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0005	5	BELANJA DAERAH	922.960.472,00	913.970.332,00	(8.990.140,00)	99,03
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0008		UPTD Balai Benih Ikan	2.353.667.721,00	2.258.445.208,00	(95.222.513,00)	95,95
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0008	5	BELANJA DAERAH	2.353.667.721,00	2.258.445.208,00	(95.222.513,00)	95,95
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0007		UPTD Balai Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan (BPMP2KP)	678.841.381,00	676.799.848,00	(2.041.533,00)	99,70
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0007	5	BELANJA DAERAH	678.841.381,00	676.799.848,00	(2.041.533,00)	99,70
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0006		UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai	2.393.935.568,00	1.738.199.443,00	(655.736.125,00)	72,61
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0006	5	BELANJA DAERAH	2.393.935.568,00	1.738.199.443,00	(655.736.125,00)	72,61
3.26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	27.718.278.477,00	26.240.716.090,00	(1.477.562.387,00)	94,67
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pariwisata	27.718.278.477,00	26.240.716.090,00	(1.477.562.387,00)	94,67
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	27.718.278.477,00	26.240.716.090,00	(1.477.562.387,00)	94,67
3.27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	16.734.795.184,00	7.227.562.621,00	(9.507.232.563,50)	43,19
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	11.438.074.626,00	2.351.766.221,00	(9.086.308.405,50)	20,56
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	5	BELANJA DAERAH	11.438.074.626,00	2.351.766.221,00	(9.086.308.405,50)	20,56
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0002		UPT Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan	565.063.587,00	238.629.394,00	(326.434.193,00)	42,23
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0002	5	BELANJA DAERAH	565.063.587,00	238.629.394,00	(326.434.193,00)	42,23
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0001		UPT Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (BP2SPTPHP)	4.731.656.971,00	4.637.167.006,00	(94.489.965,00)	98,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0001	5	BELANJA DAERAH	4.731.656.971,00	4.637.167.006,00	(94.489.965,00)	98,00
3.28			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	1.550.373.467,00	1.336.997.767,00	(213.375.700,00)	86,24

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.330.373.467,00	1.119.704.967,00	(210.668.500,00)	84,16
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	5	BELANJA DAERAH	1.330.373.467,00	1.119.704.967,00	(210.668.500,00)	84,16
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0002		UPTD KPHP Unit I Karimun	30.000.000,00	29.850.000,00	(150.000,00)	99,50
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0002	5	BELANJA DAERAH	30.000.000,00	29.850.000,00	(150.000,00)	99,50
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0004		UPTD KPHP Unit III Lingga	30.000.000,00	28.050.000,00	(1.950.000,00)	93,50
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0004	5	BELANJA DAERAH	30.000.000,00	28.050.000,00	(1.950.000,00)	93,50
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0005		UPTD KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang	42.500.000,00	42.240.800,00	(259.200,00)	99,39
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0005	5	BELANJA DAERAH	42.500.000,00	42.240.800,00	(259.200,00)	99,39
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0006		UPTD KPHP Unit V Natuna	45.000.000,00	44.914.800,00	(85.200,00)	99,81
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0006	5	BELANJA DAERAH	45.000.000,00	44.914.800,00	(85.200,00)	99,81
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0007		UPTD KPHP Unit VI Kepulauan Anambas	30.000.000,00	30.000.000,00	0	100,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0007	5	BELANJA DAERAH	30.000.000,00	30.000.000,00	0	100,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0003		UPTD KPHP Unit II Batam	42.500.000,00	42.237.200,00	(262.800,00)	99,38
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0003	5	BELANJA DAERAH	42.500.000,00	42.237.200,00	(262.800,00)	99,38
3.29			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	33.876.262.600,00	21.134.203.211,41	(12.742.059.388,59)	62,39
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	33.876.262.600,00	21.134.203.211,41	(12.742.059.388,59)	62,39
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	5	BELANJA DAERAH	33.876.262.600,00	21.134.203.211,41	(12.742.059.388,59)	62,39
3.30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	2.158.809.289,00	2.153.616.766,00	(5.192.523,00)	99,76
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.158.809.289,00	2.153.616.766,00	(5.192.523,00)	99,76
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	5	BELANJA DAERAH	2.158.809.289,00	2.153.616.766,00	(5.192.523,00)	99,76
3.31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	20.198.510.470,00	19.590.382.151,00	(608.128.319,00)	96,99
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	20.198.510.470,00	19.590.382.151,00	(608.128.319,00)	96,99
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	5	BELANJA DAERAH	20.198.510.470,00	19.590.382.151,00	(608.128.319,00)	96,99
3.32			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	20.000.000,00	19.802.800,00	(197.200,00)	99,01
3.32	2.07.3.32.0.00.07.0000		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	20.000.000,00	19.802.800,00	(197.200,00)	99,01
3.32	2.07.3.32.0.00.07.0000	5	BELANJA DAERAH	20.000.000,00	19.802.800,00	(197.200,00)	99,01
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	542.012.803.336,00	509.945.906.428,23	(32.066.896.907,77)	94,08
4.01			SEKRETARIAT DAERAH	385.655.474.580,00	368.677.964.441,23	(16.977.510.138,77)	95,60
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002		Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.243.173.252,00	4.212.198.024,00	(30.975.228,00)	99,27
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	5	BELANJA DAERAH	4.243.173.252,00	4.212.198.024,00	(30.975.228,00)	99,27
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004		Biro Kesejahteraan Rakyat	157.255.836.765,00	151.890.719.111,00	(5.365.117.654,00)	96,59
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	5	BELANJA DAERAH	157.255.836.765,00	151.890.719.111,00	(5.365.117.654,00)	96,59
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001		Biro Hukum	3.281.888.137,00	2.889.204.096,00	(392.684.041,29)	88,03
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	5	BELANJA DAERAH	3.281.888.137,00	2.889.204.096,00	(392.684.041,29)	88,03
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005		Biro Perekonomian dan Pembangunan	3.123.391.853,00	3.050.883.564,00	(72.508.289,00)	97,68
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	5	BELANJA DAERAH	3.123.391.853,00	3.050.883.564,00	(72.508.289,00)	97,68
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008		Biro Pengadaan Barang/Jasa	2.296.375.876,00	2.285.150.268,00	(11.225.608,00)	99,51
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	5	BELANJA DAERAH	2.296.375.876,00	2.285.150.268,00	(11.225.608,00)	99,51
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006		Biro Umum	201.548.624.822,00	190.718.403.762,23	(10.830.221.060,31)	94,63
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	5	BELANJA DAERAH	201.548.624.822,00	190.718.403.762,23	(10.830.221.060,31)	94,63
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007		Biro Administrasi Pimpinan	12.003.455.423,00	11.743.835.725,00	(259.619.698,00)	97,84
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	5	BELANJA DAERAH	12.003.455.423,00	11.743.835.725,00	(259.619.698,00)	97,84
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003		Biro Organisasi	1.902.728.451,00	1.887.569.891,00	(15.158.560,17)	99,20
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	5	BELANJA DAERAH	1.902.728.451,00	1.887.569.891,00	(15.158.560,17)	99,20

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
4.02			SEKRETARIAT DPRD	156.357.328.756,00	141.267.941.987,00	(15.089.386.769,00)	90,35
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000		Sekretariat DPRD	156.357.328.756,00	141.267.941.987,00	(15.089.386.769,00)	90,35
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	5	BELANJA DAERAH	156.357.328.756,00	141.267.941.987,00	(15.089.386.769,00)	90,35
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.133.238.665.769,00	1.046.690.978.423,51	(86.547.687.346,49)	92,36
5.01			PERENCANAAN	32.833.472.462,00	32.587.868.882,00	(245.603.580,57)	99,25
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	32.833.472.462,00	32.587.868.882,00	(245.603.580,57)	99,25
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5	BELANJA DAERAH	32.833.472.462,00	32.587.868.882,00	(245.603.580,57)	99,25
5.02			KEUANGAN	1.038.416.646.256,00	954.766.579.169,51	(83.650.067.086,49)	91,94
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000		Badan Keuangan dan Aset Daerah	912.103.051.023,00	836.155.098.479,31	(75.947.952.543,69)	91,67
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5	BELANJA DAERAH	912.103.051.023,00	836.155.098.479,31	(75.947.952.543,69)	91,67
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000		Badan Pendapatan Daerah	108.768.933.389,00	102.689.630.031,20	(6.079.303.357,80)	94,41
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5	BELANJA DAERAH	108.768.933.389,00	102.689.630.031,20	(6.079.303.357,80)	94,41
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0001		UPT PPD Batam Centre	3.786.262.530,00	3.143.115.497,00	(643.147.033,00)	83,01
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0001	5	BELANJA DAERAH	3.786.262.530,00	3.143.115.497,00	(643.147.033,00)	83,01
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0003		UPT PPD Bintan	1.628.754.821,00	1.470.954.766,00	(157.800.055,00)	90,31
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0003	5	BELANJA DAERAH	1.628.754.821,00	1.470.954.766,00	(157.800.055,00)	90,31
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0004		UPT PPD Karimun	1.513.037.545,00	1.417.553.013,00	(95.484.532,00)	93,69
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0004	5	BELANJA DAERAH	1.513.037.545,00	1.417.553.013,00	(95.484.532,00)	93,69
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0005		UPT PPD Lingga	958.629.448,00	940.189.896,00	(18.439.552,00)	98,08
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0005	5	BELANJA DAERAH	958.629.448,00	940.189.896,00	(18.439.552,00)	98,08
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0002		UPT PPD Tanjungpinang	2.644.754.176,00	2.505.196.008,00	(139.558.168,00)	94,72
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0002	5	BELANJA DAERAH	2.644.754.176,00	2.505.196.008,00	(139.558.168,00)	94,72
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0006		UPT PPD Natuna	995.857.280,00	935.783.224,00	(60.074.056,00)	93,97
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0006	5	BELANJA DAERAH	995.857.280,00	935.783.224,00	(60.074.056,00)	93,97
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0007		UPT PPD Anambas	662.688.059,00	621.110.134,00	(41.577.925,00)	93,73
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0007	5	BELANJA DAERAH	662.688.059,00	621.110.134,00	(41.577.925,00)	93,73
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0008		UPT PPD Batu Aji	1.262.176.745,00	1.092.170.417,00	(170.006.328,00)	86,53
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0008	5	BELANJA DAERAH	1.262.176.745,00	1.092.170.417,00	(170.006.328,00)	86,53
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0009		UPT PPD Kijang	647.703.948,00	568.374.069,00	(79.329.879,00)	87,75
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0009	5	BELANJA DAERAH	647.703.948,00	568.374.069,00	(79.329.879,00)	87,75
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0010		UPT PPD Tanjung Batu	578.055.194,00	546.109.835,00	(31.945.359,00)	94,47
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0010	5	BELANJA DAERAH	578.055.194,00	546.109.835,00	(31.945.359,00)	94,47
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0002		UPT Pemberdayaan dan Pemanfaatan Aset	2.221.372.130,00	2.128.530.596,00	(92.841.534,00)	95,82
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0002	5	BELANJA DAERAH	2.221.372.130,00	2.128.530.596,00	(92.841.534,00)	95,82
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0001		UPT Dana Bergulir	645.369.968,00	552.763.204,00	(92.606.764,00)	85,65
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0001	5	BELANJA DAERAH	645.369.968,00	552.763.204,00	(92.606.764,00)	85,65
5.03			KEPEGAWAIAN	19.120.520.906,00	18.762.730.608,00	(357.790.298,00)	98,13
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000		Badan Kepegawaian dan Korpri	19.120.520.906,00	18.762.730.608,00	(357.790.298,00)	98,13
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5	BELANJA DAERAH	19.120.520.906,00	18.762.730.608,00	(357.790.298,00)	98,13
5.04			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	16.183.217.701,00	15.453.682.273,00	(729.535.428,00)	95,49
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	16.183.217.701,00	15.453.682.273,00	(729.535.428,00)	95,49
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5	BELANJA DAERAH	16.183.217.701,00	15.453.682.273,00	(729.535.428,00)	95,49
5.05			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	743.490.996,00	742.584.939,00	(906.057,43)	99,88
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	743.490.996,00	742.584.939,00	(906.057,43)	99,88

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000	5	BELANJA DAERAH	743.490.996,00	742.584.939,00	(906.057,43)	99,88
5.06			PENGELOLAAN PERBATASAN	7.537.067.752,00	6.876.027.694,00	(661.040.058,00)	91,23
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000		Badan Pengelola Perbatasan Daerah	7.537.067.752,00	6.876.027.694,00	(661.040.058,00)	91,23
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5	BELANJA DAERAH	7.537.067.752,00	6.876.027.694,00	(661.040.058,00)	91,23
5.07			PENGELOLAAN PENGHUBUNG	18.404.249.696,00	17.501.504.858,00	(902.744.838,00)	95,09
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000		Badan Penghubung Daerah	18.404.249.696,00	17.501.504.858,00	(902.744.838,00)	95,09
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	18.404.249.696,00	17.501.504.858,00	(902.744.838,00)	95,09
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	46.909.639.743,00	45.517.169.676,00	(1.392.470.067,00)	97,03
6.01			INSPEKTORAT DAERAH	46.909.639.743,00	45.517.169.676,00	(1.392.470.067,00)	97,03
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000		Inspektorat	46.909.639.743,00	45.517.169.676,00	(1.392.470.067,00)	97,03
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	5	BELANJA DAERAH	46.909.639.743,00	45.517.169.676,00	(1.392.470.067,00)	97,03
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	185.593.956.247,00	180.159.124.503,00	(5.434.831.744,00)	97,07
8.01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	185.593.956.247,00	180.159.124.503,00	(5.434.831.744,00)	97,07
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	185.593.956.247,00	180.159.124.503,00	(5.434.831.744,00)	97,07
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	185.593.956.247,00	180.159.124.503,00	(5.434.831.744,00)	97,07
			Jumlah	(139.161.570.978,00)	(113.452.096.562,61)	25.709.474.415,39	81,53

Pada tahun 2024 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat realisasi pendapatan sebesar Rp3.958.295.361.262,68 atau sebesar 92,59% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp4.275.037.233.807,00. Beberapa realisasi pendapatan daerah yang tidak mencapai realisasi 80% dengan rincian sebagai berikut:

1. Rendahnya capaian realisasi Pajak Air Permukaan sebesar Rp1.192.208.723,00 atau sebesar 3,51% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp33.933.643.819,00 dikarenakan wajib pajak PT. Adhya Tirta Batam belum melakukan kewajiban pembayaran piutang pajak air permukaan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. PT. Adhya Tirta Batam (ATB) dinyatakan berkewajiban membayar piutang pajak air permukaan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 525K/TUN/2022 dan putusan MA atas Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan PT. ATB dimana Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (inkrah). Pemerintah Provinsi Kepulauan telah berupaya melakukan penagihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk tindakan penyitaan dan penyanderaan akan tetapi masih terbentur regulasi yang mengatur mekanisme pemberitahuan saldo rekening bank untuk keperluan penyitaan pajak daerah secara langsung dan terpisah dari ketentuan pajak pusat.
2. Tidak tercapainya realisasi Pajak Alat Berat dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp20.122.026.000,00 dikarenakan masih terbatasnya Nilai Jual Alat Berat (NJAB) sebagai dasar pengenaan pajak untuk jenis Alat Berat yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Tahun 2024, sehingga belum bisa dilakukan pemungutan.
3. Rendahnya capaian realisasi Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebesar Rp2.510.628.596,00 atau sebesar 50,40% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp4.981.200.000,00, dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Capaian realisasi Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp1.855.823.501,00 atau sebesar 53,31% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp3.481.200.000,00. Hal ini disebabkan Pelabuhan Penyeberangan Selat Belia yang dikelola oleh UPT Pelabuhan Wilayah II Kabupaten Karimun untuk sementara waktu tidak dapat beroperasi dikarenakan adanya perbaikan di sisi dermaga. Selain itu 2 (dua) pelabuhan yang telah diserahkan oleh Kementerian Perhubungan kepada

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui P3D (Pengalihan Personil, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen) yaitu Pelabuhan Dabo di Kabupaten Lingga dan Pelabuhan Berhala di Kabupaten Kepulauan Anambas belum dapat dioptimalkan dikarenakan terbatasnya ketersediaan SDM.

- b. Capaian realisasi Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp654.805.095,00 atau 43,65% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.500.000.000,00. Hal ini disebabkan menurunnya tingkat pemanfaatan *cold storage* oleh pelaku usaha perikanan. Minimnya volume ikan yang disimpan di fasilitas *cold storage* mengindikasikan turunnya aktivitas bongkar muat dan distribusi hasil perikanan di pelabuhan, yang secara langsung berdampak pada menurunnya penerimaan dari retribusi jasa pelayanan kepelabuhan. Di samping itu sebagian besar Pelaku Usaha dan Masyarakat telah memiliki *Freezer* dan membangun *Air Blast Freezer* (ABF) serta *Cold Storage* sendiri untuk penyimpanan ikan. Penurunan ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal, seperti berkurangnya hasil tangkapan nelayan, cuaca ekstrem, dan musim ikan yang terjadi hanya 2 (dua) kali yaitu bulan Mei dan Oktober.
4. Rendahnya capaian realisasi Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp71.784.845,00 atau sebesar 35,65% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp201.371.000,00 dikarenakan kondisi telur ikan yang tidak bagus dan kualitas air yang buruk akibat cuaca yang tidak menentu sehingga benih ikan yang banyak mati di ukuran ± 30 hari.
5. Rendahnya capaian realisasi Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebesar Rp1.135.607.700,00 atau 36,33% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp3.125.387.254,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Capaian realisasi Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan sebesar Rp45.171.200,00 atau sebesar 13,88% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp325.387.254,00 dikarenakan menurunnya pemeriksaan kesehatan hewan ternak pada UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan terutama pemeriksaan kesehatan ternak babi yang dikelola oleh wajib retribusi PT. Indotirta Suaka yang bergerak di bidang usaha ekspor hewan ternak babi yang berlokasi di pulau bulan kota batam sebagai salah satu perusahaan penyumbang terbesar Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah. Hal ini disebabkan terjangkitnya hewan ternak babi akibat wabah penyakit *African Swine Fever* (ASF) sehingga mengakibatkan terhentinya ekspor babi ke singapura.
 - b. Capaian realisasi Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp1.090.436.500,00 atau sebesar 38,94% dari target yang ditetapkan dalam APBD Rp2.800.000.000,00 khususnya pada sektor layanan pengujian laboratorium bahan konstruksi. Hal ini disebabkan keterbatasan pada alat dan mesin uji laboratorium yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan. Kondisi ini berdampak pada penurunan kapasitas layanan karena tidak semua jenis uji dapat dilaksanakan, penurunan jumlah pelanggan pihak ketiga (kontraktor atau konsultan) beralih ke laboratorium lain.
6. Rendahnya capaian realisasi Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi sebesar Rp5.009.217.000,00 atau sebesar 66,79% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp7.500.000.000,00 dikarenakan pendapatan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) didominasi oleh wajib retribusi PT. Bintang Alumina Indonesia dimana terhitung mulai tanggal 1 Juli 2024 terdapat perubahan signifikan dalam sistem pengajuan perpanjangan TKA melalui aplikasi online yang disediakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI. Dalam *update* terbaru sistem tersebut, pengajuan perpanjangan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di PT. Bintang Alumina Indonesia menggunakan menu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang.

Konsekuensi dari perubahan yang ada pada sistem tersebut adalah pengajuan perpanjangan TKA oleh PT. BAI hanya menggunakan 1 (satu) lokasi yaitu Kabupaten Bintan dan tidak lagi masuk sebagai pendapatan retribusi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

7. Tidak tercapainya realisasi Retribusi Pertambangan Rakyat pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tidak terealisasi dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp771.562.500,00 dikarenakan Pengurusan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di wilayah laut memerlukan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) yang merupakan salah satu persyaratan dalam pemberian Pengurusan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sedangkan Pengurusan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di wilayah darat belum memiliki dokumen teknis yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah sebelum diberikan IPR. Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 174.K/MB.01/MEM.B/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Izin Pertambangan Rakyat (IPERA) bahwa komponen biaya IPERA terdiri dari biaya pengelolaan wilayah, biaya pengelolaan perusahaan dan biaya pengelolaan lingkungan. Untuk komponen biaya IPERA tersebut perlu ditetapkan dalam suatu peraturan daerah yang memuat besaran dari tiap-tiap komponen biaya, namun Provinsi Kepulauan Riau belum menetapkan peraturan daerah tersebut.
8. Rendahnya capaian realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terealisasi sebesar Rp1.904.909.335,00 atau 5,60% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp34.003.224.423,00 dikarenakan kondisi keuangan 3 (tiga) BUMD mengalami kerugian yaitu PT. Pelabuhan Kepri sebesar Rp1.520.598.058,00, dan PDAM Tirta Kepri sebesar Rp3.122.555.359,00, serta PT. Pembangunan Kepri yang secara akumulasi tahunan juga masih mengalami kerugian, sehingga ketiga BUMD tersebut berdasarkan hasil RUPS tidak membagikan dividen kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024.

Pada tahun 2024 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat realisasi belanja daerah sebesar Rp4.071.747.457.825,29 atau sebesar 92,24% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp4.414.198.804.785,00. Beberapa realisasi belanja daerah yang tidak mencapai realisasi 80% secara umum disebabkan antara lain:

1. Rendahnya capaian realisasi Belanja Subsidi terealisasi sebesar Rp944.301.180,00 atau sebesar 67,45% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.400.000.000,00 dikarenakan masa berlaku Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan PT. Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) tentang Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Subsidi Margin telah berakhir di awal Oktober 2024 dan harus dilakukan revisi PKS. Oleh sebab itu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan proses pembaharuan Kesepakatan Bersama dan PKS yang waktu pelaksanaannya sudah mendekati akhir Tahun Anggaran 2024 sehingga tidak dapat terserap secara maksimal untuk belanja subsidi margin 0% kepada Pelaku Usaha UMKM.
2. Rendahnya capaian realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp4.002.925.000,00 atau sebesar 78,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.101.365.000,00 dikarenakan keterlambatan proses administrasi yang tidak selesai tepat waktu.
3. Rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Tanah sebesar Rp920.100.000,00 atau sebesar 11,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.021.100.000,00 dikarenakan tidak terealisasinya pengadaan tanah untuk asrama mahasiswa kepri di Jakarta sebesar Rp7.100.000.000,00.
4. Rendahnya capaian realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp2.065.423.140,00 atau sebesar 43,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.773.672.048,00. Belanja Tidak Terduga (BTT) merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Realisasi Belanja Tidak Terduga dialokasikan untuk mengantisipasi adanya bencana yang harus segera diatasi dan untuk pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka

penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

3.3. Kebijakan Anggaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Dalam pelaksanaan APBD Provinsi Kepulauan Riau TA 2024, terdapat beberapa kali pergeseran anggaran yang dilakukan melalui Perubahan Perda tentang APBD dan Perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD dikarenakan adanya beberapa kebijakan Pemerintah Pusat yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, adanya kebutuhan anggaran belanja bantuan keuangan khusus, belanja yang bersifat mengikat berupa pemenuhan belanja pegawai. Pergeseran dan Perubahan Anggaran Tahun 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pergeseran Pertama ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Pergeseran dilakukan karena penganggaran dana transfer ke daerah penggunaannya belum sesuai dengan petunjuk teknis tahun 2024 yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik.
2. Pergeseran Kedua ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau nomor 14 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, yang dikarenakan penganggaran dana transfer ke daerah penggunaannya belum sesuai dengan petunjuk teknis tahun 2024 yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, dan diperuntukan untuk bantuan keuangan khusus dalam rangka penanganan dampak bencana alam banjir lahar dingin, banjir bandang dan longsor di Provinsi Sumatera Barat.
3. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang disajikan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan kedalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
4. Pergeseran Pertama setelah Perubahan APBD TA 2024 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 53 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Pergeseran dilakukan karena adanya Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dan Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Dana Pelayanan Kepariwisata Tahun Anggaran 2024.

3.4. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

Sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk membangun akuntabilitas kinerja ini, pengembangan *e-performance* adalah bagian kunci untuk mendorong pengendalian, evaluasi atas capaian kinerja satuan kerja perangkat daerah setiap triwulan secara transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik.

Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan dan RB No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Pengukuran kinerja mencakup seluruh kinerja sasaran yang berdasarkan dokumen penetapan Perjanjian Kinerja Perubahan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 yang ditargetkan untuk dicapai.

Apabila semakin tinggi realisasi indikator menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik diukur dengan menggunakan rumus:

$$\text{CAPAIAN KINERJA} = \frac{\text{REALISASI}}{\text{TARGET}} \times 100\%$$

Sedangkan semakin tinggi realisasi indikator menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah diukur dengan menggunakan rumus:

$$\text{CAPAIAN KINERJA} = \frac{(2 \times \text{TARGET}) - \text{REALISASI}}{\text{TARGET}} \times 100\%$$

Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori sebagai berikut:

Tabel 3.3 Skala Pengukuran Kategori

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	> 100%	Sangat baik
3	75% s.d 100%	Baik
2	55% s.d 75%	Cukup
1	< 55%	Kurang

Berikut sasaran dan kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang dilakukan evaluasi kinerjanya sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Sasaran Staregis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	5,0 – 5,9 %	5,02%	100,40%
		PDRB Per Kapita			
		A. PDRB Per Kapita ADHK	87,76 Juta Rupiah	96,16 Juta Rupiah	109%
		B. PDRB Per Kapita ADHB	143,34 Juta RUpiah	161,42 Juta Rupiah	112%
		Indeks Gini	0,323 Indeks	0,357 Indeks	89%
2	Menurunnya Kemiskinan dan Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,54%	6,39%	115,25%
3	Penurunan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	70,18 Indeks	75,05 Indeks	106%

No	Sasaran Staregis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
4	Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif	Indeks Reformasi Birokrasi	70,97 Indeks	82,47 Indeks	116%
5	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia	77,04 Indeks	79,89 Indeks	104%
6	Meningkatnya Pemerataan Mutu dan Akses Layanan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	100%	85,56%	85,56%
7	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,55 Indeks	93,96 Indeks	100,49%
8	Penguatan Jaring Pengaman Sosial	Angka Kemiskinan	5,69%	4,78%	115,99%
9	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Stunting	14,00%	16,80%	80%
10	Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian Antar Pulau	Rasio Konektivitas	0,55 Rasio	0,59 Rasio	107%
11	Peningkatan Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya, dan Harmoni Masyarakat	Indeks Pembangunan Kebudayaan	55,60 Indeks	59,80 Indeks	108%
12	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar	Rasio Elektrifikasi	98,10 Rasio	98,19 Rasio	100,09%
13	Peningkatan Pembangunan Konektivitas Antar Pulau dan Kawasan Pesisir	Persentase Jalan Kondisi Mantap	80,94%	80,87%	99,91%

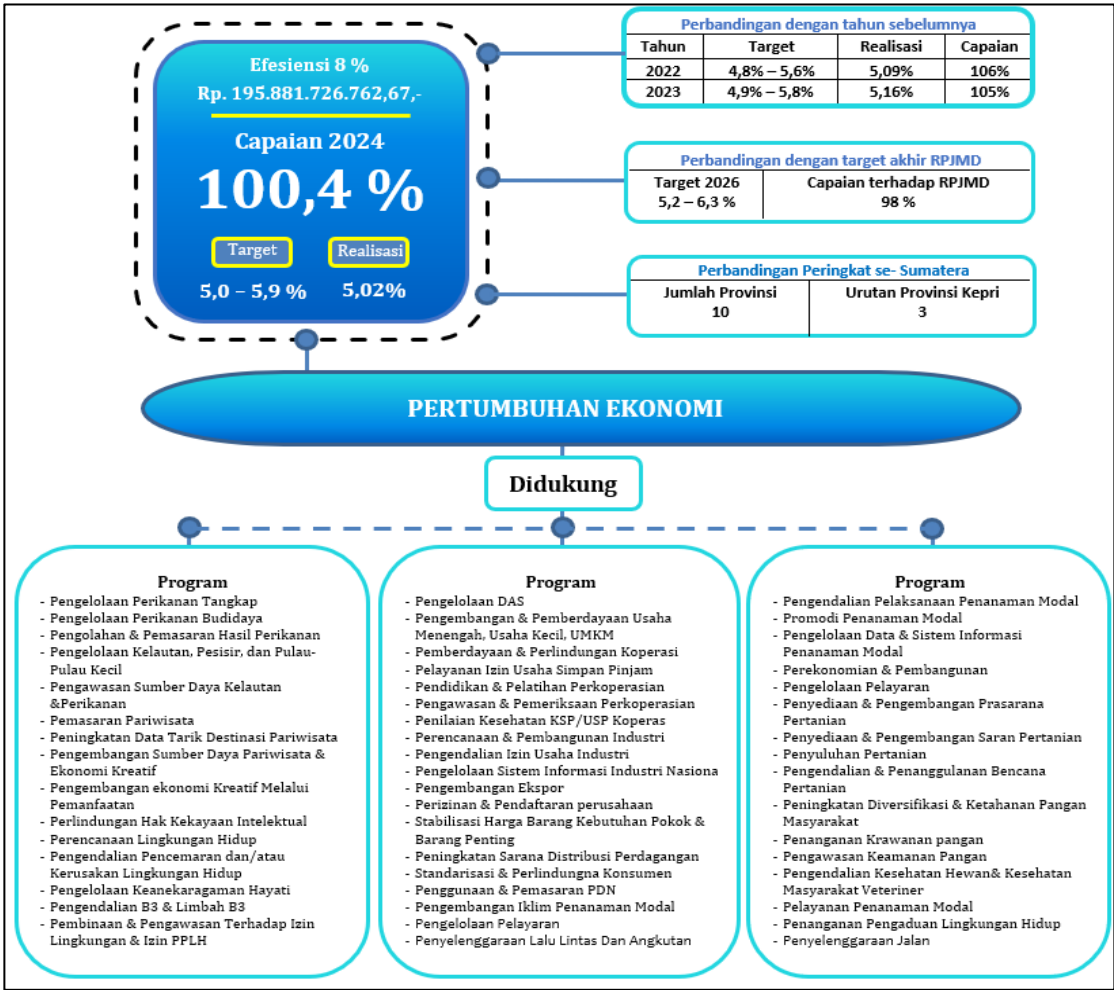
3.5. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Analisis pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan target kinerja yang telah ditetapkan, analisis atas pencapaian sasaran pada bagian ini dilakukan dengan melihat realisasi pelaksanaan program untuk setiap bidang kewenangan. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gaps*) karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan.

Analisis dalam laporan ini dilakukan per indikator kinerja berdasarkan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Provinsi Kepulauan yang ditetapkan pada bulan Januari tahun 2024. Dengan ini disampaikan analisa capaian kinerja organisasi yang diukur berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 sebagai berikut:

3.5.1. Sasaran Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

3.5.1.1. Pertumbuhan Ekonomi



Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah secara berkelanjutan menuju keadaan yang lebih baik dalam jangka waktu tertentu. Indeks Pertumbuhan Ekonomi pada Tahun 2024 sudah baik dengan realisasi kinerja sebesar 5,02% dari target sebesar 5,0 – 5,9% sehingga capain kinerja mencapai 104%.

Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah, khususnya dalam rangka pengembangan bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi di suatu wilayah tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan.

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional, dan transformasi kegiatan perekonomian dari primer ke sekunder dan tersier.

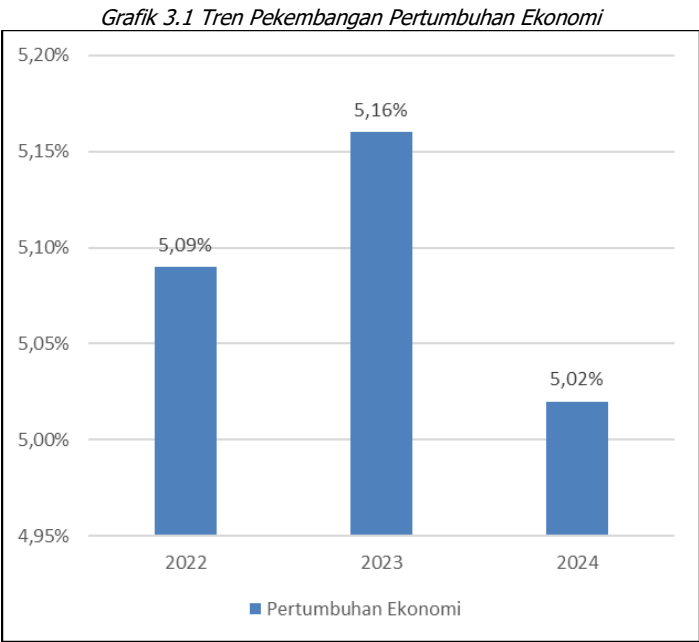
Tema RKP Tahun 2024 adalah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Adapun 7 prioritas pembangunan nasional tahun 2022 sebagai pedoman dalam penyusunan prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa

- 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
- 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

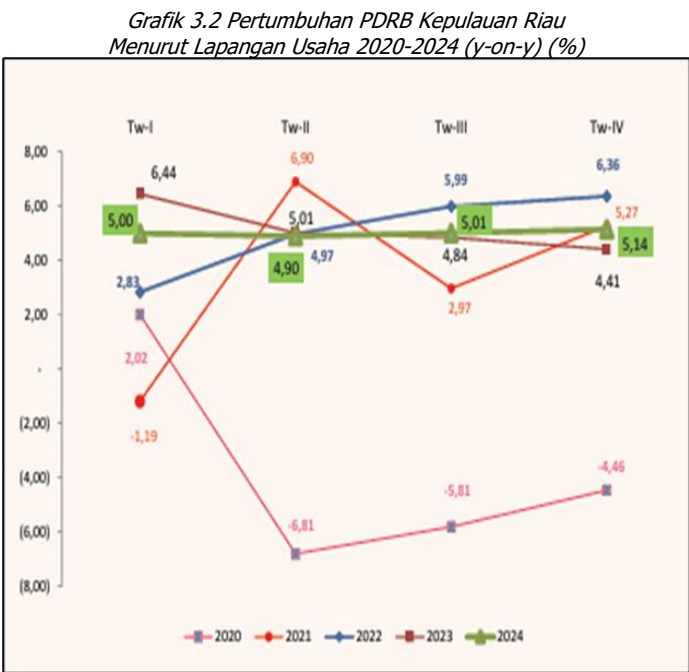
Percepatan pemulihan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan pertumbuhan maksimal. Realisasi indikator pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 sebesar 5,02% dengan target indikator yang telah ditetapkan sebesar 5,0 – 5,9% sehingga capaian kinerja sebesar 100,4% atau dalam kategori **Sangat Baik**.

Realisasi Kinerja Pertumbuhan Ekonomi dilihat dari beberapa tahun sebelumnya mengalami penurunan, hal tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Sumber : Biro Ekbang Provinsi Kepulauan Riau

Pertumbuhan PDRB Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha

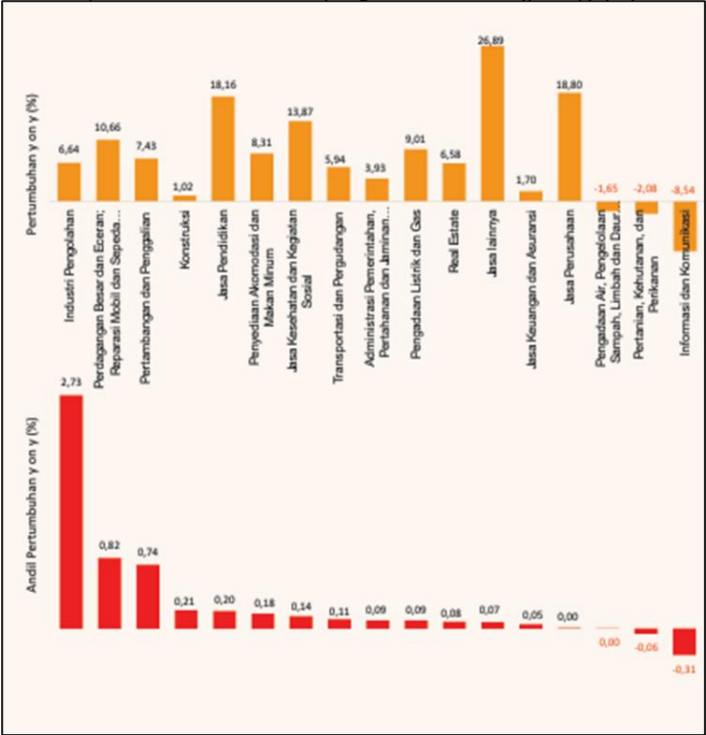


Sumber : Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Perekonomian Kepulauan Riau triwulan IV-2024 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya tumbuh sebesar 5,14 persen, tumbuh lebih cepat dibanding pertumbuhan triwulan IV-2023 (y-on-y) yang tumbuh sebesar 4,41 persen. Pertumbuhan tertinggi *year on year* pada triwulan IV-2024 dicapai oleh Jasa Lainnya sebesar 26,89 persen; diikuti Jasa Perusahaan sebesar 18,80 persen; dan kategori Jasa Pendidikan sebesar 18,16 persen.

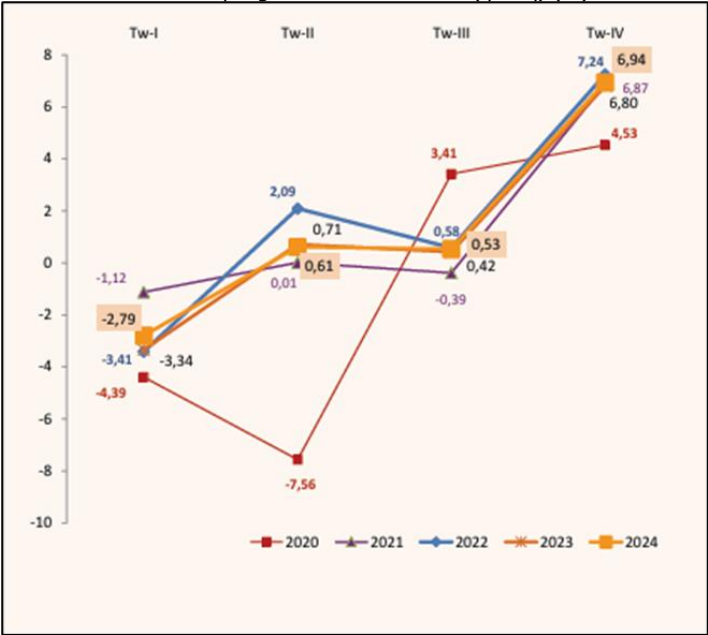
Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau triwulan IV-2024 secara *year on year*, Industri Pengolahan memberikan andil pertumbuhan tertinggi sebesar 2,73 persen; diikuti kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,82 persen; dan kategori Pertambangan dan Penggalian sebesar 0,74 persen.

Grafik 3.3 Pertumbuhan dan Andil Pertumbuhan PDRB Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha 2024 (y-on-y) (%)



Sumber : Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Grafik 3.4 Pertumbuhan PDRB Triwulanan Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha 2020-2024 (q-to-q) (%)



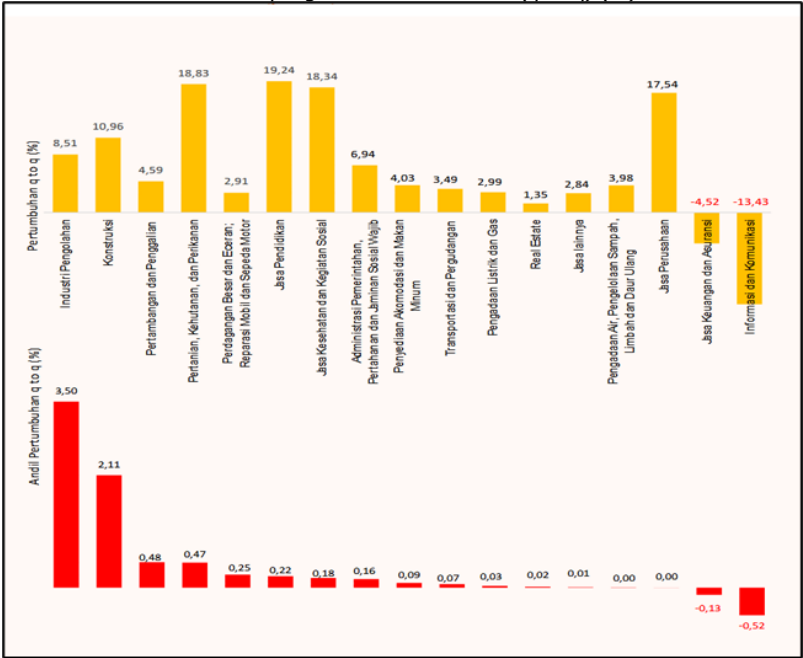
Sumber : Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Ekonomi Kepulauan Riau triwulan IV-2024 tumbuh sebesar 6,94 persen bila dibandingkan dengan triwulan III-2024 (q-to-q). Kategori yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah kategori Jasa Pendidikan sebesar 19,24 persen; disusul kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 18,83 persen; diikuti kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 18,34 persen.

Andil pertumbuhan terbesar disumbangkan oleh kategori Industri Pengolahan dengan andil pertumbuhan sebesar 3,50 persen; diikuti kategori Konstruksi dengan andil pertumbuhan sebesar 2,11 persen; dan Pertambangan dan Penggalian dengan andil pertumbuhan sebesar 0,48 persen.

Struktur Ekonomi Kepulauan Riau pada triwulan IV-2024 masih didominasi oleh Industri Pengolahan (41,07%); Konstruksi (20,82%); dan Pertambangan dan Penggalian (9,87%).

Grafik 3.5 Pertumbuhan dan Andil Pertumbuhan PDRB Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha 2020-2024 (q-to-q) (%)



Sumber : Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Grafik 3.6 Pertumbuhan Ekonomi Kumulatif TW IV menurut Lapangan Usaha 2024 (c-to-c) (%)



Sumber : Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

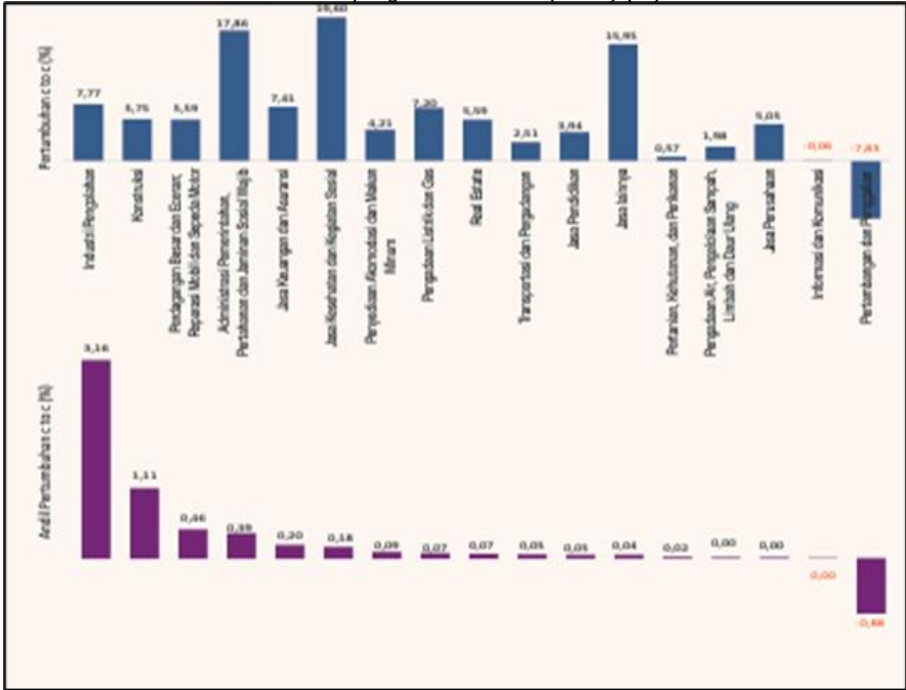
Perekonomian Kepulauan Riau kumulatif triwulan IV-2024 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,02 persen, tumbuh lebih lambat dibanding pertumbuhan kumulatif triwulan IV-2023 (c-to-c) yang tumbuh sebesar 5,16 persen. Pertumbuhan tertinggi

c-to-c pada triwulan IV-2024 dicapai oleh kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 19,60 persen; diikuti kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 17,86 persen; dan kategori Jasa Lainnya sebesar 15,95 persen.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau triwulan IV- 2024 secara c-to-c, Industri Pengolahan memberikan andil pertumbuhan tertinggi sebesar 3,36 persen.

Jika dibandingkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2024 sebesar 5,03 persen dengan Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2024 sebesar 5,02 persen, sehingga pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau lebih rendah dari pertumbuhan Ekonomi Indonesia sebesar 0,01 persen.

Grafik 3.7 Pertumbuhan Ekonomi Kumulatif TW IV menurut Lapangan Usaha 2024 (c-to-c) (%)



Sumber : Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Tabel 3.5 Laju dan Sumber Pertumbuhan PDRB Kepri (q-to-q) (y-on-y) (c-to-c) menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 (%)

Lapangan Usaha	Triw IV-2024 Terhadap Triw III-2024 (q-to-q)**	Triw IV-2024 Terhadap Triw IV-2023 (y-on-y)**	Kumulatif Triw IV-2024 Terhadap Kumulatif Triw IV-2023 (c-to-c)**	Sumber Pertumbuhan (q-to-q)	Sumber Pertumbuhan (y-on-y)	Sumber Pertumbuhan (c-to-c)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	18,83	-2,08	0,57	0,47	-0,06	0,02
B. Pertambangan dan Penggalian	4,59	7,43	-7,83	0,48	0,74	-0,88
C. Industri Pengolahan	8,51	6,64	7,77	3,50	2,73	3,16
D. Pengadaan Listrik dan Gas	2,99	9,01	7,20	0,03	0,09	0,07
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,98	-1,65	1,98	0,00	0,00	0,00
F. Konstruksi	10,96	1,02	5,75	2,11	0,21	1,11
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,91	10,66	5,59	0,25	0,82	0,46
H. Transportasi dan Pergudangan	3,49	5,94	2,51	0,07	0,11	0,05
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,03	8,31	4,21	0,09	0,18	0,09
J. Informasi dan Komunikasi	-13,43	-8,54	-0,06	-0,52	-0,31	0,00
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	-4,52	1,70	7,41	-0,13	0,05	0,20
L. Real Estat	1,35	6,58	5,59	0,02	0,08	0,07
M,N. Jasa Perusahaan	17,54	18,80	5,05	0,00	0,00	0,00
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,94	3,93	17,86	0,16	0,09	0,39
P. Jasa Pendidikan	19,24	18,16	3,94	0,22	0,20	0,05
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	18,34	13,87	19,60	0,18	0,14	0,18
R,S,T,U. Jasa Lainnya	2,84	26,89	15,95	0,01	0,07	0,04
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	6,94	5,14	5,02	6,94	5,14	5,02

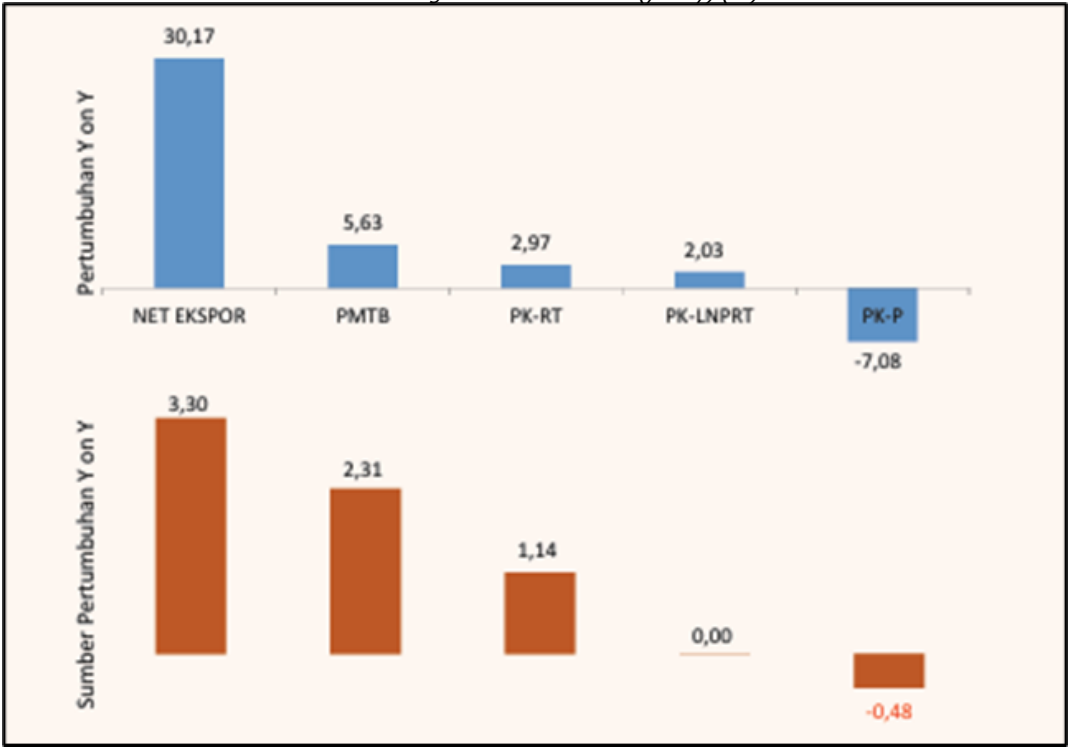
Sumber : Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Pertumbuhan PDRB Kepulauan Riau Menurut Pengeluaran

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi triwulan IV-2024 tumbuh pada hampir semua komponen. Komponen dengan pertumbuhan tertinggi yaitu komponen Net Ekspor sebesar 30,17 persen; diikuti komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 5,63 persen; diikuti komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 2,97 persen dan komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 2,03 persen. Sementara itu, komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi sebesar 7,08 persen.

Bila ditinjau dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau triwulan IV-2024 (y-on-y), komponen yang memiliki andil pertumbuhan tertinggi adalah komponen Net Ekspor dengan andil sebesar 3,30 persen; diikuti komponen PMTB dengan andil sebesar 2,31 persen.

Grafik 3.8 Pertumbuhan dan Andil Pertumbuhan PDRB Kepulauan Riau menurut Pengeluaran TW IV 2024 (y-on-y) (%)

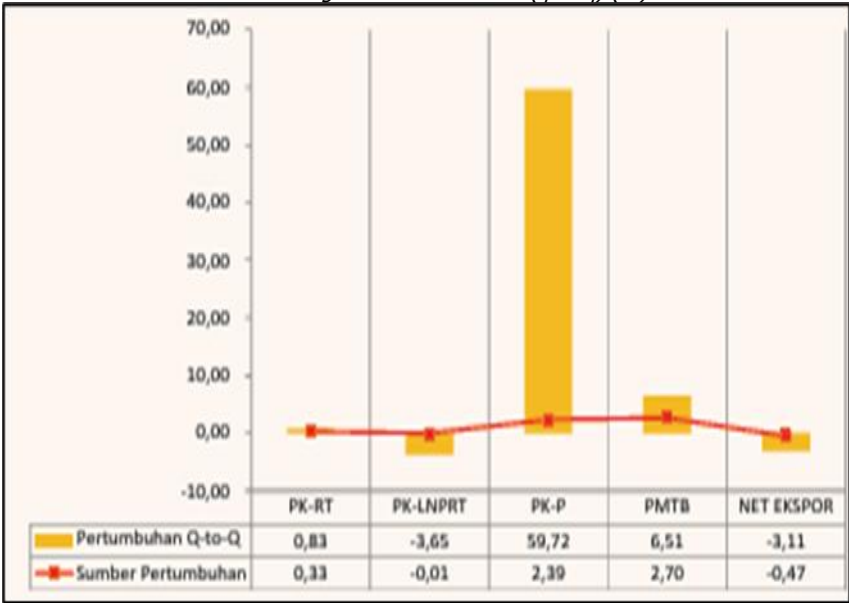


Sumber : Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, ekonomi di triwulan IV-2024 tumbuh sebesar 6,94 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen PK-P sebesar 59,72 persen dengan andil 2,39 persen; diikuti oleh komponen PMTB yang tumbuh sebesar 6,51 persen dengan andil sebesar 2,70 persen; komponen PK-RT tumbuh sebesar 0,83 persen dengan andil sebesar 0,33 persen. Komponen yang mengalami kontraksi yaitu komponen PK-LNPRT yang mengalami kontraksi sebesar 3,65 persen dengan andil kontraksi -0,01 persen dan komponen Net Ekspor yang mengalami kontraksi sebesar 3,11 persen dengan andil kontraksi -0,47 persen.

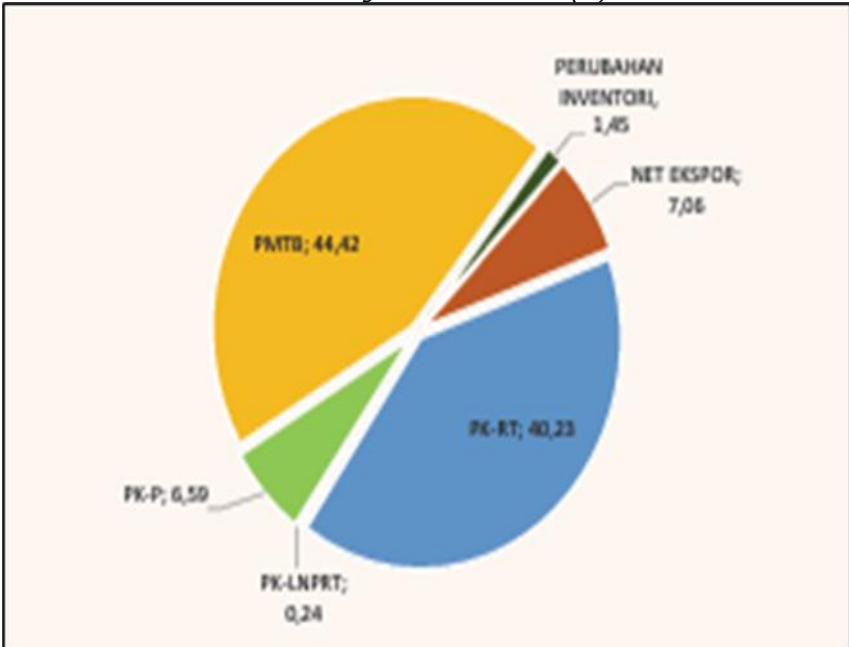
Secara umum, struktur ekonomi di triwulan IV 2024 tidak jauh berbeda dibandingkan triwulan lain di tahun sebelumnya. Struktur ekonomi menurut pengeluaran didominasi oleh komponen PMTB sebesar 44,42 persen; diikuti oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 40,23 persen; diikuti oleh Komponen Net Ekspor sebesar 7,06 persen; diikuti komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 6,59 persen; dan komponen Perubahan Inventori sebesar 1,45 persen. Adapun komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT kurang dari 1 persen.

Grafik 3.9 Pertumbuhan PDRB Kepulauan Riau Menurut Pengeluaran TW IV 2024 (q-to-q) (%)



Sumber : Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Grafik 3.10 Distribusi Komponen PDRB Kepulauan Riau Menurut Pengeluaran TW IV 2024 (%)

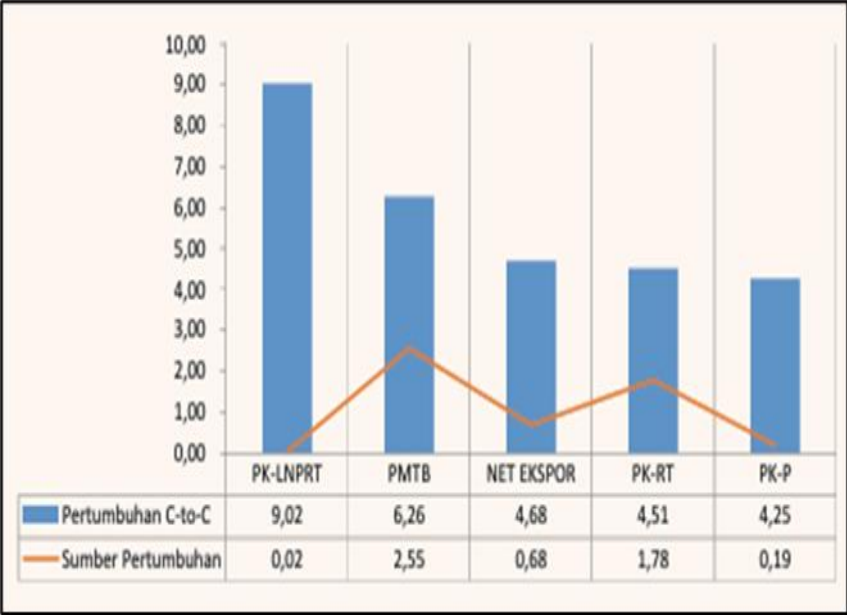


Sumber : Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Perekonomian Kepulauan Riau selama kumulatif sampai dengan triwulan IV-2024 tumbuh sebesar 5,02 persen (c-to-c) jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah komponen PK-LNPRT mencapai 9,02 persen; diikuti komponen PMTB sebesar 6,26 persen; komponen Net Ekspor sebesar 4,68 persen; komponen PK-RT sebesar 4,51 persen; dan komponen PK-P sebesar 4,25 persen.

Jika ditinjau dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau kumulatif triwulan IV-2024 (c-to-c), komponen PMTB memiliki andil pertumbuhan tertinggi sebesar 2,55 persen; diikuti komponen PK-RT memiliki andil sebesar 1,78 persen; komponen Net Ekspor dengan andil 0,68 persen; PK-P dengan andil 0,19 persen dan komponen PK-LNPRT dengan andil sebesar 0,02 persen.

Grafik 3.11 Pertumbuhan PDRB Kepulauan Riau Menurut Beberapa Komponen Pengeluaran (c-to-c) (%)



Sumber : Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Tabel 3.6 Laju dan Sumber Pertumbuhan PDRB Kepri (q-to-q) (y-on-y) (c-to-c) menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2010 (%)

Komponen	Triw IV- 2024 Terhadap Triw III- 2024 (q-to-q)**	Triw IV- 2024 Terhadap Triw IV- 2023 (y-on-y)**	Kumulatif Triw IV- 2024 Terhadap Kumulatif Triw IV- 2023 (c-to-c)**	Sumber Pertumbuhan (q-to-q)	Sumber Pertumbuhan (y-on-y)	Sumber Pertumbuhan (c-to-c)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	0,83	2,97	4,51	0,33	1,14	1,78
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-3,65	2,03	9,02	-0,01	0,00	0,02
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	59,72	-7,08	4,25	2,39	-0,48	0,19
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	6,51	5,63	6,26	2,70	2,31	2,55
5. Ekspor Barang dan Jasa	9,26	14,85	3,77	14,75	22,12	5,97
6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	10,55	13,63	3,68	15,22	18,82	5,29
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	6,94	5,14	5,02	6,94	5,14	5,02

Sumber : Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Dilihat dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) realisasi kinerja pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 5,02% dengan target sebesar 5,2 – 6,3% sehingga capaian kinerja sebesar 98%.

Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan IV-2024 mencatat pertumbuhan sebesar 5,14 persen (*year-on-year*) berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), berada di urutan 13 Nasional, sedangkan ekonomi Q to Q (*Quarter-to-Quarter*) mencatat pertumbuhan sebesar 6,94 persen, menempatkan Kepulauan Riau pada urutan 3 Nasional dan terbaik se-Sumatera.

Tabel 3.7 Ringkasan PDRB per Provinsi di Pulau Sumatera
TW IV 2024 Tahun Dasar 2010

Wilayah		PDRB (miliar rupiah)		Pertumbuhan (%)			Kontribusi terhadap Pulau Sumatera (%)
		ADHB	ADHK	q to q	y on y	c to c	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1. Aceh	65.360,45	40.854,65	6,11	4,15	4,66	5,19	
2. Sumatra Utara	295.718,16	161.551,59	0,44	5,10	5,03	23,48	
3. Sumatra Barat	85.428,79	50.983,94	2,03	4,04	4,36	6,78	
4. Riau	289.246,64	145.758,17	0,16	3,52	3,52	22,97	
5. Jambi	84.362,14	45.596,12	0,89	6,00	4,51	6,70	
6. Sumatra Selatan	168.922,19	95.612,10	-1,85	5,07	5,03	13,42	
7. Bengkulu	26.992,94	13.971,84	3,11	4,55	4,62	2,14	
8. Lampung	121.548,78	70.338,39	-3,52	5,32	4,57	9,65	
9. Kep. Bangka Belitung	28.153,44	15.751,49	3,48	0,94	0,77	2,24	
10. Kepulauan Riau	93.446,15	55.394,49	6,94	5,14	5,02	7,42	
Sumatera	1.259.179,68	695.812,77	0,70	4,60	4,45	100,00	

Sumber : Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera pada triwulan IV-2024 (y-on-y) tumbuh sebesar 4,60 persen. Pertumbuhan q-to-q triwulan IV-2024 tumbuh sebesar 0,70 persen. Dan secara c-to-c tumbuh sebesar 4,45 persen. Struktur perekonomian Pulau Sumatera secara regional didominasi oleh Provinsi Sumatera Utara sebesar 23,48 persen, sementara Kepulauan Riau berada pada urutan kelima dengan *share* sebesar 7,42 persen.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 didorong oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Kontribusi besar dari sektor minyak dan gas (migas);
2. Realisasi APBD dan APBD pada TW IV 2024 memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kepri;
3. Realisasi investasi Triwulan III capaian realisasi investasi sebesar Rp30,82 triliun. Capaian ini tidak terlepas dari capaian realisasi investasi di Kota Batam dan Kabupaten Bintan yang melampaui target yang diberikan. Untuk kabupaten Bintan, capaian realisasi investasi didorong dengan adanya Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang, dimana salah satu perusahaan yang merealisasikan investasi dengan angka yang cukup tinggi adalah PT. Bintan Alumina Indonesia (BAI). Sedangkan capaian realisasi investasi Kota Batam salah satunya ditopang oleh Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa yang bergerak di Ekonomi digital, Ekonomi Kreatif dan Pariwisata.
4. Penyerapan tenaga kerja akibat semakin meningkatnya kesempatan kerja di Kota Batam yang merupakan pusat aktivitas perekonomian di Kepulauan Riau;
5. Sektor pariwisata, semakin membaiknya infrastruktur, aksesibilitas, amenitas, dan atraksi yang menyebabkan naiknya angka kunjungan wisatawan ke Kepulauan Riau baik mancanegara maupun Nusantara yang pada akhirnya menyebabkan kontribusi penyediaan akomodasi dan makan minum yang cenderung bertambah.
6. Dari sektor peningkatan pendapatan daerah melalui kegiatan ekspor dibidang pertanian, Provinsi Kepulauan Riau memiliki posisi strategis, sehingga berfungsi sebagai salah satu dari 17 pintu ekspor komoditas. Komoditas ekspor unggulan sektor pertanian, diantaranya:
 - Ternak Babi : Kepulauan Riau dikenal sebagai penghasil ternak babi terbesar di Indonesia, dengan sebagian besar ekspor ditujukan ke Singapura. Ini menunjukkan bahwa sektor peternakan memiliki potensi yang besar dalam kontribusi ekspor.
 - Karet : Karet yang diolah di Kabupaten Bintan juga diekspor ke berbagai negara, menambah nilai ekspor dari sektor pertanian.
 - Produk Olahan Kelapa : Santan kelapa dan kelapa parut kering merupakan produk olahan yang rutin diekspor, memperkuat posisi sektor pertanian dalam perdagangan internasional.

Upaya yang dilakukan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau antara lain:

1. Terbentuknya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), yang memiliki tugas pokok sebagai berikut:
 - Mengontrol laju inflasi;
 - Meningkatkan pendapatan daerah;
 - Menjaga stabilitas perekonomian daerah;
 - Membantu pemerataan distribusi pendapatan daerah;
 - Membantu meningkatkan kapasitas produksi daerah;
 - Meningkatkan kesempatan kerja dan lapangan pekerjaan;
 - Membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
2. Melakukan realisasi belanja pemerintah lebih awal terutama belanja modal infrastruktur untuk menghasilkan dampak lebih optimal bagi perekonomian daerah;
3. Menetapkan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Energi Kepri.
4. Menyusun Usulan Kuota, Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Provinsi Kepulauan Riau sesuai Keputusan Gubernur Nomor 223 Tahun 2024 dengan melakukan Dalam rangka pengendalian distribusi jenis BBM Tertentu/Solar;
5. Kebijakan penerapan bebas visa kunjungan (BVK) bagi pemegang residen permanen dari negara tetangga, Singapura efektif berlaku mulai 8 Oktober 2024 dan kebijakan berupa visa kunjungan singkat atau selama tujuh hari dengan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp250 ribu, yang berlaku khusus di pintu-pintu masuk kedatangan wisman di wilayah Kepri efektif berlaku mulai 17 Desember 2024;
6. Pengawasan pelaporan Kegiatan Penanaman Modal dan Bimbingan dan Pelatihan penggunaan aplikasi OSS (*Online Single Submission*) kepada para pelaku usaha;
7. Melaksanakan pengawasan produksi dan penjualan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan dan Penerbitan rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin pertambangan rakyat, usaha pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dan pertambangan batuan, pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, batuan dan izin pertambangan rakyat;
8. Mengimplementasikan Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) untuk membangun pendidikan karakter budaya menabung sejak dini di Lembaga keuangan formal bagi peserta didik sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau ke Bupati/Walikota se- Provinsi Kepulauan Riau Nomor B/500/28/B.EKBANG-SET/2024 tentang Akselerasi Implementasi Program Satu Rekening Satu Pelajar;
9. Melaksanakan promosi pariwisata dengan menggelar maupun mendukung beberapa pelaksanaan even baik skala nasional maupun internasional dan Publikasi pariwisata di berbagai *chanel* media;
10. Meningkatkan produksi perikanan melalui penyediaan sarana dan prasarana pada sektor perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
11. Penyelenggaraan sistem penyediaan air minum SPAM Provinsi dan Kabupaten/Kota dan memfasilitasi penetapan tarif batas atas dan tarif batas bawah air minum;
12. Terlaksananya Pembangunan dan pemeliharaan jalan serta perluasan lintasan trayek angkutan laut sebagai sarana kemudahan konektivitas distribusi barang.

Permasalahan yang dihadapi dalam Peningkatan Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau antara lain:

1. Ketergantungan pada Sumber Eksternal: Beberapa barang konsumsi yang mempengaruhi inflasi, seperti bahan bakar dan bahan pokok, sering kali dipengaruhi oleh faktor eksternal yang di luar kendali daerah;

2. Ketergantungan pada sektor tertentu, seperti migas dan perikanan, yang membuat ekonomi daerah rentan terhadap guncangan eksternal;
3. Pendanaan dan Investasi: Keterbatasan anggaran dan tantangan dalam menarik investasi menjadi hambatan utama. Meskipun telah ada persetujuan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, realisasi pendanaan yang memadai masih menjadi tantangan;
4. Kurangnya Sinergi Antar Pemangku Kepentingan: koordinasi antara pemerintah daerah, OJK, perbankan, dan dunia usaha belum optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inklusi keuangan;
5. Belum adanya dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS);
6. Sinergi kemitraan dan promosi pemasaran wisata masih belum optimal.

Upaya kedepan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

1. Peningkatan Investasi di Sektor Energi: Melalui Peraturan Daerah yang telah disahkan, pemerintah daerah harus dapat menarik investasi swasta dan nasional di sektor energi. Penyiapan regulasi yang jelas dan insentif yang menarik akan membantu mendorong investasi, yang pada gilirannya akan menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan perekonomian daerah;
2. Diversifikasi Sumber Energi: Pemerintah provinsi perlu menggali potensi energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan biomassa untuk menciptakan keberlanjutan energi. Diversifikasi sumber energi akan mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mendukung ketahanan energi jangka panjang;
3. Penguatan Sektor Energi Lokal: Peningkatan kapasitas dan dukungan kepada BUMD Energi Kepri dalam mengelola sumber daya alam yang ada akan memperkuat ekonomi daerah. Biro Perekonomian harus memfokuskan pengelolaan BUMD agar lebih efektif dalam memanfaatkan potensi energi lokal untuk kepentingan masyarakat;
4. Meningkatkan Kolaborasi dengan Pihak Swasta dan Lembaga keuangan : Pemerintah daerah perlu menjalin kerjasama yang lebih erat dengan perusahaan swasta untuk mendorong pengembangan proyek-proyek energi yang dapat mempercepat transformasi ekonomi serta menggandeng perbankan, koperasi, dan *fintech* untuk menciptakan model bisnis yang inklusif dan berkelanjutan, Memanfaatkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari perusahaan untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah;
5. Penguatan Ketahanan Pangan dan Energi: Meningkatkan produksi pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan impor, Penguatan sektor pertanian, perikanan, dan peternakan berbasis teknologi;
6. Peningkatan Konektivitas dan Infrastruktur: Pembangunan dan perbaikan infrastruktur transportasi darat dan laut, Optimalisasi rantai pasok dan distribusi barang.
7. Optimalisasi Investasi dan Insentif Ekonomi: Meningkatkan kemudahan berusaha melalui deregulasi dan insentif pajak, Mempromosikan potensi daerah kepada investor melalui event investasi dan kerja sama internasional.

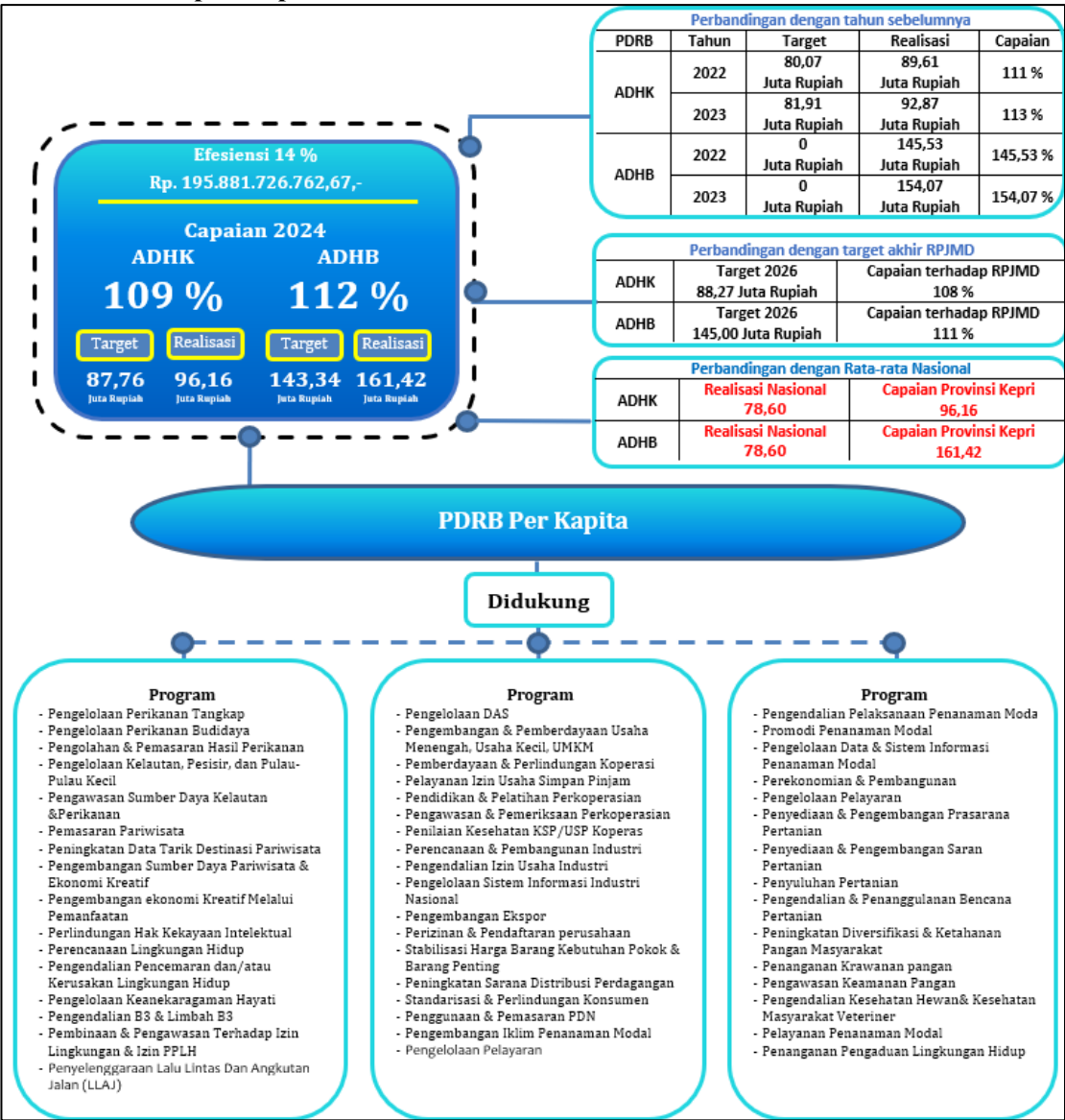
Tabel 3.8 Program dan Realisasi Anggaran yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pengelolaan Perikanan Tangkap	23.674.205.828,93	23.351.032.332,83
2	Pengelolaan Perikanan Budidaya	4.950.650.657,01	4.763.757.011,00
3	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	981.660.035,00	966.518.908,00
4	Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	432.682.670,00	397.662.602,00
5	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1.667.398.387,00	1.550.334.546,00
6	Pemasaran Pariwisata	12.822.617.814,00	12.060.439.550,00
7	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	455.110.618,00	229.625.417,00

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
8	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	119.267.600,00	119.267.600,00
9	Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan	3.778.106.462,00	23.315.043.796,00
10	Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	9.564.150.999,00	9.138.455.605,00
11	Perencanaan Lingkungan Hidup	366.213.910,00	355.188.472,00
12	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.386.207.000,00	1.186.900.126,00
13	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	16.408.038.762,00	15.228.168.888,00
14	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	214.235.911,00	151.298.245,00
15	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	6.703.797.700,00	5.669.013.347,00
16	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	4.411.453.370,00	3.989.608.754,00
17	Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	1.743.695.649,00	1.175.578.823,00
18	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	6.703.797.700,00	5.669.013.347,00
19	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	196.242.000,00	191.940.500,00
20	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	50.119.600,00	49.819.800,00
21	Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	483.133.500,00	472.596.105,00
22	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	67.456.130,00	65.289.460,00
23	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	23.851.200,00	23.773.500,00
24	Pengendalian Izin Usaha Industri	76.103.700,00	76.103.700,00
25	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	8.000.000,00	7.867.530,00
26	Pengembangan Ekspor	113.424.868,00	113.424.868,00
27	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	4.995.864,00	4.772.000,00
28	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	143.073.937,00	142.224.537,00
29	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	453.597.402,00	453.597.402,00
30	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	846.730.482,00	844.197.779,00
31	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	476.982.600,00	475.172.180,00
32	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	280.132.740,00	256.499.680,00
33	Pelayanan Penanaman Modal	552.250.623,00	546.445.525,00
34	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1.386.207.000,00	1.186.900.126,00
35	Promosi Penanaman Modal	56.159.600,00	56.029.292,00
36	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	32.162.703,00	32.162.703,00
37	Perekonomian dan Pembangunan	742.550.321,00	722.392.814,00
38	Pengelolaan Pelayaran	27.025.122.466,13	24.183.989.715,49
39	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	7.134.223.785,50	3.638.866.702,00
40	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	7.161.044.012,00	2.001.882.170,00
41	Penyuluhan Pertanian	1.207.128.050,00	714.134.914,00
42	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	132.228.531,00	127.021.801,00
43	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.803.507.070,10	1.173.800.426,00
44	Penanganan Kerawanan Pangan	133.571.210,00	43.616.700,00
45	Pengawasan Keamanan Pangan dan	47.169.787,00	25.901.500,00
46	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.	321.779.968,00	60.655.085,00
47	Penyelenggaraan Jalan	48.539.486.540,00	42.059.465.086,00
48	Pengelolaan Pelayaran	27.025.122.466	24.183.989.715
49	Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	3.010.068.920	2.039.392.705,00
Total		195.881.726.762,67	189.067.450.970,32

Dari jumlah anggaran sebesar Rp195.881.726.762,00 terealisasi sebesar Rp189.067.450.970,32,00 atau 96%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp6.814.275.792,35 (4%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja Pertumbuhan ekonomi (104%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (96%) dengan efisiensi 8%.

3.5.1.2. PDRB per Kapita



PDRB per kapita adalah PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. PDRB per kapita mengindikasikan rata-rata nilai tambah ekonomi suatu daerah yang diterima oleh setiap penduduknya.

Nilai Pendapatan Per Kapita pada Tahun 2024 dengan capaian kinerja PDRB Per Kapita ADHK sebesar 51,66 Juta Rupiah dan PDRB Per Kapita ADHB sebesar 86,88 Juta Rupiah dari target PDRB Per Kapita ADHK sebesar 87,76 Juta Rupiah dan PDRB Per Kapita ADHB sebesar 143,34 Juta Rupiah dan terealisasi PDRB Per Kapita ADHK sebesar 58,75% dan PDRB Per Kapita ADHB sebesar 60,61%.

PDRB per kapita mengindikasikan rata-rata nilai tambah ekonomi suatu daerah yang diterima oleh setiap penduduknya. PDRB per kapita sering digunakan sebagai pendekatan pendapatan per kapita penduduk karena ukuran pendapatan per kapita sulit diperoleh.

PDRB per kapita tidak semata-mata mengindikasikan kemakmuran wilayah karena pada kenyataannya distribusi pendapatan suatu wilayah masih belum merata. Ada kelompok masyarakat yang memperoleh pendapatan tinggi, tetapi ada pula yang pendapatannya masih rendah. Meskipun PDRB per kapita suatu wilayah tinggi, tetapi bila tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk juga masih tinggi maka wilayah tersebut belum dapat dikatakan mengalami makmur atau sejahtera. Sehingga, untuk memaknai data PDRB per kapita tidak terlepas dari data dasarnya. Oleh karena itu angka PDRB per kapita dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan data total PDRB. Di sisi lain besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Data PDRB adalah salah satu indikator ekonomi makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian daerah setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara:

1. PDRB atas dasar harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya;
2. PDRB atas dasar harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap lapangan usaha dari tahun ke tahun;
3. Distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap lapangan usaha dalam suatu daerah. Lapangan usaha yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah;
4. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu daerah;
5. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang.

Percepatan pemulihan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi dilihat dari indikator PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat kinerja PDRB perkapita atas Harga Konstan berdasarkan Realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 meningkat melebihi target dari yang telah ditetapkan sebesar 87,76 Juta Rupiah pada tahun 2024 dengan capaian realisasi sebesar 96,16 Juta Rupiah sehingga capaian kinerja sebesar 109% atau dalam kategori Sangat Baik.

Sedangkan realisasi PDRB Perkapita atas Harga Berlaku sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 161,42 Juta Rupiah, melebihi target dari yang telah ditetapkan sebesar 143,34 Juta Rupiah pada tahun 2024 dengan capaian kinerja sebesar 112% Juta rupiah atau dalam kategori Sangat Baik.

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Kepulauan Riau PDRB Perkapita (PDRB atas Harga Konstan) sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 sebesar Rp96,16 Juta rupiah, dibandingkan realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 sebesar Rp92,87 Juta Rupiah meningkat 3,29 Juta Rupiah dari realisasi s.d Triwulan IV Tahun 2023. Kemudian PDRB PerKapita atas Harga Berlaku sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 161,42 Juta rupiah dibandingkan Realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 sebesar 154,07 Juta Rupiah juga meningkat 7,35 Juta rupiah dari tahun 2023.

Berikut disampaikan perbandingan capaian indikator Pendapatan perkapita Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022-2024:

Grafik 3.12 Perbandingan Realisasi Indikator PDRB Per Kapita Tahun 2022-2024



Sumber : Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Dilihat dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) realisasi kinerja PDRB Per Kapita ADHK dan ADHB di Provinsi Kepulauan Riau. Dengan capaian ADHK sebesar 96,16 Juta Rupiah dengan target sebesar 88,27 Juta Rupiah dengan capaian kinerja sebesar 108% dan capaian ADHB 161,42 Juta Rupiah dengan target sebesar 145,00 Juta Rupiah dengan capaian kinerja sebesar 111%.

Upaya yang dilakukan dalam peningkatan PDRB per kapita ADHB dan ADHK di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 diantaranya:

1. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif dan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung yang bertujuan untuk meningkatkan akses layanan keuangan formal yang disiapkan bagi Masyarakat diantaranya bagi peserta didik, juga mendukung salah satu program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Kepulauan Riau dan mendukung Gerakan Nasional Menabung (GNM). Sehubungan tersebut Gubernur Kepulauan Riau telah menerbitkan Surat Edaran Nomor B/500/28/B.EKBANG-SET/2024 tentang Akselerasi Implementasi Program Satu Rekening Satu Pelajar kepada Bupati/Wali Kota se-Provinsi Kepulauan Riau dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau.
2. Meningkatkan akses listrik kepada masyarakat
3. Mengadakan pembinaan langsung kepada pelaku ekonomi kreatif di seluruh kabupaten/kota.
4. Memberikan stimulus/bantuan kepada pelaku ekonomi kreatif dalam mengembangkan produknya
5. Mendaftarkan hak kekayaan intelektual untuk produk yang dihasilkannya serta melaksanakan promosi dan pemasaran produk ekonomi kreatif.
6. Penerbitan rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin pertambangan rakyat, usaha pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dan pertambangan batuan, pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, batuan dan izin pertambangan rakyat
7. Meningkatkan produksi perikanan melalui penyediaan sarana dan prasarana pada sektor perikanan tangkap dan perikanan budidaya serta pengolahan dan pemasaran
8. Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian, terutama dalam komoditas unggulan seperti Tanaman Pangan, hortikultura, Perkebunan dan Peternakan, hal ini tidak hanya mendukung ketahanan pangan tetapi juga meningkatkan pendapatan petani dan perekonomian lokal.

Beberapa kendala dalam peningkatan PDRB Perkapita Provinsi Kepulauan Riau diantaranya:

1. Keterbatasan Sumber Daya dan Infrastruktur: Sumber daya manusia yang terbatas serta infrastruktur yang belum memadai dalam sektor energi, sektor pariwisata, sektor perikanan
2. Kurangnya Sinergi Antar Pemangku Kepentingan : koordinasi antara pemerintah daerah, OJK, perbankan, dan dunia usaha belum optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inklusi keuangan
3. Rendahnya kesesuaian kompetensi antara pencari kerja dengan kebutuhan industri

Upaya kedepan dalam peningkatan PDRB Perkapita di Provinsi Kepulauan Riau:

1. Meningkatkan produksi pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan impor dengan Penguatan sektor pertanian, perikanan, dan peternakan berbasis teknologi.
2. Peningkatan Konektivitas dan Infrastruktur : Pembangunan dan perbaikan infrastruktur transportasi darat dan laut, Optimalisasi rantai pasok dan distribusi barang.
3. Mendorong hilirisasi industri dan investasi di sektor manufaktur.
4. Diversifikasi ekonomi dengan mendorong sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
5. Meningkatkan pelatihan vokasi dan sertifikasi tenaga kerja sesuai kebutuhan industri.
6. Fasilitasi akses permodalan dan pelatihan kewirausahaan, Digitalisasi UMKM untuk meningkatkan daya saing di pasar global.
7. Pengembangan akses pemasaran dan promosi produk IKM
8. Meningkatkan kemudahan berusaha melalui deregulasi dan insentif pajak
9. Mempromosikan potensi daerah kepada investor melalui event investasi dan kerja sama internasional

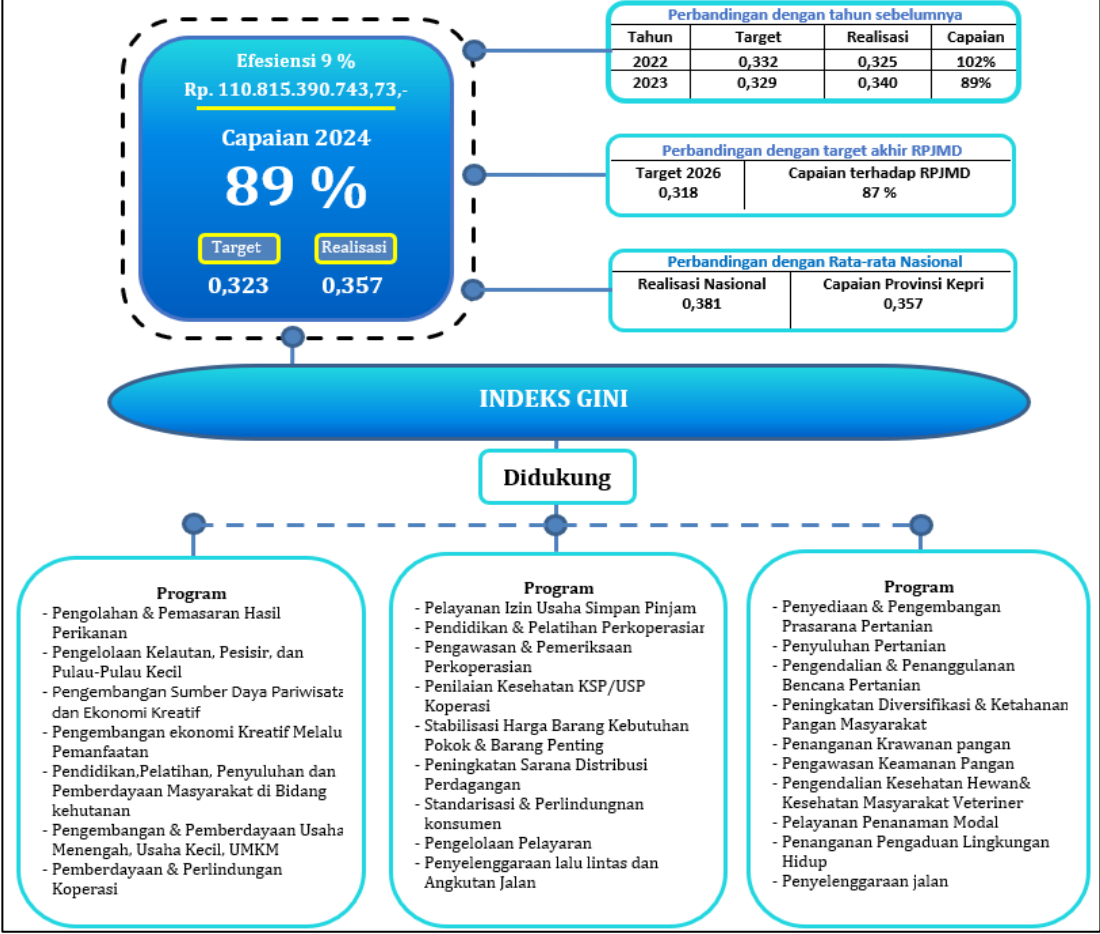
Tabel 3.9 Program dan Realisasi Anggaran yang mendukung PDRB Per Kapita Kepulauan Riau

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pengelolaan Perikanan Tangkap	23.674.205.828,93	23.351.032.332,83
2	Pengelolaan Perikanan Budidaya	4.950.650.657,01	4.763.757.011,00
3	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	981.660.035,00	966.518.908,00
4	Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	432.682.670,00	397.662.602,00
5	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1.667.398.387,00	1.550.334.546,00
6	Pemasaran Pariwisata	12.822.617.814,00	12.060.439.550,00
7	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	455.110.618,00	229.625.417,00
8	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	119.267.600,00	119.267.600,00
9	Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan	3.778.106.462,00	23.315.043.796,00
10	Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	9.564.150.999,00	9.138.455.605,00
11	Perencanaan Lingkungan Hidup	366.213.910,00	355.188.472,00
12	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.386.207.000,00	1.186.900.126,00
13	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	16.408.038.762,00	15.228.168.888,00
14	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya danBeracun (Limbah B3)	214.235.911,00	151.298.245,00
15	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	6.703.797.700,00	5.669.013.347,00
16	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	4.411.453.370,00	3.989.608.754,00
17	Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	1.743.695.649,00	1.175.578.823,00
18	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	6.703.797.700,00	5.669.013.347,00
19	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	196.242.000,00	191.940.500,00

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
20	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	50.119.600,00	49.819.800,00
21	Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	483.133.500,00	472.596.105,00
22	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	67.456.130,00	65.289.460,00
23	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	23.851.200,00	23.773.500,00
24	Pengendalian Izin Usaha Industri	76.103.700,00	76.103.700,00
25	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	8.000.000,00	7.867.530,00
26	Pengembangan Ekspor	113.424.868,00	113.424.868,00
27	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	4.995.864,00	4.772.000,00
28	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	143.073.937,00	142.224.537,00
29	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	453.597.402,00	453.597.402,00
30	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	846.730.482,00	844.197.779,00
31	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	476.982.600,00	475.172.180,00
32	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	280.132.740,00	256.499.680,00
33	Pelayanan Penanaman Modal	552.250.623,00	546.445.525,00
34	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1.386.207.000,00	1.186.900.126,00
35	Promosi Penanaman Modal	56.159.600,00	56.029.292,00
36	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	32.162.703,00	32.162.703,00
37	Perekonomian dan Pembangunan	742.550.321,00	722.392.814,00
38	Pengelolaan Pelayaran	27.025.122.466,13	24.183.989.715,49
39	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	7.134.223.785,50	3.638.866.702,00
40	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	7.161.044.012,00	2.001.882.170,00
41	Penyuluhan Pertanian	1.207.128.050,00	714.134.914,00
42	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	132.228.531,00	127.021.801,00
43	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.803.507.070,10	1.173.800.426,00
44	Penanganan Kerawanan Pangan	133.571.210,00	43.616.700,00
45	Pengawasan Keamanan Pangan dan	47.169.787,00	25.901.500,00
46	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.	321.779.968,00	60.655.085,00
47	Penyelenggaraan Jalan	48.539.486.540,00	42.059.465.086,00
48	Pengelolaan Pelayaran	27.025.122.466	24.183.989.715
49	Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	3.010.068.920	2.039.392.705,00
Total		195.881.726.762.67	189.067.450.970.32

Dari jumlah anggaran sebesar Rp195.881.726.762,67 terealisasi sebesar Rp189.067.450.970,32 atau 96%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp6.814.275.792,35 (4%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja PDRB Perkapita ADHK (109%) PDRB Perkapita ADHK (112%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (96) sehingga tercapai efisiensi 14%.

3.5.1.3. Indeks Gini



Indeks Gini, Rasio Gini, atau Koefisien Gini merupakan alat untuk mengukur tingkat ketimpangan pembagian pendapatan di antara penduduk suatu wilayah. Indeks Gini di Provinsi Kepulauan Riau belum mencapai target yang ditentukan. Indeks Gini pada September Tahun 2024 dengan capaian realisasi sebesar 0,357 Indeks dari target sebesar 0,323 Indeks dan capaian kinerja sebesar 89%.

Percepatan pemulihan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi dilihat dari indikator penurunan indeks gini Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan hasil yang belum maksimal. Indeks gini Provinsi Kepulauan Riau pada september Tahun 2024 terealisasi sebesar 0,357 Indeks dengan target dari yang telah ditetapkan sebesar 0,323 Indeks sehingga capaian kinerja sebesar 89% atau dalam kategori **Baik**.

Pada September 2024 Indeks Gini Ratio tercatat sebesar 0,357, meningkat 0,008 poin dibandingkan dengan Gini Ratio pada Maret 2024 yang sebesar 0,349. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi sedikit peningkatan ketimpangan pengeluaran di Kepulauan Riau selama periode Maret 2024 - September 2024.

Ketimpangan antar kelompok Pengeluaran dikatakan ketimpangan “Rendah” bila Indeks Gini kurang dari 0,3, dikatakan Ketimpangan “Sedang” bila Indeks Gini antara > 0,3 – 0,4; dan Ketimpangan “Tinggi” bila Indeks Gini di atas 0,4. Nilai Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau mengalami kenaikan sebesar 0,357 September 2024, dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 0,340. Angka ini menunjukan bahwa ketimpangan pendapatan di Provinsi Kepulauan Riau termasuk kategori Sedang.

Grafik 3.13 Perkembangan Gini Ratio Kepulauan Riau s.d September 2024



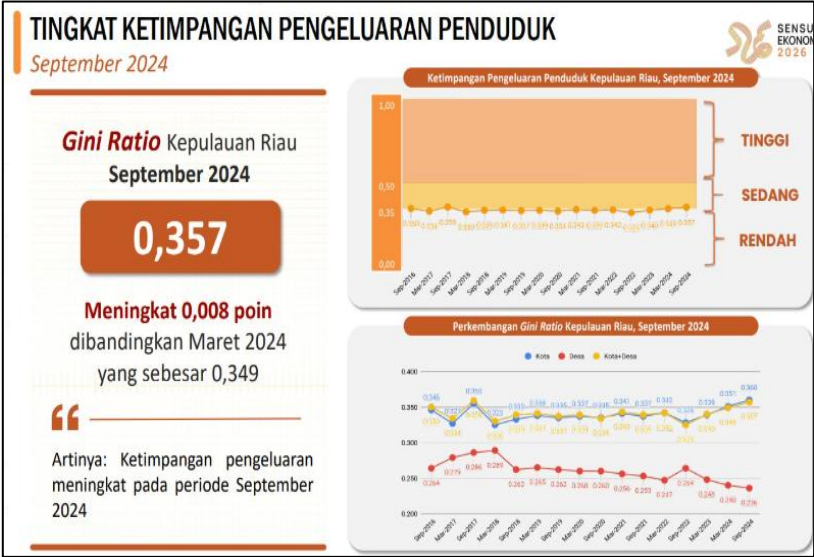
Sumber : Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2024–September 2024 Gini Ratio di daerah perkotaan mengalami peningkatan sebesar 0,009 poin yaitu dari 0,351 pada Maret 2024 menjadi 0,360 pada September 2024. Berbeda dengan daerah perkotaan, di daerah perdesaan nilai Gini Ratio mengalami penurunan pada periode Maret 2024–September 2024, yaitu sebesar 0,004 poin dari 0,240 pada Maret 2024 menjadi 0,236 pada September 2024.

Capaian kinerja penurunan indeks gini tahun 2024 apabila dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 10,8 Indeks. Dimana pada tahun 2023 indeks gini sebesar 0,340 Indeks menurun menjadi 0,357 indeks pada tahun 2024.

Analisisnya hal ini menunjukkan nilai realisasi yang lebih tinggi dari target menunjukkan adanya ketimpangan yang lebih besar dari yang diharapkan. Hal ini berarti bahwa pendapatan atau kekayaan lebih terkonsentrasi pada sebagian kecil populasi dibandingkan dengan yang direncanakan. Penyebab dan dampaknya ketimpangan yang lebih tinggi bisa disebabkan dari berbagai faktor seperti kebijakan ekonomi yang kurang merata, perubahan dalam pasar struktur tenaga kerja, atau perbedaan akses terhadap sumber daya. Hal ini berdampak negatif terhadap stabilitas sosial dan ekonomi jika ketimpangan terus meningkat.

Grafik 3.14 Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Produk Kepulauan Riau per September 2024

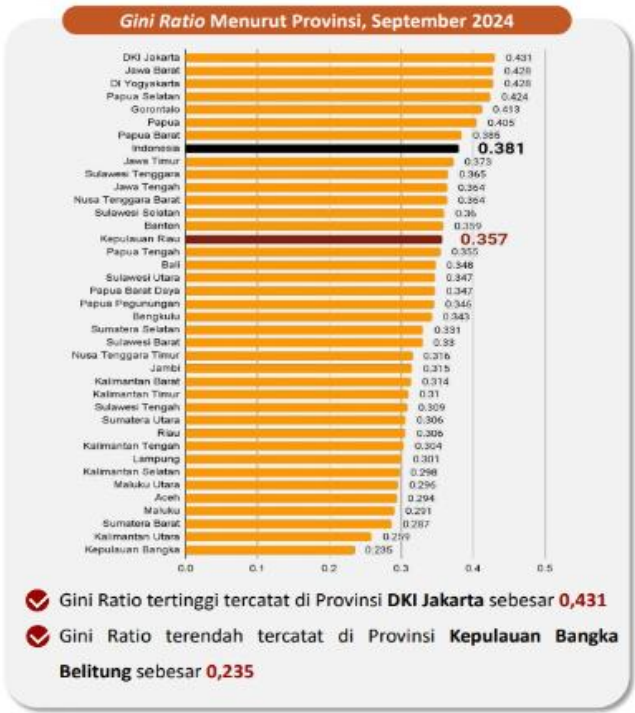


Sumber : Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Dilihat dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) realisasi kinerja penurunan indeks gini di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 0,357 Indeks dengan target sebesar 0,318% dengan capaian kinerja sebesar 87%.

Pada Tahun 2024, capaian Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan dengan capaian nasional berada dibawah capaian nasional. Dibandingkan provinsi se-Indonesia tahun 2024, Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau sebesar 0,357 pada September 2024 berada pada posisi keempat belas setelah Provinsi Banten, jika dibandingkan Provinsi se Wilayah Sumatera, Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau sebesar 0,357 pada September 2024 berada pada posisi pertama.

Grafik 3.15 Perbandingan Indeks Gini Tingkat Provinsi se-Indonesia per September 2024



Sumber : Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Upaya yang dilakukan dalam mendukung indikator indeks gini di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Penurunan kemiskinan melalui stabilitasi harga pangan, pengurangan beban penduduk miskin dan bantuan sosial;
2. Layanan kesehatan yang terjangkau melalui program jaminan kesehatan;
3. Penurunan pengangguran melalui program sertifikasi dan magang serta kemitraan dengan industri;
4. Penurunan ketimpangan kekayaan melalui kredit UMKM dibidang pertanian dan perikanan;
5. Penguatan modal bagi Kelompok Tani Hutan;
6. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan akses modal;
7. Peningkatan akses pendidikan melalui pemberian beasiswa dan program dukungan bagi keluarga berpenghasilan rendah;
8. memberikan stimulus/ bantuan kepada pelaku ekonomi kreatif dalam mengembangkan produknya dan selanjutnya mendaftarkan hak kekayaan intelektual untuk produk yang dihasilkannya serta melaksanakan promosi dan pemasaran produk ekonomi kreatif;
9. Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Provinsi Kepulauan Riau sesuai Keputusan Gubernur Nomor 223 Tahun 2024.

Beberapa hal yang menjadi kendala dalam penurunan indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

1. Tingkat Literasi dan Inklusi Keuangan yang Rendah : Masih banyak masyarakat yang belum memahami produk dan layanan keuangan yang tersedia, sehingga akses terhadap permodalan masih terbatas;
2. Kesenjangan Infrastruktur Keuangan : terutama di daerah terpencil, keterbatasan lembaga keuangan seperti bank, koperasi, dan *fintech* menjadi kendala utama dalam menyalurkan pembiayaan;
3. Infrastruktur yang belum memadai dalam sektor energi, sektor pariwisata, sektor perikanan dan transportasi menjadi tantangan besar;
4. Ketimpangan akses dan mutu pendidikan antar satuan Pendidikan dan antar wilayah.

Upaya-upaya kedepan dalam pencapaian kinerja penurunan indeks Gini di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

1. Menyediakan Sarana Usaha Perikanan Tangkap berupa Armada Perikanan Tangkap dan alat tangkap perikanan bagi nelayan berpenghasilan rendah;
2. Melaksanakan pemberian bantuan bibit dan benih dan pemanfaatan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian;
3. Penyempurnaan Data Kuota dan mengembangkan sistem informasi berbasis teknologi untuk memonitor distribusi LPG secara lebih efektif dan akurat;
4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan akses modal;
5. Peningkatan akses pendidikan melalui pemberian beasiswa dan program dukungan bagi keluarga berpenghasilan rendah;
6. Peningkatan Literasi dan Edukasi Keuangan : Mengadakan sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat, UMKM, dan pelaku usaha terkait akses pembiayaan;
7. Penguatan Infrastruktur Keuangan Daerah dengan Mendorong pendirian dan ekspansi layanan keuangan di daerah terpencil melalui sinergi dengan perbankan dan fintech, Mempermudah regulasi terkait pembukaan layanan keuangan berbasis digital serta mengembangkan produk keuangan yang sesuai dengan karakteristik daerah, seperti asuransi pertanian dan kredit mikro berbasis komunitas;
8. Optimalisasi Peran TPAKD dalam Mendorong Pembiayaan Sektor Produktif: Meningkatkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan skema pembiayaan lainnya bagi UMKM dan petani.

Tabel 3.10 Program dan Realisasi Anggaran yang mendukung Indikator Indeks Gini Kepulauan Riau

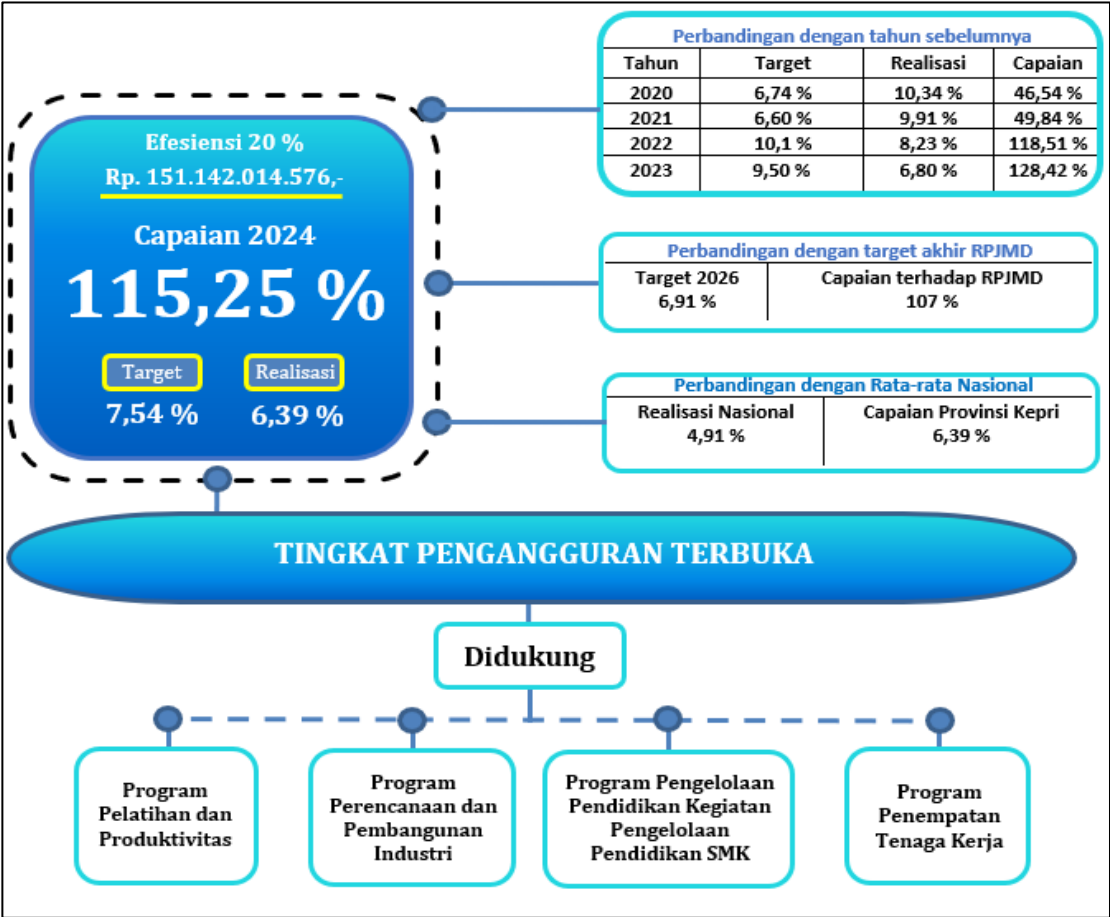
No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	981,660,035.00	966,518,908.00
2	Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	432,682,670.00	397,662,602.00
3	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	119,267,600.00	119,267,600.00
4	Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan	3,778,106,462.00	3,315,043,796.00
5	Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	1,743,695,649.00	1,175,578,823.00
6	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	6,703,797,700.00	5,669,013,347.00
7	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	196,242,000.00	191,940,500.00
8	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	50,119,600.00	49,819,800.00
9	Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	483,133,500.00	472,596,105.00
10	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	67,456,130.00	65,289,460.00
11	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	23,851,200.00	23,773,500.00

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
12	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	143,073,937.00	142,224,537.00
13	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	453,597,402.00	453,597,402.00
14	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	846,730,482.00	844,197,779.00
15	Perekonomian dan Pembangunan	742,550,321.00	722,392,814.00
16	Pengelolaan Pelayaran	27,025,122,466.13	24,183,989,715.49
18	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	7,134,223,785.50	3,638,866,702.00
19	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	7,161,044,012.00	2,001,882,170.00
20	Penyuluhan Pertanian	1,207,128,050.00	714,134,914.00
21	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1,803,507,070.10	1,173,800,426.00
22	Penanganan Kerawanan Pangan	133,571,210.00	43,616,700.00
23	Pengawasan Keamanan Pangan dan	47,169,787.00	25,901,500.00
24	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.	321,779,968.00	60,655,085.00
25	Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	676,393,167.00	615,510,878.00
26	Pendidikan	377.526.999.967	357.186.005.919
27	Penyelenggaraan Jalan	48,539,486,540.00	42,059,465,086.00
28	Pengelolaan Pelayaran	27.025.122.466	24.183.989.715
29	Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	3.010.068.920	2.039.392.705,00
Total		110,815,390,743,73	89,126,740,149,49

Dari jumlah anggaran sebesar Rp110.815.390.743,73 terealisasi sebesar Rp89.126.740.149,49 atau 80%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp21.688.650.549,24 (20%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja tingkat pengangguran terbuka (89%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (80%) dengan efesiensi 9%.

3.5.2. Sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan dan Pengangguran

3.5.2.1. Tingkat Pengangguran Terbuka



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) atau yang sering dikenal sebagai angka pengangguran seringkali dijadikan ukuran keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan di bidang ketenagakerjaan. Angka Pengangguran di Provinsi Kepulauan Riau menurun. Angka Pengangguran pada Tahun 2024 sudah baik dengan capaian kinerja sebesar 115,25% dari target sebesar 7,54% dan terealisasi sebesar 6,39%.

Ketenagakerjaan adalah masalah hajat hidup orang banyak yang pada akhirnya menjadi cermin kemajuan pembangunan daerah. Untuk itu diperlukan Komitmen yang kuat dari berbagai pihak agar permasalahan ketenagakerjaan khususnya yang berkaitan dengan usaha untuk menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi titik sentral dari pembangunan secara keseluruhan. Selain itu juga diperlukan upaya Perencanaan, Monitoring, evaluasi dan dilanjutkan dengan pengkajian yang konsisten dan berkelanjutan sehingga provinsi dapat mencapai target dalam menurunkan angka pengangguran.

Tingkat Pengangguran terbuka dikenal sebagai angka pengangguran adalah Angka yang seringkali dijadikan ukuran keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan di bidang ketenagakerjaan, sehingga perkembangan TPT dari tahun ke tahun di suatu wilayah akan menjadi perhatian yang sangat serius dari pemerintah. Untuk mencapai sasaran Menurunnya angka kemiskinan ditetapkan indikator kinerja yaitu angka pengangguran/ Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Sasaran Percepatan penurunan angka kemiskinan dan Pengangguran dilihat dari indikator penurunan tingkat pengangguran terbuka Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan penurunan yang cukup menggembirakan. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2024 indikator kinerja tingkat pengangguran terbuka Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 terealisasi sebesar 6,39% dapat melebihi target dari yang telah ditetapkan sebesar 7,54% sehingga capaian kinerja sebesar 115,25% atau dalam kategori **Sangat Baik**.

Angkatan kerja yang merupakan bagian yang mempengaruhi nilai Tingkat Pengangguran terbuka adalah bagian dari penduduk usia kerja, sehingga jumlah angkatan kerja sangat tergantung pada jumlah penduduk usia kerja yang masuk ke dalam angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2024 sebanyak 1.120.660 orang turun sebesar 26.974 orang dibanding Agustus 2023 sebesar 1.093.686 orang. Sejalan dengan penurunan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengalami kenaikan sebesar 0,49 persen point dari 68,68 persen tahun 2023 menjadi 69,17 persen tahun 2024.

Angkatan kerja merupakan bagian dari penduduk usia kerja, sehingga jumlah angkatan kerja sangat tergantung pada jumlah penduduk usia kerja yang masuk ke dalam angkatan kerja. Kriteria Penganggur Terbuka terdiri dari:

- 1. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan
- 2. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan pekerjaan
- 3. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan
- 4. Mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja

Analisis indikator kinerja tingkat pengangguran terbuka merupakan rasio dari jumlah penganggur terbuka yakni 71.570 orang dengan jumlah angkatan kerja yakni 1.120.660 sehingga Tingkat Pengangguran terbuka di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 6,39%. Adapun evaluasi tingkat pengangguran terbuka Provinsi Kepulauan Riau mulai Tahun 2015-2024 adalah sebagai berikut:



Sumber : Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Dalam Dua Belas tahun terakhir, TPT di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan tren yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Dari periode tahun 2016 ke 2024 mengalami Penurunan angka pengangguran yang cukup signifikan sebesar 1,3 poin persen, dari tahun 2020 ke 2022 terjadi penurunan sebesar 2,11 poin persen, dari tahun 2021 sampai 2022 TPT Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan penurunan sebesar 1,68 poin. Pada tahun 2018 tercatat TPT Provinsi Kepulauan Riau sebesar 7,12%. Dan pada Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,21. Pengaruh Covid -19 menyebabkan angka TPT Tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, seiring dengan peningkatan perekonomian TPT tahun 2023 mengalami penurunan sampai diangka 6.8 atau turun 1,43 poin dibandingkan tahun 2022 dan 3,11 pada Tahun 2021. Tingkat pengangguran Provinsi Kepulauan Riau terus mengalami penurunan sampai akhir tahun 2024 menjadi 3,39%.

Tabel 3.11 Karakteristik Pengangguran Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tempat Tinggal 2019-2024

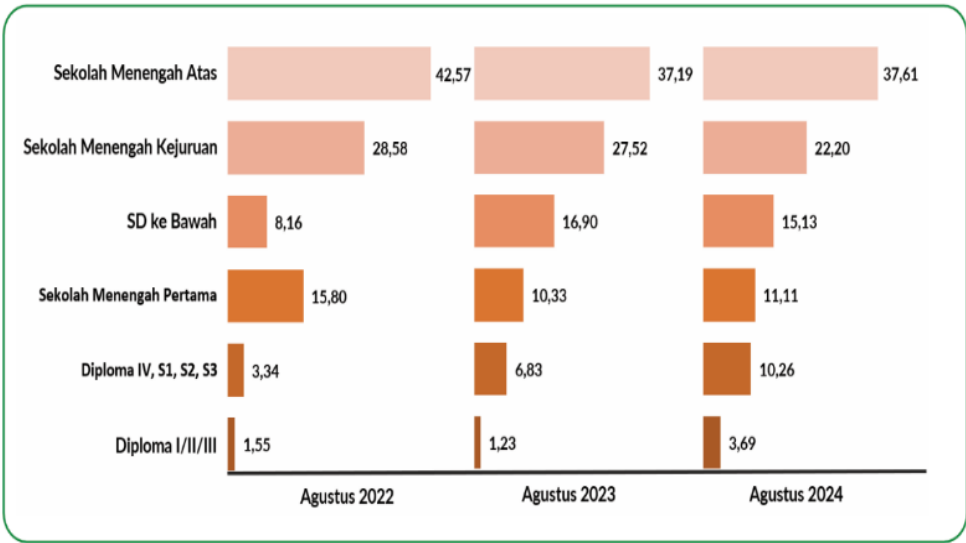
Karakteristik Pengangguran	Agustus 2022 persen	Agustus 2023 persen	Agustus 2024 persen	Perubahan Ags 2022-Ags 2024 persen poin	Perubahan Ags 2023-Ags 2024 persen poin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	8,23	6,80	6,39	-1,84	-0,41
TPT Menurut Jenis Kelamin					
- Laki-Laki	7,78	5,95	6,02	-1,76	0,08
- Perempuan	9,03	8,23	7,00	-2,03	-1,22
TPT Menurut Daerah Tempat Tinggal					
- Perkotaan	8,52	6,77	6,74	-1,78	-0,02
- Pedesaan	5,88	7,00	2,50	-3,38	-4,50

Sumber : Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar tenaga kerja. Jika dilihat Berdasarkan tipe daerah/daerah tempat tinggal, TPT perkotaan Tahun 2023 sebesar 6,77%, TPT wilayah perkotaan Lebih rendah dibandingkan TPT di daerah Pedesaan yang sebesar 7,00%. Berbeda dengan TPT perkotaan, TPT Pedesaan mencapai angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Dibandingkan Agustus 2022 TPT di daerah Perkotaan menurun sebesar 1,75 persen poin, sementara itu TPT di daerah pedesaan meningkat sebesar 1,12 persen poin. Pada Tahun 2024 adanya perubahan TPT Menurut tempat tinggal dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 sebesar -1,78 poin dan -0,02 persen point dari tahun 2023 (6,77%). Ditahun 2024 di Pedesaan juga mengalami perubahan angka pengangguran yaitu penurunan sebesar -4,5 poin dari tahun 2023 (5,88) menjadi 2,50 tahun 2024.

Pada Agustus 2024, TPT laki-laki sebesar 6,02 persen, lebih rendah dibanding TPT perempuan yang sebesar 7,00%. TPT laki-laki dan perempuan mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2022, yaitu masing-masing sebesar 1,83 persen poin dan 0,81 persen poin. Jika dibandingkan dengan Agustus 2019 TPT laki-laki menurun sebesar 2,02 persen poin, sedangkan TPT perempuan meningkat 1,63 persen poin. Dan tahun 2024 pengangguran laki-laki mengalami sedikit kenaikan dan angka pengangguran perempuan (7,00%) mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar -1,22 poin dari tahun 2023 (8,23%).

Grafik 3.17 TPT Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2022 - 2024



Sumber : Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Apabila dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penganggur, pada Agustus 2024 mempunyai pola yang sama dengan Agustus 2023. Pada Agustus 2024, TPT dari tamatan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah menengah kejuruan masih yang tertinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 37,61 persen dan 22,20. Sementara TPT yang paling rendah adalah pada tamatan pendidikan diploma, yaitu sebesar 3,69 persen. Dibandingkan Agustus 2022, penurunan TPT terjadi pada hampir semua kategori tamatan pendidikan kecuali tamatan SD ke bawah dan tamatan universitas. Penurunan TPT terbesar terjadi pada kategori tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP/ sederajat) yaitu sebesar 4,51 persen poin. Sementara peningkatan TPT terjadi pada kategori tamatan SD ke bawah yaitu sebesar 2,13 persen poin dan kategori tamatan universitas yaitu sebesar 1,03 persen poin. Tamatan Sekolah menengah Kejuruan Pada Tahun 2024 menurun secara signifikan dari 27,52 persen pada tahun 2023 menjadi 22,22 persen pada akhir tahun 2024 atau turun sebesar 5,3 persen poin.

Dibandingkan Agustus 2023, penurunan TPT pada Tahun 2024 terjadi pada dua kategori Pendidikan yaitu pada kategori pendidikan SMK dan SD ke bawah. Sementara peningkatan TPT terjadi pada hampir semua kategori pendidikan seperti tamatan SMA, SMP, Diploma dan Tamatan Universitas. TPT tertinggi terdapat pada Sekolah menengah Atas (SMA) sebesar 37,61%. Untuk kategori tamatan SMP sebesar 11,11%. Dengan kata lain, ada penawaran tenaga kerja yang masih belum optimal terserap terutama pada tingkat pendidikan SMA, SMK, SD dan SMP. Namun begitu, berdasarkan tren karakteristik penduduk yang bekerja berdasarkan tingkat pendidikan terdapat penurunan penyerapan tenaga kerja khususnya tamatan berpendidikan SD Pada tahun 2024. Berdasarkan data karakteristik penduduk yang bekerja berdasarkan tingkat pendidikan, dimana tingkat pendidikan kategori Diploma/universitas jauh mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu dari 6,83 menjadi 10,26, atau turun sebesar 3,43 persen poin dari tahun 2024.

Tabel 3.12 TPT Menurut Kab/Kota Provinsi Kepri Tahun 2022-2024

Kabupaten/Kota	Agustus 2022	Agustus 2023	Agustus 2024	Perubahan Ags 2022– Ags 2024	Perubahan Ags 2023– Ags 2024
	persen	persen	persen	persen poin	persen poin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten Karimun	6,87	6,02	5,52	-1,35	-0,50
Kabupaten Bintan	6,91	5,43	4,53	-2,38	-0,90
Kabupaten Natuna	4,15	4,05	3,89	-0,26	-0,16
Kabupaten Lingga	3,09	3,52	3,38	0,29	-0,14
Kab. Kep. Anambas	2,15	2,55	2,38	0,23	-0,17
Kota Batam	9,56	8,14	7,68	-1,88	-0,46
Kota Tanjungpinang	5,27	4,76	4,69	-0,58	-0,07
Kepulauan Riau	8,23	6,80	6,39	-1,84	-0,41

Sumber : Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Dari data tersebut dapat digambarkan bahwa TPT tertinggi pada Tahun 2024 terjadi di Kota Batam sebesar 7,68% dan yang paling rendah adalah Kabupaten Anambas sebesar 2,38%.

Berdasarkan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berdasarkan kabupaten/Kota berbagai kebijakan pemerintah dan usaha terkait penciptaan lapangan kerja tampaknya masih perlu dioptimalkan. Secara absolut, jumlah pengangguran di Kota Batam turun sekitar 52.203 orang. Sehingga, angka TPT Kota Batam menurun sebesar 0,46 dari Agustus 2023 (8,14%) menjadi 7,68% pada Agustus 2024. Dari tabel diatas tingkat pengangguran terbuka paling tinggi adalah di Kota Batam sebesar 7,68% dan yang paling rendah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas yakni 2,38%. Namun secara keseluruhan dapat tergambar bahwa terjadi

penurunan TPT di kerseluruhan kabupaten/kota. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka yang cukup Signifikan sebesar 0,91 yaitu pada kabupaten Bintan yang pada tahun 2023 sebesar 5,43% menjadi 4,53%.

Dilihat dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) realisasi kinerja penurunan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kepulauan Riau sebesar sebesar 6,39% dengan target 6,91% dengan capaian kinerja sebesar 107,52%.

Secara Nasional Jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2024 sebanyak 152,11 juta orang, naik 4,40 juta orang dibanding Agustus 2023. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) secara nasional naik sebesar 1,15 persen point atau sebesar 4,97 juta orang dari Agustus 2023.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2024 sebesar 6,39 persen, turun sebesar 0,41 persen poin dibanding Agustus 2023. Perbandingan dengan TPT Provinsi Kepulauan Riau berada di atas TPT Nasional sebesar 1,48 Poin. Perbandingan TPT Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024 dengan TPT Nasional dan TPT Provinsi Lain di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13 TPT Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan dengan TPT se-Indonesia Tahun 2024

NO	PROVINSI	TPT	
		TAHUN 2023	TAHUN 2024
1	ACEH	6,03	5,75
2	SUMATERA UTARA	5,89	5,66
3	SUMATERA BARAT	5,94	5,75
4	RIAU	4,23	3,70
5	JAMBI	4,53	4,48
6	SUMATERA SELATAN	4,11	3,86
7	BENGKULU	3,42	3,11
8	LAMPUNG	4,23	4,19
9	KEP. BANGKA BELITUNG	4,56	4,63
10	KEP. RIAU	6,8	6,39
Dst.			
38	PAPUA PEGUNUNGAN	1,02	1,32
	INDONESIA	5,32	4,91

Sumber : Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Karakteristik kesempatan kerja di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024 penduduk bekerja Provinsi Kepulauan Riau mengalami kenaikan menjadi sebanyak 1.049.000 dari 1.019.360 orang pada tahun 2023 dan pengangguran turun sebanyak 2.760 orang. Meskipun jumlah angkatan kerja berserta komponennya secara absolut mengalami penurunan, namun secara kualitas indikator ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau justru menunjukkan perbaikan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2024 sebanyak 69,17 persen mengalami kenaikan 0,49 persen poin dibanding Agustus 2023. Penurunan TPAK mengindikasikan bahwa terjadi penurunan jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja maupun sebagai penganggur. Dapat juga dikatakan telah terjadi perpindahan penduduk dari kategori Angkatan Kerja ke kategori Bukan Angkatan Kerja (sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya).

Berdasarkan jenis kelamin, pada Agustus 2024, TPAK laki-laki sebesar 85,73 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 52,15 persen. Dibandingkan Agustus 2023, TPAK laki-laki mengalami kenaikan sebesar 0,81 persen poin, Demikian TPAK perempuan juga mengalami kenaikan sebesar 0,20 persen poin. Berdasarkan wilayah tempat tinggal, pada Agustus 2023, TPAK Perkotaan sebesar 69,21 persen, lebih Tinggi dibanding TPAK Perdesaan yang sebesar 68,70. Dibandingkan Agustus 2023, TPAK Perkotaan mengalami Peningkatan sebesar 1,10 persen poin, sedangkan TPAK Perdesaan mengalami Penurunan sebesar 4,34 persen poin.

Faktor yang mendukung ketercapaian dalam mempengaruhi penurunan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 dipengaruhi penurunan TPT yang cukup signifikan yaitu:

1. Penyerapan tenaga kerja hingga Agustus 2024 didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan Sekolah Menengah Atas Umum sebanyak 318.170 orang (30,33 persen) dan sekolah Menengah kejuruan sebesar 216.690 (20,66 persen). Kemudian disusul tamatan Sekolah Dasar sebanyak 186.880 orang (17,81 persen). Dalam satu tahun terakhir, Penduduk yang bekerja sebanyak 1.049.090 orang, mengalami penurunan sebanyak 29.730 orang dari Agustus 2023. Adanya perubahan kondisi tenaga kerja selama tahun 2024 tidak terlepas dari hal-hal sebagai berikut:
 - a) Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan struktur tenaga kerja di pasar kerja. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2024, tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Industri Pengolahan yaitu sebesar 23,65 persen; Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 16,59 persen; dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,82 persen. Pola lapangan pekerjaan dalam menyerap tenaga kerja ini masih sama dengan Agustus 2023, dimana sektor konstruksi menempati posisi keempat terbesar.
 - b) Dibandingkan Agustus 2023 Lapangan pekerjaan mengalami peningkatan persentase penyerapan tenaga kerja, peningkatan terbesar pada sektor Pertambangan, Pengadaan Listrik dan Gas, dan sektor Pengadaan Air sebesar 0,04 persen poin. Sementara itu, lapangan pekerjaan mengalami penurunan persentase penyerapan tenaga kerja, dengan penurunan terbesar pada sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor industri Pengolahan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, informasi dan komunikasi dan real estate dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Tabel 3.14 Distribusi Penduduk Bekerja menurut Pendidikan yang ditamatkan, Agustus 2023 dan 2024 (%)

NO	Pendidikan	Tahun 2023	Tahun 2024	Selisih
1	SD Ke bawah	21,44	17,81	-3,63
2	Sekolah Menengah Pertama	12,07	11,36	-0,71
3	Sekolah Menengah Atas	31,83	30,33	-1,5
4	Sekolah Menengah kejuruan	18,07	20,66	2,59
5	Diploma I/II/III	2,97	4,48	1,51
6	Universitas (Diploma IV, S1, S2, S3)	13,67	15,36	1,69

Sumber : Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

- c) Kondisi ketenagakerjaan di beberapa kabupaten/kota pada tahun 2024 menunjukkan adanya penyerapan tenaga kerja akibat semakin meningkatnya kesempatan kerja. Seperti Kota Batam pada Tahun 2024 masih merupakan pusat aktivitas perekonomian di Kepulauan Riau. Dimana menunjukkan penurunan angka pengangguran yang cukup signifikan sebesar 0,46 persen dari tahun 2024. Kondisi ini disebabkan beberapa peningkatan produktifitas disektor formal dan informal. Pada Agustus 2024, penduduk Kota Kepulauan Riau yang bekerja di sektor informal mengalami penurunan 2,12 poin dari 33,67 persen menjadi 31,55 sedangkan yang bekerja di sektor formal sebanyak 68,45 persen. Persentase penduduk bekerja di kegiatan formal pada Agustus 2024 naik sebesar 2,12 persen poin jika dibandingkan Agustus 2023 (66,33). Peningkatan

penduduk bekerja pada kegiatan formal ini seiring dengan peningkatan penduduk yang berstatus berusaha dibantu buruh tetap.

- d) Indikator lain yang lebih mendalam menyangkut angkatan kerja adalah pekerja penuh dan pekerja tidak penuh. Indikator ini mampu menjelaskan bahwa seseorang yang bekerja ternyata tidak semua memiliki produktivitas yang tinggi, hal ini diindikasikan dari jam kerja rendah. Pekerja tidak penuh terbagi menjadi dua kelompok yaitu pekerja setengah penganggur dan pekerja paruh waktu. Penduduk yang dianggap sebagai pekerja penuh waktu (*full time worker*), yaitu penduduk yang bekerja pada kelompok 35 jam ke atas per minggu, pada Agustus 2024 jumlahnya mencapai 863.130 (82,27 persen). Dibandingkan dengan Agustus 2023 mengalami Kenaikan sebesar 1,28 persen poin. Sementara itu dalam setahun terakhir, pekerja tidak penuh (jumlah jam kerja kurang dari 35 jam per minggu) berkurang sebanyak 7.860 orang (4,05 persen) yaitu dari 193.808 orang pada Agustus 2022 menjadi 185.950 orang pada Agustus 2024 dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 3.15 Karakteristik Penduduk Bekerja
berdasarkan Pekerjaan Penuh/Tidak Penuh Tahun 2023-2024

NO	Karakteristik	2023 (org)	2024 (org)	Perubahan 2023-2024	persen
1	Pekerja Penuh > 35 Jam	825.550	863.130	37.580	9,61
2	Pekerja Tidak Penuh (1-34 Jam)	185.950	193.810	-7.860	18,94

Sumber : Data BPS Provinsi Kepulauan Riau



Gambar 3.1 Lokasi Pelatihan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau

- Untuk mengatasi TPT Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan upaya lainnya yang mendukung keberhasilan penurunan tingkat pengangguran terbuka adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan pelaksanaan Program pelatihan dalam rangka mengoptimalkan kebijakan Pembangunan Ketenagakerjaan melalui Pemetaan Kebutuhan Pelatihan, Perluasan Balai Latihan Kerja melalui satuan Pelayanan, Pelaksanaan Pelatihan dengan berbagai metode seperti Pelatihan di Balai Latihan Kerja, Pelathan di LPK Swasta dan Pelatihan Industri/pemagangan. Upaya Penempatan Pasca Pelatihan, Penguatan Kelembagaan Bursa Kerja khusus di SMK serta Sinergi *Stakeholder* melalui Tim koordinasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
 2. Peningkatan Pelayanan ketenagakerjaan melalui mengoptimalkan pelayanan penggunaan aplikasi SIAP kerja yang dapat digunakan dalam layanan pendataran pelatihan di Lembaga pelatihan kerja BLK dan LPK Swasta, pendaftaran pemagangan ke luar negeri, sertifikasi BNSP, pendaftaran pencari kerja di karirhub atau portal Pemda dan Portal Swasta dan layanan ketenagakerjaan lainnya seperti *job fair*.

- Beberapa kegiatan 2024 dilaksanakan dengan konsep *tailor made training* dengan pendekatan penempatan di perusahaan, seperti Untuk AK3 umum sinkronisasi program dengan praktek di perusahaan. Program ini mendapatkan materi langsung di tempat kerja, magang di departemen *safety*. Demikian juga *training* bidang perhotelan yang fokus pada *housekeeping*, praktek dilakukan di hotel dengan melibatkan supervisor maupun HRD di hotel. Demikian juga pelaksanaan pelatihan las tahun 2024, *training* dilakukan dengan melibatkan praktisi dengan adopsi *welding* prosedur dari perusahaan sehingga akhir training dilibatkan dengan melakukan *welding test*.
- Pada tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan kerja sama dengan perusahaan atas kebutuhan komposisi kompetensi yang dibutuhkan perusahaan, sehingga pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan melalui program pemagangan. Sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.16 Pelatihan Industri melalui Pemagangan Tahun 2024

Perusahaan	Jumlah Peserta	Bekerja	%
BIIE	11	8	72,73
Grand Lagoi	9	7	77,78
CCI	3	3	100
Sanchaya	29	26	89,66
Doulos Pos	5	5	100
BRC	5	4	80
Aston Inn Batam	9	8	88,89
Santika Batam	10	10	100
Citra Tubindo	70	68	97,14
Louis Alain	25	21	84
DSAW	20	18	90
Ramayana Batam	10	8	80

Sumber : Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau

- Penumbuhan wirausaha baru (WUB) industri kecil sebanyak 230 WUB dan Fasilitas industri kecil dalam bentuk pelatihan, Fasilitas HKI, merk, desain dan sertifikat halal sebanyak 808 industri kecil serta melakukan inkubasi industri kecil sebanyak 40 industri diharapkan dapat membantu memberikan dampak penurunan tingkat pengangguran.
- Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan (Ruang Kelas, Laboratorium, Perpustakaan), peningkatan kuantitas, kualitas, serta distribusi guru, peningkatan kualitas pembelajaran yang mendukung pemenuhan kompetensi siswa.
- Peningkatan jumlah satuan pendidikan Vokasi.

Pembangunan bidang tenaga kerja di Provinsi Kepulauan Riau tidak terlepas dari kondisi perekonomian makro, dimana pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya mampu mengatasi berbagai persoalan utama di bidang ketenagakerjaan baik menyangkut optimalisasi pendayagunaan tenaga kerja, pemerataan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja. Masalah pokok penyelenggaraan bidang tenaga kerja adalah:

- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang masih cukup tinggi khususnya di Kota Batam.
- Rendahnya kesesuaian kompetensi antara pencari kerja dengan kebutuhan industri. Kualifikasi yang dibutuhkan beberapa perusahaan di Provinsi Kepulauan Riau cukup tinggi, tidak dapat di penuhi oleh pencari kerja dengan pengalaman dan kompetensi kerja yang terbatas.
- Belum maksimalnya pelayanan informasi pasar kerja mengenai karakteristik kebutuhan dan persediaan tenaga kerja baik dalam dan luar negeri.
- Belum optimalnya penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang tenaga kerja.

5. Minimnya Kualitas dan Kuantitas SDM fungsional pengantar kerja sehingga pelayanan penempatan tenaga kerja belum dapat dilaksanakan secara optimal.
6. Inovasi program perluasan lapangan kerja sektor informal masih minim sehingga angkatan kerja muda dan berpendidikan kurang tertarik di sektor informal.
7. Minimnya kualitas dan kuantitas instruktur dan sumber daya manusia (SDM) pengelola pelatihan sehingga berdampak terhadap pemasaran program pelatihan kepada masyarakat, dunia usaha/industri dan dunia pendidikan.
8. Sistem, mekanisme, dan sarpras informasi kepada pencari kerja maupun perusahaan belum optimal dan efektif berjalan.
9. Masih terbatasnya modul dan standar-standar pelatihan kerja dan pelatihan kewirausahaan.
10. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelatihan sesuai dengan perkembangan teknologi sekarang sehingga kebutuhan dunia usaha terhadap lulusan BLK belum optimal terpenuhi.
11. Lulusan pendidikan vokasi belum mampu mengimbangi kebutuhan DUDI yang berkaitan perkembangan jenis, mutu dan teknologi.
12. Masih terbatasnya program *teaching factory* dan jumlah guru produktif

Dalam rangka penurunan tingkat pengangguran terbuka dan mengurangi permasalahan dan kendala yang dihadapi maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan alternatif solusi untuk kedepannya, yaitu:

1. Penguatan Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) yang melibatkan Bappeda, Disnaker, Dinas Pendidikan, Disperindag, Lembaga Pendidikan Vokasi, Konsersium Politeknik, Kadin, Asosiasi Perusahaan dan LSP.
2. Penyusunan Strategi daerah untuk revitalisasi Pelatihan Vokasi yang fokus pada Optimalisasi Sistem Informasi Pasar kerja, Penguatan Peran DUDI dalam Proses Pendidikan Vokasi, Penguatan Sistem Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebutuhan Pasar Kerja, Meningkatkan relevansi dan aksesibilitas sertifikasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, Terwujudnya kolaborasi riset inovasi dan Hilirisasi produk oleh akademisi, industri masyarakat dan Pemerintah daerah serta Monitoring dan Evaluasi Efektifitas Pelaksanaan Pelatihan Vokasi.
3. Pelatihan industri dalam bentuk pemagangan sangat efektif dalam bentuk penempatan tenaga kerja, sehingga aktivitas pemagangan di industri masih tetap akan dilaksanakan pada tahun 2025.
4. Pelatihan penumbuhan wirausaha baru melalui inkubasi industri.
5. Peningkatan kemitraan antara industri kecil, menengah, besar dan sektor ekonomi lainnya.
6. Pelatihan SDM dan pengembangan manajemen pelaku IKM.
7. Memperkuat dan memperluas kemitraan magang siswa pada dunia usaha untuk memberi ruang yang lebih fleksibel bagi peserta didik SMK melakukan magang pada dunia usaha sesuai dengan jurusan.
8. Menyesuaikan dan menyelaraskan kurikulum pendidikan dan standar kelulusan peserta didik sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
9. Menerapkan pembelajaran berbasis industri, atau yang dikenal dengan *teaching factory*. *Teaching factory* dapat meningkatkan kesiapan kerja lulusan, menyelaraskan kompetensi, dan membentuk karakter kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

- 10.Meningkatkan kemampuan lulusan peserta didik dengan penguasaan teknologi dan penguasaan Bahasa asing sebagai kemampuan dasar dalam memasuki pasar kerja.
- 11.Pengembangan dan penguatan program *Link and Match* dengan dunia usaha dengan mendatangkan tenaga kualifikasi dari dunia industri sebagai transfer ilmu dan pengalaman bagi peserta didik SMK.

Program-program yang mendukung penurunan tingkat pengangguran terbuka Tahun 2024 diantaranya adalah program Pelatihan dan Produktivitas dan Program Penempatan Tenaga Kerja.

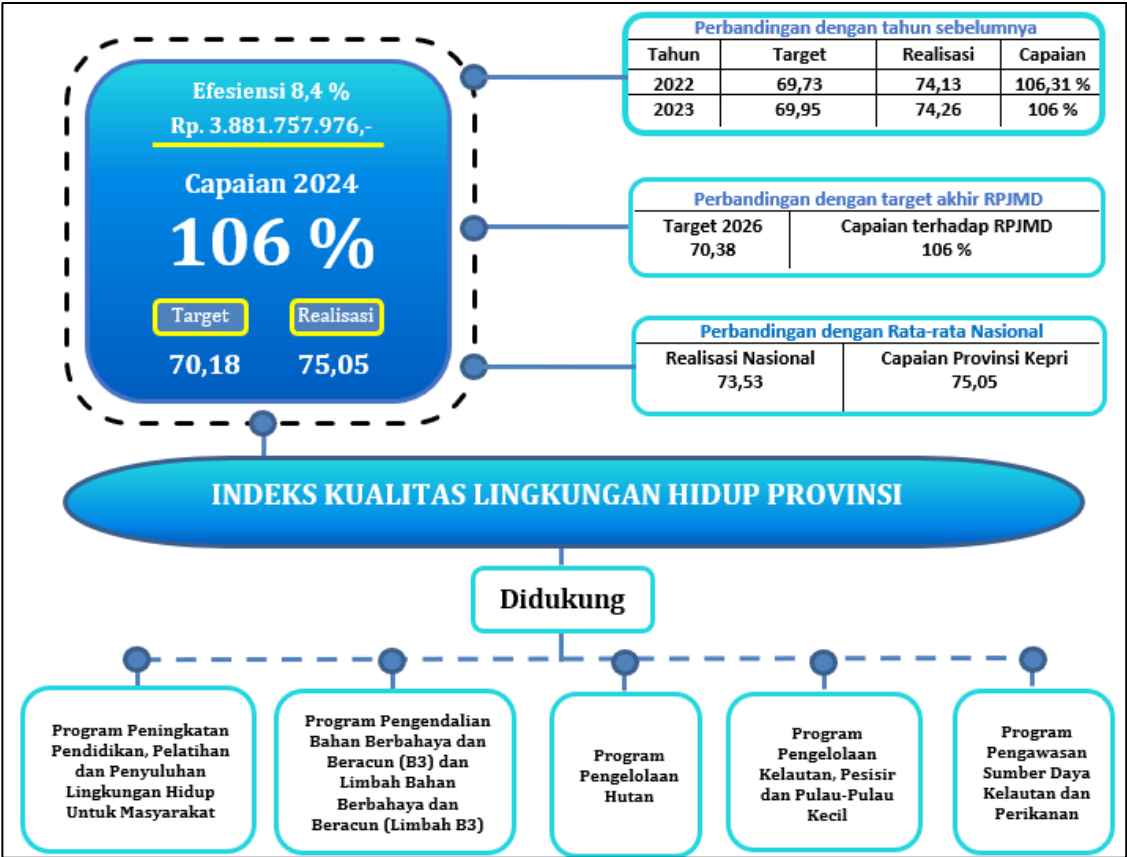
Tabel 3.17 Program-program yang mendukung Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka

No	Nama Program	Anggaran (Rupiah)	
		Target	Realisasi
1	Pelatihan dan Produktivitas	3.239.016.874,00	3.084.224.287,00
2	Penempatan Tenaga Kerja	74.818.500,00	40.430.700,00
3	Perencanaan dan Pembangunan Industri	4.671.593.002,00	4.324.879.949,00
4	Pengelolaan Pendidikan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SMK	143.731.404.700,00	113.325.764.165,00
Total		151.716.833.076,00	120.775.299.101,00

Dari jumlah anggaran sebesar Rp151.716.833.076,00 terealisasi sebesar Rp120.775.299.101,00 atau 79%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp30.941.533.975,00 (21%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja tingkat pengangguran terbuka (115,25%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (79%) sehingga efesiensi mencapai 36,25%.

3.5.3. Sasaran Penurunan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup

3.5.3.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup



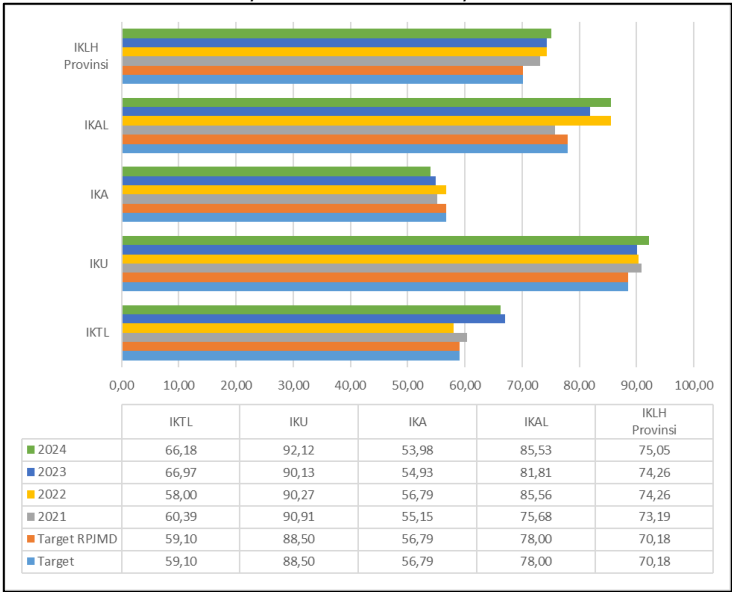
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indeks IKLH di Provinsi Kepulauan Riau meningkat. Realisasi indeks IKLH pada Tahun 2024 sudah baik sebesar 75,05 (Indeks) dari target sebesar 70,18 (Indeks) dengan capaian kinerja sebesar 106%.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nilai IKLH Nasional merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara Nasional. IKLH merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup di seluruh Provinsi. IKLH Provinsi Kepulauan Riau merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan terukur dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh Kabupaten/Kota.

Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 4 (empat) indikator yaitu:

1. Indeks Kualitas Air (IKA) yang diukur berdasarkan parameter-parameter :
 - TSS
 - Total Fosfat
 - DO
 - Fecal Coli
 - pH
 - NO3
 - BOD
 - COD
2. Indeks Kualitas Udara Ambien (IKU) yang diukur berdasarkan parameter SO2 dan NO2.
3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan dan semak belukar dalam kawasan hutan, kawasan fungsi lindung;
4. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) yang diukur berdasarkan parameter TSS, DO, Minyak dan Lemak, Amonia Total, dan Orto-Fosfat.

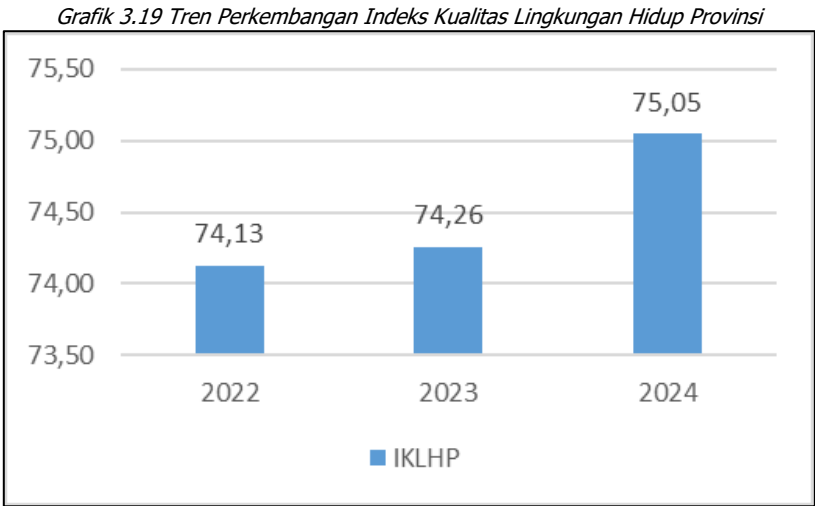
Grafik 3.18 Data Capaian ILKH Provinsi Kepulauan Riau 2021 - 2024



Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

Penurunan pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup dilihat dari indikator kualitas lingkungan hidup Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan pertumbuhan yang cukup menggembirakan. Realisasi kinerja indikator peningkatan kualitas lingkungan hidup Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 sebesar 75,05 Indeks berdasarkan kinerja dapat mencapai target dari yang telah ditetapkan sebesar 70,18 Indeks sehingga capaian kinerja sebesar 106% atau dalam kategori **Sangat Baik**.

Realisasi Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi dilihat dari beberapa tahun sebelumnya mengalami peningkatan, hal tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

Realisasi kinerja peningkatan indikator kualitas lingkungan hidup Provinsi tahun 2024 apabila dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 0,79 Indeks. Dimana pada tahun 2023 peningkatan kualitas lingkungan hidup Provinsi hanya sebesar 74,26 Indeks meningkat menjadi 75,05 Indeks pada tahun 2024.

Pada Tahun 2024 Capaian Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau sebesar 75,05 dari target yang ditetapkan pada RPJMD sebesar 70,18 dengan Rating Baik dengan Indeks Respon sebesar 5,10. Sehingga IKLH Provinsi Kepulauan Riau masuk peringkat ke 19 dari 38 Provinsi di Indonesia.

Hasil capaian kinerja IKLH dari perhitungan 4 indikator yaitu:

1. Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 53,98 dengan rating Sedang;
Indeks Kualitas Air (IKA) mengalami penurunan yang terjadi pada musim kemarau yang membuat volume air sungai berkurang di Kab/Kota, terjadi pencemaran air akibat pengerukan atau pemotongan tebing tanah untuk pelebaran jalan dan *influent* lain melalui selokan-selokan air yang ada di sekitar waduk di Batam, terbatasnya ketersediaan anggaran untuk melakukan pemantauan kualitas air. Oleh karena itu Indeks Kualitas Air (IKA) tidak mencapai target RPJMD.
2. Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 92,12 dengan rating Sangat Baik;
Indeks Kualitas Udara (IKU) Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan, hasil evaluasi dari 7 (tujuh) kab/kota dimana berdasarkan evaluasi tersebut indeks respon daerah pada Program Langit Biru pada umumnya kab/kota tersebut memiliki kebijakan dan peraturan, SDM, serta implementasi berupa menyiapkan sarana prasarana seperti pedestrian, jalur sepeda, Ruang Terbuka Hijau (RTH), penerapan area rendah emisi (LEZ); melaksanakan program seperti *Car Free Day* (CFD) dan gerakan masyarakat (germas) bersepeda.

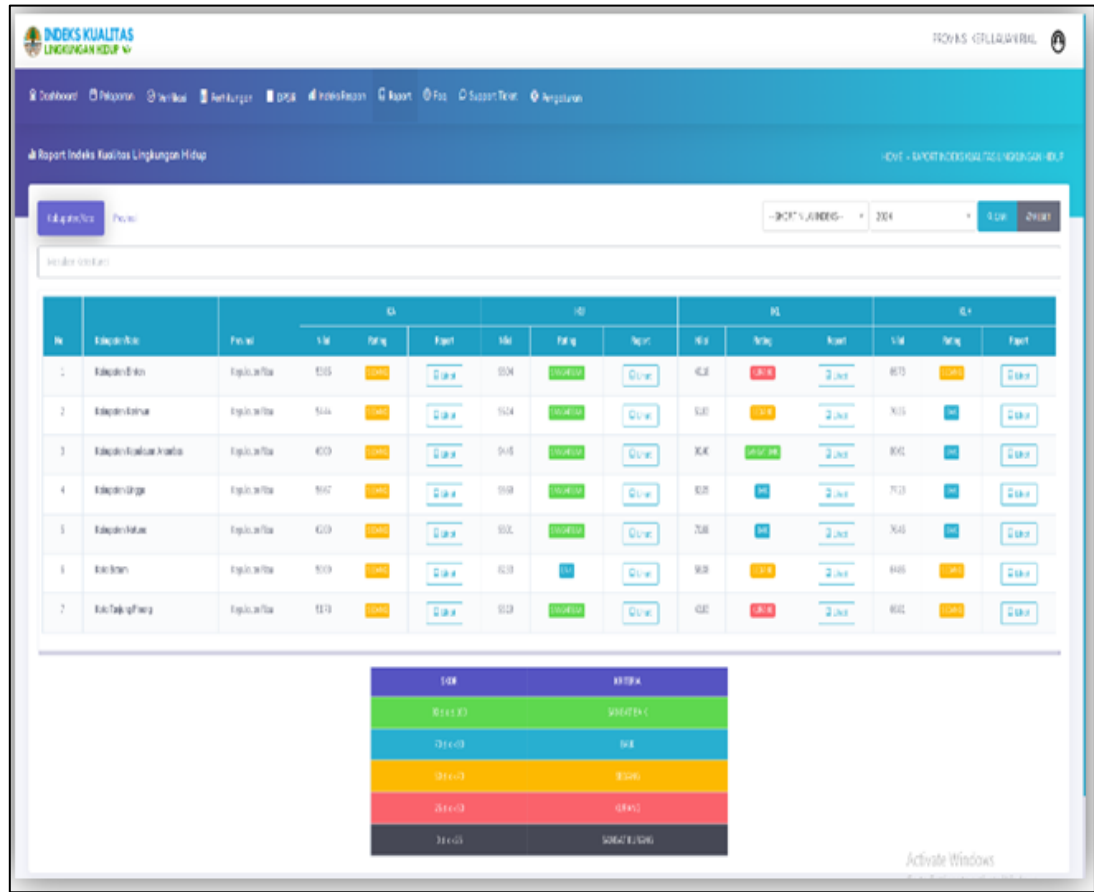
Keberhasilan pemantauan udara di provinsi Kepulauan Riau tidak lepas dari adanya instrumen AQMS yang difasilitasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang di letakkan di 2 (dua) lokasi yaitu Kota Batam dan Kota Tanjungpinang. *Air Quality Monitoring System (AQMS)* adalah Alat Pemantau Kualitas Udara Otomatis adalah sistem untuk mengetahui tingkat pencemaran udara.

3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) sebesar 66,18 dengan rating Sedang;

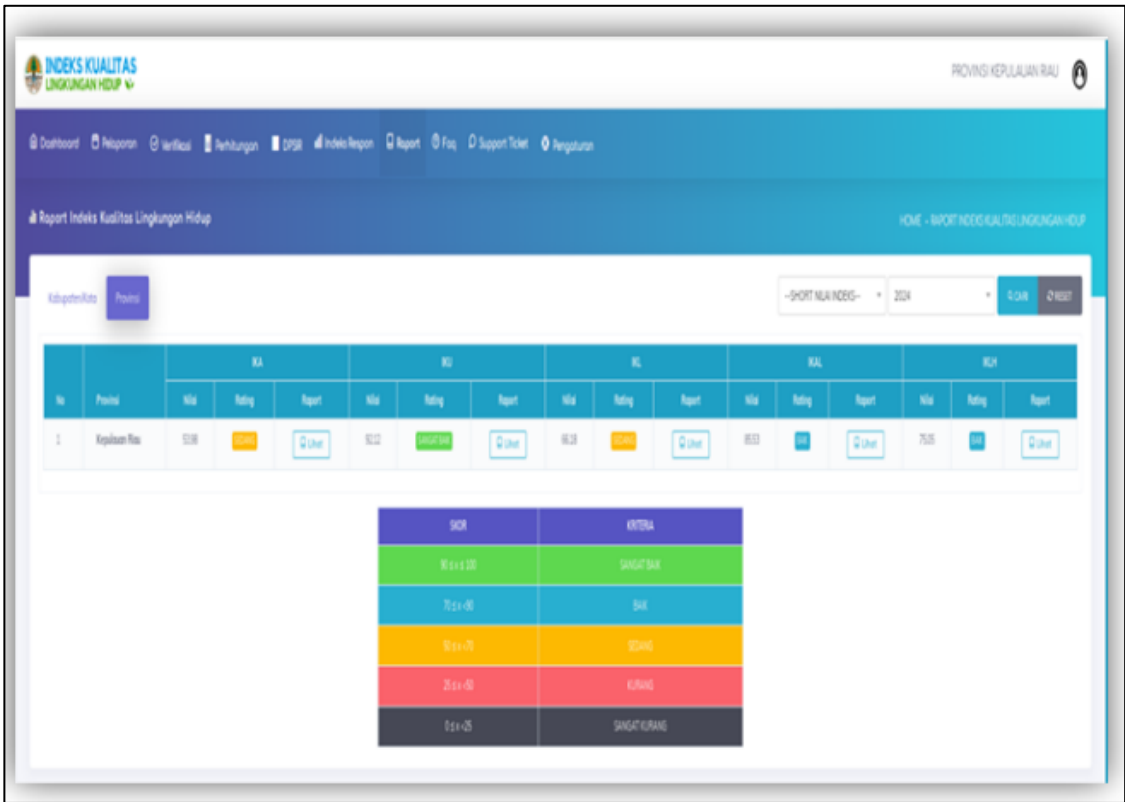
Pada data Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), terdapat 7 (tujuh) kab/kota yang meningkat nilai IKTL. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya penambahan luas ruang terbuka hijau di Provinsi Kepulauan Riau. Seperti di Pemukiman dan Taman Kota, baik dalam bentuk taman lingkungan maupun penghijauan pekarangan. Ruang terbuka hijau permukiman yang dikelola dengan baik akan memberikan sumbangan yang berarti pada luasan ruang terbuka hijau kota seluruhnya.

4. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) sebesar 85,53 dengan rating Baik.

Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) mengalami kenaikan karena dari 7 (tujuh) Kab/Kota yang dipantau dan dievaluasi, yang meningkat mutunya. Peningkatan kualitas air laut tentu tak terlepas dari adanya implementasi kebijakan seperti rehabilitasi dan restorasi pesisir seperti penanaman mangrove, partisipasi masyarakat dalam pengolahan pesisir dan laut dan tentu perbaikan di hulu, hal ini terlihat naiknya IKA dan IKTL. Sebagaimana kita ketahui bahwa kualitas air laut dipengaruhi 80% oleh pencemaran dan kerusakan di darat (*landbase pollution*).



Gambar 3.2 Report Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kab/kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024



Gambar 3.3 Raport Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Tabel 3.18 Raport Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Nasional Tahun 2024

Indeks	Target		Relisasi		Kriteria
	2023	2024	2023	2024	
IKA	55,4	55,5	54,59	54,78	Sedang
IKU	84,4	84,5	88,67	90,13	Sangat Baik
IKL	64,5	65,5	61,79	61,95	Sedang
IKAL	60	60,5	78,84	81,67	Baik
IKLH	69,48	69,74	72,54	73,53	Baik

Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

Dari tabel diatas, bahwa IKLH Nasional tahun 2024 sebesar 73,53 poin, meningkat 0,99 poin dibandingkan dengan hasil perhitungan tahun 2023 (72,54 poin). Nilai IKLH mencapai target yang ditetapkan tahun 2024 sebesar 69,74 poin, hal-hal yang menyebabkan meningkatnya IKLH Nasional antara lain :

1. Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 90,13 poin, meningkat 1,46 poin dibandingkan dengan hasil perhitungan tahun 2023 (88,67 poin). Jumlah kabupaten/kota yang dipantau kualitas udaranya sebanyak 509 kabupaten/kota dan jumlah AQMS yang dibangun sebanyak 78 unit (termasuk mobile reference dan portable). Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu emisi sebanyak 3.345 industri, meningkat sebanyak 490 industri dibandingkan tahun Sebelumnya.
2. Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 54,78 poin meningkat 0,19 poin dibandingkan hasil perhitungan tahun 2023 (54,59 poin). Jumlah titik pantau untuk perhitungan IKA sebanyak 837 dan jumlah onlimo yang dibangun sebanyak 153 titik. Jumlah fasillitas IPAL dan biodigester yang dibangun sebanyak 225 unit dan yang berada di DAS Citarum sebanyak 42 unit, dengan persentase penurunan beban pencemaran BOD sebesar 0,12% dan jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu air limbah sebanyak 3.235 industri meningkat sebbanyak 382 industri dibandingkan tahun sebelumnya.

3. Indeks Kualitas Lahan (IKL) sebesar 61,95 poin meningkat 0,16 poin dibandingkan hasil perhitungan tahun 2023 (61,79 poin). Penghitungan nilai IKL dikembangkan dari penghitungan IKTL dengan mempertimbangkan dampak dari kanal dan kebakaran di lahan gambut. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) sebesar 61,96 poin meningkat 0,31 poin dibandingkan tahun sebelumnya (61,65 poin). Pemulihan lahan yang dilakukan seluas 150,43 Ha yang terdapat di 15 lokasi.
4. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) sebesar 81,67 meningkat 2,83 poin dibandingkan tahun lalu (78,84 poin). Pemantauan kualitas air laut dilaksanakan di 386 titik sebanyak 2 kali pemantauan. Pemantauan sampah laut dilakukan di 24 provinsi dengan pemantauan jenis sampah mikroplastik. Pemulihan ekosistem terumbu karang dilaksanakan di 12 lokasi dengan adanya penambahan anggaran dari sumber PNBP.

Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup Provinsi yaitu penurunan kualitas air laut sebagaimana kita ketahui bahwa kualitas air laut dipengaruhi 80% oleh pencemaran dan kerusakan di darat diantaranya disebabkan oleh:

- Pembuangan sampah di laut
- Pembuangan Limbah oleh sektor industri
- Reklamasi pantai
- Rusaknya ekosistem laut dan terumbu karang

Kendala juga dihadapi dalam mendukung Indeks Kualitas Air (IKA) mengalami penurunan yang terjadi pada musim kemarau yang membuat volume air sungai berkurang di Kab/Kota, terjadi pencemaran air akibat pengerukan atau pemotongan tebing tanah untuk pelebaran jalan dan influent lain melalui selokan-selokan air yang ada di sekitar waduk di Batam.

Dalam rangka meningkatkan peningkatan indikator kualitas lingkungan hidup Provinsi dan mengurangi permasalahan dan kendala yang dihadapi maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan alternatif solusi untuk kedepannya dengan cara sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)

Alternatif solusi yang dilakukan adalah dengan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mematuhi aturan dan tidak melakukan pencemaran terhadap air laut dengan cara membuang sampah dilaut. Selain itu pemerintah juga harus tegas kepada oknum atau pihak perusahaan yang melakukan pembuangan limbah yang tidak diolah atau tidak aman bagi lingkungan, serta kepada perusahaan yang melakukan kegiatan reklamasi pantai agar patuh pada peraturan yang berlaku. Pemerintah Daerah dalam hal ini baik Kabupaten/Kota juga Provinsi harus melakukan pemantauan air laut secara periodik yaitu 6 bulan sekali sesuai dengan PP Nomor 22 tahun 2021.

2. Indeks Kualitas Air (IKA)

Alternatif solusi yang dilakukan agar Indeks Kualitas Air (IKA) dapat di tingkatkan yaitu dengan cara :

- Ketersediaan anggaran untuk melakukan pemantauan
- Melakukan pemantauan kualitas air sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu sebanyak 4 kali pemantau dalam setahun (PP 22 Tahun 2021)
- Pemberdayaan Instrumen Pemantauan secara online kualitas air yang ada di Sei jago di Tanjung Uban Kabupaten Bintan dan sekaligus penyediaan petugas beserta honorarium petugas jaga.

3. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Alternatif solusi yang di lakukan untuk meningkatkan indeks kualitas udara (IKU) adalah dengan cara:

- Pemerintah Daerah dalam hal ini baik Kabupaten/Kota juga Provinsi harus melakukan pemantauan udara secara periodik yaitu 6 bulan sekali sesuai dengan PP Nomor 22 tahun 2021.
- Melaksanakan kembali kegiatan uji emisi, karena sejak tahun 2014 uji emisi sudah tidak dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.
- Mengurangi Kendaraan Pribadi.
- Membatasi Penggunaan Pendingin Udara.
- Efisiensi Penggunaan Listrik sebagai Solusi Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca.
- Kurangi Penggunaan Plastik Sekali Pakai.

4. Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Penyediaan ruang terbuka hijau di suatu kota tidak hanya selalu dari pemerintah, seperti penyediaan taman kota, jalur hijau, dan lainnya. Namun, penyediaan ruang terbuka hijau juga dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kesadaran penghuni kota akan pentingnya ruang terbuka hijau.

Berbagai jenis ruang terbuka hijau dapat dilakukan di lahan privat milik masyarakat atau swasta. Salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyediaan ruang. Selain itu pemerintah juga harus menyediakan anggaran untuk melakukan program dan kegiatan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Program-program yang mendukung pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2024 diantaranya adalah sebagai berikut:

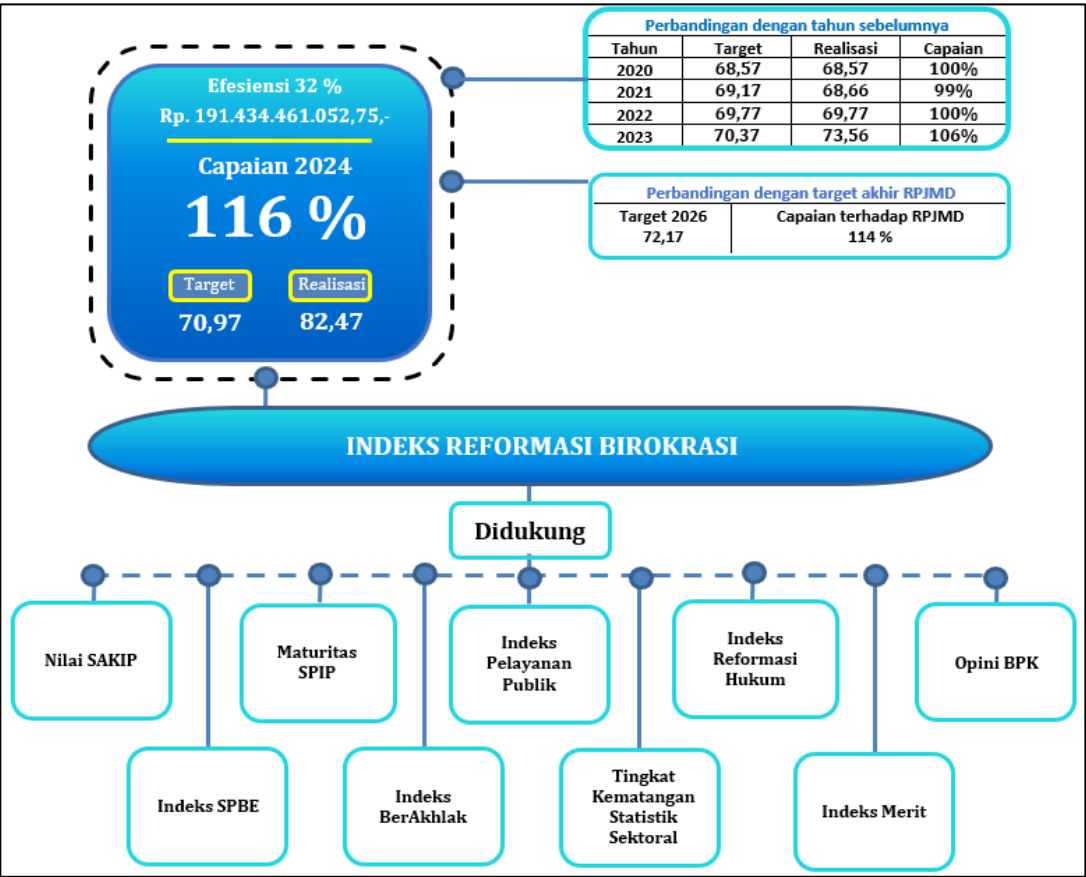
Tabel 3.19 Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau Beserta Anggaran

No	Program/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi	
			(Rp.)	(%)
1	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	181.589.541	177.987.091	98,02
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	181.589.541	177.987.091	98,02
2	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	214.235.911	151.298.245	70,62
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	214.235.911	151.298.245	70,62
3	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1.385.851.467	1.276.647.767	99,52
	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	425.186.300	384.177.286	90,36
	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	95.940.000	89.728.803	93,53
	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	644.725.167	585.448.878	90,18
	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	220.000.000	217.292.800	100
4	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	432.682.670	397.662.602	91,90
5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.667.398.387	1.550.334.546	92,97
JUMLAH		3.881.757.976	3.553.930.251	8,4

Dari jumlah anggaran sebesar Rp3.881.757.976,00 terealisasi sebesar Rp3.553.930.251,00 atau 92%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp327.827.725,00 (8,4%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja tingkat pengangguran terbuka (106%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (92%) dengan efisiensi 14%.

3.5.4. Sasaran Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat dan Antisipatif

3.5.4.1. Indeks Reformasi Birokrasi



Reformasi Birokrasi merupakan sebuah upaya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik guna mempercepat proses pembangunan nasional sampai ke daerah. Tata kelola pemerintahan berimplikasi erat pada bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat yang merupakan ujung tombak pembangunan daerah. Indeks Reformasi Birokrasi di Provinsi Kepulauan Riau meningkat. Indeks Reformasi Birokrasi pada Tahun 2024 sudah baik dengan realisasi kinerja sebesar 82,47 indeks dari target sebesar 70,97 indeks dan dengan capaian kinerja sebesar 116%.

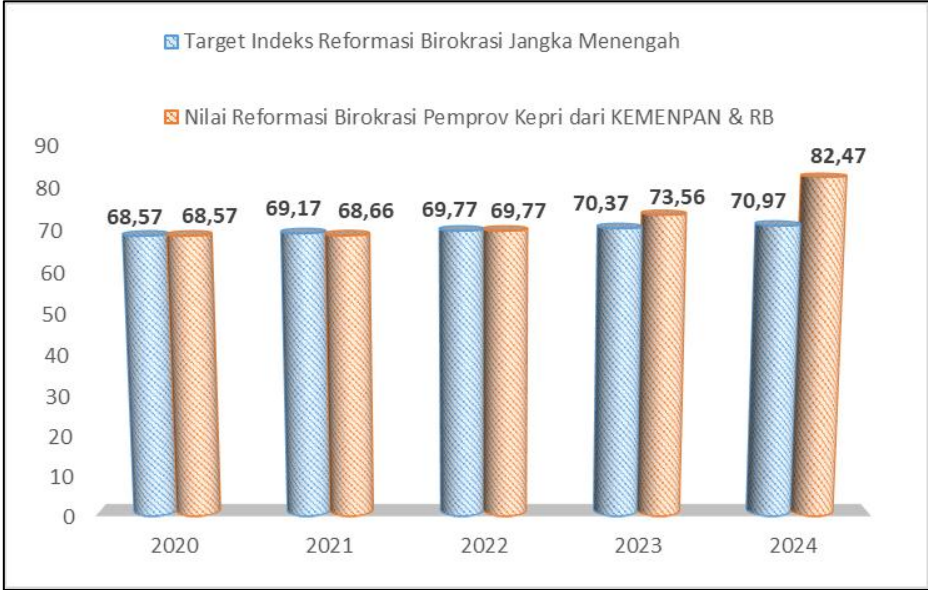
Reformasi Birokrasi merupakan sebuah upaya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik guna mempercepat proses pembangunan nasional sampai ke daerah. Tata kelola pemerintahan berimplikasi erat pada bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat yang merupakan ujung tombak pembangunan daerah. Semakin baik tata kelola pemerintahan, maka semakin baik pula pelayanan kepada masyarakat serta percepatan pembangunan dapat terwujud.

Dalam memenuhi Sasaran Strategis RPJMD bidang Tata kelola pemerintahan yang bersih, kuat dan antisipatif telah ditetapkan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Kepulauan Riau.

Dilihat berdasarkan kinerja dapat mencapai target dari yang telah ditetapkan sebesar 70,97 pada tahun 2024 dengan capaian realisasi sebesar 82,47 dan capaian kinerja sebesar 116% atau dalam kategori **Sangat Baik**.

Progres capaian RB Provinsi Kepulauan Riau juga dapat dilihat melalui Indeks RB. Indeks RB menggambarkan tingkat kemajuan pemerintah daerah dalam menciptakan birokrasi yang berkualitas. Capaian kinerja Indeks reformasi birokrasi tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 maka Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan sebesar 8,91 indeks. Pada tahun 2023 Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 73,56 meningkat menjadi 82,47 pada tahun 2024.

Grafik 3.20 Peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi Provinsi Kepulauan Riau 2020 - 2024



Sumber : Data Biro Organisasi Setda Provinsi Kepulauan Riau

Dilihat dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) realisasi kinerja Indeks reformasi birokrasi di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 82,47 dengan target sebesar 72,17 dengan capaian kinerja sebesar 114%.

Keberhasilan pencapaian indeks RB Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau didukung Tim Pelaksana Reformasi Biorkrasi yang bertugas menyusun rencana aksi dan mengkoordinir ketercapaian sasaran Reformasi Birokrasi general dan Tematik yang terbagi pada beberapa perangkat daerah penanggungjawab.

Berikut disampaikan capaian sasaran Reformasi Birokrasi Provinsi Kepulauan Riau:

Tabel 3.20 Capaian Sasaran Reformasi Birokrasi General Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024

Sasaran	Indikator	Target	Capaian
Terimplementasikannya Kebijakan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN dengan Baik	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai	4	4
Terimplementasikannya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	2	0
	Indeks SPBE	2,74	3,05
Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegritasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Perencanaan Pembangunan	83,3	91,24
	Nilai SAKIP	76,20	77,87
Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	2,5	0,5
	Tingkat Maturitas SPIP	3,4	3,2
	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	4	3

Sasaran	Indikator	Target	Capaian
	Hasil Survei Penilaian Integritas	71	71,66
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Dan Regulasi	Indeks Reformasi Hukum	70	96,42
	Indeks Kualitas Kebijakan	70	10
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital Dan Data Statistik Sektoral	Tingkat Digitalisasi Arsip	90	90,5
	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2,7	2,61
Meningkatkan Kualitas Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Pengelolaan Keuangan Dan Aset	Indeks Tata Kelola Pengadaan	91	91,35
	Opini BPK	WTP	WTP
	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	88	82,41
Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional	Indeks Sistem Merit	330,5	330,5
Terselenggaranya Manajemen Talenta ASN Yang Efektif Dan Efisien			
Terwujudnya sistem kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan berbasis kinerja			
Terwujudnya Rekrutmen Pegawai ASN yang Efektif dan efisien			
Terwujudnya percepatan tranformasi digital manajemen ASN			
Terwujudnya Percepatan Peningkatan Kapasitas Pegawai ASN			
Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Sistem Merit Dan Sistem Manajemen ASN	Indeks BerAkhlaq	70	73,54
Terwujudnya pelayanan publik secara prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	85	86,11
	Indeks Pelayanan Publik	4,2	4,26
	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	87	90,45

Sumber : Data Biro Organisasi Setda Provinsi Kepulauan Riau

3.5.4.2. Analisa Capaian Reformasi Birokrasi General

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau telah memasuki tiga periode Road Map RB sejak Grand Design RB Tahun 2010–2025 diterbitkan. Sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 dan berdasarkan hasil evaluasi Menpan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan perbaikan dokumen perencanaan pelaksanaan RB dengan menerbitkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 485 Tahun 2024 Tentang Penajaman Roadmap Reformasi Birokrasi dengan mempertajam Sasaran, indikator dan target beserta rencana aksi Reformasi Birokrasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023-2024.

Reformasi General mengarahkan pelaksanaan fokus penyelesaian isu hulu dengan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Merit Sistem

Upaya yang mendukung keberhasilan reformasi birokrasi dari segi penataan manajemen kepegawaian dalam penerapan merit sistem dimana Prinsip Sistem Merit didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Pemerintah Provinsi Kepulauan berkomitmen melaksanakan manajemen talenta dengan menerbitkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 507 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Manajemen Talenta dan Keputusan Gubernur Nomor 509 Tahun 2024 tentang Jabatan kritikal di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau. Dukungan berjalan manajemen talenta juga telah terlihat dengan dibangun aplikasi Manajemen Talenta yang akan membantu memetakan talenta ASN dalam posisi *Nine Box*.

Dalam mewujudkan pelayanan dan pengelolaan informasi kepegawaian yang akurat, terintegrasi, real time dan berkualitas secara sistematis dan terpadu Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan integrasi data aplikasi SIMPEG dengan SI-ASN (Sistem informasi Aparatur Sipil Negara) merupakan Aplikasi Badan Kepegawaian Negara dan sudah sampai pada progres capaian integrasi secara 2 (dua) arah.

Dalam peningkatan kapasitas ASN, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga melakukan penyusunan *Roadmap* Pengembangan Kompetensi ASN tahun 2024-2029 telah mengidentifikasi dan merumuskan kebutuhan pengembangan kompetensi bagi ASN Provinsi Kepulauan Riau. Pelaksanaan Coaching bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, memberikan dampak positif baik bagi Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpinnya terutama dalam memahami kewajiban pengembangan kompetensi 20 JP dalam satu tahun dan Implementasi nilai-nilai budaya berakhlak.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau berhasil meraih Peringkat V Lembaga Pelatihan Berprestasi, Kategori Kelompok Lembaga Pelatihan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Kompetisi Penghargaan Lembaga Pelatihan Berprestasi Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh LAN.

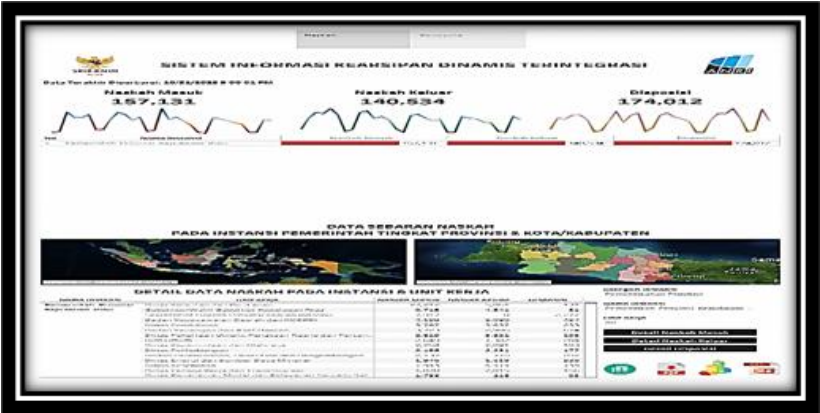


Gambar 3.4 Daftar provinsi Pelatihan Berprestasi Tahun 2024

2. Digitalisasi Arsip

Upaya penataan digitalisasi arsip Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2023 tentang Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan seluruh proses bisnis penciptaan arsip, penggunaan arsip dan pemeliharaan arsip.

100% (seratus persen) perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan pembuatan dan penerimaan naskah dinas pada aplikasi bidang kearsipan dinamis dan telah melakukan penandatanganan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSSN RI.



Gambar 3.5 Data Penggunaan Naskah Dinas Elektronik

3. Statistik Sektoral

Upaya lain dalam penerapan Reformasi Birokrasi dalam menjalankan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 21 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Kepulauan Riau, dan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 476 Tahun 2024 tentang Daftar Data Prioritas Provinsi Kepulauan Riau serta penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, melakukan beberapa upaya dalam meningkatkan kualitas data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia. Tahun 2024 Koordinator Satu Data Indonesia (SDI) Provinsi Kepulauan Riau (BAPELITBANG) bersama Walidata (Diskominfo) dan Pembina Data (BPS) menyusun Daftar Data Prioritas Provinsi Kepulauan Riau dan telah terbit Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 400 Tahun 2024 Tentang Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Berikut Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 sesuai Keputusan Kepala Badan Statistik RI Nomor 605 Tahun 2024.

Tabel 3.21 Hasil Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Domain	Bobot	Tahun 2024	
		Nilai Nasional	Hasil
Prinsip Satu Data	28%	2,43	2,75
Kualitas Data	24%	2,27	2,51
Proses Bisnis Statistik	19%	2,47	2,79
Kelembagaan	17%	2,32	2,48
Statistik Sektoral	12%	2,20	2,44
Indeks Pembangunan Statistik	100%	2,35	2,61

Sumber : Data Biro Organisasi Setda Provinsi Kepulauan Riau

4. Pelayanan Publik

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Pemerintah Provinsi Kepri Tahun 2024 melaksanakan Sosialisasi PEKPPP 2024 bagi lokus evaluasi di tingkat Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang disejalankan dengan kegiatan Sosialisasi Bersama Kebijakan Bidang Pelayanan Publik di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 serta pendampingan terhadap unit kerja yang masih memiliki kelemahan terhadap 6 aspek dan 30 indikator yang akan dievaluasi.

Grafik 3.21 Tren Capaian Indeks Pelayanan Publik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 - 2024



Sumber : Data Biro Organisasi Setda Provinsi Kepulauan Riau

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kinerja penyelenggaraan pelayanan publik pada instansi pemerintah. Hasil pelaksanaan SKM pada Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik dengan nilai rata-rata IKM mencapai 86,13.

Grafik 3.22 Tren Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 - 2024



Sumber : Data Biro Organisasi Setda Provinsi Kepulauan Riau

Perbaikan kualitas pelayanan publik serta pencegahan mal administrasi melalui pemenuhan standar pelayanan, penyediaan sarana-prasarana, peningkatan kompetensi pelaksana layanan, serta pengelolaan pengaduan pada tiap unit pelayanan publik baik pusat maupun daerah.

Ombudsman Republik Indonesia telah melakukan penilaian kepatuhan standar pelayanan publik terhadap pejabat dan unit pelayanan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dengan hasil yang diperoleh adalah Nilai 90,45 (Zona Hijau), Kategori A (Kualitas Tertinggi).



Gambar 3.6 Piagam Penghargaan Ombudsman : Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 mendapat nilai 90,45, Zona Hijau, Kualitas Tertinggi



Gambar 3.7 Piagam Penghargaan Ombudsman : Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat (RSJKO) Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau mendapat nilai 95,85, Zona Hijau, Opini Kepatuhan Tinggi



Gambar 3.8 Piagam Penghargaan Ombudsman : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kepulauan Riau mendapat nilai 92,67, Zona Hijau Opini Kepatuhan Tertinggi



Gambar 3.9 Piagam Penghargaan Ombudsman : Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau mendapat nilai 92.39, Zona Hijau, Opini Kepatuhan Tertinggi

5. Indeks Berakhlak



Gambar 3.10 Penandatanganan Komitmen Berakhlak

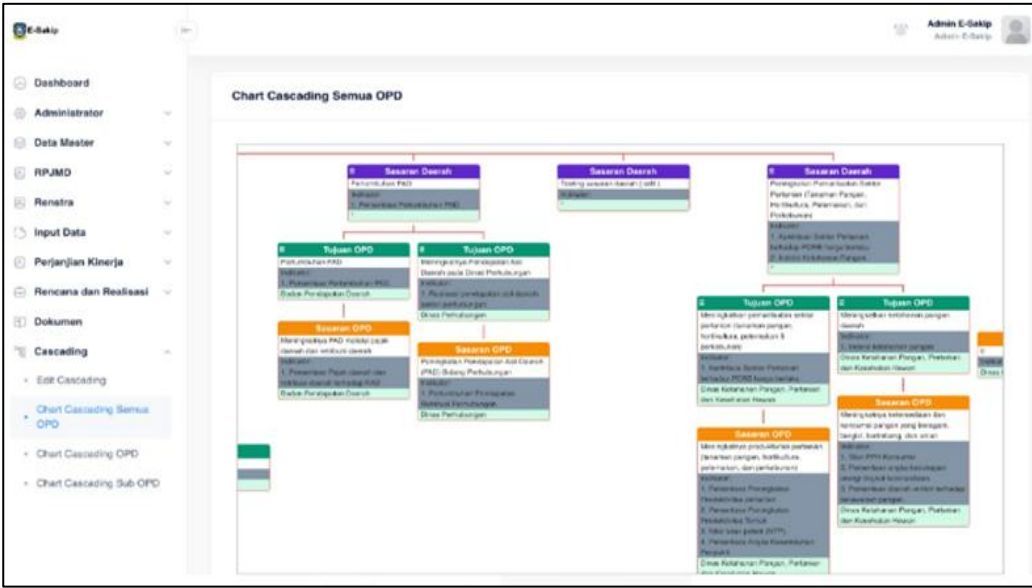
Upaya yang dilakukan dalam penerapan Budaya Kerja Berakhlak Pimpinan dan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen dalam menerapkan nilai-nilai berakhlak, salah satu upaya yang telah dilakukan:

- Penandatanganan Komitmen penerapan nilai-nilai Budaya kerja Berakhlak
- Membentuk memberdayakan Agen Perubahan sebagai pelopor dan penggerak perubahan pada perangkat daerah
- Melaksanakan internalisasi nilai-nilai budaya kerja melalui seminar dan *couching*
- Publikasi dalam rangka pengenalan budaya kerja melalui beberapa media
- Melaksanakan *sharing knowledge*

6. Nilai SAKIP

Hasil Penilaian Kementerian PAN dan RB terhadap penerapan SAKIP di lingkungan Provinsi sudah menunjukkan perkembangan yang baik dengan predikat BB. Upaya yang dilakukan dalam peningkatan Nilai Sakip Pemerintah Provinsi Kepulauan atas kerjasama Tim Sakip yang terdiri dari Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan, Badan Kepegawaian Daerah dan Biro Organisasi merumuskan konsep Peraturan Gubernur tentang Pedoman Implementasi SAKIP dengan harapan terwujudnya sinkronisasi, sinergitas dan kesinambungan mulai dari perencanaan strategis, perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, pengelolaan data Kinerja, pelaporan Kinerja dan evaluasi AKIP.

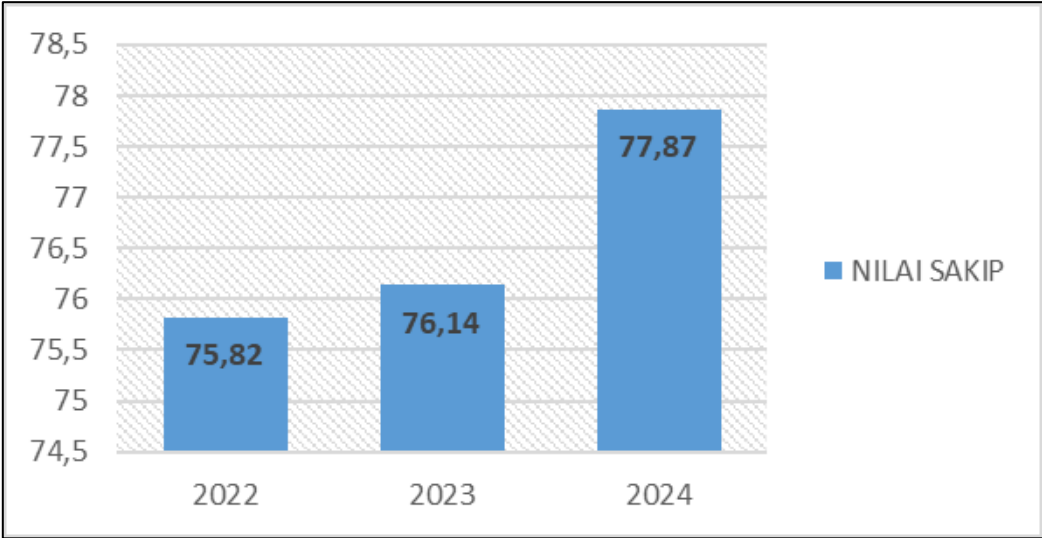
Dalam rangka mendukung proses penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja dalam pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah telah dikembangkan Sistem Informasi Penyelenggaraan SAKIP yang selanjutnya disebut e-SAKIP.



Gambar 3.11 Pengembangan Aplikasi E-SAKIP

Nilai SAKIP Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan setiap tahunnya,hal tersebut tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan dengan melaksanakan perbaikan sesuai dengan rekomendasi secara konsisten, dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.23 Tren Perkembangan Nilai SAKIP Provinsi Kepulauan Riau



Sumber : Data Biro Organisasi Setda Provinsi Kepulauan Riau

7. Indeks Tata Kelola Pengadaan

Pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mendapatkan skor Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa (ITKP) sebesar 91,35 poin dengan predikat ITKP sangat Baik. Perolehan nilai tersebut menempatkan Provinsi Kepulauan Riau berada pada peringkat ke III Nasional untuk kategori Pemerintah Provinsi. Poin ini meningkat sebesar 1,24 dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan upaya yang konsisten dalam meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

1. Pemenuhan Kebutuhan pengelola pengadaan barang/jasa sesuai dengan rencana aksi
2. Peningkatan Kompetensi SDM: Melalui pelatihan dan sertifikasi
3. Peningkatan Kematangan UKPBJ
4. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan secara Elektronik
5. Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa
6. Mendorong Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN):

8. Laporan Keuangan Predikat WTP

Dalam upaya pencapaian predikat WTP Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 190 ayat 3 menyatakan bahwa Laporan keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beberapa upaya yang telah dilakukan:

- a) Penyusunan Laporan Keuangan yang Akurat dan Tepat Waktu
- b) Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aset Daerah
- c) Penguatan Sistem Pengendalian Internal
- d) Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas dilakukan dengan cara membuka akses bagi masyarakat untuk memantau penggunaan anggaran daerah melalui sistem informasi yang mudah diakses.
- e) Penggunaan Teknologi Informasi untuk Pengelolaan Keuangan





Gambar 3.12 Penyerahan Penghargaan Predikat WTP

9. Indeks SPBE

Pencapaian sasaran “Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi” dapat diukur dari indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi Kepulauan Riau.

Pada tahun 2024 Indeks SPBE didapat dari hasil penilaian dengan menggunakan *instrument* SPBE. Struktur penilaian SPBE dibagi atas 4 domain, 8 aspek, dan 47 indikator penilaian yang masing-masing diberi bobot.

Evaluasi terhadap indeks SPBE Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 adalah penjumlahan bobot masing-masing domain. Dari hasil penjumlahan bobot masing-masing domain tersebut didapat indeks SPBE Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebesar 3,05 (Kategori Baik).

10. Survei Penilaian Integritas

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei yang dibangun oleh KPK sebagai alat ukur terhadap risiko korupsi di instansi publik (Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah) dan sebagai bagian dari upaya nasional dalam menekan risiko korupsi dan meningkatkan integritas serta kualitas layanan publik. Tujuan SPI adalah untuk memetakan dan memonitor risiko korupsi serta mendorong upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan oleh instansi-instansi tersebut.

Berdasarkan hasil penilaian SPI yang dilakukan oleh KPK-RI tahun 2024, diketahui bahwa nilai SPI Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yaitu sebesar 71,66 dan berada pada kategori “Rentan”.

Jika dibandingkan dengan capaian SPI tahun 2023 dengan capaian sebesar 70,58, terjadi peningkatan capaian sebesar 1,08. Hal ini menunjukkan terjadinya penurunan risiko korupsi pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

11. Zona Integritas

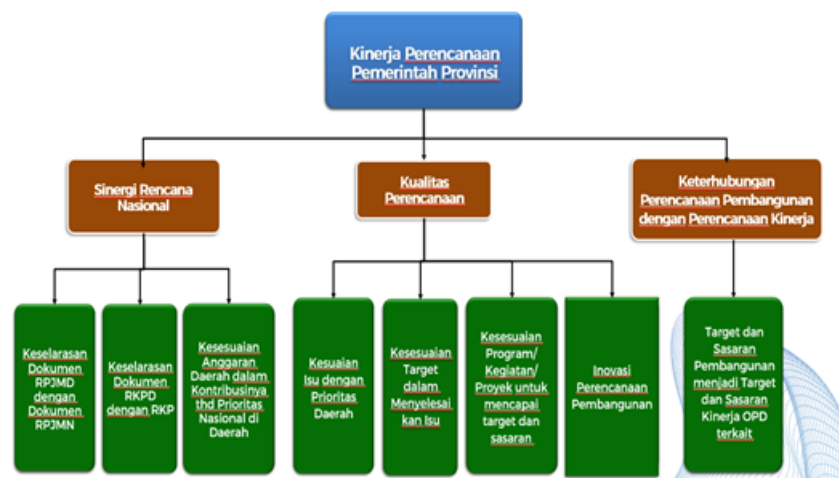
Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan pencanangan Zona Integritas pada 4 (empat) Perangkat Daerah yaitu Badan Pendapatan Daerah, Dinas Kesehatan (Rumah Sakit Raja Ahmad Tabib dan Rumah Sakit Engku Haji Daud) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Nasional terhadap 4 (empat) unit kerja yang diusulkan tersebut, belum ada unit kerja yang memenuhi persyaratan untuk mendapat predikat WBK/WBBM. Kelemahan yang dapat diidentifikasi dari implementasi pembangunan Zona Integritas pada Unit Kerja tersebut antara lain:

- Perbaiki SOP terutama terkait Pelayanan Publik dan di lakukan pemantauan secara berkala
- Identifikasi risiko terkait integritas sebagai dasar dalam pengembangan inovasi belum optimal
- Belum dilakukan identifikasi permasalahan dan harapan dari *stakeholder*.
- Belum optimalnya Tim Penilai Internal dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pembangunan ZI pada unit kerja yang telah dicanangkan.

12.Indeks Perencanaan Pembangunan

Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan tools yang digunakan untuk memastikan terwujudnya sinkronisasi perencanaan pembangunan berdasarkan pendekatan *money follow* program yang dilakukan secara tematis, holistik, integratif dan spasial (THIS). Hasil penilaian IPPN Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 mendapat total nilai sebesar 91,24 atau kategori Sangat Baik, namun masih terdapat catatan diantaranya belum optimalnya pemanfaatan dan keterkaitan *outcome* inovasi dalam perencanaan pembangunan.



Gambar 3.13 Hierarki IPPN Pemerintah Provinsi

13.Indeks Reformasi Hukum

Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai alat untuk mengukur reformasi hukum di tingkat pusat dan daerah. Berdasarkan surat dari Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM Nomor PPH-OT.03.03-276. Hasil Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024, Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan Nilai 96,42 dengan kategori AA (istimewa).

Penilaian Indeks Reformasi Hukum dinilai berdasarkan proses penyusunan produk hukum, penilaian ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Hukum dalam melakukan pengharmonisasian proses terbentuknya produk hukum.

Data-data yang didapat berdasarkan data-data saat dilakukan pembahasan produk hukum dan hasil koordinasi bersama kementerian teknis terkait berupa hasil harmonisasi dan fasilitasi.

Berdasarkan beberapa hal uraian ketercapaian reformasi general tersebut diatas, masih terdapat Permasalahan yang dihadapi yang menjadi kendala dalam pelaksanaan reformasi birokrasi general sebagai berikut:

1. Dalam Pembangunan Zona Integritas (ZI) belum terdapat unit kerja yang memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
2. Pengelolaan Aset Daerah yang Belum Optimal
Meski Perangkat yang menangani pengelolaan aset telah melakukan upaya untuk memperbaiki pengelolaan dan inventarisasi aset daerah, masih ada tantangan dalam mencocokkan data aset yang tercatat di sistem dengan kondisi riil di lapangan. Pengelolaan aset yang belum sepenuhnya optimal, seperti aset yang tidak terdaftar dengan jelas, hilang, atau tidak tercatat dengan baik dalam laporan keuangan, dapat menimbulkan temuan yang merugikan dan menghambat pencapaian opini WTP.
3. Belum adanya Rencana Induk TIK dan arsitektur SPBE serta belum memiliki *Road Map* SPBE
4. Capaian Indeks Kualitas Kebijakan masih masih kurang
5. Nilai SPIP masih dalam kategori rentan

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan RB General, Provinsi Kepulauan Riau akan melaksanakan rencana tindak sebagai berikut:

1. Perbaikan mendasar pada area-area rawan korupsi untuk memperbaiki citra publik terhadap upaya pencegahan korupsi pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
2. Penguatan pendampingan dalam pembangunan Zona Integritas, khususnya pada Unit Pelayanan Publik.
3. Peningkatan kompetensi SDM terkait manajemen risiko.
4. Meningkatkan implementasi inovasi dalam perencanaan pembangunan untuk mempercepat dan menjawab isu permasalahan di daerah.
5. Mengidentifikasi kebijakan dan penguatan tim kerja penilaian IKK.
6. Penguatan peran Agen Perubahan dalam penerapan budaya kerja ASN BerAhklak.

3.5.4.3. Analisa Capaian Reformasi Birokrasi Tematik

Reformasi Birokrasi Tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkrit terhadap isu yang ada di hilir, yaitu capaian Pembangunan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan tema RB Tematik sebagaimana yang diamanatkan sebagai berikut:

1. Penurunan Angka Kemiskinan
2. Peningkatan Investasi
3. Penanganan Inflasi
4. Penurunan Stunting
5. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Berikut informasi pencapaian Sasaran Reformasi Tematik Provinsi Kepulauan Riau:

Tabel 3.22 Capaian Sasaran Reformasi Birokrasi Tematik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Target	Capaian
Penurunan Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	5.69	4,78
Peningkatan Investasi	Realisasi Investasi	19.609 (Miliar Rupiah)	30.820
Penanganan Inflasi	Laju Inflasi	(Milyar Rupiah)	
Penurunan stunting	Pravelensi Stunting	(2.25)±1	2.09
Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri	Nilai P3DN	14	16,8

Sumber : Data Biro Organisasi Setda Provinsi Kepulauan Riau

1. Penurunan Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan penurunan yang cukup menggembirakan. Capaian kinerja indikator angka kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 sebesar 115,99% dilihat berdasarkan kinerja dapat mencapai target dari yang telah ditetapkan sebesar 5,69% dengan capaian realisasi sebesar 4,78% atau dalam kategori **SANGAT BAIK**.

Capaian kinerja penurunan angka kemiskinan tahun 2024 apabila dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,91%. Dimana pada tahun 2023 penurunan angka kemiskinan hanya sebesar 5,69% turun menjadi 4,78% pada tahun 2024.

Dilihat dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) realisasi kinerja penurunan angka kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 114,18% dengan target sebesar 5,57% dengan capaian 5,57% dengan capaian kinerja sebesar 4,78%.

Pada Tahun 2024, capaian Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan dengan target nasional berada di bawah target nasional. Namun jika dibandingkan dengan penurunan angka kemiskinan di Pulau Sumatera, sementara Provinsi Kepulauan Riau berada para urutan ke-4 dengan nilai sebesar 4,78% yang didominasi oleh Provinsi Bali sebesar 3,8%.

Tabel 3.23 Capaian Sasaran Reformasi Birokrasi Tematik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

NO URUT	PROVINSI	PENDUDUK MISKIN SEMESTER 2 (%)
1	BALI	3,8
2	KALIMANTAN SELATAN	4,02
3	DKI JAKARTA	4,14
4	KEP. RIAU	4,78
...	...	...
38	PAPUA PEGUNUNGAN	29,66
	INDONESIA	8,57

Sumber : Data Badan Pusat Statistik 2024

Permasalahan yang dihadapi yang menjadi kendala dalam penurunan angka kemiskinan sebagai berikut:

- a) Infrastruktur yang Kurang Memadai: Infrastruktur yang belum memadai, terutama di daerah terpencil dan pulau-pulau, menghambat distribusi barang dan layanan, serta akses masyarakat terhadap program-program pengentasan kemiskinan.
- b) Tantangan dalam Pendataan: Kesulitan dalam mendapatkan data yang akurat dan valid mengenai kondisi masyarakat miskin dapat menghambat pelaksanaan program bantuan sosial yang tepat sasaran. Program-program tersebut harus didasarkan pada data yang akurat agar efektif dalam mengurangi kemiskinan.

Faktor yang mendukung ketercapaian dalam mempengaruhi penurunan angka kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 adalah peningkatan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat miskin dan rentan miskin di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024.

Bantuan sosial ini dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, sehingga dapat mengurangi risiko kemiskinan. Bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Kepri antara lain bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dan sembako.

Upaya lainnya yang mendukung keberhasilan penurunan angka kemiskinan adalah peningkatan kesejahteraan melalui program ekonomi kerakyatan.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menerapkan berbagai program untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan, termasuk bantuan peralatan usaha, yang berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan ekstrem.

2. Peningkatan Realisasi Investasi

Target capaian nilai realisasi investasi dan persentase peningkatan nilai realisasi investasi provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.24 Target Capaian Nilai dan Presentase Realisasi Investasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024-2026

Indikator	Target		
	2024	2025	2026
Capaian Nilai Realisasi Investasi	3,68%	3,55%	3,42%
Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi	19,6 Triliun	20,3 Triliun	21 Triliun

Sumber : Dokumen Renstra DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau

Dalam rangka percepatan investasi di Provinsi Kepulauan Riau, DPMPTSP didukung berbagai program dan kegiatan dengan dua bidang utama yaitu bidang penanaman modal dan bidang pelayanan perizinan berusaha. Capaian Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) per Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.25 Capaian Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) per Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 (TW III Tahun 2024)

No	Kabupaten/Kota	PMA (Rp.)
1	Batam	13,24 Triliun
2	Karimun	210,9 Miliar
3	Bintan	9,81 Triliun
4	Anambas	6,69 Miliar
5	Tanjungpinang	49,2 Miliar
6	Lingga	54,8 Miliar
7	Natuna	7,06 Miliar
TOTAL		23,39 Triliun

Sumber : Bidang Data DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau

Pelaksanaan Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Kepulauan Riau berfokus kepada sektor-sektor utama yang menjadi andalan. Adapun 5 (lima) sektor utama yang menjadi capaian nilai investasi tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.26 Sektor Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 (TW III Tahun 2024)

No	Sektor	Realisasi Investasi (Rp)
1	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	5,44 Triliun
2	Industri Makanan	5,22 Triliun
3	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lainnya	2,39 Triliun
4	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	2,15 Triliun
5	Industri Karet dan Plastik	947 Miliar
6	Sektor Lainnya	7,24 Triliun
TOTAL		23,39 Triliun

Sumber : Bidang Data DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau

Capaian Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) per Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.27 Capaian Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) per Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 (TW III Tahun 2024)

No	Kabupaten/Kota	PMDN (Rp.)
1	Batam	5,99 Triliun
2	Karimun	307,4 Miliar
3	Bintan	690,5 Miliar
4	Anambas	5,94 Miliar
5	Tanjungpinang	377,3 Miliar
6	Lingga	8,01 Miliar
7	Natuna	46,9 Miliar
TOTAL		7,42 Triliun

Sumber : Bidang Data DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau

Capaian Nilai Realisasi Investasi terdiri dari Capaian Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Capaian Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Capaian Nilai Realisasi Investasi di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024 mengalami kontraksi positif dibanding tahun 2023.

Tabel 3.28 Capaian Nilai Realisasi Investasi per Kab/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 (TW III Tahun 2024)

No	Kabupaten/Kota	Nilai Realisasi Investasi (Rp.)
1	Batam	19,23 Triliun
2	Karimun	518,3 Miliar
3	Bintan	10,5 Triliun
4	Anambas	12,63 Miliar
5	Tanjungpinang	426,5 Miliar
6	Lingga	62,81 Miliar
7	Natuna	53,96 Miliar
TOTAL		30,82 Triliun

Sumber : Bidang Data DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau

Capaian realisasi investasi di Provinsi Kepulauan Riau dalam beberapa tahun terakhir mengalami dinamika yang cukup unik, sebagaimana tergambar pada tabel berikut:

Tabel 3.29 Target dan Capaian Nilai Realisasi Investasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2025

Thn	Target Provinsi / RPJMD (Rp)	Target Kementerian Investasi dan Hilirisasi / BKPM (Rp)	Nilai Realisasi Investasi (Rp)
2020	23,7 Triliun	46 Triliun	38 Triliun
2021	25 Triliun	44,1 Triliun	25 Triliun
2022	18,2 Triliun	50,3 Triliun	18,22 Triliun
2023	20,1 Triliun	26,4 Triliun	20,16 Triliun
2024	19,6 Triliun	35,3 Triliun	30,82 Triliun

Sumber : Bidang Data DPMPSTP Provinsi Kepulauan Riau

Dalam rangka peningkatan investasi di Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan Langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Penyusunan Peraturan Daerah Pemberian Fasilitas Insentif/Kemudahan Berusaha bagi para pelaku usaha
- b) Pengawasan pelaporan LKPM kepada para pelaku usaha
- c) Bimbingan dan Pelatihan penggunaan aplikasi OSS (*Online Single Submission*) kepada para pelaku usaha.

3. Penanganan Inflasi

Pada bulan Desember 2024, perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Kepulauan Riau mencatatkan inflasi sebesar 0,68% (mtm). Secara spasial, Inflasi y-on-y tertinggi terjadi di Kota Batam sebesar 2,24% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,71 dan terendah terjadi di Kota Tanjungpinang sebesar 1,53% dengan IHK sebesar 105,73. Sedangkan Kabupaten Karimun inflasi y-on-y sebesar 1,57% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,42.

Dengan demikian, secara tahunan, Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Kepulauan Riau mencatatkan inflasi sebesar 2,09% (yoy) atau secara tahun kalender tercatat sebesar 2,09% (ytd).

Adapun komoditas utama penyebab Inflasi Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Desember 2024 terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya delapan indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau naik sebesar 2,46%; kelompok pakaian dan alas kaki mengalami kenaikan sebesar 2,11%; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga naik sebesar 2,65%; kelompok kesehatan naik sebesar 4,24%; kelompok transportasi naik sebesar 2,13%; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya naik sebesar 0,38%; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran naik sebesar 1,42%; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya naik sebesar 7,53%.

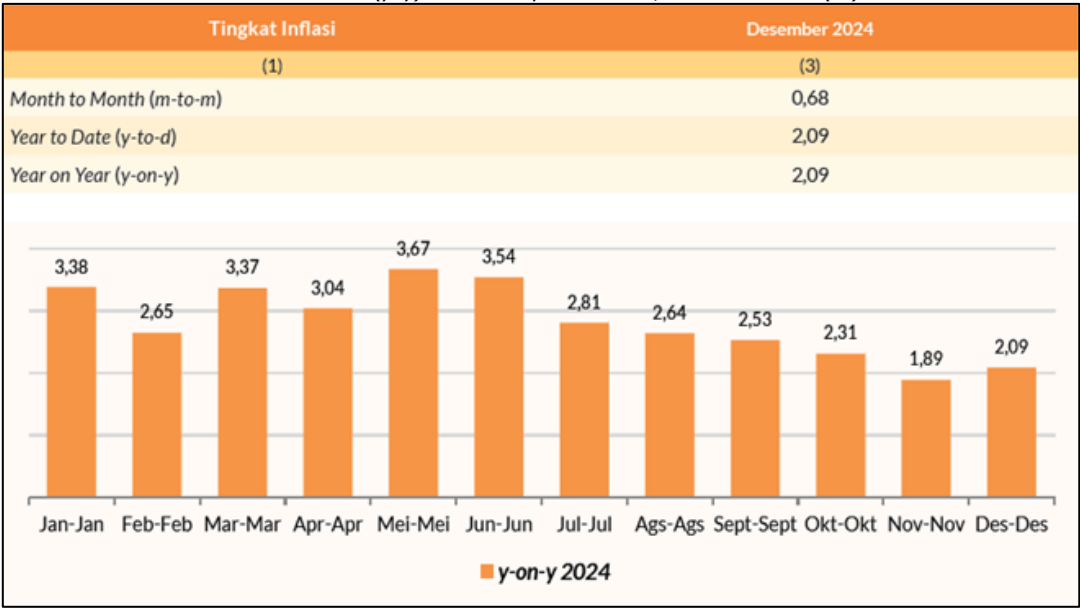
Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga turun sebesar 0,22%; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan turun sebesar 0,10%; serta kelompok pendidikan turun sebesar 1,84%.

Tabel 3.30 IHK dan Tingkat Inflasi Month to Month (mtm), Year to Date (ytd), dan Year on Year (yoy) Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kelompok Pengeluaran (2022=100), Desember 2024

Kelompok Pengeluaran	IHK Desember 2023	IHK Desember 2024	Tingkat Inflasi m-to-m Desember 2024 ¹ (%)	Tingkat Inflasi y-to-d Desember 2024 ² (%)	Tingkat Inflasi y-on-y Desember 2024 ³ (%)	Andil Inflasi m-to-m Desember 2024 (%)	Andil Inflasi y-on-y Desember 2024 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
Umum	105,15	107,35	0,68	2,09	2,09	0,68	2,09
Makanan, Minuman, dan Tembakau	107,66	110,31	2,05	2,46	2,46	0,61	0,72
Pakaian dan Alas Kaki	104,12	106,32	-0,14	2,11	2,11	-0,01	0,10
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	102,51	105,23	0,03	2,65	2,65	-0	0,42
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	101,82	101,60	-0,05	-0,22	-0,22	-0	-0,01
Kesehatan	99,88	104,11	0,12	4,24	4,24	-0	0,10
Transportasi	110,51	112,86	0,53	2,13	2,13	0,07	0,30
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	100,07	99,97	-0	-0,10	-0,10	-0	-0,01
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	101,69	102,08	-0	0,38	0,38	-0	0,01
Pendidikan	104,15	102,23	-0	-1,84	-1,84	-0	-0,13
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	101,58	103,02	0,02	1,42	1,42	-0	0,13
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	106,83	114,87	0,11	7,53	7,53	0,01	0,46
Catatan: ¹ Persentase perubahan IHK Desember 2024 terhadap IHK November 2024, ² Persentase perubahan IHK Desember 2024 terhadap IHK Desember 2023, ³ Persentase perubahan IHK Desember 2024 terhadap IHK Desember 2023							
-0: Data sangat kecil/mendekati 0							

Sumber : Data Badan Pusat Statistik 2024

Grafik 3.24 IHK dan Tingkat Inflasi Month to Month (mtm), Year to Date (ytd), dan Year on Year (yoy) Provinsi Kepulauan Riau, Desember 2024 (%)



Sumber : Data Badan Pusat Statistik 2024

Beberapa permasalahan pengendalian inflasi di Provinsi Kepulauan Riau pada Triwulan IV Tahun 2024 antara lain:

- a. Meningkatnya harga sejumlah komoditas makanan didorong oleh peningkatan permintaan pada momen liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru);
- b. Meningkatnya curah hujan di tengah kondisi pasokan makanan yang *relative* terbatas;
- c. Kenaikan tarif angkutan udara seiring peningkatan permintaan terhadap jasa angkutan udara menjelang liburan akhir tahun;
- d. Kenaikan harga emas perhiasan yang masih berlanjut sejalan dengan perkembangan harga komoditas secara global;
- e. Kenaikan Harga Ikan di Provinsi Kepulauan Riau lantaran nelayan tidak melaut karena angin kuat, sehingga membuat stok ikan berkurang;

- f. Kenaikan Harga Komoditas mengalami peningkatan terutama kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,72%; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,10%; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,42%; kelompok kesehatan sebesar 0,10%; kelompok transportasi sebesar 0,30%; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,01%; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,13%; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,46%. Sedangkan kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, yaitu kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,01%; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,01%; dan kelompok pendidikan sebesar 0,13%.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan IV tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Koordinasi dan sinergi program melalui rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kepulauan Riau dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) seluruh Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau;
- b. Bersinergi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik di level provinsi maupun kabupaten/kota se- Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dengan strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif);
- c. Pemantauan ketersediaan dan harga bahan pangan jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru);
- d. Sinergi penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Provinsi Kepulauan Riau
- e. Dukungan bantuan sarana dan prasarana untuk Toko Pangan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kepulauan Riau dan Kedai Pangan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Karimun dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan;
- f. Pelaksanaan *Capacity Building* Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Kepulauan Riau;
- g. Melanjutkan panen Gerakan Sekolah Menanam (GSM) secara mandiri oleh setiap sekolah peserta GSM 2024;
- h. Penyaluran bantuan sarana prasarana pendukung pertanian kepada Kelompok Tani.

Berdasarkan hasil evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di Provinsi Kepulauan Riau maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau merekomendasikan beberapa kebijakan pengendalian inflasi kepada Pemerintah Pusat sebagai berikut:

- a. Sinergi penyelenggaraan Operasi Pasar Murah (OPM) dan Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau;
- b. Koordinasi dan sinergi program melalui Rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di wilayah Kepulauan Riau, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dan Focus Group Discussion (FGD) terkait dengan optimalisasi bantuan pangan serta pengaruh bantuan pangan terhadap pengendalian Inflasi di Provinsi Kepulauan Riau;
- c. Penurunan harga emas perhiasan sejalan dengan normalisasi harga komoditas emas secara global;
- d. Normalisasi permintaan pasca periode liburan akhir tahun.
- e. Diskon tarif listrik untuk wilayah di luar Kota Batam sebesar 50% kepada konsumen rumah tangga dan pelaku usaha kecil dengan daya hingga 2.200 VA selama bulan Januari - Februari 2025;

4. Penanganan Stunting

Stunting adalah Keadaan gagal tumbuh dan kembang, gagal pertumbuhan tinggi badan tidak tercapai sesuai dengan anak seusianya (-2 SD Median) di mana kecerdasan intelektual dan emosional tidak tercapai dengan ciri-ciri tinggi badan lebih pendek dari seusianya, anak menjadi lebih pendiam dan apatis, tidak banyak melakukan *eye contact*, IQ nya rendah, pertumbuhan melambat tanda pubertasnya juga melambat, wajah tampak lebih muda dari usianya dan pertumbuhan gigi terlambat.

Indikator keberhasilan Penanganan Stunting adalah Prevalensi stunting dengan definisi jumlah balita yang mempunyai panjang badan atau tinggi badan yang tidak sesuai dengan umur (PB/U atau TB/U -3 SD < -2 SD).

Evaluasi capaian Prevalensi Stunting Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 3.31 Capaian Prevalensi Stunting
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Prevalensi Stunting	15,3	16,8*	85%

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

Tabel 3.32 Prevalensi Stunting
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024

NO	Kab/Kota	2021	2022	2023	2024
1	BALI	10,9	8	7,2	7,2
2	JAMBI	22,4	18	13,5	13,5
3	RIAU	22,3	17	13,6	13,6
4	LAMPUNG	18,5	15,2	14,9	14,9
5	KEP RIAU	17,6	15,4	16,8	16,8
	INDONESIA	24,4	21,6	21,5	21,5

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau 2024

Analisis dari beberapa indikator penyebab stunting dilihat dari intervensi spesifik, peningkatan prevalensi stunting di Provinsi Kepulauan Riau diakibatkan oleh beberapa faktor yang belum mencapai target:

- a. Pemantauan pertumbuhan, Cakupan penimbangan balita di Provinsi Kepulauan Riau masih tergolong rendah. Capaian penimbangan pada tahun 2023 79,57% sedangkan target yang di tetapkan yaitu 85%.
- b. Persentase bayi kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif tahun 2023 adalah 68,9%, prevalensi ini belum sesuai dengan target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu 75%.
- c. Persentase sistem data surveilans gizi elektronik dalam pemantauan intervensi gizi untuk penurunan Stunting tahun 2023 adalah 85,6%.
- d. ANC (*Ante Natal Care*) yang belum berkualitas

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam penurunan angka Stunting sebagai berikut:

- a. Koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait penyediaan akses air bersih dan sanitasi.

- b. Setiap keluarga miskin harus memiliki Jaminan Sosial berupa KIS (Kartu Indonesia Sehat).
 - c. Koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian dan Keluarga Berencana terkait layanan kesehatan dan KB.
 - d. Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.
 - e. Optimalisasi Pemanfaatan/Konsumsi Pangan Sayur, Buah dan Protein bersumber hewani kerjasama dengan Dinas Pertanian dan Kesehatan Hewan.
 - f. Kerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan melalui program ketahanan pangan dan gizi.
 - g. Meningkatkan konsumsi Ikan melalui Program Gemarikan bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan.
5. Penanggulangan Produk Dalam Negeri

Produk Dalam Negeri adalah Barang dan Jasa, termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia, dan prosesnya menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri. Penggunaan Produk Dalam Negeri, ditentukan berdasarkan besaran komponen dalam negeri pada setiap barang/jasa yang ditunjukkan dengan nilai TKDN. Penggunaan produk dalam negeri pada PBJ diwajibkan apabila terdapat produk dalam negeri dengan nilai penjumlahan TKDN dan BMP paling sedikit 40%.

Upaya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, difasilitasi oleh *Vitka Learning Center (VLC)* melakukan pelatihan “Pengolahan Pangan”, Pelatihan Diversifikasi Produk *One Village One Product (OVOP)*.

Upaya lain dalam mendukung peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan pelatihan perhitungan TKDN bagi ASN di lingkup 43 Perangkat Daerah.

Ketercapaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dilihat dari realisasi atas komitmen penggunaan produk dalam negeri mencapai 83,97 %.

Provinsi Kepulauan Riau berhasil mendapatkan menjadi Pemerintah Daerah terbaik keempat se-Indonesia dalam penggunaan produk dalam negeri.

Tabel 3.33 Rekapitulasi Realisasi Belanja Barang & Jasa PDN Periode 01 Januari s.d. Desember 2024

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	TOTAL PERENCANAAN	TOTAL PELAKSANAAN	TOTAL PEMBAYARAN	KET
		PDN	PDN	PDN (REALISASI)	
1	Dinas Pendidikan	51.834.567.117,36	371.271.853.649,37	371.271.853.649,37	82,17%
2	Dinas Kesehatan	186.306.865.531,00	170.307.843.683,00	170.307.843.683,00	91,41%
3	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan	140.308.553.534,71	139.054.554.872,50	139.054.554.872,50	99,11%
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	245.821.706.745,03	147.533.788.300,00	147.533.788.300,00	60,02%
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.774.362.112,00	4.678.707.382,36	4.678.707.382,36	98,00%
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	12.376.559.612,00	10.040.028.340,00	10.040.028.340,00	81,12%

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	TOTAL PERENCANAAN	TOTAL PELAKSANAAN	TOTAL PEMBAYARAN	KET
		PDN	PDN	PDN (REALISASI)	
7	Dinas Sosial	16.945.881.860,00	15.934.940.712,40	15.934.940.712,40	94,03%
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.432.605.732,00	5.834.615.454,00	5.834.615.454,00	90,70%
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14.914.640.943,00	10.845.439.304,00	10.845.439.304,00	72,72%
10	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan	21.886.040.685,00	11.949.436.341,00	11.949.436.341,00	54,60%
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	10.225.325.040,00	8.039.991.861,00	8.039.991.861,00	78,63%
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.736.406.299,00	6.321.194.237,00	6.321.194.237,00	93,84%
13	Dinas Perhubungan	33.080.101.759,73	31.339.518.980,49	31.339.518.980,49	94,74%
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	19.540.694.365,80	19.208.215.624,00	19.208.215.624,00	98,30%
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8.887.545.619,00	7.945.439.666,00	7.945.439.666,00	89,40%
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.466.801.664,00	4.219.799.387,00	4.219.799.387,00	94,47%
17	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	12.972.098.630,00	12.267.399.495,00	12.267.399.495,00	94,57%
18	Dinas Kebudayaan	6.496.988.800,00	6.533.868.902,00	6.533.868.902,00	100,57%
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7.941.732.936,00	7.634.435.097,00	7.634.435.097,00	96,13%
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	44.089.442.909,00	42.464.926.999,83	42.464.926.999,83	96,32%
21	Dinas Pariwisata	16.378.821.906,75	16.074.790.618,00	16.074.790.618,00	98,14%
22	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	21.714.181.511,00	11.815.169.673,41	11.815.169.673,41	54,41%
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	11.081.880.726,65	11.194.568.672,00	11.194.568.672,00	101,02%
24	Sekretariat Daerah	175.786.502.535,17	154.446.301.196,90	154.446.301.196,90	87,86%
25	Sekretariat DPRD	112.942.658.943,00	101.582.705.451,00	101.582.705.451,00	89,94%
26	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	12.830.065.929,00	12.742.740.094,00	12.742.740.094,00	99,32%
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah	37.248.068.033,10	35.306.203.288,31	35.306.203.288,31	94,79%
28	Badan Pendapatan Daerah	46.454.461.791,00	34.732.167.027,00	34.732.167.027,00	74,77%
29	Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	3.234.196.961,00	3.206.170.317,00	3.206.170.317,00	99,13%
30	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	4.898.463.059,00	4.668.184.570,00	4.668.184.570,00	95,30%
31	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	1.227.459.878,00	1.220.854.020,00	1.220.854.020,00	99,46%
32	Badan Penghubung Daerah	14.529.614.928,00	13.854.076.722,00	13.854.076.722,00	95,35%
33	Inspektorat Daerah	18.418.796.224,00	17.117.547.058,00	17.117.547.058,00	92,94%
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16.463.857.456,25	17.471.804.685,00	17.471.804.685,00	106,12%
	JUMLAH	1.749.247.951.777,00	1.468.859.281.681,00	1.468.859.281.681,00	83,97%

Sumber : Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Kepulauan Riau

Tabel 3.34 Realisasi Anggaran Reformasi Birokrasi General Provinsi Kepulauan Riau

NO	SASARAN	INDIKATOR	ANGGARAN TAHUN APBD-P TAHUN 2024	REALISASI ANGGARAN TW 4	CAPAIAN
Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital Yang Lincah, Kolaboratif, Dan Akuntabel					
1	Terimplementasikannya Kebijakan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN dengan Baik	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai	44.001.354.75	43.140.252	98,04
2	Terimplementasikannya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE (%)	28.713.172	27.579.672	96,05
		Indeks SPBE			
3	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegritasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Indeks Perencanaan Pembangunan	2.311.515.018	2.295.687.748	99,32
		Nilai SAKIP	2.485.818.027	2.434.438.654	97.93
4	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	22.148.115	21.600.000	97.93
		Tingkat Maturitas SPIP	43.408.800	43.408.800	100,00
		Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	110.369.082	104.214.171	94,42
		Hasil Survei Penilaian Integritas	603.078.000	466.220.931	77,31
5	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Dan Regulasi	Indeks Reformasi Hukum	336.829.104	333.855.120	99,12
		Indeks Kualitas Kebijakan	-	-	-
6	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital Dan Data Statistik Sektoral	Tingkat Digitalisasi Arsip	3.345.000	3.345.000	100,00
		Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	82.222.400	73.742.382	89,69
7	Meningkatkan Kualitas Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Pengelolaan Keuangan Dan Aset	Indeks Tata Kelola Pengadaan	15.428.600	15.270.000	98,97
		Opini BPK	2.842.414.447	2.076.918.859	73,07
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	1.746.723.700	866.102.045	49,58
Terciptanya Budaya Birokrasi BerAkhlaq Dengan ASN Yang Profesional					
1	Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional	Indeks Sistem Merit	39.406.500	38.805.911.00	98
2	Terselenggaranya Manajemen Talenta ASN Yang Efektif Dan Efisien		-	-	-
			-	-	-
3	Terwujudnya sistem kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan berbasis kinerja		36.982.200	35.455.896	96
4	Terwujudnya Rekrutmen Pegawai ASN yang Efektif dan efisien		446.278.409	444.282.929	100
5	Terwujudnya percepatan tranformasi digital manajemen ASN		20.532.820	20.172.020	98
6	Terwujudnya Percepatan Peningkatan Kapasitas Pegawai ASN		2.600.737.258	2.287.377.738	88
7	Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Sistem Merit	Indeks BerAkhlaq	607.527.764	598.149.455	98

NO	SASARAN	INDIKATOR	ANGGARAN TAHUN APBD-P TAHUN 2024	REALISASI ANGGARAN TW 4	CAPAIAN
	Dan Sistem Manajemen ASN				
8	Terwujudnya pelayanan publik secara prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	-	-	-
		Indeks Pelayanan Publik	-	-	-
			59.044.564	42.909.507	72.67
		Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	-	-	-
JUMLAH			14.896.425.134.75	12.678.905.347	85.11%

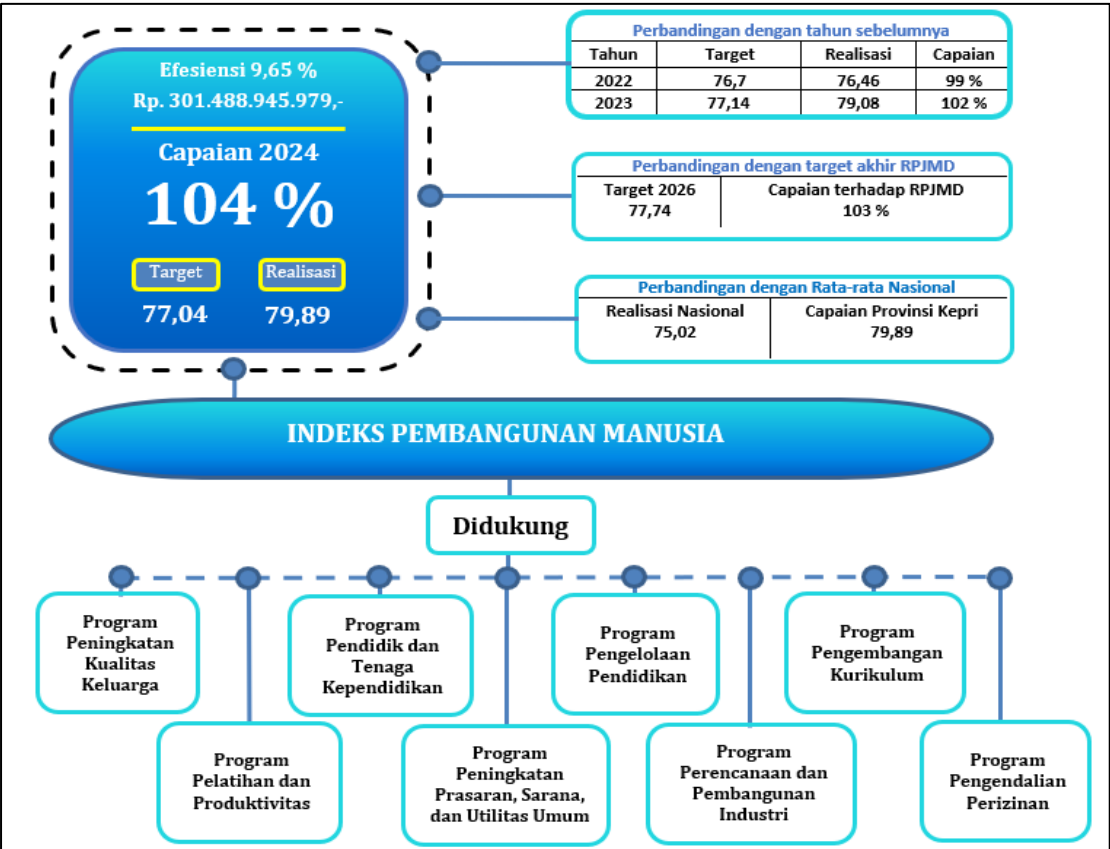
Tabel 3.35 Realisasi Anggaran Reformasi Birokrasi Tematik Provinsi Kepulauan Riau

NO	TEMA	INDIKATOR	ANGGARAN TAHUN 2024 SESUAI APBD-P	REALISASI ANGGARAN TW IV	CAPAIAN
1	Penurunan Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	122.545.130.080	101.650.723.015	82,95
2	Pengendalian Inflasi	Laju Inflasi	40.942.172.965	35.424.555.185	86,52
3	Peningkatan Realisasi investasi	Nilai Realisasi Investasi	1.786.447.063	1.559.904.002	87,32
4	Digitalisasi Pemerintahan (Stunting)	Prevalensi stunting	11.185.549.010	8.766.315.399	78,37
5	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Realisasi penggunaan produk dalam negeri	476.982.600	244.830.400	51,33
JUMLAH			176.936.281.718	147.646.328.001	83.45%

Dari jumlah anggaran sebesar Rp191.832.706.852,75,00 terealisasi sebesar Rp160.325.233.348,00 atau 84%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp31.507.473.504,75 (16%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja indeks Reformasi Birokrasi (116%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (84%) dengan efesiensi 32%.

3.5.5. Sasaran Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter

3.5.5.1. Indeks Pembangunan Manusia



Masyarakat Kepulauan Riau harus memiliki keunggulan agar mampu mengelola sumber daya pembangunan dan mampu bersaing baik di tingkat regional, nasional bahkan internasional. Untuk menjadi sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter SDM harus memperoleh pendidikan bermutu dan kualitas hidup yang sehat. Indeks Pembangunan Manusia pada Tahun 2024 sudah Sangat Baik dengan realisasi kinerja sebesar 79,89 dari target sebesar 77,04 dan sehingga capaian kinerja 104%.

Pembangunan manusia yang unggul dan berkarakter dilihat dari indeks pembangunan manusia di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan pertumbuhan yang cukup menggembirakan. Realisasi indikator Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 sebesar 79,89 Indeks berdasarkan kinerja dapat mencapai target dari yang telah ditetapkan sebesar 77,04 Indeks dengan capaian kinerja sebesar 104% atau dalam kategori **Sangat Baik**.

Komponen Indeks Pembangunan Manusia diperoleh melalui hal-hal sebagai berikut:

- a. Umur Harapan Hidup
Umur Harapan Hidup (UHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup.
- b. Rata-Rata Lama Sekolah
Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal.
- c. Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan
UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) riil yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan formula Atkinson.

Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok menurut status capaiannya. Adapun pengelompokan tersebut adalah:

- 1. sangat tinggi: $IPM \geq 80$
- 2. tinggi: $70 \leq IPM < 80$
- 3. sedang: $60 \leq IPM < 70$
- 4. rendah: $IPM < 60$

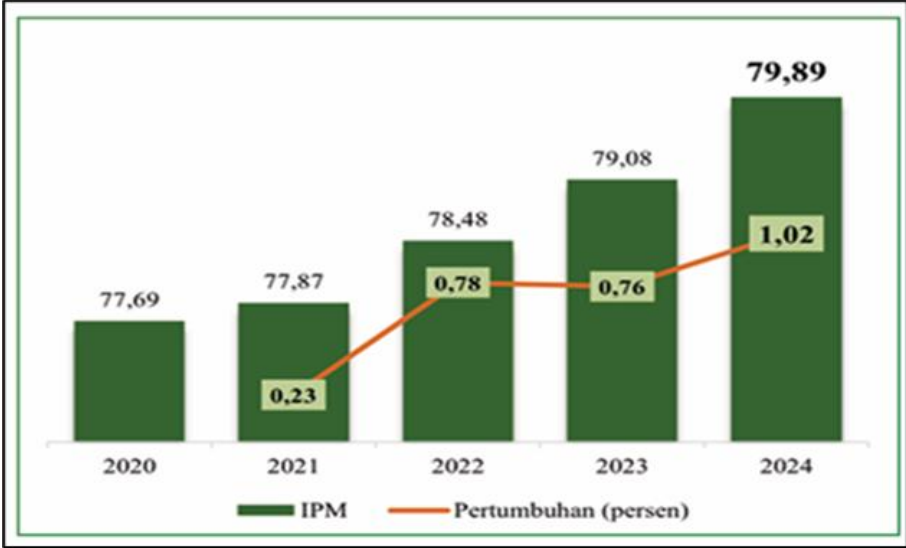
Peningkatan IPM Kepulauan Riau 2024 didukung oleh peningkatan ketiga dimensi penyusunnya yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diukur melalui Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH), dimensi pengetahuan yang diukur melalui Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan dimensi standar hidup layak yang diukur melalui rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan.

Tabel 3.36 Capaian Indikator IPM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Indikator	Nilai
1	Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH)	75,12
2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,27
3	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,5
4	Pengeluaran riil perkapita per tahun yang disesuaikan (ribu rupiah)	15.573
Indeks Pembangunan Manusia		79,89

Sumber : Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kepulauan Riau

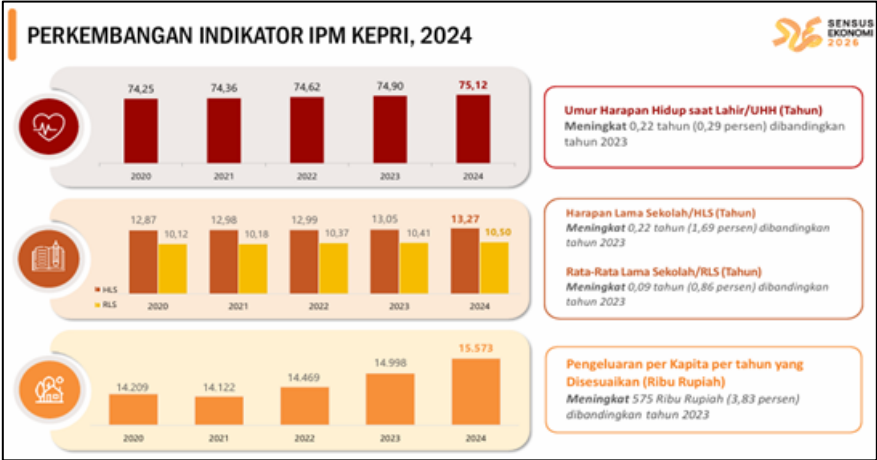
Grafik 3.25 Perkembangan IPM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024



Sumber : Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kepulauan Riau

Selama lima tahun terakhir, pembangunan manusia di Kepulauan Riau terus mengalami kemajuan. IPM Kepulauan Riau meningkat dari 77,69 pada tahun 2020 menjadi 79,89 pada tahun 2024. Selama periode tersebut, status IPM Kepulauan Riau selalu berada pada status IPM “tinggi ($70 \leq IPM < 80$)” dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,70 persen per tahun.

Grafik 3.26 Perkembangan Indikator IPM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 – 2024



Sumber : Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kepulauan Riau

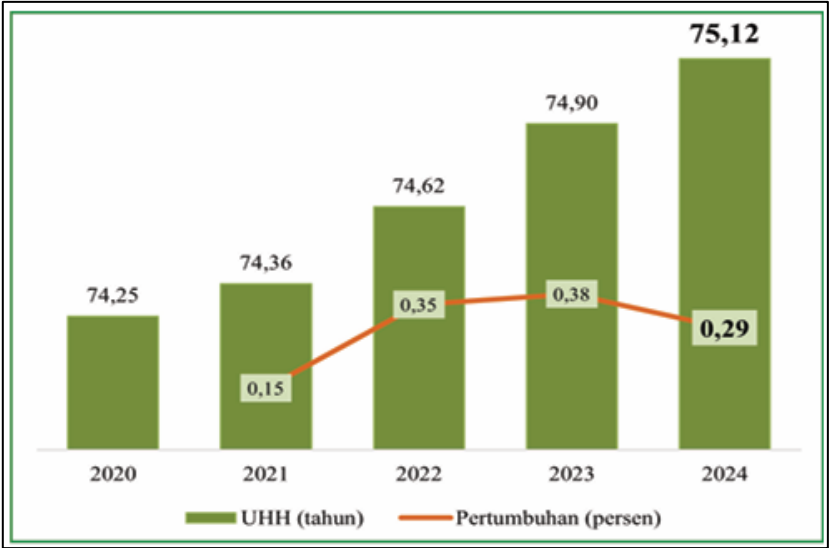
Dari sisi dimensi umur panjang dan hidup sehat, UHH saat Lahir di Kepulauan Riau sebesar 75,12, artinya bayi yang lahir pada tahun 2024 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 75,12 tahun, lebih lama 0,22 tahun atau mengalami kenaikan 0,29 persen dibandingkan dengan bayi yang lahir pada tahun 2023. Sumber data umur harapan hidup saat lahir menggunakan hasil *Long Form* SP2020 (LF SP2020).

Pada dimensi pengetahuan, HLS Kepulauan Riau sebesar 13,27, artinya penduduk berusia 7 tahun ke atas pada tahun 2024 memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,27 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga kuliah tahun pertama. Angka ini meningkat 0,22 tahun atau tumbuh 1,69 persen dibandingkan tahun 2023.

Selain itu, RLS Kepulauan Riau sebesar 10,50, artinya jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal sebesar 10,50 tahun atau sebanding dengan SMA/ sederajat di kelas X sampai kelas XI. RLS ini meningkat 0,09 tahun atau tumbuh 0,86 persen dibandingkan tahun 2023. Sumber data HLS dan RLS menggunakan hasil Susenas Maret.

Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan per tahun yang disesuaikan di Kepulauan Riau tahun 2024 sebesar Rp15.573.000, meningkat Rp575.000 atau tumbuh 3,83 persen dibandingkan tahun 2023. Sumber data pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan per tahun menggunakan hasil Susenas Maret.

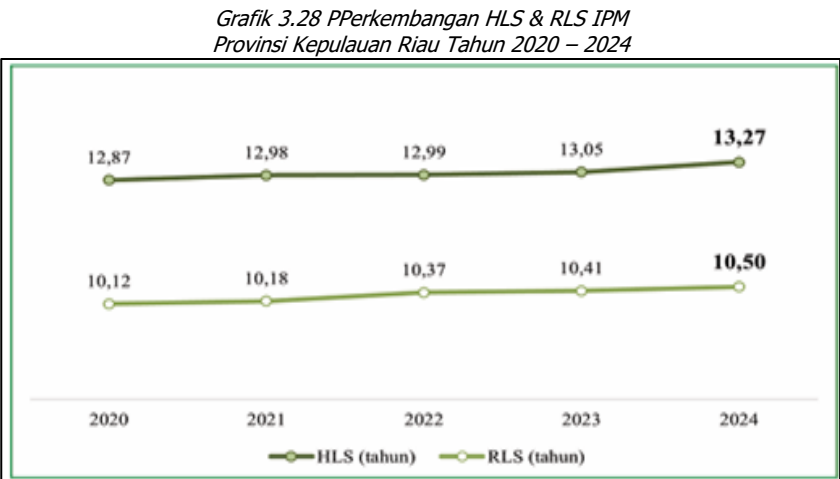
Grafik 3.27 Perkembangan UHH IPM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 – 2024



Sumber : Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kepulauan Riau

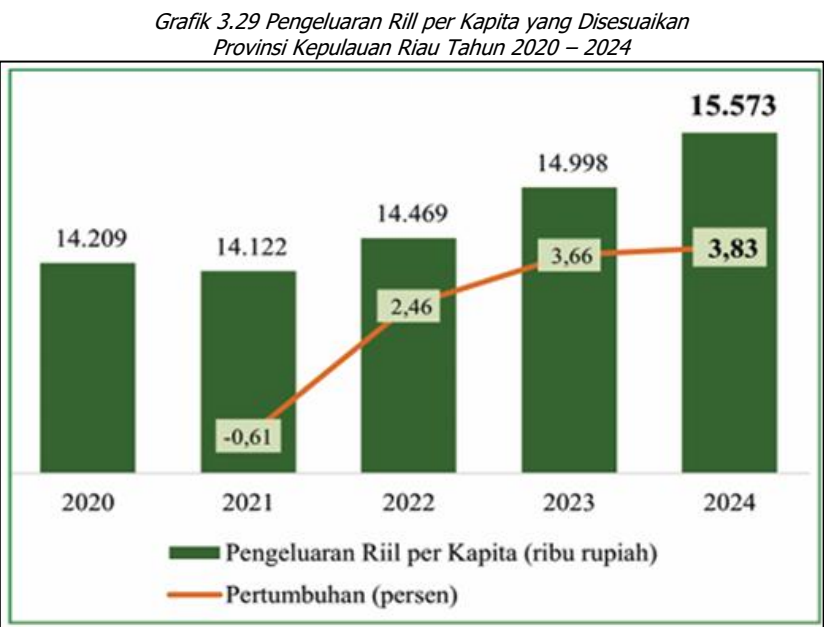
Dimensi umur panjang dan hidup sehat direpresentasikan oleh Umur Harapan Hidup (UHH). Untuk meningkatkan kualitas data, pada tahun 2023, BPS melakukan updating sumber data UHH hasil SP2010 dengan hasil LF SP2020 yang menyediakan data parameter kependudukan terbaru. Hal ini dengan mempertimbangkan perubahan karakteristik demografi dalam sepuluh tahun terakhir.

UHH saat lahir Kepulauan Riau terus meningkat dari tahun ke tahun. UHH Kepulauan Riau yang sebesar 74,25 pada tahun 2020, naik secara berturut-turut hingga mencapai 75,12 pada tahun 2024 yang artinya bayi yang lahir pada tahun 2024 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 75,12 tahun. Selama 5 tahun terakhir (2020–2024), UHH Kepulauan Riau telah meningkat sebesar 0,87 tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,29 persen per tahun.



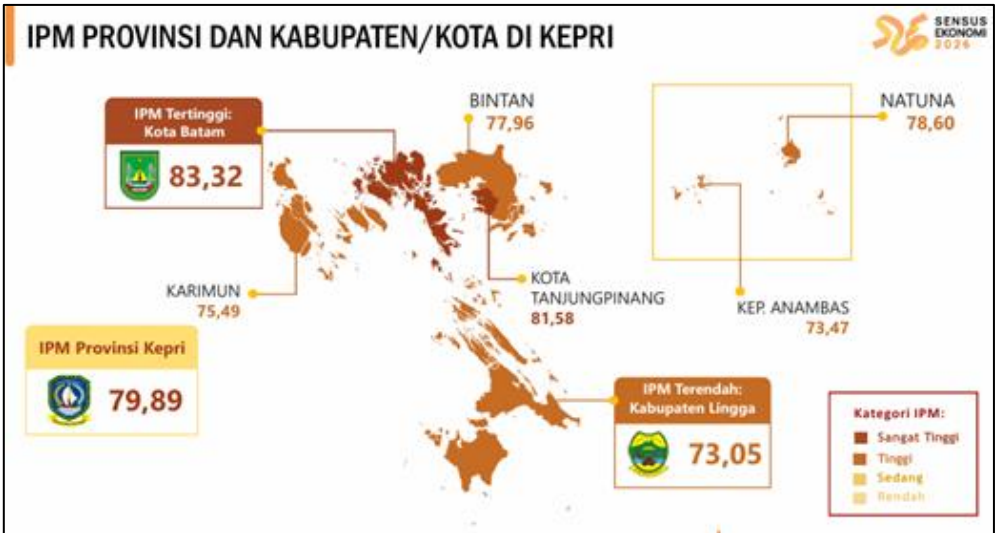
Sumber : Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kepulauan Riau

Dimensi pengetahuan dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Selama lima tahun terakhir (2020–2024), HLS Kepulauan Riau rata-rata meningkat 0,77 persen per tahun, sementara RLS meningkat 0,93 persen per tahun. Jika dibandingkan tahun 2023, HLS Kepulauan Riau meningkat sebesar 0,22 tahun (1,69 persen) dan RLS meningkat sebesar 0,09 tahun (0,86 persen).



Sumber : Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kepulauan Riau

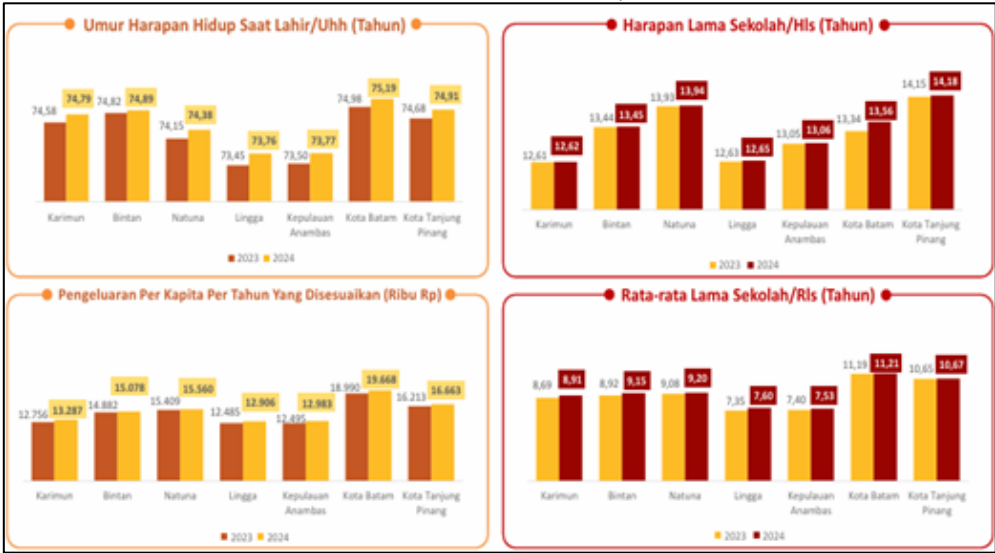
Dimensi ketiga yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran riil per kapita (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2024 pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan penduduk Kepulauan Riau mencapai Rp15.573.000,00 per tahun. Dimensi standar hidup layak tahun 2024 mengalami peningkatan seiring dengan pemulihan ekonomi Kepulauan Riau yang terus berlanjut. Selama lima tahun terakhir (2020–2024), pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan Kepulauan Riau telah meningkat sebesar Rp1.364.000,00 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,33 persen per tahun.



Gambar 3.14 IPM Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Pada 2024, dua dari tujuh kabupaten/kota di Kepulauan Riau mencapai status pembangunan manusia “sangat tinggi” (IPM ≥ 80), yaitu Kota Batam dengan capaian IPM 83,32 dan Kota Tanjungpinang dengan capaian IPM 81,58. Sementara lima diantaranya mencapai status pembangunan manusia “tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$), yaitu Kabupaten Natuna dengan capaian IPM 78,60, Kabupaten Bintan 77,96, Kabupaten Karimun 75,49, Kabupaten Kepulauan Anambas 73,47, dan Kabupaten Lingga dengan capaian IPM 73,05. Dalam kurun waktu 2020-2024, terjadi peningkatan status pembangunan manusia dari “tinggi” ke “sangat tinggi” yang dialami Kota Tanjungpinang, yaitu sejak 2022.

Grafik 3.30 Indikator IPM Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024



Sumber : Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kepulauan Riau

Pada tahun 2024, pertumbuhan IPM tertinggi dicapai oleh Kabupaten Lingga sebesar 1,14 persen, disusul Kabupaten Karimun sebesar 1,06 persen, dan Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 0,92 persen.

Selama periode 2023 hingga 2024, disparitas IPM antar kabupaten/kota di Kepulauan Riau konsisten menunjukkan perbaikan. Hal ini ditandai dengan semakin rendahnya gap antara IPM yang tertinggi dengan yang terendah, yaitu dari yang terendah di Kabupaten Lingga sebesar 72,23 di tahun 2023 menjadi 723,05 di tahun 2024. Dan IPM yang tertinggi di Kota Batam sebesar 82,64 di Tahun 2023 menjadi 83,32 di Tahun 2024.

Dilihat dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) realisasi kinerja pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 79,89 Indeks dengan target sebesar 77,74 Indeks dengan capaian kinerja sebesar 103%.

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau sebesar 79,89 sedangkan Indeks Pembangunan Manusia Nasional sebesar 75,02. Hal ini menunjukkan rata-rata Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau diatas Indeks Pembangunan Manusia Nasional sehingga Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dikategorikan memiliki Tingkat Pembangunan Manusia yang lebih baik dari rata-rata Nasional. Dampak Positifnya Provinsi Kepulauan Riau cenderung memiliki lebih banyak peluang investasi, lebih tinggi kualitas tenaga kerja, dan akses lebih baik terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, ini bisa menjadi indikator bahwa kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau lebih fokus pada Pembangunan manusia yang berdampak langsung kepada Kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada Gambar berikut:



Gambar 3.15 Indikator Provinsi Kepulauan Riau dan IPM Nasional Tahun 2024

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional sebagai berikut:

1. Pada tahun 2024, IPM Kepri mencapai 79,89, meningkat 0,81 poin atau 1,02 persen dibandingkan tahun 2023;
2. Selama 2020-2024, IPM Kepri mencatat rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 0,70 persen.

Faktor yang mendukung ketercapaian dalam mempengaruhi pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 antara lain adalah:

1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui:
 - a. OJT Orientasi Dokter Dalam Penggunaan USG Dasar Obstetri Terbatas Melalui *Blended Learning*;

- b. OJT Pelatihan Pelayanan Kesehatan Balita Untuk Penatalaksanaan Balita Sakit dan/ atau Masalah Gizi;
 - c. Pertemuan Dalam Rangka Pemantauan Pelaksanaan AMPSR, Orientasi Sistem Informasi Matneo, MPDN, dan Ekohort;
 - d. Pembinaan Surveilans Kelainan Bawaan;
 - e. Monitoring Evaluasi Program KIA Dalam Rangka Penurunan AKI dan AKB;
 - f. Pertemuan Peningkatan Kapasitas Bidan Dalam Penurunan AKI dan AKB;
2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan melalui:
- a. Meningkatkan Akses Mutu Pendidikan;
 - b. Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan melalui pembangunan USB, RKB, rehabilitasi, renovasi sekolah, dan kegiatan pembangunan fisik pendidikan lainnya, khususnya di wilayah yang angka partisipasinya masih rendah;
 - c. Tetap meneruskan Pemberian Bantuan bagi siswa tidak mampu melalui bantuan transportasi darat dan laut, kompensasi SPP dan juga bantuan bagi siswa yang melaksanakan magang;
 - d. Peningkatan kompetensi guru melalui Bimtek/Sosialisasi.
3. Meningkatkan daya saing masyarakat melalui:
- a. Peningkatan kualitas tenaga kerja dan melakukan program *Link and match* dengan dunia usaha dunia industri (DUDI);
 - b. Penumbuhan wira usaha baru (WUB) industri kecil sebanyak 230 WUB dan Fasilitas industri kecil dalam bentuk pelatihan, Fasilitas HKI, Merk, desain dan sertifikat halal sebanyak 808 industri kecil serta melakukan inkubasi industri kecil sebanyak 40 diharapkan dapat membantu memberikan nilai;
 - c. Memberikan Pelatihan dan pengembangan usaha bagi Perempuan kelompok rentan seperti penduduk perempuan dibawah garis kemiskinan;
 - d. Konsistensi IKM dalam menumbuhkan dan meningkatkan kapasitas dan juga daya saing.
4. Permasalahan yang dihadapi yang menjadi kendala dalam pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia sebagai berikut:
- a. Masih adanya persalinan yang ditolong oleh non tenaga kesehatan dan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan di non fasilitas pelayanan kesehatan. Masih banyak masyarakat di wilayah pulau – pulau di kabupaten/ kota yang lebih memilih untuk bersalin di rumah karena berbagai macam alasan diantaranya faktor tradisi yang turun menurun, wilayah kepulauan yang membuat jarak antara rumah dengan fasilitas pelayanan kesehatan cukup jauh dan moda transportasi yang kurang memadai, fasilitas pelayanan kesehatan yang kurang memadai dalam pelayanan persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.
 - b. Masih adanya keterbatasan sarana dan prasarana serta alat kesehatan di sebagian fasilitas pelayanan kesehatan dalam pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan normal dan dengan komplikasi, penanganan bayi baru lahir normal dan dengan komplikasi, dan pelayanan kesehatan bayi. Salah satunya yaitu alat USG, logistik pemeriksaan laboratorium bagi ibu, bayi, dan calon pengantin, alat stabilisasi ibu dan bayi dengan komplikasi, fasilitas dalam ambulans sebagai sarana rujukan kegawatdaruratan.

- c. Masih belum meratanya distribusi tenaga kesehatan spesialis seperti dokter spesialis kandungan, dokter spesialis anak, dokter spesialis anestesi, dan dokter spesialis penyakit dalam, dan dokter spesialis lainnya. Dokter spesialis banyak terdistribusi di daerah perkotaan sedangkan di daerah DTPK seperti Kabupaten Kepulauan Anambas masih minim.
- d. Minimnya kegiatan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan berupa pelatihan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota, salah satunya karena adanya keterbatasan anggaran dan adanya efisiensi anggaran Dekonsentrasi Program Pembinaan Kesehatan Keluarga.
- e. Sistem manual rujukan maternal neonatal yang belum berjalan dengan baik.
- f. Pelaksanaan *Audit Maternal Perital* (AMP) di kabupaten/kota belum optimal, efektif, dan sesuai dengan yang diharapkan.
- g. Program kesehatan reproduksi calon pengantin yang belum berjalan optimal.
- h. Ketimpangan akses dan mutu pendidikan antar satuan Pendidikan dan antar wilayah.
- i. Pemenuhan kualitas, kuantitas dan distribusi tenaga pendidik dan kependidikan belum berimbang antar wilayah dan antar satuan pendidikan.
- j. Kesenjangan transformasi digitalisasi dan teknologi pendidikan masih terbatas dan belum merata antar wilayah dan antar satuan pendidikan.
- k. Terbatasnya satuan pendidikan berbasis inklusi.
- l. Penggunaan kurikulum yang belum sejalan dengan kebutuhan pasar kerja dan kemajuan teknologi.
- m. Inovasi dalam Pendanaan Pendidikan masih rendah.
- n. Faktor Geografis, yaitu jarak antar sekolah yang jauh, sehingga keterbatasan akses terhadap satuan pendidikan terutama yang ada di Pulau Pulau, hal ini bisa di lihat dengan Angka Partisipasi yang tinggi di daerah perkotaan seperti Kota Tanjungpinang dan Kota Batam.
- o. Sarana dan Prasarana yang belum seluruhnya sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
- p. Tingkat kesejahteraan sosial calon peserta didik, khususnya dari keluarga berpenghasilan rendah.
- q. Sulitnya mendapatkan *update* data perempuan dibawah garis kemiskinan dan perempuan kepala keluarga dari pihak desa dan kelurahan serta masih rendahnya keinginan peserta untuk mengembangkan usaha maupun pengetahuan.
- r. Pelaksanaan pelatihan kerja yang belum berdasarkan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan indeks Pembangunan Manusia dan mengurangi permasalahan dan kendala yang dihadapi maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan alternatif solusi untuk kedepannya dengan cara sebagai berikut:

1. Secara konsisten menggiatkan dan mengedukasi masyarakat untuk menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat.
2. Melakukan kegiatan AMP sebagai proses pembelajaran kasus kematian ibu dan bayi agar tidak terulang lagi dengan kasus yang sama.
3. Membenahi sistem manual rujukan penanganan kasus komplikasi pada ibu dan bayi, melakukan penunjukan dokter spesialis kandungan dan anak sebagai penanggungjawab

wilayah yang memberikan arahan kepada tenaga kesehatan di wilayah kerja puskesmas untuk stabilisasi pasien ibu dan bayi sebelum merujuk.

4. Melengkapi sarana prasarana dan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan atau puskesmas dalam pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan normal dan dengan komplikasi, penanganan bayi baru lahir normal dan dengan komplikasi, dan pelayanan kesehatan bayi. Salah satunya yaitu alat USG, logistik pemeriksaan laboratorium bagi ibu, bayi, dan calon pengantin, alat stabilisasi ibu dan bayi dengan komplikasi, fasilitas dalam ambulans sebagai sarana rujukan kegawatdaruratan.
5. Melakukan kegiatan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pemberian pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan normal dan dengan komplikasi, penanganan bayi baru lahir normal dan dengan komplikasi, dan pelayanan kesehatan bayi.

Beberapa diantaranya yaitu pelatihan kegawatdaruratan maternal dan neonatal, pelatihan integrasi Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dan gizi buruk, pelatihan penanganan asfiksia dan BBLR, pelatihan dokter dalam pelayanan KIA termasuk penggunaan USG, pelatihan bidan dalam pelayanan KIA, dan pelatihan lainnya.

6. Peningkatan koordinasi dengan organisasi profesi (POGI, IBI, IDI, dll) untuk pemerataan SDM dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak.
7. Pelaksanaan refreshing deteksi risiko dini dan penapisan faktor risiko ibu dan bayi bagi bidan-bidan di wilayah kerja puskesmas.
8. Penguatan peran lintas sektor dalam pemberdayaan masyarakat dan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).
9. Optimalisasi dan monitoring pemanfaatan JKN, DAK, Dekonsentrasi untuk penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).
10. Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman.
11. Pemerataan sarana dan prasarana pendidikan antar wilayah dan antar satuan pendidikan.
12. Distribusi pendidik yang berimbang antar wilayah dan peningkatan persentase sertifikasi pendidik serta tingkat pendidikan tenaga pendidik.
13. Peningkatan pendidikan berbasis media pembelajaran digital dan pemenuhan secara bertahap dan Penyesuaian kurikulum berdasarkan kebutuhan.
14. Meningkatkan pengamanan biaya pendidikan melalui skema beasiswa, peningkatan pengelolaan BLUD dan memperkuat kerjasama dengan pihak lain termasuk orang tua siswa dalam pendanaan pendidikan.
15. Pelatihan penumbuhan wirausaha baru melalui inkubasi industri dan peningkatan kemitraan antara industri kecil, menengah, besar dan sektor ekonomi lainnya.
16. Pelatihan SDM dan pengembangan manajemen pelaku IKM dan pengembangan akses pemasaran dan promosi produk IKM dan Peningkatan Diverifikasi produk IKM dan fasilitasi legalitas dan sertifikasi produk.
17. Peningkatan akses pembiayaan dan akses bahan baku.
18. Memberikan pelatihan dan pengembangan usaha bagi perempuan kelompok rentan seperti penduduk perempuan dibawah garis kemiskinan.
19. Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendapatkan data akurat terkait peningkatan ekonomi perempuan melalui pelatihan pengembangan usaha, serta

bekerjasama dengan *stakeholder* terkait dalam membantu pemasaran hasil produksi berupa packingan maupun lisensi pemasaran sesuai standar di pasar modern.

Program-program yang mendukung pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2024 diantaranya adalah:

- 1. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- 2. Program Pengelolaan Pendidikan
- 3. Program Pengembangan Kurikulum
- 4. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- 5. Pengendalian Perizinan
- 6. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
- 7. Program Pelatihan dan Produktivitas
- 8. Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum

Tabel 3.37 Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau Beserta Anggaran

No	Program/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	4.086.542.944	4.049.956.331
2	Program Pengelolaan Pendidikan	377.526.999.967	357.186.005.919
3	Program Pengembangan Kurikulum	405.402.792	331.001.647
4	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	379.760.000	321.180.012
5	Program Pengendalian Perizinan	63.630.400	61.758.400
6	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	4.671.593.002	4.324.879.949
7	Pelatihan dan Produktivitas	3.239.016.874	3.084.224.287
8	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum	1.116.000.000	1.105.491.000
JUMLAH		391.488.945.979	370.464.497.545

Dari jumlah anggaran sebesar Rp391.488.945,979,00 terealisasi sebesar Rp370.464.497.454,00 atau 94,6%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp21.024.448.434,00 (5,37%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja tingkat pengangguran terbuka (104,25%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (94,6%) dengan efisiensi 9,65%.

3.5.6. Sasaran Meningkatnya Pemerataan Mutu dan Akses Layanan Pendidikan

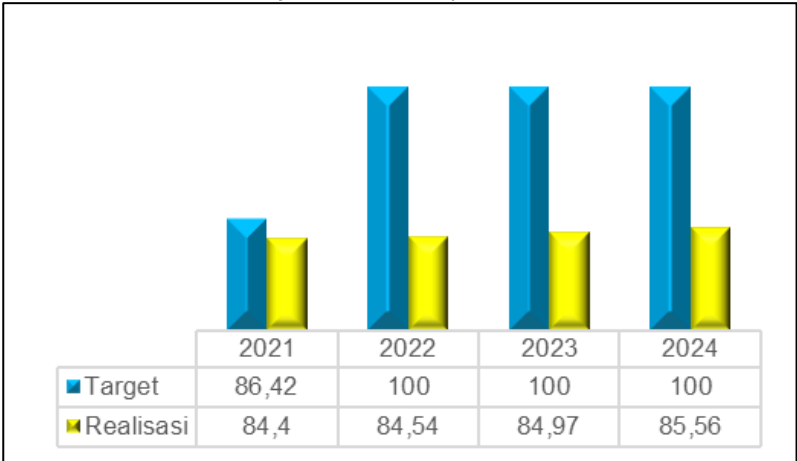
3.5.6.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK



Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuhi) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK di Provinsi Kepulauan Riau meningkat. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK pada Tahun 2024 sudah baik dengan capaian kinerja sebesar 85,56% dari target sebesar 100% dan terealisasi sebesar 85,56%.

Meningkatnya pemerataan mutu dan akses layanan pendidikan dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan peningkatan yang cukup menggembirakan. Realisasi Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 sebesar 85,56% dengan target dari yang telah ditetapkan sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 85,56% atau dalam kategori **Baik**.

Grafik 3.31 Realisasi Kinerja APS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2024



Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

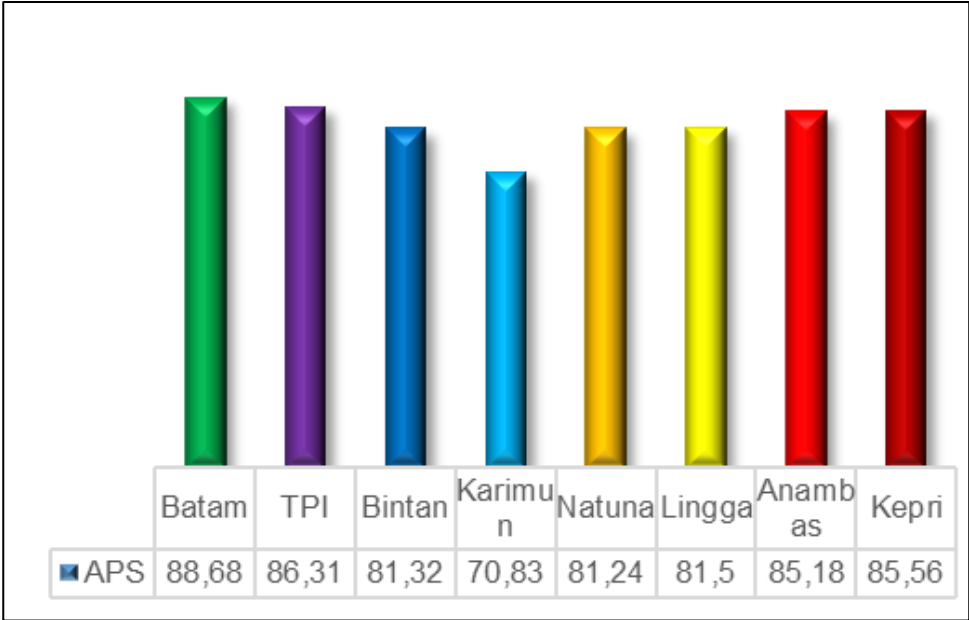
Capaian kinerja Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK tahun 2024 apabila dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,59%. Dimana pada tahun 2023 peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK hanya sebesar 84,97% meningkat menjadi 85,56% pada tahun 2024. Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 sebesar 85,56 atau 85,56% dari target yang di tetapkan sebesar 100% dengan Kategori Kinerja BAIK, Capaian 85,56% merupakan hasil dari perhitungan Jumlah Penduduk usia 16-18 tahun yang masih sekolah (81989) dibagi Jumlah Penduduk Usia 16-18 Tahun (95826) dikali 100%. Ini berarti bahwa sekitar 85,56% Penduduk usia 16-18 Tahun di Provinsi Kepulauan Riau terdaftar dan masih aktif mengikuti pendidikan, baik di pendidikan formal maupun nonformal.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021. Pemenuhan Target Angka Partisipasi Sekolah (APS) Jenjang Menengah sebesar 100%. Dengan belum mencapai nya target APS 100% menandakan bahwa di Provinsi Kepulauan Riau masih ada sekitar 14% belum atau tidak sedang sekolah pada usia 16-18 Tahun. Kondisi ini mesti dicarikan jalan keluar agar terjadi peningkatan sehingga program wajib belajar 12 tahun dapat tercapai, meskipun saat ini Provinsi Kepulauan Riau masih mencanakan wajib belajar 9 Tahun.

Capaian kinerja Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK tahun 2024 apabila dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,7%. Dimana pada tahun 2023 peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK hanya sebesar 84,97%. meningkat menjadi 85,56 pada tahun 2024. Peningkatan ini disebabkan oleh Peningkatan karena Pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana Pendidikan yang sudah meningkat setiap tahunnya. Program Pembebasan SPP, Pemberian Bantuan Biaya Personil Peserta Didik pada tahun 2024 dan Pemberian Bantuan Seragam Sekolah yang dijalankan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat mengurangi beban orang tua dalam menyekolahkan anaknya, sehingga anak tetap dapat sekolah.

Meski belum mencapai target APS akan tetapi Angka Partisipasi Kasar (APK) di tahun 2024 mencapai angka 108,40% dan Angka Partisipasi Murni (APM) mencapai angka 87,94% pada jenjang pendidikan menengah (SMA dan SMK) di tahun 2024.

Grafik 3.32 Realisasi Kinerja APS Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2024



Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

Dilihat dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) realisasi kinerja peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 85,56 dengan target sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 85,56%.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK pada Tahun 2024, capaian Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan dengan target nasional berada diatas target nasional yaitu rata-rata nasional sebesar 74,64% dengan capaian Provinsi Kepulauan Riau sebesar 85,56%. Jika dibandingkan dengan Pulau Sumatera, Provinsi Kepulauan Riau berada pada urutan ke-1 (satu) dengan nilai sebesar 85,56% yang disusul oleh Provinsi Sumatera Barat sebesar 84,40%.

Tabel 3.38 APS Provinsi Wilayah Provinsi 2024

NO	PROVINSI WILAYAH SUMATERA	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Provinsi dan Kelompok Umur 16-18
1	KEP. RIAU	85,56
2	SUMATERA BARAT	84,4
3	ACEH	81,55
4	BENGKULU	79,07
5	SUMATERA UTARA	78,59
6	RIAU	78,49
7	KEP. BANGKA BELITUNG	72,69
8	LAMPUNG	72,35
9	JAMBI	71,97
10	SUMATERA SELATAN	70,8

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

Faktor yang mempengaruhi Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 adanya beberapa faktor sebagai berikut:

1. Meningkatnya sebaran dan pemerataan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan menengah yang semakin membaik di setiap kab/kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau serta di dukungan anggaran yang terus meningkat dari tahun ke tahun serta strategi pendekatan layanan pendidikan yang lebih mendekatkan fasilitas pendidikan di tengah masyarakat bertempat tinggal.
2. Meningkatkan jumlah dan kualitas pendidik serta penyebaran pendidik yang lebih merata pada semua wilayah.
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Pendidikan bagi masa depan anak.

Upaya yang mendukung keberhasilan peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK diantaranya adalah:

1. Pemerataan Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan melalui pembangunan USB, Pembangunan Ruang kelas Baru sebanyak 10 SMA dan 11 SMK, rehabilitasi, renovasi sekolah, dan kegiatan pembangunan fisik pendidikan lainnya, khususnya di wilayah yang angka partisipasinya masih rendah.
2. Pembebasan SPP, Pemberian Bantuan bagi siswa tidak mampu melalui bantuan transportasi darat dan laut, dan juga bantuan bagi siswa yang melaksanakan magang.

3. Meningkatkan berbagai program untuk menekan permasalahan angka putus sekolah dan anak tidak sekolah melalui berbagai skema seperti skema pendidikan paket A, B dan C serta pendampingan psikologi bagi anak yang bermasalah sosial dengan melibatkan organisasi lain seperti Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Dinas Kesehatan, Kementerian Agama, organisasi Kesehatan Ahli Jiwa dan berbagai organisasi lainnya.
4. Skema beasiswa disiapkan pemerintah untuk memberikan kesempatan bagi siswa berprestasi dan kurang mampu untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
5. Penyusunan DED relokasi pembangunan SMA Negeri 3 Tanjungpinang.
6. Melakukan koordinasi secara terus menerus baik di internal Dinas Pendidikan, maupun dengan Instansi/lembaga terkait, serta pemerintah pusat dalam rangka mendorong pemenuhan SPM di bidang pendidikan khususnya jenjang menengah.

Tabel 3.39 Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan Tahun 2024

KEGIATAN	JUMLAH	SATUAN
Pembangunan Ruang Kelas baru	21	
SMA	10	Ruang
SMK	11	Ruang
Rehabilitasi Berat/Sedang Ruang Kelas	71	
SMA	67	Ruang
SMK	4	Ruang

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

Permasalahan yang dihadapi yang menjadi kendala dalam meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK sebagai berikut:

1. Faktor Geografis, yaitu jarak antar sekolah yang jauh, sehingga keterbatasan akses terhadap satuan pendidikan terutama yang ada di Pulau Pulau, hal ini bisa di lihat dengan Angka Partisipasi yang tinggi di daerah perkotaan seperti Kota Tanjungpinang dan Kota Batam.
2. Pemerataan Sarana dan Prasarana yang belum seluruhnya sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
3. Tingkat kesejahteraan sosial calon peserta didik, khususnya dari keluarga berpenghasilan rendah.
4. Pemenuhan kualitas, kuantitas dan distribusi tenaga pendidik dan kependidikan belum berimbang antar wilayah dan antar satuan pendidikan.
5. Kesenjangan transformasi digitalisasi dan teknologi pendidikan masih terbatas dan belum merata antar wilayah dan antar satuan pendidikan.
6. Terbatasnya satuan pendidikan berbasis inklusi
7. Penggunaan kurikulum yang belum sejalan dengan kebutuhan pasar kerja dan kemajuan teknologi
8. Inovasi dalam Pendanaan Pendidikan masih rendah

Dalam rangka meningkatkan ketercapaian indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK dan mengurangi permasalahan dan kendala yang dihadapi maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan alternatif solusi untuk kedepannya dengan cara sebagai berikut:

1. Pemerataan Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan melalui pembangunan USB, RKB, rehabilitasi, renovasi sekolah, dan kegiatan pembangunan fisik pendidikan lainnya, khususnya di wilayah yang angka partisipasinya masih rendah.
2. Melanjutkan program Pembebasan SPP, Pemberian Bantuan bagi siswa tidak mampu melalui bantuan transportasi darat dan laut, dan juga bantuan bagi siswa yang melaksanakan magang.
3. Melakukan koordinasi secara terus menerus baik di internal Dinas Pendidikan, maupun dengan Instansi/lembaga terkait, serta pemerintah pusat dalam rangka mendorong pemenuhan SPM di bidang pendidikan khususnya jenjang menengah.
4. Meningkatkan fasilitas Pendidikan menengah hingga ke seluruh wilayah terutama pada daerah terluar, tertinggal dan wilayah perbatasan sehingga kesenjangan fasilitas Pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan semakin membaik.
5. Peningkatan alokasi anggaran Pendidikan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas Pendidikan sesuai kebutuhan.
6. Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka meningkatkan bakat, minat dan percepatan proses pembelajaran berbasis konten-konten Pendidikan yang lebih menarik.
7. Memperkuat program teknologi informasi serta penguatan peran dan fungsi Lembaga/Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai Lembaga yang mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi informasi.
8. Distribusi pendidik yang berimbang antar wilayah dan peningkatan persentase sertifikasi pendidik serta tingkat pendidikan tenaga pendidik.
9. Peningkatan pendidikan berbasis media pembelajaran digital dan pemenuhan secara bertahap.
10. Meningkatkan jumlah satuan pendidikan yang berkeadilan
11. Penyesuaian kurikulum berdasarkan kebutuhan
12. Meningkatkan pengamanan biaya pendidikan melalui skema beasiswa, peningkatan pengelolaan BLUD dan memperkuat kerjasama dengan pihak lain termasuk orang tua siswa dalam pendanaan pendidikan

Dukungan terhadap Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Pada Tahun 2024 Provinsi Kepulauan Riau menjalankan 3 (Tiga) Program pembangunan untuk urusan pendidikan yaitu:

1. Program Pengelolaan Pendidikan yang di tunjang oleh 3 (Tiga) Kegiatan yaitu:
 - a. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas;
 - b. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - c. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus
2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program ini di tahun 2024 hanya menjalankan 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi.

3. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan yang di tunjang dengan 2 (dua) kegiatan yaitu:
 - a. Kegiatan Penerbitan Izin Pendidikan Menengah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;
 - b. Kegiatan Penerbitan Izin Pendidikan Khusus Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah.

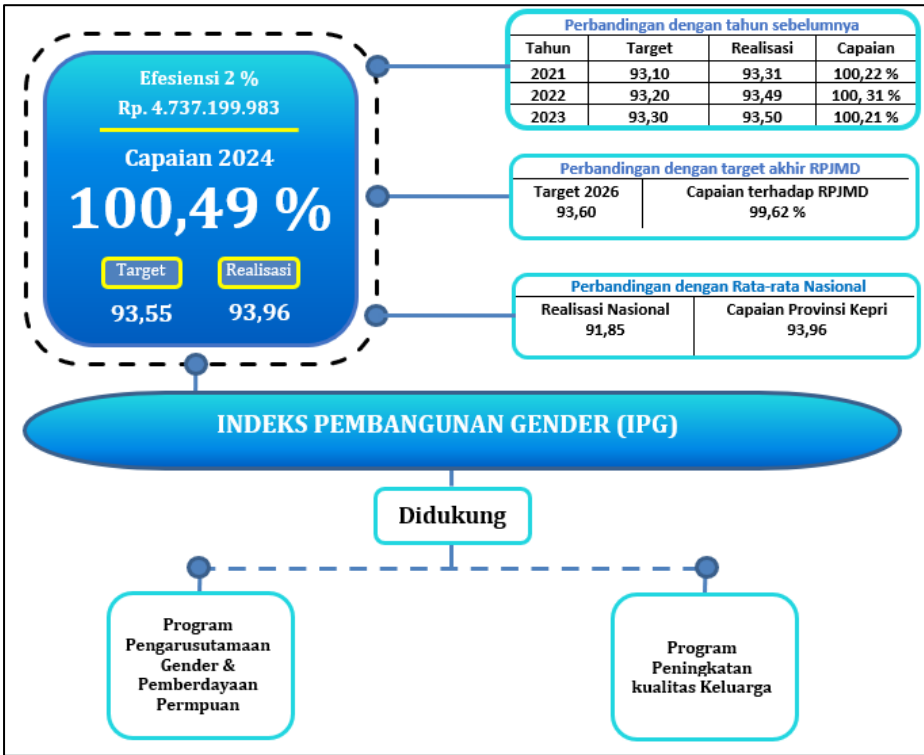
Tabel 3.40 Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Provinsi Kepulauan Riau Beserta Anggaran

No	Program	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1	Pengelolaan Pendidikan	377.526.999.967	360.395.217.626
2	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	405.402.792	331.001.647
3	Pengendalian Perizinan Pendidikan	63.630.400	61.758.400
JUMLAH		377.996.033.159	360.787.977.673

Dari jumlah anggaran sebesar Rp377.966.033.159,00 terealisasi sebesar Rp360.787.977.673,00 atau 95%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp17.208.055.486,00 (4,55%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian kinerja indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK (85,56%) lebih rendah dari realisasi anggaran (95%) sehingga belum mencapai efesiensi sebesar 9%.

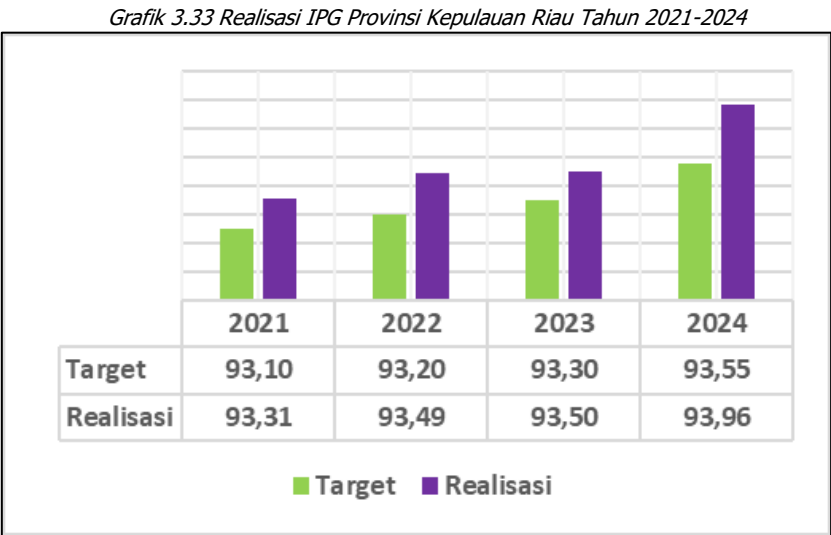
3.5.7. Sasaran Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak

3.5.7.1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)



Gender diartikan sebagai perbedaan fungsi dan peran sosial antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan oleh masyarakat. Kesenjangan gender (*gender equity*) lebih dimaknai sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia dalam berperan dan berpartisipasi di segala bidang. Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Provinsi Kepulauan Riau meningkat. Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada Tahun 2024 sudah baik dengan realisasi kinerja sebesar 93,96 Indeks dari target sebesar 93,55 Indeks dan capaian sebesar 100,49%.

Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak dilihat dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan peningkatan yang cukup menggembirakan. Capaian kinerja Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Tahun 2024 masih menggunakan data tahun 2023, dikarenakan data IPG Tahun 2024 baru dikeluarkan oleh BPS Pada Agustus 2025. Realisasi Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 sebesar 93,96 Indeks dilihat berdasarkan kinerja dapat mencapai target dari yang telah ditetapkan sebesar 93,55 Indeks dengan capaian kinerja sebesar 100,49% atau dalam kategori **Sangat Baik**.



Sumber : Data Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

Dari tabel dan grafik diatas dapat diketahui bahwa persentase realisasi Indeks Pembangunan Gender (IPG) dari tahun sebelumnya mengalami kenaikan. Pada tahun 2023 target IPG sebesar 93,30 dengan realisasi target sebesar 93,50 serta untuk capaian 100,21%, pada tahun 2024 target sebesar 93,55 dengan realisasi target 93,96 serta untuk capaian 100,49%.

Tabel 3.41 Realisasi IPG Kab/Kota diProvinsi Kepulauan Riau Tahun 2019-2023

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)				
		2023	2022	2021	2020	2019
1	KEPULAUAN RIAU	93.96	93,50	93,49	93,31	93,10
2	Karimun	91,33	91,12	91,00	91,25	90,91
3	Bintan	93,93	93,78	93,53	93,12	93,10
4	Natuna	92,07	91,86	91,95	91,67	91,72
5	Lingga	90,75	90,48	89,73	89,25	89,26
6	Kepulauan Anambas	91,25	91,14	90,30	90,27	90,16
7	Kota Batam	94,95	94,75	94,51	94,43	94,42
8	Kota Tanjung Pinang	96,96	97,14	97,14	96,79	96,77
9	INDONESIA	91,85	91,63	91,27	91,06	91,07

Sumber : Data Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan capaian setiap tahunnya bahkan capaiannya melebihi capaian IPG Nasional Tahun 2024.

Untuk menghitung IPG, menggunakan dimensi yang sama dengan Pembangunan Manusia yaitu dimensi kesehatan (Angka Harapan Hidup), dimensi pendidikan (Harapan Lama Sekolah dan rata- rata lama sekolah) dan dimensi ekonomi (Pengeluaran per Kapita).

Tabel 3.42 Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Kepulauan Riau

	LAKI-LAKI		PEREMPUAN	
	2022	2023	2022	2023
KEPULAUAN RIAU	12,92	12,93	13,16	13,30
Karimun	12,52	12,54	12,93	12,94
Bintan	13,14	13,32	14,03	14,18
Natuna	13,77	13,78	14,01	14,02
Lingga	12,89	12,9	12,57	12,61
Kepulauan Anambas	12,82	12,98	13,30	13,31
Kota Batam	13,21	13,23	13,34	13,35
Kota Tanjung Pinang	14,05	14,06	14,61	14,62

Sumber : Data Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) menggambarkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang di harapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Pada tahun 2023 HLS penduduk laki-laki sebesar 12,93 tahun dan penduduk perempuan sebesar 13,30 tahun. Hal ini menunjukkan hampir tidak ada ketimpangan dalam hal harapan lama sekolah di Provinsi Kepri antara perempuan dan laki-laki atau juga menunjukkan bahwa hampir setaranya harapan lama sekolah bagi perempuan dengan laki-laki di Indonesia.

Selanjutnya dilihat dari Rata-rata Lama sekolah (RLS) adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi: (1) partisipasi sekolah (2) jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki (3) ijazah tertinggi yang dimiliki (4) tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki. Selama periode 2022-2023 capaian RLS penduduk laki-laki masih lebih tinggi dari capaian penduduk perempuan.

Tabel 3.43 Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Kepulauan Riau

	LAKI-LAKI		PEREMPUAN	
	2022	2023	2022	2023
KEPULAUAN RIAU	10,50	10,51	10,23	10,38
Karimun	8,73	8,90	8,14	8,43
Bintan	8,97	9,05	8,68	8,92
Natuna	9,25	9,37	8,84	9,02
Lingga	7,44	7,59	6,93	7,16
Kepulauan Anambas	7,68	7,70	7,10	7,21
Kota Batam	11,36	11,37	11,05	11,07
Kota Tanjung Pinang	10,68	10,84	10,48	10,64

Sumber : Data Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

Tabel 3.44 Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)
Provinsi Kepulauan Riau

	LAKI-LAKI		PEREMPUAN	
	2022	2023	2022	2023
Kepulauan Riau	20.614	21.223	12.651	13.019
Karimun	18.830	19.509	9.947	10.240
Bintan	21.839	22.036	12.600	12.707
Natuna	21.240	21.878	11.612	12.007
Lingga	17.971	18.428	9.957	10.233
Kepulauan Anambas	17.338	17.907	9.304	9.646
Kota Batam	27.027	27.715	17.748	18.193
Kota Tanjung Pinang	19.173	19.715	15.391	15.413

Sumber : Data Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

Pada indikator Pengeluaran Perkapita, penduduk laki-laki jauh lebih tinggi dibandingkan capaian penduduk perempuan. Pada tahun 2023 terjadi kesenjangan pengeluaran yang sangat tinggi untuk penduduk laki-laki penduduk perempuan. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor terutama adalah terkait dengan kesempatan kerja dan keterampilan yang dimiliki.

Dilihat dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) realisasi kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 93,96 Indeks dengan target sebesar 93,60 Indeks dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Tabel 3.45 Capaian Kinerja IPG Berdasarkan Provinsi Se Indonesia Tahun 2023

RANGKING	PROVINSI	Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2023
	INDONESIA	91,85
1	DKI JAKARTA	95,24
2	SULAWESI UTARA	95,06
3	SUMATERA BARAT	94,93
4	D I YOGYAKARTA	94,99
5	BALI	94,59
6	KEPULAUAN RIAU	93,50
Dst		...
34	PAPUA	81,64

Sumber : Data Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

Capaian IPG Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 sebesar 93,50 jauh diatas angka capaian Nasional yaitu sebesar 91,63, kondisi ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sangat serius dalam memperhatikan kesetaraan gender dalam pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau. Serta jika dilihat dari tabel diatas, untuk Indeks Pembangunan Gender (IPG) berdasarkan Provinsi Se-Sumatera, maka Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2024 berada pada urutan ke-2. Berikut data lengkap dari seluruh Provinsi se-Sumatera:

Tabel 3.46 Capaian Kinerja IPG Berdasarkan Provinsi se-Sumatera Tahun 2023

RANGKING	PROVINSI	Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2023
1	SUMATERA BARAT	94,93
2	KEPULAUAN RIAU	93,50
3	SUMATERA SELATAN	93,25
4	ACEH	92,55
5	BENGKULU	91,57
6	SUMATERA UTARA	91,31
7	LAMPUNG	90,75

Sumber : Data Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

Faktor yang mendukung ketercapaian dalam mempengaruhi peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Provinsi;
2. Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan, pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan Provinsi;

3. Pelaksanaan penyedia layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan kualitas keluarga dan perlindungan anak yang wilayah kerjanya lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

Permasalahan yang dihadapi yang menjadi kendala dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebagai berikut:

1. Rendahnya pendapatan ekonomi perempuan dilihat dari rendahnya angka rata-rata pengeluaran perkapita perempuan dimana hal ini dikarenakan kurangnya perempuan untuk bekerja pada sektor formal. Hal ini dikarenakan pengeluaran perkapita adalah proksi dari pendapatan atau tingkat kesejahteraan secara ekonomi;
2. Masih banyaknya perempuan yang enggan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kualitas dan pengembangan kapasitas khususnya dibidang ekonomi;
3. Pembinaan dan pendampingan lebih lanjut belum optimal dilakukan terhadap peserta peningkatan kapasitas baik ekonomi maupun sosial karena terkendala dengan lingkup jangkauan dinas.

Dalam rangka meningkatkan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan mengurangi permasalahan dan kendala yang dihadapi maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan alternatif solusi untuk kedepannya yaitu:

1. Mendorong peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) yakni melalui kegiatan pelaksanaan pendidikan paket C bagi perempuan putus sekolah;
2. Mendorong peningkatan pendapatan Perkapita melalui kegiatan peningkatan kapasitas *Life Skill* dan pengembangan usaha melalui pelatihan-pelatihan yang mendukung pendapatan perempuan dalam peningkatan ekonomi keluarga;
3. Salah satu upaya dilakukan pemerintah selain meningkatkan *life skill* perempuan adalah mendorong perempuan terlibat dalam perekonomian dan membangun jejaring sosial. Tindak lanjut berupa dukungan sosial dan *support system* juga dari Pemerintah. Perlu peraturan-peraturan yang menguntungkan perempuan. Termasuk juga institusi atau kelembagaan-kelembagaan harus mendukung perempuan.

Adapun beberapa program pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Gender Provinsi (IPG) antara lain:

Tabel 3.47 Program/Kegiatan yang Menunjang Peningkatan IPG di Provinsi Kepulauan Riau

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
						Rp	%
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang mendapat Peningkatan Kapasitas	34.401.300,00	34.391.500,00	100
2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, hukum, Sosial	616.175.739,00	577.800.614,00	94

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
						Rp	%
				dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabupaten/Kota			
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	3.355.740.396,00	3.339.082.896,00	100
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	191.419.680,00	189.372.500,00	99
5	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komperhensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	539.382.868,00	521.500.935,00	97
TOTAL					4.737.199.983,00	4.662.148.445,00	98

Realisasi anggaran dalam mendukung Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2024 dengan pagu sebesar Rp4.737.119.984,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp4.662.148.445,00 sehingga dapat dicapai efesiensi penggunaan sebesar 98,41%. Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian kinerja indikator Indeks Pembangunan Gender (100,49%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (98,41%) sehingga mencapai efesiensi sebesar 2%.

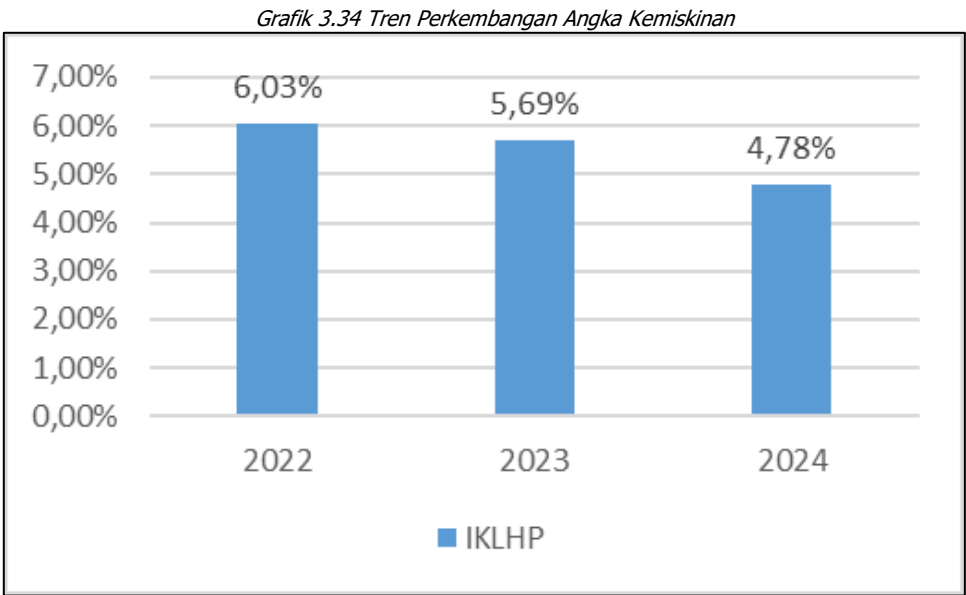
3.5.8. Sasaran Penguatan Jaring Pengaman Sosial

3.5.8.1. Angka Kemiskinan



Penguatan jaring pengaman sosial dilihat dari indikator angka kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan penurunan yang cukup menggembirakan. Realisasi angka kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 sebesar 4,78% dilihat berdasarkan kinerja dapat mencapai target dari yang telah ditetapkan sebesar 5,69% sehingga capaian kinerja sebesar 115,99% atau dalam kategori **SANGAT BAIK**.

Realisasi Kinerja Indikator Angka Kemiskinan dilihat dari beberapa tahun sebelumnya mengalami peningkatan, hal tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Sumber : Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau

Capaian kinerja penurunan angka kemiskinan tahun 2024 apabila dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,91%. Dimana pada tahun 2023 penurunan angka kemiskinan hanya sebesar 5,69% menjadi 4,78% pada tahun 2024.

Dilihat dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) capaian kinerja penurunan angka kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau dengan target sebesar 5,57% sehingga capaian kinerja sebesar 114,18%.

Pada Tahun 2024, capaian Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan dengan target nasional berada di bawah target nasional. Namun jika dibandingkan dengan penurunan angka kemiskinan di Pulau Sumatera, sementara Provinsi Kepulauan Riau berada para urutan ke-4 dengan nilai sebesar 4,78% yang didominasi oleh Provinsi Bali sebesar 3,8%.

Tabel 3.48 Capaian Kinerja IPG Berdasarkan Provinsi Se Sumatera Tahun 2023

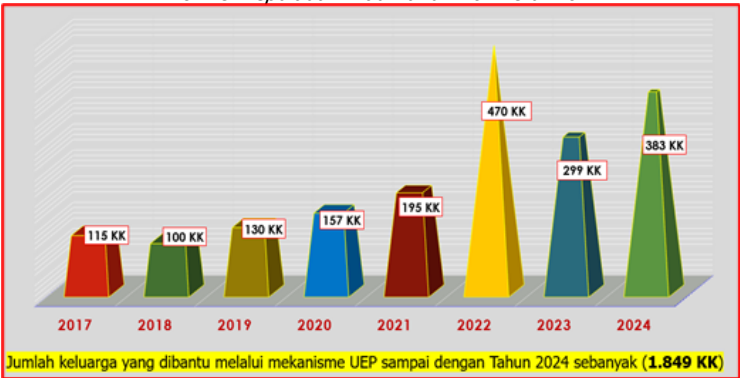
NO URUT	PROVINSI	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN SEMESTER 2
1	BALI	3,8
2	KALIMANTAN SELATAN	4,02
3	DKI JAKARTA	4,14
4	KEP. RIAU	4,78
5	KEP. BANGKA BELITUNG	5,08
...	...	...
37	PAPUA TENGAH	27,6
38	PAPUA PEGUNUNGAN	29,66
	INDONESIA	8,57

Sumber : Data Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

Faktor yang mendukung ketercapaian dalam mempengaruhi penurunan angka kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 adalah peningkatan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat miskin dan rentan miskin di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024. Bantuan sosial ini dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, sehingga dapat mengurangi risiko kemiskinan. Bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Kepri antara lain bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dan sembako.

Upaya lainnya yang mendukung keberhasilan penurunan angka kemiskinan adalah peningkatan kesejahteraan melalui program ekonomi kerakyatan dengan memberikan bantuan kesejahteraan sosial yang bersifat konsumtif, melaksanakan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), memberikan bantuan modal usaha kepada keluarga miskin yang sudah memiliki cikal bakal usaha. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menerapkan berbagai program untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan, termasuk bantuan peralatan usaha, yang berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan ekstrem.

Grafik 3.35 Data Penerima Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 s.d. 2024



Sumber : Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau

Upaya lainnya yang mendorong turunnya angka kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau dari sektor pendidikan yaitu pemberian bantuan bagi peserta didik sehingga dapat mengurangi beban biaya pendidikan, pemberian bantuan seragam sekolah.

Selanjutnya dari sektor kesehatan yaitu penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi. Kemudian melalui Biro Kesejahteraan Rakyat memberikan beasiswa pendidikan tinggi kepada mahasiswa kurang mampu sebanyak 751 orang sehingga secara tidak langsung berperan penting dalam mengentaskan kemiskinan dengan meningkatkan akses bagi kalangan kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.

Sektor Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak juga melaksanakan pelatihan dan pengembangan kapasitas/life skill perempuan khususnya kelompok rentan.

Sektor perikanan dan kelautan juga berupaya memberikan sarana penangkapan ikan yang diberikan kepada para nelayan ini diharapkan mampu menekan biaya produksi yang dikeluarkan, menyediakan sarana dan prasarana, yang secara umum terdiri dari bibit dan pakan ikan, jaring keramba tancap dan apung, penyediaan lahan pembudidaya.

Sektor lingkungan hidup melaksanakan pemberian insentif langsung kepada pengurus dan anggota Kelompok Bank Sampah dalam pengelolaan sampah. Dari Sektor Koperasi dan UKM memberikan upaya pemberian hibah bantuan modal usaha sebanyak 2.588 pelaku usaha, meningkatkan Kapasitas SDM Pelaku Wirausaha dan UMKM memberikan peningkatan pemahaman dan pengetahuan pelaku usaha, memberikan bantuan modal tanpa bunga Subsidi Margin 0 persen sebanyak 290 pelaku usaha.

Dari segi ketenagakerjaan melaksanakan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi sebanyak 748 orang.

Kemudian dari segi Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan melaksanakan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan kewenangan provinsi sebanyak sapi 34 ekor kambing 57 ekor, pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan, dan sarana pendukung pertanian seperti pompa air 11 unit, *handsprayer* 195 unit, mulsa 35 *roll*, selang 5 gulung, pupuk npk 76751 kg, pupuk organik 126760 kg, handtraktor 7 unit, kultivator 18 unit, potong rumput 10 unit, gerobak sorong 20 unit, motor roda 36 unit, cangkul 100 unit, pupuk kandang 9800 kg, penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan seperti benih sawi caisim 53 *sachet*, benih kangkung 87 *sachet*, benih bayam 54 *sachet*, tanah hitam 170 m³, pupuk kompos 17000 *pack*, pupuk npk 850 kg, benih kacang panjang 85 *sachet*, benih okra 85 *sachet*, *polybag* 3400 kg, benih terong 51 *sachet*, modul hidroponik 3 unit, nutrisi hidroponik 3 *pack*, *rockwool* 9 meter, tds meter 3 unit.

Dari segi penataan perumahan dan kawasan pemukiman melaksanakan perbaikan rumah tidak layak huni dalam kawasan permukiman dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha sebanyak 21 rumah tidak layak huni.

Kemudian dari segi elektrifikasi yaitu pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan dengan kegiatan pengadaan pemasangan mesin diesel (genset). Penetapan penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu dengan kegiatan pengadaan dan pemasangan bantuan pasang baru listrik (BPBL) ini sangat membantu masyarakat tidak mampu yang belum berlistrik PLN. Dari segi pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan melaksanakan peningkatan sistem penyediaan air minum spam lintas Kabupaten/Kota.

Permasalahan yang dihadapi yang menjadi kendala dalam penurunan angka kemiskinan sebagai berikut:

1. Infrastruktur yang Kurang Memadai: Infrastruktur yang belum memadai, terutama di daerah terpencil dan pulau-pulau, menghambat distribusi barang dan layanan, serta akses masyarakat terhadap program-program pengentasan kemiskinan.
2. Tantangan dalam Pendataan: Kesulitan dalam mendapatkan data yang akurat dan valid mengenai kondisi masyarakat miskin dapat menghambat pelaksanaan program bantuan sosial yang tepat sasaran. Program-program tersebut harus didasarkan pada data yang akurat agar efektif dalam mengurangi kemiskinan.
3. Akses Tansportasi : Kurangnya akses transportasi yang dibutuhkan untuk melakukan pengiriman barang bantuan.

Dalam rangka penurunan angka kemiskinan dan mengurangi permasalahan dan kedala yang dihadapi maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan alternatif solusi untuk kedepannya dengan cara:

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur, terutama di daerah terpencil dan pulau-pulau, untuk meningkatkan aksesibilitas. Ini mencakup pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas transportasi yang memadai agar distribusi barang dan layanan dapat berjalan lancar.
2. Melakukan pendataan yang lebih sistematis dan berkelanjutan untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai kondisi masyarakat miskin. Pemerintah perlu bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan data yang digunakan dalam program bantuan sosial adalah valid dan tepat sasaran.
3. Mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi untuk memudahkan pengelolaan data masyarakat miskin, sehingga program-program bantuan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing kelompok.
4. Memastikan bahwa program bantuan dari pemerintah pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan lainnya dapat disinkronkan dengan program lokal untuk memaksimalkan dampak pengentasan kemiskinan.
5. Mendorong pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan memberikan pelatihan, akses modal, serta pemasaran produk lokal. Ini akan membantu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Tabel 3.49 Program yang Menunjang Keberhasilan Penurunan Angka Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau Beserta Anggaran

No	Program	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1	Pengelolaan Pendidikan	20.372.730.000,00	19.616.529.800,00
2	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	30.329.254.372,00	29.836.111.258,00
3	Perlindungan Dan Jaminan Sosial	3.629.366.655,00	3.559.864.878,00
4	Peningkatan Kualitas Keluarga	2.452.414.230,00	2.412.603.567,00
5	Pengelolaan Perikanan Tangkap	15.804.463.449,00	15.659.494.677,35
6	Pengelolaan Perikanan Budidaya	4.943.104.821,00	4.817.863.963,00
7	Pengelolaan Persampahan	246.147.805,00	227.572.050,00
8	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (Umkm)	2.745.636.400,00	2.741.607.058,00
9	Pengembangan Umkm	1.084.081.323,00	982.329.994,00
10	Pengelolaan Aplikasi Informatika	4.372.235.946,00	4.265.314.003,00
11	Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	187.942.546,00	176.211.884,00
12	Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	6.656.563.817,00	5.737.512.226,00
13	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	408.096.000,00	408.082.606,00

Tabel 3.50 Capaian Kinerja Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi
1	Prevalensi stunting	2020	20,35	16,82
		2021	20	17,6
		2022	15,8	15,4
		2023	15,3	16,8
		2024	14	16,8

Sumber : Dinas Kesehataan Provinsi Kepulauan Riau

disebabkan oleh banyak faktor bukan hanya faktor kesehatan saja melainkan faktor multi sektor. Beberapa penyebab stunting diantaranya adalah praktek pengasuhan yang tidak baik seperti kurangnya pengetahuan tentang kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan, bayi 0-6 bulan tidak mendapatkan ASI Eksklusif dan Balita tidak mendapatkan MP-ASI yang padat gizi.

Selain itu penyebab lain stunting adalah terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC (*Ante Natal Care*), *Post* Natal dan pembelajaran dini yang berkualitas. Studi menyebutkan bahwa 2 dari 3 ibu hamil belum mengkonsumsi suplemen zat besi, menurunnya tingkat kehadiran anak di Posyandu. Kurangnya akses Ibu hamil dan Balita ke makanan bergizi seperti makanan bergizi mahal menyebabkan 1 dari 3 ibu hamil anemia.

Kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi juga menjadi salah satu faktor penyebab stunting, data menunjukkan 1 dari 5 rumah tangga masih BAB (buang air besar) di ruang terbuka. 1 dari 3 rumah tangga belum memiliki akses ke air minum bersih dan cuci tangan dengan benar masih rendah.

Setiap tahun realisasi indikator prevelensi stunting mengalami turun dan naik, terlihat dengan perbandingan prevalensi stunting Provinsi Kepulauan Riau dari Tahun 2020–2024. Kendala yang di hadapi dalam penanganan stunting adalah tenaga gizi terbatas, penimbangan balita masih rendah sehingga belum bisa menjangkau cakupan seluruh sasaran balita, alat antropometri di Posyandu belum semua terstandar, masih terdapat Pengukuran BB dan TB yang dilakukan oleh kader yang belum terorientasi pemantauan pertumbuhan.

Tabel 3.51 Prevalensi Stunting se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024

No	Kabupaten Kota	2021	2022	2023	2024
1	KARIMUN	17,6	13,3	17,9	17,9
2	BINTAN	20	17,8	21,6	21,6
3	NATUNA	17,8	18	16,1	16,1
4	LINGGA	25,4	18,9	20,5	20,5
5	KEPULAUAN ANAMBAS	21,7	14	15,2	15,2
6	BATAM	17,5	15,2	16,1	16,1
7	TANJUNG PINANG	18,8	15,7	15,2	15,2
PROVINSI		17,6	15,4	16,8	16,8

Berdasarkan tabel diatas prevalensi stunting tahun 2024 belum tersedia dikarenakan menunggu data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024 yang sedang dalam proses pendataan, maka dari itu persentase stunting Provinsi Kepulauan Riau masih menggunakan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023. Pada tahun 2023, prevalensi stunting di Provinsi Kepulauan Riau meningkat dari tahun sebelumnya. Prevalensi stunting tertinggi di

Kabupaten Bintan dengan capaian 21,6% dan terendah di Kabupaten Kepulauan Anambas serta Kota Tanjungpinang 15,2%. Apabila dilihat angka Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan semua Kabupaten/Kota mengalami kenaikan, kecuali Kabupaten Natuna yang mengalami penurunan prevalensi sebesar 1,9 % dan Kota Tanjungpinang mengalami penurunan sebanyak 0,5%. Kenaikan prevalensi tertinggi adalah Kabupaten Karimun sebesar 4,6% disusul dengan Kabupaten Bintan yang mengalami kenaikan 3,8% dan Kabupaten Lingga dengan kenaikan 1,6% dari tahun sebelumnya.

Dilihat dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) realisasi kinerja penurunan Prevalensi Stunting di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 16,8% dengan target sebesar 12,8% dengan capaian kinerja sebesar 89%.

Pada Tahun 2024, capaian Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan dengan target nasional berada dibawah target nasional dengan nilai sebesar 16% dan Provinsi Kepulauan Riau sebesar 16,8%.

Determinan stunting adalah faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya stunting pada balita, dan saling terkait serta dapat memperkuat satu sama lain. Determinan ini terjadi pada 3 periode yaitu periode prenatal, kelahiran dan postnatal.

Periode waktu yang berperan terhadap stunting adalah pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Edukasi bagi ibu dan keluarga menjadi penting untuk mengoptimalkan pertumbuhan anak pada 1000 HPK agar dapat mencegah stunting. Pola asuh orangtua, status ekonomi, BBLR, dan asupan gizi juga merupakan faktor yang perlu diperhatikan untuk pencegahan stunting.

Prevalensi Stunting di Provinsi Kepulauan Riau sudah mendapatkan perhatian khusus dan berbagai upaya telah dilakukan agar target benar-benar tercapai dan demi kepentingan masyarakat. Upaya sensitif yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait penyediaan akses air bersih dan sanitasi.
- Setiap keluarga miskin harus memiliki Jaminan Sosial berupa KIS (Kartu Indonesia Sehat)
- Koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian dan Keluarga Berencana terkait layanan kesehatan dan KB
- Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.
- Optimalisasi Pemanfaatan/Konsumsi Pangan Sayur, Buah dan Protein bersumber hewani kerjasama dengan Dinas Pertanian dan Kesehatan Hewan
- Kerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan melalui program ketahanan pangan dan gizi.
- Meningkatkan konsumsi Ikan melalui Program Gemarikan bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan

Selain upaya sensitif, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Kesehatan dan jajarannya di tahun 2024 juga melakukan upaya-upaya spesifik dalam menangani permasalahan dan pencegahan stunting diantaranya:

- Pemberian bantuan F100 bagi balita kasus gizi buruk
- Pelacakan kasus gizi buruk dan gizi kurang bagi balita yang tidak datang ke Posyandu melalui sweeping
- Pemberian Suplemen Taburia pada balita stunting
- Pengadaan Antropometri Kit Dalam Rangka Pemantauan Pertumbuhan

- Perawatan kasus gizi buruk di Puskesmas dan Rujukan ke Rumah Sakit serta Pemantauan kasus gizi buruk pasca perawatan (*Follow up*)
- Distribusi dan Pemberian PMT lokal bagi Ibu Hamil dan Balita gizi kurang
- Konseling pada keluarga melalui kunjungan rumah
- Program 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) berupa pemberian tablet Fe (zat besi) pada Ibu Hamil, IMD, ASI Eksklusif, MP-ASI
- Pemberian tablet Fe kepada Remaja putri dengan konsumsi 1 tablet perminggu sepanjang tahun.
- Konseling pra nikah kepada calon pengantin dengan berkerjasama dengan KUA
- Integrasi program KIA – Gizi melalui Kelas Ibu Hamil dan Ibu Balita
- Sosialisasi Gerakan AKSI BERGIZI di sekolah melalui media massa dan elektronik.
- Melakukan kegiatan GERCEP ANTING (Gerakan Cepat Pananganan Stunting) yaitu memberikan bantuan kepada keluarga Balita stunting di wilayah Kabupaten Lingga dan Kabupaten Karimun dengan tujuan untuk peningkatan status gizi
- Melakukan kegiatan penanganan balita kurus dan bumil KEK dengan konsep pencegahan yang melibatkan anak sekolah SMA/SMK sederajat di Kabupaten Lingga dan Kabupaten Karimun

Berdasarkan analisis dari beberapa indikator penyebab stunting dilihat dari intervensi spesifik, peningkatan prevalensi stunting di Provinsi Kepulauan Riau diakibatkan oleh beberapa faktor yang belum mencapai target pada tahun 2024 diantaranya:

1. Pemantauan pertumbuhan

Pemantauan pertumbuhan adalah kegiatan penimbangan berat badan dan pengukuran Panjang atau Tinggi badan pada balita usia 0-59 bulan dilakukan setiap bulan di Posyandu serta pemantauan perkembangan melalui kegiatan SDIDTK. Penimbangan merupakan langkah awal dalam memantau pertumbuhan dan perkembangan anak. Penimbangan yang rutin dilakukan setiap bulan di Posyandu, hal ini bertujuan untuk mengetahui atau deteksi dini apakah bayi /balita sakit atau tidak, kelengkapan Imunisasi dan mendapatkan penyuluhan gizi.

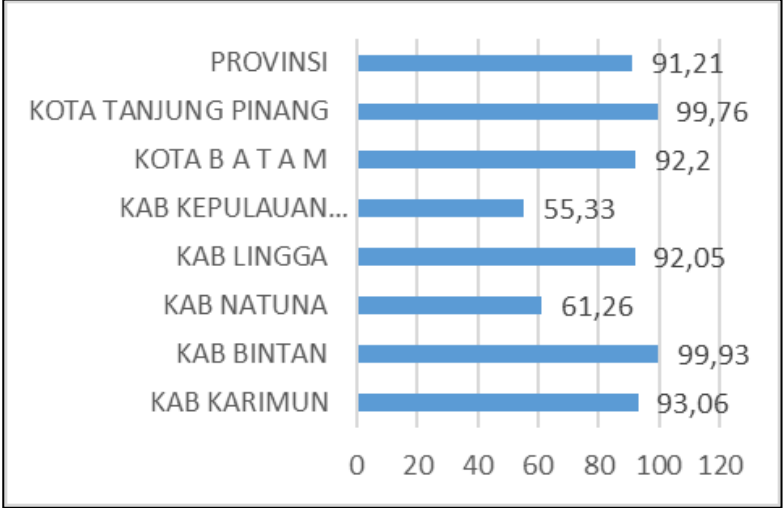
Cakupan penimbangan balita di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 adalah 85,27% sedangkan target yang ditetapkan yaitu 85%.

Target tersebut sudah tercapai akan tetapi dalam pencapaiannya masih terdapat beberapa kendala yaitu *mindset* yang berkembang adalah Posyandu hanya untuk menimbang berat badan dan memberikan vaksin anak. Hingga anak berusia 5 tahun, ibu harus rutin membawanya ke Posyandu. Para ibu terkadang tidak membawa anaknya ke Posyandu karena sudah PAUD. Mereka menganggap anaknya sudah sehat dan sudah bisa bersekolah sehingga tidak perlu lagi dibawa ke Posyandu. Hal ini tentu menjadi perhatian kita bersama bagaimana caranya menggiatkan lagi posyandu sebagai pusat pemantauan pertumbuhan balita yang diminati masyarakat.

2. Persentase Sistem Data Surveilans Gizi Elektronik Dalam Pemantauan Intervensi Gizi Untuk Penurunan Stunting

Persentase sistem data surveilans gizi elektronik dalam pemantauan intervensi gizi untuk penurunan Stunting pada tahun 2024 adalah 91,21%. Dari ke 7 Kabupaten/Kota tersebut terdapat 2 (dua) Kabupaten yang di bawah 80% yaitu Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Grafik 3.36 Persentase Pemantauan Intervensi Gizi Kabupaten/Kota Tahun 2024



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

Dari grafik diatas terlihat bahwa belum 100% balita ditimbang di input ke eppgbm. Kendala yang dialami dalam pencapaian indikator ini adalah kurangnya tenaga *entry*, signal tidak memadai, aplikasi selalu berkembang sehingga terkadang eror, dan sarana prasarana pendukung kurang memadai. Upaya yang dilakukan adalah melakukan Validasi dan input bersama data setiap bulan, mengoptimalisasikan sarana dan prasarana pendukung.

3. Memastikan Remaja Putri Yang Menerima Layanan Pemeriksaan Status Anemia (Hemoglobin).

Penanganan stunting harus dilakukan dan hulu salah satunya dengan mempersiapkan status gizi rematri dan WUS yang nantinya akan menjadi calon ibu. Pemberian tablet tambah darah (TTD) pada remaja putri merupakan salah satu upaya pencegahan anemi pada remaja putri dan WUS, akan tetapi upaya ini belum berjalan maksimal karena masih terdapat remaja putri yang di berikan TTD tapi tidak dikonsumsi sesuai yang di anjurkan.

Angka kejadian anemia erat kaitannya dengan kepatuhan dalam mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD). Berdasarkan data tahun 2024 angka kepatuhan minum Tablet Tambah Darah masih rendah dimana 86.292 remaja putri dari 94.711 remaja putri kita tidak mengonsumsi TTD sesuai anjuran.

Penyebab tingginya prevalensi anemia remaja putri di Lingga adalah sekolah belum rutin melaksanakan kegiatan aksi bergizi, kepatuhan minum TTD pada remaja putri belum optimal, kebiasaan tidak sarapan pagi serta pola makan yang rendah protein dan tidak mengonsumsi sayuran hijau.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah membuat surat edaran gubernur tentang pemberian Tablet Tambah Darah pada Remaja Putri, Optimalisasi pelaksanaan aksi bergizi di sekolah, pemberian TTD rutin seminggu sekali sepanjang tahun, pemantauan kepatuhan konsumsi TTD.

4. Balita Yang Belum Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap

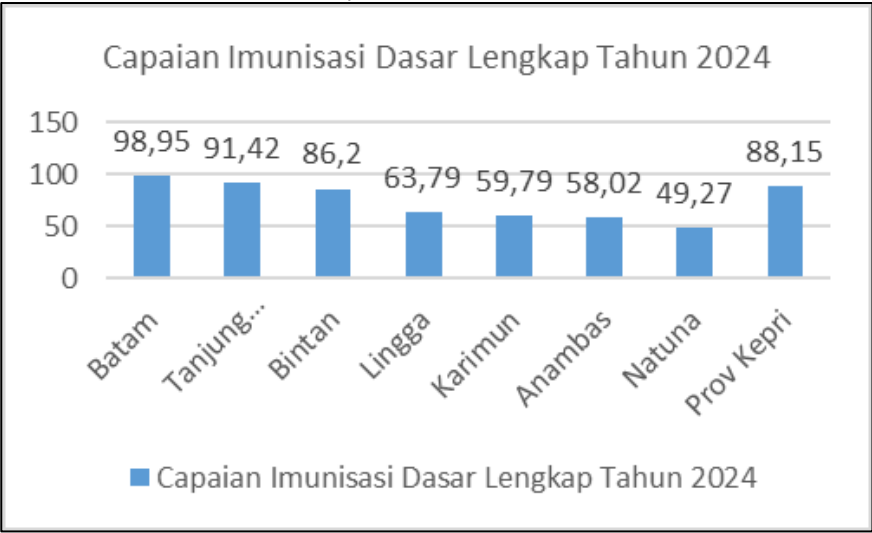
Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Imunisasi sebagai salah satu upaya *cost* efektif mencegah terjadinya penyakit menular dan menurunkan angka kematian pada anak khususnya akibat penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I).

Untuk itu cakupan imunisasi harus dipertahankan tinggi dan merata di seluruh wilayah yang bertujuan untuk menghindarkan terjadinya daerah kantong yang akan mempermudah terjadinya kejadian luar biasa (KLB). Untuk mendeteksi dini terjadinya peningkatan kasus

penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB, Imunisasi perlu didukung oleh upaya surveilans epidemiologi.

Realisasi persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 sebesar 88,15% masih rendah bila dibandingkan dengan target sebesar 94,60% dengan capaian kinerja 86%.

Grafik 3.37 Persentase Capaian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Kabupaten-Kota Tahun 2024



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

Beberapa kendala tidak tercapainya target Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 adalah:

- a) Kondisi aplikasi ASIK yang belum *running well* dan kondisi sinyal internet di daerah yang belum semuanya baik/lancar
- b) Masih adanya penolakan dari masyarakat terhadap imunisasi, termasuk penolakan terhadap Suntik Ganda
- c) Banyaknya aplikasi yang juga harus dikerjakan oleh petugas imunisasi/bidan di puskesmas
- d) Koordinasi antar petugas imunisasi dan Kesga di lapangan kurang maksimal
- e) Tugas ganda dari Petugas Imunisasi di puskesmas selain sebagai penanggungjawab program imunisasi
- f) Kurangnya dukungan Lintas Sektor/Program di daerah

Upaya yang dilakukan Provinsi Kepulauan Riau untuk mencapai target imunisasi antara lain:

- a) Mendorong petugas imunisasi untuk Input Data ASIK sec. *Real-Time*
- b) Sosialisasi dan Edukasi Imunisasi secara Masif (Suntikan Ganda, Antigen Baru) Jejaring dengan PKK, Kader, Toma/Toga
- c) Menjaring/mencari sasaran yang belum lengkap imunisasi-nyadengan *Sweeping, Drop-out Follow Up (DOFU)*, Survei Cepat Komunitas (SCK)
- d) Menskrining seluruh Ibu Hamil yang ada di wilker puskesmas dan catat capaiannya ke Register/Kohort Ibu,
- e) Menunjuk Admin ASIK dan PJ Penginput ASIK tiap fasyankes (saat ini sudah ada *Helpdesk* ASIK Provinsi)

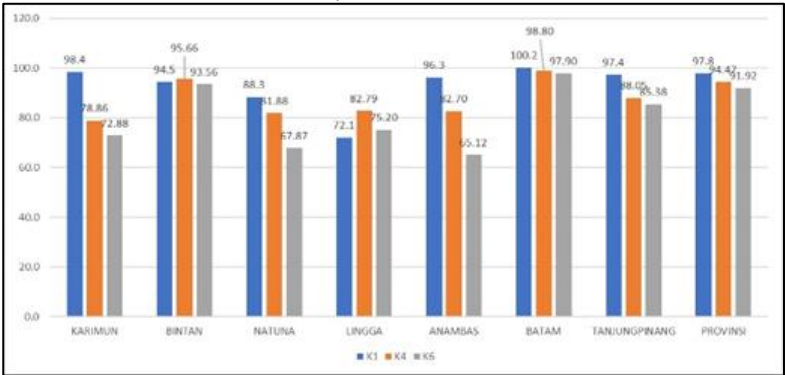
- f) Bimbingan Teknis/Pendampingan dalam Pelaksanaan Imunisasi Rutin/Kejar ->Desk Review, Monev, koordinasi pribadi
- g) Membuat Umpan Balik Capaian Imunisasi (ASIK) ke grup Forkom Imunisasi, Lintas Sektor/Program se-Kepri.

5. ANC (*Ante Natal Care*) Yang Belum Berkualitas

Setiap ibu hamil berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan sesuai standar, yang diberikan oleh tenaga kesehatan, meliputi dokter (dokter umum dan/ atau dokter kandungan), bidan dan perawat, minimal empat kali selama masa kehamilan yaitu satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua, dan dua kali pada trimester ketiga.

Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil Provinsi Kepulauan Riau digambarkan pada grafik berikut ini:

Grafik 3.38 Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

Cakupan K4 Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 sebesar 94,47% dan cakupan K6 sebesar 91,92%. Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil di Provinsi Kepulauan Riau masih belum sesuai dengan yang diharapkan karena masih adanya pemeriksaan kehamilan yang belum dilaksanakan sesuai standar 10T, kondisi geografis yang membatasi akses ibu hamil terhadap pelayanan kesehatan ibu hamil, dan sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang belum lengkap.

Saat ini pelayanan kesehatan ibu hamil bahkan sudah diarahkan minimal 6 (enam) kali kunjungan selama kehamilan untuk meningkatkan deteksi dini pada ibu hamil, yaitu satu kali pada trimester pertama, dua kali pada trimester kedua, dan tiga kali pada trimester ketiga dengan pemeriksaan oleh dokter minimal satu kali pada trimester pertama dan minimal satu kali pada trimester ketiga.

Ada 10 kriteria standar pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil (10T) yaitu :

- 1) Timbang berat badan dan ukur tinggi badan
- 2) Ukur tekanan darah
- 3) Nilai status gizi (ukur lingkar lengan atas / LiLa)
- 4) Ukur tinggi puncak rahim (fundus uteri)
- 5) Tentukan presentasi janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ)
- 6) Skrinning status imunisasi Tetanus Toxoid (TT) dan berikan imunisasi jika diperlukan
- 7) Pemberian Tablet Tambah Darah minimal 90 tablet selama kehamilan
- 8) Tes laboratorium (umum dan khusus)

- 9) Tatalaksana/penanganan kasus sesuai kewenangan
- 10) Temu wicara (konseling).

Pelayanan kesehatan ibu hamil bertujuan untuk mendeteksi secara dini penyakit atau gangguan yang diderita ibu hamil dan melakukan intervensi terhadap penyakit atau gangguan pada ibu hamil sedini mungkin. Ibu hamil mendapatkan pemeriksaan menyeluruh (riwayat kesehatan, riwayat perilaku beresiko, riwayat penyakit keluarga, pemeriksaan fisik, pemeriksaan USG, skrining preeklampsia, skrining diabetes mellitus gestasional, skrining status imunisasi TT). Selain itu ibu hamil juga mendapat konseling gizi, mendapat suplemen asam folat dan zat besi, serta pendidikan kesehatan yang tepat. Semua itu dilakukan agar ibu terhindar preeklampsia berat, Kurang Energi Kronis (KEK), anemia defisiensi besi, kejadian infeksi, serta bayi terhindar dari kelahiran dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) ataupun infeksi tokso/tetanus neonatorum yang dapat berujung pada kejadian stunting.

Kedepannya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga akan terus mengupayakan agar upaya preventif dalam pencegahan stunting dikedepankan melalui perbaikan status gizi remaja putri, calon ibu, ibu hamil dan Balita sehingga semakin dini stunting dideteksi maka penanganan akan semakin mudah.

Rekomendasi yang dapat dilakukan adalah melakukan validasi data setiap bulan melibatkan lintas program dan lintas sektor, penggerakan masyarakat dengan melibatkan tokoh masyarakat sehingga lebih banyak balita yang datang ke posyandu, revitalisasi posyandu melalui orientasi kader dan peningkatan sarana prasarana posyandu seperti pengadaan antropometri kit.

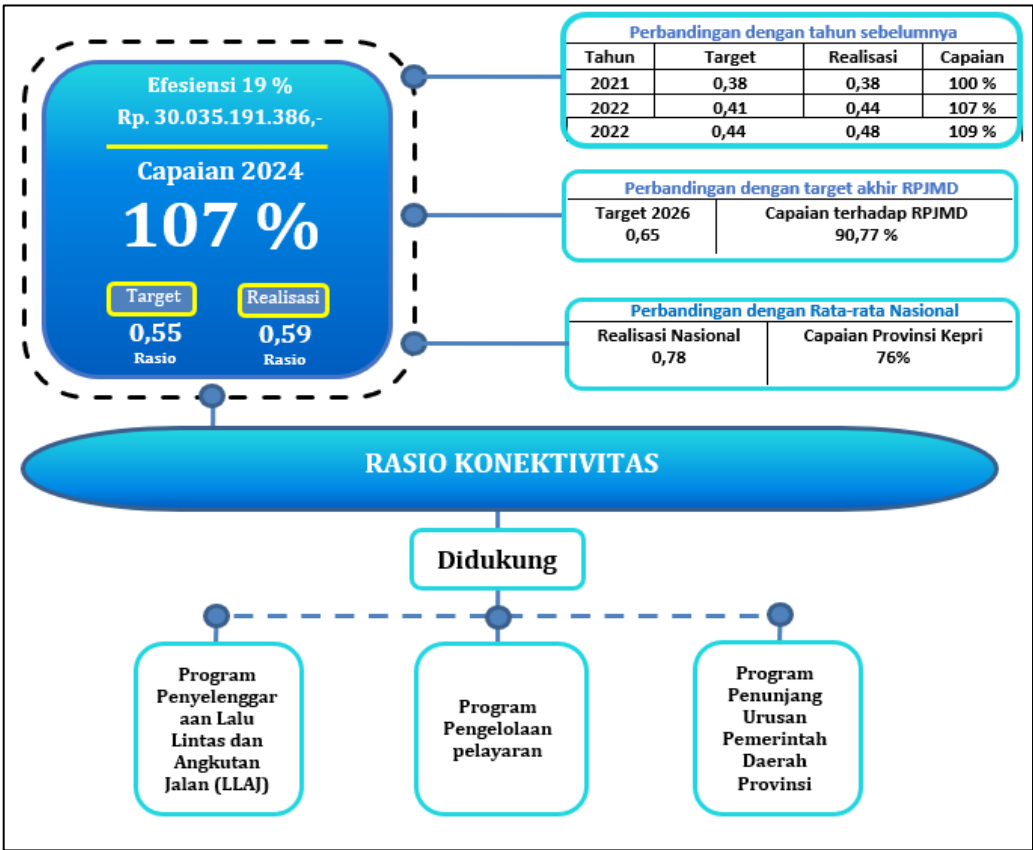
Tabel 3.52 Program yang Menunjang Indikator Prevalensi Stunting
Provinsi Kepulauan Riau Beserta Anggaran

No	Program	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	137.789.000	136.882.845
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	3.940.466.311	3.538.024.700
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	689.129.700	688.528.000
5	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1.091.799.746	1.089.733.122
6	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	369.342.200	333.805.980
7	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	143.214.462	143.214.474
8	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	2.481.517.900	2.369.884.391
9	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	230.352.530	228.266.488
10	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	140.423.952	138.391.483
11	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.112.711.818	893.419.437
12	Program Penanganan Kerawanan Pangan	60.131.700	5.549.100
13	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	2.016.000.000	2.004.301.700
14	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	2.418.507.304	2.376.231.265
JUMLAH		14.831.386.623	13.946.232.985

Dari jumlah anggaran sebesar Rp14.831.386.623,00 terealisasi sebesar Rp13.946.232.985,00 atau 94%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp885.153.638,00 (6%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian kinerja indikator Prevalensi Stunting (85%) lebih rendah dari realisasi anggaran (94%) sehingga belum efisiensi 9%.

3.5.10. Sasaran Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian Antar Pulau

3.5.10.1. Rasio Konektivitas



Rasio Konektivitas merupakan suatu komponen karakteristik suatu grafik yang mengekspresikan tingkat interaksi antar titik atau jumlah busur yang terjadi dalam suatu grafik. Dapat diartikan juga sebagai gabungan indikator kinerja angkutan darat, angkutan sungai danau penyeberangan (ASDP) pada provinsi. Rasio Konektivitas di Provinsi Kepulauan Riau meningkat. Rasio Konektivitas pada Tahun 2024 sudah baik dengan capaian kinerja sebesar 0,59 Rasio dari target sebesar 0,55 Rasio dan terealisasi sebesar 107%.

Percepatan pembangunan infrastruktur dan pengintegrasian antar pulau dilihat dari rasio konektivitas di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan peningkatan yang cukup menggembirakan. Realisasi rasio konektivitas di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 sebesar 0,59 Rasio dilihat berdasarkan kinerja dapat mencapai target dari yang telah ditetapkan sebesar 0,55 Rasio sehingga capaian kinerja sebesar 107% atau dalam kategori **Sangat Baik**.

Percepatan Pembangunan Infrastruktur Antar pulau dengan indikator Rasio Konektivitas, Indikator Rasio Konektivitas terbagi menjadi 2 (dua) indikator yaitu Rasio Konektivitas Angkutan Darat dan Rasio Konektivitas Angkutan Laut, dalam Rasio Konektivitas Angkutan Darat terdapat dua (Angkutan Perkotaan dan AKDP) sedangkan untuk Rasio Konektivitas Angkutan Laut terdapat angkutan sungai danau penyeberangan (ASDP) pada provinsi dan angkutan laut. Berikut ini adalah data jumlah layanan trayek angkutan darat (Angkutan Perkotaan dan AKDP), Lintas angkutan sungai danau penyeberangan (ASDP) pada provinsi dan jumlah trayek angkutan laut.

Tabel 3.53 Data Trayek Angkutan Darat dalam Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Trayek Angkutan Darat
1	Tanjungpinang – Tanjung Uban (Kab. Bintan)
2	Tanjung Uban (Kab. Bintan) - Tanjungpinang
3	Tanjungpinang – Berakit (Kab. Bintan)
4	Berakit (Kab. Bintan) - Tanjungpinang
5	Tanjungpinang – Kijang (Kab. Bintan)
6	Kijang (Kab. Bintan) - Tanjungpinang

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau

Tabel 3.54 Data Trayek Angkutan Darat dalam Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Lintas	Armada
1	Tanjungpinang (Pel. Sri Bintan Pura) - 75- Tanjung Balai Karimun -23- Moro - 81- Jagoh/ Dabo -80- P. Pekajang -42- Belinyu -42- P. Pekajang -80- Jagoh/ Dabo -132- Tanjungpinang - 205- Tambelan - 131- Midai -50- Selat Lampa -71- P. Laut -71- Selat Lampa -65- Subi - 52- Serasan -92- Sintete -95- Tambelan - 227- Batam -25- Tanjungpinang.	KM. Sabuk Nusantara 48 (Kapal Penumpang) 19 Lintasan
2	Kijang (Pel. Sri Bayintan) -185- Tambelan -125- Pontianak - 178- Serasan -52- Subi -65- Selat Lampa -71- P. Laut - 66- Sedanau -56- Midai -112- Tarempa - 37- Kuala Maras -162- Kijang (Pelabuhan Sri Bayintan).	KM. Sabuk Nusantara 80 (Kapal Penumpang) 10 Lintasan
3	Tg. Priok - 86 - Patimban - 502 - Kijang - 144 - Letung - 36 - Tarempa - 149 - Pulau Laut - 76- Selat Lampa - 61 – Subi - 47 - Serasan - 85 - Midai - 241- Kijang - 502- Patimban - 86 - Tg Priok.	KM. Logistik Nusantara 4 (Kapal Barang) 7 Lintasan
4	Tg. Balai Karimun -2 nm- Kapal -2 nmTg. Balai Karimun	KM Gandha Nusantara 7 (Kapal Rede)
5	Tg. Balai Karimun -2 nm- Kapal -2 nmTg. Balai Karimun	KM Gandha Nusantara 8 (Kapal Rede)

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau

Dari tabel data diatas jumlah trayek angkutan darat, angkutan sungai danau dan penyeberangan serta trayek angkutan laut yang tersedia telah memenuhi kebutuhan trayek/lintas di tahun 2024. Berdasarkan data trayek dan lintas angkutan diatas maka indikator rasio konektivitas pada tahun 2024 dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Tabel 3.55 Data Lintasan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Konsep/Definisi	:	Mengukur rasio konektivitas
Rumus	:	Rasio konektivitas = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan) - IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pada provinsi x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada provinsi tersebut) - IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)=jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd provinsi tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada provinsi tersebut) Keterangan: IK1 (Angkutan Jalan) : - Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKDP - Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKDP dalam kurun waktu tertentu IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan) : - Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasan perintis ditambah lintasan komersil - Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan atau: 1) Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan =

	30) 2) Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50) 3) Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70) 4) Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100) Bobot Trayek atau Lintas : 1) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1 2) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8 3) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5
--	---

Tabel 3.56 Realisasi Trayek/Lintas Angkutan Tahun 2024

No	Trayek/ Lintas	Tahun 2023		Bobot Lintas	Bobot Angkutan	Kebutuhan s/d Tahun 2026
		Target	Realisasi			
1	Trayek Angkutan Jalan	6	6	1	30%	8
2	Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	47	27	1	70%	52

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau

Berkenaan dengan data diatas dapat dijelaskan perhitungan ketercapaian Rasio Konektivitas Tahun 2024 sebagai berikut:

IK1 = (6x1) / 8 = 0,75

IK2 = (27 x 1) / 52 = 0,52

Rasio konektivitas = (IK1 x Bobot Angkutan Jalan) + (IK2 x Bobot Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan)

= (0,75 x 30) + (0,52 x 70) = 0,59

Capaian kinerja rasio konektivitas tahun 2024 apabila dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,11 rasio . Dimana pada tahun 2023 peningkatan rasio konektivitas hanya sebesar 0,48 meningkat menjadi 0,59 pada tahun 2024.

Grafik 3.39 Tren Rasio Konektivitas Provinsi Kepulauan Riau



Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau

Dilihat dari tren rasio konektivitas Provinsi Kepulauan Riau dari Tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 mengalami kenaikan setiap tahun, hal ini tidak terlepas dari upaya dan koordinasi yang dilakukan dengan Pemerintah pusat dalam rangka peningkatan luas lintasan angkutan penyebrangan antar pulau di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau.

Dilihat dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Antar pulau dengan Indikator rasio konektivitas di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 0,59 rasio dengan target sebesar 0,65 rasio dengan capaian kinerja sebesar 90,77%.

Pada Tahun 2024, capaian Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan dengan target nasional berada di bawah target nasional. Rasio konektivitas Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai sebesar 0,59 rasio dibandingkan dengan nasional sebesar 0,78 Rasio, dengan demikian tingkat capaian Provinsi dibanding Nasional sebesar 76%.

Faktor yang mendukung ketercapaian peningkatan rasio konektivitas di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 antara lain adalah:

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan kegiatannya:
 - a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
 - b. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Provinsi
 - c. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - d. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2. Program Pengelolaan Pelayaran, dengan kegiatannya:
 - a. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi
 - b. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional
 - c. Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan
 - d. Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas
 - e. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional

Berikut disampaikan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pencapaian indikator sektor perhubungan “Rasio Konektivitas”:

1. Keterbatasan Infrastruktur Transportasi

Secara geografis wilayah Kepulauan Riau terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil yang tersebar diseluruh wilayah yang sebagian besar merupakan perairan, kondisi geografis ini menyebabkan terbatasnya akses darat yang dapat dijangkau, hampir seluruh wilayah menggunakan akses transportasi laut. Untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah ini diperlukan infrastruktur yang memadai sebagai sarana dan prasana moda transportasi.

Kebutuhan akan infrastruktur transportasi ini merupakan alasan utama pendukung tercapainya konektivitas, akan tetapi disebagian besar wilayah Kepulauan Riau masih minim ketersediaan infrastruktur transportasi seperti kurangnya ketersediaan pelabuhan di pulau-pulau yang berpenghuni dan kurangnya moda transportasi yang laut yang melayani.

2. Aksesibilitas yang Terbatas

Beberapa pulau atau daerah pesisir mungkin hanya dapat dijangkau dengan transportasi laut atau udara, yang terkadang tidak teratur atau terhambat cuaca buruk. Aksesibilitas yang terbatas ini memperlambat pergerakan barang dan orang, serta meningkatkan biaya logistik

3. Keterbatasan Armada Transportasi

Armada transportasi laut atau udara yang terbatas, baik dalam jumlah maupun kualitas, menghambat efisiensi dan frekuensi perjalanan antar pulau. Sering kali, biaya pemeliharaan armada yang tinggi serta masalah ketergantungan pada satu jenis transportasi dapat memperburuk situasi.

4. Biaya Tinggi

Biaya transportasi di daerah kepulauan sering kali lebih mahal dibandingkan dengan daerah yang lebih terhubung dengan daratan utama. Biaya ini dipengaruhi oleh jarak yang jauh, kondisi cuaca, dan ketersediaan infrastruktur yang terbatas, yang semua berkontribusi pada tarif transportasi yang lebih tinggi, yang berdampak pada peningkatan konektivitas.

5. Kesulitan dalam Pengelolaan dan Koordinasi

Banyaknya pulau dengan jarak yang terpisah jauh membuat pengelolaan transportasi dan koordinasi antar daerah menjadi lebih sulit. Layanan yang terpisah-pisah dan tidak terintegrasi menyebabkan ketidakefisienan dalam pergerakan barang dan orang.

6. Kurangnya Investasi dan Pendanaan

Terbatasnya anggaran dan pendanaan untuk pembangunan dan perawatan infrastruktur transportasi di daerah kepulauan sering kali menjadi kendala utama. Pemerintah dan sektor swasta mungkin kurang tertarik berinvestasi di daerah yang dinilai kurang menguntungkan atau memiliki risiko tinggi.

7. Tantangan Sosial dan Budaya

Masyarakat di daerah kepulauan sering memiliki kebiasaan dan pola hidup yang berbeda dengan masyarakat di daratan utama. Pemahaman dan adaptasi terhadap teknologi transportasi modern atau perubahan kebijakan transportasi sering kali menemui kendala dalam hal penerimaan sosial atau budaya lokal.

8. Keterbatasan SDM

Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang terampil dalam bidang transportasi dan logistik, serta pelatihan teknis yang kurang memadai di daerah kepulauan, dapat memperburuk kualitas dan efisiensi sistem transportasi yang ada.

Dalam rangka meningkatkan indikator rasio konektivitas dan mengurangi permasalahan dan kendala yang dihadapi maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan alternatif solusi untuk kedepannya:

1. Mengadakan koordinasi dengan kabupaten/kota dalam hal keterhubungan wilayah atau konektivitas antar wilayah, agar terjadi sinkronisasi dan keselarasan yang baik dalam perencanaan bidang transportasi sehingga secara tidak langsung berpengaruh pada peningkatan konektivitas wilayah provinsi.

2. Memprioritaskan kegiatan yang menjadi pendukung peningkatan konektivitas provinsi yang akan direncanakan akan membangun pelabuhan pada Kabupaten Lingga dan Pelabuhan Anambas.
3. Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal kerjasama layanan trayek transportasi dengan meminta dukungan pengadaan moda transportasi dan sarana prasarana transportasi.

Program-program yang mendukung peningkatan rasio konektivitas Tahun 2024 diantaranya:

Tabel 3.57 Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Indikator Rasio Konektivitas

NO	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI	
			Rp	%
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3.010.068.920	2.039.392.705,00	67,75%
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1.935.685.870	1.924.943.084,00	99,45%
2	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Provinsi	44.513.600	43.752.500,00	98,29%
3	Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	957.588.900	988.000,00	0,10%
4	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	72.280.550	69.709.121,00	96,44%
II	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	27.025.122.466	24.183.989.715	89,49%
1	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	13.804.446	13.804.446	100%
2	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Intern	27.240.804	27.240.804	100%
3	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	30.914.950	30.914.950	100%
4	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	30.219.207	30.219.207	100%
5	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Regional	26.922.943.059	24.081.810.308	89%
Total		30.035.191.386	26.223.382.420	87%

Dari jumlah anggaran sebesar Rp30.035.191.386,00 terealisasi sebesar Rp26.223.382.420,00 atau 87%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp3.881.808.966 (12,69%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian kinerja indikator Rasio Konektivitas (107%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (87%) sehingga efisiensi tercapai 19%.

3.5.11. Sasaran Peningkatan Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya, dan Harmoni Masyarakat

3.5.11.1. Indeks Pembangunan Kebudayaan



Indeks Pembangunan Kebudayaan merupakan instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan di Provinsi Kepulauan Riau meningkat. Indeks Pembangunan Kebudayaan pada Tahun 2024 sudah baik dengan realisasi kinerja sebesar 59,80 Indeks dari target sebesar 55,60 Indeks dengan capaian sebesar 108%.

Peningkatan pembinaan keagamaan, pelestarian budaya, dan harmoni masyarakat dilihat dari Indeks Pembangunan Kebudayaan di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan peningkatan yang cukup menggembirakan. Realisasi Indeks Pembangunan Kebudayaan di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 sebesar 59,80 Indeks berdasarkan kinerja dapat mencapai target dari yang telah ditetapkan sebesar 55,60 Indeks sehingga capaian kinerja sebesar 108% atau dalam kategori Sangat Baik.

Indeks Pembangunan Kebudayaan diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni: (1) dimensi ekonomi budaya; (2) dimensi pendidikan; (3) dimensi ketahanan sosial budaya; (4) dimensi warisan budaya; (5) dimensi ekspresi budaya; (6) dimensi budaya literasi; dan (7) dimensi kesetaraan gender. Ketujuh dimensi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan

kebudayaan memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan bersifat lintas sektor. Berdasarkan Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2024, pembangunan kebudayaan Kepulauan Riau cukup baik, namun masih perlu terus ditingkatkan.

Metode Penghitungan indeks pembangunan kebudayaan adalah sebagai berikut:

- 1. Mengumpulkan data dari sumber-sumber tersebut.
- 2. Menghitung nilai setiap indikator.
- 3. Menghitung bobot setiap komponen.
- 4. Menghitung indeks pembangunan kebudayaan secara keseluruhan.

Dengan skala pengukuran sebagai berikut:

- 1. Indeks rendah (0-40): Pembangunan kebudayaan kurang.
- 2. Indeks sedang (41-60): Pembangunan kebudayaan cukup.
- 3. Indeks tinggi (61-80): Pembangunan kebudayaan baik.
- 4. Indeks sangat tinggi (81-100): Pembangunan kebudayaan sangat baik.

Dilihat dari 7 (tujuh) dimensi yang menggambarkan pembangunan kebudayaan di Provinsi Kepulauan Riau, masing-masing dimensi yang mendorong kenaikan nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan.

Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan pada di provinsi Kepulauan Riau dengan rentang nilai 0 – 100 sebesar 59,80 sedangkan untuk indeks pembangunan tingkat nasional 57,13. Pada tahun 2024 untuk realisasi indeks Pembangunan di Kepulauan Riau lebih tinggi dari nasional.

Adapun nilai untuk setiap dimensi sebagai berikut:

- dimensi ekonomi budaya (20,39)
- dimensi pendidikan (82,46)
- dimensi ketahanan sosial budaya (78,28)
- dimensi warisan budaya (51,91)
- dimensi ekspresi budaya (28,94)
- dimensi budaya literasi (68,98)
- dimensi kesetaraan gender (56,98).

Indeks Pembangunan Kebudayaan tahun 2024 Dimensi Pendidikan memiliki nilai paling tinggi, sementara dimensi ekonomi budaya memiliki nilai paling rendah dibandingkan dengan dimensi lainnya sama.

Tabel 3.58 Perbandingan Realisasi Kinerja
Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2018-2023

Tahun	Nasional	Kepulauan Riau
		RPJMD
2018	53,74	58,83
2019	55,91	60,90
2020	54,65	59,24
2021	51,90	52,12
2022	55,13	56,60
2023	57,13	59,80

Sumber : IPK Direktorat Kebudayaan, Bapennas, BPS Nasional

Capaian kinerja Indeks Pembangunan Kebudayaan tahun 2024 apabila dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 3,2 Indeks. Dimana pada tahun 2023 peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan hanya sebesar 56,60 Indeks meningkat menjadi 59,80 Indeks pada tahun 2024.

Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan kepulauan Riau dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, dan praktik budaya dan muatan lokal pada pendidikan cukup baik. Namun kontribusi kebudayaan dalam mendukung pembangunan ekonomi masih perlu terus ditingkatkan. diharapkan pembangunan kebudayaan dapat semakin terarah dan berkualitas. Publikasi Indeks Pembangunan Kebudayaan ini akan membantu para pengambil kebijakan untuk dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan yang *knowledge-based*, agar perumusan kebijakan pembangunan kebudayaan dapat lebih presisi sesuai kondisi masing-masing daerah. Selain itu Indeks Pembangunan Kebudayaan juga dapat dimanfaatkan oleh para akademisi dan peminat kajian kebudayaan untuk memperkaya data dan informasi terkait kebudayaan.

Ada beberapa faktor antara lain seperti faktor internal, yaitu : Kurangnya kesadaran dan apresiasi terhadap budaya lokal, Keterbatasan sumber daya dan infrastruktur, Kurangnya investasi dalam pendidikan dan pelatihan, Ketergantungan pada budaya asing, Kurangnya dukungan dari pemerintah dan masyarakat.

Adapun faktor eksternal, yaitu : Globalisasi dan pengaruh budaya asing, Keterbatasan akses ke teknologi dan informasi, Persaingan ekonomi global, Perubahan nilai-nilai budaya masyarakat, Pengaruh media sosial.

Selanjutnya yaitu faktor sosial seperti : Kurangnya kesadaran akan pentingnya pelestarian budaya, Perubahan struktur sosial dan nilai-nilai masyarakat, Keterbatasan partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya, Kurangnya dukungan dari tokoh masyarakat, Konflik antara generasi, Kurangnya pengembangan pariwisata budaya.

Untuk menyikapi hal tersebut maka upaya yang dilakukan adalah dengan Meningkatkan kesadaran dan apresiasi budaya lokal, Mengembangkan infrastruktur dan fasilitas budaya, Meningkatkan investasi dalam pendidikan dan pelatihan, Mengembangkan pariwisata budaya, Meningkatkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan swasta, Mengembangkan program pelestarian budaya, Meningkatkan akses ke teknologi dan informasi, Mengembangkan industri kreatif.

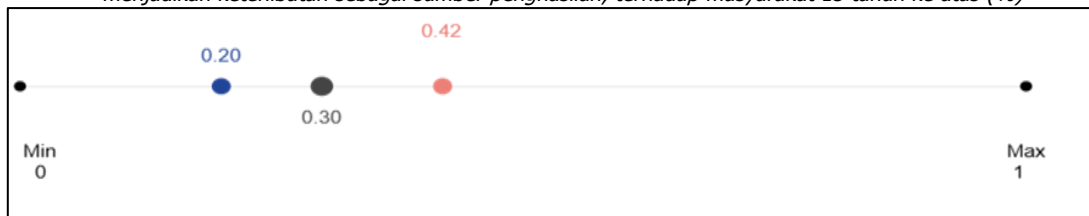
Tabel 3.59 Perbandingan Nilai Dimensi Tahun 2024

Dimensi	Nilai indeks	
	Nasional	Kepulauan Riau
Ekonomi Budaya	29,50	20,39
Pendidikan	73,35	82,46
Ketahanan Sosial Budaya	70,73	78,28
Warisan Budaya	51,54	51,91
Ekpresi budaya	34,91	28,94
Budaya Literasi	60,49	68,95
Gender	58,71	56,98
Total	57,13	59,80

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau

1. Analisis IPK berdasarkan Dimensi Ekonomi Budaya

Grafik 3.40 Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan, terhadap masyarakat 15 tahun ke atas (%)



Sumber : Susenas MSBP. BPS Nasional Kepri

Terdapat beberapa analisis faktor kegagalan berdasarkan dimensi Ekonomi Budaya, yaitu:

- Kurangnya perencanaan strategis: Kurangnya perencanaan yang matang dan terstruktur.
- Keterbatasan sumber daya: Keterbatasan dana, infrastruktur, dan sumber daya manusia.
- Kurangnya kesadaran budaya: Kurangnya apresiasi dan kesadaran masyarakat terhadap budaya lokal.
- Ketergantungan pada budaya asing: Ketergantungan yang terlalu besar pada budaya asing.
- Kurangnya regulasi dan pengawasan: Kurangnya regulasi dan pengawasan dalam pengelolaan ekonomi budaya.
- Konflik kepentingan: Konflik antara kepentingan ekonomi dan kepentingan budaya
- Kurangnya kerjasama antar-*stakeholder*: Kurangnya kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Analisa faktor keberhasilan berdasarkan dimensi Ekonomi Budaya, yaitu:

- Perencanaan strategis: Perencanaan yang matang dan terstruktur.
- Ketersediaan sumber daya: Ketersediaan dana, infrastruktur, dan sumber daya manusia.
- Kesadaran budaya: Kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap budaya lokal.
- Inovasi dan kreativitas: Pengembangan produk dan jasa budaya yang inovatif.
- Regulasi dan pengawasan: Regulasi dan pengawasan yang efektif.
- Kerjasama antar-*stakeholder*: Kerjasama yang efektif antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.
- Pemasaran dan promosi: Pemasaran dan promosi produk budaya yang efektif
- Pengembangan kapasitas: Pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Kebudayaan upaya dalam strategi pengembangan dimensi Ekonomi Budaya adalah sebagai berikut:

- Mengembangkan perencanaan strategis.
- Mengembangkan infrastruktur budaya
- Meningkatkan kerjasama antar-*stakeholder*.
- Mengembangkan produk dan jasa budaya yang inovatif.
- Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia.
- Meningkatkan pemasaran dan promosi produk budaya.

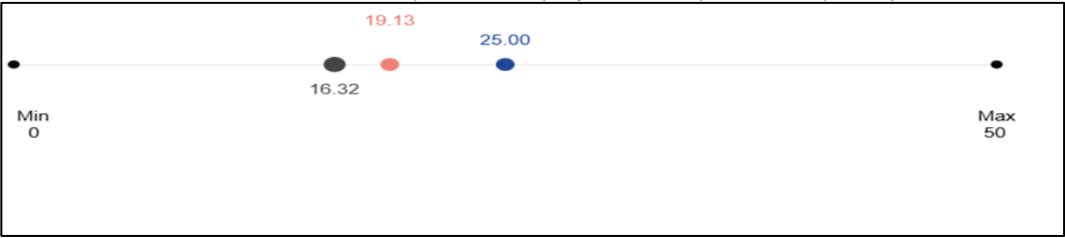
2. Analisis IPK berdasarkan Dimensi Warisan Budaya

Grafik 3.41 Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi



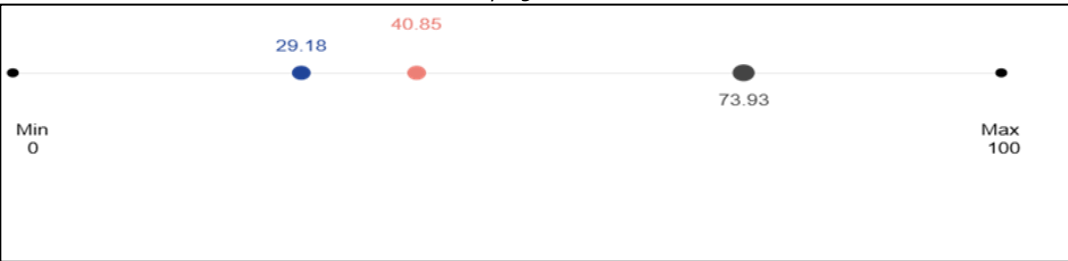
Sumber : Susenas MSBP. BPS Nasional Kepri

Grafik 3.42 Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan



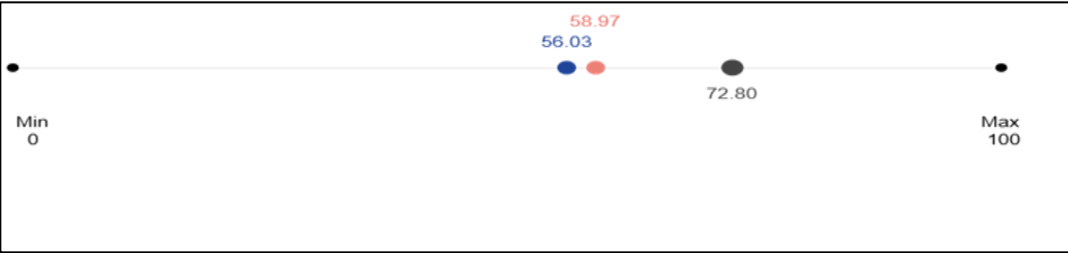
Sumber : Susenas MSBP. BPS Nasional Kepri

Grafik 3.43 Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari



Sumber : Susenas MSBP. BPS Nasional Kepri

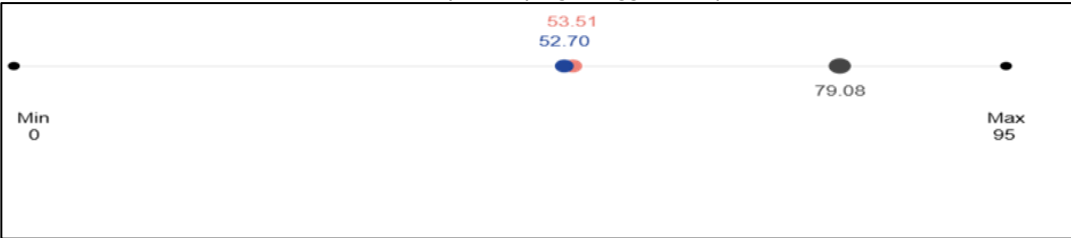
Grafik 3.44 Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni dalam 3 bulan terakhir



Sumber : Susenas MSBP. BPS Nasional Kepri

Tahun 2021 ada perluasan definisi operasional (termasuk yang tidak langsung) dari nilai maksimum 70 untuk tahun 2018-2020 menjadi nilai maksimum 100 untuk tahun 2021-2022.

Grafik 3.45 Persentase masyarakat yang menggunakan produk tradisional



Sumber : Susenas MSBP. BPS Nasional Kepri

Terdapat beberapa analisis faktor kegagalan berdasarkan dimensi Warisan Budaya, yaitu:

- a. Kurangnya perencanaan dan pengelolaan yang efektif.
- b. Keterbatasan sumber daya (dana, infrastruktur, SDM).
- c. Kurangnya kesadaran dan apresiasi masyarakat.
- d. Kerusakan atau kehilangan warisan budaya
- e. Konflik kepentingan antara pelestarian dan pengembangan ekonomi.
- f. Kurangnya dokumentasi dan inventarisasi.

Analisa faktor keberhasilan berdasarkan dimensi Warisan Budaya, yaitu:

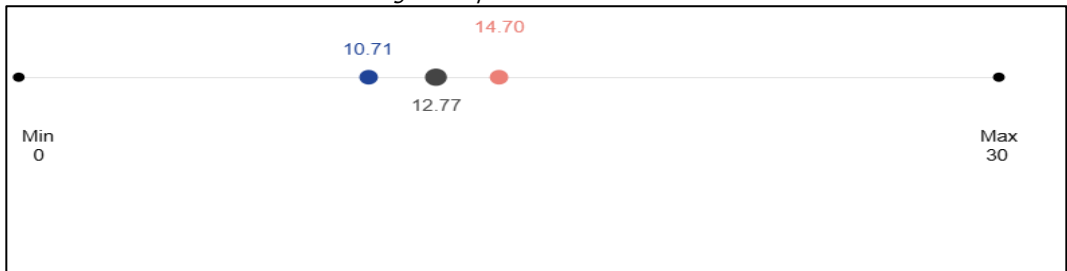
- a. Perencanaan dan pengelolaan yang efektif.
- b. Ketersediaan sumber daya memadai.
- c. Kesadaran dan apresiasi masyarakat tinggi.
- d. Pelestarian dan pengembangan warisan budaya berkelanjutan.
- e. Kerjasama antar-*stakeholder* (pemerintah, masyarakat, swasta).
- f. Regulasi dan pengawasan yang efektif.
- g. Pengembangan infrastruktur pendukung.
- h. Dokumentasi dan inventarisasi yang baik.

Dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Kebudayaan upaya dalam strategi pengembangan dimensi Warisan Budaya adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan perencanaan strategis.
- b. Meningkatkan kesadaran budaya masyarakat.
- c. Mengembangkan infrastruktur pendukung.
- d. Meningkatkan kerjasama antar-*stakeholder*.
- e. Mengembangkan program pelestarian.
- f. Mengembangkan kapasitas SDM.
- g. Meningkatkan pengawasan dan evaluasi.

3. Analisis IPK berdasarkan Dimensi Ekspresi Budaya

Grafik 3.46 Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang memberikan saran atau pendapat dalam kegiatan rapat selama satu tahun terakhir



Sumber : Susenas MSBP. BPS Nasional Kepri

Grafik 3.47 Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang aktif mengikuti kegiatan organisasi



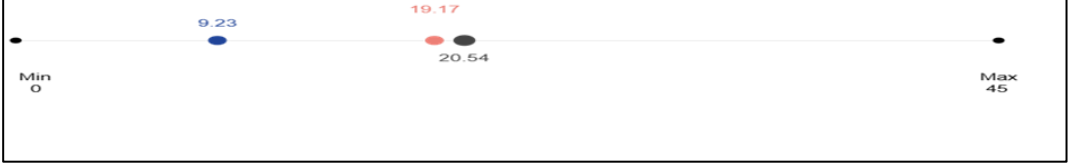
Sumber : Susenas MSBP. BPS Nasional Kepri

Grafik 3.48 Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni



Sumber : Susenas MSBP. BPS Nasional Kepri

Grafik 3.49 Persentase rumah tangga yang menghadiri atau menyelenggarakan upacara adat



Sumber : Susenas MSBP. BPS Nasional Kepri

Terdapat beberapa analisis faktor kegagalan berdasarkan dimensi Ekspresi Budaya, yaitu:

- a. Kurangnya apresiasi dan kesadaran masyarakat terhadap ekspresi budaya.
- b. Keterbatasan sumber daya (dana, infrastruktur, SDM).
- c. Kurangnya dukungan dari pemerintah dan swasta.
- d. Ketergantungan pada budaya asing.
- e. Kurangnya inovasi dan kreativitas.
- f. Konflik kepentingan antara kelompok budaya.
- g. Kurangnya dokumentasi dan inventarisasi.
- h. Keterbatasan akses teknologi.

Analisa faktor keberhasilan berdasarkan dimensi Ekspresi Budaya, yaitu:

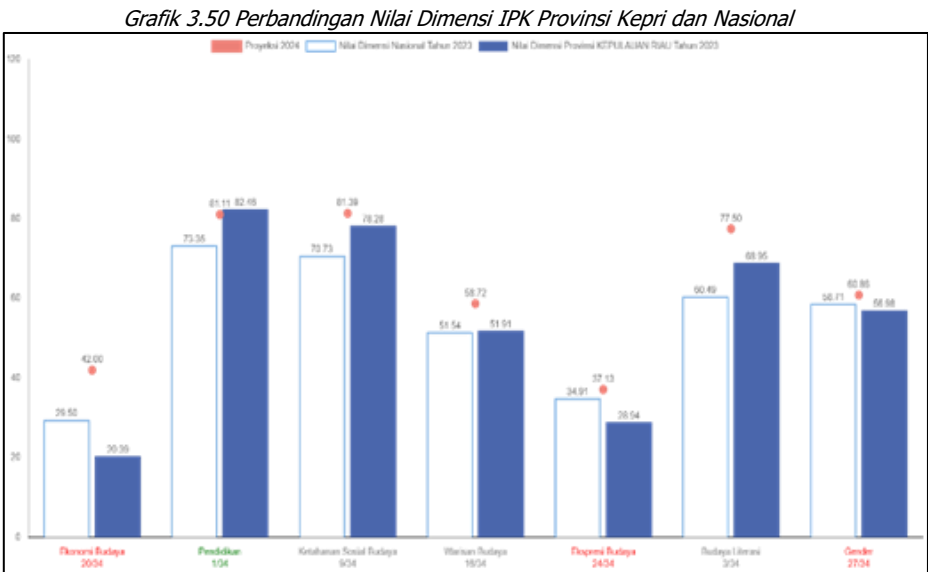
- a. Perencanaan strategis dan pengelolaan efektif.
- b. Dukungan pemerintah dan swasta.
- c. Kesadaran dan apresiasi masyarakat tinggi.
- d. Inovasi dan kreativitas dalam ekspresi budaya.
- e. Kerjasama antar-kelompok budaya.
- f. Regulasi dan pengawasan yang efektif.
- g. Pengembangan infrastruktur pendukung.
- h. Dokumentasi dan inventarisasi yang baik.

Dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Kebudayaan upaya dalam strategi pengembangan dimensi Ekspresi Budaya adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan perencanaan strategis.
- b. Meningkatkan kesadaran budaya masyarakat.
- c. Mengembangkan infrastruktur pendukung.
- d. Meningkatkan kerjasama antar-kelompok budaya.
- e. Mengembangkan program pendidikan budaya.
- f. Meningkatkan pemasaran dan promosi.
- g. Mengembangkan kapasitas SDM.
- h. Meningkatkan pengawasan dan evaluasi.

Dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) realisasi kinerja Indeks Pembangunan Kebudayaan di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 59,80 Indeks dengan target sebesar 57,60 Indeks dengan capaian kinerja sebesar 103%.

Pada Tahun 2024, capaian Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan dengan target nasional berada di atas nilai nasional. Indeks Pembangunan kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai sebesar 59,80 dibandingkan dengan nilai Nasional sebesar 57,13 Indeks.



Sumber : Susenas MSBP. BPS Nasional Kepri

Jika dilihat dari drafik diatas Skor IPK Provinsi : 59,80 berada di atas skor IPK Nasional (57,13) dan menduduki peringkat 5 dari 34. Provinsi Capaian IPK 2024 Provinsi Kepulauan Riau 56,60 (ada kenaikan sebesar 2,30 poin) Dimensi dengan skor tertinggi ada pada Dimensi Pendidikan, sedangkan yang terendah adalah Dimensi Ekonomi Budaya.

Pemerintah provinsi Kepulauan Riau dalam berkomitmen membangun kebudayaan, pada tahun 2024 pemerintah pusat telah memberikan penghargaan kepada pemerintah provinsi Kepulauan Riau yaitu anugerah kebudayaan Indonesia kategori Emas ini adalah pembuktian bahwa pemerintah provinsi kepulauan fokus dalam membangun kebudayaan.

Faktor yang mendukung ketercapaian dalam mempengaruhi peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 adalah sebagai berikut antara lain:

- a. Sinergi antara keberadaan kesenian tradisional sebagai identitas kultural masyarakat pendukung dan tuntutan industri pariwisata yang melakukan komodifikasi budaya antara lain: komodifikasi budaya menjadi keniscayaan di era ekonomi global yang berkembang di era pasca modernitas ini, terutama ditandai dengan kian berkembangnya industri pariwisata.
- b. Peningkatan kesadaran dan apresiasi budaya: Meningkatnya kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap budaya lokal.
- c. Pengembangan infrastruktur budaya: Pembangunan museum, teater, galeri, dan fasilitas budaya lainnya.
- d. Peningkatan partisipasi masyarakat: Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya.
- e. Pengakuan dan perlindungan hak cipta: Pengakuan dan perlindungan hak cipta atas karya budaya.
- f. Kerjasama internasional: Kerjasama dengan negara lain untuk mempromosikan budaya.
- g. Melakukan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah pelatihan penyusunan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah
- h. Mengelola Perpustakaan Daerah seperti pengembangan kekhasan koleksi perpustakaan daerah
- i. Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan.

Permasalahan yang dihadapi yang menjadi kendala dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Kebudayaan sebagai berikut:

- a. Kurangnya anggaran: Kurangnya anggaran untuk pengembangan kebudayaan.
- b. Keterbatasan sumber daya manusia: Kurangnya tenaga kerja terampil dalam pengelolaan kebudayaan.
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat: Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebudayaan.
- d. Pengaruh globalisasi: Pengaruh globalisasi yang dapat mengancam keaslian budaya lokal.
- e. Kurangnya regulasi dan pengawasan: Kurangnya regulasi dan pengawasan terhadap penggunaan budaya.

Dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Kebudayaan dan mengurangi permasalahan dan kendala yang dihadapi maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan alternatif solusi untuk kedepannya dengan cara sebagai berikut:

1. Penggabungan yang tepat antara warisan budaya dan pembangunan berkelanjutan membutuhkan perlindungan yang konsisten dari kondisi lingkungan dan tindakan-tindakan yang merugikan, tetapi juga bagaimana memelihara dan memperbaharui sumber daya itu secara terus menerus. Setiap pendekatan yang menempatkan warisan budaya sebagai karya masa lalu akan menimbulkan risiko mengubahnya menjadi entitas yang tetap dan beku, serta kehilangan relevansinya untuk saat ini dan untuk masa depan. Memang, pemahaman tentang warisan harus sedemikian rupa sehingga ingatan kolektif masa lalu dan praktik-praktik tradisional atas fungsi sosial dan budaya warisan tersebut, terus-menerus direvisi dan diperbarui, sehingga memungkinkan setiap masyarakat untuk menjaga hubungan dengannya dan tetap mempertahankan pemikiran, makna, dan fungsinya di masa depan.

2. Dalam menentukan indikator-indikator dalam dimensi IPK, data begitu penting. Selain data dari Ditjen Kebudayaan, dapat diperkirakan bahwa indikator dalam Indeks Pembangunan Kebudayaan banyak mengacu pada data BPS yang selama ini banyak melakukan penghitungan statistik di bidang sosial budaya. Terkait ketersediaan data, menjadi tugas pemerintah untuk membuat *platform database* kebudayaan yang terintegrasi antara pusat dan daerah. Indikator-indikator pembangunan kebudayaan harus melalui metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan dan mampu merepresentasikan kondisi kebudayaan yang sesungguhnya.

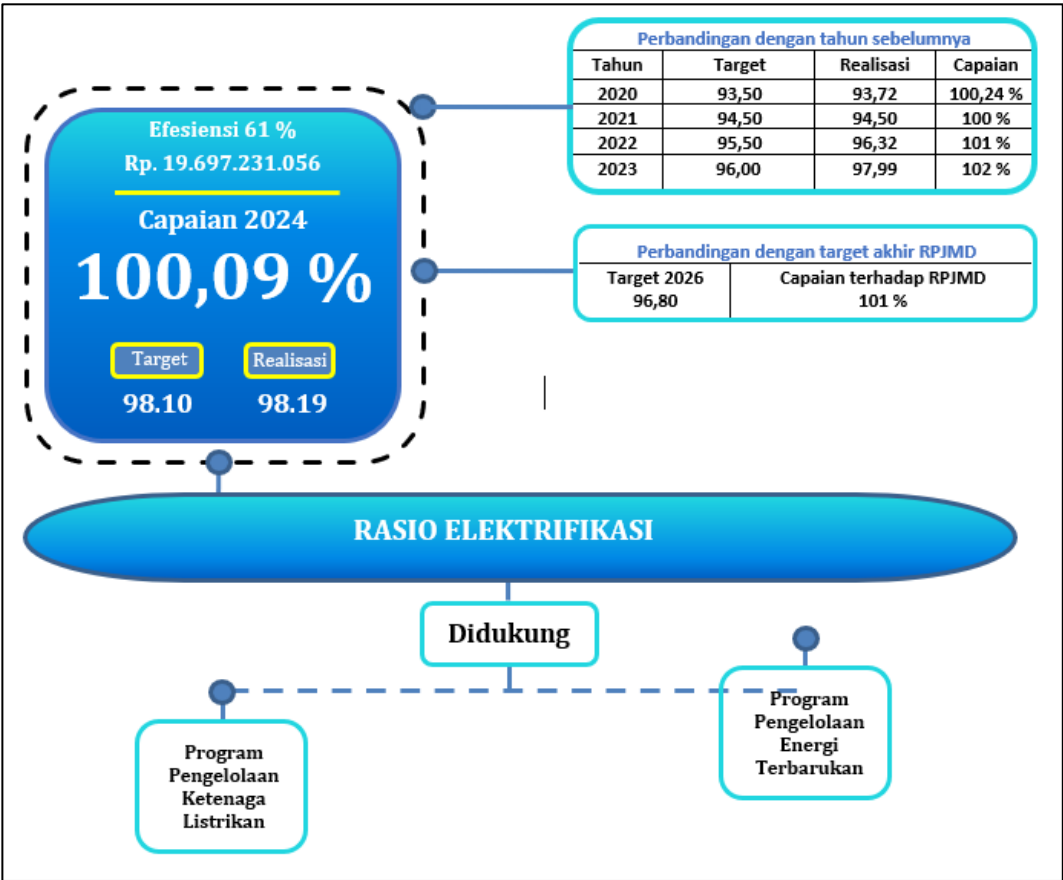
Tabel 3.60 Program/Kegiatan dan Realisasi Anggaran

Program	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan	
		Rp.	%
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	3.183.954.684,00	3.080.560.208,00	96,75
PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	1.938.884.660,00	1.831.348.192,00	94,45
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	152.592.200,00	151.328.600,00	99,17
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN Cagar Budaya	600.259.972,00	591.536.827,00	98,54
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	508.980.798,00	461.279.391,00	90,63
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	405.402.792,00	330.631.467,00	81,55
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	581.721.380,00	429.671.573,00	73,86
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI Pancasila dan Karakter Kebangsaan	345.535.546,00	Tunda Bayar	0
Total	7.717.332.032,00	6.876.356.258,00	89,10

Dari jumlah anggaran sebesar Rp7.717.332.032,00 terealisasi sebesar Rp6.876.356.258,00 atau 89%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp840.975.774,00 (10,89%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian kinerja indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan (108%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (89%) sehingga efisiensi tercapai 18%.

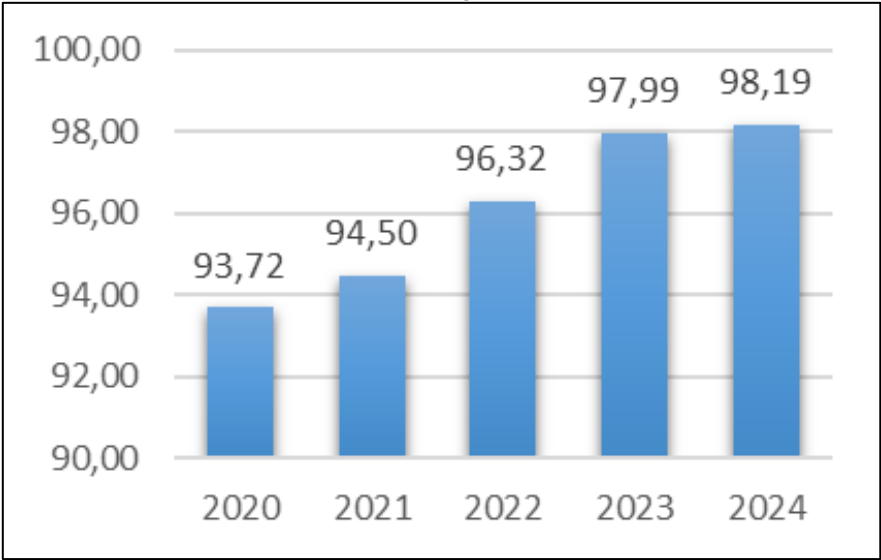
3.5.12. Sasaran Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar

3.5.12.1. Rasio Elektrifikasi



Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dilihat dari rasio elektrifikasi di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan peningkatan yang cukup menggembirakan. Realisasi rasio elektrifikasi di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 sebesar 98,19 Rasio dilihat berdasarkan kinerja dapat mencapai target dari yang telah ditetapkan sebesar 98,10 Rasio dengan capaian realisasi sebesar 100,09% atau dalam kategori **Sangat Baik**.

Grafik 3.51 Tren Perkembangan Rasio Elektrifikasi



Sumber : Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau

Capaian kinerja rasio elektrifikasi tahun 2024 apabila dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,20 rasio. Dimana pada tahun 2023 peningkatan rasio elektrifikasi hanya sebesar 97,99 rasio meningkat menjadi 98,19 rasio pada tahun 2024.

Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya penyambungan listrik kepada masyarakat oleh PT. PLN (Persero) dan kegiatan pengadaan mesin genset di Desa-Desa.

Dilihat dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) realisasi kinerja rasio elektrifikasi di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 98,19 rasio dengan target sebesar 98,80 rasio dengan capaian kinerja sebesar 101%.

Pada Tahun 2024, capaian Rasio Elektrifikasi Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan dengan target nasional berada dibawah target nasional dengan nilai sebesar 99,89 dan Provinsi Kepulauan Riau sebesar 98.19.

Tabel 3.61 Program/Kegiatan dan Realisasi Anggaran

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Kab/Kota	Rumah Tangga Kab/Kota	Rumah Tangga Berlistrik				RT	RE(%)
				PLN	Non PLN	LTSHE	Jumlah	Belum Berlistrik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)+(7)	(9)	(10)={(8)/(3)}*100
	Kepulauan Riau	2.183.290	641.475	627.564	2.177	296	629.847	11.628	98,19%
1	Karimun	263.340,00	87.780	84.607	266	-	84.873	2.907	96,69%
2	Natuna	85.660,00	26.769	25.423	-	-	25.423	1.346	94,97%
3	Lingga	102.010,00	30.912	29.899	47	161	29.946	966	96,87%
4	Batam	1.276.930,00	336.034	329.73	1.638	106	331.474	4.560	98,64%
5	Kepulauan Anambas	49.730,00	16.577	15.451	20	29	15.471	1.106	93,33%
6	Bintan	168.190,00	57.997	57.072	206	-	57.278	719	98,76%
7	Tanjung pinang	237.430,00	85.406	85.382	-	-	85.382	24	99,97%

Faktor yang mendukung ketercapaian dalam mempengaruhi peningkatan rasio elektrifikasi di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 adalah penyambungan listrik kepada masyarakat oleh PT. PLN (Persero) dan dengan terlaksananya beberapa program ketenagalistrikan seperti kegiatan Bantuan Penyambungan Listrik (BPBL) bagi Rumah Miskin, kegiatan pengadaan mesin genset, kegiatan peningkatan mutu layanan listrik kepada masyarakat serta adanya kegiatan penambahan pembangunan ketenagalistrikan dari PT. PLN (Persero) di beberapa daerah di Kab/Kota Provinsi Kepulauan Riau.

Upaya lainnya yang mendukung keberhasilan peningkatan rasio elektrifikasi yaitu:

1. Mendorong Peran aktif dari pemilik wilayah usaha ketenagalistrikan, peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat.
2. Pemasangan genset dengan Lokasi Pemasangan di Pulau Nuja Kab. Lingga sebanyak 1 unit, di Pulau Bahan Kab. Karimun sebanyak 1 unit.
3. Bantuan Pengadaan dan Pemasangan *Solar Home System* sebanyak 161 KK tersebar di Kota Batam dan Kab Lingga.
4. Pemeliharaan PLTS Komunal sebanyak 1 unit di Pulau Telang, Desa Mantang Besar Kec. Mantang Kabupaten Bintan.
5. Melaksanakan bantuan pemasangan baru listrik sebanyak 744 RT tersebar di Kab Lingga 384 RT, Natuna 237 RT Bintan 65 RT dan batam 58 RT.

Permasalahan yang dihadapi yang menjadi kendala dalam meningkatkan rasio elektrifikasi adalah:

1. Kondisi geografis wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari ribuan pulau-pulau kecil dan jarak antara pulau yang terpisah jauh dan keterbatasan anggaran baik di PT. PLN (Persero), Pemerintah Pusat maupun APBD.

2. Rumah tangga yang berada dalam satu pulau kecil juga masih tersebar dengan jumlah rumah tangga yang terbatas sehingga membutuhkan biaya pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang cukup besar.
3. Adanya peraturan pemerintah yang meminta PT. PLN (Persero) untuk melakukan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang berbasis energi bersih sehingga juga membutuhkan biaya investasi yang cukup besar.
4. Aset EBT yang sudah terbangun di Provinsi Kepulauan Riau juga tidak terawat diakibatkan minimnya anggaran pemeliharaan untuk aset EBT.

Dalam rangka meningkatkan rasio elektrifikasi dan mengurangi permasalahan dan kendala yang dihadapi maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan alternatif solusi untuk kedepannya dengan cara:

1. Menggunakan pembangkit yang kecil tersebar dan menghubungkan antar pulau yang berdekatan serta memanfaatkan sumber energi primer yang tersedia melimpah di Provinsi Kepulauan Riau, serta melakukan sosialisasi dan pendekatan dengan pemerintah daerah setempat, tokoh masyarakat, alim ulama dan pemilik lahan yang akan dihibahkan atau jalur yang dilalui jaringan distribusi tegangan menengah;
2. Dengan mengusulkan anggaran ke Pemerintah Pusat untuk pembangunan EBT di daerah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Melaksanakan bantuan pemasangan baru listrik sebanyak 35 unit di Provinsi Kepulauan Riau

Program-program yang mendukung peningkatan rasio elektrifikasi Tahun 2024 diantaranya adalah Program Pengelolaan Ketenagalistrikan dan Program Pengelolaan Energi Terbarukan.

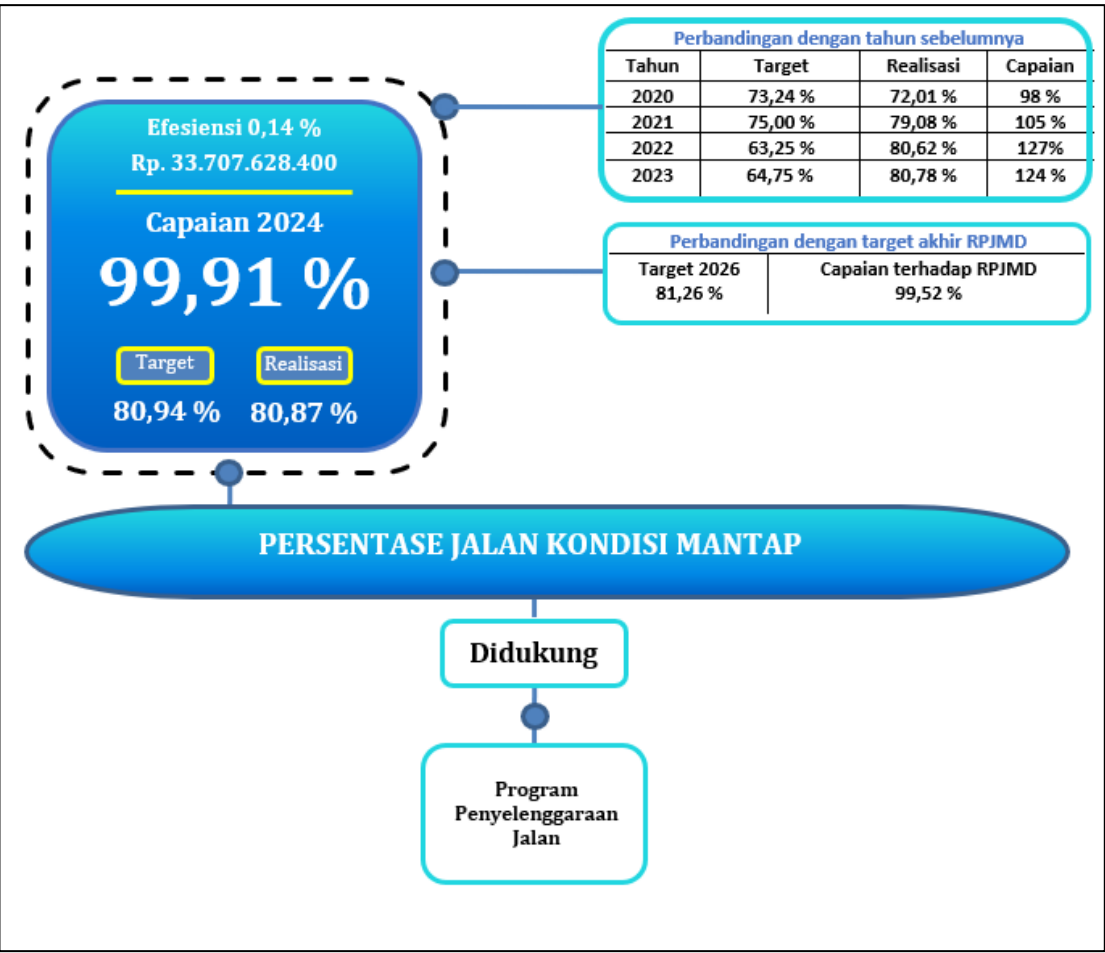
Tabel 3.62 Program/Kegiatan dan Realisasi Anggaran

Program	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	11.663.605.756,00	4.892.814.681,00
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	8.033.625.300,00	2.793.524.831,00
Total	19.697.231.056,00	7.686.339.512,00

Dari jumlah anggaran sebesar Rp19.697.231.056,00 terealisasi sebesar Rp7.686.339.512,00 atau 39%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp12.010.891.544,00 (61%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian kinerja indikator Rasio Elektrifikasi (100,09%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (39%) sehingga efesiensi tercapai 61%.

3.5.13. Sasaran Peningkatan Pembangunan Konektivitas Antar Pulau dan Kawasan Pesisir

3.5.13.1. Persentase Jalan Kondisi Mantap



Jalan kondisi mantap dapat didefinisikan sebagai jalan provinsi dalam kondisi baik dan sedang dengan permukaan perkerasan yang benar-benar rata, tidak ada gelombang dan tidak ada kerusakan permukaan. Secara harafiah jalan didefinisikan sebagai jalur di mana masyarakat mempunyai hak untuk melewatinya tanpa diperlukannya izin khusus untuk itu. %tase Jalan Kondisi mantap di Provinsi Kepulauan Riau meningkat. %tase Jalan Kondisi Baik pada Tahun 2024 sudah baik dengan realisasi kinerja sebesar 80,87 % dari target sebesar 80,94 % dengan capaian sebesar 99,91 %.

Persentase jalan kondisi mantap adalah indikator terbaru setelah dilakukannya perubahan RPJMD 2021-2026 untuk menyesuaikan dengan capaian kinerja jalan kondisi mantap hasil survey kondisi jalan yang dilakukan setiap tahun oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dan menjadi dasar untuk digunakan sebagai usulan yang dilakukan setiap tahunnya ke Kementerian PU untuk mendapatkan dana Alokasi Khusus (DAK) yang digunakan untuk meningkatkan kualitas jalan Provinsi di Kepulauan Riau.

Persentase jalan kondisi mantap merupakan gabungan dari persentase jalan kondisi baik ditambah dengan jalan kondisi sedang serta formula perhitungan persentase jalan kondisi mantap adalah Panjang jalan kondisi mantap (502.010 km) dibandingkan dengan Total Ruas Jalan Provinsi di Kepulauan Riau (620.76 Km) sehingga didapatkan hasilnya 80,87%. Perhitungan kondisi jalan mantap berdasarkan pemetaan dari data dasar kondisi jalan tahun 2024 yang kegiatan surveynya dilakukan di akhir tahun 2023.

Tabel 3.63 Persentase Capaian Kinerja Jalan kondisi mantap

Panjang jalan kondisi mantap (Baik + Sedang)	Panjang jalan provinsi keseluruhan	Persentase Capaian Kinerja Jalan kondisi mantap (panjang jalan kondisi mantap dibagi Panjang jalan provinsi keseluruhan)
502,010 Km	620,76 Km	80,87%

Sumber : Dinas PUPP Provinsi Kepulauan Riau

Peningkatan Pembangunan Konektivitas Antar Pulau dan Kawasan Pesisir dilihat dari persentase jalan kondisi mantap di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan peningkatan yang cukup menggembirakan. Realisasi indikator persentase jalan mantap di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 mencapai 80,87% walaupun masih belum dapat mencapai target dari yang telah ditetapkan sebesar 80,94% sehingga capaian kinerja sebesar 99,91% atau dalam kategori **BAIK**.

Capaian kinerja persentase jalan mantap tahun 2024 apabila dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,09%. Dimana pada tahun 2023 peningkatan persentase jalan mantap sebesar 80,78% meningkat menjadi 80,87% pada tahun 2024. Peningkatan ini disebabkan oleh konsistennya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk mengalokasikan anggaran infrastruktur untuk meningkatkan kualitas Jalan Provinsi di Kepulauan Riau. Pengawasan yang juga dilakukan oleh pemerintah maupun kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pentingnya kualitas jalan sehingga masyarakat selalu melaporkan jika ada jalan yang kondisinya kurang baik agar ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Khususnya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Namun juga capaian kinerja tahun 2024 belum memenuhi target yang diharapkan di antaranya adalah sedikitnya paket-paket pekerjaan fisik untuk mendukung kondisi jalan provinsi dikarenakan anggaran dialihkan ke pemilu dan pilkada tahun 2024.

Tabel 3.64 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Tahun	Capaian Kinerja	Persentase Peningkatan Capaian
2022	80,62%	-
2023	80,78%	0,16%
2024	80,87%	0,09%

Sumber : Dinas PUPP Provinsi Kepulauan Riau

Dilihat dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) realisasi kinerja persentase jalan mantap di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 80,87% dengan target sebesar 81,26% dengan capaian kinerja sebesar 99,52%.

Faktor yang mendukung dan mempengaruhi ketercapaian peningkatan persentase jalan mantap di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 adalah:

1. Pendanaan yang Memadai: Anggaran yang cukup untuk perbaikan dan pemeliharaan jalan adalah kunci utama. Tanpa dana yang memadai, proyek jalan tidak dapat berjalan dengan lancar.
2. Perencanaan yang Matang: Perencanaan yang komprehensif dan terstruktur sangat penting untuk memastikan setiap tahap proyek berjalan sesuai rencana.
3. Pengawasan dan Evaluasi: Pengawasan yang ketat serta evaluasi berkala terhadap proyek jalan memastikan bahwa pekerjaan dilaksanakan sesuai standar dan waktu yang ditetapkan.
4. Sumber Daya Manusia: Tenaga kerja yang terlatih dan berpengalaman dalam bidang konstruksi jalan sangat penting untuk menjamin kualitas hasil akhir.

Upaya lainnya yang mendukung keberhasilan peningkatan persentase jalan mantap adalah sebagai berikut:

1. Kerjasama dan Koordinasi: Kolaborasi antara berbagai pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, kontraktor, dan masyarakat, dapat mempercepat proses penyelesaian proyek jalan.
2. Selain itu faktor Teknologi dan Inovasi: Penggunaan teknologi modern dan metode inovatif dalam konstruksi dan pemeliharaan jalan dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pekerjaan.

Adapun upaya spesifik yang dilakukan dalam mendukung ketercapaian indikator Jalan dalam kondisi mantap Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan/Rekonstruksi Jalan Bukit Leman - Trans Batubi Lanjutan, Kab. Natuna.
2. Peningkatan/Rekonstruksi Jalan Letung - Kuala Maras Lanjutan, Kab. Kepulauan Anambas.
3. Peningkatan/Rekonstruksi Jalan Sei Asam - Sebele - Penarah - Lebuhan Lanjutan, Kab. Karimun.
4. Rekonstruksi Jalan Sp. Batu 14 - Pel. Tg. Berlian, Kab. Karimun (DBH Sawit Provinsi Kepri).
5. Rekonstruksi Jalan Sp. Batu 14 - Pel. Tg. Berlian, Kab. Karimun (DBH Sawit Provinsi Kepri).
6. Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Bintan, Lingga, Karimun dan Natuna.

Permasalahan yang dihadapi yang menjadi kendala dalam meningkatkan persentase jalan mantap sebagai berikut:

1. Anggaran Terbatas: Anggaran yang terbatas sering kali menjadi hambatan utama dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan. Biaya yang tinggi untuk material, tenaga kerja, dan peralatan bisa sulit terpenuhi dengan anggaran yang ada.
2. Kualitas Material dan Pelaksanaan: Penggunaan material yang berkualitas rendah dan pelaksanaan yang tidak sesuai standar dapat mengakibatkan jalan cepat rusak. Pembangunan jalan yang tidak sesuai spesifikasi juga bisa menyebabkan jalan cepat berlubang atau retak.
3. Pengaruh Cuaca dan Kondisi Alam: Cuaca ekstrem seperti hujan deras, banjir, dan tanah longsor dapat merusak jalan dengan cepat. Kondisi geografis yang sulit, seperti pegunungan atau daerah rawan bencana, juga menyulitkan pembangunan jalan yang mantap.
4. Pengelolaan dan Pengawasan: Kurangnya pengelolaan dan pengawasan yang baik dalam proyek pembangunan jalan dapat mengakibatkan pekerjaan yang tidak berkualitas. Pengawasan yang lemah bisa membuka celah untuk korupsi dan penyimpangan.
5. Lalu Lintas Berat: Lalu lintas kendaraan berat yang melebihi kapasitas jalan dapat mempercepat kerusakan jalan. Jalan yang tidak dirancang untuk menahan beban berat sering kali cepat rusak.
6. Kurangnya Partisipasi Masyarakat: Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjaga dan merawat jalan dapat memperparah kondisi jalan. Kesadaran masyarakat untuk tidak merusak jalan dan melaporkan kerusakan juga penting.

Dalam rangka meningkatkan persentase jalan mantap dan mengurangi permasalahan dan kendala yang dihadapi di tahun-tahun selanjutnya, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan alternatif solusi untuk kedepanya dengan cara:

1. Pemeliharaan Rutin: Menganggarkan dan Melakukan pemeliharaan jalan secara rutin agar mencegah kerusakan yang lebih parah. Ini termasuk penambalan lubang, perbaikan permukaan jalan, dan penggantian lapisan aspal.
2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur: Menggunakan material berkualitas tinggi dan teknologi canggih dalam pembangunan jalan agar lebih tahan lama dan mampu menahan beban berat.

Tabel 3.65 Perbandingan Anggaran Program Pendukung Kinerja Beserta Realisasi dan Efisiensi Anggarannya

Tahun	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (%)
2023	164.247.211.765	159.162.729.178	96,92%	3,08%
2024	56.014.659.149	48.539.486.540	86,65%	13,35%

Sumber : Dinas PUPP Provinsi Kepulauan Riau

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Anggaran yang diberikan di tahun 2023 dan tahun 2024 terdapat perbedaan yang sangat jauh dikarenakan menurunnya Pagu Anggaran Dinas PUPP di Tahun 2024 yang diakibatkan defisit anggaran dan anggaran yang tersedia sebagian dialokasikan untuk Pemilu dan Pilkada tahun 2024. Begitupun efisiensi anggaran berbeda 10,27% karena adanya paket pekerjaan yang tidak dibayarkan di tahun 2024 diakibatkan defisitnya anggaran Provinsi Kepulauan Riau.

Beberapa pekerjaan yang ada dari program penyelenggaraan jalan dan mendukung peningkatan kualitas jalan provinsi adalah:

1. Peningkatan/Rekonstruksi Jalan Bukit Leman - Trans Batubi Lanjutan, Kab. Natuna (DAK - Tematik 01),
2. Peningkatan/Rekonstruksi Jalan Letung - Kuala Maras Lanjutan, Kab. Kepulauan Anambas (DAK - Tematik 05),
3. Peningkatan/Rekonstruksi Jalan Sei Asam - Sebele - Penarah - Lebuhan Lanjutan, Kab. Karimun (DAK - Tematik 03),
4. Rekonstruksi Jalan Sp. Batu 14 - Pel. Tg. Berlian, Kab. Karimun (DBH Sawit Provinsi Kepri),
5. Rekonstruksi Jalan Sp. Batu 14 - Pel. Tg. Berlian, Kab. Karimun (DBH Sawit Provinsi Kepri) (Lanjutan) dan,
6. Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Bintan, Lingga, Karimun dan Natuna

Tabel 3.66 Program/Kegiatan dan Realisasi Anggaran

PAKET PEKERJAAN	PAGU (RP)	REALISASI KEUANGAN	
		(RP)	Persentase
Peningkatan/Rekonstruksi Jalan Bukit Leman - Trans Batubi Lanjutan, Kab. Natuna (DAK - Tematik 01)	6.371.400.000,00	6.370.245.000,00	99,98%
Peningkatan/Rekonstruksi Jalan Letung - Kuala Maras Lanjutan, Kab. Kepulauan Anambas (DAK - Tematik 05)	8.502.600.000,00	8.499.991.500,00	99,97%
Peningkatan/Rekonstruksi Jalan Sei Asam - Sebele - Penarah - Lebuhan Lanjutan, Kab. Karimun (DAK - Tematik 03)	11.322.000.000,00	11.315.191.600,00	99,94%

PAKET PEKERJAAN	PAGU (RP)	REALISASI KEUANGAN	
		(RP)	Persentase
Rekonstruksi Jalan Sp. Batu 14 - Pel. Tg. Berlian, Kab. Karimun (DBH Sawit Provinsi Kepri)	1.855.414.000,00	1.826.958.300,00	98,47%
Rekonstruksi Jalan Sp. Batu 14 - Pel. Tg. Berlian, Kab. Karimun (DBH Sawit Provinsi Kepri)(Lanjutan)	1.640.000.000,00	1.599.422.000,00	97,53%
Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Bintan, Lingga, Karimun dan Natuna	4.016.214.400,00	4.016.214.400,00	100%
Total	33.707.628.400,00	33.628.022.800,00	99,76%

Sumber : Dinas PUPP Provinsi Kepulauan Riau

Dari jumlah anggaran sebesar Rp33.707.628.400,00 terealisasi sebesar Rp33.628.022.800,00 atau 99,76%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp79.605.600,00 (0,23%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian kinerja indikator Presentase Jalan Mantap (99,91%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (99,76%) sehingga efesiensi tercapai 0,14%.

3.6. Pencapaian Pemenuhan *Mandatory Spending* dalam APBD

Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan daerah mengamanatkan Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *Mandatory Spending* adalah salah satu belanja atau pengeluaran yang sudah diatur oleh undang-undang dengan tujuan utama untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory Spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran Fungsi Pendidikan paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Alokasi anggaran Kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran Kesehatan secara memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa.

Untuk itu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2024. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 harus memperhatikan beberapa hal khusus antara lain:

1. Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan

Peningkatan pelayanan bidang pendidikan dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud disesuaikan dengan program prioritas bidang pendidikan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Untuk itu dalam rangka pemenuhan Anggaran Fungsi Pendidikan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalokasikan Anggaran Fungsi Pendidikan sebesar Rp1.076.236.158.458,00 dari total Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau

sebesar Rp4.414.198.804.785,00 atau dengan rasio sebesar 25,49%. Jika dilihat dari anggaran yang dialokasikan untuk Fungsi Pendidikan artinya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah memenuhi ketentuan amanat ketentuan perundang-undangan. Pada periode 31 Desember 2024 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau merealisasikan Fungsi Pendidikan sebesar Rp1.049.194.472.692,20 atau sebesar 97,49% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.076.236.158.458,00. Uraian Alokasi dan realisasi Anggaran Fungsi Pendidikan sebagaimana maksud butir E.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.67 Alokasi dan realisasi Anggaran Fungsi Pendidikan

No	Komponen Perhitungan	Pagu Anggaran		% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan	Realisasi	% Realisasi
1.	a. Urusan Bidang Pendidikan:		1.076.236.158.458,00	96%	1.049.194.472.692,20	97,49%
	1) Belanja Operasi:	897.500.284.475,59		80%	878.917.531.498,49	97,93%
	a. belanja pegawai;	566.534.775.403,02		50%	561.581.059.166,00	99,13%
	b. belanja barang dan jasa;	286.013.783.672,57		25%	273.865.338.166,40	95,75%
	c. belanja hibah;	41.103.725.400,00		4%	40.498.534.166,09	98,53%
	d. belanja bantuan sosial.	3.848.000.000,00		0%	2.972.600.000,00	77,25%
	2) Belanja Modal;	178.735.873.982,41		16%	170.276.941.193,71	95,27%
	b. Urusan Bidang Kebudayaan:		10.237.760.446,00	1%	9.991.486.790,00	97,59%
	1) Belanja Operasi:	9.468.278.176,00		1%	9.224.341.790,00	97,42%
	a. belanja barang dan jasa;	7.905.528.176,00		1%	7.761.591.790,00	98,18%
	b. belanja hibah;	1.562.750.000,00		0%	1.462.750.000,00	93,60%
	c. belanja bantuan sosial.	0,00		0%		
	2) Belanja Modal;	769.482.270,00		0%	767.145.000,00	99,70%
	c. Urusan Bidang Perpustakaan:		7.415.058.314,00	1%	7.120.686.431,02	96,03%
	1) Belanja Operasi:	7.318.828.434,00		1%	7.024.606.431,02	95,98%
	a. belanja barang dan jasa;	7.318.828.434,00		1%	7.024.606.431,02	95,98%
	b. belanja hibah;	0,00		0%		
	c. belanja bantuan sosial.	0,00		0%		
	2) Belanja Modal;	96.229.880,00		0%	96.080.000,00	99,84%
	d. Urusan Bidang Kepemudaaan dan Olahraga:		31.099.098.630,00	3%	30.021.021.673,00	96,53%
	1) Belanja Operasi:	30.645.236.525,00		3%	29.583.589.868,00	96,54%
	a. belanja barang dan jasa;	12.427.936.525,00		1%	11.733.667.690,00	94,41%
	b. belanja hibah;	18.217.300.000,00		2%	17.849.922.178,00	97,98%
	c. belanja bantuan sosial.	0,00		0%		
	2) Belanja Modal;	453.862.105,00		0%	437.431.805,00	96,38%

No	Komponen Perhitungan	Pagu Anggaran		% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan	Realisasi	% Realisasi
	e. Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan, antara lain:		0,00	0%		0%
	1) Belanja Transfer:	0,00		0%		0%
	Belanja bantuan keuangan...	0,00		0%		0%
	2) Sub Kegiatan pada SKPD			0%		0%
	dst	0,00		0%		0%
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b+c+d+e)	1.124.988.075.848,00			1.049.194.472.692,20	
3.	Total Belanja Daerah	4.414.198.804.785,00			4.071.747.457.825,29	
4.	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%	25,49%			25,77%	

2. Alokasi Anggaran Kesehatan

Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan alokasi anggaran kesehatan dimaksud diarahkan untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator SPM bidang kesehatan. Untuk itu dalam rangka pemenuhan Anggaran Kesehatan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalokasikan Anggaran Kesehatan sebesar Rp430.777.602.856,00 dari total Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau di luar gaji ASN yang diperhitungkan sebesar Rp3.927.545.517.398,99 atau dengan rasio sebesar 10,97%. Jika dilihat dari anggaran yang dialokasikan untuk Anggaran Kesehatan sesuai ketentuan Peraturan perundang undangan. Pada periode 31 Desember 2024 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau merealisasikan Anggaran Kesehatan sebesar Rp421.327.829.301,32 atau sebesar 97,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp430.777.602.856,00. Uraian Alokasi dan realisasi Anggaran Kesehatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.68 Alokasi dan Realisasi Anggaran Kesehatan

No	Komponen Perhitungan	Pagu Anggaran		% dari total anggaran kesehatan	Realisasi		% dari total realisasi kesehatan
		Jumlah			Jumlah		
1.	a. Urusan bidang Kesehatan:		430.777.602.856,00	100%		421.327.829.301,32	97,81%
	1) Belanja Operasi:	399.555.768.759,00		93%	392.231.762.929,00		98,17%
	a. belanja pegawai;	173.914.691.414,44		40%	171.835.691.246,00		98,80%
	b. belanja barang dan jasa;	223.964.253.344,56		52%	219.696.071.683,00		98,09%
	c. belanja hibah;	1.676.824.000,00		0%	700.000.000,00		41,75%
	d. belanja bantuan sosial.	0,00		0%	0,00		0,00%
	2) Belanja Modal;	31.221.834.097,00		7%	29.096.066.372,32		93,19%
	b. Belanja pada sub kegiatan di luar Urusan bidang Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:		0,00	0%		0,00	0,00%
	1) Belanja Transfer:	0,00		0%	0,00		0,00%
	Belanja bantuan keuangan...						
	2) Sub Kegiatan pada SKPD	0,00		0%	0,00		0,00%
	dst....						
2.	Anggaran Kesehatan (a+b)	430.777.602.856,00			421.327.829.301,32		
3.	Total Belanja Daerah	4.414.198.804.785,00			4.071.747.457.825,29		
4.	Gaji ASN	486.653.287.386,01			477.549.846.508,00		
5.	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)	3.927.545.517.398,99			3.594.197.611.317,29		
	Rasio anggaran kesehatan (2:5) x 100%	10,97			11,72		

3. Alokasi Anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik

Belanja infrastruktur pelayanan publik adalah belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar

daerah. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalokasikan anggaran sebesar Rp804.698.547.406,52 dengan realisasi sebesar Rp733.345.112.499,05 atau sebesar 91,13%. Uraian alokasi dan realisasi anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik sebagaimana maksud butir E.2 dan E.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.69 Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

No	Komponen Perhitungan	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	%
		Pagu Anggaran	Realisasi	
1	Total Belanja Daerah	4.414.198.804.785,00	4.071.747.457.825,29	92,24%
	Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa:			
	a) belanja bagi hasil	812.172.113.430,00	748.291.201.015,00	92,13%
	b) bantuan keuangan	29.445.500.000,00	26.853.000.000,00	91,20%
2	Jumlah (a+b)	841.617.613.430,00	775.144.201.015,00	92,10%
3	Selisih (1-2)	3.572.581.191.355,00	3.296.603.256.810,29	92,28%
4	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	1.429.032.476.542,00	1.318.641.302.724,12	92,28%

Tabel 3.70 Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Infrastruktur Daerah

No	Komponen Perhitungan	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	%
		Anggaran	Realisasi	
1	a) Belanja Modal	344.997.515.174,10	307.344.075.589,86	89,09%
	1) Tanah	8.021.100.000,00	920.100.000,00	11,47%
	2) Peralatan dan Mesin	130.089.417.367,93	115.508.155.838,84	88,79%
	3) Bangunan dan Gedung	138.014.437.494,17	129.103.961.833,55	93,54%
	4) Jalan, jaringan dan irigasi	43.766.559.842,00	36.791.762.576,47	84,06%
	5) Aset tetap lainnya	19.529.407.470,00	19.630.419.447,00	100,52%
	6) Aset lainnya	5.576.593.000,00	5.389.675.894,00	96,65%
	b) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	19.256.900,00	19.256.835,00	100,00%
	c) Belanja pemeliharaan	79.644.761.246,42	68.400.450.864,92	85,88%
2	a) Belanja Hibah (hanya yang berdimensi infrastruktur)	380.037.014.086,00	357.581.329.209,27	94,09%
	b) Belanja Bantuan Sosial (hanya yang berdimensi infrastruktur)	0,00	0,00	0,00%
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	804.698.547.406,52	733.345.112.499,05	91,13%
Rasio Belanja Infrastruktur Daerah		22,52%	22,25%	98,76%

Berdasarkan tabel sebagaimana diatas, jika dilihat dari Rasio Alokasi Belanja Infrastruktur Daerah yang dianggarkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebesar 22,52% masih belum memenuhi alokasi anggaran belanja infrastruktur Pelayanan Publik sebagaimana seharusnya sebesar 40,00% sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini dikarenakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau masih harus memenuhi beberapa alokasi prioritas lainnya seperti Alokasi Anggaran dalam rangka pilkada serentak tahun 2024, Pemerintah Daerah diwajibkan menyediakan pendanaan kegiatan pemilihan bersama antara provinsi dan kabupaten/kota yang bersangkutan yang dibebankan pada APBD masing-masing Pemerintah Daerah secara proporsional sesuai beban kerja masing-masing sesuai dengan tahapan pilkada serentak dimulai pada Tahun Anggaran 2023 yang pendanaannya mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang

Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari APBD, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2019.

Oleh sebab itu dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen), Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan menyesuaikan porsi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga pada batas akhir yaitu sampai dengan Tahun Anggaran 2027 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat mengalokasikan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen).

4. Alokasi Anggaran Pengawasan

Dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang undangan, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, Peningkatan kapabilitas APIP meliputi: Kapabilitas APIP level 3, Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP serta Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan.

Berkaitan dengan itu, untuk mendanai penguatan Pembinaan dan pengawasan dimaksud, Pemerintah Daerah diwajibkan mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah dengan beberapa klasifikasi yang ditetapkan. Untuk Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau termasuk dalam klasifikasi besaran dari total belanja daerah diatas Rp4.000.000.000.000,00 sampai dengan Rp10.000.000.000.000,00 sekurang kurangnya 0,60% dari total belanja daerah tidak termasuk belanja Gaji dan Tunjangan pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2024. Berikut Uraian Alokasi Anggaran Pengawasan pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau:

Tabel 3.71 Alokasi dan Realisasi Anggaran Bidang Pengawasan

No	KOMPONEN PERHITUNGAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1.	a. Urusan bidang Pengawasan:	40.020.291.224,00	38.705.877.508,00	96,72%
	1) Belanja Operasi:	38.397.691.524,00	37.091.903.308,00	96,60%
	a. belanja pegawai;	21.601.495.000,00	21.588.330.450,00	99,94%
	b. belanja barang dan jasa;	16.796.196.524,00	15.503.572.858,00	92,30%
	2) Belanja Modal;	1.622.599.700,00	1.613.974.200,00	99,47%
2.	Anggaran Bidang Pengawasan	40.020.291.224,00	38.705.877.508,00	96,72%
3.	Total Belanja Daerah	4.414.198.804.785,00	4.071.747.457.825,29	92,24%
4.	Rasio terhadap belanja Urusan bidang Pengawasan	0,91%	0,95%	104,85%

Berdasarkan tabel sebagaimana diatas, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalokasikan anggaran sebesar Rp40.020.291.224,00 dengan realisasi sebesar Rp38.705.877.508,00 atau sebesar 96,72%. Jika dilihat dari Rasio Alokasi Belanja Pengawasan yang dianggarkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebesar 0,91% maka sudah memenuhi alokasi anggaran sesuai ketentuan sebesar 0,60%.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Dalam Laporan Keuangan ini, yang dimaksud dengan Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dengan identitas sebagai berikut:

- Nama Entitas Pelaporan : Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- Alamat : Komplek Perkantoran Provinsi Kepulauan Riau
di Pulau Dompak, Tanjungpinang
- Gubernur : H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.
- Sekretaris Daerah : Drs. ADI PRIHANTARA, M.M.

Sebagai entitas pelaporan, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau meliputi seluruh unsur entitas akuntansi yang membentuk dan melaksanakan pemerintahan daerah di Provinsi Kepulauan Riau terdiri:

- a. Sekretariat Daerah merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur;
- b. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah;
- c. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
- d. Lembaga Teknis Daerah adalah merupakan unsur pelaksana tugas tertentu yang dipimpin oleh seorang Kepala, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Sementara itu, penatausahaan keuangan dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

4.2. Komponen Utama Kebijakan Akuntansi

Komponen utama kebijakan akuntansi pemerintah daerah terdiri atas:

- a. Kerangka Konseptual;
- b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- c. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Neraca;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- g. Laporan Arus Kas (LAK);
- h. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);
- i. Laporan Keuangan Konsolidasian;
- j. Kas dan Setara Kas;
- k. Piutang dan Penyisihan Piutang;
- l. Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- m. Persediaan;
- n. Investasi;
- o. Aset Tetap;
- p. Dana Cadangan;
- q. Aset Lainnya;

- r. Aset Konsesi Jasa;
- s. Properti Investasi;
- t. Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang Dihentikan;
- u. Kewajiban;
- v. Pendapatan dan Belanja;
- w. Pembiayaan;
- x. Pendapatan dan Beban;
- y. Peristiwa Setelah Pelaporan.

4.2.1 Kerangka Konseptual Akuntansi

4.2.1.1. Tujuan Kerangka Konseptual

Tujuan Kerangka Konseptual Akuntansi adalah sebagai acuan bagi:

- a. Penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi;
- b. Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi pemerintahan; dan
- c. Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi pemerintahan.

4.2.1.2. Ruang Lingkup

Kerangka konseptual ini membahas:

- a. Tujuan kerangka konseptual;
- b. Lingkungan akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- c. Pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna;
- d. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
- e. Peranan dan tujuan pelaporan keuangan, komponen
- f. laporan keuangan serta dasar hukum;
- g. Asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip, serta kendala informasi akuntansi; dan
- h. Definisi, pengukuran, dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan.

4.2.1.3. Asumsi Dasar

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri atas:

- a. Asumsi kemandirian entitas, berarti bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dianggap sebagai entitas yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggungjawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat putusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.
- b. Asumsi kesinambungan entitas adalah Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

- c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*) merupakan Laporan keuangan entitas pelaporan menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

4.2.1.4. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

a. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan harus:

1) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

2) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*).

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

3) Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

4) Lengkap

Informasi akuntansi keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

1) Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

2) Dapat Diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

3) Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

c. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan

akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

d. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

4.2.1.5. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau:

a. Basis akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan-undangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asling dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

b. Nilai historis (*Historical Cost*)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

c. Realisasi (*Realization*)

Bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

d. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form*)

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Periodisitas (*Periodicity*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

f. Konsistensi (*Consistency*)

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

g. Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

h. Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampaui rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampaui tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

4.2.1.6. Kendala Informasi Akuntansi Yang Relevan dan Andal

Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, yaitu:

a. Materialitas

Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.

b. Pertimbangan biaya dan manfaat

Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain disamping mereka yang menjadi tujuan informasi, misalnya penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin akan mengurangi biaya yang dipikul oleh suatu entitas pelaporan.

c. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

4.2.2. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Dalam Laporan Realisasi Anggaran diidentifikasi secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut :

- a. nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
- b. cakupan entitas pelaporan;
- c. periode yang dicakup;
- d. mata uang pelaporan; dan
- e. satuan angka yang digunakan.

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dengan anggarannya. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA;
- b. Belanja;
- c. Transfer;
- d. Surplus/defisit-LRA;
- e. Penerimaan Pembiayaan;
- f. Pengeluaran Pembiayaan;
- g. Pembiayaan neto; dan
- h. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Entitas akuntansi/pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan-LRA disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Entitas akuntansi/pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2.3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- a. Saldo Anggaran Lebih awal;
- b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA);
- d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya;
- e. Lain-lain; dan
- f. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Selain penyampaian informasi sebagaimana dimaksud diatas, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2.4. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif. Laporan Operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Dalam Laporan Operasional diidentifikasi secara jelas dan jika dianggap perlu diulang pada setiap halaman laporan, informasi berikut:

- a. nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
- b. cakupan entitas pelaporan;
- c. periode yang dicakup;
- d. mata uang pelaporan; dan
- e. satuan angka yang digunakan.

Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO;
- b. Beban;
- c. Surplus/Defisit dari operasi;
- d. Kegiatan non operasional;
- e. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;

- f. Pos Luar Biasa;
- g. Surplus/Defisit-LO

Entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Klasifikasi pendapatan-LO menurut sumber pendapatan maupun klasifikasi beban menurut ekonomi, pada prinsipnya merupakan klasifikasi yang menggunakan dasar klasifikasi yang sama yaitu berdasarkan jenis.

4.2.4.1. Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan;
- b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.

Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.

Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

4.2.4.2. Akuntansi Beban

Beban diakui pada saat:

- a. timbulnya kewajiban;
- b. terjadinya konsumsi aset;
- c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum Provinsi Kepulauan Riau. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi untuk Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tidak terduga.

Penyusutan/amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (straight line method).

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

4.2.4.3. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan.

Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan.

Selisih lebih/kurang antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.

4.2.4.4. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pendapatan-LO dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

Termasuk dalam pendapatan-LO/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa.

4.2.4.5. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa.

Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
- b. tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
- c. kejadian diluar kendali entitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa diungkapkan pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2.4.6. Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

4.2.5. Neraca

Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Apabila suatu entitas pelaporan menyediakan barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang.

Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- a. kas dan setara kas;
- b. investasi jangka pendek;
- c. piutang pajak dan bukan pajak;
- d. persediaan;
- e. investasi jangka panjang;
- f. aset tetap;
- g. kewajiban jangka pendek;
- h. kewajiban jangka panjang;
- i. ekuitas.

Pos-pos selain yang disebutkan diatas, disajikan dalam Neraca jika Kebijakan Akuntansi Pemerintahan mensyaratkan, atau jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas pelaporan.

Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan pada faktor-faktor berikut ini:

- a. Sifat, likuiditas, dan materialitas aset;
- b. Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas pelaporan;
- c. Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.

Aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat dan fungsi kadang-kadang diukur dengan dasar pengukuran yang berbeda. Sebagai contoh, sekelompok aset tetap tertentu dicatat atas dasar biaya perolehan dan kelompok lainnya dicatat atas dasar nilai wajar yang diestimasi.

4.2.5.1. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

- a. diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
- b. berupa kas dan setara kas.

Semua aset selain yang termasuk dalam (a) dan (b), diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, bagian lancar penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

4.2.5.2. Aset Non Lancar

Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atau yang digunakan masyarakat umum.

Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset nonlancar yang disajikan di neraca.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen.

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Investasi nonpermanen terdiri dari:

- a. Pembelian Surat Utang Negara;
- b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- c. Dana bergulir; dan
- d. Investasi nonpermanen lainnya.

Investasi permanen terdiri dari:

- a. Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada Perusahaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, lembaga keuangan, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
- b. Investasi permanen lainnya.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap terdiri dari:

- a. tanah;
- b. peralatan dan mesin;
- c. gedung dan bangunan;
- d. jalan, irigasi dan jaringan;
- e. aset tetap lainnya; dan
- f. konstruksi dalam pengerjaan.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan) dan kas yang dibatasi penggunaannya.

4.2.5.3. Pengakuan Aset

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

4.2.5.4. Pengukuran Aset

Pengukuran aset adalah sebagai berikut:

- a. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- b. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
- c. Piutang dicatat sebesar nilai nominal;
- d. Persediaan dicatat sebesar:
 - 1) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - 2) Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.2.5.5. Kewajiban

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, Lembaga Keuangan, Entitas Pemerintah Lain, atau Lembaga Internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

1. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

2. Kewajiban Jangka Panjang

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- entitas bermaksud mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*) atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek sesuai dengan poin ini, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:

- a. pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran; dan
- b. tidak mungkin terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal laporan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4.2.6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang kurangnya pos-pos:

- a. Ekuitas awal;
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - 1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - 2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d. Ekuitas akhir.

Selain penyampaian informasi sebagaimana dimaksud diatas, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur- unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2.7. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pendanaan sedangkan pembayaran bunga utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi kecuali bunga dikapitalisasikan akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas investasi.

Dalam hal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau masih membukukan penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas berdasarkan akun pelaksanaan anggaran maka laporan arus kas dapat disajikan dengan mengacu pada akun-akun pelaksanaan anggaran tersebut.

Akun-akun pelaksanaan anggaran adalah akun yang berhubungan dengan pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, dan transaksi nonanggaran/transitoris, yang dalam Laporan Arus Kas dikelompokkan menjadi aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan dan nonanggaran/transitoris.

Aktivitas Operasi

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus masuk kas dari aktivitas operasi diperoleh dari, antara lain:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
- d. Lain-lain PAD yang Sah
- e. Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer;
- f. Penerimaan Hibah; dan
- g. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi digunakan untuk pengeluaran, antara lain:

- a. Pembayaran Pegawai;
- b. Pembayaran Barang/Jasa;
- c. Pembayaran Bunga;
- d. Pembayaran Subsidi;
- e. Pembayaran Hibah;
- f. Pembayaran Bantuan Sosial;
- g. Pembayaran Tak Terduga.
- h. Pembayaran Bagi Hasil; dan
- i. Pembayaran Bantuan Keuangan.

Jika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.

Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi, antara lain:

- a. Pencairan Dana Cadangan;
- b. Penjualan atas Tanah;

- c. Penjualan atas Peralatan dan Mesin;
- d. Penjualan atas Gedung dan Bangunan;
- e. Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan;
- f. Penjualan Aset Tetap Lainnya;
- g. Penjualan Aset Lainnya;
- h. Hasil Penjualan Kekayaan Lain yang Dipisahkan;
- i. Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi, antara lain:

- a. Pembentukan Dana Cadangan;
- b. Perolehan Tanah;
- c. Perolehan atas Peralatan dan Mesin;
- d. Perolehan atas Gedung dan Bangunan;
- e. Perolehan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan;
- f. Perolehan Aset Tetap Lainnya;
- g. Perolehan Aset Lainnya;
- h. Penyertaan Modal Daerah;
- i. Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen.

Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian dan pelunasan pinjaman jangka panjang.

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan, antara lain:

- a. Penerimaan Pinjaman Daerah;
- b. Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah;
- c. Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
- d. Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat.

Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan, antara lain:

- a. Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah;
- b. Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah;
- c. Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya.

Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau antara lain Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).

4.2.8. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh kebijakan akuntansi pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Dalam rangka pengungkapan yang memadai, Catatan atas Laporan Keuangan pengungkapan hal-hal sebagai berikut:

- a. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro;
- c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Rincian dan penjelasan pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Pengungkapan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan mengikuti kebijakan akuntansi berlaku yang mengatur tentang pengungkapan untuk pos-pos yang terkait. Misalnya, kebijakan akuntansi pemerintahan tentang persediaan mengharuskan pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan.

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami laporan keuangan, pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan dapat disajikan secara narasi, bagan, grafik, daftar dan skedul atau bentuk lain yang lazim yang mengikhtisarkan secara ringkas dan padat kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan dan hasil-hasilnya selama satu periode.

4.2.9. Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.

Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*). Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan atau tidak dilakukan, maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2.10. Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Klasifikasi Kas dan Setara Kas

Kode Rekening	Uraian Akun		Kewenangan	
			SKPD	SKPKD
1.1.1	Kas dan Setara Kas			
1.1.1.01	Kas di Kas Daerah	Kas di Kas Daerah	-	√
1.1.1.02	Kas di Bendahara Penerimaan	Pendapatan Yang Belum Disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau	√	-
		Kas di Bank Persepsi	√	-
1.1.1.03	Kas di Bendahara Pengeluaran	Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU	√	-
1.1.1.04	Kas di BLUD	Kas Tunai BLUD	√	-
		Kas di Bank BLUD	√	-

Kode Rekening	Uraian Akun		Kewenangan	
			SKPD	SKPKD
		Potongan PFK di BLUD yang Belum Disetor	√	-
		Potongan Non Pajak Yang Belum Disetor.	√	-
		Uang Muka Pelayanan BLUD	√	-
1.1.1.05	Kas Dana BOS	Kas Tunai BOS	√	-
		Kas di Bank BOS	√	-
1.1.1.07	Kas Lainnya	Jasa Giro Yang Belum Disetor	√	-
		Potongan PFK yang Belum Disetor	√	-
		Kas di Satuan Pendidikan	√	-
1.1.1.08	Setara Kas	Deposito (kurang dari 3 bulan)	-	√
		Surat Utang Negara/Obligasi (kurang dari 3 bulan)	-	√

catatan: setara kas pada BLUD mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab BUD terdiri dari:

- a. Saldo rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau, yaitu saldo rekening pada bank yang ditetapkan oleh Gubernur untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
- b. Setara kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 (tiga) bulan, yang dikelola oleh BUD.

4.2.10.1. Pengakuan

Kas meliputi seluruh uang yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca.

Kas dan setara kas secara umum diakui jika memenuhi kriteria:

- a. Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas dan;
- b. Penguasaan dan/atau kepemilikan kas dan/atau setara kas telah berpindah ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Saldo kas di kas daerah dan setara kas akan bertambah apabila terdapat aliran kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau, antara lain berasal dari:

- a. Penyetoran kas Pendapatan Asli Daerah dari Bendahara Penerimaan;
- b. Penyetoran pengembalian sisa pengisian kas dari Bendahara Pengeluaran;
- c. Penerimaan pendapatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, antara lain Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan Provinsi Kepulauan Riau yang sah;
- d. Penerimaan pembiayaan, antara lain penerimaan pinjaman Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, hasil penjualan kekayaan Provinsi Kepulauan Riau yang dipisahkan dan penerimaan pelunasan piutang, pencairan dana cadangan, penerimaan kembali dana bergulir; dan
- e. Penerimaan Provinsi Kepulauan Riau lainnya, antara lain penerimaan perhitungan pihak ketiga.

Saldo kas di kas daerah akan berkurang apabila terdapat aliran kas keluar dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau, antara lain:

- a. Transfer UP/GU/TU ke rekening bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu;
- b. Belanja, antara lain pembayaran belanja gaji, barang dan jasa, belanja modal, belanja transfer dan belanja tak terduga;
- c. Pengeluaran pembiayaan, antara lain pembayaran pokok utang, penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan pemberian pinjaman, pembentukan dana cadangan, pemberian dana bergulir; dan

- d. Pengeluaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau lainnya, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

Saldo kas di Bendahara Penerimaan dapat terdiri dari kas tunai dan kas di rekening penerimaan. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan akan bertambah apabila terdapat uang masuk dari penerimaan pendapatan umumnya dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah, dan saldo Kas di Bendahara Penerimaan akan berkurang apabila terdapat uang keluar yang di transfer ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Apabila karena alasan tertentu masih terdapat uang pada Bendahara Penerimaan yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal neraca, maka jumlah tersebut dilaporkan dalam neraca sebagai Kas di Bendahara Penerimaan.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu akan bertambah apabila terdapat aliran uang masuk yang antara lain berasal dari:

- a. Transfer UP/GU/TU dan/atau dana LS yang dikelola oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
- b. Penerimaan uang pengembalian belanja;
- c. Penerimaan jasa giro; dan
- d. Penerimaan uang potongan pajak yang dipungut oleh bendahara pengeluaran.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu akan berkurang apabila terdapat aliran uang keluar yang antara lain berasal dari:

- a. Belanja yang telah di-SPJ-kan.
- b. Penyetoran uang pengembalian belanja/UP/GU/TU dan/atau dana LS yang dikelola oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu, dan
- c. Penyetoran uang potongan pajak yang dipungut oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN).

Uang Panjar yang belum dipertanggungjawabkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu dianggap belum sebagai pengurang kas di bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu.

4.2.10.2. Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya.

Kas dalam bentuk valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.2.10.3. Penyajian dan Pengungkapan

Kas dan Setara Kas disajikan dalam Laporan Arus Kas dan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi kas dan setara kas.

Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan Kas dan Setara Kas adalah:

- a. Rincian kas dan setara kas;
- b. Kebijakan manajemen setara kas; dan
- c. Informasi lainnya yang dianggap penting.

4.2.11. Piutang dan Penyisihan Piutang

4.2.11.1. Piutang

Piutang diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4.2 Klasifikasi Piutang

Kode Rekening	Uraian	Kewenangan	
		SKPD	SKPKD
1.1.03	Piutang Pajak Daerah	√	√
1.1.04	Piutang Retribusi Daerah	√	-
1.1.05	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	√	-
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	√	-
1.1.07	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	√
1.1.08	Piutang Transfer antar Daerah	-	√
1.1.09	Piutang Lainnya	√	√
1.1.10	Penyisihan Piutang	√	√
1.1.11	Beban Dibayar dimuka	√	√

Piutang Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

Pungutan

a. Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas:

- 1) Piutang Pajak Daerah;
- 2) Piutang Retribusi Daerah;
- 3) Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya.

b. Perikatan

Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas:

- 1) Pemberian Pinjaman;
- 2) Penjualan;
- 3) Kemitraan;
- 4) Pemberian fasilitas;
- 5) Transaksi Dibayar Dimuka.

c. Transfer antar Pemerintahan

Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas:

- 1) Piutang Dana Bagi Hasil;
- 2) Piutang Dana Alokasi Umum;
- 3) Piutang Dana Alokasi Khusus;
- 4) Piutang Transfer Lainnya;
- 5) Piutang Kelebihan Transfer.

d. Tuntutan Ganti Kerugian

Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian, terdiri atas:

- 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
- 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Bendahara.

e. Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka diakui pada saat direalisasikan pengeluaran kas namun unit kerja belum menikmati manfaat atas barang atau jasa yang dibayarkan. Pada akhir periode pelaporan dilakukan penyesuaian untuk menghitung berapa manfaat barang atau jasa yang telah dikonsumsi dan berapa yang masih menjadi Beban Dibayar Dimuka.

4.2.11.1.1. Pengakuan

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Didukung dengan naskah perjanjian/surat ketetapan yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas dan/atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
- b. Jumlah piutang dapat diukur;
- c. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang diakui pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang, yaitu dengan dokumen surat ketetapan tentang piutang atau dokumen yang dipersamakan dengan surat ketetapan tentang piutang dan/atau dokumen surat penagihan yang sudah diterbitkan tetapi belum dilunasi.

Piutang retribusi diakui pada saat dikeluarkannya surat ketetapan retribusi dan jasa layanannya telah digunakan oleh wajib retribusi.

Piutang atas bagian laba BUMD timbul apabila pada suatu tahun buku telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dalam RUPS tersebut telah ditetapkan besarnya bagian laba yang harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Piutang yang timbul atas pemberian fasilitas/jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang ditujukan untuk memanfaatkan barang milik daerah dengan cara berupa sewa/pinjam pakai/kerja sama pemanfaatan/bangun guna serah atau bangun serah guna/kerja sama penyediaan infrastruktur diakui pada saat ditandatangani surat perjanjian kerja sama.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/ SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah.

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan *intern* manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang.

Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan sebagai lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Entitas akuntansi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, piutang diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

4.2.11.1.2. Pengukuran

Piutang dicatat sebesar nilai nominal dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Pengukuran Piutang Pendapatan

Piutang Pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam keputusan atas penagihan.

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

- a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Pengukuran Piutang Berdasarkan Perikatan

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

- a. Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari Kas Umum Provinsi Kepulauan Riau dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.
Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
- b. Penjualan
Piutang dari penjualan dinilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
- c. Kemitraan
Piutang yang timbul dinilai berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
- d. Pemberian fasilitas/jasa
Piutang yang timbul dinilai berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran Piutang Transfer

Pengukuran piutang transfer selaras dengan pengakuan pendapatan transfer, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan yang diatur untuk penyaluran alokasi transfer.

Pengukuran Piutang Tuntutan Ganti Rugi

Pengukuran piutang ganti rugi adalah sebagai berikut:

- a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi diatas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

Pengukuran Berikutnya (*subsequent measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

Tabel 4.3 Kualitas / Umur Piutang

No.	Jenis Piutang	Kualitas/Umur Piutang			
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
		(0,5%)	(10%)	(50%)	(100%)
1.	Piutang Pajak (<i>self assessment</i>)	< 1 Thn	≥ 1 s.d 2	> 2 s.d 5	> 5 Thn
			Thn	Thn	
2.	Piutang Pajak (<i>official assessment</i>)	< 1 Thn	≥ 1 s.d 2	> 2 s.d 5	> 5 Thn
			Thn	Thn	
3.	Piutang Bukan Pajak Khusus Untuk Objek Retribusi	< 1 bulan	≥ 1 s.d 3	> 3 s.d 12	> 12
			bulan	bulan	
4.	Piutang Bukan Pajak Selain Retribusi	Belum dilakukan pelunasan sampai tanggal jatuh tempo	1 bulan terhitung sejak surat tagihan pertama	1 bulan terhitung sejak surat tagihan kedua	1 bulan terhitung sejak surat tagihan ketiga

Penyisihan piutang tidak tertagih dihitung menurut persentase masing-masing kualitas piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

- a. Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

Kualitas lancar, dengan kriteria:

- 1) Umur piutang kurang dari 1(satu) tahun; dan/atau
- 2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
- 3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
- 4) Wajib Pajak likuid; dan/atau
- 5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:

- 1) Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau
- 2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
- 3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
- 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

Kualitas Diragukan, dengan kriteria:

- 1) Umur piutang diatas 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
- 2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
- 3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
- 4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

Kualitas Macet, dengan kriteria:

- 1) Umur piutang diatas 5 (lima) tahun; dan/atau
- 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
- 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
- 4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

- b. Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

Kualitas Lancar, dengan kriteria:

- 1) Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun; dan/atau
- 2) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
- 3) Wajib Pajak likuid; dan/atau
- 4) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:

- 1) Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau
- 2) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
- 3) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

Kualitas Diragukan, dengan kriteria:

- 1) Umur piutang di atas 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
- 2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
- 3) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

Kualitas Macet, dengan kriteria:

- 1) Umur piutang diatas 5 (lima) tahun; dan/atau
- 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
- 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
- 4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

- c. Piutang retribusi yang dapat dilakukan dengan ketentuan:

Kualitas Lancar, dengan kriteria:

- 1) Umur piutang 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
- 2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:

- 1) Umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3(tiga) bulan; dan/atau
- 2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.

Kualitas Diragukan, dengan kriteria:

- 1) Umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau
- 2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

Kualitas Macet, dengan kriteria:

- 1) Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) ; dan/atau
- 2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara.

- d. Penggolongan kriteria kualitas piutang selain pajak dan retribusi:

- 1) Kualitas Lancar, apabila belum melakukan pelunasan sampai tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- 2) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagiah Pertama tidak dilakukan pelunasan;
- 3) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan;
- 4) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara.

Pada tanggal pelaporan berikutnya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang yang dimilikinya. Apabila kualitas piutang masih sama, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK. Apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

Terhadap piutang-piutang yang telah lama dan sulit untuk ditagih akan dilimpahkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk dilakukan proses penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Beban Dibayar Dimuka adalah piutang yang timbul akibat pemerintah provinsi telah melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada pihak ketiga tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati oleh Pemerintah Provinsi.

Beban Dibayar dimuka antara lain meliputi pembayaran sewa yang belum jatuh tempo dan premi asuransi yang belum jatuh tempo.

Beban Dibayar Dimuka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.

Pencatatan Beban Dibayar Dimuka dilakukan dengan pendekatan beban, dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan untuk menunjukkan bagian beban yang belum diterima/dinikmati untuk dicatat menjadi Beban Dibayar di Muka.

Beban Dibayar Dimuka diukur sesuai dengan nilai barang/jasa dari pihak lain yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah provinsi, namun pemerintah provinsi telah membayar atas barang/jasa tersebut.

Beban Dibayar Dimuka dihitung berdasarkan masa/periode manfaat beban tersebut secara harian dengan jumlah hari 360 hari dalam satu tahun.

Beban Dibayar Dimuka disajikan pada Neraca dalam kelompok aset lancar.

4.2.11.1.3. Penyajian dan Pengungkapan

Piutang disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi piutang.

Piutang TP/TGR disajikan:

- a. Kelompok jumlah yang akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan mendatang, disajikan sebagai Piutang TP/TGR pada Aset Lancar;
- b. Kelompok jumlah yang akan diterima lebih dari 12 (dua belas) bulan mendatang, disajikan sebagai TP/TGR pada Aset Lainnya.

Piutang yang telah dilimpahkan penagihannya ke KPKNL tetap dicatat sebagai aset di neraca dan harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan, antara lain:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- b. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitas;
- c. Penjelasan atas penyelesaian piutang;
- d. Informasi lain yang dianggap perlu.

Piutang yang telah dihapusbukukan tetap harus dipelihara pencatatannya secara *extracomptable*.

Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan diantaranya adalah jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

4.2.11.2. Penyisihan Piutang

4.2.11.2.1. Penentuan Besaran Penyisihan Piutang

Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:

- a. Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang dengan kualitas lancar;
- b. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
- c. Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d. Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

4.2.11.2.2. Penghapusan Piutang

Penghapusan piutang terdiri atas:

- a. Penghapusbukuan piutang atau penghapusan bersyarat piutang; dan
- b. Penghapustagihan piutang atau penghapusan mutlak piutang.

Penghapusbukuan piutang atau penghapusan bersyarat piutang dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:

- a. Piutang melampaui batas umur (kadaluwarsa) yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas piutang macet; atau
- b. Debitur tidak melakukan pelunasan 1(satu) bulan setelah tanggal Surat Tagihan Ketiga; atau
- c. Debitur mengalami musibah (*force majeure*); atau
- d. Debitur meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak diketahui keberadaannya berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
- e. Debitur tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa debitur memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi; atau
- f. Debitur dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; atau
- g. Debitur yang tidak diketahui keberadaannya lagi karena:
 - 1) Pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang; atau
 - 2) Telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang; atau
- h. Dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitur tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan sebagainya berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan Gubernur (Pemerintah Daerah setempat atau lainnya); atau
- i. Objek piutang hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian.

Tata cara penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlakuan akuntansi penghapusbukuan piutang atau penghapusan bersyarat piutang dilakukan dengan cara mengurangi akun piutang dan akun penyisihan piutang tidak tertagih.

Penghapusbukuan piutang atau penghapusan bersyarat piutang tidak menghilangkan hak tagih dan oleh karena itu terhadap piutang yang sudah dihapusbukukan ini masih dicatat secara ekstrakomptabel dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:

- a. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang/debitur kepada daerah, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam, misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar;
- b. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan;
- c. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;
- d. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *reschedulling* dan penurunan tarif bunga kredit;
- e. Penghapustagihan setelah semua upaya tagih dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan, misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual, jaminan dilelang;
- f. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan benchmarking kebijakan/peraturan *write off* di negara lain;
- g. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum.

Tata cara penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang dilakukan mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

Penghapustagihan piutang atau penghapusan mutlak piutang dilakukan dengan cara menutup ekstrakomptabel dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

4.2.12. Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir

4.2.12.1 Dana Bergulir

Dana Bergulir diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4.4 Investasi Dana Bergulir

Kode Rekening		Uraian	Kewenangan	
			SKPD	SKPKD
1.2.1		Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
1.2.1.05		Dana Bergulir	-	√

Tabel 4.5 Pendapatan Hasil Dana Bergulir

Kode Rekening		Uraian	Kewenangan	
LRA	LO		SKPD	SKPKD
4.1.4	7.1.4	Lain-Lain PAD yang Sah	-	√
4.1.4.07	7.1.4.07	Pendapatan Bunga	-	√

Dana Bergulir yang disisihkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka pelayanan masyarakat, dimasukkan dalam kelompok investasi jangka panjang non permanen.

Alokasi anggaran untuk Dana Bergulir dimasukkan sebagai Pengeluaran Pembiayaan pada DPA-PPKD, dan aset yang diperoleh dari Pengeluaran Pembiayaan tersebut merupakan bagian dari investasi jangka panjang non permanen. Penagihan kembali dana bergulir dimasukkan sebagai Penerimaan Pembiayaan.

4.2.12.1.1. Pengakuan

Realisasi pengeluaran untuk dana bergulir dicatat jika telah terjadi pengeluaran definitif dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang ditandai dengan dikeluarkannya SP2D.

Dana Bergulir dapat diakui bila memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a. Merupakan bagian dari keuangan Provinsi Kepulauan Riau;
- b. Dicantumkan dalam APBD sebagai pengeluaran pembiayaan pada DPA-SKPD PPKD;
- c. dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- d. Merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/ kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir);
- e. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat menarik kembali dana bergulir.

Dana Bergulir disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada masyarakat dan dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Dana Bergulir dialokasikan pada pos Pengeluaran Pembiayaan dan penagihannya pada pos Penerimaan Pembiayaan. Dana tersebut dilaporkan sebagai Investasi Dana Bergulir pada neraca Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Pengembalian dana kepada pengelola dana bergulir dapat dilakukan dengan cicilan atau pengembalian sekaligus.

Dana bergulir yang ditarik dari masyarakat dapat terdiri dari dua unsur yaitu dana yang berasal dari pinjaman pokok dan pendapatan berupa bunga atau bagi hasil.

Besaran cicilan pokok yang dibayar oleh masyarakat adalah sebesar pinjaman dana yang diterima dengan memperhitungkan jangka waktu pengembalian.

Besaran pendapatan yang dibayar kepada pengelola dana bergulir adalah sebesar suku bunga atau bagi hasil yang disepakati antara penerima dana dengan pengelola dana bergulir.

4.2.12.1.2. Pengukuran

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat adanya perolehan aset berupa dana bergulir sebesar perolehan atau pengeluaran pembiayaan.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau secara periodik harus melakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga nilai dana bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Nilai yang dapat direalisasikan dapat diperoleh jika pengelola dana bergulir melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*). Berdasarkan penatausahaan tersebut, akan diketahui jumlah dana bergulir yang benar-benar tidak dapat ditagih, dana bergulir yang masuk kategori diragukan dapat ditagih dan dana bergulir yang dapat ditagih.

Dana bergulir dapat dihapuskan jika dana bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku.

4.2.12.1.3. Penyajian dan Pengungkapan

Dana Bergulir disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset sesuai klasifikasi dana bergulir.

Penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan penguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

Pendapatan hasil dari pengelolaan dana bergulir yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau disajikan sebagai Lain-Lain PAD Yang Sah-LO dan Lain-Lain PAD Yang Sah-LRA.

Pengungkapkan informasi lain dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain:

- a. Dasar penilaian dana bergulir;
- b. Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih;
- c. Besarnya suku bunga yang dikenakan;
- d. Saldo awal dana bergulir, penambahan/pengurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir;
- e. Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir; dan
- f. Informasi lain yang dianggap perlu.

4.2.12.2. Penyisihan Dana Bergulir

4.2.12.2.1. Penentuan Besaran Penyisihan Piutang

Besaran Penyisihan dana bergulir Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:

- a. Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
- b. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
- c. Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d. Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

4.2.12.2.2. Penghapusan Dana Bergulir

Penghapusan dana bergulir terdiri atas:

- a. Penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir; dan
- b. Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir.

Penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:

- a. Dana bergulir melampaui batas umur (kadaluwarsa) yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas dana bergulir macet; atau
- b. Debitur tidak melakukan pelunasan 1(satu) bulan setelah tanggal Surat Tagihan Ketiga; atau
- c. Debitur mengalami musibah (force majeure); atau
- d. Debitur meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak diketahui keberadaanya berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
- e. Debitur tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa debitur memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi; atau

- f. Debitur dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; atau
- g. Debitur yang tidak diketahui keberadaanya lagi karena:
 - 1) Pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang; atau
 - 2) Telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- h. Dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitur tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan sebagainya berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan Gubernur (Pemerintah Daerah setempat atau lainnya); atau
- i. Objek dana bergulir hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian.

Tata cara penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir dilakukan mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

Perlakuan akuntansi penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir dilakukan dengan cara mengurangi akun dana bergulir dan akun penyisihan dana bergulir tidak tertagih.

Penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir tidak menghilangkan hak tagih dan oleh karena itu terhadap dana bergulir yang sudah dihapusbukukan ini masih dicatat secara ekstrakomtabel dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:

- a. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang/debitur kepada daerah, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam, misalnya kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tidak mampu membayar.
- b. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
- c. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
- d. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *reschedulling* dan penurunan tarif bunga kredit.
- e. Penghapustagihan setelah semua upaya tagih dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan, misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual, jaminan dilelang.
- f. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain.
- g. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum.

Tata cara penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dilakukan mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dilakukan dengan cara menutup ekstrakomtabel dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

4.2.13. Persediaan

Persediaan diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4.6 Klasifikasi Persediaan

Kode Rekening	Uraian		Kewenangan	
			SKPD	SKPKD
1.1.12	Persediaan			
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	Bahan	√	-
		Suku Cadang	√	-
		Alat/Bahan untuk kegiatan kantor	√	-
		Obat-obatan	√	-
		Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	√	-
		Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	√	-
		Natura dan Pakan	√	-
		Persediaan Penelitian	√	-
		Persediaan Dalam Proses	√	-
1.1.12.02	Barang Tak Habis Pakai	Komponen	√	-
		Pipa	√	-
1.1.12.03	Barang Bekas Dipakai	Komponen Bekas dan Pipa Bekas	√	-

Suatu aset dapat diklasifikasikan sebagai persediaan bila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi;
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor; barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa; dan barang bekas pakai seperti komponen dan pipa bekas.

Dalam hal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.

Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.

Persediaan dapat terdiri dari:

- a. Barang Konsumsi;
- b. Amunisi;
- c. Bahan untuk pemeliharaan;
- d. Suku cadang;
- e. Persediaan untuk tujuan strategis/tujuan berjaga-jaga;
- f. Pita cukai dan leges;
- g. Bahan baku;
- h. Barang dalam proses/setengah jadi;
- i. Tanah/bangunan untuk dijual/diserahkan kepada Kabupaten/Kota/masyarakat;
- j. Jalan, Jaringan dan Irigasi untuk diserahkan kepada Kabupaten/Kota/masyarakat; dan
- k. Hewan dan tanaman untuk dijual/diserahkan kepada Kabupaten/Kota/masyarakat.

Dalam suatu transaksi keuangan dimana pengeluaran yang dilakukan pemerintah ditujukan untuk tujuan cadangan strategis/berjaga-jaga, barang-barang yang diperoleh diakui sebagai persediaan. Sebagai contoh pemerintah membeli bahan bakar minyak sebagai cadangan energi dan membeli beras untuk cadangan pangan. Begitu juga dengan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya sapi, kuda, ikan, benih padi dan bibit tanaman.

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2.13.1. Pengakuan

Persediaan diakui pada saat:

- a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal;
- b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan pada akun konstruksi dalam pengerjaan, tidak diakui sebagai persediaan.

Persediaan dalam kondisi sudah tidak layak pakai/usang/rusak/sejenisnya berdasarkan hasil verifikasi/pengecekan/inventarisasi yang dituangkan dalam Berita Acara *stock opname*, disajikan sebagai beban persediaan dan dilaporkan dalam laporan operasional serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Jika ada hasil penjualan atas persediaan yang telah usang atau rusak diakui sebagai Lain-lain PAD yang Sah-LRA dan Lain-lain PAD yang Sah-LO.

Pengakuan Beban Persediaan

Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional.

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).

Pencatatan persediaan dilakukan dengan dua metode, yaitu:

- a. Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-update. Dalam hal pencatatan secara perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.
SKPD yang menggunakan metode perpetual, melakukan pencocokan dengan perhitungan fisik (*stock opname*). Apabila jumlah unit persediaan antara metode perpetual tidak sama dengan hasil perhitungan fisik maka diunggulkan pelaporan atas persediaan berdasarkan hasil perhitungan fisik (*stock opname*). Perbedaan jumlah unit persediaan dan sebab perbedaan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Metode Periodik, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK). Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan *stock opname* pada akhir periode. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

Beban persediaan diakui pada saat setiap pembelian persediaan. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional.

Selisih Persediaan

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik, sering terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil stock opname. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak.

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

4.2.13.2. Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga/rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.

Nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Persediaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dinilai dengan metode FIFO (*First In First Out*).

4.2.13.3. Penyajian dan Pengungkapan

Persediaan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi persediaan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan persediaan adalah:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- c. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

4.2.14. Investasi

Investasi diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4.7 Klasifikasi Investasi

Kode Rekening	Uraian		Kewenangan	
			SKPD	SKPKD
1.1.2	Investasi Jangka Pendek	Investasi dalam Deposito	-	√
		Investasi Jangka Pendek BLUD	-	√
		Investasi Jangka Pendek Lainnya	-	√
1.2.1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	-	√
		Investasi kepada Badan Usaha Milik Swasta	-	√
		Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	√
		Dana Bergulir	-	√
		Deposito Jangka Panjang	-	√
1.2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen	Penyertaan Modal Kepada BUMD	-	√
		Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Swasta	-	√
		Investasi Permanen Lainnya	-	√

Investasi diklasifikasikan berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

a. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi jangka pendek biasanya beresiko rendah. Investasi Jangka Pendek berbeda dengan Kas dan Setara Kas. Suatu investasi masuk klasifikasi Kas dan Setara Kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi jangka panjang non permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

2) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

4.2.14.1. Pengakuan Investasi

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Memungkinkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memperoleh manfaat ekonomis dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

4.2.14.2. Pengukuran

Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasi adalah sebagai berikut:

a. Pengukuran investasi jangka pendek:

- 1) Investasi dalam bentuk surat berharga:

- a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
 - b) Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
- 2) Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 (enam) bulan.
- b. Pengukuran investasi jangka panjang:
 - 1) Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
 - 2) Investasi non permanen:
 - a) Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - b) Investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - c) Penanaman modal di proyek-proyek pembangunan dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- c. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- d. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Penilaian investasi dilakukan dengan tiga metode berdasarkan kriteria tertentu, sebagai berikut:

Tabel 4.8 Metode Penilaian Investasi berdasarkan kriteria tertentu

No.	Metode	Kriteria
a.	Metode biaya	Kepemilikan kurang dari 20%
b.	Metode ekuitas	Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan
		Kepemilikan lebih dari 50%
c.	Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan	Kepemilikan bersifat non permanen

- a. Metode biaya

Investasi yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
- b. Metode ekuitas

Investasi yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentasi kepemilikan setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
- c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
- d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

4.2.14.3. Pengakuan Hasil Investasi

Hasil investasi berupa bagian laba yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode ekuitas, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan operasional dan penambah nilai investasi pemerintah pada neraca. Dividen tunai diakui sebagai piutang dividen dan pengurang investasi pemerintah pada saat diumumkan dalam RUPS. Dividen tunai yang telah diterima pemerintah akan mengurangi piutang dividen. Penerimaan dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dalam laporan realisasi anggaran. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak menambah nilai investasi pemerintah, sehingga tidak diakui sebagai pendapatan. Dividen dalam bentuk saham yang diterima akan diungkap dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2.14.4. Pelepasan Investasi

Pelepasan aset investasi pemerintah dapat berbentuk penjualan aset investasi, pertukaran dengan aset lain, kompensasi utang pemerintah, hibah dan donasi, pembebasan utang bagi penerbit efek obligasi, dan lain sebagainya.

Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya diakui sebagai surplus/defisit pelepasan investasi. Surplus/defisit pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.

4.2.14.5. Penyajian dan Pengungkapan

Investasi jangka pendek disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi investasi.

Investasi jangka panjang disajikan dalam neraca sebagai bagian dari investasi jangka panjang yang kemudian dibagi ke dalam investasi nonpermanen dan investasi permanen sesuai klasifikasi investasi.

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- b. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
- c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- f. Rekonsiliasi nilai investasi awal dan akhir atas investasi dengan metode ekuitas;
- g. Investasi yang disajikan dengan nilai nihil dan bagian akumulasi rugi yang melebihi nilai investasi;
- h. Kewajiban yang timbul dari bagian akumulasi rugi yang melebihi nilai investasi dalam hal pemerintah memiliki tanggung jawab hukum;
- i. Perubahan klasifikasi pos investasi;
- j. Perubahan porsi kepemilikan atau pengaruh signifikan yang mengakibatkan perubahan metode akuntansi.

4.2.15. Aset Tetap

4.2.15.1. Aset Tetap

Aset Tetap diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4.9 Klasifikasi Aset Tetap

Kode Rekening	Uraian Akun		Kewenangan	
			SKPD	SKPKD
1.3.1	Tanah	Tanah Persil	√	-
		Tanah Non Persil	√	-
		Lapangan	√	-
1.3.2	Peralatan dan Mesin	Alat Besar	√	-
		Alat Angkutan	√	-
		Alat Bengkel dan Alat Ukur	√	-
		Dst...	√	-
1.3.3	Gedung dan Bangunan	Bangunan Gedung	√	-
		Monumen	√	-
		Bangunan Menara	√	-
		Dst...	√	-
1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Jalan dan Jembatan	√	-
		Bangunan Air Irigasi	√	-
		Instalasi	√	-
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	Bahan Perpustakaan	√	-
		Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	√	-
		Hewan	√	-
		Dst...	√	-
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	√	-
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	√	-
		Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	√	-
		Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	√	-
		Dst...	√	-

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan dalam kondisi siap pakai.

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Jalan, Irigasi dan Jaringan mencakup Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, hewan, ikan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap-Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan, namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan pada pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatat.

Penyusutan merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

4.2.15.1.1. Pengakuan

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

Apabila Aset Tetap berasal dari pembelian/pengadaan (APBD), maka pengakuan aset tersebut diakui pada saat telah ada berita acara serah terima atau dokumen lain yang dipersamakan.

Apabila Aset Tetap berasal dari pihak ketiga (lembaga/pemerintah lainnya) aset diakui pada saat ada berita acara penyerahan aset dan adanya berita acara pemeriksaan fisik oleh tim pemeriksa aset.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi semua kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. Tidak dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga;
- f. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- g. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- h. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10 Batasan Minimal Kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Kode Rekening	Uraian	Unit	Batasan Minimal Kapitalisasi
1.3.1	Tanah	unit	Rp 1,-
1.3.2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.01	Alat Besar		
	- Alat Besar Darat	unit	Rp 1.000.000,00
	- Alat Besar Apung	unit	Rp 1.000.000,00
	- Alat Bantu	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.02	Alat Angkutan		

Kode Rekening	Uraian	Unit	Batasan Minimal Kapitalisasi
	- Alat Angkutan Darat Bermotor	unit	Rp 1.000.000,00
	- Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	unit	Rp 1.000.000,00
	- Alat Angkutan Apung Bermotor	unit	Rp 1.000.000,00
	- Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	unit	Rp 1.000.000,00
	- Alat Angkutan Bermotor Udara	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.04	Alat Pertanian	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.08	Alat Laboratorium	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.09	Alat Persenjataan	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.10	Komputer	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.11	Alat eksplorasi	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.12	Alat Pengeboran	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.14	Alat Bantu Eksplorasi	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.15	Alat Keselamatan Kerja	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.16	Alat Peraga	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.17	Peralatan Proses/Produksi	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.18	Rambu-rambu	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.19	Peralatan Olahraga	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:		
1.3.3.01	Bangunan Gedung	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.3.02	Monumen	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.3.03	Bangunan Menara	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.3.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang terdiri atas:		
1.3.4.01	Jalan dan Jembatan	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.4.02	Bangunan Air	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.4.03	Instalasi	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.4.04	Jaringan	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:		
1.3.5.01	Bahan Perpustakaan	-	Rp 1,-
1.3.5.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	-	Rp 1,-
1.3.5.03	Hewan	-	Rp 1,-
1.3.5.04	Biota Perairan	-	Rp 1,-
1.3.5.05	Tanaman	-	Rp 1,-
1.3.5.06	Barang Koleksi Non Budaya	-	Rp 1,-
1.3.5.07	Aset Tetap Dalam Renovasi	-	Rp 20.000.000,00

Pengeluaran belanja modal yang tidak memenuhi batasan minimal kapitalisasi di atas dicatat sebagai aset *extracomptable*, tidak disajikan dalam neraca namun diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hasil dari perkembangbiakan hewan, ikan dan tanaman tidak disajikan di neraca tetapi dicatat sebagai aset *extracomptable*. Apabila hasil dari perkembangbiakan tersebut akan diserahkan kepada masyarakat, pencatatan atas hasil perkembangbiakan tersebut diakui sebagai persediaan.

Catatan dalam *extracomptable* berfungsi sebagai media pengendali.

Tanah

Tanah dapat diperoleh melalui pembelian, pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya.

Tanah yang digunakan/dipakai oleh instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang berstatus tanah wakaf tidak disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, melainkan cukup diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Terkait dengan kasus-kasus kepemilikan tanah dan penyajiannya dalam laporan keuangan.

- a. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Dalam hal tanah dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
- c. Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- d. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
 - 1) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 2) Dalam hal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 3) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 4) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin dapat diperoleh melalui pembelian, pembangunan, pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya.

Pengakuan Peralatan dan Mesin dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan, dan/atau bukti pembelian.

Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dapat diperoleh melalui pembelian, pembangunan, pertukaran aset, hibah/donasi dan lainnya.

Perolehan Gedung dan Bangunan yang belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian gedung kantor yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan bukti kepemilikannya di instansi berwenang, maka Gedung dan Bangunan tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas Gedung dan Bangunan tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas bangunan.

Gedung dan bangunan tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan Gedung dan Bangunan yang ada di atasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok tanah.

Gedung bertingkat terdiri dari komponen bangunan fisik, komponen penunjang utama yang berupa *mechanical engineering* (*lift*, instalasi listrik beserta generator, dan sarana pendingin *air conditioning*), dan komponen penunjang yang lain berupa saluran air dan telpon. *Air conditioning* dimaksudkan disini adalah berupa bangunan yang didalamnya berisi peralatan-peralatan *central air conditioning*.

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat diperoleh melalui pembelian, pembangunan, hibah/donasi, dan lainnya.

Jalan, Irigasi dan Jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.

Jalan, Irigasi dan Jaringan tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang ada di atasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok tanah.

Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya, selain Aset Tetap-Renovasi, pada umumnya diperoleh melalui pembelian atau perolehan lain seperti hibah/donasi.

Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.

Khusus mengenai pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik, dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomis aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomis, maka dianggap sebagai Belanja Operasional. Aset Tetap-Renovasi diklasifikasikan ke dalam Aset Tetap Lainnya.
- b. Apabila manfaat ekonomis renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir (a) di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomis renovasi kurang dari 1 (satu) tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Belanja Operasional tahun berjalan.

- c. Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut cukup material, dan memenuhi syarat butir (a) dan (b) di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap–Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai Belanja Operasional.

4.2.15.1.2. Pengukuran

Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Komponen biaya perolehan Aset Tetap adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11 Komponen Biaya Perolehan Aset Tetap	
Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	Biaya perolehan tanah meliputi biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya perolehan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, pembongkaran dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.
	Perolehan tanah yang dilakukan oleh panitia pengadaan, termasuk dalam harga perolehan tanah tersebut adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.
Peralatan dan Mesin	Biaya perolehan peralatan dan mesin meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
Gedung dan Bangunan	Biaya perolehan Gedung dan Bangunan melalui swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk perencanaan, pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya seperti biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
	Biaya perolehan Gedung dan Bangunan melalui kontrak konstruksi meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan, pengawasan, perizinan, jasa konsultan dan pajak.
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Biaya perolehan atau biaya konstruksi jalan irigasi dan jaringan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya konsultan, biaya pembongkaran diatas tanah yang diperuntukkan untuk pembangunan jalan dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut siap pakai.
Aset Tetap Lainnya	Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai Aset Tetap Lainnya tersebut siap digunakan.
	Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan, pengawasan, sewa peralatan, biaya perizinan, jasa konsultan dan pajak.
	Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan, pengawasan, biaya perizinan dan pajak.

Tanah

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Aset tetap berupa tanah, seluruh nilai perolehannya dikapitalisasi sebagai nilai tanah.

Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut.

Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi SHM, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

Peralatan dan Mesin

Pengukuran peralatan dan mesin berdasarkan harga perolehan. Apabila penilaian peralatan dan mesin dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai peralatan dan mesin didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Pengukuran Peralatan dan Mesin harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap peralatan dan mesin.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal, nilai wajar untuk peralatan dan mesin adalah harga perolehan jika peralatan dan mesin tersebut dibeli setahun atau kurang dari tanggal neraca awal atau membandingkannya dengan harga pasar peralatan dan mesin sejenis dan dalam kondisi yang sama. Apabila harga pasar tidak tersedia maka digunakan nilai dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten (*appraisal*) dengan memperhitungkan faktor penyusutan. Jika hal tersebut terlalu mahal biayanya dan memakan waktu lama karena tingkat kerumitan perhitungan yang tinggi maka dapat dipakai standar harga yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan memakai perhitungan teknis.

Gedung dan Bangunan

Pengukuran Gedung dan Bangunan berdasarkan harga perolehan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Gedung dan Bangunan didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Pengukuran Gedung dan Bangunan harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap Gedung dan Bangunan.

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Pengukuran Jalan, Irigasi dan Jaringan berdasarkan harga perolehan. Apabila penilaian Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Pengukuran Jalan, Irigasi dan Jaringan harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Aset Tetap Lainnya

Pengukuran Aset Tetap Lainnya berdasarkan harga perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap Lainnya dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap Lainnya didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Pengukuran Aset Tetap Lainnya harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap lainnya.

Komponen Dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Perolehan secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Pertukaran Aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan persyaratan kewajibannya kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Pengeluaran setelah Perolehan

Perolehan setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan (*carrying amount*). Pengeluaran lainnya yang timbul setelah perolehan awal (selain pengeluaran yang memberi nilai manfaat tersebut) diakui sebagai beban pengeluaran (*expenses*) pada periode dimana beban pengeluaran tersebut terjadi.

Pengeluaran setelah perolehan awal Aset Tetap, yang oleh karena bentuknya, atau lokasi penggunaannya memiliki risiko penurunan nilai dan/atau kuantitas, yang mengakibatkan ketidakpastian perolehan potensi ekonomi di masa depan, maka tidak dikapitalisasi melainkan diperlakukan sebagai biaya pemeliharaan (*expense*). Pengeluaran yang dikapitalisasi berupa penggantian utama merupakan pembaharuan bagian dari aset tetap atau nilai pemeliharaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.12 Nilai Pemeliharaan Aset Tetap

No.	Aset Tetap	Nilai Pemeliharaan
1	Peralatan dan Mesin	50% dari nilai perolehan
2	Gedung dan Bangunan	10% dari nilai perolehan
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	10% dari nilai perolehan

Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengakuan Awal

Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Penyusutan

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Metode penyusutan aset tetap yang dipergunakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah metode garis lurus (*straight line method*).

Aset Tetap yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya atau bahkan bertambah nilainya tidak perlu dilakukan penyusutan, yaitu aset tetap tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.

Dalam kondisi tertentu tanah pun dapat disusutkan apabila fisik tanah tersebut tidak ada lagi, terutama tanah yang berada disekitar aliran sungai/tepi pantai yang sudah abrasi.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Untuk penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

Perhitungan penyusutan aset tetap dimulai sejak tahun perolehan. Penyusutan dihitung secara bulanan meskipun baru diperoleh satu atau dua minggu atau bahkan satu hari.

Aset Tetap tidak diketahui tahun perolehannya, misalnya dikarenakan aset tetap tersebut merupakan aset lama yang baru terdata dan tercatat pada buku inventaris barang, maka belum dapat diperhitungkan penyusutannya namun harus diungkapkan di dalam CaLK.

Aset Tetap pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau diadakan untuk digunakan dalam kegiatan operasional, tidak dimaksudkan untuk dijual pada akhir masa manfaatnya serta tidak dimaksudkan dalam rangka penandingan antara biaya dengan pendapatan. Maka dalam hal ini nilai residu diabaikan dalam menghitung penyusutan meskipun terhadap suatu aset tetap dapat ditentukan nilai residunya.

Penyusutan Aset Tetap dapat dilakukan terhadap Aset Tetap secara individual atau terhadap sekelompok aset sekaligus. Aset Tetap yang dapat disusutkan secara berkelompok dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Aset tersebut diperoleh dalam waktu yang bersamaan dan mempunyai masa manfaat yang sama;
- b. Manfaat secara teknis suatu aset sangat bergantung pada aset lain (misalnya peralatan kesehatan kamera sinar x dan alat pencetakan film sinar x);
- c. Pembelian aset dilakukan secara berpasangan dan harga belinya merupakan keseluruhan harga pasangan (misalnya komputer dan perangkat lunaknya);
- d. Untuk kemudahan dan efisiensi biaya administrasi, beberapa aset dapat dikelompokkan karena kedekatan teknis dan konteks pemanfaatannya, meskipun pemanfaatannya tidak terlalu bergantung satu sama lain (misalnya peralatan bedah).

Apabila suatu aset tetap sudah disusutkan seluruh nilainya hingga nilai bukunya menjadi Rp.0,- namun secara teknis masih dapat dimanfaatkan, maka aset tersebut tetap disajikan dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya serta tetap dicatat dalam kelompok aset tetap yang bersangkutan.

Aset Tetap yang sudah disusutkan seluruh nilainya dapat dihapuskan jika telah mendapat izin penghapusbukuan dari pejabat yang berwenang. Apabila dikemudian hari aset tetap tersebut akan dilelang untuk memberi pemasukan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, maka rencana pelelangan dicantumkan dalam anggaran dan realisasinya dicatat sebagai Pendapatan Provinsi Kepulauan Riau.

Perkiraan masa manfaat untuk setiap Aset Tetap adalah sebagai berikut:

Tabel 4.13 Perkiraan Masa Manfaat Aset Tetap

Kodefikasi						Uraian	Masa Manfaat
1	3					ASET TETAP	
1	3	2				Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01			Alat Besar	
1	3	2	01	01		Alat Besar Darat	10
1	3	2	01	02		Alat Besar Apung	8
1	3	2	01	03		Alat Bantu	7
1	3	2	02			Alat Angkutan	
1	3	2	02	01		Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	02	02		Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
1	3	2	02	03		Alat Angkutan Apung Bermotor	10
1	3	2	02	04		Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	02	05		Alat Angkutan Bermotor Udara	20
1	3	2	03			Alat Bengkel dan Alat Ukur	
1	3	2	03	01		Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	03	02		Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	03	03		Alat Ukur	5
1	3	2	04			Alat Pertanian	
1	3	2	04	01		Alat Pengolahan	4
1	3	2	05			Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1	3	2	05	01		Alat Kantor	5
1	3	2	05	02		Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	05	03		Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	06			Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	
1	3	2	06	01		Alat Studio	5
1	3	2	06	02		Alat Komunikasi	5
1	3	2	06	03		Peralatan Pemancar	10
1	3	2	06	04		Peralatan Komunikasi Navigasi	10
1	3	2	07			Alat Kedokteran dan Kesehatan	
1	3	2	07	01		Alat Kedokteran	5
1	3	2	07	01	29	Alat Kedokteran Lainnya	10
1	3	2	07	02		Alat Kesehatan Umum	5
1	3	2	08			Alat Laboratorium	
1	3	2	08	01		Unit Alat Laboratorium	8
1	3	2	08	02		Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	08	03		Alat Peraga Praktik Sekolah	10
1	3	2	08	04		Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
1	3	2	08	05		Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	08	06		Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	10
1	3	2	08	07		Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7

Kodefikasi						Uraian	Masa Manfaat
1	3	2	08	08		Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	15
1	3	2	08	09		Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	8
1	3	2	09			Alat Persenjataan	
1	3	2	09	01		Senjata Api	10
1	3	2	09	02		Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	09	02	02	Non Senjata Api	5
1	3	2	09	03		Senjata Sinar	10
1	3	2	09	04		Alat Khusus Kepolisian	3
1	3	2	10			Komputer	
1	3	2	10	01		Komputer Unit	4
1	3	2	10	02		Peralatan Komputer	4
1	3	2	11			Alat eksplorasi	
1	3	2	11	01		Alat Eksplorasi Topografi	5
1	3	2	11	02		Alat Eksplorasi Geofisika	5
1	3	2	12			Alat Pengeboran	
1	3	2	12	01		Alat Pengeboran Mesin	5
1	3	2	12	02		Alat Pengeboran Non Mesin	5
1	3	2	13			Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	
1	3	2	13	01		Sumur	4
1	3	2	13	02		Produksi	4
1	3	2	13	03		Pengolahan dan Pemurnian	5
1	3	2	14			Alat Bantu Eksplorasi	
1	3	2	14	01		Alat Bantu Eksplorasi	5
1	3	2	14	02		Alat Bantu Produksi	5
1	3	2	15			Alat Keselamatan Kerja	
1	3	2	15	01		Alat Deteksi	4
1	3	2	15	02		Alat Pelindung	4
1	3	2	15	03		Alat SAR	4
1	3	2	15	04		Alat Kerja Penerbangan	5
1	3	2	16			Alat Peraga	
1	3	2	16	01		Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	4
1	3	2	17			Peralatan Proses/Produksi	
1	3	2	17	01		Unit Peralatan Proses/Produksi	4
1	3	2	18			Rambu-rambu	
1	3	2	18	01		Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	7
1	3	2	18	02		Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	7
1	3	2	18	03		Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	7
1	3	2	19			Peralatan Olahraga	
1	3	2	19	01		Peralatan Olahraga	4
1	3	3				Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01			Bangunan Gedung	
1	3	3	01	01		Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	01	02		Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	02			Monumen	
1	3	3	02	01		Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50

Kodefikasi						Uraian	Masa Manfaat
1	3	3	03			Bangunan Menara	
1	3	3	03	01		Bangunan Menara Perambuan	40
1	3	3	04			Tugu Titik Kontrol/Pasti	
1	3	3	04	01		Tugu/Tanda Batas	50
1	3	4				Jalan, Irigasi dan Jaringan	
1	3	4	01			Jalan dan Jembatan	
1	3	4	01	01		Jalan	10
1	3	4	01	02		Jembatan	50
1	3	4	02			Bangunan Air	
1	3	4	02	01		Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	02	02		Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1	3	4	02	03		Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25
1	3	4	02	04		Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	02	05		Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	02	06		Bangunan Air Bersih/Air Baku	40
1	3	4	02	07		Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	03			Instalasi	
1	3	4	03	01		Instalasi Air Bersih/Air Baku	30
1	3	4	03	02		Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	03	03		Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	03	04		Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	03	05		Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	03	06		Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	03	08		Instalasi Gas	30
1	3	4	03	09		Instalasi Pengaman	20
1	3	4	03	10		Instalasi Lain	20
1	3	4	04			Jaringan	
1	3	4	04	01		Jaringan Air Minum	30
1	3	4	04	02		Jaringan Listrik	40
1	3	4	04	03		Jaringan Telepon	20
1	3	4	04	04		Jaringan Gas	30

Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah pusat yang berlaku secara nasional.

Dalam hal ini laporan keuangan menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas.

Aset Bersejarah

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Kebijakan ini tidak mengharuskan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca namun aset tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Penghentian dan Pelepasan

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Apabila suatu aset tidak dapat digunakan lagi secara permanen dikarenakan berbagai alasan namun masih memiliki masa manfaat, maka aset tersebut dapat dipindahkan ke dalam kelompok Aset Lain- Lain sesuai dengan nilai tercatatnya. Namun apabila suatu aset tidak dapat digunakan sementara maka aset tersebut tidak dipindahkan ke dalam kelompok Aset Lain-lain.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kerugian penghentian aset tetap dibebankan pada defisit dari kegiatan non operasional.

Nilai pelepasan aset tetap dicatat sebagai lain-lain PAD yang sah.

Pelepasan untuk hewan dapat dilakukan jika hewan tersebut mati, dijual, tukar menukar dan hilang yang disertai berita acara.

Dokumen sumber pencatatan pelepasan aset tetap mengikuti ketentuan Peraturan Gubernur yang mengatur Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Aset tetap yang dilepaskan melalui penjualan, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan risalah lelang dan SK Penghapusan atau dokumen penjualan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

Aset tetap yang dihibahkan, dikeluarkan dari neraca pada saat telah diterbitkan berita acara serah terima hibah oleh entitas sebagai tindak lanjut persetujuan hibah.

Aset tetap yang dipindahtangankan melalui mekanisme penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dikeluarkan dari aset tetap pada saat diterbitkan penetapan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan/atau Berita Acara Serah Terima. Apabila terdapat perbedaan waktu antara penetapan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan berita acara serah terima, maka pada saat aset tetap dinyatakan sebagai penyertaan modal, entitas melakukan reklasifikasi aset tetap tersebut menjadi aset lainnya (aset tetap masih dalam proses penyertaan modal).

Dalam hal pelepasan aset tetap merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku aset tetap yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku aset tetap terkait diperlakukan sebagai surplus/defisit penjualan/pertukaran aset non lancar dan disajikan pada Laporan Operasional (LO). Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai lain-lain PAD yang sah dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Apabila pelepasan suatu aset tetap akibat dari proses pemindahtanganan berupa hibah atau penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, maka akun aset tetap dikurangkan dari pembukuan sebesar nilai buku dan disisi lain diakui adanya beban hibah, atau diakui adanya investasi jika menjadi penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Aset tetap hilang dikeluarkan dari neraca sebesar nilai buku. Dan dicatat ke dalam Surplus/defisit dari kegiatan non operasional.

4.2.15.1.3. Penyajian dan Pengungkapan

Aset Tetap disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset sesuai klasifikasi aset tetap.

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan;
 - 2) Pelepasan;
 - 3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - 4) Mutasi aset tetap lainnya.
- c. Informasi penyusutan, meliputi:
 - 1) Nilai penyusutan;
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
- d. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - 1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - 2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - 3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
 - 4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
- e. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-hal berikut harus diungkapkan:
 - 1) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
 - 2) Tanggal efektif penilaian kembali;
 - 3) Jika ada, nama penilai independen;
 - 4) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
 - 5) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.
- f. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

4.2.15.2. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4.14 Klasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Kode Rekening	Uraian Akun		Kewenangan	
			SKPD	SKPKD
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Tanah Dalam Pengerjaan	√	-
		Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	√	-
		Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	√	-
		Jalan, Irigasi dan Jaringan Dalam Pengerjaan	√	-
		Aset Tetap Lainnya Dalam Pengerjaan	√	-

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

4.2.15.2.1. Pengakuan

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan, direpresentasikan dengan dokumen berita acara serah terima (BAST) atau dokumen sejenis dengan mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa; dan
- b. dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

4.2.15.2.2. Pengukuran

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan, yaitu dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun. Untuk keperluan neraca awal, dokumen sumber untuk mencatat nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan ini adalah akumulasi seluruh nilai SP2D yang telah dikeluarkan untuk aset tetap yang bersangkutan sampai dengan tanggal neraca.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- c. biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- a. biaya pekerja lapangan termasuk penyedia;
- b. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- c. biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
- d. biaya penyewaan sarana dan peralatan;
- e. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:

- a. asuransi;
- b. biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
- c. biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi, yang dialokasikan dengan menggunakan metode sistematis dan rasional.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
- c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure*, maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi *force majeure* atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi *force majeure*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

4.2.15.2.3. Penyajian dan Pengungkapan

Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset tetap.

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

- a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
- c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
- d. Uang muka kerja yang diberikan;
- e. Retensi.

Apabila Konstruksi Dalam Pengerjaan tidak dilanjutkan (dihentikan sementara atau akan dihentikan permanen) harus diungkapkan dalam CaLK. Jika penanggung jawab aset (dalam hal ini adalah Gubernur) mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan pembangunan tersebut secara permanen, maka harus diterbitkan surat keputusan Gubernur terkait penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

4.2.16. Dana Cadangan

Dana cadangan diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4.15 Dana Cadangan

Kode Rekening	Uraian		Kewenangan	
			SKPD	SKPKD
1.4.1.01	Dana Cadangan	Dana Cadangan Pembangunan Jembatan	-	√
		Dana Cadangan Pembangunan Gedung	-	√
		Dana Cadangan Pembangunan Waduk	-	√
		Dana Cadangan Penyelenggaraan Pilkada	-	√

Kode Rekening	Uraian		Kewenangan	
			SKPD	SKPKD
		Dana Cadangan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON)	-	√
		Dst....	-	√

Tabel 4.16 Penerimaan Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

Kode Rekening		Uraian		Kewenangan	
LRA	LO			SKPD	SKPKD
4.1.4.05	7.1.4.05	Penerimaan Jasa Giro	Penerimaan Jasa Giro Dana Cadangan....	-	√

4.2.16.1. Pengakuan

Dana cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau ke Rekening Dana Cadangan yang ditandai dengan dikeluarkannya SP2D.

Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang didalamnya mencakup:

- a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
- d. Sumber dana cadangan; dan
- e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- f. Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan.
- g. Pencairan Dana Cadangan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan.

Penggunaan Dana Cadangan dianggarkan pada program kegiatan yang sudah direncanakan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

4.2.16.2. Pengukuran

Pembentukan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal. Pencairan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal. Hasil pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal.

4.2.16.3. Penyajian dan Pengungkapan

Dana Cadangan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset.

Penerimaan hasil pengelolaan dana cadangan berupa jasa giro/bagi hasil diperlakukan sebagai penambah dana cadangan dan dikapitalisasi ke dana cadangan.

Penerimaan hasil pengelolaan dana cadangan dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain PAD yang Sah-jasa giro/bagi hasil dana cadangan, dan dicatat sebagai Pendapatan-LO dalam pos Lain-lain PAD yang Sah- jasa giro/bagi hasil dana cadangan.

Pengungkapan dana cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dasar hukum (Perda) pembentukan dana cadangan;
- b. Tujuan pembentukan dana cadangan;
- c. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- d. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
- e. Sumber dana cadangan; dan
- f. Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.

4.2.17. Aset Lainnya

Aset Lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4.17 Klasifikasi Aset Lainnya

Kode Rekening	Uraian		Kewenangan	
			SKPD	SKPKD
1.5.1	Tagihan Jangka Panjang	Tagihan Penjualan Angsuran	√	√
		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	√	√
1.5.2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Sewa	√	√
		Kerjasama Pemanfaatan	√	√
		Bangun Guna Serah	√	√
		Bangun Serah Guna	√	√
1.5.3	Aset Tidak Berwujud	Goodwill	√	-
		Lisensi dan Frenchise	√	-
		Hak Cipta	√	-
		Paten	√	-
		Aset Tidak Berwujud Lainnya	√	-
		Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	√	-
1.5.4	Aset Lain-lain	Aset Lain-Lain	√	√

4.2.17.1. Pengakuan

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

- a. Tagihan Jangka Panjang
 - 1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan dinas dan penjualan rumah golongan III.
 - 2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).
- b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

 - 1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga – Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.
 - 2) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. KSP diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya-KSP.

- 3) Bangun Guna Serah – BGS(*Build, Operate, Transfer* – BOT)
Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk Kerjasama berupa pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak. BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
 - 4) Bangun Serah Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate* – BTO)
Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/ dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau disertai dengan kewajiban Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.
- c. Aset Tidak Berwujud (ATB)
- Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:
- 1) *Goodwill*
Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.
 - 2) Hak Paten atau Hak Cipta
Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.
 - 3) Royalti
Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.
 - 4) *Software*
Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas *software* berkenaan.
 - 5) Lisensi
Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu hak kekayaan intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

- 6) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang
Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.
- 7) Aset Tak Berwujud Lainnya
Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.
- 8) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan
Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.
Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:
 - 1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atau dinikmati oleh entitas; dan
 - 2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- d. Aset Lain-Lain
 - 1) Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.
 - 2) Kas Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah.
 - 3) Piutang yang timbul dari kegiatan yang pengakuannya tidak dapat diklasifikasikan pada piutang pajak, piutang restribusi maupun piutang lainnya.

4.2.17.2. Pengukuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

Tuntutan ganti rugi kerugian daerah dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

- a. Sewa
Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
- b. Kerjasama Pemanfaatan (KSP)
Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
- c. Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)
BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.
- d. Bangun Serah Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)

BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

Aset Tidak Berwujud

Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tersebut. Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:

- a. Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - 1) biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - 2) biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - 3) biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

- a. Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
- b. Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
- c. Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
- d. Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

Aset Lain-lain

- a. Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.
- b. Kas Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah, diukur menurut saldo deposito ditambah dengan pendapatan bunga atas deposito tersebut.
- c. Piutang yang timbul dari kegiatan yang pengakuannya tidak dapat diklasifikasikan pada piutang pajak, piutang restribusi maupun piutang lainnya, disajikan sebesar nilai nominal yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

4.2.17.3. Amortisasi

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tidak terbatas akan di amortisasi sebesar nilai Perolehannya pada saat Aset tersebut tidak memberi manfaat dalam Operasional entitas.

Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode.

Aset Tak Berwujud berupa Kajian dihitung amortisasinya berdasarkan periode manfaat pada dokumen kajian tersebut.

4.2.17.4. Penyajian dan Pengungkapan

Aset Lainnya disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset sesuai klasifikasi aset lainnya.

Pengungkapan Aset Lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Besaran dan rincian aset lainnya;
- b. Kebijakan amortisasi atas aset tidak berwujud;
- c. Informasi lainnya yang penting.

4.2.18. Aset Konsesi Jasa

4.2.18.1. Pengakuan dan Pengukuran Aset Konsesi Jasa

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila:

- a. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya; dan
- b. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi.

Aset yang digunakan dalam perjanjian konsesi jasa adalah selama masa manfaat/umur aset tersebut.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan pengukuran awal perolehan atas aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra selama umur aset sebesar nilai wajar, kecuali atas aset yang dimiliki Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Apabila Aset yang dimiliki Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memenuhi kondisi persyaratan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan reklasifikasi aset yang dipartisipasikannya sebagai aset konsesi jasa. Reklasifikasi aset dimaksud diukur dengan menggunakan nilai tercatat aset.

Perolehan awal komponen aset konsesi jasa dalam suatu perjanjian konsesi jasa yang memiliki sifat atau fungsi yang sama dalam penyediaan jasa pelayanan publik oleh mitra dicatat sebagai satu jenis aset tersendiri dimana dapat terbentuk dari satu atau beberapa jenis kelompok aset.

Suatu konstruksi aset yang dijelaskan secara terpisah dalam kelompok aset tetap akan dijelaskan sebagai satu kesatuan komponen aset konsesi jasa untuk penyediaan jasa layanan publik sesuai dengan perjanjian konsesi jasanya.

Komponen aset konsesi jasa disusutkan atau diamortisasi secara sistematis selama umur ekonomi teknis aset tersebut, dan tidak dibatasi oleh masa konsesi sesuai perjanjian konsesi jasa.

Pada akhir masa konsesi jasa, aset konsesi jasa direklasifikasi ke dalam jenis kelompok aset berdasarkan sifat atau fungsi aset.

Reklasifikasi aset diukur menggunakan nilai tercatat aset.

4.2.18.2. Pengakuan dan Pengukuran Kewajiban

Pada saat pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengakui aset konsesi jasa, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga mengakui kewajiban.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak mengakui kewajiban atas aset konsesi jasa yang berasal dari reklasifikasi asetnya, kecuali jika terdapat tambahan imbalan yang disediakan oleh mitra.

Pengakuan kewajiban pada awalnya diukur sebesar nilai yang sama dengan nilai aset konsesi jasa, kemudian disesuaikan dengan nilai imbalan yang dialihkan dari Pemerintah Kepulauan Riau kepada mitra, atau dari mitra kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Sifat kewajiban yang diakui ditentukan berdasarkan sifat imbalan yang dipertukarkan antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan mitra. Sifat imbalan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada mitra ditentukan dengan mengacu kepada syarat peraturan atau perjanjian yang mengikat dan/atau hukum perjanjian yang relevan.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa sebagai bentuk pertukaran, melalui skema atau skema kombinasi dari:

- a. Pembayaran kepada mitra atau skema kewajiban keuangan (*financial liability model*);
- b. Pemberian hak usaha kepada mitra (*grant of a right to the operator model*), misalnya:
 - (i) Pemberian hak kepada mitra untuk memperoleh pendapatan dari para pengguna jasa aset konsesi jasa; atau
 - (ii) Pemberian hak kepada mitra untuk menggunakan aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, misalnya pengelolaan fasilitas parkir berbayar yang berdekatan dengan fasilitas penyediaan jasa pelayanan publik; atau pemanfaatan lahan untuk jasa periklanan atau fasilitas komersial lainnya yang tidak berhubungan dengan penyelenggaraan jasa layanan publik.

4.2.18.3. Skema Kewajiban Keuangan

Dalam hal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengakui kewajiban.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas, jika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menjamin untuk membayar kepada mitra terhadap:

- a. Jumlah tertentu atau dapat ditentukan; atau
- b. Jika ada kekurangan antara jumlah yang diterima mitra dari para pengguna jasa layanan publik dan jumlah tertentu tergantung pada adanya kepastian dari mitra bahwa aset konsesi jasa telah memenuhi persyaratan kualitas/kuantitas/efisiensi.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalokasikan pembayaran kepada mitra dan mengakui pembayarannya berdasarkan substansi pembayaran sebagai:

- a. pengurang nilai pengakuan kewajiban;
- b. bagian tagihan atas biaya keuangan; dan
- c. bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra.

Bagian untuk tagihan atas biaya keuangan dan bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik sesuai maksud perjanjian konsesi jasa, diakui sebagai beban pada Laporan Operasional.

Ketika komponen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik yang diatur dalam perjanjian konsesi jasa dapat diidentifikasi secara terpisah maka komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada mitra dialokasikan dengan mengacu pada nilai wajar relatif atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik.

Ketika komponen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik tidak dapat diidentifikasi secara terpisah maka komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada mitra ditentukan dengan estimasi/perkiraan sebesar nilai wajar.

4.2.18.4. Skema Pemberian Hak Usaha Kepada Mitra

Dalam hal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan dengan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, dan memberikan hak kepada mitra untuk memungut pendapatan dari pihak ketiga atas penggunaan aset konsesi jasa atau pengelolaan aset selain aset konsesi jasa, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat pengakuan kewajiban sebagai bagian tanggungan dari pendapatan yang timbul dari pertukaran aset antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan mitra.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengakui pendapatan dan mengurangi kewajiban (pendapatan tanggungan) berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa.

Pada saat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik, berupa pemberian hak untuk memungut pendapatan dari pengguna aset konsesi jasa atau mengelola aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, maka pertukaran dimaksud merupakan transaksi yang menimbulkan pendapatan.

Pada saat hak diberikan kepada mitra berlaku selama masa konsesi, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak secara langsung mengakui pendapatan dari pertukaran. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengakui bagian atas pendapatan yang belum terealisasi atau yang masih ditangguhkan sebagai kewajiban. Pendapatan diakui berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa, dan mengurangi kewajiban - pendapatan tanggungan.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan skema pemberian hak usaha kepada mitra dalam hal pembayaran sehubungan pemakaian aset konsesi jasa dimana jasa publik tersebut dinikmati oleh pihak ketiga atau masyarakat maka pembayaran tersebut merupakan transaksi imbal balik atas pertukaran untuk pemakaian aset konsesi jasa dan bukan berkaitan dengan perolehan aset konsesi jasa ataupun pengurang nilai kewajiban – pendapatan tanggungan.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memberikan imbalan berupa pembayaran kepada mitra atas penggunaan layanan jasa publik dari pemakaian aset konsesi jasa yang diakui sebagai beban dalam Laporan Operasional.

4.2.18.5. Membagi Perjanjian

Apabila dalam perjanjian konsesi jasa mengatur bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau membayar atas biaya pembangunan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, sebagian melalui skema kewajiban keuangan dan sebagian melalui skema pemberian hak usaha kepada mitra maka atas jumlah keseluruhan pengakuan kewajiban yang timbul diperlakukan secara terpisah untuk masing-masing skema. Nilai awal pengakuan untuk keseluruhan kewajiban tersebut adalah sama dengan jumlah kewajiban yang diukur.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat kewajiban berdasarkan masing-masing skema.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat kewajiban lainnya, komitmen, kewajiban kontinjensi serta aset kontinjensi yang timbul dari perjanjian konsesi jasa.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat pendapatan lainnya selain dari pendapatan diatas berpedoman pada standar akuntansi mengenai pendapatan dari transaksi pertukaran.

4.2.18.6. Penyajian dan Pengungkapan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat seluruh aspek perjanjian konsensi jasa dengan pengungkapan yang memadai dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemberi jasa/mitra menyampaikan laporan berupa informasi terkait dengan perjanjian konsensi jasa pada setiap periode pelaporan. Informasi yang diberikan berupa:

- a. Deskripsi perjanjian, kontrak, atau perikatan yang dipersamakan sehubungan perjanjian konsesi jasa;
- b. Ketentuan yang signifikan dalam perjanjian konsesi jasa yang dapat memengaruhi jumlah atau nilai, periode waktu, dan kepastian aliran kas di masa depan (misalnya masa konsesi, tanggal penentuan ulang harga/tarif, dan dasar penentuan ulang harga/tarif atau negosiasi ulang).
- c. Sifat dan tingkat (misalnya kuantitas, jangka waktu, atau nilai) dari:
 - (i) Hak untuk menggunakan aset yang ditentukan;
 - (ii) Hak yang mengharuskan mitra menyediakan jasa publik yang ditentukan dalam pelaksanaan perjanjian konsesi jasa;
 - (iii) Nilai buku aset konsesi jasa yang masih diakui pada tanggal laporan keuangan, termasuk aset milik pemberi konsesi yang direklasifikasi sebagai aset konsesi jasa;
 - (iv) Hak untuk menerima aset yang ditentukan di akhir masa perjanjian konsesi jasa;
 - (v) Opsi pembaharuan atau perpanjangan dan penghentian operasi konsesi jasa;
 - (vi) Ketentuan hak dan tanggung jawab lainnya, misalnya perbaikan besar komponen utama aset konsesi jasa (*overhaul*);
 - (vii) Ketentuan pemberian izin atau akses bagi mitra terhadap aset konsesi jasa atau aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan; dan
- d. Perubahan dalam perjanjian konsesi jasa yang terjadi pada periode laporan keuangan tahun berjalan.

Pengungkapan disajikan secara individual untuk setiap perjanjian konsesi jasa atau disajikan secara keseluruhan untuk setiap kelompok perjanjian konsesi jasa.

4.2.19. Properti Investasi

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat memiliki properti yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk peningkatan nilai. Misalnya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengelola portofolio properti berdasarkan basis komersial, baik untuk digunakan sendiri atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat juga memiliki properti untuk disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan menggunakan hasil yang diperoleh tersebut untuk membiayai kegiatannya. Sebagai contoh, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat memiliki bangunan yang disewakan secara komersial kepada pihak eksternal untuk menghasilkan pendapatan sewa.

Properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap).

Contoh properti investasi adalah sebagai berikut:

- a. tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;
- b. tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka

- pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;
- c. bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (atau dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
 - d. bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
 - e. properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi.

Contoh aset yang bukan merupakan properti investasi dan tidak termasuk dalam ruang lingkup kebijakan ini adalah sebagai berikut:

- a. properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali;
- b. properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga;
- c. properti yang digunakan sendiri termasuk properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual;
- d. properti yang disewakan kepada pemerintah/lembaga lain dengan cara sewa pembiayaan;
- e. properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar. Misalnya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar;
- f. properti yang dimiliki untuk tujuan strategis;
- g. properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain. Misalkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki properti yang digunakan untuk kegiatan operasional namun sesekali disewakan kepada pihak lain.

Aset yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada umumnya digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, bukan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai, karena itu aset tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki aset yang digunakan secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah. Apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mempertanggungjawabkannya secara terpisah. Namun apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menetapkan kriteria aset properti investasi.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat mengakui properti investasi jika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menetapkan manajemen suatu bangunan yang mengelola gedung yang disewakan kepada entitas pemerintah lain dengan pola penyewaan secara komersil. Dalam laporan keuangan entitas pengelola gedung, bangunan tersebut disajikan sebagai properti investasi. Namun demikian, untuk keperluan penyajian laporan keuangan konsolidasi, bangunan tersebut disajikan sebagai aset tetap.

Properti investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya maka bagian properti investasi yang disewakan kepada pemerintah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan kedua entitas pelaporan.

4.2.19.1. Pengakuan

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

- a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
- b. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pengakuan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi dan resiko yang terkait dengan properti investasi tersebut di masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal.

Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengevaluasi berdasarkan prinsip pengakuan, semua biaya properti investasi pada saat terjadinya.

Biaya properti investasi pada awal perolehan dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti investasi.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat properti investasi.

Biaya atas perawatan properti investasi berupa biaya perbaikan dan pemeliharaan properti, diakui sebagai surplus atau defisit di Laporan Operasional pada saat terjadi. Biaya tersebut meliputi biaya tenaga kerja, barang habis pakai, dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan.

Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian. Misalnya, penggantian interior dinding bangunan.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengakui jumlah tercatat properti investasi atas biaya penggantian bagian properti investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan dipenuhi.

Jumlah tercatat properti investasi yang digantikan dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan penghentian.

4.2.19.2. Pengukuran

Saat Pengakuan Awal

Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan.

Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya.

Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya sebagai berikut:

- a. Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
- b. Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
- c. Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.

Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.

Properti investasi dapat diperoleh melalui transaksi non pertukaran. Misalnya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menggunakan kewenangannya untuk mengalihkan properti. Dalam hal dilakukan pengalihan tersebut, nilai properti investasi yang diakui adalah sebesar nilai wajar.

Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa, diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dimana aset diakui pada nilai mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Terhadap nilai yang setara diakui sebagai kewajiban atau liabilitas.

Premi yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari liabilitas.

Hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai properti investasi. Hak atas properti dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya.

Properti investasi yang diperoleh dari hasil pertukaran dengan aset moneter atau aset nonmoneter atau kombinasi aset moneter dan nonmoneter dihitung dari nilai wajar kecuali:

- a. transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial, atau;
- b. nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal, maka biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan.

Apabila transaksi pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mempertimbangkan potensi jasa di masa yang akan datang.

Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika:

- a. konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau
- b. nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut.

Properti investasi yang diperoleh dari entitas Akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas Akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Setelah Pengakuan Awal

Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang mengatur Aset Tetap.

Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.

Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.

Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (*costs and values*) pada tanggal yang berbeda. Namun, properti investasi dapat dinilai kembali secara bertahap (*rolling basis*) asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui.

Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi.

Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.

Peningkatan dan penurunan nilai properti investasi akibat revaluasi, diakui dalam ekuitas.

Properti Investasi dinilai sebesar nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa.

Alih Guna

Alih guna properti investasi dilakukan jika terdapat perubahan penggunaan:

- a. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalihkan penggunaan properti investasi menjadi aset tetap;
- b. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengembangkan properti investasi untuk dijual, mengalihkan penggunaan dari properti investasi menjadi persediaan;
- c. berakhirnya pemakaian aset oleh entitas Akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;
- d. dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.

Pelepasan

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan.

Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil netto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan properti investasi setelah pelepasan aset.

Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.

4.2.19.3. Penyajian

Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat menyewakan dan/atau menjual properti investasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4.2.19.4. Pengungkapan

Properti investasi diungkapkan dalam laporan keuangan sebagai berikut:

- a. dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- b. metode penyusutan yang digunakan;
- c. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
- d. jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;

- e. rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
 - (i) penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
 - (ii) penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
 - (iii) pelepasan;
 - (iv) penyusutan;
 - (v) alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
 - (vi) perubahan lain.
- f. Pelaksanaan revaluasi atas properti investasi, harus mengungkapkan:
 - (i) uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
 - (ii) dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
 - (iii) tanggal efektif penilaian kembali;
 - (iv) nilai tercatat sebelum revaluasi
 - (v) jumlah penyesuaian atas nilai wajar;
 - (vi) nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.
- g. apabila penilaian dilakukan secara bertahap, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;
- h. Kriteria klasifikasi atas properti investasi yang digunakan sendiri dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;
- i. metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan revaluasi dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar didukung oleh bukti pasar atau faktor lain;
- j. jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit untuk:
 - (i) penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
 - (ii) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;
 - (iii) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.
- k. kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan;
- l. properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain.

4.2.20. Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Dihentikan

4.2.20.1. Pemilihan dan Penerapan Kebijakan Akuntansi

Ketika suatu PSAP secara spesifik mengatur suatu transaksi, peristiwa atau kondisi tertentu, maka kebijakan akuntansi yang diterapkan menggunakan PSAP dimaksud.

Standar Akuntansi Pemerintahan menentukan kebijakan akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan yang berisi informasi relevan dan andal atas transaksi, peristiwa dan kondisi lain. Kebijakan akuntansi tersebut tidak perlu diterapkan ketika dampak penerapannya tidak material. Akan tetapi, adalah tidak tepat untuk membuat, atau membiarkan ketidaktepatan, penyimpangan dari SAP untuk mencapai suatu penyajian tertentu atas posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas.

Dalam hal tidak ada PSAP yang secara spesifik mengatur transaksi, peristiwa atau kondisi tertentu, entitas menggunakan pertimbangan dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi, dengan mengacu pada sumber-sumber berikut ini, dengan hierarki:

- a. Ketentuan dalam PSAP yang mengatur hal serupa dan berhubungan dengan kondisi, situasi atau transaksi terkait;

- b. Definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran untuk aset, kewajiban, pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, arus kas dan perubahan ekuitas yang dijelaskan dalam Kerangka Konseptual.

Dalam melakukan penilaian sebagaimana dinyatakan dalam paragraf diatas, entitas juga dapat mempertimbangkan (a) pernyataan standar terkini yang diterbitkan oleh penyusun standar dan (b) praktik akuntansi yang sehat dan berterima umum baik di sektor pemerintah maupun sektor swasta, tetapi hanya sebatas yang tidak bertentangan dengan sumber-sumber sebagaimana dinyatakan dalam paragraf diatas. Contoh pernyataan standar terkini diantaranya adalah pernyataan yang diterbitkan oleh *International Public Sector Accounting Standards Board* (IPSASB).

4.2.20.2. Konsistensi Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten untuk transaksi, peristiwa lainnya, dan kondisi yang sejenis, kecuali suatu PSAP secara spesifik mengizinkan pengelompokan pos-pos dengan kebijakan akuntansi yang berbeda merupakan hal yang tepat. Jika suatu PSAP mengizinkan pengelompokan tersebut, maka suatu kebijakan akuntansi yang tepat harus dipilih dan diterapkan secara konsisten untuk setiap kelompok tersebut.

4.2.20.3. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengubah kebijakan akuntansi hanya apabila:

- a. Disyaratkan oleh suatu PSAP, atau
- b. Perubahan kebijakan akuntansi tersebut akan menghasilkan informasi yang lebih andal dan relevan terkait dengan pengaruh transaksi, peristiwa serta kondisi lain dalam penyajian laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Pengguna laporan keuangan diharapkan mampu membandingkan laporan keuangan suatu entitas antarperiode untuk mengidentifikasi perubahan posisi keuangan, kinerja dan arus kasnya. Selanjutnya, kebijakan akuntansi yang sama diterapkan untuk setiap periode dan dari satu periode ke periode berikutnya, kecuali perubahan dalam kebijakan akuntansi tersebut memenuhi kriteria sebagaimana paragraf diatas.

Suatu perubahan dari satu basis akuntansi ke basis akuntansi lainnya termasuk dalam perubahan kebijakan akuntansi.

Suatu perubahan dalam perlakuan akuntansi, pengakuan, atau pengukuran suatu transaksi, peristiwa, atau kondisi dalam satu basis akuntansi dianggap sebagai perubahan kebijakan akuntansi.

Tidak termasuk dalam perubahan kebijakan akuntansi:

- a. Penerapan suatu kebijakan akuntansi untuk transaksi, peristiwa atau kondisi lain yang berbeda secara substansi dari penerapan sebelumnya; dan
- b. Penerapan suatu kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa atau kondisi lain yang tidak terjadi sebelumnya.

4.2.20.4. Penerapan Perubahan Kebijakan Akuntansi

Apabila Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak dapat menentukan dampak kumulatif penerapan kebijakan tersebut untuk seluruh periode sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat menentukan dampak kumulatif mulai periode yang paling memungkinkan dalam menerapkan kebijakan baru, maka:

- a. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat perubahan kebijakan akuntansi akibat penerapan awal suatu PSAP sebagaimana yang diatur dalam ketentuan transisi dalam PSAP tersebut, jika ada, dan

- b. Jika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengubah kebijakan akuntansi untuk penerapan awal suatu PSAP yang tidak mengatur ketentuan transisi untuk perubahan tersebut atau perubahan kebijakan akuntansi secara sukarela, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menerapkan perubahan tersebut secara retrospektif.

Ketika perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif sesuai paragraf diatas, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyesuaikan saldo awal ekuitas dan setiap komponen yang terpengaruh untuk periode penyajian tahun berjalan seolah-olah kebijakan akuntansi baru tersebut sudah diterapkan sebelumnya.

Dalam hal terjadi perubahan kebijakan akuntansi, penerapan retrospektif disyaratkan tanpa melakukan penyajian kembali laporan keuangan yang telah diotorisasi untuk terbit.

Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi yang berpengaruh pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan pada Neraca, dan/atau Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Apabila Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak dapat menentukan dampak kumulatif penerapan kebijakan tersebut untuk seluruh periode sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat menentukan dampak kumulatif mulai periode yang paling memungkinkan dalam menerapkan kebijakan baru.

Dalam hal penerapan retrospektif tidak praktis dilakukan, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat menerapkan secara prospektif atas dampak perubahan kebijakan akuntansi sejak tanggal praktis paling awal.

Penerapan retrospektif tidak praktis jika dampak kumulatif atas penerapan perubahan kebijakan tidak dapat ditentukan secara obyektif untuk seluruh periode sebelumnya atau membutuhkan biaya dan tenaga yang besar.

Dalam hal terjadi perubahan kebijakan akuntansi atau basis akuntansi, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak menyajikan kembali laporan keuangan periode terakhir dengan kebijakan akuntansi atau basis akuntansi yang baru. Laporan keuangan periode sebelumnya dibandingkan dengan laporan periode berjalan dengan kebijakan akuntansi atau basis standar akuntansi masing-masing.

4.2.20.5. Pengungkapan

Bila Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan perubahan kebijakan akuntansi maka perlu mengungkapkan:

- a. sifat perubahan kebijakan akuntansi;
- b. alasan penerapan kebijakan akuntansi baru memberikan informasi yang lebih andal dan relevan;
- c. nilai penyesuaian untuk setiap item laporan keuangan yang terdampak perubahan kebijakan akuntansi untuk periode berjalan dan setiap periode sebelumnya yang disajikan, sepanjang memungkinkan;
- d. laporan keuangan periode berikutnya tidak perlu mengulangi pengungkapan yang sama; dan
- e. dalam hal perubahan kebijakan akuntansi disebabkan adanya penerapan pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang baru, maka pengungkapan ditambahkan dengan judul standar yang baru dan tanggal efektif penerapan standar tersebut.

4.2.20.6. Kesalahan

Kesalahan mungkin timbul dalam pengakuan, pengukuran atau pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan yang disebabkan antara lain karena:

- a. keterlambatan bukti transaksi;
- b. kesalahan perhitungan matematis;

- c. kesalahan penerapan kebijakan akuntansi;
- d. kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta; serta
- e. kecurangan.

Kesalahan yang ditemukan pada periode tahun berjalan dan kesalahan yang ditemukan setelah tanggal neraca, sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, dilakukan penyesuaian dalam laporan keuangan tahun berjalan.

Setiap kesalahan harus dilakukan penyesuaian/dikoreksi segera setelah diketahui.

Kesalahan atas pencatatan aset yang terjadi pada periode-periode sebelumnya apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, koreksi dilakukan dengan pembetulan pada akun aset bersangkutan dan akun lain yang terkait.

Kesalahan atas pencatatan pendapatan-LRA dan belanja yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan koreksi dengan pembetulan pada akun LP SAL dan akun Neraca terkait.

Kesalahan atas pencatatan pendapatan-LO dan beban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan koreksi pada akun ekuitas dan akun neraca terkait.

Kesalahan atas pencatatan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan dengan pembetulan pada akun LP SAL dan akun Neraca terkait.

Kesalahan atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan dengan pembetulan pada akun kewajiban yang bersangkutan dan akun terkait.

Koreksi atas kesalahan yang terjadi setelah laporan keuangan diotorisasi untuk terbit diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal saat audit laporan keuangan telah selesai sebagaimana yang dinyatakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan auditor eksternal atau tanggal saat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan, apabila laporan keuangan tersebut tidak diaudit.

4.2.20.7. Pengembalian Kelebihan Penerimaan Pendapatan

Pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya diakui sebagai pengurang realisasi pendapatan pada tahun berjalan.

Dalam suatu operasi normal pemerintah dapat terjadi pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan, baik pada tahun berjalan maupun pada saat laporan keuangan telah diotorisasi terbit. Pengembalian penerimaan pendapatan setelah laporan keuangan diotorisasi bukan merupakan kesalahan periode sebelumnya, sehingga pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan tersebut tidak diperlakukan sebagai koreksi kesalahan sebagaimana diatur dalam paragraf diatas, namun sebagai pengurang realisasi pendapatan LRA maupun pendapatan LO tahun berjalan.

4.2.20.8. Perubahan Estimasi Akuntansi

Tidak semua akun dalam laporan keuangan dapat diukur dengan tepat, sebagian pos atau akun dilaporkan dengan dasar estimasi umur ekonomis, estimasi ketertagihan, dan estimasi akuntansi yang lain. Estimasi mencakup pertimbangan berdasarkan informasi yang andal dan mutakhir. Estimasi diperlukan antara lain dalam menentukan:

- a. Persediaan usang.
- b. Penyisihan piutang pajak yang berisiko tidak tertagih.

- c. Masa manfaat atau pola penggunaan manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan atau potensi jasa yang berasal dari aset yang disusutkan/diamortisasi.
- d. Pendapatan pajak;
- e. Kewajiban garansi.

Metode estimasi terpilih dan alasan pilihan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Estimasi perlu direvisi jika terjadi perubahan terhadap pertimbangan yang menjadi dasar estimasi dibuat atau terdapat informasi baru atau berdasarkan pengalaman yang relevan. Berdasarkan karakteristiknya, perubahan estimasi tidak terkait dengan periode sebelumnya dan bukan merupakan koreksi kesalahan.

Perubahan estimasi dan alasan perubahan harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan secara prospektif pada laporan keuangan pada periode perubahan dan periode selanjutnya yang terpengaruh.

Sepanjang perubahan estimasi akuntansi mengakibatkan perubahan aset dan kewajiban, atau terkait dengan suatu pos ekuitas, perubahan estimasi akuntansi tersebut diakui dengan menyesuaikan jumlah tercatat pos aset, kewajiban atau ekuitas yang terkait pada periode perubahan.

Pengaruh perubahan terhadap Laporan Operasional periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

4.2.20.9. Operasi Yang Dihentikan

Operasi yang dihentikan antara lain berupa:

- a. Entitas pelaporan/entitas akuntansi yang dihentikan operasinya berdasarkan ketentuan perundangan atau penetapan pemerintah.
- b. Penghentian tugas dan fungsi, kegiatan, program, proyek yang signifikan mempengaruhi laporan keuangan entitas pelaporan/entitas akuntansi.
- c. Informasi penting dalam operasi yang dihentikan harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Informasi penting terkait operasi yang dihentikan mengungkapkan dasar peraturan atau ketentuan penghentian operasi entitas pemerintah, tugas dan fungsi, kegiatan, program, proyek, tanggal pasti penghentian, pengalihan aset atau kewajiban, dan pengalihan pendapatan dan beban.

Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan disajikan dalam laporan keuangan komparatif walaupun bersaldo nol.

Pendapatan dan beban atas operasi yang dihentikan dalam periode tahun berjalan sampai dengan tanggal penghentian, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan.

Bukan merupakan penghentian operasi apabila:

- a. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh demand (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot atau pergantian kebutuhan lain.
- b. Fungsi tersebut tetap ada.
- c. Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.
- d. Menutup suatu fasilitas yang pemanfaatannya amat rendah, dalam rangka menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

4.2.21. Kewajiban

Kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4.18 Klasifikasi Kewajiban

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPD	SKPKD
2.1	Kewajiban Jangka Pendek		
2.1.01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	√	√
2.1.02	Utang Bunga	-	√
2.1.03	Utang Pinjaman Jangka Pendek	-	√
2.1.04	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	√
2.1.05	Pendapatan Diterima Dimuka	√	√
2.1.06	Utang Belanja	√	√
2.1.07	Utang Jangka Pendek Lainnya	√	√
2.2	Kewajiban Jangka Panjang		
2.2.01	Utang kepada Pemerintah Pusat	-	√
2.2.02	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	-	√
2.2.03	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	-	√
2.2.04	Utang kepada Masyarakat (Obligasi)	-	√

Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

4.2.21.1. Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban dapat timbul dari:

- a. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*).
- b. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*).
- c. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*).
- d. Kejadian yang diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*).

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan.

Dalam kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam kejadian yang diakui Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat yang dinyatakan lebih salur dalam suatu ketetapan perundangan penyaluran alokasinya belum dapat diakui sebagai kewajiban atau utang Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau apabila dalam ketetapan tersebut tidak jelas dinyatakan sebagai transaksi utang-piutang.

Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat yang dinyatakan lebih salur dapat diakui sebagai kewajiban atau utang Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah dan dicatat pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

4.2.21.2. Pengukuran

Kewajiban Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dicatat sebesar nilai nominalnya. Kewajiban dalam bentuk mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dijabarkan sebagai berikut:

a. Utang Kepada Pihak Ketiga (*Account Payable*)

- Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.
- Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit non pemerintahan.

b. Utang Transfer

Utang transfer adalah kewajiban Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

d. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

- Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.
- Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau harus diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan bila masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetor kepada pihak lain, maka jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

- e. **Bagian Lancar Utang Jangka Panjang**
Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- f. **Kewajiban Lancar Lainnya (*Other Current Liabilities*)**
Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.

Pengukuran kewajiban atau utang jangka panjang Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dijabarkan dalam 2 (dua) karakteristik sebagai berikut:

- a. **Utang yang tidak diperjualbelikan (*Non-Traded Debt*)**
Utang yang tidak diperjualbelikan merupakan kewajiban Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan.
- b. **Utang yang diperjualbelikan (*Traded Debt*)**
 - Akuntansi untuk utang pemerintah dalam bentuk yang dapat diperjualbelikan seharusnya dapat mengidentifikasi jumlah sisa kewajiban dari pemerintah pada suatu waktu tertentu beserta bunganya untuk setiap periode akuntansi. Hal ini membutuhkan penilaian awal sekuritas pada harga jual atau hasil penjualan, penilaian pada saat jatuh tempo atas jumlah yang akan dibayarkan ke pemegangnya, dan pada periode diantaranya untuk menggambarkan secara wajar kewajiban pemerintah.
 - Utang yang dapat diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah.
 - Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi.
 - Sekuritas utang pemerintah yang dijual sebesar nilai pari tanpa diskonto atau premium harus dinilai sebesar nilai pari.
 - Sekuritas utang pemerintah yang dijual dengan harga diskonto nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo.
 - Sekuritas yang dijual dengan harga premium nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

Perubahan Valuta Asing

- a. Utang dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi.
- b. Pada setiap tanggal neraca pos utang dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- c. Selisih penjabaran pos utang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

Tunggakan

- a. Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah jatuh tempo namun tidak mampu untuk membayar jumlah pokok dan/atau bunganya sesuai jadwal.
- b. Jumlah tunggakan atas pinjaman harus disajikan dalam bentuk Daftar Umur (*aging schedule*) Kreditur pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban.

4.2.21.3. Penghapusan Utang

Penghapusan utang adalah pembatalan tagihan oleh kreditur kepada debitur, baik sebagian maupun seluruh jumlah uang debitur, apabila kreditur mengakui bahwa tidak ada kewajiban pada debitur.

4.2.21.4. Penyajian dan Pengungkapan

Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang disajikan dalam neraca sebagai bagian dari kewajiban sesuai klasifikasi kewajiban.

Utang Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan kewajiban adalah:

- a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
- b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
- c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
- e. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - 1) pengurangan pinjaman;
 - 2) modifikasi persyaratan utang;
 - 3) pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - 4) pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - 5) pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - 6) pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
- f. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
- g. Biaya pinjaman:
 - 1) Perlakuan biaya pinjaman;
 - 2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - 3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

4.2.22. Pendapatan - LRA dan Belanja

4.2.22.1. Pendapatan – LRA

Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, yaitu:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA

Tabel 4.19 Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPD	SKPKD
4.1	Pendapatan Asli Daerah-LRA		
4.1.01	Pajak Daerah - LRA	√	-
4.1.02	Retribusi Daerah - LRA	√	-
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LRA	-	√
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LRA	√	-

- b. Pendapatan Transfer

Tabel 4.20 Pendapatan Transfer

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPD	SKPKD
4.2	Pendapatan Transfer-LRA		
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	-	√

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Tabel 4.21 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPD	SKPKD
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah- LRA		
4.3.01	Pendapatan Hibah-LRA	√	√
4.3.03	Lain - lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LRA	√	√

Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat :

- a. Diterima pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau
- b. Diterima oleh SKPD
- c. Diterima entitas lain di luar Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atas nama Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Pengakuan pendapatan mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Pendapatan kas yang telah diterima pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- b. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang merupakan pendapatan Provinsi Kepulauan Riau dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari Bendahara Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- c. Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk diakui sebagai pendapatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
- d. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk diakui sebagai pendapatan Provinsi Kepulauan Riau.
- e. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan otoritas yang diberikan oleh Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dan Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengakuinya sebagai pendapatan.

Pengakuan pendapatan diakui berdasarkan bukti dokumen sumber yang sah.

Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Denda keterlambatan atas pekerjaan diakui sebagai realisasi Lain- lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada SKPD terkait.

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, SKPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

Pengakuan pendapatan transfer-LRA dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Pendapatan transfer yang terkait dengan kurang salur dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi.

Pendapatan-LRA yang tidak dianggarkan namun dilakukan penyetoran realisasinya, diakui sebagai realisasi pendapatan SKPD terkait sesuai klasifikasi pendapatan tersebut. Anggaran pendapatan yang belum ditetapkan akan diusulkan pada APBD Perubahan, namun apabila tidak dilakukan perubahan, realisasi tetap diakui sebagai pendapatan SKPD terkait sesuai klasifikasi pendapatan.

Pendapatan-LRA yang tidak diketahui sumber dan klasifikasinya diakui sebagai realisasi pada kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis Lain-lain PAD Yang Sah pada SKPKD.

Entitas akuntansi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

Pengukuran

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pengukuran pendapatan-LRA menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima.

Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis Pendapatan-LRA sesuai klasifikasi dalam pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:

- a. Penerimaan Pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. Penjelasan mengenai Pendapatan-LRA yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan Pendapatan-LRA;
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.2.22.2. Belanja

Belanja diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4.22 Klasifikasi Belanja

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPD	SKPKD
5.1	Belanja Operasi		
5.1.01	Belanja Pegawai	√	-
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	√	-
5.1.03	Belanja Bunga	-	√
5.1.04	Belanja Subsidi	-	√
5.1.05	Belanja Hibah (berupa uang)	√	√
5.1.05	Belanja Hibah (berupa barang dan jasa)	√	√
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial (berupa uang)	√	√
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial (berupa barang dan jasa)	√	√
5.2	Belanja Modal		
5.2.01	Belanja Modal Tanah	√	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	√	-
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	√	-
5.2.04	Belanja Modal Jalan, irigasi dan Jaringan	√	-
5.2.05	Belanja Modal Aset tetap Lainnya	√	-
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	√	-
5.3	Belanja Tidak Terduga		
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	-	√
5.4	Belanja Transfer		
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	-	√
5.1.02	Belanja Bantuan Keuangan	-	√

Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk seluruh transaksi di SKPD dan SKPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
- c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja dan akun terkait pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah Laporan Keuangan Audited terbit, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan pada kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis Lain-lain PAD Yang Sah–LRA.

Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara mengukur efektivitas dan efisiensi belanja tersebut.

Pengukuran

Belanja diukur sejumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan atau rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

Apabila dilakukan pengeluaran belanja berupa pemeliharaan/renovasi/rehab atas aset tetap bukan milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang mengakibatkan peningkatan manfaat dan nilai teknis pada aset tetap yang bersangkutan maka pengeluaran belanja tersebut diklasifikasikan sebagai belanja modal dan selanjutnya dikapitalisasi sebagai aset tetap-renovasi/rehab. Misalnya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan pengeluaran belanja untuk pemeliharaan/ renovasi gedung kantor milik pemerintah pusat yang mengakibatkan peningkatan manfaat dan nilai teknis gedung kantor bersangkutan, maka nilai pengeluaran belanja tersebut diakui sebagai belanja modal dan selanjutnya dikapitalisasi menjadi aset tetap-renovasi/rehab. Aset tetap-renovasi/rehab diklasifikasikan ke dalam aset tetap lainnya.

Apabila pengeluaran belanja untuk pemeliharaan/renovasi pada aset tetap bukan milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak mengakibatkan peningkatan manfaat dan nilai teknis aset tetap yang bersangkutan maka nilai pengeluaran belanja tersebut diakui sebagai belanja operasi/belanja pemeliharaan.

Penyajian dan Pengungkapan

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis belanja sesuai klasifikasi belanja.

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan belanja, antara lain:

- Rincian belanja per SKPD;
- a. Penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
- b. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah;
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Jika terdapat realisasi anggaran belanja modal yang tidak memenuhi kriteria belanja modal, maka diungkapkan dalam CALK.

Jika terdapat realisasi anggaran belanja barang dan jasa yang asetnya memenuhi kriteria untuk dikapitalisasi sebagai aset tetap dicatat sebagai aset tetap, diungkapkan dalam CALK.

4.2.23. Pembiayaan

Pembiayaan diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Penerimaan Pembiayaan

Tabel 4.23 Penerimaan Pembiayaan

Kode Rekening		Uraian Akun	Kewenangan	
LRA	LO		SKPD	SKPKD
6.1	-	Penerimaan Pembiayaan	-	√
6.1.01	-	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	√
6.1.02	-	Pencairan Dana Cadangan	-	√
6.1.03	-	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	√
6.1.04	-	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	√
6.1.05	-	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	√
6.1.06	-	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	√

- b. Pengeluaran Pembiayaan

Tabel 4.24 Pengeluaran Pembiayaan

Kode Rekening		Uraian Akun	Kewenangan	
LRA	LO		SKPD	SKPKD
6.2	-	Pengeluaran Pembiayaan	-	√
6.2.01	-	Pembentukan Dana Cadangan	-	√
6.2.02	-	Penyertaan Modal Daerah	-	√
6.2.03	-	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	√
6.2.04	-	Pemberian Pinjaman Daerah	-	√
6.2.05	-	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	√

4.2.23.1. Pengakuan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Entitas akuntansi yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, pembiayaan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

4.2.23.2. Pengukuran

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

4.2.23.3. Penyajian dan Pengungkapan

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan dalam laporan realisasi anggaran sesuai klasifikasi pembiayaan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan terkait dengan pembiayaan adalah:

- a. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal/investasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.2.24. Pendapatan – LO dan Beban

4.2.24.1. Pendapatan – LO

Pendapatan – LO diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4.25 Klasifikasi Pendapatan - LO

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPD	SKPKD
7.1	Pendapatan Asli Daerah-LO		
7.1.01	Pajak Daerah-LO	√	-
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	√	-
7.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO	-	√

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPD	SKPKD
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	√	-
7.2	Pendapatan Transfer-LO		
7.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	-	√
7.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO		
7.3.01	Pendapatan Hibah-LO	√	√
7.3.03	Lain - lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	√	√
7.4	Surplus Non Operasional-LO		
7.4.01	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	√	√
7.4.02	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	-	√
7.4.03	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	√	√
7.5	Pendapatan Luar Biasa-LO		
7.5.01	Pendapatan Luar Biasa-LO	-	√

4.2.24.1.1. Pengakuan

Pendapatan-LO diakui pada saat :

- a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*), yaitu:
 - 1) timbulnya hak untuk menagih pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
 - 2) timbulnya hak untuk menagih imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang- undangan.
- b. Adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, yaitu:
 - 1) pada saat diterima pembayaran secara tunai (*realized*); atau
 - 2) pada saat sumber daya ekonomi masih berupa piutang (*realizable*).

Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO menyesuaikan dengan metode pemungutan pajak yang digunakan. Terdapat 2 (dua) metode yang digunakan untuk pemungutan pajak, yaitu melalui *self assessment* dan *official assessment*.

- a. Sistem *self assesment* artinya masyarakat sendirilah yang harus aktif melaksanakan kewajiban pajak yang ditentukan peraturan perundang-undangan, tanpa harus ada inisiatif tindakan lebih dahulu dari otoritas perpajakan.
- b. Sistem *Official Assesment* artinya elemen masyarakat baru akan melaksanakan kewajiban pajak setelah ditentukan dan dihitung lebih dahulu oleh pihak otoritas perpajakan.

Untuk dapat mencatat Pendapatan Pajak Daerah-LO, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memetakan jenis-jenis pajak yang ada ke dalam metode pemungutan pajak yang digunakan. Mekanisme pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LO berdasarkan metode pemungutan pajak mengikuti pengaturan sebagai berikut:

- a. Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan metode *self assessment* diakui pada saat realisasi kas diterima di Rekening Umum Kas Provinsi Kepulauan Riau tanpa terlebih dahulu pemerintah menerbitkan surat ketetapan.
- b. Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan metode *official assessment* diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan dimaksud. Timbulnya hak menagih adalah pada saat otoritas perpajakan telah menerbitkan surat ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Surat ketetapan tersebut menjadi dokumen sumber untuk mencatat pendapatan Pajak Daerah-LO.

Pendapatan yang pembayarannya dilakukan di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan, pengakuan pendapatan LO sebesar yang telah menjadi hak entitas secara proposional.

Pendapatan diakui sebagai Pendapatan-LO sekaligus diakui sebagai Pendapatan-LRA apabila dalam proses transaksi pendapatan tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan dan penerimaan kas.

Entitas akuntansi yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pendapatan Retribusi diakui apabila SKPD telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dokumen dasar yang digunakan dalam pencatatan pendapatan retribusi adalah surat ketetapan retribusi atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan surat ketetapan retribusi.

Sesuai dengan kaidah pengakuan akun laporan keuangan secara substansial, hak Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk memungut retribusi baru timbul dan diakui jika layanan telah diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan layanan telah diterima oleh Wajib Retribusi. Telah diberikan/diterima layanan diwujudkan dalam penerbitan dokumen. Pengakuan pendapatan retribusi tidak menganut prinsip pengendalian tetapi menganut prinsip layanan.

Pendapatan hasil kekayaan Provinsi Kepulauan Riau yang dipisahkan-LO bagian laba BUMD diakui apabila pada suatu tahun buku telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dalam RUPS tersebut telah ditetapkan besarnya bagian laba yang disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Pendapatan-LO atas aset kemitraan diakui saat diterbitkan surat tagihan kepada pihak ketiga dan dilakukan penyesuaian di akhir tahun.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan pendapatan yang berasal dari TP/TGR, didukung dengan bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara SKP2KS dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SKTJM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan pendapatan baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh SKPD yang berwenang.

Pendapatan bagi hasil dari deposito diakui berdasarkan laporan dari bank dan dilakukan penyesuaian atas pendapatan deposito yang belum diterima oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yaitu pada saat penyusunan laporan keuangan berdasarkan laporan dari bank tempat deposito.

Pendapatan hasil dari pemanfaatan kekayaan Provinsi Kepulauan Riau diakui saat diterbitkan surat tagihan kepada pihak ketiga dan dilakukan penyesuaian di akhir tahun.

Pendapatan Hasil Penjualan Aset Yang Tidak dipisahkan diakui ketika terbitnya surat ketetapan berita hasil lelang.

Pendapatan dari Hasil Eksekusi Jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

Pendapatan transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan dokumen resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Namun demikian penetapan tersebut belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan yang diatur untuk penyaluran alokasi tersebut. Untuk itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.

Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) dan pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui sebesar jumlah alokasi DAU menurut peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Transfer lainnya diakui sebesar hak tagih bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau apabila dalam pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi.

Pendapatan transfer antar daerah diakui atau dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan nilai definitif menurut Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau selaku penerima.

Pendapatan hibah-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan hibah tersebut dan terdapat aliran masuk sumber daya ekonomi, mana yang lebih dahulu. Naskah perjanjian hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut.

Hibah barang berupa aset tetap dicatat sebagai aset tetap dan pendapatan hibah-LO.

Pendapatan Non Operasional (Surplus Non Operasional-LO) diakui ketika dokumen sumber berupa berita acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Nonlancar).

Surplus Penjualan Aset Non lancar yang berasal dari aktivitas pelepasan investasi, terjadi apabila harga jual dalam pelepasan investasi lebih tinggi daripada nilai buku investasi tersebut.

Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang timbul apabila harga perolehan kembali (nilai yang harus dibayar) lebih rendah dibandingkan dengan nilai tercatat (*carrying value*) dari kewajiban tersebut. Berdasarkan salinan SP2D LS PPKD, fungsi akuntansi PPKD akan menghapus kewajiban yang telah dibayar dan mengakui adanya surplus dari penyelesaian kewajiban tersebut.

Pendapatan yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak sering atau tidak rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dicatat sebagai pendapatan luar biasa LO.

4.2.24.1.2. Pengukuran

Pendapatan-LO secara umum dicatat sebesar:

- a. Nilai nominal pada bukti penerimaan atau surat ketetapan pajak/surat ketetapan retribusi atau dokumen ketetapan lainnya yang belum dilunasi pada saat penyusunan laporan keuangan.

- b. sebesar estimasi nilai wajar barang/jasa yang diterima untuk pendapatan-LO yang diperoleh dari hibah.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan yang diakui setelah diterbitkannya surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum di dalam surat ketetapan dimaksud.

Pendapatan yang diakui tanpa surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominal kas yang diterima Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Pendapatan transfer dari Dana Bagi Hasil (DBH), dicatat berdasarkan realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Pendapatan berupa barang/jasa akan dicatat sebesar estimasi nilai wajar dari barang/jasa yang diterima pada tanggal transaksi. Contoh, pendapatan hibah berupa barang atau hibah berupa jasa konsultasi.

Surplus Non Operasional LO dihitung dari selisih lebih harga jual aset nonlancar dikurangi nilai buku aset non lancar tersebut.

Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang dihitung dari selisih lebih nilai tercatat (*carrying amount*) suatu kewajiban dikurangi harga perolehan kembali (nilai yang harus dibayar) dari kewajiban tersebut.

4.2.24.1.3. Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional berdasarkan jenis Pendapatan-LO sesuai klasifikasi dalam pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:

- a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan Pendapatan Provinsi Kepulauan Riau;
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.2.24.2. Beban

Beban diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4.26 Klasifikasi Beban

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPD	SKPKD
8.1	Beban Operasi		
8.1.01	Beban Pegawai	√	-
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	√	-
8.1.03	Beban Bunga	-	√
8.1.04	Beban Subsidi	-	√
8.1.05	Beban Hibah	√	√

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPD	SKPKD
8.1.06	Beban Bantuan Sosial	√	√
8.1.07	Beban Penyisihan Piutang	√	√
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortasi	√	
8.2	Beban Transfer		
8.2.01	Beban Bagi Hasil	-	√
8.2.02	Beban Bantuan Keuangan	-	√
8.3	Defisit Non Operasional-LO		
8.3.01	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	√	√
8.3.02	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	-	√
8.3.03	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	√	√
8.4	Beban Luar Biasa		
8.4.01	Beban Tidak Terduga	-	√

4.2.24.2.1. Pengakuan

Beban diakui pada saat:

- a. Timbulnya kewajiban, yaitu pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Provinsi Kepulauan Riau. Contoh tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar;
- b. Terjadinya konsumsi aset, yaitu pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, yaitu pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.

Pengakuan beban dapat menggunakan dua pendekatan yaitu:

- a. Metode pendekatan Beban
Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau dikonsumsi sesegera mungkin;
- b. Metode pendekatan Aset
Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga-jaga;

Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan laporan operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya.

Dalam hal Badan Layanan Umum Provinsi Kepulauan Riau, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

4.2.24.2.2. Pengukuran

Beban dari transaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.

Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.

Beban pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti Dokumen Kepegawaian, Daftar Gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada pegawai dimaksud.

Penyusutan/amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*).

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila koreksi terjadi pada periode berikutnya setelah laporan keuangan audited terbit, koreksi atas beban dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Beban yang sifatnya tidak rutin dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

Termasuk dalam beban dari kegiatan non operasional antara lain beban penjualan aset non lancar, beban penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan beban dari kegiatan non operasional lainnya.

Beban Barang dan Jasa dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari Pihak Ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beban bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi atau jatuh tempo seiring dengan berjalannya waktu. Besaran beban bunga biasanya diukur sebagai besaran persentase tertentu atas pokok utang serta periode pembayaran bunga utang serta hal lain jika ada, sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian pemberian utang yang telah disepakati sebelumnya. Pada prinsipnya metode pengukuran besaran pengenaan bunga biasanya tercakup pada pasal dalam naskah perjanjian pemberian pinjaman untuk mencegah dispute atau (perselisihan) dikemudian hari.

Pengukuran beban subsidi didasarkan pada nilai nominal sesuai dengan dokumen tagihan yang diajukan pihak ketiga yang telah mendapatkan persetujuan dari pejabat perbendaharaan.

Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang dan jasa dicatat sebesar nilai buku.

Pengukuran Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau dokumen pengadaan barang/jasa oleh Pihak Ketiga.

Beban lain-lain dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan yang tidak menghasilkan aset tetap/aset lainnya.

Beban penyisihan piutang tak tertagih dilakukan dengan metode penyisihan piutang. Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih. Nilai beban penyisihan piutang tak tertagih diukur dengan cara mengestimasi besarnya piutang yang kemungkinan tak tertagih sesuai ketentuan yang berlaku.

Beban transfer diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber penetapan nilai transfer.

Beban Penyusutan dan Amortisasi diukur dengan cara mengalokasikan beban secara sistematis setiap tahun dengan metode penyusutan garis lurus.

Defisit non operasional antara lain meliputi beban penjualan aset non lancar dan beban penyelesaian kewajiban jangka panjang. Beban penjualan aset non lancar diukur berdasarkan selisih antara harga jual dan nilai buku aset non lancar tersebut.

Beban Luar biasa diukur berdasarkan jumlah tagihan/kas yang dikeluarkan dari anggaran belanja tidak terduga.

4.2.24.2.3. Koreksi dan Pengembalian

Koreksi beban yang terjadi pada periode yang sama terjadinya beban dimaksud dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila koreksi terjadi pada periode berikutnya setelah laporan keuangan audited terbit, koreksi beban dibukukan sebagai pendapatan lain-lain (LO). Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

4.2.24.2.4. Penyajian dan Pengungkapan

Beban disajikan dalam Laporan Operasional berdasarkan jenis beban sesuai klasifikasi ekonomi (*line item*).

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari beban.

Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan beban, antara lain:

- a. rincian beban per SKPD;
- b. penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
- c. informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.2.25. Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan

4.2.25.1. Otorisasi Penerbitan Laporan Keuangan

Untuk menentukan suatu peristiwa memenuhi definisi peristiwa setelah tanggal pelaporan, perlu dilakukan identifikasi tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Tanggal pelaporan adalah tanggal terakhir dari periode pelaporan keuangan tersebut. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal saat audit laporan keuangan telah selesai yang dinyatakan dalam LHP auditor atau tanggal saat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan, apabila laporan keuangan tersebut tidak diaudit.

Proses yang terjadi di antara penyusunan laporan keuangan dan otorisasi penerbitan laporan keuangan dapat berbeda tergantung pada sifat organisasi, struktur organisasi, ketentuan yang wajib diikuti oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serta prosedur yang ditetapkan dalam proses penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan.

4.2.25.2. Pengakuan dan Pengukuran

Dalam periode antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mungkin mengumumkan kebijakan yang dapat berdampak pada penyajian/pengungkapan pos-pos dalam laporan keuangan. Sejauh mana peristiwa akibat kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berdampak pada penyesuaian laporan keuangan tergantung pada:

- a. apakah kejadian/peristiwa tersebut memberikan informasi yang cukup tentang kondisi terkini pada tanggal pelaporan; dan
- b. apakah terdapat bukti yang cukup memadai dapat diperoleh atau dapat dipenuhi.

4.2.25.3. Peristiwa Penyesuaian setelah tanggal Pelaporan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan.

Berikut ini beberapa contoh peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan yang memerlukan penyesuaian angka-angka laporan keuangan, atau untuk mengakui peristiwa yang belum disajikan sebelumnya, antara lain:

- a. Penyelesaian atas putusan pengadilan yang telah bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap setelah tanggal pelaporan yang memutuskan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki kewajiban kini pada tanggal pelaporan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyesuaikan nilai kewajiban yang terkait dengan penyelesaian putusan pengadilan tersebut setelah tidak ada upaya lainnya.
- b. Informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai piutang pada tanggal pelaporan, misalnya informasi daluwarsa pajak (kedaluwarsanya hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak) dan kepailitan debitor yang terjadi setelah tanggal pelaporan keuangan yang mengindikasikan kemungkinan piutang tidak dapat ditagih, sehingga perlu disesuaikan.
- c. Ditetapkannya jumlah pendapatan berdasarkan informasi yang diperoleh dari entitas lain yang berwenang pada periode pelaporan setelah tanggal pelaporan.
- d. Ditemukannya kecurangan atau kesalahan yang mengakibatkan salah saji laporan keuangan.
- e. Pengesahan yang dilakukan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum terhadap transaksi belanja dan/atau pendapatan yang terjadi sebelum tanggal pelaporan.
- f. Hasil pemeriksaan BPK yang terbit setelah tanggal pelaporan keuangan atas perhitungan subsidi yang seharusnya diakui pemerintah.

4.2.25.4. Peristiwa Nonpenyesuaian setelah tanggal Pelaporan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa nonpenyesuaian setelah tanggal pelaporan.

Contoh dari peristiwa nonpenyesuaian setelah tanggal pelaporan diantaranya:

- a. Adanya kebijakan penyajian kembali nilai aset dengan menggunakan nilai wajar secara teratur yang menyebabkan menurunnya nilai aset diantara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Penurunan nilai tersebut tidak berhubungan dengan kondisi aset pada tanggal laporan keuangan namun akan menggambarkan keadaan yang terjadi pada periode berikutnya.
- b. Pengumuman pembagian dividen yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah setelah tanggal pelaporan.

4.2.25.5. Kestinambungan Entitas

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak menyusun laporan keuangan dengan dasar kesinambungan entitas apabila setelah tanggal pelaporan terdapat penetapan pemerintah untuk melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

Jika asumsi kesinambungan entitas tidak lagi terpenuhi, kebijakan ini mensyaratkan entitas untuk mencerminkan hal ini dalam laporan keuangannya. Dampak perubahan semacam itu akan tergantung pada keadaan khusus entitas, misalnya, apakah operasi akan dialihkan ke entitas pemerintah lain atau dilikuidasi. Dibutuhkan pertimbangan dalam menentukan apakah diperlukan perubahan pada nilai aset dan kewajiban yang tercatat.

Ketika asumsi kesinambungan entitas tidak lagi terpenuhi, perlu juga mempertimbangkan apakah perubahan kondisi tersebut mengarah pada munculnya kewajiban tambahan atau memicu klausul dalam kontrak utang yang mengarah pada reklasifikasi utang jangka panjang menjadi utang jangka pendek.

4.2.25.6. Pengungkapan

Pengungkapan Tanggal Laporan Keuangan diotorisasi untuk terbit

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengungkapkan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan.

Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit penting diketahui oleh pengguna karena laporan keuangan tidak mencerminkan peristiwa setelah tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.

Pemutakhiran Pengungkapan Kondisi pada Tanggal Pelaporan

Apabila Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menerima informasi setelah tanggal pelaporan dan sebelum tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memutakhirkan pengungkapan berdasarkan informasi terkini tersebut.

Dalam beberapa kasus, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu memutakhirkan pengungkapan laporan keuangannya untuk mencerminkan informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan, walaupun informasi tersebut tidak mempengaruhi jumlah yang disajikan dalam laporan keuangannya.

Pengungkapan Peristiwa Nonpenyesuaian Setelah Tanggal Pelaporan

Apabila peristiwa nonpenyesuaian setelah tanggal pelaporan memiliki nilai yang material, tidak adanya pengungkapan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna laporan. Karena itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengungkapkan informasi untuk setiap hal yang material dari peristiwa nonpenyesuaian setelah tanggal pelaporan, yang mencakup:

- a. sifat peristiwa; dan
- b. estimasi atas dampak keuangan, atau pernyataan bahwa estimasi tersebut tidak dapat dibuat.

Berikut adalah contoh peristiwa non penyesuaian setelah tanggal pelaporan yang umumnya diungkapkan dalam laporan keuangan:

- a. Pengumuman untuk tidak melanjutkan suatu program atau kegiatan pemerintah, pelepasan aset serta penyelesaian kewajiban terkait dengan penghentian program atau kegiatan pemerintah;
- b. Pembelian atau pelepasan aset dalam jumlah yang signifikan;
- c. Kerusakan aset akibat kebakaran setelah tanggal pelaporan;
- d. Perubahan tidak normal setelah tanggal pelaporan atas harga aset atau kurs valuta asing;
- e. Komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atau timbulnya kewajiban kontijensi seperti penerbitan jaminan yang memiliki nilai yang signifikan; dan
- f. Dimulainya proses tuntutan hukum yang signifikan yang terjadi setelah tanggal pelaporan, termasuk tuntutan terkait keberatan/banding/restitusi pajak yang signifikan.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH

Rincian Dari Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan yang telah disusun Pemerintah Provinsi Kepulauan Periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, meliputi:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
- 3) Neraca;
- 4) Laporan Operasional (LO);
- 5) Laporan Arus Kas (LAK); dan
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);

Penjelasan lebih lanjut masing-masing laporan keuangan (selain Catatan atas Laporan Keuangan) disajikan berikut ini:

5.1. Penjelasan Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

5.1.1. Pendapatan – LRA

Pada tahun 2024 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat realisasi pendapatan sebesar Rp3.958.295.361.262,68 atau sebesar 92,59% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp4.275.037.233.807,00. Realisasi Pendapatan tersebut meliputi realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang sah sebagaimana ikhtisar sebagai berikut:

Tabel 5.1 Pendapatan LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
PENDAPATAN DAERAH	4.275.037.233.807,00	3.958.295.361.262,68	92,59	4.170.044.095.409,31
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.020.676.416.916,00	1.980.461.763.464,68	98,01	1.806.972.833.505,31
Pajak Daerah	1.738.323.174.655,00	1.777.704.385.140,00	102,27	1.631.489.164.580,00
Retribusi Daerah	155.935.540.754,00	148.286.242.017,30	95,09	12.203.621.186,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	34.003.224.423,00	1.904.909.335,00	5,60	2.449.330.649,00
Lain-lain PAD yang Sah	92.414.477.084,00	52.566.226.972,38	56,88	160.830.717.090,31
PENDAPATAN TRANSFER	2.250.268.116.891,00	1.976.533.066.207,00	87,84	2.361.792.541.904,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.250.268.116.891,00	1.976.533.066.207,00	87,84	2.361.792.541.904,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.092.700.000,00	1.300.531.591,00	31,78	1.278.720.000,00
Pendapatan Hibah	4.092.700.000,00	1.300.531.591,00	31,78	1.278.720.000,00

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	2.020.676.416.916,00	1.980.461.763.464,68

Sumber Pendapatan Asli Daerah ini berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.980.461.763.464,68 atau sebesar 98,01% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp2.020.676.416.916,00. Tabel berikut ini adalah rincian Pendapatan Asli Daerah:

Tabel 5.2 Pendapatan Asli Daerah – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.020.676.416.916,00	1.980.461.763.464,68	98,01	1.806.972.833.505,31
Pajak Daerah	1.738.323.174.655,00	1.777.704.385.140,00	102,27	1.631.489.164.580,00
Retribusi Daerah	155.935.540.754,00	148.286.242.017,30	95,09	12.203.621.186,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	34.003.224.423,00	1.904.909.335,00	5,60	2.449.330.649,00
Lain-lain PAD yang Sah	92.414.477.084,00	52.566.226.972,38	56,88	160.830.717.090,31

5.1.1.1.1. Pajak Daerah

Pajak Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	1.738.323.174.655,00	1.777.704.385.140,00

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada tahun 2024 Pajak Daerah terealisasi sebesar Rp1.777.704.385.140,00 atau sebesar 102,27% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.738.323.174.655,00, hal ini disebabkan karena adanya Program Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penghapusan sanksi administrasi dan Pengurangan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor, yang berdampak pada kenaikan penerimaan PKB.

Tabel berikut ini adalah rincian Pajak Daerah:

Tabel 5.3 Pajak Daerah – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Pajak Daerah	1.738.323.174.655,00	1.777.704.385.140,00	102,27	1.631.489.164.580,00
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	537.836.526.827,00	596.081.883.938,00	110,83	535.895.634.154,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	476.300.202.663,00	522.716.638.500,00	109,75	443.090.099.000,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	494.400.985.079,00	490.605.194.542,00	99,23	492.259.273.564,00
Pajak Air Permukaan	33.933.643.819,00	1.192.208.723,00	3,51	991.217.140,00
Pajak Rokok	175.729.790.267,00	167.108.459.437,00	95,09	159.252.940.722,00
Pajak Alat Berat	20.122.026.000,00	0,00	0,00	0,00

Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.4 Rincian Pajak Daerah – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Pajak Daerah	1.738.323.174.655,00	1.777.704.385.140,00	102,27	1.631.489.164.580,00
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	537.836.526.827,00	596.081.883.938,00	110,83	535.895.634.154,00
PKB-Mobil Penumpang-Sedan	20.540.278.572,00	14.600.867.857,00	71,08	15.092.332.612,00
PKB-Mobil Penumpang-Jeep	87.217.534.177,00	83.223.828.443,00	95,42	74.911.055.976,00
PKB-Mobil Penumpang-Minibus	296.444.831.162,00	331.714.934.959,00	111,90	293.613.737.050,00
PKB-Mobil Bus-Microbus	282.959.127,00	418.264.750,00	147,82	408.835.895,00
PKB-Mobil Bus-Bus	2.053.714.359,00	3.286.105.834,00	160,01	3.166.994.163,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	14.304.781.407,00	18.472.453.052,00	129,13	16.741.948.380,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	16.307.345.847,00	14.290.426.591,00	87,63	12.854.578.757,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	13.442.905.299,00	17.226.016.705,00	128,14	16.129.052.435,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	1.419.819.270,00	1.237.085.451,00	87,13	1.125.378.684,00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	85.719.587.564,00	111.475.255.121,00	130,05	101.737.573.303,00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	102.770.043,00	136.645.175,00	132,96	114.146.899,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	476.300.202.663,00	522.716.638.500,00	109,75	443.090.099.000,00
BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	10.567.960.520,00	5.386.600.000,00	50,97	6.081.550.000,00
BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	69.736.714.283,00	64.727.747.500,00	92,82	54.749.545.000,00
BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	283.149.795.853,00	283.363.435.000,00	100,08	249.190.989.000,00
BBNKB-Mobil Bus-Microbus	102.521.529,00	378.975.000,00	369,65	66.400.000,00
BBNKB-Mobil Bus-Bus	967.683.385,00	2.602.425.000,00	268,93	1.427.750.000,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	7.470.018.730,00	11.545.050.000,00	154,55	11.280.340.000,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	9.087.837.563,00	4.335.870.000,00	47,71	4.143.830.000,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	3.708.648.545,00	7.391.990.000,00	199,32	5.984.656.000,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	509.164.232,00	505.800.000,00	99,34	522.500.000,00
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	90.792.524.649,00	142.115.939.000,00	156,53	109.392.888.000,00
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	207.333.374,00	362.807.000,00	174,99	249.651.000,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	494.400.985.079,00	490.605.194.542,00	99,23	492.259.273.564,00
PBBKB-Bahan Bakar Bensin	232.584.824.580,00	255.059.527.531,00	109,66	234.997.829.925,00
PBBKB-Bahan Bakar Solar	261.816.160.499,00	235.545.667.011,00	89,97	257.261.443.639,00
Pajak Air Permukaan	33.933.643.819,00	1.192.208.723,00	3,51	991.217.140,00
Pajak Air Permukaan	33.933.643.819,00	1.192.208.723,00	3,51	991.217.140,00
Pajak Rokok	175.729.790.267,00	167.108.459.437,00	95,09	159.252.940.722,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Pajak Rokok	175.729.790.267,00	167.108.459.437,00	95,09	159.252.940.722,00
Pajak Alat Berat	20.122.026.000,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Alat Berat	20.122.026.000,00	0,00	0,00	0,00

Tabel 5.5 Rincian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	537.836.526.827,00	596.081.883.938,00	110,83	535.895.634.154,00
PKB-Mobil Penumpang-Sedan	20.540.278.572,00	14.600.867.857,00	71,08	15.092.332.612,00
PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	20.205.361.941,00	14.312.861.463,00	70,84	14.759.352.670,00
PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum	205.926.306,00	119.311.461,00	57,94	171.746.992,00
PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Pusat	35.336.760,00	50.812.925,00	143,80	50.999.600,00
PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah	93.653.565,00	117.882.008,00	125,87	110.233.350,00
PKB-Mobil Penumpang-Jeep	87.217.534.177,00	83.223.828.443,00	95,42	74.911.055.976,00
PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi	87.000.898.229,00	82.841.464.510,00	95,22	74.533.258.885,00
PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Pusat	86.765.628,00	141.134.300,00	162,66	150.888.883,00
PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah	129.870.320,00	241.229.633,00	185,75	226.908.208,00
PKB-Mobil Penumpang-Minibus	296.444.831.162,00	331.714.934.959,00	111,90	293.613.737.050,00
PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	295.395.237.190,00	330.170.949.178,00	111,77	292.002.358.961,00
PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	115.879.757,00	194.320.419,00	167,69	171.442.863,00
PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Pusat	354.465.037,00	467.427.600,00	131,87	474.530.634,00
PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah	579.249.178,00	882.237.762,00	152,31	965.404.592,00
PKB-Mobil Bus-Microbus	282.959.127,00	418.264.750,00	147,82	408.835.895,00
PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi	130.121.511,00	205.321.325,00	157,79	195.981.867,00
PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum	130.396.640,00	177.792.925,00	136,35	175.705.628,00
PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Pusat	7.198.346,00	3.976.500,00	55,24	3.817.000,00
PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah	15.242.630,00	31.174.000,00	204,52	33.331.400,00
PKB-Mobil Bus-Bus	2.053.714.359,00	3.286.105.834,00	160,01	3.166.994.163,00
PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi	1.837.720.566,00	2.946.660.101,00	160,34	2.842.465.711,00
PKB-Mobil Bus-Bus-Umum	147.458.900,00	156.236.525,00	105,95	160.107.102,00
PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Pusat	31.130.354,00	64.110.900,00	205,94	59.125.700,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah	37.404.539,00	119.098.308,00	318,41	105.295.650,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	14.304.781.407,00	18.472.453.052,00	129,13	16.741.948.380,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi	13.974.987.511,00	17.951.831.556,00	128,46	16.212.313.146,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum	34.501.854,00	65.533.725,00	189,94	57.649.534,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Pusat	108.887.647,00	164.662.917,00	151,22	143.944.284,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah	186.404.395,00	290.424.854,00	155,80	328.041.416,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	16.307.345.847,00	14.290.426.591,00	87,63	12.854.578.757,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi	15.776.517.619,00	13.505.715.891,00	85,61	12.207.102.732,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum	477.475.641,00	669.550.200,00	140,23	568.306.025,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Pusat	26.139.967,00	57.096.000,00	218,42	43.589.000,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Daerah	27.212.620,00	58.064.500,00	213,37	35.581.000,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	13.442.905.299,00	17.226.016.705,00	128,14	16.129.052.435,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi	10.321.986.353,00	13.309.594.755,00	128,94	12.412.233.310,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum	2.955.502.018,00	3.710.846.450,00	125,56	3.450.170.625,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Pusat	79.891.840,00	81.607.500,00	102,15	75.883.000,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah	85.525.088,00	123.968.000,00	144,95	190.765.500,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	1.419.819.270,00	1.237.085.451,00	87,13	1.125.378.684,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi	1.412.811.602,00	1.214.230.659,00	85,94	1.113.424.592,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Umum	2.000.000,00	1.067.600,00	53,38	1.067.600,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Pusat	3.395.866,00	14.589.492,00	429,63	2.660.792,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Daerah	1.611.802,00	7.197.700,00	446,56	8.225.700,00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	85.719.587.564,00	111.475.255.121,00	130,05	101.737.573.303,00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi	85.571.751.234,00	111.232.415.762,00	129,99	101.514.579.419,00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Pusat	51.664.268,00	69.785.259,00	135,07	65.652.709,00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah	96.172.062,00	173.054.100,00	179,94	157.341.175,00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	102.770.043,00	136.645.175,00	132,96	114.146.899,00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi	94.798.083,00	118.170.475,00	124,65	101.208.900,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Pusat	1.663.461,00	4.773.200,00	286,94	3.054.999,00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah	6.308.499,00	13.701.500,00	217,19	9.883.000,00

Tabel 5.6 Rincian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	476.300.202.663,00	522.716.638.500,00	109,75	443.090.099.000,00
BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	10.567.960.520,00	5.386.600.000,00	50,97	6.081.550.000,00
BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	10.567.960.520,00	5.386.600.000,00	50,97	6.081.550.000,00
BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	69.736.714.283,00	64.727.747.500,00	92,82	54.749.545.000,00
BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	69.736.714.283,00	64.727.747.500,00	92,82	54.749.545.000,00
BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	283.149.795.853,00	283.363.435.000,00	100,08	249.190.989.000,00
BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	283.149.795.853,00	283.363.435.000,00	100,08	249.190.989.000,00
BBNKB-Mobil Bus-Microbus	102.521.529,00	378.975.000,00	369,65	66.400.000,00
BBNKB-Mobil Bus-Microbus	102.521.529,00	378.975.000,00	369,65	66.400.000,00
BBNKB-Mobil Bus-Bus	967.683.385,00	2.602.425.000,00	268,93	1.427.750.000,00
BBNKB-Mobil Bus-Bus	967.683.385,00	2.602.425.000,00	268,93	1.427.750.000,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	7.470.018.730,00	11.545.050.000,00	154,55	11.280.340.000,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	7.470.018.730,00	11.545.050.000,00	154,55	11.280.340.000,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	9.087.837.563,00	4.335.870.000,00	47,71	4.143.830.000,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	9.087.837.563,00	4.335.870.000,00	47,71	4.143.830.000,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	3.708.648.545,00	7.391.990.000,00	199,32	5.984.656.000,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	3.708.648.545,00	7.391.990.000,00	199,32	5.984.656.000,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	509.164.232,00	505.800.000,00	99,34	522.500.000,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	509.164.232,00	505.800.000,00	99,34	522.500.000,00
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	90.792.524.649,00	142.115.939.000,00	156,53	109.392.888.000,00
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	90.792.524.649,00	142.115.939.000,00	156,53	109.392.888.000,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	207.333.374,00	362.807.000,00	174,99	249.651.000,00
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	207.333.374,00	362.807.000,00	174,99	249.651.000,00

Tabel 5.7 Rincian Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	494.400.985.079,00	490.605.194.542,00	99,23	492.259.273.564,00
PBBKB Bahan Bakar Bensin	232.584.824.580,00	255.059.527.531,00	109,66	234.997.829.925,00
PBBKB Bahan Bakar Solar	261.816.160.499,00	235.545.667.011,00	89,97	257.261.443.639,00

Tabel 5.8 Rincian Pajak Air Permukaan – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Pajak Air Permukaan	33.933.643.819,00	1.192.208.723,00	3,51	991.217.140,00
Pajak Air Permukaan	33.933.643.819,00	1.192.208.723,00	3,51	991.217.140,00

Pada tahun 2024 Pajak Air Permukaan terealisasi sebesar Rp1.192.208.723,00 atau sebesar 3,51% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp33.933.643.819,00 dikarenakan wajib pajak PT. Adhya Tirta Batam belum melakukan kewajiban pembayaran piutang pajak air permukaan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. PT. Adhya Tirta Batam (ATB) dinyatakan berkewajiban membayar piutang pajak air permukaan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 525K/TUN/2022 dan putusan MA atas Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan PT. ATB dimana Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (inkrah). Pemerintah Provinsi Kepulauan telah berupaya melakukan penagihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk tindakan penyitaan dan penyanderaan akan tetapi masih terbentur regulasi yang mengatur mekanisme pemberitahuan saldo rekening bank untuk keperluan penyitaan pajak daerah secara langsung dan terpisah dari ketentuan pajak pusat.

Tabel 5.9 Rincian Pajak Rokok – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Pajak Rokok	175.729.790.267,00	167.108.459.437,00	95,09	159.252.940.722,00
Pajak Rokok	175.729.790.267,00	167.108.459.437,00	95,09	159.252.940.722,00

Tabel 5.10 Rincian Pajak Alat Berat – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Pajak Alat Berat	20.122.026.000,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Alat Berat	20.122.026.000,00	0,00	0,00	0,00

Selanjutnya tidak tercapainya realisasi Pajak Alat Berat dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp20.122.026.000,00 dikarenakan masih terbatasnya Nilai Jual Alat Berat (NJAB) sebagai dasar pengenaan pajak untuk jenis Alat Berat yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Tahun 2024, sehingga belum bisa dilakukan pemungutan.

5.1.1.1.2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	155.935.540.754,00	148.286.242.017,30

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan pemungutan Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan juga Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada tahun 2024 Retribusi Daerah terealisasi sebesar Rp148.286.242.017,30 atau sebesar 95,09% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp155.935.540.754,00, termasuk Retribusi Jasa Umum pada rincian objek Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Jasa Usaha pada rincian objek Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila merupakan pendapatan yang diterima atas layanan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib dan Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud.

Adapun rincian Retribusi Daerah terdiri dari:

Tabel 5.11 Retribusi Daerah – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Retribusi Daerah	155.935.540.754,00	148.286.242.017,30	95,09	12.203.621.186,00
Retribusi Jasa Umum	137.250.000.000,00	137.516.081.176,30	100,19	0,00
Retribusi Jasa Usaha	10.395.178.254,00	5.742.143.841,00	55,24	5.299.967.186,00
Retribusi Perizinan Tertentu	8.290.362.500,00	5.028.017.000,00	60,65	6.903.654.000,00

Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.12 Rincian Retribusi Jasa Umum – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Retribusi Jasa Umum	137.250.000.000,00	137.516.081.176,30	100,19	0,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan	137.250.000.000,00	137.516.081.176,30	100,19	0,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	137.250.000.000,00	137.516.081.176,30	100,19	0,00

Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan tahun 2024 terealisasi sebesar Rp137.516.081.176,30 atau sebesar 100,19% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp137.250.000.000,00 dikarenakan meningkatnya jumlah pasien dan adanya pengembangan layanan kesehatan untuk penyakit jantung dan saraf pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib.

Tabel 5.13 Rincian Retribusi Jasa Usaha– LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Retribusi Jasa Usaha	10.395.178.254,00	5.742.143.841,00	55,24	5.299.967.186,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.022.220.000,00	1.927.137.000,00	95,30	3.076.350.090,00
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	676.332.000,00
Retribusi Pemakaian Laboratorium	0,00	0,00	0,00	996.118.090,00
Retribusi Pemakaian Ruangan	1.705.000.000,00	1.609.917.000,00	94,42	1.403.900.000,00
Retribusi Pemakaian Alat	317.220.000,00	317.220.000,00	100,00	0,00
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	5.000.000,00	8.250.000,00	165,00	0,00
Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	5.000.000,00	8.250.000,00	165,00	0,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	4.981.200.000,00	2.510.628.596,00	50,40	2.165.293.596,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	4.981.200.000,00	2.510.628.596,00	50,40	2.165.293.596,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	261.371.000,00	160.520.545,00	61,41	58.323.500,00
Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	60.000.000,00	88.735.700,00	147,89	0,00
Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	201.371.000,00	71.784.845,00	35,65	58.323.500,00
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	3.125.387.254,00	1.135.607.700,00	36,33	0,00
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	3.125.387.254,00	1.135.607.700,00	36,33	0,00

Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila tahun 2024 terealisasi sebesar Rp8.250.000,00 atau sebesar 165,00% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp5.000.000,00 dikarenakan meningkatnya penggunaan kamar di rumah singgah untuk keluarga pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib.

Selanjutnya pendapatan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan tahun 2024 terealisasi sebesar Rp2.510.628.596,00 atau sebesar 50,40% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp4.981.200.000,00, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan pada Dinas Perhubungan terealisasi sebesar Rp1.855.823.501,00 atau sebesar 53,31% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp3.481.200.000,00. Hal ini disebabkan Pelabuhan Penyeberangan Selat Belia yang dikelola oleh UPT Pelabuhan Wilayah II Kabupaten Karimun untuk sementara waktu tidak dapat beroperasi dikarenakan adanya perbaikan di sisi dermaga. Selain itu 2 (dua)

pelabuhan yang telah diserahkan oleh Kementerian Perhubungan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui P3D (Pengalihan Personil, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen) yaitu Pelabuhan Dabo di Kabupaten Lingga dan Pelabuhan Berhala di Kabupaten Kepulauan Anambas belum dapat dioptimalkan dikarenakan terbatasnya ketersediaan SDM.

2. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan terealisasi sebesar Rp654.805.095,00 atau 43,65% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.500.000.000,00. Hal ini disebabkan menurunnya tingkat pemanfaatan *cold storage* oleh pelaku usaha perikanan. Minimnya volume ikan yang disimpan di fasilitas *cold storage* mengindikasikan turunnya aktivitas bongkar muat dan distribusi hasil perikanan di pelabuhan, yang secara langsung berdampak pada menurunnya penerimaan dari retribusi jasa pelayanan kepelabuhan. Di samping itu sebagian besar Pelaku Usaha dan Masyarakat telah memiliki *Freezer* dan membangun *Air Blast Freezer* (ABF) serta *Cold Storage* sendiri untuk penyimpanan ikan. Penurunan ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal, seperti berkurangnya hasil tangkapan nelayan, cuaca ekstrem, dan musim ikan yang terjadi hanya 2 (dua) kali yaitu bulan Mei dan Oktober.

Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dengan sub rincian objek pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp88.735.700,00 atau sebesar 147,89% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp60.000.000,00 dikarenakan banyaknya permintaan pemeriksaan benih kelapa sawit dari PT. Bakti Tani Nusantara yang ada di Pulau Batam serta meningkatnya permintaan pembelian bibit tanaman buah. Sementara itu, Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan pada tahun 2024 pada Dinas Kelautan dan Perikanan terealisasi sebesar Rp71.784.845,00 atau sebesar 35,65% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp201.371.000,00 dikarenakan kondisi telur ikan yang tidak bagus dan kualitas air yang buruk akibat cuaca yang tidak menentu sehingga benih ikan yang banyak mati di ukuran ± 30 hari.

Pendapatan Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah terealisasi sebesar Rp1.135.607.700,00 atau 36,33% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp3.125.387.254,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan terealisasi sebesar Rp45.171.200,00 atau sebesar 13,88% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp325.387.254,00 dikarenakan menurunnya pemeriksaan kesehatan hewan ternak pada UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan terutama pemeriksaan kesehatan ternak babi yang dikelola oleh wajib retribusi PT. Indotirta Suaka yang bergerak di bidang usaha ekspor hewan ternak babi yang berlokasi di Pulau Bulan Kota Batam sebagai salah satu perusahaan penyumbang terbesar Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah. Hal ini disebabkan terjangkitnya hewan ternak babi akibat wabah penyakit *African Swine Fever* (ASF) sehingga mengakibatkan terhentinya ekspor babi ke Singapura.
2. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan terealisasi sebesar Rp1.090.436.500,00 atau sebesar 38,94% dari target yang ditetapkan dalam APBD Rp2.800.000.000,00 khususnya pada sektor layanan pengujian laboratorium bahan konstruksi. Hal ini disebabkan keterbatasan pada alat dan mesin uji laboratorium yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan. Kondisi ini berdampak pada penurunan kapasitas layanan karena tidak semua jenis uji dapat dilaksanakan, penurunan jumlah pelanggan pihak ketiga (kontraktor atau konsultan) beralih ke laboratorium lain.

Tabel 5.14 Rincian Retribusi Perizinan Tertentu – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Retribusi Perizinan Tertentu	8.290.362.500,00	5.028.017.000,00	60,65	6.903.654.000,00
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	18.800.000,00	18.800.000,00	100,00	565.218.000,00
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	18.800.000,00	18.800.000,00	100,00	565.218.000,00
Retribusi Izin Usaha Perikanan	0,00	0,00	0,00	1.456.630.000,00
Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan	0,00	0,00	0,00	1.456.630.000,00
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	0,00	0,00	0,00	4.881.806.000,00
Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	0,00	0,00	0,00	4.881.806.000,00
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	7.500.000.000,00	5.009.217.000,00	66,79	0,00
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	7.500.000.000,00	5.009.217.000,00	66,79	0,00
Retribusi Pertambangan Rakyat	771.562.500,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat	771.562.500,00	0,00	0,00	0,00

Pendapatan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp5.009.217.000,00 atau sebesar 66,79% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp7.500.000.000,00 dikarenakan pendapatan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) didominasi oleh wajib retribusi PT. Bintang Alumina Indonesia dimana terhitung mulai tanggal 1 Juli 2024 terdapat perubahan signifikan dalam sistem pengajuan perpanjangan TKA melalui aplikasi *online* yang disediakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI. Dalam update terbaru sistem tersebut, pengajuan perpanjangan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di PT. Bintang Alumina Indonesia menggunakan menu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang. Konsekuensi dari perubahan yang ada pada sistem tersebut adalah pengajuan perpanjangan TKA oleh PT. BAI hanya menggunakan 1 (satu) lokasi yaitu Kabupaten Bintang dan tidak lagi masuk sebagai pendapatan retribusi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Kemudian Retribusi Pertambangan Rakyat pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2024 tidak terealisasi dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp771.562.500,00 dikarenakan Pengurusan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di wilayah laut memerlukan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) yang merupakan salah satu persyaratan dalam pemberian Pengurusan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sedangkan Pengurusan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di wilayah darat belum memiliki dokumen teknis yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah sebelum diberikan IPR. Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 174.K/MB.01/MEM.B/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Izin Pertambangan Rakyat (IPERA) bahwa komponen biaya IPERA terdiri dari biaya pengelolaan wilayah, biaya pengelolaan perusahaan dan biaya pengelolaan lingkungan. Untuk komponen biaya IPERA

tersebut perlu ditetapkan dalam suatu peraturan daerah yang memuat besaran dari tiap-tiap komponen biaya, namun Provinsi Kepulauan Riau belum menetapkan peraturan daerah tersebut.

5.1.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	34.003.224.423,00	1.904.909.335,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan bagian laba atas penyertaan modal kepada Perusahaan Milik Daerah/BUMD. Pada tahun 2024 bagian laba atas penyertaan modal terealisasi sebesar Rp1.904.909.335,00 atau 5,60% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp34.003.224.423,00 dikarenakan kondisi keuangan 3 (tiga) BUMD mengalami kerugian yaitu PT. Pelabuhan Kepri sebesar Rp1.520.598.058,00, dan PDAM Tirta Kepri sebesar Rp3.122.555.359,00, serta PT. Pembangunan Kepri yang secara akumulasi tahunan juga masih mengalami kerugian, sehingga ketiga BUMD tersebut berdasarkan hasil RUPS tidak membagikan dividen kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024.

Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.15 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	34.003.224.423,00	1.904.909.335,00	5,60	2.449.330.649,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	34.003.224.423,00	1.904.909.335,00	5,60	2.449.330.649,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	4.503.224.423,00	1.904.909.335,00	42,30	2.449.330.649,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	4.503.224.423,00	1.904.909.335,00	42,30	2.449.330.649,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	25.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	25.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	4.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	4.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Bank Riau Kepri Syariah (dividen) sebesar Rp1.904.909.335,00. Perhitungan pembagian dividen PT. Bank Riau Kepri Syariah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Alokasi Penggunaan Laba Bersih

Tabel 5.16 Alokasi Penggunaan Laba Bersih

No	Keterangan	Komposisi (%)	Nominal (Rp)
1	Dividen	67,50%	191.548.170.597,00
2	Cadangan Umum	27,50%	78.038.143.576,00
3	Dana Pembinaan Kemitraan	5%	14.188.753.378,00
Total		100,00%	283.775.067.551,00

2. Dividen perbulan tahun buku 2023 yang dibayar pada tahun 2024 untuk seluruh pemegang saham sebesar Rp15.962.347.550,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Total Dividen}}{12 \text{ bulan}} = \frac{\text{Rp191.548.170.597,00}}{12} = \text{Rp15.962.347.550,00}$$

3. Jumlah modal PT. Bank Riau Kepri Syariah untuk periode bulan Januari s.d Maret 2023 berdasarkan pencatatan OJK sebesar Rp1.205.160.700.000,00.
4. Jumlah modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau periode bulan Januari s.d Maret 2023 berdasarkan pencatatan OJK Rp12.000.000.000,00 dengan komposisi sebesar 1% (pembulatan) melalui perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah modal pemegang saham} \times 100\%}{\text{Total modal Bank}} = \frac{\text{Rp12.000.000.000,00}}{\text{Rp1.205.160.700.000,00}} \times 100\% = 1\%$$

Perhitungan dividen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan komposisi saham sebesar 1% untuk periode bulan Januari s.d Maret 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.17 Perhitungan Dividen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau periode bulan Januari s.d Maret 2023

No	Bulan	Dividen yang diterima per bulan (Dividen perbulan seluruh pemegang saham x komposisi) = Rp15.962.347.550,00 X 1%
1	Januari	158.939.942,00
2	Februari	158.939.942,00
3	Maret	158.939.942,00
Total		476.819.826,00

5. Jumlah modal PT. Bank Riau Kepri Syariah untuk periode bulan April s.d Desember 2023 berdasarkan pencatatan OJK sebesar Rp1.207.160.700.000,00.

Perubahan Modal PT. Bank Riau Kepri Syariah dikarenakan adanya penambahan setoran modal dari pemegang saham lainnya yang diakui atau dicatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada bulan April 2023, karena adanya penambahan setoran modal dari pemegang saham lain sebesar Rp2.000.000.000,00.

6. Jumlah Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau periode bulan April s.d Desember 2023 berdasarkan pencatatan OJK Rp12.000.000.000,00 dengan komposisi sebesar 0,99% (pembulatan) dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah modal pemegang saham} \times 100\%}{\text{Total modal Bank}} = \frac{\text{Rp12.000.000.000,00}}{\text{Rp1.207.160.700.000,00}} \times 100\% = 0,99\%$$

Perhitungan Dividen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan komposisi saham sebesar 0,99% untuk periode April s.d Desember 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.18 Perhitungan Dividen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau periode bulan April s.d Desember 2023

No	Bulan	Dividen yang diterima per bulan (Dividen perbulan seluruh pemegang saham x komposisi) = Rp15.962.347.550,00 X 0,99%
1	April	158.676.612,11
2	Mei	158.676.612,11
3	Juni	158.676.612,11
4	Juli	158.676.612,11
5	Agustus	158.676.612,11
6	September	158.676.612,11
7	Oktober	158.676.612,11
8	November	158.676.612,11
9	Desember	158.676.612,11
Total		1.428.089.509,00

7. Total dari dividen yang diterima Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk tahun buku 2023 yang dibayarkan pada tahun 2024:

= Total dividen (Januari s.d Maret 2023) + Total dividen (April s.d Desember 2023)

= Rp476.819.826,00+ Rp1.428.089.509,00 = **Rp1.904.909.335,00**

8. Perubahan persentase komposisi modal setiap pemegang saham, dipengaruhi oleh adanya penambahan penyertaan modal dari pemegang saham lain yang diakui/dicatat sebagai tambahan penyertaan modal oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pada tanggal 28 April 2025 PT. Bank Riau Kepri Syariah (PT. BRKS) mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2025. Salah satu agenda dalam rapat tersebut yaitu menetapkan Laporan Tahunan Tahun Buku 2024. Dalam Laporan Tahunan disebutkan PT. BRKS mencatat Laba Bersih sebesar Rp339.374.748.158,00 dan juga dijelaskan kebijakan pembagian dividen sebagai berikut:

- 1. Membayarkan dividen tunai minimum 50% dari laba bersih setiap tahun, yang besarnya akan diputuskan melalui RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi.
- 2. Keputusan untuk membayar dividen tergantung pada laba, kondisi keuangan dan likuiditas, kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, serta faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi Bank setelah memperoleh persetujuan RUPS.

Sampai dengan saat ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum menerima salinan putusan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2025, sehingga belum dapat memastikan nilai dividen yang akan diterima pada tahun 2025.

5.1.1.1.4. Lain – lain PAD Yang Sah

Lain – lain PAD Yang Sah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	92.414.477.084,00	52.566.226.972,38

Lain-lain PAD yang sah merupakan pendapatan daerah yang bukan berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba dari BUMD dan Investasi lainnya dipungut serta disetorkan ke Kas Daerah maupun Kas di Badan Layanan Umum Daerah dalam tahun anggaran yang berjalan.

Pada tahun 2024 Lain-lain PAD yang Sah terealisasi sebesar Rp52.566.226.972,38 atau 56,88% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp92.414.477.084,00 dengan realisasi yang terdiri dari:

Tabel 5.19 Lain – lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Lain-lain PAD yang Sah	92.414.477.084,00	52.566.226.972,38	56,88	160.830.717.090,31
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	1.842.358.888,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	20.000.000.000,00	1.336.203.722,00	6,68	43.460.000,00
Jasa Giro	15.000.000.000,00	6.290.193.867,90	41,93	7.819.679.440,45
Pendapatan Bunga	339.106.060,00	339.106.060,00	100,00	1.056.231.052,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	2.713.160.286,90	0,00	821.214.202,67
Pendapatan Denda Pajak Daerah	43.673.210.893,00	14.570.561.041,00	33,36	18.476.805.010,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	210.000,00	6.501.215,00	3.095,82	3.721.717,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	904.694.700,00	0,00	500.000.000,00
Pendapatan dari Pengembalian	25.565.100,00	3.951.467.681,76	15.456,49	2.560.433.079,91
Pendapatan BLUD	13.360.622.951,00	22.421.878.770,68	167,82	127.664.894.152,28
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	4.925.402,14	0,00	0,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	15.762.080,00	26.034.225,00	165,17	40.419.548,00

Rincian Lain-lain PAD yang Sah diuraikan pada tabel-tabel berikut ini:

Tabel 5.20 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	1.842.358.888,00
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	1.842.358.888,00
Hasil Penjualan Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	1.842.358.888,00

Tabel 5.21 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	20.000.000.000,00	1.336.203.722,00	6,68	43.460.000,00
Hasil Sewa BMD	0,00	0,00	0,00	43.460.000,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Hasil Sewa BMD	0,00	0,00	0,00	43.460.000,00
Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	20.000.000.000,00	1.336.203.722,00	6,68	0,00
Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	20.000.000.000,00	1.336.203.722,00	6,68	0,00

Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD merupakan pendapatan sewa kantin dan ruang ATM di lingkungan satuan pendidikan terealisasi sebesar Rp1.336.203.722,00 atau 6,68% dari yang dianggarkan sebesar Rp20.000.000.000,00 pada tahun 2024 dikarenakan masih disusunnya regulasi dan penetapan tarif sewa di lingkungan satuan pendidikan.

Tabel 5.22 Jasa Giro – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Jasa Giro	15.000.000.000,00	6.290.193.867,90	41,93	7.819.679.440,45
Jasa Giro pada Kas Daerah	15.000.000.000,00	4.478.565.314,51	29,86	7.553.965.996,47
Jasa Giro pada Kas Daerah	15.000.000.000,00	4.478.565.314,51	29,86	7.553.965.996,47
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	0,00	1.617.505.366,33	0,00	111.245.945,90
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	0,00	1.617.505.366,33	0,00	111.245.945,90
Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0,00	194.123.187,06	0,00	154.467.498,08
Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0,00	194.123.187,06	0,00	154.467.498,08

Tabel 5.23 Pendapatan Bunga – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Pendapatan Bunga	339.106.060,00	339.106.060,00	100,00	1.056.231.052,00
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	339.106.060,00	339.106.060,00	100,00	1.056.231.052,00
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	339.106.060,00	339.106.060,00	100,00	1.056.231.052,00

Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah terealisasi sebesar Rp339.106.060,00 merupakan remunerasi dari Bank Indonesia atas Pembentukan Fasilitas TDF Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi hasil oleh Kementerian Keuangan.

Tabel 5.24 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

Tabel 5.25 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	2.713.160.286,90	0,00	821.214.202,67
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	2.713.160.286,90	0,00	821.214.202,67
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	2.713.160.286,90	0,00	821.214.202,67

Tabel 5.26 Pendapatan Denda Pajak Daerah – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Pendapatan Denda Pajak Daerah	43.673.210.893,00	14.570.561.041,00	33,36	18.476.805.010,00
Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	27.084.921.860,00	14.542.181.200,00	53,69	18.339.520.780,00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan	0,00	0,00	0,00	584.365.320,00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep	0,00	0,00	0,00	1.982.830.400,00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus	0,00	0,00	0,00	8.801.097.800,00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus	0,00	0,00	0,00	21.406.100,00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus	0,00	0,00	0,00	118.645.100,00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	0,00	0,00	0,00	645.478.600,00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	0,00	0,00	0,00	280.614.800,00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	0,00	0,00	0,00	445.840.200,00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	0,00	0,00	0,00	33.669.600,00
Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	0,00	0,00	0,00	5.421.833.860,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	0,00	0,00	0,00	3.739.000,00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	1.171.074.000,00	364.564.700,00	31,13	0,00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi	2.362.038.333,00	1.775.942.100,00	75,19	0,00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	13.659.584.360,00	7.228.404.700,00	52,92	0,00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi	48.531.333,00	7.833.700,00	16,14	0,00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi	190.808.167,00	55.134.300,00	28,90	0,00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi	1.122.821.667,00	504.236.700,00	44,91	0,00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi	525.145.833,00	258.806.800,00	49,28	0,00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi	813.161.000,00	236.019.900,00	29,02	0,00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi	219.525.000,00	38.360.700,00	17,47	0,00
Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi	5.462.702.500,00	4.070.233.900,00	74,51	0,00
Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi	1.509.529.667,00	2.643.700,00	0,18	0,00
Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	0,00	0,00	0,00	208.800,00
Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	0,00	0,00	0,00	62.400,00
Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	0,00	0,00	0,00	70.800,00
Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	0,00	0,00	0,00	60.800,00
Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	0,00	0,00	0,00	14.800,00
Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	800.820.000,00	27.713.748,00	3,46	135.242.816,00
Pendapatan Denda PBBKB-Bahan Bakar Solar	800.820.000,00	27.713.748,00	3,46	135.242.816,00
Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	15.787.469.033,00	666.093,00	0,00	1.832.614,00
Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	15.787.469.033,00	666.093,00	0,00	1.832.614,00

Tabel 5.27 Pendapatan Denda Retribusi Daerah – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	210.000,00	6.501.215,00	3095,82	3.721.717,00
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	210.000,00	6.501.215,00	3095,82	3.721.717,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	1.167.600,00
Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- Pemakaian Laboratorium	0,00	0,00	0,00	154.117,00
Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- Pemakaian Ruang	210.000,00	210.000,00	100,00	2.400.000,00
Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan- Pelayanan Kepelabuhanan	0,00	6.291.215,00	0,00	0,00

Tabel 5.28 Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	904.694.700,00	0,00	500.000.000,00
Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	0,00	904.694.700,00	0,00	500.000.000,00
Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	0,00	904.694.700,00	0,00	500.000.000,00

Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa terealisasi sebesar Rp904.694.700,00 merupakan pencairan jaminan atas pelaksanaan paket pekerjaan Pembangunan Bunker Radioterapi dan fasilitas pendukung yang dilaksanakan oleh PT. Damar Intan Lestari pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib dikarenakan wanprestasi pekerjaan.

Tabel 5.29 Pendapatan dari Pengembalian

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Pendapatan dari Pengembalian	25.565.100,00	3.951.467.681,76	15456,49	2.560.433.079,91
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	0,00	149.747.935,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	0,00	149.747.935,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	145.420.254,00	0,00	259.929.050,88
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	0,00	145.420.254,00	0,00	259.929.050,88
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kematian (JKM)	0,00	0,00	0,00	666.233,12
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKM	0,00	0,00	0,00	666.233,12

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	257.212.278,00	0,00	145.372.783,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	0,00	148.281.798,00	0,00	6.534.900,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	0,00	97.866.080,00	0,00	28.729.128,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PNS	0,00	0,00	0,00	2.520.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS	0,00	9.399.400,00	0,00	35.680.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PNS	0,00	1.665.000,00	0,00	70.801.674,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	0,00	0,00	0,00	1.107.081,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN	0,00	2.542.168,00	0,00	15.026.699,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	0,00	2.542.168,00	0,00	15.026.699,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	646.000,00	0,00	27.396.900,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium-Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	0,00	646.000,00	0,00	27.396.900,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD-Dana Operasional DPRD	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	0,00	395.034.137,88	0,00	212.466.349,35
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	0,00	0,00	102.386.637,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya	0,00	0,00	0,00	81.569.422,20

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	998.700,00	0,00	6.400,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	0,00	8.002.000,00	0,00	16.024.900,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	0,00	0,00	0,00	2.301.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	370.517.937,88	0,00	8.377.990,15
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	15.339.500,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat	0,00	175.000,00	0,00	1.800.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	0,00	851.420.119,88	0,00	600.682.028,24
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	0,00	0,00	75.165.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	36.786.100,00	0,00	48.750.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	63.960.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Laboratorium	0,00	0,00	0,00	960.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi	0,00	242.571.035,74	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pelayanan Umum	0,00	0,00	0,00	273.731.841,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	0,00	39.730.000,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	0,00	0,00	0,00	1.020.700,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	36.795.666,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya	0,00	0,00	0,00	67.359.981,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gudang	0,00	0,00	0,00	6.909.091,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	0,00	0,00	0,00	1.666.666,67
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	0,00	0,00	0,00	6,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	0,00	0,00	0,00	0,07
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	0,00	134.527.433,33	0,00	1,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	0,00	66.798.555,56	0,00	1.861.073,95
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	0,00	311.911.995,25	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	0,00	0,00	0,00	1,55
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	0,00	0,00	0,00	2.966.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	0,00	0,00	0,00	19.536.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan-Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	19.095.000,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	0,00	404.212.131,71	0,00	82.873.837,10
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	0,00	519,33	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	1.201.128,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan- Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	0,00	226.893.886,52	0,00	46.139.139,67
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan- Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	52.866.948,86	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan- Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	0,00	0,00	0,00	33.452.829,41
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan- Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Rumah Negara Golongan II	0,00	124.450.777,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi- Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan- Jalan Provinsi	0,00	0,00	0,00	2.080.740,02
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	23.545.000,00	0,00	65.627.650,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat- Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	0,00	0,00	60.627.650,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat- Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	0,00	23.545.000,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat- Uang yang Diberikan kepada Posyandu	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada BUMD	0,00	9.360.000,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada BUMD	0,00	9.360.000,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	482.479.824,02	0,00	50.453.198,48
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0,00	482.479.824,02	0,00	50.453.198,48
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	8.829.152,41

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	8.829.152,41
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	173.232.852,00	0,00	325.652,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	7.335.096,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	15.052,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	51.763.447,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	310.600,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	113.964.157,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	170.152,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar	0,00	0,00	0,00	11.732.710,36
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya	0,00	0,00	0,00	11.732.710,36
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	4.754.750,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	4.754.750,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	31.481.500,33	0,00	5.000.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0,00	31.481.500,33	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Mebel	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Studio-Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Komputer	0,00	23.773.750,00	0,00	15.000.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Komputer Unit-Personal Computer	0,00	23.773.750,00	0,00	15.000.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Peraga	0,00	0,00	0,00	28.782.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan	0,00	0,00	0,00	28.782.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	0,00	249.173.291,33	0,00	399.589.644,82
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	170.285.426,31	0,00	120.552.360,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	68.965.865,02	0,00	272.806.019,89
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	0,00	9.922.000,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	0,00	0,00	0,00	0,93
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	0,00	0,00	0,00	6.231.264,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	0,00	264.644.630,46	0,00	439.942.780,62

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Provinsi	0,00	264.644.630,46	0,00	427.068.408,62
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Khusus	0,00	0,00	0,00	12.874.372,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air	0,00	291.280.951,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	0,00	291.280.951,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan	0,00	133.117.433,15	0,00	0,53
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	0,00	112.556.500,55	0,00	0,53
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	0,00	20.560.932,60	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	22.333.725,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	0,00	0,00	0,00	2.333.725,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Tanaman	0,00	20.805.000,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanaman-Tanaman	0,00	20.805.000,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tidak Terduga	0,00	12.500.000,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tidak Terduga	0,00	12.500.000,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	143.993.760,00	0,00	0,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa	0,00	143.993.760,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BLUD, Belanja Barang dan Jasa BLUD, Belanja Modal Tanah BLUD, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD, Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD, serta Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	25.565.100,00	35.592.600,00	139,22	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BLUD	25.565.100,00	35.592.600,00	139,22	0,00

Pendapatan dari Pengembalian terealisasi sebesar Rp3.951.467.681,76 merupakan pengembalian ke Kas Daerah atas belanja dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan tahun sebelumnya.

Tabel 5.30 Pendapatan BLUD – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Pendapatan BLUD	13.360.622.951,00	22.421.878.770,68	167,82	127.664.894.152,28
Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00	20.712.595.015,00
Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00	20.712.595.015,00
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	2.616.667.342,00	3.701.250.776,00	141,45	105.761.483.321,00
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	2.616.667.342,00	3.701.250.776,00	141,45	105.761.483.321,00
Pendapatan BLUD dari Hibah	9.803.737.634,00	16.693.324.096,29	170,28	0,00
Pendapatan BLUD dari Hibah Terikat	0,00	3.912.900.000,00	0,00	0,00
Pendapatan BLUD dari Hibah Tidak Terikat	9.803.737.634,00	12.780.424.096,29	130,36	0,00
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	825.783.075,00	1.248.815.078,00	151,23	590.633.800,00
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	825.783.075,00	1.248.815.078,00	151,23	590.633.800,00
Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	114.434.900,00	778.488.820,39	680,29	600.182.016,28
Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	64.434.900,00	79.055.935,69	122,69	600.182.016,28
Pendapatan BLUD dari Pengembangan Usaha	50.000.000,00	699.432.884,70	1398,87	0,00

Pendapatan BLUD pada 5 (lima) BLUD SMK terealisasi sebesar Rp21.551.503.776,29 atau sebesar 170,42% dari target yang ditetapkan sebesar Rp12.646.188.051,00 dikarenakan adanya pendapatan BLUD yang bersumber dari Sumbangan Pendanaan Pendidikan (SPP) dan program *teaching factory*.

Sedangkan Pendapatan BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib terealisasi sebesar Rp870.374.994,39 atau sebesar 121,83% dari target yang ditetapkan sebesar Rp714.434.900,00 dikarenakan Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib menjadi salah satu rumah sakit yang mendukung program pendidikan dan pelatihan bagi siswa untuk belajar langsung dari tenaga medis profesional dimana kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kualitas layanan kesehatan, tetapi juga membuka sumber pendapatan tambahan melalui kerja sama pendidikan dan pelatihan, termasuk biaya jasa pelatihan. Selain itu, BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib juga mengimplementasikan sistem pengelolaan parkir profesional yang dikelola oleh pihak ketiga atau unit khusus, dimana pengelolaan parkir ini memberikan kontribusi pendapatan.

Tabel 5.31 Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	4.925.402,14	0,00	0,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	4.925.402,14	0,00	0,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	4.925.402,14	0,00	0,00

Tabel 5.32 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	15.762.080,00	26.034.225,00	165,17	40.419.548,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	15.762.080,00	26.034.225,00	165,17	40.419.548,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	15.762.080,00	26.034.225,00	165,17	40.419.548,00

5.1.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	2.250.268.116.891,00	1.976.533.066.207,00

Pendapatan Transfer adalah pendapatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang sumber dananya berasal dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024. Pendapatan Transfer tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp1.976.533.066.207,00 atau 87,84% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp2.250.268.116.891,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dimana Dana Perimbangan

terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Non Fisik sedangkan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya yaitu Insentif Fiskal dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.33 Pendapatan Transfer – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
PENDAPATAN TRANSFER	2.250.268.116.891,00	1.976.533.066.207,00	87,84	2.361.792.541.904,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.250.268.116.891,00	1.976.533.066.207,00	87,84	2.361.792.541.904,00
Dana Perimbangan	2.235.949.562.891,00	1.965.217.978.207,00	87,89	2.355.098.796.904,00
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	583.597.438.891,00	318.182.556.980,00	54,52	637.829.070.577,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.177.919.036.000,00	1.177.916.590.123,00	100,00	1.131.016.955.470,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	160.607.688.000,00	157.564.483.366,00	98,11	299.220.452.769,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	313.825.400.000,00	311.554.347.738,00	99,28	287.032.318.088,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	14.318.554.000,00	11.315.088.000,00	79,02	6.693.745.000,00
Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	6.693.745.000,00
Insentif Fiskal	14.318.554.000,00	11.315.088.000,00	79,02	0,00

Rekapitulasi Realisasi Pendapatan Transfer selama Tahun 2024 dapat dilihat pada Lampiran 1.

5.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

5.1.1.2.1.1. Pendapatan Transfer - Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah dana perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN. Dana ini meliputi:

A. Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak – LRA

Dana Bagi Hasil Pajak	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	246.156.209.178,00	184.411.204.980,00

Dana Bagi Hasil Pajak merupakan pendapatan transfer yang berasal dari pemerintah pusat yang meliputi bagi hasil pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21, 26, dan 29), pajak bumi dan bangunan, bagi hasil bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga menerima penyaluran kurang bayar dan lebih bayar Dana Bagi Hasil Pajak pada Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2024 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024.

Pada tahun 2024 realisasi Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp184.411.204.980,00 atau 74,92% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp246.156.209.178,00 yang terdiri dari rincian sebagai berikut:

Tabel 5.34 Dana Bagi Hasil Pajak – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak	246.156.209.178,00	184.411.204.980,00	74,92	208.705.816.296,00
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	49.570.316.366,00	24.469.915.000,00	49,36	45.925.981.538,00
DBH PPh Pasal 21	182.163.015.657,00	150.453.257.000,00	82,59	148.680.792.835,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	14.372.943.155,00	9.435.749.000,00	65,65	14.056.369.931,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	49.934.000,00	52.283.980,00	104,71	42.671.992,00

B. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	337.441.229.713,00	133.771.352.000,00

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam merupakan pendapatan transfer yang berasal dari pemerintah pusat yang disebabkan oleh kegiatan eksploitasi atas sumber daya alam yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang meliputi Bagi Hasil Minyak Bumi dan Sumber Daya Alam, PSDH, Iuran Eksploitasi (Royalti), dan Dana Reboisasi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga menerima penyaluran kurang bayar dan lebih bayar Dana Bagi Hasil Pajak pada Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2024 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024.

Pada tahun 2024 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) terealisasi sebesar Rp133.771.352.000,00 atau 39,64% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp337.441.229.713,00. Rincian Bagi Hasil Sumber Daya Alam terdiri dari:

Tabel 5.35 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	337.441.229.713,00	133.771.352.000,00	39,64	429.123.254.281,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	74.782.206.127,00	13.984.366.000,00	18,70	93.467.808.878,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	252.708.303.481,00	108.952.867.000,00	43,11	325.628.393.765,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	1.314.397.000,00	1.314.397.000,00	100,00	1.420.608.214,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	4.857.165.000,00	4.857.165.000,00	100,00	5.812.944.496,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	85.844.605,00	85.688.000,00	99,82	2.214.456.165,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	0,00	0,00	0,00	279.841,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	1.877.681.500,00	2.761.237.000,00	147,06	578.762.922,00
DBH Sawit	1.815.632.000,00	1.815.632.000,00	100,00	0,00

C. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	1.177.919.036.000,00	1.177.916.590.123,00

Dana Alokasi Umum merupakan pendapatan transfer yang berasal dari pemerintah pusat yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.

Pada tahun 2024 Dana Alokasi Umum terealisasi sebesar Rp1.177.916.590.123,00 atau 100,00%, dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.177.919.036.000,00.

D. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	474.433.088.000,00	469.118.831.104,00

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan pendapatan transfer yang berasal dari pemerintah pusat yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.

Jenis Dana Alokasi Khusus terdiri atas :

- a) Dana Alokasi Khusus Fisik
- b) Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Pada tahun 2024 Dana Alokasi Khusus terealisasi sebesar Rp469.118.831.104,00 atau 98,88%, dari yang ditargetkan dalam APBD sebesar Rp474.433.088.000,00 dengan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.36 Dana Alokasi Khusus – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)	474.433.088.000,00	469.118.831.104,00	98,88	586.252.770.857,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	160.607.688.000,00	157.564.483.366,00	98,11	299.220.452.769,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	313.825.400.000,00	311.554.347.738,00	99,28	287.032.318.088,00

DAK Fisik

Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik. Pada tahun 2024 Dana Alokasi Khusus Fisik terealisasi sebesar Rp157.564.483.366,00 atau 98,11%, dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp160.607.688.000,00 dengan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.37 Dana Alokasi Khusus Fisik – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	160.607.688.000,00	157.564.483.366,00	98,11	299.220.452.769,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	49.621.937.000,00	48.956.011.194,00	98,66	46.925.881.438,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	2.845.532.000,00	2.818.515.575,00	99,05	9.911.520.364,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK	39.043.116.000,00	38.425.722.123,00	98,42	40.517.443.624,00
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	3.139.438.000,00	3.074.134.186,00	97,92	4.818.335.302,00
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	12.535.276.000,00	11.741.796.103,00	93,67	5.140.770.791,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	27.526.976.000,00	27.437.144.515,00	99,67	51.242.860.490,00
DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Penugasan	22.895.413.000,00	22.172.209.670,00	96,84	35.847.216.075,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	3.000.000.000,00	2.938.950.000,00	97,97	104.816.424.685,00

DAK Non Fisik

DAK Non Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah. DAK Non Fisik terdiri dari beberapa bidang sebagai berikut:

- 1) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler
- 2) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja
- 3) Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah
- 4) Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah
- 5) Dana Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah
- 6) Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
- 7) Dana Fasilitasi Penanaman Modal
- 8) Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana
- 9) Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak

DAK Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler dan Kinerja pada tahun 2024 tidak ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah akan tetapi langsung disalurkan ke masing-masing Rekening Satuan Pendidikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.

Terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Dana Pelayanan Kepariwisata Tahun Anggaran 2024, maka terdapat perubahan data kebutuhan dana alokasi khusus nonfisik tunjangan guru aparatur sipil negara daerah sehingga menyebabkan perubahan rincian dana alokasi khusus nonfisik tunjangan guru aparatur sipil negara daerah tahun anggaran 2024 yang diusulkan oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan sehingga perlu menyesuaikan anggaran dana alokasi khusus nonfisik tahun anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.13 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024. Oleh sebab itu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyesuaikan alokasi anggaran untuk pembayaran Tunjangan Profesi Guru Aparatur Sipil Daerah, Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Daerah dan Tunjangan Khusus Guru Aparatur Sipil Daerah.

Pada tahun 2024 Dana Alokasi Khusus Non Fisik terealisasi sebesar Rp311.554.347.738,00 atau 99,28%, dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp313.825.400.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.38 Dana Alokasi Khusus Non Fisik – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	313.825.400.000,00	311.554.347.738,00	99,28	287.032.318.088,00
DAK Non Fisik-BOS Reguler	190.787.400.000,00	189.107.070.439,00	99,12	179.213.318.625,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	4.782.500.000,00	4.712.500.000,00	98,54	5.677.500.000,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	104.615.759.000,00	104.615.759.000,00	100,00	88.966.611.000,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.977.250.000,00	2.977.250.000,00	100,00	3.062.500.000,00
DAK Non Fisik-TKG PNSD	1.042.018.000,00	1.042.018.000,00	100,00	984.100.000,00
DAK Non Fisik-PK2UKM	3.556.580.000,00	3.411.365.644,00	95,92	2.074.759.645,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	1.634.207.000,00	1.559.088.702,00	95,40	1.027.770.092,00
DAK Non Fisik-BOKB-KB	4.023.686.000,00	3.725.918.697,00	92,60	5.478.233.615,00
DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	406.000.000,00	403.377.256,00	99,35	547.525.111,00

1) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	190.787.400.000,00	189.107.070.439,00

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler adalah Dana Bos yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Pada tahun 2024 Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler terealisasi sebesar Rp189.107.070.439,00 atau 99,12% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp190.787.400.000,00.

2) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	4.782.500.000,00	4.712.500.000,00

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja adalah Dana BOS yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan. Pada tahun 2024 Dana BOS Kinerja terealisasi sebesar Rp4.712.500.000,00 atau 98,54% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp4.782.500.000,00.

3) Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah

Dana TPG PNSD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	104.615.759.000,00	104.615.759.000,00

Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut Dana TPG PNSD merupakan tunjangan profesi yang diberikan kepada guru pegawai negeri sipil daerah dan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2024 Dana TPG PNSD terealisasi sebesar Rp104.615.759.000,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp104.615.759.000,00.

4) Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah

Dana Tamsil Guru PNSD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	2.977.250.000,00	2.977.250.000,00

Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut Dana Tamsil Guru PNSD merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada guru pegawai negeri sipil daerah dan guru pemerintah dengan perjanjian kerja yang belum mendapatkan TPG PNSD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2024 Dana Tamsil Guru PNSD terealisasi sebesar Rp2.977.250.000,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp2.977.250.000,00.

5) Dana Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah

Dana TKG PNSD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	1.042.018.000,00	1.042.018.000,00

Dana Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut Dana TKG PNSD merupakan tunjangan yang diberikan kepada guru pegawai negeri sipil daerah dan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagai kompensasi atas kesulitan hidup dalam melaksanakan tugas di daerah khusus yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan. Pada tahun 2024 Dana TKG PNSD terealisasi sebesar Rp1.042.018.000,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.042.018.000,00.

6) Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil Menengah

Dana PK2UKM	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
-------------	---------------	----------------

	3.556.580.000,00	3.411.365.644,00
--	------------------	------------------

Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil Menengah yang selanjutnya disebut Dana PK2UKM adalah dana yang digunakan untuk membantu mendanai kegiatan peningkatan kapasitas koperasi, dan usaha kecil dan menengah. Pada tahun 2024 Dana PK2UKM terealisasi sebesar Rp3.411.365.644,00 atau 95,92% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp3.556.580.000,00.

7) **Dana Fasilitas Penanaman Modal**

Dana Fasilitas Penanaman Modal	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	1.634.207.000,00	1.559.088.702,00

Dana Fasilitas Penanaman Modal adalah dana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan fasilitas penanaman modal di daerah sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2024 Dana Fasilitas Penanaman Modal terealisasi sebesar Rp1.559.088.702,00 atau 95,40% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.634.207.000,00.

8) **Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana**

Dana BOKB-KB	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	4.023.686.000,00	3.725.918.697,00

Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dana BOKB-KB adalah dana yang digunakan untuk meningkatkan keikutsertaan KB dengan peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata. Pada tahun 2024 Dana BOK-KB terealisasi sebesar Rp3.725.918.697,00 atau 92,60% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp4.023.686.000,00.

9) **Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak**

Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	406.000.000,00	403.377.256,00

Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak adalah bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam penyediaan layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang. Pada tahun 2024 Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak terealisasi sebesar Rp403.377.256,00 atau 99,35% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp406.000.000,00.

5.1.1.2.2.1. **Insentif Fiskal - LRA**

Insentif Fiskal	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	14.318.554.000,00	11.315.088.000,00

Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada Daerah atas pencapaian Kinerja berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintahan daerah antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar, dukungan terhadap kebijakan strategis nasional, dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.

Pada tahun 2024 Insentif Fiskal terealisasi sebesar Rp11.315.088.000,00 atau 79,02% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp14.318.554.000,00. Pengelolaan Insentif Fiskal berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 353 Tahun 2024 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat menurut Provinsi/Kabupaten/Kota.

5.1.1.3. Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	4.092.700.000,00	1.300.531.591,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah merupakan hibah/sumbangan pihak ketiga dan Pendapatan Hibah dari Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Pada tahun anggaran 2024 penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terealisasi sebesar Rp1.300.531.591,00 atau 31,78% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp4.092.700.000,00 yang merupakan Sumbangan Hibah dari PT. Jasa Raharja kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Kepulauan Riau dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor P/13/SP/2024 dan Nomor 636/HIBAH/BAPENDA/2024 tanggal 06 September 2024, dengan nilai NPHD sebesar Rp1.292.700.000,00 dan juga berasal dari Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis yang merupakan pengembalian atas penutupan rekening dana Sumbangan Pendanaan Pendidikan (SPP) pada SMKN 9 Batam dan SMKN 2 Karimun. Sedangkan Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri tidak terealisasi dikarenakan sampai dengan periode 31 Desember 2024 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum menerima hibah berupa uang yang ditujukan untuk pengembangan asrama mahasiswa di Jakarta berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Kerabat Provinsi Kepulauan Riau Jabodetabek dan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 18/KPKRJ-NPHD/XI/2024 dan Nomor B/023.3/1460.1/BKAD-SET/2024 tentang Hibah berupa Uang dari Kerabat Provinsi Kepulauan Riau Jabodetabek kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 5.39 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.092.700.000,00	1.300.531.591,00	31,78	1.278.720.000,00
Pendapatan Hibah	4.092.700.000,00	1.300.531.591,00	31,78	1.278.720.000,00
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	2.800.000.000,00	0,00	0,00	0,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	2.800.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	1.292.700.000,00	1.292.700.000,00	100,00	1.278.720.000,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	1.292.700.000,00	1.292.700.000,00	100,00	1.278.720.000,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	7.831.591,00	0,00	0,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	7.831.591,00	0,00	0,00

5.1.2. Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran melalui Rekening Kas Umum Daerah dan Kas Badan Layanan Umum Daerah serta Belanja Operasional Sekolah (BOS) yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan, dan Pemerintah Daerah tidak akan memperoleh pembayarannya kembali.

Tabel 5.40 Belanja Daerah – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
BELANJA DAERAH	4.414.198.804.785,00	4.071.747.457.825,29	92,24	4.276.981.449.459,56
BELANJA OPERASI	3.222.810.004.132,90	2.987.193.758.080,43	92,69	2.888.146.534.690,97
Belanja Pegawai	1.329.553.415.809,12	1.309.833.869.704,00	98,52	1.100.521.283.967,05
Belanja Barang dan Jasa	1.502.668.209.237,78	1.311.138.772.714,16	87,25	1.405.114.292.589,86
Belanja Bunga	4.050.000.000,00	3.692.560.273,00	91,17	8.623.436.793,00
Belanja Subsidi	1.400.000.000,00	944.301.180,00	67,45	4.143.883.000,00
Belanja Hibah	380.037.014.086,00	357.581.329.209,27	94,09	362.326.208.341,06
Belanja Bantuan Sosial	5.101.365.000,00	4.002.925.000,00	78,47	7.417.430.000,00
BELANJA MODAL	344.997.515.174,10	307.344.075.589,86	89,09	618.877.436.638,59
Belanja Modal Tanah	8.021.100.000,00	920.100.000,00	11,47	1.388.489.184,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	130.089.417.367,93	115.508.155.838,84	88,79	202.847.528.770,05
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	138.014.437.494,17	129.103.961.833,55	93,54	232.962.878.105,59
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	43.766.559.842,00	36.791.762.576,47	84,06	178.551.126.080,95
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	19.529.407.470,00	19.630.419.447,00	100,52	529.474.380,00
Belanja Modal Aset Lainnya	5.576.593.000,00	5.389.675.894,00	96,65	2.597.940.118,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	4.773.672.048,00	2.065.423.140,00	43,27	2.413.029.129,00
Belanja Tidak Terduga	4.773.672.048,00	2.065.423.140,00	43,27	2.413.029.129,00
BELANJA TRANSFER	841.617.613.430,00	775.144.201.015,00	92,10	767.544.449.001,00
Belanja Bagi Hasil	812.172.113.430,00	748.291.201.015,00	92,13	759.191.867.087,00
Belanja Bantuan Keuangan	29.445.500.000,00	26.853.000.000,00	91,20	8.352.581.914,00

5.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	3.222.810.004.132,90	2.987.193.758.080,43

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Pada tahun 2024 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menganggarkan belanja operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp3.222.810.004.132,90 dengan realisasi belanja operasi sebesar Rp2.987.193.758.080,43 atau 92,69%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.41 Belanja Operasi – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
BELANJA OPERASI	3.222.810.004.132,90	2.987.193.758.080,43	92,69	2.888.146.534.690,97
Belanja Pegawai	1.329.553.415.809,12	1.309.833.869.704,00	98,52	1.100.521.283.967,05
Belanja Barang dan Jasa	1.502.668.209.237,78	1.311.138.772.714,16	87,25	1.405.114.292.589,86
Belanja Bunga	4.050.000.000,00	3.692.560.273,00	91,17	8.623.436.793,00
Belanja Subsidi	1.400.000.000,00	944.301.180,00	67,45	4.143.883.000,00
Belanja Hibah	380.037.014.086,00	357.581.329.209,27	94,09	362.326.208.341,06
Belanja Bantuan Sosial	5.101.365.000,00	4.002.925.000,00	78,47	7.417.430.000,00

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	1.329.553.415.809,12	1.309.833.869.704,00

Belanja Pegawai merupakan pengeluaran anggaran untuk belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan PNS lainnya yang diberikan kepada ASN, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta DPRD yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pada tahun 2024 Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp1.309.833.869.704,00 atau 98,52% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.329.553.415.809,12 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.42 Belanja Pegawai – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Belanja Pegawai	1.329.553.415.809,12	1.309.833.869.704,00	98,52	1.100.521.283.967,05
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	486.653.287.386,01	477.549.846.508,00	98,13	391.813.430.492,05
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	613.529.733.153,11	608.621.438.978,00	99,20	501.201.145.744,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	173.191.927.870,00	169.973.975.468,00	98,14	153.404.128.322,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	29.955.883.368,00	28.329.573.243,00	94,57	29.140.983.234,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.545.658.626,00	1.321.600.258,00	85,50	1.339.114.067,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	2.868.613.442,00	2.808.613.442,00	97,91	2.601.421.560,00
Belanja Pegawai BLUD	21.808.311.964,00	21.228.821.807,00	97,34	21.021.060.548,00

Secara lebih rinci dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.43 Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	486.653.287.386,01	477.549.846.508,00	98,13	391.813.430.492,05
Belanja Gaji Pokok ASN	349.542.205.568,27	347.456.590.539,00	99,40	282.814.032.233,05
Belanja Gaji Pokok PNS	264.042.130.802,01	262.185.101.679,00	99,30	244.957.607.733,05
Belanja Gaji Pokok PPPK	85.500.074.766,26	85.271.488.860,00	99,73	37.856.424.500,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	32.559.459.115,96	32.159.667.412,00	98,77	26.985.956.794,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	26.023.146.395,52	25.661.636.316,00	98,61	24.099.308.054,00
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	6.536.312.720,44	6.498.031.096,00	99,41	2.886.648.740,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.632.536.227,06	7.454.500.540,00	97,67	7.220.255.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	7.632.536.227,06	7.454.500.540,00	97,67	7.220.255.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	34.059.406.791,09	31.716.949.000,00	93,12	23.535.167.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	25.310.361.451,03	23.017.341.000,00	90,94	19.147.558.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	8.749.045.340,06	8.699.608.000,00	99,43	4.387.609.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.221.836.593,90	3.119.158.575,00	96,81	3.684.970.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.221.836.593,90	3.119.158.575,00	96,81	3.684.970.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	19.412.892.629,04	19.155.886.620,00	98,68	17.061.567.789,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	14.691.912.221,10	14.462.056.740,00	98,44	14.801.556.849,00
Belanja Tunjangan Beras PPPK	4.720.980.407,94	4.693.829.880,00	99,42	2.260.010.940,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	895.023.063,26	731.608.684,00	81,74	483.719.932,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	894.523.063,26	731.608.684,00	81,79	483.719.932,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	8.073.837,15	5.104.961,00	63,23	4.375.967,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	6.201.208,21	3.792.904,00	61,16	3.749.866,00
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.872.628,94	1.312.057,00	70,06	626.101,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	34.755.912.870,08	32.885.612.268,00	94,62	27.684.371.424,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	26.360.957.006,24	25.427.096.918,00	96,46	24.274.498.640,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	8.394.955.863,84	7.458.515.350,00	88,85	3.409.872.784,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	765.658.431,68	716.293.080,00	93,55	584.750.138,00
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	585.240.498,70	539.228.613,00	92,14	503.592.068,00
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	180.417.932,98	177.064.467,00	98,14	81.158.070,00
Belanja luran Jaminan Kematian ASN	2.237.669.234,76	2.148.474.829,00	96,01	1.754.264.215,00
Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1.700.392.363,78	1.617.303.623,00	95,11	1.510.826.282,00
Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	537.276.870,98	531.171.206,00	98,86	243.437.933,00
Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	1.562.613.023,76	0,00	0,00	0,00
Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1.512.123.402,76	0,00	0,00	0,00
Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	50.489.621,00	0,00	0,00	0,00

Tabel 5.44 Rincian Belanja Tambahan Penghasilan ASN – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	613.529.733.153,11	608.621.438.978,00	99,20	501.201.145.744,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	386.296.355.147,20	383.939.228.872,00	99,39	299.056.305.131,10
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	304.439.159.975,74	302.169.551.682,00	99,25	263.356.950.590,10
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	81.857.195.171,46	81.769.677.190,00	99,89	35.699.354.541,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	1.130.026.329,00	1.093.645.059,00	96,78	1.260.150.820,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	1.063.745.917,00	1.027.468.927,00	96,59	1.260.150.820,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK	66.280.412,00	66.176.132,00	99,84	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	36.220.538.424,12	35.683.949.932,00	98,52	32.605.800.973,50
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	35.810.220.795,18	35.287.140.917,00	98,54	32.462.099.430,50
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	410.317.628,94	396.809.015,00	96,71	143.701.543,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	9.754.020.596,96	9.610.563.036,00	98,53	9.366.556.710,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	9.134.325.218,00	9.018.367.451,00	98,73	9.036.140.631,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK	619.695.378,96	592.195.585,00	95,56	330.416.079,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	180.128.792.655,83	178.294.052.079,00	98,98	158.912.332.109,40
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	175.947.974.092,87	174.137.293.232,00	98,97	157.449.104.318,40

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	4.180.818.562,96	4.156.758.847,00	99,42	1.463.227.791,00

Tabel 5.45 Rincian Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	173.191.927.870,00	169.973.975.468,00	98,14	153.404.128.322,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	34.677.337.966,00	34.609.488.780,00	99,80	35.315.084.974,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	13.322.438.650,00	13.315.589.697,00	99,95	12.524.126.717,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	11.404.150.495,00	11.354.921.446,00	99,57	10.370.414.218,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	9.950.748.821,00	9.938.977.637,00	99,88	12.398.290.124,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	0,00	0,00	0,00	22.253.915,00
Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	104.615.759.000,00	103.322.822.388,00	98,76	88.939.376.298,00
Belanja TPG PNSD	104.615.759.000,00	103.322.822.388,00	98,76	88.939.376.298,00
Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	1.215.076.000,00	1.189.209.900,00	97,87	814.763.600,00
Belanja TKG PNSD	1.215.076.000,00	1.189.209.900,00	97,87	814.763.600,00
Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.977.250.000,00	2.977.250.000,00	100,00	2.968.821.550,00
Belanja Tamsil Guru PNSD	2.977.250.000,00	2.977.250.000,00	100,00	2.968.821.550,00
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	40.000.000,00	28.800.000,00	72,00	0,00
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	40.000.000,00	28.800.000,00	72,00	0,00
Belanja Honorarium	29.666.504.904,00	27.846.404.400,00	93,86	25.366.081.900,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	29.237.024.904,00	27.457.284.400,00	93,91	24.958.441.900,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	429.480.000,00	389.120.000,00	90,60	407.640.000,00

Tabel 5.46 Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	29.955.883.368,00	28.329.573.243,00	94,57	29.140.983.234,00
Belanja Uang Representasi DPRD	1.419.600.000,00	1.297.950.000,00	91,43	1.434.300.000,00
Belanja Uang Representasi DPRD	1.419.600.000,00	1.297.950.000,00	91,43	1.434.300.000,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	180.426.000,00	163.521.000,00	90,63	183.498.000,00
Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	180.426.000,00	163.521.000,00	90,63	183.498.000,00
Belanja Tunjangan Beras DPRD	144.840.000,00	131.080.200,00	90,50	136.439.280,00
Belanja Tunjangan Beras DPRD	144.840.000,00	131.080.200,00	90,50	136.439.280,00
Belanja Uang Paket DPRD	131.940.000,00	119.775.000,00	90,78	122.940.000,00
Belanja Uang Paket DPRD	131.940.000,00	119.775.000,00	90,78	122.940.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	2.058.420.000,00	1.882.027.500,00	91,43	2.079.735.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	2.058.420.000,00	1.882.027.500,00	91,43	2.079.735.000,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	98.092.500,00	80.866.500,00	82,44	98.919.000,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	98.092.500,00	80.866.500,00	82,44	98.919.000,00
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.025.000.000,00	7.920.000.000,00	98,69	8.100.000.000,00
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.025.000.000,00	7.920.000.000,00	98,69	8.100.000.000,00
Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.025.000.000,00	1.320.000.000,00	65,19	2.025.000.000,00
Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.025.000.000,00	1.320.000.000,00	65,19	2.025.000.000,00
Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	32.883.098,00	21.514.303,00	65,43	18.980.274,00
Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	32.883.098,00	21.514.303,00	65,43	18.980.274,00
Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	8.336.395.080,00	8.123.138.740,00	97,44	8.249.971.680,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	103.750.440,00	91.618.740,00	88,31	21.120.000,00
Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	3.161.160,00	2.880.000,00	91,11	2.212.920,00
Belanja Jaminan Kematian DPRD	9.483.480,00	8.640.000,00	91,11	6.638.760,00
Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	8.220.000.000,00	8.020.000.000,00	97,57	8.220.000.000,00
Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.897.586.690,00	6.664.000.000,00	96,61	6.691.200.000,00
Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.897.586.690,00	6.664.000.000,00	96,61	6.691.200.000,00
Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	605.700.000,00	605.700.000,00	100,00	0,00
Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	605.700.000,00	605.700.000,00	100,00	0,00

Tabel 5.47 Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.545.658.626,00	1.321.600.258,00	85,50	1.339.114.067,00
Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	75.600.000,00	75.600.000,00	100,00	75.600.000,00
Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	75.600.000,00	75.600.000,00	100,00	75.600.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	136.080.000,00	136.080.000,00	100,00	136.080.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	136.080.000,00	136.080.000,00	100,00	136.080.000,00
Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	1.738.080,00	1.738.080,00	100,00	1.738.080,00
Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	1.738.080,00	1.738.080,00	100,00	1.738.080,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	3.860.241,00	3.860.241,00	100,00	4.002.546,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	3.860.241,00	3.860.241,00	100,00	4.002.546,00
Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.080,00	1.920,00	92,31	1.920,00
Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.080,00	1.920,00	92,31	1.920,00
Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	8.000.122,00	7.257.600,00	90,72	7.257.600,00
Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	8.000.122,00	7.257.600,00	90,72	7.257.600,00
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	155.520,00	155.520,00	100,00	155.520,00
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	155.520,00	155.520,00	100,00	155.520,00
Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	466.560,00	466.560,00	100,00	466.560,00
Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	466.560,00	466.560,00	100,00	466.560,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.319.756.023,00	1.096.440.337,00	83,08	1.113.811.841,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor bagi KDH/WKDH	445.556.803,00	404.038.707,00	90,68	403.030.854,00
Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	379.495.250,00	336.719.737,00	88,73	286.765.414,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	494.703.970,00	355.681.893,00	71,90	423.194.164,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	0,00	0,00	0,00	821.409,00

Tabel 5.48 Rincian Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	2.868.613.442,00	2.808.613.442,00	97,91	2.601.421.560,00
Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	360.000.000,00	300.000.000,00	83,33	360.000.000,00
Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	360.000.000,00	300.000.000,00	83,33	360.000.000,00
Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	2.508.613.442,00	2.508.613.442,00	100,00	2.241.421.560,00
Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	2.508.613.442,00	2.508.613.442,00	100,00	2.241.421.560,00

Tabel 5.49 Belanja Pegawai BLUD – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Belanja Pegawai BLUD	21.808.311.964,00	21.228.821.807,00	97,34	21.021.060.548,00
Belanja Pegawai BLUD	21.808.311.964,00	21.228.821.807,00	97,34	21.021.060.548,00

Realisasi Belanja pegawai menurut klasifikasi fungsi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.50 Realisasi Belanja Pegawai menurut Klasifikasi Fungsi Tahun 2024 – LRA

NO	KLASIFIKASI FUNGSI	NILAI BELANJA PEGAWAI
A	PELAYANAN UMUM	1.309.805.069.704,00
1	Badan Kepegawaian dan Korpri	15.556.560.291,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.405.166.832,00
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	22.645.636.563,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.887.518.189,00
5	Badan Pendapatan Daerah	75.978.849.916,00
6	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.348.677.461,00
7	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	10.808.777.703,00
8	Badan Penghubung Daerah	3.647.428.136,00
9	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	20.587.713.727,00
10	Biro Umum	74.118.167.508,00
11	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	9.319.033.538,00
12	Dinas Kebudayaan	7.616.677.097,00
13	Dinas Kelautan dan Perikanan	25.204.302.736,00
14	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	8.530.902.304,00
15	Dinas Kesehatan	20.378.361.637,00
16	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	17.570.373.228,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	9.187.874.578,00
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8.094.176.415,00
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	26.532.474.269,00
20	Dinas Pariwisata	10.165.197.472,00
21	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	19.498.232.211,00
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.605.491.504,00
23	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	9.256.442.477,00

NO	KLASIFIKASI FUNGSI	NILAI BELANJA PEGAWAI
24	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	10.528.583.634,00
25	Dinas Pendidikan	561.581.059.166,00
26	Dinas Perhubungan	12.602.617.139,00
27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10.549.430.245,00
28	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	12.296.747.950,00
29	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	8.327.806.194,00
30	Dinas Sosial	9.472.156.927,00
31	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	24.670.214.454,00
32	Inspektorat	28.399.622.618,00
33	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	52.882.159.707,00
34	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	98.546.369.902,00
35	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	13.564.099.354,00
36	Sekretariat DPRD	42.440.166.622,00
B	KESEHATAN	28.800.000,00
1	Dinas Kesehatan	28.800.000,00
	JUMLAH	1.309.833.869.704,00

Realisasi Belanja Pegawai per masing-masing OPD dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.51 Realisasi Belanja Pegawai per masing-masing OPD Tahun 2024 – LRA

NO	OPD	NILAI BELANJA PEGAWAI
1	Badan Kepegawaian dan Korpri	15.556.560.291,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.405.166.832,00
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	22.645.636.563,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.887.518.189,00
5	Badan Pendapatan Daerah	75.978.849.916,00
6	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.348.677.461,00
7	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	10.808.777.703,00
8	Badan Penghubung Daerah	3.647.428.136,00
9	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	20.587.713.727,00
10	Biro Umum	74.118.167.508,00
11	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	9.319.033.538,00
12	Dinas Kebudayaan	7.616.677.097,00
13	Dinas Kelautan dan Perikanan	25.204.302.736,00
14	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	8.530.902.304,00
15	Dinas Kesehatan	20.407.161.637,00
16	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	17.570.373.228,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	9.187.874.578,00
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8.094.176.415,00
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	26.532.474.269,00

NO	OPD	NILAI BELANJA PEGAWAI
20	Dinas Pariwisata	10.165.197.472,00
21	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	19.498.232.211,00
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.605.491.504,00
23	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	9.256.442.477,00
24	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	10.528.583.634,00
25	Dinas Pendidikan	561.581.059.166,00
26	Dinas Perhubungan	12.602.617.139,00
27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10.549.430.245,00
28	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	12.296.747.950,00
29	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	8.327.806.194,00
30	Dinas Sosial	9.472.156.927,00
31	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	24.670.214.454,00
32	Inspektorat	28.399.622.618,00
33	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	52.882.159.707,00
34	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	98.546.369.902,00
35	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	13.564.099.354,00
36	Sekretariat DPRD	42.440.166.622,00
JUMLAH		1.309.833.869.704,00

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	1.502.668.209.237,78	1.311.138.772.714,16

Belanja Barang dan Jasa merupakan pengeluaran anggaran untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Pada tahun 2024 Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp1.311.138.772.714,16 atau sebesar 87,25%, dari yang dianggarkan sebesar Rp1.502.668.209.237,78.

Rincian Belanja Barang dan Jasa dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.52 Belanja Barang dan Jasa – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Belanja Barang dan Jasa	1.502.668.209.237,78	1.311.138.772.714,16	87,25	1.405.114.292.589,86
Belanja Barang	421.685.142.800,53	293.215.797.830,25	69,53	360.386.293.137,36
Belanja Jasa	561.835.692.723,13	518.729.152.485,59	92,33	573.858.834.528,30
Belanja Pemeliharaan	79.644.761.246,42	68.400.450.864,92	85,88	43.130.263.794,05

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Belanja Perjalanan Dinas	136.706.922.257,70	125.068.460.538,50	91,49	147.393.480.808,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	60.855.779.800,00	54.371.556.702,00	89,34	65.489.208.135,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	105.089.055.209,00	106.842.994.373,00	101,67	104.920.849.684,15
Belanja Barang dan Jasa BLUD	136.850.855.201,00	144.510.359.919,90	105,60	109.935.362.503,00

Secara lebih rinci dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.53 Rincian Belanja Barang – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Belanja Barang	421.685.142.800,53	293.215.797.830,25	69,53	360.386.293.137,36
Belanja Barang Pakai Habis	421.646.542.490,53	293.189.475.830,25	69,53	360.177.033.602,36
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	4.047.640.697,50	3.392.570.000,44	83,82	1.313.251.264,00
Belanja Bahan-Bahan Kimia	419.867.649,00	140.667.650,00	33,50	499.306.817,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	24.557.308.893,00	23.860.809.937,00	97,16	25.330.733.876,00
Belanja Bahan-Bahan Baku	1.082.634.810,00	1.036.749.870,00	95,76	1.185.825.790,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	214.806.800,00	197.617.400,00	92,00	102.615.400,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	60.941.827,00	58.325.000,00	95,71	50.882.000,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	39.178.600,00	23.060.400,00	58,86	18.139.900,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	70.500.000,00	70.083.500,00	99,41	52.100.000,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.526.804.167,00	1.360.837.750,00	89,13	2.185.379.258,87
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	3.483.562.629,00	3.480.796.200,00	99,92	4.627.755.117,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	526.259.603,00	508.839.694,00	96,69	428.930.938,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	32.446.100,00	32.402.000,00	99,86	28.331.392,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	22.075.830,00	8.891.830,00	40,28	67.305.200,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	63.309.653,00	60.885.892,00	96,17	30.873.775,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	88.064.236,00	71.607.540,00	81,31	12.491.940,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	142.191.000,00	136.180.000,00	95,77	108.851.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.373.307.670,97	4.590.617.811,00	85,43	5.834.248.669,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.041.121.159,23	4.356.185.789,00	86,41	4.949.640.651,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	16.743.897.122,03	11.917.286.335,00	71,17	21.345.493.527,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	986.254.090,00	861.015.500,00	87,30	796.278.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	1.330.146.185,62	1.187.045.509,00	89,24	961.074.334,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5.825.037.534,82	5.050.087.960,00	86,70	5.716.550.253,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)	REALISASI (Rp)
	2024	2024		2023
1	2	3	4	5
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.627.659.962,29	2.395.812.193,00	91,18	1.769.908.669,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.434.814.489,02	1.366.250.697,00	95,22	1.546.206.561,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	58.075.175,00	30.378.400,00	52,31	199.591.797,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	482.778.840,00	481.819.200,00	99,80	313.171.500,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	2.984.449.542,12	2.465.411.600,00	82,61	3.905.442.325,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.664.292.884,00	4.326.815.654,00	92,76	6.844.226.709,00
Belanja Obat-Obatan-Obat	293.595.064,00	69.906.799,00	23,81	215.341.348,00
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	4.459.858.478,00	4.134.276.337,00	92,70	2.804.177.339,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	263.672.597.554,36	154.789.780.745,81	58,71	175.765.198.485,95
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	4.728.137.984,00	2.603.844.025,00	55,07	20.502.002.201,54
Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.344.774.113,00	1.157.134.653,00	86,05	3.850.704.721,00
Belanja Natura dan Pakan-Pakan	54.562.585,00	47.626.605,00	87,29	275.768.100,00
Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	3.468.414.076,00	3.350.629.472,00	96,60	942.188.220,00
Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi Lainnya	6.141.800,00	5.967.300,00	97,16	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.667.591.937,32	19.906.755.082,00	84,11	25.411.463.679,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	12.348.780.691,00	11.875.253.948,00	96,17	15.079.941.460,00
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	21.600.000,00	20.925.000,00	96,88	36.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	355.650.000,00	171.006.000,00	48,08	311.401.500,00
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	96.492.000,00	95.951.000,00	99,44	93.020.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	15.647.770.360,00	14.757.583.540,00	94,31	16.158.260.700,00
Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	280.750.000,00	275.250.000,00	98,04	96.040.000,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00	0,00	0,00	369.000.000,00
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	0,00	0,00	0,00	109.343.000,00
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	724.500.000,00	715.500.000,00	98,76	72.300.000,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	2.049.402.640,00	1.767.779.000,00	86,26	1.188.464.800,00
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.281.800.472,00	1.170.716.012,00	91,33	1.567.833.340,00
Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	0,00
Belanja Pakaian Penyelamatan	603.200,00	598.000,00	99,14	16.800.000,00
Belanja Pakaian Teknik	52.191.756,00	49.950.000,00	95,70	129.805.023,00
Belanja Pakaian KORPRI	26.040.000,00	26.040.000,00	100,00	460.864.900,00
Belanja Pakaian Adat Daerah	1.063.633.250,25	1.023.895.000,00	96,26	1.680.526.600,00
Belanja Pakaian Batik Tradisional	351.624.800,00	228.843.300,00	65,08	236.438.280,00
Belanja Pakaian Olahraga	1.341.342.580,00	1.105.052.700,00	82,38	2.373.693.242,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)	REALISASI (Rp)
	2024	2024		2023
1	2	3	4	5
Belanja Pakaian Paskibraka	235.420.000,00	235.420.000,00	100,00	194.350.000,00
Belanja Pakaian Jas/Safari	141.440.000,00	132.340.000,00	93,57	11.500.000,00
Belanja Barang Tak Habis Pakai	5.125.400,00	5.123.000,00	99,95	209.259.535,00
Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	2.030.400,00	2.028.000,00	99,88	0,00
Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	2.580.000,00	2.580.000,00	100,00	191.444.145,00
Belanja Pipa-Pipa Lainnya	515.000,00	515.000,00	100,00	17.815.390,00
Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	33.474.910,00	21.199.000,00	63,33	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	15.950.000,00	3.800.000,00	23,82	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	12.252.188,00	12.199.000,00	99,57	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	5.272.722,00	5.200.000,00	98,62	0,00

Tabel 5.54 Rincian Belanja Jasa – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)	REALISASI (Rp)
	2024	2024		2023
1	2	3	4	5
Belanja Jasa	561.835.692.723,13	518.729.152.485,59	92,33	573.858.834.528,30
Belanja Jasa Kantor	401.137.720.783,44	376.907.284.456,71	93,96	390.342.631.129,01
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.615.657.800,00	6.937.009.500,00	91,09	10.602.798.588,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	10.219.051.999,93	9.779.920.999,00	95,70	8.195.795.000,00
Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.296.016.764,00	1.184.198.514,00	91,37	1.408.734.326,00
Honorarium Rohaniwan	0,00	0,00	0,00	21.200.000,00
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	710.800.000,00	685.000.000,00	96,37	405.850.000,00
Honorarium Penyelenggara Ujian	20.239.500,00	20.239.500,00	100,00	36.153.000,00
Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	1.898.200.000,00	1.778.520.000,00	93,70	1.295.700.000,00
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	390.000.000,00	383.000.000,00	98,21	390.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	92.962.550.000,00	85.362.384.937,00	91,82	74.601.302.132,50
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	17.904.326.437,00	17.100.722.366,00	95,51	17.187.117.855,00
Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	18.555.426,00	0,00	0,00	25.174.500,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.953.608.320,00	1.877.924.942,00	96,13	1.993.151.691,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	1.319.515.952,00	1.309.315.952,00	99,23	639.953.952,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	364.326.048,00	363.657.394,00	99,82	400.083.652,00
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	1.152.250.800,00	1.114.065.000,00	96,69	574.940.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	128.736.383.870,93	126.845.491.824,00	98,53	127.447.082.574,00
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	15.368.891.608,00	12.744.400.349,00	82,92	19.606.168.271,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	9.786.271.607,00	8.833.310.669,00	90,26	13.461.784.992,51
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	16.083.547.429,00	14.805.415.085,00	92,05	12.367.350.430,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	3.506.675.744,00	3.082.744.623,00	87,91	3.131.170.256,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	1.112.198.324,00	989.499.477,00	88,97	2.749.096.786,00
Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	0,00	0,00	0,00	10.300.000,00
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	1.504.313.900,00	1.472.800.000,00	97,91	1.006.500.000,00
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	579.473.220,00	565.478.220,00	97,58	1.097.391.013,00
Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	1.297.964.340,00	1.022.744.832,00	78,80	450.175.831,00
Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	4.517.600,00	2.864.500,00	63,41	73.012.916,00
Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	55.680.000,00
Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	130.000.000,00	0,00	0,00	238.629.000,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	7.657.200.990,00	7.567.619.270,00	98,83	4.828.587.588,00
Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	163.200.000,00	163.200.000,00	100,00	297.200.000,00
Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	384.027.302,00	382.906.050,00	99,71	142.087.170,00
Belanja Jasa Kalibrasi	315.353.072,82	58.778.000,00	18,64	505.611.000,00
Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	346.288.000,00	275.311.000,00	79,50	454.179.200,00
Belanja Jasa Pengukuran Tanah	38.450.000,00	8.500.000,00	22,11	25.849.000,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	37.073.067.266,00	34.551.919.000,00	93,20	47.910.051.650,00
Belanja Jasa Operator Kapal	871.437.933,00	870.657.026,00	99,91	574.608.819,00
Belanja Tagihan Telepon	1.499.083.833,00	1.194.953.928,00	79,71	1.242.202.082,00
Belanja Tagihan Air	533.041.809,92	447.988.912,00	84,04	368.109.334,00
Belanja Tagihan Listrik	23.502.900.763,08	21.878.886.562,00	93,09	21.978.506.586,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.244.856.100,00	1.201.710.454,00	96,53	1.401.727.380,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	9.122.048.424,00	8.263.193.554,71	90,58	9.333.998.368,00
Belanja Paket/Pengiriman	796.591.046,56	688.858.372,00	86,48	445.865.994,00
Belanja Penambahan Daya	102.095.000,00	93.656.100,00	91,73	0,00
Belanja Registrasi/Keanggotaan	1.795.789,20	1.795.789,00	100,00	0,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.416.335.624,00	972.212.756,00	68,64	974.128.914,00
Belanja Medical Check Up	134.611.140,00	24.429.000,00	18,15	25.621.260,00
Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	0,00	0,00	0,00	310.000.018,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Belanja luran Jaminan/Asuransi	44.491.421.550,18	43.336.152.424,40	97,40	44.986.953.397,01
Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	10.835.249.831,00	10.681.242.000,00	98,58	15.764.493.100,00
Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	8.085.140.700,00	8.040.235.000,00	99,44	7.463.925.000,00
Belanja Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	646.811.616,00	643.218.800,00	99,44	597.114.000,00
Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	11.508.681.572,88	10.950.525.234,00	95,15	10.946.248.489,00
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	7.056.826.998,44	7.017.759.062,00	99,45	4.017.052.673,76
Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	907.770.115,86	822.225.081,00	90,58	650.644.780,92
Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	695.534.316,00	425.540.847,40	61,18	647.475.570,33
Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	4.755.406.400,00	4.755.406.400,00	100,00	4.899.999.783,00
Belanja Sewa Tanah	118.999.600,00	12.000.000,00	10,08	803.759.000,00
Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00	569.500.000,00
Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	118.999.600,00	12.000.000,00	10,08	12.000.000,00
Belanja Sewa Tanah Lapangan Parkir	0,00	0,00	0,00	31.800.000,00
Belanja Sewa Lapangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	190.459.000,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	46.744.698.084,10	45.081.309.757,00	96,44	50.941.799.733,00
Belanja Sewa Excavator	50.585.034,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Alat Pengangkat	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	9.514.966,00	9.500.000,00	99,84	0,00
Belanja Sewa Kapal Tarik	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00
Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	3.612.924,00	3.570.000,00	98,81	0,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	13.209.320.700,00	12.529.575.311,00	94,85	12.424.957.650,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	46.920.000,00	42.520.000,00	90,62	20.076.164,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	200.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	31.500.000,00	7.100.000,00	22,54	0,00
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	0,00	0,00	0,00	1.596.000,00
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	3.054.302.032,00	2.816.403.000,00	92,21	4.520.830.000,00
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	6.491.237.500,00	6.474.612.000,00	99,74	6.219.800.000,00
Belanja Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya	6.518.615.922,00	6.283.195.587,00	96,39	5.772.468.981,00
Belanja Sewa Perkakas Bengkel Kerja	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00
Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	2.989.079.400,00	2.896.409.320,00	96,90	3.066.473.330,00
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	510.780.000,00	495.255.000,00	96,96	22.480.000,00
Belanja Sewa Alat Pembersih	30.000.000,00	29.948.724,00	99,83	0,00
Belanja Sewa Alat Dapur	0,00	0,00	0,00	5.225.000,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	14.430.000,00	14.430.000,00	100,00	14.430.000,00
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	102.100.000,00	101.200.000,00	99,12	342.419.000,00
Belanja Sewa Peralatan Umum	13.623.664.606,10	13.320.692.815,00	97,78	18.450.543.608,00
Belanja Sewa Peralatan Jaringan	58.835.000,00	56.898.000,00	96,71	0,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	14.596.984.490,37	13.598.627.647,00	93,16	14.176.823.366,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	2.632.898.650,37	2.153.848.333,00	81,81	1.877.218.900,00
Belanja Sewa Bangunan Gudang	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	260.000.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	144.800.000,00	8.700.000,00	6,01	64.800.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	229.000.000,00	212.500.000,00	92,79	0,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0,00	0,00	0,00	532.127.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.920.796.000,00	1.860.844.000,00	96,88	2.021.173.500,00
Belanja Sewa Bangunan Parkir	8.880.000,00	8.880.000,00	100,00	8.880.000,00
Belanja Sewa Taman	16.978.000,00	16.867.000,00	99,35	9.431.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	460.336.480,00	460.244.000,00	99,98	248.750.000,00
Belanja Sewa Asrama	912.401.400,00	912.353.400,00	99,99	886.379.400,00
Belanja Sewa Hotel	828.544.000,00	768.503.000,00	92,75	0,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	7.292.349.960,00	7.045.887.914,00	96,62	8.268.063.566,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	162.100.000,00
Belanja Sewa Alat Musik	0,00	0,00	0,00	162.100.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	40.208.574.538,04	28.037.664.231,48	69,73	60.016.386.507,28
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	2.456.967.990,00	2.448.704.990,00	99,66	4.052.677.303,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	12.342.564.322,00	11.313.827.514,00	91,67	12.003.209.433,72
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	0,00	0,00	0,00	29.800.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	3.135.191.223,03	2.955.631.795,50	94,27	2.269.541.073,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	575.253.000,00	475.252.605,00	82,62	234.366.750,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	1.188.824.177,00	858.708.820,00	72,23	3.447.273.257,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	2.461.490.000,00	1.257.359.160,00	51,08	8.489.045.192,52
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan	10.001.979,00	9.768.000,00	97,66	36.106.000,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	1.412.435.000,00	1.412.433.985,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	10.623.506.215,00	2.703.384.829,00	25,45	15.440.654.220,33
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	3.426.619.592,01	2.931.717.622,98	85,56	4.376.323.877,39
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	1.997.024.500,00	1.499.215.630,00	75,07	6.428.723.916,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	508.696.540,00	171.659.280,00	33,74	1.550.817.994,32
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri	0,00	0,00	0,00	117.936.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	21.034.500,00
Belanja Jasa Konsultansi Lainnya- Jasa Konsultansi Lingkungan	70.000.000,00	0,00	0,00	1.518.876.990,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.877.001.575,00	2.128.728.322,00	73,99	506.314.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	19.500.000,00	13.000.000,00	66,67	13.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	196.500.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	153.600.000,00	153.600.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	2.703.901.575,00	1.962.128.322,00	72,57	296.814.000,00
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	19.256.900,00	19.256.835,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Ketenagalistrikan	19.256.900,00	19.256.835,00	100,00	0,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	240.000.000,00	240.000.000,00	100,00	390.000.000,00
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	140.000.000,00	140.000.000,00	100,00	290.000.000,00
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	8.384.638.000,00	6.375.200.551,00	76,03	8.298.933.900,00
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	8.159.067.000,00	6.149.629.551,00	75,37	8.160.206.000,00
Belanja Bimbingan Teknis	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
Belanja Diklat Kepemimpinan	225.571.000,00	225.571.000,00	100,00	131.727.900,00
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	3.009.397.202,00	2.985.928.261,00	99,22	3.233.133.496,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	1.099.439.623,00	1.085.682.815,00	98,75	1.107.983.971,00
Belanja Jasa Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	938.481.093,00	937.864.536,00	99,93	896.221.378,00
Belanja Jasa Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	971.476.486,00	962.380.910,00	99,06	1.226.736.764,00
Belanja Jasa Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	0,00	0,00	0,00	2.191.383,00
Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	0,00

Tabel 5.55 Rincian Belanja Pemeliharaan – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Belanja Pemeliharaan	79.644.761.246,42	68.400.450.864,92	85,88	43.130.263.794,05
Belanja Pemeliharaan Tanah	773.639.100,00	773.550.000,00	99,99	745.205.000,00
Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	773.639.100,00	773.550.000,00	99,99	745.205.000,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.628.917.872,51	12.596.986.085,33	75,75	18.059.386.363,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	37.110.000,00	20.932.500,00	56,41	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	119.880.000,00	88.200.000,00	73,57	295.857.300,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	1.347.419.463,00	1.155.295.079,33	85,74	970.459.424,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	58.044.000,00	39.636.000,00	68,29	47.700.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor	0,00	0,00	0,00	67.430.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	931.302.700,00	709.680.514,00	76,20	1.518.085.240,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	5.963.925.255,51	4.478.654.362,00	75,10	6.848.271.847,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00	1.022.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	235.746.081,00	188.390.262,00	79,91	1.486.500,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat	0,00	0,00	0,00	421.000,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga				
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	1.399.630.950,00	1.271.207.550,00	90,82	1.271.778.689,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	135.913.800,00
Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es	1.306.250.220,00	719.500.000,00	55,08	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	0,00	0,00	0,00	34.432.850,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	602.333.829,00	231.809.200,00	38,49	530.621.300,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	382.474.000,00	323.524.000,00	84,59	237.700.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	0,00	0,00	0,00	67.239.840,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.271.022.550,00	1.975.784.872,00	87,00	2.784.358.699,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	915.100,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	49.783.020,00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	239.091.168,00	53.880.000,00	22,54	567.886.692,00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	105.000.000,00	0,00	0,00	142.680.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	0,00	0,00	0,00	698.406.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	10.747.020,00	10.578.000,00	98,43	61.150.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	112.385.000,00	109.725.000,00	97,63	0,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	55.712.160,00	54.450.000,00	97,73	101.394.288,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1.450.843.476,00	1.165.738.746,00	80,35	1.570.362.774,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	0,00	0,00	0,00	13.320.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00	3.010.000,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya	0,00	0,00	0,00	37.700.000,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	51.097.445.738,91	48.582.810.058,59	95,08	23.739.186.087,05
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	28.835.220.568,91	27.099.841.896,06	93,98	17.299.997.619,40
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	47.500.000,00	47.065.983,99	99,09	571.074.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00	0,00	0,00	3.489.211.600,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	171.205.200,00	168.791.820,00	98,59	1.234.416.312,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	21.842.900.082,00	21.137.510.358,54	96,77	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	200.619.888,00	129.600.000,00	64,60	178.608.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	0,00	0,00	0,00	965.878.555,65
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	11.144.758.535,00	6.447.104.721,00	57,85	586.486.344,00
Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi	4.016.214.400,00	4.016.214.400,00	100,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi	1.842.369.990,00	1.836.309.990,00	99,67	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	3.420.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	0,00	0,00	0,00	312.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	1.741.601.200,00	522.480.331,00	30,00	197.746.500,00
Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	124.572.945,00	72.100.000,00	57,88	38.555.844,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	0,00	0,00	0,00	38.184.000,00

Tabel 5.56 Rincian Belanja Perjalanan Dinas – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Belanja Perjalanan Dinas	136.706.922.257,70	125.068.460.538,50	91,49	147.393.480.808,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	135.192.729.123,70	124.695.811.106,50	92,24	146.904.351.482,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	127.898.149.505,07	118.247.877.151,50	92,45	139.408.899.023,00
Belanja Perjalanan Dinas Tetap	0,00	0,00	0,00	2.729.501,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.746.903.231,69	4.227.318.300,00	89,05	4.936.160.709,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	818.491.010,00	761.818.723,00	93,08	1.132.280.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.729.185.376,94	1.458.796.932,00	84,36	1.424.282.249,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	1.514.193.134,00	372.649.432,00	24,61	489.129.326,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri	1.514.193.134,00	372.649.432,00	24,61	489.129.326,00

Tabel 5.57 Rincian Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	60.855.779.800,00	54.371.556.702,00	89,34	65.489.208.135,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.759.785.000,00	6.662.560.000,00	98,56	26.642.589.500,00
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	872.785.000,00	775.560.000,00	88,86	2.254.289.500,00
Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	1.399.000.000,00	1.399.000.000,00	100,00	1.698.500.000,00
Belanja Beasiswa	4.488.000.000,00	4.488.000.000,00	100,00	4.242.000.000,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	0,00	0,00	0,00	8.635.200.000,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain	0,00	0,00	0,00	2.607.600.000,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu	0,00	0,00	0,00	7.205.000.000,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	54.095.994.800,00	47.708.996.702,00	88,19	38.846.618.635,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	38.750.000,00	16.250.000,00	41,94	0,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	54.057.244.800,00	47.692.746.702,00	88,23	38.846.618.635,00

Tabel 5.58 Rincian Belanja Barang dan Jasa BOS – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Belanja Barang dan Jasa BOS	105.089.055.209,00	106.842.994.373,00	101,67	104.920.849.684,15
Belanja Barang dan Jasa BOS	105.089.055.209,00	106.842.994.373,00	101,67	104.920.849.684,15
Belanja Barang dan Jasa BOS	105.089.055.209,00	106.842.994.373,00	101,67	104.920.849.684,15

Tabel 5.59 Rincian Belanja Barang dan Jasa BLUD – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Belanja Barang dan Jasa BLUD	136.850.855.201,00	144.510.359.919,90	105,60	109.935.362.503,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	136.850.855.201,00	144.510.359.919,90	105,60	109.935.362.503,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	136.850.855.201,00	144.510.359.919,90	105,60	109.935.362.503,00

Pada tahun 2024 Belanja Barang dan Jasa BLUD terealisasi Rp144.510.359.919,90 atau sebesar 105,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp136.850.855.201,00 dikarenakan penggunaan ambang batas pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib dan juga Belanja Barang dan Jasa BLUD pada SMK yang bersumber dari Sumbangan Pendanaan Pendidikan (SPP).

Realisasi Belanja Barang dan Jasa menurut klasifikasi fungsi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.60 Realisasi Belanja Barang dan Jasa menurut Klasifikasi Fungsi Tahun 2024 – LRA

NO	KLASIFIKASI FUNGSI	NILAI BELANJA BARANG DAN JASA
A	PELAYANAN UMUM	776.987.196.844,33
1	Badan Kepegawaian dan Korpri	3.138.491.317,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14.073.235.685,00
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	34.450.649.230,31
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.442.425.306,36
5	Badan Pendapatan Daerah	36.230.294.864,20
6	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	1.527.350.233,00
7	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	4.301.574.570,00
8	Badan Penghubung Daerah	11.361.818.722,00
9	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	12.221.442.294,00
10	Biro Administrasi Pimpinan	11.582.460.325,00
11	Biro Hukum	904.816.799,00
12	Biro Kesejahteraan Rakyat	50.522.965.789,00
13	Biro Organisasi	1.609.519.891,00
14	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.082.833.024,00
15	Biro Pengadaan Barang/Jasa	2.142.815.068,00
16	Biro Perekonomian dan Pembangunan	3.050.883.564,00
17	Biro Umum	94.215.195.554,23
18	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	3.387.123.551,00
19	Dinas Kebudayaan	3.448.644.740,00

NO	KLASIFIKASI FUNGSI	NILAI BELANJA BARANG DAN JASA
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	11.104.473.594,00
21	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	5.382.592.494,00
22	Dinas Kesehatan	4.948.100.424,00
23	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	3.997.312.443,00
24	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.377.467.127,00
25	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.418.081.026,00
26	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.919.402.686,00
27	Dinas Pariwisata	3.246.067.351,00
28	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	8.755.120.100,00
29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.144.675.449,00
30	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	3.377.850.273,91
31	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2.139.762.061,00
32	Dinas Pendidikan	119.421.576.604,90
33	Dinas Perhubungan	5.116.136.560,00
34	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.708.018.257,00
35	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	6.334.672.910,02
36	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6.658.788.478,00
37	Dinas Sosial	2.836.831.302,40
38	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2.084.939.984,00
39	Inspektorat	15.503.572.858,00
40	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	24.833.432.222,00
41	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	128.193.917.725,00
42	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	8.524.389.022,00
43	Sekretariat DPRD	98.265.475.365,00
B	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	5.985.842.441,00
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.175.192.076,00
2	Biro Hukum	1.885.971.297,00
3	Dinas Sosial	544.090.750,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	1.380.588.318,00
C	EKONOMI	121.474.014.649,33
1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	2.977.838.741,81
2	Dinas Kelautan dan Perikanan	10.896.903.725,80
3	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	4.900.419.267,00
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	20.508.117.135,00
5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.433.710.355,00
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.276.997.767,00
7	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	40.690.727.288,00
8	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2.078.037.326,00
9	Dinas Perhubungan	23.570.279.958,72
10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6.429.600.415,00
11	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	3.711.382.670,00
D	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	2.457.585.953,00
1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	788.191.408,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	1.669.394.545,00
E	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	142.726.640.750,00
1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	2.378.268.432,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	1.924.273.736,00

NO	KLASIFIKASI FUNGSI	NILAI BELANJA BARANG DAN JASA
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	138.424.098.582,00
F	KESEHATAN	63.902.993.674,00
1	Dinas Kesehatan	46.011.424.254,00
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	2.182.372.362,00
3	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	9.219.258.284,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	6.489.938.774,00
G	PARIWISATA	12.800.951.267,00
1	Dinas Pariwisata	12.800.951.267,00
H	PENDIDIKAN	165.949.768.094,50
1	Dinas Kebudayaan	4.312.947.050,00
2	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	6.351.075.196,00
3	Dinas Pendidikan	154.443.761.561,50
4	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	841.984.287,00
I	PERLINDUNGAN SOSIAL	18.853.779.041,00
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	7.118.652.581,00
2	Dinas Sosial	11.715.323.660,00
3	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	19.802.800,00
	JUMLAH	1.311.138.772.714,16

Realisasi Belanja Barang dan Jasa per masing-masing OPD dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.61 Realisasi Belanja Barang dan Jasa per masing-masing OPD Tahun 2024 – LRA

NO	OPD	NILAI BELANJA BARANG DAN JASA
1	Badan Kepegawaian dan Korpri	3.138.491.317,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14.073.235.685,00
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	34.450.649.230,31
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.617.617.382,36
5	Badan Pendapatan Daerah	36.230.294.864,20
6	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	1.527.350.233,00
7	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	4.301.574.570,00
8	Badan Penghubung Daerah	11.361.818.722,00
9	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	12.221.442.294,00
10	Biro Administrasi Pimpinan	11.582.460.325,00
11	Biro Hukum	2.790.788.096,00
12	Biro Kesejahteraan Rakyat	50.522.965.789,00
13	Biro Organisasi	1.609.519.891,00
14	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.082.833.024,00
15	Biro Pengadaan Barang/Jasa	2.142.815.068,00
16	Biro Perekonomian dan Pembangunan	3.050.883.564,00
17	Biro Umum	94.215.195.554,23
18	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	8.743.230.724,81
19	Dinas Kebudayaan	7.761.591.790,00
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	22.001.377.319,80
21	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	11.733.667.690,00
22	Dinas Kesehatan	50.959.524.678,00
23	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	8.897.731.710,00

NO	OPD	NILAI BELANJA BARANG DAN JASA
24	Dinas Komunikasi dan Informatika	23.885.584.262,00
25	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7.851.791.381,00
26	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5.984.591.861,00
27	Dinas Pariwisata	16.047.018.618,00
28	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	53.039.515.669,00
29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.144.675.449,00
30	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	12.678.875.216,91
31	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	4.217.799.387,00
32	Dinas Pendidikan	273.865.338.166,40
33	Dinas Perhubungan	28.686.416.518,72
34	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	11.137.618.672,00
35	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	7.176.657.197,02
36	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	145.082.887.060,00
37	Dinas Sosial	15.096.245.712,40
38	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	5.816.125.454,00
39	Inspektorat	15.503.572.858,00
40	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	34.052.690.506,00
41	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	134.683.856.499,00
42	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	9.904.977.340,00
43	Sekretariat DPRD	98.265.475.365,00
	JUMLAH	1.311.138.772.714,16

5.1.2.1.3. Belanja Bunga

Belanja Bunga	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	4.050.000.000,00	3.692.560.273,00

Belanja bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman yang diterima Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Pada tahun 2024 Belanja bunga terealisasi Rp3.692.560.273,00 atau sebesar 91,17% dari yang dianggarkan di APBD sebesar Rp4.050.000.000,00.

Tabel 5.62 Belanja Bunga – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Belanja Bunga	4.050.000.000,00	3.692.560.273,00	91,17	8.623.436.793,00
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	4.050.000.000,00	3.692.560.273,00	91,17	8.623.436.793,00
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	4.050.000.000,00	3.692.560.273,00	91,17	8.623.436.793,00

Realisasi Belanja Bunga menurut klasifikasi fungsi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.63 Realisasi Belanja Bunga menurut Klasifikasi Fungsi Tahun 2024 – LRA		
NO	KLASIFIKASI FUNGSI	NILAI BELANJA BUNGA
A	PELAYANAN UMUM	3.692.560.273,00
	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3.692.560.273,00

5.1.2.1.4. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	1.400.000.000,00	944.301.180,00

Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

Belanja Subsidi ditujukan untuk memberikan keringanan modal usaha berupa subsidi margin bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau melalui Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan PT. Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) tentang Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Subsidi Margin yang tertuang dalam Kesepakatan Bersama Nomor 120.23/KDH.118/KB-02/2024 dan Nomor 027/MOU/2024 atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor 120.2/4590/DKUKM/2024 dan Nomor 135/PKS/2024. Teknis pelaksanaan Belanja Subdisi berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 34 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Subsidi Bunga Pinjaman bagi Usaha Mikro dan Industri Kecil.

Pada tahun 2024 Belanja Subsidi terealisasi sebesar Rp944.301.180,00 atau sebesar 67,45% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.400.000.000,00 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dikarenakan masa berlaku Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan PT. Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) tentang Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Subsidi Margin telah berakhir di awal Oktober 2024 dan harus dilakukan revisi PKS. Oleh sebab itu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan proses pembaharuan Kesepakatan Bersama dan PKS yang waktu pelaksanaannya sudah mendekati akhir Tahun Anggaran 2024 sehingga tidak dapat terserap secara maksimal untuk belanja subsidi margin 0% kepada Pelaku Usaha UMKM.

Tabel 5.64 Belanja Subsidi – LRA				
URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Belanja Subsidi	1.400.000.000,00	944.301.180,00	67,45	4.143.883.000,00
Belanja Subsidi kepada BUMN	0,00	0,00	0,00	3.333.475.500,00
Belanja Subsidi kepada BUMN	0,00	0,00	0,00	3.333.475.500,00
Belanja Subsidi kepada BUMD	1.400.000.000,00	944.301.180,00	67,45	810.407.500,00
Belanja Subsidi kepada BUMD	1.400.000.000,00	944.301.180,00	67,45	810.407.500,00

Realisasi Belanja Subsidi menurut klasifikasi fungsi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.65 Realisasi Belanja Subsidi menurut Klasifikasi Fungsi Tahun 2024 – LRA		
NO	KLASIFIKASI FUNGSI	NILAI BELANJA SUBSIDI
A	EKONOMI	944.301.180,00
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	944.301.180,00

5.1.2.1.5. Belanja Hibah

Belanja Hibah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	380.037.014.086,00	357.581.329.209,27

Belanja Hibah diberikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2024 Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp357.581.329.209,27 atau sebesar 94,09% dari yang dianggarkan sebesar Rp380.037.014.086,00. Rincian Belanja Hibah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.66 Belanja Hibah – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Belanja Hibah	380.037.014.086,00	357.581.329.209,27	94,09	362.326.208.341,06
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	165.530.407.700,00	158.511.792.275,00	95,76	138.194.945.746,93
Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	147.922.624.600,00	147.213.011.075,00	99,52	94.196.650.384,00
Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	147.922.624.600,00	147.213.011.075,00	99,52	94.196.650.384,00
Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	17.607.783.100,00	11.298.781.200,00	64,17	43.998.295.362,93
Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	17.607.783.100,00	11.298.781.200,00	64,17	43.998.295.362,93
Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.146.753.011,24
Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.146.753.011,24
Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.146.753.011,24
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	172.417.463.054,00	157.544.331.693,27	91,37	218.888.287.082,89
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	24.489.064.000,00	23.132.519.267,00	94,46	18.658.884.000,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	23.792.000.000,00	22.923.400.067,00	96,35	18.658.884.000,00
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	697.064.000,00	209.119.200,00	30,00	0,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	109.562.175.712,00	105.107.423.869,09	95,93	136.349.547.211,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	103.557.830.000,00	99.743.800.012,00	96,32	134.581.474.211,00
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	6.004.345.712,00	5.363.623.857,09	89,33	1.768.073.000,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	38.196.223.342,00	29.134.388.557,18	76,28	61.327.923.071,89
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	8.753.000.000,00	7.836.500.000,00	89,53	7.665.920.414,00
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	29.443.223.342,00	21.297.888.557,18	72,34	53.662.002.657,89
Belanja Hibah kepada Koperasi	170.000.000,00	170.000.000,00	100,00	162.600.000,00
Belanja Hibah Uang kepada Koperasi	170.000.000,00	170.000.000,00	100,00	162.600.000,00
Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	0,00	0,00	0,00	1.130.000.000,00
Belanja Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	0,00	0,00	0,00	1.130.000.000,00
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	0,00	0,00	1.259.332.800,00
Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00
Belanja Hibah Barang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	0,00	0,00	959.332.800,00
Belanja Hibah Dana BOS	37.433.950.000,00	36.870.020.909,00	98,49	0,00
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	33.459.410.000,00	32.930.722.526,00	98,42	0,00
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	33.459.410.000,00	32.930.722.526,00	98,42	0,00
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	3.974.540.000,00	3.939.298.383,00	99,11	0,00
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	3.974.540.000,00	3.939.298.383,00	99,11	0,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	4.655.193.332,00	4.655.184.332,00	100,00	3.096.222.500,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	4.655.193.332,00	4.655.184.332,00	100,00	3.096.222.500,00
Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	4.655.193.332,00	4.655.184.332,00	100,00	3.096.222.500,00

Penerima hibah yang dijelaskan pada tabel diatas terdiri dari pemberian hibah dana BOS Tahun Anggaran 2024 senilai Rp36.870.020.909,00 pada satuan pendidikan, pemberian hibah berupa uang senilai Rp277.886.711.154,00 oleh 11 (sebelas) perangkat daerah, dan pemberian hibah berupa barang senilai Rp38.169.412.814,27 oleh 6 (enam) perangkat daerah.

Selanjutnya, rekapitulasi penerima hibah dana BOS Tahun Anggaran 2024 dan penerima hibah berupa uang ditunjukkan pada **Lampiran 2**.

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik pada tahun 2024 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Pada tahun 2024 Belanja Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik terealisasi sebesar Rp4.655.184.332,00 atau sebesar 100% dari target yang ditetapkan di APBD sebesar Rp4.655.193.332,00. Adapun Rincian Belanja Bantuan Keuangan Partai Politik adalah sebagai berikut:

Tabel 5.67 Belanja Hibah Bantuan Keuangan – LRA

NO	U R A I A N	JUMLAH
1	Bantuan Keuangan Kepada Partai Amanat Nasional di DPRD Provinsi Kepulauan Riau	314.840.001,00
2	Bantuan Keuangan Kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di DPRD Provinsi Kepulauan Riau	711.479.999,00
3	Bantuan Keuangan Kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPRD Provinsi Kepulauan Riau	255.431.666,00
4	Bantuan Keuangan Kepada Partai Golongan Karya (GOLKAR) di DPRD Provinsi Kepulauan Riau	719.880.001,00
5	Bantuan Keuangan Kepada Partai Demokrat di DPRD Provinsi Kepulauan Riau	437.496.666,00
6	Bantuan Keuangan Kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPRD Provinsi Kepulauan Riau	532.428.333,00
7	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) di DPRD Provinsi Kepulauan Riau	602.351.000,00
8	Bantuan Keuangan Kepada Partai Nasdem di DPRD Provinsi Kepulauan Riau	579.235.000,00
9	Bantuan Keuangan Kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD Provinsi Kepulauan Riau	58.323.333,00
10	Bantuan Keuangan Kepada Partai Hari Nurani Rakyat (Hanura) di DPRD Provinsi Kepulauan Riau	262.786.667,00
11	Bantuan Keuangan Kepada Partai Persatuan Indonesia (Perindo) di DPRD Provinsi Kepulauan Riau	50.605.000,00
12	Bantuan Keuangan Kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di DPRD Provinsi Kepulauan Riau	130.326.666,00
	JUMLAH	4.655.184.332,00

Realisasi Belanja Hibah menurut klasifikasi fungsi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.68 Realisasi Belanja Hibah menurut Klasifikasi Fungsi Tahun 2024 – LRA

NO	KLASIFIKASI FUNGSI	NILAI BELANJA HIBAH
A	PELAYANAN UMUM	271.637.336.028,00
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	157.436.092.986,00
2	Biro Kesejahteraan Rakyat	101.136.180.322,00
3	Biro Umum	11.314.752.600,00
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	175.000.000,00
5	Dinas Pendidikan	1.575.310.120,00
B	EKONOMI	26.136.157.353,16
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	10.542.672.891,94
2	Dinas Komunikasi dan Informatika	700.000.000,00
3	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.270.000.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	12.623.484.461,22

NO	KLASIFIKASI FUNGSI	NILAI BELANJA HIBAH
C	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	106.939.604,02
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	106.939.604,02
D	KESEHATAN	700.000.000,00
1	Dinas Kesehatan	700.000.000,00
E	PENDIDIKAN	58.235.896.224,09
1	Dinas Kebudayaan	1.462.750.000,00
2	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	17.849.922.178,00
3	Dinas Pendidikan	38.923.224.046,09
F	PERLINDUNGAN SOSIAL	765.000.000,00
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	200.000.000,00
2	Dinas Sosial	565.000.000,00
	JUMLAH	357.581.329.209,27

Realisasi Belanja Hibah per masing-masing OPD dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.69 Realisasi Belanja Hibah per masing-masing OPD Tahun 2024 – LRA

NO	OPD	NILAI BELANJA HIBAH
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	157.436.092.986,00
2	Biro Kesejahteraan Rakyat	101.136.180.322,00
3	Biro Umum	11.314.752.600,00
4	Dinas Kebudayaan	1.462.750.000,00
5	Dinas Kelautan dan Perikanan	10.542.672.891,94
6	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	17.849.922.178,00
7	Dinas Kesehatan	700.000.000,00
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	700.000.000,00
9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.270.000.000,00
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	12.730.424.065,24
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	175.000.000,00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	200.000.000,00
13	Dinas Pendidikan	40.498.534.166,09
14	Dinas Sosial	565.000.000,00
	JUMLAH	357.581.329.209,27

5.1.2.1.6. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	5.101.365.000,00	4.002.925.000,00

Belanja Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Pada tahun 2024 Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp4.002.925.000,00 atau sebesar 78,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.101.365.000,00, dikarenakan keterlambatan proses administrasi yang tidak selesai tepat waktu. Berikut dibawah ini adalah rincian tabel belanja bantuan sosial:

Tabel 5.70 Belanja Bantuan Sosial – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Belanja Bantuan Sosial	5.101.365.000,00	4.002.925.000,00	78,47	7.417.430.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	3.848.000.000,00	2.972.600.000,00	77,25	3.704.361.000,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	3.848.000.000,00	2.972.600.000,00	77,25	3.704.361.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	913.365.000,00	910.325.000,00	99,67	1.310.900.000,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	778.500.000,00	776.000.000,00	99,68	1.140.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	134.865.000,00	134.325.000,00	99,60	170.900.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	340.000.000,00	120.000.000,00	35,29	2.402.169.000,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	340.000.000,00	120.000.000,00	35,29	2.402.169.000,00

Belanja Bantuan Sosial pada tahun 2024 digunakan antara lain:

1. Dinas Pendidikan antara lain:
- a) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan dasar pada bidang pendidikan bagi Guru dan Tenaga Pendidikan Jenjang Pendidikan Menengah Swasta se-Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp2.772.600.000,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penerima Insentif Guru dan Tenaga Pendidikan Jenjang SMA, SMK dan SLB Swasta se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.

b) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu dalam rangka meningkatkan kompetensi, motivasi, profesionalisme, dan kinerja guru Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa dalam melaksanakan profesinya, perlu mengikuti Pendidikan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam Tahun 2024 bagi yang memenuhi syarat sebesar Rp200.000.000,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 696/KPTS-4/II/2024 tentang Peserta Pendidikan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.
2. Dinas Sosial antara lain:
- a) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga sebesar Rp134.325.000,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 240 Tahun 2024 tentang Penerima Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024.

b) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp120.000.000,00 dan Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan

kepada Keluarga sebesar Rp531.500.000,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 240 Tahun 2024 tentang Penerima Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024.

- c) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga sebesar Rp244.500.000,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1390 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 240 Tahun 2024 tentang Penerima Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial menurut klasifikasi fungsi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.71 Realisasi Belanja Bantuan Sosial menurut Klasifikasi Fungsi Tahun 2024 – LRA

NO	KLASIFIKASI FUNGSI	NILAI BELANJA BANTUAN SOSIAL
A	PENDIDIKAN	2.972.600.000,00
	Dinas Pendidikan	2.972.600.000,00
B	PERLINDUNGAN SOSIAL	1.030.325.000,00
	Dinas Sosial	1.030.325.000,00
	JUMLAH	4.002.925.000,00

5.1.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	344.997.515.174,10	307.344.075.589,86

Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Pada tahun 2024 Belanja Modal yang terealisasi adalah sebesar Rp307.344.075.589,86 atau 89,09% dari yang dianggarkan sebesar Rp344.997.515.174,10 yang terdiri dari:

Tabel 5.72 Belanja Modal – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
BELANJA MODAL	344.997.515.174,10	307.344.075.589,86	89,09	618.877.436.638,59
Belanja Modal Tanah	8.021.100.000,00	920.100.000,00	11,47	1.388.489.184,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	130.089.417.367,93	115.508.155.838,84	88,79	202.847.528.770,05
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	138.014.437.494,17	129.103.961.833,55	93,54	232.962.878.105,59
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	43.766.559.842,00	36.791.762.576,47	84,06	178.551.126.080,95
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	19.529.407.470,00	19.630.419.447,00	100,52	529.474.380,00
Belanja Modal Aset Lainnya	5.576.593.000,00	5.389.675.894,00	96,65	2.597.940.118,00

5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	8.021.100.000,00	920.100.000,00

Belanja Modal Tanah merupakan pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan, penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

Pada tahun 2024 Belanja Modal Tanah yang terealisasi sebesar Rp920.100.000,00 atau 11,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.021.100.000,00 dikarenakan tidak terealisasinya pengadaan tanah untuk asrama mahasiswa kepri di Jakarta sebesar Rp7.100.000.000,00. Berikut dibawah ini adalah rincian tabel Belanja Modal Tanah:

Tabel 5.73 Belanja Modal Tanah – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Belanja Modal Tanah	8.021.100.000,00	920.100.000,00	11,47	1.388.489.184,00
Belanja Modal Tanah Persil	8.021.100.000,00	920.100.000,00	11,47	0,00
Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal	7.100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	921.100.000,00	920.100.000,00	99,89	0,00
Belanja Modal Lapangan	0,00	0,00	0,00	1.388.489.184,00
Belanja Modal Tanah untuk Jalan	0,00	0,00	0,00	1.388.489.184,00

Realisasi Belanja Modal Tanah menurut klasifikasi fungsi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.74 Realisasi Belanja Modal Tanah menurut Klasifikasi Fungsi Tahun 2024 – LRA

NO	KLASIFIKASI FUNGSI	NILAI BELANJA MODAL TANAH
A	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	920.100.000,00
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	920.100.000,00

5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	130.089.417.367,93	115.508.155.838,84

Belanja Modal Peralatan dan Mesin merupakan pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin, serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai. Pada tahun 2024 Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp115.508.155.838,84 atau sebesar 88,79%, dari yang dianggarkan sebesar Rp130.089.417.367,93 yang terdiri dari rincian sebagai berikut:

Tabel 5.75 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	130.089.417.367,93	115.508.155.838,84	88,79	202.847.528.770,05
Belanja Modal Alat Besar	606.745.470,00	605.244.000,00	99,75	552.376.215,10
Belanja Modal Alat Angkutan	19.804.530.629,00	15.316.607.100,00	77,34	16.265.860.649,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	206.149.540,00	184.490.000,00	89,49	38.613.800,00
Belanja Modal Alat Pertanian	1.353.431.240,00	1.284.714.000,00	94,92	1.109.720.500,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	24.565.937.257,30	21.725.083.804,00	88,44	35.090.929.525,95
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	3.149.474.918,00	1.048.602.000,00	33,29	3.173.426.577,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	9.103.449.135,00	8.387.907.829,00	92,14	69.817.123.750,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	14.894.778.280,00	14.828.330.827,00	99,55	13.491.924.700,00
Belanja Modal Komputer	13.291.369.373,63	11.261.084.800,00	84,72	62.836.114.253,00
Belanja Modal Alat Eksplorasi	30.000.000,00	29.100.000,00	97,00	19.287.500,00
Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	8.970.000,00
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	65.987.100,00	17.433.000,00	26,42	2.800.000,00
Belanja Modal Rambu-Rambu	1.793.867.570,00	1.783.806.844,00	99,44	6.656.400,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	28.824.850,00	23.680.000,00	82,15	433.724.900,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	35.227.772.551,00	31.371.598.359,00	89,05	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	5.967.099.454,00	7.640.473.275,84	128,04	0,00

Adapun rincian Belanja Modal Peralatan Mesin adalah sebagai berikut :

Tabel 5.76 Rincian Belanja Modal Alat Besar – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Belanja Modal Alat Besar	606.745.470,00	605.244.000,00	99,75	552.376.215,10
Belanja Modal Alat Bantu	606.745.470,00	605.244.000,00	99,75	552.376.215,10
Belanja Modal Electric Generating Set	600.000.000,00	598.500.000,00	99,75	146.206.215,10
Belanja Modal Pompa	6.745.470,00	6.744.000,00	99,98	18.990.000,00
Belanja Modal Unit Pemeliharaan Lapangan	0,00	0,00	0,00	49.880.000,00
Belanja Modal Peralatan Selam	0,00	0,00	0,00	337.300.000,00

Tabel 5.77 Rincian Belanja Modal Alat Modal Angkutan – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Belanja Modal Alat Angkutan	19.804.530.629,00	15.316.607.100,00	77,34	16.265.860.649,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	19.804.530.629,00	15.316.607.100,00	77,34	11.687.377.949,00
Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	5.529.855.510,00	4.192.800.000,00	75,82	1.138.000.000,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	12.952.947.619,00	9.851.257.100,00	76,05	9.365.569.999,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.208.479.000,00	1.159.450.000,00	95,94	642.107.950,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	113.248.500,00	113.100.000,00	99,87	44.300.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	497.400.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	0,00	0,00	0,00	4.578.482.700,00
Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	0,00	0,00	0,00	2.679.484.500,00
Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.898.998.200,00

Tabel 5.78 Rincian Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	206.149.540,00	184.490.000,00	89,49	38.613.800,00
Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	3.201.240,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	3.201.240,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	16.800.000,00	16.800.000,00	100,00	31.413.800,00
Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	0,00	0,00	0,00	2.735.000,00
Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	0,00	0,00	0,00	9.546.000,00
Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	0,00	0,00	0,00	19.132.800,00
Belanja Modal Peralatan Bengkel Khusus Peladam	16.800.000,00	16.800.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Ukur	186.148.300,00	167.690.000,00	90,08	7.200.000,00
Belanja Modal Alat Ukur Universal	175.003.300,00	156.590.000,00	89,48	0,00
Belanja Modal Alat Kalibrasi	1.545.000,00	1.500.000,00	97,09	0,00
Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00
Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	0,00

Tabel 5.79 Rincian Belanja Modal Alat Pertanian – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Belanja Modal Alat Pertanian	1.353.431.240,00	1.284.714.000,00	94,92	1.109.720.500,00
Belanja Modal Alat Pengolahan	1.353.431.240,00	1.284.714.000,00	94,92	1.109.720.500,00
Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	55.047.000,00	55.030.000,00	99,97	1.009.019.000,00
Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	31.672.240,00	29.290.000,00	92,48	0,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	1.108.300.000,00	1.049.572.000,00	94,70	0,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Belanja Modal Alat Processing	0,00	0,00	0,00	1.679.500,00
Belanja Modal Alat Pasca Panen	0,00	0,00	0,00	38.194.000,00
Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	158.412.000,00	150.822.000,00	95,21	60.828.000,00

Tabel 5.80 Rincian Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	24.565.937.257,30	21.725.083.804,00	88,44	35.090.929.525,95
Belanja Modal Alat Kantor	2.148.423.578,00	1.888.000.694,00	87,88	10.869.020.047,95
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	703.842.657,00	598.220.695,00	84,99	404.042.400,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.444.580.921,00	1.289.779.999,00	89,28	10.464.977.647,95
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	19.466.302.397,30	17.289.622.022,00	88,82	22.516.933.478,00
Belanja Modal Mebel	15.826.649.857,00	14.946.007.224,00	94,44	14.465.820.250,00
Belanja Modal Alat Pembersih	46.220.248,00	45.545.000,00	98,54	1.520.000.000,00
Belanja Modal Alat Pendingin	1.449.242.810,30	788.585.200,00	54,41	3.081.383.885,00
Belanja Modal Alat Dapur	25.886.882,00	21.285.000,00	82,22	661.320.300,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.099.485.135,00	1.477.873.998,00	70,39	2.779.409.043,00
Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	18.817.465,00	10.325.600,00	54,87	9.000.000,00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	2.951.211.282,00	2.547.461.088,00	86,32	1.704.976.000,00
Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	193.935.746,00	167.482.059,00	86,36	415.388.000,00
Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	152.608.405,00	54.202.000,00	35,52	56.340.000,00
Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	326.291.371,00	126.693.159,00	38,83	892.427.000,00
Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	19.730.250,00	19.680.000,00	99,75	0,00
Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	2.258.645.510,00	2.179.403.870,00	96,49	340.821.000,00

Tabel 5.81 Rincian Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	3.149.474.918,00	1.048.602.000,00	33,29	3.173.426.577,00
Belanja Modal Alat Studio	2.924.417.672,00	842.013.000,00	28,79	2.928.591.477,00
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	2.055.996.391,00	492.338.000,00	23,95	2.486.271.477,00
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	868.421.281,00	349.675.000,00	40,27	338.120.000,00
Belanja Modal Alat Studio Lainnya	0,00	0,00	0,00	104.200.000,00
Belanja Modal Alat Komunikasi	42.791.946,00	42.399.000,00	99,08	227.435.100,00
Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	42.791.946,00	42.399.000,00	99,08	224.335.100,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00
Belanja Modal Peralatan Pemancar	57.265.000,00	56.690.000,00	99,00	0,00
Belanja Modal Sumber Tenaga	57.265.000,00	56.690.000,00	99,00	0,00
Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	125.000.300,00	107.500.000,00	86,00	17.400.000,00
Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya	125.000.300,00	107.500.000,00	86,00	17.400.000,00

Tabel 5.82 Rincian Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	9.103.449.135,00	8.387.907.829,00	92,14	69.817.123.750,00
Belanja Modal Alat Kedokteran	4.631.583.761,00	4.009.508.582,00	86,57	13.834.621.900,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	2.203.889.919,00	1.593.398.000,00	72,30	8.877.041.900,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	3.203.460,00	3.200.000,00	99,89	0,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	26.094.082,00	26.094.082,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Kedokteran THT	128.646.300,00	126.816.500,00	98,58	0,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	769.750.000,00	769.750.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik	0,00	0,00	0,00	678.600.000,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	0,00	0,00	0,00	4.180.000.000,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Jiwa	1.500.000.000,00	1.490.250.000,00	99,35	0,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	0,00	0,00	0,00	98.980.000,00
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	4.471.865.374,00	4.378.399.247,00	97,91	55.982.501.850,00
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	4.471.865.374,00	4.378.399.247,00	97,91	55.982.501.850,00

Tabel 5.83 Rincian Belanja Modal Alat Laboratorium – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Belanja Modal Alat Laboratorium	14.894.778.280,00	14.828.330.827,00	99,55	13.491.924.700,00
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	1.543.670.000,00	1.539.107.500,00	99,70	1.569.056.000,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	0,00	0,00	0,00	286.150.000,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	0,00	0,00	0,00	83.400.000,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Cocok Tanam	841.720.000,00	838.630.000,00	99,63	0,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)	REALISASI (Rp)
	2024	2024		2023
1	2	3	4	5
Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	0,00	0,00	0,00	18.650.000,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	0,00	0,00	0,00	517.216.500,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Biologi	0,00	0,00	0,00	21.850.000,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Pendidikan	701.950.000,00	700.477.500,00	99,79	586.639.500,00
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	0,00	0,00	0,00	55.150.000,00
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	13.261.961.000,00	13.202.373.327,00	99,55	8.673.917.700,00
Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan	13.261.961.000,00	13.202.373.327,00	99,55	8.673.917.700,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	89.147.280,00	86.850.000,00	97,42	0,00
Belanja Modal System/Power Supply	89.147.280,00	86.850.000,00	97,42	0,00
Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	0,00	0,00	0,00	3.147.607.000,00
Belanja Modal Proteksi Lingkungan	0,00	0,00	0,00	247.324.000,00
Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.900.283.000,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	101.344.000,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	0,00	0,00	0,00	87.844.000,00

Tabel 5.84 Rincian Belanja Modal Komputer – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)	REALISASI (Rp)
	2024	2024		2023
1	2	3	4	5
Belanja Modal Komputer	13.291.369.373,63	11.261.084.800,00	84,72	62.836.114.253,00
Belanja Modal Komputer Unit	9.766.906.858,70	8.245.543.400,00	84,42	11.614.458.518,00
Belanja Modal Komputer Jaringan	171.437.600,00	169.128.000,00	98,65	461.299.000,00
Belanja Modal Personal Computer	9.032.652.316,50	7.617.308.400,00	84,33	10.616.926.518,00
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	562.816.942,20	459.107.000,00	81,57	536.233.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	3.524.462.514,93	3.015.541.400,00	85,56	51.221.655.735,00
Belanja Modal Peralatan Mini Computer	220.760.875,00	151.724.000,00	68,73	0,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.829.521.386,93	1.503.823.400,00	82,20	690.217.319,00
Belanja Modal Peralatan Jaringan	267.002.997,00	155.534.000,00	58,25	437.745.284,00
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	1.207.177.256,00	1.204.460.000,00	99,77	50.093.693.132,00

Tabel 5.85 Rincian Belanja Modal Alat Eksplorasi – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Belanja Modal Alat Eksplorasi	30.000.000,00	29.100.000,00	97,00	19.287.500,00
Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	30.000.000,00	29.100.000,00	97,00	19.287.500,00
Belanja Modal Elektronik/Electric	30.000.000,00	29.100.000,00	97,00	19.287.500,00

Tabel 5.86 Rincian Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	8.970.000,00
Belanja Modal Sumur	0,00	0,00	0,00	8.970.000,00
Belanja Modal Sumur Lainnya	0,00	0,00	0,00	8.970.000,00

Tabel 5.87 Rincian Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	65.987.100,00	17.433.000,00	26,42	2.800.000,00
Belanja Modal Alat Pelindung	65.987.100,00	17.433.000,00	26,42	2.800.000,00
Belanja Modal Baju Pengaman	61.212.900,00	12.675.000,00	20,71	0,00
Belanja Modal Sepatu Lapangan	4.285.000,00	4.270.000,00	99,65	2.800.000,00
Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	489.200,00	488.000,00	99,75	0,00

Tabel 5.88 Rincian Belanja Modal Rambu – rambu – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Belanja Modal Rambu-Rambu	1.793.867.570,00	1.783.806.844,00	99,44	6.656.400,00
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	1.793.867.570,00	1.783.806.844,00	99,44	6.656.400,00
Belanja Modal Rambu Bersuar	0,00	0,00	0,00	6.656.400,00
Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	1.793.867.570,00	1.783.806.844,00	99,44	0,00

Tabel 5.89 Rincian Belanja Modal Peralatan Olahraga – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)	REALISASI (Rp)
	2024	2024		2023
1	2	3	4	5
Belanja Modal Peralatan Olahraga	28.824.850,00	23.680.000,00	82,15	433.724.900,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	28.824.850,00	23.680.000,00	82,15	433.724.900,00
Belanja Modal Peralatan Permainan	5.144.850,00	0,00	0,00	7.000.000,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	23.680.000,00	23.680.000,00	100,00	426.724.900,00

Tabel 5.90 Rincian Belanja Modal dan Peralatan Mesin BOS – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)	REALISASI (Rp)
	2024	2024		2023
1	2	3	4	5
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	35.227.772.551,00	31.371.598.359,00	89,05	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	35.227.772.551,00	31.371.598.359,00	89,05	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	35.227.772.551,00	31.371.598.359,00	89,05	0,00

Tabel 5.91 Rincian Belanja Modal dan Peralatan Mesin BLUD – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)	REALISASI (Rp)
	2024	2024		2023
1	2	3	4	5
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	5.967.099.454,00	7.640.473.275,84	128,04	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	5.967.099.454,00	7.640.473.275,84	128,04	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	5.967.099.454,00	7.640.473.275,84	128,04	0,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin menurut klasifikasi fungsi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.92 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin menurut Klasifikasi Fungsi Tahun 2024 – LRA

NO	KLASIFIKASI FUNGSI	NILAI BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN
A	PELAYANAN UMUM	37.300.820.981,84
1	Badan Kepegawaian dan Korpri	67.679.000,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	244.629.000,00
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	837.922.058,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	44.080.000,00
5	Badan Pendapatan Daerah	3.596.242.110,00
6	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	343.330.000,00
7	Badan Penghubung Daerah	2.492.258.000,00
8	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	521.297.800,00
9	Biro Administrasi Pimpinan	161.375.400,00

NO	KLASIFIKASI FUNGSI	NILAI BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN
10	Biro Hukum	54.950.000,00
11	Biro Kesejahteraan Rakyat	231.573.000,00
12	Biro Organisasi	278.050.000,00
13	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	129.365.000,00
14	Biro Pengadaan Barang/Jasa	142.335.200,00
15	Biro Umum	11.070.288.100,00
16	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	185.975.000,00
17	Dinas Kebudayaan	652.620.000,00
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	331.073.000,00
19	Dinas Kesehatan	243.333.000,00
20	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	166.244.600,00
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	11.415.000,00
22	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	93.648.285,00
23	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.995.400.000,00
24	Dinas Pariwisata	28.500.000,00
25	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	755.950.000,00
26	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	176.413.953,00
27	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	5.550.000,00
28	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2.000.000,00
29	Dinas Pendidikan	4.761.723.775,84
30	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	56.950.000,00
31	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	87.380.000,00
32	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	557.269.000,00
33	Dinas Sosial	600.050.000,00
34	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	18.490.000,00
35	Inspektorat	1.613.974.200,00
36	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	388.702.000,00
37	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	4.020.391.500,00
38	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	128.893.000,00
39	Sekretariat DPRD	203.500.000,00
B	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	66.634.000,00
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17.010.000,00
2	Biro Hukum	43.466.000,00
3	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	6.158.000,00
C	EKONOMI	5.630.351.344,00
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	937.316.500,00
2	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	1.888.202.000,00
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	919.000.000,00
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	60.000.000,00
5	Dinas Perhubungan	1.825.832.844,00
D	KESEHATAN	10.778.342.457,00
1	Dinas Kesehatan	5.195.483.628,00
2	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	2.915.821.500,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	2.667.037.329,00
E	PENDIDIKAN	61.627.687.056,00
1	Dinas Kebudayaan	114.525.000,00
2	Dinas Pendidikan	61.504.462.056,00

NO	KLASIFIKASI FUNGSI	NILAI BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN
3	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	8.700.000,00
F	PERLINDUNGAN SOSIAL	104.320.000,00
1	Dinas Sosial	104.320.000,00
	JUMLAH	115.508.155.838,84

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per masing-masing OPD dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.93 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per masing-masing OPD Tahun 2024 – LRA

NO	OPD	NILAI BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN
1	Badan Kepegawaian dan Korpri	67.679.000,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	244.629.000,00
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	837.922.058,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	61.090.000,00
5	Badan Pendapatan Daerah	3.596.242.110,00
6	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	343.330.000,00
7	Badan Penghubung Daerah	2.492.258.000,00
8	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	521.297.800,00
9	Biro Administrasi Pimpinan	161.375.400,00
10	Biro Hukum	98.416.000,00
11	Biro Kesejahteraan Rakyat	231.573.000,00
12	Biro Organisasi	278.050.000,00
13	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	129.365.000,00
14	Biro Pengadaan Barang/Jasa	142.335.200,00
15	Biro Umum	11.070.288.100,00
16	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	185.975.000,00
17	Dinas Kebudayaan	767.145.000,00
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.268.389.500,00
19	Dinas Kesehatan	5.438.816.628,00
20	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	2.054.446.600,00
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	930.415.000,00
22	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	93.648.285,00
23	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.055.400.000,00
24	Dinas Pariwisata	28.500.000,00
25	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	755.950.000,00
26	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	176.413.953,00
27	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	5.550.000,00
28	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2.000.000,00
29	Dinas Pendidikan	66.266.185.831,84
30	Dinas Perhubungan	1.825.832.844,00
31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	56.950.000,00
32	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	96.080.000,00
33	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	557.269.000,00
34	Dinas Sosial	704.370.000,00
35	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	18.490.000,00
36	Inspektorat	1.613.974.200,00

NO	OPD	NILAI BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN
37	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	3.304.523.500,00
38	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	6.687.428.829,00
39	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	135.051.000,00
40	Sekretariat DPRD	203.500.000,00
	JUMLAH	115.508.155.838,84

5.1.2.2.3. **Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	138.014.437.494,17	129.103.961.833,55

Belanja Modal Gedung dan Bangunan merupakan pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

Pada tahun 2024 Belanja Modal Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp129.103.961.833,55 atau sebesar 93,54% dari yang dianggarkan sebesar Rp138.014.437.494,17, rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.94 Belanja Modal Gedung dan Bangunan – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	138.014.437.494,17	129.103.961.833,55	93,54	232.962.878.105,59
Belanja Modal Bangunan Gedung	129.534.209.910,17	121.174.100.425,55	93,55	232.438.460.276,59
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	8.480.227.584,00	7.929.861.408,00	93,51	524.417.829,00

Dengan rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

Tabel 5.95 Rincian Belanja Modal Bangunan Gedung – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Belanja Modal Bangunan Gedung	129.534.209.910,17	121.174.100.425,55	93,55	232.438.460.276,59
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	129.534.209.910,17	121.174.100.425,55	93,55	232.272.479.587,37
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	17.882.822.745,01	15.684.793.716,97	87,71	113.249.214.085,09
Belanja Modal Bangunan Gudang	0,00	0,00	0,00	599.280.227,61
Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	635.972.689,00	436.463.094,60	68,63	0,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	600.000.000,00	599.183.122,00	99,86	199.800.000,00
Belanja Modal Bangunan Kesehatan	173.300.000,00	173.300.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	256.104.807,00	0,00	0,00	0,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)	REALISASI (Rp)
	2024	2024		2023
1	2	3	4	5
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	10.439.897.000,00	10.239.897.000,00	98,08	15.218.613.350,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	73.940.722.968,00	70.519.118.631,22	95,37	75.249.814.711,47
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	437.431.805,00	437.431.805,00	100,00	832.953.300,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	2.952.107.100,00	2.952.107.000,00	100,00	6.955.520.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Museum	0,00	0,00	0,00	199.766.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	11.016.991.796,16	8.933.287.246,76	81,09	5.452.144.034,50
Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	0,00	0,00	0,00	801.722.498,70
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	200.000.000,00	199.659.809,00	99,83	199.837.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	10.998.859.000,00	10.998.859.000,00	100,00	13.313.814.380,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00	165.980.689,22
Belanja Modal Rumah Negara Golongan III	0,00	0,00	0,00	165.980.689,22

Tabel 5.96 Rincian Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)	REALISASI (Rp)
	2024	2024		2023
1	2	3	4	5
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	8.480.227.584,00	7.929.861.408,00	93,51	524.417.829,00
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	8.480.227.584,00	7.929.861.408,00	93,51	524.417.829,00
Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	125.854.400,00	124.800.000,00	99,16	21.503.470,00
Belanja Modal Pagar	8.354.373.184,00	7.805.061.408,00	93,42	502.914.359,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan menurut klasifikasi fungsi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.97 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan menurut Klasifikasi Fungsi Tahun 2024 – LRA

NO	KLASIFIKASI FUNGSI	NILAI BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN
A	PELAYANAN UMUM	1.846.331.343,65
1	Badan Pendapatan Daerah	124.800.000,00
2	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	437.431.805,00
3	Dinas Pendidikan	996.296.298,65
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	287.803.240,00
B	EKONOMI	34.416.369.767,63
1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	294.961.489,87
2	Dinas Kelautan dan Perikanan	8.106.017.628,99
3	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	997.258.031,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	24.190.863.000,00
5	Dinas Perhubungan	827.269.617,77
C	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	970.288.604,73
1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	141.501.604,73
2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	828.787.000,00

NO	KLASIFIKASI FUNGSI	NILAI BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN
D	KESEHATAN	8.275.621.521,32
1	Dinas Kesehatan	302.888.138,00
2	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	173.300.000,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	7.799.433.383,32
E	PENDIDIKAN	83.595.350.596,22
1	Dinas Pendidikan	83.595.350.596,22
	JUMLAH	129.103.961.833,55

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per masing-masing OPD dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.98 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per masing-masing OPD Tahun 2024 – LRA

NO	OPD	NILAI BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN
1	Badan Pendapatan Daerah	124.800.000,00
2	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	436.463.094,60
3	Dinas Kelautan dan Perikanan	8.106.017.628,99
4	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	437.431.805,00
5	Dinas Kesehatan	302.888.138,00
6	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	997.258.031,00
7	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	24.190.863.000,00
8	Dinas Pendidikan	84.591.646.894,87
9	Dinas Perhubungan	827.269.617,77
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.116.590.240,00
11	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	173.300.000,00
12	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	7.799.433.383,32
	JUMLAH	129.103.961.833,55

5.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	43.766.559.842,00	36.791.762.576,47

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/ pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

Pada tahun 2024 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar terealisasi sebesar Rp36.791.762.576,47 atau sebesar 84,06% dari yang dianggarkan sebesar Rp43.766.559.842,00, yang terdiri dari rincian sebagai berikut:

Tabel 5.99 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	43.766.559.842,00	36.791.762.576,47	84,06	178.551.126.080,95
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	32.419.681.750,00	32.288.532.170,00	99,60	142.185.887.178,28
Belanja Modal Bangunan Air	2.075.888.600,00	1.149.877.370,00	55,39	18.516.361.071,07
Belanja Modal Instalasi	1.785.356.223,39	483.000.000,00	27,05	2.980.664.000,00
Belanja Modal Jaringan	7.485.633.268,61	2.870.353.036,47	38,34	14.868.213.831,60

Dengan rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut:

Tabel 5.100 Rincian Belanja Modal Jalan dan Jembatan – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	32.419.681.750,00	32.288.532.170,00	99,60	142.185.887.178,28
Belanja Modal Jalan	32.139.014.000,00	32.007.864.420,00	99,59	129.477.091.381,77
Belanja Modal Jalan Provinsi	31.991.414.000,00	31.860.375.400,00	99,59	128.833.774.909,68
Belanja Modal Jalan Lainnya	147.600.000,00	147.489.020,00	99,92	643.316.472,09
Belanja Modal Jembatan	280.667.750,00	280.667.750,00	100,00	12.708.795.796,51
Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi	280.667.750,00	280.667.750,00	100,00	12.708.795.796,51

Tabel 5.101 Rincian Belanja Modal Bangunan Air – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Belanja Modal Bangunan Air	2.075.888.600,00	1.149.877.370,00	55,39	18.516.361.071,07
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	0,00	0,00	0,00	320.075.000,00
Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	0,00	0,00	0,00	120.300.000,00
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	0,00	0,00	0,00	199.775.000,00
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	2.075.888.600,00	1.149.877.370,00	55,39	18.196.286.071,07
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	2.075.888.600,00	1.149.877.370,00	55,39	18.196.286.071,07

Tabel 5.102 Rincian Belanja Modal Instalasi – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Belanja Modal Instalasi	1.785.356.223,39	483.000.000,00	27,05	2.980.664.000,00
Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00
Belanja Modal Instalasi Air Sumber/Mata Air	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00
Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	1.785.356.223,39	483.000.000,00	27,05	2.502.664.000,00
Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	1.164.356.223,39	0,00	0,00	1.416.164.000,00
Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	621.000.000,00	483.000.000,00	77,78	1.086.500.000,00
Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	0,00	0,00	0,00	431.000.000,00
Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Distribusi	0,00	0,00	0,00	431.000.000,00
Belanja Modal Instalasi Pengaman	0,00	0,00	0,00	31.000.000,00
Belanja Modal Instalasi Pengaman Lainnya	0,00	0,00	0,00	31.000.000,00

Tabel 5.103 Belanja Modal Jaringan – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Belanja Modal Jaringan	7.485.633.268,61	2.870.353.036,47	38,34	14.868.213.831,60
Belanja Modal Jaringan Air Minum	360.000.000,00	359.957.529,37	99,99	13.337.396.728,02
Belanja Modal Jaringan Cabang Distribusi	360.000.000,00	359.957.529,37	99,99	0,00
Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	0,00	0,00	0,00	13.337.396.728,02
Belanja Modal Jaringan Listrik	7.125.633.268,61	2.510.395.507,10	35,23	1.530.817.103,58
Belanja Modal Jaringan Distribusi	6.555.633.268,61	1.966.500.854,00	30,00	1.530.817.103,58
Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	570.000.000,00	543.894.653,10	95,42	0,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan menurut klasifikasi fungsi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.104 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan menurut Klasifikasi Fungsi Tahun 2024 – LRA

NO	KLASIFIKASI FUNGSI	NILAI BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
A	EKONOMI	34.317.815.173,10
1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	483.000.000,00
2	Dinas Kelautan dan Perikanan	543.894.653,10
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	33.290.920.520,00
B	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	2.326.458.383,37
1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.966.500.854,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	359.957.529,37

NO	KLASIFIKASI FUNGSI	NILAI BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
C	PENDIDIKAN	147.489.020,00
1	Dinas Pendidikan	147.489.020,00
	JUMLAH	36.791.762.576,47

5.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	19.529.407.470,00	19.630.419.447,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan pembangunan/ pembuatan serta perawatan terhadap aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan. Termasuk dalam belanja ini adalah pembelian barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, jurnal ilmiah, dan belanja pengadaan Aset Tetap Renovasi.

Pada tahun 2024 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar Rp19.630.419.447,00 atau sebesar 100,52% dari yang dianggarkan sebesar Rp19.529.407.470,00. Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.105 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	19.529.407.470,00	19.630.419.447,00	100,52	529.474.380,00
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	366.300.000,00	358.800.000,00	97,95	20.758.350,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	1.343.985.230,00	1.299.940.000,00	96,72	22.520.400,00
Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	0,00	296.135.400,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	190.060.230,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	17.819.122.240,00	17.971.679.447,00	100,86	0,00

Dengan rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.106 Rincian Belanja Modal Bahan Perpustakaan – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	366.300.000,00	358.800.000,00	97,95	20.758.350,00
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	0,00	0,00	0,00	20.758.350,00
Belanja Modal Buku Umum	0,00	0,00	0,00	6.802.250,00
Belanja Modal Buku Agama	0,00	0,00	0,00	3.438.400,00
Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	0,00	0,00	0,00	3.973.900,00
Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	0,00	0,00	0,00	3.292.150,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	3.251.650,00
Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan	366.300.000,00	358.800.000,00	97,95	0,00
Belanja Modal Lukisan dan Ukiran	366.300.000,00	358.800.000,00	97,95	0,00

Tabel 5.107 Rincian Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	1.343.985.230,00	1.299.940.000,00	96,72	22.520.400,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	1.343.985.230,00	1.299.940.000,00	96,72	22.520.400,00
Belanja Modal Alat Musik	1.343.985.230,00	1.299.940.000,00	96,72	17.700.000,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya	0,00	0,00	0,00	4.820.400,00

Tabel 5.108 Rincian Belanja Modal Tanaman – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	0,00	296.135.400,00
Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	0,00	296.135.400,00
Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	0,00	296.135.400,00

Tabel 5.109 Rincian Belanja Modal Aset Tidak Berwujud – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	190.060.230,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	190.060.230,00
Belanja Modal Software	0,00	0,00	0,00	190.060.230,00

Tabel 5.110 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	17.819.122.240,00	17.971.679.447,00	100,86	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	17.819.122.240,00	17.971.679.447,00	100,86	0,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	17.819.122.240,00	17.971.679.447,00	100,86	0,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya menurut klasifikasi fungsi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.111 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya menurut Klasifikasi Fungsi Tahun 2024 – LRA

NO	KLASIFIKASI FUNGSI	NILAI BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA
A	PELAYANAN UMUM	358.800.000,00
	Sekretariat DPRD	358.800.000,00
B	PENDIDIKAN	19.271.619.447,00
	Dinas Pendidikan	19.271.619.447,00
	JUMLAH	19.630.419.447,00

5.1.2.2.6. Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal Aset Lainnya	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	5.576.593.000,00	5.389.675.894,00

Belanja Modal Aset Lainnya merupakan pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Pada Tahun 2024 Belanja Modal Aset Lainnya BLUD terealisasi sebesar Rp5.389.675.894,00 atau sebesar 96,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.576.593.000,00. Rincian Belanja Modal Aset Lainnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.112 Belanja Modal Aset Lainnya

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Belanja Modal Aset Lainnya	5.576.593.000,00	5.389.675.894,00	96,65	2.597.940.118,00
Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	2.597.940.118,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	2.597.940.118,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	0,00	0,00	0,00	1.210.976.300,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.386.963.818,00
Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	5.576.593.000,00	5.389.675.894,00	96,65	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	5.576.593.000,00	5.389.675.894,00	96,65	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	5.576.593.000,00	5.389.675.894,00	96,65	0,00

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya menurut klasifikasi fungsi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.113 Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya menurut Klasifikasi Fungsi Tahun 2024 – LRA

NO	KLASIFIKASI FUNGSI	NILAI BELANJA MODAL ASET LAINNYA
	PELAYANAN UMUM	5.389.675.894,00
1	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	1.270.175.894,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	4.119.500.000,00
	JUMLAH	5.389.675.894,00

5.1.2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	4.773.672.048,00	2.065.423.140,00

Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Pada tahun 2024 Belanja Tidak Terduga terealisasi sebesar Rp2.065.423.140,00 atau 43,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.773.672.048,00. Belanja Tidak Terduga (BTT) merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Realisasi Belanja Tidak Terduga dialokasikan untuk mengantisipasi adanya bencana yang harus segera diatasi dan untuk pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Belanja Tidak Terduga pada tahun 2024 digunakan antara lain:

1. Belanja Tidak Terduga dalam rangka pembayaran atas penghitungan kelebihan pembayaran pajak daerah atas nama Citra Dewi dari penerbitan SKPDLB Nomor B-960.1-272/UPTD.PPD-TBK/2023 tanggal 6 Desember 2023 sebesar Rp179.429,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 536/KPTS-28/I/2024 tentang Pembetulan Ketetapan atas SKPD Pajak Kendaraan Bermotor untuk Wajib Pajak atas Nama Citra Dewi.
2. Belanja Tidak Terduga dalam rangka pembayaran atas penghitungan kelebihan pembayaran pajak daerah atas Dardameli Wati dari penerbitan SKPDLB Nomor B-960.1-273/UPTD.PPD-TBK/2023 tanggal 6 Desember 2023 sebesar Rp892.217,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 537/KPTS-28/I/2024 tentang Pembetulan Ketetapan atas SKPD Pajak Kendaraan Bermotor untuk Wajib Pajak atas Nama Dardameli Wati.
3. Belanja Tidak Terduga dalam rangka pembayaran atas penghitungan kelebihan pembayaran pajak daerah atas Safriani Siregar dari penerbitan SKPDLB Nomor B-960.1-274/UPTD.PPD-TBK/2023 tanggal 6 Desember 2023 sebesar Rp687.994,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 538/KPTS-28/I/2024 tentang Pembetulan Ketetapan atas SKPD Pajak Kendaraan Bermotor untuk Wajib Pajak atas Nama Safriani Siregar.
4. Belanja Tidak Terduga dalam rangka pembayaran pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak daerah atas Yulia Purnama Safari dari penerbitan SKPDLB Nomor B-960.1-275/UPTD.PPD-TBK/2023 tanggal 6 Desember 2023 sebesar Rp9.302.500,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 721/KPTS-28/II/2024 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah kepada Wajib Pajak atas Nama Yulia Purnama Safari.

5. Belanja Tidak Terduga dalam rangka pembayaran pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor atas Arman sebesar Rp20.024.800,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1133/KPTS-28/VI/2024 tentang Pembetulan Ketetapan atas SKPD Pajak Kendaraan Bermotor untuk Wajib Pajak atas Nama Arman.
6. Bantuan Sosial dalam rangka melakukan langkah-langkah rehabilitasi dan penanggulangan terhadap dampak yang terjadi atas Bencana Kebakaran di Tanjung Batu Kabupaten Karimun sebesar Rp240.000.000,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 655 Tahun 2024 tentang Penerima Bantuan Sosial dalam rangka Penanganan Bencana Kebakaran di Tanjung Batu Kabupaten Karimun Tahun 2024.
7. Bantuan Sosial dalam rangka melakukan langkah-langkah rehabilitasi dan penanggulangan terhadap dampak yang terjadi atas Bencana Puting Beliung di Kabupaten Karimun sebesar Rp1.217.337.200,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 656 Tahun 2024 tentang Penerima Bantuan Sosial dalam rangka Penanganan Bencana Puting Beliung di Kabupaten Karimun Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 906 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 656 Tahun 2024 tentang Penerima Bantuan Sosial dalam rangka Penanganan Bencana Puting Beliung di Kabupaten Karimun Tahun 2024.
8. Bantuan Sosial dalam rangka melakukan langkah-langkah rehabilitasi dan penanggulangan terhadap dampak yang terjadi atas Bencana Puting Beliung di Desa Lebu Kecamatan Belat Kabupaten Karimun sebesar Rp147.860.000,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 907 Tahun 2024 tentang Penerima Bantuan Sosial dalam rangka Penanganan Bencana Puting Beliung di Desa Lebu Kecamatan Belat Kabupaten Karimun Tahun 2024.
9. Bantuan Sosial dalam rangka melakukan langkah-langkah rehabilitasi dan penanggulangan terhadap dampak yang terjadi atas Bencana Angin Puting Beliung di Pulau Petong Kelurahan Pulau Abang Kecamatan Galang Kota Batam sebesar Rp53.659.000,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1159 Tahun 2024 tentang Penerima Bantuan Sosial dalam rangka Penanganan Bencana Angin Puting Beliung di Pulau Petong Kelurahan Pulau Abang Kecamatan Galang Kota Batam Tahun 2024.
10. Bantuan Sosial dalam rangka melakukan langkah-langkah rehabilitasi dan penanggulangan terhadap dampak yang terjadi atas Bencana Kebakaran di Kelurahan Batu Merah Kecamatan Batu Ampar Kota Batam sebesar Rp110.000.000,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1158 Tahun 2024 tentang Penerima Bantuan Sosial dalam rangka Penanganan Bencana Kebakaran di Kelurahan Batu Merah Kecamatan Batu Ampar Kota Batam.
11. Bantuan sosial dalam rangka melakukan langkah-langkah rehabilitasi dan penanggulangan terhadap dampak yang terjadi atas Bencana Angin Puting Beliung di Pulau Labun Kelurahan Pemping Kecamatan Belakang Padang Kota Batam sebesar Rp123.980.000,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1160 Tahun 2024 tentang Penerima Bantuan Sosial dalam rangka Penanganan Bencana Angin Puting Beliung di Pulau Labun Kelurahan Pemping Kecamatan Belakang Padang Kota Batam Tahun 2024.
12. Bantuan sosial dalam rangka melakukan langkah-langkah rehabilitasi dan penanggulangan terhadap dampak yang terjadi atas Bencana Kebakaran di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang sebesar Rp51.500.000,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1163 Tahun 2024 tentang Penerima Bantuan Sosial dalam rangka Penanganan Bencana Kebakaran di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang Tahun 2024.

13. Menindaklanjuti Surat dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Nomor 11980/C/PR.04.01/2023 Tanggal 21 November 2023 hal Percepatan Pendataan Pengembalian Dana BOSP, dimana pada tahun 2023 terdapat kesalahan penyetoran pengembalian atas Dana BOS ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada beberapa sekolah yang seharusnya dikembalikan ke Rekening Kas Negara (RKUN) antara lain:
- a. Pengembalian Dana BOS Kinerja dari SMK Negeri 1 Seri Kuala Lobam sebesar Rp45.000.000,00.
 - b. Pengembalian Dana BOS Kinerja dari SMK Negeri 7 Batam sebesar Rp45.000.000,00.
- Untuk itu pada tahun 2024 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan pengembalian atas Dana BOS tersebut dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Negara (RKUN) melalui mekanisme Belanja Tidak Terduga.

Realisasi Belanja Tidak Terduga menurut klasifikasi fungsi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.114 Realisasi Belanja Tidak Terduga menurut Klasifikasi Fungsi Tahun 2024 – LRA

NO	KLASIFIKASI FUNGSI	NILAI BELANJA TIDAK TERDUGA
A	PELAYANAN UMUM	2.065.423.140,00
	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2.065.423.140,00
	JUMLAH	2.065.423.140,00

5.1.2.4. Belanja Transfer

Belanja Transfer	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	841.617.613.430,00	775.144.201.015,00

Belanja Transfer merupakan belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan pengeluaran anggaran dalam bentuk bantuan uang kepada Pemerintah lainnya yang digunakan untuk pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Pada tahun 2024 Belanja Transfer terealisasi sebesar Rp775.144.201.015,00 atau sebesar 92,10% dari yang dianggarkan di APBD sebesar Rp841.617.613.430,00.

Rincian Belanja Transfer dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.115 Belanja Transfer – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
BELANJA TRANSFER	841.617.613.430,00	775.144.201.015,00	92,10	767.544.449.001,00
Belanja Bagi Hasil	812.172.113.430,00	748.291.201.015,00	92,13	759.191.867.087,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	812.172.113.430,00	748.291.201.015,00	92,13	759.191.867.087,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Belanja Bantuan Keuangan	29.445.500.000,00	26.853.000.000,00	91,20	8.352.581.914,00
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	16.124.000.000,00	14.130.500.000,00	87,64	6.184.581.914,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	12.821.500.000,00	12.222.500.000,00	95,33	2.168.000.000,00

5.1.2.4.1. Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	812.172.113.430,00	748.291.201.015,00

Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penyaluran dana bagi hasil kepada kabupaten/kota sebagai kompensasi bagi hasil atas pajak-pajak daerah. Belanja bagi hasil pajak daerah tahun 2024 terealisasi sebesar Rp748.291.201.015,00 atau 92,13% dari yang dianggarkan sebesar Rp812.172.113.430,00. Khusus Pembayaran/Penyaluran Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok dilakukan berdasarkan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok, maka Gubernur menyalurkan bagi hasil Pajak Rokok kepada kabupaten/kota dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Pajak Rokok di RKUD Provinsi. Penyaluran Belanja Bagi Hasil berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 491 Tahun 2024 tentang Alokasi Besaran Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 dan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 250 Tahun 2024 Tentang Besaran Tunda Salur Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaran Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan kepada Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023. Rincian Belanja Bagi Hasil dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.116 Belanja Bagi Hasil – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Belanja Bagi Hasil	812.172.113.430,00	748.291.201.015,00	92,13	759.191.867.087,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	812.172.113.430,00	748.291.201.015,00	92,13	759.191.867.087,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	357.752.849.757,00	330.924.905.661,00	92,50	387.174.801.900,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	357.752.849.757,00	330.924.905.661,00	92,50	387.174.801.900,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	454.419.263.673,00	417.366.295.354,00	91,85	372.017.065.187,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	454.419.263.673,00	417.366.295.354,00	91,85	372.017.065.187,00

Rincian Realisasi Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

Tabel 5.117 Rincian Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah – LRA

NO	KABUPATEN / KOTA	REALISASI PEMBAYARAN TUNDA BAYAR 2023 (Rp)	REALISASI PEMBAYARAN 2024	TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5
1	Kota Batam	69.362.260.651,00	258.294.758.610,00	327.657.019.261,00
2	Kota Tanjung Pinang	21.073.992.076,00	68.635.284.017,00	89.709.276.093,00
3	Kab. Bintan	26.647.165.903,00	56.343.240.120,00	82.990.406.023,00
4	Kab. Karimun	17.167.587.493,00	59.646.825.683,00	76.814.413.176,00
5	Kab. Natuna	18.221.293.499,00	45.958.891.145,00	64.180.184.644,00
6	Kab. Lingga	13.205.958.099,00	42.042.397.947,00	55.248.356.046,00
7	Kab. Anambas	12.454.416.671,00	39.237.129.101,00	51.691.545.772,00
JUMLAH		178.132.674.392,00	570.158.526.623,00	748.291.201.015,00

Rincian Realisasi Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kota Batam adalah sebagai berikut:

Tabel 5.118 Rincian Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kota Batam – LRA

NO	KABUPATEN / KOTA	REALISASI PEMBAYARAN TUNDA BAYAR 2023 (Rp)	REALISASI PEMBAYARAN 2024 (Rp)	TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5
	Kota Batam	69.362.260.651,00	258.294.758.610,00	327.657.019.261,00
1	PKB	22.906.713.168,00	52.275.563.934,00	75.182.277.102,00
2	BBN-KB	18.500.387.043,00	47.151.448.889,00	65.651.835.932,00
3	P-AP	62.931.325,00	184.773.405,00	247.704.730,00
4	PBB-KB	27.892.229.115,00	116.439.624.921,00	144.331.854.036,00
5	PAJAK ROKOK	0,00	42.243.347.461,00	42.243.347.461,00

Rincian Realisasi Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut:

Tabel 5.119 Rincian Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kota Tanjungpinang – LRA

NO	KABUPATEN / KOTA	REALISASI PEMBAYARAN TUNDA BAYAR 2023 (Rp)	REALISASI PEMBAYARAN 2024 (Rp)	TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5
	Kota Kota Tanjungpinang	21.073.992.076,00	68.635.284.017,00	89.709.276.093,00
1	PKB	6.010.536.937,00	14.160.512.089,00	20.171.049.026,00
2	BBN-KB	2.982.069.691,00	9.468.182.296,00	12.450.251.987,00
3	P-AP	10.887.420,00	32.013.735,00	42.901.155,00
4	PBB-KB	12.070.498.028,00	30.173.779.645,00	42.244.277.673,00
5	PAJAK ROKOK	0,00	14.800.796.252,00	14.800.796.252,00

Rincian Realisasi Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Bintan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.120 Rincian Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Bintan – LRA

NO	KABUPATEN / KOTA	REALISASI PEMBAYARAN TUNDA BAYAR 2023 (Rp)	REALISASI PEMBAYARAN 2024 (Rp)	TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5
	Kabupaten Bintan	26.647.165.903,00	56.343.240.120,00	82.990.406.023,00
1	PKB	4.658.984.137,00	10.624.313.047,00	15.283.297.184,00
2	BBN-KB	2.981.455.191,00	8.073.710.893,00	11.055.166.084,00
3	P-AP	22.606.033,00	56.859.523,00	79.465.556,00
4	PBB-KB	18.984.120.542,00	24.711.814.314,00	43.695.934.856,00
5	PAJAK ROKOK	0,00	12.876.542.343,00	12.876.542.343,00

Rincian Realisasi Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut:

Tabel 5.121 Rincian Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Karimun – LRA

NO	KABUPATEN / KOTA	REALISASI PEMBAYARAN TUNDA BAYAR 2023 (Rp)	REALISASI PEMBAYARAN 2024 (Rp)	TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5
	Kabupaten Karimun	17.167.587.493,00	59.646.825.683,00	76.814.413.176,00
1	PKB	4.830.632.569,00	11.134.960.885,00	15.965.593.454,00
2	BBN-KB	2.728.834.721,00	8.062.378.964,00	10.791.213.685,00
3	P-AP	11.468.713,00	33.297.217,00	44.765.930,00
4	PBB-KB	9.596.651.490,00	24.878.444.060,00	34.475.095.550,00
5	PAJAK ROKOK	0,00	15.537.744.557,00	15.537.744.557,00

Rincian Realisasi Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

Tabel 5.122 Rincian Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Natuna – LRA

NO	KABUPATEN / KOTA	REALISASI PEMBAYARAN TUNDA BAYAR 2023 (Rp)	REALISASI PEMBAYARAN 2024 (Rp)	TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5
	Kabupaten Natuna	18.221.293.499,00	45.958.891.145,00	64.180.184.644,00
1	PKB	3.747.009.196,00	8.542.639.024,00	12.289.648.220,00
2	BBN-KB	2.505.629.784,00	6.810.085.248,00	9.315.715.032,00
3	P-AP	14.708.787,00	33.251.805,00	47.960.592,00
4	PBB-KB	11.953.945.732,00	19.907.217.644,00	31.861.163.376,00
5	PAJAK ROKOK	0,00	10.665.697.424,00	10.665.697.424,00

Rincian Realisasi Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Lingga adalah sebagai berikut:

Tabel 5.123 Rincian Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Lingga – LRA

NO	KABUPATEN / KOTA	REALISASI PEMBAYARAN TUNDA BAYAR 2023 (Rp)	REALISASI PEMBAYARAN 2024 (Rp)	TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5
	Kabupaten Lingga	13.205.958.099,00	42.042.397.947,00	55.248.356.046,00
1	PKB	3.645.625.033,00	8.433.190.884,00	12.078.815.917,00

NO	KABUPATEN / KOTA	REALISASI PEMBAYARAN TUNDA BAYAR 2023 (Rp)	REALISASI PEMBAYARAN 2024 (Rp)	TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5
2	BBN-KB	2.457.061.229,00	6.820.492.734,00	9.277.553.963,00
3	P-AP	4.235.388,00	34.437.099,00	38.672.487,00
4	PBB-KB	7.099.036.449,00	15.603.129.732,00	22.702.166.181,00
5	PAJAK ROKOK	0,00	11.151.147.498,00	11.151.147.498,00

Rincian Realisasi Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut:

Tabel 5.124 Rincian Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas – LRA

NO	KABUPATEN / KOTA	REALISASI PEMBAYARAN TUNDA BAYAR 2023 (Rp)	REALISASI PEMBAYARAN 2024 (Rp)	TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5
	Kabupaten Kepulauan Anambas	12.454.416.671,00	39.237.129.101,00	51.691.545.772,00
1	PKB	3.551.384.241,00	8.149.923.834,00	11.701.308.075,00
2	BBN-KB	2.465.847.894,00	6.717.952.320,00	9.183.800.214,00
3	P-AP	9.909.490,00	29.265.856,00	39.175.346,00
4	PBB-KB	6.427.275.046,00	14.639.341.020,00	21.066.616.066,00
5	PAJAK ROKOK	0,00	9.700.646.071,00	9.700.646.071,00

Realisasi Belanja Bagi Hasil menurut klasifikasi fungsi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.125 Realisasi Belanja Bagi Hasil menurut Klasifikasi Fungsi Tahun 2024 – LRA

NO	KLASIFIKASI FUNGSI	NILAI BELANJA BAGI HASIL
A	PELAYANAN UMUM	748.291.201.015,00
	Badan Keuangan dan Aset Daerah	748.291.201.015,00
	JUMLAH	748.291.201.015,00

5.1.2.4.2. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	29.445.500.000,00	26.853.000.000,00

Belanja bantuan keuangan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Belanja Bantuan Keuangan yang diberikan kepada pemerintah kab/kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Daerah Lainnya pada tahun 2024 dalam rangka tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi/atau penerima bantuan keuangan.

Belanja bantuan keuangan tahun 2024 terealisasi sebesar Rp26.853.000.000,00 atau 91,20% dari yang dianggarkan sebesar Rp29.445.500.000,00. Belanja Bantuan Keuangan pada tahun 2024 digunakan antara lain:

1. Belanja Bantuan Keuangan Khusus dalam rangka Penanganan Dampak Bencana Alam Banjir Lahar Dingin, Banjir Bandang dan Longsor di Provinsi Sumatera Barat terealisasi sebesar Rp500.000.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 651 Tahun 2024 tentang Penerima Bantuan Keuangan Khusus dalam rangka Penanganan Dampak Bencana Alam Banjir Lahar Dingin, Banjir Bandang dan Longsor di Provinsi Sumatera Barat.
2. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp14.130.500.000,00 atau 87,64% dari yang dianggarkan sebesar Rp16.124.000.000,00 sesuai dengan permohonan pencairan yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 760 Tahun 2024 tentang Penerima Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dalam Rangka Operasional Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Operasional Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 760 Tahun 2024 tentang Penerima Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dalam Rangka Operasional Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Operasional Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan.
3. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa terealisasi sebesar Rp12.222.500.000,00 atau 95,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp12.821.500.000,00 sesuai dengan permohonan pencairan yang diajukan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 760 Tahun 2024 tentang Penerima Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dalam Rangka Operasional Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Operasional Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 760 Tahun 2024 tentang Penerima Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dalam Rangka Operasional Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Operasional Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan.

Berikut dibawah ini dijelaskan tabel rincian Belanja Bantuan Keuangan:

Tabel 5.126 Belanja Bantuan Keuangan – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Belanja Bantuan Keuangan	29.445.500.000,00	26.853.000.000,00	91,20	8.352.581.914,00
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	16.124.000.000,00	14.130.500.000,00	87,64	6.184.581.914,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	16.124.000.000,00	14.130.500.000,00	87,64	6.184.581.914,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	16.124.000.000,00	14.130.500.000,00	87,64	6.184.581.914,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	12.821.500.000,00	12.222.500.000,00	95,33	2.168.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	12.821.500.000,00	12.222.500.000,00	95,33	2.168.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa	12.821.500.000,00	12.222.500.000,00	95,33	2.168.000.000,00

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan menurut klasifikasi fungsi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.127 Realisasi Belanja Bantuan Keuangan menurut Klasifikasi Fungsi Tahun 2024 – LRA

NO	KLASIFIKASI FUNGSI	NILAI BELANJA BANTUAN KEUANGAN
A	PELAYANAN UMUM	26.853.000.000,00
	Badan Keuangan dan Aset Daerah	26.853.000.000,00
	JUMLAH	26.853.000.000,00

5.1.3. Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Selama Tahun Anggaran 2024 realisasi pembiayaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

5.1.3.1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	231.214.715.013,00	232.684.048.633,62

Penerimaan Pembiayaan adalah setiap penerimaan rekening kas umum daerah yang perlu dibayar kembali. Pada tahun 2024 Penerimaan Pembiayaan terealisasi sebesar Rp232.684.048.633,62 atau 100,64% dari yang dianggarkan sebesar Rp231.214.715.013,00. Penerimaan Pembiayaan yang dianggarkan yang terdiri dari Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya yang terealisasi sebesar Rp232.583.164.925,62 atau 100,59% dari yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp231.214.715.013,00 dan Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya (Penarikan Dana Bergulir) sebesar Rp100.883.708,00 dari yang semula tidak dianggarkan.

5.1.3.2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	92.053.144.035,00	91.945.787.633,00

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu. Pada Tahun 2024 Penerimaan Pembiayaan terealisasi sebesar Rp91.945.787.633,00 atau 99,88% dari yang dianggarkan

sebesar Rp92.053.144.035,00 yang merupakan Pembayaran Cicilan Pokok Utang Pinjaman Daerah yang Jatuh Tempo kepada PT Sarana Multi Infrastruktur.

5.1.4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

SiLPA	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	0.00	27.286.164.438,01

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan adalah Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode tahun berjalan. Dalam Tahun Anggaran 2024 realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah sebesar Rp27.286.164.438,01.

Komponen pembentuk SiLPA sebesar Rp27.286.164.438,01 pada Neraca TA 2024 terdiri dari:

- 1. Kas di Kas Daerah sebesar Rp23.302.940.904,77;
- 2. Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp0,00;
- 3. Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp19.041.006,00 merupakan saldo kas yang berada dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 yang masih harus dipertanggung jawabkan oleh Bendahara Pengeluaran antara lain yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebesar Rp9.432.600,00, Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp6.000.000,00, Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp3.000.000,00, Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp75.006,00, serta Sekretariat DPRD sebesar Rp533.400,00.
- 4. Kas di BLUD sebesar Rp2.264.885.131,34;
- 5. Kas Dana BOS sebesar Rp1.699.060.482,84;
- 6. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran yang merupakan jasa giro yang belum dipindahbukukan ke rekening Kas Daerah pada 31 Desember 2024 sebesar Rp236.913,06 yang terdiri dari Dinas Pendidikan (Dana BOS) sebesar Rp105.011,06 dan Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp131.902,00.

5.2. Penjelasan Pos – Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- a. Saldo Awal SAL (Saldo Anggaran Lebih);
- b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
- e. Lain-lain;
- f. Saldo Akhir SAL (Saldo Anggaran Lebih).

Laporan Perubahan Saldo Akhir SAL (Saldo Anggaran Lebih) dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah daerah. Di samping itu, pemerintah daerah menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur - unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Akhir SAL (Saldo Anggaran Lebih) dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5.2.1. Saldo Awal SAL (Saldo Anggaran Lebih)

Saldo Awal SAL	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	231.214.715.013,24	388.950.302.882,49

Pada awal tahun 2024 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Saldo Awal SAL sebesar Rp231.214.715.013,24, yang merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2023.

5.2.2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	232.583.164.925,62	388.950.302.882,49

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan digunakan dalam rangka membiayai defisit APBD tahun anggaran berjalan. Penggunaan SAL dilaksanakan sesuai Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. SAL dilaporkan dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Daerah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. SAL sebagaimana merupakan bagian dari ekuitas dana dalam Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp232.583.164.925,62. Penggunaan SiLPA pada tahun 2024 untuk membiayai belanja program dan kegiatan sebesar Rp232.583.164.925,62 atau sebesar 100,59% dari SiLPA yang dianggarkan sebesar Rp231.214.715.013,00. Hal tersebut dikarenakan terdapat koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp1.368.449.912,38 yang merupakan saldo akhir Kas di BLUD tahun 2023 atas 5 (lima) BLUD SMKN terdiri dari SMKN 1 Batam sebesar Rp456.182.436,00, SMKN 2 Batam sebesar Rp131.861.983,98, SMKN 6 Batam sebesar Rp114.339.616,80, SMKN 1 Tanjungpinang sebesar Rp561.844.764,60 dan SMKN 2 Tanjungpinang sebesar Rp104.221.111,00 dimana Pendapatan dan Belanja BLUD SMKN tersebut belum dianggarkan pada APBD tahun 2023, sehingga informasi keuangan BLUD SMKN pada saat itu belum disajikan dalam LRA dan sisa kasnya tidak dapat dibukukan dalam akun saldo Kas di BLUD karena bukan merupakan bagian dari komponen SiLPA yang dihasilkan dari LRA. Walaupun demikian, informasi keuangan 5 (lima) BLUD SMKN tersebut di atas tetap disajikan dalam LO dan sisa kasnya telah disajikan dalam Neraca sebagai bagian dari Kas Lainnya. Pada tahun anggaran 2024 Pendapatan dan Belanja atas 5 (lima) BLUD SMKN sudah dianggarkan pada APBD, akan tetapi terhadap sisa kas belum teranggarkan pada penerimaan pembiayaan pada komponen SiLPA BLUD dalam rangka menutup defisit akibat pelampauan penerimaan pendapatan di tahun sebelumnya.

5.2.3. Selisih Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA / SIKPA)

Selisih Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA / SIKPA)	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	27.286.164.438,01	231.214.715.013,24

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan – LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Nilai SiLPA tahun berjalan sebesar Rp27.286.164.438,01.

5.3. Penjelasan Pos – Pos Neraca

5.3.1. Aset

5.3.1.1. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, dapat berupa:

- Kas dan setara kas
- Investasi jangka pendek
- Piutang Pajak Daerah
- Piutang Retribusi Daerah
- Piutang Lain-lain PAD yang Sah
- Piutang Lainnya dan
- Persediaan

Aset Lancar sebesar Rp386.123.239.870,43 per 31 Desember 2024 yang dimiliki Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas Dana BOS, Kas Lainnya, Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi, Piutang Lain-lain PAD yang Sah, Piutang Lainnya, Beban Dibayar Dimuka dan Persediaan dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

5.3.1.1.1. Kas Di Kas Daerah

Kas Di Kas Daerah	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
	23.302.940.904,77	210.713.848.785,43

Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas bersih pemerintah daerah setelah dikurangi dengan *Outstanding Check* yang berada di rekening Kas Daerah pada bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Saldo Kas di Kas Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada Neraca per 31 Desember 2024 sebesar Rp23.302.940.904,77. Saldo Kas di Kas Daerah tersebut tidak termasuk saldo pada Rekening Bank pada Bank Bukopin dengan Nama Rekening DKUKM Pengembalian Dana Bergulir / Nomor Rekening 100-01-21394 yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Riau. Rekening Bank tersebut secara substansi tidak dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Pembukaan rekening terjadi pada akhir tahun 2007 dikarenakan adanya himbauan dari Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk membuka rekening penampung pengembalian Dana Bergulir Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang diperuntukkan bagi penerima manfaat dana bergulir yang ada di Provinsi Kepulauan Riau dengan tujuan untuk memudahkan koordinasi dan pemantauan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4, bahwa Pengelola Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga dilakukan oleh Satker yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU (Satker BLU). Dana Bergulir yang digulirkan oleh Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau mulai tahun 2000 sampai dengan 2007 mencapai Rp4.620.000.000,00. Saldo rekening tersebut per 31 Desember 2024 sebesar Rp162.010.920,90.

Terdapat kondisi *subsequent event* yang merupakan peristiwa atau transaksi yang terjadi setelah tanggal neraca tetapi sebelum diterbitkannya laporan pemeriksaan yaitu terdapat Pengembalian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang seharusnya dikembalikan ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) dikarenakan pengembalian hasil temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atas belanja perjalanan dinas Tahun Anggaran 2023

berdasarkan Laporan Hasil Audit Dana Bantuan Operasional (BOS) Nomor 0696/G3/WS-01-02/2024 Tanggal 16 Januari 2024 sebesar Rp26.874.900,00 pada beberapa sekolah sebagai berikut:

- 1. SMAN 1 Bintan Timur sebesar Rp10.232.400,00\
- 2. SMAN 1 Teluk Bintan sebesar Rp9.343.000,00
- 3. SMAN 1 Teluk Sebong sebesar Rp1.029.500,00
- 4. SMAN 1 Toapaya sebesar Rp6.270.000,00

Dengan demikian, berikut dijelaskan tabel Kas di Kas Daerah:

Tabel 5.128 Kas Di Kas Daerah

I	NO	NO. REKENING	BANK	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
					KREDIT	DEBET	
	1	106-01-00001	BANK RIAU KEPRI SYARIAH BATAM BEND UMUM DAERAH (PAD)	82.347.945,84	5.771.071.420,00	5.617.048.843,00	236.370.522,84
	2	103-01-00310	BANK RIAU KEPRI SYARIAH TANJUNGPINANG KAS DAERAH PROVINSI KEPRI	189.254.095.582,39	3.622.377.359.325,62	3.803.972.352.376,59	7.659.102.531,42
	3	100-137-0240	BANK BUKOPIN PEMPROV KEPRI (PAD)	230.016.157,20	2.741.604.554,03	2.000.000.000,00	971.620.711,23
	4	100-030-8397	BANK BUKOPIN RKUD PROV KEPULAUAN RIAU	12.983.967.666,65	1.952.865.562.657,47	1.959.704.501.392,47	6.145.028.931,65
	5	100-999-9249	BANK BUKOPIN PEMPROV KEPRI	2.312.974,55	0,00	0,00	2.312.974,55
	6	109-00-9988990-9	BANK MANDIRI REKENING KAS UMUM DAERAH PROVINSI KEPRI	8.460.934,04	0,00	0,00	8.460.934,04
	7	7012752468	BANK SYARIAH INDONESIA KASDA	2.154.663,78	5.788,14	0,00	2.160.451,92
	8	00000174-01-001317-30-4	BANK RAKYAT INDONESIA PEMPROV KEPRI PAD	5.196.757.717,71	1.617.689.955.381,00	1.617.647.389.824,00	5.239.323.274,71
				207.760.113.642,16	7.201.445.559.126,26	7.388.941.292.436,06	20.264.380.332,36
	9	100-131-0247	BUKOPIN KASDA PROV KEPRI EX POKJA	26.670.857,99	1.495.589,88	67.589,88	28.098.857,99
	10	100-015-4390	BANK BUKOPIN KASDA PEMPROV KEPRI EX 2007	50.660.504,84	132.293,89	132.293,89	50.660.504,84
	11	100-012-2391	BANK BUKOPIN KASDA PEMPROV KEPRI EX ESSCROW	462.339.752,88	78.056.977,82	4.211.575,68	536.185.155,02
	12	100-031-0391	BANK BUKOPIN KASDA PEMPROV KEPRI EX 2010	19.757.183,11	0,00	0,00	19.757.183,11
	13	100-140-9243	BANK BUKOPIN KASDA PROV KEPRI QQ DKP 5	278.290,48	0,00	0,00	278.290,48
	14	100-023-8399	BANK BUKOPIN KASDA PEMPROV KEPRI EX KIOS PK	173.360,97	0,00	0,00	173.360,97
	15	103-01-00306	BANK RIAU KEPRI SYARIAH KASDA (DANA BERGULIR) PROVKEPRI	67.292.683,00	587.094,00	0,00	67.879.777,00
	16	103-01-00307	BANK RIAU KEPRI SYARIAH KASDA (PENG. POKOK DANA) PROVKEPRI	2.143.730.868,00	55.655.881,00	0,00	2.199.386.749,00
	17	103-01-00308	BANK RIAU KEPRI SYARIAH KASDA (PENG. BUNGA DANA) PROVKEPRI	161.385.326,00	1.630.268,00	0,00	163.015.594,00
				2.932.288.827,27	137.558.104,59	4.411.459,45	3.065.435.472,41
			JUMLAH	210.692.402.469,43	7.201.583.117.230,85	7.388.945.703.895,51	23.329.815.804,77
II	(-) Pengembalian Dana Bantuan Operasional (BOS) Reguler yang seharusnya disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN)						(26.874.900,00)
III	SALDO KAS DAERAH PER 31 DESEMBER 2024						23.302.940.904,77

5.3.1.1.2. Kas Di Bendahara Penerimaan

Kas Di Bendahara Penerimaan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	0,00	1.732.000,00

Tidak terdapat saldo kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024.

5.3.1.1.3. Kas Di Bendahara Pengeluaran

Kas Di Bendahara Pengeluaran	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	19.041.006,00	3.738.300,00

Merupakan saldo kas yang berada dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 yang masih harus dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran antara lain yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebesar Rp9.432.600,00 yang sudah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 01 Januari 2025, Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp6.000.000,00 yang sudah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 03 Januari 2025, Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp3.000.000,00 yang sudah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 02 Januari 2025, Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp75.006,00 yang sudah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 2 Januari 2025, serta Sekretariat DPRD sebesar Rp533.400,00 yang sudah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 13 Januari 2025, dan tanggal 3 Februari 2025, serta tanggal 11 Februari 2025.

5.3.1.1.4. Kas Di Badan Layanan Umum Daerah

Kas Di Badan Layanan Umum Daerah	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	2.264.885.131,34	19.556.671.568,72

Merupakan kas yang berada dalam pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib sebesar Rp222.455.773,93 dan Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp637.554.251,48 serta 5 (lima) SMK Negeri BLUD sebesar Rp1.404.875.105,93 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.129 Kas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib

No	Uraian	Jumlah
1	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD Tunai	965.100,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD pada Bank Riau Kepri Syariah (103-01-01920)	6.773.265,28
3	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD pada Bank Syariah Indonesia (9988997886)	9.784.772,33
4	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD Tunai	0,00
5	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD pada Bank Syariah Indonesia (9889998986)	204.932.636,32
TOTAL		222.455.773,93

Tabel 5.130 Kas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud

No	Uraian	Jumlah
1	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD Tunai	3.043.249,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD pada Bank Syariah Indonesia (7030374937)	215.000,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD pada Bank Riau Kepri Syariah (1460101234)	0,00
4	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD Tunai	0,00

No	Uraian	Jumlah
5	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD pada Bank Riau Kepri Syariah (1460112345)	91.602.434,00
6	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD pada Bank Syariah Indonesia (7030374929)	542.493.568,48
7	(+) Pengembalian Pemotongan atas Biaya Administrasi yang seharusnya tidak dipotong pada Bank Syariah Indonesia (7030374929)	200.000,00
TOTAL		637.554.251,48

Terdapat kondisi *subsequent event* yang merupakan peristiwa atau transaksi yang terjadi setelah tanggal neraca tetapi sebelum diterbitkannya laporan pemeriksaan yaitu Pemotongan atas Biaya Administrasi pada Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud pada rekening Bank Syariah Indonesia (7030374929) yang seharusnya tidak dilakukan oleh pihak perbankan dan belum dikembalikan ke rekening Bendahara Pengeluaran BLUD sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp200.000,00. Potongan tersebut telah dikembalikan dan menambah saldo rekening Kas Bendahara Pengeluaran BLUD Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud pada tanggal 8 Januari 2025.

Tabel 5.131 Kas Badan Layanan Umum Daerah SMK Negeri 1 Batam

No	Uraian	Jumlah
1	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD Tunai	0,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD pada Bank Riau Kepri Syariah (1940100007)	364.210.905,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD pada Bank Negara Indonesia (8880777892)	122.157.837,00
	(-) Bantuan Beasiswa Tenaris	(62.000.000,00)
	(-) Bantuan Beasiswa BAZNAS	(60.000.000,00)
4	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD Tunai	35.676.474,00
5	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD pada Bank Riau Kepri Syariah (1940100008)	0,00
6	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD Tunai	0,00
7	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD pada Bank BNI (1160519978)	631.786,00
8	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD Tunai	426,00
9	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD pada Bank Riau Kepri Syariah (1610100001)	336,00
Total		400.677.764,00

Terdapat kondisi *subsequent event* yang merupakan peristiwa atau transaksi yang terjadi setelah tanggal neraca tetapi sebelum diterbitkannya laporan pemeriksaan pada Badan Layanan Umum Daerah SMK Negeri 1 Batam sebesar Rp122.000.000,00 yaitu Dana Beasiswa dari PT. Tenaris Batam sebesar Rp62.000.000,00 dan Dana Beasiswa dari Baznas Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp60.000.000,00 yang seharusnya disalurkan kepada siswa penerima beasiswa di tahun 2024, akan tetapi belum disalurkan. Untuk itu SMK Negeri 1 Batam telah menyalurkan Dana Beasiswa dari PT. Tenaris Batam kepada siswa penerima beasiswa pada tanggal 9 Januari 2025 sebesar Rp62.000.000,00 dan Dana Beasiswa dari Baznas Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 16 Februari 2025 sebesar Rp60.000.000,00.

Tabel 5.132 Kas Badan Layanan Umum Daerah SMK Negeri 2 Batam

No	Uraian	Jumlah
1	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD Tunai	58,98
2	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD pada Bank Riau Kepri Syariah (1060100040)	145.673.353,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD pada Bank Rakyat Indonesia (228001000397300)	25.378,40
4	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD Tunai	0,00
5	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD pada Bank Riau Kepri Syariah (1060100041)	3.682.614,00

No	Uraian	Jumlah
6	Kas di Bendahara SPP Tunai	517.074,00
7	Kas di Bendahara SPP pada Bank Riau Kepri Syariah (1060100081)	24.942.242,00
Total		174.840.720,38

Tabel 5.133 Kas Badan Layanan Umum Daerah SMK Negeri 6 Batam

No	Uraian	Jumlah
1	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD pada Bank Riau Kepri Syariah (186-20-01640)	35.147.511,00
2	Kas di Bendahara SPP Tunai	2.943,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD pada Bank Riau Kepri Syariah (1862000367)	100.000,00
Total		35.250.454,00

Tabel 5.134 Kas Badan Layanan Umum Daerah SMK Negeri 1 Tanjungpinang

No	Uraian	Jumlah
1	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD pada Bank Riau Kepri Syariah (1030100090)	33.529.811,23
2	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD pada Bank Riau Kepri Syariah (1030100089)	92.422.369,37
3	Kas di Bendahara BLUD pada Bank Syariah Indonesia (1030100091)	509.044.114,63
4	Kas di Bendahara Penerimaan SPP Tunai	0,00
5	Kas di Bendahara Penerimaan SPP pada Bank Riau Kepri Syariah (103-01-00072)	0,00
6	Kas di Bendahara Pengeluaran SPP Tunai	0,00
7	Kas di Bendahara Pengeluaran SPP pada Bank Riau Kepri Syariah (103-01-00072)	0,00
Total		634.996.295,23

Tabel 5.135 Kas Badan Layanan Umum Daerah SMK Negeri 2 Tanjungpinang

No	Uraian	Jumlah
1	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD Tunai	0,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD pada Bank Riau Kepri Syariah (1030100087)	73.622.717,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD Tunai	0,00
4	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD pada Bank Riau Kepri Syariah (1030100088)	83.084.957,00
5	Kas di Bendahara SPP Tunai	2.198,32
6	Kas di Bendahara SPP pada Bank Riau Kepri Syariah (1030100073)	2.400.000,00
Total		159.109.872,32

5.3.1.1.5. Kas Dana BOS

Kas Dana BOS	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	1.699.060.482,84	935.783.131,84

Kas Dana BOS digunakan untuk mencatat nilai akumulasi dari total dana BOS yang berada pada rekening sekolah yang merupakan sisa dana BOS yang belum dibelanjakan. Pada tahun periode 31 Desember 2024, Pemerintah Provinsi Kepulauan riau mencatat saldo Kas Dana Bos sebesar Rp1.699.060.482,84 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.136 Rekapitulasi Kas di Bendahara BOS SMAN/SMKN/SLBN Per 31 Desember 2024

No	Nama Sekolah	Nomor Rekening	Sisa Kas Di sekolah		
			Tunai	Kas di Bank (Rekening Koran 31 Desember 2024)	Total
1	2	3	4	5	6=(4+5)
1	11000360 SMAN 1 BATAM	1063805104	575.834,00	358.817.258,00	359.393.092,00
2	11000359 SMAN 2 BATAM	1063805100	0,00	0,00	0,00
3	11002197 SMAN 3 BATAM	1063805231	0,00	0,00	0,00
4	11002198 SMAN 4 BATAM	1063805105	0,00	41.328.508,00	41.328.508,00
5	11002199 SMAN 5 BATAM	1063805118	0,00	0,00	0,00
6	11002200 SMAN 6 BATAM	1063805230	23.644.000,00	0,00	23.644.000,00
7	11002201 SMAN 7 BATAM	1063805101	0,00	0,00	0,00
8	11002202 SMAN 8 BATAM	1863888888	0,00	145.270.000,00	145.270.000,00
9	11002203 SMAN 9 BATAM	1063805115	0,00	0,00	0,00
10	11002194 SMAN 10 BATAM	1063805113	10.760,00	32.464.573,00	32.475.333,00
11	11002195 SMAN 11 BATAM	1063805108	0,00	0,00	0,00
12	11002196 SMAN 12 BATAM	1063805109	1.185.010,00	4.512.470,00	5.697.480,00
13	11002455 SMAN 13 BATAM	1063805102	0,00	0,00	0,00
14	11002457 SMAN 14 BATAM	1063805110	11.646.500,00	0,00	11.646.500,00
15	11002458 SMAN 15 BATAM	1063805111	0,00	0,00	0,00
16	60728418 SMAN 16 BATAM	1063805107	1.856.807,00	339.203.759,00	341.060.566,00
17	60728419 SMAN 17 BATAM	1063805119	172.290,00	81.290,00	253.580,00
18	69863917 SMAN 18 BATAM	1063805120	0,00	0,00	0,00
19	69872144 SMAN 19 BATAM	1063805121	10.997.964,00	4.952.347,00	15.950.311,00
20	69915799 SMAN 20 BATAM	1063805117	0,00	0,00	0,00
21	69915801 SMAN 21 BATAM	1063805112	0,00	0,00	0,00
22	69968298 SMAN 22 BATAM	1063805103	0,00	182.700,00	182.700,00
23	69980500 SMAN 23 BATAM	1063805122	3.021.231,00	0,00	3.021.231,00
24	69980503 SMAN 24 BATAM	1063805229	0,00	0,00	0,00
25	69990471 SMAN 25 BATAM	1863802525	0,00	0,00	0,00
26	69990472 SMAN 26 BATAM	1863826026	0,00	0,00	0,00
27	70012279 SMAN 27 BATAM	1063805232	0,00	0,00	0,00
28	70012280 SMAN 28 BATAM	1063805233	0,00	0,00	0,00
29	11002255 SMAN 1 BINTAN TIMUR	1353800126	561,00	326,00	887,00
30	11002256 SMAN 1 BINTAN UTARA	1463800062	0,00	0,00	0,00
31	11002484 SMAN 1 BINTAN PESISIR	1353800124	0,00	0,00	0,00
32	69953268 SMAN 2 BINTAN PESISIR	1353800125	0,00	0,00	0,00
33	11002257 SMAN 1 TOAPAYA	1353800122	0,00	0,00	0,00
34	11002258 SMAN 1 TAMBELAN	1353800119	100.000,00	0,00	100.000,00
35	11002259 SMAN 1 TELUK BINTAN	1353800120	0,00	0,00	0,00
36	69963195 SMAN 2 TELUK BINTAN	1353800121	50.995,00	0,00	50.995,00
37	11002260 SMAN 1 TELUK SEBONG	1463800063	0,00	0,00	0,00

No	Nama Sekolah	Nomor Rekening	Sisa Kas Di sekolah		
			Tunai	Kas di Bank (Rekening Koran 31 Desember 2024)	Total
1	2	3	4	5	6=(4+5)
38	69854725 SMAN 1 MANTANG	1353800123	0,00	0,00	0,00
39	11000240 SMAN 1 KARIMUN	1113800225	0,00	0,00	0,00
40	11000223 SMAN 2 KARIMUN	1113800226	0,00	0,00	0,00
41	11002027 SMAN 3 KARIMUN	1113800227	0,00	0,00	0,00
42	11002029 SMAN 4 KARIMUN	1113800228	0,00	0,00	0,00
43	69989323 SMAN 5 KARIMUN	1113800229	0,00	0,00	0,00
44	11000241 SMAN 1 KUNDUR	1113800232	0,00	0,00	0,00
45	11000221 SMAN 2 KUNDUR	1113800233	0,00	0,00	0,00
46	11002028 SMAN 3 KUNDUR	1113800234	0,00	0,00	0,00
47	11002030 SMAN 4 KUNDUR	1113800235	0,00	0,00	0,00
48	11002031 SMAN 1 UNGAR	1113800236	660.800,00	8.300,00	669.100,00
49	11002518 SMAN 1 BELAT	1113800237	0,00	0,00	0,00
50	11000224 SMAN 1 MORO	1113800242	0,00	0,00	0,00
51	11003223 SMAN 1 SUGIE BESAR	1113800243	0,00	0,00	0,00
52	11002025 SMAN 1 BURU	1113800241	0,00	0,00	0,00
53	11002026 SMAN 1 DURAI	1113800240	0,00	0,00	0,00
54	11002044 SMAN 1 JEMAJA	1703800068	0,00	0,00	0,00
55	11002046 SMAN 1 PALMATAK	1703800070	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
56	69859728 SMAN 1 SIANTAN UTARA	1703800071	0,00	0,00	0,00
57	11000321 SMAN 1 SIANTAN	1703800069	0,00	0,00	0,00
58	11002506 SMAN 1 SIANTAN TIMUR	1703800072	0,00	0,00	0,00
59	11002067 SMAN 1 LINGGA	1743800177	1.145.738,00	152.000.000,00	153.145.738,00
60	11003246 SMAN 1 LINGGA TIMUR	1743800337	0,00	0,00	0,00
61	11003243 SMAN 1 SELAYAR	1253800146	0,00	0,00	0,00
62	11002068 SMAN 1 LINGGA UTARA	1743800178	0,00	0,00	0,00
63	11002069 SMAN 1 SENAYANG	1743800180	0,00	0,00	0,00
64	11002813 SMAN 1 KATANG BIDARE	1253800070	0,00	0,00	0,00
65	11003247 SMAN 1 BAKUNG SERUMPUN	1253800147	0,00	0,00	0,00
66	60725467 SMAN 1 TEMIANG PESISIR	1743800181	0,00	0,00	0,00
67	11002070 SMAN 1 SINGKEP	1253800069	0,00	0,00	0,00
68	11002072 SMAN 2 SINGKEP	1253800144	0,00	0,00	0,00
69	11002071 SMAN 1 SINGKEP BARAT	1253800143	0,00	0,00	0,00
70	69979502 SMAN 1 SINGKEP PESISIR	1253800073	0,00	0,00	0,00
71	69965911 SMAN 1 SINGKEP SELATAN	1253800072	0,00	0,00	0,00
72	69980031 SMAN 1 KEPULAUAN POSEK	1253800074	0,00	0,00	0,00
73	11002042 SMAN 1 BUNGURAN BARAT	1523800011	0,00	0,00	0,00
74	11002450 SMAN 1 BATUBI	1173800001	0,00	0,00	0,00

No	Nama Sekolah	Nomor Rekening	Sisa Kas Di sekolah		
			Tunai	Kas di Bank (Rekening Koran 31 Desember 2024)	Total
1	2	3	4	5	6=(4+5)
75	11000322 SMAN 1 BUNGURAN TIMUR	1173800002	0,00	0,00	0,00
76	11002049 SMAN 2 BUNGURAN TIMUR	1173800003	0,00	0,00	0,00
77	11002778 SMAN 1 BUNGURAN TIMUR LAUT	1173800008	0,00	0,00	0,00
78	11002043 SMAN 1 BUNGURAN UTARA	1173800005	0,00	0,00	0,00
79	11002499 SMAN 1 BUNGURAN SELATAN	1173800010	0,00	0,00	0,00
80	69762629 SMAN 1 BUNGURAN TENGAH	1173800009	0,00	0,00	0,00
81	11002045 SMAN 1 MIDAI	1833800001	0,00	0,00	0,00
82	11002047 SMAN 1 SERASAN	1843800002	0,00	0,00	0,00
83	11003053 SMAN 1 SERASAN TIMUR	1843800001	0,00	0,00	0,00
84	11002048 SMAN 1 SUBI	1173800004	0,00	0,00	0,00
85	11002050 SMAN 1 PULAU TIGA BARAT	1173800007	0,00	0,00	0,00
86	11002051 SMAN 1 PULAU LAUT	1173800006	0,00	0,00	0,00
87	11000433 SMAN 1 TANJUNGPINANG	1033800367	0,00	582.000,00	582.000,00
88	11000434 SMAN 2 TANJUNGPINANG	1033800371	0,00	331.406.320,00	331.406.320,00
89	11000435 SMAN 3 TANJUNGPINANG	1033800368	0,00	127.575.000,00	127.575.000,00
90	11000436 SMAN 4 TANJUNGPINANG	1033800372	0,00	0,00	0,00
91	11000437 SMAN 5 TANJUNGPINANG	1033800369	0,00	0,00	0,00
92	11001975 SMAN 6 TANJUNGPINANG	1033800373	0,00	0,00	0,00
93	69971073 SMAN 7 TANJUNGPINANG	1033800370	36.891.078,00	0,00	36.891.078,00
94	11000382 SMKN 1 BATAM	1863826154	0,00	0,00	0,00
95	11002210 SMKN 2 BATAM	1863826155	0,00	0,00	0,00
96	11002570 SMKN 3 BATAM	1863826152	0,00	0,00	0,00
97	11002571 SMKN 4 BATAM	1863800020	0,00	0,00	0,00
98	11003006 SMKN 5 BATAM	1863826158	0,00	0,00	0,00
99	11003158 SMKN 6 BATAM	1863826153	0,00	0,00	0,00
100	69774885 SMKN 7 BATAM	1863826157	187,84	0,00	187,84
101	69974383 SMKN 8 BATAM	1863826156	0,00	0,00	0,00
102	70011450 SMKN 9 BATAM	1863826151	0,00	0,00	0,00
103	11002481 SMKN 1 BINTAN TIMUR	1463800055	0,00	0,00	0,00
104	11002263 SMKN 1 BINTAN UTARA	1353800129	0,00	0,00	0,00
105	11003305 SMKN 1 GUNUNG KIJANG	1353800128	0,00	0,00	0,00

No	Nama Sekolah	Nomor Rekening	Sisa Kas Di sekolah		
			Tunai	Kas di Bank (Rekening Koran 31 Desember 2024)	Total
1	2	3	4	5	6=(4+5)
106	69854734 SMKN 1 SERI KUALA LOBAM	1463800056	0,00	0,00	0,00
107	11002143 SMKN 1 KARIMUN	1113800230	0,00	0,00	0,00
108	69864705 SMKN 2 KARIMUN	1113800231	0,00	0,00	0,00
109	11002580 SMKN KUNDUR	1113800239	403.728,00	0,00	403.728,00
110	69960641 SMKN KUNDUR UTARA	1113800238	0,00	0,00	0,00
111	11002144 SMKN 1 MORO	1113800244	0,00	0,00	0,00
112	11003192 SMKN 1 ANAMBAS	1703800075	0,00	0,00	0,00
113	69859732 SMKN 2 ANAMBAS	1703800076	0,00	0,00	0,00
114	69859733 SMKN 3 ANAMBAS	1703800073	0,00	0,00	0,00
115	69973863 SMKN 4 ANAMBAS	1703800074	0,00	0,00	0,00
116	110003241 SMKN 1 LINGGA	1743800338	0,00	0,00	0,00
117	60725422 SMKN 2 LINGGA	1743800336	0,00	0,00	0,00
118	11002073 SMKN 1 SENAYANG	1253800145	0,00	0,00	0,00
119	11002814 SMKN 1 SINGKEP	1743800218	19.732.691,00	29.760.000,00	49.492.691,00
120	11000320 SMKN 1 BUNGURAN BARAT	1523800012	0,00	0,00	0,00
121	11003175 SMKN 2 BUNGURAN BARAT	1173800011	0,00	0,00	0,00
122	11002052 SMKN 1 BUNGURAN TIMUR	1173800012	0,00	0,00	0,00
123	69988626 SMKN 2 BUNGURAN TIMUR	1173800015	0,00	0,00	0,00
124	69974105 SMKN 1 BUNGURAN TIMUR LAUT	1173800014	0,00	0,00	0,00
125	1000438 SMKN 1 TANJUNGPINANG	1033800387	0,00	0,00	0,00
126	11000439 SMKN 2 TANJUNGPINANG	1033800388	0,00	0,00	0,00
127	11000426 SMKN 3 TANJUNGPINANG	1033800385	0,00	0,00	0,00
128	11002495 SMKN 4 TANJUNGPINANG	1033800386	0,00	0,00	0,00
129	69973762 SMKN 5 TANJUNGPINANG	1033800394	0,00	0,00	0,00
130	69786956 SLBN BATAM	1063805154	6.794.089,00	368,00	6.794.457,00
131	69786958 SLBN BINTAN	1463800060	0,00	0,00	0,00
132	70012125 SLBN KIJANG	1353880100	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
133	11002434 SLBN KARIMUN	1113800252	0,00	0,00	0,00
134	69972050 SLBN KUNDUR	1113800255	0,00	0,00	0,00
135	70009388 SLBN ANAMBAS	1703800002	0,00	0,00	0,00
136	69972874 SLBN 1 LINGGA	1253800071	0,00	0,00	0,00
137	69983759 SLBN NATUNA	1173800017	0,00	0,00	0,00
138	11002369 SLBN 1 TANJUNGPINANG	1033800382	0,00	0,00	0,00
139	69932219 SLBN 2 TANJUNGPINANG	1033800383	25.000,00	0,00	25.000,00
	JUMLAH		130.915.263,84	1.568.145.219,00	1.699.060.482,84

5.3.1.1.6. Kas Lainnya

Kas Lainnya	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
	524.292.676,64	14.324.994.566,09

Kas Lainnya digunakan untuk mencatat kas selain kas di kas daerah, kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, kas di BLUD, dan kas dana BOS. Menurut Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 14 tentang Akuntansi Kas, dimana apabila sampai dengan tanggal neraca masih terdapat uang dalam pengelolaan bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, saldo kas lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan dan juga berasal dari potongan pajak pemerintah, jumlah tersebut dilaporkan di neraca sebagai Kas Lainnya di bendahara pengeluaran. Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp524.292.676,64, termasuk saldo yang berasal dari Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebesar Rp509.663.896,58 dijelaskan pada **Lampiran 3**. Berikut ini adalah tabel rekapitulasi kas lainnya:

Tabel 5.137 Rekapitulasi Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2024

NO	SKPD	PPh21	PPh22	PPh23	PPN	JUMLAH PFK 2024	SISA KAS	SALDO KAS LAINNYA 2024
1	2	3	4	5	6	7=(3+4+5+6)	8	9= 7 + 8
1	Dinas Pendidikan (SPP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.663.896,58	509.663.896,58
2	Dinas Pendidikan (Dana BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.011,06	105.011,06
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.902,00	131.902,00
4	Biro Administrasi Pimpinan	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
5	Badan Penghubung Daerah	0,00	0,00	273.874,00	1.347.748,00	1.621.622,00	0,00	1.621.622,00
6	Dinas Pendidikan (BLUD SMK N 2 Tanjungpinang)	0,00	597.073,00	180.000,00	5.368.529,00	6.145.602,00	0,00	6.145.602,00
7	Dinas Pendidikan (BLUD SMKN 6 Batam)	6.187.643,00	0,00	413.000,00	0,00	6.600.643,00	0,00	6.600.643,00
	JUMLAH	6.187.643,00	597.073,00	890.874,00	6.716.277,00	14.391.867,00	509.900.809,64	524.292.676,64

5.3.1.1.7. Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak Daerah	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
	99.618.122.631,00	89.871.468.322,00

Merupakan piutang yang timbul dari pajak daerah yang belum diterima di Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2024. Piutang pajak daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp99.618.122.631,00 yang terdiri dari piutang pajak atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan piutang Pajak Air Permukaan yang tercatat dan dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Rincian Piutang Pajak Daerah diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.138 Rekapitulasi Saldo Akhir Piutang Pajak Badan Pendapatan Daerah per 31 Desember 2024

No	Uraian	Saldo Awal 2024	Koreksi		Pelunasan Saldo Awal	Mutasi Piutang Pajak Tahun 2024			Saldo Akhir 2024
			Tambah	Kurang		Penetapan	Pengurangan	Diskon Pajak	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=3+4-5-6+7-8-9
	TOTAL PIUTANG	89.871.468.322,00	409.384.902,00	100.550.200,00	43.960.395.675,00	1.655.117.285.188,00	1.566.635.527.459,00	35.083.542.447,00	99.618.122.631,00
I	SKPDKB	4.959.226.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.959.226.094,00
	PKB	1.007.790.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.790.974,00
	BBNKB	3.951.435.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.951.435.120,00
II	Pokok PKB dan BBN-KB	10.278.661.859,00	0,00	100.550.200,00	1.053.726.992,00	1.166.537.956.093,00	1.117.744.795.446,00	35.083.542.447,00	22.834.002.867,00
A	PKB	8.265.046.359,00	0,00	93.135.200,00	168.336.992,00	618.109.807.993,00	595.913.546.946,00	20.323.302.847,00	9.876.532.367,00
1	BATAM	7.264.820.167,00	0,00	76.858.450,00	129.048.850,00	485.409.515.550,00	468.454.890.985,00	15.148.577.865,00	8.864.959.567,00
2	TANJUNGPINANG	480.834.267,00	0,00	13.278.850,00	24.891.742,00	64.675.529.143,00	62.219.740.164,00	2.446.285.979,00	452.166.675,00
4	BINTAN	93.935.500,00	0,00	2.144.300,00	1.536.600,00	27.800.157.240,00	26.765.605.081,00	1.004.486.159,00	120.320.600,00
3	KARIMUN	303.040.175,00	0,00	670.500,00	2.189.300,00	31.418.515.908,00	30.091.469.746,00	1.327.046.162,00	300.180.375,00
5	LINGGA	16.556.800,00	0,00	0,00	0,00	3.466.154.267,00	3.349.933.604,00	116.220.663,00	16.556.800,00
6	NATUNA	105.859.450,00	0,00	183.100,00	10.670.500,00	4.692.408.685,00	4.413.997.941,00	251.068.244,00	122.348.350,00
7	ANAMBAS	0,00	0,00	0,00	0,00	647.527.200,00	617.909.425,00	29.617.775,00	0,00
B	BBNKB	2.013.615.500,00	0,00	7.415.000,00	885.390.000,00	548.428.148.100,00	521.831.248.500,00	14.760.239.600,00	12.957.470.500,00
1	BATAM	1.594.260.000,00	0,00	4.038.000,00	788.900.000,00	474.359.901.200,00	452.506.412.500,00	10.460.928.700,00	12.193.882.000,00
2	TANJUNGPINANG	166.239.000,00	0,00	2.542.000,00	12.875.000,00	33.947.306.000,00	32.036.030.000,00	1.851.566.000,00	210.532.000,00
4	BINTAN	67.915.000,00	0,00	835.000,00	0,00	18.722.505.900,00	17.551.120.000,00	971.725.900,00	266.740.000,00
3	KARIMUN	50.203.700,00	0,00	0,00	13.900.000,00	15.786.991.500,00	14.506.174.000,00	1.280.817.500,00	36.303.700,00
5	LINGGA	6.791.000,00	0,00	0,00	0,00	1.785.810.000,00	1.728.183.000,00	57.627.000,00	6.791.000,00
6	NATUNA	128.206.800,00	0,00	0,00	69.715.000,00	2.911.326.500,00	2.597.230.000,00	129.366.500,00	243.221.800,00
7	ANAMBAS	0,00	0,00	0,00	0,00	914.307.000,00	906.099.000,00	8.208.000,00	0,00
III	PBBKB	42.497.283.781,00	409.384.902,00	0,00	42.906.668.683,00	487.387.122.941,00	447.698.525.859,00	0,00	39.688.597.082,00
	PBBKB	42.497.283.781,00	409.384.902,00	0,00	42.906.668.683,00	487.387.122.941,00	447.698.525.859,00	0,00	39.688.597.082,00

No	Uraian	Saldo Awal 2024	Koreksi		Pelunasan Saldo Awal	Mutasi Piutang Pajak Tahun 2024			Saldo Akhir 2024
			Tambah	Kurang		Penetapan	Pengurangan	Diskon Pajak	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=3+4-5-6+7-8-9
IV	AIR PERMUKAAN	32.136.296.588,00	0,00	0,00	0,00	1.192.206.154,00	1.192.206.154,00	0,00	32.136.296.588,00
	BATAM	32.124.985.178,00	0,00	0,00	0,00	828.058.228,00	828.058.228,00	0,00	32.124.985.178,00
	TANJUNGPINANG	0,00	0,00	0,00	0,00	114.059.212,00	114.059.212,00	0,00	0,00
	BINTAN	0,00	0,00	0,00	0,00	101.867.264,00	101.867.264,00	0,00	0,00
	KIJANG	0,00	0,00	0,00	0,00	50.624.702,00	50.624.702,00	0,00	0,00
	KARIMUN	0,00	0,00	0,00	0,00	19.229.628,00	19.229.628,00	0,00	0,00
	TANJUNG BATU	0,00	0,00	0,00	0,00	14.873.440,00	14.873.440,00	0,00	0,00
	LINGGA	11.311.410,00	0,00	0,00	0,00	28.643.178,00	28.643.178,00	0,00	11.311.410,00
	NATUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	33.100.622,00	33.100.622,00	0,00	0,00
	ANAMBAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749.880,00	1.749.880,00	0,00	0,00

5.3.1.1.8. Piutang Retribusi Daerah

Piutang Retribusi Daerah	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	11.437.716.976,00	121.705.500,00

Merupakan piutang yang digunakan untuk mencatat pungutan daerah otonom sebagai pembayaran daerah atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Piutang Retribusi diakui apabila satuan kerja telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya namun belum diterima pembayaran dari wajib retribusi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp11.437.716.976,00 terdiri dari Piutang Jasa Umum sebesar Rp11.274.343.776,00 dan Piutang Jasa Usaha sebesar Rp163.373.200,00.

Berikut rincian Piutang Retribusi Daerah dijelaskan sebagai berikut:

1) Piutang Jasa Umum

Berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud adalah pelayanan kesehatan. Pelayanan sebagaimana dimaksud merupakan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib dan Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Piutang Jasa Umum per 31 Desember 2024 sebesar Rp11.274.343.776,00 yaitu Piutang Retribusi Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp333.469.753,00 dan Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib sebesar Rp10.940.874.023,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.139 Rekapitulasi Piutang Retribusi Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud

NO	NAMA PIHAK KE-3	SALDO AWAL PIUTANG	PELUNASAN ATAS SALDO AWAL PIUTANG	PENETAPAN PIUTANG 2024	SALDO AKHIR PIUTANG
1	2	3	4	5	6 = 3-4+5
1	BPJS KESEHATAN	55.300.093,00	55.300.093,00	23.086.000,00	23.086.000,00
2	PT INHEALTH	1.165.312,00	1.165.312,00	18.353.935,00	18.353.935,00
3	TCM	13.100.000,00	13.100.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00
4	PP ALILA VILLA	843.900,00	0,00	0,00	843.900,00
5	PP CONDOTEL	6.285.100,00	0,00	0,00	6.285.100,00
6	HUTAMA KARYA	13.102.500,00	0,00	0,00	13.102.500,00
7	BINTAN LAGOON	7.153.500,00	0,00	0,00	7.153.500,00
8	PERTAMINA	0,00	0,00	48.929.030,00	48.929.030,00
9	TASPEN	0,00	0,00	360.721,00	360.721,00
10	INDEMNITY	0,00	0,00	4.836.601,00	4.836.601,00
11	AMODA	0,00	0,00	21.670.500,00	21.670.500,00
12	KEMENKES	0,00	0,00	185.897.966,00	185.897.966,00
Total		96.950.405,00	69.565.405,00	306.084.753,00	333.469.753,00

Tabel 5.140 Rekapitulasi Piutang Retribusi Layanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib

NO	NAMA PIHAK KE-3	SALDO AWAL PIUTANG	KOREKSI SALDO AWAL PIUTANG	PELUNASAN ATAS SALDO AWAL PIUTANG	PENETAPAN 2024	PELUNASAN 2024	KOREKSI PIUTANG TAHUN BERJALAN	SALDO AKHIR PIUTANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3+4-5+6-7+8
1	JKN / BPJS KESEHATAN	202.395.300,00	(2.900,00)	202.392.400,00	102.791.307.983,00	95.526.621.858,00	(444.100,00)	7.264.242.025,00
2	JKN PARSIAL RSUD KOTA TPI	0,00	0,00	0,00	292.433.281,00	292.398.481,00	(34.800,00)	0,00
3	JKN PARSIAL RSAL	0,00	0,00	0,00	32.642.138,00	32.601.138,00	(41.000,00)	0,00
4	JKN PARSIAL RSUD KAB. BINTAN (KIJANG)	0,00	0,00	0,00	137.493.909,00	137.493.909,00	0,00	0,00
5	JAMKESDA KOTA TPI	0,00	0,00	0,00	331.181.500,00	331.181.500,00	0,00	0,00
6	JAMKESDA PROV. KEPRI	0,00	0,00	0,00	1.222.097.500,00	1.222.097.500,00	0,00	0,00
7	RUJUKAN KOTA TPI	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00	3.000.000,00	2.994.200,00	(5.800,00)	0,00
8	PT. BRC	897.750,00	0,00	897.750,00	9.923.100,00	9.923.100,00	0,00	0,00
9	BPJS KETENAGAKERJAAN	357.285.760,00	(5.800,00)	357.279.960,00	2.259.815.791,00	2.005.311.341,00	(37.700,00)	254.466.750,00
10	IOM	210.000,00	0,00	210.000,00	14.080.995,00	14.080.995,00	0,00	0,00
11	PT. INHEALTH INDONESIA	60.537.341,00	0,00	60.537.341,00	973.235.128,00	816.734.247,00	0,00	156.500.881,00
12	PT. LINTAS SUKAPURA MANDIRI	0,00	0,00	0,00	10.980.000,00	10.980.000,00	0,00	0,00
13	JKD KAB. BINTAN	0,00	0,00	0,00	1.595.542.686,00	1.576.944.336,00	0,00	18.598.350,00
14	TASPEN	33.547.555,00	0,00	33.547.555,00	230.729.067,00	191.747.967,00	0,00	38.981.100,00
15	KEMENKES (TKI DEPORTASI)	16.646.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.646.988,00
16	KIMIA FARMA	2.440.000,00	0,00	2.440.000,00	29.520.000,00	20.498.400,00	(11.600,00)	9.010.000,00
17	GLOBAL FUND (TB MDR)	7.199.020,00	0,00	7.199.020,00	83.628.827,00	69.383.131,00	0,00	14.245.696,00
18	PARSIAL RSUD EHD	0,00	0,00	0,00	123.460.462,00	116.860.462,00	0,00	6.600.000,00
19	AIRNAV	695.830,00	0,00	695.830,00	20.589.668,00	20.589.668,00	0,00	0,00
20	PT. JASA RAHARJA	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	1.725.575.718,00	1.577.689.195,00	0,00	147.886.523,00
21	BAWASLU KOTA TANJUNGPINANG	0,00	0,00	0,00	26.918.000,00	26.918.000,00	0,00	0,00
22	BAWASLU PROVINSI KEPRI	0,00	0,00	0,00	37.714.000,00	37.711.500,00	(2.500,00)	0,00
23	BANK RIAU KEPRI	0,00	0,00	0,00	41.481.281,00	41.481.281,00	0,00	0,00
24	PT. MEITECH	381.905.800,00	(2.421.000,00)	379.484.800,00	1.695.876.150,00	1.399.620.000,00	0,00	296.256.150,00
25	PT. NAYAKA ERA HUSADA	695.215,00	(482.500,00)	212.715,00	6.646.225,00	2.876.325,00	(12.500,00)	3.757.400,00
26	RRI TANJUNGPINANG	0,00	0,00	0,00	42.893.000,00	42.893.000,00	0,00	0,00
27	DP3APPKB KAB BINTAN	0,00	0,00	0,00	210.038.000,00	210.038.000,00	0,00	0,00
28	PT. PELINDO I	5.685.275,00	(7.500,00)	5.677.775,00	16.990.098,00	9.101.848,00	(20.000,00)	7.868.250,00
29	DINAS PPAM TANJUNGPINANG	0,00	0,00	0,00	58.985.987,00	58.985.987,00	0,00	0,00

NO	NAMA PIHAK KE-3	SALDO AWAL PIUTANG	KOREKSI SALDO AWAL PIUTANG	PELUNASAN ATAS SALDO AWAL PIUTANG	PENETAPAN 2024	PELUNASAN 2024	KOREKSI PIUTANG TAHUN BERJALAN	SALDO AKHIR PIUTANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3+4-5+6-7+8
30	BIRO KLASIFIKASI INDONESIA	0,00	0,00	0,00	11.270.000,00	11.270.000,00	0,00	0,00
31	DINAS PPKB (MOW)	0,00	0,00	0,00	79.420.000,00	79.414.200,00	(5.800,00)	0,00
32	UNHCR	0,00	0,00	0,00	20.225.000,00	20.225.000,00	0,00	0,00
33	RUJUKAN RSUD BINTAN	0,00	0,00	0,00	18.883.000,00	18.883.000,00	0,00	0,00
34	KPU	0,00	0,00	0,00	129.148.560,00	129.146.060,00	(2.500,00)	0,00
35	PASIEN UMUM	2.647.935.681,00	0,00	3.979.097,00	51.513.491,00	34.210.165,00	0,00	2.661.259.910,00
36	SEWA LOKET KANTIN DAN TEMPAT USAHA	25.050.000,00	0,00	18.500.000,00	127.796.000,00	104.792.000,00	0,00	29.554.000,00
37	SEWA LOKET KF	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
38	PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA	0,00	0,00	0,00	315.280.078,00	315.280.078,00	0,00	0,00
		3.779.502.515,00	(2.919.700,00)	1.094.429.243,00	114.778.316.623,00	106.518.977.872,00	(618.300,00)	10.940.874.023,00

2) **Piutang Retribusi Jasa Usaha**

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Piutang Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp163.373.200,00. Piutang Retribusi Jasa Usaha terdiri dari Piutang Retribusi Pemakaian Laboratorium yang tercatat dan dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp123.955.500,00 dan Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang tercatat dan dikelola oleh Dinas Perhubungan sebesar Rp39.417.700,00.

5.3.1.1.9. **Piutang Lain – lain PAD Yang Sah**

Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	18.180.173.021,32	22.055.375.028,32

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada tahun 2024 sebesar Rp18.180.173.021,32 terdiri dari Piutang Pendapatan Denda Pajak sebesar Rp18.157.290.883,12, Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebesar Rp1.157.138,00, Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler sebesar Rp21.725.000,00, dan Piutang atas Pendapatan Kapal MV. Lintas Kepri pada Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT. Pelabuhan Kepri tahun 2020 dikarenakan pembulatan sebesar Rp0,20. Berikut dibawah ini dijelaskan rincian Piutang Lain-lain PAD Yang sah antara lain:

1) **Piutang Pendapatan Denda Pajak**

Piutang Denda Pajak	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	18.157.290.883,12	18.178.254.908,12

Merupakan piutang denda pajak yang timbul dari pajak daerah yang belum diterima di Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2024. Piutang denda pajak per 31 Desember 2024 sebesar Rp18.157.290.883,12 dengan Saldo awal Piutang Denda Pajak sebesar Rp18.178.254.908,12.

Piutang Denda Pajak yang dicatat serta dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah, terdiri dari piutang denda pajak atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.141 Rekapitulasi Saldo Akhir Piutang Denda Pajak Badan Pendapatan Daerah per 31 Desember 2024

No	Uraian	Saldo Awal 2024	Koreksi		Pelunasan Saldo Awal	Mutasi Piutang Denda Pajak Tahun 2024			Saldo Akhir 2024
			tambah	kurang		Penetapan	Pengurangan	Diskon Denda Pajak	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=3+4-5-6+7-8-9
	TOTAL PIUTANG	18.178.254.908,12	3.775.900,00	22.309.125,00	2.430.800,00	35.647.779.441,00	14.558.323.441,00	21.089.456.000,00	18.157.290.883,12
I	Denda Pokok PKB dan BBN-KB	2.395.785.875,00	3.775.900,00	22.309.125,00	2.430.800,00	35.619.399.600,00	14.529.943.600,00	21.089.456.000,00	2.374.821.850,00
A	PKB	2.371.219.675,00	3.775.900,00	22.309.125,00	2.430.800,00	35.619.399.600,00	14.529.943.600,00	21.089.456.000,00	2.350.255.650,00
1	BATAM	2.159.944.585,00	32.500,00	17.180.000,00	23.200,00	26.897.830.500,00	11.248.493.400,00	15.649.337.100,00	2.142.773.885,00
2	TANJUNGPINANG	100.377.015,00	3.274.000,00	4.406.725,00	2.131.000,00	4.272.970.100,00	1.674.691.900,00	2.598.278.200,00	97.113.290,00
4	BINTAN	15.288.300,00	368.800,00	512.000,00	276.600,00	1.694.108.200,00	624.753.600,00	1.069.354.600,00	14.868.500,00
3	KARIMUN	70.533.550,00	87.600,00	197.400,00	0,00	2.161.899.900,00	798.177.600,00	1.363.722.300,00	70.423.750,00
5	LINGGA	5.088.525,00	0,00	0,00	0,00	194.924.900,00	71.333.200,00	123.591.700,00	5.088.525,00
5	NATUNA	19.987.700,00	13.000,00	13.000,00	0,00	343.757.900,00	89.319.400,00	254.438.500,00	19.987.700,00
6	ANAMBAS	0,00	0,00	0,00	0,00	53.908.100,00	23.174.500,00	30.733.600,00	0,00
B	BBNKB	24.566.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.566.200,00
1	BATAM	22.096.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.096.300,00
2	TANJUNGPINANG	1.085.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.300,00
3	BINTAN	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00
4	KARIMUN	675.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.200,00
5	LINGGA	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00
6	NATUNA	513.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.000,00
7	ANAMBAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Denda PBBKB	0,00	0,00	0,00	0,00	27.713.748,00	27.713.748,00	0,00	0,00
	Denda PBBKB	0,00	0,00	0,00	0,00	27.713.748,00	27.713.748,00	0,00	0,00
III	DENDA AIR PERMUKAAN	15.782.469.033,12	0,00	0,00	0,00	666.093,00	666.093,00	0,00	15.782.469.033,12
	BATAM	15.782.469.033,12	0,00	0,00	0,00	573.746,00	573.746,00	0,00	15.782.469.033,12
	TANJUNGPINANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	Saldo Awal 2024	Koreksi		Pelunasan Saldo Awal	Mutasi Piutang Denda Pajak Tahun 2024			Saldo Akhir 2024
			tambah	kurang		Penetapan	Pengurangan	Diskon Denda Pajak	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=3+4-5-6+7-8-9
	BINTAN	0,00	0,00	0,00	0,00	20.115,00	20.115,00	0,00	0,00
	KIJANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KARIMUN	0,00	0,00	0,00	0,00	67.247,00	67.247,00	0,00	0,00
	TANJUNG BATU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LINGGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NATUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.985,00	4.985,00	0,00	0,00
	ANAMBAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) **Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah**

Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	1.157.138,00	667.200,00

Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah timbul dikarenakan Wajib Retribusi Daerah tidak memenuhi kewajiban sehingga dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebesar Rp1.157.138,00 yang merupakan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha terdiri Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yaitu Pemakaian Laboratorium yang tercatat dan dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp667.200,00 dan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang tercatat dan dikelola oleh Dinas Perhubungan sebesar Rp489.938,00.

3) **Piutang Pendapatan dari Pengembalian**

Piutang Pendapatan dari Pengembalian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	21.725.000,00	0,00

Piutang Pendapatan dari Pengembalian yaitu Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional satuan Pendidikan yaitu bantuan operasional sekolah reguler. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler per 31 Desember 2024 sebesar Rp21.725.000,00 yang merupakan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal berupa buku akibat adanya kerusakan sebanyak 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) eksemplar yang ada pada SMAN 1 Bintang Timur berdasarkan surat keterangan dari PT. Intan Pariwara tanggal 30 November 2024, selanjutnya PT. Intan Pariwara sudah menyetorkan ke Kas Dana BOS pada tanggal 27 Januari 2025.

4) **Piutang Pendapatan BLUD**

Piutang Pendapatan BLUD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	0,00	3.876.452.920,00

Piutang Pendapatan BLUD digunakan untuk mencatat piutang pendapatan BLUD, piutang pendapatan BLUD dari jasa layanan, piutang pendapatan BLUD dari hibah, piutang pendapatan BLUD dari hibah tidak terikat, piutang pendapatan BLUD dari hasil kerja sama dengan pihak lain, piutang pendapatan BLUD dari APBD, dan piutang pendapatan BLUD dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pada akhir periode 31 Desember 2024 tidak terdapat saldo Piutang Pendapatan BLUD dikarenakan Piutang BLUD pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud dan Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib yang sebelumnya dicatat sebagai piutang pendapatan BLUD direklasifikasi menjadi Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah karena Jasa Pelayanan Kesehatan tersebut merupakan objek Retribusi Jasa Umum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35

Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan juga Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

5.3.1.1.10. Piutang Lainnya

Piutang Lainnya	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	96.250.000,00	96.250.000,00

Piutang lainnya adalah piutang yang timbul dari kegiatan yang pengakuannya tidak dapat diklasifikasikan pada piutang pajak maupun piutang retribusi. Pada tahun 2024 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Piutang lainnya sebesar Rp96.250.000,00 yang merupakan piutang atas kelebihan pembayaran pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang timbul karena adanya reviu Inspektorat terhadap pengurangan utang.

Rincian Piutang Lainnya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.142 Rekapitulasi Piutang Lainnya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NAMA REKANAN / URAIAN	KETERANGAN	JUMLAH
1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	PT. TIGA NAGA MAS	Peningkatan Mesjid Baiturahman Kabupaten Karimun	96.250.000,00
	TOTAL			96.250.000,00

5.3.1.1.11. Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp(66.851.818.877,96) terdiri dari Penyisihan Piutang Pajak Daerah sebesar Rp(46.281.323.152,41), Penyisihan Piutang Retribusi sebesar Rp(2.464.841.332,73) dan Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp(18.105.654.392,81) terdiri dari Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak sebesar Rp(18.105.318.343,12) dan Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian sebesar Rp(333.600,00) serta Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebesar Rp(2.449,69).

5.3.1.1.11.1. Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Penyisihan Piutang Pajak Daerah	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	(46.281.323.152,41)	(30.004.925.263,54)

Penyisihan Piutang Pajak Daerah sebesar Rp(46.281.323.152,41) merupakan pencadangan atas potensi tidak tertagihnya piutang pajak daerah dimana Penilaian Umur Piutang Pajak dapat dijelaskan melalui tabel berikut ini:

Tabel 5.143 Persentase Penyisihan Piutang Berdasarkan Jenis dan Umur Piutang

No.	Jenis Piutang	Kualitas/Umur Piutang			
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
		(0,5%)	(10%)	(50%)	(100%)
1.	Piutang Pajak (self assessment)	< 1 Thn	≥ 1 s.d 2 Thn	> 2 s.d 5 Thn	> 5 Thn

No.	Jenis Piutang	Kualitas/Umur Piutang			
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
		(0,5%)	(10%)	(50%)	(100%)
2.	Piutang Pajak (<i>official assessment</i>)	< 1 Thn	≥ 1 s.d 2 Thn	> 2 s.d 5 Thn	> 5 Thn
3.	Piutang Bukan Pajak Khusus Untuk Objek Retribusi	< 1 bulan	≥ 1 s.d 3 bulan	> 3 s.d 12 bulan	> 12 bulan
4.	Piutang Bukan Pajak Selain Retribusi	Belum dilakukan pelunasan sampai tanggal jatuh tempo	1 bulan terhitung sejak surat tagihan pertama	1 bulan terhitung sejak surat tagihan kedua	1 bulan terhitung sejak surat tagihan ketiga

Penyisihan piutang tidak tertagih dihitung menurut persentase masing-masing kualitas piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Besaran penyisihan piutang pajak daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.144 Rekapitulasi Penyisihan Piutang Pajak Daerah Tahun 2024

No	Uraian	Saldo Piutang	Umur Piutang				Penyisihan Piutang
			0 - 1 Tahun	1 - 2 Tahun	2 - 5 Tahun	> 5 Tahun	
	TOTAL PIUTANG	99.618.122.631,00	53.398.215.282,00	28.233.975,00	360.329.391,00	45.831.343.983,00	46.281.323.152,41
I	SKPDKB	4.959.226.094,00	0,00	0,00	0,00	4.959.226.094,00	4.959.226.094,00
	PKB	1.007.790.974,00	0,00	0,00	0,00	1.007.790.974,00	1.007.790.974,00
	BBNKB	3.951.435.120,00	0,00	0,00	0,00	3.951.435.120,00	3.951.435.120,00
II	Pokok PKB dan BBN-KB	22.834.002.867,00	13.709.618.200,00	28.233.975,00	360.329.391,00	8.735.821.301,00	8.987.357.485,00
1	BATAM	21.058.841.567,00	13.198.606.700,00	20.965.075,00	330.010.991,00	7.509.258.801,00	7.742.353.837,50
2	TANJUNGPINANG	662.698.675,00	69.213.000,00	6.837.900,00	21.309.200,00	565.338.575,00	577.023.030,00
4	BINTAN	387.060.600,00	229.726.000,00	431.000,00	1.214.400,00	155.689.200,00	157.488.130,00
3	KARIMUN	336.484.075,00	0,00	0,00	4.507.300,00	331.976.775,00	334.230.425,00
5	LINGGA	23.347.800,00	0,00	0,00	0,00	23.347.800,00	23.347.800,00
6	NATUNA	365.570.150,00	212.072.500,00	0,00	3.287.500,00	150.210.150,00	152.914.262,50
7	ANAMBAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	PBBKB	39.688.597.082,00	39.688.597.082,00	0,00	0,00	0,00	198.442.985,41
	PBBKB	39.688.597.082,00	39.688.597.082,00	0,00	0,00	0,00	198.442.985,41
IV	AIR PERMUKAAN	32.136.296.588,00	0,00	0,00	0,00	32.136.296.588,00	32.136.296.588,00
	BATAM	32.124.985.178,00	0,00	0,00	0,00	32.124.985.178,00	32.124.985.178,00
	TANJUNGPINANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BINTAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KIJANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KARIMUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TANJUNG BATU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LINGGA	11.311.410,00	0,00	0,00	0,00	11.311.410,00	11.311.410,00
	NATUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ANAMBAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.3.1.1.11.2. **Penyisihan Piutang Retribusi**

Penyisihan Piutang Retribusi	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
	(2.464.841.332,73)	0,00

Penyisihan Piutang Retribusi digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi sehingga nilai piutang retribusi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Penyisihan Piutang Retribusi periode 31 Desember 2024 sebesar Rp(2.464.841.332,73) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.145 Rekapitulasi Penyisihan Piutang Retribusi

NO	URAIAN	NILAI PIUTANG	PENYISIHAN PIUTANG DIRAGUKAN TERTAGIH
1	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	333.469.753,00	28.915.423,77
2	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	10.940.874.023,00	2.423.273.270,46
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	123.955.500,00	12.455.550,00
4	Dinas Perhubungan	39.417.700,00	197.088,50
SALDO AKHIR PENYISIHAN PIUTANG BLUD		11.437.716.976,00	2.464.841.332,73

Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud tahun 2024 sebesar Rp(28.915.423,77) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.146 Rekapitulasi Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud

NO	NAMA PIHAK KE-3	SALDO PIUTANG	UMUR PIUTANG				PENYISIHAN PIUTANG
			0 - 1 Tahun	1 - 2 Tahun	2 - 5 Tahun	> 5 Tahun	
1	2	3	4	4	5	5	6
1	BPJS KESEHATAN	23.086.000,00	23.086.000,00	0,00	0,00	0,00	115.430,00
2	PT INHEALTH	18.353.935,00	18.353.935,00	0,00	0,00	0,00	91.769,68
3	TCM	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	14.750,00
4	PP ALILA VILLA	843.900,00	0,00	0,00	0,00	843.900,00	843.900,00
5	PP CONDOTEL	6.285.100,00	0,00	0,00	0,00	6.285.100,00	6.285.100,00
6	HUTAMA KARYA	13.102.500,00	0,00	0,00	0,00	13.102.500,00	13.102.500,00
7	BINTAN LAGOON	7.153.500,00	0,00	0,00	0,00	7.153.500,00	7.153.500,00
8	PERTAMINA	48.929.030,00	48.929.030,00	0,00	0,00	0,00	244.645,15
9	TASPEN	360.721,00	360.721,00	0,00	0,00	0,00	1.803,60
10	INDEMNITY	4.836.601,00	4.836.601,00	0,00	0,00	0,00	24.183,01
11	AMODA	21.670.500,00	21.670.500,00	0,00	0,00	0,00	108.352,50
12	KEMENKES	185.897.966,00	185.897.966,00	0,00	0,00	0,00	929.489,83
		333.469.753,00	306.084.753,00	0,00	0,00	27.385.000,00	28.915.423,77

Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib tahun 2024 sebesar Rp(2.423.273.270,46) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.147 Rekapitulasi Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib

NO	NAMA PIHAK KE-3	SALDO PIUTANG	UMUR PIUTANG				PENYISIHAN PIUTANG
			0 - 1 Tahun	1 - 2 Tahun	2 - 5 Tahun	> 5 Tahun	
1	JKN / BPJS KESEHATAN	7.264.242.025,00	7.264.242.025,00	0,00	0,00	0,00	36.321.210,13
2	BPJS KETENAGAKERJAAN	254.466.750,00	254.466.750,00	0,00	0,00	0,00	1.272.333,75
3	PT. INHEALTH INDONESIA	156.500.881,00	156.500.881,00	0,00	0,00	0,00	782.504,41
4	JKD KAB. BINTAN	18.598.350,00	18.598.350,00	0,00	0,00	0,00	92.991,75
5	TASPEN	38.981.100,00	38.981.100,00	0,00	0,00	0,00	194.905,50
6	KEMENKES (TKI DEPORTASI)	16.646.988,00	0,00	0,00	0,00	16.646.988,00	16.646.988,00
7	KIMIA FARMA	9.010.000,00	9.010.000,00	0,00	0,00	0,00	45.050,00

NO	NAMA PIHAK KE-3	SALDO PIUTANG	UMUR PIUTANG				PENYISIHAN PIUTANG
			0 - 1 Tahun	1 - 2 Tahun	2 - 5 Tahun	> 5 Tahun	
8	GLOBAL FUND (TB MDR)	14.245.696,00	14.245.696,00	0,00	0,00	0,00	71.228,48
9	PARSIAL RSUD EHD	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
10	PT. JASA RAHARJA	147.886.523,00	147.886.523,00	0,00	0,00	0,00	739.432,61
11	PT. MEITECH	296.256.150,00	296.256.150,00	0,00	0,00	0,00	1.481.280,75
12	PT. NAYAKA ERA HUSADA	3.757.400,00	3.757.400,00	0,00	0,00	0,00	18.787,00
13	PT. PELINDO I	7.868.250,00	7.868.250,00	0,00	0,00	0,00	39.341,25
14	PASIEN UMUM	2.661.259.910,00	17.303.326,00	185.573.462,00	254.525.576,00	2.203.857.546,00	2.349.764.196,83
15	SEWA LOKET KANTIN DAN TEMPAT USAHA	29.554.000,00	23.004.000,00	6.550.000,00	0,00	0,00	770.020,00
16	SEWA LOKET KF	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
		10.940.874.023,00	8.258.720.451,00	192.123.462,00	254.525.576,00	2.235.504.534,00	2.423.273.270,46

Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Laboratorium pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp(12.455.550,00) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.148 Rekapitulasi Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Laboratorium

	SALDO PIUTANG RETRIBUSI	UMUR PIUTANG				PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI
		0 - 1 Tahun	1 - 2 Tahun	2 - 5 Tahun	> 5 Tahun	
Piutang Pokok Retribusi Pemakaian Laboratorium	123.955.500,00	0,00	123.805.500,00	150.000,00	0,00	12.455.550,00
	123.955.500,00	0,00	123.805.500,00	150.000,00	0,00	12.455.550,00

Penyisihan Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan-Pelayanan Kepelabuhanan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp(197.088,50) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.149 Rekapitulasi Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan-Pelayanan Kepelabuhanan

	SALDO PIUTANG RETRIBUSI	UMUR PIUTANG				PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI
		0 - 1 Tahun	1 - 2 Tahun	2 - 5 Tahun	> 5 Tahun	
Piutang Pokok Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	39.417.700,00	39.417.700,00	0,00	0,00	0,00	197.088,50
	39.417.700,00	39.417.700,00	0,00	0,00	0,00	197.088,50

5.3.1.1.11.2.1. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 sebesar Rp(18.105.654.392,81) terdiri dari Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak sebesar Rp(18.105.318.343,12) dan Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Laboratorium sebesar Rp(333.600,00) serta Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebesar Rp(2.449,69).

1. Penyisihan Piutang Denda Pajak

Penyisihan Piutang Denda Pajak	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
	(18.105.318.343,12)	(10.171.107.548,56)

Penyisihan Piutang Denda Pajak per 31 Desember 2024 sebesar Rp(18.105.318.343,12) merupakan pencadangan atas potensi tidak tertagihnya piutang denda pajak. Besaran Penyisihan Piutang Denda Pajak pada tahun 2024 dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 5.150 Rekapitulasi Penyisihan Piutang Denda Pajak Tahun 2024

No	Uraian	Saldo Piutang	Umur Piutang				Penyisihan Piutang
			0 - 1 Tahun	1 - 2 Tahun	2 - 5 Tahun	> 5 Tahun	
	TOTAL PIUTANG	18.157.290.883,12	0,00	5.216.600,00	94.555.200,00	18.057.519.083,12	18.105.318.343,12
I	Denda Pokok PKB dan BBN-KB	2.374.821.850,00	0,00	5.216.600,00	94.555.200,00	2.275.050.050,00	2.322.849.310,00
1	BATAM	2.164.870.185,00	0,00	4.728.900,00	91.966.200,00	2.068.175.085,00	2.114.631.075,00
2	TANJUNGPINANG	98.198.590,00	0,00	462.800,00	2.202.800,00	95.532.990,00	96.680.670,00
4	BINTAN	14.887.900,00	0,00	24.900,00	91.800,00	14.771.200,00	14.819.590,00
3	KARIMUN	71.098.950,00	0,00	0,00	258.300,00	70.840.650,00	70.969.800,00
5	LINGGA	5.265.525,00	0,00	0,00	0,00	5.265.525,00	5.265.525,00
6	NATUNA	20.500.700,00	0,00	0,00	36.100,00	20.464.600,00	20.482.650,00
7	ANAMBAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Denda PBBKB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Denda PBBKB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	DENDA AIR PERMUKAAN	15.782.469.033,12	0,00	0,00	0,00	15.782.469.033,12	15.782.469.033,12
	BATAM	15.782.469.033,12	0,00	0,00	0,00	15.782.469.033,12	15.782.469.033,12
	TANJUNGPINANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BINTAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KIJANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KARIMUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TANJUNG BATU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LINGGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NATUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ANAMBAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi

Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
	(336.049,69)	0,00

Pada akhir periode 31 Desember 2024 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi sebesar Rp(336.049,69) terdiri dari Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah Pemakaian Laboratorium sebesar Rp(333.600,00) dan Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan-Pelayanan Kepelabuhanan sebesar Rp(2.449,69) yang dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 5.151 Rekapitulasi Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah Pemakaian Laboratorium Tahun 2024

JENIS PIUTANG DENDA	SALDO PIUTANG DENDA RETRIBUSI	UMUR PIUTANG				PENYISIHAN PIUTANG PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI
		0 - 1 Tahun	1 - 2 Tahun	2 - 5 Tahun	> 5 Tahun	
Piutang Denda Retribusi Pemakaian Laboratorium	667.200,00	0,00	0,00	667.200,00	0,00	333.600,00
	667.200,00	0,00	0,00	667.200,00	0,00	333.600,00

Tabel 5.152 Rekapitulasi Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan-Pelayanan Kepelabuhanan Tahun 2024

UMUR PIUTANG			
--------------	--	--	--

JENIS PIUTANG DENDA	SALDO PIUTANG RETRIBUSI	0 - 1 Tahun	1 - 2 Tahun	2 - 5 Tahun	> 5 Tahun	PENYISIHAN PIUTANG PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI
Piutang Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	489.938,00	489.938,00	0,00	0,00	0,00	2.449,69
	489.938,00	489.938,00	0,00	0,00	0,00	2.449,69

3. Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD

Penyisihan Piutang BLUD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	0,00	(2.028.169.099,55)

Penyisihan Piutang BLUD digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan BLUD sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan BLUD sehingga nilai piutang pendapatan BLUD yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Pada akhir periode 31 Desember 2024 tidak terdapat saldo Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD dikarenakan Penyisihan Piutang BLUD pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud dan Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib yang sebelumnya dicatat sebagai Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD direklasifikasi menjadi Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah karena Jasa Pelayanan Kesehatan tersebut merupakan objek Retribusi Jasa Umum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan juga Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

5.3.1.1.12. Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	1.809.609.683,07	1.537.600.288,02

Beban Dibayar Dimuka digunakan untuk mencatat manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain yang telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi pada saat pemerintah daerah mempunyai hak klaim tersebut. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan pembayaran sewa yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran dicatat dengan pendekatan beban dan Beban Sewa Dibayar Dimuka untuk mencatat sisanya.

Pada tahun 2024 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat transaksi Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp1.809.609.683,07 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.153 Rekapitulasi Beban Dibayar Dimuka OPD per 31 Desember 2024

No	Nama OPD	Saldo Beban Dibayar Dimuka
1	Dinas Pendidikan	63.737.500,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib (BLUD)	55.742.777,78
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18.750.000,00
4	Dinas Sosial	57.558.333,33
5	Dinas Perhubungan	8.750.000,00
6	Dinas Pariwisata	22.666.666,67

7	Biro Kesejahteraan Rakyat	550.665.820,00
8	Biro Umum	472.826.950,58
9	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.194.444,44
10	Badan Keuangan dan Aset Daerah	112.777.777,78
11	Badan Pendapatan Daerah	435.384.624,99
12	Sekretariat DPRD	7.088.120,83
13	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	466.666,67
Total		1.809.609.683,07

Adapun rincian Beban Dibayar Dimuka dijelaskan pada **Lampiran 4**.

5.3.1.1.13. Persediaan

Persediaan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	294.022.966.235,40	178.060.899.676,71

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan pencatatan persediaan dengan metode Periodik dan perpetual. Dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif rendah, perputarannya cepat, dan persediaan tersebut penggunaannya sulit diidentifikasi antara lain berupa barang konsumsi, Alat Tulis Kantor (ATK) atau barang pakai habis, barang cetakan, dan yang sejenis. Nilai persediaan akan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Dengan metode periodik ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan *stock opname* pada akhir periode, dicatat secara perpetual meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif tinggi, perputarannya lambat, jenis persediaan yang sifatnya *continues*, dan membutuhkan kontrol yang besar antara lain berupa obat-obatan, suku cadang alat berat, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan/barang lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan yang sejenisnya. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu *ter-update*.

Saldo persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp294.022.966.235,40 merupakan sisa persediaan di OPD yang belum digunakan berupa Barang Habis Pakai sebesar Rp36.398.773.067,00 serta persediaan barang-barang yang akan diserahkan tetapi belum diserahkan sebesar Rp257.624.193.168,40 sampai dengan 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.154 Rekapitulasi Persediaan Barang Habis Pakai Dan Hibah Per 31 Desember 2024

NO	NAMA SKPD	JUMLAH PERSEDIAAN HABIS PAKAI	JUMLAH PERSEDIAAN HIBAH	JUMLAH PERSEDIAAN 2024
1	2	3	4	5 = (3+4)
1	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00
2	Inspektorat Daerah	4.393.380,00	0,00	4.393.380,00
3	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	0,00	0,00	0,00
4	Badan Pendapatan Daerah	2.728.028.160,00	0,00	2.728.028.160,00

NO	NAMA SKPD	JUMLAH PERSEDIAAN HABIS PAKAI	JUMLAH PERSEDIAAN HIBAH	JUMLAH PERSEDIAAN 2024
1	2	3	4	5 = (3+4)
5	Badan Kepegawaian Daerah Dan Korpri	0,00	0,00	0,00
6	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia	0,00	0,00	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	77.926.500,00	1.146.683.570,00	1.224.610.070,00
8	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1.535.800,00	0,00	1.535.800,00
9	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	41.082.158,67	0,00	41.082.158,67
10	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	388.800,00	0,00	388.800,00
11	Badan Penghubung Daerah	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00
12	Dinas Pendidikan	61.280.500,00	0,00	61.280.500,00
13	Dinas Kesehatan	15.036.251.180,77	71.776.286,97	15.108.027.467,74
14	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	1.385.000,00	111.323.229.891,39	111.324.614.891,39
15	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	71.930.000,00	135.750.938.462,95	135.822.868.462,95
16	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00
18	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	465.800,00	0,00	465.800,00
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	115.200,00	0,00	115.200,00
20	Dinas Perhubungan	24.694.655,00	8.800.041.323,09	8.824.735.978,09
21	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	2.573.500,00	0,00	2.573.500,00
22	Dinas Komunikasi Dan Informatika	0,00	0,00	0,00
23	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	2.586.000,00	0,00	2.586.000,00
24	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00
25	Dinas Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Satu Pintu	1.940.000,00	0,00	1.940.000,00
26	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00
27	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	1.351.000,00	0,00	1.351.000,00
28	Dinas Kelautan Dan Perikanan	95.752.000,00	0,00	95.752.000,00
29	Dinas Pariwisata	17.298.000,00	0,00	17.298.000,00
30	Dinas Kebudayaan	122.200,00	0,00	122.200,00
31	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Kesehatan Hewan	313.534.294,00	531.523.634,00	845.057.928,00
32	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	0,00	0,00	0,00
33	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penanggulangan Kebakaran	831.720,00	0,00	831.720,00
34	Biro Hukum	123.600,00	0,00	123.600,00
35	Biro Organisasi	0,00	0,00	0,00
36	Biro Kesejahteraan Rakyat	0,00	0,00	0,00
37	Biro Perekonomian Dan Pembangunan	4.713.600,00	0,00	4.713.600,00
38	Biro Pengadaan Barang Dan Jasa	0,00	0,00	0,00
39	Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	181.100,00	0,00	181.100,00
40	Biro Umum	0,00	0,00	0,00
41	Biro Administrasi Pimpinan	393.680,00	0,00	393.680,00
41	Rumah Sakit Umum Provinsi Raja Ahmad Thabib	26.067.664,00	0,00	26.067.664,00
	Rumah Sakit Umum Provinsi Raja Ahmad Thabib (BLUD)	12.861.579.699,20	0,00	12.861.579.699,20
42	Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	1.714.505.568,90	0,00	1.714.505.568,90
	Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud (BLUD)	3.147.756.523,46	0,00	3.147.756.523,46
43	Dinas Pendidikan (SPP)	0,00	0,00	0,00

NO	NAMA SKPD	JUMLAH PERSEDIAAN HABIS PAKAI	JUMLAH PERSEDIAAN HIBAH	JUMLAH PERSEDIAAN 2024
1	2	3	4	5 = (3+4)
44	Dinas Pendidikan (BOS)	154.535.783,00	0,00	154.535.783,00
45	Dinas Pendidikan (BLUD)	0,00	0,00	0,00
T O T A L		36.398.773.067,00	257.624.193.168,40	294.022.966.235,40

Persediaan sebesar Rp294.022.966.235,40 tidak termasuk pengadaan atas Belanja Makanan dan Minuman sebesar Rp46.827.474.570,00 dan Belanja Pakaian sebesar Rp6.733.784.012,00. Mutasi persediaan per OPD dapat dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.155 Mutasi Persediaan per OPD

NO.	NAMA OPD	SALDO AWAL	LAPORAN REALIASI ANGGARAN	MUTASI TAMBAH	MUTASI KELUAR	TOTAL PENERIMAAN	TOTAL PENGELUARAN	SALDO AKHIR
		Per 1 Januari 2024	1 Jan s/d 31 Des 2024	1 Jan s/d 31 Des 2024	1 Jan s/d 31 Des 2024	1 Jan s/d 31 Des 2024	1 Jan s/d 31 Des 2024	Per 31 Desember 2024
1	2	3	4	5	6	7=(3+4+5)-6	8	9=7-8
1	Sekretariat DPRD	21.775.000,00	6.862.905.429,00	1.165.200.715,00	0,00	8.049.881.144,00	8.049.881.144,00	0,00
2	Inspektorat Daerah	11.537.284,50	1.664.561.519,00	69.538.125,00	0,00	1.745.636.928,50	1.741.243.548,50	4.393.380,00
3	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	508.700,00	2.024.855.135,00	0,00	205.247.737,00	1.820.116.098,00	1.820.116.098,00	0,00
4	Badan Pendapatan Daerah	2.204.153.620,00	5.636.591.092,00	2.651.101.066,00	222.479.000,00	10.269.366.778,00	7.541.338.618,00	2.728.028.160,00
5	Badan Kepegawaian Daerah Dan Korpri	0,00	544.005.167,00	0,00	0,00	544.005.167,00	544.005.167,00	0,00
6	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia	0,00	436.651.616,00	0,00	0,00	436.651.616,00	436.651.616,00	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.159.833.970,00	919.746.430,00	169.931.500,00	29.938.300,00	2.219.573.600,00	994.963.530,00	1.224.610.070,00
8	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1.729.100,00	667.386.050,00	56.855.000,00	1.290.000,00	724.680.150,00	723.144.350,00	1.535.800,00
9	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	11.560.988,34	7.464.260.053,00	50.400.000,00	0,00	7.526.221.041,34	7.485.138.882,67	41.082.158,67
10	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	534.000,00	166.639.582,00	0,00	0,00	167.173.582,00	166.784.782,00	388.800,00
11	Badan Penghubung Daerah	14.438.144,00	2.139.895.483,00	16.430.000,00	0,00	2.170.763.627,00	2.167.313.627,00	3.450.000,00
12	Dinas Pendidikan	44.835.500,00	14.800.710.062,00	3.272.492.800,00	222.968.200,00	17.895.070.162,00	17.833.789.662,00	61.280.500,00
13	Dinas Kesehatan	15.812.438.179,19	4.758.415.031,00	54.651.634.993,44	0,00	75.222.488.203,63	60.114.460.735,89	15.108.027.467,74
14	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	123.225.274.093,25	6.234.118.509,00	20.853.896.959,53	411.462.187,67	149.901.827.374,11	38.577.212.482,72	111.324.614.891,39
15	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	11.373.761.570,45	125.567.169.345,00	107.028.652.012,50	325.277.800,00	243.644.305.127,95	107.821.436.665,00	135.822.868.462,95
16	Dinas Sosial	0,00	7.257.023.510,00	408.807.050,00	0,00	7.665.830.560,00	7.665.830.560,00	0,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	0,00	2.024.683.313,00	115.200,00	115.200,00	2.024.683.313,00	2.024.683.313,00	0,00
18	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	18.714.000,00	350.719.441,00	81.179.000,00	81.179.000,00	369.433.441,00	368.967.641,00	465.800,00

NO.	NAMA OPD	SALDO AWAL	LAPORAN REALIASI ANGGARAN	MUTASI TAMBAH	MUTASI KELUAR	TOTAL PENERIMAAN	TOTAL PENGELUARAN	SALDO AKHIR
		Per 1 Januari 2024	1 Jan s/d 31 Des 2024	1 Jan s/d 31 Des 2024	1 Jan s/d 31 Des 2024	1 Jan s/d 31 Des 2024	1 Jan s/d 31 Des 2024	Per 31 Desember 2024
1	2	3	4	5	6	7=(3+4+5)-6	8	9=7-8
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	171.300,00	850.459.154,00	113.744.000,00	0,00	964.374.454,00	964.259.254,00	115.200,00
20	Dinas Perhubungan	10.583.339.656,17	430.482.340,00	10.009.248,00	0,00	11.023.831.244,17	2.199.095.266,08	8.824.735.978,09
21	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	659.500,00	1.200.278.091,00	0,00	0,00	1.200.937.591,00	1.198.364.091,00	2.573.500,00
22	Dinas Komunikasi Dan Informatika	120.000,00	3.299.117.100,00	1.098.324.700,00	0,00	4.397.561.800,00	4.397.561.800,00	0,00
23	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	2.196.150,00	1.070.144.010,00	124.889.440,00	0,00	1.197.229.600,00	1.194.643.600,00	2.586.000,00
24	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	1.189.500,00	1.604.726.463,00	0,00	781.002.235,00	824.913.728,00	824.913.728,00	0,00
25	Dinas Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Satu Pintu	4.757.600,00	359.735.340,00	0,00	0,00	364.492.940,00	362.552.940,00	1.940.000,00
26	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	1.110.600,00	1.787.498.400,00	58.869.000,00	0,00	1.847.478.000,00	1.846.127.000,00	1.351.000,00
27	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	0,00	782.099.850,44	153.948.000,00	0,00	936.047.850,44	936.047.850,44	0,00
28	Dinas Kelautan Dan Perikanan	72.663.504,50	2.188.808.864,00	156.754.500,00	5.710.000,00	2.412.516.868,50	2.316.764.868,50	95.752.000,00
29	Dinas Pariwisata	0,00	623.744.400,00	102.909.500,00	60.450.000,00	666.203.900,00	648.905.900,00	17.298.000,00
30	Dinas Kebudayaan	571.800,00	971.155.145,00	0,00	0,00	971.726.945,00	971.604.745,00	122.200,00
31	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Kesehatan Hewan	20.439.970,00	2.846.128.148,00	7.279.773.447,00	0,00	10.146.341.565,00	9.301.283.637,00	845.057.928,00
32	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	0,00	3.116.270.460,81	3.272.418.000,00	0,00	6.388.688.460,81	6.388.688.460,81	0,00
33	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penanggulangan Kebakaran	782.600,00	422.272.441,00	244.876.304,00	103.125.000,00	564.806.345,00	563.974.625,00	831.720,00
34	Biro Hukum	0,00	255.498.650,00	123.423.100,00	60.200.000,00	318.721.750,00	318.598.150,00	123.600,00
35	Biro Organisasi	0,00	209.596.967,00	0,00	0,00	209.596.967,00	209.596.967,00	0,00
36	Biro Kesejahteraan Rakyat	4.394.100,00	361.683.950,00	0,00	0,00	366.078.050,00	366.078.050,00	0,00
37	Biro Perekonomian Dan Pembangunan	2.504.000,00	350.965.946,00	0,00	0,00	353.469.946,00	348.756.346,00	4.713.600,00

NO.	NAMA OPD	SALDO AWAL	LAPORAN REALIASI ANGGARAN	MUTASI TAMBAH	MUTASI KELUAR	TOTAL PENERIMAAN	TOTAL PENGELUARAN	SALDO AKHIR
		Per 1 Januari 2024	1 Jan s/d 31 Des 2024	1 Jan s/d 31 Des 2024	1 Jan s/d 31 Des 2024	1 Jan s/d 31 Des 2024	1 Jan s/d 31 Des 2024	Per 31 Desember 2024
1	2	3	4	5	6	7=(3+4+5)-6	8	9=7-8
38	Biro Pengadaan Barang Dan Jasa	0,00	291.375.200,00	0,00	0,00	291.375.200,00	291.375.200,00	0,00
39	Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	28.400,00	426.721.788,00	0,00	0,00	426.750.188,00	426.569.088,00	181.100,00
40	Biro Umum	4.078.600,00	19.907.906.291,00	294.389.000,00	228.064.600,00	19.978.309.291,00	19.978.309.291,00	0,00
41	Biro Administrasi Pimpinan	2.179.200,00	1.788.349.705,00	106.845.000,00	0,00	1.897.373.905,00	1.896.980.225,00	393.680,00
42	Rumah Sakit Umum Provinsi Raja Ahmad Thabib	133.985.988,00	604.033.245,00	35.539.082,00	0,00	773.558.315,00	747.490.651,00	26.067.664,00
43	Rumah Sakit Umum Daerah Engku Haji Daud	278.471.100,70	4.358.828.532,00	492.221.241,00	119.850.000,00	5.009.670.873,70	3.295.165.304,80	1.714.505.568,90
44	Rumah Sakit Umum Provinsi Raja Ahmad Thabib (BLUD)	10.549.748.081,94	0,00	67.793.596.244,24	65.481.764.626,98	12.861.579.699,20	0,00	12.861.579.699,20
45	Rumah Sakit Umum Daerah Engku Haji Daud (BLUD)	2.496.413.875,67	0,00	13.383.475.447,78	12.732.132.799,99	3.147.756.523,46	0,00	3.147.756.523,46
46	Dinas Pendidikan (SPP)	0,00	0,00	6.923.774.759,51	6.923.774.759,51	0,00	0,00	0,00
47	Dinas Pendidikan (BOS)	0,00	0,00	56.620.065.967,30	56.465.530.184,30	154.535.783,00	0,00	154.535.783,00
48	Dinas Pendidikan (BLUD)	0,00	0,00	2.327.457.440,17	2.327.457.440,17	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	178.060.899.676,71	239.628.217.248,25	351.193.537.842,47	146.789.019.070,62	622.093.635.696,81	328.070.669.461,41	294.022.966.235,40

Total Persediaan sebesar Rp294.022.966.235,40 tidak termasuk persediaan dengan kondisi rusak atau kadaluarsa seperti obat-obatan yang terdapat pada Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Thabib dan Rumah Sakit Khusus Jiwa Dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud, dan bahan pakai habis yang terdapat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Perhubungan serta SMA Negeri 1 Batam yang dapat dilihat dari tabel berikut ini dengan rincian pada **Lampiran 5**.

Tabel 5.156 Rekapitulasi Persediaan Dengan Kondisi Rusak atau Kadaluarsa Per 31 Desember 2024

No	NAMA OPD	OBAT-OBATAN	BAHAN MEDIS HABIS PAKAI	BAHAN HABIS PAKAI	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = (3+4+5)
1	Dinas Kesehatan	663.026.672,00	0,00	0,00	663.026.672,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib Provinsi Kepulauan Riau	26.863.122,75	0,00	0,00	26.863.122,75
3	Rumah Sakit Khusus Jiwa Dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	121.971.964,36	0,00	0,00	121.971.964,36
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	15.722.000,00	15.722.000,00
5	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	20.693.090,00	20.693.090,00
6	SMA Negeri 1 Batam	0,00	0,00	10.670.300,00	10.670.300,00
	TOTAL	811.861.759,11	0,00	47.085.390,00	858.947.149,11

Pada tahun 2024 terdapat 29 (dua puluh sembilan) jenis persediaan di SMK Negeri 1 Tanjungpinang yang tidak tercatat pada BA *Stock Opname* per 31 Desember 2024 serta belum diketahui harga perolehan dan tahun perolehannya, maka pencatatan nilai persediaan tersebut akan dilakukan proses penyesuaian atau rekonsiliasi pada laporan keuangan di TA 2025.

5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang terdiri atas Investasi Permanen dan Investasi Non Permanen. Investasi permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan investasi non permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Pada Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat investasi non permanen lainnya dan investasi permanen dengan rincian sebagai berikut:

5.3.1.2.1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang Non Permanen	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	0,00	0,00

Merupakan investasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam bentuk dana bergulir kepada masyarakat yang disalurkan melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Dasar penilaian investasi jangka panjang non permanen lainnya (dana bergulir) menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan (*net realizable value*) yaitu dengan mengurangkan perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir. Penyebab tidak tertagihnya dana bergulir antara lain seleksi calon penerima dana bergulir kurang dilakukan dengan baik.

Tidak terdapat Saldo akhir *Net Realizable Value* (NRV) per 31 Desember 2024 dengan rincian perhitungan selama tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 5.157 Rekapitulasi Dana Bergulir Per 31 Desember 2024

SKPD	Saldo Awal	Penyaluran			Pengembalian Dana Bergulir	Saldo Akhir	Penyisihan Diragukan Tertagih	Saldo Akhir NRV
		Pengguliran	APBD Tahun Berjalan	Total				
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6	7 = 2+5-6	8	9 = 7+8
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	18.298.947.576,00	0,00	0,00	0,00	100.883.708,00	18.198.063.868,00	(18.198.063.868,00)	0,00
Dinas Kelauatan dan Perikanan	15.953.332.709,52	0,00	0,00	0,00	0,00	15.953.332.709,52	(15.953.332.709,52)	0,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	382.288.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.288.894,00	(382.288.894,00)	0,00
JUMLAH	34.634.569.179,52	0,00	0,00	0,00	100.883.708,00	34.533.685.471,52	(34.533.685.471,52)	0,00

5.3.1.2.2. Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	138.205.300.338,00	144.684.048.818,00

Merupakan investasi berupa penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada perusahaan-perusahaan daerah sebagai berikut:

Tabel 5.158 Rekapitulasi Investasi Jangka Panjang Permanen Per 31 Desember 2024

NO	URAIAN	SALDO TAHUN 2024
1	Saldo Awal Investasi pada PT. Pembangunan Kepri	2.496.454.306,00
	Penambahan	
	- Laba Tahun 2024 (Un-Audited)	34.093.914,00
	- Koreksi Saldo awal Ekuitas	
	Saldo Akhir Investasi pada PT. Pembangunan Kepri	2.530.548.220,00
2	Saldo Awal Investasi pada PDAM Tirta Kepri	92.580.490.406,00
	Pengurangan	
	- Koreksi Saldo awal Ekuitas	73.850.257,00
	- Rugi tahun 2024 (Un-Audited)	(3.122.555.359,00)
	Penambahan	
	- Penyertaan Modal	
	- Koreksi Laba ditahan	(637.694.147,00)
	Saldo Akhir Investasi pada PDAM Tirta Kepri	88.894.091.157,00
3	Bank Riau Kepri	12.000.000.000,00
4	Saldo Awal Investasi pada PT. Pelabuhan Kepri	37.607.104.106,00
	Pengurangan	
	- Koreksi Saldo Awal Ekuitas	(1.306.412.907,00)
	- Koreksi (Rugi) Tahun Lalu	
	- Rugi tahun berjalan	(1.520.030.238,00)
	- Penyetoran Pend.	
	Saldo Akhir Investasi pada PT. Pelabuhan Kepri	34.780.660.961,00

NO	URAIAN	SALDO TAHUN 2024
	SALDO AKHIR PENYERTAAN MODAL	138.205.300.338,00

Metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah metode ekuitas pada PDAM Tirta Kepri dengan persentase kepemilikan sebesar 100% dan PT. Pembangunan Kepri dengan persentase kepemilikan sebesar 100% serta PT. Pelabuhan Kepri dengan persentase kepemilikan sebesar 99,95%.

Metode biaya digunakan untuk mencatat Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada Bank Riau Kepri dengan persentase kepemilikan sebesar Rp1%.

Nilai Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp138.205.300.338,00 merupakan nilai penyertaan modal kepada PT. Pembangunan Kepri sebesar Rp2.530.548.220,00 (metode ekuitas) sesuai dengan nilai kekayaan bersih/ekuitas per 31 Desember 2024 yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan Tahun 2024 (unaudited), PDAM Tirta Kepri sebesar Rp88.894.091.157,00 (metode ekuitas), PT. Pelabuhan Kepri sebesar Rp34.780.660.961,00 (metode ekuitas), serta Bank Riau Kepri Syariah sebesar Rp12.000.000.000,00 (metode biaya) sesuai dengan jumlah penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Kondisi keuangan PDAM Tirta Kepri mengalami kerugian tetapi menurun dibandingkan tahun sebelumnya berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi per 31 Desember 2024 unaudited dikarenakan meningkatnya pendapatan operasional sebesar Rp2.088.653.614,00 atau 106,48% di tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sedangkan kondisi keuangan PT. Pelabuhan Kepri juga mengalami kerugian tetapi menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang berdasarkan Laporan Keuangan PT. Pelabuhan Kepri per 31 Desember 2024 unaudited dikarenakan menurunnya beban sebesar Rp128.261.193,00 atau 102,64% di tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Adapun langkah-langkah kedepannya yang akan dilakukan untuk memperbaiki keuangan BUMD Provinsi Kepulauan Riau antara lain:

1. Melakukan perbaikan kelembagaan BUMD.
2. Melakukan pembinaan dan meningkatkan pengawasan BUMD secara rutin dan berkala dalam rangka upaya peningkatkan kinerja BUMD.
3. Melakukan inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi.
4. Melakukan diversifikasi usaha guna menghasilkan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat yang masih berkaitan dengan usaha inti BUMD.
5. Optimalisasi Sumber Daya dan Potensi Daerah.

5.3.1.3. Aset Tetap

Aset Tetap merupakan Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, berupa :

- a. Tanah
- b. Peralatan dan Mesin
- c. Gedung dan Bangunan
- d. Jalan,Irigasi dan Jaringan
- e. Aset Tetap Lainnya dan
 - f. Konstruksi dalam Pengerjaan

Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang

dimaksudkan. Biaya perolehan, di luar harga beli aset, dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan *capitalization threshold*. Batasan ini ditetapkan pada kebijakan mengenai kapitalisasi aset tetap. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan/atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.

Perolehan setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan (*carrying amount*). Pengeluaran lainnya yang timbul setelah perolehan awal (selain pengeluaran yang memberi nilai manfaat tersebut) diakui sebagai beban pengeluaran (*expenses*) pada periode dimana beban pengeluaran tersebut terjadi.

Pengeluaran setelah perolehan awal Aset Tetap, yang oleh karena bentuknya, atau lokasi penggunaannya memiliki risiko penurunan nilai dan/atau kuantitas, yang mengakibatkan ketidakpastian perolehan potensi ekonomi di masa depan, maka tidak dikapitalisasi melainkan diperlakukan sebagai biaya pemeliharaan (*expense*). Pengeluaran yang dikapitalisasi berupa penggantian utama merupakan pembaharuan bagian dari aset tetap atau nilai pemeliharaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.159 Kapitalisasi atas biaya pemeliharaan

No.	Aset Tetap	Nilai Pemeliharaan
1	Peralatan dan Mesin	50% dari nilai perolehan
2	Gedung dan Bangunan	10% dari nilai perolehan
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	10% dari nilai perolehan

Pada saat ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 46 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.

Aset tetap sebesar Rp6.039.363.970.380,51 per 31 Desember 2024 merupakan nilai perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Nilai aset tetap per 31 Desember 2024 termasuk Aset Tetap yang berasal dari pemerintah kabupaten/kota sehubungan dengan pengalihan kewenangan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan juga termasuk aset tetap yang bersumber dari pengelolaan dana BOS dan dana SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) pada SMA/SMK/SLB Negeri, yang bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), serta yang bersumber dari SMK Pusat Keunggulan (SMKPK), dengan rincian perjenis sebagai berikut:

Tabel 5.160 Rekapitulasi Aset Tetap Per 31 Desember 2024

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Tanah	1.279.193.541.736,32	1.242.532.489.774,32
Peralatan dan Mesin	2.115.169.411.496,30	2.023.580.374.784,91
Gedung dan Bangunan	2.878.738.414.770,81	2.704.114.608.690,98
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	4.011.564.533.138,15	3.966.635.637.433,47
Aset Tetap Lainnya	279.218.737.302,70	260.235.633.980,32
Konstruksi Dalam Pengerjaan	25.295.808.664,94	44.722.208.283,85
Akumulasi Penyusutan	(4.549.816.476.728,71)	(4.176.976.245.412,62)
SALDO AKHIR ASET TETAP	6.039.363.970.380,51	6.064.844.707.535,23

5.3.1.3.1. Tanah

Tanah	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	1.279.193.541.736,32	1.242.532.489.774,32

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Batasan minimal kapitalisasi aset tetap ditetapkan berdasarkan Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap yang dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya yang berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian, peralatan untuk proses belajar mengajar atau dengan kata lain setiap penambahan Rp1,00 (satu rupiah) terhadap aset tetap sebagaimana tersebut di atas akan dilakukan kapitalisasi. Komponen biaya perolehan aset tetap tanah meliputi harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan lain-lain. Biaya Pengeluaran untuk pengadaan tanah yang dapat dikapitalisasi meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan pengurangan.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat saldo awal aset tetap Tanah per 1 Januari 2024 sebesar Rp1.242.532.489.774,32. Mutasi aset tetap Tanah selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.161 Mutasi Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2024

ASET TETAP TANAH			
I	Saldo Awal ASET TETAP TANAH, 1 Januari 2024		1.242.532.489.774,32
II	Penambahan :		
	1	Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2024	920.100.000,00
	2	Penerimaan Hibah Aset Tetap Tanah	45.937.149.582,00
	3	Koreksi Pencatatan Tanah Hasil Sertifikasi Tanah Pemerintah Yang Belum Bersertipikat	453.343.130,00
	4	Koreksi Kurang Catat Aset Tetap Tanah	282.107.250,00
		Total Penambahan	47.592.699.962,00
III	Pengurangan :		
	1	Penghapusan Hibah Aset Tetap Tanah	8.047.704.000,00
	2	Koreksi Double catat Aset Tetap Tanah	2.883.944.000,00
		Total Pengurangan	10.931.648.000,00
IV	Saldo Akhir ASET TETAP TANAH, 31 Desember 2024		1.279.193.541.736,32

Berdasarkan tabel mutasi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- A. Penambahan Aset Tetap Tanah pada Tahun 2024 sebesar Rp47.592.699.962,00 berasal dari:
- 5.3.1.3.1.1.1. Belanja Modal Tanah tahun 2024 sebesar Rp920.100.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan.
- 5.3.1.3.1.1.2. Penerimaan Hibah Aset Tetap Tanah sebesar Rp45.937.149.582,00 antara lain:
- a. Hibah masuk Aset Tetap Tanah dari Pemerintah Kabupaten Karimun berdasarkan BASTH Nomor 012/ BPKAD-05/VIII/ BASTH/2022 Tanggal 24 Agustus 2022 pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp266.254.082,00.
- b. Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bintan berdasarkan BAST Nomor B/897/032/IX/2024 Tanggal 13 september 2024 pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.059.261.600,00

- c. Hibah Masuk Aset Tetap Tanah Pengalihan Personil, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) dari Pemko Batam dengan Naskah Hibah Nomor 023/900.1.4.3/I/2024 pada Dinas Pendidikan sebesar Rp44.611.633.900,00
 - 5.3.1.3.1.1.3. Koreksi Pencatatan Tanah Hasil Sertifikasi Tanah Pemerintah Yang Belum Bersertifikat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp453.343.130,00 antara lain:
 - a. Pencatatan atas Aset Tetap Tanah SLBN Kijang berdasarkan Sertipikat Hak Pakai NIB. 32.01.000002282.0 sebesar Rp282.922.880,00
 - b. Pencatatan atas Aset Tetap Tanah SMAN 1 Singkep Selatan berdasarkan Sertipikat Hak Pakai NIB. 32.06.000000160.0 sebesar Rp117.903.500,00
 - c. Pencatatan atas Aset Tetap Tanah SMAN 1 Singkep Pesisir berdasarkan Sertipikat Hak Pakai NIB. 32.06.000000167.0 sebesar Rp52.516.750,00
 - 5.3.1.3.1.1.4. Koreksi Kurang Catat Aset Tetap Tanah sebesar Rp282.107.250,00 antara lain:
 - 1. Koreksi Kurang Catat Aset Tetap Tanah Hasil Sertifikasi Tanah Pemerintah Yang Belum Bersertifikat pada SMKN 1 Kundur Utara sebesar Rp32.303.250,00
 - 2. Koreksi Kurang Catat Aset Tetap Tanah Hasil Sertifikasi Tanah Pemerintah Yang Belum Bersertifikat pada SMKN 2 Bunguran Timur sebesar Rp249.804.000,00
- B. Pengurangan Aset Tetap Tanah pada Tahun 2024 sebesar Rp10.931.648.000,00 berasal dari:
 - 1. Penghapusan atas Hibah Aset Tanah pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah sebesar Rp8.047.704.000,00 antara lain:
 - a. Koreksi Tanah atas Penghapusan BMD Hibah ke Korem 033 WP tahun 2021 senilai Rp1.548.000.000,00 berdasarkan BAST Nomor 120/528.6/BPKAD/SET/2020 tanggal 1 April 2020
 - 3. Penghapusan Tanah yang dihibahkan kepada Korem 033 WP senilai Rp6.424.704.000,00 berdasarkan BAST Nomor B/032/688.3/BKAD-SET/2024 dan Nomor 01/BAST/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024
 - 4. Penghapusan Tanah yang dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bintan senilai Rp75.000.000,00 berdasarkan BAST Nomor 120/1263/BPKAD/SET tanggal 26 Juli 2019
 - 2. Koreksi pencatatan aset tetap tanah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp2.883.944.000,00 dikarenakan terdapat pencatatan ganda aset tanah di Pulau Penyengat Tanjungpinang dengan Nomor Hak Sertipikat 32.05.02.02.4.000.11 dengan luas 64.489 m2. Tanah tersebut telah tercatat juga di Dinas Pariwisata dengan nomor sertipikat dan luasan yang sama dengan tahun perolehan 2009 senilai Rp2.579.000.000,00.
- C. Saldo akhir Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.279.193.541.736,32.

Adapun rincian mutasi aset tetap tanah per OPD dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 5.162 Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah per OPD

PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	PENAMBAHAN DARI BELANJA MODAL (LRA)	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6 = 2 + 3 + 4 - 5
Dinas Pendidikan	166.898.776.224,70	0,00	45.347.084.280,00	0,00	212.245.860.504,70
Dinas Kesehatan	540.274.100,00	0,00	0,00	0,00	540.274.100,00
Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	758.943.654.627,97	920.100.000,00	0,00	0,00	759.863.754.627,97
Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	PENAMBAHAN DARI BELANJA MODAL (LRA)	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6 = 2 + 3 + 4 - 5
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.915.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.915.000.000,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	1.753.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.753.500.000,00
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	2.774.880.000,00	0,00	0,00	0,00	2.774.880.000,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.309.166.300,00	0,00	0,00	0,00	1.309.166.300,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	50.214.916.983,00	0,00	0,00	0,00	50.214.916.983,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	968.088.400,00	0,00	1.059.261.600,00	0,00	2.027.350.000,00
Dinas Pariwisata	2.579.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.579.000.000,00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Kesejahteraan Rakyat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Perekonomian dan Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Administrasi Pimpinan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	209.338.936.648,65	0,00	0,00	10.931.648.000,00	198.407.288.648,65
Badan Pendapatan Daerah	8.696.296.490,00	0,00	266.254.082,00	0,00	8.962.550.572,00
Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Penghubung Daerah	29.600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	29.600.000.000,00

PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	PENAMBAHAN DARI BELANJA MODAL (LRA)	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6 = 2 + 3 + 4 - 5
Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	1.242.532.489.774,32	920.100.000,00	46.672.599.962,00	10.931.648.000,00	1.279.193.541.736,32

Dari Saldo Akhir Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024 Rp1.279.193.541.736,32 terdapat Aset Tetap Tanah sebanyak 842 persil dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 5.163 Rekapitulasi Rincian Aset Tetap Tanah

No.	Klasifikasi	Dokumen Kepemilikan	Jumlah Barang	Nilai Perolehan (Rp)
1	Bidang Tanah	Bersertipikat an. Provinsi Kepulauan Riau	544	848.768.590.238,03
		Bersertipikat an. Pihak Lain	48	37.221.025.200,00
		Belum bersertipikat	241	391.222.740.905,29
2	Bukan Bidang Tanah	Bersertipikat an. Provinsi Kepulauan Riau	9	1.981.185.393,00
		Jumlah Total	842	1.279.193.541.736,32

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 9 persil yang bukan merupakan bidang tanah sebesar Rp1.981.185.393,00. Selanjutnya akan dilakukan koreksi dan kapitalisasi atas aset tetap tanah tersebut ke dalam aset induk. Rincian Aset Tetap Tanah tersebut disajikan pada **Lampiran 6**.

D. Permasalahan Aset Tetap Tanah Aset Tanah eks PT Antam

Pada tahun 2006 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menerima hibah berupa aset tanah Penarik I dengan luas ± 22,9464 Ha dari Pemerintah Kabupaten Bintan berdasarkan BAST Nomor 13/BA/ADM-PEM/VI/2006 tanggal 6 Juni 2006.

Tabel 5.164 Bidang Tanah Penarik II

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Kode Barang	Register	Luas (Ha)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Asal Usul	Keterangan
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.001.004.001	000373	48,7169	2006	Penarik II Senggarang Tanjungpinang	Hibah	1 Hibah dari Bintan Tahun 2006 berdasarkan BA Nomor 13/BA/ADM-PEM/VI/2006
				(Nilai perolehan awal 60,2822)				2 Sudah dihibahkan kepada instansi Vertikal

Pada tahun 2010 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan hibah tanah di wilayah Penarik II kepada Kejaksaan Tinggi seluas ± 4 Ha berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 0313.a/KDhKepri.011/11.10 tanggal 18 November 2010 tentang Serah Terima Lahan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau untuk Pembangunan Kantor dan Rumah Dinas Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau di Senggarang Tanjungpinang. Kemudian pada Tahun 2022 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga menghibahkan tanah di Penarik II kepada Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 3 Ha berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor B/032/2303/BKAD-SET/2022, Nomor B-1023/L.10/Cum.1/09/2022 tanggal 26 September 2022 senilai Rp1.080.000.000,00 (satu miliar delapan puluh juta rupiah).

Pada Tahun 2011 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan hibah tanah di wilayah Penarik II kepada Kementerian Sosial seluas ± 3 Ha berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 064.a/Kdh Kepri.030/2.11 tanggal 24 Februari 2011 tentang Serah Terima Hibah Tanah dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada Kementerian Sosial RI untuk Pembangunan Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) di Kota Tanjungpinang.

Pada tahun 2012 terdapat Akta Hibah Nomor 25/2012 tanggal 22 Maret 2012 antara Gubernur Kepulauan Riau selaku pemberi hibah dan Menteri Sosial Republik Indonesia selaku penerima hibah yang menyatakan tanah yang menjadi objek serah terima berdasarkan hasil ukur atau luas tanah yang dapat disertifikatkan adalah seluas 2,5 Ha (dua koma lima hektar), lalu terdapat Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 463 Tahun 2013 tentang Kehutanan di Indonesia khususnya Provinsi Kepulauan Riau belum bisa dilakukan sertifikasi sehingga pada tahun 2015 dibuat Berita Acara Pembatalan Hibah terhadap sisa tanah seluas 0,5 Ha (nol koma lima hektar) berdasarkan Berita Acara Nomor 591/325.4/SET tanggal 30 April 2015 tentang Pembatalan Hibah Sisa Tanah Lahan Pembangunan Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada Kementerian Sosial RI.

Pada Tahun 2019 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan hibah tanah di wilayah Penarik II kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia seluas 12.476 m² (dua belas ribu empat ratus tujuh puluh enam meter persegi) dengan nilai Rp449.136.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 120/1531/BPKAD/SET tanggal 2 September 2019.

Pada Tahun 2019 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan hibah tanah di wilayah Penarik II kepada Kementerian Agama Republik Indonesia seluas 8.177 m² (delapan ribu seratus tujuh puluh tujuh meter persegi) dengan nilai Rp294.371.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) nomor 120/1532/BPKAD/SET tanggal 2 September 2019.

Pada Tahun 2020 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan hibah tanah di wilayah Penarik I kepada Komando Resor Militer 033 / WIRA PRATAMA seluas 43.000 m² (empat puluh tiga ribu meter persegi) dengan nilai Rp1.548.000.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh delapan juta rupiah) berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 120/528.6/BPKAD-SET/2020 tanggal 1 April 2020.

Kemudian pada tahun 2022 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan hibah tanah di wilayah Penarik I kepada Komando Resor Militer 033 / WIRA PRATAMA seluas 8.000 m² (delapan ribu meter persegi) dengan nilai Rp288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor B/032/2304/BKAD-SET/2022 tanggal 26 September 2022.

Selanjutnya untuk tindaklanjut terhadap wilayah penarik I dengan sisa lahan 17,8464 Ha telah dihibahkan pada Tahun 2024 kepada Komando Resor Militer 033/WIRA PRATAMA berdasarkan BAST Nomor B/032/688.3/BKAD-SET/2024 dan Nomor 01/BAST/VIII/2024.

Terhadap wilayah Penarik II dengan lahan 48,7169 Ha akan diselesaikan bersama dengan stakeholder terkait yang terdiri dari:

- a. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
- b. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;

- c. Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau;
- d. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau;
- e. Pemerintah Kota Tanjungpinang;
- f. Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang
- g. Pemerintah Kabupaten Bintan;
- h. Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan;
- i. PT. Aneka Tambang Tbk.

Tugas utama dari Tim tersebut diatas adalah untuk menyelesaikan permasalahan atas lahan yang dikuasai oleh pihak lain sehingga status terhadap lahan tersebut menjadi jelas.

5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	2.115.169.411.496,30	2.023.580.374.784,91

Peralatan dan Mesin mencakup mesin, kendaraan bermotor, alat elektronik, seluruh inventaris kantor, peralatan lainnya yang nilainya signifikan serta masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam kondisi siap pakai. Biaya perolehan, di luar harga beli aset, dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan *capitalization threshold*. Batasan ini ditetapkan pada kebijakan mengenai kapitalisasi aset tetap. Batasan jumlah pengeluaran yang dapat dikapitalisasi (*capitalization thresholds*) ditentukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan operasionalnya, namun harus diterapkan secara konsisten. Komponen Biaya Perolehan aset tetap peralatan dan mesin meliputi pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat saldo awal aset tetap Peralatan dan Mesin per 1 Januari 2024 sebesar Rp2.023.580.374.784,91 dengan mutasi aset tetap Peralatan dan Mesin selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.165 Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2024

ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN				
I	Saldo Awal ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN, 1 Januari 2024			2.023.580.374.784,91
II	Penambahan :			
1	Perolehan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024		115.508.155.838,84	
2	Mutasi Tambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin antar OPD		13.288.141.425,70	
3	Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan		4.282.597.695,35	
4	Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan		1.822.590.621,00	
5	Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Aset Tetap Lainnya		1.702.515.000,00	
6	Kapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Beban Barang dan Jasa		1.714.363.072,00	
7	Penerimaan Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Instansi Lainnya		13.859.954.080,43	
8	Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Utang Belanja		9.324.819.060,00	
9	Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal BLUD		985.370.500,00	
10	Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang bersumber dari Sumbangan Pihak ke-3 atas Dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)		6.122.215.879,99	
11	Koreksi Reklasifikasi aset tetap lainnya kedalam Aset Tetap Peralatan dan Mesin		29.550.000,00	

ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN			
	12	Koreksi Mutasi Tambah Aset tetap Peralatan dan Mesin yang bersumber dari pendapatan Hibah SMK Pusat Keunggulan	1.858.313.215,00
	13	Koreksi BPK atas kurang catat Aset Tetap Peralatan dan Mesin	962.380.000,00
	14	Koreksi atas salah pilih akun rekening pengakuan Utang	642.000.000,00
	Total Penambahan :		172.102.966.388,31
III	Pengurangan :		
	1	Mutasi Kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin antar OPD	13.288.141.425,70
	2	Reklasifikasi Keluar Aset Tetap Peralatan dan Mesin kedalam Beban Barang dan Jasa	2.491.137.647,00
	3	Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Ekstrakomptabel	11.862.250.992,50
	4	Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	519.005.000,00
	5	Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan	161.659.000,00
	6	Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Lainnya	52.500.000,00
	7	Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya	17.429.386.206,00
	8	Pelunasan Utang Belanja TA 2023	959.430.205,00
	9	Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke dalam Aset lainnya dikarenakan Rusak Berat berdasarkan hasil Pemeriksaan BPK	32.576.536.076,00
	10	Koreksi lebih catat atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin	612.790.000,00
	11	Koreksi BPK atas Kurang catat Mutasi Keluar Aset Tetap Peralatan dan Mesin antar OPD	156.200.000,00
	12	Koreksi BPK atas Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin kedalam Aset Ekstrakomptable	280.567.395,00
	13	Koreksi BPK atas Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang tidak diketemukan kedalam Aset lain-lain	66.846.000,00
	14	Koreksi BPK atas kelebihan pembayaran atas Paket Pekerjaan Belanja Modal Aset Tetap Peralatan dan Mesin	57.479.729,72
	Total Pengurangan		80.513.929.676,92
IV	Saldo Akhir ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN, 31 Desember 2024		2.115.169.411.496,30

Berdasarkan tabel mutasi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- A. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp172.102.966.388,31 berasal dari:
- 5.3.1.3.2.1.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2024 sebesar Rp115.508.155.838,84 antara lain:
- a. Badan Kepegawaian dan Korpri sebesar Rp67.679.000,00

b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp244.629.000,00

c. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp837.922.058,00

d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp61.090.000,00

e. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp3.596.242.110,00

f. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebesar Rp343.330.000,00

g. Badan Penghubung Daerah sebesar Rp2.492.258.000,00

h. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp521.297.800,00

i. Biro Administrasi Pimpinan sebesar Rp161.375.400,00

j. Biro Hukum sebesar Rp98.416.000,00

k. Biro Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp231.573.000,00

l. Biro Organisasi sebesar Rp278.050.000,00

m. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebesar Rp129.365.000,00

- n. Biro Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp142.335.200,00
 - o. Biro Umum sebesar Rp11.070.288.100,00
 - p. Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.268.389.500,00
 - q. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp185.975.000,00
 - r. Dinas Kebudayaan sebesar Rp767.145.000,00
 - s. Dinas Kesehatan sebesar Rp5.438.816.628,00
 - t. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan sebesar Rp2.054.446.600,00
 - u. Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp930.415.000,00
 - v. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp93.648.285,00
 - w. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp2.055.400.000,00
 - x. Dinas Pariwisata sebesar Rp28.500.000,00
 - y. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp755.950.000,00
 - z. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp176.413.953,00
 - ā. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebesar Rp5.550.000,00
 - bb. Dinas Pendidikan sebesar Rp66.266.185.831,84
 - cc. Dinas Perhubungan sebesar Rp1.825.832.844,00
 - dd. Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp56.950.000,00
 - bb. Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan sebesar Rp96.080.000,00
 - cc. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp557.269.000,00
 - gg. Dinas Sosial sebesar Rp704.370.000,00
 - hh. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi sebesar Rp18.490.000,00
 - ii. Inspektorat sebesar Rp1.613.974.200,00
 - jj. Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp3.304.523.500,00
 - kk. Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib sebesar Rp6.687.428.829,00
 - ii. Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran sebesar Rp135.051.000,00
 - mm. Sekretariat DPRD sebesar Rp203.500.000,00
 - nn. Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebesar Rp2.000.000,00
- 5.3.1.3.2.1.2. Mutasi Masuk antar OPD Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp13.288.141.425,70 antara lain:
- a. Mutasi masuk BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Biro Umum Sekretariat Daerah berdasarkan BAST Nomor 06/BA-MUTASI/VI/2024 Tanggal 25 Juni 2023 pada Badan Penghubung Daerah sebesar Rp2.375.300.000,00
 - b. Mutasi masuk BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Biro Umum Sekretariat Daerah berdasarkan BAST Nomor 06/BA-MUTASI /VIII/2024 Tanggal 28 Agustus 2024 pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebesar Rp150.450.000,00
 - c. Mutasi masuk BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan BAST Nomor 04/BA-MUTASI/III/2024 Tanggal 25 Maret 2024 pada Biro Umum sebesar Rp297.225.088,00
 - d. Mutasi masuk BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan berdasarkan BAST Nomor 33/BAST/PENGALIHAN-ASET/PUPP.1/XII/2024 Tanggal 16 Desember 2024 pada Dinas Kebudayaan sebesar Rp3.980.465.387,70,00
 - e. Pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.504.100.950,00 antara lain:

- 1) Mutasi masuk BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin (Kendaraan Dinas Inova) dari Badan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan BAST Nomor 032/760/BKAD/BA/2024 Tanggal 18 Desember 2024 pada SMKN Kundur Utara sebesar Rp211.070.200,00
- 2) Mutasi Masuk BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Biro Umum berdasarkan BAST Nomor 05/BA MUTASI/IV/2023 Tanggal 9 Oktober 2023 pada SMKN 8 Batam sebesar Rp1.293.030.750,00
- f. Mutasi masuk BMD Aset Tetap Peralatan Mesin - Mobil dari Badan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan BAST Nomor 024.1/73/BKAD/BA/2024 Tanggal 15 Februari 2024 pada Dinas Sosial sebesar Rp569.000.000,00
- g. Pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp4.099.950.000,00 antara lain:
 - 1) Mutasi Masuk BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Dinas Kesehatan berdasarkan BAST Nomor 270/ BAST-DINKES/ IV/ 2024 Tanggal 2 April 2024 sebesar Rp769.750.000,00
 - 2) Mutasi Masuk BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Dinas Kesehatan berdasarkan BAST Nomor 431/BAST-DINKES/VI/2024 Tanggal 5 Juni 2024 sebesar Rp3.330.200.000,00
- h. Pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib sebesar Rp311.650.000,00 antara lain:
 - 1) Mutasi Masuk BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berdasarkan BAST Nomor 01/BAST-BPPP/2024 Tanggal 8 Januari 2024 sebesar Rp17.850.000,00
 - 2) Mutasi Masuk BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Dinas Kesehatan berdasarkan BAST Nomor 254/BA-HB/PERLK/III/2024 Tanggal 26 Maret 2024 sebesar Rp293.800.000,00
- 5.3.1.3.2.1.3. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp4.282.597.695,35 antara lain:
 - a. Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin (Papan Nama Instansi) pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp124.800.000,00
 - b. Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin (Peralatan Gedung LAM) pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp3.980.465.387,70
 - c. Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin (Mebel Interior BTKP) pada Dinas Pendidikan sebesar Rp177.332.307,65
4. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp1.822.590.621,00 antara lain:
 - a. Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp1.443.851.300,00 antara lain:
 - 1) Reklasifikasi Hibah BMD dari Pemerintah Kabupaten Bintang berupa Genset dari Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp279.565.000,00
 - 2) Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp1.164.286.300,00
 - b. Reklasifikasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan, Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp378.739.321,00

5. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.702.515.000,00 antara lain:
 - a. Pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.343.715.000,00 antara lain:
 - 1) Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya (Alat *Marching Band*) ke Aset Tetap Peralatan Mesin pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.299.940.000,00
 - 2) Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin (Alat Musik SMK 3 Negeri Tanjungpinang) pada Dinas Pendidikan Rp43.775.000,00
 - b. Reklasifikasi dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Lukisan dan Ukiran ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Sekretariat DPRD sebesar Rp358.800.000,00
6. Kapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Beban Barang dan Jasa sebesar Rp1.714.363.072,00 antara lain:
 - a. Kapitalisasi dari Belanja Bahan Bangunan dan Konstruksi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin (Mebel dan Penyimpanan Kantor) pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp222.479.000,00
 - b. Kapitalisasi dari Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Personal Computer* (Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi) ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Badan Penghubung Daerah sebesar Rp4.400.000,00
 - c. Pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp209.047.737,00 antara lain:
 - 1) Kapitalisasi Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp41.049.547,00
 - 2) Kapitalisasi dari Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya (Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi) ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.800.000,00
 - 3) Kapitalisasi dari Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor sebesar ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin Rp164.198.190,00
 - d. Kapitalisasi dari Bahan Bangunan dan Konstruksi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Biro Hukum sebesar Rp60.200.000,00
 - e. Kapitalisasi dari Persediaan Bahan Untuk Kegiatan kantor lainnya ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Biro Umum sebesar Rp228.064.600,00
 - f. Pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp5.710.000,00 antara lain:
 - 1) Kapitalisasi dari Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp4.450.000,00
 - 2) Kapitalisasi dari Belanja Suku Cadang Alat Bengkel ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.260.000,00
 - g. Kapitalisasi dari Belanja Bahan Bangunan dan Konstruksi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Pariwisata sebesar Rp60.450.000,00
 - h. Kapitalisasi dari Belanja Bahan Bangunan dan Konstruksi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp199.364.335,00
 - i. Kapitalisasi dari Belanja Bahan Bangunan dan Konstruksi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp81.179.000,00
 - j. Kapitalisasi dari Belanja Bahan/alat Kegiatan Kantor-Perabot Kantor ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran sebesar Rp103.125.000,00

- k. Pada Dinas Pendidikan sebesar Rp435.670.400,00 antara lain:
 - 1) Kapitalisasi Bahan bangunan dan konstruksi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin (Teralis jendela dan Teralis Pintu Kantor) sebesar Rp222.968.200,00
 - 2) Kapitalisasi Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp190.813.000,00
 - 3) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultan Perencanaan - Jasa Arsitektur Lainnya ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin (interior BTKP) sebesar Rp11.954.700,00
 - 4) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultan Pengawasan - Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin (interior BTKP) sebesar Rp9.934.500,00
- l. Kapitalisasi Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp104.673.000,00
7. Penerimaan Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Instansi Lainnya sebesar Rp13.859.954.080,43 antara lain:
 - a. Mutasi Tambah Hibah Aset Peralatan dan Mesin dari Kementerian Perdagangan RI berdasarkan BAST Nomor 355/M-DAG/BAST/10/2019 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp344.769.700,00
 - b. Pada Dinas Pendidikan sebesar Rp13.515.184.380,43 antara lain:
 - 1) Hibah Masuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin SMKN 6 Batam berdasarkan Nomor 3/HR/CT/I/2024 dari PT. Citra Tubindo (Rp628.000.000,00) dan Nomor 052/EOB/HR-GA-RT/IX-2024 PT. Ecogreen (Rp156.500.000,00) sebesar Rp784.500.000,00
 - 2) Hibah Masuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pengalihan Personil, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) dari Pemerintah Kota Batam dengan Naskah Hibah Nomor 023/900.1.4.3/I/2024 sebesar Rp12.730.684.380,43
8. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Utang Belanja sebesar Rp9.324.819.060,00 antara lain:
 - a. Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp11.700.000,00 antara lain:
 - 1) Utang Belanja modal alat kantor lainnya (mesin potong rumput) sebesar Rp1.800.000,00
 - 2) Utang Belanja modal alat kantor lainnya (mesin Penggerak) sebesar Rp7.000.000,00
 - 3) Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya sebesar Rp2.900.000,00
 - b. Pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp681.690.000,00 antara lain:
 - 1) Utang Belanja Modal *Personal Computer* sebesar Rp25.500.000,00
 - 2) Utang Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat sebesar Rp32.575.000,00
 - 3) Utang Belanja Modal Mebel sebesar Rp23.950.000,00
 - 4) Utang Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat sebesar Rp28.130.000,00
 - 5) Utang Belanja Modal Peralatan *Personal Computer* sebesar Rp34.200.000,00
 - 6) Utang Belanja Modal Mebel sebesar Rp17.255.000,00
 - 7) Utang Belanja Modal Alat Pendingin sebesar Rp200.250.000,00
 - 8) Utang Belanja Modal Alat Pendingin sebesar Rp164.790.000,00
 - 9) Utang Belanja Modal Peralatan Mini Komputer sebesar Rp35.790.000,00
 - 10) Utang Belanja Modal Peralatan Jaringan sebesar Rp106.500.000,00
 - 11) Utang Belanja Modal *Personal Computer* sebesar Rp12.750.000,00
 - c. Utang Belanja Modal *Personal Computer* pada Biro Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp34.410.000,00

- d. Utang Belanja Modal Peralatan Studio Audio pada Biro Administrasi Pimpinan sebesar Rp12.045.000,00
- e. Utang Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang pada Biro Umum sebesar Rp1.113.100.000,00
- f. Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp77.285.000,00 antara lain:
 - 1) Utang Belanja Modal *Personal Computer* sebesar Rp15.400.000,00
 - 2) Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*) sebesar Rp36.575.000,00
 - 3) Utang Belanja Modal Alat Penyimpan sebesar Rp7.740.000,00
 - 4) Utang Belanja Modal Alat Pendingin sebesar Rp17.570.000,00
- g. Pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp80.450.000,00 antara lain:
 - 1) Utang Belanja Modal Komputer Unit Lainnya sebesar Rp11.750.000,00
 - 2) Utang Belanja Modal Komputer Unit Lainnya sebesar Rp28.870.000,00
 - 3) Utang Belanja Modal *Personal Computer* sebesar Rp25.260.000,00
 - 4) Utang Belanja Modal peralatan *Personal Computer* sebesar Rp7.000.000,00
 - 5) Utang Belanja Modal Alat Produksi Perikanan sebesar Rp7.570.000,00
- h. Utang Belanja Modal Alat Pendingin pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp16.430.000,00
- i. Pada Dinas Kesehatan sebesar Rp77.799.500,00 antara lain:
 - 1) Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*) sebesar Rp9.000.000,00
 - 2) Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*) sebesar Rp12.369.500,00
 - 3) Utang Belanja Modal peralatan *Personal Computer* sebesar Rp3.750.000,00
 - 4) Utang Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film sebesar Rp16.480.000,00
 - 5) Utang Belanja Modal *Personal Computer* sebesar Rp36.200.000,00
- j. Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan sebesar Rp613.025.000,00 antara lain:
 - 1) Utang Belanja Modal Alat Kantor Lainnya sebesar Rp16.825.000,00
 - 2) Utang Belanja Modal *Personal Computer* sebesar Rp84.300.000,00
 - 3) Utang Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor sebesar Rp511.900.000,00
- k. Pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp79.650.000,00 antara lain:
 - 1) Utang Belanja Modal Komputer Unit Lainnya sebesar Rp4.090.000,00
 - 2) Utang Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film sebesar Rp38.750.000,00
- l. Utang Belanja Modal Alat Pendingin AC *Split* 2 PK pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp20.800.000,00
- m. Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp156.700.000,00 antara lain:
 - 1) Utang Belanja Modal Alat Pendingin (AC Panasonic 2 PK CS-PN18WKJ) sebesar Rp9.000.000,00
 - 2) Utang Belanja Modal *Personal Computer* Printer Epson L15150 *Ecotank* dan Printer Epson L3210 *Ecotank* sebesar Rp18.000.000,00
 - 3) Utang Belanja Modal Peralatan Mini *Computer* sebesar Rp15.350.000,00
 - 4) Utang Belanja Modal *Personal Computer* sebesar Rp30.750.000,00
 - 5) Utang Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film (*Drone*) sebesar Rp56.000.000,00
 - 6) Utang Belanja Modal Televisi, Belanja Modal AC Split, Belanja Modal Mesin Potong Rumput, Belanja Modal Dispenser sebesar Rp27.600.000,00

- n. Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp14.576.000,00
 - 1) Utang Belanja Modal *Personal Computer* sebesar Rp11.280.000,00
 - 2) Utang Belanja Modal Peralatan *Personal Computer* sebesar Rp3.296.000,00
- o. Utang Belanja Pembayaran Belanja Modal Alat Pendingin pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebesar Rp22.140.000,00
- p. Pada Dinas Pendidikan sebesar Rp919.904.500,00 antara lain:
 - 1) Utang Belanja Modal Kursi kerja sebesar Rp15.840.000,00
 - 2) Utang Belanja Modal alat rumah tangga lainnya (*home use*) sebesar Rp8.280.000,00
 - 3) Utang Belanja Modal alat kantor lain nya sebesar Rp14.480.000,00
 - 4) Utang Belanja Modal Alat pendingin sebesar Rp9.380.000,00
 - 5) Utang Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film sebesar Rp39.035.000,00
 - 6) Utang Belanja Modal *Personal Computer* sebesar Rp107.375.000,00
 - 7) Utang Belanja Modal Peralatan *Personal Computer* sebesar Rp8.760.000,00
 - 8) Utang Belanja Modal Peralatan *Personal Computer* sebesar Rp15.980.000,00
 - 9) Utang Belanja Modal Alat Pendingin sebesar Rp12.865.000,00
 - 10) Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*) sebesar Rp10.790.000,00
 - 11) Utang Belanja Modal *Personal Computer* sebesar Rp31.580.000,00
 - 12) Utang Belanja Modal Alat Pendingin sebesar Rp14.000.000,00
 - 13) Utang Belanja Modal *Personal Computer* sebesar Rp79.493.500,00
 - 14) Utang Belanja Modal Peralatan *Personal Computer* sebesar Rp6.600.000,00
 - 15) Utang Belanja Modal Komputer Unit Lainnya sebesar Rp17.161.000,00
 - 16) Utang Belanja Modal *Personal Computer* sebesar Rp14.250.000,00
 - 17) Utang Belanja Modal alat rumah tangga lainnya (*home use*) sebesar Rp24.980.000,00
 - 18) Utang Belanja Modal Peralatan Studio Audio sebesar Rp19.245.000,00
 - 19) Utang Belanja Peralatan Studio Video dan Film sebesar Rp80.085.000,00
 - 20) Utang Belanja Modal *Personal Computer* sebesar Rp222.480.000,00
 - 21) Utang Belanja Modal Peralatan *Personal Computer* sebesar Rp4.450.000,00
 - 22) Utang Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan sebesar Rp1.647.500,00
 - 23) Utang Belanja Modal Alat Kantor Lainnya sebesar Rp157.500,00
 - 24) Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp160.990.000,00 yang bersumber dari Dana SPP pada SMKN 5 BATAM antara lain Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*) sebesar Rp44.500.000,00, Utang Belanja Modal Alat Pendingin sebesar Rp93.600.000,00, Utang Belanja Modal Mebel sebesar Rp22.890.000,00
- q. Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp976.826.960,00 antara lain:
 - 1) Utang Belanja Modal Mebel-Kursi Rapat sebesar Rp75.600.000,00
 - 2) Utang Belanja Modal *Personal Computer*-Laptop dan *Tablet* sebesar Rp109.950.000,00
 - 3) Utang Belanja Modal Peralatan *Personal Computer*-Printer, Scanner dan Hardisk sebesar Rp48.020.000,00

- 4) Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*)-Televisi sebesar Rp45.400.000,00
 - 5) Utang Belanja Modal Kursi kerja Pejabat sebesar Rp103.940.000,00
 - 6) Utang Belanja Pekerjaan Interior Ruangan dan *Meubelair* sebesar Rp593.916.960,00
- r. Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi sebesar Rp277.685.000,00 antara lain:
- 1) Utang Belanja Modal Alat Pendingin sebesar Rp12.350.000,00
 - 2) Utang Belanja Modal *Personal Computer* sebesar Rp16.900.000,00
 - 3) Utang Belanja Modal Alat Pendingin sebesar Rp57.150.000,00
 - 4) Utang Belanja Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*) - Televisi - *Sound System* - (Belanja Televisi) sebesar Rp47.500.000,00
 - 5) Utang Belanja Modal *Personal Computer* - Belanja Komputer - Belanja Laptop (Belanja Modal *Personal Computer*) sebesar Rp56.150.000,00
 - 6) Utang Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan sebesar Rp15.900.000,00
 - 7) Utang Belanja Modal Mebel - Perabot Kantor - Belanja Mebel sebesar Rp71.735.000,00
- s. Pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp537.060.000,00 antara lain:
- 1) Utang Belanja Modal Alat Kedokteran Umum sebesar Rp450.000.000,00
 - 2) Utang Belanja Modal Peralatan *Personal Computer* sebesar Rp46.060.000,00
 - 3) Utang Belanja Belanja Modal Alat Kantor Lainnya sebesar Rp41.000.000,00
- t. Pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib sebesar Rp342.192.000,00 antara lain:
- 1) Utang Belanja Modal Alat Kedokteran Umum sebesar Rp39.900.000,00
 - 2) Utang Belanja Modal Alat Kedokteran Umum sebesar Rp67.900.000,00
 - 3) Utang Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya sebesar Rp68.498.000,00
 - 4) Utang Belanja Modal Alat Kantor Lainnya sebesar Rp22.000.000,00
 - 5) Utang Belanja Modal Peralatan *Personal Computer* sebesar Rp46.950.000,00
 - 6) Utang Belanja Modal *Personal Computer* sebesar Rp96.944.000,00
- u. Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran sebesar Rp336.100.100,00 antara lain:
- 1) Utang Belanja Modal Baju Anti Panas sebesar Rp46.350.000,00
 - 2) Utang Belanja Modal Pendingin Ruangan (AC) sebesar Rp7.000.000,00
 - 3) Utang Belanja Modal *Printer* sebesar Rp7.000.000,00
 - 4) Utang Belanja Modal Mesin Penghancur Kertas sebesar Rp10.800.000,00
 - 5) Utang Belanja Modal Personal Komputer sebesar Rp80.700.000,00
 - 6) Utang Belanja Modal Alat Pendingin Kulkas sebesar Rp4.118.100,00
 - 7) Utang Belanja Modal Pengadaan Mebel Sofa sebesar Rp10.000.000,00
 - 8) Utang Belanja Modal Meja Rapat *Custom* sebesar Rp97.000.000,00
 - 9) Utang Belanja Modal Meja Tennis sebesar Rp5.100.000,00
 - 10) Utang Belanja Modal *Drone* sebesar Rp19.700.000,00
 - 11) Utang Belanja Modal Mic Wireless sebesar Rp20.000.000,00
 - 12) Utang Belanja Modal Meja Kerja Pejabat sebesar Rp25.800.000,00
 - 13) Utang Belanja Modal Senter Kepala sebesar Rp2.532.000,00
- v. Pada Sekretariat DPRD sebesar Rp2.923.250.000,00 antara lain:
- 1) Utang Belanja Modal *Personal Computer* Laptop sebesar Rp111.000.000,00
 - 2) Utang Belanja Modal *Personal Computer* sebesar Rp96.800.000,00

- 3) Utang Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film Tele Kamera, Lampu Studio sebesar Rp129.100.000,00
 - 4) Utang Belanja Modal Peralatan Studio Audio *Microphone Clip On* sebesar Rp12.700.000,00
 - 5) Utang Belanja Modal Alat Pendingin sebesar Rp63.350.000,00
 - 6) Utang Belanja Modal Peralatan Studio Audio *Microphone* Ruang Rapat Paripurna sebesar Rp1.480.000.000,00
 - 7) Utang Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Mobil Ketua DPRD sebesar Rp636.300.000,00
 - 8) Utang Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor sebesar Rp76.000.000,00
 - 9) Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*) sebesar Rp318.000.000,00
9. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal BLUD merupakan Reklasifikasi Aset Lain-lain BLUD pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp985.370.500,00
 10. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang bersumber dari Sumbangan Pihak ke-3 atas Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Belanja Modal Peralatan Mesin SMAN/SMKN pada Dinas Pendidikan sebesar Rp6.122.215.879,99
 11. Koreksi Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin akibat kesalahan penginputan pada EBMD sebesar Rp29.550.000,00 antara lain pada SMAN 1 SINGKEP sebesar Rp1.400.000,00 dan SMKN 8 BATAM sebesar Rp28.150.000,00 pada Dinas Pendidikan
 12. Koreksi Mutasi Tambah Aset tetap Peralatan dan Mesin yang bersumber dari pendapatan Hibah pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.858.313.215,00 antara lain:
 - a. Koreksi Mutasi Tambah Aset tetap Peralatan dan Mesin yang bersumber dari Hibah SMK Pusat Keunggulan Tahun 2024 pada SMKN 1 Bintan Timur, SMKN 1 Seri Kuala Lobam, SMKN 7 Batam, SMKN 3 Batam sebesar Rp786.750.815,00
 - b. Koreksi Kurang catat mutasi masuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang bersumber dari Hibah SMK Pusat Keunggulan Tahun 2021 pada SMKN 3 Batam sebesar Rp1.071.562.400,00
 13. Koreksi Kurang Catat Aset Tetap Peralatan dan Mesin berdasarkan hasil Pemeriksaan BPK sebesar Rp962.380.000,00 antara lain:
 1. Koreksi Kurang Catat Aset Tetap Peralatan dan Mesin (Kendaraan Bermotor Penumpang) berdasarkan hasil Pemeriksaan BPK pada Dinas Perhubungan sebesar Rp806.180.000,00
 2. Koreksi Kurang Catat Mutasi Masuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin (Kendaraan Bermotor Penumpang) dari Biro Umum berdasarkan hasil Pemeriksaan BPK pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp156.200.000,00
 14. Koreksi atas salah pilih akun rekening pengakuan Utang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Terdapat Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Pengadaan Mobil Dinas) yang salah pilih akun penginputan sebagai beban peralatan dan mesin/beban ekstrakomptabel peralatan dan mesin sebesar Rp642.000.000,00
- B. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp80.513.929.676,92 antara lain:
1. Mutasi Kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin antar OPD sebesar Rp13.288.141.425,70 antara lain:

- a. Mutasi BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp780.070.200,00 antara lain:
 - 1) Mutasi keluar BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Dinas Pendidikan (SMKN Kundur Utara) berdasarkan BAST Nomor 032/760/BKAD/BA/2024 Tanggal 18 Desember 2024 sebesar Rp211.070.200,00
 - 2) Mutasi keluar BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Dinas Sosial berdasarkan BAST Nomor 0241.3/73/BKAD/BA/2024 tanggal 05 Maret 2024 sebesar Rp569.000.000,00
- b. Mutasi Keluar BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berdasarkan BAST Nomor 01/BAST-BPPP/2024 Tanggal 8 Januari 2024 sebesar Rp17.850.000,00 ke Rumah Sakit Daerah Raja Ahmad Thabib
- c. Mutasi Keluar BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Biro Umum sebesar Rp3.818.780.750,00 antara lain:
 - 1) Mutasi keluar BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah berdasarkan BAST Nomor 06/BA-MUTASI/VIII/2024 Tanggal 28 Agustus 2024 sebesar Rp150.450.000,00
 - 2) Mutasi keluar BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Badan Penghubung Daerah berdasarkan BAST Nomor 06/BA-MUTASI/VI/2024 Tanggal 25 Juni 2023 sebesar Rp2.375.300.000,00
 - 3) Mutasi keluar BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke SMKN 8 Batam Dinas Pendidikan berdasarkan BAST Nomor 05/BA MUTASI/IV/2023 Tanggal 9 Oktober 2023 sebesar Rp1.293.030.750,00
- d. Mutasi Keluar BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Kesehatan sebesar Rp4.393.750.000,00 antara lain:
 - 1) Mutasi Keluar BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib berdasarkan BAST Nomor 254/BA-HB/PERLK/III/2024 Tanggal 26 Maret 2024 sebesar Rp293.800.000,00
 - 2) Mutasi Keluar BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud berdasarkan BAST Nomor 270/BAST-DINKES/IV/2024 Tanggal 2 April 2024 sebesar Rp769.750.000,00
 - 3) Mutasi Keluar BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud berdasarkan BAST Nomor 431/BAST-DINKES/VI/2024 Tanggal 5 Juni 2024 sebesar Rp3.330.200.000,00
- e. Mutasi Keluar BMD pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan BAST Nomor 04/BA-MUTASI/III/2024 Tanggal 25 Maret 2024 ke Biro Umum sebesar Rp297.225.088,00
- f. Mutasi Keluar BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan berdasarkan BAST Nomor 33/BAST/PENGALIHAN-ASET/PUPP.1/XII/2024 Tanggal 16 Desember 2024 ke Dinas Kebudayaan sebesar Rp3.980.465.387,70
2. Reklasifikasi Keluar Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Beban Barang dan Jasa sebesar Rp2.491.137.647,00 antara lain:
 - a. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Badan Keuangan dan Aset Daerah ke dalam Persediaan Bahan Bangunan sebesar Rp50.400.000,00
 - b. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp14.518.000,00 antara lain:

- 1) Reklasifikasi Aset Tetap peralatan dan Mesin (Alat Rumah Tangga Lainnya) ke Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak sebesar Rp11.368.000,00
- 2) Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin (Mesin Pengharum Ruangan) ke Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebesar Rp3.150.000,00
- c. Reklasifikasi Aset Tetap peralatan dan Mesin pada Badan Penghubung Daerah ke Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor lainnya sebesar Rp15.090.000,00
- d. Reklasifikasi Aset tetap Peralatan dan Mesin pada Biro Organisasi ke Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung sebesar Rp30.000.000,00
- e. Reklasifikasi Belanja Modal ke Persediaan pada Biro Umum sebesar Rp294.389.000,00 antara lain:
 - 1) Reklasifikasi Belanja Modal ke Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebesar Rp80.850.000,00
 - 2) Reklasifikasi Belanja Modal ke Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp149.539.000,00 dan Alat Listrik Rp64.000.000,00
- f. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp123.289.500,00
- g. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Alat Kegiatan Kantor Lainnya pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan sebesar Rp3.987.000,00
- h. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Belanja Bahan Komputer Lainnya sebesar pada Dinas Komunikasi dan Informatika Rp31.000.000,00
- i. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin (Mebel) ke Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp52.104.721,00
- j. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin (Rambu Jalan) ke Beban Pemeliharaan Marka Jalan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp1.748.701.844,00
- k. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Persediaan untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan sebesar Rp8.700.000,00
- l. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Persediaan pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp40.023.000,00 antara lain :
 - 1) Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Persediaan Suku Cadang Alat Kedokteran Rp9.364.000,00, Alat Listrik Rp12.600.000,00, Bahan Komputer Rp3.490.000,00 dan Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Pendukung Olahraga Rp3.769.000,00 dengan total Rp29.223.000,00.
 - 2) Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin (Tunda Bayar 2024) ke Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya sebesar Rp10.800.000,00
- m. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Persediaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib sebesar Rp78.934.582,00 antara lain :
 - 1) Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp6.190.000,00
 - 2) Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran sebesar Rp72.744.582,00

Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Ekstrakomptabel sebesar Rp11.862.250.992,50 antara lain:

- a. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Ekstrakomptabel pada Badan kepegawaian dan Korpri sebesar Rp824.000,00
- b. Reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin ke Aset Ekstrakomptabel pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp680.000,00
- c. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Ekstrakomptabel pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp1.330.000,00
- d. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Ekstrakomptabel pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp30.260.000,00
- e. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Ekstrakomptabel pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp2.720.000,00
- f. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Ekstrakomptabel pada Badan Penghubung Daerah sebesar Rp49.330.000,00
- g. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Ekstrakomptabel pada Biro Umum sebesar Rp83.448.700,00
- h. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Ekstrakomptabel pada Dinas Kebudayaan sebesar Rp56.866.000,00
- i. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Ekstrakomptabel pada Dinas kelautan dan Perikanan sebesar Rp7.446.223,50
- j. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Ekstrakomptabel pada Dinas Kesehatan sebesar Rp101.958.600,00
- k. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Ekstrakomptabel pada Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan sebesar Rp2.975.000,00
- l. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Ekstrakomptabel pada Dinas Pendidikan sebesar Rp11.310.873.469,00 antara lain :
 - 1) Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Ekstrakomptabel sebesar Rp5.457.315.611,00
 - 2) Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Ekstrakomptabel yang bersumber dari Dana BOS Sekolah sebesar Rp3.647.453.060,00
 - 3) Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Ekstrakomptabel yang bersumber dari Dana SPP Sekolah sebesar Rp1.354.803.798,00
 - 4) Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Ekstrakomptabel yang bersumber dari BANPEM Sekolah sebesar Rp4.327.200,00
 - 5) Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Ekstrakomptabel yang bersumber dari Belanja BLUD Sekolah sebesar Rp69.602.700,00
 - 6) Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Ekstrakomptabel yang berasal dari Hibah Masuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pengalihan Personil, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) dari Pemko Batam dengan Naskah Hibah Nomor 023/900.1.4.3/I/2024 sebesar Rp777.371.100,00
- m. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Ekstrakomptabel pada Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan sebesar Rp550.000,00
- n. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Ekstrakomptabel pada Dinas Sosial sebesar Rp740.000,00
- o. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Ekstrakomptabel pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp23.060.000,00
- p. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Ekstrakomptabel pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp56.839.000,00

- q. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Ekstrakomptabel pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib sebesar Rp30.240.000,00
- r. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Ekstrakomptabel pada Satuan Polisi Pamong praja dan Penanggulangan Kebakaran sebesar Rp102.110.000,00

Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp519.005.000,00

Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Jalan Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp161.659.000,00

Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Lainnya (Buku Umum) pada Dinas Pendidikan sebesar Rp52.500.000,00

Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya sebesar Rp17.429.386.206,00 antara lain:

- a. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya atas Usulan Pemusnahan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp4.536.109.976,00
- b. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya akibat usulan pemusnahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp352.988.287,00
- c. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya atas usulan pemusnahan pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp1.930.224.437,00
- d. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya berdasarkan usulan pemusnahan pada Badan Penghubung Daerah sebesar Rp185.494.155,00
- e. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya Akibat Usulan Pemusnahan Barang pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp2.577.900.772,00
- f. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya akibat usulan pemusnahan pada Dinas Kebudayaan sebesar Rp228.488.774,00
- g. Reklasifikasi Aset Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya yang merupakan usulan penjualan pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp5.275.500.000,00
- h. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya akibat Usulan Pemusnahan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp926.507.250,00
- i. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya yang merupakan usulan pemusnahan BMD pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp323.877.900,00
- j. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya akibat usulan pemusnahan pada Dinas Pariwisata sebesar Rp53.432.500,00
- k. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya yang merupakan usulan pemusnahan barang pada Dinas Perpustakaan Daerah dan Arsip Daerah sebesar Rp53.200.000,00
- l. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya akibat Usulan Pemusnahan pada Sekretariat DPRD sebesar Rp985.662.155,00

Pelunasan Utang Belanja TA 2023 sebesar Rp959.430.205,00 antara lain :

- a. Pelunasan Utang Belanja Modal BLUD Tahun 2023 Rumah Sakit Umum Daerah Engku Haji Daud sebesar Rp16.350.000,00
- b. Pelunasan Utang Belanja Pengadaan Aset Tetap pada Rumah Sakit Umum Raja Ahmad Thabib Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp943.080.205,00

9. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke dalam Aset lainnya dikarenakan Rusak Berat berdasarkan hasil Pemeriksaan BPK sebesar Rp32.576.536.076,00 antara lain:
 - a. Pada Sekretariat DPRD sebesar Rp665.639.000,00 antara lain:
 - 1) Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke dalam Aset lainnya dikarenakan Rusak Berat berdasarkan hasil Pemeriksaan BPK (Alat kantor dan rumah tangga) pada Sekretariat DPRD sebesar Rp71.089.000,00
 - 2) Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan Mesin Kendaraan Bermotor kedalam Aset Lainnya- Rusak Berat dan Penghapusan Aset Lainnya-Rusak Berat berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK dan Risalah Lelang Nomor 186/11/2023 tanggal 05 April 2023 pada Sekretariat DPRD sebesar Rp549.550.000,00
 - b. Pada Rumah Sakit Engku Haji Daud sebesar Rp14.019.802.579,00
 - 1) Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke dalam Aset lainnya dikarenakan Rusak Berat berdasarkan hasil Pemeriksaan BPK (Alat kantor dan rumah tangga dan Alat Kedokteran dan Kesehatan) pada Rumah Sakit Engku Haji Daud sebesar Rp13.893.658.979,00
 - 2) Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan Mesin Kendaraan Bermotor kedalam Aset Lainnya- Rusak Berat berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK pada Rumah Sakit Engku Haji Daud sebesar Rp126.143.600
 - c. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke dalam Aset lainnya dikarenakan Rusak Berat berdasarkan hasil Pemeriksaan BPK (Alat Kedokteran dan Kesehatan) pada Rumah Sakit Raja Ahmad Thabib sebesar Rp17.561.084.497,00
 - d. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan Mesin Kendaraan Bermotor kedalam Aset Lainnya-Rusak Berat berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK pada Dinas Perhubungan sebesar Rp330.010.000,00
10. Koreksi lebih catat atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp612.790.000,00 antara lain:
 - a. Koreksi lebih catat pencatatan mobil berdasarkan hasil Pemeriksaan BPK dimana terdapat lebih pencatatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Sipil dan Catatan Sipil seharusnya mobil tersebut tercatat dan penguasaannya di Biro umum sebesar Rp225.900.000,00
 - b. Koreksi lebih catat pencatatan mobil berdasarkan hasil Pemeriksaan BPK dimana terdapat lebih pencatatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik seharusnya mobil tersebut tercatat dan penguasaannya di Biro umum sebesar Rp225.900.000,00
 - c. Koreksi lebih catat atas aset tetap Peralatan dan Mesin yang bersumber dari dana SPP SMKN 5 Batam pada Dinas Pendidikan sebesar Rp160.990.000,00
11. Koreksi kurang catat Mutasi Keluar Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan hasil Pemeriksaan BPK pada Biro Umum sebesar Rp156.200.000,00
12. Koreksi BPK atas Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan Mesin kedalam Aset Ekstrakompable pada Dinas Pendidikan sebesar Rp280.567.395,00 antara lain:
 - a. Koreksi Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan Mesin kedalam Aset Ekstrakompable pada SMKN 8 Batam sebesar Rp10.850.000,00
 - b. Koreksi Kurang Catat Reklasifikasi Aset tetap Peralatan dan Mesin kedalam Aset Ekstrakompable (SMAN 11 BATAM, SMAN 1 DURAI dan Dinas Pendidikan) sebesar Rp235.224.580,00
 - c. Reklasifikasi Aset tetap Peralatan dan Mesin kedalam Aset Ekstrakompable yang bersumber dari SPP Pada SMKN 6 Batam sebesar Rp7.260.000,00

- d. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang bersumber dari Hibah SMK Pusat Keunggulan 2024 kedalam Aset Ekstrakompactable pada SMKN 3 Batam sebesar Rp6.123.815,00
 - e. Reklasifikasi Aset tetap Peralatan dan Mesin kedalam Aset Ekstrakompactable yang bersumber dari Hibah SMK-PK TA 2021 Pada SMKN 3 Batam Dinas Pendidikan sebesar Rp21.109.000,00
13. Koreksi BPK atas Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan mesin yang tidak diketemukan keberadaannya kedalam Aset lain-lain sebesar Rp66.846.000,00 antara lain:
- a. Koreksi atas dua aset tablet yang hilang pada Sekretariat DPRD dengan harga satuan sebesar Rp21.087.000,00
 - b. Koreksi atas aset yang hilang 1 (satu) buah kendaraan dengan Nomor Polisi BP2075A pada pada BLUD Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud senilai Rp24.672.000,00
14. Koreksi BPK atas kelebihan pembayaran atas Paket Pekerjaan Belanja Modal Aset Tetap Peralatan dan Mesin antara lain:
- a. Kekurangan Volume sebesar Rp14.000.000,00 atas Paket Pekerjaan Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home use*) pada Sekretariat DPRD
 - b. Kekurangan Volume Pekerjaan dan Ketidaksesuaian Spesifikasi pada Pekerjaan Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian sebesar Rp43.479.729,72 pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
- C. Saldo Akhir aset tetap Peralatan Mesin Per 31 Desember 2024 senilai Rp2.115.169.411.496,30

Adapun rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per OPD dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 5.166 Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per OPD

PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	PENAMBAHAN DARI BELANJA MODAL (LRA)	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6 = 2 + 3 + 4 - 5
Dinas Pendidikan	606.376.275.896,28	66.266.185.831,84	25.905.986.633,07	12.485.594.864,00	686.062.853.497,19
Dinas Kesehatan	58.605.426.772,60	5.438.816.628,00	77.799.500,00	5.422.215.850,00	58.699.827.050,60
Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	342.323.581.094,53	6.687.428.829,00	653.842.000,00	18.613.339.284,00	331.051.512.639,53
Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	121.694.646.249,00	3.304.523.500,00	5.622.380.500,00	14.157.686.579,00	116.463.863.670,00
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	29.242.674.458,00	755.950.000,00	4.137.165.387,70	3.980.465.387,70	30.155.324.458,00
Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	4.586.555.195,00	557.269.000,00	976.826.960,00	0,00	6.120.651.155,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.695.635.483,00	244.629.000,00	798.200.000,00	226.580.000,00	6.511.884.483,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	9.162.929.335,00	135.051.000,00	439.225.100,00	102.110.000,00	9.635.095.435,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15.835.232.576,00	61.090.000,00	11.700.000,00	352.988.287,00	15.555.034.289,00
Dinas Sosial	3.611.149.575,00	704.370.000,00	569.000.000,00	740.000,00	4.883.779.575,00
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	3.856.944.539,00	18.490.000,00	358.864.000,00	23.060.000,00	4.211.238.539,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.949.023.686,00	5.550.000,00	22.140.000,00	0,00	5.976.713.686,00
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	32.836.826.581,22	2.054.446.600,00	613.025.000,00	50.441.729,72	35.453.856.451,50

PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	PENAMBAHAN DARI BELANJA MODAL (LRA)	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6 = 2 + 3 + 4 - 5
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	18.567.440.963,76	2.055.400.000,00	0,00	297.225.088,00	20.325.615.875,76
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.301.721.775,00	176.413.953,00	14.576.000,00	278.004.721,00	9.214.707.007,00
Dinas Perhubungan	45.760.749.252,51	1.825.832.844,00	806.180.000,00	2.078.711.844,00	46.314.050.252,51
Dinas Komunikasi dan Informatika	21.562.427.923,00	930.415.000,00	79.650.000,00	354.877.900,00	22.217.615.023,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.088.259.865,00	93.648.285,00	20.800.000,00	0,00	5.202.708.150,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.578.327.872,00	2.000.000,00	0,00	0,00	8.580.327.872,00
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	10.759.569.553,00	0,00	16.430.000,00	0,00	10.775.999.553,00
Dinas Kebudayaan	6.266.828.500,00	767.145.000,00	3.980.465.387,70	285.354.774,00	10.729.084.113,70
Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	20.370.240.992,00	96.080.000,00	0,00	62.450.000,00	20.403.870.992,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	73.560.933.283,03	1.268.389.500,00	464.899.321,00	5.406.235.723,50	69.887.986.380,53
Dinas Pariwisata	5.803.339.413,00	28.500.000,00	60.450.000,00	53.432.500,00	5.838.856.913,00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	8.466.470.764,10	185.975.000,00	1.625.809.300,00	0,00	10.278.255.064,10
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8.268.995.091,00	56.950.000,00	544.134.035,00	0,00	8.870.079.126,00
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.078.356.355,00	129.365.000,00	150.450.000,00	0,00	4.358.171.355,00
Biro Kesejahteraan Rakyat	4.004.688.869,00	231.573.000,00	34.410.000,00	0,00	4.270.671.869,00
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	5.783.397.207,06	142.335.200,00	0,00	0,00	5.925.732.407,06
Biro Perekonomian dan Pembangunan	5.026.034.102,00	0,00	0,00	0,00	5.026.034.102,00
Biro Organisasi	2.036.575.225,00	278.050.000,00	0,00	30.000.000,00	2.284.625.225,00
Biro Administrasi Pimpinan	11.069.279.170,50	161.375.400,00	12.045.000,00	0,00	11.242.699.570,50
Biro Umum	284.278.871.078,00	11.070.288.100,00	1.638.389.688,00	4.352.818.450,00	292.634.730.416,00
Biro Hukum	2.023.793.807,00	98.416.000,00	60.200.000,00	0,00	2.182.409.807,00
Inspektorat Daerah	11.261.179.994,20	1.613.974.200,00	0,00	0,00	12.875.154.194,20
Badan Keuangan dan Aset Daerah	31.232.461.004,00	837.922.058,00	0,00	5.367.910.176,00	26.702.472.886,00
Badan Pendapatan Daerah	52.879.032.146,95	3.596.242.110,00	1.028.969.000,00	1.975.002.437,00	55.529.240.819,95
Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	8.376.837.873,00	67.679.000,00	0,00	824.000,00	8.443.692.873,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	4.139.262.448,67	343.330.000,00	0,00	2.720.000,00	4.479.872.448,67
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	15.994.839.987,50	521.297.800,00	209.047.737,00	2.595.750.772,00	14.129.434.752,50
Sekretariat DPRD	84.702.381.365,00	203.500.000,00	3.282.050.000,00	1.707.475.155,00	86.480.456.210,00
Badan Penghubung Daerah	13.467.694.764,00	2.492.258.000,00	2.379.700.000,00	249.914.155,00	18.089.738.609,00
Badan Pengelola Perbatasan Daerah	1.093.482.700,00	0,00	0,00	0,00	1.093.482.700,00
JUMLAH	2.023.580.374.784,91	115.508.155.838,84	56.594.810.549,47	80.513.929.676,92	2.115.169.411.496,30

Adapun daftar kendaraan bermotor yang sudah dilengkapi BPKB dan sudah tercatat di KIB dapat dilihat di **Lampiran 7**.

Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Masa manfaat aset tetap dihitung sejak perolehan aset tetap dimaksud. Masa manfaat aset tetap peralatan dan mesin ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.167 Masa Manfaat Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Kodefikasi						Uraian	Masa Manfaat
1	3					ASET TETAP	
1	3	2				Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01			Alat Besar	
1	3	2	01	01		Alat Besar Darat	10
1	3	2	01	02		Alat Besar Apung	8
1	3	2	01	03		Alat Bantu	7
1	3	2	02			Alat Angkutan	
1	3	2	02	01		Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	02	02		Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
1	3	2	02	03		Alat Angkutan Apung Bermotor	10
1	3	2	02	04		Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	02	05		Alat Angkutan Bermotor Udara	20
1	3	2	03			Alat Bengkel dan Alat Ukur	
1	3	2	03	01		Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	03	02		Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	03	03		Alat Ukur	5
1	3	2	04			Alat Pertanian	
1	3	2	04	01		Alat Pengolahan	4
1	3	2	05			Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1	3	2	05	01		Alat Kantor	5
1	3	2	05	02		Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	05	03		Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	06			Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	
1	3	2	06	01		Alat Studio	5
1	3	2	06	02		Alat Komunikasi	5
1	3	2	06	03		Peralatan Pemancar	10
1	3	2	06	04		Peralatan Komunikasi Navigasi	10
1	3	2	07			Alat Kedokteran dan Kesehatan	
1	3	2	07	01		Alat Kedokteran	5
1	3	2	07	01	29	Alat Kedokteran Lainnya	10
1	3	2	07	02		Alat Kesehatan Umum	5
1	3	2	08			Alat Laboratorium	
1	3	2	08	01		Unit Alat Laboratorium	8
1	3	2	08	02		Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	08	03		Alat Peraga Praktik Sekolah	10
1	3	2	08	04		Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
1	3	2	08	05		Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	08	06		Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	10
1	3	2	08	07		Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	08	08		Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	15
1	3	2	08	09		Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	8
1	3	2	09			Alat Persenjataan	
1	3	2	09	01		Senjata Api	10
1	3	2	09	02		Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	09	02	02	Non Senjata Api	5

Kodefikasi						Uraian	Masa Manfaat
1	3	2	09	03		Senjata Sinar	10
1	3	2	09	04		Alat Khusus Kepolisian	3
1	3	2	10			Komputer	
1	3	2	10	01		Komputer Unit	4
1	3	2	10	02		Peralatan Komputer	4
1	3	2	11			Alat eksplorasi	
1	3	2	11	01		Alat Eksplorasi Topografi	5
1	3	2	11	02		Alat Eksplorasi Geofisika	5
1	3	2	12			Alat Pengeboran	
1	3	2	12	01		Alat Pengeboran Mesin	5
1	3	2	12	02		Alat Pengeboran Non Mesin	5
1	3	2	13			Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	
1	3	2	13	01		Sumur	4
1	3	2	13	02		Produksi	4
1	3	2	13	03		Pengolahan dan Pemurnian	5
1	3	2	14			Alat Bantu Eksplorasi	
1	3	2	14	01		Alat Bantu Eksplorasi	5
1	3	2	14	02		Alat Bantu Produksi	5
1	3	2	15			Alat Keselamatan Kerja	
1	3	2	15	01		Alat Deteksi	4
1	3	2	15	02		Alat Pelindung	4
1	3	2	15	03		Alat SAR	4
1	3	2	15	04		Alat Kerja Penerbangan	5
1	3	2	16			Alat Peraga	
1	3	2	16	01		Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	4
1	3	2	17			Peralatan Proses/Produksi	
1	3	2	17	01		Unit Peralatan Proses/Produksi	4
1	3	2	18			Rambu-rambu	
1	3	2	18	01		Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	7
1	3	2	18	02		Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	7
1	3	2	18	03		Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	7
1	3	2	19			Peralatan Olahraga	
1	3	2	19	01		Peralatan Olahraga	4

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 5.168 Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL PENYUSUTAN	BEBAN PENYUSUTAN	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5-6
		1.525.231.139.203,45	87.023.038.849,89	85.175.163.363,81	55.106.128.275,53	1.642.323.213.141,62
1	Dinas Pendidikan	382.189.492.283,20	0,00	79.561.662.455,38	0,00	461.751.154.738,58
2	Dinas Kesehatan	55.575.672.333,00	1.175.210.527,95	5.659.483,27	1.221.816.448,90	55.534.725.895,32
3	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	227.897.582.385,48	32.853.553.239,38	2.888.603.204,38	18.198.280.922,75	245.441.457.906,49

NO	PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL PENYUSUTAN	BEBAN PENYUSUTAN	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5-6
4	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	94.376.420.185,00	8.506.127.009,18	25.388.159,50	14.077.100.619,02	88.830.834.734,66
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	19.133.088.215,00	2.516.165.589,92	6.415.427,91	3.318.269,39	21.652.350.963,44
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.918.480.948,00	368.100.236,50	212.958.952,40	5,38	4.499.540.131,52
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.149.286.552,00	1.019.314.978,73	328.908.478,59	225.900.000,00	5.271.610.009,32
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	6.818.748.942,00	511.911.980,03	374.845,70	367.329,72	7.330.668.438,01
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14.825.185.654,00	495.355.232,85	0,00	352.988.292,42	14.967.552.594,43
10	Dinas Sosial	3.238.953.968,00	296.615.557,21	81.747.564,93	225.234,07	3.617.091.856,07
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.405.310.043,00	155.748.788,60	0,00	37,46	3.561.058.794,14
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	5.405.566.788,00	243.544.022,97	35,44	0,00	5.649.110.846,41
13	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	27.917.151.484,22	1.398.437.198,12	8.659.647,24	130.812.942,10	29.193.435.387,48
14	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	17.000.233.970,00	661.029.793,08	275.558,00	297.225.088,00	17.364.314.233,08
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.207.345.822,00	433.145.796,21	23,27	225.900.000,00	8.414.591.641,48
16	Dinas Perhubungan	41.633.710.023,50	1.713.623.518,52	806.180.000,00	330.010.035,32	43.823.503.506,70
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	18.578.667.035,00	1.265.227.154,90	0,00	312.026.390,22	19.531.867.799,68
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.504.035.302,00	246.352.638,28	112,42	224,82	4.750.387.827,88
19	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	6.525.139.363,00	674.993.806,71	0,00	1,85	7.200.133.167,86
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	8.719.751.770,00	861.506.505,24	38.537,90	38.561,67	9.581.258.251,47
21	Dinas Kebudayaan	5.593.680.447,00	728.002.208,57	26.600.678,04	228.488.749,30	6.119.794.584,31
22	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	19.156.306.980,00	343.166.970,22	0,00	53.200.009,80	19.446.273.940,42
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	61.040.080.114,05	3.205.354.585,59	0,00	5.376.984.507,80	58.868.450.191,84
24	Dinas Pariwisata	5.096.971.704,00	309.612.193,80	0,00	53.432.500,55	5.353.151.397,25
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	7.488.695.709,00	332.638.174,23	289.463.995,68	66.330.005,89	8.044.467.873,02
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6.912.609.136,00	560.880.574,38	210.016.131,57	0,00	7.683.505.841,95
27	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	3.741.556.605,00	1.321.377.810,67	150.450.000,00	1.203.598.797,00	4.009.785.618,67
28	Biro Kesejahteraan Rakyat	2.947.466.006,00	323.972.022,57	19,98	8,12	3.271.438.040,43
29	Biro Pengadaan Barang/Jasa	5.224.852.989,00	295.933.073,06	2,61	1,11	5.520.786.063,56
30	Biro Perekonomian dan Pembangunan	4.550.578.027,00	198.713.734,71	0,00	39,80	4.749.291.721,91
31	Biro Organisasi	1.747.552.590,00	126.946.819,33	0,00	1,00	1.874.499.408,33
32	Biro Administrasi Pimpinan	9.885.075.728,50	444.290.444,61	0,00	39,90	10.329.366.133,21
33	Biro Umum	257.241.809.318,00	7.911.335.803,18	571.555.333,87	1.599.680.750,00	264.125.019.705,05
34	Biro Hukum	1.932.792.045,00	47.187.407,42	0,00	1,00	1.979.979.451,42

NO	PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL PENYUSUTAN	BEBAN PENYUSUTAN	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5-6
35	Inspektorat	7.724.177.539,00	1.203.393.641,67	0,00	71,42	8.927.571.109,25
36	Badan Keuangan dan Aset Daerah	25.693.660.371,00	1.749.704.467,28	160,62	4.783.860.648,04	22.659.504.350,86
37	Badan Pendapatan Daerah	40.615.175.562,00	4.718.416.708,54	0,00	1.930.672.547,68	43.402.919.722,86
38	Badan Kepegawaian dan Korpri	7.095.217.158,00	475.186.112,45	12,00	0,00	7.570.403.282,45
39	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.342.992.889,00	708.234.408,10	0,00	2.292.527,51	2.048.934.769,59
40	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	13.547.339.721,50	1.071.960.032,77	37.099,34	2.578.674.502,00	12.040.662.351,61
41	Sekretariat DPRD	74.955.742.373,00	3.370.776.784,38	0,00	1.684.276.950,66	76.642.242.206,72
42	Badan Penghubung Daerah	7.501.633.890,00	1.965.342.385,75	167.443,49	168.625.213,86	9.298.518.505,38
43	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	175.349.235,00	214.648.912,23	0,28	0,00	389.998.147,51

5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	2.878.738.414.770,81	2.704.114.608.690,98

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Komponen Biaya Perolehan aset tetap Gedung dan Bangunan meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Pengeluaran untuk pembangunan gedung dan bangunan yang dapat dikapitalisasi berupa:

- a) Pengeluaran yang dilaksanakan melalui kontrak yaitu nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
- b) Pengeluaran untuk pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.
- c) Pembayaran atas pembangunan gedung melalui kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan per termin. Apabila proses pembangunan gedung tersebut melampaui periode pelaporan (pertengahan dan akhir tahun), maka biaya yang telah dikeluarkan dikapitalisasi sebagai "Konstruksi Dalam Pengerjaan".

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat saldo awal aset tetap Gedung dan Bangunan per 1 Januari 2024 sebesar Rp2.704.114.608.690,98. Mutasi aset tetap Gedung dan Bangunan selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.169 Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2024

ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN				
I	Saldo Awal ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN, 1 Januari 2024			2.704.114.608.690,98
II	Penambahan :			
	1	Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024	129.103.961.833,55	
	2	Mutasi Masuk Aset Tetap Gedung dan Bangunan antar OPD	57.390.858.820,30	

ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN			
	3	Reklasifikasi Masuk Belanja Modal Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang bersumber dari dana BLUD	519.005.000,00
	4	Kapitalisasi Masuk Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Beban Jasa Konsultan Pengawasan dan Perencanaan	6.608.446.452,12
	5	Reklasifikasi Masuk Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Aset Lainnya	168.665.394,00
	6	Reklasifikasi Masuk Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan	12.236.072.691,96
	7	Penerimaan Hibah Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah/Instansi Lainnya	5.517.343.235,92
	8	Belanja Modal Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang bersumber dari Dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)	4.551.654.989,00
	9	Kapitalisasi dari Bahan Bangunan dan Konstruksi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	299.790.996,00
	10	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung dan Bangunan	6.602.833.377,24
	11	Koreksi kurang catat atas kapitalisasi Jasa Konsultansi Pengawasan dan Perencanaan	119.408.250,00
	12	Koreksi Mutasi Tambah Aset tetap Gedung dan Bangunan yang bersumber dari Hibah SMK Pusat Keunggulan	1.779.726.600,00
	13	Koreksi nilai pengakuan Utang Belanja Tahun 2024 berdasarkan Hasil Reviu Inspektorat	62.281.968,00
	14	Koreksi BPK atas kurang catat Kapitalisasi Aset tetap Gedung dan Bangunan dari Beban Pemeliharaan, Beban Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan	13.957.209.900,00
		Total Penambahan :	238.917.259.508,09
III	Pengurangan :		
	1	Reklasifikasi Keluar Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	4.282.597.695,35
	2	Reklasifikasi Keluar Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	578.678.376,00
	3	Reklasifikasi Keluar Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Lain-lain	360.692.695,00
	4	Mutasi Keluar Aset Tetap Gedung dan Bangunan antar OPD	57.390.858.820,30
	5	Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Persediaan	604.438.500,00
	6	Penyesuaian Pencatatan atas Koreksi Audit TA 2023	8,05
	7	Pelunasan Utang Pengadaan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2023	158.140.633,56
	8	Koreksi lebih catat atas aset tetap Gedung dan Bangunan	27.000.000,00
	9	Koreksi BPK atas Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Lain-lain	467.342.500,00
	10	Koreksi catat atas kelebihan pembayaran atas Paket Pekerjaan Belanja Modal Aset Tetap Gedung dan bangunan	423.704.200,00
		Total Pengurangan :	64.293.453.428,26
IV	Saldo Akhir ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN, 31 Desember 2024		2.878.738.414.770,81

Dari tabel mutasi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- A. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp238.917.259.508,09 berasal dari:

Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2024 sebesar Rp129.103.961.833,55 pada :

a. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp24.190.863.000,00

- b. Dinas Pendidikan sebesar Rp84.591.646.894,87
- c. Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib sebesar Rp7.799.433.383,32
- d. Dinas Kesehatan sebesar Rp302.888.138,00
- e. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.116.590.240,00
- f. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp124.800.000,00
- g. Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp173.300.000,00
- h. Dinas Perhubungan sebesar Rp827.269.617,77
- i. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp436.463.094,60
- j. Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp8.106.017.628,99
- k. Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp437.431.805,00
- l. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan sebesar Rp997.258.031,00

Mutasi masuk Aset tetap Gedung dan Bangunan antar OPD sebesar Rp57.390.858.820,30 antara lain:

- a. Mutasi BMD Aset Tetap Gedung dan Bangunan (Gedung LAM) Provinsi Kepulauan Riau pada Dinas Kebudayaan berdasarkan BAST Nomor 33/BAST/PENGALIHAN-ASET/PUPP.1/XII/2024 Tanggal 16 Desember 2024 dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp31.245.198.477,30
- b. Mutasi BMD Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Badan Penghubung Daerah berdasarkan BAST Nomor 032.1/1/DISPAP/2024 Tanggal 21 Oktober 2024 dari Dinas Pariwisata sebesar Rp987.000.000,00 dan berdasarkan BAST Nomor B/25/BAST/PUPP.1/2024 Tanggal 10 Oktober 2024 dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp11.201.450.440,00
- c. Mutasi BMD Aset Tetap Gedung dan Bangunan (Rehabilitasi Gedung DPRD) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berdasarkan BAST Nomor B/34/BAST/PUPP.1/2024 Tanggal 17 Desember 2024 dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp13.957.209.900,00

Reklasifikasi Masuk Belanja Modal Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang bersumber dari dana BLUD sebesar Rp519.005.000,00 antara lain pada SMKN 1 Batam sebesar Rp210.275.000,00 dan SMKN 2 Batam sebesar Rp308.730.000,00

Kapitalisasi Masuk Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Beban Jasa Konsultan Pengawasan dan Perencanaan sebesar Rp6.608.446.452,12

- a. Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur ke Aset tetap Gedung dan Bangunan (pagar batu miring) pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp19.436.100,00
- b. Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp180.395.510,00 dan Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur sebesar Rp105.387.840,00 pada Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan
- c. Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan - Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp26.351.000,00
- d. Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp646.608.900,00 antara lain:

- 1) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultan Pengawasan Arsitektur ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan (Gedung LAM dan Dekranasda) sebesar Rp546.740.900,00
 - 2) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan - Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung (Tunda Bayar Tahun 2024) ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp99.868.000,00
 - e. Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan (Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal) pada Dinas Perhubungan sebesar Rp52.209.960,000,00
 - f. Kapitalisasi Beban Jasa Konsultan Perencanaan-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air sebesar Rp146.945.685,00 dan Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp181.675.453,80
 - g. Pada Dinas Pendidikan sebesar Rp5.249.436.003,32 antara lain:
 - 1) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan - Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.156.137.295,16
 - 2) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultan Perencanaan - Jasa Arsitektur Lainnya ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.625.453.516,50
 - 3) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya (Tunda Bayar 2024) ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp36.095.589,00
 - 4) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung (Tunda Bayar 2024) ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp405.387.102,66
 - 5) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur (Tunda Bayar 2024) ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada sebesar Rp26.362.500,00
- Reklasifikasi Masuk ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Aset Lainnya BLUD pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp168.665.394,00
- Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib sebesar Rp12.236.072.691,96 antara lain:
- a. Reklasifikasi Konstruksi dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Radioterapy ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp12.214.072.691,96
 - b. Reklasifikasi Konstruksi dalam Pekerjaan Pembangunan Pekerjaan Halaman Mesjid ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp22.000.000,00
- Penerimaan Hibah Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah/Instansi Lainnya sebesar Rp5.517.343.235,92 antara lain:
- a. Pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.568.983.210,00 antara lain:
 - 1) Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bintan berdasarkan BAST Nomor B/032/098.3/BKAD-SET/2024 Tanggal 07 Februari 2024 (Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya/Dermaga) sebesar Rp290.015.700,00
 - 2) Hibah dari Pemerintah Kabupaten Natuna berdasarkan BAST Nomor 032/37/BAST-BMD/I/2024 Tanggal 16 Januari 2024 (Bangunan genset dan Instalasi listrik, Gedung Pertokoan, Gedung Pos Jaga Permanen, dan Banguna Pantry) sebesar Rp986.017.500,00
 - 3) Hibah dari Pemerintah Kota Batam (P3D) berdasarkan Naskah Hibah Nomor 022/900.1.4.3/I/2024 Tanggal 10 Januari 2024 (Bangunan Gedung Kantor UPT KKPD TJ Cakang) sebesar Rp292.950.010,00

- b. Hibah Masuk Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Pengalihan Personil, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) dari Pemerintah Kota Batam dengan Naskah Hibah 023/900.1.4.3/I/2024 pada Dinas Pendidikan sebesar Rp3.948.360.025,92

Belanja Modal Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang bersumber Dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) sebesar Rp4.551.654.989,00 antara lain:

- a. Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang bersumber dari Dana SPP pada SMAN 1 BATAM sebesar Rp397.061.000,00
- b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang bersumber dari Dana SPP pada SMAN 4 BATAM sebesar Rp196.796.000,00
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang bersumber dari Dana SPP pada SMAN 5 BATAM sebesar Rp123.120.000,00
- d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang bersumber dari Dana SPP pada SMAN 12 BATAM sebesar Rp28.750.100,00
- e. Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang bersumber dari Dana SPP pada SMAN 13 BATAM sebesar Rp10.000.000,00
- f. Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang bersumber dari Dana SPP pada SMAN 15 BATAM sebesar Rp32.521.000,00
- g. Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang bersumber dari Dana SPP pada SMAN 16 BATAM sebesar Rp333.036.000,00
- h. Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang bersumber dari Dana SPP pada SMAN 19 BATAM sebesar Rp239.467.370,00
- i. Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang bersumber dari Dana SPP pada SMAN 20 BATAM sebesar Rp431.795.000,00
- j. Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang bersumber dari Dana SPP pada SMAN 21 BATAM sebesar Rp51.888.000,00
- k. Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang bersumber dari Dana SPP pada SMAN 23 BATAM sebesar Rp21.234.000,00
- l. Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang bersumber dari Dana SPP pada SMAN 24 BATAM sebesar Rp126.292.000,00
- m. Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang bersumber dari Dana SPP pada SMAN 28 BATAM sebesar Rp57.780.000,00
- n. Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang bersumber dari Dana SPP pada SMKN 3 BATAM sebesar Rp35.377.000,00
- o. Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang bersumber dari Dana SPP pada SMKN 5 BATAM sebesar Rp1.443.833.479,00
- p. Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang bersumber dari Dana SPP pada SMKN 7 BATAM sebesar Rp586.890.000,00
- q. Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang bersumber dari Dana SPP pada SMKN 8 BATAM sebesar Rp232.149.000,00
- r. Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang bersumber dari Dana SPP pada SMAN 5 TANJUNGPINANG sebesar Rp36.188.125,00
- s. Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang bersumber dari Dana SPP pada SMAN 1 TELUK SEBONG sebesar Rp9.346.915,00
- t. Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang bersumber dari Dana SPP pada SMAN 1 MANTANG sebesar Rp6.180.00,00
- u. Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang bersumber dari Dana SPP pada SMAN 1 SINGKEP sebesar Rp69.900.00,00
- v. Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang bersumber dari Dana SPP pada SMAN 3 BATAM sebesar Rp82.050.000,00

Kapitalisasi dari Bahan Bangunan dan Konstruksi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp299.790.996,00 antara lain:

- a. Kapitalisasi dari Bahan Bangunan dan Konstruksi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan (Aula Dompok) pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp179.940.996,00
 - b. Kapitalisasi dari Bahan Bangunan dan Konstruksi Pemeliharaan Rumah Sakit ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan Rumah Sakit pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp119.850.000,00
- Utang Belanja Modal Bangunan Gedung dan Bangunan Tahun 2024 sebesar Rp6.602.833.377,24 antara lain:

- a. Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Sub Kegiatan pembangunan pelabuhan pengumpan regional pada Dinas Perhubungan tahun 2024 sebesar Rp1.900.641.377,29
- b. Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor pada sub kegiatan Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya pada Dinas Kesehatan tahun 2024 sebesar Rp242.638.990,00
- c. Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Pembangunan Sarana dan Prasarana Cafeteria Gedung LAM Provinsi Kepulauan Riau pada Dinas Pekerjaan umum, Penataan Ruang dan Pertanahan tahun 2024 sebesar Rp199.866.000,00
- d. Utang Belanja Modal Bangunan Gedung dan Bangunan Paket Pekerjaan Pembangunan Musholla Sub. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 sebesar Rp219.280.700,00
- e. Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi Sub. Kegiatan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral tahun 2024 sebesar Rp198.225.143,28
- f. Utang Belanja Modal Bangunan Gedung pada Dinas Pendidikan tahun 2024 sebesar Rp3.842.181.166,67 antara lain:
 - 1) Pembangunan RPS Animasi SMKN 9 BATAM Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa sebesar Rp46.010.915,00
 - 2) Pembangunan RKB SMKN 5 Batam sebesar Rp1.551.450.261,00
 - 3) Pembangunan Selasar Kantor Dinas Pendidikan Sub Keg Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebesar Rp922.967.802,00
 - 4) Pemasangan Batu Miring SMKN 1 Tanjungpinang Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah sebesar Rp154.054.870,00
 - 5) Pembangunan Batu Miring SMAN 2 Karimun sebesar Rp110.844.782,00
 - 6) Pembangunan musholla SMAN 21 Batam sebesar Rp157.179.904,00
 - 7) Pembangunan Musholla SMKN 2 Bunguran Barat sub keg Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah sebesar Rp148.738.671,00
 - 8) Pembangunan Drainase Asrama Siswa SMKN 2 Bunguran Barat sub keg Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah sebesar Rp141.845.234,28
 - 9) Pembangunan Toilet SMAN 1 TOAPAYA sebesar Rp152.928.217,00
 - 10) Pembangunan Pagar SLBN sebesar Rp138.280.340,00
 - 11) Pembangunan Masjid SMAN 7 Tanjungpinang sebesar Rp73.466.805,00
 - 12) Pembangunan Pagar SMKN 1 Bunguran Barat sub keg Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah sebesar Rp156.635.805,39

- 13) Lanjutan Pembangunan RPS DKV SMK Negeri 9 Batam sebesar Rp60.777.560,00
 - 14) Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang bersumber dari Dana SPP SMKN 5 BATAM sebesar Rp27.000.000,00
11. Koreksi kurang catat atas kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan dan Perencanaan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp119.408.250,00 antara lain:
 - a. Koreksi kurang catat atas kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur (SP2D Nomor 21/11.0/000158/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.02.0.00.0.00.02.0000/02/2025) ke dalam Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp19.980.000,00
 - b. Koreksi kurang catat atas kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya (Tunda Bayar 2024) ke dalam Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp99.428.250,00
 12. Koreksi Mutasi Tambah Aset tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan yang bersumber dari Hibah SMK Pusat Keunggulan sebesar Rp1.779.726.600,00 antara lain:
 - a. Koreksi mutasi tambah Aset tetap Gedung dan Bangunan yang bersumber dari Hibah SMK Pusat Keunggulan Tahun Anggaran 2024 pada SMKN 3 Batam sebesar Rp850.000.000,00
 - b. Koreksi Kurang catat mutasi tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang bersumber dari Hibah SMK Pusat Keunggulan Tahun Anggaran 2021 pada SMKN 3 Batam sebesar Rp929.726.600,00
 13. Koreksi nilai pengakuan Utang Belanja Tahun 2024 berdasarkan Hasil Reviu Inspektorat yaitu utang belanja barang jasa dan utang belanja modal terdapat paket pekerjaan yang tidak layak bayar, pengurangan nilai utang, maupun kesalahan perhitungan dalam penentuan nilai utang pada Dinas Pendidikan sebesar Rp62.281.968,00
 14. Koreksi BPK atas kurang catat Kapitalisasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Rehabilitasi Gedung Kantor DPRD sebesar Rp13.957.209.900,00 yaitu dari Beban Pemeliharaan Bangunan sebesar Rp13.460.000.000,00, Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya sebesar Rp99.689.000,00 dan Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur sebesar Rp397.520.900,00 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
- B. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp64.293.453.428,26 berasal dari:
1. Reklasifikasi Keluar Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp4.282.597.695,35 antara lain:
 - a. Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin (Peralatan Gedung LAM) pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp3.980.465.387.70,00
 - b. Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar (Papan Nama Instansi) pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp124.800.000,00
 - c. Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin (Mebel Interior BTKP) pada Dinas Pendidikan sebesar Rp177.332.307,65
 2. Reklasifikasi Keluar Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp578.678.376,00 antara lain:
 - a. Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp309.705.376,00

- b. Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp268.973.000,00 antara lain:
 - 1) Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan (Pembangunan Fasilitas Air Bersih Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman) sebesar Rp89.186.000,00
 - 2) Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan (Semenisasi Halaman SMK Negeri 2 Cening Desa Merawang, Kab. Lingga) sebesar Rp179.787.000,00
3. Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Lain-lain akibat Usulan Pemusnahan pada Badan Penanggulangan Bencana sebesar Rp360.692.695,00
4. Mutasi Keluar Aset Tetap Gedung dan Bangunan antar OPD sebesar Rp57.390.858.820,30 antara lain:
 - a. Mutasi BMD Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Badan Penghubung Daerah berdasarkan BAST Nomor 032.1/1/DISPAR/2024 Tanggal 21 Oktober 2024 pada Dinas Pariwisata sebesar Rp987.000.000,00
 - b. Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp56.403.858.820,30 antara lain:
 - 1) Mutasi BMD Aset Tetap Gedung dan Bangunan (Gedung LAM) ke Dinas Kebudayaan berdasarkan BAST Nomor 33/BAST/PENGALIHAN-ASET/PUPP.1/XII/2024 Tanggal 16 Desember 2024 sebesar Rp31.245.198.477,30,00
 - 2) Mutasi BMD Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Badan Penghubung Daerah berdasarkan BAST Nomor 25/BAST/PENGALIHAN-ASET/PUPP.1/X/2024 Tanggal 10 Oktober 2024 Rp11.201.450.443,00
 - 3) Mutasi BMD Aset Tetap Gedung dan Bangunan (Rehabilitasi Gedung DPRD) ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan BAST Nomor B/34/BAST/PUPP.1/2024 Tanggal 17 Desember 2024 sebesar Rp13.957.209.900,00
5. Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (4 Ruang Kelas Baru SLB Mutiara Tanjungpinang) pada Dinas Pendidikan sebesar Rp604.438.500,00
6. Penyesuaian Pencatatan atas Koreksi Audit Tahun 2023 pada Dinas Pendidikan Sebesar Rp8,05
7. Pelunasan Utang Pengadaan Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp158.140.633,56
8. Koreksi lebih catat atas Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang bersumber dari dana SPP SMKN 5 Batam pada Dinas Pendidikan sebesar Rp27.000.000,00
9. Koreksi BPK atas Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Lain-lain dikarenakan Usulan penghapusan BMD atas pasar higienis yg roboh di Tanjungpinang dengan kondisi aset tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp467.342.500,00
10. Koreksi atas kelebihan pembayaran atas Paket Pekerjaan Belanja Modal Aset Tetap Gedung dan bangunan sebesar Rp423.704.200,00 antara lain:
 - a. Kekurangan Volume dan item pekerjaan tidak dapat dibayarkan sebesar Rp155.301.200,00 atas pekerjaan penataan Kawasan Gurindam 12 (Lanjutan) pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
 - b. Kekurangan Volume dan Ketidaksesuaian Spesifikasi pada Pekerjaan Pembangunan Tahap Awal Dermaga Pelabuhan Perikanan Kijang sebesar Rp69.215.100,00 pada Dinas Kelautan dan Perikanan

- c. Kekurangan Volume Pekerjaan atas 22 (dua puluh dua) Paket Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp199.187.900,00 antara lain:
 - 1) Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang (DAK) SMAN 1 Toapaya sebesar Rp39.267.800,00
 - 2) Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (DAK) SMAN 1 Toapaya sebesar Rp35.811.500,00
 - 3) Pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa (DAK) SMAN 1 Toapaya sebesar Rp21.683.000,00
 - 4) Pekerjaan Pembangunan Ruang Tata Usaha (DAK) SMAN 1 Toapaya sebesar Rp7.422.600,00
 - 5) Pekerjaan Rehabilitasi Laboratorium Kimia dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang (DAK) SMAN 1 Toapaya sebesar Rp5.299.900,00
 - 6) Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Laboratorium Biologi dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang (DAK) SMAN 1 Toapaya sebesar Rp4.040.500,00
 - 7) Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Laboratorium Fisika dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang (DAK) SMAN 1 Toapaya sebesar Rp4.165.100,00
 - 8) Pekerjaan Pembangunan Ruang OSIS (DAK) SMAN 1 Toapaya sebesar Rp4.871.100,00
 - 9) Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Laboratorium Komputer dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang (DAK) SMAN 1 Toapaya sebesar Rp2.985.100,00
 - 10) Pekerjaan Pembangunan Ruang Bimbingan Konseling (DAK) SMAN 1 Toapaya sebesar Rp3.701.600,00
 - 11) Pekerjaan Pembangunan Toilet SMAN 1 Toapaya sebesar Rp995.000,00
 - 12) Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang (DAK) SMAN 1 Kundur sebesar Rp9.421.300,00
 - 13) Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Guru dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang (DAK) SMAN 1 Kundur sebesar Rp1.120.600,00
 - 14) Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Perpustakaan dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang (DAK) SMAN 1 Kundur sebesar Rp4.935.000,00
 - 15) Pekerjaan Rehabilitasi Toilet (Jamban) dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang (DAK) SMAN 1 Kundur sebesar Rp9.565.500,00
 - 16) Pekerjaan Rehabilitasi Ruang UKS dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang (DAK) SMAN 1 Kundur sebesar Rp1.722.700,00
 - 17) Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang (DAK) SMAN 1 Karimun sebesar Rp12.773.900,00
 - 18) Pekerjaan Pembangunan Laboratorium Kimia (DAK) SMAN 1 Karimun sebesar Rp4.214.000,00
 - 19) Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (DAK) SMAN 1 Karimun sebesar Rp3.697.400,00
 - 20) Pekerjaan Pembangunan Laboratorium Bahasa (DAK) SMAN 1 Karimun sebesar Rp7.960.400,00
 - 21) Pekerjaan Rehabilitasi Laboratorium Fisika dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang (DAK) SMAN 1 Karimun sebesar Rp1.384.700,00
 - 22) Pekerjaan Rehabilitasi Laboratorium Biologi dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang (DAK) SMAN 1 Karimun sebesar Rp12.149.200,00
- C. Saldo Akhir Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 Rp2.878.738.414.770,81

Adapun rincian mutasi aset tetap gedung dan bangunan per OPD dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 5.170 Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per OPD

PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	PENAMBAHAN DARI BELANJA MODAL (LRA)	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6 = 2 + 3 + 4 - 5
Dinas Pendidikan	1.049.728.589.566,45	84.591.646.894,87	19.952.645.752,91	1.007.958.715,70	1.153.264.923.498,53
Dinas Kesehatan	21.972.504.623,52	302.888.138,00	362.047.240,00	0,00	22.637.440.001,52
Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	250.818.785.770,84	7.799.433.383,32	12.236.072.691,96	158.140.633,56	270.696.151.212,56
Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	46.490.355.566,00	173.300.000,00	314.866.394,00	0,00	46.978.521.960,00
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	98.424.639.915,36	24.190.863.000,00	14.983.625.796,00	60.539.625.408,00	77.059.503.303,36
Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	554.462.531.236,04	1.116.590.240,00	14.176.490.600,00	268.973.000,00	569.486.639.076,04
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	89.965.000,00	0,00	0,00	0,00	89.965.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	5.287.098.342,30	0,00	0,00	0,00	5.287.098.342,30
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.888.901.918,48	0,00	0,00	360.692.695,00	2.528.209.223,48
Dinas Sosial	5.116.692.359,00	0,00	0,00	0,00	5.116.692.359,00
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2.002.648.000,00	0,00	0,00	0,00	2.002.648.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	624.390.200,00	0,00	0,00	0,00	624.390.200,00
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	33.900.770.933,51	997.258.031,00	285.783.350,00	0,00	35.183.812.314,51
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.267.797.894,00	0,00	0,00	0,00	3.267.797.894,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	351.312.476.390,61	827.269.617,77	1.952.851.337,29	0,00	354.092.597.345,67
Dinas Komunikasi dan Informatika	736.923.281,00	0,00	0,00	0,00	736.923.281,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	49.615.984,00	0,00	0,00	0,00	49.615.984,00
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	78.416.217,00	0,00	0,00	0,00	78.416.217,00
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	56.511.442.963,23	437.431.805,00	19.436.100,00	309.705.376,00	56.658.605.492,23
Dinas Kebudayaan	29.457.600.754,00	0,00	31.245.198.477,30	0,00	60.702.799.231,30
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12.609.362.017,00	0,00	0,00	0,00	12.609.362.017,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	40.229.892.771,15	8.106.017.628,99	1.897.604.348,80	536.557.600,00	49.696.957.148,94
Dinas Pariwisata	5.991.000.801,00	0,00	0,00	987.000.000,00	5.004.000.801,00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	7.922.978.059,22	436.463.094,60	198.225.143,28	0,00	8.557.666.297,10
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	137.400.000,00	0,00	0,00	0,00	137.400.000,00
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	373.623.000,00	0,00	0,00	0,00	373.623.000,00
Biro Kesejahteraan Rakyat	8.188.125.164,00	0,00	0,00	0,00	8.188.125.164,00
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	2.510.453.750,00	0,00	0,00	0,00	2.510.453.750,00
Biro Perekonomian dan Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Administrasi Pimpinan	2.121.021.650,00	0,00	0,00	0,00	2.121.021.650,00
Biro Umum	10.743.149.796,63	0,00	0,00	0,00	10.743.149.796,63
Biro Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	PENAMBAHAN DARI BELANJA MODAL (LRA)	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6 = 2 + 3 + 4 - 5
Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	45.463.347.933,71	0,00	0,00	0,00	45.463.347.933,71
Badan Pendapatan Daerah	41.738.650.488,00	124.800.000,00	0,00	124.800.000,00	41.738.650.488,00
Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	5.321.872.144,93	0,00	0,00	0,00	5.321.872.144,93
Badan Penghubung Daerah	7.541.584.200,00	0,00	12.188.450.443,00	0,00	19.730.034.643,00
Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	2.704.114.608.690,98	129.103.961.833,55	109.813.297.674,54	64.293.453.428,26	2.878.738.414.770,81

Untuk masa manfaat aset tetap gedung dan bangunan ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.171 Masa Manfaat Aset Tetap Gedung dan Bangunan

KODEFIKASI					URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
1	3	3			Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01		Bangunan Gedung	
1	3	3	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	01	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	02		Monumen	
1	3	3	02	01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
1	3	3	03		Bangunan Menara	
1	3	3	03	01	Bangunan Menara Perambuan	40
1	3	3	04		Tugu Titik Kontrol/Pasti	
1	3	3	04	01	Tugu/Tanda Batas	50

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dapat dijelaskan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 5.172 Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL PENYUSUTAN	BEBAN PENYUSUTAN	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5-6
		488.842.960.065,00	52.796.062.596,33	6.654.966.764,49	1.810.010.415,37	546.483.979.010,45
1	Dinas Pendidikan	170.360.572.066,00	19.476.453.606,43	2.632.933.297,16	331.979,85	192.469.626.989,74
2	Dinas Kesehatan	3.414.021.802,00	445.075.604,32	2.223.641,02	1.081.416,34	3.860.239.631,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	53.875.406.345,00	5.017.822.888,64	70.903.551,82	329.468.211,91	58.634.664.573,55
4	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	5.310.342.460,00	933.469.669,22	2.204.300.981,27	0,00	8.448.113.110,49
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	2.254.331.726,00	1.268.670.602,59	139.274.812,31	399.105.636,72	3.263.171.504,18

NO	PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL PENYUSUTAN	BEBAN PENYUSUTAN	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5-6
		488.842.960.065,00	52.796.062.596,33	6.654.966.764,49	1.810.010.415,37	546.483.979.010,45
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	132.709.451.460,00	10.996.640.793,00	151.488.505,56	0,00	143.857.580.758,56
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	18.142.942,00	1.799.300,00	0,00	0,00	19.942.242,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	719.995.302,00	104.007.143,00	0,00	1.996.135,00	822.006.310,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	717.741.949,00	50.698.241,00	0,00	127.444.754,00	640.995.436,00
10	Dinas Sosial	769.233.926,00	102.333.849,00	0,00	0,33	871.567.774,67
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	465.812.401,00	40.052.960,00	0,00	0,00	505.865.361,00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	99.055.782,00	13.769.610,00	0,00	0,00	112.825.392,00
13	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	5.282.285.882,00	641.589.155,67	59.095.526,51	0,00	5.982.970.564,18
14	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	870.670.205,00	65.918.983,96	0,00	0,00	936.589.188,96
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dinas Perhubungan	48.791.622.837,00	7.383.702.100,12	9.267.071,33	0,00	56.184.592.008,45
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	140.366.612,00	14.738.466,04	0,00	0,23	155.105.077,81
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.067.333,00	992.320,00	0,00	0,00	3.059.653,00
19	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	6.403.990,00	1.568.324,00	0,00	0,00	7.972.314,00
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4.653.139.156,00	1.134.236.644,29	0,00	38.538,00	5.787.337.262,29
21	Dinas Kebudayaan	6.812.243.410,00	1.139.004.655,96	235.861.454,90	0,00	8.187.109.520,86
22	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	2.256.025.878,00	252.187.240,00	0,00	0,00	2.508.213.118,00
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	6.169.126.792,00	791.418.542,21	460.116.355,27	642.928.732,54	6.777.732.956,94
24	Dinas Pariwisata	1.462.491.705,00	105.208.460,00	0,00	307.615.000,00	1.260.085.165,00
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.727.520.487,00	170.619.523,22	2.614.125,72	7,85	1.900.754.128,09
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	43.547.500,00	2.748.000,00	0,00	0,00	46.295.500,00
27	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	109.021.311,00	7.472.460,00	0,00	0,00	116.493.771,00
28	Biro Kesejahteraan Rakyat	1.950.992.117,00	163.762.502,00	0,00	0,00	2.114.754.619,00
29	Biro Pengadaan Barang/Jasa	325.317.117,00	50.593.227,00	0,00	0,00	375.910.344,00
30	Biro Perekonomian dan Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Biro Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Biro Administrasi Pimpinan	674.942.586,00	42.420.433,00	0,00	0,00	717.363.019,00
33	Biro Umum	2.557.718.999,00	214.862.995,00	0,00	0,00	2.772.581.994,00
34	Biro Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Badan Keuangan dan Aset Daerah	21.390.723.824,00	976.506.629,00	0,00	0,00	22.367.230.453,00
37	Badan Pendapatan Daerah	10.860.622.287,00	834.773.008,00	0,00	0,00	11.695.395.295,00
38	Badan Kepegawaian dan Korpri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NO	PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL PENYUSUTAN	BEBAN PENYUSUTAN	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5-6
		488.842.960.065,00	52.796.062.596,33	6.654.966.764,49	1.810.010.415,37	546.483.979.010,45
40	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Sekretariat DPRD	809.317.338,00	106.249.964,00	2,10	2,60	915.567.301,50
42	Badan Penghubung Daerah	1.232.684.538,00	244.694.695,66	686.887.439,52	0,00	2.164.266.673,18
43	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.3.1.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	4.011.564.533.138,15	3.966.635.637.433,47

Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Komponen biaya perolehan aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai. Pengeluaran untuk pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dapat dikapitalisasi berupa:

- a) Pengeluaran yang dilaksanakan melalui kontrak yaitu Nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;
- b) Pengeluaran untuk pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat saldo awal aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 1 Januari 2024 sebesar Rp3.966.635.637.433,47. Mutasi aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.173 Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2024

ASET TETAP JALAN IRIGASI DAN JARINGAN				
I	Saldo Awal Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan, 1 Januari 2024			3.966.635.637.433,47
II	Penambahan :			
	1	Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024	36.791.762.576,47	
	2	Reklasifikasi Masuk Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin	161.659.000,00	
	3	Reklasifikasi Masuk Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	578.678.376,00	
	4	Reklasifikasi Masuk Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.029.318.080,00	
	5	Reklasifikasi Masuk Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Aset Lain-lain	99.140.000,00	
	6	Kapitalisasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Beban Jasa Konsultan Perencanaan	358.562.745,00	
	7	Kapitalisasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Beban Jasa Konsultan Pengawasan	1.353.045.280,00	

ASET TETAP JALAN IRIGASI DAN JARINGAN				
	8	Kapitalisasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan	148.740.000,00	
	9	Kapitalisasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan (Tunda Bayar Tahun 2024) dari Beban Jasa Konsultan dan Pengawasan	186.879.650,00	
	10	Hibah Masuk Peralatan dan Mesin dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Instansi Lainnya	279.565.000,00	
	11	Koreksi nilai pengakuan Utang Belanja Tahun 2024 berdasarkan Hasil Reviu Inspektorat	150.662.210,00	
	12	Mutasi Tambah dari Belanja Modal Jalan yang bersumber dari dana SPP	949.484.900,00	
	13	Utang Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024	6.752.838.308,21	
		Total Penambahan :		49.840.336.125,68
III		Pengurangan :		
	1	Reklasifikasi Keluar Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	1.822.590.621,00	
	2	Reklasifikasi Keluar Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan ke Aset Lainnya karena Hibah	2.113.180.550,00	
	3	Pelunasan Utang Belanja TA 2023	280.667.750,00	
	4	Koreksi kelebihan pembayaran atas Paket Pekerjaan Belanja Modal Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan	695.001.500,00	
		Total Pengurangan		4.911.440.421,00
IV		Saldo Akhir Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan, 31 Desember 2024		4.011.564.533.138,15

Dari tabel mutasi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- A. Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi Dan Jaringan sebesar Rp49.840.336.125,68 berasal dari:
1. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 sebesar Rp36.791.762.576,47

a. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp2.449.500.854,00

b. Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp543.894.653,10

c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp33.650.878.049,37

d. Dinas Pendidikan sebesar Rp147.489.020,00
2. Reklasifikasi yang berasal dari Belanja Modal Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang bersumber dari dana BLUD TA 2024 pada Dinas Pendidikan sebesar Rp161.659.000,00
3. Reklasifikasi Masuk Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp578.678.376,00 antara lain:

a. Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga (semenisasi dan pengerjaan Batu Miring jalan depan Stadion Gelora Sri Tribuana Dompok) sebesar Rp309.705.376,00

b. Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Semenisasi Halaman SMK Negeri 2 Cening Desa Merawang, Kab. Lingga) sebesar Rp179.787.000,00 dan Pembangunan Fasilitas Air Bersih Kantor Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp89.186.000,00
4. Reklasifikasi Masuk Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp2.029.318.080,00 pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (Pembangunan *Box Culvert* Ruas Jalan Sp. Budus - Pelabuhan Roro Penarik Kab. Lingga)

5. Reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan dari Aset Lain-lain BLUD pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud (Semenisasi jalan Gedung Jiwa) sebesar Rp99.140.000,00
6. Kapitalisasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Beban Jasa Konsultan Perencanaan sebesar Rp358.562.745,00 antara lain:
 - a. Kapitalisasi Beban Jasa Konsultan Perencanaan - Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp9.768.000,00
 - b. Kapitalisasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Beban Jasa Konsultan Perencanaan pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp335.879.895,00 antara lain:
 - 1) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultan Perencanaan ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan (Jalan Provinsi, Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana, dan Jaringan Cabang Distribusi) sebesar Rp99.439.905,00
 - 2) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultan Perencanaan ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan (Jalan Provinsi, Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana, dan Jaringan Cabang Distribusi) sebesar Rp176.557.710,00
 - 3) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultan Perencanaan ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan (Jalan Provinsi, Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana, dan Jaringan Cabang Distribusi) sebesar Rp59.882.280,00
 - c. Kapitalisasi Beban Jasa Konsultan Perencanaan - Jasa Arsitektur Lainnya ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan (*paving block* SMAN 18 batam) pada Dinas Pendidikan Sebesar Rp12.914.850,00
7. Kapitalisasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Beban Jasa Konsultansi Pengawasan sebesar Rp1.353.045.280,00 antara lain:
 - a. Kapitalisasi dari Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp19.436.100,00
 - b. Kapitalisasi dari Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Jaringan dan Instalasi Listrik ke Aset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp12.420.900,00
 - c. Kapitalisasi dari Beban Jasa Konsultan Pengawasan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp1.311.224.920,00 antara lain:
 - 1) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultan Pengawasan ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan (Jalan Provinsi, Jaringan Cabang Distribusi, Jembatan pada Jalan Provinsi) sebesar Rp9.960.880,00
 - 2) Kapitalisasi Jasa Konsultan Pengawasan ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan (Jalan Provinsi, Jaringan Cabang Distribusi, Jembatan pada Jalan Provinsi) sebesar Rp1.251.580.440,00
 - 3) Kapitalisasi Jasa Konsultan Pengawasan ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan (Jalan Provinsi, Jaringan Cabang Distribusi, Jembatan pada Jalan Provinsi) sebesar Rp49.683.600,00
 - d. Kapitalisasi dari Beban Jasa Konsultan Pengawasan - Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan (*paving block* SMAN 18 batam) pada Dinas Pendidikan sebesar Rp9.963.360,00

8. Kapitalisasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan dari Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp148.740.000,00
9. Kapitalisasi Beban Jasa Konsultan dan Pengawasan ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (Tunda Bayar 2024) sebesar Rp186.879.650,00 antara lain:
 - a. Kapitalisasi Beban Jasa Konsultan Perencanaan - Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan (Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam) sebesar Rp37.012.950,00
 - b. Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan (Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam) sebesar Rp149.866.700,00
10. Hibah Masuk Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Instansi Lainnya pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yaitu Penerimaan Hibah BMD Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan dari Pemerintah Kabupaten Bintan berdasarkan BAST Nomor 298/032/XI/2023 Tanggal 14 November 2023 sebesar Rp279.565.000,00
11. Koreksi atas nilai pengakuan Utang Belanja Modal Jembatan Tahun 2024 pada Jalan Provinsi berdasarkan Hasil Reviu Inspektorat pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertahanan sebesar Rp150.662.210,00
12. Mutasi tambah dari Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan yang bersumber dari dana SPP pada Dinas Pendidikan Provinsi sebesar Rp949.484.900,00
13. Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 sebesar Rp6.752.838.308,21 antara lain:
 - a. Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp5.831.451.278,21 antara lain:
 - 1) Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Sub Kegiatan Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT sebesar Tahun 2024 Rp138.000.000,00
 - 2) Utang Belanja Modal Jaringan Distribusi Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Tahun 2024 sebesar Rp2.722.935.099,16
 - 3) Utang Belanja Modal Jaringan Distribusi Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Tahun 2024 Rp1.806.229.879,05
 - 4) Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Tahun 2024 sebesar Rp418.945.500,00
 - 5) Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Tahun 2024 sebesar Rp745.340.800,00
 - b. Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp921.387.030,00 antara lain:
 - 1) Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya Paket Pekerjaan Pembangunan Tanggul Penahan Gelombang Desa Tukul Kec Bakung Serumpun Kabupaten Lingga, Lanjutan pada sub keg Pembangunan *Seawall* dan

- Bangunan Pengaman Pantai Lainnya Tahun 2024 sebesar Rp127.401.390,00
- 2) Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya Paket Pekerjaan Pembangunan Tanggul Penahan Gelombang Dusun 1 Desa Tanjung Harapan Kec. Singkep Pembangunan *Seawall* dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya Tahun 2024 sebesar Rp331.192.630,00
 - 3) Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya Paket Pekerjaan Pembangunan Saluran utama Sagulung (Lanjutan) pada CV. Miniko Sejahtera atas pekerjaan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Tahun 2024 sebesar Rp165.523.100,00
 - 4) Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya Paket Pekerjaan Pembangunan Tanggul Penahan Gelombang Desa Tukul Kec. Bakung Serumpun Kabupaten Lingga, Lanjutan Pembangunan *Seawall* dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya Tahun 2024 sebesar Rp297.269.910,00
- B. Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp4.911.440.421,00 berasal dari :
1. Reklasifikasi Keluar Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.822.590.621,00 antara lain:
 - a. Reklasifikasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp378.739.321,00
 - b. Reklasifikasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp1.443.851.300,00 antara lain:
 - 1) Reklasifikasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan ke Peralatan dan Mesin berupa Genset di Karimun dan Lingga sebesar Rp1.164.286.300,00
 - 2) Reklasifikasi Hibah BMD dari Pemerintah Kabupaten Bintan berdasarkan BAST Nomor 298/032/XI/2023 Tanggal 14 November 2023 berupa Genset sebesar Rp279.565.000,00
 2. Reklasifikasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan ke Aset Lainnya karena Hibah Keluar BMD (Dermaga Ponton di Binjai Natuna) ke Pemerintah Kabupaten Natuna berdasarkan BAST Nomor 000.2.3.2/UM-SET/309/XII/2024 pada Dinas Perhubungan sebesar Rp2.113.180.550,00
 3. Pelunasan Utang Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2023 sebesar Rp280.667.750,00
 4. Koreksi kelebihan pembayaran atas Paket Pekerjaan Belanja Modal Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp695.001.500,00 antara lain:
 - a. Kekurangan Volume sebesar Rp54.466.200,00 atas Pekerjaan Jalan SP. Batu 14-Pel. Tg. Berlian, Kab. Karimun pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
 - b. Kekurangan Volume sebesar Rp46.918.800,00 atas Pekerjaan Jalan SP. Batu 14– Pel. Tg. Berlian, Kab. Karimun (Lanjutan) pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
 - c. Kekurangan Volume dan Ketidaksesuaian Spesifikasi sebesar Rp591.123.800,00 atas Pekerjaan Peningkatan/Rekonstruksi Jalan Sei Asam - Sebele - Penarah - Lebu (Lanjutan), Kab. Karimun pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

- d. Kekurangan Volume dan Ketidaksesuaian Spesifikasi pada Pekerjaan Revitalisasi dan Instalasi Listrik di Pelabuhan Perikanan Kijang sebesar Rp2.492.700,00 pada Dinas Kelautan dan Perikanan
- C. Saldo Akhir Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2024 senilai Rp4.011.564.533.138,15

Adapun rincian mutasi aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per OPD dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 5.174 Rincian Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per OPD

PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	PENAMBAHAN DARI BELANJA MODAL (LRA)	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6 = 2 + 3 + 4 - 5
Dinas Pendidikan	13.284.230.830,00	147.489.020,00	1.134.022.110,00	0,00	14.565.741.960,00
Dinas Kesehatan	1.021.326.000,01	0,00	0,00	0,00	1.021.326.000,01
Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	12.279.215.917,36	0,00	0,00	0,00	12.279.215.917,36
Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	6.622.895.500,00	0,00	99.140.000,00	0,00	6.722.035.500,00
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	2.843.244.699.742,17	33.650.878.049,37	4.935.351.785,00	973.176.550,00	2.880.857.753.026,54
Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	285.529.806.445,68	0,00	268.973.000,00	0,00	285.798.779.445,68
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.996.000,00	0,00	0,00	0,00	9.996.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	208.622.000,00	0,00	0,00	0,00	208.622.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	516.959.431,07	0,00	0,00	0,00	516.959.431,07
Dinas Sosial	20.185.000,00	0,00	0,00	0,00	20.185.000,00
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	600.927.000,00	0,00	0,00	0,00	600.927.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	429.594.968,00	0,00	0,00	0,00	429.594.968,00
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	25.196.931.434,36	0,00	0,00	0,00	25.196.931.434,36
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	99.880.000,00	0,00	0,00	0,00	99.880.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Dinas Perhubungan	288.082.610.044,55	0,00	0,00	2.113.180.550,00	285.969.429.494,55
Dinas Komunikasi dan Informatika	7.453.564.535,00	0,00	0,00	0,00	7.453.564.535,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	108.334.000,00	0,00	0,00	0,00	108.334.000,00
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	34.007.500,00	0,00	0,00	0,00	34.007.500,00
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	913.481.510,00	0,00	329.141.476,00	0,00	1.242.622.986,00
Dinas Kebudayaan	866.460.646,00	0,00	0,00	0,00	866.460.646,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	790.008.400,00	0,00	0,00	0,00	790.008.400,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	9.268.277.275,47	543.894.653,10	22.188.900,00	381.232.021,00	9.453.128.807,57
Dinas Pariwisata	5.351.707.445,00	0,00	0,00	0,00	5.351.707.445,00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	273.080.647.529,09	2.449.500.854,00	6.259.756.278,21	1.443.851.300,00	280.346.053.361,30

PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	PENAMBAHAN DARI BELANJA MODAL (LRA)	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6 = 2 + 3 + 4 - 5
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12.283.800,00	0,00	0,00	0,00	12.283.800,00
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Kesejahteraan Rakyat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	965.050.893,69	0,00	0,00	0,00	965.050.893,69
Biro Perekonomian dan Pembangunan	7.630.000,00	0,00	0,00	0,00	7.630.000,00
Biro Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Administrasi Pimpinan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Umum	16.957.200.066,00	0,00	0,00	0,00	16.957.200.066,00
Biro Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	171.687.192.620,02	0,00	0,00	0,00	171.687.192.620,02
Badan Pendapatan Daerah	1.358.823.900,00	0,00	0,00	0,00	1.358.823.900,00
Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	19.825.000,00	0,00	0,00	0,00	19.825.000,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	44.858.000,00	0,00	0,00	0,00	44.858.000,00
Sekretariat DPRD	556.989.000,00	0,00	0,00	0,00	556.989.000,00
Badan Penghubung Daerah	8.415.000,00	0,00	0,00	0,00	8.415.000,00
Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	3.966.635.637.433,47	36.791.762.576,47	13.048.573.549,21	4.911.440.421,00	4.011.564.533.138,15

Untuk masa manfaat aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.175 Masa Manfaat Aset Tetap Jalan, Irigasi Dan Jaringan

KODEFIKASI					URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
1	3	4			Jalan, Irigasi dan Jaringan	
1	3	4	1		Jalan dan Jembatan	
1	3	4	1	1	Jalan	10
1	3	4	1	2	Jembatan	50
1	3	4	2		Bangunan Air	
1	3	4	2	1	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	2	2	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1	3	4	2	3	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25
1	3	4	2	4	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	2	5	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	2	6	Bangunan Air Bersih/Air Baku	40
1	3	4	2	7	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	3		Instalasi	
1	3	4	3	1	Instalasi Air Bersih/Air Baku	30
1	3	4	3	2	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	3	3	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	3	4	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10

KODEFIKASI					URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
1	3	4	3	5	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	3	6	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	3	8	Instalasi Gas	30
1	3	4	3	9	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	3	10	Instalasi Lain	20
1	3	4	4		Jaringan	
1	3	4	4	1	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	4	2	Jaringan Listrik	40
1	3	4	4	3	Jaringan Telepon	20
1	3	4	4	4	Jaringan Gas	30

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dijelaskan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 5.176 Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL PENYUSUTAN	BEBAN PENYUSUTAN	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5-6
		2.145.873.723.430,17	31.951.574.481,37	167.715.912.036,52	2.324.293.972,65	2.343.216.915.975,41
1	Dinas Pendidikan	5.547.546.090,00	935.507.827,33	22.669.103,05	0,00	6.505.723.020,38
2	Dinas Kesehatan	401.319.050,00	25.652.400,00	20.863.701,44	0,00	447.835.151,44
3	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	4.912.147.653,70	329.295.849,00	0,00	35,77	5.241.443.466,93
4	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	1.424.629.034,00	233.578.065,00	0,00	0,00	1.658.207.099,00
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	1.457.370.179.608,63	0,00	167.558.056.311,07	0,00	1.624.928.235.919,70
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	222.316.572.230,14	5.779.347.213,00	14,08	2.055.465.202,38	226.040.454.254,84
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.358.968,00	333.200,00	0,00	0,00	5.692.168,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	71.363.384,00	5.746.666,00	0,00	0,00	77.110.050,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.615.991,00	51.695.943,11	0,00	0,49	60.311.933,62
10	Dinas Sosial	5.088.302,00	0,00	504.625,00	0,00	5.592.927,00
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	265.093.770,00	13.154.641,00	0,00	0,00	278.248.411,00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	159.731.826,00	36.892.996,00	0,00	0,00	196.624.822,00
13	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	15.180.302.631,00	1.571.361.672,08	24.813.445,24	278.654,79	16.776.199.093,53
14	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	41.200.500,00	2.497.000,00	0,00	0,00	43.697.500,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.200.000,00	75.000,00	0,00	0,00	1.275.000,00
16	Dinas Perhubungan	189.562.704.225,00	13.911.896.112,67	0,00	268.550.033,33	203.206.050.304,34
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.564.856.011,00	308.078.614,95	1.522.162,12	0,00	3.874.456.788,07

NO	PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL PENYUSUTAN	BEBAN PENYUSUTAN	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5-6
		2.145.873.723.430,17	31.951.574.481,37	167.715.912.036,52	2.324.293.972,65	2.343.216.915.975,41
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	41.276.277,00	3.126.682,00	1,00	0,00	44.402.960,00
19	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	11.837.720,00	850.187,00	0,00	0,00	12.687.907,00
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	131.240.708,00	103.942.512,80	0,00	0,00	235.183.220,80
21	Dinas Kebudayaan	526.786.888,00	83.648.091,00	6,51	0,00	610.434.985,51
22	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	287.108.947,00	34.579.480,00	0,00	0,00	321.688.427,00
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.272.501.160,00	265.390.636,55	84.545.175,30	0,00	3.622.436.971,85
24	Dinas Pariwisata	1.843.285.351,00	94.845.120,00	0,00	0,00	1.938.130.471,00
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	70.774.827.169,00	7.016.758.758,88	2.937.484,25	42,77	77.794.523.369,36
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.641.268,00	482.606,00	6,46	0,00	8.123.880,46
27	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Biro Kesejahteraan Rakyat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Biro Pengadaan Barang/Jasa	551.341.405,00	71.152.189,00	1,00	0,00	622.493.595,00
30	Biro Perekonomian dan Pembangunan	2.925.832,00	190.750,00	0,00	0,00	3.116.582,00
31	Biro Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Biro Administrasi Pimpinan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Biro Umum	6.909.675.264,00	593.958.374,00	0,00	2,00	7.503.633.636,00
34	Biro Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Badan Keuangan dan Aset Daerah	160.035.826.318,70	414.900.683,00	0,00	0,00	160.450.727.001,70
37	Badan Pendapatan Daerah	331.354.803,00	33.661.935,00	0,00	1,12	365.016.736,88
38	Badan Kepegawaian dan Korpri	4.832.344,00	495.625,00	0,00	0,00	5.327.969,00
39	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	11.588.317,00	1.121.450,00	0,00	0,00	12.709.767,00
41	Sekretariat DPRD	284.962.259,00	26.514.701,00	0,00	0,00	311.476.960,00
42	Badan Penghubung Daerah	6.802.125,00	841.500,00	0,00	0,00	7.643.625,00
43	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
	279.218.737.302,70	260.235.633.980,32

Aset tetap lainnya mencakup buku dan perpustakaan, barang bercorak kesenian, serta hewan/ternak dan tumbuhan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah. Komponen Biaya Perolehan aset tetap lainnya adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola,

misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.

Pengeluaran untuk pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai yang dapat dikapitalisasi meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi. Pengeluaran untuk pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dapat dikapitalisasi berupa:

- a) Pengeluaran yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan;
- b) Pengeluaran yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

Aset Tetap Lainnya yang tidak dikapitalisasi tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun tetap diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan dan dalam Laporan BMN/D.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat saldo awal Aset Tetap Lainnya per 1 Januari 2024 sebesar Rp260.235.633.980,32. Mutasi aset tetap lainnya Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.177 Mutasi Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2024

ASET TETAP LAINNYA				
I	Saldo Awal Aset Tetap Lainnya, 1 Januari 2024			260.235.633.980,32
II	Penambahan :			
	1	Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2024	19.630.419.447,00	
	2	Mutasi Tambah Aset Tetap Lainnya antar OPD	623.948.000,00	
	3	Utang Belanja Modal Tahun 2024	43.775.000,00	
	4	Kapitalisasi dari Bahan Bangunan dan Konstruksi ke Aset Tetap Lainnya	581.637.900,00	
	5	Penambahan Aset Tetap Lainnya dari Belanja Modal yang bersumber dari dana SPP	383.440.700,00	
	6	Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Lainnya	52.500.000,00	
	7	Hibah Masuk Aset Tetap Lainnya dari Pengalihan Personil, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D)	1.196.297.650,38	
		Total Penambahan :		22.512.018.697,38
III	Pengurangan :			
	1	Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset Lain-lain	1.151.177.375,00	
	2	Mutasi Keluar Aset Tetap Lainnya antar OPD	623.948.000,00	
	3	Reklasifikasi dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	358.800.000,00	
	4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang bersumber dari Dana BOS	21.725.000,00	
	5	Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Aset Tetap Peralatan Mesin	1.373.265.000,00	
		Total Pengurangan		3.528.915.375,00
IV	Saldo Akhir ASET TETAP LAINNYA, 31 Desember 2024			279.218.737.302,70

Dari tabel mutasi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- A. Penambahan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp22.512.018.697,38 berasal dari:
 - 1. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 sebesar Rp19.630.419.447,00 antara lain:
 - a. Dinas Pendidikan sebesar Rp19.271.619.447,00
 - b. Sekretariat DPRD sebesar Rp358.800.000,00

- Mutasi Tambah Aset Tetap Lainnya antar OPD pada Badan Penghubung Daerah dari Dinas Pariwisata berdasarkan BAST Nomor 032.1/1/DISPAR/2024 Tanggal 21 Oktober 2024 sebesar Rp623.948.000,00
- Utang Belanja Modal Tahun 2024 berasal dari Utang Belanja Modal Alat Musik Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga peserta Didik pada Dinas Pendidikan sebesar Rp43.775.000,00
- Kapitalisasi dari Bahan Bangunan dan Konstruksi ke Aset Tetap Lainnya (Aset Tetap Renovasi) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp581.637.900,00
- Penambahan Aset Tetap Lainnya dari Belanja Modal yang bersumber dari dana SPP pada Dinas Pendidikan sebesar Rp383.440.700,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Lainnya (Buku Umum) pada Dinas Pendidikan sebesar Rp52.500.000,00
- Hibah Masuk Aset Tetap Lainnya dari Pengalihan Personil, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) dari Pemerintah Kota Batam dengan Naskah Hibah Nomor 023/900.1.4.3/I/2024 pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.196.297.650,38

- B. Pengurangan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp3.528.915.375,00 berasal dari:
- Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset Lain-lain sebesar Rp1.151.177.375,00 antara lain:
 - Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset Lain-lain akibat usulan pemusnahan pada Dinas Kebudayaan sebesar Rp1.144.418.000,00
 - Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset Lain-lain karena Penghapusan BMD berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 526 Tahun 2024 Tanggal 5 April 2024 sebesar Rp6.759.375,00
 - Mutasi Keluar Aset Tetap Lainnya antar OPD pada Dinas Pariwisata ke Badan Penghubung Daerah berdasarkan BAST Nomor 032.1/1/DISPAR/2024 Tanggal 21 Oktober 2024 sebesar Rp623.948.000,00
 - Reklasifikasi dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin (Lukisan dan Ukiran) pada Sekretariat DPRD sebesar Rp358.800.000,00
 - Penyesuaian atas Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang bersumber dari Dana BOS dikarenakan adanya pengembalian belanja Buku ke Penerbit (rusak) sebesar Rp21.725.000,00
 - Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset Tetap Peralatan Mesin pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.373.265.000,00 diantaranya:
 - Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset Tetap Peralatan Mesin berupa Alat *Marching Band* sebesar Rp1.299.940.000,00
 - Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa Alat Musik SMK Negeri 3 Tanjungpinang Rp43.775.000,00
 - Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya - Aset Tetap Renovasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin akibat kesalahan pemilihan kode rekening pada saat penginputan ke aplikasi E-BMD pada SMA Negeri 1 Singkep dan SMK Negeri 8 Batam sebesar Rp29.550.000,00

- C. Saldo Akhir Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2024 senilai Rp279.218.737.302,70

Adapun rincian mutasi aset tetap lainnya per OPD dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 5.178 Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya per OPD

PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	PENAMBAHAN DARI BELANJA MODAL (LRA)	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6 = 2 + 3 + 4 - 5
Dinas Pendidikan	130.709.358.576,41	19.271.619.447,00	1.676.013.350,38	1.394.990.000,00	150.262.001.373,79
Dinas Kesehatan	1.123.552.174,10	0,00	0,00	0,00	1.123.552.174,10

PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	PENAMBAHAN DARI BELANJA MODAL (LRA)	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6 = 2 + 3 + 4 - 5
Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	640.455.426,00	0,00	0,00	0,00	640.455.426,00
Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	181.700.600,00	0,00	0,00	0,00	181.700.600,00
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	6.457.907.399,99	0,00	0,00	0,00	6.457.907.399,99
Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	70.822.930.854,30	0,00	0,00	0,00	70.822.930.854,30
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	247.771.000,00	0,00	0,00	0,00	247.771.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial	983.027.000,00	0,00	0,00	0,00	983.027.000,00
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	863.728.100,00	0,00	0,00	0,00	863.728.100,00
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	949.882.950,00	0,00	0,00	6.759.375,00	943.123.575,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	78.580.852,00	0,00	0,00	0,00	78.580.852,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	359.961.364,00	0,00	0,00	0,00	359.961.364,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	69.529.600,00	0,00	0,00	0,00	69.529.600,00
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	650.659.380,00	0,00	0,00	0,00	650.659.380,00
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	187.710.000,00	0,00	0,00	0,00	187.710.000,00
Dinas Kebudayaan	2.783.622.620,00	0,00	0,00	1.144.418.000,00	1.639.204.620,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	25.006.128.274,52	0,00	0,00	0,00	25.006.128.274,52
Dinas Kelautan dan Perikanan	1.554.386.800,00	0,00	0,00	0,00	1.554.386.800,00
Dinas Pariwisata	6.004.112.000,00	0,00	0,00	623.948.000,00	5.380.164.000,00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	12.870.000,00	0,00	0,00	0,00	12.870.000,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	129.134.960,00	0,00	581.637.900,00	0,00	710.772.860,00
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Kesejahteraan Rakyat	106.480.000,00	0,00	0,00	0,00	106.480.000,00
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	12.100.000,00	0,00	0,00	0,00	12.100.000,00
Biro Perekonomian dan Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Organisasi	45.380.000,00	0,00	0,00	0,00	45.380.000,00
Biro Administrasi Pimpinan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Umum	7.498.933.579,00	0,00	0,00	0,00	7.498.933.579,00
Biro Hukum	248.491.270,00	0,00	0,00	0,00	248.491.270,00
Inspektorat Daerah	236.708.000,00	0,00	0,00	0,00	236.708.000,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	256.584.900,00	0,00	0,00	0,00	256.584.900,00

PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	PENAMBAHAN DARI BELANJA MODAL (LRA)	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6 = 2 + 3 + 4 - 5
Badan Pendapatan Daerah	75.639.000,00	0,00	0,00	0,00	75.639.000,00
Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	71.697.600,00	0,00	0,00	0,00	71.697.600,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	24.500.000,00	0,00	0,00	0,00	24.500.000,00
Sekretariat DPRD	1.473.896.900,00	358.800.000,00	0,00	358.800.000,00	1.473.896.900,00
Badan Penghubung Daerah	358.712.800,00	0,00	623.948.000,00	0,00	982.660.800,00
Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	260.235.633.980,32	19.630.419.447,00	2.881.599.250,38	3.528.915.375,00	279.218.737.302,70

Masa manfaat aset tetap lainnya ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.179 Masa Manfaat Aset Tetap Lainnya

KODEFIKASI					URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
1	3	5			Aset Tetap Lainnya	
1	3	5	7	1	Aset tetap dalam renovasi	50

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya dapat dijelaskan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 5.180 Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL PENYUSUTAN	BEBAN PENYUSUTAN	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5-6
		17.028.422.714,00	32.852.207,76	731.598.314,56	504.635,09	17.792.368.601,23
1	Dinas Pendidikan	152.204.284,00	0,00	23.230.720,00	0,00	175.435.004,00
2	Dinas Kesehatan	191.003.874,00	22.471.043,48	0,00	4,40	213.474.913,08
3	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	18.326.042,00	0,00	3.012.500,04	0,09	21.338.541,95
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	11.963.451.016,00	0,00	0,00	0,00	11.963.451.016,00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Sosial	138.235.076,00	504.625,00	19.515.539,97	504.625,00	157.750.615,97
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	63.535.259,00	0,00	12.626.242,08	0,00	76.161.501,08

NO	PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL PENYUSUTAN	BEBAN PENYUSUTAN	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5-6
		17.028.422.714,00	32.852.207,76	731.598.314,56	504.635,09	17.792.368.601,23
13	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dinas Perhubungan	60.953.317,00	6.625.027,28	0,00	0,00	67.578.344,28
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.581.154,00	0,00	1.097.932,33	0,00	6.679.086,33
19	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	26.810.933,00	0,00	4.044.437,64	0,00	30.855.370,64
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	25.138.125,00	0,00	2.767.500,00	0,00	27.905.625,00
21	Dinas Kebudayaan	12.703.159,00	2.074.424,00	0,67	0,00	14.777.583,67
22	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	2.619.225.945,00	0,00	0,00	0,00	2.619.225.945,00
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	202.559.752,00	0,00	30.011.739,96	0,61	232.571.491,35
24	Dinas Pariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	4.846.982,50	0,00	4.846.982,50
27	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Biro Kesejahteraan Rakyat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Biro Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Biro Perekonomian dan Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Biro Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Biro Administrasi Pimpinan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Biro Umum	1.283.147.566,00	0,00	0,00	4,00	1.283.147.562,00
34	Biro Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Inspektorat	13.962.687,00	0,00	3.659.986,97	0,00	17.622.673,97
36	Badan Keuangan dan Aset Daerah	13.046.059,00	1.177.088,00	0,33	0,66	14.223.146,67
37	Badan Pendapatan Daerah	21.304.985,00	0,00	1.512.780,00	0,00	22.817.765,00
38	Badan Kepegawaian dan Korpri	9.030.339,00	0,00	1.323.952,00	0,33	10.354.290,67
39	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Badan Penghubung Daerah	208.203.142,00	0,00	623.948.000,07	0,00	832.151.142,07
43	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.3.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	25.295.808.664,94	44.722.208.283,85

Konstruksi dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Konstruksi dalam pengerjaan tersebut pada umumnya merupakan pembangunan fisik yang jangka waktu pelaksanaannya melebihi satu tahun anggaran yang diikat dengan kontrak tahun jamak.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat saldo awal aset tetap Konstruksi dalam Pengerjaan per 1 Januari 2024 sebesar Rp44.722.208.283,85 dengan mutasi aset tetap Konstruksi dalam Pengerjaan selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.181 Mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2024

ASET TETAP KONTRUKSI DALAM Pengerjaan			
I	Saldo Awal ASET TETAP KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan, 1 Januari 2024		44.722.208.283,85
II	Penambahan :		
	1	Kapitalisasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	424.824.195,00
	2	Penyesuaian Atas Kesalahan Koreksi Pencatatan Tahun 2023	99.480.008,05
	3	Koreksi BPK atas kesalahan Pencatatan	99.800.000,00
	Total Penambahan :		624.104.203,05
III	Pengurangan :		
	1	Reklasifikasi Keluar Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	12.236.072.691,96
	2	Reklasifikasi Keluar Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.029.318.080,00
	3	Reklasifikasi Keluar Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset lainnya	5.785.113.050,00
	Total Pengurangan :		20.050.503.821,96
IV	Saldo Akhir ASET TETAP KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan, 31 Desember 2024		25.295.808.664,94

Berdasarkan tabel mutasi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- A. Penambahan Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp624.104.203,05 berasal dari:
1. Kapitalisasi Masuk Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan sebesar Rp424.824.195,00, yang terdiri dari:

a. Kapitalisasi dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air ke Aset Konstruksi Dalam Pekerjaan (Review Masterplan Dermaga PP. Batu Duyung) pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp99.413.820,00

b. Kapitalisasi dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air ke Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp325.410.375,00
2. Penyesuaian Atas Koreksi Kesalahan Pencatatan Tahun 2023 sebesar Rp99.480.008,05, antara lain:

a. Penyesuaian Atas Koreksi Kesalahan Pencatatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp99.480.000,00

b. Penyesuaian Atas Koreksi Kesalahan Pencatatan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp8,05
3. Koreksi BPK atas pencatatan saldo persediaan untuk dijual/diserahkan per 31 Desember 2024 karena terdapat hasil pengadaan yang dipergunakan sendiri oleh dinas terkait sehingga seharusnya dilaporkan sebagai Aset Tetap, sebesar

Rp99.800.000,00 yang merupakan Paket Pekerjaan DED Peningkatan Sarana Prasarana Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

- B. Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp20.050.503.821,96 antara lain:
- 1. Reklasifikasi Keluar Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp12.236.072.691,96 yaitu Reklasifikasi Konstruksi dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Radioterapy sebesar Rp12.214.072.691,96 dan Pekerjaan Halaman Mesjid sebesar Rp22.000.000,00 ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib.
 - 2. Reklasifikasi Keluar Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Jalan, Irigasi dan Jaringan (Pembangunan *Box Culvert* Ruas Jalan Sp. Budus - Pelabuhan Roro Penarik Kab. Lingga) pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp2.029.318.080,00.
 - 3. Reklasifikasi Keluar Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Lainnya sebesar Rp5.785.113.050,00, antara lain:
 - a. Reklasifikasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pekerjaan ke Aset Lainnya (Aset Tetap Konstruksi Dalam Pekerjaan yang pembangunan kontruksinya telah dihentikan atau tidak ada rencana untuk direalisasikan pembangunannya) pada Dinas Perhubungan sebesar Rp298.100.000,00
 - b. Reklasifikasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pekerjaan ke Aset Lainnya (Aset Tetap Konstruksi Dalam Pekerjaan yang pembangunan kontruksinya telah dihentikan atau tidak ada rencana untuk direalisasikan pembangunannya) pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp67.925.000,00
 - c. Reklasifikasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Lainnya (Aset Tetap Konstruksi Dalam Pekerjaan yang pembangunan kontruksinya telah dihentikan atau tidak ada rencana untuk direalisasikan pembangunannya) pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp5.145.512.500,00
 - d. Reklasifikasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pekerjaan ke Aset Lainnya (Aset Tetap Konstruksi Dalam Pekerjaan yang pembangunan kontruksinya telah dihentikan atau tidak ada rencana untuk direalisasikan pembangunannya) pada Dinas Pendidikan sebesar Rp273.575.550,00
- C. Saldo akhir Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp25.295.808.664,94

Adapun rincian mutasi aset tetap Konstruksi dalam Pengerjaan per OPD dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 5.182 Rincian Mutasi Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan per OPD

PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	PENAMBAHAN DARI BELANJA MODAL (LRA)	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6 = 2 + 3 + 4 - 5
Dinas Pendidikan	1.070.824.267,95	0,00	8,05	273.575.550,00	797.248.726,00
Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	13.159.275.191,96	0,00	0,00	12.236.072.691,96	923.202.500,00
Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	34.870.000,00	0,00	0,00	0,00	34.870.000,00

PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	PENAMBAHAN DARI BELANJA MODAL (LRA)	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6 = 2 + 3 + 4 - 5
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	20.494.187.979,04	0,00	325.410.375,00	7.174.830.580,00	13.644.767.774,04
Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	775.862.000,00	0,00	199.280.000,00	0,00	975.142.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial	29.977.200,00	0,00	0,00	0,00	29.977.200,00
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	184.467.000,00	0,00	0,00	0,00	184.467.000,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	4.642.188.844,90	0,00	0,00	298.100.000,00	4.344.088.844,90
Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Kebudayaan	4.250.805.800,00	0,00	0,00	0,00	4.250.805.800,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	67.925.000,00	0,00	99.413.820,00	67.925.000,00	99.413.820,00
Dinas Pariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	11.825.000,00	0,00	0,00	0,00	11.825.000,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Kesejahteraan Rakyat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Perekonomian dan Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Administrasi Pimpinan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	PENAMBAHAN DARI BELANJA MODAL (LRA)	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6 = 2 + 3 + 4 - 5
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Penghubung Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	44.722.208.283,85	0,00	624.104.203,05	20.050.503.821,96	25.295.808.664,94

5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	(4.549.816.476.728,71)	(4.176.976.245.412,62)

Akumulasi penyusutan adalah bagian dari biaya perolehan aktiva tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aktiva tersebut diperoleh. Akumulasi penyusutan aktiva tetap merupakan akun kontra aktiva tetap yang berhubungan.

Penyusutan aset tetap diakui dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode dan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Untuk penyusutan atas Aset Tetap Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

Pengukuran penyusutan aset tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah.
- b) Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.Masa manfaat aset tetap dihitung sejak perolehan aset tetap dimaksud.
- c) Masa manfaat aset tetap ditetapkan.
- d) Untuk perhitungan penyusutan, aset tetap dilakukan setiap bulan dimulai pada bulan perolehan aset tetap bersangkutan.
- e) Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.
- f) Metode garis lurus atau *straight line method* adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.
- g) Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.

Adapun rincian Akumulasi Penyusutan per OPD dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 5.183 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per OPD						
NO	PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL PENYUSUTAN	BEBAN PENYUSUTAN	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5-6
		4.176.976.245.412,62	171.803.528.135,35	260.277.640.479,38	59.240.937.298,64	4.549.816.476.728,71
1	Dinas Pendidikan	558.249.814.723,20	20.411.961.433,76	82.240.495.575,59	331.979,85	660.901.939.752,7000
2	Dinas Kesehatan	59.582.017.059,00	1.668.409.575,75	28.746.825,73	1.222.897.869,64	60.056.275.590,84
3	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	286.685.136.384,18	38.200.671.977,02	2.959.506.756,20	18.527.749.170,43	309.317.565.946,97
4	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	101.129.717.721,00	9.673.174.743,40	2.232.701.640,81	14.077.100.619,11	98.958.493.486,10
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	1.478.757.599.549,63	3.784.836.192,51	167.703.746.551,29	402.423.906,11	1.649.843.758.387,32
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	370.907.955.654,14	17.144.088.242,50	364.447.472,04	2.055.465.207,76	386.361.026.160,92
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.172.788.462,00	1.021.447.478,73	328.908.478,59	225.900.000,00	5.297.244.419,3200
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	7.610.107.628,00	621.665.789,03	374.845,70	2.363.464,72	8.229.784.798,0099
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15.551.543.594,00	597.749.416,96	0,00	480.433.046,91	15.668.859.964,05
10	Dinas Sosial	4.151.511.272,00	399.454.031,21	101.767.729,90	729.859,40	4.652.003.173,7068
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.136.216.214,00	208.956.389,60	0,00	37,46	4.345.172.566,14
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	5.727.889.655,00	294.206.628,97	12.626.277,52	0,00	6.034.722.561,49
13	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	48.379.739.997,22	3.611.388.025,87	92.568.618,99	131.091.596,89	51.952.605.045,1898
14	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	17.912.104.675,00	729.445.777,04	275.558,00	297.225.088,00	18.344.600.922,04
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.208.545.822,00	433.220.796,21	23,27	225.900.000,00	8.415.866.641,48
16	Dinas Perhubungan	280.048.990.402,50	23.015.846.758,59	815.447.071,33	598.560.068,65	303.281.724.163,77
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	22.283.889.658,00	1.588.044.235,89	1.522.162,12	312.026.390,45	23.561.429.665,56
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.552.960.066,00	250.471.640,28	1.098.045,75	224,82	4.804.529.527,21
19	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	6.570.192.006,00	677.412.317,71	4.044.437,64	1,85	7.251.648.759,50
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	13.529.269.759,00	2.099.685.662,33	2.806.037,90	77.099,67	15.631.684.359,56
21	Dinas Kebudayaan	12.945.413.904,00	1.952.729.379,53	262.462.140,12	228.488.749,30	14.932.116.674,35
22	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	24.318.667.750,00	629.933.690,22	0,00	53.200.009,80	24.895.401.430,42
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	70.684.267.818,05	4.262.163.764,35	574.673.270,53	6.019.913.240,95	69.501.191.611,98
24	Dinas Pariwisata	8.402.748.760,00	509.665.773,80	0,00	361.047.500,55	8.551.367.033,25
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	79.991.043.365,00	7.520.016.456,33	295.015.605,65	66.330.056,51	87.739.745.370,4704
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6.963.797.904,00	564.111.180,38	214.863.120,53	0,00	7.742.772.204,91
27	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	3.850.577.916,00	1.328.850.270,67	150.450.000,00	1.203.598.797,00	4.126.279.389,6700
28	Biro Kesejahteraan Rakyat	4.898.458.123,00	487.734.524,57	19,98	8,12	5.386.192.659,43
29	Biro Pengadaan Barang/Jasa	6.101.511.511,00	417.678.489,06	3,61	1,11	6.519.190.002,56

NO	PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL PENYUSUTAN	BEBAN PENYUSUTAN	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5-6
		4.176.976.245.412,62	171.803.528.135,35	260.277.640.479,38	59.240.937.298,64	4.549.816.476.728,71
30	Biro Perekonomian dan Pembangunan	4.553.503.859,00	198.904.484,71	0,00	39,80	4.752.408.303,91
31	Biro Organisasi	1.747.552.590,00	126.946.819,33	0,00	1,00	1.874.499.408,33
32	Biro Administrasi Pimpinan	10.560.018.314,50	486.710.877,61	0,00	39,90	11.046.729.152,21
33	Biro Umum	267.992.351.147,00	8.720.157.172,18	571.555.333,87	1.599.680.756,00	275.684.382.897,05
34	Biro Hukum	1.932.792.045,00	47.187.407,42	0,00	1,00	1.979.979.451,42
35	Inspektorat Daerah	7.738.140.226,00	1.203.393.641,67	3.659.986,97	71,42	8.945.193.783,2200
36	Badan Keuangan dan Aset Daerah	207.133.256.572,70	3.142.288.867,28	160,95	4.783.860.648,70	205.491.684.952,23
37	Badan Pendapatan Daerah	51.828.457.637,00	5.586.851.651,54	1.512.780,00	1.930.672.548,80	55.486.149.519,74
38	Badan Kepegawaian dan Korpri	7.109.079.841,00	475.681.737,45	1.323.964,00	0,33	7.586.085.542,12
39	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.342.992.889,00	708.234.408,10	0,00	2.292.527,51	2.048.934.769,59
40	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	13.558.928.038,50	1.073.081.482,77	37.099,34	2.578.674.502,00	12.053.372.118,61
41	Sekretariat DPRD	76.050.021.970,00	3.503.541.449,38	2,10	1.684.276.953,26	77.869.286.468,22
42	Badan Penghubung Daerah	8.949.323.695,00	2.210.878.581,41	1.311.002.883,08	168.625.213,86	12.302.579.945,63
43	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	175.349.235,00	214.648.912,23	0,28	0,00	389.998.147,51

Properti Investasi

Pada tahun 2024 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah memiliki kebijakan akuntansi yang mengatur tentang properti investasi sebagai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 17 (PSAP 17), yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah mendata aset tetap yang memiliki potensi untuk dicatat sebagai properti investasi dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.184 Rincian Aset Tetap Tanah yang berpotensi peruntukan pemanfaatan atau tujuan penggunaan definitif

No	Nama Barang	Kode Barang	Register	Luas Tanah	Tahun Perolehan	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nilai Perolehan (Rp)
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.001.004.001	170	18.144	2006	Hak Pakai	29 September 2022	145.152.000,00
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.001.004.001	171	20.000	2006	Hak Pakai	23 September 2022	140.000.000,00
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.001.004.001	171	13.920	2006	Hak Pakai	23 September 2022	97.440.000,00
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.001.004.001	171	13.710	2006	Hak Pakai	23 September 2022	311.997.000,00
5	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.001.004.001	174	19.789	2006	Hak Pakai	23 September 2022	65.303.700,00

No	Nama Barang	Kode Barang	Register	Luas Tanah	Tahun Perolehan	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nilai Perolehan (Rp)
6	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.001.004.001	175	2.488	2006	Hak Pakai	23 September 2022	8.210.000,00
Total								768.102.700,00

Namun Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum dapat menyajikan aset tetap tersebut sebagai bagian dari aset properti investasi dalam neraca karena penyajian tersebut terkendala hal-hal yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau antara lain:

- a) Dasar pengakuan intensi sebagai dasar pencatatan properti investasi berupa intensi untuk disewakan, mengharapkan kenaikan nilai, atau tanah yang belum ditetapkan peruntukannya/tidak digunakan. Bentuk pengakuan intensi antara lain seperti penetapan kepala daerah/pengelola barang atas rencana pemanfaatan tanah yang belum ditentukan peruntukannya dan/atau tanah/bangunan untuk disewakan belum menjadi bagian yang diatur dalam kebijakan akuntansi; dan
- b) Referensi bagi Pengelola BMD yang memberikan panduan secara jelas mengenai aspek dan ukuran signifikansi dalam menentukan suatu aset/bangunan yang digunakan secara bersamaan untuk kegiatan operasional dan persewaan, apakah akan diperlakukan sebagai aset tetap atau properti investasi. Pengaturan tersebut antara lain berupa persentase minimal pemanfaatan aset untuk disewakan sebagai dasar pengakuan properti investasi.

Dalam rangka mengupayakan penyajian tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kedepannya akan melengkapi dan memperbaiki kebijakan akuntansi terkait properti investasi dengan memperhatikan SAP dan ketentuan terkait lainnya.

5.3.1.4. Aset Lainnya

Aset Lainnya	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	541.842.363.389,04	562.807.778.012,83

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang termasuk aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan Pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya. Aset lainnya per 31 Desember 2024 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp541.842.363.389,04 yang terdiri dari:

Tagihan Jangka Panjang/ Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tagihan Jangka Panjang/Tuntutan Ganti Kerugian Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat lain, merupakan suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian daerah, sedangkan Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara adalah suatu tata cara perhitungan terhadap bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan, maka bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian yang terjadi berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp993.008.950,00 dengan rincian pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.185 Rincian Daftar Tuntutan Kerugian Daerah

No	Jenis Kerugian	SKTJM/SKP				Jaminan	Uraian	Nilai Terhutang	Pengembalian s.d. 31 Des 2024	Saldo
		Nomor	Tanggal Penerbitan	Nilai TP/TGR Berdasarkan SKTJM/SKP	Jangka Waktu Penyelesaian TP/TGR (bulan)					
1	TGR Non Bendahara	tidak ada SKTJM				-	Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) DPRD Prov. Kepri Tahun Anggaran 2006	450.168.000,00	82.000.000,00	368.168.000,00
2	Tuntutan Perbendaharaan	SKTJM atas Nama Ipan	01 November 2010	706.668.199,00	24 bulan	Sertifikat Tanah Nomor 797 Tahun 1984	Pengembalian Bendahara Pengeluaran	706.668.199,00	101.075.249,00	605.592.950,00
3	TGR Non Bendahara	004/SKTJM/RUGDA-BPK/2017	16 August 2017	28.500.000,00	24 bulan	Surat Pengoperasian Penguasaan Tanah (Alas Hak)	Pengembalian Belanja	28.500.000,00	17.752.000,00	10.748.000,00
4	TGR Non Bendahara	005/SKTJM/RUGDA-BPK/2017	04 September 2017	12.000.000,00	24 bulan	BPKB Kendaraan Roda Dua	Pengembalian Belanja	12.000.000,00	3.500.000,00	8.500.000,00
Jumlah								1.197.336.199,00	204.327.249,00	993.008.950,00

Aset Tidak Berwujud

Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi. Pengurangan ini dilakukan dengan mendebit akun “Beban Amortisasi” terhadap akun “Akumulasi Amortisasi”. Amortisasi hanya dapat diterapkan atas ATB yang memiliki masa manfaat terbatas dan pada umumnya ditetapkan dalam jumlah yang sama pada periode atau dengan suatu basis alokasi garis lurus. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Aset Tidak berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp23.934.822.607,06 dengan uraian sebagai berikut:

- Nilai Perolehan	26.348.603.927,06
- Amortisasi	(2.413.781.320,00)
Jumlah Aset Tidak Berwujud	23.934.822.607,06

Amortisasi per Jenis Aset Tidak Berwujud dijelaskan lebih rinci pada **Lampiran 8**. Tabel rekapitulasi per jenis Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.186 Rekapitulasi per Jenis Aset Tidak Berwujud

No.	Jenis Aset Tidak Berwujud	Nilai Perolehan	Akumulasi Amortisasi/ Penyusutan 1 Jan 2024	Amortisasi/ Penyusutan		Akumulasi Amortisasi/ Penyusutan 31 Desember 2024	Nilai Buku
				Semester 1	Semester 2		
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5+6	8 = 3-7
1	Lisensi dan Frenchise	123.841.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.841.649,00
2	Software	23.237.796.938,06	2.413.781.320,00	0,00	0,00	2.413.781.320,00	20.824.015.618,06
3	Software Lainnya	493.627.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.627.430,00
4	Kajian	2.493.337.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493.337.910,00
	JUMLAH	26.348.603.927,06	2.413.781.320,00	0,00	0,00	2.413.781.320,00	23.934.822.607,06

Mutasi Aset Tidak Berwujud pada tahun 2024 dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.187 Mutasi Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2024

ASET TAK BERWUJUD				
I	Saldo Awal ASET TAK BERWUJUD, 1 Januari 2024			26.984.101.427,06
II	Penambahan :			
	1	Realisasi Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Tahun 2024		5.389.675.894,00
		Total Penambahan :		5.389.675.894,00
III	Pengurangan			
	1	Mutasi Keluar Akibat Penghapusan Barang Milik Daerah		4.771.997.500,00
	2	Reklasifikasi Keluar ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin		985.370.500,00
	3	Reklasifikasi Keluar ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan		168.665.394,00
	4	Reklasifikasi Keluar ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan		99.140.000,00

ASET TAK BERWUJUD			
		Total Pengurangan :	6.025.173.394,00
IV	Saldo Akhir ASET TAK BERWUJUD, 31 Desember 2024		26.348.603.927,06

Berdasarkan tabel mutasi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- A. Penambahan Aset Tidak Berwujud sebesar Rp5.389.675.894,00
1. Realisasi Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Tahun 2024 sebesar Rp5.389.675.894,00 berasal dari:
- a) Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib sebesar Rp4.119.500.000,00
- b) Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp1.270.175.894,00
- B. Pengurangan Aset Tidak Berwujud sebesar Rp6.025.173.394,00 yang terdiri dari:
1. Mutasi Keluar akibat Penghapusan Barang Milik Daerah sebesar Rp4.771.997.500,00 berasal dari:
- a) Penghapusan Barang Milik Daerah Aset Tak Berwujud berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 658 Tahun 2024 pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp187.000.000,00
- b) Penghapusan Barang Milik Daerah Aset Tak Berwujud (*Software*) berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 658 Tahun 2024 pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp2.961.240.000,00
- c) Penghapusan Barang Milik Daerah Aset Tak Berwujud (*Software*) berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 658 Tahun 2024 pada Badan Kepegawaian dan Korpri sebesar Rp665.390.000,00
- d) Penghapusan Barang Milik Daerah Aset Tak Berwujud berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor Nomor 658 Tahun 2024 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp88.330.000,00
- e) Penghapusan Barang Milik Daerah Aset Tak Berwujud berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 658 Tahun 2024 sebesar Rp102.800.000,00 dan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 837 Tahun 2024 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp469.562.500,00
- f) Penghapusan Barang Milik Daerah Aset Tak Berwujud (*Software*) berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 658 Tahun 2024 pada Biro Umum sebesar Rp297.675.000,00
2. Reklasifikasi Keluar Aset Tidak Berwujud Lainnya BLUD ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp985.370.500,00
3. Reklasifikasi Keluar dari Aset Tidak Berwujud Lainnya BLUD ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp168.665.394,00
4. Reklasifikasi Keluar dari Aset Tidak Berwujud Lainnya BLUD ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp99.140.000,00
- C. Saldo Akhir Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2024 senilai Rp26.348.603.927,06
- Adapun rincian mutasi Aset Tidak Berwujud per OPD dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 5.188 Rincian Mutasi Aset Tidak Berwujud per OPD

PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	PENAMBAHAN DARI BELANJA MODAL (LRA)	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6 = 2 + 3 + 4 - 5
Dinas Pendidikan	11.932.014.480,00	0,00	0,00	0,00	11.932.014.480,00
Dinas Kesehatan	638.362.500,00	0,00	0,00	572.362.500,00	66.000.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	1.699.775.000,06	4.119.500.000,00	0,00	0,00	5.819.275.000,06
Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	1.445.280.900,00	1.270.175.894,00	0,00	1.253.175.894,00	1.462.280.900,00
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	2.452.437.910,00	0,00	0,00	0,00	2.452.437.910,00
Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	27.900.000,00	0,00	0,00	0,00	27.900.000,00
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	34.650.000,00	0,00	0,00	0,00	34.650.000,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	44.000.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15.101.451,00	0,00	0,00	0,00	15.101.451,00
Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	777.700.000,00	0,00	0,00	187.000.000,00	590.700.000,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	259.000.000,00	0,00	0,00	0,00	259.000.000,00
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	63.998.500,00	0,00	0,00	0,00	63.998.500,00
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	43.000.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000.000,00
Dinas Kebudayaan	35.167.000,00	0,00	0,00	0,00	35.167.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	795.624.420,00	0,00	0,00	0,00	795.624.420,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	494.166.000,00	0,00	0,00	0,00	494.166.000,00
Dinas Pariwisata	28.160.000,00	0,00	0,00	0,00	28.160.000,00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	39.400.000,00	0,00	0,00	0,00	39.400.000,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Kesejahteraan Rakyat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00	8.700.000,00
Biro Perekonomian dan Pembangunan	401.788.200,00	0,00	0,00	0,00	401.788.200,00
Biro Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Administrasi Pimpinan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Umum	546.506.000,00	0,00	0,00	297.675.000,00	248.831.000,00
Biro Hukum	49.324.000,00	0,00	0,00	0,00	49.324.000,00

PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	PENAMBAHAN DARI BELANJA MODAL (LRA)	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6 = 2 + 3 + 4 - 5
Inspektorat Daerah	350.945.000,00	0,00	0,00	0,00	350.945.000,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	474.915.000,00	0,00	0,00	88.330.000,00	386.585.000,00
Badan Pendapatan Daerah	113.141.649,00	0,00	0,00	0,00	113.141.649,00
Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	727.742.711,00	0,00	0,00	665.390.000,00	62.352.711,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.961.240.000,00	0,00	0,00	2.961.240.000,00	0,00
Sekretariat DPRD	369.782.476,00	0,00	0,00	0,00	369.782.476,00
Badan Penghubung Daerah	140.028.230,00	0,00	0,00	0,00	140.028.230,00
Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	26.984.101.427,06	5.389.675.894,00	0,00	6.025.173.394,00	26.348.603.927,06

Aset Lain-lain

Aset Lain-lain adalah Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp361.847.876.562,91, terdiri atas:

1. Usulan Penghapusan Aset Tetap akan Dihibahkan/Rusak Berat
- Usulan penghapusan Aset Tetap termasuk Aset Tetap yang direncanakan untuk dihibahkan/dihapuskan sebesar Rp276.356.139.582,38 dengan akumulasi penyusutan atas aset tetap yang direncanakan untuk dihibahkan/dihapuskan sebesar Rp(41.286.530.988,55)

Tabel 5.189 Mutasi Aset Lain-lain atas Aset yang akan dihibahkan/rusak berat

ASET LAIN-LAIN - ASET YANG AKAN DIHIBAHKAN/RUSAK BERAT				
I	Saldo Awal ASET LAIN LAIN, 1 Januari 2024			243.280.366.169,27
II	<u>Penambahan :</u>			
	1	Reklasifikasi Masuk Aset Lain-Lain dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin	17.429.386.206,00	
	2	Reklasifikasi Masuk Aset Lain-Lain dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	360.692.695,00	
	3	Reklasifikasi Masuk Aset Lain-Lain dari Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan	2.113.180.550,00	
	4	Reklasifikasi Masuk Aset Lain-Lain dari Aset Tetap Lainnya	1.151.177.375,00	
	5	Reklasifikasi Masuk Aset Lain-Lain dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.785.113.050,00	
	6	Koreksi BPK Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain terhadap Aset Rusak Berat	32.576.536.076,00	
	7	Koreksi BPK Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Lain-lain terhadap Aset Rusak Berat	467.342.500,00	
	8	Koreksi BPK Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain terhadap Aset yang tidak Ditemukan	66.846.000,00	
		<u>Total Penambahan :</u>		59.950.274.452,00

ASET LAIN-LAIN - ASET YANG AKAN DIHIBAHKAN/RUSAK BERAT			
III	Pengurangan :		
	1	Penghapusan Aset Lain-lain karena dihibahkan	59.959.375,00
	2	Penghapusan Aset Lain-lain karena dimusnahkan	14.487.128.613,89
	3	Penghapusan Aset Lain-lain karena sebab lain	6.357.883.050,00
	4	Penghapusan Aset Lain-lain karena penjualan	5.275.500.000,00
	5	Penyesuaian atas kesalahan koreksi audit 2023	99.480.000,00
	6	Koreksi Penghapusan Aset yang telah dilelang	594.550.000,00
		Total Pengurangan :	26.874.501.038,89
IV	SALDO AKHIR ASET LAIN-LAIN - ASET YANG AKAN DIHIBAHKAN/RUSAK BERAT, 31 Desember 2024		276.356.139.582,38

Berdasarkan tabel mutasi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- A. Penambahan Aset Lain-lain sebesar Rp59.950.274.452,00 antara lain:
1. Reklasifikasi Masuk Aset Lain-Lain dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp17.429.386.206,00 antara lain :
 1. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain akibat usulan pemusnahan pada Dinas Kebudayaan sebesar Rp228.488.774,00 berdasarkan Surat Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Daerah Nomor B/032.4/2012/BKAD-SET/2023, Tanggal 29 Desember 2023.
 2. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain yang merupakan usulan pemusnahan Barang Milik Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp323.877.900,00 berdasarkan Surat Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Daerah Nomor B/032.4/744/BKAD-SET/2024, Tanggal 7 Juni 2024.
 3. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain akibat usulan pemusnahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp352.988.287,00 berdasarkan Surat Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Daerah Nomor B/032/627.1/BKAD-SET/2024, Tanggal 31 Juli 2024.
 4. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain akibat Usulan Pemusnahan Barang pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp2.577.900.772,00 antara lain:
 - 1) Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain akibat Usulan Pemusnahan Barang sebesar Rp1.072.688.500,00 berdasarkan Surat Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Daerah Nomor B/032.4/2032/BKAD-SET/2023, Tanggal 29 Desember 2023.
 - 2) Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain akibat Usulan Pemusnahan Barang sebesar Rp534.359.000,00 berdasarkan Surat Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Daerah Nomor B/032/626.3/BKAD-SET/2024, Tanggal 31 Juli 2024.
 - 3) Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain akibat usulan Pemusnahan sebesar Rp970.853.272,00 berdasarkan Surat Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Daerah Nomor B/032/1402.3/BKAD-SET/2024, Tanggal 26 November 2024.

5. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain akibat usulan pemusnahan pada Dinas Pariwisata Rp53.432.500,00 berdasarkan Surat Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Daerah Nomor B/032/627.2/BKAD-SET/2024, Tanggal 31 Juli 2024.
6. Reklasifikasi Aset tetap Peralatan dan mesin ke Aset Lain-lain akibat usulan pemusnahan pada Badan Penghubung Daerah sebesar Rp185.494.155,00, antara lain:
 - 1) Reklasifikasi Aset tetap Peralatan dan mesin ke Aset Lain-lain akibat usulan pemusnahan sebesar Rp36.549.975,00 berdasarkan Surat Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Daerah Nomor B/032.4/2030/BKAD-SET/2023, Tanggal 29 Desember 2023.
 - 2) Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain berdasarkan usulan pemusnahan sebesar Rp148.944.180,00 berdasarkan Surat Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Daerah Nomor B/032.4/489.2/BKAD-SET/2024, Tanggal 1 Juli 2024.
7. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain atas Usulan Pemusnahan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp4.536.109.976,00 berdasarkan Surat Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Daerah Nomor B/032/786.3/BKAD-SET/2024, Tanggal 3 September 2024
8. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain akibat Usulan Pemusnahan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp926.507.250,00 berdasarkan Surat Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Daerah Nomor B/032/488.5/BKAD-SET/2024, Tanggal 1 Juli 2024.
9. Reklasifikasi Aset Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain yang merupakan usulan penjualan pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp5.275.500.000,00
10. Reklasifikasi aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain atas usulan pemusnahan pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp1.930.224.437,00 berdasarkan Surat Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Daerah Nomor B/032.4/1698/BKAD-SET/2023, Tanggal 24 Oktober 2023.
11. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain yang merupakan usulan Penghapusan barang pada Dinas Perpustakaan Daerah dan Arsip Daerah sebesar Rp53.200.000,00 berdasarkan Berita Acara Penelitian Nomor 025/BA-Penelitian/BKAD-BMD/2024.
12. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain akibat Usulan Pemusnahan pada Sekretariat DPRD sebesar Rp985.662.155,00 berdasarkan Surat Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Daerah Nomor B/032/722.4/BKAD-SET/2024, Tanggal 19 Agustus 2024.
2. Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Lain-lain akibat Usulan Pemusnahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp360.692.695,00 berdasarkan Surat Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Daerah Nomor B/032.4/743/BKAD-SET/2024, Tanggal 7 Juni 2024.
3. Reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset Lain-lain karena Hibah keluar (Dermaga Ponton di Binjai Natuna) ke Pemerintah Kabupaten Natuna berdasarkan BAST Nomor 000.2.3.2/UM-SET/309/XII/2024 pada Dinas Perhubungan sebesar Rp2.113.180.550.
4. Reklasifikasi Masuk Aset Lain-Lain dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.151.177.375,00, antara lain:

- a. Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset Lain-lain pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan sebesar Rp6.759.375,00 berdasarkan Surat Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah Nomor B/032/101.5/BKAD-SET/2024 Tanggal 5 Februari 2024.
 - b. Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset Lain-lain akibat usulan pemusnahan pada Dinas Kebudayaan sebesar Rp1.144.418.000,00 berdasarkan Surat Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Daerah Nomor B/032.4/2012/BKAD-SET/2023, Tanggal 29 Desember 2023.
5. Reklasifikasi Masuk Aset Lain-Lain dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp5.785.113.050,00, antara lain:
- a. Reklasifikasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pekerjaan ke Aset Lain-lain atas usulan Penghapusan pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp67.925.000,00 berdasarkan Surat Persetujuan Penghapusan Barang Milik Daerah Nomor B/032/1402.2/BKAD-SET/2024, Tanggal 26 November 2024.
 - b. Reklasifikasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Lain-lain (Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan yang pembangunan konstruksinya telah dihentikan atau tidak ada rencana untuk direalisasikan pembangunannya) pada Dinas Perhubungan sebesar Rp298.100.000,00 berdasarkan Surat Persetujuan Penghapusan Barang Milik Daerah Nomor B/032/590.2/BKAD-SET/2024, Tanggal 24 Juli 2024.
 - c. Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Lain-lain (Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan yang Pembangunan Kontruksinya Telah Dihentikan atau Tidak Ada Rencana untuk Direalisasikan Pembangunannya) pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp5.145.512.500,00 berdasarkan Surat Persetujuan Penghapusan Barang Milik Daerah Nomor B/032/590.1/BKAD-SET/2024, Tanggal 24 Juli 2024.
 - d. Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pekerjaan ke Aset Lain-lain (Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan yang Pembangunan Kontruksinya Telah Dihentikan atau Tidak Ada Rencana untuk Direalisasikan Pembangunannya) pada Dinas Pendidikan sebesar Rp273.575.550,00 berdasarkan Surat Persetujuan Penghapusan Barang Milik Daerah Nomor B/032/1402.4/BKAD-SET/2024, Tanggal 26 November 2024.
6. Koreksi BPK atas Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain terhadap aset rusak berat sebesar Rp32.576.536.076,00 antara lain:
- a. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain terhadap Aset Rusak Berat pada Sekretariat DPRD sebesar Rp665.639.000,00, antara lain:
 - 1) Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain akibat usulan pemusnahan sebesar Rp71.089.000,00.
 - 2) Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain akibat usulan Penjualan Kendaraan Sedan sebesar Rp594.550.000,00.
 - b. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain terhadap aset Rusak Berat pada Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp14.019.802.579,00 antara lain:
 - 1) Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain akibat usulan pemusnahan sebesar Rp13.893.658.979,00.
 - 2) Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain akibat usulan Penjualan Kendaraan Mobil *Ambulance* sebesar Rp126.143.600,00
 - c. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain akibat usulan pemusnahan pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib sebesar Rp17.561.084.497,00.

- d. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain akibat usulan Penjualan Kendaraan Mobil Unit Penerangan Darat pada Dinas Perhubungan sebesar Rp330.010.000,00.
 7. Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Lain-lain akibat Rusak Berat pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp467.342.500,00
 8. Koreksi BPK atas Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain terhadap Barang Milik Daerah yang tidak Ditemukan keberadaannya sebesar Rp66.846.000,00, antara lain:
 - a. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain karena Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak ditemukan keberadaannya pada Sekretariat DPRD sebesar Rp42.174.000,00
 - b. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain karena Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak ditemukan keberadaannya pada Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp24.672.000,00
- B. Pengurangan Aset Lain-lain sebesar Rp26.874.501.038,89 berasal dari:
1. Penghapusan Barang Milik Daerah karena dihibahkan kepada pemerintah daerah lainnya/instansi lainnya sebesar Rp59.959.375,00 antara lain:
 - a. Penghapusan Barang Milik Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 526 Tahun 2024 Tanggal 5 April 2024 pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan sebesar Rp6.759.375,00.
 - b. Penghapusan Barang Milik Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1401 Tahun 2024 Tanggal 4 Oktober 2024 pada Dinas Perpustakaan Daerah dan Arsip Daerah sebesar Rp53.200.000,00.
 2. Penghapusan Barang Milik Daerah karena dimusnahkan sebesar Rp14.487.128.613,89, antara lain:
 - a. Penghapusan Barang Milik Daerah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp2.577.900.772,00 antara lain:
 - 1) Penghapusan Barang Milik Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 151 Tahun 2024 Tanggal 10 Januari 2024 sebesar Rp1.072.688.500,00.
 - 2) Penghapusan Barang Milik Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 978 Tahun 2024 Tanggal 12 Agustus 2024 sebesar Rp534.359.000,00.
 - 3) Penghapusan Barang Milik Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1536 Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2024 sebesar Rp970.853.272,00.
 - b. Penghapusan Barang Milik Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1055 Tahun 2024 Tanggal 28 Agustus 2024 pada Dinas Pariwisata sebesar Rp923.335.099,80.
 - c. Penghapusan Barang Milik Daerah pada Badan Penghubung Daerah sebesar Rp185.494.155,00
 - 1) Penghapusan Barang Milik Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 219 Tahun 2024, Tanggal 25 Januari 2024 sebesar Rp36.549.975,00
 - 2) Penghapusan Barang Milik Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1353 Tahun 2024, Tanggal 25 November 2024 sebesar Rp148.944.180,00
 - d. Penghapusan Barang Milik Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 174 Tahun 2024 Tanggal 16 Januari 2024 pada Dinas Kebudayaan sebesar Rp1.372.906.774,00

- e. Penghapusan Barang Milik Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana sebesar Rp473.219.186,00 antara lain:
 - 1) Penghapusan Barang Milik Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1074 Tahun 2024 Tanggal 3 September 2024 sebesar Rp352.988.287,00
 - 2) Penghapusan Barang Milik Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 823 Tahun 2024 Tanggal 9 Juli 2024 sebesar Rp120.230.899,00
 - f. Penghapusan Barang Milik Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 790 Tahun 2024 Tanggal 1 Juli 2024 pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp323.877.900,00
 - g. Penghapusan Barang Milik Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1408 Tahun 2024, Tanggal 6 Desember 2024 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp4.536.109.976,00
 - h. Penghapusan Barang Milik Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 834 Tahun 2024 Tanggal 12 Juli 2024 sebesar Rp938.507.250,00
 - i. Penghapusan BMD berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Kepulauan Riau No. 151 Tahun 2024 Tanggal 10 Januari 2024 pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp2.139.972.437,00
 - j. Penghapusan Barang Milik Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 342 Tahun 2024 Tanggal 23 Februari 2024 sebesar Rp30.142.909,09 pada Dinas Pendidikan (SMAN 10 Batam)
 - k. Penghapusan Barang Milik Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1389 Tahun 2024 Tanggal 2 Desember 2024 pada Sekretariat DPRD sebesar Rp985.662.155,00
3. Penghapusan Barang Milik Daerah karena sebab lain sebesar Rp6.357.883.050,00, antara lain:
- a. Penghapusan Barang Milik Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 887 Tahun 2024 Tanggal 23 Juli 2024 pada Dinas Perhubungan sebesar Rp298.100.000,00.
 - b. Penghapusan Barang Milik Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 887 Tahun 2024 Tanggal 23 Juli 2024 (Aset Tetap Konstruksi Dalam Pekerjaan yang Pembangunan Kontruksinya Telah Dihentikan atau Tidak Ada Rencana untuk Direalisasikan Pembangunannya) pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp5.145.512.500,00
 - c. Penghapusan Barang Milik Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1066 Tahun 2024 Tanggal 23 September 2024 pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp67.925.000,00.
 - d. Penghapusan Barang Milik Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1066 Tahun 2024 Tanggal 23 September 2024 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp572.770.000,00
 - e. Penghapusan Barang Milik Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1398 Tahun 2024 Tanggal 3 Desember 2024 (Aset Tetap Konstruksi Dalam Pekerjaan yang Pembangunan Kontruksinya Telah Dihentikan atau Tidak Ada Rencana untuk Direalisasikan Pembangunannya) pada Dinas Pendidikan sebesar Rp273.575.550,00

- 4. Penghapusan Barang Milik Daerah karena penjualan sebesar Rp5.275.500.000,00 pada Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 256 Tahun 2024 Tanggal 1 Februari 2024
- 5. Penyesuaian atas koreksi kesalahan pencatatan tahun 2023 Rp99.480.000,00 pada Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman
- 6. Koreksi Penghapusan Barang Milik Daerah akibat dilelang pada Sekretariat DPRD sebesar Rp594.550.000,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 256 Tahun 2024 Tanggal 1 Februari 2024

C. Saldo akhir aset lain-lain yang akan dihibahkan/rusak berat sebesar Rp276.356.139.582,38.

Tabel 5.190 Rincian Mutasi Aset Lain-lain – Aset yang akan dihibahkan/rusak berat per OPD

PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5 = 2 + 3 - 4
Dinas Pendidikan	58.737.924.529,98	273.575.550,00	303.718.459,09	58.707.781.620,89
Dinas Kesehatan	6.376.786.737,50	926.507.250,00	938.507.250,00	6.364.786.737,50
Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	0,00	17.561.084.497,00	0,00	17.561.084.497,00
Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	10.563.326.140,00	14.044.474.579,00	0,00	24.607.800.719,00
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	15.258.157.993,00	5.145.512.500,00	5.145.512.500,00	15.258.157.993,00
Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	118.950.967.006,39	0,00	99.480.000,00	118.851.487.006,39
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	456.717.868,00	0,00	0,00	456.717.868,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	47.625.000,00	0,00	0,00	47.625.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	713.680.982,00	473.219.186,00	240.461.796,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1.865.794.702,00	0,00	0,00	1.865.794.702,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	2.224.178.000,00	6.759.375,00	6.759.375,00	2.224.178.000,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	31.207.820,00	0,00	0,00	31.207.820,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	4.002.036.200,00	2.741.290.550,00	298.100.000,00	6.445.226.750,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	6.944.000,00	323.877.900,00	323.877.900,00	6.944.000,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.701.225.241,00	0,00	0,00	2.701.225.241,00
Dinas Kebudayaan	0,00	1.372.906.774,00	1.372.906.774,00	0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	49.442.800,00	53.200.000,00	53.200.000,00	49.442.800,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	6.245.269.972,70	5.810.767.500,00	5.343.425.000,00	6.712.612.472,70
Dinas Pariwisata	2.637.618.200,00	53.432.500,00	923.335.099,80	1.767.715.600,20

PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5 = 2 + 3 - 4
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	4.554.838.500,00	0,00	0,00	4.554.838.500,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	653.327.200,00	0,00	572.770.000,00	80.557.200,00
Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Kesejahteraan Rakyat	270.755.520,00	0,00	0,00	270.755.520,00
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Perekonomian dan Pembangunan	1.126.149.799,70	0,00	0,00	1.126.149.799,70
Biro Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Administrasi Pimpinan	725.124.200,00	0,00	0,00	725.124.200,00
Biro Umum	2.979.218.919,00	0,00	0,00	2.979.218.919,00
Biro Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00
Inspektorat Daerah	25.500.000,00	0,00	0,00	25.500.000,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	764.060.000,00	4.536.109.976,00	4.536.109.976,00	764.060.000,00
Badan Pendapatan Daerah	258.871.000,00	1.930.224.437,00	2.139.972.437,00	49.123.000,00
Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	1.761.058.820,00	0,00	0,00	1.761.058.820,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	6.240.000,00	0,00	0,00	6.240.000,00
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	2.577.900.772,00	2.577.900.772,00	0,00
Sekretariat DPRD	0,00	1.693.475.155,00	1.580.212.155,00	113.263.000,00
Badan Penghubung Daerah	0,00	185.494.155,00	185.494.155,00	0,00
Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	243.280.366.169,27	59.950.274.452,00	26.874.501.038,89	276.356.139.582,38

Sedangkan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain untuk Aset yang akan dihibahkan/rusak berat pada tahun 2024 dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.191 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain - Aset yang akan dihibahkan/rusak berat per OPD

PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5 = 2 + 3 - 4
Dinas Pendidikan	93.648.822,00	0,00	0,00	93.648.822,00
Dinas Kesehatan	0,00	1.220.307.250,00	1.220.307.250,00	0,00
Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	0,00	17.561.084.497,00	0,00	17.561.084.497,00
Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	0,00	14.044.474.579,00	0,00	14.044.474.579,00
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	495.090.406,00	0,00	0,00	495.090.406,00
Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	170.105.644,00	0,00	0,00	170.105.644,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	480.433.039,00	395.469.855,00	84.963.184,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1.755.663.537,00	0,00	0,00	1.755.663.537,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	0,00	0,00	0,00

PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5 = 2 + 3 - 4
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	0,00	598.560.029,00	0,00	598.560.029,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	4.577.218,00	312.026.314,00	312.026.314,00	4.577.218,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	302.579.978,00	0,00	0,00	302.579.978,00
Dinas Kebudayaan	0,00	227.516.452,67	227.516.452,67	0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	53.200.000,00	53.200.000,00	0,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	5.388.441.104,65	5.275.500.000,00	112.941.104,65
Dinas Pariwisata	1.059.523.487,00	53.432.500,00	923.335.099,80	189.620.887,20
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Kesejahteraan Rakyat	270.755.520,00	0,00	0,00	270.755.520,00
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Perekonomian dan Pembangunan	1.100.817.845,70	0,00	0,00	1.100.817.845,70
Biro Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Administrasi Pimpinan	528.458.032,00	0,00	0,00	528.458.032,00
Biro Umum	1.184.010.259,00	210.000.000,00	0,00	1.394.010.259,00
Biro Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00
Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	669.955.000,00	0,00	0,00	669.955.000,00
Badan Pendapatan Daerah	258.871.000,00	1.930.224.437,00	2.140.224.437,00	48.871.000,00
Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	1.761.058.820,00	0,00	0,00	1.761.058.820,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	6.240.000,00	0,00	0,00	6.240.000,00
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	0,00	687.604.626,00	594.550.000,00	93.054.626,00
Badan Penghubung Daerah	0,00	168.625.196,83	168.625.196,83	0,00
Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	9.661.355.568,70	42.935.930.025,15	11.310.754.605,30	41.286.530.988,55

- Piutang kontribusi hasil penjualan logam timah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang sejak Tahun 2012 belum diterima sebesar Rp74.743.000,00;
- Piutang yang tidak disetujui Klaimnya kepada Askes/Jamsostek pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp658.871.262,89, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.192 Piutang Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud

NO	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2024
1	ASKES	37.015.108,00
2	Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)	5.049.750,00
3	Jamsostek	592.803.199,00
4	Jamkesmas	24.003.205,89
	JUMLAH	658.871.262,89

- Pada Tahun Anggaran 2024, Kementerian Keuangan menyalurkan TDF kurang bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2023 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38/KM.7/2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada tahun 2023 sebesar Rp30.019.706.000,00 yang dilakukan secara sekaligus dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.193 Rekapitulasi Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2023
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di tahun 2024

NO	URAIAN	NILAI TDF 2023	NILAI PENYALURAN TDF 2024	TANGGAL PENYALURAN TDF	SISA
1	2	3	4	5	6=(3-4)
1	DBH PPh Pasal 21	22.624.423.000,00	22.624.423.000,00	25-Mar-24	0,00
2	DBH PPh Pasal 25/29 OP	225.700.000,00	225.700.000,00	25-Mar-24	0,00
3	DBH PBB Bagian Daerah untuk Provinsi - DBH PBB Migas Bagian Daerah	2.569.196.000,00	2.569.196.000,00	25-Mar-24	0,00
4	DBH PBB Bagian Daerah untuk Provinsi-DBH PBB Perkebunan Bagian Daerah	55.096.000,00	55.096.000,00	25-Mar-24	0,00
5	DBH PBB Bagian Daerah untuk Provinsi-DBH PBB Non Migas Lainnya Bagian Daerah	476.310.000,00	476.310.000,00	25-Mar-24	0,00
6	DBH PBB Bagian Daerah untuk Provinsi-DBH PBB Sektor Lainnya Bagian Daerah	15.799.000,00	15.799.000,00	25-Mar-24	0,00
7	DBH SDA Minyak Bumi 15%	1.873.157.000,00	1.873.157.000,00	25-Mar-24	0,00
8	DBH SDA Minerba - Iuran Tetap	422.541.000,00	422.541.000,00	25-Mar-24	0,00
9	DBH SDA Minerba - Royalti	1.684.345.000,00	1.684.345.000,00	25-Mar-24	0,00
10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	156.000,00	156.000,00	25-Mar-24	0,00
11	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Dana Reboisasi (DR)	70.247.000,00	70.247.000,00	25-Mar-24	0,00
	TOTAL	30.016.970.000,00	30.016.970.000,00		0,00

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada periode 31 Desember 2024 mendapatkan alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sampai dengan Tahun Anggaran 2023 dengan nilai pembulatan sebesar Rp69.710.829.000,00 dan lebih bayar Dana Bagi Hasil sampai dengan Tahun Anggaran 2023 dengan nilai pembulatan adalah sebesar Rp68.962.766.000,00 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada tahun 2024. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut bahwa Kurang Bayar Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disebut Kurang Bayar DBH adalah selisih kurang antara realisasi penerimaan negara yang dibagihasikan dengan realisasi penyaluran DBH. Sedangkan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disebut Lebih Bayar DBH adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan negara yang dibagihasikan dengan realisasi penyaluran DBH. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.194 Rincian Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil sampai dengan Tahun Tahun Anggaran 2023 Provinsi Kepulauan Riau

Uraian Bagi Hasil	Kurang Bayar (KB)				Lebih Bayar (LB)			
	KB s.d. TA 2022	KB TA 2023	KB s.d. TA 2023	Pembulatan KB s.d. TA 2023	LB s.d. TA 2022	LB TA 2023	LB s.d. TA 2023	Pembulatan LB s.d. TA 2023
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6) + (7)	(9)
Pajak	2.178,00	59.499.139.000,00	59.499.141.178,00	59.499.145.000,00	265.378.313,00		265.378.313,00	265.375.000,00
PPh	812,00	37.176.571.000,00	37.176.571.812,00	37.176.573.000,00				
PPh Pasal 21	657,00	34.786.298.000,00	34.786.298.657,00	34.786.299.000,00				
PPh Pasal 25/29	155,00	2.390.273.000,00	2.390.273.155,00	2.390.274.000,00				
PBB	1.366,000	22.317.836.000,000	22.317.837.366,000	22.317.840.000,000	263.160.923,000		263.160.923,000	263.158.000,000
Bagi Rata								
Bagian Daerah	1.010,00	22.317.836.000,00	22.317.837.010,00	22.317.838.000,00	254.163.472,00		254.163.472,00	254.162.000,00
Bagian Daerah Migas	218,00	21.627.854.000,00	21.627.854.218,00	21.627.855.000,00				
Bagian Daerah Non Migas	792,00	383.606.000,00	383.606.792,00	383.607.000,00				
Bagian Daerah Panas Bumi								
Bagian Daerah Perhutanan								
Bagian Daerah Perkebunan		211.291.000,00	211.291.000,00	211.291.000,00	47.365.681,00		47.365.681,00	47.365.000,00
Bagian Daerah Sektor Lainnya		95.085.000,00	95.085.000,00	95.085.000,00	206.797.791,00		206.797.791,00	206.797.000,00
Biaya Pemungutan	356,00		356,00	2.000,00	8.997.451,00		8.997.451,00	8.996.000,00
Biaya Pemungutan Migas	218,00		218,00	1.000,00				
Biaya Pemungutan Non Migas	138,00		138,00	1.000,00				
Biaya Pemungutan Panas Bumi								
Biaya Pemungutan Perhutanan								
Biaya Pemungutan Perkebunan					2.104.716,00		2.104.716,00	2.104.000,00
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya					6.892.735,00		6.892.735,00	6.892.000,00
CHT		4.732.000,00	4.732.000,00	4.732.000,00	2.217.390,00		2.217.390,00	2.217.000,00
SDA	3.713,00	10.211.678.000,00	10.211.681.713,00	10.211.684.000,00	19.900.275.665,00	48.797.119.000,00	68.697.394.665,00	68.697.391.000,00
Migas	1.608,00	5.891.151.000,00	5.891.152.608,00	5.891.154.000,00	12.346.672.324,00	47.562.158.000,00	59.908.830.324,00	59.908.830.000,00
Minyak Bumi	1.127,00	5.891.151.000,00	5.891.152.127,00	5.891.153.000,00	12.346.672.324,00		12.346.672.324,00	12.346.672.000,00
Minyak Bumi	1.127,00	5.891.151.000,00	5.891.152.127,00	5.891.153.000,00	12.346.672.324,00		12.346.672.324,00	12.346.672.000,00
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus								
Gas Bumi	481,00		481,00	1.000,00		47.562.158.000,00	47.562.158.000,00	47.562.158.000,00
Gas Bumi	481,00		481,00	1.000,00		47.562.158.000,00	47.562.158.000,00	47.562.158.000,00
Gas Bumi dalam Rangka Otsus								

Uraian Bagi Hasil	Kurang Bayar (KB)				Lebih Bayar (LB)			
	KB s.d. TA 2022	KB TA 2023	KB s.d. TA 2023	Pembulatan KB s.d. TA 2023	LB s.d. TA 2022	LB TA 2023	LB s.d. TA 2023	Pembulatan LB s.d. TA 2023
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6) + (7)	(9)
Minerba		13.556.000,00	13.556.000,00	13.556.000,00	7.285.738.681,00	200.395.000,00	7.486.133.681,00	7.486.132.000,00
Landrent		13.556.000,00	13.556.000,00	13.556.000,00	1.391.838.805,00		1.391.838.805,00	1.391.838.000,00
Royalti					5.893.899.876,00	200.395.000,00	6.094.294.876,00	6.094.294.000,00
Panas Bumi								
Iuran Produksi								
Iuran Tetap								
Setoran Bagian Pemerintah								
Kehutanan	2.105,00	4.306.971.000,00	4.306.973.105,00	4.306.974.000,00	267.864.660,00		267.864.660,00	267.863.000,00
DR	1.500,00	4.060.431.000,00	4.060.432.500,00	4.060.433.000,00	152.627.201,00		152.627.201,00	152.627.000,00
IIUPH		1.869.000,00	1.869.000,00	1.869.000,00	2.867.841,00		2.867.841,00	2.867.000,00
PSDH	605,00	244.671.000,00	244.671.605,00	244.672.000,00	112.369.618,00		112.369.618,00	112.369.000,00
Perikanan								
Perkebunan Sawit						1.034.566.000,00	1.034.566.000,00	1.034.566.000,00
Total	5.891,00	69.710.817.000,00	69.710.822.891,00	69.710.829.000,00	20.165.653.978,00	48.797.119.000,00	68.962.772.978,00	68.962.766.000,00

Ketentuan pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2024 dijelaskan bahwa Penyaluran Kurang Bayar DBH sampai dengan Tahun Anggaran 2023 kepada Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara dan Penyaluran Kurang Bayar DBH kepada Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Menteri. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2024 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024, Menteri Keuangan melakukan penyaluran Kurang Bayar dan penyelesaian lebih bayar melalui Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan. Penyaluran kurang bayar dan penyelesaian lebih bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024 sebagaimana dimaksud ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 44/KM.7/2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menerima rincian penyaluran Kurang Bayar sampai dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp16.375.221.000,00 dan penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil sampai dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp12.281.415.000,00. Adapun rincian adalah sebagai berikut:

Tabel 5.195 Rincian Penyaluran Kurang Bayar dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil sampai dengan Tahun Anggaran 2023 Provinsi Kepulauan Riau

Uraian Dana Bagi Hasil	Kurang Bayar (KB)				Lebih Bayar (LB)		
	KB s.d. TA 2023	Penyaluran KB s.d. TA 2023	Perhitungan untuk Penyelesaian LB	Sisa KB s.d. TA 2023	LB s.d. TA 2023	Penyelesaian LB s.d. TA 2023	Sisa LB s.d. TA 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) - (3)	(6)	(7)	(8) = (6) - (7)
Pajak	59.499.145.000,00	13.976.475.000,00	12.281.415.000,00	45.522.670.000,00	265.375.000,00	263.158.000,00	2.217.000,00
PPh	37.176.573.000,00	8.732.854.000,00	8.732.854.000,00	28.443.719.000,00			
PPh Pasal 21	34.786.299.000,00	8.171.374.000,00	8.171.374.000,00	26.614.925.000,00			
PPh Pasal 25/29	2.390.274.000,00	561.480.000,00	561.480.000,00	1.828.794.000,00			
PBB	22.317.840.000,00	5.242.509.000,00	3.548.561.000,00	17.075.331.000,00	263.158.000,00	263.158.000,00	
Bagi Rata							
Bagian Daerah	22.317.838.000,00	5.242.507.000,00	3.548.561.000,00	17.075.331.000,00	254.162.000,00	254.162.000,00	
Bagian Daerah Migas	21.627.855.000,00	5.080.428.000,00	3.548.561.000,00	16.547.427.000,00			
Bagian Daerah Non Migas	383.607.000,00	90.110.000,00		293.497.000,00			
Bagian Daerah Panas Bumi							
Bagian Daerah Perhutanan							
Bagian Daerah Perkebunan	211.291.000,00	49.633.000,00		161.658.000,00	47.365.000,00	47.365.000,00	
Bagian Daerah Sektor Lainnya	95.085.000,00	22.336.000,00		72.749.000,00	206.797.000,00	206.797.000,00	
Biaya Pemungutan	2.000,00	2.000,00			8.996.000,00	8.996.000,00	
Biaya Pemungutan Migas	1.000,00	1.000,00					
Biaya Pemungutan Non Migas	1.000,00	1.000,00					
Biaya Pemungutan Panas Bumi							
Biaya Pemungutan Perhutanan							
Biaya Pemungutan Perkebunan					2.104.000,00	2.104.000,00	
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya					6.892.000,00	6.892.000,00	
CHT	4.732.000,00	1.112.000,00		3.620.000,00	2.217.000,00		2.217.000,00
SDA	10.211.684.000,00	2.398.746.000,00		7.812.938.000,00	68.697.391.000,00	12.018.257.000,00	56.679.134.000,00
Migas	5.891.154.000,00	1.383.845.000,00		4.507.309.000,00	59.908.830.000,00	12.018.257.000,00	47.890.573.000,00
Minyak Bumi	5.891.153.000,00	1.383.844.000,00		4.507.309.000,00	12.346.672.000,00	12.018.257.000,00	328.415.000,00
Minyak Bumi	5.891.153.000,00	1.383.844.000,00		4.507.309.000,00	12.346.672.000,00	12.018.257.000,00	328.415.000,00
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus							
Gas Bumi	1.000,00	1.000,00			47.562.158.000,00		47.562.158.000,00
Gas Bumi	1.000,00	1.000,00			47.562.158.000,00		47.562.158.000,00
Gas Bumi dalam Rangka Otsus							

Uraian Dana Bagi Hasil	Kurang Bayar (KB)				Lebih Bayar (LB)		
	KB s.d. TA 2023	Penyaluran KB s.d. TA 2023	Perhitungan untuk Penyelesaian LB	Sisa KB s.d. TA 2023	LB s.d. TA 2023	Penyelesaian LB s.d. TA 2023	Sisa LB s.d. TA 2023
Minerba	13.556.000,00	3.184.000,00		10.372.000,00	7.486.132.000,00		7.486.132.000,00
Landrent	13.556.000,00	3.184.000,00		10.372.000,00	1.391.838.000,00		1.391.838.000,00
Royalti					6.094.294.000,00		6.094.294.000,00
Panas Bumi							
Iuran Produksi							
Iuran Tetap							
Setoran Bagian Pemerintah							
Kehutanan	4.306.974.000,00	1.011.717.000,00		3.295.257.000,00	267.863.000,00		267.863.000,00
DR	4.060.433.000,00	953.804.000,00		3.106.629.000,00	152.627.000,00		152.627.000,00
IIUPH	1.869.000,00	439.000,00		1.430.000,00	2.867.000,00		2.867.000,00
PSDH	244.672.000,00	57.474.000,00		187.198.000,00	112.369.000,00		112.369.000,00
Perikanan							
Perkebunan Sawit					1.034.566.000,00		1.034.566.000,00
Total	69.710.829.000,00	16.375.221.000,00	12.281.415.000,00	53.335.608.000,00	68.962.766.000,00	12.281.415.000,00	56.681.351.000,00

Berdasarkan Diktum Kedua Keputusan Menteri Keuangan Nomor 44/KM.7/2024 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024 diatur bahwa penyaluran Kurang Bayar DBH Tahun 2024 dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu secara tunai (melalui RKUD) dan secara nontunai (melalui Rekening TDF). Berikut uraian Penyaluran pada Tahun Anggaran 2024:

- a. Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil tunai ke Rekening Kas Umum Daerah untuk Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi sebesar Rp954.916.000,00 disalurkan pada tanggal 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.196 Rincian Penyaluran Kurang Bayar DBH dan Penyelesaian Lebih Bayar DBH Tahun 2024 secara Tunai

Jenis DBH	Penyaluran KB	Pemotongan KB utk Penyelesaian LB	Penyaluran KB setelah Pemotongan
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)
Penyaluran KB & Penyelesaian LB secara Tunai	954.916.000,00	0,00	954.916.000,00
DBH SDA Kehutanan - Dana Reboisasi	953.804.000,00	0,00	953.804.000,00
DBH Cukai Hasil Tembakau	1.112.000,00	0,00	1.112.000,00
Total	954.916.000,00	0,00	954.916.000,00

- b. Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil secara non tunai melalui Treasury Deposit Facility (TDF) disalurkan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.138.890.000,00 yang telah memperhitungkan penyelesaian Lebih Bayar sebesar Rp12.281.415.000,00 dari Alokasi kurang bayar Dana Bagi Hasil yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada tahun 2024 sebesar Rp15.420.305.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.197 Rincian Penyaluran Kurang Bayar DBH dan Penyelesaian Lebih Bayar DBH Tahun 2024 secara non Tunai melalui Treasury Deposit Facility (TDF)

Jenis DBH	Penyaluran KB	Pemotongan KB utk Penyelesaian LB	Penyaluran KB setelah Pemotongan
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)
Penyaluran KB & Penyelesaian LB melalui TDF	15.420.305.000,00	12.281.415.000,00	3.138.890.000,00
DBH Pajak Penghasilan	8.732.854.000,00	8.732.854.000,00	0,00
DBH PPh Pasal 21	8.171.374.000,00	8.171.374.000,00	0,00
DBH PPh Pasal 25/29 OP	561.480.000,00	561.480.000,00	0,00
DBH PBB	5.242.509.000,00	3.548.561.000,00	1.693.948.000,00
DBH PBB Migas Bagian Daerah - Provinsi	5.080.428.000,00	3.548.561.000,00	1.531.867.000,00
DBH PBB Perkebunan Bagian Daerah - Provinsi	49.633.000,00	0,00	49.633.000,00
DBH PBB Non Migas Lainnya Bagian Daerah - Provinsi	90.110.000,00	0,00	90.110.000,00
DBH PBB Sektor Lainnya Bagian Daerah - Provinsi	22.336.000,00	0,00	22.336.000,00
DBH PBB Biaya Pemungutan Migas - Provinsi	1.000,00	0,00	1.000,00
DBH PBB Biaya Pemungutan Non Migas Lainnya (Mineral dan Batu Bara) - Provinsi	1.000,00	0,00	1.000,00
DBH SDA Migas	1.383.845.000,00	0,00	1.383.845.000,00
DBH SDA Minyak Bumi	1.383.844.000,00	0,00	1.383.844.000,00
DBH SDA Gas Bumi	1.000,00	0,00	1.000,00

Jenis DBH	Penyaluran KB	Pemotongan KB utk Penyelesaian LB	Penyaluran KB setelah Pemotongan
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)
DBH SDA Minerba	3.184.000,00	0,00	3.184.000,00
DBH SDA Minerba - luran Tetap	3.184.000,00	0,00	3.184.000,00
DBH SDA Kehutanan	57.913.000,00	0,00	57.913.000,00
DBH SDA Kehutanan - IIUPH/IHPH	439.000,00	0,00	439.000,00
DBH SDA Kehutanan - PSDH	57.474.000,00	0,00	57.474.000,00
Total	15.420.305.000,00	12.281.415.000,00	3.138.890.000,00

Pada periode 31 Desember 2024 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat sebagai Aset Lainnya – Aset Lain-lain (neraca) pada Pendapatan Transfer-Dana Transfer Umum DBH (LO) sebesar Rp3.138.890.000,00 dikarenakan belum melakukan penarikan tambahan Dana Bagi Hasil dari rekening TDF ke Rekening Kas Umum Daerah. Pencatatan nilai TDF tersebut mempedomani surat dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.14.1/7481/Keuda Tanggal 15 Maret 2023 Perihal Pengelolaan DBH dan/atau DAU melalui Fasilitas TDF.

- Pada tahun 2024 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat penambahan aset lainnya – aset lain-lain yang berasal dari hasil temuan oleh auditor atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja modal yang akan menjadi aset Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap apabila sudah ditetapkan oleh Majelis TGR yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.198 Rekapitulasi hasil temuan auditor yang menambah Aset Lainnya - Aset lain-lain

No	SKPD	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Hibah	Belanja Modal	Aset Lainnya - Aset Lain-lain
1	2	3	4	5	6	7 = (3+4+5+6)
1	Badan Kepegawaian dan Korpri	0,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	10.807.400,00	0,00	0,00	10.807.400,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	1.133.000,00	0,00	0,00	1.133.000,00
4	Badan Pendapatan Daerah	2.057.648,00	740.000,00	0,00	0,00	2.797.648,00
5	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	26.310.369,00	0,00	0,00	26.310.369,00
6	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00	2.577.420,00	0,00	0,00	2.577.420,00
7	Badan Penghubung Daerah	0,00	7.161.800,00	0,00	0,00	7.161.800,00
8	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.055.678,00	680.000,00	0,00	0,00	6.735.678,00
9	Biro Administrasi Pimpinan	0,00	1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00
10	Biro Hukum	0,00	769.500,00	0,00	0,00	769.500,00
11	Biro Kesejahteraan Rakyat	0,00	3.435.500,00	0,00	0,00	3.435.500,00
12	Biro Organisasi	4.358.585,00		0,00	0,00	4.358.585,00
13	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	3.120.858,00	7.026.900,00	0,00	0,00	10.147.758,00
14	Dinas Kebudayaan	0,00	2.068.600,00	0,00	0,00	2.068.600,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	537.534,00	0,00	71.707.800,00	72.245.334,00
16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	14.048.400,00	529.500,00	0,00	0,00	14.577.900,00
17	Dinas Kesehatan	0,00	31.875.700,00	0,00	0,00	31.875.700,00

No	SKPD	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Hibah	Belanja Modal	Aset Lainnya - Aset Lain-lain
1	2	3	4	5	6	7 = (3+4+5+6)
18	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	0,00	12.040.600,00	0,00	43.479.729,72	55.520.329,72
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00
20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	346.500,00	0,00	0,00	346.500,00
21	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	503.000,00	0,00	0,00	503.000,00
22	Dinas Pariwisata	0,00	2.269.500,00	0,00	0,00	2.269.500,00
23	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	726.620,00	63.474.400,00	179.205.091,67	847.810.000,00	1.091.216.111,67
24	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	67.271.083,00	0,00	0,00	67.271.083,00
25	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	0,00	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00
26	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0,00	3.162.900,00	0,00	0,00	3.162.900,00
27	Dinas Pendidikan	133.300.868,00	11.882.400,00	0,00	199.187.900,00	344.371.168,00
28	Dinas Perhubungan	555.000,00	2.312.000,00	0,00	0,00	2.867.000,00
29	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00
30	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	2.936.300,00		0,00	0,00	2.936.300,00
31	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.298.028,00	230.957.800,00	0,00	0,00	232.255.828,00
32	Dinas Sosial	0,00	2.740.700,00	0,00	0,00	2.740.700,00
33	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	0,00	1.561.000,00	0,00	0,00	1.561.000,00
34	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	10.675.000,00	0,00	0,00	0,00	10.675.000,00
35	Sekretariat DPRD	0,00	76.861.645,00	0,00	14.000.000,00	90.861.645,00
	Total	179.132.985,00	575.846.751,00	179.205.091,67	1.176.185.429,72	2.110.370.257,39

6. Selain itu terdapat reklasifikasi aset persediaan barang untuk diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat yang sudah tidak dalam penguasaan OPD terkait, namun belum didukung dengan administrasi BAST sebesar Rp79.508.862.460,25 antara lain pada Dinas Pendidikan sebesar Rp51.443.186.125,60, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp25.226.395.058,56 dan juga Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman sebesar Rp2.839.281.276,09. Persediaan tersebut berasal dari persediaan Tahun 2020 ke bawah, dan hal tersebut sudah diungkapkan dalam LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 Nomor 82.B/LHP/XVIII.TJP/05/2021, dikarenakan adanya permasalahan atas penatausahaan persediaan yaitu penyerahan barang untuk diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga belum didukung dengan naskah perjanjian hibah daerah. Persediaan tersebut sudah tidak memenuhi definisi sebagai persediaan karena sudah tidak dalam penguasaan OPD terkait dan telah diusulkan oleh pengguna barang pada OPD terkait kepada pengelola barang untuk dihapuskan dengan melengkapi administrasi serah terima barang sebelum penghapusan dilakukan, dengan rincian surat usulan sebagai berikut:
- a. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan nomor B/032/233/PUPP.1/2024 tanggal 22 April 2024.
 - b. Surat Kepala Dinas Pendidikan nomor 032.1/350/2024 tanggal 22 April 2024.
 - c. Surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman nomor B/032/52/DPKP/2024 tanggal 22 April 2024.

Atas dasar usulan penghapusan tersebut persediaan direklasifikasi ke Aset Lain-Lain.

Kas Yang Dibatasi Penggunaannya

Kas yang dibatasi penggunaannya merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah, disajikan sebagai Kas yang Dibatasi Penggunaannya pada sub rincian objek Uang Jaminan Reklamasi dengan akun lawan Utang Jangka Panjang Lainnya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Kas yang dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2024 sebesar Rp196.353.186.257,62 yang merupakan saldo atas jaminan pascatambang dan jaminan reklamasi yang sudah atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang akan digunakan Gubernur untuk menunjuk pihak ketiga jika nantinya perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan komitmennya. Rincian Kas Yang Dibatasi Penggunaannya dijelaskan lebih lanjut dalam Utang Jangka Panjang Lainnya.

Mutasi Aset Lainnya– Kas yang dibatasi penggunaannya dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.199 Mutasi Aset Lainnya - Kas yang Dibatasi Penggunaannya

DANA JAMINAN REKLAMASI DAN PASCATAMBAK TAHUN 2024				
Saldo Awal Dana Jaminan Reklamasi dan Pascatambang, 1 Januari 2024				191.337.190.542,18
	Penambahan :			
1	Penempatan dan Penambahan Bunga Deposito dan Koreksi Pencatatan Dana Jaminan Reklamasi		2.574.902.375,42	
		Kabupaten Bintan	78.112.286,78	
		Kota Tanjungpinang	309.049.302,00	
		Kabupaten Lingga	94.500.699,33	
		Kota Batam	24.877.163,00	
		Kabupaten Karimun	282.673.789,26	
		Kabupaten Natuna	1.785.689.135,05	
2	Penempatan dan Penambahan Bunga Deposito, dan Koreksi Pencatatan Dana Jaminan Pascatambang		30.973.718.128,31	
		Kabupaten Bintan	1.469.566.150,33	
		Kota Tanjungpinang	31.686.198,00	
		Kabupaten Lingga	189.636.432,93	
		Kota Batam	17.026.162,00	
		Kabupaten Karimun	29.231.521.611,05	
		Kabupaten Natuna	34.281.574,00	
Total Penambahan :				33.548.620.503,73
	Pengurangan :			
1	Pencairan dan Koreksi Pencatatan Dana Jaminan Reklamasi		22.197.646.578,48	
		Kabupaten Lingga	383.627.321,48	
		Kota Batam	103.813.335,00	
		Kabupaten Karimun	21.710.205.922,00	

DANA JAMINAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG TAHUN 2024					
	2	Pencairan dan Koreksi Pencatatan Dana Jaminan Pascatambang		6.334.978.209,81	
		Kabupaten Bintan	2.869.949.379,00		
		Kabupaten Lingga	3.315.497.453,81		
		Kota Batam	147.934.021,00		
		Kabupaten Karimun	1.597.356,00		
		<u>Total Pengurangan :</u>			28.532.624.788,29
		Saldo Akhir Jaminan Reklamasi dan Pascatambang, 31 Desember 2024			196.353.186.257,62

Tabel 5.200 Rekapitulasi Aset Lainnya Per 31 Desember 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	TAGIHAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH	ASET TIDAK BERWUJUD		ASET RUSAK BERAT		KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA	ASET LAIN-LAINNYA	TOTAL ASET LAINNYA
			NILAI PEROLEHAN	AMORTISASI	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			
1	Dinas Pendidikan	0,00	11.932.014.480,000	(1.935.966.000,00)	58.707.781.620,889	(93.648.822,00)	0,00	51.787.557.293,600	120.397.738.572,489
2	Dinas Kesehatan	0,00	66.000.000,000	0,00	6.364.786.737,500	0,00	0,00	31.875.700,000	6.462.662.437,500
3	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	0,00	5.819.275.000,060	(48.000.000,00)	17.561.084.497,00	(17.561.084.497,00)	0,00	10.675.000,000	5.781.950.000,060
4	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	0,00	1.462.280.900,000	0,00	24.607.800.719,000	(14.044.474.579,00)	0,00	658.871.262,890	12.684.478.302,890
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	0,00	2.452.437.910,000	0,00	15.258.157.993,000	(495.090.406,00)	0,00	26.317.611.170,230	43.533.116.667,230
6	Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	118.851.487.006,390	(170.105.644,00)	0,00	3.071.537.104,090	121.752.918.466,480
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	2.000.000,000	0,00	456.717.868,000	0,00	0,00	10.807.400,000	469.525.268,000
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	0,00	0,00	0,00	47.625.000,000	0,00	0,00	0,00	47.625.000,000
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	240.461.796,00	(84.963.184,00)	0,00	1.133.000,000	156.631.612,00
10	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740.700,000	2.740.700,000
11	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	0,00	9.500.000,000	0,00	1.865.794.702,000	(1.755.663.537,00)	0,00	1.561.000,000	121.192.165,000
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	10.748.000,000	27.900.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,000	39.388.000,000
13	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	0,00	34.650.000,000	0,00	2.224.178.000,000	0,00	0,00	55.520.329,720	2.314.348.329,720
14	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	44.000.000,000	0,00	31.207.820,000	0,00	0,00	503.000,000	75.710.820,000

NO	PERANGKAT DAERAH	TAGIHAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH	ASET TIDAK BERWUJUD		ASET RUSAK BERAT		KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA	ASET LAIN-LAINNYA	TOTAL ASET LAINNYA
			NILAI PEROLEHAN	AMORTISASI	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	15.101.451,000	0,00	0,00	0,00	0,00	67.271.083,000	82.372.534,000
16	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	6.445.226.750,000	(598.560.029,00)	0,00	2.867.000,000	5.849.533.721,000
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	590.700.000,000	0,00	6.944.000,000	(4.577.218,00)	0,00	1.480.000,000	594.546.782,000
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	259.000.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	346.500,000	259.346.500,000
19	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0,00	63.998.500,000	(14.998.500,00)	0,00	0,00	0,00	3.162.900,000	52.162.900,000
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	43.000.000,000	0,00	2.701.225.241,000	(302.579.978,00)	0,00	14.577.900,000	2.456.223.163,000
21	Dinas Kebudayaan	0,00	35.167.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068.600,000	37.235.600,000
22	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	0,00	795.624.420,000	(244.999.820,00)	49.442.800,000	0,00	0,00	2.936.300,000	603.003.700,000
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	494.166.000,000	0,00	6.712.612.472,700	(112.941.104,65)	0,00	72.245.334,000	7.166.082.702,050
24	Dinas Pariwisata	0,00	28.160.000,000	0,00	1.767.715.600,200	(189.620.887,20)	0,00	2.269.500,000	1.608.524.213,000
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0,00	39.400.000,000	0,00	4.554.838.500,000	0,00	0,00	84.890.758,000	4.679.129.258,000
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	2.750.000,000	0,00	80.557.200,000	0,00	0,00	740.000,000	84.047.200,000
27	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Biro Kesejahteraan Rakyat	0,00	0,00	0,00	270.755.520,000	(270.755.520,00)	0,00	3.435.500,000	3.435.500,00
29	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	8.700.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700.000,000
30	Biro Perekonomian dan Pembangunan	0,00	401.788.200,000	0,00	1.126.149.799,700	(1.100.817.845,70)	0,00	0,00	427.120.154,000
31	Biro Organisasi	8.500.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.358.585,000	12.858.585,000

NO	PERANGKAT DAERAH	TAGIHAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH	ASET TIDAK BERWUJUD		ASET RUSAK BERAT		KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA	ASET LAIN-LAINNYA	TOTAL ASET LAINNYA
			NILAI PEROLEHAN	AMORTISASI	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			
32	Biro Administrasi Pimpinan	0,00	0,00	0,00	725.124.200,000	(528.458.032,00)	0,00	1.480.000,000	198.146.168,000
33	Biro Umum	0,00	248.831.000,000	0,00	2.979.218.919,000	(1.394.010.259,00)	0,00	0,00	1.834.039.660,000
34	Biro Hukum	0,00	49.324.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	769.500,000	50.093.500,000
35	Inspektorat Daerah	0,00	350.945.000,000	0,00	25.500.000,000	0,00	0,00	0,00	376.445.000,000
36	Badan Keuangan dan Aset Daerah	973.760.950,000	386.585.000,000	0,00	764.060.000,000	(669.955.000,00)	196.353.186.257,620	3.138.890.000,000	200.946.527.207,620
37	Badan Pendapatan Daerah	0,00	113.141.649,000	0,00	49.123.000,000	(48.871.000,00)	0,00	2.797.648,000	116.191.297,000
38	Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	0,00	62.352.711,000	0,00	1.761.058.820,000	(1.761.058.820,00)	0,00	370.000,000	62.722.711,000
39	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00	0,00	0,00	6.240.000,000	(6.240.000,00)	0,00	2.577.420,000	2.577.420,000
40	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.735.678,000	6.735.678,000
41	Sekretariat DPRD	0,00	369.782.476,000	(169.817.000,00)	113.263.000,00	(93.054.626,00)	0,00	90.861.645,000	311.035.495,000
42	Badan Penghubung Daerah	0,00	140.028.230,000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.161.800,000	147.190.030,000
43	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.310.369,000	26.310.369,00
	JUMLAH	993.008.950,00	26.348.603.927,06	(2.413.781.320,00)	276.356.139.582,38	(41.286.530.988,55)	196.353.186.257,62	85.491.736.980,53	541.842.363.389,04

5.3.2. Kewajiban

Kewajiban	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	651.254.610.738,43	503.356.852.441,17

Saldo Kewajiban Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 sebesar Rp651.254.610.738,43 terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp454.901.424.480,81 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp196.353.186.257,62.

5.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang harus dipenuhi/diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 sebesar Rp454.901.424.480,81 terdiri dari Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar Rp14.391.867,00, Utang Belanja sebesar Rp451.420.582.417,31 dan Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp3.466.450.196,50. Utang PFK sebesar Rp14.391.867,00 merupakan utang atas potongan pajak yang telah dipungut oleh Bendahara Pengeluaran dan belum disetorkan ke Kas Negara per 31 Desember 2024.

Kewajiban Jangka Pendek selain Utang PFK sebesar Rp454.887.032.613,81 terdiri dari:

5.3.2.1.1.1.1. Utang Belanja sebesar Rp451.420.582.417,31 yang antara lain terdiri dari:

1. Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan IV Tahun 2024 sebesar Rp226.476.692.255,00; dan
2. Utang Belanja selain Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp224.943.890.162,31 yang terdiri dari Utang Belanja Pegawai sebesar Rp188.239.845,00, Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp187.444.539.282,87, Utang Belanja Hibah sebesar Rp13.811.458.307,29, dan Utang Belanja Modal sebesar Rp23.499.652.727,15.

5.3.2.1.1.1.2. Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp3.466.450.196,50.

Utang Belanja selain Bagi Hasil Pajak Daerah dan Utang Jangka Pendek Lainnya dengan total sebesar Rp228.410.340.358,81 (Rp224.943.890.162,31 + Rp3.466.450.196,50) merupakan utang yang timbul dari kegiatan belanja Perangkat Daerah yang hingga akhir tahun 2024 belum dapat dibayarkan karena keterbatasan kemampuan pendanaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Penjelasan lebih rinci kewajiban jangka pendek sebagai berikut:

5.3.2.1.1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	14.391.867,00	4.619.097,00

Utang perhitungan fihak ketiga (PFK) merupakan utang yang timbul atas potongan SP2D berupa pajak yang belum disetorkan sampai akhir tahun. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2024 sebesar Rp14.391.867,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5Error! No text of specified style in document..201 Rekapitulasi Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

NO	SKPD	PPh21	PPh22	PPh23	PPN	JUMLAH PFK 2024
1	2	3	4	5	6	7=(3+4+5+6)
1	Biro Administrasi Pimpinan	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
2	Badan Penghubung Daerah	0,00	0,00	273.874,00	1.347.748,00	1.621.622,00

NO	SKPD	PPh21	PPh22	PPh23	PPN	JUMLAH PFK 2024
1	2	3	4	5	6	7=(3+4+5+6)
3	Dinas Pendidikan (BLUD SMK Negeri 2 Tanjungpinang)	0,00	597.073,00	180.000,00	5.368.529,00	6.145.602,00
4	Dinas Pendidikan (BLUD SMKN 6 Batam)	6.187.643,00	0,00	413.000,00	0,00	6.600.643,00
	JUMLAH	6.187.643,00	597.073,00	890.874,00	6.716.277,00	14.391.867,00

5.3.2.1.2. Utang Bunga

Utang Bunga	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	0,00	613.908.869,00

Utang bunga (*Accrued Interest*) dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. Pada periode 31 Desember 2023 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Utang Bunga sebesar Rp613.908.869,00 yang bersumber dari penerimaan pembiayaan dari PT. Sarana Multi Infrastruktur, Persero (PT. SMI) berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Nomor 15, 16, 17, dan 18 yang digunakan untuk membiayai beberapa proyek Strategis dengan nilai total plafon dalam empat akta tersebut sebesar Rp162.087.178.360,00.

Pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan pembayaran dan/atau pelunasan atas seluruh kewajiban fasilitas pembiayaan (pokok, bunga, dan biaya-biaya) kepada PT Sarana Multi Infrastruktur dengan meminta pembayaran dipercepat atas sisa pokok pinjaman sebelum jatuh tempo pembayaran akhir Tahun Anggaran kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur dalam rangka efisiensi pembayaran bunga cicilan. Atas Pembayaran yang di percepat sebelum jatuh tempo, PT.SMI telah mengeluarkan surat Nomor S-1090/SMI/DU/1024 Tanggal 31 Oktober 2024 Perihal : Keterangan Lunas atas Fasilitas Pembiayaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Surat tersebut menjelaskan bahwa telah diterimanya pembayaran dan/atau pelunasan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (“Pemprov Kepri”) atas seluruh kewajiban fasilitas pembiayaan (pokok, bunga, dan biaya-biaya) kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“PT SMI”) berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 15, 16, 17, dan 18 tanggal 31 Agustus 2022 antara PT SMI dengan Pemprov Kepri (“Perjanjian Pinjaman Pembiayaan”). PT SMI juga telah menyatakan bahwa Fasilitas Pembiayaan dari PT SMI kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Perjanjian Pinjaman Pembiayaan tersebut telah LUNAS.

5.3.2.1.3. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	0,00	91.945.787.633,00

Bagian lancar utang jangka panjang digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan/atau masyarakat yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Pada periode 31 Desember 2024 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan pembayaran dan/atau pelunasan atas seluruh kewajiban fasilitas pembiayaan (pokok, bunga, dan biaya-biaya) kepada PT Sarana Multi Infrastruktur, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.202 Pelunasan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Periode Pembayaran	Akta No.	Outstanding	Pembayaran		Keterangan
			Pokok	Tanggal Pembayaran	
25/02/2024	15	60.280.081.485,00	15.070.019.844,00	20/02/2024	lunas
	16	19.294.517.295,00	4.823.629.155,00	20/02/2024	lunas
	17	5.645.825.082,00	1.411.456.220,00	20/02/2024	lunas
	18	6.725.363.771,00	1.681.340.945,00	20/02/2024	lunas
Sub Total		91.945.787.633,00	22.986.446.164,00		
25/05/2024	15	45.210.061.641,00	15.070.019.844,00	20/05/2024	lunas
	16	14.470.888.140,00	4.823.629.155,00	20/05/2024	lunas
	17	4.234.368.862,00	1.411.456.220,00	20/05/2024	lunas
	18	5.044.022.826,00	1.681.340.945,00	20/05/2024	lunas
Sub Total		68.959.341.469,00	22.986.446.164,00		
25/08/2024	15	30.140.041.797,00	15.070.019.844,00	21/08/2024	lunas
	16	9.647.258.985,00	4.823.629.155,00	21/08/2024	lunas
	17	2.822.912.642,00	1.411.456.220,00	21/08/2024	lunas
	18	3.362.681.881,00	1.681.340.945,00	21/08/2024	lunas
Sub Total		45.972.895.305,00	22.986.446.164,00		
31/12/2024	15	15.070.021.953,00	15.070.021.953,00	25/10/2024	lunas
	16	4.823.629.830,00	4.823.629.830,00	25/10/2024	lunas
	17	1.411.456.422,00	1.411.456.422,00	25/10/2024	lunas
	18	1.681.340.936,00	1.681.340.936,00	25/10/2024	lunas
Sub Total		22.986.449.141,00	22.986.449.141,00		
Total 2024			91.945.787.633,00		

PT.SMI telah mengeluarkan surat Nomor S-1090/SMI/DU/1024 Tanggal 31 Oktober 2024 Perihal : Keterangan Lunas atas Fasilitas Pembiayaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Surat tersebut menjelaskan bahwa telah diterimanya pembayaran dan/atau pelunasan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (“Pemprov Kepri”) atas seluruh kewajiban fasilitas pembiayaan (pokok, bunga, dan biaya-biaya) kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“PT SMI”) berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 15, 16, 17, dan 18 tanggal 31 Agustus 2022 antara PT SMI dengan Pemprov Kepri (“Perjanjian Pinjaman Pembiayaan”). PT SMI juga telah menyatakan bahwa Fasilitas Pembiayaan dari PT SMI kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Perjanjian Pinjaman Pembiayaan tersebut telah LUNAS.

5.3.2.1.4. Utang Belanja

Utang Belanja	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
	451.420.582.417,31	210.029.652.829,73

Utang Belanja digunakan untuk mencatat utang belanja pemerintah daerah kepada pihak ketiga/masyarakat yang disebabkan terjadinya transaksi belanja yang belum dibayarkan kepada masyarakat/pihak ketiga.

Pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Utang belanja sebesar Rp451.420.582.417,31 dimana terdapat Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp226.476.692.255,00 yang akan dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 430 Tahun 2025 tentang Besaran Tunda Salur Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024. Sedangkan Utang pihak ketiga terdiri dari Utang Belanja Pegawai sebesar Rp188.239.845,00, Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp187.444.539.282,87 yang sudah dilakukan reviu oleh Inspektorat, Utang atas pekerjaan yang belum terbayar yang merupakan Utang Belanja Hibah sebesar Rp13.811.458.307,29, dan Utang Belanja Modal sebesar Rp23.499.652.727,15. Berikut ini adalah tabel rincian Utang Belanja:

Tabel 5.203 Rekapitulasi Utang Belanja per 31 Desember 2024

JENIS UTANG BELANJA	JUMLAH
Utang Belanja Pegawai	188.239.845,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	187.444.539.282,87
Utang Belanja Hibah	13.811.458.307,29
Utang Belanja Modal	23.499.652.727,15
Utang Belanja Bagi Hasil	226.476.692.255,00
SALDO AKHIR UTANG BELANJA	451.420.582.417,31

Berikut ini adalah tabel mutasi utang belanja per 31 Desember 2024:

Tabel 5.204 Mutasi Utang Belanja Per 31 Desember 2024

MUTASI UTANG BELANJA					
Saldo Awal Utang Belanja, 1 Januari 2024					210.029.652.829,73
Penambahan Utang Belanja Tahun 2024 :					
1	Penambahan Utang Belanja Pegawai Karena Reviu			682,00	
	-	Dinas Pendidikan	682,00		
2	Penambahan Utang Belanja Pegawai			188.239.845,00	
	-	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	25.091.881,00		
	-	Dinas Kebudayaan	160.504,00		
	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	162.944.705,00		
	-	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	42.374,00		
	-	Badan Penghubung Daerah	381,00		
3	Penambahan Utang Belanja Barang dan Jasa Karena Reviu			3.018.146,64	
	-	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	3.018.146,64		
4	Penambahan Utang Belanja Barang dan Jasa			185.814.174.752,96	
	-	Dinas Pendidikan	5.788.757.830,52		
	-	Dinas Kesehatan	1.038.082.979,00		
	-	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	975.754.394,00		

MUTASI UTANG BELANJA					
		- Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib (BLUD)	28.701.120.126,00		
		- Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	346.552.289,00		
		- Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud (BLUD)	9.423.684.837,00		
		- Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	8.593.553.311,60		
		- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	96.016.649.323,50		
		- Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	1.694.634.459,00		
		- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	31.790.000,00		
		- Dinas Sosial	663.061.666,00		
		- Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	184.395.000,00		
		- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.043.241.000,00		
		- Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	7.373.698.847,50		
		- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.433.873.000,00		
		- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	311.192.000,00		
		- Dinas Perhubungan	90.754.034,00		
		- Dinas Komunikasi dan Informatika	1.206.924.700,00		
		- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.077.250.396,00		
		- Dinas Kepemudaan dan Olahraga	219.051.000,00		
		- Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	224.403.290,40		
		- Dinas Kelautan dan Perikanan	283.714.320,00		
		- Dinas Pariwisata	1.067.794.500,00		
		- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	5.667.472.068,44		
		- Dinas Perindustrian dan Perdagangan	302.150.000,00		
		- Biro Administrasi Pimpinan	143.835.000,00		
		- Biro Hukum	234.707.100,00		
		- Sekretariat DPRD	4.644.253.954,00		
		- Badan Pendapatan Daerah	4.637.437.354,00		
		- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	178.900.000,00		
		- Badan Penghubung Daerah	501.324.908,00		
		- Inspektorat	325.245.265,00		
		- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	388.915.800,00		
	5	Penambahan Utang Belanja Hibah		13.814.967.307,29	
		- Dinas Kesehatan	975.821.560,00		
		- Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	4.815.417.747,29		
		- Dinas Perhubungan	924.800.000,00		
		- Dinas Kelautan dan Perikanan	119.028.000,00		
		- Biro Umum	4.487.200.000,00		
		- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.492.700.000,00		
	6	Reklasifikasi dari Utang Jangka Pendek Lainnya ke Utang Belanja Modal		1.319.191.392,26	
		- Dinas Pendidikan	35.322.201,20		
		- Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	1.101.220.838,56		
		- Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	16.350.000,00		

MUTASI UTANG BELANJA					
		- Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan	130.005.540,00		
		- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	36.292.812,50		
	7	Penambahan Utang Belanja Modal atas Reviu		212.944.178,00	
		- Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	150.662.210,00		
		- Dinas Pendidikan	62.281.968,00		
	8	Penambahan Utang Belanja Modal		23.366.265.745,45	
		- Dinas Pendidikan	4.805.860.666,67		
		- Dinas Kesehatan	320.438.490,00		
		- Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	342.192.000,00		
		- Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	537.060.000,00		
		- Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	1.277.953.030,00		
		- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.196.107.660,00		
		- Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	336.100.100,00		
		- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.700.000,00		
		- Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	277.685.000,00		
		- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	22.140.000,00		
		- Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	613.025.000,00		
		- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14.576.000,00		
		- Dinas Perhubungan	1.900.641.377,29		
		- Dinas Komunikasi dan Informatika	79.650.000,00		
		- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	20.800.000,00		
		- Dinas Kepemudaan dan Olahraga	16.430.000,00		
		- Dinas Kelautan dan Perikanan	80.450.000,00		
		- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	6.106.961.421,49		
		- Biro Administrasi Pimpinan	12.045.000,00		
		- Biro Kesejahteraan Rakyat	34.410.000,00		
		- Biro Umum	1.113.100.000,00		
		- Sekretariat DPRD	2.923.250.000,00		
		- Badan Pendapatan Daerah	681.690.000,00		
		- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	642.000.000,00		
	9	Penambahan Utang Belanja Bagi Hasil		226.476.692.255,00	
		- Badan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	226.476.692.255,00		
		Total Penambahan :			451.195.494.304,60
		Pengurangan Utang Tahun 2023 :			
	1	Pengurangan Utang Belanja Pegawai Tahun 2023 karena Reviu :		7.904,00	
		- Dinas Komunikasi dan Informatika	7.904,00		
	2	Pengurangan Utang Belanja Pegawai Tahun 2023 karena Pelunasan :		352.882.780,00	
		- Dinas Pendidikan	124.897.896,00		
		- Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	81.308.476,00		

MUTASI UTANG BELANJA					
		- Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud (BLUD)	46.261.570,00		
		- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	16.862.302,00		
		- Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	935.271,00		
		- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	37.018.100,00		
		- Dinas Perhubungan	480.000,00		
		- Dinas Komunikasi dan Informatika	25.510.954,00		
		- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.298.904,00		
		- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.646.386,00		
		- Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	286.883,00		
		- Sekretariat DPRD	3.474.953,00		
		- Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.015.372,00		
		- Badan Pendapatan Daerah	605.399,00		
		- Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	1.290.376,00		
		- Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.274.350,00		
		- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	715.588,00		
	3	Pengurangan Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 karena Pelunasan :		29.599.060.695,00	
		- Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	9.960.880,00		
		- Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	142.984.206,00		
		- Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib (BLUD)	22.909.041.198,00		
		- Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud (BLUD)	6.532.489.411,00		
		- Biro Umum	4.585.000,00		
	4	Pengurangan Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 karena Reviu :		180.372.292,00	
		- Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib (BLUD)	167.772.236,00		
		- Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud (BLUD)	12.600.056,00		
	5	Pengurangan Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 karena Reviu :		132.713.790,00	
		- Dinas Pendidikan	9.150.000,00		
		- Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	17.725.800,00		
		- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	99.837.990,00		
		- Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	4.950.000,00		
		- Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	1.050.000,00		
	6	Pengurangan Utang Belanja Hibah Tahun 2023 karena Pelunasan :		4.595.275,46	
		- Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan	4.595.275,46		
	7	Pengurangan Utang Belanja Hibah Tahun 2024 karena Reviu :		3.509.000,00	
		- Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan	3.509.000,00		

MUTASI UTANG BELANJA				
	8	Pengurangan Utang Belanja Modal Tahun 2023 karena Pelunasan :		1.398.238.588,56
	-	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	1.101.220.838,56	
	-	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	16.350.000,00	
	-	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	280.667.750,00	
	9	Pengurangan Utang Belanja Modal Tahun 2024 karena Reviu :		510.000,00
	-	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	510.000,00	
	10	Pengurangan Belanja Bagi Hasil Tahun 2023 karena Pelunasan :		178.132.674.392,00
	-	Badan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	178.132.674.392,00	
		<u>Total Pengurangan</u>		209.804.564.717,02
		Saldo Akhir Utang Belanja, 31 Desember 2024		451.420.582.417,31

Berikut rincian utang belanja pada beberapa OPD:

Tabel 5.205 Utang Belanja Pegawai

NO	PERANGKAT DAERAH	UTANG BELANJA PEGAWAI
1	2	3
1	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	25.091.881,00
2	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	42.374,00
3	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	162.944.705,00
4	Dinas Kebudayaan	160.504,00
5	Badan Penghubung Daerah	381,00
	JUMLAH	188.239.845,00

Tabel 5.206 Utang Belanja Barang dan Jasa

NO	PERANGKAT DAERAH	UTANG BELANJA BARANG DAN JASA
1	2	3
1	Dinas Pendidikan	5.815.688.364,52
2	Dinas Kesehatan	1.038.082.979,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	975.754.394,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib (BLUD)	29.204.253.778,00
5	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	328.826.489,00
6	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud (BLUD)	9.423.684.837,00
7	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	8.593.553.311,60
8	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	96.609.315.467,41
9	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	1.689.684.459,00
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	31.790.000,00
11	Dinas Sosial	663.061.666,00
12	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	184.395.000,00
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.043.241.000,00
14	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	7.372.648.847,50

NO	PERANGKAT DAERAH	UTANG BELANJA BARANG DAN JASA
1	2	3
15	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.433.873.000,00
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	311.192.000,00
17	Dinas Perhubungan	90.754.034,00
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.206.924.700,00
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.077.250.396,00
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	219.051.000,00
21	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	224.403.290,40
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	283.714.320,00
23	Dinas Pariwisata	1.067.794.500,00
24	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	5.667.472.068,44
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	302.150.000,00
26	Biro Administrasi Pimpinan	143.835.000,00
27	Biro Hukum	234.707.100,00
28	Sekretariat DPRD	5.175.613.954,00
29	Badan Pendapatan Daerah	4.637.437.354,00
30	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	178.900.000,00
31	Badan Penghubung Daerah	501.324.908,00
32	Inspektorat	325.245.265,00
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	388.915.800,00
	JUMLAH	187.444.539.282,87

Tabel 5.207 Utang Belanja Hibah

NO	PERANGKAT DAERAH	UTANG BELANJA HIBAH
1	2	3
1	Dinas Kesehatan	975.821.560,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	4.811.908.747,29
3	Dinas Perhubungan	924.800.000,00
4	Dinas Kelautan dan Perikanan	119.028.000,00
5	Biro Umum	4.487.200.000,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.492.700.000,00
	JUMLAH	13.811.458.307,29

Tabel 5.208 Utang Belanja Modal

NO	PERANGKAT DAERAH	UTANG BELANJA MODAL
1	2	3
1	Dinas Pendidikan	4.903.464.835,87
2	Dinas Kesehatan	320.438.490,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	342.192.000,00
4	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	536.550.000,00
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	1.277.953.030,00

NO	PERANGKAT DAERAH	UTANG BELANJA MODAL
1	2	3
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.232.400.472,50
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	336.100.100,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.700.000,00
9	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	277.685.000,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	22.140.000,00
11	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	613.025.000,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14.576.000,00
13	Dinas Perhubungan	1.900.641.377,29
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	79.650.000,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	20.800.000,00
16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	16.430.000,00
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	80.450.000,00
18	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	6.106.961.421,49
19	Biro Administrasi Pimpinan	12.045.000,00
20	Biro Kesejahteraan Rakyat	34.410.000,00
21	Biro Umum	1.113.100.000,00
22	Sekretariat DPRD	2.923.250.000,00
23	Badan Pendapatan Daerah	681.690.000,00
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	642.000.000,00
	JUMLAH	23.499.652.727,15

Utang Belanja BLUD Rumah Sakit sebagaimana tabel-tabel di atas dirinci sebagai berikut:

- 5.3.2.1.1.1.3. Total Utang Belanja BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib sebesar Rp30.547.292.053,00, terdiri dari:
1. Utang Belanja Barang dan Jasa dari alokasi sumber dana BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib sebesar Rp29.204.253.778,00; dan

2. Utang Belanja dari alokasi sumber dana APBD sebesar Rp1.343.038.275,00 yang terdiri dari Utang Belanja Pegawai sebesar Rp25.091.881,00, Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp975.754.394,00 dan Utang Belanja Modal sebesar Rp342.192.000,00.
- 5.3.2.1.1.1.4. Total Utang Belanja BLUD Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp10.307.297.126,00 terdiri dari:
1. Utang Belanja Barang dan Jasa dari alokasi sumber dana BLUD Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp9.423.684.837,00; dan

2. Utang Belanja dari alokasi sumber dana APBD sebesar Rp865.376.489,00 yang terdiri dari Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp328.826.489,00 dan Utang Belanja Modal sebesar Rp536.550.000,00.

Tabel 5.209 Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah

NO	KAB/KOTA	PKB	BBN-KB	AIR PERMUKAAN	PBB-KB	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	Kota Batam	30.785.210.269,00	32.043.918.811,00	64.820.058,00	45.880.551.236,00	108.774.500.374,00
2	Kota Tanjung Pinang	7.949.365.924,00	6.540.224.279,00	39.079.951,00	11.889.334.441,00	26.418.004.595,00
3	Kab. Bintan	6.163.941.432,00	5.760.027.932,00	23.842.352,00	9.737.163.476,00	21.684.975.192,00
4	Kab. Karimun	6.152.271.199,00	5.316.702.961,00	17.808.053,00	9.802.820.372,00	21.289.602.585,00
5	Kab. Natuna	4.894.244.469,00	4.791.027.327,00	17.602.233,00	7.844.014.610,00	17.546.888.639,00
6	Kab. Lingga	4.842.482.384,00	4.639.805.541,00	15.302.578,00	6.148.080.549,00	15.645.671.052,00
7	Kab. Kep. Anambas	4.715.945.807,00	4.619.033.355,00	13.750.497,00	5.768.320.159,00	15.117.049.818,00
	TOTAL	65.503.461.484,00	63.710.740.206,00	192.205.722,00	97.070.284.843,00	226.476.692.255,00

5.3.2.1.5. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	3.466.450.196,50	9.425.693.470,26

Utang Jangka Pendek Lainnya digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah. Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat terdapat/timbul klaim kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima tetapi belum ada pembayaran/pengakuan sampai dengan tanggal pelaporan.

Pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menggunakan akun Utang Jangka Pendek Lainnya untuk mencatat Utang Pengadaan Aset Tetap akan tetapi pada tahun 2024 tidak terdapat saldo Utang Pengadaan Aset Tetap dikarenakan Utang Pengadaan Aset Tetap disajikan pada akun Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan, dan Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pada Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat utang jangka pendek lainnya sebesar Rp3.466.450.196,50 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.210 Rekapitulasi Utang Jangka Pendek Lainnya Per 31 Desember 2024

NO	JENIS UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA	JUMLAH
1	2	3
1	Utang Lebih Bayar Pajak Kendaraan Bermotor	1.702.100.196,50
2	Kurang catat atas BOS Dikmen 2017	1.764.350.000,00
	Total Utang Jangka Pendek Lainnya	3.466.450.196,50

Berikut ini adalah tabel mutasi utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2024:

Tabel 5.211 Mutasi Utang Jangka Pendek Lainnya Per 31 Desember 2024

MUTASI UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA				
		Saldo Awal Utang Jangka Pendek Lainnya, 1 Januari 2024		8.106.502.078,00
	1	Pengurangan Utang Jangka Pendek Lainnya karena Pelunasan :	4.640.051.881,50	

MUTASI UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA					
		-	Badan Pendapatan Daerah	4.640.051.881,50	
			Total Pengurangan		4.640.051.881,50
Saldo Akhir Utang Jangka Pendek Lainnya, 31 Desember 2024					3.466.450.196,50

Rincian Kewajiban Jangka Pendek Lainnya pada Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya ditunjukkan pada **Lampiran 9**.

5.3.2.2. Kewajiban Jangka Panjang

5.3.2.2.1. Utang Kepada Pemerintah Pusat

Utang Kepada Pemerintah Pusat	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
	196.353.186.257,62	191.337.190.542,18

Utang Kepada Pemerintah Pusat adalah Utang Jangka Panjang atas jaminan pascatambang dan jaminan reklamasi yang merupakan jaminan yang digunakan Gubernur untuk menunjuk pihak ketiga jika nantinya perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan komitmennya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 169C huruf c terdapat peralihan kewenangan atas dana jaminan reklamasi dan pascatambang dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ke Pemerintah Pusat.

Nilai Kewajiban Jangka Panjang untuk Kas yang Dibatasi Penggunaannya pada tahun 2024 sebesar Rp196.353.186.257,62 terdiri atas jaminan reklamasi dan pascatambang sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 5.212 Dana Jaminan Reklamasi dan Dana Jaminan Pascatambang

KABUPATEN/KOTA	REKLAMASI	PASCATAMBANG	TOTAL
KABUPATEN BINTAN	2.567.150.527,45	60.442.981.095,65	63.010.131.623,10
KOTA TANJUNGPINANG	309.049.302,00	4.321.089.858,00	4.630.139.160,00
KABUPATEN LINGGA	5.868.648.409,73	9.451.232.267,13	15.319.880.676,86
KABUPATEN KARIMUN	30.598.713.308,40	76.976.691.560,60	107.575.404.869,00
KOTA BATAM	2.228.417.883,00	1.528.648.064,00	3.757.065.947,00
KABUPATEN NATUNA	2.026.282.407,66	34.281.574,00	2.060.563.981,66
JUMLAH	43.598.261.838,24	152.754.924.419,38	196.353.186.257,62

Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.213 Rincian Dana Jaminan Reklamasi dan Dana Jaminan Pascatambang

DANA JAMINAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG TAHUN 2024				
Saldo Awal Dana Jaminan Reklamasi dan Pascatambang, 1 Januari 2024				191.337.190.542,18
	Penambahan :			
1	Penempatan dan Penambahan Bunga Deposito dan Koreksi Pencatatan Dana Jaminan Reklamasi		2.574.902.375,42	
		Kabupaten Bintan	78.112.286,78	
		Kota Tanjungpinang	309.049.302,00	
		Kabupaten Lingga	94.500.699,33	

DANA JAMINAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG TAHUN 2024					
		Kota Batam	24.877.163,00		
		Kabupaten Karimun	282.673.789,26		
		Kabupaten Natuna	1.785.689.135,05		
	2	Penempatan dan Penambahan Bunga Deposito, dan Koreksi Pencatatan Dana Jaminan Pascatambang		30.973.718.128,31	
		Kabupaten Bintan	1.469.566.150,33		
		Kota Tanjungpinang	31.686.198,00		
		Kabupaten Lingga	189.636.432,93		
		Kota Batam	17.026.162,00		
		Kabupaten Karimun	29.231.521.611,05		
		Kabupaten Natuna	34.281.574,00		
		Total Penambahan :			33.548.620.503,73
		Pengurangan :			
	1	Pencairan dan Koreksi Pencatatan Dana Jaminan Reklamasi		22.197.646.578,48	
		Kabupaten Lingga	383.627.321,48		
		Kota Batam	103.813.335,00		
		Kabupaten Karimun	21.710.205.922,00		
	2	Pencairan dan Koreksi Pencatatan Dana Jaminan Pascatambang		6.334.978.209,81	
		Kabupaten Bintan	2.869.949.379,00		
		Kabupaten Lingga	3.315.497.453,81		
		Kota Batam	147.934.021,00		
		Kabupaten Karimun	1.597.356,00		
		Total Pengurangan :			28.532.624.788,29
		Saldo Akhir Jaminan Reklamasi dan Pascatambang, 31 Desember 2024			196.353.186.257,62

Nilai Kewajiban Jangka Panjang untuk Kas yang Dibatasi Penggunaannya sebesar Rp196.353.186.257,62 tersebut merupakan nilai Jaminan Reklamasi dan Pascatambang yang ditempatkan atas nama Gubernur/Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Jaminan Reklamasi dan Pascatambang disajikan sebagai akun Kewajiban Jangka Panjang - Utang Kepada Pemerintah Pusat dikarenakan tidak ada akun yang relevan dapat mengakomodir penyajian jaminan tersebut dalam bagan akun standar aplikasi pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Berikut ini tabel nilai penempatan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang Atas Nama Gubernur/Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau:

Tabel 5.214 Dana Jaminan Reklamasi & Pascatambang Atas Nama Gubernur/Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau

NO	PERUSAHAAN	JAMINAN REKLAMASI			JAMINAN PASCATAMBANG		
		2024	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN	2024	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN
KABUPATEN BINTAN							
1	PT. BINA RIAU JAYA				7.000.000.000,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BINA RIAU JAYA	BNI
					5.568.842.847,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BINA RIAU JAYA	BNI
					3.169.108.983,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BINA RIAU JAYA	BNI
2	PT. BINTAN INTI SUKSES				587.975.473,65	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BINTAN INTI SUKSES	BTN
3	PT. BINTAN KARISMA PRATAMA				847.801.554,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BINTAN KARISMA PRATAMA	BRI
4	PT. BINTAN NUSA MULTI	65.814.459,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BINTAN NUSA MULTI	BNI	3.169.108.983,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BINTAN NUSA MULTI	BNI
5	PT. BINTANG MAHKOTA SUKSES	1.097.256.264,37	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BINTANG MAHKOTA SUKSES	BANK MANDIRI	6.000.000.000,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BINTANG MAHKOTA SUKSES	BANK MANDIRI
					946.372.977,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BINTANG MAHKOTA SUKSES	BANK MANDIRI
					7.219.429.300,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BINTANG MAHKOTA SUKSES	BANK MANDIRI
6	PT. BUKIT PANGLONG				275.456.213,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT. BUKIT PANGLONG	BPR BINTAN
7	PT. GUNUNG BINTAN ABADI				6.026.754.496,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT. GUNUNG BINTAN ABADI	BPR BINTAN
8	PT. GUNUNG MARIO LAGALIGO	313.223.396,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. GUNUNG MARIO LAGALIGO	BNI	1.266.937.448,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. GUNUNG MARIO LAGALIGO	BNI
9	PT. LOBINDO NUSA PERSADA				3.144.496.924,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. LOBINDO NUSA PERSADA	BANK MANDIRI
10	PT. SHANINDO INDAH				33.687.462,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT. SHANINDO INDAH	BPR BINTAN
11	PT. SINDO MANDIRI				832.048.171,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT. SINDO MANDIRI	BPR BINTAN
12	PT. TRI PANORAMA SETIA				4.443.348.053,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. TRI PANORAMA SETIA	BNI

NO	PERUSAHAAN	JAMINAN REKLAMASI			JAMINAN PASCATAMBANG		
		2024	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN	2024	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN
13	PT. TRI PANORAMA SETIA	1.090.856.408,08	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. TRI PANORAMA SETIA	BANK MANDIRI			
14	PT. TUNGGUL ULUNG MAKMUR				4.514.680.067,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT. TUNGGUL ULUNG MAKMUR	BPR BINTAN
15	PT. WAHANA KARYA SUKSESINDO UTAMA				5.396.932.144,00	GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU QQ PT. WAHANA KARYA SUKSESINDO UTAMA	BRI
TOTAL BINTAN		2.567.150.527,45			60.442.981.095,65		
KOTA TANJUNGPINANG							
1	PT. ALAM INDAH PURNAMA PANJANG					DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA QQ PT. ALAM INDAH PURNAMA PANJANG	
						DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA QQ PT. ALAM INDAH PURNAMA PANJANG	
2	PT. KERETA KENCANA BANGUN PERKASA	309.049.302,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT. KERETA KENCANA	BPR BESTARI	3.966.328.133,00	GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU QQ PT. KERETA KENCANA BANGUN PERKASA	BPR BESTARI
3	PT. SYAHNUR				354.761.725,00	KA. DPMPTSP PROV. KEPRI PT. SYAHNUR (SYAHJONI)	BPR BESTARI
TOTAL TANJUNGPINANG		309.049.302,00			4.321.089.858,00		
KABUPATEN LINGGA							
1	PT. ALAM PURNAMA PANJANG	570.154.915,07	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. ALAM PURNAMA PANJANG	BANK MANDIRI	649.355.418,49	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. ALAM PURNAMA PANJANG	BANK MANDIRI
2	PT. BINTAN BATAM PRATAMA				798.256.928,00	KEPALA DPMPTSP PROVINSI KEPRI QQ PT BINTAN BATAM PRATAMA	BNI
3	PT. BUKIT ALAM INDO	425.828.201,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BUKIT ALAM INDO	BRI	436.076.201,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BUKIT ALAM INDO	BRI

NO	PERUSAHAAN	JAMINAN REKLAMASI			JAMINAN PASCATAMBANG		
		2024	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN	2024	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN
4	PT. CITRA SEMARAK SEJATI	84.444.346,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. CITRA SEMARAK SEJATI	BNI	727.896.387,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. CITRA SEMARAK SEJATI	BNI
5	PT. DABO BANGUN SUKSES	613.749.480,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. DABO BANGUN SUKSES	BTN	722.655.993,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. DABO BANGUN SUKSES	BTN
6	PT. DABO BINA SUKSES	821.433.480,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. DABO BINA SUKSES	BANK MANDIRI			
7	PT. DEVA PANJANG JAYA	739.491.234,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. DEVA PANJANG JAYA	BTN	477.301.354,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. DEVA PANJANG JAYA	BTN
8	PT. ENERGI SINGKEP BERTUAH	670.205.533,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. ENERGI SINGKEP BERTUAH	BNI	520.093.358,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. ENERGI SINGKEP BERTUAH	BNI
9	PT. GROWA INDONESIA	242.170.065,52	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. GROWA INDONESIA	BANK MANDIRI	712.347.907,88	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. GROWA INDONESIA	BANK MANDIRI
		174.229.156,31	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. GROWA INDONESIA	BANK MANDIRI	6.883.747,69	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. GROWA INDONESIA	BANK MANDIRI
		230.670.279,68	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. GROWA INDONESIA	BANK MANDIRI			
10	PT. INDO INTER INTRACO	238.641.702,15	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. INDO INTER INTRACO	BANK MANDIRI	119.320.851,07	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. INDO INTER INTRACO	BANK MANDIRI
					1.115.020.823,00	KA. DPMTSP PROVINSI KEPRI QQ PT. INDO INTER INTRACO	BRI
11	PT. INDOPRIMA KARISMA JAYA	382.771.319,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. INDOPRIMA KARISMA JAYA	BRI	1.260.220.680,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. INDOPRIMA KARISMA JAYA	BRI
12	PT. MITRA PERSADA RESOURCES	0,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. MITRA PERSADA RESOURCES	BTN	0,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. MITRA PERSADA RESOURCES	BTN
					0,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. MITRA PERSADA RESOURCES	BTN
13	PT. SINGKEP TUAH PERSADA	551.767.296,00	KA. DPMTSP PROVINSI KEPRI QQ PT. SINGKEP TUAH PERSADA	BRI	467.953.654,00	KA. DPMTSP PROVINSI KEPRI QQ PT. SINGKEP TUAH PERSADA	BRI
14	PT. SIRTU ALAM PERSADA				1.437.848.964,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. SIRTU ALAM PERSADA	BNI
15	PT. TRI TUNAS UTAMA	123.091.402,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. TRI TUNAS UTAMA	BNI			

NO	PERUSAHAAN	JAMINAN REKLAMASI			JAMINAN PASCATAMBANG		
		2024	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN	2024	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN
TOTAL LINGGA		5.868.648.409,73			9.451.232.267,13		
KOTA BATAM							
1	PT. BARELANG INTERNASIONAL EKSPASINDO	116.614.872,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ BARELANG INTERNASIONAL EKSPANSINDO	BNI	26.872.406,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ BARELANG INTERNASIONAL EKSPANSINDO	BNI
		270.000.000,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ BARELANG INTERNASIONAL EKSPANSINDO	BNI	131.985.281,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ BARELANG INTERNASIONAL EKSPANSINDO	BNI
		285.013.653,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ BARELANG INTERNASIONAL EKSPANSINDO	BNI			
2	PT. BINTANG ARTHA MAKMUR	150.000.000,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT BINTANG ARTHA MAKMUR	BNI	150.000.000,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT BINTANG ARTHA MAKMUR	BNI
		95.877.191,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT BINTANG ARTHA MAKMUR	BNI	203.442.880,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT BINTANG ARTHA MAKMUR	BNI
3	PT. BUMI SEMESTA UTAMA	150.000.000,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BUMI SEMESTA UTAMA	BNI	150.000.000,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BUMI SEMESTA UTAMA	BNI
		149.715.211,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BUMI SEMESTA UTAMA	BNI	300.049.487,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BUMI SEMESTA UTAMA	BNI
4	PT. CIPTA REZEKI KITA BERSAMA	0,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. CIPTA REZEKI KITA BERSAMA	BANK MANDIRI			
5	PT. RIAU MULIA JAYA	150.000.000,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. RIAU MULIA JAYA	BNI	150.000.000,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. RIAU MULIA JAYA	BNI
		64.249.035,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. RIAU MULIA JAYA	BNI	147.909.446,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. RIAU MULIA JAYA	BNI
6	PT. RIAU PRATAMA					-	
7	PT. SARANA TRANS SEJAHTERA	396.277.213,00	KA. DPMPTSP KEPRI QQ PT. SARANA TRANS SEJAHTERA	BNI	134.194.282,00	KA. DPMPTSP KEPRI QQ PT. SARANA TRANS SEJAHTERA	BNI

NO	PERUSAHAAN	JAMINAN REKLAMASI			JAMINAN PASCATAMBANG		
		2024	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN	2024	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN
8	PT. SARANA TRANS SEJAHTERA	400.670.708,00	KA. DPMPTSP KEPRI QQ PT. SARANA TRANS SEJAHTERA	BNI	134.194.282,00	KA. DPMPTSP KEPRI QQ PT. SARANA TRANS SEJAHTERA	BNI
TOTAL BATAM		2.228.417.883,00			1.528.648.064,00		
KABUPATEN KARIMUN							
1	CV. BALI JAYA KARIMUN	79.000.056,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ CV. BALI JAYA KARIMUN	BNI	101.931.864,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ CV. BALI JAYA KARIMUN	BNI
2	PT. ANEKA ALAM ANUGERAH	107.847.056,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. ANEKA ALAM ANUGERAH	BNI	500.000.000,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. ANEKA ALAM ANUGERAH	BNI
					277.355.285,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. ANEKA ALAM ANUGERAH	BNI
3	PT. ASA TATA MARDIVKA	757.792.864,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. ASA TATA MARDIVKA	BNI	56.621.647,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. ASA TATA MARDIVKA	BNI
		56.621.647,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. ASA TATA MARDIVKA	BNI	350.617.003,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. ASA TATA MARDIVKA	BNI
4	PT. ATMA BERSATU SUKSES	231.226.532,00	KEPALA DPMPTSP PROV KEPRI QQ DIR PT ATMA BERSATU SUKSES	BNI	134.162.427,00	KEPALA DPMPTSP PROV KEPRI QQ DIR PT ATMA BERSATU SUKSES	BNI
		193.909.325,00	KEPALA DPMPTSP PROV KEPRI QQ DIR PT ATMA BERSATU SUKSES	BNI			
5	PT. BERKAH MAJU BERSAMA	420.326.190,59	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BERKAH MAJU BERSAMA	BANK MANDIRI	60.046.598,64	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BERKAH MAJU BERSAMA	BANK MANDIRI
		11.355.541,11	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BERKAH MAJU BERSAMA	BANK MANDIRI	452.178.712,10	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BERKAH MAJU BERSAMA	BANK MANDIRI
6	PT. BUKIT ALAM PERSADA	0,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT. BUKIT ALAM PERSADA	BNI	9.860.775.772,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT. BUKIT ALAM PERSADA	BNI
7	PT. BUKIT GRANIT MINING MANDIRI	3.124.118.631,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT. BUKIT GRANIT MINING MANDIRI	BNI	765.439.180,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT. BUKIT GRANIT MINING MANDIRI	BNI
8	PT. BUKIT LINTANG KARIMUN	818.429.281,61	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BUKIT LINTANG KARIMUN	BANK MANDIRI	376.409.652,43	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BUKIT LINTANG KARIMUN	BANK MANDIRI

NO	PERUSAHAAN	JAMINAN REKLAMASI			JAMINAN PASCATAMBANG		
		2024	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN	2024	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN
9	PT. BUKIT MERAH INDAH	6.001.996.165,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT BUKIT MERAH INDAH	BNI	4.806.861.000,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT BUKIT MERAH INDAH	BNI
10	PT. CIPTA MORO MANDIRI	31.454.680,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT CIPTA MORO MANDIRI	BNI			
11	PT. CITRA SINDO	388.211.320,00	GUB. KEPRI CQ KA. PMPTSP KEPRI QQ PT. CITRA SINDO	BNI	464.350.000,00	GUB. KEPRI CQ KA. PMPTSP KEPRI QQ PT. CITRA SINDO	BNI
12	PT. ENERGI CAHAYA MAKMUR				374.834.946,67	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. ENERGI CAHAYA MAKMUR	BANK MANDIRI
					364.553.077,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. ENERGI CAHAYA MAKMUR	BANK MANDIRI
13	PT. EUNINDO USAHA MANDIRI	177.422.068,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT EUNINDO USAHA MANDIRI	BNI	422.981.425,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT. EUNINDO USAHA MANDIRI	BNI CABANG TANJUNG BALAI KARIMUN
14	PT. INDONESIA BISA SUKSES	369.830.554,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT INDONESIA BISA SUKSES	BNI	121.255.896,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT INDONESIA BISA SUKSES	BNI
15	PT. JENI PRIMA SUKSES	1.469.669.061,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. JENI PRIMA SUKSES	BNI	690.060.033,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. JENI PRIMA SUKSES	BNI
16	PT. KARIMUN GRANIT	4.037.384.500,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. KARIMUN GRANITE	BRI	18.553.668.462,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. KARIMUN GRANITE	BRI
		645.517.715,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. KARIMUN GRANITE	BRI			
		314.032.800,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. KARIMUN GRANITE	BRI			
17	PT. KARIMUN MINING	210.256.196,93	KA. DINAS ESDM QQ PT. KARIMUN MINING	BANK MANDIRI			-
18	PT. KAWASAN DINAMIKA HARMONITAMA	4.444.811.000,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT. KAWASAN DINAMIKA HARMONITAMA	BNI	970.297.000,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT. KAWASAN DINAMIKA HARMONITAMA	BNI
19	PT. MIRASINDO PERDANA	403.200.314,00	GUB. KEPRI CQ KA. BPMPTSP KEPRI QQ PT. MIRASINDO PERDANA	BNI	353.399.942,00	GUB. KEPRI CQ KA. BPMPTSP KEPRI QQ PT. MIRASINDO PERDANA	BNI
					790.288.000,00	GUB. KEPRI CQ KA. BPMPTSP KEPRI QQ PT. MIRASINDO PERDANA	BNI
					1.485.689.635,76	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. MIRASINDO PERDANA	BANK MANDIRI

NO	PERUSAHAAN	JAMINAN REKLAMASI			JAMINAN PASCATAMBANG		
		2024	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN	2024	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN
20	PT. PERINTIS MORO ADITYA	1.562.609.315,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT. PERINTIS MORO ADITYA	BNI	748.558.817,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT. PERINTIS MORO ADITYA	BNI
21	PT. RIAU ALAM ANUGERAH INDONESIA	0,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT RIAUALAM ANUGERAH INDONESIA	BNI	13.378.547.550,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT RIAUALAM ANUGERAH INDONESIA	BNI
		0,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT RIAUALAM ANUGERAH INDONESIA	BNI			
		0,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT RIAUALAM ANUGERAH INDONESIA	BNI			
		0,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT RIAUALAM ANUGERAH INDONESIA	BNI			
22	PT. SARANA TRANS SEJAHTERA	412.721.077,00	KA. DPMPTSP KEPRI QQ PT. SARANA TRANS SEJAHTERA	BNI	134.194.282,00	KA. DPMPTSP KEPRI QQ PT. SARANA TRANS SEJAHTERA	BNI
23	PT. SARANA TRANS SEJAHTERA	418.746.089,00	KA. DPMPTSP KEPRI QQ PT. SARANA TRANS SEJAHTERA	BNI	134.194.282,00	KA. DPMPTSP KEPRI QQ PT. SARANA TRANS SEJAHTERA	BNI
24	PT. SINDO MANDIRI	34.521.341,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT SINDO MANDIRI	BNI			
25	PT. SUNGAI UNGAR ABADI	219.869.421,16	KA. DINAS ESDM QQ PT. SUNGAI UNGAR ABADI	BANK MANDIRI	2.461.427,00	KA. DINAS ESDM QQ PT. SUNGAI UNGAR ABADI	BANK MANDIRI
26	PT. SYABAS RIAU SAKTI	60.392.483,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ SYABAS RIAU SAKTI	BNI			
27	PT. TANJUNG MELAYU MAKMUR	12.491.134,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT TANJUNG MELAYU MAKMUR	BNI			
28	PT. WIRA PENTA KENCANA	0,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT WIRA PENTA KENCANA	BNI	9.809.410.066,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT WIRA PENTA KENCANA	BRI
29	PT. PACIFIC GRANITAMA	3.582.948.950,00	DIRJEN MINERBA QQ. PACIFIC GRANITAMA (Pelimpahan kewenangan dari Pusat (PMA ke PMDN) Tahun 2023)	BNI	947.534.000,00	DIRJEN MINERBA QQ. PACIFIC GRANITAMA (Pelimpahan kewenangan dari Pusat (PMA ke PMDN) Tahun 2023)	BNI
					7.610.797.831,00	DIRJEN MINERBA QQ. PACIFIC GRANITAMA (Pelimpahan kewenangan dari Pusat (PMA ke PMDN) Tahun 2023)	BNI

NO	PERUSAHAAN	JAMINAN REKLAMASI			JAMINAN PASCATAMBANG		
		2024	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN	2024	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN
					1.877.215.747,00	DIRJEN MINERBA QQ. PACIFIC GRANITAMA (Pelimpahan kewenangan dari Pusat (PMA ke PMDN) Tahun 2023)	BNI
TOTAL KARIMUN		30.598.713.308,40			76.976.691.560,60		
KABUPATEN NATUNA							
1	PT. MULTI MINERAL INDONESIA	774.478.743,00	KA. DINAS DPMPTSP PROV KEPRI QQ PT. MULTI MINERAL INDONESIA	BNI			
2	PT. ZAMRUD EKUATOR RESOURCES	761.250.412,00	KA. DINAS DPMPTSP PROV KEPRI QQ PT. ZAMRUD EKUATOR RESOURCES	BANK MANDIRI			
3	PT. INDOPRIMA KARISMA JAYA	246.308.690,00	KA. DINAS DPMPTSP PROV KEPRI QQ PT. INDOPRIMA KARISMA JAYA	BRI	34.281.574,00	KA. DINAS DPMPTSP PROV KEPRI QQ PT. INDOPRIMA KARISMA JAYA	BRI
4	CV. NUSANTARA PASIR NATUNA	244.244.562,66	KA. DINAS DPMPTSP PROV KEPRI QQ CV. NUSANTARA PASIR NATUNA	BANK MANDIRI			
TOTAL NATUNA		2.026.282.407,66			34.281.574,00		
GRAND TOTAL		43.598.261.838,24			152.754.924.419,38		

Sedangkan penempatan dana jaminan reklamasi dan pascatambang oleh Perusahaan Pemegang IUP yang bukan/belum atas nama Gubernur/Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, sebesar Rp12.006.540.079,54 belum dapat diakui sebagai Kas yang Dibatasi Penggunaannya. Berikut ini tabel rincian dana jaminan reklamasi dan pascatambang yang belum atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau:

Tabel 5.215 Dana Jaminan Reklamasi & Pascatambang Yang Belum Atas Nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau

NO	PERUSAHAAN	JAMINAN REKLAMASI			JAMINAN PASCATAMBAH		
		2024	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN	2024	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN
KABUPATEN BINTAN							
1	PT. BINTAN KARISMA PRATAMA	1.659.401.308,00	PT. BINTAN KARISMA PRATAMA				
2	PT. GUNUNG BINTAN ABADI				936.827.108,54	PT. GUNUNG BINTAN ABADI QQ BUPATI BINTAN	MANDIRI CABANG TANJUNGPINANG
TOTAL BINTAN		1.659.401.308,00			936.827.108,54		
KOTA TANJUNGPINANG							
1	CV. YAKIN SETIA MULYA				5.143.681,00	CV. YAKIN SETIA MULYA QQ WALIKOTA TPI	BPR BESTARI
2	PT. CAHAYA BINTAN ABADI				268.751.044,00	PT. CAHAYA BINTAN ABADI QQ WALIKOTA TPI	BPR BESTARI
3	PT. DUA KARYA ABADI				2.496.666.412,00	PT. DUA KARYA ABADI QQ WALIKOTA TPI	BPR BESTARI
4	PT. LOBINDO NUSA PERSADA	121.876.487,00	PT. LOBINDO NUSA PERSADA QQ WALIKOTA TANJUNGPINANG	BPR BESTARI	2.077.866,00	PT. LOBINDO NUSA PERSADA QQ WALIKOTA TANJUNGPINANG	BPR BESTARI
5	PT. PIPO JAYA				751.426.409,00	PT. PIPO JAYA QQ WALIKOTA TPI	BPR BESTARI
6	PT. SYAHNUR				405.564.707,00	PT. SYAHNUR QQ WALIKOTA TPI	BPR BESTARI
TOTAL TANJUNGPINANG		121.876.487,00			3.929.630.119,00		
KABUPATEN LINGGA							
1	PT. IMPIAN CIPTA BISA SUKSES	504.315.000,00	BUPATI LINGGA QQ PT. IMPIAN CIPTA BISA SUKSES		1.060.000.000,00	BUPATI LINGGA QQ PT. IMPIAN CIPTA BISA SUKSES	BANK RIAU KEPRI CABANG TANJUNGPINANG
2	PT. KARYA PUTRA LINGGA	750.000.000,00	BUPATI LINGGA QQ PT. KARYA PUTRA LINGGA		1.000.000.000,00	BUPATI LINGGA QQ PT. KARYA PUTRA LINGGA	BANK RIAU KEPRI CAPEM. DAIK LINGGA
3	PT. SUMBER PRIMA LESTARI	1.266.276.182,00	PT. SUMBER PRIMA LESTARI QQ BUPATI LINGGA				

NO	PERUSAHAAN	JAMINAN REKLAMASI			JAMINAN PASCATAMBANG		
		2024	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN	2024	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN
	TOTAL LINGGA		2.520.591.182,00			2.060.000.000,00	
KABUPATEN KARIMUN							
1	PT. ENERGI CAHAYA MAKMUR	778.213.875,00	PT. ENERGI CAHAYA MAKMUR				
TOTAL KARIMUN		778.213.875,00					
GRAND TOTAL		5.080.082.852,00			6.926.457.227,54		

5.3.3. Ekuitas

Ekuitas	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
	6.454.280.263.239,55	6.764.055.547.180,37

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Pada Tahun 2024 Ekuitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar Rp6.454.280.263.239,55.

- Ekuitas Awal	6.764.055.547.180,37
- Surplus / (Defisit) - LO	(303.759.392.886,40)
- Koreksi Nilai Persediaan	10.026.024.201,81
- Lain-lain	(16.041.915.256,23)
Ekuitas Akhir	6.454.280.263.239,55

5.4. Penjelasan Pos – Pos Laporan Operasional (LO)

5.4.1. Pendapatan–LO

Pendapatan - LO	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	(Rp)	(Rp)
	4.115.268.949.417,46	4.542.605.075.949,12

Pendapatan–LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas Pemerintah Daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan–LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO, Pendapatan Transfer-LO, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan–LO dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO.

Pada Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat realisasi Pendapatan-LO sebesar Rp4.115.268.949.417,46. Sebagaimana rincian berikut:

Tabel 5.216 Pendapatan–LO

Jenis Pendapatan – LO	Saldo 2024	Saldo 2023
	(Rp)	(Rp)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	1.994.646.518.322,80	1.808.546.273.646,02
Pendapatan Transfer - LO	1.949.654.986.207,00	2.348.989.767.452,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah- LO	170.967.444.887,66	385.069.034.851,10
JUMLAH	4.115.268.949.417,46	4.542.605.075.949,12

5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO

Pendapatan Asli Daerah - LO	Saldo 2024	Saldo 2023
	(Rp)	(Rp)
	1.994.646.518.322,80	1.808.546.273.646,02

Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dikenakan berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah - LO, Pendapatan Retribusi Daerah - LO, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO, dan Lain-lain PAD yang Sah - LO dengan realisasi sebagai berikut :

Tabel 5.217 Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

Jenis Pendapatan Asli Daerah - LO	Saldo 2024	Saldo 2023
	(Rp)	(Rp)
Pajak Daerah - LO	1.787.142.204.747,00	1.636.218.610.341,00
Retribusi Daerah - LO	155.726.470.273,30	12.172.912.898,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	1.904.909.335,00	2.449.330.649,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	49.872.933.967,50	157.705.419.758,02
JUMLAH	1.994.646.518.322,80	1.808.546.273.646,02

Apabila dibandingkan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Laporan Operasional (LO) maka terdapat perbedaan sebagai berikut:

Tabel 5.218 Rincian Selisih Pendapatan Asli Daerah (PAD) LRA dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) LO

URAIAN	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	LAPORAN OPERASIONAL	SELISIH
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	1.980.461.763.464,68	1.994.646.518.322,80	14.184.754.858,12
Pajak Daerah-LO	1.777.704.385.140,00	1.787.142.204.747,00	9.437.819.607,00
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	596.081.883.938,00	597.786.505.146,00	1.704.621.208,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)–LO	522.716.638.500,00	533.667.908.500,00	10.951.270.000,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO	490.605.194.542,00	487.387.122.941,00	(3.218.071.601,00)
Pajak Air Permukaan-LO	1.192.208.723,00	1.192.208.723,00	0,00
Pajak Rokok–LO	167.108.459.437,00	167.108.459.437,00	0,00
Retribusi Daerah-LO	148.286.242.017,30	155.726.470.273,30	7.440.228.256,00
Retribusi Jasa Umum-LO	137.516.081.176,30	144.916.891.732,30	7.400.810.556,00
Retribusi Jasa Usaha-LO	5.742.143.841,00	5.781.561.541,00	39.417.700,00
Retribusi Perizinan Tertentu-LO	5.028.017.000,00	5.028.017.000,00	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	1.904.909.335,00	1.904.909.335,00	0,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO	1.904.909.335,00	1.904.909.335,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah-LO	52.566.226.972,38	49.872.933.967,50	(2.693.293.004,88)
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	1.336.203.722,00	0,00	(1.336.203.722,00)
Jasa Giro-LO	6.290.193.867,90	1336203722,00	(4.953.990.145,90)
Pendapatan Bunga-LO	339.106.060,00	6.290.193.867,90	5.951.087.807,90
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.500.000,00	339.106.060,00	337.606.060,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	2.713.160.286,90	2.680.427.634,30	(32.732.652,60)
Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	14.570.561.041,00	14.568.130.241,00	(2.430.800,00)
Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	6.501.215,00	6.991.153,00	489.938,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO	904.694.700,00	904.694.700,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian-LO	3.951.467.681,76	1.294.348.191,48	(2.657.119.490,28)
Pendapatan dari BLUD-LO	22.421.878.770,68	22.421.878.770,68	0,00

URAIAN	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	LAPORAN OPERASIONAL	SELISIH
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	4.925.402,14	4.925.402,14	0,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	26.034.225,00	26.034.225,00	0,00

Penjelasan selisih Pendapatan Asli Daerah pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Pendapatan Asli Daerah pada Laporan Operasional (LO) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.219 Penjelasan Selisih Pendapatan Pajak Daerah-LRA dengan Pendapatan Pajak Daerah-LO

URAIAN	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	PELUNASAN SALDO AWAL PIUTANG	PELUNASAN PIUTANG	PENETAPAN PIUTANG 2024	LAPORAN OPERASIONAL
Pajak Daerah	1.777.704.385.140,00	(43.960.395.675,00)	(1.600.526.863.752,00)	1.653.925.079.034,00	1.787.142.204.747,00
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	596.081.883.938,00	(168.336.992,00)	(616.236.849.793,00)	618.109.807.993,00	597.786.505.146,00
PKB-Mobil Penumpang-Sedan	14.600.867.857,00	(168.336.992,00)	(616.236.849.793,00)	618.109.807.993,00	16.305.489.065,00
PKB-Mobil Penumpang-Jeep	83.223.828.443,00	0,00	0,00	0,00	83.223.828.443,00
PKB-Mobil Penumpang-Minibus	331.714.934.959,00	0,00	0,00	0,00	331.714.934.959,00
PKB-Mobil Bus-Microbus	418.264.750,00	0,00	0,00	0,00	418.264.750,00
PKB-Mobil Bus-Bus	3.286.105.834,00	0,00	0,00	0,00	3.286.105.834,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	18.472.453.052,00	0,00	0,00	0,00	18.472.453.052,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	14.290.426.591,00	0,00	0,00	0,00	14.290.426.591,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	17.226.016.705,00	0,00	0,00	0,00	17.226.016.705,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	1.237.085.451,00	0,00	0,00	0,00	1.237.085.451,00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	111.475.255.121,00	0,00	0,00	0,00	111.475.255.121,00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	136.645.175,00	0,00	0,00	0,00	136.645.175,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	522.716.638.500,00	(885.390.000,00)	(536.591.488.100,00)	548.428.148.100,00	533.667.908.500,00
BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	5.386.600.000,00	(885.390.000,00)	(536.591.488.100,00)	548.428.148.100,00	16.337.870.000,00
BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	64.727.747.500,00	0,00	0,00	0,00	64.727.747.500,00
BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	283.363.435.000,00	0,00	0,00	0,00	283.363.435.000,00
BBNKB-Mobil Bus-Microbus	378.975.000,00	0,00	0,00	0,00	378.975.000,00
BBNKB-Mobil Bus-Bus	2.602.425.000,00	0,00	0,00	0,00	2.602.425.000,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	11.545.050.000,00	0,00	0,00	0,00	11.545.050.000,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	4.335.870.000,00	0,00	0,00	0,00	4.335.870.000,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	7.391.990.000,00	0,00	0,00	0,00	7.391.990.000,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	505.800.000,00	0,00	0,00	0,00	505.800.000,00

URAIAN	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	PELUNASAN SALDO AWAL PIUTANG	PELUNASAN PIUTANG	PENETAPAN PIUTANG 2024	LAPORAN OPERASIONAL
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	142.115.939.000,00	0,00	0,00	0,00	142.115.939.000,00
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	362.807.000,00	0,00	0,00	0,00	362.807.000,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	490.605.194.542,00	(42.906.668.683,00)	(447.698.525.859,00)	487.387.122.941,00	487.387.122.941,00
PBBKB-Bahan Bakar Bensin	255.059.527.531,00	(42.906.668.683,00)	(447.698.525.859,00)	487.387.122.941,00	251.841.455.930,00
PBBKB-Bahan Bakar Solar	235.545.667.011,00	0,00	0,00	0,00	235.545.667.011,00
Pajak Air Permukaan	1.192.208.723,00	0,00	0,00	0,00	1.192.208.723,00
Pajak Air Permukaan	1.192.208.723,00	0,00	0,00	0,00	1.192.208.723,00
Pajak Rokok	167.108.459.437,00	0,00	0,00	0,00	167.108.459.437,00
Pajak Rokok	167.108.459.437,00	0,00	0,00	0,00	167.108.459.437,00

Tabel 5.220 Penjelasan Selisih Retribusi Daerah-LRA dengan Retribusi Daerah-LO

URAIAN	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	PELUNASAN PIUTANG	KOREKSI NILAI PIUTANG	PENETAPAN PIUTANG	LAPORAN OPERASIONAL
Retribusi Daerah	148.286.242.017,30	(107.682.972.520,00)	(618.300,00)	115.123.819.076,00	155.726.470.273,30
Retribusi Jasa Umum	137.516.081.176,30	(107.682.972.520,00)	(618.300,00)	115.084.401.376,00	144.916.891.732,30
Retribusi Pelayanan Kesehatan	137.516.081.176,30	(107.682.972.520,00)	(618.300,00)	115.084.401.376,00	144.916.891.732,30
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	137.516.081.176,30	(107.682.972.520,00)	(618.300,00)	115.084.401.376,00	144.916.891.732,30
Retribusi Jasa Usaha	5.742.143.841,00	0,00	0,00	39.417.700,00	5.781.561.541,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.927.137.000,00	0,00	0,00	0,00	1.927.137.000,00
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pemakaian Laboratorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pemakaian Ruangan	1.609.917.000,00	0,00	0,00	0,00	1.609.917.000,00
Retribusi Pemakaian Alat	317.220.000,00	0,00	0,00	0,00	317.220.000,00
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	8.250.000,00	0,00	0,00	0,00	8.250.000,00
Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	8.250.000,00	0,00	0,00	0,00	8.250.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	2.510.628.596,00	0,00	0,00	39.417.700,00	2.550.046.296,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	2.510.628.596,00	0,00	0,00	39.417.700,00	2.550.046.296,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	160.520.545,00	0,00	0,00	0,00	160.520.545,00
Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	88.735.700,00	0,00	0,00	0,00	88.735.700,00
Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	71.784.845,00	0,00	0,00	0,00	71.784.845,00
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	1.135.607.700,00	0,00	0,00	0,00	1.135.607.700,00
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	1.135.607.700,00	0,00	0,00	0,00	1.135.607.700,00

URAIAN	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	PELUNASAN PIUTANG	KOREKSI NILAI PIUTANG	PENETAPAN PIUTANG	LAPORAN OPERASIONAL
Retribusi Perizinan Tertentu	5.028.017.000,00	0,00	0,00	0,00	5.028.017.000,00
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	18.800.000,00	0,00	0,00	0,00	18.800.000,00
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	18.800.000,00	0,00	0,00	0,00	18.800.000,00
Retribusi Izin Usaha Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	5.009.217.000,00	0,00	0,00	0,00	5.009.217.000,00
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	5.009.217.000,00	0,00	0,00	0,00	5.009.217.000,00
Retribusi Pertambangan Rakyat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabel 5.221 Rincian Selisih Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA dengan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

URAIAN	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	LAPORAN OPERASIONAL	SELISIH
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.904.909.335,00	1.904.909.335,00	0,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	1.904.909.335,00	1.904.909.335,00	0,00

URAIAN	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	LAPORAN OPERASIONAL	SELISIH
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1.904.909.335,00	1.904.909.335,00	0,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1.904.909.335,00	1.904.909.335,00	0,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	0,00	0,00	0,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	0,00	0,00	0,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	0,00	0,00	0,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	0,00	0,00	0,00

Tabel 5.222 Penjelasan Selisih Lain-lain PAD Yang Sah-LRA dengan Lain-lain PAD Yang Sah-LO

URAIAN	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	PENETAPAN PIUTANG PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI	PENGEMBALIAN ATAS TEMUAN	PELUNASAN SALDO AWAL PIUTANG	PENGEMBALIAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH	LAPORAN OPERASIONAL
Lain-lain PAD yang Sah-LO	52.566.226.972,38	489.938,00	(2.689.852.142,88)	(2.430.800,00)	(1.500.000,00)	49.872.933.967,50
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	1.336.203.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336.203.722,00
Hasil Sewa BMD-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD-LO	1.336.203.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336.203.722,00
Jasa Giro-LO	6.290.193.867,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.290.193.867,90
Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	4.478.565.314,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.478.565.314,51
Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	1.617.505.366,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617.505.366,33
Jasa Giro pada Rekening Dana BOS-LO	194.123.187,06	0,00	0,00	0,00	0,00	194.123.187,06
Pendapatan Bunga-LO	339.106.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.106.060,00
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	339.106.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.106.060,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	2.713.160.286,90	0,00	(32.732.652,60)	0,00	0,00	2.680.427.634,30
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	2.713.160.286,90	0,00	(32.732.652,60)	0,00	0,00	2.680.427.634,30
Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	14.570.561.041,00	0,00	0,00	(2.430.800,00)	0,00	14.568.130.241,00
Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	14.542.181.200,00	0,00	0,00	(2.430.800,00)	0,00	14.539.750.400,00
Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO	27.713.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.713.748,00
Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan-LO	666.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.093,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	6.501.215,00	489.938,00	0,00	0,00	0,00	6.991.153,00

URAIAN	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	PENETAPAN PIUTANG PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI	PENGEMBALIAN ATAS TEMUAN	PELUNASAN SALDO AWAL PIUTANG	PENGEMBALIAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH	LAPORAN OPERASIONAL
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-LO	6.501.215,00	489.938,00	0,00	0,00	0,00	6.991.153,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO	904.694.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904.694.700,00
Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa-LO	904.694.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904.694.700,00
Pendapatan dari Pengembalian-LO	3.951.467.681,76	0,00	(2.657.119.490,28)	0,00	0,00	1.294.348.191,48
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO	145.420.254,00	0,00	(121.767.704,00)	0,00	0,00	23.652.550,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kematian (JKM)-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-LO	257.212.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.212.278,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-LO	2.542.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542.168,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-LO	646.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-LO	395.034.137,88	0,00	(183.098.559,33)	0,00	0,00	211.935.578,55
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-LO	851.420.119,88	0,00	(755.808.825,44)	0,00	0,00	95.611.294,44
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan-LO	404.212.131,71	0,00	(272.200.867,36)	0,00	0,00	132.011.264,35
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-LO	23.545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.545.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada BUMD-LO	9.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat-LO	482.479.824,02	0,00	(482.479.823,89)	0,00	0,00	0,13
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia-LO	173.232.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.232.852,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

URAIAN	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	PENETAPAN PIUTANG PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI	PENGEMBALIAN ATAS TEMUAN	PELUNASAN SALDO AWAL PIUTANG	PENGEMBALIAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH	LAPORAN OPERASIONAL
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-LO	31.481.500,33	0,00	(31.481.500,33)	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Komputer-LO	23.773.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.773.750,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-LO	249.173.291,33	0,00	(229.915.612,90)	0,00	0,00	19.257.678,43
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-LO	264.644.630,46	0,00	(135.165.939,12)	0,00	0,00	129.478.691,34
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-LO	291.280.951,00	0,00	(291.280.950,68)	0,00	0,00	0,32
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-LO	133.117.433,15	0,00	(133.117.433,15)	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Tanaman-LO	20.805.000,00	0,00	(20.802.274,08)	0,00	0,00	2.725,92
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tidak Terduga-LO	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-LO	143.993.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.993.760,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BLUD, Belanja Barang dan Jasa BLUD, Belanja Modal Tanah BLUD, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD, Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD, serta Belanja Modal Aset Lainnya BLUD-LO	35.592.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.592.600,00
Pendapatan dari BLUD-LO	22.421.878.770,68	0,00	0,00	0,00	0,00	22.421.878.770,68
Pendapatan dari BLUD-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	3.701.250.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.701.250.776,00
Pendapatan BLUD dari Hibah-LO	16.693.324.096,29	0,00	0,00	0,00	0,00	16.693.324.096,29
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain-LO	1.248.815.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248.815.078,00
Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah-LO	778.488.820,39	0,00	0,00	0,00	0,00	778.488.820,39
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	4.925.402,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.925.402,14

URAIAN	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	PENETAPAN PIUTANG PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI	PENGEMBALIAN ATAS TEMUAN	PELUNASAN SALDO AWAL PIUTANG	PENGEMBALIAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH	LAPORAN OPERASIONAL
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	4.925.402,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.925.402,14
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	26.034.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.034.225,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	26.034.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.034.225,00

5.4.1.2. Pendapatan Transfer – LO

Pendapatan Transfer - LO	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
	1.949.654.986.207,00	2.348.989.767.452,00

Pendapatan Transfer – LO atau Dana Perimbangan adalah pendapatan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Alokasi Pendapatan Transfer – LO untuk pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Presiden RI mengenai Rincian APBN yang terdiri dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota (yang diterbitkan tiap tahun) dan disalurkan per periode sesuai dengan ketentuan penyaluran.

Pada Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO sebesar Rp1.949.654.986.207,00 dari Dana Perimbangan dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dimana Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Non Fisik sedangkan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya yaitu Insentif Fiskal yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.223 Pendapatan Transfer – LO

URAIAN	LAPORAN OPERASIONAL
PENDAPATAN TRANSFER	1.949.654.986.207,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.949.654.986.207,00
Dana Perimbangan	1.938.339.898.207,00
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	291.304.476.980,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.177.916.590.123,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	157.564.483.366,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	311.554.347.738,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	11.315.088.000,00
Dana Insentif Daerah (DID)	0,00
Insentif Fiskal	11.315.088.000,00

Apabila dibandingkan antara Pendapatan Transfer dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Pendapatan Transfer dalam Laporan Operasional (LO) maka terdapat perbedaan sebagai berikut:

Tabel 5.224 Rincian Selisih Pendapatan Transfer-LRA dengan Pendapatan Transfer-LO

URAIAN	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	PENDAPATAN TRANSFER - LO	SELISIH
PENDAPATAN TRANSFER	1.976.533.066.207,00	1.949.654.986.207,00	26.878.080.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.976.533.066.207,00	1.949.654.986.207,00	26.878.080.000,00

URAIAN	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	PENDAPATAN TRANSFER - LO	SELISIH
Dana Perimbangan	1.965.217.978.207,00	1.938.339.898.207,00	26.878.080.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	318.182.556.980,00	291.304.476.980,00	26.878.080.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.177.916.590.123,00	1.177.916.590.123,00	0,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	157.564.483.366,00	157.564.483.366,00	0,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	311.554.347.738,00	311.554.347.738,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	11.315.088.000,00	11.315.088.000,00	0,00
Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00
Insentif Fiskal	11.315.088.000,00	11.315.088.000,00	0,00

Penjelasan selisih Pendapatan Transfer pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Pendapatan Transfer pada Laporan Operasional (LO) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.225 Penjelasan Selisih Pendapatan Transfer-LRA dengan Pendapatan Transfer-LO

URAIAN	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	PENYALURAN KURANG BAYAR TDF 2023	PENYALURAN KURANG BAYAR TDF 2024	PENDAPATAN TRANSFER - LO
PENDAPATAN TRANSFER	1.976.533.066.207,00	(30.016.970.000,00)	3.138.890.000,00	1.949.654.986.207,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.976.533.066.207,00	(30.016.970.000,00)	3.138.890.000,00	1.949.654.986.207,00
Dana Perimbangan	1.965.217.978.207,00	(30.016.970.000,00)	3.138.890.000,00	1.938.339.898.207,00
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	318.182.556.980,00	(30.016.970.000,00)	3.138.890.000,00	291.304.476.980,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.177.916.590.123,00	0,00	0,00	1.177.916.590.123,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	157.564.483.366,00	0,00	0,00	157.564.483.366,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	311.554.347.738,00	0,00	0,00	311.554.347.738,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	11.315.088.000,00	0,00	0,00	11.315.088.000,00
Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	0,00
Insentif Fiskal	11.315.088.000,00	0,00	0,00	11.315.088.000,00

5.4.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO	Saldo 2024	Saldo 2023
	(Rp)	(Rp)
	170.967.444.887,66	385.069.034.851,10

Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO adalah seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah - LO dan Pendapatan Transfer - LO (dana perimbangan). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO yang merupakan Pendapatan Hibah - LO dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp170.967.444.887,66 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.226 Pendapatan Hibah – LO

NO	OPD	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	JUMLAH
1	1	2	3	4	5	6=2+3+4+5
1	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	7.831.591,00	7.831.591,00
2	Badan Pendapatan Daerah	0,00	266.254.082,00	1.292.700.000,00	0,00	1.558.954.082,00
3	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0,00	279.565.000,00	0,00	0,00	279.565.000,00
4	Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	2.628.244.810,00	0,00	0,00	2.628.244.810,00
5	Dinas Kesehatan	46.674.243.342,95	0,00	0,00	0,00	46.674.243.342,95
6	Dinas Pendidikan	6.000.889.572,00	62.486.975.956,73	784.500.000,00	49.998.876.080,98	119.271.241.609,71
7	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	344.769.700,00	0,00	0,00	0,00	344.769.700,00
8	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	0,00	202.594.752,00	0,00	0,00	202.594.752,00
	JUMLAH	53.019.902.614,95	65.863.634.600,73	2.077.200.000,00	50.006.707.671,98	170.967.444.887,66

Apabila dibandingkan antara Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Laporan Operasional (LO) maka terdapat perbedaan sebagai berikut:

Tabel 5.227 Rincian Selisih Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA dengan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

URAIAN	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	LAPORAN OPERASIONAL	SELISIH
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	1.300.531.591,00	170.967.444.887,66	(169.666.913.296,66)
Pendapatan Hibah-LO	1.300.531.591,00	170.967.444.887,66	(169.666.913.296,66)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	0,00	53.019.902.614,95	(53.019.902.614,95)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	0,00	53.019.902.614,95	(53.019.902.614,95)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	0,00	65.863.634.600,73	(65.863.634.600,73)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	0,00	65.863.634.600,73	(65.863.634.600,73)
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	1.292.700.000,00	2.077.200.000,00	(784.500.000,00)
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	1.292.700.000,00	2.077.200.000,00	(784.500.000,00)
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	7.831.591,00	50.006.707.671,98	(49.998.876.080,98)
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	7.831.591,00	50.006.707.671,98	(49.998.876.080,98)

Penjelasan selisih Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Laporan Operasional (LO) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.228 Penjelasan selisih Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LRA dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

URAIAN	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	PENERIMAAN HIBAH ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN	PENERIMAAN HIBAH ASET TETAP TANAH	PENERIMAAN HIBAH ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN	PENERIMAAN HIBAH ASET TETAP JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PENERIMAAN HIBAH ASET TETAP LAINYA	PENERIMAAN HIBAH BARANG PERSEDIAAN	PENERIMAAN DARI DANA SPP	PENERIMAAN HIBAH SMKPK	PENGEMBALIAN SISA KAS SMKPK	LAPORAN OPERASIONAL
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	1.300.531.591,00	13.859.954.080,43	45.937.149.582,00	5.517.343.235,92	279.565.000,00	1.196.297.650,38	46.876.838.094,95	49.998.876.080,98	6.217.700.000,00	(216.810.428,00)	170.967.444.887,66
Pendapatan Hibah- LO	1.300.531.591,00	13.859.954.080,43	45.937.149.582,00	5.517.343.235,92	279.565.000,00	1.196.297.650,38	46.876.838.094,95	49.998.876.080,98	6.217.700.000,00	(216.810.428,00)	170.967.444.887,66
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	0,00	344.769.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.674.243.342,95	0,00	6.217.700.000,00	(216.810.428,00)	53.019.902.614,95
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	0,00	344.769.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.674.243.342,95	0,00	6.217.700.000,00	(216.810.428,00)	53.019.902.614,95
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	0,00	12.730.684.380,43	45.937.149.582,00	5.517.343.235,92	279.565.000,00	1.196.297.650,38	202.594.752,00	0,00	0,00	0,00	65.863.634.600,73
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	0,00	12.730.684.380,43	45.937.149.582,00	5.517.343.235,92	279.565.000,00	1.196.297.650,38	202.594.752,00	0,00	0,00	0,00	65.863.634.600,73
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	1.292.700.000,00	784.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077.200.000,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	1.292.700.000,00	784.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077.200.000,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	7.831.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.998.876.080,98	0,00	0,00	50.006.707.671,98
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	7.831.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.998.876.080,98	0,00	0,00	50.006.707.671,98

5.4.2. Beban - LO

Beban - LO	Saldo 2024	Saldo 2023
	(Rp)	(Rp)
	4.377.962.746.624,97	4.192.969.045.092,78

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah, atau timbulnya kewajiban pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah, dan/atau saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat beban pada Tahun 2024 sebesar Rp4.377.962.746.624,97 dengan rincian sebagai berikut:

5.4.2.1. Beban Operasi

Beban Operasi	Saldo 2024	Saldo 2023
	(Rp)	(Rp)
	3.162.864.178.041,50	3.022.273.651.461,78

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.

Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban Penyusutan dan Amortisasi dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp3.162.864.178.041,50 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.229 Beban Operasi – LO

JENIS BEBAN OPERASI	SALDO 2024	SALDO 2023
	(Rp)	(Rp)
Beban Pegawai	1.309.490.093.784,00	1.107.151.335.185,05
Beban Barang dan Jasa	1.466.829.936.561,96	1.589.253.037.899,72
Beban Bunga	3.078.651.404,00	8.525.004.761,00
Beban Subsidi	944.301.180,00	4.143.883.000,00
Beban Hibah	353.850.454.704,03	304.901.011.544,11
Beban Bantuan Sosial	4.002.925.000,00	7.417.430.000,00
Beban Penyisihan Piutang	24.667.815.407,51	881.949.071,90
JUMLAH	3.162.864.178.041,50	3.022.273.651.461,78

Rincian Beban Operasi adalah sebagai berikut:

5.4.2.1.1. **Beban Pegawai**

Pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat realisasi Beban Pegawai sebesar Rp1.309.490.093.784,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.230 Rincian Beban Pegawai

URAIAN	LAPORAN OPERASIONAL
Beban Pegawai	1.309.490.093.784,00
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	477.213.376.031,00
Beban Gaji Pokok ASN	347.298.206.798,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	32.120.933.548,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	7.454.020.540,00
Beban Tunjangan Fungsional ASN	31.716.949.000,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.103.484.575,00
Beban Tunjangan Beras ASN	19.155.452.100,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	730.932.064,00
Beban Pembulatan Gaji ASN	5.104.789,00
Beban luran Jaminan Kesehatan ASN	32.763.551.681,00
Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	716.286.338,00
Beban luran Jaminan Kematian ASN	2.148.454.598,00
Beban luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	0,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	608.661.886.427,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	384.014.847.843,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	1.093.645.059,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	35.686.646.683,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	9.610.563.036,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	178.256.183.806,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	169.973.975.468,00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	34.609.488.780,00
Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	103.322.822.388,00
Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	1.189.209.900,00
Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.977.250.000,00
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	28.800.000,00
Beban Honorarium	27.846.404.400,00
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	28.328.081.921,00
Beban Uang Representasi DPRD	1.297.950.000,00
Beban Tunjangan Keluarga DPRD	163.521.000,00
Beban Tunjangan Beras DPRD	131.080.200,00
Beban Uang Paket DPRD	119.775.000,00
Beban Tunjangan Jabatan DPRD	1.882.027.500,00
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	80.866.500,00
Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.920.000.000,00
Beban Tunjangan Reses DPRD	1.320.000.000,00
Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	20.022.981,00
Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	8.123.138.740,00
Beban Tunjangan Transportasi DPRD	6.664.000.000,00
Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	605.700.000,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.321.600.258,00
Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	75.600.000,00

URAIAN	LAPORAN OPERASIONAL
Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	136.080.000,00
Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	1.738.080,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	3.860.241,00
Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.920,00
Beban luran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	7.257.600,00
Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	155.520,00
Beban luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	466.560,00
Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.096.440.337,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	2.808.613.442,00
Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	300.000.000,00
Beban Dana Operasional KDH/WKDH	2.508.613.442,00
Beban Pegawai BLUD	21.182.560.237,00
Beban Pegawai BLUD	21.182.560.237,00

Dengan rincian beban pegawai menurut SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.231 Beban Pegawai per SKPD Tahun 2024

NO	SKPD	BEBAN PEGAWAI TAHUN 2024	BEBAN PEGAWAI TAHUN 2023
1	Dinas Pendidikan	561.322.860.402,00	430.837.263.004,00
2	Dinas Kesehatan	20.407.161.637,00	17.777.921.780,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	98.479.478.307,00	84.201.281.823,00
4	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	52.835.898.137,00	45.505.445.180,00
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	19.497.505.591,00	17.003.478.362,00
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	8.309.645.864,00	7.929.989.574,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	13.563.164.083,00	12.804.125.652,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.887.518.189,00	5.622.607.668,00
9	Dinas Sosial	9.472.156.927,00	8.925.729.344,00
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	26.532.474.269,00	25.105.914.691,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.568.473.404,00	7.880.391.892,00
12	Dinas Perhubungan	12.601.582.139,00	11.575.591.933,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	9.162.363.624,00	9.135.182.035,00
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8.254.822.216,00	7.248.753.373,00
15	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	10.524.937.248,00	9.607.314.955,00
16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	8.516.853.904,00	8.530.038.977,00
17	Dinas Kebudayaan	7.616.837.601,00	7.718.344.483,00
18	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	12.293.524.767,00	11.644.683.818,00
19	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	24.670.214.454,00	21.622.387.280,00

NO	SKPD	BEBAN PEGAWAI TAHUN 2024	BEBAN PEGAWAI TAHUN 2023
20	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	9.256.442.477,00	8.934.576.195,00
21	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	17.570.415.602,00	16.404.364.404,00
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	25.204.302.736,00	22.076.110.805,00
23	Dinas Pariwisata	10.165.197.472,00	9.062.104.647,00
24	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	9.315.912.680,00	8.879.952.881,00
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10.549.430.245,00	9.129.275.741,00
26	Sekretariat Daerah	0,00	62.293.595.220,00
27	Biro Umum	74.113.808.923,00	4.970.944.060,00
28	Sekretariat DPRD	42.436.691.669,00	41.645.037.322,00
29	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	20.579.642.677,00	18.560.515.543,00
30	Badan Keuangan dan Aset Daerah	22.645.636.563,00	21.188.880.577,00
31	Badan Pendapatan Daerah	75.976.186.869,00	74.082.180.304,00
32	Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	15.555.269.915,00	12.323.510.197,00
33	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10.808.777.703,00	9.725.791.730,00
34	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.343.403.111,00	5.222.108.264,00
35	Badan Penghubung Daerah	3.647.428.517,00	3.234.495.967,05
36	Inspektorat	28.399.622.618,00	21.347.631.919,00
37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.404.451.244,00	7.393.813.585,00
JUMLAH		1.309.490.093.784,00	1.107.151.335.185,05

Apabila dibandingkan antara Belanja Pegawai dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Beban Pegawai dalam Laporan Operasional (LO) maka terdapat perbedaan sebagai berikut:

Tabel 5.232 Rincian Selisih Perbedaan Belanja Pegawai-LRA dan Beban Pegawai-LO

URAIAN	BELANJA PEGAWAI - LRA	BEBAN PEGAWAI - LO	SELISIH
Beban Pegawai	1.309.833.869.704,00	1.309.490.093.784,00	343.775.920,00
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	477.549.846.508,00	477.213.376.031,00	336.470.477,00
Beban Gaji Pokok ASN	347.456.590.539,00	347.298.206.798,00	158.383.741,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	32.159.667.412,00	32.120.933.548,00	38.733.864,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	7.454.500.540,00	7.454.020.540,00	480.000,00
Beban Tunjangan Fungsional ASN	31.716.949.000,00	31.716.949.000,00	0,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.119.158.575,00	3.103.484.575,00	15.674.000,00
Beban Tunjangan Beras ASN	19.155.886.620,00	19.155.452.100,00	434.520,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	731.608.684,00	730.932.064,00	676.620,00
Beban Pembulatan Gaji ASN	5.104.961,00	5.104.789,00	172,00

URAIAN	BELANJA PEGAWAI - LRA	BEBAN PEGAWAI - LO	SELISIH
Beban luran Jaminan Kesehatan ASN	32.885.612.268,00	32.763.551.681,00	122.060.587,00
Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	716.293.080,00	716.286.338,00	6.742,00
Beban luran Jaminan Kematian ASN	2.148.474.829,00	2.148.454.598,00	20.231,00
Beban luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	0,00	0,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	608.621.438.978,00	608.661.886.427,00	(40.447.449,00)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	383.939.228.872,00	384.014.847.843,00	(75.618.971,00)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	1.093.645.059,00	1.093.645.059,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	35.683.949.932,00	35.686.646.683,00	(2.696.751,00)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	9.610.563.036,00	9.610.563.036,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	178.294.052.079,00	178.256.183.806,00	37.868.273,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	169.973.975.468,00	169.973.975.468,00	0,00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	34.609.488.780,00	34.609.488.780,00	0,00
Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	103.322.822.388,00	103.322.822.388,00	0,00
Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	1.189.209.900,00	1.189.209.900,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.977.250.000,00	2.977.250.000,00	0,00
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00
Beban Honorarium	27.846.404.400,00	27.846.404.400,00	0,00
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	28.329.573.243,00	28.328.081.921,00	1.491.322,00
Beban Uang Representasi DPRD	1.297.950.000,00	1.297.950.000,00	0,00
Beban Tunjangan Keluarga DPRD	163.521.000,00	163.521.000,00	0,00
Beban Tunjangan Beras DPRD	131.080.200,00	131.080.200,00	0,00
Beban Uang Paket DPRD	119.775.000,00	119.775.000,00	0,00
Beban Tunjangan Jabatan DPRD	1.882.027.500,00	1.882.027.500,00	0,00
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	80.866.500,00	80.866.500,00	0,00
Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.920.000.000,00	7.920.000.000,00	0,00
Beban Tunjangan Reses DPRD	1.320.000.000,00	1.320.000.000,00	0,00
Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	21.514.303,00	20.022.981,00	1.491.322,00
Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	8.123.138.740,00	8.123.138.740,00	0,00
Beban Tunjangan Transportasi DPRD	6.664.000.000,00	6.664.000.000,00	0,00
Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	605.700.000,00	605.700.000,00	0,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.321.600.258,00	1.321.600.258,00	0,00
Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	75.600.000,00	75.600.000,00	0,00
Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	136.080.000,00	136.080.000,00	0,00
Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	1.738.080,00	1.738.080,00	0,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	3.860.241,00	3.860.241,00	0,00
Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.920,00	1.920,00	0,00
Beban luran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	7.257.600,00	7.257.600,00	0,00
Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	155.520,00	155.520,00	0,00
Beban luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	466.560,00	466.560,00	0,00
Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.096.440.337,00	1.096.440.337,00	0,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	2.808.613.442,00	2.808.613.442,00	0,00
Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
Beban Dana Operasional KDH/WKDH	2.508.613.442,00	2.508.613.442,00	0,00
Beban Pegawai BLUD	21.228.821.807,00	21.182.560.237,00	46.261.570,00
Beban Pegawai BLUD	21.228.821.807,00	21.182.560.237,00	46.261.570,00

Penjelasan selisih Belanja Pegawai pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Beban Pegawai pada Laporan Operasional (LO) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.233 Penjelasan Selisih Perbedaan Belanja Pegawai-LRA dan Beban Pegawai-LO

URAIAN	BELANJA PEGAWAI - LRA	PELUNASAN UTANG TAHUN 2023	KOREKSI PEMERIKSAAN BPK	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2024	BEBAN PEGAWAI - LO
Beban Pegawai	1.309.833.869.704,00	(352.882.780,00)	(179.132.985,00)	188.239.845,00	1.309.490.093.784,00
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	477.549.846.508,00	(195.719.494,00)	(167.630.235,00)	26.879.252,00	477.213.376.031,00
Beban Gaji Pokok ASN	347.456.590.539,00	(39.828.200,00)	(118.555.541,00)	0,00	347.298.206.798,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	32.159.667.412,00	(4.203.170,00)	(34.530.694,00)	0,00	32.120.933.548,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	7.454.500.540,00	(480.000,00)	0,00	0,00	7.454.020.540,00
Beban Tunjangan Fungsional ASN	31.716.949.000,00	0,00	0,00	0,00	31.716.949.000,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.119.158.575,00	(1.130.000,00)	(14.544.000,00)	0,00	3.103.484.575,00
Beban Tunjangan Beras ASN	19.155.886.620,00	(434.520,00)	0,00	0,00	19.155.452.100,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	731.608.684,00	(837.124,00)	0,00	160.504,00	730.932.064,00
Beban Pembulatan Gaji ASN	5.104.961,00	(553,00)	0,00	381,00	5.104.789,00
Beban luran Jaminan Kesehatan ASN	32.885.612.268,00	(148.778.954,00)	0,00	26.718.367,00	32.763.551.681,00
Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	716.293.080,00	(6.742,00)	0,00	0,00	716.286.338,00
Beban luran Jaminan Kematian ASN	2.148.474.829,00	(20.231,00)	0,00	0,00	2.148.454.598,00
Beban luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	608.621.438.978,00	(109.410.394,00)	(11.502.750,00)	161.360.593,00	608.661.886.427,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	383.939.228.872,00	(27.315.230,00)	0,00	102.934.201,00	384.014.847.843,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	1.093.645.059,00	0,00	0,00	0,00	1.093.645.059,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	35.683.949.932,00	(90.344,00)	0,00	2.787.095,00	35.686.646.683,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	9.610.563.036,00	0,00	0,00	0,00	9.610.563.036,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	178.294.052.079,00	(82.004.820,00)	(11.502.750,00)	55.639.297,00	178.256.183.806,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	169.973.975.468,00	0,00	0,00	0,00	169.973.975.468,00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	34.609.488.780,00	0,00	0,00	0,00	34.609.488.780,00
Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	103.322.822.388,00	0,00	0,00	0,00	103.322.822.388,00
Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	1.189.209.900,00	0,00	0,00	0,00	1.189.209.900,00
Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.977.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.977.250.000,00
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	28.800.000,00	0,00	0,00	0,00	28.800.000,00
Beban Honorarium	27.846.404.400,00	0,00	0,00	0,00	27.846.404.400,00
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	28.329.573.243,00	(1.491.322,00)	0,00	0,00	28.328.081.921,00
Beban Uang Representasi DPRD	1.297.950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.297.950.000,00
Beban Tunjangan Keluarga DPRD	163.521.000,00	0,00	0,00	0,00	163.521.000,00
Beban Tunjangan Beras DPRD	131.080.200,00	0,00	0,00	0,00	131.080.200,00
Beban Uang Paket DPRD	119.775.000,00	0,00	0,00	0,00	119.775.000,00
Beban Tunjangan Jabatan DPRD	1.882.027.500,00	0,00	0,00	0,00	1.882.027.500,00
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	80.866.500,00	0,00	0,00	0,00	80.866.500,00
Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.920.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.920.000.000,00
Beban Tunjangan Reses DPRD	1.320.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000.000,00
Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	21.514.303,00	(1.491.322,00)	0,00	0,00	20.022.981,00
Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	8.123.138.740,00	0,00	0,00	0,00	8.123.138.740,00
Beban Tunjangan Transportasi DPRD	6.664.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.664.000.000,00
Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	605.700.000,00	0,00	0,00	0,00	605.700.000,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.321.600.258,00	0,00	0,00	0,00	1.321.600.258,00

URAIAN	BELANJA PEGAWAI - LRA	PELUNASAN UTANG TAHUN 2023	KOREKSI PEMERIKSAAN BPK	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2024	BEBAN PEGAWAI - LO
Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	75.600.000,00	0,00	0,00	0,00	75.600.000,00
Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	136.080.000,00	0,00	0,00	0,00	136.080.000,00
Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	1.738.080,00	0,00	0,00	0,00	1.738.080,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	3.860.241,00	0,00	0,00	0,00	3.860.241,00
Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	7.257.600,00	0,00	0,00	0,00	7.257.600,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	155.520,00	0,00	0,00	0,00	155.520,00
Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	466.560,00	0,00	0,00	0,00	466.560,00
Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.096.440.337,00	0,00	0,00	0,00	1.096.440.337,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	2.808.613.442,00	0,00	0,00	0,00	2.808.613.442,00
Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00
Beban Dana Operasional KDH/WKDH	2.508.613.442,00	0,00	0,00	0,00	2.508.613.442,00
Beban Pegawai BLUD	21.228.821.807,00	(46.261.570,00)	0,00	0,00	21.182.560.237,00
Beban Pegawai BLUD	21.228.821.807,00	(46.261.570,00)	0,00	0,00	21.182.560.237,00

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan selisih antara Belanja Pegawai - LRA dengan Beban Pegawai - LO sebagai berikut:

- a. Penambahan Utang Belanja Pegawai sebesar Rp188.239.845,00 terdiri dari :
 - 1. Badan Penghubung Daerah sebesar Rp381,00
 - 2. Dinas Kebudayaan sebesar Rp160.504,00
 - 3. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan sebesar Rp42.374,00
 - 4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp162.944.705,00
 - 5. Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib sebesar Rp25.091.881,00
- b. Pengurangan Beban Pegawai yang merupakan Pelunasan Utang Belanja Pegawai Tahun 2023 sebesar Rp352.882.780,00 terdiri dari:
 - 1. Badan Kepegawaian dan Korpri sebesar Rp1.290.376,00
 - 2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp715.588,00
 - 3. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp605.399,00
 - 4. Badan Pengelola Perbatasan Daerah sebesar Rp5.274.350,00
 - 5. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp2.015.372,00
 - 6. Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp25.510.954,00
 - 7. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp2.298.904,00
 - 8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp37.018.100,00
 - 9. Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebesar Rp3.646.386,00
 - 10. Dinas Pendidikan sebesar Rp124.897.896,00
 - 11. Dinas Perhubungan sebesar Rp480.000,00
 - 12. Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan sebesar Rp286.883,00
 - 13. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp16.862.302,00
 - 14. Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib sebesar Rp81.308.476,00
 - 15. Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran sebesar Rp935.271,00
 - 16. Sekretariat DPRD sebesar Rp3.474.953,00
 - 17. Utang Belanja Pegawai BLUD pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp46.261.570,00
- c. Koreksi terkait temuan BPK kelebihan atas pembayaran belanja pegawai pada beberapa OPD sebesar Rp179.132.985,00 antara lain:
 - 1. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp2.057.648,00
 - 2. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp6.055.678,00

- Biro Organisasi sebesar Rp4.358.585,00
- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp3.120.858,00
- Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp14.048.400,00
- Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp726.620,00
- Dinas Pendidikan sebesar Rp133.300.868,00
- Dinas Perhubungan sebesar Rp555.000,00
- Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan sebesar Rp2.936.300,00
- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.298.028,00
- Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib sebesar Rp10.675.000,00

5.4.2.1.2. Beban Barang dan Jasa

Pada tahun 2024 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Beban Barang dan Jasa sebesar Rp1.466.829.936.561,96 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 5.234 Rincian Beban Barang dan Jasa– LO	
URAIAN BEBAN BARANG DAN JASA - LO	NILAI
Beban Barang dan Jasa	1.466.829.936.561,96
Beban Barang	397.465.658.910,91
Beban Jasa	508.837.398.227,82
Beban Pemeliharaan	65.287.102.461,76
Beban Perjalanan Dinas	125.908.758.245,50
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	57.587.256.702,00
Beban Barang dan Jasa BOS	159.434.869.743,88
Beban Barang dan Jasa BLUD	152.308.892.270,09

i. Beban Barang

Pada tahun 2024 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Beban Barang dengan realisasi sebesar Rp397.465.658.910,91 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.235 Rincian Beban Barang – LO	
URAIAN	LAPORAN OPERASIONAL
Beban Barang	397.465.658.910,91
Beban Barang Pakai Habis	385.307.013.523,41
Beban Barang Tak Habis Pakai	5.123.000,00
Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	12.153.522.387,50

Dengan rincian Beban Barang menurut SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.236 Beban Barang per SKPD Tahun 2024

NO	SKPD	BEBAN BARANG TAHUN 2024	BEBAN BARANG TAHUN 2023
1	Dinas Pendidikan	31.237.986.026,00	4.830.408.901,00
2	Dinas Kesehatan	61.377.059.585,89	92.485.991.088,54
3	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	843.104.651,00	3.682.560.788,00
4	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	3.573.640.804,80	4.272.537.621,90
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	39.022.644.682,72	13.768.866.598,46
6	Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	108.163.795.265,00	172.692.151.110,97
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.843.566.850,00	1.163.500.660,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	2.210.841.485,00	2.209.134.362,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.170.643.090,00	2.041.803.812,00
10	Dinas Sosial	8.100.441.560,00	5.906.043.367,00
11	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	512.224.641,00	706.127.982,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.677.392.800,00	7.497.171.323,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.092.528.600,00	1.345.335.602,00
14	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	670.060.690,00	922.662.314,00
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.927.479.600,00	4.547.788.989,00
16	Dinas Kebudayaan	1.676.193.545,00	1.582.276.860,00
17	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	1.070.156.350,44	1.125.327.027,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	3.300.724.113,00	3.744.108.935,00
19	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	9.538.441.937,00	8.698.579.575,50
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.378.582.091,00	926.820.207,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.766.996.854,00	2.219.424.385,00
22	Dinas Perhubungan	2.315.690.266,08	1.295.102.599,75
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.766.565.592,00	2.522.150.939,50
24	Dinas Pariwisata	920.707.400,00	964.540.206,00
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	6.527.434.460,81	1.169.483.310,21
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.263.406.040,00	2.114.965.815,00
27	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	243.103.782,00	377.940.326,00
28	Inspektorat	3.165.816.061,50	3.150.320.284,50
29	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.279.601.267,00	3.884.838.507,00
30	Badan Keuangan dan Aset Daerah	9.919.890.732,67	11.225.352.690,36

NO	SKPD	BEBAN BARANG TAHUN 2024	BEBAN BARANG TAHUN 2023
31	Badan Pendapatan Daerah	9.251.139.118,00	7.526.133.141,00
32	Badan Kepegawaian dan Korpri	814.479.167,00	877.546.275,00
33	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.288.219.766,00	1.258.335.387,00
34	Sekretariat DPRD	24.625.967.412,00	26.574.283.351,00
35	Badan Penghubung Daerah	3.634.186.867,00	2.601.336.404,00
36	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	655.129.088,00	757.929.301,00
37	Sekretariat Daerah	0,00	1.971.000,00
38	Biro Kesejahteraan Rakyat	5.010.398.300,00	3.285.613.300,00
39	Biro Pengadaan Barang/Jasa	310.393.200,00	602.522.595,00
40	Biro Perekonomian dan Pembangunan	479.061.346,00	1.151.892.704,00
41	Biro Organisasi	312.116.967,00	518.057.780,00
42	Biro Administrasi Pimpinan	2.868.759.475,00	4.654.426.952,00
43	Biro Umum	30.088.912.731,00	36.563.141.477,00
44	Biro Hukum	570.174.650,00	594.484.127,00
JUMLAH BEBAN BARANG		397.465.658.910,91	450.040.989.981,69

Apabila dibandingkan antara Belanja Barang dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Beban Barang dalam Laporan Operasional (LO) maka terdapat perbedaan sebagai berikut:

Tabel 5.237 Rincian Selisih Perbedaan Belanja Barang-LRA dan Beban Barang-LO

URAIAN	BELANJA BARANG - LRA	BEBAN BARANG - LO	SELISIH
Beban Barang	293.215.797.830,25	397.465.658.910,91	(104.249.861.080,66)
Beban Barang Pakai Habis	293.189.475.830,25	385.307.013.523,41	(92.117.537.693,16)
Beban Barang Tak Habis Pakai	5.123.000,00	5.123.000,00	0,00
Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	21.199.000,00	12.153.522.387,50	(12.132.323.387,50)

Penjelasan selisih Belanja Barang pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Beban Barang pada Laporan Operasional (LO) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.238 Penjelasan Selisih Perbedaan Belanja Barang-LRA dan Beban Barang-LO

Uraian	Belanja Barang - LRA	Utang Beban Tahun 2024	Pembebanan Persediaan Awal	Pembebanan atas Mutasi Persediaan	Pembebanan atas Koreksi Temuan Persediaan	Reklasifikasi antar Beban	Reklasifikasi dari Aset Tetap/ Ekstrakomptable	Persediaan Kadaluarsa/Usang	Koreksi Beban atas Persediaan Akhir 2024	Kapitalisasi Beban ke Aset Tetap	Koreksi Temuan Pemeriksaan	Beban Barang - LO
Beban Barang	293.215.797.830,25	113.718.237.408,50	256.655.035.890,07	120.657.475,00	970.138.706,00	1.196.809.012,00	12.318.138.574,50	7.072.090,00	(266.125.596.420,41)	(2.109.768.578,00)	(12.500.863.077,00)	397.465.658.910,91
Beban Barang Pakai Habis	293.189.475.830,25	113.032.537.408,50	256.655.035.890,07	120.657.475,00	970.138.706,00	1.196.809.012,00	455.887.582,00	7.072.090,00	(266.125.596.420,41)	(2.101.568.578,00)	(12.093.435.472,00)	385.307.013.523,41
Beban Barang Tak Habis Pakai	5.123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.123.000,00
Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	21.199.000,00	685.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.862.250.992,50	0,00	0,00	-8.200.000,00	-407.427.605,00	12.153.522.387,50

ii. **Beban Jasa**

Pada tahun 2024 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Beban Jasa dengan realisasi sebesar Rp508.837.398.227,82 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.239 Rincian Beban Jasa – LO

URAIAN	BEBAN JASA - LO
Beban Jasa	508.837.398.227,82
Beban Jasa Kantor	382.835.944.067,57
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	43.251.269.118,04
Beban Sewa Tanah	157.355.972,22
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	45.866.991.465,77
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	14.401.421.508,10
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00
Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	7.000.000,00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	8.750.179.327,12
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.497.651.122,00
Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	19.256.835,00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	240.000.000,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	7.824.400.551,00
Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	2.985.928.261,00

Dengan rincian Beban Jasa menurut SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.240 Beban Jasa per SKPD Tahun 2024

NO	SKPD	BEBAN JASA TAHUN 2024	BEBAN JASA TAHUN 2023
1	Dinas Pendidikan	99.926.241.238,92	90.488.386.480,78
2	Dinas Kesehatan	40.771.960.701,79	42.599.488.116,65
3	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	26.638.000.765,33	27.465.380.755,67
4	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	8.787.880.121,00	10.958.316.414,00
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	16.838.172.059,60	16.243.341.776,31
6	Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	4.262.608.365,00	19.176.457.866,44
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.760.894.778,00	5.845.233.562,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	8.022.859.006,00	7.743.405.908,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.281.984.318,00	2.528.578.167,00
10	Dinas Sosial	3.214.960.874,45	2.979.565.136,23
11	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	4.531.937.705,00	5.186.709.064,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	18.682.166.200,00	30.726.772.392,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.380.003.055,00	6.762.264.939,00
14	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2.131.468.777,00	2.700.000.579,00

NO	SKPD	BEBAN JASA TAHUN 2024	BEBAN JASA TAHUN 2023
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	7.082.460.985,00	8.992.828.190,00
16	Dinas Kebudayaan	4.466.910.845,00	4.226.765.756,00
17	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	5.483.232.232,71	4.914.563.763,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	4.830.921.835,11	5.234.448.718,56
19	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	3.676.129.319,50	3.972.726.131,00
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.856.705.146,00	2.873.175.511,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.161.284.107,00	2.652.100.088,00
22	Dinas Perhubungan	5.441.804.454,51	6.827.431.668,58
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	15.838.321.257,00	13.610.180.234,00
24	Dinas Pariwisata	14.702.590.474,33	14.192.518.757,00
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	2.815.255.680,00	2.691.016.221,00
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6.947.819.670,00	6.891.004.578,00
27	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	376.416.458,33	506.987.659,00
28	Inspektorat	3.802.260.744,00	3.085.114.815,00
29	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.834.355.770,12	6.423.330.454,44
30	Badan Keuangan dan Aset Daerah	16.077.523.429,56	18.667.561.332,77
31	Badan Pendapatan Daerah	22.831.854.569,79	23.728.607.874,00
32	Badan Kepegawaian dan Korpri	1.248.484.856,00	1.913.399.253,00
33	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.561.392.136,00	1.490.095.815,00
34	Sekretariat DPRD	49.593.376.963,84	53.996.173.329,59
35	Badan Penghubung Daerah	6.161.673.826,00	4.625.265.481,55
36	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1.456.104.785,00	1.648.366.405,00
37	Biro Kesejahteraan Rakyat	14.134.948.748,00	8.078.607.687,50
38	Biro Pengadaan Barang/Jasa	1.397.926.256,00	1.524.464.496,00
39	Biro Perekonomian dan Pembangunan	1.312.088.083,00	1.689.256.528,00
40	Biro Organisasi	659.769.861,00	790.956.533,00
41	Biro Administrasi Pimpinan	6.045.393.222,00	6.342.641.033,00
42	Biro Umum	48.264.783.908,93	49.896.319.551,00
43	Biro Hukum	1.544.470.639,00	1.483.950.227,00
	JUMLAH BEBAN JASA	508.837.398.227,82	534.373.759.248,07

Apabila dibandingkan antara Belanja Jasa dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Beban Jasa dalam Laporan Operasional (LO) maka terdapat perbedaan sebagai berikut:

Tabel 5.241 Rincian Selisih Perbedaan Belanja Jasa-LRA dan Beban Jasa-LO

URAIAN	BELANJA JASA - LRA	BEBAN JASA - LO	SELISIH
Beban Jasa	518.729.152.485,59	508.837.398.227,82	9.891.754.257,77
Beban Jasa Kantor	376.907.284.456,71	382.835.944.067,57	(5.928.659.610,86)
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	43.336.152.424,40	43.251.269.118,04	84.883.306,36
Beban Sewa Tanah	12.000.000,00	157.355.972,22	(145.355.972,22)
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	45.081.309.757,00	45.866.991.465,77	(785.681.708,77)
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	13.598.627.647,00	14.401.421.508,10	(802.793.861,10)
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	28.037.664.231,48	8.750.179.327,12	19.287.484.904,36
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.128.728.322,00	2.497.651.122,00	(368.922.800,00)
Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	19.256.835,00	19.256.835,00	0,00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	6.375.200.551,00	7.824.400.551,00	(1.449.200.000,00)
Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	2.985.928.261,00	2.985.928.261,00	0,00

Penjelasan selisih Belanja Jasa pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Beban Jasa pada Laporan Operasional (LO) dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 5.242 Penjelasan Selisih Perbedaan Belanja Jasa-LRA dan Beban Jasa-LO

URAIAN	Belanja Jasa - LRA	Utang Belanja Jasa Tahun 2024	Pengakuan Beban Sewa Dibayar Dimuka Tahun 2023	Pelunasan Utang Belanja Jasa Tahun 2023	Sewa Dibayar Dimuka Tahun 2024	Reklasifikasi/ Kapitalisasi	Koreksi Temuan Pemeriksaan	Beban Jasa - LO
Beban Jasa	518.729.152.485,59	21.587.708.791,62	1.537.600.288,02	(157.530.086,00)	(2.007.279.905,29)	(30.752.415.356,12)	(99.837.990,00)	508.837.398.227,82
Beban Jasa Kantor	376.907.284.456,71	6.033.082.600,86	0,00	(4.585.000,00)	0,00	0,00	(99.837.990,00)	382.835.944.067,57
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	43.336.152.424,40	271.511.422,00	0,00	0,00	(356.394.728,36)	0,00	0,00	43.251.269.118,04
Belanja Sewa Tanah	12.000.000,00	0,00	145.355.972,22	0,00	0,00	0,00	0,00	157.355.972,22
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	45.081.309.757,00	778.543.431,00	25.664.944,44	0,00	(18.526.666,67)	0,00	0,00	45.866.991.465,77
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	13.598.627.647,00	815.160.000,00	1.366.579.371,36	0,00	(1.378.945.510,26)	0,00	0,00	14.401.421.508,10
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	28.037.664.231,48	11.617.875.537,76	0,00	(152.945.086,00)	0,00	(30.752.415.356,12)	0,00	8.750.179.327,12
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.128.728.322,00	622.335.800,00	0,00	0,00	(253.413.000,00)	0,00	0,00	2.497.651.122,00
Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	19.256.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.256.835,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	240.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	6.375.200.551,00	1.449.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.824.400.551,00
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	2.985.928.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985.928.261,00

iii. **Beban Pemeliharaan**

Pada tahun 2024 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Beban Pemeliharaan dengan realisasi sebesar Rp65.287.102.461,76 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.243 Rincian Beban Pemeliharaan – LO

URAIAN	LAPORAN OPERASIONAL
Beban Pemeliharaan	65.287.102.461,76
Beban Pemeliharaan Tanah	773.550.000,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.952.934.673,33
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	36.448.885.293,99
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	11.111.732.494,44

Dengan rincian Beban Pemeliharaan menurut SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.244 Beban Pemeliharaan per SKPD Tahun 2024

NO	SKPD	BEBAN PEMELIHARAAN TAHUN 2024	BEBAN PEMELIHARAAN TAHUN 2023
1	Dinas Pendidikan	739.863.944,00	2.534.367.667,10
2	Dinas Kesehatan	511.491.074,00	552.992.160,30
3	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	76.951.020,00	581.272.931,00
4	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	1.596.160.300,00	2.280.731.659,74
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	12.648.999.421,00	7.123.762.760,50
6	Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	1.139.097.900,00	1.070.468.700,00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	82.656.500,00	128.225.776,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	179.418.185,00	801.191.241,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	199.803.792,36	211.986.622,00
10	Dinas Sosial	282.613.055,40	148.436.246,00
11	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	46.885.000,00	142.027.000,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	197.810.500,00	343.519.100,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	107.284.300,00	122.983.287,00
14	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	124.800.250,00	244.185.900,00
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	70.765.000,00	153.210.070,00
16	Dinas Kebudayaan	95.530.350,00	324.095.078,00
17	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	198.496.089,27	273.594.785,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	583.344.868,91	86.539.000,00

NO	SKPD	BEBAN PEMELIHARAAN TAHUN 2024	BEBAN PEMELIHARAAN TAHUN 2023
19	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	258.857.012,00	231.079.803,00
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	363.983.000,00	167.537.000,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	149.999.721,00	97.867.000,00
22	Dinas Perhubungan	22.928.303.202,54	830.748.796,13
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.091.310.640,00	445.918.482,00
24	Dinas Pariwisata	87.304.000,00	127.355.706,00
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	2.205.311.654,44	720.883.273,00
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	94.630.800,00	309.351.660,00
27	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	568.000,00
28	Inspektorat	701.540.880,00	533.268.949,00
29	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	505.240.450,00	704.849.270,00
30	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.012.487.580,81	1.001.301.855,00
31	Badan Pendapatan Daerah	3.369.295.295,20	2.913.818.312,00
32	Badan Kepegawaian dan Korpri	101.381.149,00	81.600.900,00
33	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	200.907.253,00	616.955.804,00
34	Sekretariat DPRD	3.037.982.597,00	4.510.813.745,92
35	Badan Penghubung Daerah	1.071.900.887,00	1.252.312.695,00
36	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	79.006.500,00	81.390.280,00
37	Biro Kesejahteraan Rakyat	101.900.000,00	93.302.050,00
38	Biro Pengadaan Barang/Jasa	80.238.881,00	391.693.612,00
39	Biro Perekonomian dan Pembangunan	56.355.000,00	102.420.000,00
40	Biro Organisasi	76.079.000,00	66.791.400,00
41	Biro Administrasi Pimpinan	72.789.800,00	112.411.600,00
42	Biro Umum	8.716.515.608,83	10.241.036.358,00
43	Biro Hukum	41.810.000,00	33.340.000,00
	Jumlah Beban Pemeliharaan	65.287.102.461,76	42.792.206.534,69

Apabila dibandingkan antara Belanja Pemeliharaan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Beban Pemeliharaan dalam Laporan Operasional (LO) maka terdapat perbedaan sebagai berikut:

Tabel 5.245 Rincian Selisih Perbedaan Belanja Pemeliharaan -LRA dan Beban Pemeliharaan-LO

URAIAN	BELANJA PEMELIHARAAN - LRA	BEBAN PEMELIHARAAN - LO	SELISIH
Beban Pemeliharaan	68.400.450.864,92	65.287.102.461,76	3.113.348.403,16
Beban Pemeliharaan Tanah	773.550.000,00	773.550.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.596.986.085,33	16.952.934.673,33	(4.355.948.588,00)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	48.582.810.058,59	36.448.885.293,99	12.133.924.764,60
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.447.104.721,00	11.111.732.494,44	(4.664.627.773,44)

Penjelasan selisih Belanja Pemeliharaan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Beban Pemeliharaan pada Laporan Operasional (LO) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.246 Penjelasan Rincian Selisih Perbedaan Belanja Pemeliharaan -LRA dan Beban Pemeliharaan-LO

URAIAN	BELANJA PEMELIHARAAN - LRA	KAPITALISASI KE ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN	KAPITALISASI KE ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN	KOREKSI PEMERIKSAAN BPK	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2024	REKLASIFIKASI DARI ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN	BEBAN PEMELIHARAAN - LO
Beban Pemeliharaan	68.400.450.864,92	(190.813.000,00)	(13.460.000.000,00)	(73.405.300,00)	8.780.063.331,84	1.830.806.565,00	65.287.102.461,76
Beban Pemeliharaan Tanah	773.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.550.000,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.596.986.085,33	0,00	0,00	0,00	2.555.142.023,00	1.800.806.565,00	16.952.934.673,33
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	48.582.810.058,59	(190.813.000,00)	(13.460.000.000,00)	(64.093.000,00)	1.550.981.235,40	30.000.000,00	36.448.885.293,99
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.447.104.721,00	0,00	0,00	(9.312.300,00)	4.673.940.073,44	0,00	11.111.732.494,44

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan selisih antara Belanja Pemeliharaan-LRA dengan Beban Pemeliharaan-LO sebagai berikut:

- a. Penambahan Beban Pemeliharaan terdiri dari :
 1. Penambahan Utang Belanja Pemeliharaan Tahun 2024 sebesar Rp8.780.063.331,84 terdiri dari:
 - a) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp23.085.000,00
 - b) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp31.790.000,00
 - c) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp548.214.838,00
 - d) Badan Penghubung Daerah sebesar Rp49.050.000,00
 - e) Biro Administrasi Pimpinan sebesar Rp36.990.000,00
 - f) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp1.408.719.873,44
 - g) Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp137.600.000,00
 - h) Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp23.025.000,00
 - i) Dinas Kesehatan sebesar Rp24.145.000,00
 - j) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan sebesar Rp71.815.000,00
 - k) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp35.000.000,00
 - l) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp38.323.400,00
 - m) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp184.073.000,00
 - n) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp3.600.467.935,00
 - o) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebesar Rp39.241.000,00
 - p) Dinas Pendidikan sebesar Rp200.525.000,00
 - q) Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan sebesar Rp43.155.290,40
 - r) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp631.463.000,00
 - s) Inspektorat sebesar Rp242.507.140,00
 - t) Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp50.000.000,00
 - u) Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran sebesar Rp100.887.395,00
 - v) Sekretariat DPRD sebesar Rp1.259.985.460,00
 2. Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Beban pemeliharaan sebesar Rp1.830.806.565,00 terdiri dari:
 - a) Biro Organisasi sebesar Rp30.000.000,00
 - b) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp52.104.721,00
 - c) Dinas Perhubungan sebesar Rp1.748.701.844,00
- b. Pengurangan Beban Pemeliharaan terdiri dari:
 1. Kapitalisasi Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor ke dalam Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan sebesar Rp190.813.000,00
 2. Kapitalisasi Beban Pemeliharaan Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor ke dalam Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp13.460.000.000,00
 3. Koreksi BPK kelebihan pembayaran atas pekerjaan Belanja Pemeliharaan pada beberapa OPD sebagai akibat dari kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp73.405.300,000 antara lain:
 - a) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp64.093.000,00
 - b) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp6.478.300,00

c) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp2.834.000,00

iv. **Beban Perjalanan Dinas**

Pada tahun 2024 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Beban Perjalanan Dinas dengan realisasi sebesar Rp125.908.758.245,50 rincian sebagai berikut:

Tabel 5.247 Rincian Beban Perjalanan Dinas – LO

URAIAN	LAPORAN OPERASIONAL
Beban Perjalanan Dinas	125.908.758.245,50
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	125.536.108.813,50
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	372.649.432,00

Dengan rincian Beban Perjalanan Dinas menurut SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.248 Beban Perjalanan Dinas per SKPD Tahun 2024

NO	SKPD	BEBAN PERJALANAN DINAS TAHUN 2024	BEBAN PERJALANAN DINAS TAHUN 2023
1	Dinas Pendidikan	7.341.016.979,00	2.534.367.667,10
2	Dinas Kesehatan	4.342.109.248,00	552.992.160,30
3	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	92.932.758,00	581.272.931,00
4	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	589.942.422,00	2.280.731.659,74
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	5.370.449.824,00	7.123.762.760,50
6	Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	2.654.332.171,00	1.070.468.700,00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.765.099.257,00	128.225.776,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	1.180.479.003,00	801.191.241,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.071.060.282,00	211.986.622,00
10	Dinas Sosial	2.940.406.358,00	148.436.246,00
11	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	868.041.308,00	142.027.000,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.534.779.462,00	343.519.100,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.348.489.472,00	122.983.287,00
14	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1.296.374.370,00	244.185.900,00
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.584.811.005,00	153.210.070,00
16	Dinas Kebudayaan	1.481.429.050,00	324.095.078,00
17	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	647.925.815,00	273.594.785,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	2.002.371.511,00	86.539.000,00
19	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	1.886.980.765,00	231.079.803,00

NO	SKPD	BEBAN PERJALANAN DINAS TAHUN 2024	BEBAN PERJALANAN DINAS TAHUN 2023
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.590.327.624,00	167.537.000,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.242.469.505,00	97.867.000,00
22	Dinas Perhubungan	1.480.271.525,00	830.748.796,13
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.228.669.986,00	445.918.482,00
24	Dinas Pariwisata	1.329.027.077,00	127.355.706,00
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	2.602.261.098,00	720.883.273,00
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.353.359.427,00	309.351.660,00
27	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	881.198.157,00	568.000,00
28	Inspektorat	8.166.344.342,00	533.268.949,00
29	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.392.886.881,00	704.849.270,00
30	Badan Keuangan dan Aset Daerah	7.462.761.872,50	1.001.301.855,00
31	Badan Pendapatan Daerah	4.639.253.308,00	2.913.818.312,00
32	Badan Kepegawaian dan Korpri	974.600.145,00	81.600.900,00
33	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.430.097.995,00	616.955.804,00
34	Sekretariat DPRD	25.597.007.522,00	4.510.813.745,92
35	Badan Penghubung Daerah	1.059.228.394,00	1.252.312.695,00
36	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1.892.439.951,00	81.390.280,00
37	Biro Kesejahteraan Rakyat	2.958.612.726,00	93.302.050,00
38	Biro Pengadaan Barang/Jasa	354.256.731,00	391.693.612,00
39	Biro Perekonomian dan Pembangunan	1.201.169.535,00	102.420.000,00
40	Biro Organisasi	591.554.063,00	66.791.400,00
41	Biro Administrasi Pimpinan	2.739.658.348,00	112.411.600,00
42	Biro Umum	6.925.324.166,00	10.241.036.358,00
43	Biro Hukum	816.946.807,00	33.340.000,00
	Jumlah Beban Perjalanan Dinas	125.908.758.245,50	42.792.206.534,69

Apabila dibandingkan antara Belanja Perjalanan Dinas dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Beban Perjalanan Dinas dalam Laporan Operasional (LO) maka terdapat perbedaan sebagai berikut:

Tabel 5.249 Rincian Selisih Perbedaan Belanja Perjalanan Dinas -LRA dan Beban Perjalanan Dinas -LO

URAIAN	BELANJA PERJALANAN DINAS - LRA	BEBAN PERJALANAN DINAS - LO	SELISIH
Beban Perjalanan Dinas	125.068.460.538,50	125.908.758.245,50	(840.297.707,00)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	124.695.811.106,50	125.536.108.813,50	(840.297.707,00)
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	372.649.432,00	372.649.432,00	0,00

Penjelasan selisih Belanja Perjalanan Dinas pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Beban Perjalanan Dinas pada Laporan Operasional (LO) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.250 Penjelasan Rincian Selisih Perbedaan Belanja Perjalanan Dinas-LRA dan Beban Perjalanan Dinas-LO

URAIAN	BELANJA PERJALANAN DINAS - LRA	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2024	HASIL PEMERIKSAAN BPK	HASIL REVIU INSPEKTORAT	BEBAN PERJALANAN DINAS - LO
Beban Perjalanan Dinas	125.068.460.538,50	1.073.360.258,00	(222.862.551,00)	(10.200.000,00)	125.908.758.245,50
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	124.695.811.106,50	1.073.360.258,00	(222.862.551,00)	(10.200.000,00)	125.536.108.813,50
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	372.649.432,00	0,00	0,00	0,00	372.649.432,00

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan selisih antara Belanja Perjalanan Dinas - LRA dengan Beban Perjalanan Dinas - LO adalah sebagai berikut:

- a. Penambahan Beban Perjalanan Dinas merupakan Utang Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2024 pada beberapa OPD sebesar Rp1.073.360.258,00 sebagai berikut:
1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp20.025.800,00

2. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp411.827.700,00

3. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan sebesar Rp13.373.200,00

4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp177.037.556,00

5. Dinas Pendidikan sebesar Rp294.617.310,00

6. Dinas Perhubungan sebesar Rp28.573.676,00

7. Dinas Sosial sebesar Rp120.319.616,00

8. Sekretariat DPRD sebesar Rp7.585.400,00
- b. Pengurangan Beban Perjalanan Dinas terdiri dari :
1. Koreksi BPK atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp222.862.551,00 pada beberapa OPD sebagai berikut:

a) Badan Kepegawaian dan Korpri sebesar Rp370.000,00

b) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp10.807.400,00

c) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp1.133.000,00

d) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp740.000,00

e) Badan Pengelola Perbatasan Daerah sebesar Rp26.310.369,00

f) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebesar Rp2.577.420,00

g) Badan Penghubung Daerah sebesar Rp7.161.800,00

h) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp680.000,00

i) Biro Administrasi Pimpinan sebesar Rp1.480.000,00

j) Biro Hukum sebesar Rp769.500,00

k) Biro Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp3.435.500,00

l) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp4.192.900,00

m) Dinas Kebudayaan sebesar Rp2.068.600,00

n) Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp537.534,00

- o) Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp529.500,00
 - p) Dinas Kesehatan sebesar Rp31.875.700,00
 - q) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan sebesar Rp10.255.600,00
 - r) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp1.480.000,00
 - s) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp346.500,00
 - t) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp503.000,00
 - u) Dinas Pariwisata sebesar Rp2.269.500,00
 - v) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp4.680.000,00
 - w) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp3.178.083,00
 - x) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebesar Rp740.000,00
 - y) Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebesar Rp3.162.900,00
 - z) Dinas Pendidikan sebesar Rp11.882.400,00
 - aa) Dinas Perhubungan sebesar Rp2.312.000,00
 - bb) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp740.000,00
 - cc) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp5.480.000,00
 - dd) Dinas Sosial sebesar Rp2.740.700,00
 - ee) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi sebesar Rp1.561.000,00
 - ff) Sekretariat DPRD sebesar Rp76.861.645,00
2. Koreksi nilai pengakuan utang belanja barang jasa dan utang belanja modal karena berdasarkan hasil revidi yang dilakukan oleh Inspektorat terdapat paket pekerjaan yang tidak layak bayar, pengurangan nilai utang, maupun kesalahan perhitungan dalam penentuan nilai utang pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan sebesar Rp1.050.000,00 dan Dinas Pendidikan sebesar Rp9.150.000,00
- v. **Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**

Pada tahun 2024 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dengan realisasi sebesar Rp57.587.256.702,00 rincian sebagai berikut:

Tabel 5.251 Rincian Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	
URAIAN	LAPORAN OPERASIONAL
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	57.587.256.702,00
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.664.060.000,00
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	50.923.196.702,00

Dengan rincian Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat menurut SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.252 Beban Uang dan/atau Jasa untuk
Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat per SKPD

NO	SKPD	BEBAN UANG DAN/ATAU JASA UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT - LO TAHUN 2024	BEBAN UANG DAN/ATAU JASA UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT - LO TAHUN 2023
1	Dinas Pendidikan	22.138.861.702,00	15.693.414.134,00
2	Dinas Kesehatan	4.500.000,00	40.250.000,00
3	Dinas Sosial	1.299.000.000,00	1.299.000.000,00
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	30.000.000,00	30.000.000,00
5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	10.500.000,00
6	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	247.560.000,00	1.777.990.200,00
7	Dinas Kebudayaan	96.775.000,00	30.409.000,00
8	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	10.500.000,00	10.500.000,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	4.008.000.000,00	0,00
10	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	25.750.000,00	35.400.000,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	184.100.000,00	18.935.350.000,00
12	Dinas Perhubungan	0,00	0,00
13	Dinas Kelautan dan Perikanan	11.400.000,00	11.655.000,00
14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00
15	Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	0,00	6.750.000,00
16	Biro Kesejahteraan Rakyat	28.304.360.000,00	27.607.989.801,00
17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.226.450.000,00	0,00
	Jumlah Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	57.587.256.702,00	65.489.208.135,00

Apabila dibandingkan antara Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dalam Laporan Operasional (LO) maka terdapat perbedaan sebagai berikut:

Tabel 5.253 Rincian Selisih Perbedaan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat -LRA dan Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat -LO

URAIAN	BELANJA UANG DAN/ATAU JASA UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT - LRA	BEBAN UANG DAN/ATAU JASA UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT - LO	SELISIH
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	54.371.556.702,00	57.587.256.702,00	(3.215.700.000,00)
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.662.560.000,00	6.664.060.000,00	(1.500.000,00)
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	47.708.996.702,00	50.923.196.702,00	(3.214.200.000,00)

Penjelasan selisih Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dalam Laporan Operasional (LO) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.254 Penjelasan Rincian Selisih Perbedaan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat -LRA dan Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat -LO

URAIAN	BELANJA UANG DAN/ATAU JASA UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT - LRA	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2024	BEBAN UANG DAN/ATAU JASA UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT - LO
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	54.371.556.702,00	3.215.700.000,00	57.587.256.702,00
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.662.560.000,00	1.500.000,00	6.664.060.000,00
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	47.708.996.702,00	3.214.200.000,00	50.923.196.702,00

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan selisih antara Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat - LRA dengan Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat – LO sebesar Rp3.215.700.000,00 adalah penetapan Utang Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2024 pada beberapa OPD sebagai berikut:

- 1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp1.210.200.000,00
- 2) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebesar Rp2.004.000.000,00
- 3) Dinas Pendidikan sebesar Rp1.500.000,00

vi. **Beban Lain-lain**

Pada tahun 2023 Beban Lain-lain digunakan untuk menampung Beban Barang Ekstrakomptabel atas Aset Tetap Peralatan Mesin yang tidak memenuhi Batas Kapitalisasi Aset Tetap. Selanjutnya pada Tahun 2024 tidak terdapat saldo Beban Lain-lain dikarenakan Beban Lain-lain disajikan pada akun Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tabel 5.255 Beban Lain-lain per SKPD tahun 2024

NO	SKPD	BEBAN LAIN-LAIN TAHUN 2024	BEBAN LAIN-LAIN TAHUN 2023
1	Dinas Pendidikan	0,00	3.121.430.508,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	36.596.000,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	0,00	87.046.580,00
4	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	0,00	128.205.000,00
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	0,00	21.800.073,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	0,00	141.179.900,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	1.300.000,00
9	Dinas Sosial	0,00	1.240.000,00
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	910.000,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	1.854.000,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	1.539.900,00
13	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	88.920.000,00
14	Dinas Kebudayaan	0,00	2.832.000,00
15	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	0,00	0,00
16	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	0,00	426.000,00
17	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	0,00	26.277.000,00
18	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	39.516.000,00
19	Dinas Perhubungan	0,00	36.073.419,00
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	52.075.000,00
21	Dinas Pariwisata	0,00	1.125.000,00
22	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0,00	0,00
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	1.590.000,00
24	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00

NO	SKPD	BEBAN LAIN-LAIN TAHUN 2024	BEBAN LAIN-LAIN TAHUN 2023
25	Inspektorat	0,00	3.100.000,00
26	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	1.435.000,00
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	99.710.000,00
28	Badan Pendapatan Daerah	0,00	26.762.000,00
29	Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	0,00	0,00
30	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	875.000,00
31	Sekretariat DPRD	0,00	0,00
32	Badan Penghubung Daerah	0,00	112.869.700,00
33	Biro Kesejahteraan Rakyat	0,00	0,00
34	Biro Pengadaan Barang/Jasa	0,00	2.044.400,00
35	Biro Perekonomian dan Pembangunan	0,00	2.450.000,00
36	Biro Administrasi Pimpinan	0,00	4.944.600,00
37	Biro Umum	0,00	455.229.000,00
JUMLAH BEBAN LAIN-LAIN		0,00	4.501.356.080,00

vii. **Beban Barang dan Jasa Bos**

Pada tahun 2024 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Beban Barang dan Jasa BOS dengan realisasi sebesar Rp159.434.869.743,88 rincian sebagai berikut:

Tabel 5.256 Rincian Beban Barang dan Jasa BOS – LO

URAIAN	BEBAN BARANG DAN JASA BOS - LRA
Beban Barang dan Jasa BOS	159.434.869.743,88
Beban Barang dan Jasa BOS	159.434.869.743,88
Beban Barang dan Jasa BOS	159.434.869.743,88

Beban Barang dan Jasa BOS terdiri Beban Barang dan Jasa yang bersumber dari Dana BOS SMA/SMK Negeri dan SLB Negeri dan juga Beban Barang dan Jasa pada SMA/SMK Negeri yang bersumber dari Dana SPP serta berasal dari hibah Pemerintah Pusat untuk SMK Non BLUD. Rekapitulasi Beban Barang dan Jasa SPP dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

Apabila dibandingkan antara Belanja Barang dan Jasa BOS dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Beban Barang dan Jasa BOS dalam Laporan Operasional (LO) maka terdapat perbedaan sebagai berikut:

Tabel 5.257 Rincian Selisih Perbedaan Belanja Barang dan Jasa BOS-LRA dan Beban Barang dan Jasa BOS-LO

URAIAN	BELANJA BARANG DAN JASA BOS - LRA	BEBAN BARANG DAN JASA BOS - LRA	SELISIH

Beban Barang dan Jasa BOS	106.842.994.373,00	159.434.869.743,88	(52.591.875.370,88)
Beban Barang dan Jasa BOS	106.842.994.373,00	159.434.869.743,88	(52.591.875.370,88)
Beban Barang dan Jasa BOS	106.842.994.373,00	159.434.869.743,88	(52.591.875.370,88)

Penjelasan selisih Belanja Barang dan Jasa BOS pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Beban Barang dan Jasa BOS pada Laporan Operasional (LO) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.258 Penjelasan Rincian Selisih Perbedaan Belanja Barang dan Jasa BOS-LRA dan Beban Barang dan Jasa BOS-LO

URAIAN	BELANJA BARANG DAN JASA BOS - LRA	BELANJA BARANG DAN JASA BERSUMBER DARI DANA SPP	KOREKSI TAMBAH BEBAN BARANG DAN JASA TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA BERSUMBER DARI HIBAH PEMERINTAH PUSAT	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	BEBAN BARANG DAN JASA BOS - LRA
Beban Barang dan Jasa BOS	106.842.994.373,00	48.282.817.365,58	114.467.031,30	4.349.126.757,00	(154.535.783,00)	159.434.869.743,88
Beban Barang dan Jasa BOS	106.842.994.373,00	48.282.817.365,58	114.467.031,30	4.349.126.757,00	(154.535.783,00)	159.434.869.743,88
Beban Barang dan Jasa BOS	106.842.994.373,00	48.282.817.365,58	114.467.031,30	4.349.126.757,00	(154.535.783,00)	159.434.869.743,88

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan selisih antara Belanja Barang dan Jasa BOS - LRA dengan Beban Barang dan Jasa BOS - LO sebagai berikut:

Penambahan Beban Barang dan Jasa BOS terdiri dari:

- Belanja Barang dan Jasa bersumber dari dana SPP sebesar Rp48.282.817.365,58
- Koreksi Tambah Pencatatan Beban Barang dan Jasa BOS Tahun 2023 sebesar Rp114.467.031,30 pada beberapa sekolah antara lain:
 - SMAN 1 Batam sebesar Rp5.853.100,00
 - SMAN 1 Tanjungpinang sebesar Rp21.993.000,00
 - SMAN 17 Batam sebesar Rp38.905.115,00
 - SMAN 2 Tanjungpinang sebesar Rp21.143.800,00
 - SMAN 23 Batam sebesar Rp26.572.016,30
- Belanja Barang dan Jasa bersumber dari Hibah Pemerintah Pusat sebesar Rp4.349.126.757,00
- Koreksi kurang catat nilai persediaan di sekolah-sekolah per 31 Desember 2024 dilaporkan saldonya adalah Rp0,00. Hasil pemeriksaan atas laporan BA *Stock Opname* Sekolah per 31 Desember 2024, terdapat 4 (empat sekolah) yang masih memiliki saldo persediaan sebesar Rp154.535.783,00 antara lain:
 - SMAN 16 Batam sebesar Rp27.814.500,00
 - SMKN 1 Tanjungpinang sebesar Rp16.886.252,00
 - SMKN 2 Tanjungpinang sebesar Rp108.633.400,00
 - SMKN 4 Tanjungpinang sebesar Rp1.201.631,00

viii. **Beban Barang dan Jasa BLUD**

Pada tahun 2024 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Beban Barang dan Jasa BLUD dengan realisasi sebesar Rp152.308.892.270,09 rincian sebagai berikut:

Tabel 5.259 Rincian Beban Barang dan Jasa BLUD

URAIAN	BEBAN BARANG DAN JASA BLUD - LO

URAIAN	BEBAN BARANG DAN JASA BLUD - LO
Beban Barang dan Jasa BLUD	152.308.892.270,09
Beban Barang dan Jasa BLUD	152.308.892.270,09
Beban Barang dan Jasa BLUD	152.308.892.270,09

Beban Barang dan Jasa BLUD terdiri dari Beban Barang dan Jasa yang bersumber dari penerimaan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib dan Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud serta Beban Barang dan Jasa yang bersumber dari BLUD Sekolah Menengah Kejuruan.

Apabila dibandingkan antara Belanja Barang dan Jasa BLUD dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Beban Barang dan Jasa BLUD dalam Laporan Operasional (LO) maka terdapat perbedaan sebagai berikut:

Tabel 5.260 Rincian Selisih Perbedaan Belanja
Barang dan Jasa BLUD-LRA dan Beban Barang dan Jasa BLUD-LO

URAIAN	BELANJA BARANG DAN JASA BLUD - LRA	BEBAN BARANG DAN JASA BLUD - LO	SELISIH
Beban Barang dan Jasa BLUD	144.510.359.919,90	152.308.892.270,09	(7.798.532.350,19)
Beban Barang dan Jasa BLUD	144.510.359.919,90	152.308.892.270,09	(7.798.532.350,19)
Beban Barang dan Jasa BLUD	144.510.359.919,90	152.308.892.270,09	(7.798.532.350,19)

Penjelasan selisih Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Beban Barang dan Jasa BLUD pada Laporan Operasional (LO) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.261 Penjelasan Rincian Selisih Perbedaan Belanja Barang dan Jasa BLUD -LRA dan Beban Barang dan Jasa BLUD-LO

URAIAN	BELANJA BARANG DAN JASA BLUD - LRA	PELUNASAN UTANG TAHUN 2023	BEBAN SEWA DIBAYAR DI MUKA	KOREKSI PERSEDIAAN AKHIR	PENGUNAAN/ PEMBEBANAN PERSEDIAAN AWAL	KOREKSI TAMBAH BEBAN BARANG DAN JASA BLUD	PEMBEBANAN PERSEDIAAN HASIL REKLASIFIKASI DARI ASET TETAP	KURANG CATAT PENERIMAAN DAN BELANJA BERSUMBER DARI HIBAH PEMERINTAH PUSAT	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2024	BEBAN BARANG DAN JASA BLUD - LO
Beban Barang dan Jasa BLUD	144.510.359.919,90	(29.441.530.609,00)	(55.742.777,78)	(16.009.336.222,66)	13.046.161.957,61	2.036.556.539,02	72.618.500,00	25.000.000,00	38.124.804.963,00	152.308.892.270,09
Beban Barang dan Jasa BLUD	144.510.359.919,90	(29.441.530.609,00)	(55.742.777,78)	(16.009.336.222,66)	13.046.161.957,61	2.036.556.539,02	72.618.500,00	25.000.000,00	38.124.804.963,00	152.308.892.270,09
Beban Barang dan Jasa BLUD	144.510.359.919,90	(29.441.530.609,00)	(55.742.777,78)	(16.009.336.222,66)	13.046.161.957,61	2.036.556.539,02	72.618.500,00	25.000.000,00	38.124.804.963,00	152.308.892.270,09

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan selisih antara Belanja Barang dan Jasa BLUD-LRA dengan Beban Barang dan Jasa BLUD-LO sebagai berikut:

- a. Penambahan Beban Barang dan Jasa BLUD terdiri dari :
 - 1. Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD tahun 2024 sebesar Rp38.124.804.963,00 dengan rincian Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib sebesar Rp28.701.120.126,00 dan Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp9.423.684.837,00
 - 2. Penggunaan/Pembebanan Persediaan Awal sebesar Rp13.046.161.957,61 dengan rincian Penggunaan/Pembebanan Persediaan Awal pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib sebesar Rp10.549.748.081,94 dan Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp2.496.413.875,67.
 - 3. Pembebanan Persediaan Hasil Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp72.618.500,00 dengan rincian pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib sebesar Rp43.395.500,00 dan Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp29.223.000,00
 - 4. Koreksi Tambah Beban Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp2.036.556.539,02 dengan rincian dengan rincian pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib sebesar Rp1.720.510.473,24 dan Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp316.046.065,78
 - 5. Koreksi kurang catat penerimaan bantuan hibah dari Pemerintah Pusat tahun 2024 dan Belanja Persediaan SMKPK BLUD SMK Negeri 1 Batam sebesar Rp25.000.000
- b. Pengurangan Beban Barang dan Jasa BLUD terdiri dari :
 - 1. Pelunasan Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD tahun 2023 sebesar Rp29.441.530.609,00, dengan rincian Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib sebesar Rp22.909.041.198,00 dan Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp6.532.489.411,00.
 - 2. Beban Sewa Dibayar di Muka sebesar Rp55.742.777,78 merupakan Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gudang pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib
 - 3. Koreksi Persediaan Akhir sebesar Rp16.009.336.222,66 dengan rincian Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib sebesar Rp12.861.579.699,20 dan Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp3.147.756.523,46.

5.4.2.1.3. Beban Bunga

Pada Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Beban Bunga sebesar Rp3.078.651.404,00 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 5.262 Rincian Beban Bunga – LO

URAIAN	LAPORAN OPERASIONAL
Beban Bunga	3.078.651.404,00
Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	3.078.651.404,00
Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	3.078.651.404,00

Apabila dibandingkan antara Belanja Bunga dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Beban Bunga dalam Laporan Operasional (LO) maka terdapat perbedaan sebagai berikut:

Tabel 5.263 Rincian Selisih Perbedaan Belanja Bunga-LRA dan Beban Bunga-LO

URAIAN	BELANJA BUNGA - LRA	BEBAN BUNGA - LO	SELISIH
Beban Bunga	3.692.560.273,00	3.078.651.404,00	613.908.869,00
Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	3.692.560.273,00	3.078.651.404,00	613.908.869,00
Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	3.692.560.273,00	3.078.651.404,00	613.908.869,00

Penjelasan selisih Belanja Bunga pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Beban Bunga pada Laporan Operasional (LO) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.264 Penjelasan Rincian Selisih Perbedaan Belanja Bunga-LRA dan Beban Bunga-LO

URAIAN	BELANJA BUNGA - LRA	PELUNASAN UTANG TAHUN 2023	BEBAN BUNGA - LO
Beban Bunga	3.692.560.273,00	613.908.869,00	3.078.651.404,00
Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	3.692.560.273,00	613.908.869,00	3.078.651.404,00
Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	3.692.560.273,00	613.908.869,00	3.078.651.404,00

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan selisih antara Belanja Bunga - LRA dengan Beban Bunga - LO dikarenakan adanya Pelunasan Utang Bunga Pinjaman Jangka Menengah kepada PT SMI sebesar Rp613.908.869,00.

5.4.2.1.4. **Beban Subsidi**

Pada Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Beban Subsidi sebesar Rp944.301.180,00 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 5.265 Rincian Beban Subsidi

URAIAN	LAPORAN OPERASIONAL
Beban Subsidi	944.301.180,00
Beban Subsidi kepada BUMN	0,00
Beban Subsidi kepada BUMN	0,00
Beban Subsidi kepada BUMD	944.301.180,00
Beban Subsidi kepada BUMD	944.301.180,00

Pada tahun 2024 tidak terdapat perbedaan antara Belanja Subsidi dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Beban Subsidi dalam Laporan Operasional (LO) yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.266 Rincian Selisih Perbedaan Belanja Subsidi-LRA dan Beban Subsidi-LO

URAIAN	BELANJA SUBSIDI - LRA	BEBAN SUBSIDI - LO	SELISIH
Beban Subsidi	944.301.180,00	944.301.180,00	0,00
Beban Subsidi kepada BUMN	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi kepada BUMN	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi kepada BUMD	944.301.180,00	944.301.180,00	0,00
Beban Subsidi kepada BUMD	944.301.180,00	944.301.180,00	0,00

Dengan rincian Beban Subsidi menurut SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.267 Beban Subsidi per SKPD Tahun 2024

NO	SKPD	BEBAN SUBSIDI TAHUN 2024	BEBAN SUBSIDI TAHUN 2023
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	3.333.475.500,00
2	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	944.301.180,00	810.407.500,00
	Jumlah Beban Hibah	944.301.180,00	4.143.883.000,00

5.4.2.1.5. Beban Hibah

Pada Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Beban Hibah sebesar Rp353.850.454.704,03 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 5.268 Rincian Beban Hibah – LO

URAIAN	BEBAN HIBAH - LO
Beban Hibah	353.850.454.704,03
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	151.417.532.635,00
Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	147.213.011.075,00
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	4.204.521.560,00
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	160.907.716.828,03
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	22.923.400.067,00
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	105.007.613.269,09
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	32.806.703.491,94
Beban Hibah kepada Koperasi	170.000.000,00
Beban Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	0,00

Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00
Beban Hibah Dana BOS	36.870.020.909,00
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	32.930.722.526,00
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	3.939.298.383,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	4.655.184.332,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	4.655.184.332,00

Dengan rincian Beban Hibah menurut SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.269 Beban Hibah per SKPD Tahun 2024

NO	SKPD	BEBAN HIBAH TAHUN 2024	BEBAN HIBAH TAHUN 2023
1	Dinas Pendidikan	40.498.534.166,09	37.538.874.211,00
2	Dinas Kesehatan	1.675.821.560,00	847.500.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	0,00	1.171.676.388,76
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	159.928.792.986,00	104.502.872.884,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00
6	Dinas Sosial	565.000.000,00	2.473.750.000,00
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	700.000.000,00	1.854.600.000,00
8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.270.000.000,00	1.292.600.000,00
9	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	17.849.922.178,00	21.435.616.200,00
10	Dinas Kebudayaan	1.462.750.000,00	2.165.000.000,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	200.000.000,00	435.000.000,00
12	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	0,00	1.335.766.080,00
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	530.000.000,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	175.000.000,00	1.072.000.000,00
15	Dinas Perhubungan	924.800.000,00	5.263.080.210,00
16	Dinas Kelautan dan Perikanan	10.661.700.891,94	15.288.886.856,35
17	Dinas Pariwisata	0,00	222.488.300,00
18	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0,00	577.700.000,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00
20	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00
21	Biro Kesejahteraan Rakyat	101.136.180.322,00	88.302.020.414,00
22	Biro Umum	15.801.952.600,00	18.591.580.000,00
	Jumlah Beban Hibah	353.850.454.704,03	304.901.011.544,11

Apabila dibandingkan antara Belanja Hibah dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Beban Hibah dalam Laporan Operasional (LO) maka terdapat perbedaan sebagai berikut:

Tabel 5.270 Rincian Selisih Perbedaan Belanja Hibah-LRA dan Beban Hibah-LO

URAIAN	BELANJA HIBAH - LRA	BEBAN HIBAH - LO	SELISIH
Beban Hibah	357.581.329.209,27	353.850.454.704,03	3.730.874.505,24
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	158.511.792.275,00	151.417.532.635,00	7.094.259.640,00
Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	147.213.011.075,00	147.213.011.075,00	0,00
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	11.298.781.200,00	4.204.521.560,00	7.094.259.640,00
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	157.544.331.693,27	160.907.716.828,03	(3.363.385.134,76)
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	23.132.519.267,00	22.923.400.067,00	209.119.200,00
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	105.107.423.869,09	105.007.613.269,09	99.810.600,00
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	29.134.388.557,18	32.806.703.491,94	(3.672.314.934,76)
Beban Hibah kepada Koperasi	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00
Beban Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah Dana BOS	36.870.020.909,00	36.870.020.909,00	0,00
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	32.930.722.526,00	32.930.722.526,00	0,00
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	3.939.298.383,00	3.939.298.383,00	0,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	4.655.184.332,00	4.655.184.332,00	0,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	4.655.184.332,00	4.655.184.332,00	0,00

Penjelasan selisih Belanja Hibah pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Beban Hibah pada Laporan Operasional (LO) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

T
el 5.271 Penjelasan Rincian Selisih Perbedaan Belanja Hibah-LRA dan Beban Hibah-LO

URAIAN	BELANJA HIBAH - LRA	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2024	REKLASIFIKASI KE PERSEDIAAN	HASIL REVIU INSPEKTORAT	BEBAN HIBAH - LO
Beban Hibah	357.581.329.209,27	13.814.967.307,29	(17.542.332.812,53)	(3.509.000,00)	353.850.454.704,03
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	158.511.792.275,00	5.916.015.360,00	(13.010.275.000,00)	0,00	151.417.532.635,00
Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	147.213.011.075,00	0,00	0,00	0,00	147.213.011.075,00
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	11.298.781.200,00	5.916.015.360,00	(13.010.275.000,00)	0,00	4.204.521.560,00
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi	157.544.331.693,27	7.898.951.947,29	(4.532.057.812,53)	(3.509.000,00)	160.907.716.828,03

URAIAN	BELANJA HIBAH - LRA	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2024	REKLASIFIKASI KE PERSEDIAAN	HASIL REVIU INSPEKTORAT	BEBAN HIBAH - LO
Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	23.132.519.267,00	487.944.800,00	(693.555.000,00)	(3.509.000,00)	22.923.400.067,00
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	105.107.423.869,09	599.454.500,00	(699.265.100,00)	0,00	105.007.613.269,09
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	29.134.388.557,18	6.811.552.647,29	(3.139.237.712,53)	0,00	32.806.703.491,94
Beban Hibah kepada Koperasi	170.000.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00
Beban Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah Dana BOS	36.870.020.909,00	0,00	0,00	0,00	36.870.020.909,00
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	32.930.722.526,00	0,00	0,00	0,00	32.930.722.526,00
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	3.939.298.383,00	0,00	0,00	0,00	3.939.298.383,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	4.655.184.332,00	0,00	0,00	0,00	4.655.184.332,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	4.655.184.332,00	0,00	0,00	0,00	4.655.184.332,00

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan selisih antara Belanja Hibah-LRA dengan Beban Hibah-LO sebagai berikut:

- a. Penambahan Beban Hibah merupakan penambahan Utang Belanja Hibah Tahun 2024 sebesar Rp13.814.967.307,29 pada beberapa OPD sebagai berikut:
 1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp2.492.700.000,00
 2. Biro Umum sebesar Rp4.487.200.000,00
 3. Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp119.028.000,00
 4. Dinas Kesehatan sebesar Rp975.821.560,00
 5. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp4.815.417.747,29
 6. Dinas Perhubungan sebesar Rp924.800.000,00
- b. Pengurangan Beban Hibah merupakan Reklasifikasi ke Persediaan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan sebesar Rp17.542.332.812,53 antara lain:
 1. Reklasifikasi dari Beban Hibah barang kepada pemerintah pusat ke Persediaan untuk Dijual/Diserahkan pihak Lainnya sebesar Rp10.562.781.200,00
 2. Reklasifikasi dari Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan ke Persediaan untuk Dijual/Diserahkan pihak Lainnya sebesar Rp209.119.200,00
 3. Reklasifikasi Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar ke Persediaan untuk Dijual/Diserahkan pihak Lainnya Rp99.810.600,00

- 4. Reklasifikasi Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan ke Persediaan untuk Dijual/Diserahkan pihak Lainnya Rp1.858.713.065,24
 - 5. Reklasifikasi Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat ke Persediaan untuk Dijual/Diserahkan pihak Lainnya sebesar Rp2.447.493.800,00
 - 6. Reklasifikasi Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan ke Persediaan untuk Dijual/Diserahkan pihak Lainnya sebesar Rp484.435.800
 - 7. Reklasifikasi Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar ke Persediaan untuk Dijual/Diserahkan pihak Lainnya Rp599.454.500
 - 8. Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan ke Persediaan untuk Dijual/Diserahkan pihak Lainnya sebesar Rp1.280.524.647,29
- c. Koreksi nilai pengakuan utang belanja barang jasa karena berdasarkan hasil reviu yang dilakukan oleh Inspektorat terdapat paket pekerjaan yang tidak layak bayar, pengurangan nilai utang, maupun kesalahan perhitungan dalam penentuan nilai utang pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp3.509.000,00

5.4.2.1.6. Beban Bantuan Sosial

Pada Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Beban Bantuan Sosial sebesar Rp4.002.925.000,00 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 5.272 Uraian Beban Bantuan Sosial – LO

URAIAN	LAPORAN OPERASIONAL
Beban Bantuan Sosial	4.002.925.000,00
Beban Bantuan Sosial kepada Individu	2.972.600.000,00
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	2.972.600.000,00
Beban Bantuan Sosial kepada Keluarga	910.325.000,00
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	776.000.000,00
Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	134.325.000,00
Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	120.000.000,00
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	120.000.000,00

Dengan rincian Beban Bantuan Sosial menurut SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.273 Beban Bantuan Sosial per SKPD Tahun 2024

NO	SKPD	BEBAN BANTUAN SOSIAL TAHUN 2024	BEBAN BANTUAN SOSIAL TAHUN 2023
1	Dinas Pendidikan	2.972.600.000,00	5.906.530.000,00
2	Dinas Sosial	1.030.325.000,00	1.510.900.000,00
	Jumlah Beban Bantuan Sosial	4.002.925.000,00	7.417.430.000,00

Pada tahun 2024 tidak terdapat perbedaan antara Belanja Bantuan Sosial dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Beban Bantuan Sosial dalam Laporan Operasional (LO).

Tabel 5.274 Rincian Selisih Perbedaan Belanja Bantuan Sosial-LRA dan Beban Bantuan Sosial-LO

URAIAN	BELANJA BANTUAN SOSIAL - LRA	BEBAN BANTUAN SOSIAL - LO	SELISIH
Beban Bantuan Sosial	4.002.925.000,00	4.002.925.000,00	0,00
Beban Bantuan Sosial kepada Individu	2.972.600.000,00	2.972.600.000,00	0,00
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	2.972.600.000,00	2.972.600.000,00	0,00
Beban Bantuan Sosial kepada Keluarga	910.325.000,00	910.325.000,00	0,00
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	776.000.000,00	776.000.000,00	0,00
Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	134.325.000,00	134.325.000,00	0,00
Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00

5.4.2.1.7. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Pada Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp24.667.815.407,51 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.275 Beban Penyisihan Piutang per SKPD

NO	SKPD	BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAHUN 2024	BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAHUN 2023
1	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	444.921.130,65	44.996.855,65
2	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	1.715.523,77	880.377,03
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	385.550.254,50
4	Badan Pendapatan Daerah	24.217.027.664,89	450.521.584,72
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	3.951.550,00	0,00
6	Dinas Perhubungan	199.538,19	0,00
	Jumlah Beban Penyisihan Piutang	24.667.815.407,51	881.949.071,90

5.4.2.2. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu. Pada tahun 2024 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Beban Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp391.610.349.705,48 dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.276 Beban Penyusutan dan Amortisasi per SKPD tahun 2024			
NO	SKPD	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI TAHUN 2024	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI TAHUN 2023
1	Dinas Pendidikan	88.078.263.073,16	89.326.505.724,00
2	Dinas Kesehatan	1.670.421.242,83	1.516.916.254,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	37.634.379.099,73	34.501.858.405,00
4	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	11.846.894.409,60	8.247.396.958,00
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	156.727.594.573,86	174.817.966.531,00
6	Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	15.426.170.125,58	23.738.792.240,00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.021.447.478,73	267.242.202,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	622.040.634,73	405.435.284,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	597.749.416,96	663.148.815,00
10	Dinas Sosial	439.752.850,40	273.074.235,00
11	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	208.956.389,60	193.142.647,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.588.044.235,89	1.875.539.483,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	251.569.572,61	274.263.639,00
14	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	681.456.755,35	705.317.964,00
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.102.453.162,33	2.068.410.109,00
16	Dinas Kebudayaan	1.989.303.518,63	996.039.248,00
17	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	629.933.690,22	898.650.734,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	306.832.871,05	515.692.645,00
19	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	3.688.558.580,62	3.821.741.003,00
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	729.445.777,04	1.038.669.642,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	433.220.796,21	364.746.150,00
22	Dinas Perhubungan	23.025.113.828,45	26.814.320.210,00
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	4.283.126.710,67	4.218.214.601,00
24	Dinas Pariwisata	509.665.773,80	637.532.115,00
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	7.532.529.534,96	7.297.293.359,00
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	568.958.380,26	447.311.037,00
27	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	214.648.912,23	144.791.156,00
28	Inspektorat	1.205.636.961,75	1.018.890.206,00
29	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.073.081.482,77	951.082.326,00
30	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3.142.288.867,28	3.129.869.505,00
31	Badan Pendapatan Daerah	5.588.364.431,54	5.468.072.177,00
32	Badan Kepegawaian dan Korpri	477.005.689,45	517.108.457,00
33	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	708.234.408,10	503.403.771,00
34	Sekretariat DPRD	3.492.531.282,71	3.663.255.307,00
35	Badan Penghubung Daerah	2.364.611.045,76	1.330.509.712,00
36	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	125.251.480,67	106.867.445,00
37	Biro Kesejahteraan Rakyat	487.734.516,45	427.709.439,00
38	Biro Pengadaan Barang/Jasa	417.678.489,06	495.151.649,00
39	Biro Perekonomian dan Pembangunan	198.904.484,71	265.131.243,00
40	Biro Organisasi	126.946.819,33	73.916.958,00
41	Biro Administrasi Pimpinan	486.710.877,61	508.595.963,00

NO	SKPD	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI
		TAHUN 2024	TAHUN 2023
42	Biro Umum	8.859.650.065,37	7.527.372.190,00
43	Biro Hukum	47.187.407,42	35.984.463,00
	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	391.610.349.705,48	412.092.933.201,00

5.4.2.3. Beban Transfer

5.4.2.3.1. Beban Bagi Hasil

Beban Bagi Hasil merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban bagi hasil diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas. Pada tahun 2024 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat beban bagi hasil sebesar Rp796.635.218.878,00 dengan rincian:

Tabel 5.277 Beban Bagi Hasil – LO

URAIAN	LAPORAN OPERASIONAL
Beban Bagi Hasil	796.635.218.878,00
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	796.635.218.878,00
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	334.512.671.282,00
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	462.122.547.596,00

Apabila dibandingkan antara Belanja Bagi Hasil dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Beban Bagi Hasil dalam Laporan Operasional (LO) maka terdapat perbedaan sebagai berikut:

Tabel 5.278 Rincian Selisih Perbedaan Belanja Bagi Hasil-LRA dan Beban Bagi Hasil-LO

URAIAN	BELANJA BAGI HASIL - LRA	BEBAN BAGI HASIL - LO	SELISIH
Beban Bagi Hasil	748.291.201.015,00	796.635.218.878,00	(48.344.017.863,00)
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	748.291.201.015,00	796.635.218.878,00	(48.344.017.863,00)
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	330.924.905.661,00	334.512.671.282,00	(3.587.765.621,00)
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	417.366.295.354,00	462.122.547.596,00	(44.756.252.242,00)

Penjelasan selisih Belanja Bagi Hasil pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Beban Bagi Hasil pada Laporan Operasional (LO) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.279 Penjelasan Rincian Selisih Perbedaan Belanja Bagi Hasil -LRA dan Beban Bagi Hasil -LO

URAIAN	BELANJA BAGI HASIL - LRA	PENAMBAHAN UTANG 2024	PELUNASAN UTANG 2023	BEBAN BAGI HASIL - LO
Beban Bagi Hasil	748.291.201.015,00	226.476.692.255,00	(178.132.674.392,00)	796.635.218.878,00
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	748.291.201.015,00	226.476.692.255,00	(178.132.674.392,00)	796.635.218.878,00
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	330.924.905.661,00	91.284.187.286,00	(87.696.421.665,00)	334.512.671.282,00
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	417.366.295.354,00	135.192.504.969,00	(90.436.252.727,00)	462.122.547.596,00

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan selisih antara Belanja Bagi Hasil - LRA dengan Beban Bagi Hasil-LO sebagai berikut:

- a. Penambahan Beban Bagi Hasil berasal dari Penetapan Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota tahun 2024 antara lain:

1. Pemerintah Kota Batam sebesar Rp108.774.500.374,00

2. Pemerintah Kota Tanjungpinang sebesar Rp26.418.004.595,00

3. Pemerintah Kabupaten Bintan sebesar Rp21.684.975.192,00

4. Pemerintah Kabupaten Karimun sebesar Rp21.289.602.585,00

5. Pemerintah Kabupaten Natuna sebesar Rp17.546.888.639,00

6. Pemerintah Kabupaten Lingga sebesar Rp15.645.671.052,00

7. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp15.117.049.818,00
- b. Pengurangan Beban Bagi Hasil berasal dari pelunasan Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota tahun 2023 antara lain:

1. Pemerintah Kota Batam sebesar Rp69.362.260.651,00

2. Pemerintah Kota Tanjungpinang sebesar Rp21.073.992.076,00

3. Pemerintah Kabupaten Bintan sebesar Rp26.647.165.903,00

4. Pemerintah Kabupaten Karimun sebesar Rp17.167.587.493,00

5. Pemerintah Kabupaten Natuna sebesar Rp18.221.293.499,00

6. Pemerintah Kabupaten Lingga sebesar Rp13.205.958.099,00

7. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp12.454.416.671,00

5.4.2.3.2. Beban Bantuan Keuangan

Beban Bantuan Keuangan diberikan kepada pemerintah kab/kota dalam rangka tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi/atau penerima bantuan keuangan. Pada tahun 2024 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat beban bantuan keuangan sebesar Rp26.853.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.280 Beban Bantuan Keuangan – LO

URAIAN	LAPORAN OPERASIONAL
Beban Bantuan Keuangan	26.853.000.000,00
Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	500.000.000,00
Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi	500.000.000,00
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	14.130.500.000,00
Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	14.130.500.000,00
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	12.222.500.000,00

URAIAN	LAPORAN OPERASIONAL
Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	12.222.500.000,00

Pada tahun 2024 tidak terdapat perbedaan antara Belanja Bantuan Keuangan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Beban Bantuan Keuangan dalam Laporan Operasional (LO).

Tabel 5.281 Selisih Perbedaan Belanja Bantuan Keuangan - LRA dan Beban Bantuan Keuangan – LO

URAIAN	BELANJA TIDAK TERDUGA - LRA	BEBAN TIDAK TERDUGA - LO	SELISIH
Beban Bantuan Keuangan	26.853.000.000,00	26.853.000.000,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	14.130.500.000,00	14.130.500.000,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	14.130.500.000,00	14.130.500.000,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	12.222.500.000,00	12.222.500.000,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	12.222.500.000,00	12.222.500.000,00	0,00

5.4.2.4. Beban Tidak Terduga

Pada Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Beban Tidak Terduga sebesar Rp2.065.423.140,00, dimana tidak terdapat perbedaan antara Belanja Tak Terduga dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Beban Tidak Terduga dalam Laporan Operasional (LO).

Tabel 5.282 Perbedaan antara Belanja Tak Terduga – LRA dengan Beban Tidak Terduga – LO

URAIAN	BELANJA TIDAK TERDUGA - LRA	BEBAN TIDAK TERDUGA - LO	SELISIH
Beban Tidak Terduga	2.065.423.140,00	2.065.423.140,00	0,00
Beban Tidak Terduga	2.065.423.140,00	2.065.423.140,00	0,00
Beban Tidak Terduga	2.065.423.140,00	2.065.423.140,00	0,00

5.4.2.5. Defisit Kegiatan Non Operasional

Defisit Kegiatan Non Operasional	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
	(39.000.172.538,89)	(13.263.844.787,78)

Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional adalah pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan dikelompokkan dalam kegiatan non operasional. Defisit Kegiatan Non Operasional sebesar Rp(39.000.172.538,89).

5.4.2.6. Surplus/Defisit Pos Luar Biasa

Defisit Pos Luar Biasa	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
	(2.065.423.140,00)	(2.413.029.129,00)

Defisit Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. Pos Luar Biasa - LO diakui pada saat hak atas pendapatan pos luar biasa timbul akibat ketidakpastian serta kejadian yang terjadi di luar kendali. Pada Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat realisasi Pendapatan Luar Biasa sebesar Rp0,00, dan Defisit Pos Luar Biasa sebesar Rp(2.065.423.140,00)

5.4.3. Surplus/Defisit - LO

Defisit- LO	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	(303.759.392.886,40)	333.959.156.939,56

Surplus/Defisit - LO merupakan selisih antara pendapatan - LO dengan beban. Pada tahun 2024 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat defisit - LO sebesar Rp(303.759.392.886,40)

5.5. Penjelasan Pos – Pos Laporan Arus Kas

5.5.1. Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

5.5.1.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Operasi	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	3.604.366.696.276,70	3.855.646.023.744,03

Arus Masuk Kas dari aktivitas operasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2024 sebesar Rp3.604.366.696.276,70 yang terdiri dari:

Tabel 5.283 Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Operasi

URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Pajak Daerah	1.777.704.385.140,00	1.631.489.164.580,00
Penerimaan Retribusi Daerah	10.634.618.841,00	12.203.621.186,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.904.909.335,00	2.449.330.649,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	30.108.755.601,70	31.323.464.050,03
Penerimaan dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.782.713.495.768,00	2.176.901.723.279,00

URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Hibah	1.300.531.591,00	1.278.720.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas	3.604.366.696.276,70	3.855.646.023.744,03

5.5.1.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Operasi	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	3.454.951.185.226,53	3.385.317.865.874,82

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau selama Tahun 2024 sebesar Rp3.454.951.185.226,53 terdiri dari:

Tabel 5.284 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pegawai	1.288.605.047.897,00	1.079.500.223.419,05
Pembayaran Barang dan Jasa	1.059.785.418.421,26	1.190.258.080.402,71
Pembayaran Bunga	3.692.560.273,00	8.623.436.793,00
Pembayaran Subsidi	944.301.180,00	4.143.883.000,00
Pembayaran Hibah	320.711.308.300,27	325.417.334.130,06
Pembayaran Bantuan Sosial	4.002.925.000,00	7.417.430.000,00
Pembayaran Tak Terduga	2.065.423.140,00	2.413.029.129,00
Pembayaran Bagi Hasil	748.291.201.015,00	759.191.867.087,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	26.853.000.000,00	8.352.581.914,00
Jumlah Arus Keluar Kas	3.454.951.185.226,53	3.385.317.865.874,82

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi adalah selisih dari Jumlah Arus Masuk Kas dikurangi dengan Jumlah Arus Keluar Kas sejumlah Rp149.415.511.050,17. Perbandingan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2024 dan 2023 adalah:

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	149.415.511.050,17	470.328.157.869,21

5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset Non-K keuangan lainnya.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

5.5.2.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Investasi	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
	0,00	1.842.358.888,00

Arus Masuk Kas dari aktivitas investasi selama Tahun 2024 Sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.285 Arus Masuk Kas dari aktivitas investasi

URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Masuk Kas		
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	1.842.358.888,00
Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	1.842.358.888,00

5.5.2.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Investasi	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
	244.970.648.614,02	565.801.995.124,59

Arus Keluar Kas dari aktivitas investasi selama tahun 2024 sebesar Rp244.970.648.614,02 merupakan pengeluaran uang untuk memperoleh aset tetap berupa: tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya (berupa aset tidak berwujud), dan aset lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.286 Arus Keluar Kas dari aktivitas investasi

URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Keluar Kas		
Perolehan Tanah	920.100.000,00	1.388.489.184,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	76.496.084.204,00	151.991.551.074,05
Perolehan Gedung dan Bangunan	129.103.961.833,55	232.962.878.105,59
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	36.791.762.576,47	178.551.126.080,95
Perolehan Aset Tetap Lainnya	1.658.740.000,00	529.474.380,00
Perolehan Aset Lainnya	0,00	378.476.300,00
Jumlah Arus Keluar Kas	244.970.648.614,02	565.801.995.124,59

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi adalah Rp(244.970.648.614,02). Perbandingan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun 2024 dan 2023 adalah:

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Tahun 2023	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
	(244.970.648.614,02)	(563.959.636.236,59)

5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Aktivitas Pendanaan adalah penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang, dan utang pemerintah daerah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran.

Arus Kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah daerah dan klaim pemerintah daerah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

5.5.3.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Masuk Kas dari Aktivitas pendanaan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	100.883.708,00	15.468.412.199,00

Arus Masuk Kas dari aktivitas pendanaan selama tahun 2024 sebesar Rp100.883.708,00 merupakan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dana bergulir, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.287 Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Pendanaan

URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	15.431.239.382,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	100.883.708,00	37.172.817,00
Jumlah Arus Masuk Kas	100.883.708,00	15.468.412.199,00

5.5.3.2. Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Arus Keluar Kas dari Aktivitas pendanaan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	91.945.787.633,00	66.266.646.018,00

Arus Keluar Kas dari aktivitas pendanaan selama Tahun 2024 sebesar Rp91.945.787.633,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.288 Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Pendanaan

URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Daerah	91.945.787.633,00	66.266.646.018,00
Jumlah Arus Keluar Kas	91.945.787.633,00	66.266.646.018,00

Arus kas bersih aktivitas pendanaan merupakan indikator untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah daerah dan klaim pemerintah daerah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari aktivitas pendanaan Tahun 2024 adalah sebesar Rp(91.844.903.925,00). Perbandingan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan tahun 2024 dan 2023 adalah:

Arus Kas Bersih Dari Aktivitas pendanaan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	(91.844.903.925,00)	(50.798.233.819,00)

5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan pemerintah daerah.

5.5.4.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Transitoris	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	212.531.012.053,25	246.895.945.634,00

Arus Masuk Kas dari aktivitas Transitoris selama tahun 2024 sebesar Rp212.531.012.053,25 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.289 Arus Masuk Kas dari aktivitas Transitoris

URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	212.522.600.526,00	246.800.531.830,00
UYHD TAHUN 2023	3.738.300,00	5.000.000,00
Pengembalian Jasa Giro Kas Lainnya Tahun 2023	2.941.227,25	233.804,00
Pengembalian Kas dari Bendahara Penerimaan	1.732.000,00	180.000,00
Pengembalian Dana Bos	0,00	90.000.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas	212.531.012.053,25	246.895.945.634,00

5.5.4.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Transitoris	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	212.541.878.445,06	246.808.943.357,25

Arus Keluar Kas dari aktivitas Transitoris selama tahun 2024 sebesar Rp212.541.878.445,06 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.290 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitor		
Arus Keluar Kas		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	212.522.600.526,00	246.800.531.830,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	1.732.000,00
Jasa Giro Kas Lainnya	236.913,06	2.941.227,25
UYHD TAHUN 2024	19.041.006,00	3.738.300,00
Jumlah Arus Keluar Kas	212.541.878.445,06	246.808.943.357,25

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris adalah Rp(10.866.391,81). Perbandingan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut:

	Tahun 2024	Tahun 2023
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	(Rp)	(Rp)
	(10.866.391,81)	87.002.276,75

5.5.5. Kenaikan/(Penurunan) Kas Bersih Selama Periode 2024

Kenaikan/(penurunan) Kas Bersih Selama Periode Tahun 2024 merupakan akumulasi jumlah kenaikan/(penurunan) kas bersih dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, Aktivitas Transitoris.

Selama Tahun Anggaran 2024 terjadi penurunan kas bersih sebesar Rp(187.410.907.880,66) yang terdiri dari Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp149.415.511.050,17, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar Rp(244.970.648.614,02), Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp(91.844.903.925,00) dan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp(10.866.391,81). Perbandingan Kenaikan/(Penurunan) Kas Bersih tahun 2024 dan 2023 adalah:

	Tahun 2024	Tahun 2023
Kenaikan/ (Penurunan) Kas Bersih	(Rp)	(Rp)
	(187.410.907.880,66)	(144.342.709.909,63)

5.5.6. Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2024

Saldo akhir kas per 31 Desember 2024 merupakan perhitungan Saldo Awal per 1 Januari 2024 ditambah (dikurangi) dengan kenaikan (penurunan) kas bersih selama periode tahun 2024.

Saldo akhir kas di BUD per 31 Desember 2024 sebesar Rp23.302.940.904,77 didapat dari perhitungan saldo awal Tahun 2024 sebesar Rp210.713.848.785,43 ditambah penurunan kas bersih selama periode tahun 2024 sebesar Rp((187.410.907.880,66).

Total Saldo Kas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Per 31 Desember 2024 sebesar Rp27.810.220.201,59 dengan rincian sebagai berikut :

- Saldo Akhir Kas di BUD	23.302.940.904,77
- Kas di Bendahara Penerimaan	0,00
- Kas di Bendahara Pengeluaran	19.041.006,00
- Kas di BLUD	2.264.885.131,34
- Kas Dana BOS	1.699.060.482,84
- Kas Lainnya	524.292.676,64
Saldo Akhir Kas	27.810.220.201,59

Perbandingan Saldo Akhir Kas 2024 dan 2023 adalah:

	Tahun 2024	Tahun 2023
Saldo Akhir Kas	(Rp)	(Rp)
	27.810.220.201,59	245.536.768.352,08

5.6. Penjelasan Pos – Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos:

- a) Ekuitas awal;
- b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;

- c) Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti:
1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;
 2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d) Ekuitas akhir

5.6.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	6.764.055.547.180,37	6.543.925.196.252,10

Pada Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat ekuitas awal sebesar Rp6.764.055.547.180,37 yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada laporan Tahun 2023. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Jumlah Aset Tahun 2023	7.267.412.399.621,54
- Jumlah Kewajiban Tahun 2023	503.356.852.441,17
Saldo Awal Ekuitas 2023	6.764.055.547.180,37

5.6.2. Surplus/Defisit– LO

Defisit LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	(303.759.392.886,40)	333.959.156.939,56

Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dalam Laporan Operasional Tahun 2024 tercatat sebesar Rp(303.759.392.886,40).

5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

Pada tahun 2024 Koreksi kesalahan nilai persediaan tercatat sebesar Rp10.136.600.251,81 dan lain-lain sebesar Rp(16.152.491.306,23).

5.6.4. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	6.454.280.263.239,55	6.764.055.547.180,37

Ekuitas Akhir sebesar Rp6.454.280.263.239,55 merupakan saldo kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara Total Aset dan Total Kewajiban Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.

- Jumlah Aset Tahun 2024	7.105.534.873.977,98
- Jumlah Kewajiban Tahun 2024	651.254.610.738,43
Saldo Akhir Ekuitas 2024	6.454.280.263.239,55

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH

6.1. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Terpilih Periode 2024-2029

Pada tanggal 9 September 2024 Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau terpilih periode 2024-2029, resmi dilantik. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan wakil rakyat tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna yang bertempat di Ruang Rapat Sidang Utama Balairung Raja Khalid, Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang. Rapat Paripurna dipimpin oleh Jumaga Nadeak, SH selaku Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau periode 2019-2024. Pelantikan ini sekaligus menandai peresmian pemberhentian pimpinan dan anggota DPRD periode 2019-2024. Namun, dari 45 (empat puluh lima) Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang terpilih, hanya 43 (empat puluh tiga) orang saja yang dilantik dan diambil sumpahnya. Anggota DPRD terpilih yang tidak dilantik tersebut adalah Nyanyang Haris Pratamura, S.E., M.Si. dari Partai Gerindra, yang mengajukan pengunduran diri untuk pencalonan sebagai pasangan calon pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau. Selain itu, Ery Suandi dari PDI Perjuangan juga mengajukan pengunduran diri untuk pencalonan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun.

Empat pimpinan definitif DPRD Provinsi Kepulauan Riau periode 2024-2029 dilantik dan diambil sumpah di DPRD Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 7 Oktober 2024 melalui rapat paripurna. Empat pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang dilantik berasal dari partai politik dengan suara terbanyak di DPRD Provinsi Kepulauan Riau hasil Pemilu 2024. Berikut nama-nama Pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Riau:

1. H.Iman Sutiawan,SE– Ketua DPRD dari Partai Gerindra
2. Dra. Dewi Kumalasari, M.Pd.– Wakil Ketua I dari Partai Golkar
3. dr. T. Afrizal Dachlan,M.M – Wakil Ketua II dari Partai Nasdem
4. H. Bahktiar, M.A.– Wakil Ketua II dari Partai Keadilan Sejahtera

Selain pelantikan pimpinan, DPRD Provinsi Kepulauan Riau juga telah mengesahkan 7 (tujuh) fraksi yang akan bertugas selama periode 2024-2029. Empat diantaranya fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Riau ini merupakan fraksi utuh, yaitu:

1. Fraksi Partai Gerindra
2. Fraksi Partai Golkar
3. Fraksi Partai Nasdem
4. Fraksi Partai PKS
5. Fraksi Demokrat Nurani Indonesia
6. Fraksi Partai PDI Perjuangan
7. Fraksi Amanat Nasional Kebangkitan Bangsa

Melalui Paripurna pada tanggal 9 Oktober 2024, terbentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Dalam Paripurna ini DPRD Provinsi Kepulauan Riau mengesahkan Struktural Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan yang ada di DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Keberadaan AKD diatur melalui Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah, yang meliputi:

1. Komisi
2. Badan Musyawarah (Banmus)
3. Badan Anggaran (Banggar)
4. Badan Pembentukan Perda
5. Badan Kehormatan

Dengan dibentuknya AKD DPRD Provinsi Kepulauan Riau tentunya akan meningkatkan peran DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Kepulauan Riau.

6.2. Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 merupakan salah satu instrumen yang digunakan oleh bangsa Indonesia dalam mewujudkan pilar-pilar demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 merupakan sebuah instrumen sebagai mekanisme pendelegasian kedaulatan rakyat. Pada tahun 2024 dilaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi Kepulauan Riau dengan 2 (dua) Pasangan Calon peserta Pemilihan dimana Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dengan Calon Gubernur Ansar Ahmad, SE., MM dan Calon Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura, S.E., M.Si. yang diusung oleh 10 (sepuluh) partai pengusung diantaranya yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, Parta Gerindra, Partai Golkar, Partai Gelora, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai UMMAT. Sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yaitu H. Muhammad Rudi sebagai calon Gubernur dan Dr. H. Aunur Rafiq, S.Sos., M.Si sebagai Calon Wakil Gubernur dengan jumlah 3 (tiga) partai pengusung diantaranya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Nasdem dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Provinsi Kepulauan Riau memiliki jumlah daftar pemilih sebanyak 1.559.727 Pemilih, diantaranya 781.654 pemilih laki-laki dan 778.073 pemilih perempuan Total jumlah TPS yang tersebar di sejumlah wilayah di Provinsi Kepulauan Riau yaitu sebanyak 3.327 TPS. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 107 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2024 terdapat 817.476 pengguna surat suara sah dan terdapat 34.253 jumlah surat suara tidak sah dengan total surat suara yang digunakan 851.729. Dan hasil perolehan suara untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 (satu) atas nama Ansar Ahmad, SE., MM dan Nyanyang Haris Pratamura, S.E., M.Si dengan perolehan surat suara sah sebanyak 450.109 dan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 (dua) atas nama H. Muhammad Rudi- Dr. H. Aunur Rafiq, S.Sos., M.Si dengan perolehan suara sah sebanyak 367.367.

Provinsi Kepulauan Riau memiliki jumlah daftar pemilih sebanyak 1.559.727 Pemilih, diantaranya 781.654 pemilih laki-laki dan 778.073 pemilih perempuan. Total jumlah TPS yang tersebar di sejumlah wilayah di Provinsi Kepulauan Riau yaitu sebanyak 3.327 TPS. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 107 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2024 terdapat 817.476 pengguna surat suara sah dan terdapat 34.253 jumlah surat suara tidak sah dengan total surat suara yang digunakan 851.729. Dan hasil perolehan suara untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 (satu) atas nama Ansar Ahmad, SE., MM dan Nyanyang Haris Pratamura, S.E., M.Si dengan perolehan surat suara sah sebanyak 450.109 dan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 (dua) atas nama H. Muhammad Rudi- Dr. H. Aunur Rafiq, S.Sos., M.Si dengan perolehan suara sah sebanyak 367.367.

Pada tanggal 9 Januari 2025, bertempat di Trans Convention Centre Hotel Aston Tanjungpinang, telah berlangsung Rapat Pleno Terbuka untuk menetapkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau terpilih. Dalam rapat pleno tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Riau mengumumkan pasangan Ansar Ahmad-Nyanyang Haris Pratamura sebagai pemenang Pilkada Kepri 2024 dengan perolehan suara terbanyak, yaitu 450.109 suara. Dengan demikian, pasangan Ansar Ahmad, SE., MM dan Nyanyang Haris Pratamura, S.E., M.Si resmi ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau periode 2025-2030.

Setelah dilakukannya pembacaan Berita Acara Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau. Setelah itu, dilakukan penandatanganan Berita Acara oleh Ketua, Sekretariat, dan Anggota KPU, serta penyerahan petikan Surat Keputusan (SK) penetapan kepada pasangan Ansar Ahmad, SE., MM dan Nyanyang Haris Pratamura, S.E., M.Si sebagai pasangan calon yang terpilih. Secara Umum Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Kepulauan Riau berjalan kondusif dan lancar hingga akhir tahapan Pemilihan selesai.

BAB VII

PENUTUP

Proses Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimulai dengan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah tentunya harus dilaksanakan secara tertib dan akuntabel. Pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 disusun sebagai salah satu bentuk akuntabilitas atas pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan rujukan utama Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Melalui proses penyusunan dan penyajian konsolidasi dari laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi, proses penyesuaian dan harmonisasi dilakukan dengan merujuk Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau agar terwujud Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang memadai sesuai ketentuan.

Akhir kata, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengharapkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dapat memenuhi kewajiban kami dalam melaporkan dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada para *stakeholders* dan berguna bagi pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah pada tahun berikutnya.

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

dto

ANSAR AHMAD



PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	SKPD	JENIS PIUTANG	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6	7=(4+5+6)
1	Badan Pendapatan Daerah	Piutang Pajak Daerah	89.871.468.322,00	1.655.526.670.090,00	(1.645.780.015.781,00)	99.618.122.631,00
2	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	Piutang Retribusi Daerah	96.950.405,00	306.084.753,00	(69.565.405,00)	333.469.753,00
3	Piutang Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	Piutang Retribusi Daerah	3.779.502.515,00	114.778.316.623,00	(107.616.945.115,00)	10.940.874.023,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Piutang Retribusi Daerah	121.705.500,00	2.250.000,00	0,00	123.955.500,00
5	Dinas Perhubungan	Piutang Retribusi Daerah	0,00	39.417.700,00	0,00	39.417.700,00
6	Badan Pendapatan Daerah	Piutang Lain-lain PAD yang Sah (Piutang Pendapatan Denda Pajak)	18.178.254.908,12	35.651.555.341,00	(35.672.519.366,00)	18.157.290.883,12
7	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Piutang Lain-lain PAD yang Sah (Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah)	667.200,00	0,00	0,00	667.200,00
8	Dinas Perhubungan	Piutang Lain-lain PAD yang Sah (Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah)	0,20	489.938,00	0,00	489.938,20
9	Dinas Pendidikan	Piutang Lain-lain PAD yang Sah (Piutang Pendapatan dari Pengembalian)	0,00	21.725.000,00	0,00	21.725.000,00
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Piutang Lainnya	96.250.000,00	0,00	0,00	96.250.000,00
Jumlah			112.144.798.850,32	1.806.326.509.445,00	(1.789.139.045.667,00)	129.332.262.628,32

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

dto

ANSAR AHMAD



PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	JENIS PIUTANG	JUMLAH PIUTANG	JUMLAH PENYISIHAN	JUMLAH PIUTANG BERSIH
1	2	3	4	5
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	99.618.122.631,00	46.281.323.152,41	53.336.799.478,59
2	Penyisihan Piutang Retribusi	11.437.716.976,00	2.464.841.332,73	8.972.875.643,27
3	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah			
	- Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak	18.157.290.883,12	18.105.318.343,12	51.972.540,00
	- Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi	1.157.138,00	336.049,69	821.088,31
	Saldo Akhir Penyisihan Piutang	129.214.287.628,12	66.851.818.877,95	62.362.468.750,17

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

dto

ANSAR AHMAD



LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2024

PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR
DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	SKPD	JUMLAH DANA BERGULIR	JUMLAH PENYISIHAN DANA BERGULIR	JUMLAH PIUTANG BERSIH
1	2	3	4	5
1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	18.198.063.868,00	(18.198.063.868,00)	0,00
2	Dinas Kelauatan dan Perikanan	15.953.332.709,52	(15.953.332.709,52)	0,00
3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	382.288.894,00	(382.288.894,00)	0,00
	SALDO AKHIR DANA BERGULIR	34.533.685.471,52	(34.533.685.471,52)	0,00

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

dto

ANSAR AHMAD



LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN
ANGGARAN 2024

PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DAFTAR PEYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/ Lembaga / Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan	Bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Jumlah Penyertaan Modal Daerah	Jumlah Modal yang Telah Disertakan Sampai dengan Awal Tahun	Penyertaan Modal Tahun Ini	Jumlah Modal yang Disertakan Sampai dengan Akhir Tahun Ini	Sisa Modal Yang Belum Disertakan	Hasil Penyertaan Modal Daerah Tahun Ini	Jumlah Modal yang Diterima Kembali Tahun Ini	Jumlah Sisa Modal yang Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7+8	10 = 6-9	11	12	13 =9-12
1		Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Kepri	Perda No. 6 Tahun 2021	Penyertaan Modal, Pinjaman, Hibah, Sumber Modal Lainnya	25.000.000.000,00	13.999.000.000,00	0,00	13.999.000.000,00	11.001.000.000,00	34.093.914,00	0,00	13.999.000.000,00
2		Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kepri	Perda No. 3 Tahun 2020	Penyertaan Modal, Pinjaman, Hibah, Sumber Modal Lainnya	900.000.000.000,00	121.303.871.063,00	0,00	121.303.871.063,00	778.696.128.937,00	(3.122.555.359,00)	0,00	121.303.871.063,00
3		Perusahaan Perseroan Daerah Pelabuhan Kepri	Perda No. 7 Tahun 2021	Penyertaan Modal, Pinjaman, Hibah, Sumber Modal Lainnya	190.000.000.000,00	48.303.490.000,00	0,00	48.303.490.000,00	141.696.510.000,00	(1.520.030.238,00)	0,00	48.303.490.000,00
4		Bank Riau Kepri	Perda No. 2 Tahun 2011	Penyertaan Modal	100.000.000.000,00	12.000.000.000,00	0,00	12.000.000.000,00	88.000.000.000,00	1.904.909.335,00	0,00	12.000.000.000,00
		JUMLAH			1.215.000.000.000,00	195.606.361.063,00	0,00	195.606.361.063,00	1.019.393.638.937,00	-2.703.582.348,00	0,00	195.606.361.063,00

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

dto

ANSAR AHMAD



PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN
ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Uraian	Sado Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6 = (3 + 4 + 5)
1	TANAH	1.242.532.489.774,32	47.592.699.962,00	(10.931.648.000,00)	1.279.193.541.736,32
	terdiri dari :				
	Dinas Pendidikan	166.898.776.224,70	45.347.084.280,00	-	212.245.860.504,70
	Dinas Kesehatan	540.274.100,00	-	-	540.274.100,00
	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	-	-	-	-
	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	2.000.000.000,00	-	-	2.000.000.000,00
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	758.943.654.627,97	920.100.000,00	-	759.863.754.627,97
	Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	-	-	-	-
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-
	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	-	-	-	-
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.915.000.000,00	-	-	6.915.000.000,00
	Dinas Sosial	-	-	-	-
	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	-	-	-	-
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	1.753.500.000,00	-	-	1.753.500.000,00
	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	2.774.880.000,00	-	-	2.774.880.000,00
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.309.166.300,00	-	-	1.309.166.300,00
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-
	Dinas Perhubungan	50.214.916.983,00	-	-	50.214.916.983,00
	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	-
	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-	-	-	-
	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-	-	-	-
	Dinas Kebudayaan	-	-	-	-
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	-
	Dinas Kelautan dan Perikanan	968.088.400,00	1.059.261.600,00	-	2.027.350.000,00
	Dinas Pariwisata	2.579.000.000,00	-	-	2.579.000.000,00
	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	-
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-
	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	-	-	-	-
	Biro Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-
	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-
	Biro Perekonomian dan Pembangunan	-	-	-	-
	Biro Organisasi	-	-	-	-
	Biro Administrasi Pimpinan	-	-	-	-
	Biro Umum	-	-	-	-
	Biro Hukum	-	-	-	-
	Inspektorat Daerah	-	-	-	-
	Badan Keuangan dan Aset Daerah	209.338.936.648,65	-	(10.931.648.000,00)	198.407.288.648,65
	Badan Pendapatan Daerah	8.696.296.490,00	266.254.082,00	-	8.962.550.572,00
	Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	-	-	-	-
	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	-	-	-
	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-	-	-
	Sekretariat DPRD	-	-	-	-
	Badan Penghubung Daerah	29.600.000.000,00	-	-	29.600.000.000,00
	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	-	-	-	-
2	PERALATAN DAN MESIN	2.023.580.374.784,91	172.102.966.388,31	(55.542.739.948,92)	2.140.140.601.224,30
	Terdiri dari :				
	Dinas Pendidikan	606.376.275.896,28	92.172.172.464,91	12.485.594.864,00	711.034.043.225,19
	Dinas Kesehatan	58.605.426.772,60	5.516.616.128,00	(5.422.215.850,00)	58.699.827.050,60
	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	342.323.581.094,53	7.341.270.829,00	(18.613.339.284,00)	331.051.512.639,53
	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	121.694.646.249,00	8.926.904.000,00	(14.157.686.579,00)	116.463.863.670,00
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	29.242.674.458,00	4.893.115.387,70	(3.980.465.387,70)	30.155.324.458,00
	Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	4.586.555.195,00	1.534.095.960,00	-	6.120.651.155,00
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.695.635.483,00	1.042.829.000,00	(226.580.000,00)	6.511.884.483,00
	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	9.162.929.335,00	574.276.100,00	(102.110.000,00)	9.635.095.435,00
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15.835.232.576,00	72.790.000,00	(352.988.287,00)	15.555.034.289,00
	Dinas Sosial	3.611.149.575,00	1.273.370.000,00	(740.000,00)	4.883.779.575,00
	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	3.856.944.539,00	377.354.000,00	(23.060.000,00)	4.211.238.539,00
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.949.023.686,00	27.690.000,00	-	5.976.713.686,00

No.	Uraian	Sado Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6 = (3 + 4 + 5)
	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	32.836.826.581,22	2.667.471.600,00	(50.441.729,72)	35.453.856.451,50
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	18.567.440.963,76	2.055.400.000,00	(297.225.088,00)	20.325.615.875,76
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.301.721.775,00	190.989.953,00	(278.004.721,00)	9.214.707.007,00
	Dinas Perhubungan	45.760.749.252,51	2.632.012.844,00	(2.078.711.844,00)	46.314.050.252,51
	Dinas Komunikasi dan Informatika	21.562.427.923,00	1.010.065.000,00	(354.877.900,00)	22.217.615.023,00
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.088.259.865,00	114.448.285,00	-	5.202.708.150,00
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.578.327.872,00	2.000.000,00	-	8.580.327.872,00
	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	10.759.569.553,00	16.430.000,00	-	10.775.999.553,00
	Dinas Kebudayaan	6.266.828.500,00	4.747.610.387,70	(285.354.774,00)	10.729.084.113,70
	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	20.370.240.992,00	96.080.000,00	(62.450.000,00)	20.403.870.992,00
	Dinas Kelautan dan Perikanan	73.560.933.283,03	1.733.288.821,00	(5.406.235.723,50)	69.887.986.380,53
	Dinas Pariwisata	5.803.339.413,00	88.950.000,00	(53.432.500,00)	5.838.856.913,00
	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	8.466.470.764,10	1.811.784.300,00	-	10.278.255.064,10
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8.268.995.091,00	601.084.035,00	-	8.870.079.126,00
	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.078.356.355,00	279.815.000,00	-	4.358.171.355,00
	Biro Kesejahteraan Rakyat	4.004.688.869,00	265.983.000,00	-	4.270.671.869,00
	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	5.783.397.207,06	142.335.200,00	-	5.925.732.407,06
	Biro Perekonomian dan Pembangunan	5.026.034.102,00	-	-	5.026.034.102,00
	Biro Organisasi	2.036.575.225,00	278.050.000,00	(30.000.000,00)	2.284.625.225,00
	Biro Administrasi Pimpinan	11.069.279.170,50	173.420.400,00	-	11.242.699.570,50
	Biro Umum	284.278.871.078,00	12.708.677.788,00	(4.352.818.450,00)	292.634.730.416,00
	Biro Hukum	2.023.793.807,00	158.616.000,00	-	2.182.409.807,00
	Inspektorat Daerah	11.261.179.994,20	1.613.974.200,00	-	12.875.154.194,20
	Badan Keuangan dan Aset Daerah	31.232.461.004,00	837.922.058,00	(5.367.910.176,00)	26.702.472.886,00
	Badan Pendapatan Daerah	52.879.032.146,95	4.625.211.110,00	(1.975.002.437,00)	55.529.240.819,95
	Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	8.376.837.873,00	67.679.000,00	(824.000,00)	8.443.692.873,00
	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	4.139.262.448,67	343.330.000,00	(2.720.000,00)	4.479.872.448,67
	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	15.994.839.987,50	730.345.537,00	(2.595.750.772,00)	14.129.434.752,50
	Sekretariat DPRD	84.702.381.365,00	3.485.550.000,00	(1.707.475.155,00)	86.480.456.210,00
	Badan Penghubung Daerah	13.467.694.764,00	4.871.958.000,00	(249.914.155,00)	18.089.738.609,00
	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	1.093.482.700,00	-	-	1.093.482.700,00
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	2.704.114.608.690,98	238.917.259.508,09	(64.293.453.428,26)	2.878.738.414.770,81
	Terdiri dari :				
	Dinas Pendidikan	1.049.728.589.566,45	104.544.292.647,78	(1.007.958.715,70)	1.153.264.923.498,53
	Dinas Kesehatan	21.972.504.623,52	664.935.378,00	-	22.637.440.001,52
	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	250.818.785.770,84	20.035.506.075,28	(158.140.633,56)	270.696.151.212,56
	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	46.490.355.566,00	488.166.394,00	-	46.978.521.960,00
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	98.424.639.915,36	39.174.488.796,00	(60.539.625.408,00)	77.059.503.303,36
	Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	554.462.531.236,04	15.293.080.840,00	(268.973.000,00)	569.486.639.076,04
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	89.965.000,00	-	-	89.965.000,00
	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	5.287.098.342,30	-	-	5.287.098.342,30
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.888.901.918,48	-	(360.692.695,00)	2.528.209.223,48
	Dinas Sosial	5.116.692.359,00	-	-	5.116.692.359,00
	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2.002.648.000,00	-	-	2.002.648.000,00
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	624.390.200,00	-	-	624.390.200,00
	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	33.900.770.933,51	1.283.041.381,00	-	35.183.812.314,51
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.267.797.894,00	-	-	3.267.797.894,00
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-
	Dinas Perhubungan	351.312.476.390,61	2.780.120.955,06	-	354.092.597.345,67
	Dinas Komunikasi dan Informatika	736.923.281,00	-	-	736.923.281,00
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	49.615.984,00	-	-	49.615.984,00
	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	78.416.217,00	-	-	78.416.217,00
	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	56.511.442.963,23	456.867.905,00	(309.705.376,00)	56.658.605.492,23
	Dinas Kebudayaan	29.457.600.754,00	31.245.198.477,30	-	60.702.799.231,30
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12.609.362.017,00	-	-	12.609.362.017,00
	Dinas Kelautan dan Perikanan	40.229.892.771,15	10.003.621.977,79	(536.557.600,00)	49.696.957.148,94
	Dinas Pariwisata	5.991.000.801,00	-	(987.000.000,00)	5.004.000.801,00
	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	7.922.978.059,22	634.688.237,88	-	8.557.666.297,10
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	137.400.000,00	-	-	137.400.000,00
	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	373.623.000,00	-	-	373.623.000,00
	Biro Kesejahteraan Rakyat	8.188.125.164,00	-	-	8.188.125.164,00
	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	2.510.453.750,00	-	-	2.510.453.750,00
	Biro Perekonomian dan Pembangunan	-	-	-	-
	Biro Organisasi	-	-	-	-
	Biro Administrasi Pimpinan	2.121.021.650,00	-	-	2.121.021.650,00
	Biro Umum	10.743.149.796,63	-	-	10.743.149.796,63
	Biro Hukum	-	-	-	-
	Inspektorat Daerah	-	-	-	-
	Badan Keuangan dan Aset Daerah	45.463.347.933,71	-	-	45.463.347.933,71
	Badan Pendapatan Daerah	41.738.650.488,00	124.800.000,00	(124.800.000,00)	41.738.650.488,00
	Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	-	-	-	-
	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	-	-	-

No.	Uraian	Sado Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6 = (3 + 4 + 5)
	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-	-	-
	Sekretariat DPRD	5.321.872.144,93	-	-	5.321.872.144,93
	Badan Penghubung Daerah	7.541.584.200,00	12.188.450.443,00	-	19.730.034.643,00
	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	-	-	-	-
4	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	3.966.635.637.433,47	49.840.336.125,68	(4.911.440.421,00)	4.011.564.533.138,15
	terdiri dari				
	Dinas Pendidikan	13.284.230.830,00	1.281.511.130,00	-	14.565.741.960,00
	Dinas Kesehatan	1.021.326.000,01	-	-	1.021.326.000,01
	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	12.279.215.917,36	-	-	12.279.215.917,36
	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	6.622.895.500,00	99.140.000,00	-	6.722.035.500,00
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	2.843.244.699.742,17	38.586.229.834,37	(973.176.550,00)	2.880.857.753.026,54
	Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	285.529.806.445,68	268.973.000,00	-	285.798.779.445,68
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.996.000,00	-	-	9.996.000,00
	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	208.622.000,00	-	-	208.622.000,00
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	516.959.431,07	-	-	516.959.431,07
	Dinas Sosial	20.185.000,00	-	-	20.185.000,00
	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	600.927.000,00	-	-	600.927.000,00
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	429.594.968,00	-	-	429.594.968,00
	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	25.196.931.434,36	-	-	25.196.931.434,36
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	99.880.000,00	-	-	99.880.000,00
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00
	Dinas Perhubungan	288.082.610.044,55	-	(2.113.180.550,00)	285.969.429.494,55
	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.453.564.535,00	-	-	7.453.564.535,00
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	108.334.000,00	-	-	108.334.000,00
	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	34.007.500,00	-	-	34.007.500,00
	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	913.481.510,00	329.141.476,00	-	1.242.622.986,00
	Dinas Kebudayaan	866.460.646,00	-	-	866.460.646,00
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	790.008.400,00	-	-	790.008.400,00
	Dinas Kelautan dan Perikanan	9.268.277.275,47	566.083.553,10	(381.232.021,00)	9.453.128.807,57
	Dinas Pariwisata	5.351.707.445,00	-	-	5.351.707.445,00
	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	273.080.647.529,09	8.709.257.132,21	(1.443.851.300,00)	280.346.053.361,30
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12.283.800,00	-	-	12.283.800,00
	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	-	-	-	-
	Biro Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-
	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	965.050.893,69	-	-	965.050.893,69
	Biro Perekonomian dan Pembangunan	7.630.000,00	-	-	7.630.000,00
	Biro Organisasi	-	-	-	-
	Biro Administrasi Pimpinan	-	-	-	-
	Biro Umum	16.957.200.066,00	-	-	16.957.200.066,00
	Biro Hukum	-	-	-	-
	Inspektorat Daerah	-	-	-	-
	Badan Keuangan dan Aset Daerah	171.687.192.620,02	-	-	171.687.192.620,02
	Badan Pendapatan Daerah	1.358.823.900,00	-	-	1.358.823.900,00
	Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	19.825.000,00	-	-	19.825.000,00
	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	-	-	-
	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	44.858.000,00	-	-	44.858.000,00
	Sekretariat DPRD	556.989.000,00	-	-	556.989.000,00
	Badan Penghubung Daerah	8.415.000,00	-	-	8.415.000,00
	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	-	-	-	-
5	ASET TETAP LAINNYA	260.235.633.980,32	22.512.018.697,38	(3.528.915.375,00)	279.218.737.302,70
	terdiri dari :				
	Dinas Pendidikan	130.709.358.576,41	20.947.632.797,38	(1.394.990.000,00)	150.262.001.373,79
	Dinas Kesehatan	1.123.552.174,10	-	-	1.123.552.174,10
	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	640.455.426,00	-	-	640.455.426,00
	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	181.700.600,00	-	-	181.700.600,00
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	6.457.907.399,99	-	-	6.457.907.399,99
	Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	70.822.930.854,30	-	-	70.822.930.854,30
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.500.000,00	-	-	9.500.000,00
	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	247.771.000,00	-	-	247.771.000,00
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-
	Dinas Sosial	983.027.000,00	-	-	983.027.000,00
	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	-	-	-	-
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	863.728.100,00	-	-	863.728.100,00
	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	949.882.950,00	-	(6.759.375,00)	943.123.575,00
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	78.580.852,00	-	-	78.580.852,00
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-
	Dinas Perhubungan	359.961.364,00	-	-	359.961.364,00
	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-

No.	Uraian	Sado Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6 = (3 + 4 + 5)
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	69.529.600,00	-	-	69.529.600,00
	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	650.659.380,00	-	-	650.659.380,00
	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	187.710.000,00	-	-	187.710.000,00
	Dinas Kebudayaan	2.783.622.620,00	-	(1.144.418.000,00)	1.639.204.620,00
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	25.006.128.274,52	-	-	25.006.128.274,52
	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.554.386.800,00	-	-	1.554.386.800,00
	Dinas Pariwisata	6.004.112.000,00	-	(623.948.000,00)	5.380.164.000,00
	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	12.870.000,00	-	-	12.870.000,00
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	129.134.960,00	581.637.900,00	-	710.772.860,00
	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	-	-	-	-
	Biro Kesejahteraan Rakyat	106.480.000,00	-	-	106.480.000,00
	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	12.100.000,00	-	-	12.100.000,00
	Biro Perekonomian dan Pembangunan	-	-	-	-
	Biro Organisasi	45.380.000,00	-	-	45.380.000,00
	Biro Administrasi Pimpinan	-	-	-	-
	Biro Umum	7.498.933.579,00	-	-	7.498.933.579,00
	Biro Hukum	248.491.270,00	-	-	248.491.270,00
	Inspektorat Daerah	236.708.000,00	-	-	236.708.000,00
	Badan Keuangan dan Aset Daerah	256.584.900,00	-	-	256.584.900,00
	Badan Pendapatan Daerah	75.639.000,00	-	-	75.639.000,00
	Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	71.697.600,00	-	-	71.697.600,00
	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	-	-	-
	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	24.500.000,00	-	-	24.500.000,00
	Sekretariat DPRD	1.473.896.900,00	358.800.000,00	(358.800.000,00)	1.473.896.900,00
	Badan Penghubung Daerah	358.712.800,00	623.948.000,00	-	982.660.800,00
	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	-	-	-	-
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	44.722.208.283,85	624.104.203,05	(20.050.503.821,96)	25.295.808.664,94
	terdiri dari :				
	Dinas Pendidikan	5.087.400.607,95	8,05	(273.575.550,00)	4.813.825.066,00
	Dinas Kesehatan	-	-	-	-
	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	13.159.275.191,96	-	(12.236.072.691,96)	923.202.500,00
	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	34.870.000,00	-	-	34.870.000,00
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	16.378.131.639,04	325.410.375,00	(7.174.830.580,00)	9.528.711.434,04
	Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	875.342.000,00	199.280.000,00	-	1.074.622.000,00
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-
	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	-	-	-	-
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-
	Dinas Sosial	29.977.200,00	-	-	29.977.200,00
	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	-	-	-	-
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	-	-	-	-
	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	184.467.000,00	-	-	184.467.000,00
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-	-
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-
	Dinas Perhubungan	4.642.188.844,90	-	(298.100.000,00)	4.344.088.844,90
	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	-
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-
	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-	-	-	-
	Dinas Kebudayaan	4.250.805.800,00	-	-	4.250.805.800,00
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	-
	Dinas Kelautan dan Perikanan	67.925.000,00	99.413.820,00	(67.925.000,00)	99.413.820,00
	Dinas Pariwisata	-	-	-	-
	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	11.825.000,00	-	-	11.825.000,00
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-
	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	-	-	-	-
	Biro Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-
	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-
	Biro Perekonomian dan Pembangunan	-	-	-	-
	Biro Organisasi	-	-	-	-
	Biro Administrasi Pimpinan	-	-	-	-
	Biro Umum	-	-	-	-
	Biro Hukum	-	-	-	-
	Inspektorat Daerah	-	-	-	-
	Badan Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	-
	Badan Pendapatan Daerah	-	-	-	-
	Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	-	-	-	-
	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	-	-	-
	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-	-	-
	Sekretariat DPRD	-	-	-	-
	Badan Penghubung Daerah	-	-	-	-
	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	-	-	-	-
7	AKUMULASI PENYUSUTAN	4.176.976.245.412,62	432.081.168.614,73	(59.240.937.298,64)	4.549.816.476.728,71

No.	Uraian	Sado Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6 = (3 + 4 + 5)
	terdiri dari :				
	Dinas Pendidikan	558.249.814.723,20	102.652.457.009,35	(331.979,85)	660.901.939.752,70
	Dinas Kesehatan	59.582.017.059,00	1.697.156.401,48	(1.222.897.869,64)	60.056.275.590,84
	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	286.685.136.384,18	41.160.178.733,22	(18.527.749.170,43)	309.317.565.946,97
	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	101.129.717.721,00	11.905.876.384,21	(14.077.100.619,11)	98.958.493.486,10
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	1.478.757.599.549,63	171.488.582.743,80	(402.423.906,11)	1.649.843.758.387,32
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	370.907.955.654,14	17.508.535.714,54	(2.055.465.207,76)	386.361.026.160,92
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.172.788.462,00	1.350.355.957,32	(225.900.000,00)	5.297.244.419,32
	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	7.610.107.628,00	622.040.634,73	(2.363.464,72)	8.229.784.798,01
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15.551.543.594,00	597.749.416,96	(480.433.046,91)	15.668.859.964,05
	Dinas Sosial	4.151.511.272,00	501.221.761,11	(729.859,40)	4.652.003.173,71
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.136.216.214,00	208.956.389,60	(37,46)	4.345.172.566,14
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	5.727.889.655,00	306.832.906,49	-	6.034.722.561,49
	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	48.379.739.997,22	3.703.956.644,86	(131.091.596,89)	51.952.605.045,19
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	17.912.104.675,00	729.721.335,04	(297.225.088,00)	18.344.600.922,04
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.208.545.822,00	433.220.819,48	(225.900.000,00)	8.415.866.641,48
	Dinas Perhubungan	280.048.990.402,50	23.831.293.829,92	(598.560.068,65)	303.281.724.163,77
	Dinas Komunikasi dan Informatika	22.283.889.658,00	1.589.566.398,01	(312.026.390,45)	23.561.429.665,56
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.552.960.066,00	251.569.686,03	(224,82)	4.804.529.527,21
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.570.192.006,00	681.456.755,35	(1,85)	7.251.648.759,50
	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	13.529.269.759,00	2.102.491.700,23	(77.099,67)	15.631.684.359,56
	Dinas Kebudayaan	12.945.413.904,00	2.215.191.519,65	(228.488.749,30)	14.932.116.674,35
	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	24.318.667.750,00	629.933.690,22	(53.200.009,80)	24.895.401.430,42
	Dinas Kelautan dan Perikanan	70.684.267.818,05	4.836.837.034,88	(6.019.913.240,95)	69.501.191.611,98
	Dinas Pariwisata	8.402.748.760,00	509.665.773,80	(361.047.500,55)	8.551.367.033,25
	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	79.991.043.365,00	7.815.032.061,98	(66.330.056,51)	87.739.745.370,47
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6.963.797.904,00	778.974.300,91	-	7.742.772.204,91
	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	3.850.577.916,00	1.479.300.270,67	(1.203.598.797,00)	4.126.279.389,67
	Biro Kesejahteraan Rakyat	4.898.458.123,00	487.734.544,55	(8,12)	5.386.192.659,43
	Biro Pengadaan Barang/Jasa	6.101.511.511,00	417.678.492,67	(1,11)	6.519.190.002,56
	Biro Perekonomian dan Pembangunan	4.553.503.859,00	198.904.484,71	(39,80)	4.752.408.303,91
	Biro Organisasi dan Korpri	1.747.552.590,00	126.946.819,33	(1,00)	1.874.499.408,33
	Biro Administrasi Pimpinan	10.560.018.314,50	486.710.877,61	(39,90)	11.046.729.152,21
	Biro Umum	267.992.351.147,00	9.291.712.506,05	(1.599.680.756,00)	275.684.382.897,05
	Biro Hukum	1.932.792.045,00	47.187.407,42	(1,00)	1.979.979.451,42
	Inspektorat	7.738.140.226,00	1.207.053.628,64	(71,42)	8.945.193.783,22
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	207.133.256.572,70	3.142.289.028,23	(4.783.860.648,70)	205.491.684.952,23
	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	51.828.457.637,00	5.588.364.431,54	(1.930.672.548,80)	55.486.149.519,74
	Badan Kepegawaian dan Korpri	7.109.079.841,00	477.005.701,45	(0,33)	7.586.085.542,12
	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.342.992.889,00	708.234.408,10	(2.292.527,51)	2.048.934.769,59
	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	13.558.928.038,50	1.073.118.582,11	(2.578.674.502,00)	12.053.372.118,61
	Sekretariat DPRD	76.050.021.970,00	3.503.541.451,48	(1.684.276.953,26)	77.869.286.468,22
	Badan Penghubung Daerah	8.949.323.695,00	3.521.881.464,49	(168.625.213,86)	12.302.579.945,63
	Badan Pengelola Perbatasan	175.349.235,00	214.648.912,51	-	389.998.147,51
	JUMLAH	6.064.844.707.535,23	99.508.216.269,78	(100.017.763.696,50)	6.064.335.160.108,51

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

dto

ANSAR AHMAD



PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Uraian	Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2023	Mutasi		Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024
			Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6
1	Tanah	1.242.532.489.774,32	171.781.085.158,97	135.120.033.196,97	1.279.193.541.736,32
2	Peralatan dan Mesin	2.023.580.374.784,91	209.110.938.790,31	117.521.902.078,92	2.115.169.411.496,30
3	Gedung dan Bangunan	2.704.114.608.690,98	282.000.571.349,73	107.376.765.269,90	2.878.738.414.770,81
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.966.635.637.433,47	136.191.068.446,79	91.262.172.742,11	4.011.564.533.138,15
5	Aset Tetap Lainnya	260.235.633.980,32	22.512.018.697,38	3.528.915.375,00	279.218.737.302,70
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	44.722.208.283,85	624.104.203,05	20.050.503.821,96	25.295.808.664,94
7	Akumulasi Penyusutan	(4.176.976.245.412,62)	(432.581.262.586,71)	(59.741.031.270,62)	(4.549.816.476.728,71)
Jumlah		6.064.844.707.535,23	389.638.524.059,52	415.119.261.214,24	6.039.363.970.380,51

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

dto

ANSAR AHMAD



PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN
PER 31 DESEMBER 2024

No.	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI								REKLASIFIKASI/P ENGHAPUSAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2024
			BERTAMBAH				BERKURANG					
			ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN	ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Dinas Pendidikan	1.070.824.267,95		8,05				273.575.550,00				797.248.726,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	13.159.275.191,96						12.236.072.691,96				923.202.500,00
3	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	34.870.000,00										34.870.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	20.494.187.979,04			325.410.375,00				2.029.318.080,00		5.145.512.500,00	13.644.767.774,04
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	775.862.000,00		199.280.000,00								975.142.000,00
6	Dinas Sosial	29.977.200,00										29.977.200,00
7	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	184.467.000,00										184.467.000,00
8	Dinas Perhubungan	4.642.188.844,90									298.100.000,00	4.344.088.844,90
9	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-										-
10	Dinas Kebudayaan	4.250.805.800,00										4.250.805.800,00
11	Dinas Kelautan dan Perikanan	67.925.000,00			99.413.820,00						67.925.000,00	99.413.820,00
12	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	11.825.000,00										11.825.000,00
JUMLAH		44.722.208.283,85	-	199.280.008,05	424.824.195,00	-	-	12.509.648.241,96	2.029.318.080,00	-	5.511.537.500,00	25.295.808.664,94

GOVERNOR OF KEPULAUAN RIAU

dto

ANSAR AHMAD



PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2024

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
1	TAGIHAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH	994.508.950,00	-	1.500.000,00	993.008.950,00
	terdiri dari :				
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12.248.000,00	-	1.500.000,00	10.748.000,00
	Biro Organisasi dan Korpri	8.500.000,00	-	-	8.500.000,00
	Badan Keuangan dan Aset Daerah	973.760.950,00	-	-	973.760.950,00
2	ASET TIDAK BERWUJUD	26.984.101.427,06	5.389.675.894,00	6.025.173.394,00	26.348.603.927,06
	Terdiri dari :				-
	Dinas Pendidikan	11.932.014.480,00	-	-	11.932.014.480,00
	Dinas Kesehatan	638.362.500,00	-	572.362.500,00	66.000.000,00
	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	1.699.775.000,06	4.119.500.000,00	-	5.819.275.000,06
	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	1.445.280.900,00	1.270.175.894,00	1.253.175.894,00	1.462.280.900,00
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	2.452.437.910,00	-	-	2.452.437.910,00
	Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	-	-	-	-
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	-	-	-	-
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-
	Dinas Sosial	-	-	-	-
	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	9.500.000,00	-	-	9.500.000,00
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	27.900.000,00	-	-	27.900.000,00
	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	34.650.000,00	-	-	34.650.000,00
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	44.000.000,00	-	-	44.000.000,00
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15.101.451,00	-	-	15.101.451,00
	Dinas Perhubungan	-	-	-	-
	Dinas Komunikasi dan Informatika	777.700.000,00	-	187.000.000,00	590.700.000,00
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	259.000.000,00	-	-	259.000.000,00
	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	63.998.500,00	-	-	63.998.500,00
	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	43.000.000,00	-	-	43.000.000,00
	Dinas Kebudayaan	35.167.000,00	-	-	35.167.000,00
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	795.624.420,00	-	-	795.624.420,00
	Dinas Kelautan dan Perikanan	494.166.000,00	-	-	494.166.000,00
	Dinas Pariwisata	28.160.000,00	-	-	28.160.000,00
	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	39.400.000,00	-	-	39.400.000,00
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.750.000,00	-	-	2.750.000,00
	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	-	-	-	-
	Biro Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	8.700.000,00	-	-	8.700.000,00
	Biro Perekonomian dan Pembangunan	401.788.200,00	-	-	401.788.200,00
	Biro Organisasi	-	-	-	-
	Biro Administrasi Pimpinan	-	-	-	-
	Biro Umum	546.506.000,00	-	297.675.000,00	248.831.000,00
	Biro Hukum	49.324.000,00	-	-	49.324.000,00
	Inspektorat Daerah	350.945.000,00	-	-	350.945.000,00
	Badan Keuangan dan Aset Daerah	474.915.000,00	-	88.330.000,00	386.585.000,00
	Badan Pendapatan Daerah	113.141.649,00	-	-	113.141.649,00
	Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	727.742.711,00	-	665.390.000,00	62.352.711,00
	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	-	-	-
	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.961.240.000,00	-	2.961.240.000,00	-
	Sekretariat DPRD	369.782.476,00	-	-	369.782.476,00
	Badan Penghubung Daerah	140.028.230,00	-	-	140.028.230,00
	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	-	-	-	-
		-			-
3	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(3.146.651.320,00)	-	(732.870.000,00)	(2.413.781.320,00)
	Terdiri dari :	-			-
	Dinas Pendidikan	(1.935.966.000,00)	-		(1.935.966.000,00)
	Dinas Kesehatan	(78.800.000,00)		(78.800.000,00)	-
	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	(48.000.000,00)	-		(48.000.000,00)
	Dinas Komunikasi dan Informatika	-			-
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(14.998.500,00)	-		(14.998.500,00)
	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	(244.999.820,00)	-		(244.999.820,00)
	Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	(482.570.000,00)	-	(482.570.000,00)	-
	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	(171.500.000,00)	-	(171.500.000,00)	-
	Sekretariat DPRD	(169.817.000,00)	-		(169.817.000,00)
		-			-
4	Aset Lain-lain – Aset yang akan dihibahkan/rusak berat per OPD	243.280.366.169,27	59.950.274.452,00	26.874.501.038,89	276.356.139.582,38
	Terdiri dari :	-			-
	Dinas Pendidikan	58.737.924.529,98	273.575.550,00	303.718.459,09	58.707.781.620,89
	Dinas Kesehatan	6.376.786.737,50	926.507.250,00	938.507.250,00	6.364.786.737,50
	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	-	17.561.084.497,00	-	17.561.084.497,00
	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	10.563.326.140,00	14.044.474.579,00	-	24.607.800.719,00
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	15.258.157.993,00	5.145.512.500,00	5.145.512.500,00	15.258.157.993,00
	Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	118.950.967.006,39	-	99.480.000,00	118.851.487.006,39
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	456.717.868,00	-	-	456.717.868,00
	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	47.625.000,00	-	-	47.625.000,00
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	713.680.982,00	473.219.186,00	240.461.796,00
	Dinas Sosial	-	-	-	-
	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1.865.794.702,00	-	-	1.865.794.702,00
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	-	-	-	-
	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	2.224.178.000,00	6.759.375,00	6.759.375,00	2.224.178.000,00
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	31.207.820,00	-	-	31.207.820,00
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
	Dinas Perhubungan	4.002.036.200,00	2.741.290.550,00	298.100.000,00	6.445.226.750,00
	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.944.000,00	323.877.900,00	323.877.900,00	6.944.000,00
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	-
	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-	-	-	-
	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.701.225.241,00	-	-	2.701.225.241,00
	Dinas Kebudayaan	-	1.372.906.774,00	1.372.906.774,00	-
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	49.442.800,00	53.200.000,00	53.200.000,00	49.442.800,00
	Dinas Kelautan dan Perikanan	6.245.269.972,70	5.810.767.500,00	5.343.425.000,00	6.712.612.472,70
	Dinas Pariwisata	2.637.618.200,00	53.432.500,00	923.335.099,80	1.767.715.600,20
	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	4.554.838.500,00	-	-	4.554.838.500,00
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	653.327.200,00	-	572.770.000,00	80.557.200,00
	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	-	-	-	-
	Biro Kesejahteraan Rakyat	270.755.520,00	-	-	270.755.520,00
	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-
	Biro Perekonomian dan Pembangunan	1.126.149.799,70	-	-	1.126.149.799,70
	Biro Organisasi	-	-	-	-
	Biro Administrasi Pimpinan	725.124.200,00	-	-	725.124.200,00
	Biro Umum	2.979.218.919,00	-	-	2.979.218.919,00
	Biro Hukum	-	-	-	-
	Inspektorat Daerah	25.500.000,00	-	-	25.500.000,00
	Badan Keuangan dan Aset Daerah	764.060.000,00	-	-	764.060.000,00
	Badan Pendapatan Daerah	258.871.000,00	4.536.109.976,00	4.536.109.976,00	258.871.000,00
	Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	1.761.058.820,00	1.930.224.437,00	2.139.972.437,00	1.551.310.820,00
	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	6.240.000,00	-	-	6.240.000,00
	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-	-	-
	Sekretariat DPRD	-	2.577.900.772,00	2.577.900.772,00	-
	Badan Penghubung Daerah	-	1.693.475.155,00	1.580.212.155,00	113.263.000,00
	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	-	185.494.155,00	185.494.155,00	-
5	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain - Aset yang akan dihibahkan/rusak berat per OPD	(9.661.355.568,70)	(42.935.930.025,15)	(11.310.754.605,30)	(41.286.530.988,55)
	Terdiri dari :	-			-
	Dinas Pendidikan	(93.648.822,00)	-	-	(93.648.822,00)
	Dinas Kesehatan	-	(1.220.307.250,00)	(1.220.307.250,00)	-
	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	-	(17.561.084.497,00)	-	(17.561.084.497,00)
	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	-	(14.044.474.579,00)	-	(14.044.474.579,00)
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	(495.090.406,00)	-	-	(495.090.406,00)
	Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	(170.105.644,00)	-	-	(170.105.644,00)
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-
	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	-	-	-	-
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	(480.433.039,00)	(395.469.855,00)	(84.963.184,00)
	Dinas Sosial	-	-	-	-
	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	(1.755.663.537,00)	-	-	(1.755.663.537,00)
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	-	-	-	-
	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	-	-	-	-
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-	-
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
	Dinas Perhubungan	-	(598.560.029,00)	-	(598.560.029,00)
	Dinas Komunikasi dan Informatika	(4.577.218,00)	(312.026.314,00)	(312.026.314,00)	(4.577.218,00)
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	-
	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-	-	-	-
	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	(302.579.978,00)	-	-	(302.579.978,00)
	Dinas Kebudayaan	-	(227.516.452,67)	(227.516.452,67)	-
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	(53.200.000,00)	(53.200.000,00)	-
	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	(5.388.441.104,65)	(5.275.500.000,00)	(112.941.104,65)
	Dinas Pariwisata	(1.059.523.487,00)	(53.432.500,00)	(923.335.099,80)	(189.620.887,20)
	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	-
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-
	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	-	-	-	-
	Biro Kesejahteraan Rakyat	(270.755.520,00)	-	-	(270.755.520,00)
	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-
	Biro Perekonomian dan Pembangunan	(1.100.817.845,70)	-	-	(1.100.817.845,70)
	Biro Organisasi	-	-	-	-
	Biro Administrasi Pimpinan	(528.458.032,00)	-	-	(528.458.032,00)
	Biro Umum	(1.184.010.259,00)	(210.000.000,00)	-	(1.394.010.259,00)
	Biro Hukum	-	-	-	-
	Inspektorat Daerah	-	-	-	-
	Badan Keuangan dan Aset Daerah	(669.955.000,00)	-	-	(669.955.000,00)
	Badan Pendapatan Daerah	(258.871.000,00)	(1.930.224.437,00)	(2.140.224.437,00)	(48.871.000,00)
	Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	(1.761.058.820,00)	-	-	(1.761.058.820,00)
	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	(6.240.000,00)	-	-	(6.240.000,00)
	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-	-	-
	Sekretariat DPRD	-	(687.604.626,00)	(594.550.000,00)	(93.054.626,00)
	Badan Penghubung Daerah	-	(168.625.196,83)	(168.625.196,83)	-
	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	-	-	-	-
		-			-
6	Aset Lain-lain - Kas yang Dibatasi Penggunaannya	191.337.190.542,18	33.548.620.503,73	28.532.624.788,29	196.353.186.257,62
	Terdiri dari :	-			-
	Badan Keuangan dan Aset Daerah	191.337.190.542,18	33.548.620.503,73	28.532.624.788,29	196.353.186.257,62
7	ASET LAIN-LAINNYA	113.019.617.813,02	5.249.260.257,39	32.777.141.089,88	85.491.736.980,53
	Terdiri dari :				
	Dinas Pendidikan	51.661.546.071,09	344.371.168,00	218.359.945,49	51.787.557.293,60
	Dinas Kesehatan	61.687.361,36	31.875.700,00	61.687.361,36	31.875.700,00
	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	44.393.212,55	10.675.000,00	44.393.212,55	10.675.000,00
	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	804.219.608,15		145.348.345,26	658.871.262,89
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	26.734.850.780,65	1.091.216.111,67	1.508.455.722,09	26.317.611.170,23
	Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	3.052.080.254,82	232.255.828,00	212.798.978,73	3.071.537.104,09
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	10.807.400,00	-	10.807.400,00
	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	-			-
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	1.133.000,00	-	1.133.000,00
	Dinas Sosial	6.259.800,00	2.740.700,00	6.259.800,00	2.740.700,00
	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	-	1.561.000,00	-	1.561.000,00
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	-	740.000,00	-	740.000,00
	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	8.432.000,00	55.520.329,72	8.432.000,00	55.520.329,72
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	503.000,00	-	503.000,00

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	355.794,00	3.178.083,00	355.794,00	3.178.083,00
	Dinas Perhubungan	6.000.000,00	66.960.000,00	6.000.000,00	66.960.000,00
	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	1.480.000,00	-	1.480.000,00
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	346.500,00	-	346.500,00
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	3.162.900,00	-	3.162.900,00
	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-	14.577.900,00	-	14.577.900,00
	Dinas Kebudayaan	-	2.068.600,00	-	2.068.600,00
	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	-	2.936.300,00	-	2.936.300,00
	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.887.000,00	72.245.334,00	2.887.000,00	72.245.334,00
	Dinas Pariwisata	-	2.269.500,00	-	2.269.500,00
	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	95.303.932,60	10.147.758,00	20.560.932,60	84.890.758,00
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	740.000,00	-	740.000,00
	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	-			-
	Biro Kesejahteraan Rakyat	-	3.435.500,00	-	3.435.500,00
	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	-			-
	Biro Perekonomian dan Pembangunan	-			-
	Biro Organisasi	-	4.358.585,00	-	4.358.585,00
	Biro Administrasi Pimpinan	-	1.480.000,00	-	1.480.000,00
	Biro Umum	-			-
	Biro Hukum	-	769.500,00	-	769.500,00
	Inspektorat Daerah	-			-
	Badan Keuangan dan Aset Daerah	30.016.970.000,00	3.138.890.000,00	30.016.970.000,00	3.138.890.000,00
	Badan Pendapatan Daerah	525.000,00	2.797.648,00	525.000,00	2.797.648,00
	Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	-	370.000,00	-	370.000,00
	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	31.481.500,33	2.577.420,00	31.481.500,33	2.577.420,00
	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.976.800,00	6.735.678,00	3.976.800,00	6.735.678,00
	Sekretariat DPRD	488.648.697,47	90.861.645,00	488.648.697,47	90.861.645,00
	Badan Penghubung Daerah	-	7.161.800,00	-	7.161.800,00
	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	-	26.310.369,00	-	26.310.369,00
					-
	JUMLAH	562.807.778.012,83	61.201.901.081,97	82.167.315.705,76	541.842.363.389,04

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

dto

ANSAR AHMAD



PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIRENCANAKAN	SALDO AWAL	TRANSFER DARI KAS DAERAH	TRANSFER KE KAS DAERAH	SALDO AKHIR	SISA DANA YANG BELUM DICADANGKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								-
2			N/A					
3								
Jumlah								

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

dto

ANSAR AHMAD



PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
PER 31 DESEMBER 2024

No.	Uraian	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
1	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	4.619.097,00	14.391.867,00	4.619.097,00	14.391.867,00
2	Utang Bunga	613.908.869,00	0,00	613.908.869,00	0,00
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	91.945.787.633,00	0,00	91.945.787.633,00	0,00
4	Utang Belanja	210.029.652.829,73	451.195.494.304,60	209.804.564.717,02	451.420.582.417,31
5	Utang Jangka Pendek Lainnya	8.106.502.078,00	0,00	4.640.051.881,50	3.466.450.196,50
JUMLAH		310.700.470.506,73	451.209.886.171,60	307.008.932.197,52	454.901.424.480,81

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

dto

ANSAR AHMAD



PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
PER 31 DESEMBER 2024

No.	Uraian	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
1	Utang Kepada Pemerintah Pusat	191.337.190.542,18	33.548.620.503,73	28.532.624.788,29	196.353.186.257,62
Jumlah		191.337.190.542,18	33.548.620.503,73	28.532.624.788,29	196.353.186.257,62

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

dto

ANSAR AHMAD



PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TA 2024 DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN
ANGGARAN BERIKUTNYA

No.	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN**)	REALISASI	TAMBAH/ KURANG	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah			-	-	-		-	

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

dto

ANSAR AHMAD



PROVINSI KEPULAUAN RIAU
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

LAMPIRAN XX.1
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	BUMD/Perusahaan Daerah Tahun	Sumber a)	Status b)	Aset Lancar	Aset Tidak Lancar	Aset Lainnya	Total Aset	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	BPYDS	Ekuitas Lainnya	Laba Ditahan	Total Ekuitas	% Saham Daerah	Kepemilikan Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5+6+7)	9	10	11 = (9 + 10)	12	13	14	15	16	17	18	19 = (17 X 18)
1	Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Kepri	APBD		3.147.490.988,00	13.982.894.423,00	0,00	17.130.385.411,00	5.167.251.343,00	9.432.585.848,00	14.599.837.191,00	14.000.000.000,00	0,00	0,00		(11.469.451.780,00)	2.530.548.220,00	100%	2.530.548.220,00
2	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kepri	APBD		17.299.996.934,00	73.791.347.945,00	296.710.450,00	91.388.055.329,00	972.038.103,00	1.521.926.069,00	2.493.964.172,00	121.303.871.063,00	0,00	0,00	0,00	(32.409.779.906,00)	88.894.091.157,00	100%	88.894.091.157,00
3	Perusahaan Perseroan Daerah Pelabuhan Kepri	APBD		14.793.523.499,00	19.161.477.655,00	1.361.566.800,00	35.316.567.954,00	35.906.993,00	500.000.000,00	535.906.993,00	48.328.490.000,00	0,00	0,00	0,00	(13.547.829.039,00)	34.780.660.961,00	100%	34.780.660.961,00
4	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI	APBD		29.659.585.968.692,00	385.292.464.606,00	814.848.131.876,00	30.859.726.565.174,00	27.440.661.885.087,00	0,00	27.440.661.885.087,00	12.000.000.000,00	0,00	0,00	1.143.816.517.128,00	2.275.248.162.959,00	3.419.064.680.087,00	0,4%	12.000.000.000,00
	Total Seluruh Bidang Industri			29.694.826.980.113,00	492.228.184.629,00	816.506.409.126,00	31.003.561.573.868,00	27.446.837.081.526,00	11.454.511.917,00	27.458.291.593.443,00	195.632.361.063,00	0,00	0,00	1.143.816.517.128,00	2.217.821.102.234,00	3.545.269.980.425,00		138.205.300.338,00

GOVERNOR KEPULAUAN RIAU

dto

ANSAR AHMAD



PROVINSI KEPULAUAN RIAU
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

LAMPIRAN XX.2
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	BUMD/Perusahaan Daerah Tahun	Sumber a)	Status b)	Pendapatan	Beban	Laba (Rugi) Kotor	Pendapatan di luar usaha	Beban di luar Usaha	Laba (Rugi) Sebelum Pajak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Kepri	APBD		115.095.801,00	705.239.052,00	(590.143.251,00)	635.099.259,00	10.862.094,00	34.093.914,00
2	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kepri	APBD		34.311.186.753,00	37.531.506.784,00	(3.220.320.031,00)	142.447.897,00	44.683.225,00	(3.122.555.359,00)
3	Perusahaan Perseroan Daerah Pelabuhan Kepri	APBD		2.969.113.480,00	1.005.521.958,00	1.963.591.522,00	284.398.515,00	3.768.588.095,00	(1.520.598.058,00)
4	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI	APBD		2.331.167.738.597,00	926.717.440.785,00	1.404.450.297.812,00	127.127.148.965,00	1.107.954.296.731,00	423.623.150.046,00
Total Seluruh Bidang Industri				2.368.563.134.631,00	965.959.708.579,00	1.402.603.426.052,00	128.189.094.636,00	1.111.778.430.145,00	419.014.090.543,00

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
dto
ANSAR AHMAD